SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 2025

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (6), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 22 ayat (6), dan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas rincian:

a. Anggaran . . .

a. Anggaran Pendapatan Negara;

b. Anggaran Belanja Negara; dan

c. Pembiayaan Anggaran.

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas rincian:

a. Penerimaan Perpajakan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas rincian:

a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan

b. Anggaran Transfer ke Daerah.

Pasal 4

(1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas rincian:

   a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran kementerian/lembaga; dan

   b. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Rincian . . .

(3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, kecuali anggaran program pengelolaan belanja lainnya.

(4) Rincian Anggaran program pengelolaan belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas rincian:
   a. Dana Bagi Hasil;
   b. Dana Alokasi Umum;
   c. Dana Alokasi Khusus;
   d. Dana Otonomi Khusus;
   e. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
   f. Dana Desa.

(2) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dana Insentif Fiskal.

(3) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. Dana Alokasi Khusus Fisik;
   b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik; dan
   c. Hibah kepada Daerah.

(4) Menteri teknis/pimpinan lembaga menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

(5) Rincian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. Dana Otonomi Khusus Aceh yang terdiri atas:

1. Bagian . . .

1. Bagian program dan kegiatan bersama Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota pada Provinsi Aceh;
2. Bagian alokasi Provinsi Aceh; dan
3. Bagian alokasi kabupaten/kota pada Provinsi Aceh;

b. Dana Otonomi Khusus Papua yang terdiri atas:
1. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; dan
2. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya; dan

c. Dana Tambahan Infrastruktur untuk Papua.

(6) Bagian program dan kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V pada Tabel V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(8) Rincian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(9) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk setiap desa dan insentif desa yang dialokasikan pada tahun anggaran 2026 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(10) Dana Insentif Fiskal diberikan kepada daerah yang berkinerja baik yang dialokasikan pada tahun berjalan sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah).

(11) Alokasi Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk rincian setiap daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(12) Penyesuaian rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat dari:

a. Perubahan . . .

a. perubahan data;

b. kesalahan hitung;

c. selisih nilai alokasi dengan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;

d. selisih nilai alokasi dengan Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;

e. perubahan perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri dan/atau percepatan penarikan pinjaman atau hibah luar negeri;

f. kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada perhitungan Dana Alokasi Umum; dan/atau

g. kebijakan pemerintah lainnya,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

(1) Rincian Anggaran Pendidikan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk investasi pemerintah pada pos pembiayaan.

Pasal 7

(1) Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Pembiayaan Anggaran yang belum dirinci dalam Lampiran VII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Pergeseran rincian Pembiayaan Anggaran dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Perubahan anggaran Belanja Negara berupa:

a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum;

b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan pada Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau perhitungan sisa klaim asuransi Barang Milik Negara tahun anggaran sebelumnya;

c. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman baru untuk penanggulangan bencana;

d. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana;

e. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan;

f. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana;

g. perubahan anggaran cadangan kompensasi dalam Program Pengelolaan Belanja Lainnya;

h. pergeseran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian/lembaga atau sebaliknya dan/atau pergeseran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara);

i. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian Anggaran;

j. perubahan . . .

j. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian/lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2025 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2026;

k. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;

l. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (*ineligible expenditure*) atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

m. pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian/lembaga;

n. pergeseran anggaran antarprogram dalam unit eselon I yang sama;

o. perubahan anggaran belanja dalam rangka pembayaran tunggakan tahun sebelumnya/kewajiban Pemerintah;

p. perubahan anggaran Belanja Negara berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah *closing date*;

q. perubahan anggaran Belanja Negara berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri;

r. perubahan . . .

r. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, perubahan kebijakan, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya;

s. realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal;

t. pergeseran anggaran dalam satu atau antar provinsi/kabupaten/kota dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; dan

u. perubahan anggaran Belanja Negara berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan proyek strategis nasional, percepatan kegiatan rehabilitasi mangrove, pengembangan kegiatan sektor pariwisata, dan/atau kegiatan penanggulangan bencana,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan anggaran belanja kementerian/lembaga dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara termasuk pergeseran rincian anggarannya.

(3) Tata cara perubahan dan pergeseran anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang berasal dari:

a. perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagai akibat dari:

1. penambahan . . .

1. penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena percepatan atau lanjutan penarikan;
2. penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran 2025 yang tidak terserap;
3. pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/ atau
4. pengesahan atas pemberian pinjaman luar negeri yang telah *closing date*;

b. perubahan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/ badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan selisih kurs; dan/atau

c. perubahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, penarikan pinjaman tunai, penerbitan Surat Berharga Negara, dan/atau pemanfaatan saldo kas badan layanan umum sebagai akibat tambahan pembiayaan,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Tata cara perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Pasal 11

(1) Dalam hal terdapat pembentukan dan/atau perubahan kementerian/lembaga, penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Penyesuaian . . .

(2) Penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran sebagai akibat pemisahan dan/atau perubahan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pergeseran alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Rincian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 12

(1) Dalam hal terdapat pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pengalihan anggaran antar kementerian/ lembaga;

b. penyesuaian belanja negara secara otomatis;

c. penyesuaian Transfer ke Daerah;

d. penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik kepada penyedia barang dan jasa; dan/atau

e. *earmarking* belanja dalam rangka menghadapi ancaman terhadap perekonomian dan/atau instabilitas sistem keuangan.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	2.601.247.989.783
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)	1.209.363.362.920
1.1.1	Pendapatan PPh Migas	55.236.374.412
1.1.2	Pendapatan PPh Non-Migas	1.154.126.988.508
1.1.2.1	Pendapatan PPh Pasal 21	251.192.870.533
1.1.2.2	Pendapatan PPh Pasal 22	36.718.323.674
1.1.2.3	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	84.163.352.525
1.1.2.4	Pendapatan PPh Pasal 23	76.773.751.533
1.1.2.5	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	22.140.110.095
1.1.2.6	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	434.420.736.470
1.1.2.7	Pendapatan PPh Pasal 26	91.463.621.296
1.1.2.8	Pendapatan PPh Final	157.006.754.944
1.1.2.9	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	247.467.438
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	995.277.404.803
1.2.1	Pendapatan PPN Dalam Negeri	615.170.629.640
1.2.2	Pendapatan PPN Impor	352.213.036.590
1.2.3	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	8.429.567.858
1.2.4	Pendapatan PPnBM Impor	6.805.280.122
1.2.5	Pendapatan PPN/PPnBM Lainnya	12.658.890.593

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	26.138.114.575
1.3.1	Pendapatan PBB Perkebunan	3.184.263.671
1.3.2	Pendapatan PBB Perhutanan	599.620.856
1.3.3	Pendapatan PBB Pertambangan	7.406.160.719
1.3.4	Pendapatan PBB Migas	14.293.451.397
1.3.5	Pendapatan PBB Panas Bumi	482.738.846
1.3.6	Pendapatan PBB Lainnya	171.879.086
1.4	Pendapatan Cukai	243.533.739.783
1.4.1	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	225.734.433.048
1.4.2	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	133.711.121
1.4.3	Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	10.063.695.614
1.4.4	Pendapatan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan	7.601.900.000
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	126.935.367.702
2	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	92.466.260.217
2.1	Pendapatan Bea Masuk	49.901.699.242
2.2	Pendapatan Bea Keluar	42.564.560.975
TOTAL		**2.693.714.250.000**

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

Memorandum Item:	**JUMLAH**
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas:	**10.649.892.145**
a. Komoditas Panas Bumi	3.645.004.553
b. Bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal	7.004.887.592

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
42	**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**	**459.199.942.626**
421	**PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM**	**236.614.142.236**
4211	PENDAPATAN MINYAK BUMI	80.211.970.000
42111	Pendapatan Minyak Bumi	80.211.970.000
421111	Pendapatan Minyak Bumi	80.211.970.000
4212	PENDAPATAN GAS BUMI	32.857.270.000
42121	Pendapatan Gas Bumi	32.857.270.000
421211	Pendapatan Gas Bumi	32.857.270.000
4213	PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	113.389.502.258
42132	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	755.857.380
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara – Eksplorasi	25.752.460
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi	730.104.920
42133	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	109.133.644.878
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara	88.348.421.627
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga	4.822.413.750
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas	5.200.272.000
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak	156.667.500

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah	829.125.000
421338	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Bauksit	495.495.001
42134	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	3.500.000.000
421341	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	3.500.000.000
4214	PENDAPATAN KEHUTANAN	5.919.772.267
42141	Pendapatan Dana Reboisasi	2.100.000.002
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	2.100.000.002
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.101.038.681
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.101.038.681
42143	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	68.558.026
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	68.558.026
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	2.650.175.558
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	2.650.175.558
4215	PENDAPATAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.663.048.854
42152	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan	30.115.850
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	30.057.605
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	58.245
42153	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	1.186.933.004
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	1.186.933.004
42154	Pendapatan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi	446.000.000
421541	Pendapatan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut	446.000.000
4216	PENDAPATAN PANAS BUMI	2.572.578.857

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
42162	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.404.682.850
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.404.682.850
42163	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	33.325.559
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi	17.158.448
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi	16.167.111
42164	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	134.570.448
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	134.570.448
422	**PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)**	**1.800.000.000**
4221	PENDAPATAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN	1.800.000.000
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	900.600.000
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	900.600.000
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	899.400.000
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	899.400.000
424	**PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM**	**98.322.645.220**
4241	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM	92.787.291.229
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	50.127.578.112
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	30.242.246.610
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	14.641.761.704
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	797.895.294
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	750.000
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian	522.573.459
424116	Pendapatan Penyelenggaraan Telekomunikasi	2.985.000.000

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	4.846.880
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	10.564.813
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	921.939.352
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	3.125.599.215
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	2.458.402.322
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	5.459.156
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	661.737.737
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	38.689.811.603
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	1.775
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	146.219.782
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	51.332.500
424136	Pendapatan Investasi	965.000.000
424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	10.332.247.500
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	26.134.400.000
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	1.060.610.046
42414	Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	844.302.299
424141	Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	844.302.299
4242	PENDAPATAN HIBAH BADAN LAYANAN UMUM	48.822.565
42421	Pendapatan Hibah Terikat - Uang	25.401.000
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	50.000
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	151.000
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	25.200.000
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang	23.421.565
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	21.702.098
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	1.719.467

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
4243	PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA BLU	1.514.497.706
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.514.497.706
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	56.908.887
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1.254.974.705
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	202.614.114
4244	PENDAPATAN DARI ALOKASI APBN	114.171.487
42442	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	114.171.487
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	110.416.800
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang Membawahi BLU	3.754.687
4249	PENDAPATAN BLU LAINNYA	3.857.862.233
42491	Pendapatan BLU Lainnya	3.512.394.989
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3.041.597.069
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	1.648.401
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	8.963.088
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	2.938.513
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	457.247.918
42492	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	345.159.041
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	16.469.600
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	69.532.985
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	93.870.957
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	101.643.476
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	54.975.471

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	8.666.552
42493	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	308.203
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	200.000
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	108.203
425	**PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA**	**122.463.155.170**
4251	PENDAPATAN DARI PENJUALAN, PENGELOLAAN BMN, DAN IURAN BADAN USAHA	27.582.258.717
42511	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	20.307.705.641
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	20.242.524.404
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	62.378.884
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	2.802.353
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	159.877.265
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.881.240
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	74.139.953
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	3.152.731
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	79.703.341
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	582.280.127
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	487.462.738
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	32.140.078
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	500
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	59.553.986

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	3.038.075
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	84.750
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	777.301.200
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	89.326.200
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B dan Pemegang IUPK	477.000.000
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	1.100.000
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	2.550.000
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	207.325.000
42515	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	58.973.203
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	58.973.203
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	4.376.164.000
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	4.311.700.000
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	64.464.000
42517	Pendapatan Iuran Badan Usaha	1.319.957.281
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM	1.025.000.000
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa	270.153.158
425174	Pendapatan Pengelolaan ADP yang Dipungut oleh Pengguna ADP	24.804.123

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
4252	PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM	33.910.632.652
42521	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	10.644.740.338
425211	Pendapatan Paspor	3.219.441.850
425212	Pendapatan Visa	3.854.920.250
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	1.318.053.200
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	126.685.700
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	820.000.000
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	275.000.000
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	92.300.000
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	935.000.000
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	3.339.338
42522	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	446.476.788
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri	79.448.020
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri	162.458.503
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran	105.203.252
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri	59.849.850
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri	13.573.100
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri	25.944.063
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	921.282.173
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	102.300
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.792.420
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	27.011.343
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	2.066.819
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	519.161.330

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	182.840.370
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	77.896.260
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	109.411.331
42524	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	2.827.690.058
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	96.580.644
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	513.276.300
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	1.407.821.153
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	45.152.200
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	466.753.350
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	84.724.200
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	14.426.100
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	6.607.228
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	192.348.883
42525	Pendapatan Perizinan	3.039.607.533
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing	1.829.775.000
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	24.431.200
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan	1.840.000
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan	63.585.000
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.733.085
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	1.113.243.248
42526	Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	13.669.695.870

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	731.914.910
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	1.030.657.835
425263	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	4.254.711.300
425264	Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	187.205.220
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	3.909.402.525
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	2.311.544.480
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	44.793.850
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	282.375.750
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	917.090.000
42527	Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	1.630.522.540
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	3.738.900
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	3.739.000
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	372.955.105
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	344.191.100
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	46.739.900
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	821.497.715
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya	37.660.820
42528	Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	730.617.352
425281	Pendapatan Akreditasi	44.887.455
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.068.785

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	34.871.200
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	14.455.959
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	65.631.333
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	7.083.464
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	98.285.200
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika	274.232.000
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	190.101.956
4253	PENDAPATAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN KEAGAMAAN	6.616.496.670
42531	Pendapatan Jasa Kesehatan	2.034.918.562
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	447.670.508
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	1.028.435.773
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	402.625.135
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	67.345.435
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	71.153.511
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan	17.688.200
42532	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	259.677.225
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	259.677.225
42533	Pendapatan Jasa Karantina	314.185.000

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	310.000.000
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	4.185.000
42534	Pendapatan Jasa Agraria	3.377.083.680
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	3.377.083.680
42535	Pendapatan Jasa Keagamaan	630.632.203
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	586.056.600
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	44.575.603
4254	PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI	3.017.094.873
42541	Pendapatan Pendidikan	1.980.024.809
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	31.765.294
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	1.863.261.554
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	19.857.919
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	65.140.042
42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	364.393.612
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	327.969.935
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	36.423.677
42543	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek	671.746.452
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	240.028.600
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	6.857.680
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	164.912.520
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	18.273
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	256.338.194
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	2.700.000
425437	Pendapatan Penelitian, Survei, dan Pengambilan Sampel Bidang Kehutanan	596.835

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	294.350
42545	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	930.000
425451	Pendapatan Museum	930.000
4255	PENDAPATAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.849.365.554
42551	Pendapatan Jasa Transportasi	9.032.181.233
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.165.511.995
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.087.623.104
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	3.173.731.732
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	676.828.985
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	299.101.476
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	178.568.745
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	796.913.762
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	1.415.989.398
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	237.912.036
42552	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	21.705.511.756
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	20.389.036.758
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.238.276.560
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran	53.801.658
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos	475.000
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal	8.044.404
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia	3.654.073
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya	12.223.303
42553	Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	111.672.565
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	23.926.024

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	37.679.131
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI	50.067.410
4256	PENDAPATAN JASA LAINNYA	1.353.180.574
42561	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	255.137.132
425611	Pendapatan Wisata Alam	217.684.118
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27.405.714
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	10.047.300
42562	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	74.428.814
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	58.368.690
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	16.060.124
42569	Pendapatan Jasa Lainnya	1.023.614.628
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	6.890.034
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	770.687.776
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	246.036.818
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	15.376.042.011
42571	Pendapatan Bunga	716.000.000
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman	716.000.000
42573	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	3.560.000.000
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	3.200.000.000
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	360.000.000
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	179.646.240
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	103.000.000
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo	76.646.240

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs	17.000.001
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	17.000.000
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	1
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	5.807.144
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5.807.144
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	9.851.109.083
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	97.549.760
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National Pooling	302.333.051
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	9.121.226.272
425776	Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah	330.000.000
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	1.044.824.644
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.478.650
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	647.522.565
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	184.194.234
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	175.936.170
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	35.693.025
42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	1.654.899
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	1.562.599

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	92.300
4258	PENDAPATAN DENDA	1.891.670.218
42581	Pendapatan Denda I	26.537.214
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.477.214
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	25.000.000
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan	60.000
42582	Pendapatan Denda II	1.560.800.000
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.560.800.000
42583	Pendapatan Denda III	304.333.004
425839	Pendapatan Denda Lainnya	304.333.004
4259	PENDAPATAN LAIN-LAIN	1.866.413.901
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	1.625.545.239
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	100.000
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	10.175.239
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	15.270.000
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	1.600.000.000
42593	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	363.500
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	350.000
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara	13.500
42599	Pendapatan Lain-Lain	240.505.162

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	60.414.826
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	180.090.336

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 001

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)**	**120.929.389**	**886.456.223**	**42.614.388**		**1.050.000.000**	**1.070.164.677**	**1.092.831.951**	**1.120.315.637**
001.01	**Deputi Bidang Administrasi**	**120.929.389**	**151.416.461**	**42.614.388**		**314.960.238**	**321.151.203**	**328.110.606**	**336.548.735**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**120.929.389**	**151.416.461**	**42.614.388**		**314.960.238**	**321.151.203**	**328.110.606**	**336.548.735**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**120.929.389**	**151.416.461**	**42.614.388**		**314.960.238**	**321.151.203**	**328.110.606**	**336.548.735**
001.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**120.929.389**	**151.416.461**	**42.614.388**		**314.960.238**	**321.151.203**	**328.110.606**	**336.548.735**
1001	Pengelolaan Administrasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi		14.108.034			14.108.034	14.382.870	14.691.878	15.066.537
1002	Pengelolaan Administrasi, Publikasi, dan Layanan Informasi		33.422.168	975.000		34.397.168	35.079.602	35.846.767	36.776.932
1003	Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Hak-hak Keuangan	120.929.389	38.538.856			159.468.245	162.613.358	166.148.793	170.435.437
1014	Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor		63.816.449	41.639.388		105.455.837	107.519.147	109.838.517	112.650.711
6485	Pengelolaan Administrasi dan Pengendalian Internal		1.530.954			1.530.954	1.556.226	1.584.651	1.619.118
001.02	**Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi**		**735.039.762**			**735.039.762**	**749.013.474**	**764.721.345**	**783.766.902**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**		**735.039.762**			**735.039.762**	**749.013.474**	**764.721.345**	**783.766.902**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**735.039.762**			**735.039.762**	**749.013.474**	**764.721.345**	**783.766.902**
001.02.CF	**Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan**		**735.039.762**			**735.039.762**	**749.013.474**	**764.721.345**	**783.766.902**
1008	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR		84.021.461			84.021.461	85.680.153	87.544.720	89.805.495

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 001

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5002	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR		455.577.764			455.577.764	464.019.225	473.508.201	485.013.426
5003	Pengkajian Kemajelisan		141.782.239			141.782.239	144.591.212	147.748.802	151.577.329
5728	Penganggaran MPR		36.749.471			36.749.471	37.478.599	38.298.219	39.292.000
6487	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI		16.908.827			16.908.827	17.244.285	17.621.403	18.078.652
	JUMLAH RM	**120.929.389**	**886.456.223**	**42.614.388**		**1.050.000.000**	**1.070.164.677**	**1.092.831.951**	**1.120.315.637**
	TOTAL JUMLAH	**120.929.389**	**886.456.223**	**42.614.388**		**1.050.000.000**	**1.070.164.677**	**1.092.831.951**	**1.120.315.637**

SK No 154199 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 002

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**								
002.01	**Sekretariat Jenderal**	**1.329.498.324**	**1.136.930.962**	**949.481.479**		**3.415.910.765**	**3.443.947.466**	**3.475.463.668**	**3.513.676.500**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**1.329.498.324**	**1.136.930.962**	**949.481.479**		**3.415.910.765**	**3.443.947.466**	**3.475.463.668**	**3.513.676.500**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**1.329.498.324**	**1.136.930.962**	**949.481.479**		**3.415.910.765**	**3.443.947.466**	**3.475.463.668**	**3.513.676.500**
002.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.329.498.324**	**1.136.930.962**	**949.481.479**		**3.415.910.765**	**3.443.947.466**	**3.475.463.668**	**3.513.676.500**
5781	Persidangan Komisi dan Paripurna		13.648.672			13.648.672	13.754.726	13.873.963	14.018.534
5782	Persidangan Badan dan Mahkamah		6.858.546			6.858.546	6.921.113	6.991.449	7.076.729
5783	Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen		4.542.867			4.542.867	4.574.331	4.609.711	4.652.611
5784	Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan		20.803.002			20.803.002	20.973.347	21.164.851	21.397.054
5785	Pemberitaan Parlemen		150.960.525	75.932.140		226.892.665	229.233.627	231.865.108	235.055.726
5786	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat		68.276.950			68.276.950	68.751.752	69.285.541	69.932.734
5787	Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		10.612.130			10.612.130	10.661.668	10.717.368	10.784.907
5788	Pengelolaan SDM Aparatur		41.741.185			41.741.185	42.494.646	43.341.639	44.368.601
5791	Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor		240.254.876	281.753.452		522.008.328	527.557.263	533.794.776	541.357.652
5792	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I		2.640.608			2.640.608	2.675.251	2.714.205	2.761.442
5793	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II		7.465.678			7.465.678	7.531.730	7.605.990	7.696.036
5794	Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif		36.390.045			36.390.045	36.652.128	36.946.754	37.303.982
5795	Pengelolaan Teknologi Informasi		66.689.047	63.409.219		130.098.266	130.843.125	131.680.420	132.695.631
5797	Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		5.235.421			5.235.421	5.294.161	5.360.197	5.440.262
5800	Penyusunan Analisis Keparlemenan		15.196.421			15.196.421	15.341.578	15.504.778	15.702.653

SK No 154198 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 002

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6574	Penataan Perencanaan, Organisasi, serta Pengelolaan Kinerja		14.776.243			14.776.243	14.920.282	15.082.242	15.278.613
6575	Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas	1.329.498.324	15.118.896			1.344.617.220	1.351.342.728	1.358.902.827	1.368.069.309
6576	Pengelolaan Bangunan dan Wisma		383.981.601	528.386.668		912.368.269	922.370.732	933.614.394	947.247.145
6976	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukham		16.061.499			16.061.499	16.191.404	16.337.465	16.514.551
6977	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Ekkuinbangkesra		10.262.308			10.262.308	10.378.811	10.509.783	10.668.586
6978	Penyusunan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara		5.414.442			5.414.442	5.483.063	5.560.207	5.653.742
002.02	**Dewan**	**379.154.382**	**6.104.934.853**			**6.484.089.235**	**6.559.817.926**	**6.644.944.062**	**6.748.157.978**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**379.154.382**	**6.104.934.853**			**6.484.089.235**	**6.559.817.926**	**6.644.944.062**	**6.748.157.978**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**379.154.382**	**6.104.934.853**			**6.484.089.235**	**6.559.817.926**	**6.644.944.062**	**6.748.157.978**
002.02.CF	**Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan**		**5.926.757.173**			**5.926.757.173**	**5.994.994.952**	**6.071.700.648**	**6.164.704.923**
4397	Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Penegakan Etik DPR		48.471.471			48.471.471	49.376.352	50.393.537	51.626.854
5801	Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI		515.975.914			515.975.914	520.987.283	526.620.758	533.451.228
5802	Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI		45.384.375			45.384.375	46.097.912	46.900.032	47.872.584
5803	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI		560.796.980			560.796.980	567.076.499	574.135.330	582.694.030
5804	Pengelolaan Kelembagaan oleh Pimpinan DPR		96.332.307			96.332.307	98.022.098	99.921.606	102.224.718
5805	Pelaksanaan Tugas DPR RI Dalam Kerjasama Internasional		208.350.810			208.350.810	212.484.658	217.131.510	222.765.731
5806	Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat		4.418.411.533			4.418.411.533	4.467.690.502	4.523.084.331	4.590.248.387
5807	Pengelolaan Administrasi Dewan		33.033.783			33.033.783	33.259.648	33.513.544	33.821.391
002.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**379.154.382**	**178.177.680**			**557.332.062**	**564.822.974**	**573.243.414**	**583.453.055**
6573	Pengelolaan Hak Keuangan Dewan	379.154.382	178.177.680			557.332.062	564.822.974	573.243.414	583.453.055

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 004

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**	**3.444.129.598**	**3.002.763.206**	**388.067.196**		**6.834.960.000**	**6.966.485.766**	**7.114.335.696**	**7.293.601.258**
004.01	**Badan Pemeriksa Keuangan**	**3.444.129.598**	**3.002.763.206**	**388.067.196**		**6.834.960.000**	**6.966.485.766**	**7.114.335.696**	**7.293.601.258**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**3.444.129.598**	**3.002.763.206**	**388.067.196**		**6.834.960.000**	**6.966.485.766**	**7.114.335.696**	**7.293.601.258**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**3.444.129.598**	**3.002.763.206**	**388.067.196**		**6.834.960.000**	**6.966.485.766**	**7.114.335.696**	**7.293.601.258**
004.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**368.802.090**	**687.352.030**	**353.802.367**		**1.409.956.487**	**1.435.210.448**	**1.463.598.254**	**1.498.017.980**
6832	Kegiatan Pelayanan Dukungan Pemeriksaan Keuangan Negara	368.802.090	687.352.030	353.802.367		1.409.956.487	1.435.210.448	1.463.598.254	1.498.017.980
004.01.CI	**Program Pemeriksaan Keuangan Negara**	**3.075.327.508**	**2.315.411.176**	**34.264.829**		**5.425.003.513**	**5.531.275.318**	**5.650.737.442**	**5.795.583.278**
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	3.055.626.178	2.069.571.110	30.314.064		5.155.511.352	5.256.687.971	5.370.422.077	5.508.322.772
1153	Pengawasan oleh Inspektorat		27.895.937			27.895.937	28.401.482	28.969.840	29.658.971
1167	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	19.701.330	147.322.657	3.950.765		170.974.752	174.235.819	177.901.836	182.346.840
6830	Pembinaan, Pengembangan, dan Bantuan Hukum PKN		23.501.545			23.501.545	23.940.251	24.433.494	25.031.546
6831	Perencanaan, Analisis Kebijakan, dan Evaluasi PKN		47.119.927			47.119.927	48.009.795	49.010.195	50.223.149
	JUMLAH RM	**3.444.129.598**	**2.975.070.738**	**388.067.196**		**6.807.267.532**	**6.938.243.129**	**7.085.474.596**	**7.263.990.279**
	JUMLAH PNBP		**27.692.468**			**27.692.468**	**28.242.637**	**28.861.100**	**29.610.979**
	TOTAL JUMLAH	**3.444.129.598**	**3.002.763.206**	**388.067.196**		**6.834.960.000**	**6.966.485.766**	**7.114.335.696**	**7.293.601.258**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 005

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005	**MAHKAMAH AGUNG**	**9.864.012.448**	**3.318.622.076**	**1.571.117.616**		**14.753.752.140**	**14.805.606.602**	**14.841.618.473**	**14.885.281.559**
005.01	**Badan Urusan Administrasi**	**9.564.614.802**	**2.802.827.336**	**1.533.117.616**		**13.900.559.754**	**13.948.518.553**	**13.980.099.122**	**14.018.389.987**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**9.564.614.802**	**2.802.827.336**	**1.533.117.616**		**13.900.559.754**	**13.948.518.553**	**13.980.099.122**	**14.018.389.987**
03.04	**PERADILAN**	**9.564.614.802**	**2.802.827.336**	**1.533.117.616**		**13.900.559.754**	**13.948.518.553**	**13.980.099.122**	**14.018.389.987**
005.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**9.564.614.802**	**2.802.827.336**	**1.533.117.616**		**13.900.559.754**	**13.948.518.553**	**13.980.099.122**	**14.018.389.987**
1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan		60.944.878			60.944.878	60.944.878	60.944.878	60.944.878
1065	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		8.432.096			8.432.096	8.432.096	8.432.096	8.432.096
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.908.206.925	501.912.850			4.410.119.775	4.816.709.860	4.816.709.860	4.816.709.860
1067	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung		68.212.185			68.212.185	69.252.927	69.252.927	69.252.927
1068	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya		7.525.838			7.525.838	7.525.838	7.525.838	7.525.838
1069	Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya		82.388.652			82.388.652	82.388.652	82.388.652	82.388.652
1070	Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung		230.591.508			230.591.508	233.137.662	237.337.397	242.429.508
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			1.533.117.616		1.533.117.616	1.587.329.270	1.605.569.435	1.627.685.319
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5.656.407.877	1.842.819.329			7.499.227.206	7.082.797.370	7.091.938.039	7.103.020.909
005.02	**Kepaniteraan**	**188.031.865**	**34.746.023**			**222.777.888**	**223.203.734**	**223.682.455**	**224.262.897**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**188.031.865**	**34.746.023**			**222.777.888**	**223.203.734**	**223.682.455**	**224.262.897**
03.04	**PERADILAN**	**188.031.865**	**34.746.023**			**222.777.888**	**223.203.734**	**223.682.455**	**224.262.897**
005.02.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**12.410.037**			**12.410.037**	**12.653.477**	**12.927.136**	**13.258.941**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 005

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara		12.410.037			12.410.037	12.653.477	12.927.136	13.258.941
005.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**188.031.865**	**22.335.986**			**210.367.851**	**210.550.257**	**210.755.319**	**211.003.956**
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	188.031.865	22.335.986			210.367.851	210.550.257	210.755.319	211.003.956
005.03	**Ditjen Badan Peradilan Umum**	**11.090.958**	**147.645.097**			**158.736.055**	**159.930.185**	**161.323.414**	**163.012.235**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**11.090.958**	**147.645.097**			**158.736.055**	**159.930.185**	**161.323.414**	**163.012.235**
03.04	**PERADILAN**	**11.090.958**	**147.645.097**			**158.736.055**	**159.930.185**	**161.323.414**	**163.012.235**
005.03.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**96.021.945**			**96.021.945**	**96.458.236**	**96.999.569**	**97.655.481**
1046	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum		1.388.400			1.388.400	1.388.400	1.388.400	1.388.400
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		94.633.545			94.633.545	95.069.836	95.611.169	96.267.081
005.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**11.090.958**	**51.623.152**			**62.714.110**	**63.471.949**	**64.323.845**	**65.356.754**
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	11.090.958	38.780.296			49.871.254	50.629.093	51.480.989	52.513.898
6627	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum		7.914.036			7.914.036	7.914.036	7.914.036	7.914.036
6630	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum		4.928.820			4.928.820	4.928.820	4.928.820	4.928.820
005.04	**Ditjen Badan Peradilan Agama**	**8.565.680**	**117.616.875**			**126.182.555**	**126.704.113**	**127.291.156**	**128.002.816**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**8.565.680**	**117.616.875**			**126.182.555**	**126.704.113**	**127.291.156**	**128.002.816**
03.04	**PERADILAN**	**8.565.680**	**117.616.875**			**126.182.555**	**126.704.113**	**127.291.156**	**128.002.816**
005.04.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**77.598.924**			**77.598.924**	**78.120.482**	**78.707.525**	**79.419.185**
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		75.742.669			75.742.669	76.264.227	76.851.270	77.562.930
1056	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan		1.014.868			1.014.868	1.014.868	1.014.868	1.014.868
7019	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama		841.387			841.387	841.387	841.387	841.387
005.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**8.565.680**	**40.017.951**			**48.583.631**	**48.583.631**	**48.583.631**	**48.583.631**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 005

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	8.565.680	33.679.547			42.245.227	42.245.227	42.245.227	42.245.227
6631	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama		3.549.749			3.549.749	3.549.749	3.549.749	3.549.749
6983	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama		2.788.655			2.788.655	2.788.655	2.788.655	2.788.655
005.05	**Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)**	**8.636.467**	**30.510.631**			**39.147.098**	**39.716.834**	**40.357.765**	**41.134.787**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**8.636.467**	**30.510.631**			**39.147.098**	**39.716.834**	**40.357.765**	**41.134.787**
03.04	**PERADILAN**	**8.636.467**	**30.510.631**			**39.147.098**	**39.716.834**	**40.357.765**	**41.134.787**
005.05.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**12.594.290**			**12.594.290**	**12.798.277**	**13.028.055**	**13.306.565**
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer		7.660.167			7.660.167	7.798.133	7.953.541	8.141.889
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara		4.934.123			4.934.123	5.000.144	5.074.514	5.164.676
005.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**8.636.467**	**17.916.341**			**26.552.808**	**26.918.557**	**27.329.710**	**27.828.222**
6245	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	8.636.467	15.729.514			24.365.981	24.731.730	25.142.883	25.641.395
6984	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer		1.006.678			1.006.678	1.006.678	1.006.678	1.006.678
6985	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara		1.180.149			1.180.149	1.180.149	1.180.149	1.180.149
005.06	**Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan**	**27.601.142**	**148.892.445**	**38.000.000**		**214.493.587**	**214.493.587**	**214.493.587**	**214.493.587**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**27.601.142**	**148.892.445**	**38.000.000**		**214.493.587**	**214.493.587**	**214.493.587**	**214.493.587**
03.04	**PERADILAN**	**27.601.142**	**148.892.445**	**38.000.000**		**214.493.587**	**214.493.587**	**214.493.587**	**214.493.587**
005.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**27.601.142**	**148.892.445**	**38.000.000**		**214.493.587**	**214.493.587**	**214.493.587**	**214.493.587**
1073	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan		60.458.466			60.458.466	60.458.466	60.458.466	60.458.466
1074	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan		19.533.223			19.533.223	19.533.223	19.533.223	19.533.223
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	27.601.142	38.791.973	38.000.000		104.393.115	104.393.115	104.393.115	104.393.115

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 005

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1076	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan		30.108.783			30.108.783	30.108.783	30.108.783	30.108.783
005.07	**Badan Pengawasan Mahkamah Agung**	**55.471.534**	**36.383.669**			**91.855.203**	**93.039.596**	**94.370.974**	**95.985.250**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**55.471.534**	**36.383.669**			**91.855.203**	**93.039.596**	**94.370.974**	**95.985.250**
03.04	**PERADILAN**	**55.471.534**	**36.383.669**			**91.855.203**	**93.039.596**	**94.370.974**	**95.985.250**
005.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**55.471.534**	**36.383.669**			**91.855.203**	**93.039.596**	**94.370.974**	**95.985.250**
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV		29.517.782			29.517.782	29.517.782	29.517.782	29.517.782
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	55.471.534	6.865.887			62.337.421	63.521.814	64.853.192	66.467.468
	JUMLAH RM	**9.864.012.448**	**3.305.978.624**	**1.553.973.688**		**14.723.964.760**	**14.775.475.403**	**14.811.104.894**	**14.854.304.349**
	JUMLAH PNBP		**12.643.452**	**17.143.928**		**29.787.380**	**30.131.199**	**30.513.579**	**30.977.210**
	TOTAL JUMLAH	**9.864.012.448**	**3.318.622.076**	**1.571.117.616**		**14.753.752.140**	**14.805.606.602**	**14.841.618.473**	**14.885.281.559**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 006

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
006	**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**	**5.695.431.816**	**1.957.564.017**	**12.597.004.167**		**20.250.000.000**	**20.456.407.688**	**20.688.439.928**	**20.969.774.243**
006.01	**Kejaksaan Republik Indonesia**	**5.695.431.816**	**1.957.564.017**	**12.597.004.167**		**20.250.000.000**	**20.456.407.688**	**20.688.439.928**	**20.969.774.243**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**5.695.431.816**	**1.957.564.017**	**12.597.004.167**		**20.250.000.000**	**20.456.407.688**	**20.688.439.928**	**20.969.774.243**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**5.695.431.816**	**1.936.155.675**	**12.597.004.167**		**20.228.591.658**	**20.434.830.682**	**20.666.673.323**	**20.947.777.755**
006.01.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**326.508.820**	**8.309.405.083**		**8.635.913.903**	**8.637.218.965**	**8.638.690.461**	**8.640.473.866**
1087	Operasi Intelijen di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan di Jaksa Agung Muda Intelijen		1.723.790			1.723.790	1.723.790	1.723.790	1.723.790
1099	Operasi Inteliijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Intelijen		2.125.550			2.125.550	2.125.550	2.125.550	2.125.550
1100	Operasi Inteliijen di Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di Jaksa Agung Muda Intelijen		3.506.682			3.506.682	3.506.682	3.506.682	3.506.682
1101	Operasi Inteliijen di Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Jaksa Agung Muda Intelijen		2.378.850			2.378.850	2.378.850	2.378.850	2.378.850
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		6.025.900			6.025.900	6.044.908	6.066.747	6.093.095
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		25.034.800			25.034.800	25.376.513	25.761.954	26.229.221
1104	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Intelijen		3.557.288			3.557.288	3.586.623	3.619.604	3.659.602
1109	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum		3.272.420			3.272.420	3.298.389	3.327.582	3.362.977
1112	Operasi Intelijen di Bidang Pengamanan dan Pembangunan Strategis di Jaksa Agung Muda Intelijen		2.510.150			2.510.150	2.559.825	2.615.670	2.683.382
1115	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus		3.212.472			3.212.472	3.212.472	3.212.472	3.212.472
1120	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara		2.166.768			2.166.768	2.209.746	2.258.072	2.316.667
6579	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum		14.488.580			14.488.580	14.488.580	14.488.580	14.488.580

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 006

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6580	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus		28.367.688			28.367.688	28.530.956	28.714.516	28.937.083
6581	Pertimbangan Hukum dan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara		3.521.240			3.521.240	3.591.095	3.669.630	3.764.849
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		218.902.642			218.902.642	219.374.650	219.907.807	220.553.683
6583	Penanganan Perkara Koneksitas di Jaksa Agung Muda Pidana Militer		3.053.429			3.053.429	3.111.750	3.177.334	3.256.855
6584	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Pidana Militer		2.660.571			2.660.571	2.693.503	2.730.538	2.775.445
8010	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum			8.309.405.083		8.309.405.083	8.309.405.083	8.309.405.083	8.309.405.083
006.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**5.695.431.816**	**1.609.646.855**	**4.287.599.084**		**11.592.677.755**	**11.797.611.717**	**12.027.982.862**	**12.307.303.889**
1080	Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Perrtimbangan Hukum, Kerja sama dan Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Kejaksaan RI diluar negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum dan Kerja Sama Hukum		4.775.105			4.775.105	4.865.836	4.967.839	5.091.520
1082	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI	595.802.249	75.296.648			671.098.897	685.312.930	701.290.742	720.663.564
1084	Analisis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengadakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan serta Penata Usahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kejaksaan RI		17.604.231			17.604.231	17.953.498	18.346.128	18.822.178
1085	Pelayanan Ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli, Keprotokolan dan Keamanan Pimpinan, Keamanan, Kesehatan, dan Pembinaan Rohani, serta Kerumah Tanggaan		122.800.963			122.800.963	125.488.132	127.943.340	130.920.236
1088	Pengelolaan Data, Statistik Kriminal serta Penerapan Pengembangan Teknologi		65.503.000			65.503.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	5.034.629.567	1.214.657.095			6.249.286.662	6.348.239.067	6.481.959.418	6.644.093.030
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI		1.971.250	4.287.599.084		4.289.570.334	4.376.774.273	4.452.317.318	4.543.911.946

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 006

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		9.224.985			9.224.985	9.224.985	9.224.985	9.224.985
1098	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan		5.760.887			5.760.887	5.782.496	5.806.787	5.836.247
5008	Kesekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI	65.000.000	38.659.851			103.659.851	105.577.660	107.733.465	110.347.343
6577	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		50.000.000			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
6578	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan		3.392.840			3.392.840	3.392.840	3.392.840	3.392.840
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**		**21.408.342**			**21.408.342**	**21.577.006**	**21.766.605**	**21.996.488**
006.01.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**21.408.342**			**21.408.342**	**21.577.006**	**21.766.605**	**21.996.488**
7066	Pemulihan Aset yang Menjadi Kewenangan Kejaksaan RI sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Koordinasi dengan Jaringan Kerjasama Pemulihan Aset Nasional maupun Transnasional		21.408.342			21.408.342	21.577.006	21.766.605	21.996.488
	JUMLAH RM	**5.695.431.816**	**1.625.889.533**	**11.247.703.992**		**18.569.025.341**	**18.757.517.860**	**18.969.411.789**	**19.226.328.763**
	JUMLAH PNBP		**239.274.484**	**494.912.825**		**734.187.309**	**735.419.193**	**736.804.046**	**738.483.146**
	JUMLAH BLU		**92.400.000**			**92.400.000**	**92.400.000**	**92.400.000**	**92.400.000**
	JUMLAH SBSN			**854.387.350**		**854.387.350**	**871.070.635**	**889.824.093**	**912.562.334**
	TOTAL JUMLAH	**5.695.431.816**	**1.957.564.017**	**12.597.004.167**		**20.250.000.000**	**20.456.407.688**	**20.688.439.928**	**20.969.774.243**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 007

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007	**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**	**1.063.788.861**	**1.357.909.287**	**187.689.316**		**2.609.387.464**	**3.263.439.817**	**3.319.620.533**	**3.386.786.012**
007.01	**Sekretariat Negara**	**1.026.760.534**	**1.266.310.723**	**187.666.252**		**2.480.737.509**	**2.524.128.709**	**2.572.904.292**	**2.632.043.850**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**1.026.760.534**	**1.266.310.723**	**187.666.252**		**2.480.737.509**	**2.524.128.709**	**2.572.904.292**	**2.632.043.850**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**1.026.760.534**	**1.266.310.723**	**187.666.252**		**2.480.737.509**	**2.524.128.709**	**2.572.904.292**	**2.632.043.850**
007.01.CA	**Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden**		**205.729.284**	**15.236.721**		**220.966.005**	**221.163.909**	**221.386.377**	**221.656.117**
1148	Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri		6.371.114			6.371.114	6.371.114	6.371.114	6.371.114
5953	Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden		49.609.024	860.170		50.469.194	50.469.194	50.469.194	50.469.194
5956	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Kerumahtanggaan, Pers, Media, dan Informasi kepada Wakil Presiden		12.868.379			12.868.379	12.868.379	12.868.379	12.868.379
5958	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan kepada Wakil Presiden Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia		10.716.593			10.716.593	10.914.497	11.136.965	11.406.705
5959	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan kepada Wakil Presiden Bidang Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan		560.576			560.576	560.576	560.576	560.576
5960	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan kepada Wakil Presiden Bidang Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital		560.219			560.219	560.219	560.219	560.219
6430	Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan		2.013.051			2.013.051	2.013.051	2.013.051	2.013.051
6431	Pelaksanaan Analisis dan Administrasi Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan		825.679			825.679	825.679	825.679	825.679
6432	Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Lainnya		346.734			346.734	346.734	346.734	346.734
6433	Penyelenggaraan Dukungan Fasilitas Pejabat Negara, Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden serta Tugas Teknis Lainnya		115.633.543	14.376.551		130.010.094	130.010.094	130.010.094	130.010.094

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 007

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6434	Penyelenggaraan Layanan Personel TNI dan Polri, Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dan Pengkoordinasian Pengamanan bagi Presiden dan Wapres beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing		1.236.971			1.236.971	1.236.971	1.236.971	1.236.971
7180	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM		583.889			583.889	583.889	583.889	583.889
7181	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian		583.889			583.889	583.889	583.889	583.889
7182	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat		583.889			583.889	583.889	583.889	583.889
7183	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan		583.889			583.889	583.889	583.889	583.889
7184	Penyelenggaraan dan Pelaporan Sidang Kabinet/Ratas/Pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden		578.000			578.000	578.000	578.000	578.000
7185	Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan		212.000			212.000	212.000	212.000	212.000
7186	Pengelolaan Dokumentasi, Diseminasi, dan Arsip Kepresidenan		216.259			216.259	216.259	216.259	216.259
7187	Penyusunan Rancangan Keputusan Presiden terkait Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan lainnya yang melalui Tim Penilai Akhir		285.022			285.022	285.022	285.022	285.022
7321	Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional pada Kementerian/Lembaga		1.360.564			1.360.564	1.360.564	1.360.564	1.360.564
007.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.026.760.534**	**1.060.581.439**	**172.429.531**		**2.259.771.504**	**2.302.964.800**	**2.351.517.915**	**2.410.387.733**
1126	Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan, Hukum, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Sekretariat Negara		352.264			352.264	352.264	352.264	352.264
1128	Penyelenggaraan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara		293.868			293.868	293.868	293.868	293.868
1262	Pengelolaan Komplek Kemayoran		187.890.154	5.283.210		193.173.364	196.819.624	200.918.388	205.888.078
1263	Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno		431.373.384	149.451.694		580.825.078	592.349.195	605.303.340	621.010.011

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 007

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6435	Penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PKASN) Kementerian Sekretariat Negara		8.683.292	165.358		8.848.650	8.848.650	8.848.650	8.848.650
6436	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Administrasi Keuangan, dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	984.308.241	11.006.281			995.314.522	1.020.693.516	1.049.221.715	1.083.811.663
6437	Penyelenggaran Keprotokolan, Ketatausahaan, Kearsipan, dan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		5.370.069			5.370.069	5.370.069	5.370.069	5.370.069
6438	Penyelenggaraan Dukungan Sarana, Prasarana, Pelayanan Umum Lainnya, serta Pengelolaan TIK di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		209.921.101	16.929.269		226.850.370	229.400.125	232.266.274	235.741.433
6439	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sekretariat Presiden	24.651.029	116.704.863			141.355.892	141.355.892	141.355.892	141.355.892
6440	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sekretariat Wakil Presiden	9.500.812	52.702.843	400.000		62.603.655	62.603.655	62.603.655	62.603.655
6441	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sekretariat Militer Presiden	1.185.370	8.398.245			9.583.615	9.677.785	9.783.643	9.911.993
7191	Pengelolaan Layanan Umum Sekretariat Dukungan Kabinet		27.515.375	200.000		27.715.375	27.715.375	27.715.375	27.715.375
7192	Pengelolaan Dukungan Kelembagaan, Kerja Sama, Arsip dan Ketatausahaan Sekretariat Dukungan Kabinet		10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
7193	Pengelolaan Anggaran, Kinerja, dan Kepegawaian Sekretariat Dukungan Kabinet	7.115.082	140.000			7.255.082	7.255.082	7.255.082	7.255.082
7194	Pengelolaan Dukungan Administrasi Kedeputian di lingkungan Sekretariat Dukungan Kabinet		219.700			219.700	219.700	219.700	219.700
007.06	**Pasukan Pengamanan Presiden**		**25.844.735**			**25.844.735**	**591.540.153**	**595.141.305**	**598.797.358**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**		**25.844.735**			**25.844.735**	**591.540.153**	**595.141.305**	**598.797.358**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**25.844.735**			**25.844.735**	**591.540.153**	**595.141.305**	**598.797.358**
007.06.CA	**Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden**		**21.430.622**			**21.430.622**	**586.999.534**	**590.507.062**	**594.049.671**
5965	Pengamanan Presiden, Wakil Presiden beserta Keluarganya Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintah		21.430.622			21.430.622	586.999.534	590.507.062	594.049.671
007.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**4.414.113**			**4.414.113**	**4.540.619**	**4.634.243**	**4.747.687**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 007

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6442	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Paspampres		4.414.113			4.414.113	4.540.619	4.634.243	4.747.687
007.07	**Dewan Pertimbangan Presiden**	**715.194**	**11.733.730**	**23.064**		**12.471.988**	**12.688.121**	**12.931.079**	**13.225.667**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**715.194**	**11.733.730**	**23.064**		**12.471.988**	**12.688.121**	**12.931.079**	**13.225.667**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**715.194**	**11.733.730**	**23.064**		**12.471.988**	**12.688.121**	**12.931.079**	**13.225.667**
007.07.CA	**Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden**		**291.944**			**291.944**	**291.944**	**291.944**	**291.944**
5966	Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden		291.944			291.944	291.944	291.944	291.944
007.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**715.194**	**11.441.786**	**23.064**		**12.180.044**	**12.396.177**	**12.639.135**	**12.933.723**
6443	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	715.194	11.441.786	23.064		12.180.044	12.396.177	12.639.135	12.933.723
007.10	**Kantor Staf Presiden**	**13.830.413**	**22.092.312**			**35.922.725**	**36.806.463**	**37.799.864**	**39.004.346**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**13.830.413**	**22.092.312**			**35.922.725**	**36.806.463**	**37.799.864**	**39.004.346**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**13.830.413**	**22.092.312**			**35.922.725**	**36.806.463**	**37.799.864**	**39.004.346**
007.10.CA	**Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden**		**591.174**			**591.174**	**591.174**	**591.174**	**591.174**
5969	Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional, Pengelolaan Isu Strategis, dan Komunikasi Politik		591.174			591.174	591.174	591.174	591.174
007.10.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**13.830.413**	**21.501.138**			**35.331.551**	**36.215.289**	**37.208.690**	**38.413.172**
6444	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Kantor Staf Presiden	13.830.413	21.501.138			35.331.551	36.215.289	37.208.690	38.413.172
007.12	**DEWAN EKONOMI NASIONAL**	**12.114.816**	**21.774.951**			**33.889.767**	**34.256.784**	**34.669.352**	**35.169.590**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**12.114.816**	**21.774.951**			**33.889.767**	**34.256.784**	**34.669.352**	**35.169.590**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**12.114.816**	**21.774.951**			**33.889.767**	**34.256.784**	**34.669.352**	**35.169.590**

SK No 154184 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 007

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007.12.CA	**Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden**		**291.944**			**291.944**	**291.944**	**291.944**	**291.944**
7189	Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Strategi dan Program Prioritas di Bidang Ekonomi		291.944			291.944	291.944	291.944	291.944
007.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**12.114.816**	**21.483.007**			**33.597.823**	**33.964.840**	**34.377.408**	**34.877.646**
7196	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Ekonomi Nasional	12.114.816	21.483.007			33.597.823	33.964.840	34.377.408	34.877.646
007.13	**BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS**	**10.367.904**	**10.152.836**			**20.520.740**	**64.019.587**	**66.174.641**	**68.545.201**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**10.367.904**	**10.152.836**			**20.520.740**	**64.019.587**	**66.174.641**	**68.545.201**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**10.367.904**	**10.152.836**			**20.520.740**	**64.019.587**	**66.174.641**	**68.545.201**
007.13.CA	**Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden**		**291.944**			**291.944**	**964.855**	**1.061.341**	**1.167.476**
7190	Pengendalian dan Investigasi Khusus Program dan Kegiatan Pembangunan		291.944			291.944	964.855	1.061.341	1.167.476
007.13.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**10.367.904**	**9.860.892**			**20.228.796**	**63.054.732**	**65.113.300**	**67.377.725**
7197	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus	10.367.904	9.860.892			20.228.796	63.054.732	65.113.300	67.377.725
	JUMLAH RM	**1.063.788.861**	**727.834.257**	**32.869.054**		**1.824.492.172**	**2.463.176.244**	**2.502.081.583**	**2.548.300.961**
	JUMLAH PNBP		**836.663**	**85.358**		**922.021**	**922.021**	**922.021**	**922.021**
	JUMLAH BLU		**619.263.538**	**154.734.904**		**773.998.442**	**789.168.819**	**806.221.728**	**826.898.089**
	JUMLAH HLN		**9.974.829**			**9.974.829**	**10.172.733**	**10.395.201**	**10.664.941**
	TOTAL JUMLAH	**1.063.788.861**	**1.357.909.287**	**187.689.316**		**2.609.387.464**	**3.263.439.817**	**3.319.620.533**	**3.386.786.012**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**	**1.099.531.885**	**5.401.980.886**	**1.298.487.229**		**7.800.000.000**	**7.933.297.334**	**8.080.352.874**	**8.252.964.899**
010.01	**Sekretariat Jenderal**	**477.863.386**	**2.192.127.607**	**564.038.996**		**3.234.029.989**	**3.267.879.961**	**3.305.931.645**	**3.352.068.582**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**477.863.386**	**2.192.127.607**	**564.038.996**		**3.234.029.989**	**3.267.879.961**	**3.305.931.645**	**3.352.068.582**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**203.196.961**	**1.730.889.963**	**481.883.304**		**2.415.970.228**	**2.439.115.282**	**2.465.132.925**	**2.496.678.886**
010.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**203.196.961**	**1.730.889.963**	**481.883.304**		**2.415.970.228**	**2.439.115.282**	**2.465.132.925**	**2.496.678.886**
4255	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	19.903.117	80.171.411	5.086.106		105.160.634	106.810.937	108.666.086	110.915.422
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal		131.007.763	99.500		131.107.263	131.638.498	132.235.752	132.959.903
6084	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal	183.293.844	1.353.451.918	164.546.398		1.701.292.160	1.714.556.906	1.729.467.814	1.747.547.043
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal		105.628.986	311.233.410		416.862.396	423.909.698	431.831.581	441.436.747
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal		60.629.885	917.890		61.547.775	62.199.243	62.931.692	63.819.771
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**274.666.425**	**461.237.644**	**82.155.692**		**818.059.761**	**828.764.679**	**840.798.720**	**855.389.696**
010.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**274.666.425**	**461.237.644**	**82.155.692**		**818.059.761**	**828.764.679**	**840.798.720**	**855.389.696**
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN		460.885			460.885	463.399	466.226	469.656
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	274.666.425	332.960.292	82.155.692		689.782.409	692.647.038	702.593.875	714.654.233
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN		1.098.098			1.098.098	1.241.103	1.279.863	1.326.858
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN		17.139.665			17.139.665	18.528.335	18.695.507	18.898.204
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN		109.578.704			109.578.704	115.884.804	117.763.249	120.040.745
010.02	**Inspektorat Jenderal**	**51.181.788**	**75.415.268**	**9.308.952**		**135.906.008**	**138.601.242**	**141.631.250**	**145.305.063**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**51.181.788**	**75.415.268**	**9.308.952**		**135.906.008**	**138.601.242**	**141.631.250**	**145.305.063**
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**51.181.788**	**75.415.268**	**9.308.952**		**135.906.008**	**138.601.242**	**141.631.250**	**145.305.063**
010.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**51.181.788**	**75.415.268**	**9.308.952**		**135.906.008**	**138.601.242**	**141.631.250**	**145.305.063**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah		573.222			573.222	611.898	625.284	641.508
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	51.181.788	15.551.244	9.308.952		76.041.984	77.501.410	79.121.742	81.086.368
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah		801.784			801.784	727.942	743.862	763.164
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah		2.645.184			2.645.184	2.726.827	2.786.460	2.858.767
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD		1.682.944			1.682.944	1.716.356	1.753.893	1.799.402
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus		54.160.890			54.160.890	55.316.809	56.600.009	58.155.854
010.03	**Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum**	**47.920.056**	**304.285.892**	**7.000.000**		**359.205.948**	**365.123.476**	**372.373.327**	**381.163.639**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**47.920.056**	**304.285.892**	**7.000.000**		**359.205.948**	**365.123.476**	**372.373.327**	**381.163.639**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**262.819.299**			**262.819.299**	**267.624.096**	**273.623.118**	**280.896.828**
010.03.CR	**Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum**		**262.819.299**			**262.819.299**	**267.624.096**	**273.623.118**	**280.896.828**
1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya		36.350.000			36.350.000	36.350.000	36.350.000	36.350.000
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional		28.500.000			28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan		197.969.299			197.969.299	202.774.096	208.773.118	216.046.828
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**47.920.056**	**41.466.593**	**7.000.000**		**96.386.649**	**97.499.380**	**98.750.209**	**100.266.811**
010.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**47.920.056**	**41.466.593**	**7.000.000**		**96.386.649**	**97.499.380**	**98.750.209**	**100.266.811**
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum		3.200.000			3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	47.920.056	29.266.593	7.000.000		84.186.649	85.299.380	86.550.209	88.066.811
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum		5.000.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum		4.000.000			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
010.04	**Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan**	**55.902.363**	**301.333.589**	**4.797.022**		**362.032.974**	**400.186.980**	**440.289.391**	**483.222.848**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**55.902.363**	**301.333.589**	**4.797.022**		**362.032.974**	**400.186.980**	**440.289.391**	**483.222.848**
01.06	**PEMBANGUNAN DAERAH**		**198.394.635**	**900.000**		**199.294.635**	**231.123.497**	**265.455.315**	**302.061.442**
010.04.CM	**Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**		**198.394.635**	**900.000**		**199.294.635**	**231.123.497**	**265.455.315**	**302.061.442**
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		60.242.855			60.242.855	81.838.601	104.475.239	128.574.701
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		138.151.780	900.000		139.051.780	149.284.896	160.980.076	173.486.741
01.90	**PELAYANAN UMUM LAINNYA**		**59.830.000**			**59.830.000**	**60.829.205**	**60.940.720**	**61.075.930**
010.04.CM	**Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**		**59.830.000**			**59.830.000**	**60.829.205**	**60.940.720**	**61.075.930**
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi		59.830.000			59.830.000	60.829.205	60.940.720	61.075.930
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**55.902.363**	**43.108.954**	**3.897.022**		**102.908.339**	**108.234.278**	**113.893.356**	**120.085.476**
010.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**55.902.363**	**43.108.954**	**3.897.022**		**102.908.339**	**108.234.278**	**113.893.356**	**120.085.476**
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah		1.913.913			1.913.913	1.913.913	1.913.913	1.913.913
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	55.902.363	37.457.461	3.897.022		97.256.846	97.038.045	102.658.875	108.804.620
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah		1.045.000			1.045.000	6.185.773	6.216.661	6.254.112
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah		2.692.580			2.692.580	3.096.547	3.103.907	3.112.831
010.05	**Ditjen Bina Pemerintahan Desa**	**93.414.664**	**225.371.289**	**13.319.000**		**332.104.953**	**336.003.656**	**340.386.299**	**345.700.158**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**93.414.664**	**225.371.289**	**13.319.000**		**332.104.953**	**336.003.656**	**340.386.299**	**345.700.158**
01.06	**PEMBANGUNAN DAERAH**		**158.569.775**			**158.569.775**	**159.706.334**	**160.983.990**	**162.533.114**
010.05.CM	**Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**		**158.569.775**			**158.569.775**	**159.706.334**	**160.983.990**	**162.533.114**
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa		82.839.380			82.839.380	83.654.940	84.571.725	85.683.307
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa		44.730.395			44.730.395	45.051.394	45.412.265	45.849.807
6138	Penataan kelembagaan Desa		31.000.000			31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**93.414.664**	**66.801.514**	**13.319.000**		**173.535.178**	**176.297.322**	**179.402.309**	**183.167.044**
010.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**93.414.664**	**66.801.514**	**13.319.000**		**173.535.178**	**176.297.322**	**179.402.309**	**183.167.044**
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa		2.300.000			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	93.414.664	52.453.592	13.319.000		159.187.256	161.831.585	164.804.135	168.408.291
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa		9.460.922			9.460.922	9.537.708	9.624.023	9.728.679
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa		2.587.000			2.587.000	2.628.029	2.674.151	2.730.074
010.06	**Ditjen Bina Pembangunan Daerah**	**72.538.479**	**196.874.421**	**26.101.871**		**295.514.771**	**299.664.847**	**304.330.212**	**309.986.901**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**72.538.479**	**196.874.421**	**26.101.871**		**295.514.771**	**299.664.847**	**304.330.212**	**309.986.901**
01.06	**PEMBANGUNAN DAERAH**		**154.039.596**	**10.405**		**154.050.001**	**155.587.536**	**157.316.113**	**159.411.987**
010.06.CM	**Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**		**154.039.596**	**10.405**		**154.050.001**	**155.587.536**	**157.316.113**	**159.411.987**
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah		10.900.000			10.900.000	10.961.303	11.030.223	11.113.785
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah		143.139.596	10.405		143.150.001	144.626.233	146.285.890	148.298.202
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**72.538.479**	**42.834.825**	**26.091.466**		**141.464.770**	**144.077.311**	**147.014.099**	**150.574.914**
010.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**72.538.479**	**42.834.825**	**26.091.466**		**141.464.770**	**144.077.311**	**147.014.099**	**150.574.914**
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah		6.750.000			6.750.000	6.839.284	6.939.648	7.061.337
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah		2.000.000			2.000.000	2.017.966	2.038.161	2.062.651
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	72.538.479	29.760.728	26.091.466		128.390.673	130.814.443	133.539.026	136.842.541
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah		2.500.000			2.500.000	2.548.825	2.603.714	2.670.264
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah		1.824.097			1.824.097	1.856.793	1.893.550	1.938.121
010.07	**Ditjen Otonomi Daerah**	**50.764.127**	**95.671.693**	**1.815.080**		**148.250.900**	**150.869.457**	**153.214.974**	**156.058.849**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**50.764.127**	**95.671.693**	**1.815.080**		**148.250.900**	**150.869.457**	**153.214.974**	**156.058.849**

SK No 154218 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**71.757.743**	**366.545**		**72.124.288**	**73.426.077**	**74.291.411**	**75.340.598**
010.07.CM	**Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**		**71.757.743**	**366.545**		**72.124.288**	**73.426.077**	**74.291.411**	**75.340.598**
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa		27.952.000			27.952.000	28.778.041	29.108.573	29.509.335
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		10.626.288			10.626.288	10.700.205	10.783.299	10.884.045
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa		15.325.000	175.000		15.500.000	15.664.677	15.849.795	16.074.242
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah		17.854.455	191.545		18.046.000	18.283.154	18.549.744	18.872.976
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**50.764.127**	**23.913.950**	**1.448.535**		**76.126.612**	**77.443.380**	**78.923.563**	**80.718.251**
010.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**50.764.127**	**23.913.950**	**1.448.535**		**76.126.612**	**77.443.380**	**78.923.563**	**80.718.251**
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah		2.000.000			2.000.000	2.019.840	2.042.144	2.069.186
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	50.764.127	19.284.056	1.448.535		71.496.718	72.606.230	74.055.189	75.812.017
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah		585.465			585.465	589.433	593.893	599.302
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah		2.044.429			2.044.429	2.227.877	2.232.337	2.237.746
010.08	**Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**54.895.852**	**1.626.766.877**	**560.143.808**		**2.241.806.537**	**2.273.023.516**	**2.308.114.212**	**2.350.661.070**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**54.895.852**	**1.626.766.877**	**560.143.808**		**2.241.806.537**	**2.273.023.516**	**2.308.114.212**	**2.350.661.070**
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**54.895.852**	**1.626.766.877**	**560.143.808**		**2.241.806.537**	**2.273.023.516**	**2.308.114.212**	**2.350.661.070**
010.08.CP	**Program Tata Kelola Kependudukan**		**1.564.960.902**	**504.783.808**		**2.069.744.710**	**2.097.470.096**	**2.128.635.911**	**2.166.423.916**
1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan		429.524.571	24.378.371		453.902.942	459.603.420	467.632.500	477.367.620
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan		245.159.685	1.388.231		246.547.916	252.797.731	258.201.816	264.754.175
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		3.387.000	30.000		3.417.000	3.417.000	3.417.000	3.417.000
6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital		886.889.646	478.987.206		1.365.876.852	1.381.651.945	1.399.384.595	1.420.885.121

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**54.895.852**	**61.805.975**	**55.360.000**		**172.061.827**	**175.553.420**	**179.478.301**	**184.237.154**
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2.558.230			2.558.230	2.804.562	2.865.896	2.940.261
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.895.852	52.408.429	55.360.000		162.664.281	165.623.077	169.373.282	173.920.345
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.859.531			3.859.531	3.531.852	3.531.852	3.531.852
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2.979.785			2.979.785	3.593.929	3.707.271	3.844.696
010.09	**Ditjen Bina Keuangan Daerah**	**49.849.508**	**138.042.285**	**1.500.000**		**189.391.793**	**192.195.678**	**195.347.530**	**199.169.080**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**49.849.508**	**138.042.285**	**1.500.000**		**189.391.793**	**192.195.678**	**195.347.530**	**199.169.080**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**114.313.557**			**114.313.557**	**115.689.129**	**117.235.396**	**119.110.219**
010.09.CM	**Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**		**114.313.557**			**114.313.557**	**115.689.129**	**117.235.396**	**119.110.219**
1276	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah		13.750.000			13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah		100.563.557			100.563.557	101.939.129	103.485.396	105.360.219
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**49.849.508**	**23.728.728**	**1.500.000**		**75.078.236**	**76.506.549**	**78.112.134**	**80.058.861**
010.09.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**49.849.508**	**23.728.728**	**1.500.000**		**75.078.236**	**76.506.549**	**78.112.134**	**80.058.861**
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah		1.000.000			1.000.000	1.019.841	1.042.144	1.069.186
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	49.849.508	19.782.410	1.500.000		71.131.918	72.474.323	73.983.334	75.812.971
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah		1.196.318			1.196.318	1.218.737	1.243.940	1.274.497
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah		1.750.000			1.750.000	1.793.648	1.842.716	1.902.207
010.11	**Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri**	**35.642.499**	**55.664.939**	**287.500**		**91.594.938**	**93.079.708**	**94.748.755**	**96.772.437**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**35.642.499**	**55.664.939**	**287.500**		**91.594.938**	**93.079.708**	**94.748.755**	**96.772.437**
01.06	**PEMBANGUNAN DAERAH**		**29.712.500**	**287.500**		**30.000.000**	**30.330.284**	**30.701.562**	**31.151.726**

SK No 154216 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010.11.CM	**Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**		**29.712.500**	**287.500**		**30.000.000**	**30.330.284**	**30.701.562**	**31.151.726**
1283	Pembinaan inovasi daerah		4.062.500	187.500		4.250.000	4.324.160	4.407.525	4.508.604
6142	Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri		25.650.000	100.000		25.750.000	26.006.124	26.294.037	26.643.122
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**35.642.499**	**25.952.439**			**61.594.938**	**62.749.424**	**64.047.193**	**65.620.711**
010.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**35.642.499**	**25.952.439**			**61.594.938**	**62.749.424**	**64.047.193**	**65.620.711**
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri		175.000			175.000	175.000	175.000	175.000
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	35.642.499	24.234.764			59.877.263	61.022.800	62.310.509	63.871.829
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri		20.000			20.000	20.000	20.000	20.000
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri		1.522.675			1.522.675	1.531.624	1.541.684	1.553.882
010.12	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**109.559.163**	**190.427.026**	**110.175.000**		**410.161.189**	**416.668.813**	**423.985.279**	**432.856.272**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**109.559.163**	**190.427.026**	**110.175.000**		**410.161.189**	**416.668.813**	**423.985.279**	**432.856.272**
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**109.559.163**	**106.438.341**	**110.175.000**		**326.172.504**	**331.256.464**	**336.971.746**	**343.901.358**
010.12.CM	**Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**		**24.560.582**			**24.560.582**	**25.043.184**	**25.585.745**	**26.243.558**
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		24.560.582			24.560.582	25.043.184	25.585.745	26.243.558
010.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**109.559.163**	**81.877.759**	**110.175.000**		**301.611.922**	**306.213.280**	**311.386.001**	**317.657.800**
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		400.000			400.000	410.057	421.365	435.077
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	109.559.163	75.690.759	110.175.000		295.424.922	299.936.629	305.008.521	311.158.059
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		2.400.000			2.400.000	2.427.767	2.458.990	2.496.849
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		3.387.000			3.387.000	3.438.827	3.497.125	3.567.815
01.06	**PEMBANGUNAN DAERAH**		**83.988.685**			**83.988.685**	**85.412.349**	**87.013.533**	**88.954.914**

SK No 154215 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010.12.CM	**Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**		**83.988.685**			**83.988.685**	**85.412.349**	**87.013.533**	**88.954.914**
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		83.988.685			83.988.685	85.412.349	87.013.533	88.954.914
	JUMLAH RM	**1.099.531.885**	**4.356.640.024**	**818.031.541**		**6.274.203.450**	**6.389.505.644**	**6.516.332.155**	**6.664.416.922**
	JUMLAH PNBP		**53.176.318**	**1.468.482**		**54.644.800**	**55.636.281**	**56.751.608**	**58.103.839**
	JUMLAH PLN		**944.813.046**	**478.987.206**		**1.423.800.252**	**1.440.721.542**	**1.459.742.647**	**1.482.805.401**
	JUMLAH HLN		**47.351.498**			**47.351.498**	**47.433.867**	**47.526.464**	**47.638.737**
	TOTAL JUMLAH	**1.099.531.885**	**5.401.980.886**	**1.298.487.229**		**7.800.000.000**	**7.933.297.334**	**8.080.352.874**	**8.252.964.899**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011	**KEMENTERIAN LUAR NEGERI**	**3.442.634.554**	**6.154.393.866**	**623.492.391**		**10.220.520.811**	**10.417.694.177**	**10.639.341.848**	**10.908.085.403**
011.01	**Sekretariat Jenderal**	**3.442.634.554**	**4.792.098.035**	**619.964.782**		**8.854.697.371**	**9.025.979.905**	**9.218.522.901**	**9.451.977.551**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**3.442.634.554**	**4.792.098.035**	**619.964.782**		**8.854.697.371**	**9.025.979.905**	**9.218.522.901**	**9.451.977.551**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**3.442.634.554**	**4.574.078.098**	**619.964.782**		**8.636.677.434**	**8.804.244.727**	**8.992.610.387**	**9.221.000.178**
011.01.AA	**Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional**		**748.745.051**			**748.745.051**	**759.880.537**	**772.401.325**	**787.582.283**
5640	Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional di Perwakilan RI		683.890.631			683.890.631	693.838.581	705.024.435	718.586.807
8015	Perumusan Strategi Kebijakan Penguatan Postur Diplomasi		64.854.420			64.854.420	66.041.956	67.376.890	68.995.476
011.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**3.442.634.554**	**3.825.333.047**	**619.964.782**		**7.887.932.383**	**8.044.364.190**	**8.220.209.062**	**8.433.417.895**
6015	Pengelolaan Organisasi		23.123.277			23.123.277	23.581.090	24.095.765	24.719.791
6016	Pengelolaan SDM		259.851.729			259.851.729	264.970.695	270.724.980	277.701.942
6017	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi		75.662.156	10.000.000		85.662.156	87.361.051	89.270.794	91.586.322
6019	Legislasi dan Litigasi		2.018.000			2.018.000	2.042.118	2.069.239	2.102.120
6023	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	3.442.634.554	3.464.677.885	609.964.782		7.517.277.221	7.666.409.236	7.834.048.284	8.037.307.720
01.03	**PELAYANAN UMUM**		**218.019.937**			**218.019.937**	**221.735.178**	**225.912.514**	**230.977.373**
011.01.AL	**Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik**		**218.019.937**			**218.019.937**	**221.735.178**	**225.912.514**	**230.977.373**
4439	Pelayanan dan Pelindungan WNI Perwakilan RI		218.019.937			218.019.937	221.735.178	225.912.514	230.977.373
011.02	**Ditjen Asia Pasifik dan Afrika**		**55.263.092**	**114.000**		**55.377.092**	**56.417.476**	**57.587.214**	**59.005.541**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**		**55.263.092**	**114.000**		**55.377.092**	**56.417.476**	**57.587.214**	**59.005.541**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**55.263.092**	**114.000**		**55.377.092**	**56.417.476**	**57.587.214**	**59.005.541**
011.02.AA	**Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional**		**51.547.693**			**51.547.693**	**52.517.172**	**53.607.182**	**54.928.841**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6024	Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika		51.547.693			51.547.693	52.517.172	53.607.182	54.928.841
011.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**3.715.399**	**114.000**		**3.829.399**	**3.900.304**	**3.980.032**	**4.076.700**
1312	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Asia Pasifik dan Afrika		3.715.399	114.000		3.829.399	3.900.304	3.980.032	4.076.700
011.03	**Ditjen Amerika dan Eropa**		**52.738.349**			**52.738.349**	**53.691.027**	**54.762.079**	**56.060.727**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**		**52.738.349**			**52.738.349**	**53.691.027**	**54.762.079**	**56.060.727**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**52.738.349**			**52.738.349**	**53.691.027**	**54.762.079**	**56.060.727**
011.03.AA	**Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional**		**49.001.837**			**49.001.837**	**49.928.350**	**50.969.975**	**52.232.937**
6025	Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Kawasan Amerika dan Eropa		49.001.837			49.001.837	49.928.350	50.969.975	52.232.937
011.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**3.736.512**			**3.736.512**	**3.762.677**	**3.792.104**	**3.827.790**
1318	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Amerika dan Eropa		3.736.512			3.736.512	3.762.677	3.792.104	3.827.790
011.04	**Ditjen Kerja Sama Asean**		**24.817.595**			**24.817.595**	**25.007.014**	**25.219.978**	**25.478.198**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**		**24.817.595**			**24.817.595**	**25.007.014**	**25.219.978**	**25.478.198**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**24.817.595**			**24.817.595**	**25.007.014**	**25.219.978**	**25.478.198**
011.04.AA	**Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional**		**19.546.649**			**19.546.649**	**19.632.271**	**19.728.530**	**19.845.235**
8031	Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama ASEAN		19.546.649			19.546.649	19.632.271	19.728.530	19.845.235
011.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**5.270.946**			**5.270.946**	**5.374.743**	**5.491.448**	**5.632.963**
1323	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Kerja Sama ASEAN		5.270.946			5.270.946	5.374.743	5.491.448	5.632.963
011.05	**Ditjen Kerjasama Multilateral**		**1.053.798.644**	**83.000**		**1.053.881.644**	**1.074.659.029**	**1.098.014.774**	**1.126.333.176**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**		**1.053.798.644**	**83.000**		**1.053.881.644**	**1.074.659.029**	**1.098.014.774**	**1.126.333.176**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**1.053.798.644**	**83.000**		**1.053.881.644**	**1.074.659.029**	**1.098.014.774**	**1.126.333.176**
011.05.AA	**Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional**		**1.048.173.754**			**1.048.173.754**	**1.068.840.066**	**1.092.070.918**	**1.120.237.896**
8032	Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral		1.048.173.754			1.048.173.754	1.068.840.066	1.092.070.918	1.120.237.896
011.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**5.624.890**	**83.000**		**5.707.890**	**5.818.963**	**5.943.856**	**6.095.280**
1329	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Kerja Sama Multilateral		5.624.890	83.000		5.707.890	5.818.963	5.943.856	6.095.280
011.06	**Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik**		**22.482.208**	**50.000**		**22.532.208**	**22.819.547**	**23.142.650**	**23.534.418**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**		**22.482.208**	**50.000**		**22.532.208**	**22.819.547**	**23.142.650**	**23.534.418**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**22.482.208**	**50.000**		**22.532.208**	**22.819.547**	**23.142.650**	**23.534.418**
011.06.AA	**Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional**		**18.098.443**			**18.098.443**	**18.303.058**	**18.533.140**	**18.812.121**
6026	Peningkatan Citra Positif indonesia di Dunia Internasional		18.098.443			18.098.443	18.303.058	18.533.140	18.812.121
011.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**4.383.765**	**50.000**		**4.433.765**	**4.516.489**	**4.609.510**	**4.722.297**
1334	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik		4.383.765	50.000		4.433.765	4.516.489	4.609.510	4.722.297
011.07	**Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional**		**19.587.772**	**69.030**		**19.656.802**	**20.030.049**	**20.449.684**	**20.958.484**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**		**19.587.772**	**69.030**		**19.656.802**	**20.030.049**	**20.449.684**	**20.958.484**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**19.587.772**	**69.030**		**19.656.802**	**20.030.049**	**20.449.684**	**20.958.484**
011.07.AA	**Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional**		**15.009.087**			**15.009.087**	**15.291.401**	**15.608.797**	**15.993.633**
8033	Optimalisasi Diplomasi Hukum dan Perjanjian Internasional		15.009.087			15.009.087	15.291.401	15.608.797	15.993.633
011.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**4.578.685**	**69.030**		**4.647.715**	**4.738.648**	**4.840.887**	**4.964.851**

SK No 154211 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1338	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional		4.578.685	69.030		4.647.715	4.738.648	4.840.887	4.964.851
011.08	**Ditjen Protokol dan Konsuler**		**84.465.760**	**3.035.079**		**87.500.839**	**88.989.397**	**90.662.848**	**92.691.844**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**		**84.465.760**	**3.035.079**		**87.500.839**	**88.989.397**	**90.662.848**	**92.691.844**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**84.465.760**	**3.035.079**		**87.500.839**	**88.989.397**	**90.662.848**	**92.691.844**
011.08.AL	**Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik**		**79.166.713**	**2.935.079**		**82.101.792**	**83.483.265**	**85.036.299**	**86.919.294**
6028	Pelayanan dan Pelindungan WNI Pusat		60.266.713	2.935.079		63.201.792	64.361.605	65.665.424	67.246.259
6029	Pelayanan Keprotokolan dan Fasilitas Diplomatik		18.900.000			18.900.000	19.121.660	19.370.875	19.673.035
011.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**5.299.047**	**100.000**		**5.399.047**	**5.506.132**	**5.626.549**	**5.772.550**
1343	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Protokol dan Konsuler		5.299.047	100.000		5.399.047	5.506.132	5.626.549	5.772.550
011.09	**Inspektorat Jenderal**		**12.003.483**			**12.003.483**	**12.241.594**	**12.509.315**	**12.833.911**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**		**12.003.483**			**12.003.483**	**12.241.594**	**12.509.315**	**12.833.911**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**12.003.483**			**12.003.483**	**12.241.594**	**12.509.315**	**12.833.911**
011.09.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**12.003.483**			**12.003.483**	**12.241.594**	**12.509.315**	**12.833.911**
1348	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Inspektorat Jenderal		3.898.221			3.898.221	3.975.550	4.062.494	4.167.907
6022	Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		8.105.262			8.105.262	8.266.044	8.446.821	8.666.004
011.10	**Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan**		**23.808.477**	**150.000**		**23.958.477**	**24.255.943**	**24.590.325**	**24.995.756**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**		**23.808.477**	**150.000**		**23.958.477**	**24.255.943**	**24.590.325**	**24.995.756**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**23.808.477**	**150.000**		**23.958.477**	**24.255.943**	**24.590.325**	**24.995.756**
011.10.AA	**Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional**		**20.908.247**			**20.908.247**	**21.205.713**	**21.540.095**	**21.945.526**

SK No 154210 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8014	Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional dalam Lingkup Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional		20.908.247			20.908.247	21.205.713	21.540.095	21.945.526
011.10.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**2.900.230**	**150.000**		**3.050.230**	**3.050.230**	**3.050.230**	**3.050.230**
8013	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan		2.900.230	150.000		3.050.230	3.050.230	3.050.230	3.050.230
011.11	**Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri**		**13.330.451**	**26.500**		**13.356.951**	**13.603.196**	**13.880.080**	**14.215.797**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**		**13.330.451**	**26.500**		**13.356.951**	**13.603.196**	**13.880.080**	**14.215.797**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**13.330.451**	**26.500**		**13.356.951**	**13.603.196**	**13.880.080**	**14.215.797**
011.11.AA	**Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional**		**10.031.665**			**10.031.665**	**10.214.716**	**10.420.536**	**10.670.090**
6027	Perumusan Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri		10.031.665			10.031.665	10.214.716	10.420.536	10.670.090
011.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**3.298.786**	**26.500**		**3.325.286**	**3.388.480**	**3.459.544**	**3.545.707**
1352	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri		3.298.786	26.500		3.325.286	3.388.480	3.459.544	3.545.707
	JUMLAH RM	**3.442.634.554**	**6.153.691.414**	**394.095.529**		**9.990.421.497**	**10.183.029.550**	**10.399.545.375**	**10.662.066.644**
	JUMLAH PNBP		**702.452**	**229.396.862**		**230.099.314**	**234.664.627**	**239.796.473**	**246.018.759**
	TOTAL JUMLAH	**3.442.634.554**	**6.154.393.866**	**623.492.391**		**10.220.520.811**	**10.417.694.177**	**10.639.341.848**	**10.908.085.403**

SK No 154209 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
012	**KEMENTERIAN PERTAHANAN**	**55.479.427.573**	**54.867.025.361**	**76.753.547.066**		**187.100.000.000**	**190.084.855.991**	**193.481.397.482**	**197.599.641.545**
012.01	**Kementerian Pertahanan**	**913.356.541**	**22.058.049.611**	**52.368.153.474**		**75.339.559.626**	**76.532.554.177**	**77.914.859.258**	**79.590.879.974**
02	**FUNGSI PERTAHANAN**	**847.003.547**	**21.644.611.818**	**52.357.749.714**		**74.849.365.079**	**76.033.825.631**	**77.406.537.433**	**79.070.926.401**
02.01	**PERTAHANAN NEGARA**	**847.003.547**	**21.644.611.818**	**52.357.749.714**		**74.849.365.079**	**76.033.825.631**	**77.406.537.433**	**79.070.926.401**
012.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**847.003.547**	**10.908.753.374**	**1.213.123.069**		**12.968.879.990**	**13.065.407.673**	**13.173.915.002**	**13.305.478.025**
1354	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Kemhan		20.543.017	10.159.799		30.702.816	31.311.980	31.996.748	32.827.009
1358	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan		109.706.182	70.497.037		180.203.219	183.778.590	187.797.668	192.670.723
1361	Pengelolaan Organisasi dan SDM Kemhan		18.645.079	30.000.000		48.645.079	49.213.358	49.852.242	50.626.849
1365	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kemhan		6.615.120	233.014		6.848.134	6.982.208	7.132.947	7.315.717
6548	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Kemhan	847.003.547	10.721.679.391	1.100.662.851		12.669.345.789	12.760.362.076	12.862.673.656	12.986.724.479
6549	Legislasi dan Litigasi Kemhan		5.497.542	1.570.368		7.067.910	7.198.725	7.345.843	7.524.229
6550	Pengelolaan Resiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Kemhan		1.500.000			1.500.000	1.529.740	1.563.199	1.603.764
6551	Pendidikan dan Pelatihan		24.567.043			24.567.043	25.030.996	25.552.699	26.185.255
012.01.AD	**Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan**		**36.717.369**			**36.717.369**			
1389	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Pertahanan Negara		36.717.369			36.717.369			
012.01.AJ	**Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan**		**141.610.841**	**8.400**		**141.619.241**	**144.408.383**	**147.543.823**	**151.345.463**
1403	Pembinaan Kesadaran Bela Negara		1.412.962			1.412.962	1.440.982	1.472.501	1.510.707
6554	Pembinaan Potensi dan Kekuatan Sumber Daya Pertahanan		140.197.879	8.400		140.206.279	142.967.401	146.071.322	149.834.756
012.01.KA	**Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan**		**1.340.462.858**	**237.411.142**		**1.577.874.000**	**1.608.494.560**	**1.642.914.778**	**1.684.648.692**
1406	Pembinaan dan Pengembangan Industri Pertahanan		1.321.202.600	6.906.400		1.328.109.000	1.354.459.995	1.384.080.810	1.419.995.533
6555	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan		19.260.258	230.504.742		249.765.000	254.034.565	258.833.968	264.653.159

SK No 154208 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
012.01.AF	**Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan**		**9.217.067.376**	**50.907.207.103**		**60.124.274.479**	**61.215.515.015**	**62.442.163.830**	**63.929.454.221**
6552	Pembangunan/Pengadaan Sarpras Pertahanan			2.097.912.499		2.097.912.499	2.139.537.178	2.186.326.919	2.243.058.670
6553	Pengadaan Non Alutsista (Kemhan)		1.254.117	531.353		1.785.470	1.820.882	1.860.704	1.908.988
6559	Pengadaan/Harwat Alutsista Strategis		9.215.813.259	48.808.763.251		58.024.576.510	59.074.156.955	60.253.976.207	61.684.486.563
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**66.352.994**	**413.437.793**	**10.403.760**		**490.194.547**	**498.728.546**	**508.321.825**	**519.953.573**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**66.352.994**	**413.437.793**	**10.403.760**		**490.194.547**	**498.728.546**	**508.321.825**	**519.953.573**
012.01.KA	**Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan**		**123.328.472**	**10.403.760**		**133.732.232**	**135.195.567**	**136.840.675**	**138.835.414**
1386	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan		123.328.472	10.403.760		133.732.232	135.195.567	136.840.675	138.835.414
012.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**66.352.994**	**290.109.321**			**356.462.315**	**363.532.979**	**371.481.150**	**381.118.159**
6658	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Universitas Pertahanan	66.352.994	290.109.321			356.462.315	363.532.979	371.481.150	381.118.159
012.21	**Markas Besar TNI**	**2.511.402.736**	**8.026.256.062**	**4.767.469.960**		**15.305.128.758**	**15.540.133.796**	**15.804.302.336**	**16.124.602.056**
02	**FUNGSI PERTAHANAN**	**2.511.402.736**	**8.026.256.062**	**4.767.469.960**		**15.305.128.758**	**15.540.133.796**	**15.804.302.336**	**16.124.602.056**
02.01	**PERTAHANAN NEGARA**	**2.511.402.736**	**8.026.256.062**	**4.767.469.960**		**15.305.128.758**	**15.540.133.796**	**15.804.302.336**	**16.124.602.056**
012.21.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**2.511.402.736**	**2.203.646.095**	**9.217.682**		**4.724.266.513**	**4.806.366.244**	**4.898.655.692**	**5.010.555.006**
1439	Pengelolaan Organisasi dan SDM Integratif	2.511.402.736	84.508.567			2.595.911.303	2.646.388.498	2.703.130.111	2.771.928.318
6527	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Integratif		2.069.218.953	8.667.682		2.077.886.635	2.108.540.628	2.142.999.357	2.184.780.008
6528	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Integratif		451.603	550.000		1.001.603	1.021.475	1.043.813	1.070.899
6529	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Integratif		3.078.212			3.078.212	3.139.285	3.207.938	3.291.179
6530	Legislasi dan Litigasi Integratif		28.719.298			28.719.298	29.256.421	29.860.441	30.592.768
6531	Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Integratif		17.669.462			17.669.462	18.019.937	18.414.032	18.891.834
012.21.AC	**Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit**		**950.668.190**	**689.332.561**		**1.640.000.751**	**1.658.678.250**	**1.679.673.612**	**1.705.130.126**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6538	Penyelenggaraan Pendidikan Integratif		836.159.798	534.932.561		1.371.092.359	1.386.070.878	1.402.908.222	1.423.323.213
6539	Penyelenggaraan Latihan Integratif		101.205.195			101.205.195	101.828.829	102.529.868	103.379.859
6540	Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Integratif		12.656.271			12.656.271	12.892.573	13.158.213	13.480.299
6541	Pembinaan Psikologi Integratif		646.926			646.926	660.612	676.004	694.669
6542	Peningkatan Perumahan Dinas Integratif			154.400.000		154.400.000	157.225.358	160.401.305	164.252.086
012.21.AB	**Program Pelaksanaan Tugas TNI**		**4.871.941.777**			**4.871.941.777**	**4.947.142.611**	**5.031.674.916**	**5.134.168.858**
6537	Penggunaan Kekuatan		4.871.941.777			4.871.941.777	4.947.142.611	5.031.674.916	5.134.168.858
012.21.AF	**Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan**			**4.068.919.717**		**4.068.919.717**	**4.127.946.691**	**4.194.298.116**	**4.274.748.066**
1424	Pengadaan Non Alutsista Integratif			2.760.000.000		2.760.000.000	2.934.026.974	3.000.378.399	3.080.828.349
6532	Pengadaan Alutsista Integratif			715.000.000		715.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
6536	Pemeliharaan/ Perawatan/ Peningkatan Sarpras Pertahanan Integratif			593.919.717		593.919.717	593.919.717	593.919.717	593.919.717
012.22	**Markas Besar TNI AD**	**38.452.750.603**	**14.722.895.431**	**6.158.424.611**		**59.334.070.645**	**60.294.684.109**	**61.374.515.495**	**62.683.788.971**
02	**FUNGSI PERTAHANAN**	**38.452.750.603**	**14.722.895.431**	**6.158.424.611**		**59.334.070.645**	**60.294.684.109**	**61.374.515.495**	**62.683.788.971**
02.01	**PERTAHANAN NEGARA**	**38.452.750.603**	**14.722.895.431**	**6.158.424.611**		**59.334.070.645**	**60.294.684.109**	**61.374.515.495**	**62.683.788.971**
012.22.AB	**Program Pelaksanaan Tugas TNI**		**581.283.226**	**5.211.500**		**586.494.726**	**587.921.217**	**589.525.164**	**591.469.937**
6512	Dukungan Kesiapan Operasi Matra Darat		581.283.226	5.211.500		586.494.726	587.921.217	589.525.164	591.469.937
012.22.AC	**Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit**		**6.334.608.119**	**1.159.764.599**		**7.494.372.718**	**7.574.914.021**	**7.665.452.000**	**7.775.227.405**
1466	Penyelenggaraan Latihan Matra Darat		1.108.167.875			1.108.167.875	1.108.836.289	1.109.588.766	1.110.500.837
6505	Penyelenggaraan Pendidikan Matra Darat		1.255.865.955			1.255.865.955	1.262.918.132	1.270.845.925	1.280.458.254
6506	Pembinaan Psikologi Matra Darat		4.566.591			4.566.591	4.656.377	4.757.315	4.879.704
6507	Penyelenggaraan Kesehatan Matra Darat		3.966.007.698	473.726.716		4.439.734.414	4.500.212.289	4.568.195.554	4.650.624.030

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6508	Peningkatan Perumahan Dinas Matra Darat			686.037.883		686.037.883	698.290.934	712.064.440	728.764.580
012.22.AF	**Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan**		**420.951.165**	**4.981.211.012**		**5.402.162.177**	**5.431.773.288**	**5.465.058.630**	**5.505.416.734**
1451	Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Non Alutsista Matra Darat		339.029.127	100.951.210		439.980.337	441.062.772	442.279.580	443.754.935
1463	Pengadaan Non Alutsista Matra Darat			4.086.101.925		4.086.101.925	4.088.314.931	4.090.802.541	4.093.818.725
1464	Pembangunan/Pengadaan Sarpras Pertahanan Matra Darat			525.918.884		525.918.884	551.753.912	580.794.718	616.006.192
1465	Pengadaan Alutsista Matra Darat		12.557.581	160.125.000		172.682.581	172.976.629	173.307.165	173.707.934
6509	Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Alutsista Matra Darat		60.239.008			60.239.008	60.239.008	60.239.008	60.239.008
6510	Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Sarpras Pertahanan Matra Darat		9.125.449	108.113.993		117.239.442	117.426.036	117.635.618	117.889.940
012.22.AJ	**Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan**		**759.597.596**			**759.597.596**	**759.837.194**	**760.106.641**	**760.433.298**
6511	Pembinaan Teritorial		759.597.596			759.597.596	759.837.194	760.106.641	760.433.298
012.22.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**38.452.750.603**	**6.530.092.707**	**12.237.500**		**44.995.080.810**	**45.843.463.955**	**46.797.135.684**	**47.953.442.912**
6498	Pengelolaan Organisasi dan SDM Matra Darat	38.452.750.603	3.711.575.150			42.164.325.753	42.975.211.427	43.886.724.061	44.991.916.705
6499	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Matra Darat		1.648.280.577			1.648.280.577	1.676.496.069	1.708.218.095	1.746.678.616
6500	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Matra Darat		23.992.210			23.992.210	24.286.076	24.616.738	25.017.586
6501	Legislasi dan Litigasi Matra Darat		32.574.576			32.574.576	32.923.423	33.317.520	33.794.918
6502	Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Matra Darat		902.459.980			902.459.980	911.056.547	920.720.844	932.438.424
6503	Pengelolaan sistem Informasi dan teknologi Matra Darat		211.210.214	12.237.500		223.447.714	223.490.413	223.538.426	223.596.663
012.22.KA	**Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan**		**96.362.618**			**96.362.618**	**96.774.434**	**97.237.376**	**97.798.685**
1454	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Darat		96.362.618			96.362.618	96.774.434	97.237.376	97.798.685
012.23	**Markas Besar TNI AL**	**8.588.507.750**	**5.357.523.158**	**8.340.379.098**		**22.286.410.006**	**22.612.573.768**	**22.979.213.609**	**23.423.758.262**
02	**FUNGSI PERTAHANAN**	**8.588.507.750**	**5.357.523.158**	**8.340.379.098**		**22.286.410.006**	**22.612.573.768**	**22.979.213.609**	**23.423.758.262**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02	**DUKUNGAN PERTAHANAN**	**8.588.507.750**	**5.357.523.158**	**8.340.379.098**		**22.286.410.006**	**22.612.573.768**	**22.979.213.609**	**23.423.758.262**
012.23.AB	**Program Pelaksanaan Tugas TNI**		**419.504.545**			**419.504.545**	**424.122.309**	**429.313.177**	**435.607.036**
6513	Dukungan Kesiapan Operasi Matra Laut		419.504.545			419.504.545	424.122.309	429.313.177	435.607.036
012.23.AC	**Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit**		**1.368.858.234**	**988.325.885**		**2.357.184.119**	**2.387.264.784**	**2.421.078.562**	**2.462.077.289**
1506	Penyelenggaraan Latihan Matra Laut		108.461.044			108.461.044	110.571.877	112.944.654	115.821.603
1508	Pembinaan Psikologi Matra Laut		4.227.963			4.227.963	4.304.573	4.390.699	4.495.129
1511	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Matra Laut		688.770.803	208.684.068		897.454.871	914.612.025	933.898.445	957.282.888
6556	Peningkatan Perumahan Dinas Matra Laut		2.000.000	264.941.817		266.941.817	276.905.856	288.106.300	301.686.648
6557	Penyelenggaraan Pendidikan Matra Laut		565.398.424	514.700.000		1.080.098.424	1.080.870.453	1.081.738.464	1.082.791.021
012.23.AF	**Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan**		**1.744.689.717**	**7.082.810.317**		**8.827.500.034**	**8.959.887.193**	**9.108.701.857**	**9.289.137.085**
6514	Pengadaan Alutsista Matra Laut		425.998.300	455.182.805		881.181.105	892.843.769	905.953.614	921.849.076
6515	Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Alutsista Matra Laut		736.021.021	633.421.364		1.369.442.385	1.392.221.709	1.417.827.688	1.448.874.484
6516	Pembangunan/Pengadaan Sarpras Pertahanan Matra Laut			197.027.665		197.027.665	205.194.220	214.374.136	225.504.625
6517	Pengadaan Non Alutsista Matra Laut		248.957.952	5.740.941.450		5.989.899.402	6.073.061.780	6.166.543.497	6.279.888.452
6518	Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Non Alutsista Matra Laut		20.034.545			20.034.545	20.429.305	20.873.030	21.411.080
6519	Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Sarpras Pertahanan Matra Laut		313.677.899	56.237.033		369.914.932	376.136.410	383.129.892	391.609.368
012.23.KA	**Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan**		**3.605.000**	**7.202.677**		**10.807.677**	**10.873.150**	**10.946.751**	**11.035.987**
1492	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Laut		3.605.000	7.202.677		10.807.677	10.873.150	10.946.751	11.035.987
012.23.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**8.588.507.750**	**1.793.442.662**	**262.040.219**		**10.643.990.631**	**10.802.605.024**	**10.980.904.167**	**11.197.088.831**
6521	Pengelolaan Organisasi dan SDM Matra Laut	8.588.507.750	180.736.425			8.769.244.175	8.917.414.900	9.083.973.642	9.285.923.281
6522	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Matra Laut		1.536.135.778	20.000.000		1.556.135.778	1.565.672.644	1.576.393.625	1.589.392.662

SK No 154204 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6523	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Matra Laut		7.514.593	240.040.219		247.554.812	247.593.185	247.636.371	247.688.698
6524	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Matra Laut		21.645.150	2.000.000		23.645.150	23.972.000	24.339.414	24.784.904
6525	Legislasi dan Litigasi Matra Laut		26.147.640			26.147.640	26.308.825	26.490.040	26.709.751
6526	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Matra Laut		21.263.076			21.263.076	21.643.470	22.071.075	22.589.535
012.23.AJ	**Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan**		**27.423.000**			**27.423.000**	**27.821.308**	**28.269.095**	**28.812.034**
6520	Pembinaan Potensi Maritim		27.423.000			27.423.000	27.821.308	28.269.095	28.812.034
012.24	**Markas Besar TNI AU**	**5.013.409.943**	**4.702.301.099**	**5.119.119.923**		**14.834.830.965**	**15.104.910.141**	**15.408.506.784**	**15.776.612.282**
02	**FUNGSI PERTAHANAN**	**5.013.409.943**	**4.702.301.099**	**5.119.119.923**		**14.834.830.965**	**15.104.910.141**	**15.408.506.784**	**15.776.612.282**
02.01	**PERTAHANAN NEGARA**	**5.013.409.943**	**2.495.859.405**	**1.415.008.138**		**8.924.277.486**	**9.108.691.133**	**9.315.991.963**	**9.567.340.466**
012.24.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**5.013.409.943**	**1.351.391.224**	**19.259.129**		**6.384.060.296**	**6.507.651.781**	**6.646.582.309**	**6.815.033.023**
1523	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Matra Udara		21.806.904	19.259.129		41.066.033	41.719.022	42.453.043	43.343.034
1549	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Matra Udara		10.899.800			10.899.800	11.109.257	11.344.764	11.630.258
6493	Pengelolaan Organisasi dan SDM Matra Udara	5.013.409.943	414.310.726			5.427.720.669	5.533.736.382	5.652.909.337	5.797.404.391
6543	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Matra Udara		856.204.729			856.204.729	872.078.396	889.922.174	911.557.502
6544	Legislasi dan Litigasi Matra Udara		16.387.065			16.387.065	16.620.451	16.883.204	17.201.730
6545	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Matra Udara		31.782.000			31.782.000	32.388.273	33.069.787	33.896.108
012.24.AC	**Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit**		**1.144.468.181**	**1.177.210.892**		**2.321.679.073**	**2.378.165.225**	**2.441.661.471**	**2.518.649.554**
1536	Penyelenggaraan Latihan Matra Udara		172.867.618			172.867.618	175.974.040	179.466.098	183.700.166
1537	Penyelenggaraan Pendidikan Matra Udara		287.686.868	509.718.318		797.405.186	816.949.629	838.919.437	865.557.484
1538	Peningkatan Perumahan Dinas Matra Udara			436.354.575		436.354.575	445.017.223	454.754.811	466.561.472
1540	Pembinaan Psikologi Matra Udara		5.829.625	4.044.900		9.874.525	10.067.986	10.285.500	10.549.197

SK No 154203 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1544	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Matra Udara		678.084.070	227.093.099		905.177.169	930.156.347	958.235.625	992.281.235
012.24.AF	**Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan**			**218.538.117**		**218.538.117**	**222.874.127**	**227.748.183**	**233.657.889**
6560	Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Sarpras Pertahanan Matra Udara			218.538.117		218.538.117	222.874.127	227.748.183	233.657.889
02.02	**DUKUNGAN PERTAHANAN**		**2.206.441.694**	**3.704.111.785**		**5.910.553.479**	**5.996.219.008**	**6.092.514.821**	**6.209.271.816**
012.24.KA	**Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan**		**24.277.500**			**24.277.500**	**24.759.188**	**25.300.649**	**25.957.161**
1526	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Udara		24.277.500			24.277.500	24.759.188	25.300.649	25.957.161
012.24.AF	**Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan**		**2.144.799.847**	**3.702.921.135**		**5.847.720.982**	**5.932.172.048**	**6.027.102.533**	**6.142.204.061**
1532	Pembangunan/Pengadaan Sarpras Pertahanan Matra Udara			517.007.135		517.007.135	527.241.449	538.745.764	552.694.539
6494	Pengadaan Alutsista Matra Udara		240.000.000	60.971.236		300.971.236	302.180.966	303.540.807	305.189.591
6495	Pengadaan Non Alutsista Matra Udara		2.574.655	2.923.231.560		2.925.806.215	2.956.794.482	2.991.627.990	3.033.863.009
6496	Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Non Alutsista Matra Udara		297.372.374	40.000.000		337.372.374	344.085.313	351.631.240	360.780.549
6546	Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Alutsista Matra Udara		1.604.852.818	161.711.204		1.766.564.022	1.801.869.838	1.841.556.732	1.889.676.373
012.24.AB	**Program Pelaksanaan Tugas TNI**		**18.707.197**			**18.707.197**	**19.051.267**	**19.438.154**	**19.907.274**
6547	Dukungan Kesiapan Operasi Matra Udara		18.707.197			18.707.197	19.051.267	19.438.154	19.907.274
012.24.AJ	**Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan**		**18.657.150**	**1.190.650**		**19.847.800**	**20.236.505**	**20.673.485**	**21.203.320**
6558	Pembinaan Potensi Dirgantara		18.657.150	1.190.650		19.847.800	20.236.505	20.673.485	21.203.320
	JUMLAH RM	**55.479.427.573**	**42.963.257.881**	**30.427.860.726**		**128.870.546.180**	**130.727.103.725**	**132.855.338.417**	**135.435.782.584**
	JUMLAH PNBP		**1.252.094.516**	**164.161.876**		**1.416.256.392**	**1.442.908.948**	**1.472.870.218**	**1.509.197.653**
	JUMLAH BLU		**4.147.637.456**	**563.747.714**		**4.711.385.170**	**4.779.279.074**	**4.855.597.890**	**4.948.133.134**
	JUMLAH PLN		**5.701.586.068**	**40.798.413.932**		**46.500.000.000**	**47.422.606.469**	**48.459.695.963**	**49.717.148.970**
	JUMLAH SBSN			**1.914.013.499**		**1.914.013.499**	**1.951.989.421**	**1.994.677.661**	**2.046.436.417**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTAL JUMLAH	**55.479.427.573**	**54.867.025.361**	**76.753.547.066**		**187.100.000.000**	**190.084.855.991**	**193.481.397.482**	**197.599.641.545**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015	**KEMENTERIAN KEUANGAN**	**27.878.299.416**	**21.478.634.045**	**2.659.066.539**		**52.016.000.000**	**53.002.261.249**	**54.110.929.611**	**55.455.169.096**
015.01	**Sekretariat Jenderal**	**27.212.784.194**	**4.607.351.459**	**185.736.589**		**32.005.872.242**	**32.636.399.017**	**33.345.166.253**	**34.204.534.212**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**27.212.784.194**	**673.198.408**	**185.736.589**		**28.071.719.191**	**28.626.985.126**	**29.251.152.591**	**30.007.944.794**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**27.212.784.194**	**673.198.408**	**185.736.589**		**28.071.719.191**	**28.626.985.126**	**29.251.152.591**	**30.007.944.794**
015.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**27.212.784.194**	**673.198.408**	**185.736.589**		**28.071.719.191**	**28.626.985.126**	**29.251.152.591**	**30.007.944.794**
4750	Legislasi dan Litigasi		5.556.907			5.556.907	5.565.320	5.574.793	5.586.277
4751	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)		7.780.688			7.780.688	7.935.288	8.109.125	8.319.893
4753	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		532.796.898	185.736.589		718.533.487	731.779.074	746.668.562	764.721.810
4755	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		8.616.719			8.616.719	8.774.428	8.951.729	9.166.704
4757	Pengelolaan Organisasi dan SDM	27.212.784.194	117.873.279			27.330.657.473	27.872.345.716	28.481.250.281	29.219.536.490
4759	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		573.917			573.917	585.300	598.101	613.620
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**3.934.153.051**			**3.934.153.051**	**4.009.413.891**	**4.094.013.662**	**4.196.589.418**
10.07	**PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN**		**3.934.153.051**			**3.934.153.051**	**4.009.413.891**	**4.094.013.662**	**4.196.589.418**
015.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**3.934.153.051**			**3.934.153.051**	**4.009.413.891**	**4.094.013.662**	**4.196.589.418**
4752	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan		3.934.153.051			3.934.153.051	4.009.413.891	4.094.013.662	4.196.589.418
015.02	**Inspektorat Jenderal**	**4.303.740**	**29.438.699**	**2.446.645**		**36.189.084**	**36.874.747**	**37.645.572**	**38.580.178**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**4.303.740**	**29.438.699**	**2.446.645**		**36.189.084**	**36.874.747**	**37.645.572**	**38.580.178**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**4.303.740**	**29.438.699**	**2.446.645**		**36.189.084**	**36.874.747**	**37.645.572**	**38.580.178**
015.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**4.303.740**	**29.438.699**	**2.446.645**		**36.189.084**	**36.874.747**	**37.645.572**	**38.580.178**
4738	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		14.084.989	2.446.645		16.531.634	16.839.731	17.186.080	17.606.018

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4739	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		200.016			200.016	200.016	200.016	200.016
4740	Pengelolaan Organisasi dan SDM	4.303.740	2.167.777			6.471.517	6.595.744	6.735.395	6.904.722
4741	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		12.959.267			12.959.267	13.212.079	13.496.309	13.840.929
6885	Legislasi dan Litigasi		26.650			26.650	27.177	27.772	28.493
015.03	**Ditjen Anggaran**	**7.102.320**	**35.393.321**	**2.802.246**		**45.297.887**	**46.184.163**	**47.180.503**	**48.388.564**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**7.102.320**	**35.393.321**	**2.802.246**		**45.297.887**	**46.184.163**	**47.180.503**	**48.388.564**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**7.102.320**	**35.393.321**	**2.802.246**		**45.297.887**	**46.184.163**	**47.180.503**	**48.388.564**
015.03.CB	**Program Pengelolaan Belanja Negara**		**7.440.900**			**7.440.900**	**7.581.471**	**7.739.530**	**7.931.175**
4775	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		1.787.749			1.787.749	1.823.056	1.862.758	1.910.895
4776	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD		3.633.523			3.633.523	3.700.262	3.775.297	3.866.283
4777	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD		8.100			8.100	8.260	8.441	8.660
4778	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD		2.011.528			2.011.528	2.049.893	2.093.034	2.145.337
015.03.CC	**Program Pengelolaan Penerimaan Negara**		**6.187.846**			**6.187.846**	**6.310.604**	**6.448.605**	**6.615.933**
4785	Pengawasan dan Penegakan Hukum		2.500.000			2.500.000	2.549.595	2.605.351	2.672.955
4786	Perumusan Kebijakan Administratif		3.036.572			3.036.572	3.102.767	3.177.179	3.267.403
6206	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi		651.274			651.274	658.242	666.075	675.575
015.03.CE	**Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi**		**882.880**			**882.880**	**900.394**	**920.085**	**943.959**
4766	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi		882.880			882.880	900.394	920.085	943.959
015.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**7.102.320**	**20.881.695**	**2.802.246**		**30.786.261**	**31.391.694**	**32.072.283**	**32.897.497**
4688	Legislasi dan Litigasi		27.040			27.040	27.576	28.179	28.910
4689	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		19.925.695	2.802.246		22.727.941	23.173.506	23.674.373	24.281.673

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4690	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		198.500			198.500	202.433	206.860	212.229
4691	Pengelolaan Organisasi dan SDM	7.102.320	606.000			7.708.320	7.861.251	8.033.168	8.241.616
4692	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		124.460			124.460	126.928	129.703	133.069
015.04	**Ditjen Pajak**	**362.534.604**	**5.348.068.141**	**559.049.922**		**6.269.652.667**	**6.382.884.220**	**6.510.176.341**	**6.664.515.436**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**362.534.604**	**5.348.068.141**	**559.049.922**		**6.269.652.667**	**6.382.884.220**	**6.510.176.341**	**6.664.515.436**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**362.534.604**	**5.348.068.141**	**559.049.922**		**6.269.652.667**	**6.382.884.220**	**6.510.176.341**	**6.664.515.436**
015.04.CC	**Program Pengelolaan Penerimaan Negara**		**1.096.195.705**			**1.096.195.705**	**1.115.949.169**	**1.138.159.417**	**1.165.088.517**
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara		157.984.834			157.984.834	161.118.294	164.641.800	168.914.028
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi		90.601.867			90.601.867	92.318.397	94.249.885	96.591.621
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum		812.627.577			812.627.577	826.885.967	842.915.713	862.351.215
4795	Perumusan Kebijakan Administratif		20.652.016			20.652.016	21.012.865	21.418.785	21.910.920
6209	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan		14.329.411			14.329.411	14.613.646	14.933.234	15.320.733
015.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**362.534.604**	**4.251.872.436**	**559.049.922**		**5.173.456.962**	**5.266.935.051**	**5.372.016.924**	**5.499.426.919**
4706	Legislasi dan Litigasi		835.613			835.613	835.613	835.613	835.613
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		1.858.286.017	399.160.413		2.257.446.430	2.297.183.377	2.341.854.985	2.396.018.610
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	362.534.604	1.925.703.190			2.288.237.794	2.333.489.434	2.384.356.724	2.446.032.411
4709	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		3.224.364			3.224.364	3.288.328	3.360.241	3.447.434
4710	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		463.654.148	159.889.509		623.543.657	631.965.842	641.433.131	652.912.049
6199	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		169.104			169.104	172.457	176.230	180.802
015.05	**Ditjen Bea dan Cukai**	**137.038.377**	**2.199.418.538**	**952.609.095**		**3.289.066.010**	**3.350.576.229**	**3.419.721.656**	**3.503.559.292**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**137.038.377**	**2.199.418.538**	**952.609.095**		**3.289.066.010**	**3.350.576.229**	**3.419.721.656**	**3.503.559.292**

SK No 154243 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**137.038.377**	**2.199.418.538**	**952.609.095**		**3.289.066.010**	**3.350.576.229**	**3.419.721.656**	**3.503.559.292**
015.05.CC	**Program Pengelolaan Penerimaan Negara**		**889.636.421**			**889.636.421**	**906.595.428**	**925.659.789**	**948.775.005**
4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi		573.497.881			573.497.881	584.624.031	597.131.166	612.295.883
4788	Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan		1.324.632			1.324.632	1.348.876	1.376.159	1.409.231
4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum		308.702.048			308.702.048	314.426.219	320.861.236	328.663.567
4790	Perumusan Kebijakan Administratif		6.111.860			6.111.860	6.196.302	6.291.228	6.406.324
015.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**137.038.377**	**1.293.219.802**	**952.609.095**		**2.382.867.274**	**2.427.100.014**	**2.476.823.065**	**2.537.111.401**
4694	Legislasi dan Litigasi		1.254.432			1.254.432	1.254.432	1.254.432	1.254.432
4695	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		937.489.410	853.470.169		1.790.959.579	1.825.248.298	1.863.793.220	1.910.528.272
4696	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		6.567.616			6.567.616	6.697.897	6.844.374	7.021.978
4697	Pengelolaan Organisasi dan SDM	137.038.377	38.441.505			175.479.882	178.946.900	182.844.166	187.569.532
4698	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		2.528.338			2.528.338	2.577.970	2.633.874	2.701.652
4699	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		306.938.501	99.138.926		406.077.427	412.374.517	419.452.999	428.035.535
015.05.CE	**Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi**		**16.562.315**			**16.562.315**	**16.880.787**	**17.238.802**	**17.672.886**
4768	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional		15.850.913			15.850.913	16.165.390	16.518.914	16.947.551
4769	Komunikasi dan Edukasi		201.396			201.396	205.391	209.882	215.329
4770	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi		510.006			510.006	510.006	510.006	510.006
015.06	**Ditjen Perimbangan Keuangan**	**4.424.288**	**47.775.512**	**2.594.066**		**54.793.866**	**55.643.346**	**56.598.376**	**57.756.328**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**4.424.288**	**47.775.512**	**2.594.066**		**54.793.866**	**55.643.346**	**56.598.376**	**57.756.328**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**4.424.288**	**44.627.182**	**2.594.066**		**51.645.536**	**52.486.331**	**53.431.597**	**54.577.710**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015.06.CB	**Program Pengelolaan Belanja Negara**		**16.965.899**			**16.965.899**	**17.275.487**	**17.623.576**	**18.045.632**
4779	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		9.265.184			9.265.184	9.440.427	9.637.451	9.876.332
4780	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD		2.159.755			2.159.755	2.199.080	2.243.302	2.296.923
4781	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD		2.636.123			2.636.123	2.688.409	2.747.200	2.818.493
4782	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD		2.904.837			2.904.837	2.947.571	2.995.623	3.053.884
015.06.CE	**Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi**		**3.960.586**			**3.960.586**	**3.972.552**	**3.986.016**	**4.002.334**
4772	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi		3.960.586			3.960.586	3.972.552	3.986.016	4.002.334
015.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**4.424.288**	**23.700.697**	**2.594.066**		**30.719.051**	**31.238.292**	**31.822.005**	**32.529.744**
4728	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		20.038.529	2.594.066		22.632.595	23.167.886	23.577.783	24.074.772
4729	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		626.660			626.660	635.102	644.593	656.104
4730	Pengelolaan Organisasi dan SDM	4.424.288	2.673.581			7.097.869	7.240.317	7.400.458	7.594.621
4731	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		96.447			96.447	98.359	100.510	103.118
6609	Legislasi dan Litigasi		265.480			265.480	96.628	98.661	101.129
01.03	**PELAYANAN UMUM**		**3.148.330**			**3.148.330**	**3.157.015**	**3.166.779**	**3.178.618**
015.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**3.148.330**			**3.148.330**	**3.157.015**	**3.166.779**	**3.178.618**
7789	Pengolahan Data dan Informasi		3.148.330			3.148.330	3.157.015	3.166.779	3.178.618
015.07	**Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko**	**4.004.154**	**87.609.246**	**8.322.535**		**99.935.935**	**101.111.423**	**102.433.048**	**104.035.471**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**4.004.154**	**87.609.246**	**8.322.535**		**99.935.935**	**101.111.423**	**102.433.048**	**104.035.471**
01.02	**BANTUAN LUAR NEGERI**		**42.670.243**	**343.677**		**43.013.920**	**43.186.109**	**43.379.671**	**43.614.366**
015.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**42.670.243**	**343.677**		**43.013.920**	**43.186.109**	**43.379.671**	**43.614.366**
6389	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional		42.670.243	343.677		43.013.920	43.186.109	43.379.671	43.614.366

SK No 154241 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**4.004.154**	**44.939.003**	**7.978.858**		**56.922.015**	**57.925.314**	**59.053.377**	**60.421.105**
015.07.CD	**Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko**		**17.693.069**			**17.693.069**	**18.007.886**	**18.361.992**	**18.791.313**
4807	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		332.760			332.760	342.243	352.908	365.843
4808	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara		13.116.988			13.116.988	13.351.748	13.615.748	13.935.841
4809	Pengelolaan risiko Keuangan Negara		2.732.479			2.732.479	2.783.198	2.840.295	2.909.505
4810	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara		323.104			323.104	327.528	332.505	338.538
6217	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		1.187.738			1.187.738	1.203.169	1.220.536	1.241.586
015.07.CE	**Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi**		**593.531**			**593.531**	**593.531**	**593.531**	**593.531**
4773	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi		593.531			593.531	593.531	593.531	593.531
015.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**4.004.154**	**26.652.403**	**7.978.858**		**38.635.415**	**39.323.897**	**40.097.854**	**41.036.261**
4733	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		23.217.999	7.978.858		31.196.857	31.748.327	32.368.248	33.119.890
4734	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		1.788.488			1.788.488	1.818.533	1.852.307	1.893.262
4735	Pengelolaan Organisasi dan SDM	4.004.154	1.551.916			5.556.070	5.661.174	5.779.340	5.922.609
4736	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		94.000			94.000	95.863	97.959	100.500
015.08	**Ditjen Perbendaharaan**	**78.646.146**	**7.025.856.308**	**50.953.860**		**7.155.456.314**	**7.293.266.137**	**7.448.184.618**	**7.636.019.418**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**78.646.146**	**6.862.057.291**	**49.508.860**		**6.990.212.297**	**7.126.703.448**	**7.280.139.549**	**7.466.176.981**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**78.646.146**	**810.309.691**	**45.120.860**		**934.076.697**	**952.012.272**	**972.181.608**	**996.635.403**
015.08.CD	**Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko**		**45.888.943**			**45.888.943**	**46.753.032**	**47.728.938**	**48.911.109**
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		21.201.149			21.201.149	21.621.522	22.095.944	22.671.062
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		15.244.888			15.244.888	15.501.515	15.791.203	16.142.388

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara		1.669.657			1.669.657	1.430.759	1.462.355	1.500.134
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara		1.927.634			1.927.634	1.965.472	2.008.693	2.060.706
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif		5.845.615			5.845.615	6.233.764	6.370.743	6.536.819
015.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**78.646.146**	**764.420.748**	**45.120.860**		**888.187.754**	**905.259.240**	**924.452.670**	**947.724.294**
4711	Legislasi dan Litigasi		96.900			96.900	98.820	100.982	103.602
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		282.634.049	45.120.860		327.754.909	333.341.209	340.077.255	348.244.507
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		4.449.462			4.449.462	4.918.005	5.008.714	5.118.776
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	78.302.754	48.476.892			126.779.646	129.350.722	132.189.508	135.631.447
4722	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		737.149			737.149	751.709	768.161	788.095
4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		362.358.321			362.358.321	369.477.696	377.514.717	387.259.460
6990	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Badan Pengarah Papua	343.392	65.667.975			66.011.367	67.321.079	68.793.333	70.578.407
01.03	**PELAYANAN UMUM**		**6.051.747.600**	**4.388.000**		**6.056.135.600**	**6.174.691.176**	**6.307.957.941**	**6.469.541.578**
015.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**6.051.747.600**	**4.388.000**		**6.056.135.600**	**6.174.691.176**	**6.307.957.941**	**6.469.541.578**
4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit		6.051.747.600	4.388.000		6.056.135.600	6.174.691.176	6.307.957.941	6.469.541.578
04	**FUNGSI EKONOMI**		**163.799.017**	**1.445.000**		**165.244.017**	**166.562.689**	**168.045.069**	**169.842.437**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**		**69.603.239**			**69.603.239**	**70.109.078**	**70.677.728**	**71.367.210**
015.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**69.603.239**			**69.603.239**	**70.109.078**	**70.677.728**	**71.367.210**
4714	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup		69.603.239			69.603.239	70.109.078	70.677.728	71.367.210
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**		**94.195.778**	**1.445.000**		**95.640.778**	**96.453.611**	**97.367.341**	**98.475.227**
015.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**94.195.778**	**1.445.000**		**95.640.778**	**96.453.611**	**97.367.341**	**98.475.227**

SK No 154239 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Investasi Pemerintah		94.195.778	1.445.000		95.640.778	96.453.611	97.367.341	98.475.227
015.09	**Ditjen Kekayaan Negara**	**27.628.466**	**677.584.922**	**208.635.818**		**913.849.206**	**927.342.576**	**942.512.926**	**960.906.654**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**27.628.466**	**677.584.922**	**208.635.818**		**913.849.206**	**927.342.576**	**942.512.926**	**960.906.654**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**27.628.466**	**677.584.922**	**208.635.818**		**913.849.206**	**927.342.576**	**942.512.926**	**960.906.654**
015.09.CD	**Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko**		**225.650.560**			**225.650.560**	**227.367.656**	**229.299.271**	**231.641.208**
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		12.314.573			12.314.573	12.237.999	12.281.893	12.335.097
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		12.661.127			12.661.127	12.806.323	12.969.651	13.167.691
4798	Pengelolaan Aset		197.944.004			197.944.004	199.522.980	201.226.549	203.291.992
4799	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara		518.376			518.376	527.069	536.847	548.705
4800	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara		138.867			138.867	141.434	144.321	147.822
4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif		2.073.613			2.073.613	2.131.851	2.140.010	2.149.901
015.09.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**27.628.466**	**451.934.362**	**208.635.818**		**688.198.646**	**699.974.920**	**713.213.655**	**729.265.446**
4700	Legislasi dan Litigasi		5.460.625			5.460.625	5.441.470	5.525.390	5.627.114
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		204.858.879	203.976.546		408.835.425	417.782.705	426.628.831	437.354.654
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		8.023.233			8.023.233	8.112.134	8.181.533	8.265.708
4703	Pengelolaan Organisasi dan SDM	27.628.466	36.420.456			64.048.922	63.612.136	64.228.445	64.975.707
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		4.208.221			4.208.221	4.251.923	4.298.858	4.355.781
4705	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		30.413.443	3.737.777		34.151.220	34.140.040	34.159.965	34.184.120
7061	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional		162.549.505	921.495		163.471.000	166.634.512	170.190.633	174.502.362
015.11	**Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan**	**9.762.322**	**333.753.784**	**28.664.284**		**372.180.390**	**378.679.952**	**385.986.326**	**394.845.153**

SK No 154238 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**7.679.560**	**278.935.733**	**26.564.284**		**313.179.577**	**318.514.206**	**324.511.000**	**331.782.001**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**7.679.560**	**278.935.733**	**26.564.284**		**313.179.577**	**318.514.206**	**324.511.000**	**331.782.001**
015.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**7.679.560**	**278.935.733**	**26.564.284**		**313.179.577**	**318.514.206**	**324.511.000**	**331.782.001**
4678	Legislasi dan Litigasi		10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		78.580.971	26.564.284		105.145.255	106.914.011	108.902.375	111.313.242
4681	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		1.294.660			1.294.660	1.294.857	1.295.081	1.295.351
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	7.679.560	199.035.902			206.715.462	210.280.918	214.288.873	219.148.435
4685	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		14.200			14.200	14.420	14.671	14.973
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**2.082.762**	**54.818.051**	**2.100.000**		**59.000.813**	**60.165.746**	**61.475.326**	**63.063.152**
10.05	**PENDIDIKAN KEDINASAN**	**2.082.762**	**54.818.051**	**2.100.000**		**59.000.813**	**60.165.746**	**61.475.326**	**63.063.152**
015.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**2.082.762**	**54.818.051**	**2.100.000**		**59.000.813**	**60.165.746**	**61.475.326**	**63.063.152**
4680	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		22.999.576			22.999.576	23.455.878	23.968.810	24.590.729
4682	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		240.350			240.350	245.114	250.475	256.973
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM	2.082.762	18.645.304			20.728.066	21.139.281	21.601.581	22.162.108
4686	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		6.887			6.887	7.020	7.176	7.361
7062	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Keuangan Negara		12.925.934	2.100.000		15.025.934	15.318.453	15.647.284	16.045.981
015.12	**Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal**	**5.833.208**	**40.616.168**	**6.484.122**		**52.933.498**	**53.548.305**	**54.239.500**	**55.077.571**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**5.833.208**	**40.616.168**	**6.484.122**		**52.933.498**	**53.548.305**	**54.239.500**	**55.077.571**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**19.260.211**			**19.260.211**	**19.636.976**	**20.060.550**	**20.574.135**
015.12.CE	**Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi**		**19.260.211**			**19.260.211**	**19.636.976**	**20.060.550**	**20.574.135**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7790	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi		6.846.872			6.846.872	6.982.700	7.135.400	7.320.556
7791	Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi		9.337.497			9.337.497	9.518.792	9.722.607	9.969.732
7792	Komunikasi dan Edukasi		3.075.842			3.075.842	3.135.484	3.202.543	3.283.847
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**5.833.208**	**21.355.957**	**6.484.122**		**33.673.287**	**33.911.329**	**34.178.950**	**34.503.436**
015.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**5.833.208**	**21.355.957**	**6.484.122**		**33.673.287**	**33.911.329**	**34.178.950**	**34.503.436**
7779	Legislasi dan Litigasi		49.692			49.692	50.523	51.458	52.593
7780	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		19.312.044	6.484.122		25.796.166	25.975.470	26.177.047	26.421.450
7781	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		368.293			368.293	374.616	381.725	390.348
7782	Pengelolaan Organisasi dan SDM	5.833.208	1.533.977			7.367.185	7.418.769	7.476.769	7.547.094
7783	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		91.951			91.951	91.951	91.951	91.951
015.13	**Lembaga National Single Window**	**6.867.261**	**74.402.990**	**2.744.995**		**84.015.246**	**85.594.200**	**87.369.102**	**89.521.145**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**6.867.261**	**74.402.990**	**2.744.995**		**84.015.246**	**85.594.200**	**87.369.102**	**89.521.145**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**6.867.261**	**74.402.990**	**2.744.995**		**84.015.246**	**85.594.200**	**87.369.102**	**89.521.145**
015.13.CC	**Program Pengelolaan Penerimaan Negara**		**5.048.510**			**5.048.510**	**5.065.374**	**5.084.332**	**5.107.317**
6610	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi		770.947			770.947	770.947	770.947	770.947
6611	Perumusan Kebijakan Administratif		4.277.563			4.277.563	4.294.427	4.313.385	4.336.370
015.13.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**6.867.261**	**69.354.480**	**2.744.995**		**78.966.736**	**80.528.826**	**82.284.770**	**84.413.828**
4743	Legislasi dan Litigasi		100.104			100.104	183.704	183.704	183.704
4745	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		4.979.045			4.979.045	5.030.917	5.140.938	5.274.338
4746	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		1.546.828			1.546.828	1.562.423	1.596.592	1.638.022
4747	Pengelolaan Organisasi dan SDM	6.867.261	430.250			7.297.511	7.423.830	7.585.052	7.780.534

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4748	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		5.700			5.700			
4749	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		62.292.553	2.744.995		65.037.548	66.327.952	67.778.484	69.537.230
015.14	**DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN**	**5.337.792**	**76.432.400**	**5.760.352**		**87.530.544**	**88.843.309**	**90.319.087**	**92.108.440**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**5.337.792**	**76.432.400**	**5.760.352**		**87.530.544**	**88.843.309**	**90.319.087**	**92.108.440**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**48.772.807**			**48.772.807**	**49.447.244**	**50.205.449**	**51.124.761**
015.14.CE	**Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi**		**48.772.807**			**48.772.807**	**49.447.244**	**50.205.449**	**51.124.761**
7793	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi		12.689.430			12.689.430	12.732.533	12.781.002	12.839.767
7794	Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi		18.419.075			18.419.075	18.760.844	19.145.056	19.610.904
7795	Komunikasi dan Edukasi		6.369.735			6.369.735	6.477.739	6.599.162	6.746.384
7796	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional		11.294.567			11.294.567	11.476.128	11.680.229	11.927.706
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**5.337.792**	**27.659.593**	**5.760.352**		**38.757.737**	**39.396.065**	**40.113.638**	**40.983.679**
015.14.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**5.337.792**	**27.659.593**	**5.760.352**		**38.757.737**	**39.396.065**	**40.113.638**	**40.983.679**
7784	Legislasi dan Litigasi		67.371			67.371	68.706	70.208	72.030
7785	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		23.902.232	5.760.352		29.662.584	30.150.870	30.699.767	31.365.294
7786	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		1.204.930			1.204.930	1.228.835	1.255.708	1.288.291
7787	Pengelolaan Organisasi dan SDM	5.337.792	2.407.700			7.745.492	7.868.760	8.007.336	8.175.353
7788	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		77.360			77.360	78.894	80.619	82.711
015.15	**BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN**	**12.032.544**	**894.932.557**	**642.262.010**		**1.549.227.111**	**1.565.313.625**	**1.583.396.303**	**1.605.321.234**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**12.032.544**	**894.932.557**	**642.262.010**		**1.549.227.111**	**1.565.313.625**	**1.583.396.303**	**1.605.321.234**
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**12.032.544**	**894.932.557**	**642.262.010**		**1.549.227.111**	**1.565.313.625**	**1.583.396.303**	**1.605.321.234**

SK No 154235 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015.15.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**12.032.544**	**894.932.557**	**642.262.010**		**1.549.227.111**	**1.565.313.625**	**1.583.396.303**	**1.605.321.234**
7774	Pengelola Keuangan, BMN, dan Umum		433.739.910	304.433.653		738.173.563	746.735.817	756.360.549	768.030.366
7775	Pengelolaan Organisasi dan SDM	12.032.544	4.873.089			16.905.633	17.240.644	17.617.230	18.073.834
7776	Manajemen Sistem Informasi		450.086.890	337.828.357		787.915.247	794.997.512	802.958.595	812.611.271
7777	Intelijen Ekonomi dan Keuangan		2.175.704			2.175.704	2.218.865	2.267.392	2.326.228
7778	Manajemen Transformasi Strategik		4.056.964			4.056.964	4.120.787	4.192.537	4.279.535
	JUMLAH RM	**27.878.299.416**	**11.080.841.845**	**2.606.462.691**		**41.565.603.952**	**42.351.964.954**	**43.235.927.040**	**44.307.714.200**
	JUMLAH PNBP		**29.946.850**	**43.405.676**		**73.352.526**	**74.489.465**	**75.768.311**	**77.318.754**
	JUMLAH BLU		**10.367.845.350**	**9.198.172**		**10.377.043.522**	**10.575.806.830**	**10.799.234.260**	**11.070.136.142**
	TOTAL JUMLAH	**27.878.299.416**	**21.478.634.045**	**2.659.066.539**		**52.016.000.000**	**53.002.261.249**	**54.110.929.611**	**55.455.169.096**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
018	**KEMENTERIAN PERTANIAN**	**6.988.163.575**	**32.419.703.479**	**737.132.946**		**40.145.000.000**	**40.500.700.067**	**40.923.590.939**	**41.436.338.537**
018.01	**Sekretariat Jenderal**	**3.357.683.668**	**396.132.916**	**9.534.560**		**3.763.351.144**	**3.830.511.654**	**3.906.005.952**	**3.997.541.478**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**3.357.683.668**	**396.132.916**	**9.534.560**		**3.763.351.144**	**3.830.511.654**	**3.906.005.952**	**3.997.541.478**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**3.357.683.668**	**396.132.916**	**9.534.560**		**3.763.351.144**	**3.830.511.654**	**3.906.005.952**	**3.997.541.478**
018.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**3.357.683.668**	**396.132.916**	**9.534.560**		**3.763.351.144**	**3.830.511.654**	**3.906.005.952**	**3.997.541.478**
1746	Penyelenggaraan Hukum Bidang Pertanian		4.542.229			4.542.229	4.542.229	4.542.229	4.542.229
1747	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Bidang Pertanian		7.004.361			7.004.361	7.004.361	7.004.361	7.004.361
1749	Pengelolaan Organisasi dan SDM		8.784.377			8.784.377	8.784.377	8.784.377	8.784.377
1753	Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	6.516.099	18.513.200	200.000		25.229.299	25.474.013	25.749.107	26.082.657
4576	Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	3.342.412.950	305.238.239	8.659.560		3.656.310.749	3.722.794.459	3.797.527.950	3.888.141.002
4577	Pengelolaan Data, Informasi dan Kehumasan	8.754.619	52.050.510	675.000		61.480.129	61.912.215	62.397.928	62.986.852
018.02	**Inspektorat Jenderal**	**23.219.934**	**99.494.558**	**7.000.000**		**129.714.492**	**130.513.849**	**131.412.417**	**132.501.924**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**23.219.934**	**99.494.558**	**7.000.000**		**129.714.492**	**130.513.849**	**131.412.417**	**132.501.924**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**23.219.934**	**99.494.558**	**7.000.000**		**129.714.492**	**130.513.849**	**131.412.417**	**132.501.924**
018.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**23.219.934**	**99.494.558**	**7.000.000**		**129.714.492**	**130.513.849**	**131.412.417**	**132.501.924**
1760	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	23.219.934	20.118.516	7.000.000		50.338.450	51.137.807	52.036.375	53.125.882
4578	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian		79.376.042			79.376.042	79.376.042	79.376.042	79.376.042
018.03	**Ditjen Tanaman Pangan**	**51.013.981**	**2.862.200.710**	**400.000**		**2.913.614.691**	**2.950.413.134**	**3.009.700.367**	**3.081.585.083**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**51.013.981**	**2.862.200.710**	**400.000**		**2.913.614.691**	**2.950.413.134**	**3.009.700.367**	**3.081.585.083**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**51.013.981**	**2.862.200.710**	**400.000**		**2.913.614.691**	**2.950.413.134**	**3.009.700.367**	**3.081.585.083**
018.03.HA	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		**2.800.803.417**			**2.800.803.417**	**2.836.014.742**	**2.893.517.832**	**2.963.239.291**

SK No 154233 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1761	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan		125.300.308			125.300.308	127.716.957	130.433.478	133.727.216
1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan		2.587.082.929			2.587.082.929	2.635.195.152	2.689.277.526	2.754.851.457
4579	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan		37.905.980			37.905.980	38.312.963	38.770.643	39.325.543
4580	Pelindungan Tanaman Pangan		50.514.200			50.514.200	34.789.670	35.036.185	35.335.075
018.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**51.013.981**	**55.397.293**	**400.000**		**106.811.274**	**108.279.367**	**109.929.696**	**111.930.702**
1766	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	51.013.981	55.397.293	400.000		106.811.274	108.279.367	109.929.696	111.930.702
018.03.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**6.000.000**			**6.000.000**	**6.119.025**	**6.252.839**	**6.415.090**
5885	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan		6.000.000			6.000.000	6.119.025	6.252.839	6.415.090
018.04	**Ditjen Hortikultura**	**33.941.094**	**431.524.857**	**3.267.972**		**468.733.923**	**474.272.728**	**480.498.881**	**488.047.988**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**33.941.094**	**431.524.857**	**3.267.972**		**468.733.923**	**474.272.728**	**480.498.881**	**488.047.988**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**33.941.094**	**431.524.857**	**3.267.972**		**468.733.923**	**474.272.728**	**480.498.881**	**488.047.988**
018.04.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**157.347.467**	**267.972**		**157.615.439**	**158.992.973**	**160.541.446**	**162.418.941**
5887	Hilirisasi Hasil Hortikultura		157.347.467	267.972		157.615.439	158.992.973	160.541.446	162.418.941
018.04.HA	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		**235.914.000**			**235.914.000**	**238.934.270**	**242.329.332**	**246.445.781**
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		73.709.000			73.709.000	74.967.861	76.382.935	78.098.684
1773	Pelindungan Hortikultura		14.360.000			14.360.000	14.506.821	14.671.863	14.871.973
4581	Perbenihan Hortikultura		92.445.000			92.445.000	93.983.977	95.713.926	97.811.459
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura		55.400.000			55.400.000	55.475.611	55.560.608	55.663.665
018.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**33.941.094**	**38.263.390**	**3.000.000**		**75.204.484**	**76.345.485**	**77.628.103**	**79.183.266**
1774	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	33.941.094	38.263.390	3.000.000		75.204.484	76.345.485	77.628.103	79.183.266
018.05	**Ditjen Perkebunan**	**71.845.758**	**5.925.818.388**	**508.500**		**5.998.172.646**	**6.022.865.525**	**6.050.622.910**	**6.084.278.182**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	**FUNGSI EKONOMI**	**71.845.758**	**5.925.818.388**	**508.500**		**5.998.172.646**	**6.022.865.525**	**6.050.622.910**	**6.084.278.182**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**71.845.758**	**5.925.818.388**	**508.500**		**5.998.172.646**	**6.022.865.525**	**6.050.622.910**	**6.084.278.182**
018.05.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**5.870.456.269**			**5.870.456.269**	**5.893.194.812**	**5.918.755.235**	**5.949.746.739**
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma		474.798.548			474.798.548	478.388.069	482.423.049	487.315.374
1779	Pelindungan Perkebunan		5.049.514			5.049.514	5.119.639	5.198.582	5.294.269
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan		1.721.379.760			1.721.379.760	1.740.202.206	1.761.360.398	1.787.014.306
5889	Hilirisasi Hasil Perkebunan		4.956.000			4.956.000	4.986.513	5.020.818	5.062.412
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan		3.664.272.447			3.664.272.447	3.664.498.385	3.664.752.388	3.665.060.378
018.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**71.845.758**	**55.362.119**	**508.500**		**127.716.377**	**129.670.713**	**131.867.675**	**134.531.443**
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	71.845.758	55.362.119	508.500		127.716.377	129.670.713	131.867.675	134.531.443
018.06	**Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**177.411.286**	**711.071.766**	**311.386.830**		**1.199.869.882**	**1.214.235.161**	**1.230.383.341**	**1.249.962.754**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**177.411.286**	**711.071.766**	**311.386.830**		**1.199.869.882**	**1.214.235.161**	**1.230.383.341**	**1.249.962.754**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**177.411.286**	**711.071.766**	**311.386.830**		**1.199.869.882**	**1.214.235.161**	**1.230.383.341**	**1.249.962.754**
018.06.HA	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		**303.832.515**	**310.886.830**		**614.719.345**	**618.562.422**	**622.882.384**	**628.120.263**
1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak		6.775.587	7.844.750		14.620.337	14.634.295	14.649.985	14.669.009
1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan		160.742.817	302.871.785		463.614.602	467.443.345	471.747.193	476.965.534
1785	Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak		128.151.956	170.295		128.322.251	128.322.627	128.323.051	128.323.565
1786	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner		8.162.155			8.162.155	8.162.155	8.162.155	8.162.155
018.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**177.411.286**	**382.239.251**	**500.000**		**560.150.537**	**570.664.810**	**582.484.106**	**596.814.822**
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Ditjen Peternakan	177.411.286	382.239.251	500.000		560.150.537	570.664.810	582.484.106	596.814.822
018.06.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**25.000.000**			**25.000.000**	**25.007.929**	**25.016.851**	**25.027.669**

SK No 154231 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5891	Hilirisasi Hasil Peternakan		25.000.000			25.000.000	25.007.929	25.016.851	25.027.669
018.08	**Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian**	**31.772.247**	**4.396.005.102**	**400.000**		**4.428.177.349**	**4.493.313.458**	**4.566.532.426**	**4.655.309.115**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**31.772.247**	**4.396.005.102**	**400.000**		**4.428.177.349**	**4.493.313.458**	**4.566.532.426**	**4.655.309.115**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**31.772.247**	**4.396.005.102**	**400.000**		**4.428.177.349**	**4.493.313.458**	**4.566.532.426**	**4.655.309.115**
018.08.HA	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		**4.357.440.631**			**4.357.440.631**	**4.421.633.430**	**4.493.792.001**	**4.581.282.978**
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian		3.504.860.428			3.504.860.428	3.568.446.843	3.639.923.520	3.726.587.737
3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida		842.120.203			842.120.203	842.699.075	843.350.019	844.139.262
3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian		10.460.000			10.460.000	10.487.512	10.518.462	10.555.979
018.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**31.772.247**	**38.564.471**	**400.000**		**70.736.718**	**71.680.028**	**72.740.425**	**74.026.137**
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	31.772.247	38.564.471	400.000		70.736.718	71.680.028	72.740.425	74.026.137
018.09	**Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian**	**330.477.299**	**1.077.539.113**	**106.029.333**		**1.514.045.745**	**1.518.629.731**	**1.523.783.127**	**1.530.031.485**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**330.477.299**	**1.077.539.113**	**106.029.333**		**1.514.045.745**	**1.518.629.731**	**1.523.783.127**	**1.530.031.485**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**330.477.299**	**1.077.539.113**	**106.029.333**		**1.514.045.745**	**1.518.629.731**	**1.523.783.127**	**1.530.031.485**
018.09.HA	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		**181.018.934**	**7.414.998**		**188.433.932**	**188.433.932**	**188.433.932**	**188.433.932**
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian		181.018.934	7.414.998		188.433.932	188.433.932	188.433.932	188.433.932
018.09.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**330.477.299**	**426.917.730**	**3.540.184**		**760.935.213**	**765.519.199**	**770.672.595**	**776.920.953**
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	330.477.299	426.917.730	3.540.184		760.935.213	765.519.199	770.672.595	776.920.953
018.09.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**469.602.449**	**95.074.151**		**564.676.600**	**564.676.600**	**564.676.600**	**564.676.600**
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian		469.602.449	95.074.151		564.676.600	564.676.600	564.676.600	564.676.600
018.10	**Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**	**2.899.108.819**	**862.637.967**	**296.805.751**		**4.058.552.537**	**4.129.942.447**	**4.210.192.098**	**4.307.493.410**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	**FUNGSI EKONOMI**	**2.899.108.819**	**640.903.744**	**280.309.478**		**3.820.322.041**	**3.887.285.666**	**3.962.559.175**	**4.053.827.026**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**2.899.108.819**	**640.903.744**	**280.309.478**		**3.820.322.041**	**3.887.285.666**	**3.962.559.175**	**4.053.827.026**
018.10.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**229.885.337**	**279.577.506**		**509.462.843**	**516.655.472**	**524.740.799**	**534.544.129**
1810	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian		65.253.537	13.881.306		79.134.843	80.437.553	81.902.061	83.677.754
1812	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian		164.631.800	265.696.200		430.328.000	436.217.919	442.838.738	450.866.375
018.10.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**2.899.108.819**	**411.018.407**	**731.972**		**3.310.859.198**	**3.370.630.194**	**3.437.818.376**	**3.519.282.897**
1813	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian	2.899.108.819	411.018.407	731.972		3.310.859.198	3.370.630.194	3.437.818.376	3.519.282.897
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**221.734.223**	**16.496.273**		**238.230.496**	**242.656.781**	**247.632.923**	**253.666.384**
10.03	**PENDIDIKAN MENENGAH**		**221.734.223**	**16.496.273**		**238.230.496**	**242.656.781**	**247.632.923**	**253.666.384**
018.10.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**221.734.223**	**16.496.273**		**238.230.496**	**242.656.781**	**247.632.923**	**253.666.384**
5892	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian		221.734.223	16.496.273		238.230.496	242.656.781	247.632.923	253.666.384
018.13	**Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian**	**11.689.489**	**15.657.278.102**	**1.800.000**		**15.670.767.591**	**15.736.002.380**	**15.814.459.420**	**15.909.587.118**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**11.689.489**	**15.657.278.102**	**1.800.000**		**15.670.767.591**	**15.736.002.380**	**15.814.459.420**	**15.909.587.118**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**11.689.489**	**15.657.278.102**	**1.800.000**		**15.670.767.591**	**15.736.002.380**	**15.814.459.420**	**15.909.587.118**
018.13.HA	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		**15.617.199.312**	**200.000**		**15.617.399.312**	**15.682.233.620**	**15.760.240.473**	**15.854.822.325**
7922	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian		4.039.447.303	200.000		4.039.647.303	4.071.587.255	4.108.090.797	4.152.350.709
7923	Pelindungan dan Penyediaan Lahan		11.577.752.009			11.577.752.009	11.610.646.365	11.652.149.676	11.702.471.616
018.13.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**11.689.489**	**40.078.790**	**1.600.000**		**53.368.279**	**53.768.760**	**54.218.947**	**54.764.793**
7924	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Ditjen LIP	11.689.489	40.078.790	1.600.000		53.368.279	53.768.760	54.218.947	54.764.793
	JUMLAH RM	**6.988.163.575**	**31.565.637.785**	**332.846.500**		**38.886.647.860**	**39.236.338.842**	**39.652.474.942**	**40.157.032.497**
	JUMLAH PNBP		**62.813.917**	**8.917.480**		**71.731.397**	**72.001.011**	**72.304.115**	**72.671.624**

SK No 154229 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BLU		81.793.016			81.793.016	82.444.115	83.176.006	84.063.413
	JUMLAH PLN		709.458.761	92.497.181		801.955.942	803.300.442	804.811.782	806.644.252
	JUMLAH SBSN			302.871.785		302.871.785	306.615.657	310.824.094	315.926.751
	TOTAL JUMLAH	6.988.163.575	32.419.703.479	737.132.946		40.145.000.000	40.500.700.067	40.923.590.939	41.436.338.537

SK No 154228 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
019	**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**	**1.080.965.033**	**1.328.096.774**	**92.734.876**		**2.501.796.683**	**2.539.217.871**	**2.580.717.603**	**2.630.295.412**
019.01	**Sekretariat Jenderal**	**89.602.656**	**185.896.481**	**14.691.518**		**290.190.655**	**295.227.403**	**300.889.694**	**307.755.096**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**89.602.656**	**185.896.481**	**14.691.518**		**290.190.655**	**295.227.403**	**300.889.694**	**307.755.096**
04.07	**INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	**89.602.656**	**185.896.481**	**14.691.518**		**290.190.655**	**295.227.403**	**300.889.694**	**307.755.096**
019.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**89.602.656**	**148.363.738**	**2.563.938**		**240.530.332**	**244.590.866**	**249.155.700**	**254.690.464**
1824	Pelayanan Legislasi, Advokasi, dan Diseminasi		3.714.774			3.714.774	3.787.514	3.869.344	3.968.554
1825	Pengelolaan Pelayanan Umum dan Protokoleran serta Sarana dan Prasarana Perkantoran		113.217.559	2.085.000		115.302.559	116.939.766	118.780.238	121.011.758
1826	Pengelolaan Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi		3.777.626			3.777.626	3.849.394	3.930.102	4.027.956
1827	Pengelolaan Keuangan dan BMN	68.064.101	4.612.485			72.676.586	74.116.372	75.734.904	77.697.356
1828	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan		4.684.215			4.684.215	4.777.095	4.881.564	5.008.227
1829	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	7.398.800	5.129.488	227.498		12.755.786	12.999.200	13.272.854	13.604.647
1831	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		9.203.981			9.203.981	9.341.640	9.496.387	9.684.022
4905	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	8.414.214	2.047.530	101.440		10.563.184	10.772.499	11.007.810	11.293.122
6561	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Industri Produk Halal	5.725.541	1.976.080	150.000		7.851.621	8.007.386	8.182.497	8.394.822
019.01.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**37.532.743**	**12.127.580**		**49.660.323**	**50.636.537**	**51.733.994**	**53.064.632**
6075	Pengembangan Sistem Informasi Industri		6.103.233	11.996.050		18.099.283	18.451.850	18.848.189	19.328.745
6076	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		17.815.248			17.815.248	18.166.188	18.560.732	19.039.100
6699	Pengembangan Industri Produk Halal		13.614.262	131.530		13.745.792	14.018.499	14.325.073	14.696.787
019.02	**Ditjen Industri Agro**	**31.106.342**	**66.567.293**	**881.000**		**98.554.635**	**100.477.697**	**102.639.914**	**105.261.529**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**31.106.342**	**66.567.293**	**881.000**		**98.554.635**	**100.477.697**	**102.639.914**	**105.261.529**

SK No 154227 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.07	**INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	**31.106.342**	**66.567.293**	**881.000**		**98.554.635**	**100.477.697**	**102.639.914**	**105.261.529**
019.02.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**55.830.000**	**200.000**		**56.030.000**	**57.110.374**	**58.325.243**	**59.798.210**
6044	Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro		8.600.000			8.600.000	8.770.493	8.962.201	9.194.633
6045	Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Agro		7.000.000			7.000.000	7.138.260	7.293.808	7.482.386
6046	Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Agro		25.850.000	200.000		26.050.000	26.563.901	27.141.665	27.842.191
6047	Pengembangan Standar Industri Agro		6.000.000			6.000.000	6.106.401	6.226.078	6.371.185
6049	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro		5.050.000			5.050.000	5.135.294	5.231.199	5.347.477
6050	Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Agro		930.000			930.000	948.431	969.173	994.319
6051	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro		2.400.000			2.400.000	2.447.594	2.501.119	2.566.019
019.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**31.106.342**	**10.737.293**	**681.000**		**42.524.635**	**43.367.323**	**44.314.671**	**45.463.319**
6037	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Agro	31.106.342	10.737.293	681.000		42.524.635	43.367.323	44.314.671	45.463.319
019.03	**Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil**	**38.219.081**	**64.638.508**	**500.000**		**103.357.589**	**105.345.323**	**107.579.919**	**110.289.342**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**38.219.081**	**64.638.508**	**500.000**		**103.357.589**	**105.345.323**	**107.579.919**	**110.289.342**
04.07	**INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	**38.219.081**	**64.638.508**	**500.000**		**103.357.589**	**105.345.323**	**107.579.919**	**110.289.342**
019.03.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**54.987.786**			**54.987.786**	**56.018.527**	**57.177.322**	**58.582.340**
6053	Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		36.250.000			36.250.000	36.969.215	37.777.699	38.757.972
6054	Pengembangan Standar Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		800.000			800.000	815.866	833.708	855.341
6055	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		1.000.000			1.000.000	1.014.061	1.029.881	1.049.067
6056	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		1.400.000			1.400.000	1.427.768	1.458.994	1.496.849
6057	Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		1.600.000			1.600.000	1.631.734	1.667.419	1.710.685
6058	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		2.600.000			2.600.000	2.651.571	2.709.557	2.779.866

SK No 154226 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6059	Perbaikan Rantai Pasok Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		3.550.000			3.550.000	3.620.416	3.699.593	3.795.592
6060	Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		7.787.786			7.787.786	7.887.896	8.000.471	8.136.968
019.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**38.219.081**	**9.650.722**	**500.000**		**48.369.803**	**49.326.796**	**50.402.597**	**51.707.002**
6038	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	38.219.081	9.650.722	500.000		48.369.803	49.326.796	50.402.597	51.707.002
019.04	**Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika**	**35.364.305**	**71.464.001**	**376.000**		**107.204.306**	**109.263.062**	**111.577.601**	**114.383.910**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**35.364.305**	**71.464.001**	**376.000**		**107.204.306**	**109.263.062**	**111.577.601**	**114.383.910**
04.07	**INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	**35.364.305**	**71.464.001**	**376.000**		**107.204.306**	**109.263.062**	**111.577.601**	**114.383.910**
019.04.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**62.573.315**			**62.573.315**	**63.747.852**	**65.068.382**	**66.669.472**
6062	Perbaikan Rantai Pasok Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		42.673.315			42.673.315	43.484.327	44.396.133	45.501.662
6063	Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		4.000.000			4.000.000	4.060.811	4.129.185	4.212.093
6067	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		2.500.000			2.500.000	2.549.597	2.605.354	2.672.958
6068	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		6.500.000			6.500.000	6.628.884	6.773.801	6.949.498
6070	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		4.600.000			4.600.000	4.691.253	4.793.848	4.918.239
6966	Peningkatan Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)		2.300.000			2.300.000	2.332.980	2.370.061	2.415.022
019.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**35.364.305**	**8.890.686**	**376.000**		**44.630.991**	**45.515.210**	**46.509.219**	**47.714.438**
6039	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	35.364.305	8.890.686	376.000		44.630.991	45.515.210	46.509.219	47.714.438
019.05	**Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka**	**46.849.723**	**186.480.615**	**5.650.000**		**238.980.338**	**248.602.635**	**258.850.437**	**270.536.106**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**46.849.723**	**186.480.615**	**5.650.000**		**238.980.338**	**248.602.635**	**258.850.437**	**270.536.106**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.07	**INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	**46.849.723**	**186.480.615**	**5.650.000**		**238.980.338**	**248.602.635**	**258.850.437**	**270.536.106**
019.05.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**169.483.246**	**3.800.000**		**173.283.246**	**181.618.981**	**190.420.408**	**200.352.405**
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		169.483.246	3.800.000		173.283.246	181.618.981	190.420.408	200.352.405
019.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**46.849.723**	**16.997.369**	**1.850.000**		**65.697.092**	**66.983.654**	**68.430.029**	**70.183.701**
6040	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	46.849.723	16.997.369	1.850.000		65.697.092	66.983.654	68.430.029	70.183.701
019.06	**Inspektorat Jenderal**	**23.332.269**	**16.963.893**	**1.709.500**		**42.005.662**	**42.806.493**	**43.706.841**	**44.798.475**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**23.332.269**	**16.963.893**	**1.709.500**		**42.005.662**	**42.806.493**	**43.706.841**	**44.798.475**
04.07	**INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	**23.332.269**	**16.963.893**	**1.709.500**		**42.005.662**	**42.806.493**	**43.706.841**	**44.798.475**
019.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**23.332.269**	**16.963.893**	**1.709.500**		**42.005.662**	**42.806.493**	**43.706.841**	**44.798.475**
1841	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat I		1.450.000			1.450.000	1.473.215	1.499.318	1.530.969
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat II		1.450.000			1.450.000	1.471.940	1.496.615	1.526.534
1843	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat III		1.450.000			1.450.000	1.479.390	1.512.449	1.552.525
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat IV		1.450.000			1.450.000	1.476.012	1.505.275	1.540.754
6036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	23.332.269	9.713.893	1.709.500		34.755.662	35.429.294	36.186.559	37.104.730
7886	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian		1.450.000			1.450.000	1.476.642	1.506.625	1.542.963
019.07	**Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri**	**351.963.913**	**339.301.507**	**54.394.146**		**745.659.566**	**745.659.566**	**745.659.566**	**745.659.566**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**351.963.913**	**339.301.507**	**54.394.146**		**745.659.566**	**745.659.566**	**745.659.566**	**745.659.566**
04.07	**INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	**351.963.913**	**339.301.507**	**54.394.146**		**745.659.566**	**745.659.566**	**745.659.566**	**745.659.566**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
019.07.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**160.833.926**	**44.301.159**		**205.135.085**	**205.135.085**	**205.135.085**	**205.135.085**
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri		130.183.926	44.301.159		174.485.085	174.485.085	174.485.085	174.485.085
6078	Pengembangan Industri Hijau		13.650.000			13.650.000	13.650.000	13.650.000	13.650.000
6079	Pengembangan Standar Industri		17.000.000			17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
019.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**351.963.913**	**178.467.581**	**10.092.987**		**540.524.481**	**540.524.481**	**540.524.481**	**540.524.481**
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	351.963.913	178.467.581	10.092.987		540.524.481	540.524.481	540.524.481	540.524.481
019.09	**Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional**	**32.804.643**	**147.249.160**	**1.037.645**		**181.091.448**	**184.639.064**	**188.627.118**	**193.462.559**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**32.804.643**	**147.249.160**	**1.037.645**		**181.091.448**	**184.639.064**	**188.627.118**	**193.462.559**
04.07	**INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	**32.804.643**	**147.249.160**	**1.037.645**		**181.091.448**	**184.639.064**	**188.627.118**	**193.462.559**
019.09.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**127.789.160**			**127.789.160**	**130.293.377**	**133.108.452**	**136.521.678**
6072	Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal		9.500.000			9.500.000	9.687.042	9.897.331	10.152.316
6073	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri		112.889.160			112.889.160	115.107.936	117.602.095	120.626.203
6074	Pengembangan Perwilayahan Industri		5.400.000			5.400.000	5.498.399	5.609.026	5.743.159
019.09.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**32.804.643**	**19.460.000**	**1.037.645**		**53.302.288**	**54.345.687**	**55.518.666**	**56.940.881**
6041	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	32.804.643	19.460.000	1.037.645		53.302.288	54.345.687	55.518.666	56.940.881
019.10	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri**	**431.722.101**	**249.535.316**	**13.495.067**		**694.752.484**	**707.196.628**	**721.186.513**	**738.148.829**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**431.722.101**	**249.535.316**	**13.495.067**		**694.752.484**	**707.196.628**	**721.186.513**	**738.148.829**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**		**61.507.085**	**11.367.467**		**72.874.552**	**74.200.650**	**75.691.655**	**77.499.461**
019.10.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**61.507.085**	**11.367.467**		**72.874.552**	**74.200.650**	**75.691.655**	**77.499.461**
4958	Pendidikan Tinggi Vokasi Industri		61.507.085	11.367.467		72.874.552	74.200.650	75.691.655	77.499.461

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.90	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA**	**431.722.101**	**135.411.569**	**1.470.000**		**568.603.670**	**578.998.409**	**590.708.054**	**604.905.704**
019.10.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**431.722.101**	**135.411.569**	**1.470.000**		**568.603.670**	**578.998.409**	**590.708.054**	**604.905.704**
6043	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	431.722.101	135.411.569	1.470.000		568.603.670	578.998.409	590.708.054	604.905.704
10.03	**PENDIDIKAN MENENGAH**		**27.935.430**	**572.600**		**28.508.030**	**28.997.347**	**29.547.645**	**30.214.827**
019.10.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**27.935.430**	**572.600**		**28.508.030**	**28.997.347**	**29.547.645**	**30.214.827**
4959	Pendidikan Menengah Kejuruan Industri		27.935.430	572.600		28.508.030	28.997.347	29.547.645	30.214.827
10.04	**PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL**		**15.945.000**			**15.945.000**	**16.070.735**	**16.212.217**	**16.383.748**
019.10.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**15.945.000**			**15.945.000**	**16.070.735**	**16.212.217**	**16.383.748**
4957	Pelatihan Vokasi Industri		15.945.000			15.945.000	16.070.735	16.212.217	16.383.748
10.05	**PENDIDIKAN KEDINASAN**		**8.736.232**	**85.000**		**8.821.232**	**8.929.487**	**9.026.942**	**9.145.089**
019.10.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**8.736.232**	**85.000**		**8.821.232**	**8.929.487**	**9.026.942**	**9.145.089**
6893	Peningkatan Kompetensi ASN		8.736.232	85.000		8.821.232	8.929.487	9.026.942	9.145.089
	JUMLAH RM	**1.080.965.033**	**978.748.347**	**29.799.632**		**2.089.513.012**	**2.124.954.458**	**2.164.228.361**	**2.211.107.437**
	JUMLAH PNBP		**65.981.494**	**3.895.393**		**69.876.887**	**70.434.952**	**71.062.494**	**71.823.348**
	JUMLAH BLU		**283.366.933**	**59.039.851**		**342.406.784**	**343.828.461**	**345.426.748**	**347.364.627**
	TOTAL JUMLAH	**1.080.965.033**	**1.328.096.774**	**92.734.876**		**2.501.796.683**	**2.539.217.871**	**2.580.717.603**	**2.630.295.412**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020	**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**2.404.410.149**	**3.327.996.595**	**4.385.590.747**		**10.117.997.491**	**10.260.672.538**	**10.421.055.959**	**10.615.517.708**
020.01	**Sekretariat Jenderal**	**274.676.710**	**287.400.995**	**3.124.622**		**565.202.327**	**576.293.357**	**588.761.098**	**603.878.013**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**274.676.710**	**287.400.995**	**3.124.622**		**565.202.327**	**576.293.357**	**588.761.098**	**603.878.013**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**274.676.710**	**287.400.995**	**3.124.622**		**565.202.327**	**576.293.357**	**588.761.098**	**603.878.013**
020.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**274.676.710**	**287.400.995**	**3.124.622**		**565.202.327**	**576.293.357**	**588.761.098**	**603.878.013**
6359	Pengelolaan SDM, Organisasi dan Tata Laksana	274.676.710	4.184.913			278.861.623	284.394.404	290.613.858	298.154.829
6360	Perencanaan dan Penganggaran serta Pengelolaan Keuangan		5.720.500			5.720.500	5.819.916	5.931.761	6.067.368
6361	Pelayanan Umum dan Pengelolaan BMN		140.859.995	3.000.000		143.859.995	146.619.962	149.722.531	153.484.352
6362	Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Kerjasama, Legislasi dan Litigasi		136.635.587	124.622		136.760.209	139.459.075	142.492.948	146.171.464
020.02	**Inspektorat Jenderal**	**99.053.527**	**36.909.781**	**2.758.000**		**138.721.308**	**141.463.556**	**144.546.217**	**148.283.888**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**99.053.527**	**36.909.781**	**2.758.000**		**138.721.308**	**141.463.556**	**144.546.217**	**148.283.888**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**99.053.527**	**36.909.781**	**2.758.000**		**138.721.308**	**141.463.556**	**144.546.217**	**148.283.888**
020.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**99.053.527**	**36.909.781**	**2.758.000**		**138.721.308**	**141.463.556**	**144.546.217**	**148.283.888**
6363	Pengelolaan Risiko, Pengawasan dan Pengendalian Internal Kementerian ESDM		15.250.000			15.250.000	15.552.534	15.892.656	16.305.047
6364	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Internal KESDM	99.053.527	21.659.781	2.758.000		123.471.308	125.911.022	128.653.561	131.978.841
020.04	**Ditjen Minyak dan Gas Bumi**	**255.264.846**	**520.771.840**	**3.246.942.702**		**4.022.979.388**	**4.080.412.961**	**4.144.973.654**	**4.223.252.341**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**255.264.846**	**520.771.840**	**3.246.942.702**		**4.022.979.388**	**4.080.412.961**	**4.144.973.654**	**4.223.252.341**
04.05	**BAHAN BAKAR DAN ENERGI**	**255.264.846**	**520.771.840**	**3.246.942.702**		**4.022.979.388**	**4.080.412.961**	**4.144.973.654**	**4.223.252.341**
020.04.JA	**Program Energi dan Ketenagalistrikan**		**424.173.333**	**3.246.073.651**		**3.670.246.984**	**3.725.208.886**	**3.786.991.054**	**3.861.900.829**
6348	Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi		233.621.255	12.196.066		245.817.321	250.681.362	256.149.163	262.778.744
6349	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi		190.552.078	3.233.877.585		3.424.429.663	3.474.527.524	3.530.841.891	3.599.122.085

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**255.264.846**	**96.598.507**	**869.051**		**352.732.404**	**355.204.075**	**357.982.600**	**361.351.512**
1896	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	255.264.846	96.598.507	869.051		352.732.404	355.204.075	357.982.600	361.351.512
020.05	**Ditjen Ketenagalistrikan**	**153.970.054**	**610.924.993**	**966.848.707**		**1.731.743.754**	**1.746.237.699**	**1.762.530.354**	**1.782.284.851**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**153.970.054**	**610.924.993**	**966.848.707**		**1.731.743.754**	**1.746.237.699**	**1.762.530.354**	**1.782.284.851**
04.05	**BAHAN BAKAR DAN ENERGI**	**153.970.054**	**610.924.993**	**966.848.707**		**1.731.743.754**	**1.746.237.699**	**1.762.530.354**	**1.782.284.851**
020.05.JA	**Program Energi dan Ketenagalistrikan**		**568.341.293**	**964.898.707**		**1.533.240.000**	**1.543.801.418**	**1.555.673.501**	**1.570.068.130**
6350	Pengelolaan Ketenagalistrikan		568.341.293	964.898.707		1.533.240.000	1.543.801.418	1.555.673.501	1.570.068.130
020.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**153.970.054**	**42.583.700**	**1.950.000**		**198.503.754**	**202.436.281**	**206.856.853**	**212.216.721**
1901	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan	153.970.054	42.583.700	1.950.000		198.503.754	202.436.281	206.856.853	212.216.721
020.06	**Ditjen Mineral dan Batubara**	**511.660.242**	**155.630.109**	**12.468.310**		**679.758.661**	**693.182.835**	**708.272.934**	**726.569.405**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**511.660.242**	**155.630.109**	**12.468.310**		**679.758.661**	**693.182.835**	**708.272.934**	**726.569.405**
04.06	**PERTAMBANGAN**		**42.341.218**	**10.908.761**		**53.249.979**	**54.300.252**	**55.480.922**	**56.912.451**
020.06.JB	**Program Pertambangan Mineral dan Batubara**		**42.341.218**	**10.908.761**		**53.249.979**	**54.300.252**	**55.480.922**	**56.912.451**
6355	Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		16.581.156	168.823		16.749.979	17.079.957	17.450.920	17.900.700
6356	Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		25.760.062	10.739.938		36.500.000	37.220.295	38.030.002	39.011.751
04.05	**BAHAN BAKAR DAN ENERGI**	**511.660.242**	**113.288.891**	**1.559.549**		**626.508.682**	**638.882.583**	**652.792.012**	**669.656.954**
020.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**511.660.242**	**113.288.891**	**1.559.549**		**626.508.682**	**638.882.583**	**652.792.012**	**669.656.954**
1906	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	511.660.242	113.288.891	1.559.549		626.508.682	638.882.583	652.792.012	669.656.954
020.07	**Dewan Energi Nasional**	**52.329.020**	**24.095.387**	**1.178.746**		**77.603.153**	**79.020.721**	**80.614.299**	**82.546.476**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**52.329.020**	**24.095.387**	**1.178.746**		**77.603.153**	**79.020.721**	**80.614.299**	**82.546.476**
04.05	**BAHAN BAKAR DAN ENERGI**	**52.329.020**	**24.095.387**	**1.178.746**		**77.603.153**	**79.020.721**	**80.614.299**	**82.546.476**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020.07.JA	**Program Energi dan Ketenagalistrikan**		**4.726.033**			**4.726.033**	**4.726.033**	**4.726.033**	**4.726.033**
8012	Dukungan Rekomendasi Peningkatan Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional		4.726.033			4.726.033	4.726.033	4.726.033	4.726.033
020.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**52.329.020**	**19.369.354**	**1.178.746**		**72.877.120**	**74.294.688**	**75.888.266**	**77.820.443**
1909	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Dewan Energi Nasional	52.329.020	19.369.354	1.178.746		72.877.120	74.294.688	75.888.266	77.820.443
020.08	**Ditjen Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral**		**66.945.700**	**3.054.300**		**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**
04	**FUNGSI EKONOMI**		**66.945.700**	**3.054.300**		**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**
04.05	**BAHAN BAKAR DAN ENERGI**		**66.945.700**	**3.054.300**		**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**
020.08.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**37.229.768**			**37.229.768**	**37.229.768**	**37.229.768**	**37.229.768**
8025	Pengelolaan Pengawasan, Pencegahan dan Penegakan Hukum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		37.229.768			37.229.768	37.229.768	37.229.768	37.229.768
020.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**29.715.932**	**3.054.300**		**32.770.232**	**32.770.232**	**32.770.232**	**32.770.232**
8024	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penegakan Hukum ESDM		29.715.932	3.054.300		32.770.232	32.770.232	32.770.232	32.770.232
020.12	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM**	**241.183.618**	**468.207.452**	**20.040.000**		**729.431.070**	**743.655.928**	**759.647.182**	**779.036.185**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**180.518.187**	**370.256.684**	**13.500.000**		**564.274.871**	**575.226.544**	**587.538.178**	**602.465.715**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**		**286.256.896**	**13.500.000**		**299.756.896**	**305.460.904**	**311.873.163**	**319.647.859**
020.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**244.156.907**	**13.500.000**		**257.656.907**	**262.759.069**	**268.494.731**	**275.449.049**
6345	Pelatihan Vokasi Sektor ESDM		244.156.907	13.500.000		257.656.907	262.759.069	268.494.731	275.449.049
020.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**42.099.989**			**42.099.989**	**42.701.835**	**43.378.432**	**44.198.810**
6398	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara		42.099.989			42.099.989	42.701.835	43.378.432	44.198.810
04.05	**BAHAN BAKAR DAN ENERGI**	**180.518.187**	**83.999.788**			**264.517.975**	**269.765.640**	**275.665.015**	**282.817.856**
020.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**180.518.187**	**83.999.788**			**264.517.975**	**269.765.640**	**275.665.015**	**282.817.856**

SK No 154268 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1915	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	180.518.187	83.999.788			264.517.975	269.765.640	275.665.015	282.817.856
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**60.665.431**	**97.950.768**	**6.540.000**		**165.156.199**	**168.429.384**	**172.109.004**	**176.570.470**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**60.665.431**	**97.950.768**	**6.540.000**		**165.156.199**	**168.429.384**	**172.109.004**	**176.570.470**
020.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**76.398.320**	**6.540.000**		**82.938.320**	**84.580.295**	**86.426.211**	**88.664.341**
6344	Pendidikan Vokasi Sektor ESDM		76.398.320	6.540.000		82.938.320	84.580.295	86.426.211	88.664.341
020.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**60.665.431**	**21.552.448**			**82.217.879**	**83.849.089**	**85.682.793**	**87.906.129**
6452	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Pendidikan Vokasi dan Sektor ESDM	60.665.431	21.552.448			82.217.879	83.849.089	85.682.793	87.906.129
020.13	**Badan Geologi**	**465.474.730**	**218.570.848**	**112.247.486**		**796.293.064**	**809.623.459**	**824.608.758**	**842.778.075**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**465.474.730**	**218.570.848**	**112.247.486**		**796.293.064**	**809.623.459**	**824.608.758**	**842.778.075**
04.06	**PERTAMBANGAN**	**465.474.730**	**218.570.848**	**112.247.486**		**796.293.064**	**809.623.459**	**824.608.758**	**842.778.075**
020.13.FE	**Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi**		**102.947.720**	**105.744.705**		**208.692.425**	**210.731.059**	**213.023.088**	**215.802.062**
6346	Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi		38.974.536	1.849.442		40.823.978	41.564.151	42.396.363	43.405.348
6347	Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi		63.973.184	103.895.263		167.868.447	169.166.908	170.626.725	172.396.714
020.13.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**465.474.730**	**115.623.128**	**6.502.781**		**587.600.639**	**598.892.400**	**611.585.670**	**626.976.013**
1928	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Geologi	465.474.730	115.623.128	6.502.781		587.600.639	598.892.400	611.585.670	626.976.013
020.14	**BPH Migas**	**108.445.835**	**205.883.906**	**9.070.000**		**323.399.741**	**329.713.835**	**336.811.703**	**345.417.728**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**108.445.835**	**205.883.906**	**9.070.000**		**323.399.741**	**329.713.835**	**336.811.703**	**345.417.728**
04.05	**BAHAN BAKAR DAN ENERGI**	**108.445.835**	**205.883.906**	**9.070.000**		**323.399.741**	**329.713.835**	**336.811.703**	**345.417.728**
020.14.JA	**Program Energi dan Ketenagalistrikan**		**88.302.866**			**88.302.866**	**90.045.672**	**92.004.861**	**94.380.321**
6351	Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa		88.302.866			88.302.866	90.045.672	92.004.861	94.380.321

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020.14.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**108.445.835**	**117.581.040**	**9.070.000**		**235.096.875**	**239.668.163**	**244.806.842**	**251.037.407**
6366	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas	108.445.835	117.581.040	9.070.000		235.096.875	239.668.163	244.806.842	251.037.407
020.15	**Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi**	**176.606.148**	**696.010.497**	**7.857.874**		**880.474.519**	**886.690.875**	**893.679.048**	**902.152.069**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**176.606.148**	**696.010.497**	**7.857.874**		**880.474.519**	**886.690.875**	**893.679.048**	**902.152.069**
04.05	**BAHAN BAKAR DAN ENERGI**	**176.606.148**	**696.010.497**	**7.857.874**		**880.474.519**	**886.690.875**	**893.679.048**	**902.152.069**
020.15.JA	**Program Energi dan Ketenagalistrikan**		**641.731.821**	**27.972**		**641.759.793**	**643.255.047**	**644.936.108**	**646.974.368**
6352	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi		51.414.014	27.972		51.441.986	52.461.895	53.608.617	54.998.999
6353	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi		590.317.807			590.317.807	590.793.152	591.327.491	591.975.369
020.15.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**176.606.148**	**54.278.676**	**7.829.902**		**238.714.726**	**243.435.828**	**248.742.940**	**255.177.701**
4036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang EBTKE	176.606.148	54.278.676	7.829.902		238.714.726	243.435.828	248.742.940	255.177.701
020.16	**Badan Pengelola Migas Aceh**	**65.745.419**	**36.645.087**			**102.390.506**	**104.377.312**	**106.610.712**	**109.318.677**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**65.745.419**	**36.645.087**			**102.390.506**	**104.377.312**	**106.610.712**	**109.318.677**
04.05	**BAHAN BAKAR DAN ENERGI**	**65.745.419**	**36.645.087**			**102.390.506**	**104.377.312**	**106.610.712**	**109.318.677**
020.16.JA	**Program Energi dan Ketenagalistrikan**		**15.757.033**			**15.757.033**	**16.069.637**	**16.421.064**	**16.847.173**
6354	Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Aceh		15.757.033			15.757.033	16.069.637	16.421.064	16.847.173
020.16.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**65.745.419**	**20.888.054**			**86.633.473**	**88.307.675**	**90.189.648**	**92.471.504**
6365	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hulu Migas Aceh	65.745.419	20.888.054			86.633.473	88.307.675	90.189.648	92.471.504
	JUMLAH RM	**2.295.964.314**	**2.526.866.136**	**2.860.074.857**		**7.682.905.307**	**7.760.153.013**	**7.846.989.901**	**7.952.277.776**
	JUMLAH PNBP	**108.445.835**	**231.807.476**	**1.482.965.952**		**1.823.219.263**	**1.876.510.502**	**1.936.414.785**	**2.009.047.676**
	JUMLAH BLU		**569.322.983**	**42.549.938**		**611.872.921**	**624.009.023**	**637.651.273**	**654.192.256**
	TOTAL JUMLAH	**2.404.410.149**	**3.327.996.595**	**4.385.590.747**		**10.117.997.491**	**10.260.672.538**	**10.421.055.959**	**10.615.517.708**

SK No 154266 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**	**4.840.012.416**	**17.062.955.139**	**6.586.437.157**		**28.489.404.712**	**30.069.699.018**	**30.705.894.662**	**31.447.169.584**
022.01	**Sekretariat Jenderal**	**166.989.262**	**357.925.985**	**50.712.373**		**575.627.620**	**586.841.636**	**599.448.115**	**614.733.285**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**166.989.262**	**357.925.985**	**50.712.373**		**575.627.620**	**586.841.636**	**599.448.115**	**614.733.285**
04.08	**TRANSPORTASI**	**166.989.262**	**357.925.985**	**50.712.373**		**575.627.620**	**586.841.636**	**599.448.115**	**614.733.285**
022.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**166.989.262**	**357.925.985**	**50.712.373**		**575.627.620**	**586.841.636**	**599.448.115**	**614.733.285**
1932	Legislasi dan Litigasi		7.303.658			7.303.658	7.442.493	7.598.590	7.787.851
1933	Pengelolaan Organisasi dan SDM		32.372.447			32.372.447	33.002.227	33.710.369	34.568.967
1937	Pelayanan Pemeriksaan Kecelakaan Moda Transportasi		12.065.853			12.065.853	12.299.761	12.562.724	12.881.566
1938	Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran		1.740.000			1.740.000	1.774.521	1.813.324	1.860.378
1939	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi		982.480	16.516.716		17.499.196	17.837.569	18.217.932	18.679.116
1940	Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan		3.060.000			3.060.000	3.118.563	3.184.423	3.264.273
1941	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		31.672.933			31.672.933	32.134.832	32.654.105	33.283.704
4657	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	166.989.262	249.225.591	34.195.657		450.410.510	459.341.311	469.380.830	481.553.619
5877	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama		19.503.023			19.503.023	19.890.359	20.325.818	20.853.811
022.02	**Inspektorat Jenderal**	**51.413.965**	**43.140.298**	**2.632.224**		**97.186.487**	**98.861.276**	**100.743.963**	**103.026.668**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**51.413.965**	**43.140.298**	**2.632.224**		**97.186.487**	**98.861.276**	**100.743.963**	**103.026.668**
04.08	**TRANSPORTASI**	**51.413.965**	**43.140.298**	**2.632.224**		**97.186.487**	**98.861.276**	**100.743.963**	**103.026.668**
022.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**51.413.965**	**43.140.298**	**2.632.224**		**97.186.487**	**98.861.276**	**100.743.963**	**103.026.668**
4636	Pelaksanaan Pengawasan Internal		21.950.000			21.950.000	22.346.787	22.792.850	23.333.690
4663	Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan		4.450.000			4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
4664	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pengawasan	51.413.965	13.490.298	2.632.224		67.536.487	68.806.660	70.234.471	71.965.657

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4665	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan		1.150.000			1.150.000	1.153.964	1.158.426	1.163.834
4669	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pengawasan		194.984			194.984	198.849	203.200	208.471
4818	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawasan		1.250.000			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4820	Legislasi dan Litigasi Pengawasan		655.016			655.016	655.016	655.016	655.016
022.03	**Ditjen Perhubungan Darat**	**820.920.036**	**3.404.560.799**	**658.492.302**		**4.883.973.137**	**4.961.120.803**	**5.047.843.931**	**5.152.994.134**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**820.920.036**	**3.404.560.799**	**658.492.302**		**4.883.973.137**	**4.961.120.803**	**5.047.843.931**	**5.152.994.134**
04.08	**TRANSPORTASI**	**820.920.036**	**3.404.560.799**	**658.492.302**		**4.883.973.137**	**4.961.120.803**	**5.047.843.931**	**5.152.994.134**
022.03.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**		**3.175.692.854**	**658.492.302**		**3.834.185.156**	**3.892.156.267**	**3.957.322.684**	**4.036.335.770**
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat		892.210.935	66.789.549		959.000.484	952.855.971	964.235.018	978.031.919
4638	Pelayanan Transportasi Darat		1.258.370.646	121.860.821		1.380.231.467	1.356.391.953	1.384.526.118	1.418.638.322
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat		568.059.016	309.225.182		877.284.198	879.528.433	892.033.475	907.195.587
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat		457.052.257	160.616.750		617.669.007	703.379.910	716.528.073	732.469.942
022.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**820.920.036**	**228.867.945**			**1.049.787.981**	**1.068.964.536**	**1.090.521.247**	**1.116.658.364**
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat		228.867.945			228.867.945	231.756.955	235.004.648	238.942.461
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	820.920.036				820.920.036	837.207.581	855.516.599	877.715.903
022.04	**Ditjen Perhubungan Laut**	**1.913.328.793**	**3.978.924.548**	**3.780.689.629**		**9.672.942.970**	**9.800.080.591**	**9.943.002.788**	**10.116.292.921**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**1.913.328.793**	**3.978.924.548**	**3.780.689.629**		**9.672.942.970**	**9.800.080.591**	**9.943.002.788**	**10.116.292.921**
04.08	**TRANSPORTASI**	**1.913.328.793**	**3.978.924.548**	**3.780.689.629**		**9.672.942.970**	**9.800.080.591**	**9.943.002.788**	**10.116.292.921**
022.04.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**		**2.665.276.820**	**3.780.689.629**		**6.445.966.449**	**6.516.216.521**	**6.595.185.297**	**6.690.933.304**
4658	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut		537.949.379	664.666.631		1.202.616.010	1.298.259.738	1.315.356.265	1.336.085.441
4659	Pelayanan Transportasi Laut		1.900.000.000			1.900.000.000	1.736.673.122	1.750.562.933	1.767.404.089

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4660	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut		6.437.172	2.873.753.625		2.880.190.797	3.014.739.620	3.058.706.590	3.112.015.783
4661	Penunjang Teknis Transportasi Laut		220.890.269	242.269.373		463.159.642	466.544.041	470.559.509	475.427.991
022.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.913.328.793**	**1.313.647.728**			**3.226.976.521**	**3.283.864.070**	**3.347.817.491**	**3.425.359.617**
4631	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut		32.140.669			32.140.669	32.719.234	33.369.663	34.158.300
4632	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut	1.913.328.793	1.245.709.883			3.159.038.676	3.214.504.662	3.277.105.054	3.353.006.659
4633	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut		15.893.315			15.893.315	16.425.242	16.778.144	17.206.027
4634	Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut		19.903.861			19.903.861	20.214.932	20.564.630	20.988.631
022.05	**Ditjen Perhubungan Udara**	**1.186.034.714**	**3.006.955.807**	**609.226.108**		**4.802.216.629**	**6.018.375.083**	**6.244.105.682**	**6.487.700.276**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**1.186.034.714**	**3.006.955.807**	**609.226.108**		**4.802.216.629**	**6.018.375.083**	**6.244.105.682**	**6.487.700.276**
04.08	**TRANSPORTASI**	**1.186.034.714**	**3.006.955.807**	**609.226.108**		**4.802.216.629**	**6.018.375.083**	**6.244.105.682**	**6.487.700.276**
022.05.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**		**1.385.417.023**	**603.994.940**		**1.989.411.963**	**2.227.392.262**	**2.270.154.692**	**2.322.003.409**
1960	Pelayanan Transportasi Udara		710.086.715	517.623		710.604.338	928.578.072	948.850.345	973.430.125
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara		40.032.247	506.940.123		546.972.370	550.263.289	559.405.996	570.491.412
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara		232.961.648	91.848.048		324.809.696	334.783.856	341.234.906	349.056.691
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara		402.336.413	4.689.146		407.025.559	413.767.045	420.663.445	429.025.181
022.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.186.034.714**	**1.621.538.784**	**5.231.168**		**2.812.804.666**	**3.790.982.821**	**3.973.950.990**	**4.165.696.867**
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	1.186.034.714	1.468.987.999	5.231.168		2.660.253.881	3.636.431.225	3.816.200.650	4.004.068.109
4612	Legislasi Dan Litigasi Transportasi Udara		7.147.455			7.147.455	7.289.235	7.448.643	7.641.916
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara		104.350.367			104.350.367	105.417.378	107.565.445	110.169.940
4614	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara		41.052.963			41.052.963	41.844.983	42.736.252	43.816.902
022.08	**Ditjen Perkeretaapian**	**206.957.690**	**3.859.648.501**	**1.415.352.087**		**5.481.958.278**	**5.583.411.987**	**5.698.580.514**	**5.838.220.336**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	**FUNGSI EKONOMI**	**206.957.690**	**3.859.648.501**	**1.415.352.087**		**5.481.958.278**	**5.583.411.987**	**5.698.580.514**	**5.838.220.336**
04.08	**TRANSPORTASI**	**206.957.690**	**3.859.648.501**	**1.415.352.087**		**5.481.958.278**	**5.583.411.987**	**5.698.580.514**	**5.838.220.336**
022.08.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**		**3.205.751.763**	**1.294.281.697**		**4.500.033.460**	**4.582.950.826**	**4.677.281.296**	**4.791.655.340**
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian		408.561.813	991.600.806		1.400.162.619	1.421.417.887	1.452.170.637	1.489.457.807
4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian		2.420.617.056	210.438.151		2.631.055.207	2.642.405.550	2.695.232.447	2.759.284.136
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian		344.074.521	91.054.665		435.129.186	479.645.069	489.616.704	501.707.137
4644	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian		32.498.373	1.188.075		33.686.448	39.482.320	40.261.508	41.206.260
022.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**206.957.690**	**653.896.738**	**121.070.390**		**981.924.818**	**1.000.461.161**	**1.021.299.218**	**1.046.564.996**
4600	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian		35.382.385	10.930.000		46.312.385	47.533.033	48.570.311	49.828.019
4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	206.957.690	569.203.218	105.408.490		881.569.398	898.185.618	916.865.076	939.513.560
4602	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian		24.122.013	4.731.900		28.853.913	29.062.075	29.631.065	30.320.962
4603	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian		18.488.936			18.488.936	18.847.323	19.250.217	19.738.720
4604	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian		6.700.186			6.700.186	6.833.112	6.982.549	7.163.735
022.09	**Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda**	**44.525.172**	**120.409.667**	**9.630.045**		**174.564.884**	**174.564.884**	**174.564.884**	**174.564.884**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**44.525.172**	**120.409.667**	**9.630.045**		**174.564.884**	**174.564.884**	**174.564.884**	**174.564.884**
04.08	**TRANSPORTASI**	**44.525.172**	**120.409.667**	**9.630.045**		**174.564.884**	**174.564.884**	**174.564.884**	**174.564.884**
022.09.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**		**85.244.910**	**7.870.045**		**93.114.955**	**93.114.955**	**93.114.955**	**93.114.955**
8044	Pelayanan Integrasi Transportasi dan Multimoda		1.300.000	4.974.000		6.274.000	6.274.000	6.274.000	6.274.000
8045	Penunjang Teknis Integrasi Transportasi dan Multimoda		83.944.910	2.896.045		86.840.955	86.840.955	86.840.955	86.840.955
022.09.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**44.525.172**	**35.164.757**	**1.760.000**		**81.449.929**	**81.449.929**	**81.449.929**	**81.449.929**
8046	Pengelolaan Organisasi dan SDM Integrasi Transportasi dan Multimoda		7.406.649			7.406.649	7.406.649	7.406.649	7.406.649

SK No 154262 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8047	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Integrasi Transportasi dan Multimoda	44.525.172	24.758.108	1.760.000		71.043.280	71.043.280	71.043.280	71.043.280
8048	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Integrasi Transportasi dan Multimoda		2.020.000			2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
8049	Legislasi dan Litigasi Integrasi Transportasi dan Multimoda		980.000			980.000	980.000	980.000	980.000
022.11	**Badan Kebijakan Transportasi**	**47.678.438**	**72.821.950**	**1.498.370**		**121.998.758**	**124.139.160**	**126.545.545**	**129.463.271**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**47.678.438**	**72.821.950**	**1.498.370**		**121.998.758**	**124.139.160**	**126.545.545**	**129.463.271**
04.08	**TRANSPORTASI**	**47.678.438**	**72.821.950**	**1.498.370**		**121.998.758**	**124.139.160**	**126.545.545**	**129.463.271**
022.11.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**		**13.800.674**			**13.800.674**	**14.021.377**	**14.269.551**	**14.570.475**
6891	Formulasi Kebijakan Transportasi		13.800.674			13.800.674	14.021.377	14.269.551	14.570.475
022.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**47.678.438**	**59.021.276**	**1.498.370**		**108.198.084**	**110.117.783**	**112.275.994**	**114.892.796**
4652	Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan		5.960.275			5.960.275	6.080.335	6.215.352	6.379.046
4653	Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan	47.678.438	33.024.424	1.498.370		82.201.232	86.495.718	88.187.521	90.238.811
4655	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perumus Kebijakan		16.794.643			16.794.643	14.235.499	14.494.586	14.808.733
6892	Legislasi dan Litigasi Kebijakan		3.241.934			3.241.934	3.306.231	3.378.535	3.466.206
022.12	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan**	**402.164.346**	**2.218.567.584**	**58.204.019**		**2.678.935.949**	**2.722.303.598**	**2.771.059.240**	**2.830.173.809**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**1.826.722.605**	**50.694.974**		**1.877.417.579**	**1.905.594.662**	**1.937.273.164**	**1.975.682.418**
10.05	**PENDIDIKAN KEDINASAN**		**173.980.656**	**1.218.408**		**175.199.064**	**178.548.188**	**182.314.055**	**186.879.999**
022.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**132.107.593**	**623.408**		**132.731.001**	**135.248.552**	**138.079.500**	**141.511.856**
1975	Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi		132.107.593	623.408		132.731.001	135.248.552	138.079.500	141.511.856
022.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**41.873.063**	**595.000**		**42.468.063**	**43.299.636**	**44.234.555**	**45.368.143**
1979	Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan		41.873.063	595.000		42.468.063	43.299.636	44.234.555	45.368.143
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**		**1.652.741.949**	**49.476.566**		**1.702.218.515**	**1.727.046.474**	**1.754.959.109**	**1.788.802.419**

SK No 154261 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**1.652.741.949**	**49.476.566**		**1.702.218.515**	**1.727.046.474**	**1.754.959.109**	**1.788.802.419**
3996	Pendidikan Transportasi		1.652.741.949	49.476.566		1.702.218.515	1.727.046.474	1.754.959.109	1.788.802.419
04	**FUNGSI EKONOMI**	**402.164.346**	**391.844.979**	**7.509.045**		**801.518.370**	**816.708.936**	**833.786.076**	**854.491.391**
04.08	**TRANSPORTASI**	**402.164.346**	**391.844.979**	**7.509.045**		**801.518.370**	**816.708.936**	**833.786.076**	**854.491.391**
022.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**402.164.346**	**391.844.979**	**7.509.045**		**801.518.370**	**816.708.936**	**833.786.076**	**854.491.391**
4626	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi		28.159.452			28.159.452	28.680.617	29.266.782	29.977.381
4627	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum SDM Transportasi	402.164.346	362.786.128	7.509.045		772.459.519	787.111.081	803.581.996	823.552.393
4628	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik SDM Transportasi		160.919			160.919	164.109	167.699	172.049
4629	Legislasi dan Litigasi SDM Transportasi		481.180			481.180	491.519	503.142	517.236
4630	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama SDM Transportasi		257.300			257.300	261.610	266.457	272.332
	JUMLAH RM	**4.840.012.416**	**12.294.642.520**	**2.568.651.770**		**19.703.306.706**	**21.155.668.000**	**21.648.049.634**	**22.214.952.898**
	JUMLAH PNBP		**1.570.827.409**	**2.228.277.953**		**3.799.105.362**	**3.841.950.655**	**3.890.115.774**	**3.948.514.976**
	JUMLAH BLU		**2.132.883.003**	**92.591.137**		**2.225.474.140**	**2.256.973.303**	**2.292.384.022**	**2.335.318.740**
	JUMLAH PLN		**1.064.602.207**	**1.696.916.297**		**2.761.518.504**	**2.815.107.060**	**2.875.345.232**	**2.948.382.970**
	TOTAL JUMLAH	**4.840.012.416**	**17.062.955.139**	**6.586.437.157**		**28.489.404.712**	**30.069.699.018**	**30.705.894.662**	**31.447.169.584**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024	**KEMENTERIAN KESEHATAN**	**7.356.989.883**	**44.435.448.744**	**5.743.561.373**	**56.464.000.000**	**114.000.000.000**	**116.208.685.674**	**118.691.521.461**	**121.701.916.599**
024.01	**Sekretariat Jenderal**	**1.783.521.633**	**3.292.722.604**	**64.290.509**	**56.464.000.000**	**61.604.534.746**	**62.835.091.380**	**64.218.343.752**	**65.895.513.189**
07	**FUNGSI KESEHATAN**	**1.783.521.633**	**3.292.722.604**	**64.290.509**	**56.464.000.000**	**61.604.534.746**	**62.835.091.380**	**64.218.343.752**	**65.895.513.189**
07.90	**KESEHATAN LAINNYA**	**1.783.521.633**	**3.260.798.419**	**64.290.509**	**56.464.000.000**	**61.572.610.561**	**62.802.756.293**	**64.185.546.769**	**65.862.156.165**
024.01.D1	**Program Sumber Daya Kesehatan**		**2.504.300.000**		**56.464.000.000**	**58.968.300.000**	**60.138.276.093**	**61.453.430.439**	**63.048.032.228**
7967	Pembiayaan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan		2.504.300.000		56.464.000.000	58.968.300.000	60.138.276.093	61.453.430.439	63.048.032.228
024.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.783.521.633**	**756.498.419**	**64.290.509**		**2.604.310.561**	**2.664.480.200**	**2.732.116.330**	**2.814.123.937**
2038	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kesehatan		296.627.337	35.446.619		332.073.956	338.292.558	345.282.845	353.758.437
2042	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		11.150.000			11.150.000	11.290.531	11.448.510	11.640.055
6792	Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum		4.760.000			4.760.000	4.819.509	4.886.420	4.967.546
6793	Pengelolaan organisasi dan manajemen ASN		39.886.220	1.332.528		41.218.748	41.298.082	41.387.288	41.495.448
6794	Harmonisasi Sistem dan Strategi Kesehatan		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7949	Pengelolaan anggaran, keuangan, BMN dan umum	1.783.521.633	403.074.862	27.511.362		2.214.107.857	2.267.779.520	2.328.111.267	2.401.262.451
07.03	**PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**		**31.924.185**			**31.924.185**	**32.335.087**	**32.796.983**	**33.357.024**
024.01.DZ	**Program Sistem Ketahanan Kesehatan**		**31.924.185**			**31.924.185**	**32.335.087**	**32.796.983**	**33.357.024**
7959	Pengelolaan Krisis dan kegawatdaruratan Kesehatan		31.924.185			31.924.185	32.335.087	32.796.983	33.357.024
024.02	**Inspektorat Jenderal**		**16.752.678**			**16.752.678**	**17.064.958**	**17.416.025**	**17.841.690**
07	**FUNGSI KESEHATAN**		**16.752.678**			**16.752.678**	**17.064.958**	**17.416.025**	**17.841.690**
07.90	**KESEHATAN LAINNYA**		**16.752.678**			**16.752.678**	**17.064.958**	**17.416.025**	**17.841.690**
024.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**16.752.678**			**16.752.678**	**17.064.958**	**17.416.025**	**17.841.690**
2052	Peningkatan Pengawasan Internal atas Penerapan Tata Kelola - Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal		7.808.780			7.808.780	7.959.542	8.129.020	8.334.509

SK No 154259 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2056	Peningkatan Pengawasan melalui Audit Investigasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat		1.538.225			1.538.225	1.568.741	1.603.049	1.644.645
2073	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Inspektorat Jenderal		7.405.673			7.405.673	7.536.675	7.683.956	7.862.536
024.03	**Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas**	**220.649.805**	**2.403.937.212**	**314.579.355**		**2.939.166.372**	**2.991.662.935**	**3.050.674.251**	**3.122.224.399**
07	**FUNGSI KESEHATAN**	**220.649.805**	**2.403.937.212**	**314.579.355**		**2.939.166.372**	**2.991.662.935**	**3.050.674.251**	**3.122.224.399**
07.90	**KESEHATAN LAINNYA**	**220.649.805**	**207.073.011**	**1.751.165**		**429.473.981**	**436.539.707**	**444.482.715**	**454.113.436**
024.03.D1	**Program Sumber Daya Kesehatan**		**26.057.090**			**26.057.090**	**26.057.090**	**26.057.090**	**26.057.090**
7968	Pengelolaan Pembiayaan di IPWL		26.057.090			26.057.090	26.057.090	26.057.090	26.057.090
024.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**220.649.805**	**181.015.921**	**1.751.165**		**403.416.891**	**410.482.617**	**418.425.625**	**428.056.346**
4812	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas	220.649.805	181.015.921	1.751.165		403.416.891	410.482.617	418.425.625	428.056.346
07.03	**PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**		**2.196.864.201**	**312.828.190**		**2.509.692.391**	**2.555.123.228**	**2.606.191.536**	**2.668.110.963**
024.03.DX	**Program Pelayanan Kesehatan Primer**		**2.196.864.201**	**312.828.190**		**2.509.692.391**	**2.555.123.228**	**2.606.191.536**	**2.668.110.963**
7951	Peningkatan Fasilitas, mutu dan tata kelola Pelayanan Kesehatan Primer		2.036.924.585	310.502.280		2.347.426.865	2.391.208.591	2.440.423.052	2.500.094.731
7952	Pembinaan Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas		13.070.000			13.070.000	13.070.000	13.070.000	13.070.000
7953	Pembinaan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup		67.775.377			67.775.377	67.939.332	68.123.646	68.347.121
7954	Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan masyarakat		79.094.239	2.325.910		81.420.149	82.905.305	84.574.838	86.599.111
024.04	**Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan**	**3.458.776.723**	**25.150.364.701**	**5.084.985.766**		**33.694.127.190**	**34.335.913.762**	**35.057.338.626**	**35.932.053.755**
07	**FUNGSI KESEHATAN**	**3.458.776.723**	**25.150.364.701**	**5.084.985.766**		**33.694.127.190**	**34.335.913.762**	**35.057.338.626**	**35.932.053.755**
07.90	**KESEHATAN LAINNYA**	**3.458.776.723**	**25.150.364.701**	**5.084.985.766**		**33.694.127.190**	**34.335.913.762**	**35.057.338.626**	**35.932.053.755**
024.04.DY	**Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan**		**24.635.518.804**	**5.062.277.954**		**29.697.796.758**	**30.272.433.096**	**30.918.374.711**	**31.701.567.695**
7957	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjutan		5.422.181.861	475.983.911		5.898.165.772	6.012.060.844	6.140.088.933	6.295.320.796

SK No 154258 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7958	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjutan di Unit Pelaksana Teknis		19.213.336.943	4.586.294.043		23.799.630.986	24.260.372.252	24.778.285.778	25.406.246.899
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**3.458.776.723**	**514.845.897**	**22.707.812**		**3.996.330.432**	**4.063.480.666**	**4.138.963.915**	**4.230.486.060**
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Lanjutan	3.458.776.723	514.845.897	22.707.812		3.996.330.432	4.063.480.666	4.138.963.915	4.230.486.060
024.05	**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT**	**597.007.328**	**534.115.872**	**17.959.928**		**1.149.083.128**	**1.158.539.995**	**1.169.244.058**	**1.182.222.646**
07	**FUNGSI KESEHATAN**	**597.007.328**	**534.115.872**	**17.959.928**		**1.149.083.128**	**1.158.539.995**	**1.169.244.058**	**1.182.222.646**
07.03	**PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**		**334.825.517**	**7.634.008**		**342.459.525**	**348.181.334**	**354.614.602**	**362.414.923**
024.05.DZ	**Program Sistem Ketahanan Kesehatan**		**153.966.417**	**7.634.008**		**161.600.425**	**163.837.289**	**166.353.097**	**169.403.558**
7960	Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan		91.781.026	7.634.008		99.415.034	100.728.253	102.135.423	103.841.681
7961	Penguatan Surveilans, Kekarantinaan dan Penyehatan Lingkungan		62.185.391			62.185.391	63.109.036	64.217.674	65.561.877
024.05.DX	**Program Pelayanan Kesehatan Primer**		**180.859.100**			**180.859.100**	**184.344.045**	**188.261.505**	**193.011.365**
7955	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular		11.723.770			11.723.770	11.928.640	12.158.942	12.438.180
7956	Penanggulangan Penyakit Menular		169.135.330			169.135.330	172.415.405	176.102.563	180.573.185
07.90	**KESEHATAN LAINNYA**	**597.007.328**	**199.290.355**	**10.325.920**		**806.623.603**	**810.358.661**	**814.629.456**	**819.807.723**
024.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**597.007.328**	**199.290.355**	**10.325.920**		**806.623.603**	**810.358.661**	**814.629.456**	**819.807.723**
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	597.007.328	199.290.355	10.325.920		806.623.603	810.358.661	814.629.456	819.807.723
024.07	**Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan**	**82.859.290**	**9.430.794.397**	**45.428.118**		**9.559.081.805**	**9.740.546.720**	**9.944.529.487**	**10.191.855.053**
07	**FUNGSI KESEHATAN**	**82.859.290**	**9.430.794.397**	**45.428.118**		**9.559.081.805**	**9.740.546.720**	**9.944.529.487**	**10.191.855.053**
07.01	**OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN**		**9.307.913.156**			**9.307.913.156**	**9.484.987.144**	**9.684.033.724**	**9.925.374.259**
024.07.DZ	**Program Sistem Ketahanan Kesehatan**		**9.307.913.156**			**9.307.913.156**	**9.484.987.144**	**9.684.033.724**	**9.925.374.259**
7962	Pembinaan produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alkes		20.635.166			20.635.166	20.972.584	21.351.923	21.811.877
7966	Pengelolaan dan pelayanan Farmasi		9.287.277.990			9.287.277.990	9.464.014.560	9.662.681.801	9.903.562.382

SK No 154257 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.90	**KESEHATAN LAINNYA**	**82.859.290**	**122.881.241**	**45.428.118**		**251.168.649**	**255.559.576**	**260.495.763**	**266.480.794**
024.07.DZ	**Program Sistem Ketahanan Kesehatan**		**65.079.477**	**41.006.638**		**106.086.115**	**107.910.070**	**109.960.484**	**112.446.575**
7963	Penyelenggaraan Pengamanan Alat Kesehatan, PKRT dan Fasilitas Kesehatan		20.621.009	40.622.686		61.243.695	62.423.462	63.749.659	65.357.653
7965	Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)		44.458.468	383.952		44.842.420	45.486.608	46.210.825	47.088.922
024.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**82.859.290**	**57.801.764**	**4.421.480**		**145.082.534**	**147.649.506**	**150.535.279**	**154.034.219**
4814	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan	82.859.290	57.801.764	4.421.480		145.082.534	147.649.506	150.535.279	154.034.219
024.11	**Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan**		**230.098.276**	**381.128**		**230.479.404**	**235.003.736**	**240.089.652**	**246.256.277**
07	**FUNGSI KESEHATAN**		**230.098.276**	**381.128**		**230.479.404**	**235.003.736**	**240.089.652**	**246.256.277**
07.90	**KESEHATAN LAINNYA**		**230.098.276**	**381.128**		**230.479.404**	**235.003.736**	**240.089.652**	**246.256.277**
024.11.D1	**Program Sumber Daya Kesehatan**		**212.000.000**			**212.000.000**	**216.189.548**	**220.899.069**	**226.609.303**
7969	Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		212.000.000			212.000.000	216.189.548	220.899.069	226.609.303
024.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**18.098.276**	**381.128**		**18.479.404**	**18.814.188**	**19.190.583**	**19.646.974**
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		18.098.276	381.128		18.479.404	18.814.188	19.190.583	19.646.974
024.12	**Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**1.214.175.104**	**3.376.663.004**	**215.936.569**		**4.806.774.677**	**4.894.862.188**	**4.993.885.610**	**5.113.949.590**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**2.295.358.470**	**215.936.569**		**2.511.295.039**	**2.556.272.572**	**2.606.835.643**	**2.668.142.258**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**		**2.295.358.470**	**215.936.569**		**2.511.295.039**	**2.556.272.572**	**2.606.835.643**	**2.668.142.258**
024.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**2.295.358.470**	**215.936.569**		**2.511.295.039**	**2.556.272.572**	**2.606.835.643**	**2.668.142.258**
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi		1.588.887.154	215.936.569		1.804.823.723	1.835.796.452	1.870.616.884	1.912.835.823
5234	Pelaksanaan Internsip Tenaga Medis		706.471.316			706.471.316	720.476.120	736.218.759	755.306.435
07	**FUNGSI KESEHATAN**	**1.214.175.104**	**1.081.304.534**			**2.295.479.638**	**2.338.589.616**	**2.387.049.967**	**2.445.807.332**
07.90	**KESEHATAN LAINNYA**	**1.214.175.104**	**1.081.304.534**			**2.295.479.638**	**2.338.589.616**	**2.387.049.967**	**2.445.807.332**

SK No 154256 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.214.175.104**	**415.447.597**			**1.629.622.701**	**1.659.906.474**	**1.693.948.769**	**1.735.224.473**
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.214.175.104	415.447.597			1.629.622.701	1.659.906.474	1.693.948.769	1.735.224.473
024.12.D1	**Program Sumber Daya Kesehatan**		**207.826.141**			**207.826.141**	**211.818.046**	**216.305.458**	**221.746.367**
7970	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan		207.826.141			207.826.141	211.818.046	216.305.458	221.746.367
024.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**458.030.796**			**458.030.796**	**466.865.096**	**476.795.740**	**488.836.492**
6822	Peningkatan Mutu dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		458.030.796			458.030.796	466.865.096	476.795.740	488.836.492
	JUMLAH RM	**7.356.989.883**	**18.935.501.661**	**1.070.213.451**	**56.464.000.000**	**83.826.704.995**	**85.454.077.989**	**87.282.593.548**	**89.499.636.931**
	JUMLAH PNBP		**293.632.661**	**53.493.787**		**347.126.448**	**351.671.087**	**357.650.349**	**364.900.163**
	JUMLAH BLU		**20.411.959.993**	**2.732.074.694**		**23.144.034.687**	**23.591.982.257**	**24.095.517.696**	**24.706.045.471**
	JUMLAH PLN		**4.728.983.765**	**1.887.779.441**		**6.616.763.206**	**6.744.593.315**	**6.888.285.545**	**7.062.509.870**
	JUMLAH HLN		**65.370.664**			**65.370.664**	**66.361.026**	**67.474.323**	**68.824.164**
	TOTAL JUMLAH	**7.356.989.883**	**44.435.448.744**	**5.743.561.373**	**56.464.000.000**	**114.000.000.000**	**116.208.685.674**	**118.691.521.461**	**121.701.916.599**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
025	**KEMENTERIAN AGAMA**	**56.238.488.202**	**24.608.028.241**	**4.349.260.737**	**3.701.951.200**	**88.897.728.380**	**89.690.425.385**	**90.995.099.762**	**92.534.400.110**
025.01	**Sekretariat Jenderal**	**43.149.855.329**	**1.482.153.515**	**195.749.556**	**3.692.575.600**	**48.520.334.000**	**49.096.653.793**	**49.744.492.116**	**50.529.984.841**
09	**FUNGSI AGAMA**	**8.094.993.553**	**1.028.834.175**	**190.775.556**		**9.314.603.284**	**9.418.487.792**	**9.535.266.636**	**9.676.858.948**
09.01	**PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA**	**1.092.000**	**102.554.343**	**1.006.058**		**104.652.401**	**104.654.385**	**104.656.615**	**104.659.319**
025.01.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**	**1.092.000**	**102.554.343**	**1.006.058**		**104.652.401**	**104.654.385**	**104.656.615**	**104.659.319**
2130	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	1.092.000	6.485.500			7.577.500	7.579.484	7.581.714	7.584.418
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama		96.068.843	1.006.058		97.074.901	97.074.901	97.074.901	97.074.901
09.90	**PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA**	**8.093.901.553**	**921.147.222**	**189.638.958**		**9.204.687.733**	**9.308.570.257**	**9.425.346.871**	**9.566.936.479**
025.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**8.093.901.553**	**921.147.222**	**189.638.958**		**9.204.687.733**	**9.308.570.257**	**9.425.346.871**	**9.566.936.479**
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN		9.607.937			9.607.937	9.607.937	9.607.937	9.607.937
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian		20.906.585	32.547		20.939.132	20.939.132	20.939.132	20.939.132
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	8.093.901.553	23.244.766	1.425.500		8.118.571.819	8.215.834.114	8.325.166.516	8.457.730.050
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana		18.735.805	237.001		18.972.806	18.972.806	18.972.806	18.972.806
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan		92.431.960	142.354		92.574.314	92.574.314	92.574.314	92.574.314
2103	Pembinaan Administrasi Umum		737.535.113	187.457.406		924.992.519	931.612.748	939.056.960	948.083.034
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan		5.463.206	144.150		5.607.356	5.607.356	5.607.356	5.607.356
7887	Pembinaan Administrasi Kehumasan dan Komunikasi Publik		7.855.524	200.000		8.055.524	8.055.524	8.055.524	8.055.524
7888	Peningkatan Layanan Data dan Teknologi Informasi		5.366.326			5.366.326	5.366.326	5.366.326	5.366.326
09.03	**LITBANG AGAMA**		**5.132.610**	**130.540**		**5.263.150**	**5.263.150**	**5.263.150**	**5.263.150**
025.01.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**		**5.132.610**	**130.540**		**5.263.150**	**5.263.150**	**5.263.150**	**5.263.150**
7920	Peningkatan Layanan Penilaian Buku Agama, Lektur dan Literasi Keagamaan		5.132.610	130.540		5.263.150	5.263.150	5.263.150	5.263.150

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**35.054.861.776**	**453.319.340**	**4.974.000**	**3.692.575.600**	**39.205.730.716**	**39.678.166.001**	**40.209.225.480**	**40.853.125.893**
10.90	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA**	**35.054.351.776**	**415.519.958**	**3.369.000**		**35.473.240.734**	**35.915.786.155**	**36.413.246.837**	**37.016.409.294**
025.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**35.054.351.776**	**415.519.958**	**3.369.000**		**35.473.240.734**	**35.915.786.155**	**36.413.246.837**	**37.016.409.294**
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	35.054.351.776	415.519.958	3.369.000		35.473.240.734	35.915.786.155	36.413.246.837	37.016.409.294
10.08	**PENDIDIKAN KEAGAMAAN**	**510.000**	**23.304.382**			**23.814.382**	**23.814.382**	**23.814.382**	**23.814.382**
025.01.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**	**510.000**	**23.304.382**			**23.814.382**	**23.814.382**	**23.814.382**	**23.814.382**
5621	Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	510.000	19.910.873			20.420.873	20.420.873	20.420.873	20.420.873
7921	Peningkatan Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan		3.393.509			3.393.509	3.393.509	3.393.509	3.393.509
10.07	**PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN**		**8.495.000**	**505.000**	**2.102.425.200**	**2.111.425.200**	**2.111.425.200**	**2.111.425.200**	**2.111.425.200**
025.01.DF	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**		**8.495.000**	**505.000**	**2.102.425.200**	**2.111.425.200**	**2.111.425.200**	**2.111.425.200**	**2.111.425.200**
8067	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kekhasan Agama dan pendidikan Keagamaan		8.495.000	505.000	2.102.425.200	2.111.425.200	2.111.425.200	2.111.425.200	2.111.425.200
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**		**6.000.000**	**1.100.000**	**1.590.150.400**	**1.597.250.400**	**1.627.140.264**	**1.660.739.061**	**1.701.477.017**
025.01.DK	**Program Pendidikan Tinggi**		**6.000.000**	**1.100.000**	**1.590.150.400**	**1.597.250.400**	**1.627.140.264**	**1.660.739.061**	**1.701.477.017**
7884	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi Keagamaan		6.000.000		1.590.150.400	1.596.150.400	1.626.040.264	1.659.639.061	1.700.377.017
7885	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Khonghucu			1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
025.02	**Inspektorat Jenderal**	**71.788.354**	**128.049.386**	**8.000.000**		**207.837.740**	**209.613.739**	**211.610.142**	**214.030.744**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**76.965.329**			**76.965.329**	**76.965.329**	**76.965.329**	**76.965.329**
10.90	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA**		**76.965.329**			**76.965.329**	**76.965.329**	**76.965.329**	**76.965.329**
025.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**76.965.329**			**76.965.329**	**76.965.329**	**76.965.329**	**76.965.329**
2113	PENGAWASAN FUNGSIONAL PENDIDIKAN		76.965.329			76.965.329	76.965.329	76.965.329	76.965.329

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	**FUNGSI AGAMA**	**71.788.354**	**51.084.057**	**8.000.000**		**130.872.411**	**132.648.410**	**134.644.813**	**137.065.415**
09.90	**PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA**	**71.788.354**	**51.084.057**	**8.000.000**		**130.872.411**	**132.648.410**	**134.644.813**	**137.065.415**
025.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**71.788.354**	**51.084.057**	**8.000.000**		**130.872.411**	**132.648.410**	**134.644.813**	**137.065.415**
2115	Pengawasan Fungsional Inspektorat I-IV		13.669.421			13.669.421	13.669.421	13.669.421	13.669.421
2119	Pengawasan Fungsional Inspektorat V		5.000.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2120	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	71.788.354	32.414.636	8.000.000		112.202.990	113.978.989	115.975.392	118.395.994
025.03	**Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam**	**56.831.740**	**1.493.892.016**	**466.709.380**		**2.017.433.136**	**2.031.893.078**	**2.048.151.816**	**2.067.865.450**
09	**FUNGSI AGAMA**	**56.831.740**	**1.493.892.016**	**466.709.380**		**2.017.433.136**	**2.031.893.078**	**2.048.151.816**	**2.067.865.450**
09.90	**PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA**		**561.113.060**	**462.201.380**		**1.023.314.440**	**1.028.531.083**	**1.034.395.427**	**1.041.505.917**
025.03.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**		**561.113.060**	**462.201.380**		**1.023.314.440**	**1.028.531.083**	**1.034.395.427**	**1.041.505.917**
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		352.134.900	456.950.380		809.085.280	814.143.196	819.829.116	826.723.271
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		183.978.160	5.251.000		189.229.160	189.328.365	189.439.880	189.575.090
7891	Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal		25.000.000			25.000.000	25.059.522	25.126.431	25.207.556
09.01	**PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA**		**375.857.721**	**508.000**		**376.365.721**	**376.530.796**	**376.716.357**	**376.941.345**
025.03.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**		**375.857.721**	**508.000**		**376.365.721**	**376.530.796**	**376.716.357**	**376.941.345**
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		150.616.721	480.000		151.096.721	151.261.796	151.447.357	151.672.345
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam		225.241.000	28.000		225.269.000	225.269.000	225.269.000	225.269.000
09.03	**LITBANG AGAMA**	**56.831.740**	**556.921.235**	**4.000.000**		**617.752.975**	**626.831.199**	**637.040.032**	**649.418.188**
025.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**56.831.740**	**556.921.235**	**4.000.000**		**617.752.975**	**626.831.199**	**637.040.032**	**649.418.188**
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	56.831.740	556.921.235	4.000.000		617.752.975	626.831.199	637.040.032	649.418.188
025.04	**Ditjen Pendidikan Islam**	**11.824.346.975**	**19.534.529.712**	**2.822.301.362**	**1.200.000**	**34.182.378.049**	**34.567.823.705**	**35.001.486.551**	**35.527.293.428**

SK No 154252 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**11.824.346.975**	**19.534.529.712**	**2.822.301.362**	**1.200.000**	**34.182.378.049**	**34.567.823.705**	**35.001.486.551**	**35.527.293.428**
10.02	**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**		**11.428.134.581**	**1.260.412.815**		**12.688.547.396**	**12.867.105.359**	**13.067.819.957**	**13.311.182.920**
025.04.DF	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**		**11.428.134.581**	**1.260.412.815**		**12.688.547.396**	**12.867.105.359**	**13.067.819.957**	**13.311.182.920**
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah		11.428.134.581	1.260.412.815		12.688.547.396	12.867.105.359	13.067.819.957	13.311.182.920
10.90	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA**	**10.372.885.036**	**2.333.223.193**	**3.800.460**		**12.709.908.689**	**12.801.635.141**	**12.905.115.535**	**13.030.583.184**
025.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**3.469.791.097**	**1.561.249.007**	**2.100.460**		**5.033.140.564**	**5.123.660.514**	**5.225.784.694**	**5.349.607.956**
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	3.469.791.097	1.561.249.007	2.100.460		5.033.140.564	5.123.660.514	5.225.784.694	5.349.607.956
025.04.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**	**6.903.093.939**	**771.974.186**	**1.700.000**		**7.676.768.125**	**7.677.974.627**	**7.679.330.841**	**7.680.975.228**
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	6.903.093.939	744.000.000			7.647.093.939	7.648.300.441	7.649.656.655	7.651.301.042
4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah		27.974.186	1.700.000		29.674.186	29.674.186	29.674.186	29.674.186
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**390.906.816**	**4.735.895.856**	**1.558.088.087**	**1.200.000**	**6.686.090.759**	**6.792.286.920**	**6.908.304.988**	**7.048.973.621**
025.04.DK	**Program Pendidikan Tinggi**	**390.906.816**	**4.735.895.856**	**1.558.088.087**	**1.200.000**	**6.686.090.759**	**6.792.286.920**	**6.908.304.988**	**7.048.973.621**
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	390.906.816	4.698.851.856	1.558.088.087	1.200.000	6.649.046.759	6.752.242.920	6.868.260.988	7.008.929.621
4438	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Ma'had Ali		37.044.000			37.044.000	40.044.000	40.044.000	40.044.000
10.08	**PENDIDIKAN KEAGAMAAN**	**1.060.555.123**	**1.037.276.082**			**2.097.831.205**	**2.106.796.285**	**2.120.246.071**	**2.136.553.703**
025.04.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**	**1.060.555.123**	**262.227.782**			**1.322.782.905**	**1.324.092.411**	**1.325.564.409**	**1.327.349.181**
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	1.060.555.123	124.187.782			1.184.742.905	1.186.052.411	1.187.524.409	1.189.309.181
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam		138.040.000			138.040.000	138.040.000	138.040.000	138.040.000
025.04.DF	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**		**775.048.300**			**775.048.300**	**782.703.874**	**794.681.662**	**809.204.522**
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam		775.048.300			775.048.300	782.703.874	794.681.662	809.204.522

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
025.05	**Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen**	**437.462.225**	**638.222.650**	**95.596.141**		**1.171.281.016**	**1.171.281.016**	**1.171.281.016**	**1.171.281.016**
09	**FUNGSI AGAMA**	**29.409.028**	**264.164.569**	**5.906.408**		**299.480.005**	**299.480.005**	**299.480.005**	**299.480.005**
09.01	**PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA**		**214.888.000**			**214.888.000**	**214.888.000**	**214.888.000**	**214.888.000**
025.05.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**		**214.888.000**			**214.888.000**	**214.888.000**	**214.888.000**	**214.888.000**
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen		214.888.000			214.888.000	214.888.000	214.888.000	214.888.000
09.90	**PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA**	**29.409.028**	**49.276.569**	**5.906.408**		**84.592.005**	**84.592.005**	**84.592.005**	**84.592.005**
025.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**29.409.028**	**49.276.569**	**5.906.408**		**84.592.005**	**84.592.005**	**84.592.005**	**84.592.005**
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	29.409.028	49.276.569	5.906.408		84.592.005	84.592.005	84.592.005	84.592.005
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**408.053.197**	**374.058.081**	**89.689.733**		**871.801.011**	**871.801.011**	**871.801.011**	**871.801.011**
10.08	**PENDIDIKAN KEAGAMAAN**	**194.764.197**	**335.402.831**	**89.681.733**		**619.848.761**	**619.848.761**	**619.848.761**	**619.848.761**
025.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**167.764.197**	**80.260.328**	**4.583.438**		**252.607.963**	**252.607.963**	**252.607.963**	**252.607.963**
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	167.764.197	80.260.328	4.583.438		252.607.963	252.607.963	252.607.963	252.607.963
025.05.DF	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**		**52.108.530**	**22.217.250**		**74.325.780**	**74.325.780**	**74.325.780**	**74.325.780**
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen		52.108.530	22.217.250		74.325.780	74.325.780	74.325.780	74.325.780
025.05.DK	**Program Pendidikan Tinggi**	**27.000.000**	**203.033.973**	**62.881.045**		**292.915.018**	**292.915.018**	**292.915.018**	**292.915.018**
5101	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	27.000.000	203.033.973	62.881.045		292.915.018	292.915.018	292.915.018	292.915.018
10.90	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA**	**213.289.000**	**38.655.250**	**8.000**		**251.952.250**	**251.952.250**	**251.952.250**	**251.952.250**
025.05.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**	**213.289.000**	**38.655.250**	**8.000**		**251.952.250**	**251.952.250**	**251.952.250**	**251.952.250**
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	213.289.000	38.655.250	8.000		251.952.250	251.952.250	251.952.250	251.952.250
025.06	**Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik**	**212.540.223**	**310.875.468**	**55.074.612**	**8.175.600**	**586.665.903**	**588.695.202**	**590.977.101**	**593.743.829**
09	**FUNGSI AGAMA**	**15.563.931**	**163.407.497**	**1.103.528**		**180.074.956**	**180.797.729**	**181.610.628**	**182.596.219**

SK No 154250 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.01	**PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA**		**136.796.986**	**6.880**		**136.803.866**	**136.803.866**	**136.803.866**	**136.803.866**
025.06.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**		**136.796.986**	**6.880**		**136.803.866**	**136.803.866**	**136.803.866**	**136.803.866**
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik		136.796.986	6.880		136.803.866	136.803.866	136.803.866	136.803.866
09.90	**PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA**	**15.563.931**	**26.610.511**	**1.096.648**		**43.271.090**	**43.993.863**	**44.806.762**	**45.792.353**
025.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**15.563.931**	**26.610.511**	**1.096.648**		**43.271.090**	**43.993.863**	**44.806.762**	**45.792.353**
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	15.563.931	26.610.511	1.096.648		43.271.090	43.993.863	44.806.762	45.792.353
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**196.976.292**	**147.467.971**	**53.971.084**	**8.175.600**	**406.590.947**	**407.897.473**	**409.366.473**	**411.147.610**
10.08	**PENDIDIKAN KEAGAMAAN**	**21.681.492**	**116.564.217**	**53.971.084**	**8.175.600**	**200.392.393**	**201.655.899**	**203.076.524**	**204.799.007**
025.06.DF	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**		**20.238.600**	**21.133.000**	**8.175.600**	**49.547.200**	**50.054.920**	**50.625.642**	**51.317.633**
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik		20.238.600	21.133.000	8.175.600	49.547.200	50.054.920	50.625.642	51.317.633
025.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**12.420.276**	**36.374.174**	**32.338.084**		**81.132.534**	**81.704.569**	**82.347.919**	**83.127.969**
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	12.420.276	36.374.174	32.338.084		81.132.534	81.704.569	82.347.919	83.127.969
025.06.DK	**Program Pendidikan Tinggi**	**9.261.216**	**59.951.443**	**500.000**		**69.712.659**	**69.896.410**	**70.102.963**	**70.353.405**
2131	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik	9.261.216	59.951.443	500.000		69.712.659	69.896.410	70.102.963	70.353.405
10.90	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA**	**175.294.800**	**30.903.754**			**206.198.554**	**206.241.574**	**206.289.949**	**206.348.603**
025.06.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**	**175.294.800**	**30.903.754**			**206.198.554**	**206.241.574**	**206.289.949**	**206.348.603**
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	175.294.800	30.903.754			206.198.554	206.241.574	206.289.949	206.348.603
025.07	**Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu**	**187.372.509**	**342.507.638**	**118.514.309**		**648.394.456**	**652.609.053**	**657.347.307**	**663.092.340**
09	**FUNGSI AGAMA**	**16.288.278**	**146.165.197**	**1.570.000**		**164.023.475**	**164.521.999**	**165.082.551**	**165.762.222**
09.01	**PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA**		**122.930.121**	**42.000**		**122.972.121**	**122.983.529**	**122.996.352**	**123.011.902**
025.07.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**		**122.930.121**	**42.000**		**122.972.121**	**122.983.529**	**122.996.352**	**123.011.902**

SK No 154249 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu		122.930.121	42.000		122.972.121	122.983.529	122.996.352	123.011.902
09.90	**PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA**	**16.288.278**	**23.235.076**	**1.528.000**		**41.051.354**	**41.538.470**	**42.086.199**	**42.750.320**
025.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**16.288.278**	**23.235.076**	**1.528.000**		**41.051.354**	**41.538.470**	**42.086.199**	**42.750.320**
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	16.288.278	23.235.076	1.528.000		41.051.354	41.538.470	42.086.199	42.750.320
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**171.084.231**	**196.342.441**	**116.944.309**		**484.370.981**	**488.087.054**	**492.264.756**	**497.330.118**
10.08	**PENDIDIKAN KEAGAMAAN**	**130.497.226**	**153.455.983**	**116.944.309**		**400.897.518**	**404.516.575**	**408.585.196**	**413.518.290**
025.07.DF	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**		**40.388.780**			**40.388.780**	**40.392.555**	**40.396.802**	**40.401.950**
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu		40.388.780			40.388.780	40.392.555	40.396.802	40.401.950
025.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**127.822.725**	**39.888.744**	**6.489.000**		**174.200.469**	**177.312.605**	**180.811.124**	**185.053.020**
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	127.822.725	39.888.744	6.489.000		174.200.469	177.312.605	180.811.124	185.053.020
025.07.DK	**Program Pendidikan Tinggi**	**2.674.501**	**73.178.459**	**110.455.309**		**186.308.269**	**186.811.415**	**187.377.270**	**188.063.320**
5104	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	2.674.501	73.178.459	110.455.309		186.308.269	186.811.415	187.377.270	188.063.320
10.90	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA**	**40.587.005**	**42.886.458**			**83.473.463**	**83.570.479**	**83.679.560**	**83.811.828**
025.07.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**	**40.587.005**	**42.886.458**			**83.473.463**	**83.570.479**	**83.679.560**	**83.811.828**
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	40.587.005	42.886.458			83.473.463	83.570.479	83.679.560	83.811.828
025.08	**Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha**	**64.637.627**	**218.910.345**	**53.111.132**		**336.659.104**	**338.044.760**	**339.602.891**	**341.492.042**
09	**FUNGSI AGAMA**	**17.507.041**	**92.710.512**	**1.361.123**		**111.578.676**	**112.121.105**	**112.711.347**	**113.426.995**
09.01	**PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA**		**78.168.000**			**78.168.000**	**78.183.871**	**78.201.714**	**78.223.347**
025.08.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**		**78.168.000**			**78.168.000**	**78.183.871**	**78.201.714**	**78.223.347**
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha		78.168.000			78.168.000	78.183.871	78.201.714	78.223.347
09.90	**PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA**	**17.507.041**	**14.542.512**	**1.361.123**		**33.410.676**	**33.937.234**	**34.509.633**	**35.203.648**

SK No 154248 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
025.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**17.507.041**	**14.542.512**	**1.361.123**		**33.410.676**	**33.937.234**	**34.509.633**	**35.203.648**
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha	17.507.041	14.542.512	1.361.123		33.410.676	33.937.234	34.509.633	35.203.648
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**47.130.586**	**126.199.833**	**51.750.009**		**225.080.428**	**225.923.655**	**226.891.544**	**228.065.047**
10.08	**PENDIDIKAN KEAGAMAAN**	**23.198.305**	**98.630.978**	**51.750.009**		**173.579.292**	**174.380.567**	**175.301.292**	**176.417.609**
025.08.DF	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**		**52.332.787**			**52.332.787**	**52.335.869**	**52.339.334**	**52.343.537**
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha		52.332.787			52.332.787	52.335.869	52.339.334	52.343.537
025.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**20.575.905**	**22.556.866**	**2.623.033**		**45.755.804**	**46.453.080**	**47.256.856**	**48.231.388**
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	20.575.905	22.556.866	2.623.033		45.755.804	46.453.080	47.256.856	48.231.388
025.08.DK	**Program Pendidikan Tinggi**	**2.622.400**	**23.741.325**	**49.126.976**		**75.490.701**	**75.591.618**	**75.705.102**	**75.842.684**
5106	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha	2.622.400	23.741.325	49.126.976		75.490.701	75.591.618	75.705.102	75.842.684
10.90	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA**	**23.932.281**	**27.568.855**			**51.501.136**	**51.543.088**	**51.590.252**	**51.647.438**
025.08.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**	**23.932.281**	**27.568.855**			**51.501.136**	**51.543.088**	**51.590.252**	**51.647.438**
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	23.932.281	27.568.855			51.501.136	51.543.088	51.590.252	51.647.438
025.09	**Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah**		**21.074.275**	**502.195.870**		**523.270.145**	**39.341**	**39.442**	**39.543**
09	**FUNGSI AGAMA**		**21.074.275**	**502.195.870**		**523.270.145**	**39.341**	**39.442**	**39.543**
09.03	**LITBANG AGAMA**		**21.074.275**	**13.310.507**		**34.384.782**	**39.341**	**39.442**	**39.543**
025.09.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**21.074.275**	**13.310.507**		**34.384.782**	**39.341**	**39.442**	**39.543**
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		21.074.275	13.310.507		34.384.782	39.341	39.442	39.543
09.01	**PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA**			**488.885.363**		**488.885.363**			
025.09.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**			**488.885.363**		**488.885.363**			

SK No 154247 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri			488.885.363		488.885.363			
025.11	**Badan Moderasi Beragama Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**233.653.220**	**437.813.236**	**32.008.375**		**703.474.831**	**1.033.771.698**	**1.230.111.380**	**1.425.576.877**
09	**FUNGSI AGAMA**	**233.653.220**	**291.141.603**	**10.395.985**		**535.190.808**	**796.276.942**	**966.485.730**	**1.138.938.416**
09.90	**PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA**	**233.653.220**	**236.675.020**	**9.717.785**		**480.046.025**	**605.430.058**	**724.616.252**	**845.443.614**
025.11.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**		**122.960.104**	**7.679.506**		**130.639.610**	**249.941.099**	**362.289.623**	**474.826.428**
7893	Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama		72.098.686	7.679.506		79.778.192	185.279.614	293.115.701	401.140.065
7894	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keagamaan		50.861.418			50.861.418	64.661.485	69.173.922	73.686.363
025.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**233.653.220**	**113.714.916**	**2.038.279**		**349.406.415**	**355.488.959**	**362.326.629**	**370.617.186**
2156	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM	233.653.220	113.714.916	2.038.279		349.406.415	355.488.959	362.326.629	370.617.186
09.03	**LITBANG AGAMA**		**54.466.583**	**678.200**		**55.144.783**	**190.846.884**	**241.869.478**	**293.494.802**
025.11.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**		**54.466.583**	**678.200**		**55.144.783**	**190.846.884**	**241.869.478**	**293.494.802**
7892	Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an		15.155.851	678.200		15.834.051	45.042.373	62.313.721	80.046.552
7895	Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama		39.310.732			39.310.732	145.804.511	179.555.757	213.448.250
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**146.671.633**	**21.612.390**		**168.284.023**	**237.494.756**	**263.625.650**	**286.638.461**
10.08	**PENDIDIKAN KEAGAMAAN**		**146.671.633**	**21.612.390**		**168.284.023**	**237.494.756**	**263.625.650**	**286.638.461**
025.11.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**		**146.671.633**	**21.612.390**		**168.284.023**	**237.494.756**	**263.625.650**	**286.638.461**
7896	Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan		21.649.655			21.649.655	50.719.134	61.323.833	68.810.419
7897	Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan		646.000			646.000	19.918.332	30.685.000	41.451.666
7898	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan		124.375.978	21.612.390		145.988.368	166.857.290	171.616.817	176.376.376
	JUMLAH RM	**56.238.488.202**	**20.333.112.849**	**1.025.078.246**	**3.701.951.200**	**81.298.630.497**	**82.505.201.783**	**83.690.252.091**	**85.085.632.367**

SK No 154246 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH PNBP		964.146.869	275.322.510		1.239.469.379	1.230.846.306	1.256.446.762	1.286.365.590
	JUMLAH BLU		3.310.768.523	669.831.734		3.980.600.257	4.047.598.663	4.122.922.177	4.214.249.850
	JUMLAH SBSN			2.379.028.247		2.379.028.247	1.906.778.633	1.925.478.732	1.948.152.303
	TOTAL JUMLAH	56.238.488.202	24.608.028.241	4.349.260.737	3.701.951.200	88.897.728.380	89.690.425.385	90.995.099.762	92.534.400.110

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
026	**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**	**755.652.454**	**2.616.655.112**	**488.549.455**		**3.860.857.021**	**3.917.817.432**	**3.981.848.564**	**4.059.485.067**
026.01	**Sekretariat Jenderal**	**155.297.552**	**287.734.805**	**8.991.146**		**452.023.503**	**459.782.213**	**468.504.163**	**479.079.358**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**8.103.836**	**12.108.387**	**2.682.241**		**22.894.464**	**23.286.714**	**23.727.717**	**24.262.428**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**		**3.986.793**	**2.682.241**		**6.669.034**	**6.739.371**	**6.818.498**	**6.914.445**
026.01.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**3.986.793**	**2.682.241**		**6.669.034**	**6.739.371**	**6.818.498**	**6.914.445**
2238	Pelayanan Politeknik Ketenagakerjaan		3.986.793	2.682.241		6.669.034	6.739.371	6.818.498	6.914.445
10.04	**PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL**	**8.103.836**	**8.121.594**			**16.225.430**	**16.547.343**	**16.909.219**	**17.347.983**
026.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**8.103.836**	**8.121.594**			**16.225.430**	**16.547.343**	**16.909.219**	**17.347.983**
6625	Dukungan Manajemen Politeknik Ketenagakerjaan	8.103.836	8.121.594			16.225.430	16.547.343	16.909.219	17.347.983
04	**FUNGSI EKONOMI**	**147.193.716**	**275.626.418**	**6.308.905**		**429.129.039**	**436.495.499**	**444.776.446**	**454.816.930**
04.02	**TENAGA KERJA**	**147.193.716**	**275.626.418**	**6.308.905**		**429.129.039**	**436.495.499**	**444.776.446**	**454.816.930**
026.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**147.193.716**	**236.309.780**	**6.308.905**		**389.812.401**	**396.810.330**	**404.677.006**	**414.215.191**
2157	Pembentukan, Pembaruan dan Penyelesaian Masalah Hukum		3.655.703			3.655.703	3.716.310	3.784.464	3.867.095
2158	Peningkatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	122.939.226	99.545.889			222.485.115	226.827.787	231.709.445	237.628.350
2159	Peningkatan Pengelolaan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian		19.832.429			19.832.429	19.950.504	20.083.284	20.244.273
2160	Peningkatan Perencanaan Program dan Anggaran		70.358.515	200.000		70.558.515	71.722.366	73.030.677	74.616.980
2161	Peningkatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha dan Pelayanan Umum		11.364.612	5.372.312		16.736.924	17.054.200	17.410.878	17.843.345
2162	Peningkatan Pengelolaan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri		3.194.484			3.194.484	3.256.138	3.325.461	3.409.513
2163	Peningkatan dan Pengelolaan Hubungan Masyarakat		9.217.731			9.217.731	9.400.851	9.606.711	9.856.308
2165	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	14.300.000	14.716.630	727.000		29.743.630	30.207.887	30.729.811	31.362.643
6595	Peningkatan Pelayanan Pasar Kerja	9.954.490	4.423.787	9.593		14.387.870	14.674.287	14.996.275	15.386.684

SK No 154287 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
026.01.DN	**Program Pembinaan Ketenagakerjaan**		**39.316.638**			**39.316.638**	**39.685.169**	**40.099.440**	**40.601.739**
6618	Peningkatan Pelayanan Pasar Kerja		39.316.638			39.316.638	39.685.169	40.099.440	40.601.739
026.02	**Inspektorat Jenderal**	**26.095.409**	**16.119.929**	**200.000**		**42.415.338**	**42.541.119**	**42.682.548**	**42.854.034**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**26.095.409**	**16.119.929**	**200.000**		**42.415.338**	**42.541.119**	**42.682.548**	**42.854.034**
04.02	**TENAGA KERJA**	**26.095.409**	**16.119.929**	**200.000**		**42.415.338**	**42.541.119**	**42.682.548**	**42.854.034**
026.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**26.095.409**	**16.119.929**	**200.000**		**42.415.338**	**42.541.119**	**42.682.548**	**42.854.034**
2167	Pengawasan Inspektorat I		1.612.396			1.612.396	1.644.377	1.680.339	1.723.942
2168	Pengawasan Inspektorat II		1.560.742			1.560.742	1.591.699	1.626.509	1.668.712
2169	Pengawasan Inspektorat III		1.553.350			1.553.350	1.584.160	1.618.802	1.660.809
2170	Pengawasan Inspektorat IV		1.614.980			1.614.980	1.647.013	1.683.028	1.726.701
2171	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	26.095.409	9.778.461	200.000		36.073.870	36.073.870	36.073.870	36.073.870
026.04	**Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**	**67.001.595**	**207.497.227**	**600.000**		**275.098.822**	**280.144.235**	**285.816.003**	**292.692.883**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**67.001.595**	**207.497.227**	**600.000**		**275.098.822**	**280.144.235**	**285.816.003**	**292.692.883**
04.02	**TENAGA KERJA**	**67.001.595**	**207.497.227**	**600.000**		**275.098.822**	**280.144.235**	**285.816.003**	**292.692.883**
026.04.DN	**Program Pembinaan Ketenagakerjaan**		**171.186.916**			**171.186.916**	**174.223.860**	**177.637.802**	**181.777.139**
2173	Penempatan Tenaga Kerja		18.826.249			18.826.249	19.185.495	19.589.374	20.079.066
2175	Perluasan Kesempatan Kerja		128.997.766			128.997.766	131.378.271	134.054.219	137.298.760
2177	Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing		8.678.720			8.678.720	8.816.079	8.970.492	9.157.714
6593	Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja		7.095.812			7.095.812	7.251.581	7.426.711	7.639.050
7907	Penempatan Tenaga Kerja Khusus		7.588.369			7.588.369	7.592.434	7.597.006	7.602.549
026.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**67.001.595**	**36.310.311**	**600.000**		**103.911.906**	**105.920.375**	**108.178.201**	**110.915.744**

SK No 154286 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6621	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	67.001.595	36.310.311	600.000		103.911.906	105.920.375	108.178.201	110.915.744
026.05	**Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**	**39.424.879**	**1.281.200.737**	**70.500**		**1.320.696.116**	**1.344.040.649**	**1.370.281.957**	**1.402.099.092**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**39.424.879**	**1.281.200.737**	**70.500**		**1.320.696.116**	**1.344.040.649**	**1.370.281.957**	**1.402.099.092**
04.02	**TENAGA KERJA**	**39.424.879**	**1.281.200.737**	**70.500**		**1.320.696.116**	**1.344.040.649**	**1.370.281.957**	**1.402.099.092**
026.05.DN	**Program Pembinaan Ketenagakerjaan**		**1.267.542.237**			**1.267.542.237**	**1.290.886.770**	**1.317.128.078**	**1.348.945.213**
2179	Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial		20.343.322			20.343.322	20.475.863	20.624.860	20.805.519
2181	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		25.123.426			25.123.426	25.230.518	25.350.902	25.496.867
5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja		1.179.386.135			1.179.386.135	1.202.338.242	1.228.138.406	1.259.420.657
6586	Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial		12.158.854			12.158.854	12.158.854	12.158.854	12.158.854
6587	Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan		30.530.500			30.530.500	30.683.293	30.855.056	31.063.316
026.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**39.424.879**	**13.658.500**	**70.500**		**53.153.879**	**53.153.879**	**53.153.879**	**53.153.879**
6623	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	39.424.879	13.658.500	70.500		53.153.879	53.153.879	53.153.879	53.153.879
026.08	**Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**	**98.591.803**	**106.026.353**	**500.000**		**205.118.156**	**208.746.794**	**212.826.098**	**217.772.171**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**98.591.803**	**106.026.353**	**500.000**		**205.118.156**	**208.746.794**	**212.826.098**	**217.772.171**
04.02	**TENAGA KERJA**	**98.591.803**	**106.026.353**	**500.000**		**205.118.156**	**208.746.794**	**212.826.098**	**217.772.171**
026.08.DN	**Program Pembinaan Ketenagakerjaan**		**70.550.836**	**500.000**		**71.050.836**	**72.056.119**	**73.186.397**	**74.556.830**
6588	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan		8.749.183			8.749.183	8.922.754	9.117.888	9.354.483
6589	Peningkatan Kompetensi Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3		10.170.275			10.170.275	10.270.528	10.383.238	10.519.902
6590	Peningkatan Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		23.601.281	500.000		24.101.281	24.399.085	24.733.865	25.139.785

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6591	Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan		8.560.347			8.560.347	8.710.129	8.878.542	9.082.740
6592	Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja		19.469.750			19.469.750	19.753.623	20.072.864	20.459.920
026.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**98.591.803**	**35.475.517**			**134.067.320**	**136.690.675**	**139.639.701**	**143.215.341**
6622	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	98.591.803	35.475.517			134.067.320	136.690.675	139.639.701	143.215.341
026.11	**Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan**	**26.790.636**	**109.901.183**	**1.443.822**		**138.135.641**	**138.135.641**	**138.135.641**	**138.135.641**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**26.790.636**	**109.901.183**	**1.443.822**		**138.135.641**	**138.135.641**	**138.135.641**	**138.135.641**
04.02	**TENAGA KERJA**	**26.790.636**	**109.901.183**	**1.443.822**		**138.135.641**	**138.135.641**	**138.135.641**	**138.135.641**
026.11.DN	**Program Pembinaan Ketenagakerjaan**		**53.866.228**	**1.043.822**		**54.910.050**	**54.910.050**	**54.910.050**	**54.910.050**
6766	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan		52.159.715	1.043.822		53.203.537	53.203.537	53.203.537	53.203.537
6767	Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan		701.429			701.429	701.429	701.429	701.429
6769	Pengembangan Perencanaan Tenaga Kerja		1.005.084			1.005.084	1.005.084	1.005.084	1.005.084
026.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**26.790.636**	**56.034.955**	**400.000**		**83.225.591**	**83.225.591**	**83.225.591**	**83.225.591**
6624	Dukungan Manajemen Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	26.790.636	56.034.955	400.000		83.225.591	83.225.591	83.225.591	83.225.591
026.13	**Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas**	**342.450.580**	**608.174.878**	**476.743.987**		**1.427.369.445**	**1.444.426.781**	**1.463.602.154**	**1.486.851.888**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**449.661.327**	**341.444.209**		**791.105.536**	**796.154.955**	**801.831.943**	**808.715.104**
10.04	**PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL**		**449.661.327**	**341.444.209**		**791.105.536**	**796.154.955**	**801.831.943**	**808.715.104**
026.13.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**445.161.327**	**340.944.209**		**786.105.536**	**791.067.776**	**796.646.738**	**803.411.047**
4053	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas		54.658.133			54.658.133	55.387.392	56.207.334	57.201.449
4055	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Binalavotas		11.122.916			11.122.916	11.251.901	11.396.914	11.572.738
4056	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas		79.670.719	340.944.209		420.614.928	420.631.749	420.650.672	420.673.616

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas		276.662.135			276.662.135	280.589.730	285.005.262	290.359.002
4059	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas		7.900.396			7.900.396	7.961.875	8.031.149	8.115.126
4060	Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas		15.147.028			15.147.028	15.245.129	15.355.407	15.489.116
026.13.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**4.500.000**	**500.000**		**5.000.000**	**5.087.179**	**5.185.205**	**5.304.057**
6620	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		4.500.000	500.000		5.000.000	5.087.179	5.185.205	5.304.057
04	**FUNGSI EKONOMI**	**342.450.580**	**158.513.551**	**135.299.778**		**636.263.909**	**648.271.826**	**661.770.211**	**678.136.784**
04.02	**TENAGA KERJA**	**342.450.580**	**158.513.551**	**135.299.778**		**636.263.909**	**648.271.826**	**661.770.211**	**678.136.784**
026.13.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**342.450.580**	**118.474.075**			**460.924.655**	**469.453.667**	**479.041.461**	**490.666.509**
6988	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	342.450.580	118.474.075			460.924.655	469.453.667	479.041.461	490.666.509
026.13.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**40.039.476**	**135.299.778**		**175.339.254**	**178.818.159**	**182.728.750**	**187.470.275**
2217	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		40.039.476	135.299.778		175.339.254	178.818.159	182.728.750	187.470.275
	JUMLAH RM	**755.652.454**	**1.629.597.882**	**19.345.075**		**2.404.595.411**	**2.442.839.758**	**2.485.831.060**	**2.537.957.191**
	JUMLAH PNBP		**768.288.677**	**10.314.716**		**778.603.393**	**792.173.974**	**807.429.812**	**825.927.200**
	JUMLAH PLN		**218.768.553**	**458.889.664**		**677.658.217**	**682.803.700**	**688.587.692**	**695.600.676**
	TOTAL JUMLAH	**755.652.454**	**2.616.655.112**	**488.549.455**		**3.860.857.021**	**3.917.817.432**	**3.981.848.564**	**4.059.485.067**

SK No 154283 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 027

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027	**KEMENTERIAN SOSIAL**	**5.692.925.318**	**4.897.266.224**	**843.319.204**	**73.006.545.420**	**84.440.056.166**	**86.026.683.273**	**87.817.634.025**	**89.989.130.608**
027.01	**Sekretariat Jenderal**	**1.725.878.886**	**3.841.641.023**	**843.319.204**		**6.410.839.113**	**6.474.537.619**	**6.546.140.863**	**6.632.958.484**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**620.352.953**	**3.493.866.528**	**836.770.869**		**4.950.990.350**	**4.990.709.868**	**5.035.358.172**	**5.089.493.457**
10.02	**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**	**620.352.953**	**3.480.050.521**	**836.770.869**		**4.937.174.343**	**4.976.619.774**	**5.020.959.936**	**5.074.721.612**
027.01.DQ	**Program Perlindungan Sosial**		**3.092.673.881**	**836.770.869**		**3.929.444.750**	**3.948.895.825**	**3.970.760.594**	**3.997.271.246**
7936	Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat		3.092.673.881	836.770.869		3.929.444.750	3.948.895.825	3.970.760.594	3.997.271.246
027.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**620.352.953**	**387.376.640**			**1.007.729.593**	**1.027.723.949**	**1.050.199.342**	**1.077.450.366**
7937	Layanan Pengelolaan Sekolah Rakyat	620.352.953	387.376.640			1.007.729.593	1.027.723.949	1.050.199.342	1.077.450.366
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**		**13.816.007**			**13.816.007**	**14.090.094**	**14.398.236**	**14.771.845**
027.01.DQ	**Program Perlindungan Sosial**		**13.816.007**			**13.816.007**	**14.090.094**	**14.398.236**	**14.771.845**
6884	Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial		13.816.007			13.816.007	14.090.094	14.398.236	14.771.845
11	**FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL**	**1.105.525.933**	**347.774.495**	**6.548.335**		**1.459.848.763**	**1.483.827.751**	**1.510.782.691**	**1.543.465.027**
11.90	**PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA**	**1.105.525.933**	**295.181.098**	**6.548.335**		**1.407.255.366**	**1.430.891.790**	**1.457.461.582**	**1.489.676.937**
027.01.DQ	**Program Perlindungan Sosial**		**74.500.000**			**74.500.000**	**75.720.270**	**77.091.987**	**78.755.158**
8002	Pengelolaan DTSEN untuk Bantuan dan Pemberdayaan Sosial		74.500.000			74.500.000	75.720.270	77.091.987	78.755.158
027.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.105.525.933**	**220.681.098**	**6.548.335**		**1.332.755.366**	**1.355.171.520**	**1.380.369.595**	**1.410.921.779**
6287	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		807.272			807.272	2.655.757	2.696.383	2.745.640
6288	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	1.105.525.933	214.087.952	6.548.335		1.326.162.220	1.344.013.068	1.368.986.390	1.399.266.078
6289	Pengelolaan Organisasi dan SDM		4.649.004			4.649.004	6.822.449	6.969.829	7.148.514
6290	Legislasi dan Litigasi		1.136.870			1.136.870	1.680.246	1.716.993	1.761.547
11.09	**LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL**		**49.293.397**			**49.293.397**	**49.570.497**	**49.882.046**	**50.259.792**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 027

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027.01.DQ	**Program Perlindungan Sosial**		**49.293.397**			**49.293.397**	**49.570.497**	**49.882.046**	**50.259.792**
6897	Pembinaan Lembaga dan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial		49.293.397			49.293.397	49.570.497	49.882.046	50.259.792
11.08	**BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**3.300.000**			**3.300.000**	**3.365.464**	**3.439.063**	**3.528.298**
027.01.DQ	**Program Perlindungan Sosial**		**3.300.000**			**3.300.000**	**3.365.464**	**3.439.063**	**3.528.298**
6975	Koordinasi Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		3.300.000			3.300.000	3.365.464	3.439.063	3.528.298
027.02	**Inspektorat Jenderal**	**26.037.301**	**22.278.768**			**48.316.069**	**42.523.264**	**43.453.208**	**44.580.760**
11	**FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL**	**26.037.301**	**12.269.118**			**38.306.419**	**32.315.027**	**33.021.728**	**33.878.595**
11.90	**PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA**	**26.037.301**	**12.269.118**			**38.306.419**	**32.315.027**	**33.021.728**	**33.878.595**
027.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**26.037.301**	**12.269.118**			**38.306.419**	**32.315.027**	**33.021.728**	**33.878.595**
6291	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		6.703.251			6.703.251			
6292	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal		104.000			104.000	199.071	203.424	208.704
6293	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal	26.037.301	4.995.361			31.032.662	31.653.455	32.345.689	33.185.013
6294	Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal		245.656			245.656	237.270	242.458	248.749
6295	Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal		220.850			220.850	225.231	230.157	236.129
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**10.009.650**			**10.009.650**	**10.208.237**	**10.431.480**	**10.702.165**
10.02	**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**		**10.009.650**			**10.009.650**	**10.208.237**	**10.431.480**	**10.702.165**
027.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**10.009.650**			**10.009.650**	**10.208.237**	**10.431.480**	**10.702.165**
7938	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Sekolah Rakyat		10.009.650			10.009.650	10.208.237	10.431.480	10.702.165
027.03	**Ditjen Pemberdayaan Sosial**	**328.557.494**	**148.640.460**		**100.875.000**	**578.072.954**	**588.164.091**	**599.507.526**	**613.261.267**
11	**FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL**	**328.557.494**	**148.640.460**		**100.875.000**	**578.072.954**	**588.164.091**	**599.507.526**	**613.261.267**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 027

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.03	**PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL KELUARGA PAHLAWAN, PERINTIS KEMERDEKAAN**		**8.284.599**		**300.000**	**8.584.599**	**8.700.030**	**8.829.817**	**8.987.178**
027.03.DQ	**Program Perlindungan Sosial**		**8.284.599**		**300.000**	**8.584.599**	**8.700.030**	**8.829.817**	**8.987.178**
6273	Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan		8.284.599		300.000	8.584.599	8.700.030	8.829.817	8.987.178
11.90	**PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA**	**328.557.494**	**140.355.861**		**100.575.000**	**569.488.355**	**579.464.061**	**590.677.709**	**604.274.089**
027.03.DQ	**Program Perlindungan Sosial**		**120.077.540**		**100.575.000**	**220.652.540**	**223.965.376**	**227.689.318**	**232.204.540**
6274	Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu		99.740.040			99.740.040	101.019.120	102.456.935	104.200.263
6276	Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil		6.437.500		24.575.000	31.012.500	31.504.802	32.058.196	32.729.175
7998	Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial Ekonomi		13.900.000		76.000.000	89.900.000	91.441.454	93.174.187	95.275.102
027.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**328.557.494**	**20.278.321**			**348.835.815**	**355.498.685**	**362.988.391**	**372.069.549**
6296	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemberdayaan Sosial		421.752			421.752	1.522.326	1.555.617	1.595.985
6297	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pemberdayaan Sosial	328.557.494	19.074.380			347.631.874	353.178.658	360.617.629	369.637.266
6298	Pengelolaan Organisasi dan SDM Pemberdayaan Sosial		385.609			385.609	393.255	401.856	412.283
6299	Legislasi dan Litigasi Pemberdayaan Sosial		396.580			396.580	404.446	413.289	424.015
027.04	**Ditjen Rehabilitasi Sosial**	**648.377.503**	**587.197.738**		**328.062.400**	**1.563.637.641**	**1.580.739.648**	**1.599.965.994**	**1.623.277.568**
11	**FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL**	**648.377.503**	**587.197.738**		**328.062.400**	**1.563.637.641**	**1.580.739.648**	**1.599.965.994**	**1.623.277.568**
11.90	**PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA**	**648.377.503**	**330.792.462**		**99.816.000**	**1.078.985.965**	**1.090.780.348**	**1.104.039.416**	**1.120.115.770**
027.04.DQ	**Program Perlindungan Sosial**		**126.961.000**		**99.816.000**	**226.777.000**	**228.142.300**	**229.677.273**	**231.538.395**
6277	Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan		69.714.500		48.864.000	118.578.500	119.943.800	121.478.773	123.339.895
7992	Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHIV		57.246.500		50.952.000	108.198.500	108.198.500	108.198.500	108.198.500
027.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**648.377.503**	**203.831.462**			**852.208.965**	**862.638.048**	**874.362.143**	**888.577.375**
6300	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rehabilitasi Sosial		1.095.238			1.095.238	2.167.723	2.216.102	2.274.753

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 027

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6301	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Rehabilitasi Sosial	648.377.503	197.925.064			846.302.567	855.281.385	866.854.643	880.887.005
6302	Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial		3.715.060			3.715.060	4.074.054	4.155.391	4.254.001
6303	Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial		1.096.100			1.096.100	1.114.886	1.136.007	1.161.616
11.01	**PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT**		**96.881.476**		**93.047.200**	**189.928.676**	**192.232.159**	**194.821.885**	**197.961.875**
027.04.DQ	**Program Perlindungan Sosial**		**96.881.476**		**93.047.200**	**189.928.676**	**192.232.159**	**194.821.885**	**197.961.875**
6278	Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas		96.881.476		93.047.200	189.928.676	192.232.159	194.821.885	197.961.875
11.04	**PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA**		**82.792.800**		**68.371.200**	**151.164.000**	**152.727.934**	**154.486.255**	**156.618.203**
027.04.DQ	**Program Perlindungan Sosial**		**82.792.800**		**68.371.200**	**151.164.000**	**152.727.934**	**154.486.255**	**156.618.203**
6279	Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak		82.792.800		68.371.200	151.164.000	152.727.934	154.486.255	156.618.203
11.02	**PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA**		**76.731.000**		**66.828.000**	**143.559.000**	**144.999.207**	**146.618.438**	**148.581.720**
027.04.DQ	**Program Perlindungan Sosial**		**76.731.000**		**66.828.000**	**143.559.000**	**144.999.207**	**146.618.438**	**148.581.720**
6280	Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia		76.731.000		66.828.000	143.559.000	144.999.207	146.618.438	148.581.720
027.05	**Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**2.964.074.134**	**297.508.235**		**72.577.608.020**	**75.839.190.389**	**77.340.718.651**	**79.028.566.434**	**81.075.052.529**
11	**FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL**	**2.964.074.134**	**297.508.235**		**72.577.608.020**	**75.839.190.389**	**77.340.718.651**	**79.028.566.434**	**81.075.052.529**
11.08	**BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**202.488.881**		**28.777.608.020**	**28.980.096.901**	**29.552.161.200**	**30.195.211.014**	**30.974.897.729**
027.05.DQ	**Program Perlindungan Sosial**		**202.488.881**		**28.777.608.020**	**28.980.096.901**	**29.552.161.200**	**30.195.211.014**	**30.974.897.729**
6281	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana		122.064.252		67.608.020	189.672.272	191.613.486	193.795.633	196.441.434
6282	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan		80.424.629		28.710.000.000	28.790.424.629	29.360.547.714	30.001.415.381	30.778.456.295
11.90	**PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA**	**2.964.074.134**	**95.019.354**		**43.800.000.000**	**46.859.093.488**	**47.788.557.451**	**48.833.355.420**	**50.100.154.800**
027.05.DQ	**Program Perlindungan Sosial**		**70.145.217**		**43.800.000.000**	**43.870.145.217**	**44.740.379.589**	**45.718.598.312**	**46.904.671.510**
7993	Pelayanan Akses Jaminan Sosial		1.021.780			1.021.780	1.042.050	1.064.839	1.092.470

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 027

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7994	Pelayanan Penghargaan Pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan		6.334.052			6.334.052	6.346.285	6.360.037	6.376.711
7997	Pelaksanaan Bantuan Program Sembako		62.789.385		43.800.000.000	43.862.789.385	44.732.991.254	45.711.173.436	46.897.202.329
027.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**2.964.074.134**	**24.874.137**			**2.988.948.271**	**3.048.177.862**	**3.114.757.108**	**3.195.483.290**
6304	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial		458.000			458.000	1.478.812	1.511.131	1.550.319
6305	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.964.074.134	22.404.537			2.986.478.671	3.045.459.038	3.111.989.678	3.192.656.918
6306	Pengelolaan Organisasi dan SDM Perlindungan dan Jaminan Sosial		1.363.600			1.363.600	867.166	877.005	888.939
6307	Legislasi dan Litigasi Perlindungan dan Jaminan Sosial		648.000			648.000	372.846	379.294	387.114
	JUMLAH RM	**5.692.925.318**	**4.891.225.607**	**843.319.204**	**73.006.245.420**	**84.433.715.549**	**86.020.222.827**	**87.811.038.853**	**89.982.372.088**
	JUMLAH PNBP		**6.040.617**		**300.000**	**6.340.617**	**6.460.446**	**6.595.172**	**6.758.520**
	TOTAL JUMLAH	**5.692.925.318**	**4.897.266.224**	**843.319.204**	**73.006.545.420**	**84.440.056.166**	**86.026.683.273**	**87.817.634.025**	**89.989.130.608**

SK No 154278 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**2.331.147.394**	**9.218.748.069**	**1.450.104.537**		**13.000.000.000**	**13.205.619.941**	**13.436.753.830**	**13.716.999.531**
032.01	**Sekretariat Jenderal**	**110.390.941**	**452.143.973**	**78.026.049**		**640.560.963**	**651.169.642**	**663.095.325**	**677.555.007**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**110.390.941**	**452.143.973**	**78.026.049**		**640.560.963**	**651.169.642**	**663.095.325**	**677.555.007**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**110.390.941**	**452.143.973**	**78.026.049**		**640.560.963**	**651.169.642**	**663.095.325**	**677.555.007**
032.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**110.390.941**	**452.143.973**	**78.026.049**		**640.560.963**	**651.169.642**	**663.095.325**	**677.555.007**
2322	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama		23.626.470			23.626.470	23.926.537	24.263.903	24.672.960
2323	Pengelolaan Organisasi dan SDM		13.203.782			13.203.782	13.203.782	13.203.782	13.203.782
2325	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN		36.500.779			36.500.779	36.949.121	37.453.131	38.064.253
2328	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, Umum, serta Pengadaan Barang dan Jasa	110.390.941	314.750.604	45.665.318		470.806.863	479.049.326	488.314.981	499.549.415
2329	Pengelolaan Data dan Informasi		23.400.839	32.066.731		55.467.570	56.301.526	57.238.998	58.375.662
6453	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan		36.961.499	294.000		37.255.499	37.989.758	38.815.178	39.815.980
7939	Analisis Kebijakan Strategis Kelautan dan Perikanan		3.700.000			3.700.000	3.749.592	3.805.352	3.872.955
032.02	**Inspektorat Jenderal**	**41.126.165**	**53.720.405**	**4.032.123**		**98.878.693**	**99.911.736**	**101.072.993**	**102.480.990**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**41.126.165**	**53.720.405**	**4.032.123**		**98.878.693**	**99.911.736**	**101.072.993**	**102.480.990**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**41.126.165**	**53.720.405**	**4.032.123**		**98.878.693**	**99.911.736**	**101.072.993**	**102.480.990**
032.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**41.126.165**	**53.720.405**	**4.032.123**		**98.878.693**	**99.911.736**	**101.072.993**	**102.480.990**
2335	Pengawasan Akuntablitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP		44.896.747			44.896.747	44.896.747	44.896.747	44.896.747
2336	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	41.126.165	8.823.658	4.032.123		53.981.946	55.014.989	56.176.246	57.584.243
032.03	**Ditjen Perikanan Tangkap**	**269.909.943**	**5.897.916.310**	**88.803.350**		**6.256.629.603**	**6.368.232.142**	**6.493.684.241**	**6.645.792.654**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**269.909.943**	**5.897.916.310**	**88.803.350**		**6.256.629.603**	**6.368.232.142**	**6.493.684.241**	**6.645.792.654**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**269.909.943**	**5.897.916.310**	**88.803.350**		**6.256.629.603**	**6.368.232.142**	**6.493.684.241**	**6.645.792.654**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032.03.HB	**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**		**5.761.949.869**	**72.135.171**		**5.834.085.040**	**5.937.529.292**	**6.053.810.200**	**6.194.798.737**
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan		530.551.426			530.551.426	530.636.852	530.732.919	530.849.389
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan		116.144.420	72.089.194		188.233.614	191.365.602	194.886.707	199.155.950
2339	Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan		8.850.000			8.850.000	8.982.853	9.132.200	9.313.283
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan		4.304.023	45.977		4.350.000	4.417.036	4.492.430	4.583.838
7940	Pengelolaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan		5.102.100.000			5.102.100.000	5.202.126.949	5.314.565.944	5.450.896.277
032.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**269.909.943**	**135.966.441**	**16.668.179**		**422.544.563**	**430.702.850**	**439.874.041**	**450.993.917**
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	269.909.943	135.966.441	16.668.179		422.544.563	430.702.850	439.874.041	450.993.917
032.04	**Ditjen Perikanan Budidaya**	**234.572.709**	**868.239.544**	**53.057.145**		**1.155.869.398**	**1.170.866.844**	**1.187.726.009**	**1.208.167.450**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**234.572.709**	**868.239.544**	**53.057.145**		**1.155.869.398**	**1.170.866.844**	**1.187.726.009**	**1.208.167.450**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**234.572.709**	**868.239.544**	**53.057.145**		**1.155.869.398**	**1.170.866.844**	**1.187.726.009**	**1.208.167.450**
032.04.HB	**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**		**746.909.789**	**51.057.145**		**797.966.934**	**806.928.307**	**817.002.098**	**829.216.371**
7021	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut		27.040.000	3.100.000		30.140.000	30.442.961	30.783.553	31.196.502
7022	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau		486.588.642	41.965.922		528.554.564	532.829.762	537.635.571	543.462.538
7023	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut		41.641.890	1.008.123		42.650.013	43.447.059	44.343.095	45.429.513
7024	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar		44.974.257	4.983.100		49.957.357	50.563.330	51.244.632	52.070.693
7941	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya		146.665.000			146.665.000	149.645.195	152.995.247	157.057.125
032.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**234.572.709**	**121.329.755**	**2.000.000**		**357.902.464**	**363.938.537**	**370.723.911**	**378.951.079**
2348	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	234.572.709	121.329.755	2.000.000		357.902.464	363.938.537	370.723.911	378.951.079
032.05	**Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**247.546.905**	**747.101.068**	**52.335.399**		**1.046.983.372**	**1.046.983.372**	**1.046.983.372**	**1.046.983.372**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**247.546.905**	**747.101.068**	**52.335.399**		**1.046.983.372**	**1.046.983.372**	**1.046.983.372**	**1.046.983.372**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**247.546.905**	**747.101.068**	**52.335.399**		**1.046.983.372**	**1.046.983.372**	**1.046.983.372**	**1.046.983.372**
032.05.HB	**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**		**679.983.640**	**51.025.399**		**731.009.039**	**731.009.039**	**731.009.039**	**731.009.039**
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP		636.075.309	51.025.399		687.100.708	687.100.708	687.100.708	687.100.708
2351	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan		12.550.000			12.550.000	12.550.000	12.550.000	12.550.000
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		27.697.646			27.697.646	27.697.646	27.697.646	27.697.646
2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan		3.660.685			3.660.685	3.660.685	3.660.685	3.660.685
032.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**247.546.905**	**67.117.428**	**1.310.000**		**315.974.333**	**315.974.333**	**315.974.333**	**315.974.333**
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	247.546.905	67.117.428	1.310.000		315.974.333	315.974.333	315.974.333	315.974.333
032.06	**Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**	**86.378.910**	**189.303.846**	**341.487**		**276.024.243**	**279.305.464**	**282.994.069**	**287.466.438**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**86.378.910**	**189.303.846**	**341.487**		**276.024.243**	**279.305.464**	**282.994.069**	**287.466.438**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**86.378.910**	**189.303.846**	**341.487**		**276.024.243**	**279.305.464**	**282.994.069**	**287.466.438**
032.06.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**157.008.513**	**291.487**		**157.300.000**	**158.368.715**	**159.570.163**	**161.026.895**
2357	Pemasaran, Akses, dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan		55.650.000	200.000		55.850.000	56.753.966	57.770.133	59.002.221
2358	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan		11.500.000			11.500.000	11.513.516	11.528.717	11.547.152
5279	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan		8.008.513	91.487		8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
7025	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan		68.989.400			68.989.400	69.009.776	69.032.693	69.060.474
7026	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan		12.860.600			12.860.600	12.991.457	13.138.620	13.317.048
032.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**86.378.910**	**32.295.333**	**50.000**		**118.724.243**	**120.936.749**	**123.423.906**	**126.439.543**
2361	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	86.378.910	32.295.333	50.000		118.724.243	120.936.749	123.423.906	126.439.543
032.07	**Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut**	**111.812.806**	**364.315.650**	**919.300.000**		**1.395.428.456**	**1.422.710.128**	**1.453.377.689**	**1.490.561.569**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	**FUNGSI EKONOMI**	**111.812.806**	**320.335.650**	**918.740.000**		**1.350.888.456**	**1.377.437.074**	**1.407.280.382**	**1.443.464.864**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**111.812.806**	**320.335.650**	**918.740.000**		**1.350.888.456**	**1.377.437.074**	**1.407.280.382**	**1.443.464.864**
032.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**111.812.806**	**32.615.650**			**144.428.456**	**147.137.531**	**150.182.992**	**153.875.540**
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	111.812.806	32.615.650			144.428.456	147.137.531	150.182.992	153.875.540
032.07.HB	**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**		**287.720.000**	**918.740.000**		**1.206.460.000**	**1.230.299.543**	**1.257.097.390**	**1.289.589.324**
2363	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan		282.760.000	918.740.000		1.201.500.000	1.225.254.166	1.251.955.980	1.284.331.476
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		1.960.000			1.960.000	1.985.887	2.015.011	2.050.319
7942	Pengelolaan Jasa Bahari		3.000.000			3.000.000	3.059.490	3.126.399	3.207.529
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		**43.980.000**	**560.000**		**44.540.000**	**45.273.054**	**46.097.307**	**47.096.705**
05.04	**KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM**		**43.980.000**	**560.000**		**44.540.000**	**45.273.054**	**46.097.307**	**47.096.705**
032.07.FD	**Program Kualitas Lingkungan Hidup**		**43.980.000**	**560.000**		**44.540.000**	**45.273.054**	**46.097.307**	**47.096.705**
2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil		42.690.000	560.000		43.250.000	43.973.643	44.787.310	45.773.870
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		1.290.000			1.290.000	1.299.411	1.309.997	1.322.835
032.08	**Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut**	**50.000.000**	**138.804.543**	**11.155.799**		**199.960.342**	**203.065.153**	**206.548.855**	**210.772.827**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**50.000.000**	**138.804.543**	**11.155.799**		**199.960.342**	**203.065.153**	**206.548.855**	**210.772.827**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**50.000.000**	**138.804.543**	**11.155.799**		**199.960.342**	**203.065.153**	**206.548.855**	**210.772.827**
032.08.HB	**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**		**99.771.543**	**3.838.799**		**103.610.342**	**105.116.966**	**106.804.079**	**108.849.685**
7943	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil		21.236.876	755.224		21.992.100	22.323.904	22.690.232	23.134.397
7944	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut		42.810.425	2.389.575		45.200.000	46.053.422	47.012.837	48.176.097
7945	Pembinaan Penataan Ruang Laut		27.715.645	194.000		27.909.645	28.062.272	28.233.881	28.441.964
7946	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut		8.008.597	500.000		8.508.597	8.677.368	8.867.129	9.097.227

SK No 154274 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**50.000.000**	**39.033.000**	**7.317.000**		**96.350.000**	**97.948.187**	**99.744.776**	**101.923.142**
7947	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	50.000.000	39.033.000	7.317.000		96.350.000	97.948.187	99.744.776	101.923.142
032.12	**Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**	**972.938.000**	**367.553.192**	**58.816.573**		**1.399.307.765**	**1.424.901.215**	**1.453.671.749**	**1.488.555.428**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**139.135.500**	**33.686.307**		**172.821.807**	**176.167.604**	**179.928.862**	**184.489.314**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**		**139.135.500**	**33.686.307**		**172.821.807**	**176.167.604**	**179.928.862**	**184.489.314**
032.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**139.135.500**	**33.686.307**		**172.821.807**	**176.167.604**	**179.928.862**	**184.489.314**
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan		139.135.500	33.686.307		172.821.807	176.167.604	179.928.862	184.489.314
04	**FUNGSI EKONOMI**	**972.938.000**	**228.417.692**	**25.130.266**		**1.226.485.958**	**1.248.733.611**	**1.273.742.887**	**1.304.066.114**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**972.938.000**	**228.417.692**	**25.130.266**		**1.226.485.958**	**1.248.733.611**	**1.273.742.887**	**1.304.066.114**
032.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**972.938.000**	**159.501.329**	**200.000**		**1.132.639.329**	**1.153.052.376**	**1.175.999.259**	**1.203.821.887**
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	972.938.000	145.501.329	200.000		1.118.639.329	1.139.052.376	1.161.999.259	1.189.821.887
4345	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan		14.000.000			14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
032.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**68.916.363**	**24.930.266**		**93.846.629**	**95.681.235**	**97.743.628**	**100.244.227**
2375	Pelatihan Kelautan dan Perikanan		34.873.103	24.230.266		59.103.369	60.271.898	61.585.508	63.178.220
7020	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		22.443.260	100.000		22.543.260	22.967.541	23.444.510	24.022.822
7948	Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		11.600.000	600.000		12.200.000	12.441.796	12.713.610	13.043.185
032.13	**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**	**206.471.015**	**139.649.538**	**184.236.612**		**530.357.165**	**538.474.245**	**547.599.528**	**558.663.796**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**206.471.015**	**139.649.538**	**184.236.612**		**530.357.165**	**538.474.245**	**547.599.528**	**558.663.796**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**206.471.015**	**139.649.538**	**184.236.612**		**530.357.165**	**538.474.245**	**547.599.528**	**558.663.796**
032.13.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**47.363.388**	**179.936.612**		**227.300.000**	**231.065.732**	**235.298.985**	**240.431.715**

SK No 154273 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		25.163.388	179.936.612		205.100.000	208.649.165	212.661.161	217.525.643
7010	Manajemen Mutu		22.200.000			22.200.000	22.416.567	22.637.824	22.906.072
032.13.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**206.471.015**	**92.286.150**	**4.300.000**		**303.057.165**	**307.408.513**	**312.300.543**	**318.232.081**
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	206.471.015	92.286.150	4.300.000		303.057.165	307.408.513	312.300.543	318.232.081
	JUMLAH RM	**2.331.147.394**	**8.777.474.067**	**1.232.955.407**		**12.341.576.868**	**12.536.302.451**	**12.755.189.210**	**13.020.585.531**
	JUMLAH PNBP		**55.772.425**	**19.153.997**		**74.926.422**	**75.978.986**	**77.162.738**	**78.597.986**
	JUMLAH BLU		**209.336.137**	**8.206.541**		**217.542.678**	**221.439.152**	**225.819.285**	**231.130.103**
	JUMLAH PLN		**150.677.440**	**99.322.560**		**250.000.000**	**253.833.565**	**258.143.007**	**263.368.124**
	JUMLAH HLN		**25.488.000**	**2.512.000**		**28.000.000**	**28.366.664**	**28.778.829**	**29.278.573**
	JUMLAH SBSN			**87.954.032**		**87.954.032**	**89.699.123**	**91.660.761**	**94.039.214**
	TOTAL JUMLAH	**2.331.147.394**	**9.218.748.069**	**1.450.104.537**		**13.000.000.000**	**13.205.619.941**	**13.436.753.830**	**13.716.999.531**

SK No 154272 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 035

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
035	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**	**131.073.671**	**343.920.774**	**10.220.000**		**485.214.445**	**492.857.120**	**501.448.821**	**511.866.017**
035.01	**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**	**131.073.671**	**343.920.774**	**10.220.000**		**485.214.445**	**492.857.120**	**501.448.821**	**511.866.017**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**131.073.671**	**343.920.774**	**10.220.000**		**485.214.445**	**492.857.120**	**501.448.821**	**511.866.017**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**131.073.671**	**343.920.774**	**10.220.000**		**485.214.445**	**492.857.120**	**501.448.821**	**511.866.017**
035.01.CL	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**		**217.442.208**			**217.442.208**	**219.870.164**	**222.599.885**	**225.909.563**
2491	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital		4.500.000			4.500.000	4.555.916	4.618.782	4.695.006
2492	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal		2.000.000			2.000.000	2.036.323	2.077.168	2.126.693
2493	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi		42.247.000			42.247.000	42.483.627	42.749.642	43.072.180
2499	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga		2.500.000			2.500.000	2.522.341	2.547.467	2.577.929
2500	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional		2.500.000			2.500.000	2.549.594	2.605.353	2.672.955
2503	Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN		4.000.000			4.000.000	4.057.543	4.122.231	4.200.666
2510	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral		4.000.000			4.000.000	4.031.979	4.067.936	4.111.526
2513	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral		7.135.000			7.135.000	7.240.143	7.358.341	7.501.656
2514	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional		6.800.000			6.800.000	6.874.834	6.958.966	7.060.977
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil		3.500.000			3.500.000	3.540.694	3.586.449	3.641.925
2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor		2.500.000			2.500.000	2.526.045	2.555.335	2.590.856
4539	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan		2.165.000			2.165.000	2.206.847	2.253.901	2.310.950
4540	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik		2.112.000			2.112.000	2.141.037	2.173.691	2.213.290
4541	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi		3.097.500			3.097.500	3.121.861	3.149.251	3.182.465
4542	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan		3.097.500			3.097.500	3.122.366	3.150.326	3.184.228



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 035

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4543	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis		2.662.500			2.662.500	2.712.390	2.768.488	2.836.508
4544	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		2.500.000			2.500.000	2.540.064	2.585.111	2.639.741
4545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan		3.500.000			3.500.000	3.534.540	3.573.376	3.620.464
4546	Koordinasi Kebijakan Percepatan Investasi Dan Hilirisasi		3.000.000			3.000.000	3.058.239	3.123.722	3.203.115
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja		5.000.000			5.000.000	5.099.197	5.210.713	5.345.923
5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi		37.155.708			37.155.708	37.515.918	37.920.855	38.411.827
5266	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis		12.500.000			12.500.000	12.736.564	13.002.514	13.324.963
6920	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK		3.300.000			3.300.000	3.309.525	3.320.235	3.333.220
6921	Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK		3.612.500			3.612.500	3.612.500	3.612.500	3.612.500
6922	Koordinasi Peningkatan Investasi, Kerjasama, Komunikasi dan Sistem Informasi KEK		3.300.000			3.300.000	3.346.786	3.399.384	3.463.155
6923	Peningkatan Pelayanan Investasi dan Pengendalian pembangunan KEK		7.545.000			7.545.000	7.557.832	7.572.263	7.589.761
6924	Koordinasi Peraturan Perundang-undangan, Hukum, Organisasi Ketatalaksanaan dan Kepegawaian		3.212.500			3.212.500	3.212.500	3.212.500	3.212.500
7701	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata		3.500.000			3.500.000	3.538.628	3.582.056	3.634.711
7702	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka		3.500.000			3.500.000	3.555.008	3.616.856	3.691.844
7703	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata		4.000.000			4.000.000	4.068.609	4.145.743	4.239.265
7704	Peningkatan Layanan Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital		4.000.000			4.000.000	4.074.127	4.157.476	4.258.523
7706	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi		2.500.000			2.500.000	2.543.968	2.593.415	2.653.356
7707	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara		3.000.000			3.000.000	3.048.462	3.102.952	3.169.013
7708	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		2.500.000			2.500.000	2.545.659	2.597.002	2.659.254

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 035

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7709	Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi		3.000.000			3.000.000	3.058.204	3.123.643	3.202.981
7710	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan		2.500.000			2.500.000	2.546.339	2.598.441	2.661.612
7711	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral		4.500.000			4.500.000	4.566.379	4.641.006	4.731.487
7712	Peningkatan Layanan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi		5.000.000			5.000.000	5.077.576	5.164.795	5.270.538
035.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**131.073.671**	**126.478.566**	**10.220.000**		**267.772.237**	**272.986.956**	**278.848.936**	**285.956.454**
2486	Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama		18.353.092	800.000		19.153.092	19.497.007	19.883.647	20.352.425
2487	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi		4.000.000			4.000.000	4.059.037	4.125.424	4.205.913
2488	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Umum	109.915.785	67.601.543	7.920.000		185.437.328	189.083.204	193.181.534	198.150.683
2489	Pengawasan Inspektorat		1.224.750			1.224.750	1.249.039	1.276.360	1.309.475
2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian		7.500.000			7.500.000	7.646.391	7.810.962	8.010.504
4538	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan		10.650.000			10.650.000	10.858.374	11.092.624	11.376.646
6919	Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	21.157.886	17.149.181	1.500.000		39.807.067	40.593.904	41.478.385	42.550.808
	JUMLAH RM	**131.073.671**	**343.920.774**	**10.220.000**		**485.214.445**	**492.857.120**	**501.448.821**	**511.866.017**
	TOTAL JUMLAH	**131.073.671**	**343.920.774**	**10.220.000**		**485.214.445**	**492.857.120**	**501.448.821**	**511.866.017**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 036

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
036	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**	**85.589.547**	**135.619.385**	**15.500.000**		**236.708.932**	**240.529.676**	**244.824.971**	**250.032.924**
036.01	**Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**	**85.589.547**	**135.619.385**	**15.500.000**		**236.708.932**	**240.529.676**	**244.824.971**	**250.032.924**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**85.589.547**	**135.619.385**	**15.500.000**		**236.708.932**	**240.529.676**	**244.824.971**	**250.032.924**
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**85.589.547**	**135.619.385**	**15.500.000**		**236.708.932**	**240.529.676**	**244.824.971**	**250.032.924**
036.01.CL	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**		**50.145.620**			**50.145.620**	**50.577.235**	**51.062.698**	**51.651.300**
6338	Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial		7.450.000			7.450.000	7.524.073	7.607.384	7.708.404
6339	Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan		7.763.750			7.763.750	7.849.252	7.945.431	8.062.056
6340	Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan		7.550.000			7.550.000	7.639.247	7.739.629	7.861.327
6341	Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa		7.050.000			7.050.000	7.132.611	7.225.532	7.338.194
6342	Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan		7.663.750			7.663.750	7.743.781	7.833.795	7.942.924
7067	Koordinasi Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		12.668.120			12.668.120	12.688.271	12.710.927	12.738.395
036.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**85.589.547**	**85.473.765**	**15.500.000**		**186.563.312**	**189.952.441**	**193.762.273**	**198.381.624**
6336	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	85.589.547	85.473.765	15.500.000		186.563.312	189.952.441	193.762.273	198.381.624
	JUMLAH RM	**85.589.547**	**135.619.385**	**15.500.000**		**236.708.932**	**240.529.676**	**244.824.971**	**250.032.924**
	TOTAL JUMLAH	**85.589.547**	**135.619.385**	**15.500.000**		**236.708.932**	**240.529.676**	**244.824.971**	**250.032.924**

SK No 154309 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 041

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
041	**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**	**91.431.444**	**185.561.718**	**3.317.898**		**280.311.060**	**285.872.411**	**292.124.199**	**299.704.362**
041.01	**Kementerian Badan Usaha Milik Negara**	**91.431.444**	**185.561.718**	**3.317.898**		**280.311.060**	**285.872.411**	**292.124.199**	**299.704.362**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**91.431.444**	**185.561.718**	**3.317.898**		**280.311.060**	**285.872.411**	**292.124.199**	**299.704.362**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**91.431.444**	**185.561.718**	**3.317.898**		**280.311.060**	**285.872.411**	**292.124.199**	**299.704.362**
041.01.EI	**Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN**		**81.167.426**	**1.317.898**		**82.485.324**	**84.121.759**	**85.961.427**	**88.191.992**
4407	Pengembangan BUMN Sektor Industri Energi, Minyak dan Gas		640.000			640.000	652.694	666.968	684.276
4408	Pengembangan BUMN Sektor Industri Mineral dan Batubara		940.600			940.600	959.256	980.235	1.005.670
4409	Pengembangan BUMN Sektor Industri Kesehatan		640.000			640.000	652.692	666.967	684.272
4410	Pengembangan BUMN Sektor Industri Manufaktur		640.000			640.000	652.694	666.969	684.275
4412	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Keuangan		1.372.523			1.372.523	1.399.745	1.430.355	1.467.469
4413	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Infrastruktur		984.384			984.384	1.003.910	1.025.863	1.052.482
4414	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun		640.000			640.000	652.694	666.968	684.275
4415	Pengembangan BUMN Sektor Industri Perkebunan dan Kehutanan		1.137.108			1.137.108	1.159.664	1.185.023	1.215.774
4416	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Pariwisata dan Pendukung		840.000			840.000	856.660	875.394	898.111
4418	Peningkatan Pengeloaan Risiko BUMN		1.397.634			1.397.634	1.425.356	1.456.530	1.494.322
4419	Peningkatan Pengelolaan Hukum BUMN		3.250.000			3.250.000	3.314.471	3.386.959	3.474.843
4420	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Hukum		3.600.000			3.600.000	3.671.417	3.751.707	3.849.058
4421	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Keuangan BUMN		14.200.303			14.200.303	14.482.036	14.798.745	15.182.751
4828	Pengembangan BUMN Sektor Industri Pangan dan Pupuk		1.540.000			1.540.000	1.570.548	1.604.895	1.646.539
5810	Peningkatan Kualitas SDM BUMN		3.031.003			3.031.003	3.091.121	3.158.717	3.240.687
5811	Pengembangan Teknologi dan Informasi BUMN yang mendukung kinerja		41.314.520	1.317.898		42.632.418	43.478.274	44.429.108	45.581.974

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 041

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5813	Penatakelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN		2.500.000			2.500.000	2.549.597	2.605.353	2.672.958
6601	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media		840.000			840.000	856.663	875.397	898.113
6602	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Logistik		1.659.351			1.659.351	1.692.267	1.729.274	1.774.143
041.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**91.431.444**	**104.394.292**	**2.000.000**		**197.825.736**	**201.750.652**	**206.162.772**	**211.512.370**
2617	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian	91.431.444	15.335.623			106.767.067	108.885.382	111.266.610	114.153.804
2619	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Rumah Tangga, Layanan Administrasi dan Keuangan		66.406.322	1.850.000		68.256.322	69.610.554	71.132.877	72.978.666
2620	Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian BUMN		3.000.000			3.000.000	3.059.505	3.126.418	3.207.541
4406	Penyelenggaraan Layanan Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis Pimpinan		19.652.347	150.000		19.802.347	20.195.211	20.636.867	21.172.359
	JUMLAH RM	**91.431.444**	**185.561.718**	**3.317.898**		**280.311.060**	**285.872.411**	**292.124.199**	**299.704.362**
	TOTAL JUMLAH	**91.431.444**	**185.561.718**	**3.317.898**		**280.311.060**	**285.872.411**	**292.124.199**	**299.704.362**

SK No 154307 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 047

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
047	**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**102.039.166**	**112.073.651**			**214.112.817**	**218.306.602**	**223.021.424**	**228.737.999**
047.01	**Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**102.039.166**	**112.073.651**			**214.112.817**	**218.306.602**	**223.021.424**	**228.737.999**
11	**FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL**	**102.039.166**	**112.073.651**			**214.112.817**	**218.306.602**	**223.021.424**	**228.737.999**
11.05	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**99.076.034**	**74.737.593**			**173.813.627**	**177.194.894**	**180.996.095**	**185.604.913**
047.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**99.076.034**	**41.637.593**			**140.713.627**	**143.438.428**	**146.501.377**	**150.215.138**
2784	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran serta Keuangan	99.076.034				99.076.034	100.886.972	102.922.645	105.390.853
2785	Pengembangan SDM, Administrasi, dan Pengelolaan Penunjang Pelaksana Tugas Kementerian PP dan PA		41.637.593			41.637.593	42.551.456	43.578.732	44.824.285
047.01.DE	**Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak**		**33.100.000**			**33.100.000**	**33.756.466**	**34.494.718**	**35.389.775**
2787	Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI)		1.400.000			1.400.000	1.427.714	1.458.929	1.496.796
2790	Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum		2.050.000			2.050.000	2.090.646	2.136.372	2.191.801
2794	Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya		7.200.000			7.200.000	7.342.813	7.503.401	7.698.104
2795	Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi		6.300.000			6.300.000	6.424.985	6.565.492	6.735.858
2797	Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan		2.700.000			2.700.000	2.753.522	2.813.756	2.886.754
2800	Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO		2.200.000			2.200.000	2.243.621	2.292.694	2.352.177
6372	Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender		3.500.000			3.500.000	3.569.429	3.647.485	3.742.135
6375	Layanan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO		6.500.000			6.500.000	6.628.953	6.773.923	6.949.692
6376	Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan		1.250.000			1.250.000	1.274.783	1.302.666	1.336.458
11.04	**PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA**	**2.963.132**	**37.336.058**			**40.299.190**	**41.111.708**	**42.025.329**	**43.133.086**
047.01.DE	**Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak**		**35.970.000**			**35.970.000**	**36.666.576**	**37.449.863**	**38.399.593**
2805	Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus		1.519.999			1.519.999	1.548.730	1.581.071	1.620.284
2809	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan		2.550.001			2.550.001	2.600.564	2.657.430	2.726.387

SK No 154306 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 047

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan		8.400.000			8.400.000	8.566.622	8.753.979	8.981.129
2811	Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak		2.400.000			2.400.000	2.447.581	2.501.111	2.566.013
2812	Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan		3.150.000			3.150.000	3.212.475	3.282.728	3.367.908
6373	Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak		1.600.000			1.600.000	1.631.711	1.667.391	1.710.664
6377	Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak		450.000			450.000	458.919	468.950	481.121
6378	Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		15.900.000			15.900.000	16.199.974	16.537.203	16.946.087
047.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**2.963.132**	**1.366.058**			**4.329.190**	**4.445.132**	**4.575.466**	**4.733.493**
6379	Penyelenggaraan Kesekretariatan KPAI	2.963.132	1.366.058			4.329.190	4.445.132	4.575.466	4.733.493
	JUMLAH RM	**102.039.166**	**112.073.651**			**214.112.817**	**218.306.602**	**223.021.424**	**228.737.999**
	TOTAL JUMLAH	**102.039.166**	**112.073.651**			**214.112.817**	**218.306.602**	**223.021.424**	**228.737.999**

SK No 154305 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 048

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
048	**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**	**155.693.944**	**187.602.108**	**49.684.075**		**392.980.127**	**399.302.026**	**406.408.776**	**415.025.582**
048.01	**Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**	**155.693.944**	**187.602.108**	**49.684.075**		**392.980.127**	**399.302.026**	**406.408.776**	**415.025.582**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**155.693.944**	**187.602.108**	**49.684.075**		**392.980.127**	**399.302.026**	**406.408.776**	**415.025.582**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**155.693.944**	**187.602.108**	**49.684.075**		**392.980.127**	**399.302.026**	**406.408.776**	**415.025.582**
048.01.CO	**Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN**		**94.970.000**	**44.550.000**		**139.520.000**	**141.209.485**	**143.108.845**	**145.411.791**
4350	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik		550.000	800.000		1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6189	Perumusan Kebijakan PANRB		11.210.874			11.210.874	11.332.073	11.468.353	11.633.583
6191	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan		15.898.702			15.898.702	16.103.038	16.332.792	16.611.372
6193	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana		13.187.064			13.187.064	13.384.080	13.605.610	13.874.226
6194	Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur		15.705.715	41.500.000		57.205.715	58.233.204	59.388.228	60.788.668
6195	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik		14.710.000	1.250.000		15.960.000	16.099.445	16.256.217	16.446.297
7908	Koordinasi Percepatan Penerapan dan Evaluasi Transformasi Digital Pemerintah		23.707.645	1.000.000		24.707.645	24.707.645	24.707.645	24.707.645
048.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**155.693.944**	**92.632.108**	**5.134.075**		**253.460.127**	**258.092.541**	**263.299.931**	**269.613.791**
2818	Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB		765.670			765.670	779.413	794.881	813.633
6178	Pengelolaan Legislasi dan Litigasi		818.000			818.000	818.000	818.000	818.000
6179	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		9.191.264	105.000		9.296.264	9.481.527	9.689.806	9.942.331
6180	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	155.693.944	58.841.919	1.891.507		216.427.370	220.645.560	225.387.226	231.136.417
6181	Pengelolaan Sistem dan Teknologi		5.427.029	3.137.568		8.564.597	8.664.458	8.776.728	8.912.849
6182	Pengelolaan Organisasi dan SDM		11.054.155			11.054.155	11.169.512	11.299.219	11.456.490
6183	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		6.534.071			6.534.071	6.534.071	6.534.071	6.534.071

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 048

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH RM	155.693.944	187.602.108	49.684.075		392.980.127	399.302.026	406.408.776	415.025.582
	TOTAL JUMLAH	155.693.944	187.602.108	49.684.075		392.980.127	399.302.026	406.408.776	415.025.582

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 050

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INTELIJEN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050	**BADAN INTELIJEN NEGARA**	**1.127.973.393**	**7.918.814.551**	**7.623.212.056**		**16.670.000.000**	**16.960.821.999**	**17.287.731.278**	**17.684.103.089**
050.01	**Badan Intelijen Negara**	**1.127.973.393**	**7.918.814.551**	**7.623.212.056**		**16.670.000.000**	**16.960.821.999**	**17.287.731.278**	**17.684.103.089**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**1.127.973.393**	**7.918.814.551**	**7.623.212.056**		**16.670.000.000**	**16.960.821.999**	**17.287.731.278**	**17.684.103.089**
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**	**1.127.973.393**	**7.918.814.551**	**7.623.212.056**		**16.670.000.000**	**16.960.821.999**	**17.287.731.278**	**17.684.103.089**
050.01.BK	**Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara**		**6.672.102.134**	**6.322.762.056**		**12.994.864.190**	**13.235.112.562**	**13.505.172.593**	**13.832.615.680**
2854	Operasi Intelijen Luar Negeri		827.262.551			827.262.551	839.158.742	852.531.098	868.744.844
2855	Operasi Intelijen Dalam Negeri		2.235.622.868			2.235.622.868	2.267.771.556	2.303.909.467	2.347.726.061
2856	Operasi Kontra Intelijen		1.478.245.576			1.478.245.576	1.498.927.819	1.522.176.461	1.550.365.037
2857	Operasi Intelijen Ekonomi		420.153.414			420.153.414	426.195.293	432.986.900	441.221.604
2858	Operasi Intelijen Teknologi		550.145.399	5.422.762.056		5.972.907.455	6.093.261.409	6.228.549.674	6.392.584.342
2859	Operasi Intelijen Komunikasi dan Informasi		223.163.371			223.163.371	226.372.497	229.979.842	234.353.678
3074	Operasi Intelijen Siber		647.870.254	900.000.000		1.547.870.254	1.589.621.498	1.636.553.511	1.693.457.768
5235	Analisis dan Produksi Intelijen		140.835.095			140.835.095	142.860.322	145.136.865	147.897.129
6659	Operasi Intelijen Pengamanan Aparatur		148.803.606			148.803.606	150.943.426	153.348.775	156.265.217
050.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.127.973.393**	**1.246.712.417**	**1.300.450.000**		**3.675.135.810**	**3.725.709.437**	**3.782.558.685**	**3.851.487.409**
2851	Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Manajemen	1.127.973.393	1.042.176.750	1.300.350.000		3.470.500.143	3.563.006.433	3.615.370.113	3.678.860.159
2852	Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen		180.154.867	100.000		180.254.867	137.838.467	141.780.273	146.559.645
2853	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan		24.380.800			24.380.800	24.864.537	25.408.299	26.067.605
	JUMLAH RM	**1.127.973.393**	**7.918.814.551**	**4.929.348.220**		**13.976.136.164**	**14.213.509.213**	**14.480.337.247**	**14.803.861.593**
	JUMLAH PLN			**2.693.863.836**		**2.693.863.836**	**2.747.312.786**	**2.807.394.031**	**2.880.241.496**
	TOTAL JUMLAH	**1.127.973.393**	**7.918.814.551**	**7.623.212.056**		**16.670.000.000**	**16.960.821.999**	**17.287.731.278**	**17.684.103.089**

SK No 154302 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 051

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
051	**BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**	**298.652.690**	**442.104.937**	**2.754.789.453**		**3.495.547.080**	**3.552.195.309**	**3.615.872.859**	**3.693.080.797**
051.01	**Badan Siber dan Sandi Negara**	**298.652.690**	**442.104.937**	**2.754.789.453**		**3.495.547.080**	**3.552.195.309**	**3.615.872.859**	**3.693.080.797**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**298.652.690**	**442.104.937**	**2.754.789.453**		**3.495.547.080**	**3.552.195.309**	**3.615.872.859**	**3.693.080.797**
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**	**298.652.690**	**442.104.937**	**2.754.789.453**		**3.495.547.080**	**3.552.195.309**	**3.615.872.859**	**3.693.080.797**
051.01.BO	**Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara**		**305.901.665**	**2.754.789.453**		**3.060.691.118**	**3.109.130.717**	**3.163.581.019**	**3.229.601.066**
3121	Pengembangan SDM Keamanan Siber dan Sandi		9.300.889			9.300.889	9.300.889	9.300.889	9.300.889
3123	Pendidikan Profesional di Bidang Siber dan Sandi		25.470.484			25.470.484	25.470.484	25.470.484	25.470.484
3124	Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik		11.660.559			11.660.559	11.831.769	12.024.224	12.257.572
6653	Perumusan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi		5.342.987			5.342.987	5.342.987	5.342.987	5.342.987
6654	Penyelenggaraan Operasi Keamanan Siber dan Sandi		14.121.611	2.749.642.194		2.763.763.805	2.810.270.855	2.862.548.801	2.925.934.903
6655	Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		14.344.894			14.344.894	14.344.894	14.344.894	14.344.894
6656	Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Perekonomian		13.981.782			13.981.782	13.981.782	13.981.782	13.981.782
6895	Pemeliharaan Peralatan Keamanan Siber dan Sandi		208.384.427	5.147.259		213.531.686	215.293.025	217.272.926	219.673.523
6994	Penyelenggaraan Sertifikasi Teknologi Keamanan Siber dan Sandi		3.294.032			3.294.032	3.294.032	3.294.032	3.294.032
051.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**298.652.690**	**136.203.272**			**434.855.962**	**443.064.592**	**452.291.840**	**463.479.731**
3075	Penyelenggaraan Perencanaan dan Keuangan	298.652.690	6.898.160			305.550.850	311.524.617	318.239.665	326.381.545
3076	Penyelenggaraan Organisasi dan SDM		4.690.000			4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
3077	Penyelenggaraan Hukum dan Komunikasi Publik		14.408.676			14.408.676	14.609.006	14.834.205	15.107.264
3078	Penyelenggaraan Dukungan Administratif Bidang Kerumahtanggaan, Pengelolaan BMN, dan Layanan Pengadaan		89.933.548			89.933.548	91.675.866	93.634.390	96.009.069
3079	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Siber dan Sandi Negara		1.264.090			1.264.090	1.264.090	1.264.090	1.264.090

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 051

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3138	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi		16.959.068			16.959.068	17.248.004	17.572.794	17.966.596
7656	Penyelenggaraan Dukungan Layanan Perkantoran Sertifikasi Elektronik		2.049.730			2.049.730	2.053.009	2.056.696	2.061.167
	JUMLAH RM	**298.652.690**	**442.104.937**	**410.802.249**		**1.151.559.876**	**1.161.701.055**	**1.173.100.659**	**1.186.922.495**
	JUMLAH PLN			**2.343.987.204**		**2.343.987.204**	**2.390.494.254**	**2.442.772.200**	**2.506.158.302**
	TOTAL JUMLAH	**298.652.690**	**442.104.937**	**2.754.789.453**		**3.495.547.080**	**3.552.195.309**	**3.615.872.859**	**3.693.080.797**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 054

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
054	**BADAN PUSAT STATISTIK**	**3.142.739.655**	**3.605.732.695**	**178.512.696**		**6.926.985.046**	**7.054.832.095**	**7.198.598.256**	**7.372.902.804**
054.01	**Badan Pusat Statistik**	**3.142.739.655**	**3.605.732.695**	**178.512.696**		**6.926.985.046**	**7.054.832.095**	**7.198.598.256**	**7.372.902.804**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**3.142.739.655**	**3.605.732.695**	**178.512.696**		**6.926.985.046**	**7.054.832.095**	**7.198.598.256**	**7.372.902.804**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**3.142.739.655**	**3.605.732.695**	**178.512.696**		**6.926.985.046**	**7.054.832.095**	**7.198.598.256**	**7.372.902.804**
054.01.GG	**Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik**		**2.986.456.464**	**146.966.881**		**3.133.423.345**	**3.193.340.823**	**3.260.741.401**	**3.342.454.442**
2896	Pengembangan dan Analisis Statistik		46.259.807	20.000		46.279.807	47.108.487	48.040.675	49.170.401
2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik		23.157.774	35.000		23.192.774	23.725.745	24.326.166	25.054.483
2898	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran		11.654.659			11.654.659	11.888.564	12.155.026	12.477.577
2899	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi		16.060.873			16.060.873	16.382.152	16.746.827	17.188.718
2900	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei		1.712.795			1.712.795	1.745.953	1.784.410	1.830.550
2901	Pengembangan Sistem Informasi Statistik		11.495.007	146.211.881		157.706.888	160.833.523	164.348.424	168.610.052
2902	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi		2.140.870.334	700.000		2.141.570.334	2.182.079.278	2.227.623.811	2.282.842.964
2903	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga		120.630.571			120.630.571	122.973.477	125.611.490	128.808.983
2904	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi		48.808.456			48.808.456	49.774.276	50.862.627	52.181.876
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan		78.552.172			78.552.172	80.117.569	81.879.267	84.014.960
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat		245.313.770			245.313.770	250.099.588	255.481.781	262.007.483
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial		40.234.480			40.234.480	41.026.306	41.922.548	43.007.966
2908	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata		38.141.635			38.141.635	38.888.960	39.731.614	40.752.861
2909	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan		23.874.302			23.874.302	24.345.484	24.878.087	25.523.414

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 054

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		139.689.829			139.689.829	142.351.461	145.348.648	148.982.154
054.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**3.142.739.655**	**619.276.231**	**31.545.815**		**3.793.561.701**	**3.861.491.272**	**3.937.856.855**	**4.030.448.362**
2881	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran		16.801.596			16.801.596	16.801.596	16.801.596	16.801.596
2882	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum		6.087.090			6.087.090	6.087.090	6.087.090	6.087.090
2883	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian		15.775.422			15.775.422	15.775.422	15.775.422	15.775.422
2884	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	644.572.713	15.158.815			659.731.528	673.182.144	688.301.813	706.634.149
2885	Dukungan Manajemen BPS Lainnya		121.885.425	11.977.825		133.863.250	133.863.250	133.863.250	133.863.250
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	2.459.997.309	367.487.953	18.920.196		2.846.405.458	2.900.135.065	2.960.538.610	3.033.776.431
2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	15.237.780	48.909.254			64.147.034	64.183.317	64.224.109	64.273.565
2888	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	22.931.853	23.639.772	647.794		47.219.419	47.932.484	48.734.061	49.705.955
4203	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I		1.258.163			1.258.163	1.258.163	1.258.163	1.258.163
4204	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II		1.114.594			1.114.594	1.114.594	1.114.594	1.114.594
4205	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III		1.158.147			1.158.147	1.158.147	1.158.147	1.158.147
	JUMLAH RM	**3.142.739.655**	**3.594.391.076**	**177.829.902**		**6.914.960.633**	**7.042.569.120**	**7.186.067.099**	**7.360.046.483**
	JUMLAH PNBP		**11.341.619**	**682.794**		**12.024.413**	**12.262.975**	**12.531.157**	**12.856.321**
	TOTAL JUMLAH	**3.142.739.655**	**3.605.732.695**	**178.512.696**		**6.926.985.046**	**7.054.832.095**	**7.198.598.256**	**7.372.902.804**

SK No 154298 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 055

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
055	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS**	**619.424.267**	**1.908.927.602**	**68.648.131**		**2.597.000.000**	**2.613.999.816**	**2.633.109.568**	**2.656.279.778**
055.01	**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional**	**619.424.267**	**1.908.927.602**	**68.648.131**		**2.597.000.000**	**2.613.999.816**	**2.633.109.568**	**2.656.279.778**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**619.424.267**	**1.908.927.602**	**68.648.131**		**2.597.000.000**	**2.613.999.816**	**2.633.109.568**	**2.656.279.778**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**619.424.267**	**1.908.927.602**	**68.648.131**		**2.597.000.000**	**2.613.999.816**	**2.633.109.568**	**2.656.279.778**
055.01.CK	**Program Perencanaan Pembangunan Nasional**		**1.064.684.569**	**4.602.028**		**1.069.286.597**	**1.079.773.459**	**1.091.561.969**	**1.105.855.303**
6262	Perencanaan Makro Pembangunan		34.510.097	1.789.903		36.300.000	36.606.974	36.952.071	37.370.485
6263	Perencanaan Pembangunan Kewilayahan		38.250.000			38.250.000	38.521.887	38.827.577	39.198.237
6264	Perencanaan Pembangunan Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup		99.767.049	43.625		99.810.674	100.439.621	101.146.628	102.003.861
6265	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan		15.100.000			15.100.000	15.298.306	15.521.251	15.791.565
6266	Perencanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		56.820.000			56.820.000	57.094.852	57.875.933	58.822.977
6267	Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur		58.501.522			58.501.522	59.334.400	60.270.643	61.405.821
6268	Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan		32.250.000			32.250.000	32.736.470	33.283.351	33.946.434
6269	Perencanaan Pembangunan Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan		29.750.000			29.750.000	104.711.173	105.099.166	105.569.603
6270	Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan		55.300.000	1.450.000		56.750.000	57.660.741	58.684.524	59.925.846
6271	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang		488.280.793	1.017.500		489.298.293	401.900.325	406.860.424	412.874.459
6272	Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan		101.263.108			101.263.108	119.923.756	121.099.783	122.525.685
8009	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital		54.892.000	301.000		55.193.000	55.544.954	55.940.618	56.420.330
055.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**619.424.267**	**844.243.033**	**64.046.103**		**1.527.713.403**	**1.534.226.357**	**1.541.547.599**	**1.550.424.475**
6257	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		49.885.414	114.586		50.000.000	50.681.118	51.446.776	52.375.121

SK No 154297 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 055

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6258	Legislasi dan Litigasi		6.600.000			6.600.000	6.716.150	6.846.728	7.005.053
6259	Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana		114.450.536			114.450.536	99.748.150	100.082.694	100.488.325
6260	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	619.424.267	558.290.522	43.948.078		1.221.662.867	1.225.625.044	1.230.078.900	1.235.479.112
6261	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		9.000.000			9.000.000	9.119.852	9.254.611	9.418.004
8006	Pengelolaan Sumber Daya Manusia		36.000.000			36.000.000	51.210.314	51.446.726	51.733.371
8007	Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		30.105.185	19.894.815		50.000.000	50.752.723	51.598.864	52.624.796
8008	Pengelolaan Manajemen Internal Deputi		39.911.376	88.624		40.000.000	40.373.006	40.792.300	41.300.693
	JUMLAH RM	**619.424.267**	**1.702.227.627**	**67.643.131**		**2.389.295.025**	**2.403.986.739**	**2.420.501.983**	**2.440.526.397**
	JUMLAH PLN		**26.425.439**			**26.425.439**	**26.884.304**	**27.400.109**	**28.025.514**
	JUMLAH HLN		**180.274.536**	**1.005.000**		**181.279.536**	**183.128.773**	**185.207.476**	**187.727.867**
	TOTAL JUMLAH	**619.424.267**	**1.908.927.602**	**68.648.131**		**2.597.000.000**	**2.613.999.816**	**2.633.109.568**	**2.656.279.778**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
056	**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN**	**5.075.991.527**	**4.016.763.666**	**406.591.772**		**9.499.346.965**	**9.674.363.334**	**9.871.166.916**	**10.109.776.513**
056.01	**Sekretariat Jenderal**	**5.075.991.527**	**3.531.457.745**	**307.007.121**		**8.914.456.393**	**9.080.586.098**	**9.267.399.124**	**9.493.895.247**
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**	**5.075.991.527**	**3.531.457.745**	**307.007.121**		**8.914.456.393**	**9.080.586.098**	**9.267.399.124**	**9.493.895.247**
05.05	**TATA RUANG DAN PERTANAHAN**	**5.075.991.527**	**3.531.457.745**	**307.007.121**		**8.914.456.393**	**9.080.586.098**	**9.267.399.124**	**9.493.895.247**
056.01.CS	**Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan**		**1.809.344.980**	**110.393.021**		**1.919.738.001**	**1.950.260.082**	**1.984.609.940**	**2.026.252.208**
6411	Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang		1.178.560	101.809.708		102.988.268	103.787.142	104.685.333	105.774.400
6412	Survei dan Pemetaan Tematik		1.994.740			1.994.740	2.033.152	2.076.485	2.128.975
6413	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral		1.048.302.137			1.048.302.137	1.063.895.613	1.081.432.650	1.102.693.993
6415	Penetapan Hak Tanah dan Ruang		56.450.064			56.450.064	57.558.800	58.808.671	60.323.729
6417	Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah		514.483			514.483	524.662	536.141	550.055
6418	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		107.955.816			107.955.816	109.951.533	112.198.349	114.921.795
6419	Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)		38.635.086			38.635.086	39.333.416	40.120.179	41.073.895
6420	Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah		4.533.993			4.533.993	4.592.503	4.658.646	4.738.841
6421	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan		309.617	8.583.313		8.892.930	9.068.344	9.266.135	9.506.001
6422	Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan		3.405.095			3.405.095	3.465.292	3.533.404	3.615.928
6423	Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan		1.121.178			1.121.178	1.141.310	1.164.155	1.191.824
6424	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		5.913.989			5.913.989	6.027.211	6.156.699	6.312.939
6425	Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan		9.521.926			9.521.926	9.707.298	9.916.702	10.170.677
6426	Penanganan Sengketa Pertanahan		21.520.220			21.520.220	21.941.880	22.420.848	23.000.898
6427	Penanganan Perkara Pertanahan		43.823.301			43.823.301	44.685.577	45.660.062	46.841.463
7971	Pendaftaran Tanah dan Ruang Serta PPAT		445.981.093			445.981.093	454.010.043	463.041.908	473.991.679

SK No 154295 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7973	Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal		18.183.682			18.183.682	18.536.306	18.933.573	19.415.116
056.01.IC	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**		**33.620.977**	**18.350.711**		**51.971.688**	**52.997.613**	**54.156.487**	**55.560.430**
6670	Penertiban Pemanfaatan Ruang		4.350.000			4.350.000	4.436.249	4.533.271	4.650.905
6908	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang		2.975.900			2.975.900	3.034.364	3.100.418	3.180.502
7974	Nilai Tata Guna Tanah		26.295.077	18.350.711		44.645.788	45.527.000	46.522.798	47.729.023
056.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**5.075.991.527**	**1.688.491.788**	**178.263.389**		**6.942.746.704**	**7.077.328.403**	**7.228.632.697**	**7.412.082.609**
4401	Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat		65.224.398	1.063.000		66.287.398	67.344.640	68.533.091	69.974.078
5517	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	2.104.097.512	87.486.700	64.710		2.191.648.922	2.235.133.356	2.284.013.698	2.343.280.271
5519	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama		46.292.744	2.003.218		48.295.962	49.213.289	50.244.524	51.494.892
5521	Pengelolaan Administrasi Umum		104.152.062	9.000.000		113.152.062	114.341.633	116.798.451	119.777.286
5522	Pengembangan Data dan Informasi		143.803.870	94.910.313		238.714.183	244.472.333	249.825.428	256.315.958
5523	Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum		5.419.734			5.419.734	5.520.565	5.633.966	5.771.474
5526	Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN	22.705.358	18.967.214	1.579.189		43.251.761	44.109.751	45.074.412	46.244.005
5527	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	2.949.188.657	1.202.632.548	68.212.959		4.220.034.164	4.301.250.318	4.392.566.609	4.503.282.127
8069	Pembinaan Sumber Daya Manusia		3.367.205	195.000		3.562.205	3.562.205	3.562.205	3.562.205
8070	Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko		11.145.313	1.235.000		12.380.313	12.380.313	12.380.313	12.380.313
056.02	**Inspektorat Jenderal**		**27.253.171**	**940.500**		**28.193.671**	**28.700.539**	**29.270.437**	**29.961.438**
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		**27.253.171**	**940.500**		**28.193.671**	**28.700.539**	**29.270.437**	**29.961.438**
05.05	**TATA RUANG DAN PERTANAHAN**		**27.253.171**	**940.500**		**28.193.671**	**28.700.539**	**29.270.437**	**29.961.438**
056.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**27.253.171**	**940.500**		**28.193.671**	**28.700.539**	**29.270.437**	**29.961.438**

SK No 154294 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko		11.209.605	940.500		12.150.105	12.357.220	12.590.074	12.872.402
6667	Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko		16.043.566			16.043.566	16.343.319	16.680.363	17.089.036
056.03	**Direktorat Jenderal Tata Ruang**		**187.766.351**	**16.500.000**		**204.266.351**	**206.177.497**	**208.325.940**	**210.930.896**
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		**187.766.351**	**16.500.000**		**204.266.351**	**206.177.497**	**208.325.940**	**210.930.896**
05.05	**TATA RUANG DAN PERTANAHAN**		**187.766.351**	**16.500.000**		**204.266.351**	**206.177.497**	**208.325.940**	**210.930.896**
056.03.IC	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**		**162.771.734**	**16.500.000**		**179.271.734**	**181.019.959**	**182.985.260**	**185.368.158**
5538	Perencanaan Tata Ruang Nasional		6.307.306	16.500.000		22.807.306	22.807.306	22.807.306	22.807.306
5539	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang		14.860.087			14.860.087	14.860.087	14.860.087	14.860.087
6668	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah		141.604.341			141.604.341	143.352.566	145.317.867	147.700.765
056.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**24.994.617**			**24.994.617**	**25.157.538**	**25.340.680**	**25.562.738**
5536	Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)		24.994.617			24.994.617	25.157.538	25.340.680	25.562.738
056.04	**Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang**		**60.313.617**	**23.182.353**		**83.495.970**	**84.726.189**	**86.109.150**	**87.785.960**
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		**60.313.617**	**23.182.353**		**83.495.970**	**84.726.189**	**86.109.150**	**87.785.960**
05.05	**TATA RUANG DAN PERTANAHAN**		**60.313.617**	**23.182.353**		**83.495.970**	**84.726.189**	**86.109.150**	**87.785.960**
056.04.CS	**Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan**		**49.762.357**	**14.065.991**		**63.828.348**	**64.668.366**	**65.612.686**	**66.757.644**
5543	Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang		9.241.028	7.975.965		17.216.993	17.242.309	17.270.779	17.305.295
5544	Survei dan Pemetaan Tematik		9.573.965	6.090.026		15.663.991	15.864.629	16.090.194	16.363.677
5546	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral		30.947.364			30.947.364	31.561.428	32.251.713	33.088.672
056.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**10.551.260**	**9.116.362**		**19.667.622**	**20.057.823**	**20.496.464**	**21.028.316**
5542	Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)		10.551.260	9.116.362		19.667.622	20.057.823	20.496.464	21.028.316
056.05	**Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah**		**23.919.755**	**330.000**		**24.249.755**	**24.724.725**	**25.258.728**	**25.906.229**

SK No 154293 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		**23.919.755**	**330.000**		**24.249.755**	**24.724.725**	**25.258.728**	**25.906.229**
05.05	**TATA RUANG DAN PERTANAHAN**		**23.919.755**	**330.000**		**24.249.755**	**24.724.725**	**25.258.728**	**25.906.229**
056.05.CS	**Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan**		**16.328.885**			**16.328.885**	**16.648.512**	**17.007.869**	**17.443.606**
5549	Penetapan Hak Tanah dan Ruang		2.024.731			2.024.731	2.064.887	2.110.044	2.164.799
7975	Pendaftaran Tanah dan Ruang Serta PPAT		5.012.585			5.012.585	5.110.708	5.221.021	5.354.797
7976	Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan		2.140.535			2.140.535	2.181.800	2.228.201	2.284.466
7977	Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal		7.151.034			7.151.034	7.291.117	7.448.603	7.639.544
056.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**7.590.870**	**330.000**		**7.920.870**	**8.076.213**	**8.250.859**	**8.462.623**
5548	Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)		7.590.870	330.000		7.920.870	8.076.213	8.250.859	8.462.623
056.06	**Direktorat Jenderal Penataan Agraria**		**25.700.009**	**777.275**		**26.477.284**	**26.975.368**	**27.535.374**	**28.214.381**
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		**25.700.009**	**777.275**		**26.477.284**	**26.975.368**	**27.535.374**	**28.214.381**
05.05	**TATA RUANG DAN PERTANAHAN**		**25.700.009**	**777.275**		**26.477.284**	**26.975.368**	**27.535.374**	**28.214.381**
056.06.CS	**Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan**		**18.847.317**	**619.675**		**19.466.992**	**19.838.432**	**20.256.041**	**20.762.396**
5551	Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)		7.372.562	100.000		7.472.562	7.620.792	7.787.451	7.989.530
5554	Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah		2.724.494	519.675		3.244.169	3.293.790	3.349.584	3.417.236
5557	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		8.750.261			8.750.261	8.923.850	9.119.006	9.355.630
056.06.IC	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**		**1.979.861**			**1.979.861**	**2.006.720**	**2.036.926**	**2.073.544**
7978	Nilai Tata Guna Tanah		1.979.861			1.979.861	2.006.720	2.036.926	2.073.544
056.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**4.872.831**	**157.600**		**5.030.431**	**5.130.216**	**5.242.407**	**5.378.441**
5553	Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)		4.872.831	157.600		5.030.431	5.130.216	5.242.407	5.378.441
056.07	**Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan**		**17.577.072**	**55.366.701**		**72.943.773**	**74.390.928**	**76.017.775**	**77.990.340**

SK No 154292 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		**17.577.072**	**55.366.701**		**72.943.773**	**74.390.928**	**76.017.775**	**77.990.340**
05.05	**TATA RUANG DAN PERTANAHAN**		**17.577.072**	**55.366.701**		**72.943.773**	**74.390.928**	**76.017.775**	**77.990.340**
056.07.CS	**Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan**		**8.056.666**	**54.445.962**		**62.502.628**	**63.742.653**	**65.136.636**	**66.826.848**
4403	Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah		1.759.516			1.759.516	1.794.418	1.833.657	1.881.241
5556	Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan		1.892.007			1.892.007	1.929.530	1.971.726	2.022.893
5563	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan		4.405.143	54.445.962		58.851.105	60.018.705	61.331.253	62.922.714
056.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**9.520.406**	**920.739**		**10.441.145**	**10.648.275**	**10.881.139**	**11.163.492**
5559	Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)		9.520.406	920.739		10.441.145	10.648.275	10.881.139	11.163.492
056.08	**Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang**		**90.368.745**			**90.368.745**	**92.153.574**	**94.160.125**	**96.593.042**
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		**90.368.745**			**90.368.745**	**92.153.574**	**94.160.125**	**96.593.042**
05.05	**TATA RUANG DAN PERTANAHAN**		**90.368.745**			**90.368.745**	**92.153.574**	**94.160.125**	**96.593.042**
056.08.CS	**Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan**		**24.998.513**			**24.998.513**	**25.494.447**	**26.051.989**	**26.727.989**
5569	Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan		10.090.610			10.090.610	10.290.782	10.515.833	10.788.692
5570	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		14.907.903			14.907.903	15.203.665	15.536.156	15.939.297
056.08.IC	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**		**48.394.672**			**48.394.672**	**49.346.814**	**50.417.218**	**51.715.086**
5567	Penertiban Pemanfaatan Ruang		26.272.336			26.272.336	26.785.610	27.362.624	28.062.263
5568	Pengendalian Pemanfaatan Ruang		22.122.336			22.122.336	22.561.204	23.054.594	23.652.823
056.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**16.975.560**			**16.975.560**	**17.312.313**	**17.690.918**	**18.149.967**
5565	Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)		16.975.560			16.975.560	17.312.313	17.690.918	18.149.967
056.09	**Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan**		**22.777.636**	**916.907**		**23.694.543**	**24.164.562**	**24.693.024**	**25.333.769**
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		**22.777.636**	**916.907**		**23.694.543**	**24.164.562**	**24.693.024**	**25.333.769**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.05	**TATA RUANG DAN PERTANAHAN**		**22.777.636**	**916.907**		**23.694.543**	**24.164.562**	**24.693.024**	**25.333.769**
056.09.CS	**Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan**		**16.021.701**			**16.021.701**	**16.339.535**	**16.696.870**	**17.130.130**
4404	Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan		5.518.024			5.518.024	5.627.485	5.750.555	5.899.773
5573	Penanganan Sengketa Pertanahan		3.979.531			3.979.531	4.058.476	4.147.232	4.254.844
5576	Penanganan Perkara Pertanahan		6.524.146			6.524.146	6.653.574	6.799.083	6.975.513
056.09.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**6.755.935**	**916.907**		**7.672.842**	**7.825.027**	**7.996.154**	**8.203.639**
5572	Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)		6.755.935	916.907		7.672.842	7.825.027	7.996.154	8.203.639
056.10	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**29.629.565**	**1.570.915**		**31.200.480**	**31.763.854**	**32.397.239**	**33.165.211**
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		**29.629.565**	**1.570.915**		**31.200.480**	**31.763.854**	**32.397.239**	**33.165.211**
05.05	**TATA RUANG DAN PERTANAHAN**		**29.629.565**	**1.570.915**		**31.200.480**	**31.763.854**	**32.397.239**	**33.165.211**
056.10.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**29.629.565**	**1.570.915**		**31.200.480**	**31.763.854**	**32.397.239**	**33.165.211**
7979	Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Kompetensi Teknis		4.241.671			4.241.671	4.325.813	4.420.416	4.535.120
7980	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen dan Kepemimpinan		11.922.774			11.922.774	12.153.192	12.412.227	12.726.303
7981	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi		4.139.338	350.000		4.489.338	4.528.924	4.573.446	4.627.431
7982	Dukungan Manajemen (BPSDM)		9.325.782	1.220.915		10.546.697	10.755.925	10.991.150	11.276.357
	JUMLAH RM	**5.075.991.527**	**1.399.594.064**			**6.475.585.591**	**6.603.682.545**	**6.746.998.642**	**6.920.766.069**
	JUMLAH PNBP		**1.757.504.295**	**166.689.079**		**1.924.193.374**	**1.956.595.549**	**1.993.763.884**	**2.038.819.393**
	JUMLAH PLN		**859.665.307**	**239.902.693**		**1.099.568.000**	**1.114.085.240**	**1.130.404.390**	**1.150.191.051**
	TOTAL JUMLAH	**5.075.991.527**	**4.016.763.666**	**406.591.772**		**9.499.346.965**	**9.674.363.334**	**9.871.166.916**	**10.109.776.513**

SK No 154290 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 057

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
057	**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**213.114.514**	**158.401.680**	**6.483.343**		**377.999.537**	**409.270.222**	**426.376.582**	**440.382.036**
057.01	**Perpustakaan Nasional**	**213.114.514**	**158.401.680**	**6.483.343**		**377.999.537**	**409.270.222**	**426.376.582**	**440.382.036**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**213.114.514**	**92.282.148**	**286.202**		**305.682.864**	**328.036.113**	**344.415.902**	**357.590.401**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**213.114.514**	**92.282.148**	**286.202**		**305.682.864**	**328.036.113**	**344.415.902**	**357.590.401**
057.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**213.114.514**	**92.282.148**	**286.202**		**305.682.864**	**328.036.113**	**344.415.902**	**357.590.401**
3067	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno	8.473.855	4.956.348			13.430.203	26.954.584	29.628.345	32.535.527
3069	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	4.985.217	3.067.232			8.052.449	9.297.043	10.601.746	11.895.072
4377	Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional	199.655.442	1.890.399			201.545.841	207.539.931	218.153.737	224.960.397
4378	Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional		1.882.415			1.882.415	1.882.415	1.882.415	1.882.415
4379	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional		71.983.754	286.202		72.269.956	73.703.854	75.315.692	77.270.013
5204	Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional		125.000			125.000	125.000	125.000	125.000
6873	Pengelolaan Data dan Informasi		8.377.000			8.377.000	8.533.286	8.708.967	8.921.977
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**66.119.532**	**6.197.141**		**72.316.673**	**81.234.109**	**81.960.680**	**82.791.635**
10.04	**PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL**		**66.119.532**	**6.197.141**		**72.316.673**	**81.234.109**	**81.960.680**	**82.791.635**
057.01.DM	**Program Perpustakaan dan Literasi**		**66.119.532**	**6.197.141**		**72.316.673**	**81.234.109**	**81.960.680**	**82.791.635**
3004	Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3005	Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan		1.682.570			1.682.570	1.682.570	1.682.570	1.682.570
3009	Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan		2.839.052			2.839.052	2.839.052	2.839.052	2.839.052
4380	Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan		251.945			251.945	251.945	251.945	251.945
4381	Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan		848.055			848.055	848.055	848.055	848.055
4382	Pengelolaan Data dan Informasi		2.291.000	6.181.000		8.472.000	8.472.000	8.472.000	8.472.000

SK No 154289 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 057

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4384	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus		40.134.000			40.134.000	47.952.201	48.563.160	49.285.649
4385	Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi		5.389.990			5.389.990	5.477.190	5.503.826	5.520.396
4386	Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca dan Literasi		10.675.000			10.675.000	11.686.558	11.774.998	11.866.244
5272	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta		7.920	16.141		24.061	24.538	25.074	25.724
	JUMLAH RM	**213.114.514**	**158.259.261**	**6.181.000**		**377.554.775**	**408.817.630**	**425.915.187**	**439.909.968**
	JUMLAH PNBP		**142.419**	**302.343**		**444.762**	**452.592**	**461.395**	**472.068**
	TOTAL JUMLAH	**213.114.514**	**158.401.680**	**6.483.343**		**377.999.537**	**409.270.222**	**426.376.582**	**440.382.036**

SK No 154329 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
059	**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**	**778.860.047**	**7.426.345.558**	**419.105.141**		**8.624.310.746**	**17.123.959.588**	**17.653.683.239**	**9.497.887.658**
059.01	**Sekretariat Jenderal**	**128.106.649**	**296.111.824**	**5.826.544**		**430.045.017**	**434.663.645**	**439.855.447**	**446.150.408**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**128.106.649**	**296.111.824**	**5.826.544**		**430.045.017**	**434.663.645**	**439.855.447**	**446.150.408**
04.09	**TELEKOMUNIKASI**	**128.106.649**	**296.111.824**	**5.826.544**		**430.045.017**	**434.663.645**	**439.855.447**	**446.150.408**
059.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**128.106.649**	**281.314.824**	**5.623.544**		**415.045.017**	**419.663.645**	**424.855.447**	**431.150.408**
4492	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal	128.106.649	245.592.057	1.371.144		375.069.850	379.688.478	384.880.280	391.175.241
4493	Pengelolaan Organisasi dan SDM		6.252.698			6.252.698	6.252.698	6.252.698	6.252.698
4513	Legislasi dan Litigasi		3.402.698			3.402.698	3.402.698	3.402.698	3.402.698
4518	Pengelolaan administrasi dan kerjasama internasional		5.479.114			5.479.114	5.479.114	5.479.114	5.479.114
4519	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		7.112.563	105.000		7.217.563	7.217.563	7.217.563	7.217.563
4520	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital		4.067.698	150.000		4.217.698	4.217.698	4.217.698	4.217.698
4521	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi		7.305.298	3.797.400		11.102.698	11.102.698	11.102.698	11.102.698
7426	Pengembangan Analisis Kebijakan Strategis bidang Komunikasi dan Digital		2.102.698	200.000		2.302.698	2.302.698	2.302.698	2.302.698
059.01.GH	**Program Komunikasi Publik dan Media**		**14.797.000**	**203.000**		**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**
4511	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik		2.797.000	203.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4523	Penguatan Lembaga Pers dan Jurnalis		7.000.000			7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4524	Peningkatan Kualitas Konten Penyiaran		5.000.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
059.02	**Inspektorat Jenderal**	**26.276.607**	**20.400.963**			**46.677.570**	**47.504.481**	**48.434.011**	**49.561.059**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**26.276.607**	**20.400.963**			**46.677.570**	**47.504.481**	**48.434.011**	**49.561.059**
04.09	**TELEKOMUNIKASI**	**26.276.607**	**20.400.963**			**46.677.570**	**47.504.481**	**48.434.011**	**49.561.059**
059.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**26.276.607**	**20.400.963**			**46.677.570**	**47.504.481**	**48.434.011**	**49.561.059**

SK No 154328 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4491	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Inspektorat Jenderal	26.276.607	17.930.127			44.206.734	45.033.645	45.963.175	47.090.223
4497	Pengelolaan Resiko, Pengandalian dan Pengawasan Internal		2.470.836			2.470.836	2.470.836	2.470.836	2.470.836
059.06	**Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**115.250.343**	**131.499.013**	**542.670**		**247.292.026**	**620.371.366**	**621.371.366**	**622.371.366**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**85.266.867**	**104.360.711**			**189.627.578**	**620.371.366**	**621.371.366**	**622.371.366**
04.09	**TELEKOMUNIKASI**	**85.266.867**	**104.360.711**			**189.627.578**	**620.371.366**	**621.371.366**	**622.371.366**
059.06.GK	**Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital**		**31.611.099**			**31.611.099**	**421.269.250**	**422.269.250**	**423.269.250**
7448	Pengembangan keterampilan digital dasar dan literasi digital bagi masyarakat		22.172.487			22.172.487	195.976.000	195.976.000	195.976.000
7449	Pengembangan Talenta Digital Masyarakat		3.244.727			3.244.727	165.511.500	165.511.500	165.511.500
7450	Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur dan Kepemimpinan Digital		5.193.885			5.193.885	29.205.200	30.205.200	31.205.200
7451	Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi		1.000.000			1.000.000	30.576.550	30.576.550	30.576.550
059.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**85.266.867**	**72.749.612**			**158.016.479**	**199.102.116**	**199.102.116**	**199.102.116**
4485	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital	85.266.867	72.749.612			158.016.479	199.102.116	199.102.116	199.102.116
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**29.983.476**	**27.138.302**	**542.670**		**57.664.448**			
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**29.983.476**	**27.138.302**	**542.670**		**57.664.448**			
059.06.GK	**Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital**		**15.552.657**	**542.670**		**16.095.327**			
7657	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Komdigi		15.552.657	542.670		16.095.327			
059.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**29.983.476**	**11.585.645**			**41.569.121**			
6995	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Pendidikan Tinggi	29.983.476	11.585.645			41.569.121			
059.07	**Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik**	**53.469.329**	**285.123.242**	**4.074.160**		**342.666.731**	**344.247.334**	**346.024.132**	**348.178.459**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**53.469.329**	**285.123.242**	**4.074.160**		**342.666.731**	**344.247.334**	**346.024.132**	**348.178.459**
04.09	**TELEKOMUNIKASI**	**53.469.329**	**285.123.242**	**4.074.160**		**342.666.731**	**344.247.334**	**346.024.132**	**348.178.459**

SK No 154327 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
059.07.GH	**Program Komunikasi Publik dan Media**		**258.893.571**	**4.074.160**		**262.967.731**	**262.967.731**	**262.967.731**	**262.967.731**
7431	Penguatan Komunikasi dan Informasi Publik Nasional		90.908.319	3.045.000		93.953.319	113.894.943	113.894.943	113.894.943
7432	Pengembangan Ekosistem Media, Kehumasan, dan Kemitraan Komunikasi Publik		167.985.252	1.029.160		169.014.412	149.072.788	149.072.788	149.072.788
059.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**53.469.329**	**26.229.671**			**79.699.000**	**81.279.603**	**83.056.401**	**85.210.728**
4486	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media	53.469.329	26.229.671			79.699.000	81.279.603	83.056.401	85.210.728
059.08	**Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi**	**11.004.322**	**4.431.485.269**	**3.975.000**		**4.446.464.591**	**12.542.584.367**	**13.030.523.499**	**4.824.277.624**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**11.004.322**	**4.431.485.269**	**3.975.000**		**4.446.464.591**	**12.542.584.367**	**13.030.523.499**	**4.824.277.624**
04.09	**TELEKOMUNIKASI**	**11.004.322**	**4.431.485.269**	**3.975.000**		**4.446.464.591**	**12.542.584.367**	**13.030.523.499**	**4.824.277.624**
059.08.GL	**Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital**		**4.196.712.718**			**4.196.712.718**	**12.224.116.273**	**12.712.055.406**	**4.557.246.507**
7438	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal		4.196.712.718			4.196.712.718	12.224.116.273	12.712.055.406	4.557.246.507
059.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**11.004.322**	**234.772.551**	**3.975.000**		**249.751.873**	**318.468.094**	**318.468.093**	**267.031.117**
4490	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum BAKTI	11.004.322	234.772.551	3.975.000		249.751.873	318.468.094	318.468.093	267.031.117
059.09	**Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital**	**303.653.192**	**764.678.751**	**77.927.965**		**1.146.259.908**	**1.161.751.821**	**1.185.722.165**	**1.214.785.550**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**303.653.192**	**764.678.751**	**77.927.965**		**1.146.259.908**	**1.161.751.821**	**1.185.722.165**	**1.214.785.550**
04.09	**TELEKOMUNIKASI**	**303.653.192**	**764.678.751**	**77.927.965**		**1.146.259.908**	**1.161.751.821**	**1.185.722.165**	**1.214.785.550**
059.09.GL	**Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital**		**286.640.988**	**51.950.767**		**338.591.755**	**344.512.582**	**351.170.187**	**359.242.224**
7433	Akselerasi pengembangan infrastruktur digital		24.928.138	430.000		25.358.138	25.696.104	26.076.069	26.536.775
7434	Penataan Spektrum Frekuensi Radio dan Standarisasi Perangkat Digital		20.915.956	1.662.444		22.578.400	22.938.547	23.343.450	23.834.404
7435	Pengembangan Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital		21.553.236	1.404.468		22.957.704	23.335.837	23.760.958	24.276.424
7436	Layanan Publik Bidang Sumber Daya dan Perangkat Digital		48.112.916	38.571.681		86.684.597	88.395.738	90.319.391	92.651.774

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7437	Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Digital dan Kualitas Layanan Telekomunikasi		171.130.742	9.882.174		181.012.916	184.146.356	187.670.319	191.942.847
059.09.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**303.653.192**	**478.037.763**	**25.977.198**		**807.668.153**	**817.239.239**	**834.551.978**	**855.543.326**
7427	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	303.653.192	478.037.763	25.977.198		807.668.153	817.239.239	834.551.978	855.543.326
059.10	**Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital**	**29.092.918**	**774.791.421**	**104.195.685**		**908.080.024**	**908.966.166**	**909.962.312**	**911.170.134**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**29.092.918**	**774.791.421**	**104.195.685**		**908.080.024**	**908.966.166**	**909.962.312**	**911.170.134**
04.09	**TELEKOMUNIKASI**	**29.092.918**	**774.791.421**	**104.195.685**		**908.080.024**	**908.966.166**	**909.962.312**	**911.170.134**
059.10.GK	**Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital**		**741.357.799**	**104.195.685**		**845.553.484**	**845.553.484**	**845.553.484**	**845.553.484**
7440	Pengembangan Aplikasi dan infrastruktur digital Pemerintahan Terpadu		726.907.799	103.645.685		830.553.484	830.553.484	830.553.484	830.553.484
7441	Tata kelola teknologi pemerintah digital		9.450.000	550.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7442	Percepatan transformasi digital daerah		5.000.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
059.10.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**29.092.918**	**33.433.622**			**62.526.540**	**63.412.682**	**64.408.828**	**65.616.650**
7428	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	29.092.918	33.433.622			62.526.540	63.412.682	64.408.828	65.616.650
059.11	**Direktorat Jenderal Ekosistem Digital**	**66.254.239**	**505.577.954**	**25.805.598**		**597.637.791**	**602.024.996**	**606.956.677**	**612.936.256**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**66.254.239**	**505.577.954**	**25.805.598**		**597.637.791**	**602.024.996**	**606.956.677**	**612.936.256**
04.09	**TELEKOMUNIKASI**	**66.254.239**	**505.577.954**	**25.805.598**		**597.637.791**	**602.024.996**	**606.956.677**	**612.936.256**
059.11.GK	**Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital**		**320.224.566**	**21.530.598**		**341.755.164**	**342.100.770**	**342.489.309**	**342.960.401**
7443	Pengembangan Ekosistem untuk Startup Digital dan Gim Nasional		121.656.843	504.124		122.160.967	122.287.846	122.430.476	122.603.412
7444	Pemanfaatan dan Pengembangan Ekosistem AI dan Teknologi Baru		45.391.181	66.829		45.458.010	45.510.751	45.570.045	45.641.937
7445	Pengembangan Industri Pos dan Penyiaran		45.153.205	2.133.800		47.287.005	47.356.453	47.434.533	47.529.200
7446	Layanan Publik Bidang Pos Logistik, Penyiaran, Telekomunikasi, dan Informatika		52.636.000	5.167.000		57.803.000	57.899.538	58.008.073	58.139.670

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7447	Pengelolaan data dan pengendalian bidang ekosistem digital		55.387.337	13.658.845		69.046.182	69.046.182	69.046.182	69.046.182
059.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**66.254.239**	**185.353.388**	**4.275.000**		**255.882.627**	**259.924.226**	**264.467.368**	**269.975.855**
7429	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Ekosistem Digital	66.254.239	185.353.388	4.275.000		255.882.627	259.924.226	264.467.368	269.975.855
059.12	**Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital**	**45.752.448**	**216.677.121**	**196.757.519**		**459.187.088**	**461.845.412**	**464.833.630**	**468.456.802**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**45.752.448**	**216.677.121**	**196.757.519**		**459.187.088**	**461.845.412**	**464.833.630**	**468.456.802**
04.09	**TELEKOMUNIKASI**	**45.752.448**	**216.677.121**	**196.757.519**		**459.187.088**	**461.845.412**	**464.833.630**	**468.456.802**
059.12.GK	**Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital**		**180.755.985**	**196.757.519**		**377.513.504**	**378.568.029**	**379.753.417**	**381.190.682**
7453	Pengendalian di ruang digital		178.606.715	196.757.519		375.364.234	376.376.122	377.513.575	378.892.718
7455	Penyelenggaraan pengawasan aktivitas dan transaksi elektronik		2.149.270			2.149.270	2.191.907	2.239.842	2.297.964
059.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**45.752.448**	**35.921.136**			**81.673.584**	**83.277.383**	**85.080.213**	**87.266.120**
7430	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	45.752.448	35.921.136			81.673.584	83.277.383	85.080.213	87.266.120
	JUMLAH RM	**778.860.047**	**2.693.866.004**	**310.853.908**		**3.783.579.959**	**5.825.152.388**	**5.845.760.834**	**4.367.117.730**
	JUMLAH PNBP		**1.082.454.554**	**104.276.233**		**1.186.730.787**	**1.184.778.442**	**1.202.489.827**	**1.223.964.392**
	JUMLAH BLU		**3.650.025.000**	**3.975.000**		**3.654.000.000**	**10.114.028.758**	**10.605.432.578**	**3.906.805.536**
	TOTAL JUMLAH	**778.860.047**	**7.426.345.558**	**419.105.141**		**8.624.310.746**	**17.123.959.588**	**17.653.683.239**	**9.497.887.658**

SK No 154323 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060	**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**	**60.160.738.683**	**33.759.051.280**	**52.130.210.037**		**146.050.000.000**	**147.153.660.007**	**148.394.327.583**	**149.898.612.400**
060.01	**Kepolisian Negara Republik Indonesia**	**60.160.738.683**	**33.759.051.280**	**52.130.210.037**		**146.050.000.000**	**147.153.660.007**	**148.394.327.583**	**149.898.612.400**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**60.160.738.683**	**33.759.051.280**	**52.130.210.037**		**146.050.000.000**	**147.153.660.007**	**148.394.327.583**	**149.898.612.400**
03.01	**KEPOLISIAN**	**60.160.738.683**	**33.759.051.280**	**52.130.210.037**		**146.050.000.000**	**147.153.660.007**	**148.394.327.583**	**149.898.612.400**
060.01.BP	**Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri**		**2.197.060.844**	**52.130.210.037**		**54.327.270.881**	**54.387.611.784**	**54.455.442.287**	**54.537.685.441**
3084	Pengembangan Peralatan Polri		277.982.260	50.293.359.215		50.571.341.475	50.615.711.478	50.666.721.359	50.728.569.960
4341	Pengadaan Polri		7.484.871			7.484.871	7.503.099	7.523.592	7.548.437
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras		1.452.664.313			1.452.664.313	1.460.302.764	1.468.890.826	1.479.303.513
5060	Pengkajian dan Strategi Sarpras		3.497.978			3.497.978	3.567.379	3.645.394	3.739.986
5061	Pengembangan Perbekalan Umum		454.300.892			454.300.892	460.438.782	467.338.537	475.704.403
5062	Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri		1.130.530	1.836.850.822		1.837.981.352	1.840.088.282	1.841.322.579	1.842.819.142
060.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**60.160.738.683**	**12.929.021.268**			**73.089.759.951**	**73.901.124.096**	**74.813.196.751**	**75.919.067.302**
3068	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri		40.757.724			40.757.724	41.415.946	42.156.004	43.053.299
3070	Penerangan Masyarakat		100.588.888			100.588.888	101.663.902	102.872.799	104.338.546
3071	Penyelenggaraan Teknologi Informasi		9.017.870			9.017.870	9.145.861	9.289.775	9.464.264
3072	Pelayanan Kesehatan Polri		3.129.464.128			3.129.464.128	3.167.608.403	3.210.486.375	3.262.475.169
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	60.160.738.683	9.229.627.835			69.390.366.518	70.156.076.451	71.016.824.728	72.060.465.576
3088	Pertanggungjawaban Profesi		25.403.773			25.403.773	25.749.114	26.137.721	26.608.962
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri		33.291.901			33.291.901	33.699.832	34.158.798	34.715.225
3090	Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri		27.006.393			27.006.393	27.383.256	27.807.374	28.321.616
3091	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan		91.547.201			91.547.201	93.023.736	94.684.160	96.697.342

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3149	Pengelolaan Multimedia		31.412.181			31.412.181	31.454.162	31.501.376	31.558.615
3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum		26.023.087			26.023.087	26.359.066	26.736.914	27.195.074
3155	Kerjasama dan Penyuluhan Hukum		16.836.669			16.836.669	17.061.416	17.314.491	17.621.290
4339	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Polri		17.409.550			17.409.550	17.726.913	18.083.856	18.516.646
4340	Penyusunan, Dokumentasi dan Informasi Hukum		2.223.041			2.223.041	2.267.144	2.316.722	2.376.839
5051	Penyusunan Kebijakan Polri		11.118.297			11.118.297	11.301.549	11.507.725	11.757.722
5052	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri		13.477.381			13.477.381	13.698.729	13.947.605	14.249.354
5053	Reformasi Birokrasi Polri		31.303.273			31.303.273	31.793.985	32.345.916	33.015.067
5054	Manajemen Anggaran		60.564.379			60.564.379	61.540.384	62.637.928	63.968.633
5055	Teknologi Komunikasi		116.648			116.648	118.961	121.563	124.718
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi		10.081.916			10.081.916	10.143.890	10.213.600	10.298.115
5057	Penyelenggaraan Kesejarahan, Museum dan Perpustakan Polri		6.014.216			6.014.216	6.133.536	6.267.670	6.430.307
5067	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri		15.734.917			15.734.917	15.757.860	15.783.651	15.814.923
060.01.BI	**Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana**		**3.535.735.259**			**3.535.735.259**	**3.594.065.809**	**3.659.638.708**	**3.739.144.425**
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana		535.147.204			535.147.204	543.185.656	552.223.078	563.180.738
3140	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana		65.729.021			65.729.021	67.003.763	68.436.894	70.174.537
3141	Penyelenggaraan Laboratrium Forensik		49.645.051			49.645.051	50.627.271	51.731.440	53.070.230
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum		975.861.587			975.861.587	989.591.993	1.005.026.957	1.023.741.546
3143	Penindakan Tindak Pidana Terorisme		824.837.217			824.837.217	841.202.808	859.599.153	881.904.401
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba		617.836.725			617.836.725	627.319.846	637.980.012	650.905.268
3145	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus		45.760.931			45.760.931	46.494.468	47.319.150	48.319.041

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi		119.170.354			119.170.354	122.671.052	126.606.367	131.377.809
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber		70.789.647			70.789.647	72.098.226	73.569.332	75.352.989
4342	Penindakan Tindak Pidana Perairan		25.236.641			25.236.641	25.668.009	26.153.010	26.741.052
4343	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas		54.794.967			54.794.967	55.721.352	56.762.956	58.025.891
5082	Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana		10.089.360			10.089.360	10.264.101	10.460.633	10.698.935
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu		58.213.573			58.213.573	59.292.179	60.504.822	61.975.128
5084	Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional		2.964.633			2.964.633	2.964.633	2.964.633	2.964.633
5085	Koordinasi dan Pengawasan PPNS		5.837.274			5.837.274	5.950.298	6.077.459	6.231.589
5086	Pengawasan Penyidikan		11.292.433			11.292.433	11.481.513	11.694.171	11.951.997
8050	Penindakan Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang		62.528.641			62.528.641	62.528.641	62.528.641	62.528.641
060.01.BQ	**Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**		**13.708.842.463**			**13.708.842.463**	**13.878.169.750**	**14.068.530.364**	**14.299.338.357**
3112	Analisis Keamanan		80.545.758			80.545.758	81.924.206	83.474.174	85.353.474
3114	Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik		218.477.617			218.477.617	222.628.752	227.297.144	232.957.309
3115	Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi		199.903.944			199.903.944	203.624.389	207.808.721	212.881.865
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya		207.968.687			207.968.687	211.862.066	216.240.809	221.549.766
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara		225.810.766			225.810.766	230.072.690	234.865.342	240.676.334
3120	Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban K/L		4.499.814			4.499.814	4.540.760	4.586.866	4.642.760
3122	Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Luar Negeri		18.698.929			18.698.929	19.069.929	19.486.972	19.992.627
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		3.081.321.445			3.081.321.445	3.122.300.533	3.168.369.864	3.224.227.987
3130	Penyelenggaraan Fungsi Samapta Polri		368.487.819			368.487.819	375.396.665	383.163.460	392.580.572

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Penyelenggaraan Fungsi Pamobvit Polri		682.398.569			682.398.569	691.762.347	702.288.445	715.051.154
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas		6.561.834.488			6.561.834.488	6.625.772.454	6.697.647.368	6.784.794.482
3134	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan		67.520.698			67.520.698	68.078.314	68.705.227	69.465.344
3135	Penyelenggaraan Kepolisian Udara		10.946.672			10.946.672	11.041.708	11.148.538	11.278.069
3150	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Khusus		189.820.039			189.820.039	193.047.351	196.675.228	201.073.957
5074	Misi Internasional		64.350.276			64.350.276	65.627.047	67.062.251	68.802.410
5076	Pembinaan Potensi Keamanan		897.975.759			897.975.759	913.600.274	931.165.667	952.463.321
5077	Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan		10.924.092			10.924.092	11.075.440	11.245.693	11.452.128
5078	Pengkajian dan Strategi Operasi Kepolisian		893.344			893.344	893.344	893.344	893.344
5079	Pembinaan Operasi Kepolisian		579.206.855			579.206.855	586.785.132	595.304.662	605.634.454
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian		55.831.888			55.831.888	56.682.478	57.638.642	58.797.974
5081	Penyelenggaraan Fungsi Polsatwa Polri		32.253.074			32.253.074	32.790.030	33.393.734	34.125.669
5087	Penanggulangan Keamanan dalam Negeri		149.171.930			149.171.930	149.593.841	150.068.213	150.643.357
060.01.BD	**Program Profesionalisme SDM Polri**		**1.388.391.446**			**1.388.391.446**	**1.392.688.568**	**1.397.519.473**	**1.403.376.875**
3096	Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDM Polri		104.946.667			104.946.667	106.142.786	107.487.744	109.118.496
3097	Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri		5.688.250			5.688.250	5.688.250	5.688.250	5.688.250
3098	Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolsian		32.192.881			32.192.881	32.192.881	32.192.881	32.192.881
3099	Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri		14.393.225			14.393.225	14.393.225	14.393.225	14.393.225
3100	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri		810.474.482			810.474.482	811.362.639	812.361.009	813.571.515
3104	Pengkajian dan Strategi SDM Polri		7.427.930			7.427.930	7.575.305	7.740.971	7.941.836
3105	Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri		66.692.223			66.692.223	67.984.344	69.436.890	71.198.053

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3107	Pengendalian Pegawai Polri		155.696.835			155.696.835	155.696.835	155.696.835	155.696.835
3108	Pembinaan Karier Personel Polri		27.635.427			27.635.427	28.139.241	28.705.590	29.392.299
3110	Pelayanan Psikologi Anggota Polri		14.373.880			14.373.880	14.643.416	14.946.432	15.313.839
5068	Pengkajian Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri		5.329.108			5.329.108	5.329.108	5.329.108	5.329.108
5069	Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri		6.818.272			6.818.272	6.818.272	6.818.272	6.818.272
5070	Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Polri		5.294.782			5.294.782	5.294.782	5.294.782	5.294.782
5071	Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri		20.285.660			20.285.660	20.285.660	20.285.660	20.285.660
5072	Pendidikan AKPOL		111.141.824			111.141.824	111.141.824	111.141.824	111.141.824
	JUMLAH RM	**60.160.738.683**	**22.223.842.677**	**47.186.633.538**		**129.571.214.898**	**130.503.783.927**	**131.552.121.522**	**132.823.209.826**
	JUMLAH PNBP		**8.968.250.082**	**2.010.460.611**		**10.978.710.693**	**11.074.404.690**	**11.181.981.694**	**11.312.416.709**
	JUMLAH BLU		**2.566.958.521**	**135.184.926**		**2.702.143.447**	**2.735.259.931**	**2.772.485.972**	**2.817.621.885**
	JUMLAH SBSN			**666.964.886**		**666.964.886**	**666.964.886**	**666.964.886**	**666.964.886**
	JUMLAH RMP			**1.676.332.207**		**1.676.332.207**	**1.709.592.314**	**1.746.979.551**	**1.792.310.927**
	TOTAL JUMLAH	**60.160.738.683**	**33.759.051.280**	**52.130.210.037**		**146.050.000.000**	**147.153.660.007**	**148.394.327.583**	**149.898.612.400**

SK No 154318 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 063

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
063	**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**	**1.050.074.969**	**895.428.226**	**301.539.963**		**2.247.043.158**	**2.285.988.599**	**2.329.768.475**	**2.382.850.792**
063.01	**Badan Pengawas Obat dan Makanan**	**1.050.074.969**	**895.428.226**	**301.539.963**		**2.247.043.158**	**2.285.988.599**	**2.329.768.475**	**2.382.850.792**
07	**FUNGSI KESEHATAN**	**1.050.074.969**	**895.428.226**	**301.539.963**		**2.247.043.158**	**2.285.988.599**	**2.329.768.475**	**2.382.850.792**
07.01	**OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN**	**1.050.074.969**	**895.428.226**	**301.539.963**		**2.247.043.158**	**2.285.988.599**	**2.329.768.475**	**2.382.850.792**
063.01.DR	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**		**411.576.267**	**296.692.963**		**708.269.230**	**714.603.193**	**721.723.415**	**730.356.531**
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		270.934.061	280.882.746		551.816.807	556.818.923	562.442.560	569.261.124
4117	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		5.952.163			5.952.163	5.952.163	5.952.163	5.952.163
4118	Intelijen Obat dan Makanan		4.729.902			4.729.902	4.729.902	4.729.902	4.729.902
4119	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan		5.250.386			5.250.386	5.272.861	5.298.133	5.328.776
4120	Pengawasan Produksi Pangan Olahan		7.401.000	99.000		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
4121	Pengawasan Kosmetik		5.305.000			5.305.000	5.335.415	5.369.611	5.411.072
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor		6.648.243	80.000		6.728.243	6.731.559	6.735.287	6.739.808
4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		5.521.951	70.000		5.591.951	5.609.584	5.629.412	5.653.455
4124	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan		14.166.284	200.000		14.366.284	14.422.638	14.486.001	14.562.827
4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor		4.596.677			4.596.677	4.616.488	4.638.767	4.665.779
4126	Registrasi Pangan Olahan		4.896.751	99.000		4.995.751	5.031.170	5.070.988	5.119.264
4127	Registrasi Obat		7.000.678	75.000		7.075.678	7.172.589	7.281.549	7.413.651
4128	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		6.842.000	98.000		6.940.000	6.965.123	6.993.376	7.027.628
4129	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		8.154.824	1.250.000		9.404.824	9.404.824	9.404.824	9.404.824
4130	Standardisasi Pangan Olahan		5.485.942			5.485.942	5.519.998	5.558.304	5.604.740
4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		6.409.844	1.429.546		7.839.390	7.839.390	7.839.390	7.839.390

SK No 154317 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 063

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4132	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan		6.859.400	90.000		6.949.400	7.905.152	8.978.849	10.280.686
4133	Pengujian Obat dan Makanan		15.395.846	12.289.671		27.685.517	27.720.099	27.758.984	27.806.127
4134	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan		6.214.667			6.214.667	6.214.667	6.214.667	6.214.667
4135	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan		1.990.656	30.000		2.020.656	2.020.656	2.020.656	2.020.656
6385	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos		5.974.300			5.974.300	5.974.300	5.974.300	5.974.300
6386	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber		5.845.692			5.845.692	5.845.692	5.845.692	5.845.692
063.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.050.074.969**	**483.851.959**	**4.847.000**		**1.538.773.928**	**1.571.385.406**	**1.608.045.060**	**1.652.494.261**
3158	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM		3.055.790			3.055.790	3.055.790	3.055.790	3.055.790
3159	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan		6.291.283	240.000		6.531.283	6.551.563	6.574.366	6.602.013
4110	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana		3.009.343			3.009.343	3.009.343	3.009.343	3.009.343
4112	Pengelolaan Sumber Daya Manusia		3.785.187			3.785.187	3.785.187	3.785.187	3.785.187
4113	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	5.787.888	11.604.590	45.000		17.437.478	17.596.996	17.776.326	17.993.754
4114	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	6.485.418	31.891.022	2.252.000		40.628.440	40.628.440	40.628.440	40.628.440
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	8.814.600	4.864.679			13.679.279	13.907.115	14.163.239	14.473.781
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II		2.050.000			2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1.028.987.063	417.300.065	2.310.000		1.448.597.128	1.480.800.972	1.517.002.369	1.560.895.953
	JUMLAH RM	**1.050.074.969**	**796.317.400**	**295.725.074**		**2.142.117.443**	**2.180.121.594**	**2.222.843.078**	**2.274.642.142**
	JUMLAH PNBP		**99.110.826**	**5.814.889**		**104.925.715**	**105.867.005**	**106.925.397**	**108.208.650**
	TOTAL JUMLAH	**1.050.074.969**	**895.428.226**	**301.539.963**		**2.247.043.158**	**2.285.988.599**	**2.329.768.475**	**2.382.850.792**

SK No 154316 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 064

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
064	**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**	**88.533.971**	**120.242.629**	**3.253.184**		**212.029.784**	**261.072.129**	**275.067.740**	**296.128.720**
064.01	**Lembaga Ketahanan Nasional RI**	**88.533.971**	**120.242.629**	**3.253.184**		**212.029.784**	**261.072.129**	**275.067.740**	**296.128.720**
02	**FUNGSI PERTAHANAN**	**88.533.971**	**120.242.629**	**3.253.184**		**212.029.784**	**261.072.129**	**275.067.740**	**296.128.720**
02.04	**LITBANG PERTAHANAN**	**88.533.971**	**120.242.629**	**3.253.184**		**212.029.784**	**261.072.129**	**275.067.740**	**296.128.720**
064.01.AI	**Program Pembinaan Ketahanan Nasional**		**56.127.571**	**2.902.255**		**59.029.826**	**99.178.581**	**109.584.202**	**126.098.853**
3190	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional		23.458.877			23.458.877	32.385.725	32.768.719	33.233.096
3191	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional		9.960.918			9.960.918	20.070.536	20.228.600	20.401.636
3192	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pendidikan Bidang Program Pendidikan		2.272.140			2.272.140	2.346.920	2.401.773	2.460.694
3194	Penyusunan Rencana dan Program Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan		250.000			250.000	304.576	379.411	465.808
3195	Penyusunan Rencana dan Pembinaan serta Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan		11.800.000			11.800.000	11.336.164	13.675.058	22.377.151
3197	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Training of Trainer (ToT) Nilai-nilai Kebangsaan		1.752.830			1.752.830	3.070.383	3.165.682	3.844.618
3198	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan		1.300.000			1.300.000	1.635.660	1.968.183	2.334.627
3199	Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Ideologi dan Politik		574.755			574.755	4.795.278	6.446.842	8.202.642
3200	Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam		574.755			574.755	5.480.286	6.446.807	8.202.620
3201	Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Sosial Budaya dan Demografi		1.649.927			1.649.927	9.231.560	12.384.301	12.542.228
3202	Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Pertahanan Keamanan dan Geografi		574.755			574.755	3.299.929	4.612.679	6.866.618
3203	Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Pengkajian Strategik		692.798			692.798	871.665	914.119	959.713

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 064

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6381	Pengukuran Ketahanan Nasional dan Kepemimpinan Tingkat Nasional		1.265.816	2.902.255		4.168.071	4.349.899	4.192.028	4.207.402
064.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**88.533.971**	**64.115.058**	**350.929**		**152.999.958**	**161.893.548**	**165.483.538**	**170.029.867**
3183	Pengelolaan Hubungan Masyarakat Lemhannas		1.798.162	60.000		1.858.162	1.869.684	1.882.643	1.898.354
3184	Pengelolaan Hubungan Kerja Sama dan Hukum		1.399.736			1.399.736	3.286.348	3.491.588	3.670.629
3185	Pengelolaan Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana		3.684.936			3.684.936	7.538.262	7.955.940	8.733.370
3186	Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lemhannas		1.693.894	290.929		1.984.823	1.989.650	1.995.078	2.001.659
3187	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Lemhannas	88.533.971	53.760.216			142.294.187	144.979.287	147.851.337	151.333.017
3189	Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Lemhanas		1.778.114			1.778.114	2.230.317	2.306.952	2.392.838
	JUMLAH RM	**88.533.971**	**120.242.629**	**3.253.184**		**212.029.784**	**261.072.129**	**275.067.740**	**296.128.720**
	TOTAL JUMLAH	**88.533.971**	**120.242.629**	**3.253.184**		**212.029.784**	**261.072.129**	**275.067.740**	**296.128.720**

SK No 154314 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 065

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
065	**KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**	**327.255.387**	**398.608.181**	**49.218.721**		**775.082.289**	**790.213.843**	**807.223.654**	**827.847.814**
065.01	**KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**	**327.255.387**	**398.608.181**	**49.218.721**		**775.082.289**	**790.213.843**	**807.223.654**	**827.847.814**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**327.255.387**	**398.608.181**	**49.218.721**		**775.082.289**	**790.213.843**	**807.223.654**	**827.847.814**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**327.255.387**	**398.608.181**	**49.218.721**		**775.082.289**	**790.213.843**	**807.223.654**	**827.847.814**
065.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**327.255.387**	**146.545.427**	**2.782.833**		**476.583.647**	**486.027.709**	**496.643.801**	**509.515.639**
3204	Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM		831.663			831.663	847.345	864.992	886.383
3205	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal	327.255.387	116.015.191	2.782.833		446.053.411	454.898.546	464.841.299	476.896.721
3208	Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.737.872			1.737.872	1.772.339	1.811.100	1.858.097
3210	Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM		1.203.301			1.203.301	1.227.167	1.254.004	1.286.546
6774	Penyempurnaan Produk Hukum dan Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal		1.205.847			1.205.847	1.229.759	1.256.651	1.289.259
6776	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat		23.668.423			23.668.423	24.134.046	24.657.461	25.292.093
7901	Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal		924.947			924.947	943.288	963.917	988.928
7902	Penatakelolaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi		958.183			958.183	975.219	994.377	1.017.612
065.01.ED	**Program Penanaman Modal dan Hilirisasi**		**252.062.754**	**46.435.888**		**298.498.642**	**304.186.134**	**310.579.853**	**318.332.175**
3213	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal		6.000.000			6.000.000	6.118.479	6.251.689	6.413.201
3214	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah		1.000.000			1.000.000	1.019.585	1.041.606	1.068.309
3215	Pemberdayaan Usaha Nasional		6.500.000			6.500.000	6.628.459	6.772.868	6.947.966
3216	Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal		60.896.301			60.896.301	62.104.277	63.462.200	65.108.655
3225	Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha		3.025.640			3.025.640	3.085.574	3.152.957	3.234.656

SK No 154313 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 065

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3226	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I		8.137.039			8.137.039	8.298.183	8.479.340	8.698.986
3227	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II		6.145.795			6.145.795	6.267.334	6.403.971	6.569.637
3228	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III		4.468.576			4.468.576	4.557.075	4.656.576	4.777.217
3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV		3.680.119			3.680.119	3.752.749	3.834.410	3.933.424
3230	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal		7.000.000			7.000.000	7.031.029	7.065.910	7.108.203
3231	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur		2.800.000			2.800.000	2.838.561	2.881.914	2.934.488
3233	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan		5.200.000			5.200.000	5.298.375	5.408.979	5.543.079
3234	Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)		600.000			600.000	611.800	625.072	641.164
5089	Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta		800.000			800.000	815.750	833.464	854.941
5264	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat		500.000			500.000	509.919	521.070	534.591
5265	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur		2.700.000			2.700.000	2.753.130	2.812.868	2.885.302
6481	Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha		500.000			500.000	509.916	521.068	534.587
6482	Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal		5.125.125			5.125.125	5.225.103	5.337.500	5.473.791
6483	Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal		7.917.121			7.917.121	8.073.099	8.248.477	8.461.108
6777	Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		10.000.000			10.000.000	10.198.409	10.421.439	10.691.859
6778	Promosi Wilayah Amerika dan Eropa		14.114.327			14.114.327	14.394.287	14.709.000	15.090.584
6779	Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika		7.440.135			7.440.135	7.587.660	7.753.507	7.954.590
6780	Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik		11.259.703			11.259.703	11.483.099	11.734.219	12.038.707
6781	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V		4.745.214			4.745.214	4.839.196	4.944.850	5.072.962
6782	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri		1.000.000			1.000.000	1.019.837	1.042.139	1.069.181
6783	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri		1.500.000			1.500.000	1.529.557	1.562.787	1.603.081

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 065

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6784	Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan		1.300.000			1.300.000	1.319.131	1.340.649	1.366.740
6785	Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		21.341.669	30.658.331		52.000.000	53.031.723	54.191.479	55.597.663
6786	Pengelolaan Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan		29.709.436	15.777.557		45.486.993	46.389.485	47.403.982	48.634.044
6787	Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal		3.136.194			3.136.194	3.179.834	3.228.899	3.288.394
7059	Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi		1.200.000			1.200.000	1.204.170	1.208.867	1.214.564
7060	Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batubara		2.900.000			2.900.000	2.936.053	2.976.596	3.025.776
7903	Perencanaan Makro Investasi		6.000.000			6.000.000	6.110.800	6.235.366	6.386.402
7904	Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Perikanan dan Kelautan		2.500.000			2.500.000	2.525.881	2.554.993	2.590.292
7905	Pengembangan Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi		920.360			920.360	938.615	959.142	984.031
	JUMLAH RM	**327.255.387**	**398.608.181**	**49.218.721**		**775.082.289**	**790.213.843**	**807.223.654**	**827.847.814**
	TOTAL JUMLAH	**327.255.387**	**398.608.181**	**49.218.721**		**775.082.289**	**790.213.843**	**807.223.654**	**827.847.814**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 066

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
066	**BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)**	**872.729.420**	**643.540.187**	**347.700**		**1.516.617.307**	**1.516.619.400**	**1.516.621.760**	**1.516.624.620**
066.01	**Badan Narkotika Nasional**	**872.729.420**	**643.540.187**	**347.700**		**1.516.617.307**	**1.516.619.400**	**1.516.621.760**	**1.516.624.620**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**872.729.420**	**643.540.187**	**347.700**		**1.516.617.307**	**1.516.619.400**	**1.516.621.760**	**1.516.624.620**
03.01	**KEPOLISIAN**	**872.729.420**	**643.540.187**	**347.700**		**1.516.617.307**	**1.516.619.400**	**1.516.621.760**	**1.516.624.620**
066.01.BL	**Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**		**144.788.809**			**144.788.809**	**140.394.126**	**140.396.486**	**140.399.346**
6239	Pelayanan Pengujian dan Pengembangan Laboratorium Narkotika		5.475.752			5.475.752	5.477.845	5.480.205	5.483.065
8034	Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		9.920.000			9.920.000	9.920.000	9.920.000	9.920.000
8035	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba		15.060.000			15.060.000	15.060.000	15.060.000	15.060.000
8036	Penguatan Kemitraan dan Sistem Hukum P4GN		1.050.000			1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
8037	Penyelenggaraan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba		79.984.160			79.984.160	79.984.160	79.984.160	79.984.160
8038	Penyelenggaraan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba		33.298.897			33.298.897	28.902.121	28.902.121	28.902.121
066.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**872.729.420**	**498.751.378**	**347.700**		**1.371.828.498**	**1.376.225.274**	**1.376.225.274**	**1.376.225.274**
3241	Pengawasan dan Pembinaan Kinerja dan Aparatur		1.020.000			1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
3242	Pelayanan Dukungan Teknologi, Data dan Informasi P4GN		930.000			930.000	930.000	930.000	930.000
3244	Pengembangan Kapasitas Aparatur BNN		1.280.000			1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
8039	Penyelenggaraan Layanan Dukungan Operasional dan Manajemen Kelembagaan	872.729.420	495.521.378	347.700		1.368.598.498	1.372.995.274	1.372.995.274	1.372.995.274
	JUMLAH RM	**872.729.420**	**627.121.378**	**347.700**		**1.500.198.498**	**1.500.198.498**	**1.500.198.498**	**1.500.198.498**
	JUMLAH PNBP		**16.418.809**			**16.418.809**	**16.420.902**	**16.423.262**	**16.426.122**
	TOTAL JUMLAH	**872.729.420**	**643.540.187**	**347.700**		**1.516.617.307**	**1.516.619.400**	**1.516.621.760**	**1.516.624.620**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 068

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
068	**KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**	**3.064.627.302**	**546.783.821**	**26.564.116**		**3.637.975.239**	**3.702.147.793**	**3.774.285.393**	**3.861.750.937**
068.01	**Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**	**3.064.627.302**	**546.783.821**	**26.564.116**		**3.637.975.239**	**3.702.147.793**	**3.774.285.393**	**3.861.750.937**
07	**FUNGSI KESEHATAN**	**3.064.627.302**	**546.783.821**	**26.564.116**		**3.637.975.239**	**3.702.147.793**	**3.774.285.393**	**3.861.750.937**
07.04	**KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**	**3.064.627.302**	**546.783.821**	**26.564.116**		**3.637.975.239**	**3.702.147.793**	**3.774.285.393**	**3.861.750.937**
068.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**3.064.627.302**	**189.127.340**	**24.914.956**		**3.278.669.598**	**3.341.936.333**	**3.413.055.065**	**3.499.285.284**
3300	Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan Hukum Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana		1.750.000			1.750.000	1.775.505	1.804.201	1.838.983
3303	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) BKKBN		2.000.000			2.000.000	2.034.947	2.074.247	2.121.896
3306	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana Wilayah III		780.000			780.000	788.807	798.709	810.715
3307	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana Wilayah I		750.000			750.000	758.219	767.460	778.664
3308	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana Wilayah II		750.000			750.000	763.139	777.913	795.826
5297	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	2.856.958.399	134.897.513	13.060.956		3.004.916.868	3.062.552.642	3.127.341.492	3.205.896.829
7548	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pengelolaan BMN	207.668.903	39.831.230	11.854.000		259.354.133	264.744.717	270.804.278	278.151.391
7549	Penguatan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran		3.000.000			3.000.000	3.056.988	3.121.089	3.198.828
7550	Peningkatan Kualitas Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik		1.500.000			1.500.000	1.518.637	1.539.599	1.565.020
7551	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara		3.868.597			3.868.597	3.942.732	4.026.077	4.127.132
068.01.DJ	**Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana**		**357.656.481**	**1.649.160**		**359.305.641**	**360.211.460**	**361.230.328**	**362.465.653**
3316	Pembinaan Akses Pelayanan KB		450.000			450.000	455.663	462.034	469.760
3317	Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak		2.350.000			2.350.000	2.395.797	2.447.288	2.509.717
3319	Pembinaan Ketahanan Remaja		2.350.000			2.350.000	2.385.407	2.425.214	2.473.481

SK No 154346 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 068

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3320	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi		680.000			680.000	688.493	698.059	709.654
3322	Peningkatan Pelayanan KB Wilayah dan Sasaran Khusus		520.000			520.000	530.308	541.905	555.968
3323	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		500.000			500.000	509.913	521.064	534.586
3324	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan		1.850.000			1.850.000	1.885.376	1.925.158	1.973.392
3325	Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan		450.000			450.000	455.910	462.574	470.649
3326	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk		450.000			450.000	458.917	468.953	481.120
3327	Pembinaan Kualitas Pelayanan KB		450.000			450.000	458.640	468.364	480.159
3328	Analisis Dampak Kependudukan		500.000			500.000	507.928	516.853	527.668
3329	Perencanaan Pengendalian Penduduk		450.000			450.000	458.923	468.955	481.127
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi		312.620.000			312.620.000	312.800.611	313.004.038	313.250.672
7552	Penguatan Kualitas Kebijakan Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana		400.000			400.000	400.000	400.000	400.000
7553	Penguatan Kualitas Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk		400.000			400.000	400.000	400.000	400.000
7554	Penguatan Kebijakan Kualitas Akses Pembangunan dan Pelayanan Keluarga		450.000			450.000	450.000	450.000	450.000
7555	Penguatan Kebijakan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana		400.000			400.000	406.126	413.021	421.384
7556	Peningkatan peran serta masyarakat dan mitra kerja terhadap program Bangga Kencana		2.900.000			2.900.000	2.952.785	3.012.129	3.084.081
7557	Peningkatan Kualitas Data dan Teknologi Informasi Program Bangga Kencana		5.850.840	1.649.160		7.500.000	7.619.021	7.752.838	7.915.078
7558	Peningkatan Pendayagunaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemangku Kebijakan dalam Penguatan Program Bangga Kencana		11.850.000			11.850.000	12.004.811	12.178.849	12.389.862
7559	Peningkatan Kualitas Penggerak Lini Lapangan Program Bangga Kencana		450.000			450.000	457.931	466.849	477.668

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 068

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7560	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Program Bangga Kencana bagi Tenaga Pengelola/Pelaksana		10.935.641			10.935.641	11.121.256	11.329.935	11.582.951
7713	Peningkatan Kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan		400.000			400.000	407.644	416.248	426.676
	JUMLAH RM	**3.064.627.302**	**538.386.653**	**26.564.116**		**3.629.578.071**	**3.693.603.917**	**3.765.576.593**	**3.852.842.165**
	JUMLAH PNBP		**79.168**			**79.168**	**80.709**	**82.446**	**84.550**
	JUMLAH HLN		**8.318.000**			**8.318.000**	**8.463.167**	**8.626.354**	**8.824.222**
	TOTAL JUMLAH	**3.064.627.302**	**546.783.821**	**26.564.116**		**3.637.975.239**	**3.702.147.793**	**3.774.285.393**	**3.861.750.937**

SK No 154344 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 074

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
074	**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**	**73.967.106**	**83.959.576**	**3.698.043**		**161.624.725**	**164.625.665**	**167.999.280**	**172.089.761**
074.01	**Komnas HAM**	**73.967.106**	**83.959.576**	**3.698.043**		**161.624.725**	**164.625.665**	**167.999.280**	**172.089.761**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**73.967.106**	**83.959.576**	**3.698.043**		**161.624.725**	**164.625.665**	**167.999.280**	**172.089.761**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**73.967.106**	**83.959.576**	**3.698.043**		**161.624.725**	**164.625.665**	**167.999.280**	**172.089.761**
074.01.BG	**Program Pemajuan dan Penegakan HAM**		**29.980.783**	**200.000**		**30.180.783**	**30.679.997**	**31.241.313**	**31.921.912**
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara		8.988.866	15.000		9.003.866	9.165.869	9.348.021	9.568.883
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM		11.250.969	185.000		11.435.969	11.626.681	11.841.121	12.101.128
5681	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban		9.740.948			9.740.948	9.887.447	10.052.171	10.251.901
074.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**73.967.106**	**53.978.793**	**3.498.043**		**131.443.942**	**133.945.668**	**136.757.967**	**140.167.849**
3335	Peningkatan Kualitas Perencananaan dan Pengawasan Internal		3.508.809			3.508.809	3.565.206	3.628.623	3.705.526
3336	Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan	56.467.106	26.114.280	1.700.000		84.281.386	85.860.672	87.635.989	89.788.550
6387	Dukungan Internal Komnas Perempuan	17.500.000	19.961.009	1.798.043		39.259.052	40.037.921	40.913.468	41.975.044
6594	Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama		4.394.695			4.394.695	4.481.869	4.579.887	4.698.729
	JUMLAH RM	**73.967.106**	**83.959.576**	**3.698.043**		**161.624.725**	**164.625.665**	**167.999.280**	**172.089.761**
	TOTAL JUMLAH	**73.967.106**	**83.959.576**	**3.698.043**		**161.624.725**	**164.625.665**	**167.999.280**	**172.089.761**

SK No 154343 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 075

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
075	**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**	**970.611.418**	**1.087.177.160**	**617.650.325**		**2.675.438.903**	**2.873.030.238**	**2.924.930.640**	**2.987.859.092**
075.01	**Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika**	**970.611.418**	**1.087.177.160**	**617.650.325**		**2.675.438.903**	**2.873.030.238**	**2.924.930.640**	**2.987.859.092**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**970.611.418**	**1.087.177.160**	**617.650.325**		**2.675.438.903**	**2.873.030.238**	**2.924.930.640**	**2.987.859.092**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**970.611.418**	**1.087.177.160**	**617.650.325**		**2.675.438.903**	**2.873.030.238**	**2.924.930.640**	**2.987.859.092**
075.01.GJ	**Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika**		**752.439.210**	**617.455.325**		**1.369.894.535**	**1.491.278.643**	**1.513.718.501**	**1.540.926.400**
3344	Pengelolaan Data dan Komputasi BMKG		12.288.352			12.288.352	12.379.181	12.649.894	12.978.145
3345	Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG		63.950.479			63.950.479	65.153.073	66.505.144	68.144.496
3346	Pengelolaan Layanan Iklim Terapan BMKG		15.460.599	79.450.000		94.910.599	96.560.056	98.414.196	100.662.307
3347	Pengelolaan Instrumentasi dan Kalibrasi BMKG		294.504.366	475.073.057		769.577.423	780.578.450	793.394.468	808.933.681
3348	Pengelolaan Sistem Jaringan Komunikasi BMKG		149.162.754			149.162.754	148.695.474	148.695.474	148.695.474
3349	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan BMKG		72.789.206	21.870.000		94.659.206	98.079.866	99.420.849	101.046.735
3350	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG		25.645.709	40.682.268		66.327.977	67.177.243	68.131.901	69.289.409
3352	Pengelolaan Perubahan Iklim BMKG		37.812.628			37.812.628	38.468.767	39.206.478	40.100.938
3353	Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG		23.584.166			23.584.166	23.990.842	24.448.045	25.002.398
3354	Pengembangan dan Pengelolaan UPT BMKG		33.736.154			33.736.154	32.662.747	32.817.073	33.004.189
5201	Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG		17.341.797			17.341.797	69.437.343	70.668.909	72.162.127
7029	Pengelolaan Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG		1.970.000	380.000		2.350.000	2.396.588	2.448.972	2.512.489
7030	Pengelolaan Operasional Modifikasi Cuaca BMKG		4.193.000			4.193.000	55.699.013	56.917.098	58.394.012
075.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**970.611.418**	**334.737.950**	**195.000**		**1.305.544.368**	**1.381.751.595**	**1.411.212.139**	**1.446.932.692**
3337	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG	15.505.333	12.911.472			28.416.805	34.524.443	35.151.293	35.911.341
3338	Pengelolaan Layanan Hukum, Humas dan Kerja Sama BMKG		1.500.000			1.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 075

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3339	Pengelolaan Layanan Perencanaan, Program Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi BMKG		1.500.000			1.500.000	4.433.694	4.433.694	4.433.694
3340	Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, Tata Usaha dan Rumah Tangga BMKG	927.555.102	293.624.758			1.221.179.860	1.280.359.860	1.308.310.077	1.342.199.388
3341	Pengawasan Internal BMKG	8.326.975	2.952.007			11.278.982	12.502.206	12.753.146	13.057.402
3342	Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia MKG	8.501.616	17.041.994			25.543.610	26.292.122	26.571.487	26.910.212
3343	Pengelolaan Standardisasi Instrumen Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	9.046.995	1.950.050			10.997.045	11.990.992	12.265.225	12.597.727
7031	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi BMKG		1.500.000			1.500.000	3.900.144	3.900.307	3.900.504
7032	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.675.397	1.757.669	195.000		3.628.066	3.948.134	4.026.910	4.122.424
	JUMLAH RM	**970.611.418**	**1.003.064.669**	**195.000**		**1.973.871.087**	**2.107.511.023**	**2.144.119.946**	**2.188.507.751**
	JUMLAH PNBP		**82.242.909**	**22.250.000**		**104.492.909**	**156.597.747**	**158.572.664**	**160.967.211**
	JUMLAH PLN			**475.073.057**		**475.073.057**	**484.498.981**	**495.094.535**	**507.941.461**
	JUMLAH SBSN		**1.869.582**	**120.132.268**		**122.001.850**	**124.422.487**	**127.143.495**	**130.442.669**
	TOTAL JUMLAH	**970.611.418**	**1.087.177.160**	**617.650.325**		**2.675.438.903**	**2.873.030.238**	**2.924.930.640**	**2.987.859.092**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 076

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
076	**KOMISI PEMILIHAN UMUM**	**2.212.534.024**	**1.327.053.917**			**3.539.587.941**	**10.394.692.712**	**22.355.215.448**	**28.442.242.582**
076.01	**Komisi Pemilihan Umum**	**2.212.534.024**	**1.327.053.917**			**3.539.587.941**	**10.394.692.712**	**22.355.215.448**	**28.442.242.582**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**2.212.534.024**	**1.327.053.917**			**3.539.587.941**	**10.394.692.712**	**22.355.215.448**	**28.442.242.582**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**2.212.534.024**	**1.327.053.917**			**3.539.587.941**	**10.394.692.712**	**22.355.215.448**	**28.442.242.582**
076.01.CQ	**Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum**		**87.304.002**			**87.304.002**	**6.881.676.845**	**18.773.921.294**	**24.778.163.383**
3356	Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pilkada		3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3363	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan		7.065.900			7.065.900	7.245.774	7.447.972	7.693.131
3364	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih		3.346.030			3.346.030	3.412.418	3.487.044	3.577.527
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada		6.491.872			6.491.872	6.799.281.381	18.689.745.784	24.691.829.600
7016	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal		67.400.200			67.400.200	68.737.272	70.240.494	72.063.125
076.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**2.212.534.024**	**1.239.749.915**			**3.452.283.939**	**3.513.015.867**	**3.581.294.154**	**3.664.079.199**
3355	Pengelolaan Keuangan	2.212.534.024	10.507.110			2.223.041.134	2.267.055.879	2.316.538.963	2.376.535.886
3357	Manajemen Perencanaan dan Organisasi		10.439.280			10.439.280	10.646.398	10.879.228	11.161.522
3358	Pengelolaan Sumber Daya Manusia		10.328.701			10.328.701	10.424.640	10.532.528	10.663.348
3360	Pelayanan Operasional Kantor dan Dukungan Sarana Prasarana		1.160.050.555			1.160.050.555	1.175.809.580	1.193.527.653	1.215.009.771
3361	Pemeriksaan Internal KPU		9.794.170			9.794.170	9.794.170	9.794.170	9.794.170
6174	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara		5.611.520			5.611.520	5.611.520	5.611.520	5.611.520
6634	Pengelolaan Data dan Informasi		3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6635	Pengembangan Sumber Daya Manusia		10.287.840			10.287.840	10.551.483	10.847.842	11.207.171
7017	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu		5.200.000			5.200.000	5.303.167	5.419.140	5.559.762
7018	Pendataan DPT Berkelanjutan		14.530.739			14.530.739	14.819.030	15.143.110	15.536.049

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 076

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH RM	2.212.534.024	1.327.053.917			3.539.587.941	10.394.692.712	22.355.215.448	28.442.242.582
	TOTAL JUMLAH	2.212.534.024	1.327.053.917			3.539.587.941	10.394.692.712	22.355.215.448	28.442.242.582

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 077

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
077	**MAHKAMAH KONSTITUSI RI**	**120.470.482**	**243.041.850**	**15.823.210**		**379.335.542**	**386.713.606**	**395.007.305**	**405.063.272**
077.01	**Mahkamah Konstitusi Ri**	**120.470.482**	**243.041.850**	**15.823.210**		**379.335.542**	**386.713.606**	**395.007.305**	**405.063.272**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**120.470.482**	**243.041.850**	**15.823.210**		**379.335.542**	**386.713.606**	**395.007.305**	**405.063.272**
03.04	**PERADILAN**	**120.470.482**	**243.041.850**	**15.823.210**		**379.335.542**	**386.713.606**	**395.007.305**	**405.063.272**
077.01.BJ	**Program Penanganan Perkara Konstitusi**		**196.969.340**	**4.550.000**		**201.519.340**	**205.388.382**	**209.737.562**	**215.010.872**
3372	Penanganan Perkara Konstitusi, Hukum dan Administrasi Kepaniteraan		169.748.440			169.748.440	173.106.205	176.891.879	181.481.950
4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK		390.000			390.000	407.933	416.855	427.671
4247	Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK serta Kerjasama Kelembagaan		13.148.000			13.148.000	13.299.440	13.469.678	13.676.088
7068	Pengelolaan Kebijakan Strategis dan Literasi Konstitusi		1.105.000	50.000		1.155.000	1.177.907	1.203.667	1.234.902
7069	Pengelolaan Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara		12.577.900	4.500.000		17.077.900	17.396.897	17.755.483	18.190.261
077.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**120.470.482**	**46.072.510**	**11.273.210**		**177.816.202**	**181.325.224**	**185.269.743**	**190.052.400**
3367	Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	120.470.482	760.000			121.230.482	123.620.723	126.307.575	129.565.340
3369	Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi		42.165.160	11.273.210		53.438.370	54.497.616	55.688.339	57.132.065
4245	Penyelenggaraan Pengawasan Intern		215.000			215.000	219.257	224.053	229.863
5238	Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi		2.932.350			2.932.350	2.987.628	3.049.776	3.125.132
	JUMLAH RM	**120.470.482**	**243.041.850**	**15.823.210**		**379.335.542**	**386.713.606**	**395.007.305**	**405.063.272**
	TOTAL JUMLAH	**120.470.482**	**243.041.850**	**15.823.210**		**379.335.542**	**386.713.606**	**395.007.305**	**405.063.272**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 078

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
078	**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)**	**200.479.238**	**123.747.842**	**9.350.000**		**333.577.080**	**339.216.667**	**345.556.273**	**353.242.905**
078.01	**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**	**200.479.238**	**123.747.842**	**9.350.000**		**333.577.080**	**339.216.667**	**345.556.273**	**353.242.905**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**200.479.238**	**123.747.842**	**9.350.000**		**333.577.080**	**339.216.667**	**345.556.273**	**353.242.905**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**200.479.238**	**123.747.842**	**9.350.000**		**333.577.080**	**339.216.667**	**345.556.273**	**353.242.905**
078.01.BE	**Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme**		**77.095.202**	**5.000.000**		**82.095.202**	**83.480.359**	**85.037.488**	**86.925.482**
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK		3.613.377			3.613.377	3.669.563	3.732.730	3.809.316
3379	Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPATK		1.317.299			1.317.299	1.329.456	1.343.131	1.359.708
3380	Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri dan Internasional TPPU TPPT dan PPSPM		6.732.206			6.732.206	6.842.202	6.965.853	7.115.776
3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK		45.379.412	5.000.000		50.379.412	51.275.318	52.282.404	53.503.484
3382	Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PPATK		5.148.862			5.148.862	5.227.948	5.316.864	5.424.675
3384	Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK		9.260.694			9.260.694	9.419.294	9.597.593	9.813.788
8003	Penyusunan Strategi dan Kebijakan APU, PPT, dan PPSPM		5.643.352			5.643.352	5.716.578	5.798.913	5.898.735
078.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**200.479.238**	**46.652.640**	**4.350.000**		**251.481.878**	**255.736.308**	**260.518.785**	**266.317.423**
3374	Pengawasan Internal PPATK		420.481			420.481	427.886	436.217	446.314
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	200.479.238	287.296			200.766.534	204.666.410	209.050.247	214.365.568
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK		3.338.007			3.338.007	3.387.241	3.442.606	3.509.727
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan PPATK		41.092.480	4.300.000		45.392.480	45.672.711	45.987.758	46.369.741
8004	Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Pemberdayaan Kemitraan APU, PPT, dan PPSPM		1.514.376	50.000		1.564.376	1.582.060	1.601.957	1.626.073
	JUMLAH RM	**200.479.238**	**123.747.842**	**9.350.000**		**333.577.080**	**339.216.667**	**345.556.273**	**353.242.905**
	TOTAL JUMLAH	**200.479.238**	**123.747.842**	**9.350.000**		**333.577.080**	**339.216.667**	**345.556.273**	**353.242.905**

SK No 154336 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 083

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
083	**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)**	**117.913.042**	**177.298.434**	**1.976.041.886**		**2.271.253.362**	**2.316.280.932**	**2.366.895.981**	**2.428.265.835**
083.01	**Badan Informasi Geospasial**	**117.913.042**	**177.298.434**	**1.976.041.886**		**2.271.253.362**	**2.316.280.932**	**2.366.895.981**	**2.428.265.835**
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**	**117.913.042**	**177.298.434**	**1.976.041.886**		**2.271.253.362**	**2.316.280.932**	**2.366.895.981**	**2.428.265.835**
05.05	**TATA RUANG DAN PERTANAHAN**	**117.913.042**	**177.298.434**	**1.976.041.886**		**2.271.253.362**	**2.316.280.932**	**2.366.895.981**	**2.428.265.835**
083.01.GI	**Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial**		**142.689.586**	**1.976.041.886**		**2.118.731.472**	**2.160.732.874**	**2.207.946.230**	**2.265.191.585**
6445	Penyelenggaraan Sistem Referensi Geospasial Indonesia		27.546.056	2.632.244		30.178.300	30.776.891	31.449.818	32.265.724
6446	Penyelenggaraan Peta Dasar		25.458.094	1.727.979.983		1.753.438.077	1.788.228.011	1.827.334.947	1.874.751.417
6447	Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna Informasi Geospasial		6.316.500	7.410.262		13.726.762	13.999.104	14.305.254	14.676.453
6448	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial		68.956.125	230.755.033		299.711.158	305.657.720	312.342.178	320.446.965
6449	Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial		13.950.097			13.950.097	14.190.761	14.461.310	14.789.346
7063	Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik		462.714	7.264.364		7.727.078	7.880.387	8.052.723	8.261.680
083.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**117.913.042**	**34.608.848**			**152.521.890**	**155.548.058**	**158.949.751**	**163.074.250**
6450	Penyelenggaraan Kesekretariatan	117.913.042	34.608.848			152.521.890	155.548.058	158.949.751	163.074.250
	JUMLAH RM	**117.913.042**	**92.026.909**	**2.632.244**		**212.572.195**	**216.789.643**	**221.530.497**	**227.278.700**
	JUMLAH PNBP		**1.962.080**			**1.962.080**	**1.999.336**	**2.041.229**	**2.092.023**
	JUMLAH PLN		**83.309.445**	**1.973.409.642**		**2.056.719.087**	**2.097.491.953**	**2.143.324.255**	**2.198.895.112**
	TOTAL JUMLAH	**117.913.042**	**177.298.434**	**1.976.041.886**		**2.271.253.362**	**2.316.280.932**	**2.366.895.981**	**2.428.265.835**

SK No 154335 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 084

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
084	**BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)**	**102.859.057**	**86.559.636**	**584.534**		**190.003.227**	**193.705.108**	**197.866.386**	**202.911.866**
084.01	**Badan Standarisasi Nasional**	**102.859.057**	**86.559.636**	**584.534**		**190.003.227**	**193.705.108**	**197.866.386**	**202.911.866**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**102.859.057**	**86.559.636**	**584.534**		**190.003.227**	**193.705.108**	**197.866.386**	**202.911.866**
04.07	**INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	**102.859.057**	**86.429.636**	**584.534**		**189.873.227**	**193.575.108**	**197.736.386**	**202.781.866**
084.01.EJ	**Program Standardisasi Nasional**		**43.629.066**	**554.534**		**44.183.600**	**45.009.209**	**45.937.285**	**47.062.560**
3558	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		6.100.850			6.100.850	6.100.850	6.100.850	6.100.850
3559	Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		2.359.350			2.359.350	2.359.350	2.359.350	2.359.350
6176	Peningkatan Akreditasi		31.474.390	476.000		31.950.390	32.775.999	33.704.075	34.829.350
6177	Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran		3.694.476	78.534		3.773.010	3.773.010	3.773.010	3.773.010
084.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**102.859.057**	**42.800.570**	**30.000**		**145.689.627**	**148.565.899**	**151.799.101**	**155.719.306**
3549	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Hubungan Masyarakat		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3550	Peningkatan Pelayanan Keuangan dan Umum	102.859.057	39.615.856			142.474.913	145.334.762	148.549.495	152.447.305
3556	Peningkatan Data dan Informasi		1.650.570	30.000		1.680.570	1.696.993	1.715.462	1.737.857
4176	Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama		534.144			534.144	534.144	534.144	534.144
04.10	**LITBANG EKONOMI**		**130.000**			**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
084.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**130.000**			**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
3551	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN		130.000			130.000	130.000	130.000	130.000
	JUMLAH RM	**102.859.057**	**41.280.000**			**144.139.057**	**146.998.906**	**150.213.639**	**154.111.449**
	JUMLAH PNBP		**45.279.636**	**584.534**		**45.864.170**	**46.706.202**	**47.652.747**	**48.800.417**
	TOTAL JUMLAH	**102.859.057**	**86.559.636**	**584.534**		**190.003.227**	**193.705.108**	**197.866.386**	**202.911.866**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 085

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
085	**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**	**82.014.165**	**35.605.875**	**121.500**		**117.741.540**	**119.940.881**	**122.413.172**	**125.410.767**
085.01	**Badan Pengawas Tenaga Nuklir**	**82.014.165**	**35.605.875**	**121.500**		**117.741.540**	**119.940.881**	**122.413.172**	**125.410.767**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**82.014.165**	**35.605.875**	**121.500**		**117.741.540**	**119.940.881**	**122.413.172**	**125.410.767**
01.04	**PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK**	**82.014.165**	**35.605.875**	**121.500**		**117.741.540**	**119.940.881**	**122.413.172**	**125.410.767**
085.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**82.014.165**	**22.131.589**			**104.145.754**	**106.318.560**	**108.761.016**	**111.722.440**
3565	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	82.014.165	22.131.589			104.145.754	106.318.560	108.761.016	111.722.440
085.01.KB	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**		**13.474.286**	**121.500**		**13.595.786**	**13.622.321**	**13.652.156**	**13.688.327**
3568	Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perizinan dan Inspeksi dalam Keselamatan, Keamanan, Garda Aman Ketenaganukliran		11.035.286	121.500		11.156.786	11.156.786	11.156.786	11.156.786
3570	Peningkatan Sistem Keamanan dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional		1.939.000			1.939.000	1.965.535	1.995.370	2.031.541
3571	Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran		500.000			500.000	500.000	500.000	500.000
	JUMLAH RM	**82.014.165**	**24.070.589**			**106.084.754**	**108.284.095**	**110.756.386**	**113.753.981**
	JUMLAH PNBP		**11.535.286**	**121.500**		**11.656.786**	**11.656.786**	**11.656.786**	**11.656.786**
	TOTAL JUMLAH	**82.014.165**	**35.605.875**	**121.500**		**117.741.540**	**119.940.881**	**122.413.172**	**125.410.767**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 086

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
086	**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**	**173.228.047**	**119.435.135**	**686.200**		**293.349.382**	**298.969.124**	**305.286.874**	**312.947.017**
086.01	**Lembaga Administrasi Negara**	**173.228.047**	**119.435.135**	**686.200**		**293.349.382**	**298.969.124**	**305.286.874**	**312.947.017**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**173.228.047**	**100.680.040**	**686.200**		**274.594.287**	**279.865.299**	**285.790.900**	**292.975.554**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**173.228.047**	**100.680.040**	**686.200**		**274.594.287**	**279.865.299**	**285.790.900**	**292.975.554**
086.01.CO	**Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN**		**28.466.680**			**28.466.680**	**28.960.785**	**29.516.466**	**30.190.175**
7913	Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara		1.347.726			1.347.726	1.374.449	1.404.496	1.440.928
7914	Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara		200.000			200.000			
7915	Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara		200.000			200.000	2.080.268	2.080.268	2.080.268
7916	Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara		25.446.726			25.446.726	24.208.601	24.705.861	25.308.734
7917	Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara		1.272.228			1.272.228	1.297.467	1.325.841	1.360.245
086.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**173.228.047**	**72.213.360**	**686.200**		**246.127.607**	**250.904.514**	**256.274.434**	**262.785.379**
3579	Pengawasan Resiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		49.370			49.370	50.346	51.446	52.781
4821	Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan		60.365			60.365	264.590	269.769	276.050
7918	Peningkatan Kualitas Layanan Umum, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi	173.228.047	71.317.625	686.200		245.231.872	249.634.801	254.983.510	261.468.733
7919	Peningkatan Kualitas Layanan Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Internal		786.000			786.000	954.777	969.709	987.815
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**18.755.095**			**18.755.095**	**19.103.825**	**19.495.974**	**19.971.463**
10.05	**PENDIDIKAN KEDINASAN**		**18.755.095**			**18.755.095**	**19.103.825**	**19.495.974**	**19.971.463**
086.01.CO	**Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN**		**18.755.095**			**18.755.095**	**19.103.825**	**19.495.974**	**19.971.463**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 086

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3611	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Terapan Bidang Ilmu Administrasi Politeknik STIA LAN		18.755.095			18.755.095	19.103.825	19.495.974	19.971.463
	JUMLAH RM	**173.228.047**	**66.038.629**			**239.266.676**	**243.869.971**	**249.044.651**	**255.318.862**
	JUMLAH PNBP		**53.396.506**	**686.200**		**54.082.706**	**55.099.153**	**56.242.223**	**57.628.155**
	TOTAL JUMLAH	**173.228.047**	**119.435.135**	**686.200**		**293.349.382**	**298.969.124**	**305.286.874**	**312.947.017**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 087

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
087	**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**130.167.692**	**83.366.422**	**65.801.269**		**279.335.383**	**282.353.379**	**284.858.380**	**286.241.771**
087.01	**Arsip Nasional**	**130.167.692**	**83.366.422**	**65.801.269**		**279.335.383**	**282.353.379**	**284.858.380**	**286.241.771**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**130.167.692**	**83.366.422**	**65.801.269**		**279.335.383**	**282.353.379**	**284.858.380**	**286.241.771**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**130.167.692**	**83.366.422**	**65.801.269**		**279.335.383**	**282.353.379**	**284.858.380**	**286.241.771**
087.01.CN	**Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional**		**30.543.845**	**62.724.593**		**93.268.438**	**50.849.341**	**54.155.696**	**50.468.787**
3624	Pengolahan Arsip Nasional		529.647			529.647	3.638.919	3.276.840	3.319.574
3625	Preservasi Arsip Nasional		4.196.141	980.780		5.176.921	7.265.347	8.363.929	5.483.455
3626	Pelayanan Jasa Kearsipan		5.694.172			5.694.172	6.031.043	6.291.427	6.557.229
5357	Pengembangan dan Sertifikasi SDM Kearsipan		1.667.165			1.667.165	2.495.124	2.506.345	2.525.807
7034	Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Kearsipan		1.340.036			1.340.036	1.860.141	2.095.434	2.165.339
7036	Pelatihan Sumber Daya Manusia		8.273.240			8.273.240	11.320.565	11.600.588	11.933.621
7037	Penjaminan Kualitas Kebijakan, Pengawasan, dan Akreditasi Kearsipan		2.222.437	7.000		2.229.437	5.576.814	5.693.409	5.834.766
7038	Penyelamatan Arsip Nasional		472.840			472.840	3.557.343	3.633.134	3.783.395
7039	Pelayanan Arsip Nasional		4.375.420	59.603.000		63.978.420	4.124.014	4.188.493	4.427.899
7040	Pengembangan Kearsipan Digital Nasional		643.007	2.133.813		2.776.820	3.776.820	5.276.820	3.176.820
7041	Pengolahan Data dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan Nasional		1.129.740			1.129.740	1.203.211	1.229.277	1.260.882
087.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**130.167.692**	**52.822.577**	**3.076.676**		**186.066.945**	**231.504.038**	**230.702.684**	**235.772.984**
3617	Pengawasan Internal		223.567			223.567	223.567	223.567	223.567
7042	Pelayanan Manajemen Kinerja, Keuangan, dan Organisasi	130.167.692	1.393.293			131.560.985	153.353.978	150.636.336	153.029.857
7043	Pelayanan Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat		1.280.419			1.280.419	1.759.404	1.780.104	1.805.206
7044	Pelayanan Kepegawaian dan Umum		48.487.945	2.960.179		51.448.124	72.909.731	74.686.730	76.815.620



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 087

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7045	Pelayanan Data dan Informasi Internal		1.437.353	116.497		1.553.850	3.257.358	3.375.947	3.898.734
	JUMLAH RM	**130.167.692**	**66.749.302**	**4.451.570**		**201.368.564**	**260.434.311**	**262.371.268**	**263.094.040**
	JUMLAH PNBP		**16.205.120**	**1.761.699**		**17.966.819**	**21.881.818**	**22.468.081**	**23.128.207**
	JUMLAH SBSN		**412.000**	**59.588.000**		**60.000.000**	**37.250**	**19.031**	**19.524**
	TOTAL JUMLAH	**130.167.692**	**83.366.422**	**65.801.269**		**279.335.383**	**282.353.379**	**284.858.380**	**286.241.771**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 088

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
088	**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**	**454.622.044**	**143.403.289**	**41.442.490**		**639.467.823**	**650.784.557**	**663.506.239**	**678.931.055**
088.01	**Badan Kepegawaian Negara**	**454.622.044**	**143.403.289**	**41.442.490**		**639.467.823**	**650.784.557**	**663.506.239**	**678.931.055**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**454.622.044**	**143.403.289**	**41.442.490**		**639.467.823**	**650.784.557**	**663.506.239**	**678.931.055**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**454.622.044**	**143.403.289**	**41.442.490**		**639.467.823**	**650.784.557**	**663.506.239**	**678.931.055**
088.01.CO	**Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN**		**19.413.322**			**19.413.322**	**19.488.572**	**19.573.186**	**19.675.776**
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi		11.179.572			11.179.572	11.179.572	11.179.572	11.179.572
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN		4.440.000			4.440.000	4.440.000	4.440.000	4.440.000
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian		3.793.750			3.793.750	3.869.000	3.953.614	4.056.204
088.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**454.622.044**	**123.989.967**	**41.442.490**		**620.054.501**	**631.295.985**	**643.933.053**	**659.255.279**
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	454.622.044	123.989.967	41.442.490		620.054.501	631.295.985	643.933.053	659.255.279
	JUMLAH RM	**454.622.044**	**123.989.967**			**578.612.011**	**590.080.811**	**602.610.830**	**617.803.262**
	JUMLAH PNBP		**19.413.322**	**4.799.741**		**24.213.063**	**24.060.997**	**24.252.660**	**24.485.044**
	JUMLAH SBSN			**36.642.749**		**36.642.749**	**36.642.749**	**36.642.749**	**36.642.749**
	TOTAL JUMLAH	**454.622.044**	**143.403.289**	**41.442.490**		**639.467.823**	**650.784.557**	**663.506.239**	**678.931.055**

SK No 154368 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 089

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
089	**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**	**1.277.334.742**	**693.689.803**	**403.914.008**		**2.374.938.553**	**2.419.556.150**	**2.469.712.576**	**2.530.526.293**
089.01	**Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**	**1.277.334.742**	**693.689.803**	**403.914.008**		**2.374.938.553**	**2.419.556.150**	**2.469.712.576**	**2.530.526.293**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**1.277.334.742**	**693.689.803**	**403.914.008**		**2.374.938.553**	**2.419.556.150**	**2.469.712.576**	**2.530.526.293**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**1.277.334.742**	**693.689.803**	**403.914.008**		**2.374.938.553**	**2.419.556.150**	**2.469.712.576**	**2.530.526.293**
089.01.CH	**Program Pengawasan Pembangunan**		**381.511.844**	**14.023.812**		**395.535.656**	**402.974.690**	**411.338.127**	**421.478.572**
3671	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP		3.093.087			3.093.087	3.154.453	3.223.438	3.307.083
3672	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengawasan		4.480.829	11.540.000		16.020.829	16.328.833	16.675.074	17.094.894
3673	Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor		4.577.500			4.577.500	4.668.294	4.770.385	4.894.170
3674	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan		171.152.699			171.152.699	174.761.041	178.817.223	183.735.269
3675	Pengembangan Strategi Kebijakan Pengawasan		6.909.633			6.909.633	7.046.703	7.200.805	7.387.654
3701	Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan		94.001.507			94.001.507	95.625.838	97.452.525	99.667.262
4207	Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan		1.828.712			1.828.712	1.864.831	1.905.447	1.954.686
4208	Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan		2.095.244			2.095.244	2.136.320	2.182.507	2.238.514
4209	Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan		2.068.348			2.068.348	2.109.232	2.155.196	2.210.931
4210	Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan		2.463.102			2.463.102	2.510.822	2.564.475	2.629.530
4211	Pengawasan Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan		2.174.808			2.174.808	2.195.757	2.219.338	2.247.915
4212	Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan		2.029.509			2.029.509	2.067.641	2.110.532	2.162.535
4213	Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum		1.481.557			1.481.557	1.506.782	1.535.155	1.569.553
4214	Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana		2.076.182			2.076.182	2.114.829	2.158.296	2.210.990
4215	Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		1.953.202			1.953.202	1.985.988	2.022.862	2.067.575

SK No 154367 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 089

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4216	Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi		1.872.027			1.872.027	1.908.950	1.950.474	2.000.825
4217	Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah		4.406.331			4.406.331	4.487.143	4.577.998	4.688.165
4218	Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah		1.794.292			1.794.292	1.828.978	1.867.977	1.915.273
4219	Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa		1.743.009			1.743.009	1.762.955	1.785.389	1.812.592
4220	Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah		2.851.424			2.851.424	2.898.036	2.950.444	3.013.987
4221	Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur		1.676.179			1.676.179	1.709.413	1.746.791	1.792.107
4222	Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata		1.773.785			1.773.785	1.807.780	1.846.005	1.892.353
4223	Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur		1.983.174			1.983.174	2.022.143	2.065.960	2.119.102
4224	Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan		1.735.385			1.735.385	1.765.109	1.798.535	1.839.059
4225	Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa		1.591.228			1.591.228	1.616.780	1.645.517	1.680.353
4226	Pengawasan Investigasi I		1.729.985			1.729.985	1.738.287	1.747.621	1.758.938
4227	Pengawasan Investigasi II		2.471.009			2.471.009	2.499.506	2.531.547	2.570.396
4228	Pengawasan Investigasi III		2.748.338			2.748.338	2.793.478	2.844.226	2.905.757
4229	Pengawasan Investigasi IV		5.320.648			5.320.648	5.418.220	5.527.906	5.660.903
5237	Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pengawasan Intern Nasional dan Pengembangan Metodologi Pengawasan		33.827.760			33.827.760	34.498.923	35.253.384	36.168.151
7070	Pengawasan Forensik Digital dan Analitika Data		3.060.881	2.483.812		5.544.693	5.601.155	5.664.625	5.741.580
7988	Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran		2.055.534			2.055.534	2.055.534	2.055.534	2.055.534
7989	Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		2.251.205			2.251.205	2.251.205	2.251.205	2.251.205
7990	Pengawasan Bidang Pangan		2.257.436			2.257.436	2.257.436	2.257.436	2.257.436
7991	Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		1.976.295			1.976.295	1.976.295	1.976.295	1.976.295

SK No 154366 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 089

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
089.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.277.334.742**	**312.177.959**	**389.890.196**		**1.979.402.897**	**2.016.581.460**	**2.058.374.449**	**2.109.047.721**
3665	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Hukum dan Komunikasi		2.627.112			2.627.112	2.679.219	2.737.810	2.808.853
3666	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Sumber Daya Manusia		29.612.612			29.612.612	30.200.125	30.860.577	31.661.358
3667	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Keuangan	1.259.451.384	52.070.595			1.311.521.979	1.337.718.292	1.367.165.307	1.402.869.298
3668	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Manajemen Kinerja Organisasi, dan Tata Kelola		2.734.284			2.734.284	2.788.522	2.849.496	2.923.444
3669	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Sarana Prasarana dan Layanan Internal		38.769.368	179.980.054		218.749.422	220.805.922	223.117.636	225.920.544
3676	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	17.883.358	186.363.988	209.910.142		414.157.488	422.389.380	431.643.623	442.864.224
	JUMLAH RM	**1.277.334.742**	**526.868.942**	**86.025.123**		**1.890.228.807**	**1.927.251.989**	**1.968.871.529**	**2.019.334.448**
	JUMLAH PNBP		**55.681.001**	**22.349.035**		**78.030.036**	**79.578.191**	**81.318.497**	**83.428.583**
	JUMLAH PLN		**111.139.860**	**295.539.850**		**406.679.710**	**412.725.970**	**419.522.550**	**427.763.262**
	TOTAL JUMLAH	**1.277.334.742**	**693.689.803**	**403.914.008**		**2.374.938.553**	**2.419.556.150**	**2.469.712.576**	**2.530.526.293**

SK No 154365 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
090	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**	**703.898.805**	**684.105.955**	**12.359.470**		**1.400.364.230**	**1.416.811.315**	**1.426.504.333**	**1.438.257.014**
090.01	**Sekretariat Jenderal**	**696.708.105**	**498.735.572**	**8.073.000**		**1.203.516.677**	**1.210.033.370**	**1.217.359.273**	**1.226.241.856**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**696.708.105**	**498.735.572**	**8.073.000**		**1.203.516.677**	**1.210.033.370**	**1.217.359.273**	**1.226.241.856**
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**	**696.708.105**	**498.735.572**	**8.073.000**		**1.203.516.677**	**1.210.033.370**	**1.217.359.273**	**1.226.241.856**
090.01.EE	**Program Perdagangan Luar Negeri**		**70.343.985**			**70.343.985**	**71.493.423**	**72.785.678**	**74.352.497**
3714	Penyelenggaraan Atase Perdagangan		33.216.555			33.216.555	33.811.679	34.480.772	35.292.025
3777	Pengembangan Promosi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)		33.800.000			33.800.000	34.344.008	34.955.568	35.697.076
3973	Layanan Advokasi Perdagangan		977.430			977.430	987.736	999.338	1.013.396
8016	Pengelolaan Kerja Sama Bidang Ekonomi di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan		2.350.000			2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
090.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**696.708.105**	**424.935.427**	**8.073.000**		**1.129.716.532**	**1.135.074.025**	**1.141.096.693**	**1.148.399.141**
3702	Peningkatan Pengelolaan Perencanaan		7.595.841	214.900		7.810.741	7.850.255	7.894.676	7.948.538
3703	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi		7.962.496			7.962.496	7.991.509	8.024.125	8.063.674
3704	Peningkatan Pengelolaan Keuangan	685.034.943	15.808.785	300.000		701.143.728	701.144.720	701.145.835	701.147.187
3705	Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan		94.785.931	100.000		94.885.931	95.398.954	95.975.663	96.674.923
3706	Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan		2.640.144	360.000		3.000.144	3.004.112	3.008.572	3.013.981
3709	Pelayanan Informasi Publik		7.842.820	178.000		8.020.820	8.043.258	8.068.497	8.099.099
3713	Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan	1.037.551	56.177.516	50.000		57.265.067	57.378.148	57.505.277	57.659.417
3718	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan		9.009.110	1.010.000		10.019.110	10.276.869	10.566.619	10.917.944
5048	Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan		36.190.773	3.200.000		39.390.773	40.065.998	40.825.045	41.745.377
6410	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal	10.635.611	186.922.011	2.660.100		200.217.722	203.920.202	208.082.384	213.129.001

SK No 154364 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
090.01.EF	**Program Perdagangan Dalam Negeri**		**3.456.160**			**3.456.160**	**3.465.922**	**3.476.902**	**3.490.218**
3725	Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional		1.585.738			1.585.738	1.595.500	1.606.480	1.619.796
8017	Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi		1.170.422			1.170.422	1.170.422	1.170.422	1.170.422
8018	Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)		700.000			700.000	700.000	700.000	700.000
090.02	**Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri**		**20.923.439**			**20.923.439**	**21.145.194**	**21.394.517**	**21.696.820**
04	**FUNGSI EKONOMI**		**20.923.439**			**20.923.439**	**21.145.194**	**21.394.517**	**21.696.820**
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**		**20.923.439**			**20.923.439**	**21.145.194**	**21.394.517**	**21.696.820**
090.02.EF	**Program Perdagangan Dalam Negeri**		**10.718.887**			**10.718.887**	**10.821.813**	**10.937.541**	**11.077.861**
3716	Peningkatan Pemasaran Produk Dalam Negeri		2.079.349			2.079.349	2.109.314	2.143.002	2.183.848
3720	Peningkatan Sinergi Pengendalian Distribusi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang Dalam Pengawasan		3.365.108			3.365.108	3.369.451	3.374.334	3.380.256
3722	Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan		1.613.305			1.613.305	1.613.305	1.613.305	1.613.305
5090	Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik		2.074.121			2.074.121	2.113.608	2.158.010	2.211.844
6907	Pengembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa		1.587.004			1.587.004	1.616.135	1.648.890	1.688.608
090.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**10.204.552**			**10.204.552**	**10.323.381**	**10.456.976**	**10.618.959**
3719	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Dalam Negeri		10.204.552			10.204.552	10.323.381	10.456.976	10.618.959
090.03	**Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri**		**14.282.144**			**14.282.144**	**14.352.904**	**14.432.484**	**14.528.978**
04	**FUNGSI EKONOMI**		**14.282.144**			**14.282.144**	**14.352.904**	**14.432.484**	**14.528.978**
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**		**14.282.144**			**14.282.144**	**14.352.904**	**14.432.484**	**14.528.978**
090.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**11.087.864**			**11.087.864**	**11.128.398**	**11.173.969**	**11.229.221**
3729	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri		11.087.864			11.087.864	11.128.398	11.173.969	11.229.221

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
090.03.EE	**Program Perdagangan Luar Negeri**		**3.194.280**			**3.194.280**	**3.224.506**	**3.258.515**	**3.299.757**
3730	Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan		575.000			575.000	575.000	575.000	575.000
3731	Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan		635.000			635.000	641.645	649.117	658.175
3736	Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor		885.000			885.000	898.669	914.055	932.718
3737	Pengelolaan Impor		525.000			525.000	525.000	525.000	525.000
3745	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar		574.280			574.280	584.192	595.343	608.864
090.04	**Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional**		**17.253.078**			**17.253.078**	**25.222.980**	**25.385.659**	**25.582.906**
04	**FUNGSI EKONOMI**		**17.253.078**			**17.253.078**	**25.222.980**	**25.385.659**	**25.582.906**
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**		**17.253.078**			**17.253.078**	**25.222.980**	**25.385.659**	**25.582.906**
090.04.EE	**Program Perdagangan Luar Negeri**		**10.496.960**			**10.496.960**	**18.322.146**	**18.322.146**	**18.322.146**
3738	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional		6.591.230			6.591.230	9.092.929	9.092.929	9.092.929
3740	Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik		675.000			675.000	1.491.950	1.491.950	1.491.950
3741	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia		600.000			600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3742	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN		800.526			800.526	2.001.315	2.001.315	2.001.315
3743	Perundingan Perdagangan Bilateral		1.085.751			1.085.751	2.695.198	2.695.198	2.695.198
3744	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional		744.453			744.453	1.240.754	1.240.754	1.240.754
090.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**6.756.118**			**6.756.118**	**6.900.834**	**7.063.513**	**7.260.760**
3739	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional		6.756.118			6.756.118	6.900.834	7.063.513	7.260.760
090.05	**Inspektorat Jenderal**		**9.254.414**			**9.254.414**	**9.377.569**	**9.516.012**	**9.683.873**
04	**FUNGSI EKONOMI**		**9.254.414**			**9.254.414**	**9.377.569**	**9.516.012**	**9.683.873**
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**		**9.254.414**			**9.254.414**	**9.377.569**	**9.516.012**	**9.683.873**

SK No 154362 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
090.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**9.254.414**			**9.254.414**	**9.377.569**	**9.516.012**	**9.683.873**
3746	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal		7.260.414			7.260.414	7.383.569	7.522.012	7.689.873
3747	Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah I		469.600			469.600	469.600	469.600	469.600
3748	Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah II		479.138			479.138	479.138	479.138	479.138
3749	Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah III		515.368			515.368	515.368	515.368	515.368
3750	Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah IV		529.894			529.894	529.894	529.894	529.894
090.06	**Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional**		**18.441.474**			**18.441.474**	**18.649.100**	**18.882.723**	**19.166.011**
04	**FUNGSI EKONOMI**		**18.441.474**			**18.441.474**	**18.649.100**	**18.882.723**	**19.166.011**
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**		**18.441.474**			**18.441.474**	**18.649.100**	**18.882.723**	**19.166.011**
090.06.EE	**Program Perdagangan Luar Negeri**		**10.261.360**			**10.261.360**	**10.402.394**	**10.561.081**	**10.753.509**
3751	Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor		400.000			400.000	407.908	416.839	427.649
3753	Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor		3.150.000			3.150.000	3.156.243	3.163.268	3.171.786
6904	Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif		2.150.000			2.150.000	2.192.635	2.240.592	2.298.731
6905	Pengembangan Ekspor Produk Primer		2.400.000			2.400.000	2.443.629	2.492.699	2.552.195
6906	Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur		2.161.360			2.161.360	2.201.979	2.247.683	2.303.148
090.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**8.180.114**			**8.180.114**	**8.246.706**	**8.321.642**	**8.412.502**
3752	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PEN		8.180.114			8.180.114	8.246.706	8.321.642	8.412.502
090.07	**Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi**		**8.553.077**			**8.553.077**	**8.634.236**	**8.725.510**	**8.836.178**
04	**FUNGSI EKONOMI**		**8.553.077**			**8.553.077**	**8.634.236**	**8.725.510**	**8.836.178**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**		**8.553.077**			**8.553.077**	**8.634.236**	**8.725.510**	**8.836.178**
090.07.EF	**Program Perdagangan Dalam Negeri**		**2.600.000**			**2.600.000**	**2.620.559**	**2.643.705**	**2.671.771**
3759	Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas		625.000			625.000	632.578	641.100	651.431
3760	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas		745.000			745.000	752.239	760.399	770.297
3761	Peningkatan Efektifitas Kebijakan dan Pelayanan Hukum		525.000			525.000	527.602	530.530	534.079
3762	Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi		705.000			705.000	708.140	711.676	715.964
090.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**5.953.077**			**5.953.077**	**6.013.677**	**6.081.805**	**6.164.407**
3758	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi		5.953.077			5.953.077	6.013.677	6.081.805	6.164.407
090.08	**Badan Kebijakan Perdagangan**		**9.125.481**			**9.125.481**	**9.162.053**	**9.203.172**	**9.253.024**
04	**FUNGSI EKONOMI**		**9.125.481**			**9.125.481**	**9.162.053**	**9.203.172**	**9.253.024**
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**		**9.125.481**			**9.125.481**	**9.162.053**	**9.203.172**	**9.253.024**
090.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**9.125.481**			**9.125.481**	**9.162.053**	**9.203.172**	**9.253.024**
3763	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Perdagangan		5.789.231			5.789.231	5.825.803	5.866.922	5.916.774
6901	Dukungan terhadap kebijakan perdagangan domestik		878.750			878.750	878.750	878.750	878.750
6902	Dukungan terhadap kebijakan ekspor impor dan pengamanan perdagangan		1.578.750			1.578.750	1.578.750	1.578.750	1.578.750
6903	Dukungan terhadap kebijakan perdagangan internasional		878.750			878.750	878.750	878.750	878.750
090.09	**Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga**		**53.596.661**	**3.894.490**		**57.491.151**	**58.235.546**	**59.072.602**	**60.087.498**
04	**FUNGSI EKONOMI**		**53.596.661**	**3.894.490**		**57.491.151**	**58.235.546**	**59.072.602**	**60.087.498**
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**		**53.596.661**	**3.894.490**		**57.491.151**	**58.235.546**	**59.072.602**	**60.087.498**
090.09.EF	**Program Perdagangan Dalam Negeri**		**17.276.693**	**3.835.490**		**21.112.183**	**21.402.748**	**21.729.634**	**22.125.960**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3724	Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen		429.280			429.280	438.128	448.074	460.135
3726	Peningkatan Tertib Ukur		5.694.666	2.735.490		8.430.156	8.525.636	8.633.081	8.763.361
3727	Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa		858.380			858.380	871.093	885.416	902.771
3732	Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang		3.634.670	500.000		4.134.670	4.215.403	4.306.174	4.416.226
3733	Standardisasi dan Pengendalian Mutu		214.958			214.958	219.199	223.974	229.761
3734	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi		2.046.560	600.000		2.646.560	2.674.768	2.706.496	2.744.967
3735	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi		2.192.511			2.192.511	2.213.770	2.237.679	2.266.665
3992	Peningkatan Tertib Niaga		2.205.668			2.205.668	2.244.751	2.288.740	2.342.074
090.09.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**36.319.968**	**59.000**		**36.378.968**	**36.832.798**	**37.342.968**	**37.961.538**
3977	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga		36.319.968	59.000		36.378.968	36.832.798	37.342.968	37.961.538
090.11	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan**	**7.190.700**	**33.940.615**	**391.980**		**41.523.295**	**41.998.363**	**42.532.381**	**43.179.870**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**7.190.700**	**5.359.300**			**12.550.000**	**12.692.670**	**12.853.044**	**13.047.495**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**7.190.700**	**5.359.300**			**12.550.000**	**12.692.670**	**12.853.044**	**13.047.495**
090.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**7.190.700**	**5.359.300**			**12.550.000**	**12.692.670**	**12.853.044**	**13.047.495**
3723	Penyelenggaraan Akademi Metrologi	7.190.700	5.359.300			12.550.000	12.692.670	12.853.044	13.047.495
04	**FUNGSI EKONOMI**		**28.581.315**	**391.980**		**28.973.295**	**29.305.693**	**29.679.337**	**30.132.375**
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**		**28.581.315**	**391.980**		**28.973.295**	**29.305.693**	**29.679.337**	**30.132.375**
090.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**24.897.419**	**391.980**		**25.289.399**	**25.621.797**	**25.995.441**	**26.448.479**
3707	Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan		12.077.465	202.980		12.280.445	12.280.445	12.280.445	12.280.445
6900	Pengelolaan Jabatan Fungsional Perdagangan		2.907.820			2.907.820	2.907.820	2.907.820	2.907.820

SK No 154359 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8019	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan		9.912.134	189.000		10.101.134	10.433.532	10.807.176	11.260.214
090.11.EE	**Program Perdagangan Luar Negeri**		**3.683.896**			**3.683.896**	**3.683.896**	**3.683.896**	**3.683.896**
3756	Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan		3.683.896			3.683.896	3.683.896	3.683.896	3.683.896
	JUMLAH RM	**703.898.805**	**642.970.549**	**8.964.980**		**1.355.834.334**	**1.372.856.716**	**1.382.194.880**	**1.393.517.317**
	JUMLAH PNBP		**41.135.406**	**3.394.490**		**44.529.896**	**43.954.599**	**44.309.453**	**44.739.697**
	TOTAL JUMLAH	**703.898.805**	**684.105.955**	**12.359.470**		**1.400.364.230**	**1.416.811.315**	**1.426.504.333**	**1.438.257.014**

SK No 154358 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 092

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
092	**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**189.502.164**	**960.517.624**	**5.980.212**		**1.156.000.000**	**1.244.718.082**	**1.270.255.890**	**1.301.220.048**
092.01	**Kementerian Pemuda dan Olah Raga**	**189.502.164**	**960.517.624**	**5.980.212**		**1.156.000.000**	**1.244.718.082**	**1.270.255.890**	**1.301.220.048**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**243.812.733**			**243.812.733**	**312.163.094**	**319.091.295**	**327.491.621**
10.10	**PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**		**243.812.733**			**243.812.733**	**312.163.094**	**319.091.295**	**327.491.621**
092.01.DA	**Program Keolahragaan**		**187.312.733**			**187.312.733**	**254.482.640**	**260.083.811**	**266.875.141**
3820	Pengembangan Olahraga Layanan Khusus		17.500.000			17.500.000	17.744.058	18.018.423	18.351.079
3821	Pengembangan Olahraga Pendidikan		30.018.538			30.018.538	31.641.954	31.801.536	31.995.023
3822	Pengembangan Olahraga Masyarakat		31.250.000			31.250.000	35.520.783	36.668.262	38.059.557
3823	Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda		108.544.195			108.544.195	169.575.845	173.595.590	178.469.482
092.01.DB	**Program Kepemudaan**		**56.500.000**			**56.500.000**	**57.680.454**	**59.007.484**	**60.616.480**
7841	Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta		15.217.680			15.217.680	10.406.340	10.638.289	10.919.527
7842	Transformasi Organisasi dan Komunitas Pemuda		13.352.320			13.352.320	13.437.240	13.737.663	14.101.921
7843	Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah		10.800.000			10.800.000	12.044.010	12.318.332	12.650.949
7844	Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan		4.000.000			4.000.000	8.398.400	8.621.431	8.891.847
7845	Pengembangan Kepemudaan Global		13.130.000			13.130.000	13.394.464	13.691.769	14.052.236
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**189.502.164**	**165.027.836**	**3.020.000**		**357.550.000**	**364.114.547**	**371.493.860**	**380.441.136**
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**189.502.164**	**165.027.836**	**3.020.000**		**357.550.000**	**364.114.547**	**371.493.860**	**380.441.136**
092.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**189.502.164**	**165.027.836**	**3.020.000**		**357.550.000**	**364.114.547**	**371.493.860**	**380.441.136**
1720	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga		1.669.236			1.669.236	6.066.263	6.088.567	6.115.609
1721	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		4.880.627			4.880.627	10.222.948	10.245.251	10.272.294

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 092

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3805	Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur		2.500.000			2.500.000	1.019.833	1.042.136	1.069.176
3806	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Pemuda dan Olahraga			3.000.000		3.000.000	3.019.840	3.042.142	3.069.184
6971	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol		9.583.025			9.583.025	5.099.196	5.210.710	5.345.921
6972	Perencanaan, Penganggaran, Manajemen Kinerja, dan Data		9.246.139	20.000		9.266.139	8.365.619	8.551.390	8.776.619
6973	Penyelenggaraan Hukum dan Kerjasama		5.457.562			5.457.562	4.181.333	4.272.779	4.383.645
6974	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keorganisasian		8.951.739			8.951.739	3.039.649	3.084.255	3.138.342
7851	Pengelolaan Keuangan dan Umum	189.502.164	120.497.836			310.000.000	316.070.058	322.893.368	331.166.522
7909	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga		830.946			830.946	3.519.839	3.542.142	3.569.184
7910	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pelayanan Pemuda		1.410.726			1.410.726	3.509.969	3.521.120	3.534.640
08	**FUNGSI PARIWISATA**		**551.677.055**	**2.960.212**		**554.637.267**	**568.440.441**	**579.670.735**	**593.287.291**
08.02	**PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**		**551.677.055**	**2.960.212**		**554.637.267**	**568.440.441**	**579.670.735**	**593.287.291**
092.01.DA	**Program Keolahragaan**		**551.677.055**	**2.960.212**		**554.637.267**	**568.440.441**	**579.670.735**	**593.287.291**
3824	Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi		5			5	50.152.760	50.324.491	50.532.720
3829	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi		47.816.260			47.816.260	40.073.403	40.155.926	40.255.985
3833	Pembinaan Olahragawan Elit		458.782.002			458.782.002	419.311.726	428.654.877	439.983.292
6657	Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan		30.039.788	2.960.212		33.000.000	33.625.129	34.327.900	35.179.998
7846	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga		4.239.000			4.239.000	10.342.056	10.951.374	11.690.161
7847	Pengembangan Wisata Olahraga		3.600.000			3.600.000	3.669.438	3.747.499	3.842.145
7848	Pembinaan Olahraga Profesional		3			3	3.927.373	4.014.351	4.119.818
7849	Peningkatan Pengelolaan Jasa, Sarana dan Prasarana Olahraga		4			4	3.684.320	3.779.108	3.894.037

SK No 154356 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 092

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7850	Peningkatan Promosi dan Kemitraan Global Olahraga		7.199.993			7.199.993	3.654.236	3.715.209	3.789.135
	JUMLAH RM	**189.502.164**	**930.477.836**	**3.020.000**		**1.123.000.000**	**1.211.092.953**	**1.235.927.990**	**1.266.040.050**
	JUMLAH BLU		**30.039.788**	**2.960.212**		**33.000.000**	**33.625.129**	**34.327.900**	**35.179.998**
	TOTAL JUMLAH	**189.502.164**	**960.517.624**	**5.980.212**		**1.156.000.000**	**1.244.718.082**	**1.270.255.890**	**1.301.220.048**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 093

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
093	**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**	**980.497.704**	**526.001.819**	**75.361.130**		**1.581.860.653**	**1.643.437.962**	**1.706.484.195**	**1.776.508.481**
093.01	**Komisi Pemberantasan Korupsi**	**980.497.704**	**526.001.819**	**75.361.130**		**1.581.860.653**	**1.643.437.962**	**1.706.484.195**	**1.776.508.481**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**980.497.704**	**526.001.819**	**75.361.130**		**1.581.860.653**	**1.643.437.962**	**1.706.484.195**	**1.776.508.481**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**980.497.704**	**526.001.819**	**75.361.130**		**1.581.860.653**	**1.643.437.962**	**1.706.484.195**	**1.776.508.481**
093.01.BC	**Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi**		**268.409.490**	**61.361.346**		**329.770.836**	**332.823.260**	**334.893.363**	**337.867.713**
3843	Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi		29.150.137			29.150.137	31.471.813	32.632.805	34.954.498
3845	Pengelolaan LHKPN		3.304.204			3.304.204	3.304.204	3.304.204	3.304.204
3846	Pengelolaan Gratifikasi dan Pemantauan Layanan Publik Pemerintahan		1.614.120			1.614.120	1.614.120	1.614.120	1.625.660
3850	Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi		11.274.804	61.361.346		72.636.150	72.636.150	72.636.150	72.636.150
3851	Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama Antara Lembaga/Instansi (PJKAKI)		6.868.000			6.868.000	6.868.000	6.868.000	6.868.000
3855	Penanganan Laporan dan Pengaduan Masyarakat		2.595.850			2.595.850	2.595.850	2.595.850	2.595.850
6564	Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi		32.283.260			32.283.260	32.283.260	32.283.260	32.283.260
6565	Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi		9.735.466			9.735.466	11.083.439	11.324.850	11.568.234
6566	Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi		12.046.547			12.046.547	12.178.639	12.316.248	12.453.857
6567	Pemantauan dan Kajian terhadap Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Perspektif Antikorupsi		26.854.290			26.854.290	26.854.290	26.854.290	26.854.290
6568	Anti Korupsi pada Badan Usaha		2.899.218			2.899.218	1.889.778	2.159.743	2.159.743
6569	Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Setiap Jejaring Pendidikan		22.747.319			22.747.319	22.795.445	22.843.573	22.891.700
6570	Deteksi dan Analisis Anti Korupsi		5.799.949			5.799.949	6.011.946	6.223.944	6.435.941
6991	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi		101.236.326			101.236.326	101.236.326	101.236.326	101.236.326
093.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**980.497.704**	**257.592.329**	**13.999.784**		**1.252.089.817**	**1.310.614.702**	**1.371.590.832**	**1.438.640.768**

SK No 154354 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 093

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3834	Perancangan Hukum, Litigasi, dan Bantuan Hukum		1.800.000			1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3835	Penyelenggaraan Humas		7.060.200	100.000		7.160.200	7.160.200	7.160.200	7.160.200
3836	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan		719.364			719.364	719.364	719.364	719.364
3837	Manajemen Sumber Daya Manusia	980.497.704	12.865.626			993.363.330	1.043.128.490	1.094.604.620	1.148.654.556
3838	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (KPK)		219.013.781	13.899.784		232.913.565	241.673.290	251.173.290	264.173.290
5645	Penyelenggaraan Dukungan Internal Kesekretariatan		5.590.030			5.590.030	9.619.024	9.619.024	9.619.024
6563	Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi		5.803.219			5.803.219	5.803.219	5.803.219	5.803.219
6992	Pengawasan Internal KPK		711.115			711.115	711.115	711.115	711.115
8082	Dukungan Internal dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Kode Etik, dan Kode Perilaku KPK		4.028.994			4.028.994			
	JUMLAH RM	**980.497.704**	**526.001.819**	**75.361.130**		**1.581.860.653**	**1.643.437.962**	**1.706.484.195**	**1.776.508.481**
	TOTAL JUMLAH	**980.497.704**	**526.001.819**	**75.361.130**		**1.581.860.653**	**1.643.437.962**	**1.706.484.195**	**1.776.508.481**

SK No 154353 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 095

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
095	**DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**	**576.689.572**	**1.222.510.428**	**800.000**		**1.800.000.000**	**1.827.690.818**	**1.858.818.226**	**1.896.559.771**
095.01	**Sekretariat Jenderal DPD RI**	**199.379.875**	**115.131.484**	**800.000**		**315.311.359**	**321.545.959**	**328.554.309**	**337.051.894**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**199.379.875**	**115.131.484**	**800.000**		**315.311.359**	**321.545.959**	**328.554.309**	**337.051.894**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**199.379.875**	**115.131.484**	**800.000**		**315.311.359**	**321.545.959**	**328.554.309**	**337.051.894**
095.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**199.379.875**	**115.131.484**	**800.000**		**315.311.359**	**321.545.959**	**328.554.309**	**337.051.894**
3856	Pengelolaan Organisasi Dan Sumber Daya Manusia		399.000			399.000	406.915	415.815	426.605
3857	Pengelolaan Perencanaan Dan Keuangan	199.379.875	24.657.176			224.037.051	228.482.152	233.478.857	239.537.264
3859	Pengelolaan Sistem Dan Teknologi		14.322.076	800.000		15.122.076	15.412.905	15.739.834	16.136.226
3961	Pengelolaan Layanan Umum, Sarana Dan Prasarana Di Kantor Pusat		44.120.000			44.120.000	44.995.377	45.979.382	47.172.476
5241	Pengelolaan Dukungan Administrasi Di Daerah Pemilihan		31.633.232			31.633.232	32.248.610	32.940.421	33.779.323
095.02	**Dewan Perwakilan Daerah**	**377.309.697**	**1.107.378.944**			**1.484.688.641**	**1.506.144.859**	**1.530.263.917**	**1.559.507.877**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**377.309.697**	**1.107.378.944**			**1.484.688.641**	**1.506.144.859**	**1.530.263.917**	**1.559.507.877**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**377.309.697**	**1.107.378.944**			**1.484.688.641**	**1.506.144.859**	**1.530.263.917**	**1.559.507.877**
095.02.CF	**Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan**		**1.082.240.817**			**1.082.240.817**	**1.103.697.035**	**1.127.816.093**	**1.157.060.053**
7983	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPD RI		899.008.639			899.008.639	916.833.791	936.870.966	961.165.712
7984	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPD RI		65.358.079			65.358.079	66.650.508	68.103.439	69.865.098
7985	Pengelolaan Kerumahtanggan Dan Kerjasama Parlemen DPD RI		40.824.578			40.824.578	41.634.536	42.545.043	43.649.024
7986	Pemasyarakatan Produk Hukum DPD RI		77.049.521			77.049.521	78.578.200	80.296.645	82.380.219
095.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**377.309.697**	**25.138.127**			**402.447.824**	**402.447.824**	**402.447.824**	**402.447.824**
6383	Pengelolaan Keuangan Keanggotaan DPD dan Operasional Persidangan dan Rapat-rapat	377.309.697	25.138.127			402.447.824	402.447.824	402.447.824	402.447.824

SK No 154352 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 095

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH RM	576.689.572	1.222.510.428	800.000		1.800.000.000	1.827.690.818	1.858.818.226	1.896.559.771
	TOTAL JUMLAH	576.689.572	1.222.510.428	800.000		1.800.000.000	1.827.690.818	1.858.818.226	1.896.559.771

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 100

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**	**65.640.375**	**125.159.659**	**4.453.120**		**195.253.154**	**198.854.440**	**202.902.915**	**207.811.635**
100.01	**Komisi Yudisial RI**	**65.640.375**	**125.159.659**	**4.453.120**		**195.253.154**	**198.854.440**	**202.902.915**	**207.811.635**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**65.640.375**	**125.159.659**	**4.453.120**		**195.253.154**	**198.854.440**	**202.902.915**	**207.811.635**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**65.640.375**	**125.159.659**	**4.453.120**		**195.253.154**	**198.854.440**	**202.902.915**	**207.811.635**
100.01.BH	**Program Penegakan Integritas Hakim**		**39.232.241**			**39.232.241**	**40.004.812**	**40.873.366**	**41.926.469**
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim		6.934.733			6.934.733	7.072.301	7.226.970	7.414.495
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH		13.407.228			13.407.228	13.667.478	13.960.053	14.314.798
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim		18.890.280			18.890.280	19.265.033	19.686.343	20.197.176
100.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**65.640.375**	**85.927.418**	**4.453.120**		**156.020.913**	**158.849.628**	**162.029.549**	**165.885.166**
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	65.640.375	52.016.738	3.858.120		121.515.233	123.763.887	126.291.660	129.356.532
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik		17.886.778	595.000		18.481.778	18.848.411	19.260.603	19.760.392
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		16.023.902			16.023.902	16.237.330	16.477.286	16.768.242
	JUMLAH RM	**65.640.375**	**125.159.659**	**4.453.120**		**195.253.154**	**198.854.440**	**202.902.915**	**207.811.635**
	TOTAL JUMLAH	**65.640.375**	**125.159.659**	**4.453.120**		**195.253.154**	**198.854.440**	**202.902.915**	**207.811.635**

SK No 154350 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 103

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)**	**157.242.676**	**83.720.281**		**250.000.000**	**490.962.957**	**500.656.414**	**511.552.763**	**524.764.390**
103.01	**Badan Nasional Penanggulangan Bencana**	**157.242.676**	**83.720.281**		**250.000.000**	**490.962.957**	**500.656.414**	**511.552.763**	**524.764.390**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**157.242.676**	**83.720.281**		**250.000.000**	**490.962.957**	**500.656.414**	**511.552.763**	**524.764.390**
03.02	**PENANGGULANGAN BENCANA**	**157.242.676**	**83.720.281**		**250.000.000**	**490.962.957**	**500.656.414**	**511.552.763**	**524.764.390**
103.01.FA	**Program Ketahanan Bencana**				**250.000.000**	**250.000.000**	**254.913.069**	**260.435.787**	**267.131.986**
3891	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Dukungan Sumber Daya Darurat				250.000.000	250.000.000	254.913.069	260.435.787	267.131.986
103.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**157.242.676**	**83.720.281**			**240.962.957**	**245.743.345**	**251.116.976**	**257.632.404**
3874	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BNPB	157.242.676	2.174.820			159.417.496	162.580.487	166.135.976	170.446.943
3876	Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum		79.909.561			79.909.561	81.495.032	83.277.256	85.438.172
3878	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana		1.635.900			1.635.900	1.667.826	1.703.744	1.747.289
	JUMLAH RM	**157.242.676**	**82.084.381**		**250.000.000**	**489.327.057**	**498.988.588**	**509.849.019**	**523.017.101**
	JUMLAH PNBP		**1.635.900**			**1.635.900**	**1.667.826**	**1.703.744**	**1.747.289**
	TOTAL JUMLAH	**157.242.676**	**83.720.281**		**250.000.000**	**490.962.957**	**500.656.414**	**511.552.763**	**524.764.390**

SK No 154349 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 104

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**	**260.213.390**	**282.106.011**	**4.016.767**		**546.336.168**	**555.912.094**	**566.677.144**	**579.729.631**
104.01	**SEKRETARIAT JENDERAL**	**260.213.390**	**282.106.011**	**4.016.767**		**546.336.168**	**555.912.094**	**566.677.144**	**579.729.631**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**260.213.390**	**282.106.011**	**4.016.767**		**546.336.168**	**555.912.094**	**566.677.144**	**579.729.631**
04.02	**TENAGA KERJA**	**260.213.390**	**282.106.011**	**4.016.767**		**546.336.168**	**555.912.094**	**566.677.144**	**579.729.631**
104.01.DP	**Program Penempatan, Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia**		**67.943.684**	**1.842.483**		**69.786.167**	**70.743.241**	**71.819.682**	**73.124.880**
3894	Pelayanan Penempatan, Pelindungan dan Pemberdayaan PMI		42.070.684	1.395.483		43.466.167	44.191.194	45.006.638	45.995.371
7798	Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri		574.000	126.000		700.000	712.210	725.951	742.610
7799	Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia		700.000			700.000	712.094	725.700	742.196
7800	Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia		700.000			700.000	711.699	724.855	740.812
7801	Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri		554.000	146.000		700.000	707.978	716.957	727.845
7803	Penempatan Nonpemerintah Pada Pemberi Kerja Perseorangan		700.000			700.000	704.621	709.820	716.124
7804	Penempatan Nonpemerintah Pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum		700.000			700.000	706.645	714.124	723.196
7805	Penempatan Pemerintah		13.420.000			13.420.000	13.474.273	13.535.293	13.609.279
7806	Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran		700.000			700.000	708.262	717.555	728.820
7807	Kelembagaan Penempatan		1.000.000			1.000.000	1.013.503	1.028.688	1.047.101
7809	Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		700.000			700.000	711.619	724.690	740.535
7810	Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan		700.000			700.000	708.448	717.953	729.477
7811	Layanan Pengaduan, Mediasi dan Advokasi Pekerja Migran Indonesia Pada Pemberi Kerja Perseorangan		700.000			700.000	713.827	729.378	748.234
7812	Layanan Pengaduan, Mediasi dan Advokasi Pekerja Migran Indonesia Pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum		700.000			700.000	713.830	729.387	748.252

SK No 154348 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 104

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7813	Bina Kemitraan Pelindungan		700.000			700.000	709.111	719.359	731.787
7815	Literasi Keuangan Pekerja Migran Indonesia dan Pemanfaatan Remitansi		700.000			700.000	706.926	714.717	724.167
7816	Kepulangan dan Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia		1.400.000			1.400.000	1.424.670	1.452.416	1.486.057
7817	Reintegrasi dan Penguatan Keluarga Pekerja Migran Indonesia		700.000			700.000	704.966	710.553	717.325
7818	Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga		525.000	175.000		700.000	707.365	715.648	725.692
104.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**260.213.390**	**214.162.327**	**2.174.284**		**476.550.001**	**485.168.853**	**494.857.462**	**506.604.751**
4587	Dukungan Manajemen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	260.213.390	178.399.331			438.612.721	447.231.573	456.920.182	468.667.471
8051	Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, Rumah Tangga dan Kearsipan		1.000.000	700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
8052	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Kelembagaan		700.000			700.000	700.000	700.000	700.000
8053	Pengelolaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Program, Anggaran, Manajemen Kinerja dan Kerja Sama		700.000			700.000	700.000	700.000	700.000
8054	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan		11.398.307			11.398.307	11.398.307	11.398.307	11.398.307
8055	Pengelolaan Penyusunan Produk Hukum		700.000			700.000	700.000	700.000	700.000
8056	Peningkatan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		5.381.750	118.250		5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
8057	Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur		700.000			700.000	700.000	700.000	700.000
8058	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Internal Wilayah I		500.204			500.204	500.204	500.204	500.204
8059	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Internal Wilayah II		500.204			500.204	500.204	500.204	500.204
8060	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Internal Wilayah III		500.204			500.204	500.204	500.204	500.204
8061	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri		1.431.600	68.400		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 104

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8062	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Penempatan		3.495.000	5.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
8063	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pelindungan		1.910.000	90.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8064	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pemberdayaan		1.259.910	240.090		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8065	Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal		1.675.664	173.724		1.849.388	1.849.388	1.849.388	1.849.388
8066	Dukungan Manajemen Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		3.910.153	778.820		4.688.973	4.688.973	4.688.973	4.688.973
	JUMLAH RM	**260.213.390**	**279.586.011**	**4.016.767**		**543.816.168**	**553.342.102**	**564.050.948**	**577.035.288**
	JUMLAH PNBP		**2.520.000**			**2.520.000**	**2.569.992**	**2.626.196**	**2.694.343**
	TOTAL JUMLAH	**260.213.390**	**282.106.011**	**4.016.767**		**546.336.168**	**555.912.094**	**566.677.144**	**579.729.631**

SK No 154392 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 106

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)**	**75.302.562**	**134.673.267**	**6.291.125**		**216.266.954**	**220.281.845**	**224.795.249**	**230.267.640**
106.01	**Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**	**75.302.562**	**134.673.267**	**6.291.125**		**216.266.954**	**220.281.845**	**224.795.249**	**230.267.640**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**75.302.562**	**134.673.267**	**6.291.125**		**216.266.954**	**220.281.845**	**224.795.249**	**230.267.640**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**75.302.562**	**134.673.267**	**6.291.125**		**216.266.954**	**220.281.845**	**224.795.249**	**230.267.640**
106.01.CJ	**Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional**		**74.258.488**	**3.869.000**		**78.127.488**	**79.997.588**	**82.100.052**	**84.649.217**
6319	Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa		14.093.391			14.093.391	14.394.625	14.733.313	15.143.954
6320	Pengelolaan Sistem Informasi PBJ		27.189.392	3.090.000		30.279.392	30.980.558	31.768.772	32.724.469
6321	Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya		16.654.348	744.000		17.398.348	17.802.962	18.257.898	18.809.478
6322	Pengelolaan Advokasi dan Hukum		8.595.219	35.000		8.630.219	8.791.461	8.972.757	9.192.576
6323	Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ		7.726.138			7.726.138	8.027.982	8.367.312	8.778.740
106.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**75.302.562**	**60.414.779**	**2.422.125**		**138.139.466**	**140.284.257**	**142.695.197**	**145.618.423**
5664	Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP		1.227.860			1.227.860	1.227.860	1.227.860	1.227.860
6598	Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum		5.742.195			5.742.195	5.742.195	5.742.195	5.742.195
6599	Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	75.302.562	2.814.109			78.116.671	79.610.743	81.290.213	83.326.543
6600	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran		43.933.792			43.933.792	44.584.511	45.315.981	46.202.877
7033	Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK		6.696.823	2.422.125		9.118.948	9.118.948	9.118.948	9.118.948
	JUMLAH RM	**75.302.562**	**134.673.267**	**6.291.125**		**216.266.954**	**220.281.845**	**224.795.249**	**230.267.640**
	TOTAL JUMLAH	**75.302.562**	**134.673.267**	**6.291.125**		**216.266.954**	**220.281.845**	**224.795.249**	**230.267.640**

SK No 154391 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 107

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	**BADAN SAR NASIONAL**	**578.354.190**	**910.140.289**	**65.181.490**		**1.553.675.969**	**1.581.276.340**	**1.612.302.537**	**1.649.921.270**
107.01	**Badan SAR Nasional**	**578.354.190**	**910.140.289**	**65.181.490**		**1.553.675.969**	**1.581.276.340**	**1.612.302.537**	**1.649.921.270**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**578.354.190**	**910.140.289**	**65.181.490**		**1.553.675.969**	**1.581.276.340**	**1.612.302.537**	**1.649.921.270**
04.08	**TRANSPORTASI**	**578.354.190**	**910.140.289**	**65.181.490**		**1.553.675.969**	**1.581.276.340**	**1.612.302.537**	**1.649.921.270**
107.01.BM	**Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana**		**633.185.536**	**52.000.000**		**685.185.536**	**696.187.300**	**708.554.561**	**723.549.605**
3946	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR		437.433.578	32.000.000		469.433.578	477.761.707	487.123.358	498.474.178
3947	Pembinaan Tenaga SAR		23.385.183			23.385.183	23.407.670	23.432.954	23.463.610
3948	Pengelolaan Operasi SAR		52.828.224			52.828.224	54.555.399	55.663.154	57.006.290
3949	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR		63.726.251			63.726.251	64.741.802	65.883.423	67.267.621
3971	Pembinaan Potensi SAR		6.806.537			6.806.537	6.819.360	6.833.787	6.851.279
3972	Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR		26.716.921			26.716.921	26.208.364	26.470.537	26.788.414
6931	Pengelolaan Diklat SAR		9.073.612			9.073.612	9.242.198	9.431.744	9.661.538
7065	Pengelolaan Teknologi Informasi SAR		13.215.230	20.000.000		33.215.230	33.450.800	33.715.604	34.036.675
107.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**578.354.190**	**276.954.753**	**13.181.490**		**868.490.433**	**885.089.040**	**903.747.976**	**926.371.665**
3941	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan	578.354.190	12.178.913			590.533.103	602.210.242	615.336.711	631.252.313
3942	Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian		2.211.962			2.211.962	2.243.091	2.278.102	2.320.548
3943	Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol		254.244.471			254.244.471	259.029.992	264.409.597	270.932.340
3944	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur			13.181.490		13.181.490	13.181.490	13.181.490	13.181.490
3945	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi		932.231			932.231	950.715	971.507	996.718
4021	Pengawasan dan Pembinaan Internal		1.982.549			1.982.549	2.005.543	2.031.392	2.062.735
6932	Pengelolaan Diklat Aparatur		2.476.799			2.476.799	2.509.598	2.546.468	2.591.174

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 107

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6933	Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama		2.927.828			2.927.828	2.958.369	2.992.709	3.034.347
	JUMLAH RM	**578.354.190**	**909.196.449**	**65.181.490**		**1.552.732.129**	**1.580.313.774**	**1.611.318.920**	**1.648.912.130**
	JUMLAH PNBP		**943.840**			**943.840**	**962.566**	**983.617**	**1.009.140**
	TOTAL JUMLAH	**578.354.190**	**910.140.289**	**65.181.490**		**1.553.675.969**	**1.581.276.340**	**1.612.302.537**	**1.649.921.270**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 108

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**	**48.000.000**	**110.182.893**	**5.316.000**		**163.498.893**	**165.435.315**	**167.612.096**	**170.251.404**
108.01	**Komisi Pengawas Persaingan Usaha**	**48.000.000**	**110.182.893**	**5.316.000**		**163.498.893**	**165.435.315**	**167.612.096**	**170.251.404**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**48.000.000**	**110.182.893**	**5.316.000**		**163.498.893**	**165.435.315**	**167.612.096**	**170.251.404**
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**	**48.000.000**	**110.182.893**	**5.316.000**		**163.498.893**	**165.435.315**	**167.612.096**	**170.251.404**
108.01.EG	**Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan**		**56.000.893**	**316.000**		**56.316.893**	**56.550.456**	**56.813.031**	**57.131.405**
3952	Pengawasan Pelaksanaan Persaingan Usaha		9.038.000			9.038.000	9.182.016	9.343.916	9.540.217
3953	Pengawasan Kemitraan		6.011.000			6.011.000	6.037.911	6.068.169	6.104.859
5275	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha dan Kemitraan		40.951.893	316.000		41.267.893	41.330.529	41.400.946	41.486.329
108.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**48.000.000**	**54.182.000**	**5.000.000**		**107.182.000**	**108.884.859**	**110.799.065**	**113.119.999**
5971	Penyelenggaraan Administrasi Lembaga	48.000.000	42.897.000	5.000.000		95.897.000	97.463.254	99.223.872	101.358.587
5973	Penyelenggaraan Layanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Data dan Informasi		11.285.000			11.285.000	11.421.605	11.575.193	11.761.412
	JUMLAH RM	**48.000.000**	**99.182.893**	**5.316.000**		**152.498.893**	**154.415.417**	**156.537.011**	**159.109.407**
	JUMLAH PNBP		**11.000.000**			**11.000.000**	**11.019.898**	**11.075.085**	**11.141.997**
	TOTAL JUMLAH	**48.000.000**	**110.182.893**	**5.316.000**		**163.498.893**	**165.435.315**	**167.612.096**	**170.251.404**

SK No 154388 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 110

KEMENTERIAN/LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**	**139.563.918**	**111.750.712**	**663.543**		**251.978.173**	**369.996.950**	**387.321.173**	**409.789.719**
110.01	**Ombudsman Republik Indonesia**	**139.563.918**	**111.750.712**	**663.543**		**251.978.173**	**369.996.950**	**387.321.173**	**409.789.719**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**139.563.918**	**111.750.712**	**663.543**		**251.978.173**	**369.996.950**	**387.321.173**	**409.789.719**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**139.563.918**	**111.750.712**	**663.543**		**251.978.173**	**369.996.950**	**387.321.173**	**409.789.719**
110.01.CG	**Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**		**37.022.541**			**37.022.541**	**58.416.056**	**65.948.591**	**76.876.470**
5618	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat		24.009.278			24.009.278	31.281.261	37.480.679	44.699.833
5619	Pencegahan Maladministrasi		12.913.263			12.913.263	24.999.461	26.010.360	29.389.316
5731	Manajemen Mutu		100.000			100.000	2.135.334	2.457.552	2.787.321
110.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**139.563.918**	**74.728.171**	**663.543**		**214.955.632**	**311.580.894**	**321.372.582**	**332.913.249**
4051	Perencanaan dan Keuangan		30.000			30.000	7.730.225	8.564.569	8.970.012
4191	Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		10.000			10.000	752.646	846.017	954.767
4192	Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi		393.000	467.000		860.000	11.977.954	12.140.676	12.337.978
4193	Pengawasan Internal		10.000			10.000	1.648.350	1.768.350	1.888.350
5093	Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi		30.000			30.000	7.951.610	8.424.142	9.242.758
5094	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	139.563.918	74.255.171	196.543		214.015.632	281.520.109	289.628.828	299.519.384
	JUMLAH RM	**139.563.918**	**111.750.712**	**663.543**		**251.978.173**	**369.996.950**	**387.321.173**	**409.789.719**
	TOTAL JUMLAH	**139.563.918**	**111.750.712**	**663.543**		**251.978.173**	**369.996.950**	**387.321.173**	**409.789.719**

SK No 154387 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 111

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)**	**75.812.190**	**180.745.282**	**213.053.403**		**469.610.875**	**474.042.638**	**479.024.621**	**485.065.186**
111.01	**Badan Nasional Pengelola Perbatasan**	**75.812.190**	**180.745.282**	**213.053.403**		**469.610.875**	**474.042.638**	**479.024.621**	**485.065.186**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**75.812.190**	**180.745.282**	**213.053.403**		**469.610.875**	**474.042.638**	**479.024.621**	**485.065.186**
01.06	**PEMBANGUNAN DAERAH**		**34.392.605**	**868.403**		**35.261.008**	**35.459.127**	**35.681.896**	**35.952.012**
111.01.AG	**Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan**		**34.392.605**	**868.403**		**35.261.008**	**35.459.127**	**35.681.896**	**35.952.012**
4592	Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas Negara		11.774.848			11.774.848	11.876.361	11.990.499	12.128.901
4593	Pengelolaan Potensi dan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan		11.613.303			11.613.303	11.664.220	11.721.483	11.790.912
4594	Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan		11.004.454	868.403		11.872.857	11.918.546	11.969.914	12.032.199
01.90	**PELAYANAN UMUM LAINNYA**	**75.812.190**	**146.352.677**	**212.185.000**		**434.349.867**	**438.583.511**	**443.342.725**	**449.113.174**
111.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**75.812.190**	**146.352.677**	**212.185.000**		**434.349.867**	**438.583.511**	**443.342.725**	**449.113.174**
4588	Layanan Legislasi dan Litigasi		1.950.000			1.950.000	1.988.677	2.032.169	2.084.896
4589	Pengelolaan Organisasi, SDM dan Kerjasama		6.705.000	125.000		6.830.000	6.937.706	7.058.807	7.205.642
4590	Layanan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	75.812.190	124.909.677	211.500.000		412.221.867	421.978.304	426.429.209	431.825.849
4591	Pengelolaan Data, Komunikasi dan Informasi Publik		12.788.000	560.000		13.348.000	7.678.824	7.822.540	7.996.787
	JUMLAH RM	**75.812.190**	**180.745.282**	**213.053.403**		**469.610.875**	**474.042.638**	**479.024.621**	**485.065.186**
	TOTAL JUMLAH	**75.812.190**	**180.745.282**	**213.053.403**		**469.610.875**	**474.042.638**	**479.024.621**	**485.065.186**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 112

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)**		**1.598.738.868**	**929.209.662**		**2.527.948.530**	**2.553.222.765**	**2.581.633.359**	**2.616.080.698**
112.01	**Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)**		**1.598.738.868**	**929.209.662**		**2.527.948.530**	**2.553.222.765**	**2.581.633.359**	**2.616.080.698**
04	**FUNGSI EKONOMI**		**1.598.738.868**	**929.209.662**		**2.527.948.530**	**2.553.222.765**	**2.581.633.359**	**2.616.080.698**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**		**1.598.738.868**	**929.209.662**		**2.527.948.530**	**2.553.222.765**	**2.581.633.359**	**2.616.080.698**
112.01.EH	**Program Pengembangan Kawasan Strategis**		**588.119.208**	**840.801.271**		**1.428.920.479**	**1.437.245.478**	**1.446.603.562**	**1.457.950.065**
5123	Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan PBPB Batam		15.534.205	31.671.000		47.205.205	47.205.205	47.205.205	47.205.205
5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kepelabuhanan		66.825.245	565.650		67.390.895	68.067.299	68.827.670	69.749.594
5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Bandara		13.738.467	1.061.316		14.799.783	14.799.783	14.799.783	14.799.783
5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Rumah Sakit		163.026.938	9.835.000		172.861.938	172.861.938	172.861.938	172.861.938
5127	Penyelenggaraan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur		102.278.965	711.224.988		813.503.953	819.396.212	826.019.638	834.050.422
5129	Penyelenggaraan Pelayanan Lalu lintas Barang		2.066.056			2.066.056	2.066.056	2.066.056	2.066.056
5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan SPAM, Fasilitas dan Lingkungan		84.165.090	64.916.803		149.081.893	149.323.464	149.595.016	149.924.273
5134	Penyelenggaraan Pengamanan Aset dan Kawasan		71.186.285	1.543.700		72.729.985	74.117.237	75.676.636	77.567.380
5982	Pengendalian Pengusahaan dan Kerjasama		3.794.012			3.794.012	3.794.012	3.794.012	3.794.012
6651	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur		6.186.135	13.809.658		19.995.793	19.995.793	19.995.793	19.995.793
6652	Penyelenggaraan Pelayanan Investasi dan Promosi		18.216.061			18.216.061	18.343.574	18.486.910	18.660.704
8000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam		14.500.493	4.811.456		19.311.949	19.311.949	19.311.949	19.311.949
8001	Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam		18.781.461	1.361.700		20.143.161	20.143.161	20.143.161	20.143.161
8005	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Pengembangan Kawasan PBPB dan KEK		7.819.795			7.819.795	7.819.795	7.819.795	7.819.795
112.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**1.010.619.660**	**88.408.391**		**1.099.028.051**	**1.115.977.287**	**1.135.029.797**	**1.158.130.633**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 112

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5113	Penyusunan Perencanaan Program Strategis		10.741.834	37.556.345		48.298.179	48.725.600	49.206.064	49.788.619
5114	Pengelolaan dan Pelayanan Umum		181.695.372	13.957.080		195.652.452	197.235.682	199.015.404	201.173.281
5115	Pengelolaan Sumber Daya Manusia		730.803.850	60.000		730.863.850	744.858.798	760.590.341	779.664.563
5116	Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Anggaran		6.380.580			6.380.580	6.380.580	6.380.580	6.380.580
5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum		7.372.260			7.372.260	7.372.260	7.372.260	7.372.260
5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan		3.548.675			3.548.675	3.548.675	3.548.675	3.548.675
5978	Penyusunan Harmonisasi Kebijakan dan Pelayanan Dukungan Strategis		8.034.568			8.034.568	8.034.568	8.034.568	8.034.568
6671	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		6.066.197			6.066.197	6.088.564	6.113.715	6.144.206
6673	Pengelolaan Data Center dan Teknologi Informasi		50.388.193	36.834.966		87.223.159	88.144.429	89.180.059	90.435.750
7999	Pengelolaan Organisasi, Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja		5.588.131			5.588.131	5.588.131	5.588.131	5.588.131
	JUMLAH RM			**80.000.000**		**80.000.000**	**80.000.000**	**80.000.000**	**80.000.000**
	JUMLAH BLU		**1.598.738.868**	**849.209.662**		**2.447.948.530**	**2.473.222.765**	**2.501.633.359**	**2.536.080.698**
	TOTAL JUMLAH		**1.598.738.868**	**929.209.662**		**2.527.948.530**	**2.553.222.765**	**2.581.633.359**	**2.616.080.698**

SK No 154325 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 113

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)**	**100.896.523**	**66.986.346**	**1.551.894.619**		**1.719.777.488**	**970.275.169**	**999.462.732**	**1.029.525.923**
113.01	**Badan Nasional Penanggulangan Terorisme**	**100.896.523**	**66.986.346**	**1.551.894.619**		**1.719.777.488**	**970.275.169**	**999.462.732**	**1.029.525.923**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**100.896.523**	**66.986.346**	**1.551.894.619**		**1.719.777.488**	**970.275.169**	**999.462.732**	**1.029.525.923**
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**	**100.896.523**	**66.986.346**	**1.551.894.619**		**1.719.777.488**	**970.275.169**	**999.462.732**	**1.029.525.923**
113.01.BA	**Program Penanggulangan Terorisme**		**3.819.400**	**1.431.229.728**		**1.435.049.128**	**3.933.982**	**4.052.001**	**4.173.561**
5096	Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan		779.400	1.431.229.728		1.432.009.128	802.782	826.865	851.671
5097	Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan		3.040.000			3.040.000	3.131.200	3.225.136	3.321.890
113.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**100.896.523**	**63.166.946**	**120.664.891**		**284.728.360**	**966.341.187**	**995.410.731**	**1.025.352.362**
5099	Dukungan Administrasi dan SDM	100.896.523	63.166.946	120.664.891		284.728.360	966.341.187	995.410.731	1.025.352.362
	JUMLAH RM	**100.896.523**	**66.986.346**			**167.882.869**	**170.275.169**	**175.462.732**	**180.805.923**
	JUMLAH PLN			**1.431.229.728**		**1.431.229.728**			
	JUMLAH SBSN			**120.664.891**		**120.664.891**	**800.000.000**	**824.000.000**	**848.720.000**
	TOTAL JUMLAH	**100.896.523**	**66.986.346**	**1.551.894.619**		**1.719.777.488**	**970.275.169**	**999.462.732**	**1.029.525.923**

SK No 154381 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 115

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**	**1.308.803.704**	**1.163.630.765**	**500.000**		**2.472.934.469**	**4.163.867.364**	**10.747.162.885**	**11.114.229.566**
115.01	**Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**	**1.308.803.704**	**1.163.630.765**	**500.000**		**2.472.934.469**	**4.163.867.364**	**10.747.162.885**	**11.114.229.566**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**1.308.803.704**	**1.163.630.765**	**500.000**		**2.472.934.469**	**4.163.867.364**	**10.747.162.885**	**11.114.229.566**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**1.308.803.704**	**1.163.630.765**	**500.000**		**2.472.934.469**	**4.163.867.364**	**10.747.162.885**	**11.114.229.566**
115.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.308.803.704**	**1.121.472.928**			**2.430.276.632**	**2.893.843.467**	**2.980.290.117**	**3.069.385.553**
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal		170.000			170.000	170.000	170.000	170.000
4356	Pengelolaan Data dan Informasi		120.000			120.000	120.000	120.000	120.000
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	1.308.803.704	1.009.895.705			2.318.699.409	2.780.317.931	2.864.754.362	2.951.412.442
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM		111.287.223			111.287.223	113.235.536	115.245.755	117.683.111
115.01.CQ	**Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum**		**42.157.837**	**500.000**		**42.657.837**	**1.270.023.897**	**7.766.872.768**	**8.044.844.013**
4358	Fasilitasi Pengawasan Pemilu		3.653.837			3.653.837	1.230.890.141	7.727.593.152	8.005.387.546
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		31.964.000			31.964.000	31.964.000	31.964.000	31.964.000
7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif		3.500.000			3.500.000	3.569.442	3.647.501	3.742.146
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan		2.440.000			2.440.000	2.488.410	2.542.830	2.608.812
7015	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu		600.000	500.000		1.100.000	1.111.904	1.125.285	1.141.509
	JUMLAH RM	**1.308.803.704**	**1.163.630.765**	**500.000**		**2.472.934.469**	**4.163.867.364**	**10.747.162.885**	**11.114.229.566**
	TOTAL JUMLAH	**1.308.803.704**	**1.163.630.765**	**500.000**		**2.472.934.469**	**4.163.867.364**	**10.747.162.885**	**11.114.229.566**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 116

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**	**611.240.964**	**386.464.991**			**997.705.955**	**1.004.883.017**	**1.024.014.428**	**1.047.210.826**
116.01	**Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia**	**611.240.964**	**386.464.991**			**997.705.955**	**1.004.883.017**	**1.024.014.428**	**1.047.210.826**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**611.240.964**	**386.464.991**			**997.705.955**	**1.004.883.017**	**1.024.014.428**	**1.047.210.826**
01.90	**PELAYANAN UMUM LAINNYA**	**611.240.964**	**386.464.991**			**997.705.955**	**1.004.883.017**	**1.024.014.428**	**1.047.210.826**
116.01.GC	**Program Penyiaran Publik**		**15.868.345**			**15.868.345**	**16.032.061**	**16.370.491**	**16.780.725**
5141	Pengembangan Infrastruktur Penyiaran Teknologi dan Media Baru		2.208.148			2.208.148	2.248.976	2.294.880	2.350.535
5142	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik		2.208.149			2.208.149	2.251.937	2.301.182	2.360.898
5143	Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha		2.208.148			2.208.148	2.245.998	2.288.555	2.340.153
5145	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional		9.243.900			9.243.900	9.285.150	9.485.874	9.729.139
116.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**611.240.964**	**370.596.646**			**981.837.610**	**988.850.956**	**1.007.643.937**	**1.030.430.101**
5136	Pengelolaan Keuangan LPP RRI	611.240.964	370.596.646			981.837.610	988.850.956	1.007.643.937	1.030.430.101
	JUMLAH RM	**611.240.964**	**370.596.646**			**981.837.610**	**988.850.956**	**1.007.643.937**	**1.030.430.101**
	JUMLAH PNBP		**15.868.345**			**15.868.345**	**16.032.061**	**16.370.491**	**16.780.725**
	TOTAL JUMLAH	**611.240.964**	**386.464.991**			**997.705.955**	**1.004.883.017**	**1.024.014.428**	**1.047.210.826**

SK No 154379 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 117

KEMENTERIAN/LEMBAGA : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	**TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**	**647.764.774**	**477.917.282**	**34.021.004**		**1.159.703.060**	**1.182.317.201**	**1.207.738.821**	**1.238.561.984**
117.01	**Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia**	**647.764.774**	**477.917.282**	**34.021.004**		**1.159.703.060**	**1.182.317.201**	**1.207.738.821**	**1.238.561.984**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**647.764.774**	**477.917.282**	**34.021.004**		**1.159.703.060**	**1.182.317.201**	**1.207.738.821**	**1.238.561.984**
01.90	**PELAYANAN UMUM LAINNYA**	**647.764.774**	**477.917.282**	**34.021.004**		**1.159.703.060**	**1.182.317.201**	**1.207.738.821**	**1.238.561.984**
117.01.GC	**Program Penyiaran Publik**		**157.744.948**	**26.241.933**		**183.986.881**	**187.297.937**	**191.020.572**	**195.534.131**
5152	Pengembangan Infrastruktur Penyiaran TV Publik		31.035.596	19.770.000		50.805.596	51.813.608	52.946.727	54.320.613
5153	Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik		66.568.683			66.568.683	67.801.448	69.187.297	70.867.597
5154	Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik		2.391.205			2.391.205	2.438.637	2.491.967	2.556.634
5155	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional		57.749.464	6.471.933		64.221.397	65.244.244	66.394.581	67.789.287
117.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**647.764.774**	**320.172.334**	**7.779.071**		**975.716.179**	**995.019.264**	**1.016.718.249**	**1.043.027.853**
4376	Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional	496.951.778	147.323.719			644.275.497	657.029.231	671.366.146	688.749.357
5147	Pengelolaan Keuangan LPP TVRI	150.812.996	132.522.320			283.335.316	288.956.957	295.276.186	302.938.139
5148	Pengelolaan Organisasi dan SDM LPP TVRI		38.559.347	7.779.071		46.338.418	47.232.018	48.236.507	49.454.437
5150	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TV Publik		1.766.948			1.766.948	1.801.058	1.839.410	1.885.920
	JUMLAH RM	**647.764.774**	**431.745.842**	**9.995.216**		**1.089.505.832**	**1.110.570.356**	**1.134.249.765**	**1.162.960.527**
	JUMLAH PNBP		**46.171.440**	**24.025.788**		**70.197.228**	**71.746.845**	**73.489.056**	**75.601.457**
	TOTAL JUMLAH	**647.764.774**	**477.917.282**	**34.021.004**		**1.159.703.060**	**1.182.317.201**	**1.207.738.821**	**1.238.561.984**

SK No 154378 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 118

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)**		**34.590.707**	**1.885.036**		**36.475.743**	**36.598.123**	**36.735.699**	**36.902.507**
118.01	**Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang)**		**34.590.707**	**1.885.036**		**36.475.743**	**36.598.123**	**36.735.699**	**36.902.507**
04	**FUNGSI EKONOMI**		**34.590.707**	**1.885.036**		**36.475.743**	**36.598.123**	**36.735.699**	**36.902.507**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**		**34.590.707**	**1.885.036**		**36.475.743**	**36.598.123**	**36.735.699**	**36.902.507**
118.01.EH	**Program Pengembangan Kawasan Strategis**		**3.374.509**	**1.885.036**		**5.259.545**	**5.363.891**	**5.481.193**	**5.623.420**
5165	Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		5.250	1.885.036		1.890.286	1.927.790	1.969.949	2.021.067
5167	Penyelenggaraan Promosi dan Kerja Sama Pengembangan Kawasan		75.000			75.000	76.488	78.160	80.188
5168	Penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha dan Investasi		75.000			75.000	76.488	78.160	80.188
5169	Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKS		270.800			270.800	276.170	282.209	289.532
5732	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		18.258			18.258	18.620	19.027	19.521
5733	Penyelenggaraan Manajemen Pelabuhan Berstandar International		2.930.201			2.930.201	2.988.335	3.053.688	3.132.924
118.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**31.216.198**			**31.216.198**	**31.234.232**	**31.254.506**	**31.279.087**
5158	Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Umum, Program dan Anggaran serta Penelitian dan Pengelolaan Data/Informasi		779.030			779.030	794.486	811.861	832.927
5160	Koordinasi Bidang Hukum, Kehumasan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan (Administrasi Umum), Perpustakaan/Kearsipan, dan Peningkatan SDM		30.437.168			30.437.168	30.439.746	30.442.645	30.446.160
	JUMLAH RM		**24.800.173**			**24.800.173**	**24.818.207**	**24.838.481**	**24.863.062**
	JUMLAH BLU		**9.790.534**	**1.885.036**		**11.675.570**	**11.779.916**	**11.897.218**	**12.039.445**
	TOTAL JUMLAH		**34.590.707**	**1.885.036**		**36.475.743**	**36.598.123**	**36.735.699**	**36.902.507**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 119

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEAMANAN LAUT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	**BADAN KEAMANAN LAUT**	**140.760.891**	**247.065.181**	**1.364.161.821**		**1.751.987.893**	**2.260.267.589**	**2.309.697.609**	**2.369.630.639**
119.01	**Badan Keamanan Laut**	**140.760.891**	**247.065.181**	**1.364.161.821**		**1.751.987.893**	**2.260.267.589**	**2.309.697.609**	**2.369.630.639**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**140.760.891**	**247.065.181**	**1.364.161.821**		**1.751.987.893**	**2.260.267.589**	**2.309.697.609**	**2.369.630.639**
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**	**140.760.891**	**247.065.181**	**1.364.161.821**		**1.751.987.893**	**2.260.267.589**	**2.309.697.609**	**2.369.630.639**
119.01.BN	**Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia**		**140.741.113**	**1.364.161.821**		**1.504.902.934**	**1.964.787.078**	**2.007.851.811**	**2.060.067.047**
5735	Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut		135.079.840	163.796.830		298.876.670	1.697.868.175	2.001.983.562	2.054.065.988
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Keselamatan Laut		5.661.273	1.200.364.991		1.206.026.264	266.918.903	5.868.249	6.001.059
119.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**140.760.891**	**106.324.068**			**247.084.959**	**295.480.511**	**301.845.798**	**309.563.592**
5734	Penyelenggaraan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla	140.760.891	106.324.068			247.084.959	295.480.511	301.845.798	309.563.592
	JUMLAH RM	**140.760.891**	**247.065.181**			**387.826.072**	**1.999.107.398**	**2.309.697.609**	**2.369.630.639**
	JUMLAH PLN			**1.092.605.166**		**1.092.605.166**	**261.160.191**		
	JUMLAH SBSN			**271.556.655**		**271.556.655**			
	TOTAL JUMLAH	**140.760.891**	**247.065.181**	**1.364.161.821**		**1.751.987.893**	**2.260.267.589**	**2.309.697.609**	**2.369.630.639**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 122

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**	**104.523.359**	**278.338.663**	**2.000.000**		**384.862.022**	**390.477.904**	**396.790.669**	**404.444.782**
122.01	**Badan Pembinaan Ideologi Pancasila**	**104.523.359**	**278.338.663**	**2.000.000**		**384.862.022**	**390.477.904**	**396.790.669**	**404.444.782**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**104.523.359**	**278.338.663**	**2.000.000**		**384.862.022**	**390.477.904**	**396.790.669**	**404.444.782**
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**104.523.359**	**278.338.663**	**2.000.000**		**384.862.022**	**390.477.904**	**396.790.669**	**404.444.782**
122.01.AH	**Program Pembinaan Ideologi Pancasila**		**194.885.000**			**194.885.000**	**197.507.869**	**200.456.210**	**204.031.021**
6926	Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila		89.673.226			89.673.226	90.654.773	91.758.118	93.095.905
6927	Analisis dan Penyelarasan Hukum, Advokasi, serta Pengawasan Regulasi		14.321.267			14.321.267	14.331.371	14.342.730	14.356.502
6928	Pengkajian Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila		19.424.979			19.424.979	19.956.395	20.553.754	21.278.041
6929	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila		59.170.802			59.170.802	60.181.320	61.317.234	62.694.510
6930	Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila		12.294.726			12.294.726	12.384.010	12.484.374	12.606.063
122.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**104.523.359**	**83.453.663**	**2.000.000**		**189.977.022**	**192.970.035**	**196.334.459**	**200.413.761**
6925	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen	104.523.359	83.453.663	2.000.000		189.977.022	192.970.035	196.334.459	200.413.761
	JUMLAH RM	**104.523.359**	**278.338.663**	**2.000.000**		**384.862.022**	**390.477.904**	**396.790.669**	**404.444.782**
	TOTAL JUMLAH	**104.523.359**	**278.338.663**	**2.000.000**		**384.862.022**	**390.477.904**	**396.790.669**	**404.444.782**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 123

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**	**64.434.954**	**185.907.257**	**8.880.000**		**259.222.211**	**264.072.074**	**269.524.026**	**276.134.410**
123.01	**Sekretariat Jenderal**	**64.434.954**	**185.907.257**	**8.880.000**		**259.222.211**	**264.072.074**	**269.524.026**	**276.134.410**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**64.434.954**	**185.907.257**	**8.880.000**		**259.222.211**	**264.072.074**	**269.524.026**	**276.134.410**
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**	**64.434.954**	**185.907.257**	**8.880.000**		**259.222.211**	**264.072.074**	**269.524.026**	**276.134.410**
123.01.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**113.483.277**	**8.730.000**		**122.213.277**	**124.496.822**	**127.063.952**	**130.176.538**
6220	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban		89.110.863	8.730.000		97.840.863	99.621.015	101.622.260	104.048.729
7011	Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban		24.372.414			24.372.414	24.875.807	25.441.692	26.127.809
123.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**64.434.954**	**72.423.980**	**150.000**		**137.008.934**	**139.575.252**	**142.460.074**	**145.957.872**
6221	Penyelenggaraan Pengelolaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Tata Usaha, serta Pengawasan Intern	64.434.954	69.467.980	150.000		134.052.934	136.597.735	139.458.345	142.926.787
7012	Penyelenggaraan Layanan Hukum, Kehumasan, Protokol, Organisasi dan Tata Laksana serta Penyusunan Peraturan		2.956.000			2.956.000	2.977.517	3.001.729	3.031.085
	JUMLAH RM	**64.434.954**	**185.907.257**	**8.880.000**		**259.222.211**	**264.072.074**	**269.524.026**	**276.134.410**
	TOTAL JUMLAH	**64.434.954**	**185.907.257**	**8.880.000**		**259.222.211**	**264.072.074**	**269.524.026**	**276.134.410**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 124

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**	**3.030.879.245**	**1.608.931.066**	**1.504.751.880**		**6.144.562.191**	**6.767.679.565**	**7.291.987.403**	**7.945.301.071**
124.01	**Badan Riset dan Inovasi Nasional**	**3.030.879.245**	**1.608.931.066**	**1.504.751.880**		**6.144.562.191**	**6.767.679.565**	**7.291.987.403**	**7.945.301.071**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**3.015.380.795**	**1.602.463.206**	**1.498.751.880**		**6.116.595.881**	**6.739.158.393**	**7.262.842.498**	**7.915.399.905**
01.04	**PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK**	**3.015.380.795**	**1.602.463.206**	**1.498.751.880**		**6.116.595.881**	**6.739.158.393**	**7.262.842.498**	**7.915.399.905**
124.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**3.015.380.795**	**843.929.551**			**3.859.310.346**	**3.935.435.033**	**4.021.005.834**	**4.124.758.940**
6676	Dukungan Manajemen Iptek	3.015.380.795	842.929.551			3.858.310.346	3.934.435.033	4.020.005.834	4.123.758.940
6677	Pengawasan dan Audit Kinerja Internal		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
124.01.KB	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**		**758.533.655**	**1.498.751.880**		**2.257.285.535**	**2.803.723.360**	**3.241.836.664**	**3.790.640.965**
6680	Manajemen Sumber Daya Manusia Iptek		170.097.508	200.000		170.297.508	327.935.665	473.160.413	629.851.783
6681	Penguatan Infrastruktur Riset dan Inovasi		164.539.147	1.482.551.880		1.647.091.027	1.866.385.035	1.994.428.698	2.287.067.921
6682	Fasilitasi Riset dan Inovasi		214.897.000	16.000.000		230.897.000	388.231.362	549.328.789	644.505.447
6683	Pemanfaatan Riset dan Inovasi		200.000.000			200.000.000	200.291.298	200.618.764	201.015.814
6684	Manajemen Riset dan Inovasi Daerah		3.000.000			3.000.000			
6685	Perumusan Kebijakan Pembangunan		3.000.000			3.000.000	8.700.000	10.500.000	12.540.000
6686	Perumusan Kebijakan Riset dan Inovasi		3.000.000			3.000.000	12.180.000	13.800.000	15.660.000
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**15.498.450**	**6.467.860**	**6.000.000**		**27.966.310**	**28.521.172**	**29.144.905**	**29.901.166**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**15.498.450**	**6.467.860**	**6.000.000**		**27.966.310**	**28.521.172**	**29.144.905**	**29.901.166**
124.01.KB	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**		**6.467.860**	**6.000.000**		**12.467.860**	**12.715.223**	**12.993.293**	**13.330.448**
6860	Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir		6.467.860	6.000.000		12.467.860	12.715.223	12.993.293	13.330.448
124.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**15.498.450**				**15.498.450**	**15.805.949**	**16.151.612**	**16.570.718**
6996	Dukungan Manajemen Pendidikan Teknologi Nuklir	15.498.450				15.498.450	15.805.949	16.151.612	16.570.718

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 124

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH RM	3.030.879.245	1.448.601.087	1.030.917.204		5.510.397.536	6.117.730.146	6.787.798.324	7.428.711.625
	JUMLAH PNBP		130.002.553	100.936.176		230.938.729	235.746.947	240.291.208	245.843.843
	JUMLAH PLN		13.567.648	222.898.500		236.466.148	247.110.168	246.431.774	252.826.289
	JUMLAH HLN		16.759.778			16.759.778	17.092.304	17.466.097	17.919.314
	JUMLAH SBSN			150.000.000		150.000.000	150.000.000		
	TOTAL JUMLAH	3.030.879.245	1.608.931.066	1.504.751.880		6.144.562.191	6.767.679.565	7.291.987.403	7.945.301.071

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 125

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PANGAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	**BADAN PANGAN NASIONAL**	**74.160.617**	**154.417.432**	**4.716.554**		**233.294.603**	**236.749.965**	**240.635.138**	**245.345.609**
125.01	**Badan Pangan Nasional**	**74.160.617**	**154.417.432**	**4.716.554**		**233.294.603**	**236.749.965**	**240.635.138**	**245.345.609**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**74.160.617**	**154.417.432**	**4.716.554**		**233.294.603**	**236.749.965**	**240.635.138**	**245.345.609**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**74.160.617**	**154.417.432**	**4.716.554**		**233.294.603**	**236.749.965**	**240.635.138**	**245.345.609**
125.01.HA	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		**87.232.831**	**1.963.500**		**89.196.331**	**90.775.840**	**92.552.215**	**94.705.834**
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		36.664.047	815.000		37.479.047	38.172.781	38.952.852	39.898.625
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan		20.149.974	769.500		20.919.474	21.292.972	21.712.966	22.222.171
6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		30.418.810	379.000		30.797.810	31.310.087	31.886.397	32.585.038
125.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**74.160.617**	**67.184.601**	**2.753.054**		**144.098.272**	**145.974.125**	**148.082.923**	**150.639.775**
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	74.160.617	67.184.601	2.753.054		144.098.272	145.974.125	148.082.923	150.639.775
	JUMLAH RM	**74.160.617**	**154.417.432**	**4.716.554**		**233.294.603**	**236.749.965**	**240.635.138**	**245.345.609**
	TOTAL JUMLAH	**74.160.617**	**154.417.432**	**4.716.554**		**233.294.603**	**236.749.965**	**240.635.138**	**245.345.609**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 126

KEMENTERIAN/LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	**OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**	**423.000.000**	**983.746.945**	**4.855.299.925**		**6.262.046.870**	**15.093.837.273**	**7.262.046.870**	**8.262.046.870**
126.01	**Otorita Ibu Kota Nusantara**	**423.000.000**	**983.746.945**	**4.855.299.925**		**6.262.046.870**	**15.093.837.273**	**7.262.046.870**	**8.262.046.870**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**423.000.000**	**983.746.945**	**4.855.299.925**		**6.262.046.870**	**15.093.837.273**	**7.262.046.870**	**8.262.046.870**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**423.000.000**	**983.746.945**	**4.855.299.925**		**6.262.046.870**	**15.093.837.273**	**7.262.046.870**	**8.262.046.870**
126.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**423.000.000**	**208.700.709**	**12.366.161**		**644.066.870**	**644.066.870**	**644.066.870**	**644.066.870**
6941	Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama		8.000.000			8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
6942	Pengelolaan SDM, Hubungan Masyarakat, dan Informasi Publik	423.000.000	6.886.057	113.943		430.000.000	430.000.000	430.000.000	430.000.000
6943	Pembinaan Administrasi Umum dan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa		167.814.652	12.252.218		180.066.870	180.066.870	180.066.870	180.066.870
6944	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Aset Dalam Penguasaan		16.000.000			16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
6961	Legislasi, Pengelolaan Risiko, dan Pengawasan Internal		10.000.000			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
126.01.EH	**Program Pengembangan Kawasan Strategis**		**775.046.236**	**4.842.933.764**		**5.617.980.000**	**14.449.770.403**	**6.617.980.000**	**7.617.980.000**
6934	Perencanaan dan Pengelolaan Pertanahan		106.800.000	195.200.000		302.000.000	302.000.000	302.000.000	302.000.000
6935	Pengendalian Pembangunan		25.345.858	4.654.142		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
6936	Pengembangan Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat		12.000.000			12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
6937	Pengembangan Transformasi Hijau dan Digital		8.760.000	9.240.000		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
6938	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam		16.222.673	2.777.327		19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
6939	Pengelolaan Pendanaan dan Investasi		24.980.000			24.980.000	24.980.000	24.980.000	24.980.000
6940	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana		580.937.705	4.631.062.295		5.212.000.000	14.043.790.403	6.212.000.000	7.212.000.000
	JUMLAH RM	**423.000.000**	**983.746.945**	**4.855.299.925**		**6.262.046.870**	**15.093.837.273**	**7.262.046.870**	**8.262.046.870**
	TOTAL JUMLAH	**423.000.000**	**983.746.945**	**4.855.299.925**		**6.262.046.870**	**15.093.837.273**	**7.262.046.870**	**8.262.046.870**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 127

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KARANTINA INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	**BADAN KARANTINA INDONESIA**	**893.923.370**	**579.940.546**	**322.201.995**		**1.796.065.911**	**1.812.687.191**	**1.831.372.151**	**1.854.027.215**
127.01	**Badan Karantina Indonesia**	**893.923.370**	**579.940.546**	**322.201.995**		**1.796.065.911**	**1.812.687.191**	**1.831.372.151**	**1.854.027.215**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**893.923.370**	**579.940.546**	**322.201.995**		**1.796.065.911**	**1.812.687.191**	**1.831.372.151**	**1.854.027.215**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**893.923.370**	**579.940.546**	**322.201.995**		**1.796.065.911**	**1.812.687.191**	**1.831.372.151**	**1.854.027.215**
127.01.HA	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		**282.445.076**	**322.201.995**		**604.647.071**	**606.540.953**	**608.670.314**	**611.252.041**
7000	Perumusan Kebijakan Karantina Hewan		14.100.000			14.100.000	14.372.463	14.678.931	15.050.418
7001	Perumusan Kebijakan Karantina Ikan		14.264.450			14.264.450	14.489.008	14.741.520	15.047.696
7002	Perumusan Kebijakan Karantina Tumbuhan		17.482.864			17.482.864	17.742.396	18.034.224	18.388.066
7003	Penyelenggaraan Layanan Karantina		236.597.762	322.201.995		558.799.757	559.937.086	561.215.639	562.765.861
127.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**893.923.370**	**297.495.470**			**1.191.418.840**	**1.206.146.238**	**1.222.701.837**	**1.242.775.174**
6999	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia	893.923.370	297.495.470			1.191.418.840	1.206.146.238	1.222.701.837	1.242.775.174
	JUMLAH RM	**893.923.370**	**400.054.749**	**140.000.000**		**1.433.978.119**	**1.448.705.517**	**1.465.261.116**	**1.485.334.453**
	JUMLAH PNBP		**179.885.797**	**102.378.973**		**282.264.770**	**284.158.652**	**286.288.013**	**288.869.740**
	JUMLAH SBSN			**79.823.022**		**79.823.022**	**79.823.022**	**79.823.022**	**79.823.022**
	TOTAL JUMLAH	**893.923.370**	**579.940.546**	**322.201.995**		**1.796.065.911**	**1.812.687.191**	**1.831.372.151**	**1.854.027.215**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 128

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN GIZI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	**BADAN GIZI NASIONAL**	**7.193.794.571**	**259.323.978.128**	**1.482.227.301**		**268.000.000.000**	**273.216.432.330**	**279.080.154.091**	**286.189.814.838**
128.01	**Badan Gizi Nasional**	**7.193.794.571**	**259.323.978.128**	**1.482.227.301**		**268.000.000.000**	**273.216.432.330**	**279.080.154.091**	**286.189.814.838**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**7.193.794.571**	**11.038.672.734**	**1.482.227.301**		**19.714.694.606**	**20.004.898.195**	**20.331.112.791**	**20.726.642.308**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**7.193.794.571**	**11.038.672.734**	**1.482.227.301**		**19.714.694.606**	**20.004.898.195**	**20.331.112.791**	**20.726.642.308**
128.01.DT	**Program Pemenuhan Gizi Nasional**		**5.878.335.325**	**1.416.592.585**		**7.294.927.910**	**7.425.546.188**	**7.572.372.702**	**7.750.397.281**
7071	Pengelolaan Penyediaan Penyaluran Makan Bergizi		4.228.254.803	870.402.807		5.098.657.610	5.203.631.077	5.321.630.370	5.464.702.452
7074	Perumusan Sistem Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional		541.992.595	307.405		542.300.000	553.046.575	565.126.765	579.773.784
7075	Pengelolaan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional		162.470.300			162.470.300	165.693.871	169.317.446	173.710.968
7076	Promosi dan Edukasi Pemenuhan Gizi Nasional		269.080.729	919.271		270.000.000	275.354.735	281.373.956	288.672.157
7077	Kerjasama dan Kemitraan dalam Mendukung Pemenuhan Gizi Nasional		50.000.000			50.000.000	50.988.463	52.099.592	53.446.818
7078	Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pemenuhan Gizi Nasional		110.000.000			110.000.000	112.156.947	114.581.573	117.521.379
7079	Pemantauan dan Pengawasan Pemberian Makan Bergizi Sesuai Standar		320.634.699	539.365.301		860.000.000	863.174.520	866.743.000	871.069.723
8086	Pengelolaan Pemenuhan Gizi di Seluruh Indonesia		195.902.199	5.597.801		201.500.000	201.500.000	201.500.000	201.500.000
128.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**7.193.794.571**	**5.160.337.409**	**65.634.716**		**12.419.766.696**	**12.579.352.007**	**12.758.740.089**	**12.976.245.027**
7080	Penyusunan Regulasi, Bantuan Hukum, dan Kehumasan		77.401.000	349.000		77.750.000	79.180.473	80.788.503	82.738.204
7081	Pengelolaan Manajemen Kinerja Organisasi		36.258.000			36.258.000	36.969.427	37.769.218	38.738.959
7082	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana, dan Budaya Kerja		195.000.000			195.000.000	196.960.259	199.163.787	201.835.546
7083	Pengelolaan Urusan Keuangan serta Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Arsip, Rumah Tangga, dan Protokol	7.193.794.571	700.667.086	52.738.770		7.947.200.427	8.020.393.724	8.102.669.371	8.202.427.156
7084	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa		14.564.710	135.290		14.700.000	14.978.737	15.292.088	15.672.033
7085	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Badan Gizi Nasional		4.036.633.150	12.048.000		4.048.681.150	4.129.011.014	4.219.308.749	4.328.793.187

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 128

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN GIZI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7086	Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola		7.115.000	85.000		7.200.000	7.340.418	7.498.286	7.689.693
7087	Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran		7.200.000			7.200.000	7.342.846	7.503.428	7.698.133
7088	Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama		7.200.000			7.200.000	7.328.213	7.472.346	7.647.103
7089	Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan		7.200.000			7.200.000	7.342.842	7.503.423	7.698.124
7090	Pengawasan Internal dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur		60.102.823			60.102.823	61.053.124	62.121.381	63.416.617
7091	Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi Inspektorat Utama		10.995.640	278.656		11.274.296	11.450.930	11.649.509	11.890.272
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**223.558.960.490**			**223.558.960.490**	**227.994.593.822**	**232.980.629.318**	**239.026.110.728**
10.07	**PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN**		**223.558.960.490**			**223.558.960.490**	**227.994.593.822**	**232.980.629.318**	**239.026.110.728**
128.01.DT	**Program Pemenuhan Gizi Nasional**		**223.558.960.490**			**223.558.960.490**	**227.994.593.822**	**232.980.629.318**	**239.026.110.728**
7072	Penyediaan dan Penyaluran Makan Bergizi untuk Anak Sekolah di Seluruh Indonesia		223.558.960.490			223.558.960.490	227.994.593.822	232.980.629.318	239.026.110.728
07	**FUNGSI KESEHATAN**		**24.726.344.904**			**24.726.344.904**	**25.216.940.313**	**25.768.411.982**	**26.437.061.802**
07.03	**PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**		**24.726.344.904**			**24.726.344.904**	**25.216.940.313**	**25.768.411.982**	**26.437.061.802**
128.01.DT	**Program Pemenuhan Gizi Nasional**		**24.726.344.904**			**24.726.344.904**	**25.216.940.313**	**25.768.411.982**	**26.437.061.802**
7073	Penyediaan dan Penyaluran Makan Bergizi untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita di Seluruh Indonesia		24.726.344.904			24.726.344.904	25.216.940.313	25.768.411.982	26.437.061.802
	JUMLAH RM	**7.193.794.571**	**259.323.978.128**	**1.482.227.301**		**268.000.000.000**	**273.216.432.330**	**279.080.154.091**	**286.189.814.838**
	TOTAL JUMLAH	**7.193.794.571**	**259.323.978.128**	**1.482.227.301**		**268.000.000.000**	**273.216.432.330**	**279.080.154.091**	**286.189.814.838**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 129

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN**	**99.155.929**	**238.841.814**	**20.000.000**		**357.997.743**	**364.504.416**	**371.819.768**	**380.689.492**
129.01	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN**	**99.155.929**	**238.841.814**	**20.000.000**		**357.997.743**	**364.504.416**	**371.819.768**	**380.689.492**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**99.155.929**	**238.841.814**	**20.000.000**		**357.997.743**	**364.504.416**	**371.819.768**	**380.689.492**
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**	**99.155.929**	**238.841.814**	**20.000.000**		**357.997.743**	**364.504.416**	**371.819.768**	**380.689.492**
129.01.CL	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**		**103.000.000**			**103.000.000**	**105.042.851**	**107.340.075**	**110.125.405**
7296	Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri		21.100.000			21.100.000	21.518.543	21.989.129	22.559.720
7299	Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri		12.600.000			12.600.000	12.849.873	13.130.897	13.471.607
7378	Koordinasi Bidang Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa		19.100.000			19.100.000	19.478.856	19.904.820	20.421.345
7379	Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		25.100.000			25.100.000	25.597.718	26.157.583	26.836.333
7380	Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi		19.100.000			19.100.000	19.478.821	19.904.794	20.421.302
7381	Pengawasan terhadap kinerja POLRI (Kompolnas)		3.000.000			3.000.000	3.059.520	3.126.420	3.207.540
7382	Pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan RI (Komjak RI)		3.000.000			3.000.000	3.059.520	3.126.432	3.207.558
129.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**99.155.929**	**135.841.814**	**20.000.000**		**254.997.743**	**259.461.565**	**264.479.693**	**270.564.087**
7383	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kerjasama		12.503.786			12.503.786	12.751.803	13.030.673	13.368.811
7384	Penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Persidangan		6.600.000			6.600.000	6.730.914	6.878.112	7.056.590
7385	Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Pengadaan, dan Rumah Tangga	88.741.823	85.201.446	20.000.000		193.943.269	197.195.962	200.852.385	205.285.737
7386	Pengelolaan Pengawasan Internal		5.000.000			5.000.000	5.099.145	5.210.677	5.345.875
7387	Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam		3.000.000			3.000.000	3.059.502	3.126.411	3.207.531
7388	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	5.015.868	13.413.484			18.429.352	18.794.965	19.205.991	19.704.371
7389	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan RI	5.398.238	10.123.098			15.521.336	15.829.274	16.175.444	16.595.172

SK No 154408 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 129

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH RM	99.155.929	238.841.814	20.000.000		357.997.743	364.504.416	371.819.768	380.689.492
	TOTAL JUMLAH	99.155.929	238.841.814	20.000.000		357.997.743	364.504.416	371.819.768	380.689.492

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 130

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**	**56.591.227**	**109.084.495**	**56.258.800**		**221.934.522**	**237.591.649**	**253.967.675**	**271.482.300**
130.01	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**	**56.591.227**	**109.084.495**	**56.258.800**		**221.934.522**	**237.591.649**	**253.967.675**	**271.482.300**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**56.591.227**	**109.084.495**	**56.258.800**		**221.934.522**	**237.591.649**	**253.967.675**	**271.482.300**
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**	**56.591.227**	**109.084.495**	**56.258.800**		**221.934.522**	**237.591.649**	**253.967.675**	**271.482.300**
130.01.CL	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**		**33.784.557**			**33.784.557**	**37.561.417**	**40.461.417**	**43.761.417**
7151	Koordinasi Bidang Hukum		12.094.857			12.094.857	13.299.280	14.399.280	15.499.280
7152	Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia		10.594.850			10.594.850	11.956.227	12.856.227	13.956.227
7153	Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan		11.094.850			11.094.850	12.305.910	13.205.910	14.305.910
130.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**56.591.227**	**75.299.938**	**56.258.800**		**188.149.965**	**200.030.232**	**213.506.258**	**227.720.883**
7150	Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator	56.591.227	69.790.298	56.258.800		182.640.325	194.520.592	207.996.618	222.211.243
8020	Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi Hukum		1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8021	Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi HAM		1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8022	Dukungan Manajemen Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan		1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8023	Dukungan Manajemen Pengawasan Internal		1.009.640			1.009.640	1.009.640	1.009.640	1.009.640
	JUMLAH RM	**56.591.227**	**109.084.495**	**56.258.800**		**221.934.522**	**237.591.649**	**253.967.675**	**271.482.300**
	TOTAL JUMLAH	**56.591.227**	**109.084.495**	**56.258.800**		**221.934.522**	**237.591.649**	**253.967.675**	**271.482.300**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 131

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN**	**62.853.445**	**143.433.704**	**700.000**		**206.987.149**	**210.231.265**	**213.878.178**	**218.299.977**
131.01	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN**	**62.853.445**	**143.433.704**	**700.000**		**206.987.149**	**210.231.265**	**213.878.178**	**218.299.977**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**62.853.445**	**143.433.704**	**700.000**		**206.987.149**	**210.231.265**	**213.878.178**	**218.299.977**
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**62.853.445**	**143.433.704**	**700.000**		**206.987.149**	**210.231.265**	**213.878.178**	**218.299.977**
131.01.CL	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**		**50.000.000**			**50.000.000**	**50.367.152**	**50.780.005**	**51.280.573**
7458	Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan		14.500.000			14.500.000	14.599.126	14.710.607	14.845.769
7459	Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian		12.000.000			12.000.000	12.069.665	12.148.005	12.242.991
7460	Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan		13.500.000			13.500.000	13.599.183	13.710.699	13.845.909
7461	Koordinasi Sumber Daya Maritim		10.000.000			10.000.000	10.099.178	10.210.694	10.345.904
131.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**62.853.445**	**93.433.704**	**700.000**		**156.987.149**	**159.864.113**	**163.098.173**	**167.019.404**
7457	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pangan	62.853.445	93.433.704	700.000		156.987.149	159.864.113	163.098.173	167.019.404
	JUMLAH RM	**62.853.445**	**143.433.704**	**700.000**		**206.987.149**	**210.231.265**	**213.878.178**	**218.299.977**
	TOTAL JUMLAH	**62.853.445**	**143.433.704**	**700.000**		**206.987.149**	**210.231.265**	**213.878.178**	**218.299.977**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 132

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**	**78.607.425**	**171.164.426**	**12.785.520**		**262.557.371**	**266.795.953**	**271.560.887**	**277.338.275**
132.01	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**	**78.607.425**	**171.164.426**	**12.785.520**		**262.557.371**	**266.795.953**	**271.560.887**	**277.338.275**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**78.607.425**	**171.164.426**	**12.785.520**		**262.557.371**	**266.795.953**	**271.560.887**	**277.338.275**
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**78.607.425**	**171.164.426**	**12.785.520**		**262.557.371**	**266.795.953**	**271.560.887**	**277.338.275**
132.01.CL	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**		**72.944.890**			**72.944.890**	**73.979.537**	**75.142.805**	**76.553.234**
7390	Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		17.712.050			17.712.050	17.962.008	18.243.054	18.583.816
7391	Koordinasi Konektivitas		18.061.498			18.061.498	18.316.623	18.603.468	18.951.253
7392	Koordinasi Infrastruktur Dasar		20.158.191			20.158.191	20.451.110	20.780.435	21.179.735
7393	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman		17.013.151			17.013.151	17.249.796	17.515.848	17.838.430
132.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**78.607.425**	**98.219.536**	**12.785.520**		**189.612.481**	**192.816.416**	**196.418.082**	**200.785.041**
7394	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	78.607.425	98.219.536	12.785.520		189.612.481	192.816.416	196.418.082	200.785.041
	JUMLAH RM	**78.607.425**	**171.164.426**	**12.785.520**		**262.557.371**	**266.795.953**	**271.560.887**	**277.338.275**
	TOTAL JUMLAH	**78.607.425**	**171.164.426**	**12.785.520**		**262.557.371**	**266.795.953**	**271.560.887**	**277.338.275**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 134

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**97.791.674**	**223.547.433**	**12.246.473**		**333.585.580**	**339.021.074**	**345.131.469**	**352.540.181**
134.01	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**97.791.674**	**223.547.433**	**12.246.473**		**333.585.580**	**339.021.074**	**345.131.469**	**352.540.181**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**97.791.674**	**223.547.433**	**12.246.473**		**333.585.580**	**339.021.074**	**345.131.469**	**352.540.181**
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**97.791.674**	**223.547.433**	**12.246.473**		**333.585.580**	**339.021.074**	**345.131.469**	**352.540.181**
134.01.CL	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**		**53.708.482**			**53.708.482**	**54.237.682**	**54.832.875**	**55.554.507**
7198	Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran		7.500.000			7.500.000	7.592.970	7.697.567	7.824.386
7199	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial		17.500.000			17.500.000	17.751.798	18.034.950	18.378.260
7200	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu		6.000.000			6.000.000	6.098.394	6.209.105	6.343.314
7201	Koordinasi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan		2.000.000			2.000.000	2.031.413	2.066.736	2.109.569
7202	Koordinasi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7204	Koordinasi Kebijakan Kemandirian Sosial dan Ekonomi		18.708.482			18.708.482	18.763.107	18.824.517	18.898.978
134.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**97.791.674**	**169.838.951**	**12.246.473**		**279.877.098**	**284.783.392**	**290.298.594**	**296.985.674**
7203	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	97.791.674	169.838.951	12.246.473		279.877.098	284.783.392	290.298.594	296.985.674
	JUMLAH RM	**97.791.674**	**223.547.433**	**12.246.473**		**333.585.580**	**339.021.074**	**345.131.469**	**352.540.181**
	TOTAL JUMLAH	**97.791.674**	**223.547.433**	**12.246.473**		**333.585.580**	**339.021.074**	**345.131.469**	**352.540.181**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	**KEMENTERIAN HUKUM**	**2.084.783.889**	**1.679.660.522**	**456.770.880**		**4.221.215.291**	**4.284.320.977**	**4.355.254.988**	**4.441.261.203**
135.01	**SEKRETARIAT JENDERAL**	**1.830.865.873**	**347.800.097**	**188.862.393**		**2.367.528.363**	**2.409.960.749**	**2.457.659.177**	**2.515.492.740**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**1.830.865.873**	**347.800.097**	**188.862.393**		**2.367.528.363**	**2.409.960.749**	**2.457.659.177**	**2.515.492.740**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**1.830.865.873**	**347.800.097**	**188.862.393**		**2.367.528.363**	**2.409.960.749**	**2.457.659.177**	**2.515.492.740**
135.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.830.865.873**	**347.800.097**	**188.862.393**		**2.367.528.363**	**2.409.960.749**	**2.457.659.177**	**2.515.492.740**
7092	Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama		9.592.640			9.592.640	9.606.754	9.622.624	9.641.867
7093	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum		22.672.307			22.672.307	22.672.307	22.672.307	22.672.307
7094	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum		5.119.557			5.119.557	5.145.792	5.175.304	5.211.099
7095	Perencanaan dan Organisasi		12.340.526			12.340.526	12.344.114	12.348.148	12.353.042
7096	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum		5.106.437			5.106.437	5.154.295	5.208.115	5.273.369
7097	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum	1.548.160.517	85.593.929	26.452.118		1.660.206.564	1.692.490.418	1.728.780.306	1.772.781.175
7098	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum	5.925.053	52.240.620	73.260.710		131.426.383	133.532.697	135.900.399	138.771.206
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	276.780.303	155.134.081	89.149.565		521.063.949	529.014.372	537.951.974	548.788.675
135.02	**INSPEKTORAT JENDERAL**	**16.311.660**	**15.229.247**	**147.350**		**31.688.257**	**32.210.529**	**32.791.009**	**33.494.556**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**16.311.660**	**15.229.247**	**147.350**		**31.688.257**	**32.210.529**	**32.791.009**	**33.494.556**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**16.311.660**	**15.229.247**	**147.350**		**31.688.257**	**32.210.529**	**32.791.009**	**33.494.556**
135.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**16.311.660**	**15.229.247**	**147.350**		**31.688.257**	**32.210.529**	**32.791.009**	**33.494.556**
7100	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I		1.103.080			1.103.080	1.110.637	1.118.383	1.126.324
7101	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II		1.103.011			1.103.011	1.109.267	1.112.652	1.122.252
7102	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III		1.104.320			1.104.320	1.110.392	1.116.615	1.122.993
7103	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV		1.103.478			1.103.478	1.113.848	1.124.479	1.135.374

SK No 154338 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7104	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V		1.102.934			1.102.934	1.109.005	1.115.227	1.121.606
7105	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum	16.311.660	9.712.424	147.350		26.171.434	26.657.380	27.203.653	27.866.007
135.03	**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**20.852.718**	**55.646.400**	**17.545.874**		**94.044.992**	**95.426.868**	**96.980.862**	**98.865.062**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**20.852.718**	**55.646.400**	**17.545.874**		**94.044.992**	**95.426.868**	**96.980.862**	**98.865.062**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**20.852.718**	**55.646.400**	**17.545.874**		**94.044.992**	**95.426.868**	**96.980.862**	**98.865.062**
135.03.BB	**Program Pembentukan Regulasi**		**40.041.633**			**40.041.633**	**40.765.376**	**41.579.543**	**42.566.719**
7123	Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan		2.608.906			2.608.906	2.660.635	2.718.830	2.789.376
7124	Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-Undangan		2.669.648			2.669.648	2.722.602	2.782.143	2.854.337
7125	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan		5.614.335			5.614.335	5.680.706	5.755.332	5.845.814
7126	Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan		2.813.025			2.813.025	2.867.944	2.929.701	3.004.589
7127	Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi		3.212.352			3.212.352	3.276.085	3.347.731	3.434.598
7128	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Masyarakat		3.944.318			3.944.318	4.022.573	4.110.545	4.217.207
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah		13.060.861			13.060.861	13.295.296	13.559.267	13.879.355
7833	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian		2.553.841			2.553.841	2.604.509	2.661.465	2.730.528
7834	Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan		3.564.347			3.564.347	3.635.026	3.714.529	3.810.915
135.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**20.852.718**	**15.604.767**	**17.545.874**		**54.003.359**	**54.661.492**	**55.401.319**	**56.298.343**
7130	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP	20.852.718	15.604.767	17.545.874		54.003.359	54.661.492	55.401.319	56.298.343
135.04	**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**	**53.638.268**	**536.053.563**	**187.994.923**		**777.686.754**	**781.107.378**	**784.953.089**	**789.615.944**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**53.638.268**	**536.053.563**	**187.994.923**		**777.686.754**	**781.107.378**	**784.953.089**	**789.615.944**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**53.638.268**	**536.053.563**	**187.994.923**		**777.686.754**	**781.107.378**	**784.953.089**	**789.615.944**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135.04.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**313.342.334**	**110.011.315**		**423.353.649**	**425.296.106**	**427.480.155**	**430.128.259**
7106	Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional		14.487.820			14.487.820	14.487.820	14.487.820	14.487.820
7107	Administrasi Hukum Perdata		12.331.290			12.331.290	12.337.880	12.345.288	12.354.270
7108	Administrasi Hukum Pidana		7.617.890			7.617.890	7.617.890	7.617.890	7.617.890
7109	Administrasi Hukum Tata Negara		6.862.568			6.862.568	6.862.568	6.862.568	6.862.568
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		72.492.831			72.492.831	73.272.644	74.149.769	75.213.247
7111	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum		190.198.243	110.011.315		300.209.558	301.365.612	302.665.128	304.240.772
7112	Administrasi Badan Usaha		9.351.692			9.351.692	9.351.692	9.351.692	9.351.692
135.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**53.638.268**	**222.711.229**	**77.983.608**		**354.333.105**	**355.811.272**	**357.472.934**	**359.487.685**
7113	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	12.279.807	14.706.615	4.570.970		31.557.392	32.039.233	32.580.929	33.237.739
7114	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU	41.358.461	208.004.614	73.412.638		322.775.713	323.772.039	324.892.005	326.249.946
135.05	**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**87.078.596**	**468.365.679**	**42.300.028**		**597.744.303**	**607.566.071**	**618.607.839**	**631.995.858**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**87.078.596**	**468.365.679**	**42.300.028**		**597.744.303**	**607.566.071**	**618.607.839**	**631.995.858**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**87.078.596**	**468.365.679**	**42.300.028**		**597.744.303**	**607.566.071**	**618.607.839**	**631.995.858**
135.05.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**259.057.186**	**22.887.543**		**281.944.729**	**286.773.796**	**292.203.272**	**298.786.466**
7115	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri		14.619.677			14.619.677	14.909.721	15.235.783	15.631.129
7116	Penyelenggaraan Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Kekayaan Intelektual		39.162.380			39.162.380	39.716.067	40.338.521	41.093.238
7117	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis		26.663.737			26.663.737	27.081.415	27.550.953	28.120.260
7118	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang		26.783.096			26.783.096	27.314.464	27.911.805	28.636.075
7119	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual		10.702.460			10.702.460	10.913.461	11.150.713	11.438.362
7120	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual		61.860.663	22.887.543		84.748.206	86.108.720	87.638.066	89.492.372

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		79.265.173			79.265.173	80.729.948	82.377.431	84.375.030
135.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**87.078.596**	**209.308.493**	**19.412.485**		**315.799.574**	**320.792.275**	**326.404.567**	**333.209.392**
7122	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	87.078.596	209.308.493	19.412.485		315.799.574	320.792.275	326.404.567	333.209.392
135.11	**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**	**21.343.977**	**101.811.509**	**1.919.772**		**125.075.258**	**127.382.612**	**129.976.769**	**133.122.243**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**21.343.977**	**101.811.509**	**1.919.772**		**125.075.258**	**127.382.612**	**129.976.769**	**133.122.243**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**21.343.977**	**101.811.509**	**1.919.772**		**125.075.258**	**127.382.612**	**129.976.769**	**133.122.243**
135.11.BB	**Program Pembentukan Regulasi**		**6.994.945**			**6.994.945**	**7.133.232**	**7.288.773**	**7.477.391**
7131	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional		1.304.945			1.304.945	1.330.827	1.359.932	1.395.220
7132	Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional		4.370.000			4.370.000	4.456.698	4.554.161	4.672.331
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah		1.320.000			1.320.000	1.345.707	1.374.680	1.409.840
135.11.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**74.865.162**			**74.865.162**	**76.335.070**	**77.987.740**	**79.991.653**
7134	Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN		1.188.445			1.188.445	1.212.011	1.238.516	1.270.657
7135	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum		5.083.907			5.083.907	5.174.341	5.276.008	5.399.279
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		68.592.810			68.592.810	69.948.718	71.473.216	73.321.717
135.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**21.343.977**	**19.951.402**	**1.919.772**		**43.215.151**	**43.914.310**	**44.700.256**	**45.653.199**
7137	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	21.343.977	19.951.402	1.919.772		43.215.151	43.914.310	44.700.256	45.653.199
135.12	**BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**	**13.496.274**	**19.688.513**	**480.630**		**33.665.417**	**34.061.070**	**34.506.170**	**35.045.880**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**13.496.274**	**19.688.513**	**480.630**		**33.665.417**	**34.061.070**	**34.506.170**	**35.045.880**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**13.496.274**	**19.688.513**	**480.630**		**33.665.417**	**34.061.070**	**34.506.170**	**35.045.880**
135.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**13.496.274**	**19.688.513**	**480.630**		**33.665.417**	**34.061.070**	**34.506.170**	**35.045.880**
7138	Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum	13.496.274	10.102.327	480.630		24.079.231	24.327.345	24.606.265	24.944.450

SK No 154398 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7139	Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum		2.049.616			2.049.616	2.069.454	2.091.756	2.118.799
7140	Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum		1.200.000			1.200.000	1.223.803	1.250.563	1.283.016
7141	Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum		1.200.000			1.200.000	1.223.801	1.250.564	1.283.015
7142	Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan		1.200.000			1.200.000	1.223.796	1.250.560	1.283.009
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		3.936.570			3.936.570	3.992.871	4.056.462	4.133.591
135.13	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**	**41.196.523**	**135.065.514**	**17.519.910**		**193.781.947**	**196.605.700**	**199.780.073**	**203.628.920**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**25.516.400**	**75.340.990**	**16.735.610**		**117.593.000**	**119.106.226**	**120.807.408**	**122.870.030**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**25.516.400**	**75.340.990**	**16.735.610**		**117.593.000**	**119.106.226**	**120.807.408**	**122.870.030**
135.13.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**25.516.400**	**75.340.990**	**16.735.610**		**117.593.000**	**119.106.226**	**120.807.408**	**122.870.030**
7145	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional		4.959.724			4.959.724	4.966.134	4.973.344	4.982.084
7146	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur		4.130.334			4.130.334	4.130.334	4.130.334	4.130.334
7147	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan		7.761.825			7.761.825	7.823.218	7.892.234	7.975.916
7148	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum	20.551.448	43.044.377	16.597.960		80.193.785	81.341.004	82.630.616	84.194.242
7149	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah	4.964.952	15.444.730	137.650		20.547.332	20.845.536	21.180.880	21.587.454
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**15.680.123**	**59.724.524**	**784.300**		**76.188.947**	**77.499.474**	**78.972.665**	**80.758.890**
10.05	**PENDIDIKAN KEDINASAN**	**15.680.123**	**59.724.524**	**784.300**		**76.188.947**	**77.499.474**	**78.972.665**	**80.758.890**
135.13.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**15.680.123**	**59.724.524**	**784.300**		**76.188.947**	**77.499.474**	**78.972.665**	**80.758.890**
7144	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan	15.680.123	59.724.524	784.300		76.188.947	77.499.474	78.972.665	80.758.890
	JUMLAH RM	**2.084.783.889**	**734.339.497**	**226.475.929**		**3.045.599.315**	**3.099.101.692**	**3.159.238.948**	**3.232.154.240**
	JUMLAH PNBP		**945.321.025**	**230.294.951**		**1.175.615.976**	**1.185.219.285**	**1.196.016.040**	**1.209.106.963**
	TOTAL JUMLAH	**2.084.783.889**	**1.679.660.522**	**456.770.880**		**4.221.215.291**	**4.284.320.977**	**4.355.254.988**	**4.441.261.203**

SK No 154397 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 136

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	**KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA**	**279.057.540**	**439.071.932**			**718.129.472**	**721.790.186**	**725.905.841**	**730.896.035**
136.01	**SEKRETARIAT JENDERAL**	**279.057.540**	**186.993.747**			**466.051.287**	**468.640.166**	**471.550.558**	**475.079.354**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**279.057.540**	**186.993.747**			**466.051.287**	**468.640.166**	**471.550.558**	**475.079.354**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**279.057.540**	**186.993.747**			**466.051.287**	**468.640.166**	**471.550.558**	**475.079.354**
136.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**279.057.540**	**186.993.747**			**466.051.287**	**468.640.166**	**471.550.558**	**475.079.354**
7865	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana		6.000.000			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7866	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		6.000.000			6.000.000	6.067.176	6.142.692	6.234.254
7867	Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama HAM		10.000.000			10.000.000	10.024.840	10.052.765	10.086.639
7868	Pelayanan Tata Usaha, Rumah Tangga, Protokol, dan Hubungan Masyarakat	279.057.540	111.493.747			390.551.287	392.809.817	395.348.623	398.426.878
7869	Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM		19.108.319			19.108.319	19.176.082	19.252.256	19.344.622
7870	Pengelolaan Data dan Informasi HAM		14.000.000			14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
7871	Dukungan Manajemen Internal Kantor Wilayah		20.391.681			20.391.681	20.562.251	20.754.222	20.986.961
136.02	**INSPEKTORAT JENDERAL**		**9.000.000**			**9.000.000**	**9.040.298**	**9.085.597**	**9.140.525**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**		**9.000.000**			**9.000.000**	**9.040.298**	**9.085.597**	**9.140.525**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**		**9.000.000**			**9.000.000**	**9.040.298**	**9.085.597**	**9.140.525**
136.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**9.000.000**			**9.000.000**	**9.040.298**	**9.085.597**	**9.140.525**
6147	Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal		3.953.660			3.953.660	3.993.958	4.039.257	4.094.185
7872	Pengawasan Intern Kementerian HAM		5.046.340			5.046.340	5.046.340	5.046.340	5.046.340
136.03	**DIREKTORAT JENDERAL INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA**		**152.279.406**			**152.279.406**	**152.731.628**	**153.240.181**	**153.856.821**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**		**152.279.406**			**152.279.406**	**152.731.628**	**153.240.181**	**153.856.821**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**		**152.279.406**			**152.279.406**	**152.731.628**	**153.240.181**	**153.856.821**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 136

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136.03.BG	**Program Pemajuan dan Penegakan HAM**		**148.279.406**			**148.279.406**	**148.675.053**	**149.120.001**	**149.659.524**
7873	Penyusunan, Evaluasi, dan Pelaporan Instrumen HAM		22.750.000			22.750.000	22.798.593	22.853.233	22.919.490
7874	Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara		5.925.322			5.925.322	5.932.490	5.940.558	5.950.340
7875	Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha		47.340.000			47.340.000	47.361.541	47.385.769	47.415.146
7879	Koordinasi Pelaksanaan dan Monitoring Instrumen, serta Penguatan Kapasitas HAM di Wilayah		72.264.084			72.264.084	72.582.429	72.940.441	73.374.548
136.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**4.000.000**			**4.000.000**	**4.056.575**	**4.120.180**	**4.197.297**
6149	Dukungan Manajemen Ditjen Instrumen dan Penguatan HAM		4.000.000			4.000.000	4.056.575	4.120.180	4.197.297
136.04	**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA**		**90.798.779**			**90.798.779**	**91.378.094**	**92.029.505**	**92.819.335**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**		**90.798.779**			**90.798.779**	**91.378.094**	**92.029.505**	**92.819.335**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**		**90.798.779**			**90.798.779**	**91.378.094**	**92.029.505**	**92.819.335**
136.04.BG	**Program Pemajuan dan Penegakan HAM**		**86.798.779**			**86.798.779**	**87.358.996**	**87.988.934**	**88.752.727**
7876	Pengelolaan Pelayanan dan Pembelaan HAM		29.704.056			29.704.056	29.998.157	30.328.768	30.729.628
7877	Pengelolaan dan Pelaporan Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah		9.069.040			9.069.040	9.121.826	9.181.178	9.253.138
7878	Pengelolaan dan Pelaporan Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha		14.500.000			14.500.000	14.529.384	14.562.423	14.602.483
7880	Pengelolaan Pelaporan dan Monitoring Pengaduan, Pembelaan HAM, serta Kepatuhan HAM di Wilayah		33.525.683			33.525.683	33.709.629	33.916.565	34.167.478
136.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**4.000.000**			**4.000.000**	**4.019.098**	**4.040.571**	**4.066.608**
6152	Dukungan Manajemen Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM		4.000.000			4.000.000	4.019.098	4.040.571	4.066.608
	JUMLAH RM	**279.057.540**	**439.071.932**			**718.129.472**	**721.790.186**	**725.905.841**	**730.896.035**
	TOTAL JUMLAH	**279.057.540**	**439.071.932**			**718.129.472**	**721.790.186**	**725.905.841**	**730.896.035**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 137

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**	**7.922.895.923**	**8.578.763.921**	**2.347.414.737**		**18.849.074.581**	**19.134.933.850**	**19.456.284.358**	**19.845.915.912**
137.01	**SEKRETARIAT JENDERAL**	**760.239.701**	**312.823.643**			**1.073.063.344**	**1.163.507.855**	**1.265.175.341**	**1.388.445.396**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**760.239.701**	**312.823.643**			**1.073.063.344**	**1.163.507.855**	**1.265.175.341**	**1.388.445.396**
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**	**760.239.701**	**312.823.643**			**1.073.063.344**	**1.163.507.855**	**1.265.175.341**	**1.388.445.396**
137.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**760.239.701**	**312.823.643**			**1.073.063.344**	**1.163.507.855**	**1.265.175.341**	**1.388.445.396**
7854	Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan	760.239.701	312.823.643			1.073.063.344	1.163.507.855	1.265.175.341	1.388.445.396
137.02	**INSPEKTORAT JENDERAL**	**23.339.247**	**13.858.090**			**37.197.337**	**37.718.604**	**38.304.573**	**39.015.050**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**23.339.247**	**13.858.090**			**37.197.337**	**37.718.604**	**38.304.573**	**39.015.050**
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**	**23.339.247**	**13.858.090**			**37.197.337**	**37.718.604**	**38.304.573**	**39.015.050**
137.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**23.339.247**	**13.858.090**			**37.197.337**	**37.718.604**	**38.304.573**	**39.015.050**
6154	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	23.339.247	13.858.090			37.197.337	37.718.604	38.304.573	39.015.050
137.03	**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**	**1.566.632.610**	**3.965.655.263**	**1.577.814.737**		**7.110.102.610**	**7.169.538.422**	**7.236.356.216**	**7.317.371.522**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**1.566.632.610**	**3.965.655.263**	**1.577.814.737**		**7.110.102.610**	**7.169.538.422**	**7.236.356.216**	**7.317.371.522**
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**	**1.566.632.610**	**3.965.655.263**	**1.577.814.737**		**7.110.102.610**	**7.169.538.422**	**7.236.356.216**	**7.317.371.522**
137.03.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**2.768.185.939**	**286.164.173**		**3.054.350.112**	**3.079.743.023**	**3.108.291.287**	**3.142.905.369**
6155	Pelayanan Visa dan Dokumen Perjalanan		1.485.519.866			1.485.519.866	1.486.032.978	1.486.609.770	1.487.309.132
6156	Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian		18.874.216			18.874.216	19.212.902	19.593.627	20.055.258
6157	Pelayanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian		15.907.385			15.907.385	16.221.008	16.573.561	17.001.022
6158	Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan		140.363.185	7.655.361		148.018.546	150.328.236	152.924.711	156.072.889
6159	Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian		16.753.274			16.753.274	16.991.310	17.258.921	17.583.401
6160	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Keimigrasian		475.585.682	278.508.812		754.094.494	770.073.324	788.034.923	809.813.048

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 137

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6161	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		602.798.595			602.798.595	608.253.839	614.390.157	621.830.119
7862	Pemeriksaan Keimigrasian dan Pengelolaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi		12.383.736			12.383.736	12.629.426	12.905.617	13.240.500
137.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.566.632.610**	**1.197.469.324**	**1.291.650.564**		**4.055.752.498**	**4.089.795.399**	**4.128.064.929**	**4.174.466.153**
6162	Dukungan Manajeman dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	139.892.070	340.910.118	102.341.124		583.143.312	588.172.672	593.814.951	600.656.107
6163	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	1.426.740.540	847.157.044	1.189.309.440		3.463.207.024	3.492.034.034	3.524.451.588	3.563.757.406
7863	Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal		9.402.162			9.402.162	9.588.693	9.798.390	10.052.640
137.04	**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**	**5.567.358.226**	**4.281.973.170**	**769.600.000**		**10.618.931.396**	**10.754.262.707**	**10.906.399.903**	**11.090.863.370**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**5.567.358.226**	**4.281.973.170**	**769.600.000**		**10.618.931.396**	**10.754.262.707**	**10.906.399.903**	**11.090.863.370**
03.05	**LEMBAGA PEMASYARAKATAN**		**2.723.000.000**			**2.723.000.000**	**2.773.017.435**	**2.829.244.838**	**2.897.419.471**
137.04.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**2.723.000.000**			**2.723.000.000**	**2.773.017.435**	**2.829.244.838**	**2.897.419.471**
6170	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		2.723.000.000			2.723.000.000	2.773.017.435	2.829.244.838	2.897.419.471
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**	**5.567.358.226**	**1.558.973.170**	**769.600.000**		**7.895.931.396**	**7.981.245.272**	**8.077.155.065**	**8.193.443.899**
137.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**5.567.358.226**	**1.558.973.170**	**769.600.000**		**7.895.931.396**	**7.981.245.272**	**8.077.155.065**	**8.193.443.899**
6171	Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan	84.403.333	256.718.645	769.600.000		1.110.721.978	1.116.491.810	1.122.977.625	1.130.841.561
6172	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	5.482.954.893	1.302.254.525			6.785.209.418	6.864.753.462	6.954.177.440	7.062.602.338
137.11	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**	**5.326.139**	**4.453.755**			**9.779.894**	**9.906.262**	**10.048.325**	**10.220.574**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**5.326.139**	**4.453.755**			**9.779.894**	**9.906.262**	**10.048.325**	**10.220.574**
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**	**5.326.139**	**4.453.755**			**9.779.894**	**9.906.262**	**10.048.325**	**10.220.574**
137.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**5.326.139**	**4.453.755**			**9.779.894**	**9.906.262**	**10.048.325**	**10.220.574**
6173	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPSDM	5.326.139	4.453.755			9.779.894	9.906.262	10.048.325	10.220.574

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 137

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH RM	7.922.895.923	5.521.797.181	769.600.000		14.214.293.104	14.455.320.012	14.726.269.440	15.054.790.674
	JUMLAH PNBP		3.056.966.740	1.577.814.737		4.634.781.477	4.679.613.838	4.730.014.918	4.791.125.238
	TOTAL JUMLAH	7.922.895.923	8.578.763.921	2.347.414.737		18.849.074.581	19.134.933.850	19.456.284.358	19.845.915.912

SK No 154428 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 138

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**	**16.088.717.289**	**26.583.360.163**	**220.374.448**	**13.789.678.100**	**56.682.130.000**	**57.331.198.509**	**58.330.219.287**	**59.541.513.424**
138.01	**SEKRETARIAT JENDERAL**	**14.370.282.648**	**2.851.215.609**	**133.096.588**	**13.763.606.100**	**31.118.200.945**	**31.702.094.128**	**32.358.442.919**	**33.154.254.484**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**14.370.282.648**	**2.851.215.609**	**133.096.588**	**13.763.606.100**	**31.118.200.945**	**31.702.094.128**	**32.358.442.919**	**33.154.254.484**
10.07	**PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN**	**14.370.282.648**	**2.851.215.609**	**133.096.588**	**13.763.606.100**	**31.118.200.945**	**31.702.094.128**	**32.358.442.919**	**33.154.254.484**
138.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**276.419.009**	**1.115.528.707**	**118.485.697**		**1.510.433.413**	**1.538.301.540**	**1.569.629.355**	**1.607.613.829**
7565	Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara		41.178.704			41.178.704	41.995.682	42.914.095	44.027.651
7579	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum	5.198.628	24.133.714	535.638		29.867.980	30.441.547	31.086.353	31.868.152
7580	Peningkatan Efektivitas Layanan di Bidang Organisasi, Tata Laksana, dan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara	10.032.198	45.408.742	480.000		55.920.940	57.019.282	58.254.017	59.751.103
7581	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	9.068.957	44.278.820	1.343.192		54.690.969	55.775.892	56.995.674	58.474.659
7582	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Kerja Sama	19.462.857	150.191.381	2.163.473		171.817.711	175.162.974	178.923.757	183.483.677
7583	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa	176.342.308	201.615.732	100.981.552		478.939.592	488.442.073	499.123.869	512.075.355
7584	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan	8.226.942	103.735.608	470.000		112.432.550	114.663.238	117.170.823	120.211.213
7585	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan	20.260.330	288.342.088	1.885.600		310.488.018	315.147.783	320.386.032	326.737.323
7587	Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	9.635.707	15.511.761			25.147.468	25.605.834	26.121.123	26.745.910
7588	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	4.523.207	5.586.503	102.622		10.212.332	10.232.292	10.254.748	10.281.976
7589	Layanan Pembiayaan Pendidikan	6.008.863	77.057.960	1.206.035		84.272.858	85.821.684	87.562.770	89.673.831
7590	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7.659.012	118.487.694	9.317.585		135.464.291	137.993.259	140.836.094	144.282.979
138.01.DF	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**		**484.213.875**	**12.921.991**	**13.763.606.100**	**14.260.741.966**	**14.535.735.445**	**14.844.851.998**	**15.219.650.443**

SK No 154427 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 138

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7575	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah		484.213.875	12.921.991	13.763.606.100	14.260.741.966	14.535.735.445	14.844.851.998	15.219.650.443
138.01.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**	**14.093.863.639**	**1.251.473.027**	**1.688.900**		**15.347.025.566**	**15.628.057.143**	**15.943.961.566**	**16.326.990.212**
7562	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non ASN	14.093.863.639	32.724.082			14.126.587.721	14.385.445.107	14.676.423.202	15.029.229.087
7563	Pengembangan Pendidikan, Sains, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara		82.886.871			82.886.871	84.531.303	86.379.928	88.621.347
7564	Layanan Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Beasiswa Prestasi		346.264.618			346.264.618	352.278.204	359.038.013	367.234.167
7576	Kebijakan Penguatan Karakter		56.931.789			56.931.789	58.061.294	59.331.043	60.870.601
7577	Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran		358.279.944	200.000		358.479.944	365.287.132	372.939.070	382.216.887
7578	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik		374.385.723	1.488.900		375.874.623	382.454.103	389.850.310	398.818.123
138.02	**INSPEKTORAT JENDERAL**	**34.689.303**	**89.562.370**	**5.342.790**		**129.594.463**	**130.849.994**	**132.261.568**	**133.973.104**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**34.689.303**	**89.562.370**	**5.342.790**		**129.594.463**	**130.849.994**	**132.261.568**	**133.973.104**
10.07	**PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN**	**34.689.303**	**89.562.370**	**5.342.790**		**129.594.463**	**130.849.994**	**132.261.568**	**133.973.104**
138.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**34.689.303**	**89.562.370**	**5.342.790**		**129.594.463**	**130.849.994**	**132.261.568**	**133.973.104**
7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I		13.021.648			13.021.648	14.418.988	14.682.493	15.001.988
7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II		14.053.204			14.053.204	16.248.065	16.587.433	16.998.931
7593	Penguatan Pengawasan Inspektorat III		13.187.322			13.187.322	13.667.015	13.839.824	14.049.340
7594	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	34.689.303	39.377.997	5.342.790		79.410.090	76.026.496	76.558.703	77.204.014
7683	Penguatan Audit Investigasi		9.922.199			9.922.199	10.489.430	10.593.115	10.718.831
138.03	**DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU**	**545.212.226**	**3.602.470.217**	**9.456.303**		**4.157.138.746**	**4.230.040.943**	**4.312.023.082**	**4.411.424.701**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**545.212.226**	**3.602.470.217**	**9.456.303**		**4.157.138.746**	**4.230.040.943**	**4.312.023.082**	**4.411.424.701**
10.90	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA**	**545.212.226**	**3.602.470.217**	**9.456.303**		**4.157.138.746**	**4.230.040.943**	**4.312.023.082**	**4.411.424.701**
138.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**545.212.226**	**415.708.657**	**9.456.303**		**970.377.186**	**982.288.785**	**995.679.021**	**1.011.914.428**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 138

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	545.212.226	415.708.657	9.456.303		970.377.186	982.288.785	995.679.021	1.011.914.428
138.03.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**		**3.186.761.560**			**3.186.761.560**	**3.247.752.158**	**3.316.344.061**	**3.399.510.273**
7570	Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		479.332.251			479.332.251	488.841.974	499.531.833	512.493.100
7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.022.822.185			1.022.822.185	1.040.943.022	1.061.344.124	1.086.079.941
7615	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar		544.570.782			544.570.782	555.355.987	567.479.566	582.179.200
7616	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		258.410.427			258.410.427	263.493.474	269.208.074	276.136.895
7617	Pendidikan Profesi Guru		735.964.199			735.964.199	750.566.203	766.980.444	786.882.348
7618	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan		145.661.716			145.661.716	148.551.498	151.800.020	155.738.789
138.04	**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**	**608.451.191**	**14.173.990.081**		**9.072.000**	**14.791.513.272**	**14.694.374.982**	**14.854.552.677**	**15.048.764.540**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**608.451.191**	**14.173.990.081**		**9.072.000**	**14.791.513.272**	**14.694.374.982**	**14.854.552.677**	**15.048.764.540**
10.90	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA**	**608.451.191**	**568.280.483**			**1.176.731.674**	**1.194.051.230**	**1.213.520.963**	**1.237.127.598**
138.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**608.451.191**	**568.280.483**			**1.176.731.674**	**1.194.051.230**	**1.213.520.963**	**1.237.127.598**
7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	608.451.191	568.280.483			1.176.731.674	1.194.051.230	1.213.520.963	1.237.127.598
10.02	**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**		**9.274.578.736**		**6.072.000**	**9.280.650.736**	**9.127.969.912**	**9.225.711.674**	**9.344.221.212**
138.04.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**		**918.080.868**			**918.080.868**	**687.141.862**	**696.914.533**	**708.763.046**
7601	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar		239.630.368			239.630.368			
7602	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama		188.816.865			188.816.865	190.271.610	191.907.053	193.889.959
7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen		489.633.635			489.633.635	496.870.252	505.007.480	514.873.087
138.04.DF	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**		**8.356.497.868**		**6.072.000**	**8.362.569.868**	**8.440.828.050**	**8.528.797.141**	**8.635.458.166**
7595	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama		3.590.349.657		3.072.000	3.593.421.657	3.663.474.517	3.742.220.070	3.837.697.672

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 138

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7596	Pembinaan Sekolah Dasar		4.766.148.211		3.000.000	4.769.148.211	4.777.353.533	4.786.577.071	4.797.760.494
10.03	**PENDIDIKAN MENENGAH**		**2.294.886.889**		**2.000.000**	**2.296.886.889**	**2.335.038.245**	**2.377.923.925**	**2.429.921.984**
138.04.DF	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**		**2.142.768.610**		**2.000.000**	**2.144.768.610**	**2.181.301.390**	**2.222.367.500**	**2.272.159.413**
7599	Pembinaan Sekolah Menengah Atas		2.142.768.610		2.000.000	2.144.768.610	2.181.301.390	2.222.367.500	2.272.159.413
138.04.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**		**152.118.279**			**152.118.279**	**153.736.855**	**155.556.425**	**157.762.571**
7603	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas		152.118.279			152.118.279	153.736.855	155.556.425	157.762.571
10.01	**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**		**2.036.243.973**		**1.000.000**	**2.037.243.973**	**2.037.315.595**	**2.037.396.115**	**2.037.493.746**
138.04.DF	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**		**1.873.638.321**		**1.000.000**	**1.874.638.321**	**1.874.638.321**	**1.874.638.321**	**1.874.638.321**
7597	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini		1.873.638.321		1.000.000	1.874.638.321	1.874.638.321	1.874.638.321	1.874.638.321
138.04.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**		**162.605.652**			**162.605.652**	**162.677.274**	**162.757.794**	**162.855.425**
7600	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini		162.605.652			162.605.652	162.677.274	162.757.794	162.855.425
138.05	**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**	**251.256.359**	**4.276.433.696**	**25.904.153**	**17.000.000**	**4.570.594.208**	**4.627.147.328**	**4.690.719.362**	**4.767.799.324**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**251.256.359**	**4.276.433.696**	**25.904.153**	**17.000.000**	**4.570.594.208**	**4.627.147.328**	**4.690.719.362**	**4.767.799.324**
10.90	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA**	**251.256.359**	**744.375.251**	**25.904.153**		**1.021.535.763**	**1.039.863.719**	**1.060.466.930**	**1.085.447.983**
138.05.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**425.960.339**	**24.944.153**		**450.904.492**	**458.871.932**	**467.828.291**	**478.687.743**
7623	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi		425.960.339	24.944.153		450.904.492	458.871.932	467.828.291	478.687.743
138.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**251.256.359**	**261.265.792**	**960.000**		**513.482.151**	**523.081.012**	**533.871.607**	**546.954.998**
7574	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	251.256.359	261.265.792	960.000		513.482.151	523.081.012	533.871.607	546.954.998
138.05.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**		**57.149.120**			**57.149.120**	**57.910.775**	**58.767.032**	**59.805.242**
7572	Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus		57.149.120			57.149.120	57.910.775	58.767.032	59.805.242

SK No 154424 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 138

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.03	**PENDIDIKAN MENENGAH**		**2.701.648.030**			**2.701.648.030**	**2.726.881.414**	**2.755.246.031**	**2.789.637.631**
138.05.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**		**82.241.833**			**82.241.833**	**82.372.116**	**82.518.579**	**82.696.171**
7571	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan		82.241.833			82.241.833	82.372.116	82.518.579	82.696.171
138.05.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**2.619.406.197**			**2.619.406.197**	**2.644.509.298**	**2.672.727.452**	**2.706.941.460**
7620	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan		2.619.406.197			2.619.406.197	2.644.509.298	2.672.727.452	2.706.941.460
10.04	**PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL**		**199.782.029**			**199.782.029**	**200.770.191**	**201.881.055**	**203.227.935**
138.05.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**139.866.662**			**139.866.662**	**139.914.521**	**139.968.339**	**140.033.595**
7622	Pembinaan Kursus dan Pelatihan		139.866.662			139.866.662	139.914.521	139.968.339	140.033.595
138.05.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**		**59.915.367**			**59.915.367**	**60.855.670**	**61.912.716**	**63.194.340**
7573	Peningkatan Kualitas Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal		59.915.367			59.915.367	60.855.670	61.912.716	63.194.340
10.01	**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**		**630.628.386**		**17.000.000**	**647.628.386**	**659.632.004**	**673.125.346**	**689.485.775**
138.05.DF	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**		**630.628.386**		**17.000.000**	**647.628.386**	**659.632.004**	**673.125.346**	**689.485.775**
7835	Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Satuan Pendidikan Nonformal		630.628.386		17.000.000	647.628.386	659.632.004	673.125.346	689.485.775
138.11	**BADAN STANDAR, KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN**	**73.251.432**	**1.144.990.190**	**16.504.000**		**1.234.745.622**	**1.255.074.369**	**1.277.926.118**	**1.305.633.444**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**73.251.432**	**1.144.990.190**	**16.504.000**		**1.234.745.622**	**1.255.074.369**	**1.277.926.118**	**1.305.633.444**
10.09	**LITBANG PENDIDIKAN**	**73.251.432**	**1.144.990.190**	**16.504.000**		**1.234.745.622**	**1.255.074.369**	**1.277.926.118**	**1.305.633.444**
138.11.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**		**1.048.899.003**			**1.048.899.003**	**1.066.725.975**	**1.086.765.331**	**1.111.062.694**
7607	Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan		535.406.492			535.406.492	544.547.930	554.823.824	567.283.160
7608	Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi		304.120.044			304.120.044	309.162.021	314.829.662	321.701.576
7609	Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran		86.324.721			86.324.721	88.037.443	89.962.745	92.297.138
7610	Pengembangan Perbukuan		80.294.316			80.294.316	81.887.387	83.678.194	85.849.515

SK No 154423 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 138

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7611	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan		42.753.430			42.753.430	43.091.194	43.470.906	43.931.305
138.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**73.251.432**	**96.091.187**	**16.504.000**		**185.846.619**	**188.348.394**	**191.160.787**	**194.570.750**
7612	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan	73.251.432	96.091.187	16.504.000		185.846.619	188.348.394	191.160.787	194.570.750
138.12	**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**	**205.574.130**	**444.698.000**	**30.070.614**		**680.342.744**	**691.616.765**	**704.293.561**	**719.663.827**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**205.574.130**	**444.698.000**	**30.070.614**		**680.342.744**	**691.616.765**	**704.293.561**	**719.663.827**
10.90	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA**	**205.574.130**	**444.698.000**	**30.070.614**		**680.342.744**	**691.616.765**	**704.293.561**	**719.663.827**
138.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**205.574.130**	**107.553.320**	**27.960.614**		**341.088.064**	**347.689.095**	**355.110.331**	**364.108.446**
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	205.574.130	107.553.320	27.960.614		341.088.064	347.689.095	355.110.331	364.108.446
138.12.DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**		**140.847.697**	**189.000**		**141.036.697**	**142.316.687**	**143.756.016**	**145.501.119**
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi		140.847.697	189.000		141.036.697	142.316.687	143.756.016	145.501.119
138.12.DU	**Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan**		**196.296.983**	**1.921.000**		**198.217.983**	**201.610.983**	**205.427.214**	**210.054.262**
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah		65.275.215			65.275.215	66.545.602	67.974.117	69.706.185
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia		90.459.247	1.921.000		92.380.247	94.040.420	95.908.165	98.172.675
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia		40.562.521			40.562.521	41.024.961	41.544.932	42.175.402
	JUMLAH RM	**16.088.717.289**	**26.412.435.412**	**220.374.448**	**13.789.678.100**	**56.511.205.249**	**57.156.892.698**	**58.152.112.805**	**59.358.798.757**
	JUMLAH PNBP		**9.487.353**			**9.487.353**	**9.675.472**	**9.886.996**	**10.143.404**
	JUMLAH BLU		**161.437.398**			**161.437.398**	**164.630.339**	**168.219.486**	**172.571.263**
	TOTAL JUMLAH	**16.088.717.289**	**26.583.360.163**	**220.374.448**	**13.789.678.100**	**56.682.130.000**	**57.331.198.509**	**58.330.219.287**	**59.541.513.424**

SK No 154422 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**	**20.538.772.207**	**20.504.352.990**	**5.527.045.095**	**15.303.699.708**	**61.873.870.000**	**62.543.197.522**	**63.295.585.587**	**64.207.842.669**
139.01	**SEKRETARIAT JENDERAL**	**113.821.621**	**827.740.086**	**35.437.190**	**15.303.699.708**	**16.280.698.605**	**16.601.130.557**	**16.961.323.924**	**17.398.052.125**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**113.821.621**	**827.740.086**	**35.437.190**	**15.303.699.708**	**16.280.698.605**	**16.601.130.557**	**16.961.323.924**	**17.398.052.125**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**113.821.621**	**827.740.086**	**35.437.190**	**15.303.699.708**	**16.280.698.605**	**16.601.130.557**	**16.961.323.924**	**17.398.052.125**
139.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**113.821.621**	**239.915.080**	**35.437.190**		**389.173.891**	**392.626.949**	**396.508.586**	**401.215.001**
7721	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal	113.821.621	182.366.627	3.599.750		299.787.998	302.569.541	305.696.336	309.487.519
7722	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi		57.548.453	31.837.440		89.385.893	90.057.408	90.812.250	91.727.482
139.01.DK	**Program Pendidikan Tinggi**		**587.825.006**		**15.303.699.708**	**15.891.524.714**	**16.208.503.608**	**16.564.815.338**	**16.996.837.124**
7719	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi		542.411.006		15.303.699.708	15.846.110.714	16.163.089.608	16.519.401.338	16.951.423.124
7720	Layanan Asesmen Pendidikan Tinggi		45.414.000			45.414.000	45.414.000	45.414.000	45.414.000
139.02	**INSPEKTORAT JENDERAL**	**28.601.150**	**57.284.610**	**954.201**		**86.839.961**	**88.117.749**	**89.554.136**	**91.295.732**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**28.601.150**	**57.284.610**	**954.201**		**86.839.961**	**88.117.749**	**89.554.136**	**91.295.732**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**28.601.150**	**57.284.610**	**954.201**		**86.839.961**	**88.117.749**	**89.554.136**	**91.295.732**
139.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**28.601.150**	**57.284.610**	**954.201**		**86.839.961**	**88.117.749**	**89.554.136**	**91.295.732**
7724	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	28.601.150	19.827.484	954.201		49.382.835	50.150.681	51.013.823	52.060.366
7725	Penguatan Pengawasan Inspektorat		37.457.126			37.457.126	37.967.068	38.540.313	39.235.366
139.03	**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**	**20.353.148.231**	**16.224.617.447**	**4.523.447.270**		**41.101.212.948**	**41.418.812.152**	**41.775.826.899**	**42.208.700.726**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**20.353.148.231**	**16.224.617.447**	**4.523.447.270**		**41.101.212.948**	**41.418.812.152**	**41.775.826.899**	**42.208.700.726**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**20.353.148.231**	**16.224.617.447**	**4.523.447.270**		**41.101.212.948**	**41.418.812.152**	**41.775.826.899**	**42.208.700.726**
139.03.DK	**Program Pendidikan Tinggi**	**2.704.297.187**	**15.195.730.645**	**4.513.424.141**		**22.413.451.973**	**22.623.270.860**	**22.859.129.816**	**23.145.104.382**
7726	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan		78.430.133			78.430.133	79.265.483	80.204.520	81.343.082

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7727	Pengembangan Kelembagaan		405.489.861			405.489.861	413.660.541	422.845.113	433.981.251
7728	Peningkatan Kualitas Sumber Daya		264.431.751			264.431.751	270.104.948	276.482.249	284.214.628
7729	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Akademik		4.618.679.797	561.571.593		5.180.251.390	5.228.417.200	5.282.559.738	5.348.206.623
7730	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Akademik		7.718.247.056	2.875.948.616		10.594.195.672	10.665.430.150	10.745.504.792	10.842.593.787
7731	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi		596.727.317	95.187.513		691.914.830	691.914.830	691.914.830	691.914.830
7732	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi		1.415.606.093	980.236.277		2.395.842.370	2.416.164.462	2.439.010.745	2.466.711.303
7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	2.704.297.187	98.118.637	480.142		2.802.895.966	2.858.313.246	2.920.607.829	2.996.138.878
139.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**17.648.851.044**	**1.028.886.802**	**10.023.129**		**18.687.760.975**	**18.795.541.292**	**18.916.697.083**	**19.063.596.344**
7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	16.088.454.621	942.810.124	668.000		17.031.932.745	17.116.225.809	17.210.979.547	17.325.866.804
7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	1.560.396.423	86.076.678	9.355.129		1.655.828.230	1.679.315.483	1.705.717.536	1.737.729.540
139.04	**DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**	**21.534.320**	**3.243.561.969**	**4.633.782**		**3.269.730.071**	**3.299.650.398**	**3.333.283.512**	**3.374.063.054**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**21.534.320**	**3.243.561.969**	**4.633.782**		**3.269.730.071**	**3.299.650.398**	**3.333.283.512**	**3.374.063.054**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**21.534.320**	**3.243.561.969**	**4.633.782**		**3.269.730.071**	**3.299.650.398**	**3.333.283.512**	**3.374.063.054**
139.04.DK	**Program Pendidikan Tinggi**		**3.211.312.176**	**4.633.782**		**3.215.945.958**	**3.245.629.658**	**3.278.996.747**	**3.319.453.760**
7736	Peningkatan Talenta Penelitian dan Pengembangan		221.045.600	1.704.400		222.750.000	223.221.220	223.750.916	224.393.164
7737	Penguatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat		1.743.788.283	2.304.382		1.746.092.665	1.774.505.572	1.806.444.150	1.845.169.124
7738	Peningkatan Hilirisasi Hasil Penelitian dan Kemitraan		542.175.000	625.000		542.800.000	543.599.573	544.498.388	545.588.179
8068	Penguatan Unit Intermediasi Pemanfaatan Riset dan Pengembangan		704.303.293			704.303.293	704.303.293	704.303.293	704.303.293
139.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**21.534.320**	**32.249.793**			**53.784.113**	**54.020.740**	**54.286.765**	**54.609.294**
7739	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Riset dan Pengembangan	21.534.320	32.249.793			53.784.113	54.020.740	54.286.765	54.609.294

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139.05	**DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI**	**21.666.885**	**151.148.878**	**962.572.652**		**1.135.388.415**	**1.135.486.666**	**1.135.597.116**	**1.135.731.032**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**21.666.885**	**151.148.878**	**962.572.652**		**1.135.388.415**	**1.135.486.666**	**1.135.597.116**	**1.135.731.032**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**21.666.885**	**151.148.878**	**962.572.652**		**1.135.388.415**	**1.135.486.666**	**1.135.597.116**	**1.135.731.032**
139.05.KB	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**		**126.323.300**	**956.176.700**		**1.082.500.000**	**1.082.500.000**	**1.082.500.000**	**1.082.500.000**
7740	Peningkatan Talenta Sains dan Teknologi		60.673.300	954.326.700		1.015.000.000	1.015.000.000	1.015.000.000	1.015.000.000
7741	Pengembangan Pembelajaran Transformatif		20.000.000			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7742	Peningkatan Ekosistem Sains dan Teknologi		25.650.000	1.850.000		27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
7743	Peningkatan Talenta Guru Sains dan Teknologi		20.000.000			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
139.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**21.666.885**	**24.825.578**	**6.395.952**		**52.888.415**	**52.986.666**	**53.097.116**	**53.231.032**
7744	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Sains dan Teknologi	21.666.885	24.825.578	6.395.952		52.888.415	52.986.666	53.097.116	53.231.032
	JUMLAH RM	**20.538.772.207**	**11.126.196.548**	**1.670.860.202**	**15.303.699.708**	**48.639.528.665**	**49.230.258.451**	**49.894.292.443**	**50.699.422.028**
	JUMLAH PNBP		**731.607.564**	**259.843.668**		**991.451.232**	**999.692.156**	**1.008.957.390**	**1.020.191.219**
	JUMLAH BLU		**7.442.741.560**	**1.786.108.052**		**9.228.849.612**	**9.290.166.241**	**9.359.093.125**	**9.442.665.600**
	JUMLAH PLN		**1.144.686.828**	**263.364.805**		**1.408.051.633**	**1.416.146.341**	**1.425.245.495**	**1.436.278.062**
	JUMLAH HLN		**47.652.757**			**47.652.757**	**48.598.232**	**49.661.033**	**50.949.659**
	JUMLAH SBSN		**3.937.733**	**1.546.868.368**		**1.550.806.101**	**1.550.806.101**	**1.550.806.101**	**1.550.806.101**
	JUMLAH RMP		**7.530.000**			**7.530.000**	**7.530.000**	**7.530.000**	**7.530.000**
	TOTAL JUMLAH	**20.538.772.207**	**20.504.352.990**	**5.527.045.095**	**15.303.699.708**	**61.873.870.000**	**62.543.197.522**	**63.295.585.587**	**64.207.842.669**

SK No 154419 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 140

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN**	**429.570.702**	**1.017.273.984**	**60.547.135**		**1.507.391.821**	**1.525.963.783**	**1.546.842.230**	**1.572.156.983**
140.01	**SEKRETARIAT JENDERAL**	**30.963.540**	**197.737.238**	**4.559.620**		**233.260.398**	**237.479.373**	**242.222.166**	**247.972.705**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**30.963.540**	**197.737.238**	**4.559.620**		**233.260.398**	**237.479.373**	**242.222.166**	**247.972.705**
10.11	**PENGEMBANGAN BUDAYA**	**30.963.540**	**197.737.238**	**4.559.620**		**233.260.398**	**237.479.373**	**242.222.166**	**247.972.705**
140.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**30.963.540**	**157.737.238**	**4.559.620**		**193.260.398**	**196.884.146**	**200.957.848**	**205.897.127**
7395	Peningkatan layanan prima dibidang perencanaan dan keuangan	5.691.504	21.803.226			27.494.730	28.040.202	28.653.422	29.396.934
7397	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	4.886.111	10.983.135	474.250		16.343.496	16.638.191	16.969.492	17.371.204
7398	Peningkatan layanan prima dibidang hukum dan kerjasama	3.329.591	6.000.650			9.330.241	9.496.036	9.682.433	9.908.436
7399	Peningkatan Layanan Prima dalam rangka menunjang Fungsi Pelayanan, BMN dan Pengadaan Barang dan Jasa	9.029.704	98.141.805	806.400		107.977.909	110.098.591	112.482.513	115.372.980
7400	Peningkatan layanan prima dibidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	4.013.315	5.001.884	199.850		9.215.049	9.397.569	9.602.780	9.851.577
7401	Penyediaan data dan Informasi Kebudayaan	4.013.315	15.806.538	3.079.120		22.898.973	23.213.557	23.567.208	23.995.996
140.01.DV	**Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan**		**40.000.000**			**40.000.000**	**40.595.227**	**41.264.318**	**42.075.578**
7840	Penguatan Pemajuan Kebudayaan pada Masyarakat		40.000.000			40.000.000	40.595.227	41.264.318	42.075.578
140.02	**INSPEKTORAT JENDERAL**	**10.916.190**	**15.034.246**			**25.950.436**	**26.465.202**	**27.043.958**	**27.745.744**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**10.916.190**	**15.034.246**			**25.950.436**	**26.465.202**	**27.043.958**	**27.745.744**
10.11	**PENGEMBANGAN BUDAYA**	**10.916.190**	**15.034.246**			**25.950.436**	**26.465.202**	**27.043.958**	**27.745.744**
140.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**10.916.190**	**15.034.246**			**25.950.436**	**26.465.202**	**27.043.958**	**27.745.744**
7403	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kebudayaan	10.916.190	15.034.246			25.950.436	26.465.202	27.043.958	27.745.744
140.03	**DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI**	**325.179.952**	**519.629.153**	**30.584.288**		**875.393.393**	**881.867.754**	**889.146.500**	**897.971.817**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**325.179.952**	**519.629.153**	**30.584.288**		**875.393.393**	**881.867.754**	**889.146.500**	**897.971.817**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 140

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.11	**PENGEMBANGAN BUDAYA**	**325.179.952**	**519.629.153**	**30.584.288**		**875.393.393**	**881.867.754**	**889.146.500**	**897.971.817**
140.03.DV	**Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan**		**314.105.659**	**30.584.288**		**344.689.947**	**349.419.406**	**354.736.589**	**361.183.558**
7407	Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat		27.213.379			27.213.379	27.551.918	27.932.494	28.393.940
7408	Penguatan Kesejarahan dan Permuseuman		20.249.746			20.249.746	20.643.123	21.085.352	21.621.543
7410	Penguatan Pemberdayaan Nilai Budaya dan Kekayaan Intelektual		27.293.000			27.293.000	27.834.495	28.443.211	29.181.270
7411	Peningkatan Pelindungan Warisan Budaya		26.836.500	992.500		27.829.000	28.381.114	29.001.777	29.754.333
7412	Pengelolaaan dan Pelestarian Warisan Budaya		157.429.556	22.400.538		179.830.094	182.473.490	185.445.618	189.049.233
7413	Pengelolaan Museum, Galeri dan Cagar Budaya		55.083.478	7.191.250		62.274.728	62.535.266	62.828.137	63.183.239
140.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**325.179.952**	**205.523.494**			**530.703.446**	**532.448.348**	**534.409.911**	**536.788.259**
7406	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	325.179.952	205.523.494			530.703.446	532.448.348	534.409.911	536.788.259
140.04	**DIREKTORAT JENDERAL DIPLOMASI, PROMOSI DAN KERJASAMA KEBUDAYAAN**	**19.964.892**	**59.855.779**			**79.820.671**	**81.451.958**	**83.285.825**	**85.509.334**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**19.964.892**	**59.855.779**			**79.820.671**	**81.451.958**	**83.285.825**	**85.509.334**
10.11	**PENGEMBANGAN BUDAYA**	**19.964.892**	**59.855.779**			**79.820.671**	**81.451.958**	**83.285.825**	**85.509.334**
140.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**19.964.892**	**11.175.228**			**31.140.120**	**31.753.762**	**32.443.617**	**33.280.037**
7414	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan	19.964.892	11.175.228			31.140.120	31.753.762	32.443.617	33.280.037
140.04.DV	**Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan**		**48.680.551**			**48.680.551**	**49.698.196**	**50.842.208**	**52.229.297**
7415	Penguatan Diplomasi Kebudayaan		28.680.551			28.680.551	29.301.422	29.999.369	30.845.619
7416	Penguatan Promosi Kebudayaan		15.000.000			15.000.000	15.297.602	15.632.151	16.037.778
7417	Penguatan Kerja Sama Kebudayaan		5.000.000			5.000.000	5.099.172	5.210.688	5.345.900

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 140

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140.05	**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN**	**42.546.128**	**225.017.568**	**25.403.227**		**292.966.923**	**298.699.496**	**305.143.781**	**312.957.383**
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**42.546.128**	**225.017.568**	**25.403.227**		**292.966.923**	**298.699.496**	**305.143.781**	**312.957.383**
10.11	**PENGEMBANGAN BUDAYA**	**42.546.128**	**225.017.568**	**25.403.227**		**292.966.923**	**298.699.496**	**305.143.781**	**312.957.383**
140.05.DV	**Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan**		**195.920.003**	**25.403.227**		**221.323.230**	**225.636.321**	**230.484.890**	**236.363.688**
7420	Pengembangan Film, Musik dan Seni		49.743.000			49.743.000	50.729.885	51.839.302	53.184.451
7421	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan		4.489.000	170.000		4.659.000	4.674.737	4.692.430	4.713.885
7422	Pengembangan Budaya Digital		12.256.773	2.743.227		15.000.000	15.296.363	15.629.516	16.033.453
7423	Pembinaan dan Peningkatan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan		88.050.000			88.050.000	89.796.858	91.760.643	94.141.699
7424	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film		6.671.230	200.000		6.871.230	7.007.549	7.160.800	7.346.608
7425	Pengembangan dan Distribusi Konten Kebudayaan		34.710.000	22.290.000		57.000.000	58.130.929	59.402.199	60.943.592
140.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**42.546.128**	**29.097.565**			**71.643.693**	**73.063.175**	**74.658.891**	**76.593.695**
7419	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	42.546.128	29.097.565			71.643.693	73.063.175	74.658.891	76.593.695
	JUMLAH RM	**429.570.702**	**962.190.506**	**53.355.885**		**1.445.117.093**	**1.463.428.517**	**1.484.014.093**	**1.508.973.744**
	JUMLAH BLU		**55.083.478**	**7.191.250**		**62.274.728**	**62.535.266**	**62.828.137**	**63.183.239**
	TOTAL JUMLAH	**429.570.702**	**1.017.273.984**	**60.547.135**		**1.507.391.821**	**1.525.963.783**	**1.546.842.230**	**1.572.156.983**

SK No 154416 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 141

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	**KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH**	**36.463.176**	**523.768.541**	**18.800.000**		**579.031.717**	**581.605.457**	**584.498.718**	**588.006.697**
141.01	**SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH**	**36.463.176**	**523.768.541**	**18.800.000**		**579.031.717**	**581.605.457**	**584.498.718**	**588.006.697**
09	**FUNGSI AGAMA**	**36.463.176**	**523.768.541**	**18.800.000**		**579.031.717**	**581.605.457**	**584.498.718**	**588.006.697**
09.90	**PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA**	**36.463.176**	**523.768.541**	**18.800.000**		**579.031.717**	**581.605.457**	**584.498.718**	**588.006.697**
141.01.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**		**466.164.329**	**18.800.000**		**484.964.329**	**485.671.693**	**486.466.973**	**487.431.182**
7155	Dukungan Administrasi dan Dokumen Haji Reguler		24.152.098			24.152.098	24.274.862	24.412.897	24.580.248
7156	Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi (Dalam Negeri)		12.654.543			12.654.543	12.707.605	12.767.279	12.839.615
7157	Dukungan Bina Haji dan Petugas Haji		332.067.299			332.067.299	332.092.035	332.119.848	332.153.570
7158	Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi (Luar Negeri)		19.081.994			19.081.994	19.250.358	19.439.633	19.669.121
7159	Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Dalam Negeri		14.273.520			14.273.520	14.303.059	14.336.267	14.376.529
7931	Dukungan Fasilitasi Kerjasama dan Layanan Masyair		3.358.438			3.358.438	3.359.222	3.360.108	3.361.180
7932	Dukungan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji		17.808.600			17.808.600	17.816.155	17.824.653	17.834.954
7933	Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri		13.457.990			13.457.990	13.490.522	13.527.097	13.571.441
7934	Penyusunan Strategi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Haji		7.591.849			7.591.849	7.611.527	7.633.648	7.660.470
7935	Dukungan Pengelolaan Data dan Informasi Haji		21.717.998	18.800.000		40.517.998	40.766.348	41.045.543	41.384.054
141.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**36.463.176**	**57.604.212**			**94.067.388**	**95.933.764**	**98.031.745**	**100.575.515**
7154	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji	36.463.176	57.604.212			94.067.388	95.933.764	98.031.745	100.575.515
	JUMLAH RM	**36.463.176**	**523.768.541**	**18.800.000**		**579.031.717**	**581.605.457**	**584.498.718**	**588.006.697**
	TOTAL JUMLAH	**36.463.176**	**523.768.541**	**18.800.000**		**579.031.717**	**581.605.457**	**584.498.718**	**588.006.697**

SK No 154415 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 142

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**	**45.462.524**	**469.867.782**	**36.517.924**		**551.848.230**	**562.224.734**	**573.888.942**	**588.031.611**
142.01	**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**	**45.462.524**	**469.867.782**	**36.517.924**		**551.848.230**	**562.224.734**	**573.888.942**	**588.031.611**
09	**FUNGSI AGAMA**	**45.462.524**	**469.867.782**	**36.517.924**		**551.848.230**	**562.224.734**	**573.888.942**	**588.031.611**
09.90	**PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA**	**45.462.524**	**469.867.782**	**36.517.924**		**551.848.230**	**562.224.734**	**573.888.942**	**588.031.611**
142.01.DC	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**		**391.021.061**			**391.021.061**	**398.509.989**	**406.928.238**	**417.135.222**
7160	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal		335.752.169			335.752.169	342.286.438	349.631.534	358.537.337
7161	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		17.768.892			17.768.892	17.979.537	18.216.328	18.503.435
7162	Kemitraan dan Standardisasi Halal		37.500.000			37.500.000	38.244.014	39.080.376	40.094.450
142.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**45.462.524**	**78.846.721**	**36.517.924**		**160.827.169**	**163.714.745**	**166.960.704**	**170.896.389**
7163	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH	45.462.524	78.846.721	36.517.924		160.827.169	163.714.745	166.960.704	170.896.389
	JUMLAH RM	**45.462.524**	**411.878.866**	**36.517.924**		**493.859.314**	**503.161.913**	**513.618.931**	**526.297.898**
	JUMLAH BLU		**57.988.916**			**57.988.916**	**59.062.821**	**60.270.011**	**61.733.713**
	TOTAL JUMLAH	**45.462.524**	**469.867.782**	**36.517.924**		**551.848.230**	**562.224.734**	**573.888.942**	**588.031.611**

SK No 154414 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	**KEMENTERIAN KEHUTANAN**	**3.026.449.832**	**2.936.294.759**	**76.540.667**		**6.039.285.258**	**6.223.919.407**	**6.351.685.630**	**6.506.598.726**
143.01	**SEKRETARIAT JENDERAL**	**258.660.976**	**310.151.351**	**10.721.199**		**579.533.526**	**590.858.911**	**603.590.337**	**619.026.934**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**258.660.976**	**310.151.351**	**10.721.199**		**579.533.526**	**590.858.911**	**603.590.337**	**619.026.934**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**258.660.976**	**310.151.351**	**10.721.199**		**579.533.526**	**590.858.911**	**603.590.337**	**619.026.934**
143.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**258.660.976**	**307.532.751**	**10.163.167**		**576.356.894**	**587.619.685**	**600.280.702**	**615.631.933**
7301	Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan		7.731.175			7.731.175	5.538.911	5.660.041	5.806.913
7302	Penyelenggaraan Data dan Informasi Kehutanan		56.409.270	1.685.000		58.094.270	57.462.986	58.712.651	60.227.838
7303	Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi		46.718.920			46.718.920	55.460.628	56.594.783	57.969.923
7304	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Kehutanan	258.660.976	160.584.562	7.048.972		426.294.510	434.722.289	444.196.029	455.682.770
7305	Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri		6.278.804			6.278.804	6.402.125	6.540.778	6.708.885
7306	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan		11.351.463	865.700		12.217.163	12.429.915	12.669.107	12.959.126
7307	Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Kehutanan		7.818.095	192.063		8.010.158	6.412.186	6.515.682	6.641.155
7308	Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang Kehutanan		6.469.615	221.432		6.691.047	4.784.095	4.888.718	5.015.570
7309	Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Kehutanan		4.170.847	150.000		4.320.847	4.406.550	4.502.913	4.619.753
143.01.FF	**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**		**2.618.600**	**558.032**		**3.176.632**	**3.239.226**	**3.309.635**	**3.395.001**
7259	Pengembangan Hutan Berkelanjutan		990.107	498.000		1.488.107	1.517.608	1.550.800	1.591.033
7261	Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan		685.493	30.000		715.493	729.676	745.627	764.978
7262	Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan		943.000	30.032		973.032	991.942	1.013.208	1.038.990
143.02	**INSPEKTORAT JENDERAL**	**25.683.674**	**26.308.181**	**1.015.000**		**53.006.855**	**54.055.449**	**55.234.279**	**56.663.596**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**25.683.674**	**26.308.181**	**1.015.000**		**53.006.855**	**54.055.449**	**55.234.279**	**56.663.596**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**25.683.674**	**26.308.181**	**1.015.000**		**53.006.855**	**54.055.449**	**55.234.279**	**56.663.596**

SK No 154413 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**25.683.674**	**26.308.181**	**1.015.000**		**53.006.855**	**54.055.449**	**55.234.279**	**56.663.596**
7311	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan	25.683.674	21.703.181	1.015.000		48.401.855	49.361.550	50.440.419	51.748.536
7312	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan		3.423.750			3.423.750	3.489.220	3.562.835	3.652.090
7313	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN		1.181.250			1.181.250	1.204.679	1.231.025	1.262.970
143.03	**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**	**224.442.317**	**186.082.505**	**208.020**		**410.732.842**	**494.882.141**	**505.665.348**	**518.739.660**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**224.442.317**	**186.082.505**	**208.020**		**410.732.842**	**494.882.141**	**505.665.348**	**518.739.660**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**224.442.317**	**186.082.505**	**208.020**		**410.732.842**	**494.882.141**	**505.665.348**	**518.739.660**
143.03.FF	**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**		**125.067.538**	**208.020**		**125.275.558**	**193.580.917**	**197.794.429**	**202.903.194**
7264	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan		12.951.406	154.020		13.105.426	39.667.670	40.527.627	41.570.281
7265	Penatagunaan Kawasan Hutan		4.600.000			4.600.000	4.691.253	4.793.843	4.918.236
7266	Pengukuhan Kawasan Hutan		73.560.999			73.560.999	75.011.188	76.640.632	78.616.277
7267	Perencanaan Kawasan Hutan		7.000.000			7.000.000	7.137.969	7.293.097	7.481.188
7268	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		26.955.133	54.000		27.009.133	67.072.837	68.539.230	70.317.212
143.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**224.442.317**	**61.014.967**			**285.457.284**	**301.301.224**	**307.870.919**	**315.836.466**
7314	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	224.442.317	61.014.967			285.457.284	301.301.224	307.870.919	315.836.466
143.04	**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**	**1.252.583.329**	**699.998.208**	**25.171.316**		**1.977.752.853**	**2.012.988.446**	**2.053.341.932**	**2.102.269.433**
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		**307.799.667**	**23.161.316**		**330.960.983**	**334.494.637**	**339.210.207**	**344.927.545**
05.04	**KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM**		**307.799.667**	**23.161.316**		**330.960.983**	**334.494.637**	**339.210.207**	**344.927.545**
143.04.FF	**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**		**307.799.667**	**23.161.316**		**330.960.983**	**334.494.637**	**339.210.207**	**344.927.545**
7269	Konservasi Spesies dan Genetik		16.516.000	634.000		17.150.000	17.417.791	17.719.188	18.084.554

SK No 154412 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7270	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru		10.450.821	11.446.532		21.897.353	22.258.954	22.665.568	23.158.556
7271	Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi		129.636.574	663.426		130.300.000	130.631.469	131.744.742	133.094.549
7272	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati		25.978.830	321.170		26.300.000	26.692.099	27.133.252	27.668.105
7273	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru		125.217.442	10.096.188		135.313.630	137.494.324	139.947.457	142.921.781
04	**FUNGSI EKONOMI**	**1.252.583.329**	**392.198.541**	**2.010.000**		**1.646.791.870**	**1.678.493.809**	**1.714.131.725**	**1.757.341.888**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**1.252.583.329**	**392.198.541**	**2.010.000**		**1.646.791.870**	**1.678.493.809**	**1.714.131.725**	**1.757.341.888**
143.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.252.583.329**	**392.198.541**	**2.010.000**		**1.646.791.870**	**1.678.493.809**	**1.714.131.725**	**1.757.341.888**
7315	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	1.252.583.329	392.198.541	2.010.000		1.646.791.870	1.678.493.809	1.714.131.725	1.757.341.888
143.05	**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN**	**345.072.208**	**757.366.668**	**8.694.679**		**1.111.133.555**	**1.128.468.931**	**1.151.233.395**	**1.178.834.641**
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		**647.408.981**	**8.407.679**		**655.816.660**	**664.428.071**	**677.385.134**	**693.095.140**
05.04	**KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM**		**647.408.981**	**8.407.679**		**655.816.660**	**664.428.071**	**677.385.134**	**693.095.140**
143.05.FF	**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**		**647.408.981**	**8.407.679**		**655.816.660**	**664.428.071**	**677.385.134**	**693.095.140**
7274	Penerapan Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan		55.457.559	386.441		55.844.000	56.789.356	57.852.287	59.141.033
7275	Penghijauan dan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan		264.378.116	4.314.744		268.692.860	273.179.887	278.224.227	284.340.358
7276	Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		30.677.414	272.586		30.950.000	31.488.980	32.095.383	32.830.564
7277	Rehabilitasi Hutan		197.648.390	3.247.958		200.896.348	204.636.374	208.841.170	213.939.379
7278	Rehabilitasi Mangrove		99.247.502	185.950		99.433.452	98.333.474	100.372.067	102.843.806
04	**FUNGSI EKONOMI**	**345.072.208**	**109.957.687**	**287.000**		**455.316.895**	**464.040.860**	**473.848.261**	**485.739.501**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**345.072.208**	**109.957.687**	**287.000**		**455.316.895**	**464.040.860**	**473.848.261**	**485.739.501**
143.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**345.072.208**	**109.957.687**	**287.000**		**455.316.895**	**464.040.860**	**473.848.261**	**485.739.501**

SK No 154451 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7316	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	345.072.208	109.957.687	287.000		455.316.895	464.040.860	473.848.261	485.739.501
143.06	**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**	**173.516.679**	**151.685.052**	**1.933.955**		**327.135.686**	**333.448.525**	**340.546.100**	**349.151.705**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**173.516.679**	**151.685.052**	**1.933.955**		**327.135.686**	**333.448.525**	**340.546.100**	**349.151.705**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**173.516.679**	**151.685.052**	**1.933.955**		**327.135.686**	**333.448.525**	**340.546.100**	**349.151.705**
143.06.FF	**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**		**100.820.125**	**1.535.400**		**102.355.525**	**104.329.454**	**106.549.204**	**109.240.539**
7279	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		18.400.000			18.400.000	18.746.064	19.135.243	19.607.098
7280	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		11.080.000	120.000		11.200.000	11.420.317	11.668.074	11.968.464
7281	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		27.650.125	845.400		28.495.525	29.047.338	29.667.894	30.420.310
7282	Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan		16.730.000	570.000		17.300.000	17.636.695	18.015.307	18.474.359
7283	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan		26.960.000			26.960.000	27.479.040	28.062.686	28.770.308
143.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**173.516.679**	**50.864.927**	**398.555**		**224.780.161**	**229.119.071**	**233.996.896**	**239.911.166**
7317	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	173.516.679	50.864.927	398.555		224.780.161	229.119.071	233.996.896	239.911.166
143.07	**DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL**	**139.222.397**	**345.865.435**	**1.359.838**		**486.447.670**	**494.544.456**	**503.647.043**	**514.683.653**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**139.222.397**	**345.865.435**	**1.359.838**		**486.447.670**	**494.544.456**	**503.647.043**	**514.683.653**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**139.222.397**	**345.865.435**	**1.359.838**		**486.447.670**	**494.544.456**	**503.647.043**	**514.683.653**
143.07.FF	**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**		**302.192.869**	**510.979**		**302.703.848**	**307.093.846**	**312.029.206**	**318.013.196**
7284	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial		24.957.419	300.184		25.257.603	25.725.430	26.251.449	26.889.216
7286	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat		53.981.078	210.795		54.191.873	55.114.040	56.150.798	57.407.835
7287	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		208.811.372			208.811.372	211.557.519	214.644.663	218.387.768
7288	Pengendalian Perhutanan Sosial		14.443.000			14.443.000	14.696.857	14.982.296	15.328.377

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**139.222.397**	**43.672.566**	**848.859**		**183.743.822**	**187.450.610**	**191.617.837**	**196.670.457**
7318	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial	139.222.397	43.672.566	848.859		183.743.822	187.450.610	191.617.837	196.670.457
143.08	**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN**	**442.614.316**	**278.706.521**	**18.736.660**		**740.057.497**	**754.531.111**	**770.801.899**	**790.529.865**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**442.614.316**	**278.706.521**	**18.736.660**		**740.057.497**	**754.531.111**	**770.801.899**	**790.529.865**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**442.614.316**	**278.706.521**	**18.736.660**		**740.057.497**	**754.531.111**	**770.801.899**	**790.529.865**
143.08.FF	**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**		**174.709.447**	**18.236.660**		**192.946.107**	**196.639.258**	**200.791.376**	**205.825.690**
7289	Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan		13.958.590	6.291.410		20.250.000	20.641.097	21.080.832	21.613.996
7290	Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan		14.750.000			14.750.000	15.036.877	15.359.390	15.750.430
7291	Pengendalian Kebakaran Hutan		72.655.000			72.655.000	74.021.334	75.557.454	77.419.942
7292	Penindakan Pidana Kehutanan		55.915.857	11.945.250		67.861.107	69.197.005	70.698.898	72.519.900
7293	Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan		17.430.000			17.430.000	17.742.945	18.094.802	18.521.422
143.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**442.614.316**	**103.997.074**	**500.000**		**547.111.390**	**557.891.853**	**570.010.523**	**584.704.175**
7319	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan	442.614.316	103.997.074	500.000		547.111.390	557.891.853	570.010.523	584.704.175
143.11	**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**164.653.936**	**180.130.838**	**8.700.000**		**353.484.774**	**360.141.437**	**367.625.297**	**376.699.239**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**164.653.936**	**110.430.838**	**2.400.000**		**277.484.774**	**282.653.918**	**288.465.445**	**295.511.721**
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**164.653.936**	**110.430.838**	**2.400.000**		**277.484.774**	**282.653.918**	**288.465.445**	**295.511.721**
143.11.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**36.148.750**	**200.000**		**36.348.750**	**36.805.614**	**37.319.605**	**37.942.725**
7295	Perencanaan dan Pengembangan SDM		3.850.000			3.850.000	3.925.367	4.010.120	4.112.875
7297	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kehutanan		30.298.750	200.000		30.498.750	30.840.578	31.225.210	31.691.495
7300	Pengembangan Generasi Pelestari Hutan		2.000.000			2.000.000	2.039.669	2.084.275	2.138.355

SK No 154449 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**164.653.936**	**63.812.989**	**2.200.000**		**230.666.925**	**235.199.996**	**240.296.048**	**246.474.910**
7320	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	164.653.936	63.812.989	2.200.000		230.666.925	235.199.996	240.296.048	246.474.910
143.11.FF	**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**		**10.469.099**			**10.469.099**	**10.648.308**	**10.849.792**	**11.094.086**
7294	Peningkatan Penyuluhan Kehutanan		10.469.099			10.469.099	10.648.308	10.849.792	11.094.086
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**69.700.000**	**6.300.000**		**76.000.000**	**77.487.519**	**79.159.852**	**81.187.518**
10.03	**PENDIDIKAN MENENGAH**		**69.700.000**	**6.300.000**		**76.000.000**	**77.487.519**	**79.159.852**	**81.187.518**
143.11.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**69.700.000**	**6.300.000**		**76.000.000**	**77.487.519**	**79.159.852**	**81.187.518**
7298	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan		69.700.000	6.300.000		76.000.000	77.487.519	79.159.852	81.187.518
	JUMLAH RM	**3.026.449.832**	**1.674.511.881**	**50.723.605**		**4.751.685.318**	**4.851.879.118**	**4.953.505.227**	**5.076.724.556**
	JUMLAH PNBP		**1.051.070.567**	**19.929.433**		**1.071.000.000**	**1.151.400.692**	**1.172.999.489**	**1.199.187.015**
	JUMLAH HLN		**210.712.311**	**5.887.629**		**216.599.940**	**220.639.597**	**225.180.914**	**230.687.155**
	TOTAL JUMLAH	**3.026.449.832**	**2.936.294.759**	**76.540.667**		**6.039.285.258**	**6.223.919.407**	**6.351.685.630**	**6.506.598.726**

SK No 154448 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**	**376.266.171**	**970.617.603**	**49.510.469**		**1.396.394.243**	**1.420.303.585**	**1.447.181.501**	**1.479.770.509**
144.01	**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**	**376.266.171**	**970.617.603**	**49.510.469**		**1.396.394.243**	**1.420.303.585**	**1.447.181.501**	**1.479.770.509**
05	**FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		**532.563.518**	**24.132.896**		**556.696.414**	**567.155.186**	**578.912.805**	**593.168.690**
05.06	**LITBANG LINGKUNGAN HIDUP**		**6.526.334**	**1.440.000**		**7.966.334**	**7.998.363**	**8.034.380**	**8.078.053**
144.01.FD	**Program Kualitas Lingkungan Hidup**		**6.526.334**	**1.440.000**		**7.966.334**	**7.998.363**	**8.034.380**	**8.078.053**
7510	Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup		2.748.808	40.000		2.788.808	2.820.837	2.856.854	2.900.527
7511	Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup		3.777.526	1.400.000		5.177.526	5.177.526	5.177.526	5.177.526
05.90	**LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA**		**316.132.337**	**17.000.752**		**333.133.089**	**339.761.068**	**347.212.232**	**356.246.613**
144.01.FD	**Program Kualitas Lingkungan Hidup**		**244.637.125**	**8.241.240**		**252.878.365**	**258.010.651**	**263.780.280**	**270.775.846**
7508	Pengendalian Lingkungan Hidup		26.265.830	139.450		26.405.280	26.825.299	27.297.574	27.870.209
7513	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup		4.935.944			4.935.944	5.033.865	5.143.982	5.277.490
7514	Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup		4.341.559			4.341.559	4.341.559	4.341.559	4.341.559
7515	Pencegahan Dampak Lingkungan		19.984.895	1.195.105		21.180.000	21.600.179	22.072.556	22.645.306
7516	Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan		8.395.000	105.000		8.500.000	8.668.631	8.858.204	9.088.062
7517	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut		14.232.226	1.668.570		15.900.796	16.243.044	16.627.783	17.094.276
7518	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat		14.633.234	702.000		15.335.234	15.674.169	16.055.230	16.517.244
7521	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		25.800.000	1.500.000		27.300.000	27.895.400	28.564.720	29.376.256
7522	Pengawasan Lingkungan Hidup		26.952.542	1.280.000		28.232.542	28.850.400	29.544.958	30.387.092
7523	Sanksi Administratif Lingkungan Hidup		22.700.000			22.700.000	23.206.329	23.775.501	24.465.614
7524	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup		28.300.000			28.300.000	28.937.769	29.654.698	30.523.969

SK No 154447 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7529	Pemantauan Kualitas Lingkungan		48.095.895	1.651.115		49.747.010	50.734.007	51.843.515	53.188.769
144.01.FB	**Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**		**50.297.165**	**8.493.012**		**58.790.177**	**59.914.970**	**61.179.494**	**62.712.699**
7502	Pengendalian Kebakaran Lahan		13.959.495	8.086.012		22.045.507	22.443.217	22.890.290	23.432.360
7503	Adaptasi Perubahan Iklim		9.443.305			9.443.305	9.630.648	9.841.266	10.096.632
7504	Mitigasi Perubahan Iklim		14.951.765			14.951.765	15.246.523	15.577.923	15.979.735
7505	Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi		2.813.285			2.813.285	2.869.081	2.931.828	3.007.901
7506	Mobilisasi Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim		5.958.839			5.958.839	6.077.056	6.209.959	6.371.098
7507	Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon		3.170.476	407.000		3.577.476	3.648.445	3.728.228	3.824.973
144.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**21.198.047**	**266.500**		**21.464.547**	**21.835.447**	**22.252.458**	**22.758.068**
7538	Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan dan Kerja Sama Bidang Lingkungan Hidup		13.946.055	266.500		14.212.555	14.439.629	14.694.895	15.004.402
7540	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja yang Bebas dari Kasus Pelanggaran Berindikasi KKN lingkup Inspektorat I		3.333.396			3.333.396	3.399.504	3.473.853	3.563.989
7541	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja yang Bebas dari Kasus Pelanggaran Berindikasi KKN lingkup Inspektorat II		3.918.596			3.918.596	3.996.314	4.083.710	4.189.677
05.02	**MANAJEMEN AIR LIMBAH**		**157.522.087**	**3.710.000**		**161.232.087**	**163.704.987**	**166.484.951**	**169.855.601**
144.01.FD	**Program Kualitas Lingkungan Hidup**		**157.522.087**	**3.710.000**		**161.232.087**	**163.704.987**	**166.484.951**	**169.855.601**
7525	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun		12.639.682	600.000		13.239.682	13.502.324	13.797.606	14.155.633
7526	Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun		12.943.310	500.000		13.443.310	13.710.000	14.009.838	14.373.357
7527	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun		11.504.073	1.500.000		13.004.073	13.262.065	13.552.094	13.903.751
7528	Pengelolaan Sampah		120.435.022	1.110.000		121.545.022	123.230.598	125.125.413	127.422.860

SK No 154446 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.03	**PENANGGULANGAN POLUSI**		**42.481.125**	**1.832.144**		**44.313.269**	**45.487.335**	**46.807.161**	**48.407.430**
144.01.FD	**Program Kualitas Lingkungan Hidup**		**42.481.125**	**1.832.144**		**44.313.269**	**45.487.335**	**46.807.161**	**48.407.430**
7530	Pengendalian Pencemaran Lingkungan		33.241.414	1.319.864		34.561.278	35.541.883	36.644.211	37.980.766
7531	Pemulihan Kerusakan Lingkungan		9.239.711	512.280		9.751.991	9.945.452	10.162.950	10.426.664
05.04	**KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM**		**9.901.635**	**150.000**		**10.051.635**	**10.203.433**	**10.374.081**	**10.580.993**
144.01.FD	**Program Kualitas Lingkungan Hidup**		**9.901.635**	**150.000**		**10.051.635**	**10.203.433**	**10.374.081**	**10.580.993**
7532	Konservasi Keanekaragaman Hayati		9.901.635	150.000		10.051.635	10.203.433	10.374.081	10.580.993
04	**FUNGSI EKONOMI**	**376.266.171**	**438.054.085**	**25.377.573**		**839.697.829**	**853.148.399**	**868.268.696**	**886.601.819**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**376.266.171**	**438.054.085**	**25.377.573**		**839.697.829**	**853.148.399**	**868.268.696**	**886.601.819**
144.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**376.266.171**	**438.054.085**	**25.377.573**		**839.697.829**	**853.148.399**	**868.268.696**	**886.601.819**
7509	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup	61.397.137	46.044.043	1.626.500		109.067.680	111.189.458	113.574.735	116.466.814
7533	Penyebarluasan Informasi Pembangunan LH dan Penyelenggaraan Protokol		31.367.272	252.880		31.620.152	32.247.482	32.952.708	33.807.771
7534	Penyelenggaraan Data, Informasi dan Digitalisasi Kementerian LH		20.000.944	302.000		20.302.944	20.705.742	21.158.557	21.707.594
7535	Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kementerian LH		13.135.202	560.000		13.695.202	13.863.906	14.053.579	14.283.557
7536	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LH	314.869.034	143.679.866	6.096.761		464.645.661	471.713.532	479.658.470	489.291.578
7537	Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LH		11.959.170	320.409		12.279.579	12.523.197	12.797.064	13.129.131
7539	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Utama		6.755.538	473.132		7.228.670	7.372.045	7.533.266	7.728.742
7542	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan		30.768.959			30.768.959	31.203.490	31.691.985	32.284.285

SK No 154445 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7544	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup		37.640.029	4.750.000		42.390.029	43.231.037	44.176.444	45.322.763
7545	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon		18.171.240	250.000		18.421.240	18.747.016	19.113.259	19.557.322
7546	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun		18.346.646	904.200		19.250.846	19.712.135	20.230.698	20.859.444
7547	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		19.420.000	1.206.691		20.626.691	20.996.237	21.411.661	21.915.366
7678	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup		5.007.783	480.000		5.487.783	5.596.643	5.719.038	5.867.440
7679	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup		15.641.083	7.800.000		23.441.083	23.441.083	23.441.083	23.441.083
7681	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup		6.404.214	355.000		6.759.214	6.893.300	7.044.053	7.226.833
7682	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup		13.712.096			13.712.096	13.712.096	13.712.096	13.712.096
	JUMLAH RM	**376.266.171**	**958.984.203**	**49.510.469**		**1.384.760.843**	**1.408.441.228**	**1.435.061.760**	**1.467.338.691**
	JUMLAH HLN		**11.633.400**			**11.633.400**	**11.862.357**	**12.119.741**	**12.431.818**
	TOTAL JUMLAH	**376.266.171**	**970.617.603**	**49.510.469**		**1.396.394.243**	**1.420.303.585**	**1.447.181.501**	**1.479.770.509**

SK No 154444 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**	**6.149.336.828**	**39.240.050.438**	**73.110.612.734**		**118.500.000.000**	**126.349.192.538**	**130.465.215.266**	**136.687.843.140**
145.01	**SEKRETARIAT JENDERAL**	**183.838.804**	**376.104.266**	**16.914.125**		**576.857.195**	**583.726.925**	**591.449.439**	**600.812.786**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**183.838.804**	**376.104.266**	**16.914.125**		**576.857.195**	**583.726.925**	**591.449.439**	**600.812.786**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**183.838.804**	**376.104.266**	**16.914.125**		**576.857.195**	**583.726.925**	**591.449.439**	**600.812.786**
145.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**183.838.804**	**376.104.266**	**16.914.125**		**576.857.195**	**583.726.925**	**591.449.439**	**600.812.786**
7745	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Kementerian PU		5.950.000			5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
7746	Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundangn-Undangan Serta Advokasi Hukum		8.586.904			8.586.904	8.665.521	8.753.931	8.861.118
7747	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang Pekerjaan Umum		75.981.755	6.500.396		82.482.151	82.482.151	82.482.151	82.482.151
7748	Penyelenggaraan Fasilitasi Infrastruktur Daerah		7.500.000			7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
7749	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	183.838.804	183.535.710	10.413.729		377.788.243	384.397.868	391.827.948	400.836.730
7750	Pengkajian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan		5.610.429			5.610.429	5.610.429	5.610.429	5.610.429
7751	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum		70.468.098			70.468.098	70.468.098	70.468.098	70.468.098
7752	Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik		18.471.370			18.471.370	18.652.858	18.856.882	19.104.260
145.02	**INSPEKTORAT JENDERAL**	**61.635.544**	**44.249.301**	**1.930.080**		**107.814.925**	**109.888.649**	**112.219.898**	**115.046.444**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**61.635.544**	**44.249.301**	**1.930.080**		**107.814.925**	**109.888.649**	**112.219.898**	**115.046.444**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**61.635.544**	**44.249.301**	**1.930.080**		**107.814.925**	**109.888.649**	**112.219.898**	**115.046.444**
145.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**61.635.544**	**44.249.301**	**1.930.080**		**107.814.925**	**109.888.649**	**112.219.898**	**115.046.444**
7753	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	61.635.544	14.937.244	1.930.080		78.502.868	79.995.150	81.672.641	83.706.570
7754	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum		29.312.057			29.312.057	29.893.499	30.547.257	31.339.874
145.03	**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**	**1.888.078.085**	**11.091.638.426**	**21.755.823.010**		**34.735.539.521**	**40.574.736.044**	**43.489.912.805**	**47.273.943.056**

SK No 154443 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	**FUNGSI EKONOMI**	**1.888.078.085**	**11.091.638.426**	**21.755.823.010**		**34.735.539.521**	**40.574.736.044**	**43.489.912.805**	**47.273.943.056**
04.04	**PENGAIRAN**		**10.218.414.206**	**21.692.332.680**		**31.910.746.886**	**37.701.773.419**	**40.562.802.326**	**44.281.179.254**
145.03.FC	**Program Ketahanan Sumber Daya Air**		**10.218.414.206**	**21.692.332.680**		**31.910.746.886**	**37.701.773.419**	**40.562.802.326**	**44.281.179.254**
7687	Layanan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)		7.678.777			7.678.777	7.824.960	7.989.309	8.188.595
7688	Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi		154.315.905	1.458.187.267		1.612.503.172	1.643.569.641	1.678.491.384	1.720.833.422
7690	Layanan Teknis SDA		230.742.226	60.052.792		290.795.018	293.907.447	297.406.737	301.649.591
7691	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi		2.371.155.182	7.008.534.371		9.379.689.553	11.440.915.587	12.448.798.747	14.346.040.957
7692	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai		183.996.654	7.691.588.871		7.875.585.525	7.891.940.286	9.156.738.668	10.635.305.571
7693	Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		82.921.990	2.578.869.602		2.661.791.592	5.283.887.196	5.759.414.151	5.965.188.915
7694	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku		18.188.392	2.768.349.683		2.786.538.075	3.790.545.951	3.795.051.162	3.800.513.644
7695	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana		7.169.415.080	126.750.094		7.296.165.174	7.349.182.351	7.418.912.168	7.503.458.559
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**1.888.078.085**	**873.224.220**	**63.490.330**		**2.824.792.635**	**2.872.962.625**	**2.927.110.479**	**2.992.763.802**
145.03.FC	**Program Ketahanan Sumber Daya Air**		**152.985.194**	**31.432.000**		**184.417.194**	**184.417.405**	**184.417.643**	**184.417.932**
7686	Pengendalian Lumpur Sidoarjo		137.789.279	31.422.000		169.211.279	169.211.279	169.211.279	169.211.279
7689	Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air		15.195.915	10.000		15.205.915	15.206.126	15.206.364	15.206.653
145.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.888.078.085**	**720.239.026**	**32.058.330**		**2.640.375.441**	**2.688.545.220**	**2.742.692.836**	**2.808.345.870**
7755	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	1.888.078.085	720.239.026	32.058.330		2.640.375.441	2.688.545.220	2.742.692.836	2.808.345.870
145.04	**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**	**2.253.870.406**	**14.772.129.629**	**28.590.221.097**		**45.616.221.132**	**46.314.682.955**	**46.117.223.296**	**47.041.551.674**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**2.253.870.406**	**14.772.129.629**	**28.590.221.097**		**45.616.221.132**	**46.314.682.955**	**46.117.223.296**	**47.041.551.674**
04.08	**TRANSPORTASI**		**14.045.067.575**	**28.561.514.682**		**42.606.582.257**	**46.314.682.955**	**46.117.223.296**	**47.041.551.674**

SK No 154442 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145.04.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**		**14.045.067.575**	**28.561.514.682**		**42.606.582.257**	**46.314.682.955**	**46.117.223.296**	**47.041.551.674**
7696	Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional		13.542.077.236	28.495.672.022		42.037.749.258	46.314.682.955	46.117.223.296	47.041.551.674
7697	Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol		53.184.477			53.184.477			
7698	Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		449.805.862	65.842.660		515.648.522			
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**2.253.870.406**	**727.062.054**	**28.706.415**		**3.009.638.875**			
145.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**2.253.870.406**	**727.062.054**	**28.706.415**		**3.009.638.875**			
7756	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	2.253.870.406	727.062.054	28.706.415		3.009.638.875			
145.05	**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**	**1.028.374.946**	**9.659.607.827**	**1.344.015.318**		**12.031.998.091**	**13.119.440.736**	**14.281.315.926**	**15.548.571.824**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**1.028.374.946**	**9.659.607.827**	**1.344.015.318**		**12.031.998.091**	**13.119.440.736**	**14.281.315.926**	**15.548.571.824**
06.03	**PENYEDIAAN AIR MINUM**		**3.241.142.986**	**323.376.391**		**3.564.519.377**	**3.699.614.569**	**3.867.763.130**	**4.053.333.740**
145.05.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**3.241.142.986**	**323.376.391**		**3.564.519.377**	**3.699.614.569**	**3.867.763.130**	**4.053.333.740**
7714	Penyelenggaraan Air Minum yang Aman		3.241.142.986	323.376.391		3.564.519.377	3.699.614.569	3.867.763.130	4.053.333.740
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**	**1.028.374.946**	**6.418.464.841**	**1.020.638.927**		**8.467.478.714**	**9.419.826.167**	**10.413.552.796**	**11.495.238.084**
145.05.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**6.162.712.583**	**967.088.579**		**7.129.801.162**	**8.061.389.083**	**9.031.780.003**	**10.085.171.163**
7715	Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu		4.107.485.244	345.256.366		4.452.741.610	4.729.090.315	5.023.341.715	5.346.645.715
7716	Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya		524.038.446	52.426.874		576.465.320	584.271.680	593.047.004	603.686.894
7772	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis		1.531.188.893	569.405.339		2.100.594.232	2.748.027.088	3.415.391.284	4.134.838.554
145.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.028.374.946**	**255.752.258**	**53.550.348**		**1.337.677.552**	**1.358.437.084**	**1.381.772.793**	**1.410.066.921**
7757	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya	1.028.374.946	255.752.258	53.550.348		1.337.677.552	1.358.437.084	1.381.772.793	1.410.066.921
145.06	**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS**	**116.277.247**	**2.649.254.895**	**21.343.000.017**		**24.108.532.159**	**24.305.058.563**	**24.510.501.409**	**24.719.943.037**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**116.277.247**	**863.777.695**	**208.571.544**		**1.188.626.486**	**1.320.383.294**	**1.478.427.637**	**1.616.124.485**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**	**116.277.247**	**863.777.695**	**208.571.544**		**1.188.626.486**	**1.320.383.294**	**1.478.427.637**	**1.616.124.485**
145.06.GM	**Program Prasarana Strategis**		**786.710.675**	**204.110.506**		**990.821.181**	**1.070.777.181**	**1.174.526.107**	**1.248.008.565**
7718	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya		641.285.892	204.110.506		845.396.398	925.352.398	1.029.101.324	1.102.583.782
7987	Penyelenggaraan Pembinaan Prasarana Strategis		145.424.783			145.424.783	145.424.783	145.424.783	145.424.783
145.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**116.277.247**	**77.067.020**	**4.461.038**		**197.805.305**	**249.606.113**	**303.901.530**	**368.115.920**
7838	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis	116.277.247	77.067.020	4.461.038		197.805.305	249.606.113	303.901.530	368.115.920
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**1.785.477.200**	**21.134.428.473**		**22.919.905.673**	**22.984.675.269**	**23.032.073.772**	**23.103.818.552**
10.90	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA**		**1.785.477.200**	**21.134.428.473**		**22.919.905.673**	**22.984.675.269**	**23.032.073.772**	**23.103.818.552**
145.06.GM	**Program Prasarana Strategis**		**1.785.477.200**	**21.134.428.473**		**22.919.905.673**	**22.984.675.269**	**23.032.073.772**	**23.103.818.552**
7717	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan		1.785.477.200	21.134.428.473		22.919.905.673	22.984.675.269	23.032.073.772	23.103.818.552
145.07	**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**	**353.741.694**	**242.223.589**	**3.064.910**		**599.030.193**	**607.504.009**	**617.029.828**	**628.579.710**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**353.741.694**	**201.223.589**	**3.064.910**		**558.030.193**	**566.504.009**	**576.029.828**	**587.579.710**
04.07	**INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	**353.741.694**	**201.223.589**	**3.064.910**		**558.030.193**	**566.504.009**	**576.029.828**	**587.579.710**
145.07.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**353.741.694**	**201.223.589**	**3.064.910**		**558.030.193**	**566.504.009**	**576.029.828**	**587.579.710**
7758	Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Konstruksi	353.741.694	96.356.908	3.064.910		453.163.512	460.355.916	468.441.123	478.244.284
7759	Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi		15.712.208			15.712.208	15.874.878	16.057.759	16.279.505
7761	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi		25.776.897			25.776.897	26.101.118	26.465.612	26.907.547
7762	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa		50.106.620			50.106.620	50.813.128	51.607.409	52.570.471
7763	Pembinaan Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi		6.408.896			6.408.896	6.496.909	6.595.865	6.715.843
7839	Penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko di Ditjen Bina Konstruksi		6.862.060			6.862.060	6.862.060	6.862.060	6.862.060
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**41.000.000**			**41.000.000**	**41.000.000**	**41.000.000**	**41.000.000**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.90	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA**		**41.000.000**			**41.000.000**	**41.000.000**	**41.000.000**	**41.000.000**
145.07.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**41.000.000**			**41.000.000**	**41.000.000**	**41.000.000**	**41.000.000**
7685	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi		41.000.000			41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
145.08	**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM**	**67.397.460**	**78.941.268**	**800.000**		**147.138.728**	**147.263.887**	**147.404.621**	**147.575.271**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**67.397.460**	**78.941.268**	**800.000**		**147.138.728**	**147.263.887**	**147.404.621**	**147.575.271**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**67.397.460**	**78.941.268**	**800.000**		**147.138.728**	**147.263.887**	**147.404.621**	**147.575.271**
145.08.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**67.397.460**	**78.941.268**	**800.000**		**147.138.728**	**147.263.887**	**147.404.621**	**147.575.271**
7764	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	67.397.460	26.062.268	800.000		94.259.728	94.259.728	94.259.728	94.259.728
7765	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan		4.175.000			4.175.000	4.234.456	4.301.316	4.382.391
7766	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		48.704.000			48.704.000	48.769.703	48.843.577	48.933.152
145.11	**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**	**59.624.697**	**110.810.779**	**2.500.000**		**172.935.476**	**175.741.455**	**178.895.748**	**182.720.266**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**59.624.697**	**110.810.779**	**2.500.000**		**172.935.476**	**175.741.455**	**178.895.748**	**182.720.266**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**59.624.697**	**110.810.779**	**2.500.000**		**172.935.476**	**175.741.455**	**178.895.748**	**182.720.266**
145.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**59.624.697**	**110.810.779**	**2.500.000**		**172.935.476**	**175.741.455**	**178.895.748**	**182.720.266**
7767	Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah	59.624.697	27.630.779	2.500.000		89.755.476	91.393.460	93.234.745	95.467.270
7768	Pengembangan Infrastruktur Wilayah		83.180.000			83.180.000	84.347.995	85.661.003	87.252.996
145.12	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**136.497.945**	**215.090.458**	**52.344.177**		**403.932.580**	**411.149.315**	**419.262.296**	**429.099.072**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**136.497.945**	**159.441.592**	**8.344.177**		**304.283.714**	**309.603.838**	**315.584.778**	**322.836.493**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**136.497.945**	**159.441.592**	**8.344.177**		**304.283.714**	**309.603.838**	**315.584.778**	**322.836.493**
145.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**136.497.945**	**159.441.592**	**8.344.177**		**304.283.714**	**309.603.838**	**315.584.778**	**322.836.493**
7769	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang Pekerjaan Umum		42.327.627			42.327.627	42.989.945	43.734.798	44.637.867

SK No 154439 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7770	Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia	136.497.945	109.745.517	8.344.177		254.587.639	259.101.371	264.175.478	270.327.731
7771	Penyelenggaraan Pengelolaan Talenta		7.368.448			7.368.448	7.512.522	7.674.502	7.870.895
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**		**55.648.866**	**44.000.000**		**99.648.866**	**101.545.477**	**103.677.518**	**106.262.579**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**		**55.648.866**	**44.000.000**		**99.648.866**	**101.545.477**	**103.677.518**	**106.262.579**
145.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**55.648.866**	**44.000.000**		**99.648.866**	**101.545.477**	**103.677.518**	**106.262.579**
7684	Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum		55.648.866	44.000.000		99.648.866	101.545.477	103.677.518	106.262.579
	JUMLAH RM	**6.149.336.828**	**36.132.405.696**	**52.799.637.028**		**95.081.379.552**	**107.333.101.166**	**111.251.235.806**	**116.833.927.803**
	JUMLAH PNBP		**11.241.127**			**11.241.127**	**11.460.682**	**11.707.491**	**12.006.742**
	JUMLAH PLN		**2.783.186.607**	**10.591.294.976**		**13.374.481.583**	**11.675.237.502**	**11.793.853.841**	**12.037.674.104**
	JUMLAH HLN		**869.589**			**869.589**	**886.842**	**906.236**	**929.751**
	JUMLAH SBSN		**312.347.419**	**5.969.731.124**		**6.282.078.543**	**2.128.395.888**	**2.140.375.257**	**2.154.900.031**
	JUMLAH RMP			**744.695.766**		**744.695.766**	**135.229.378**	**135.229.378**	**135.229.378**
	TOTAL JUMLAH	**6.149.336.828**	**39.240.050.438**	**73.110.612.734**		**118.500.000.000**	**126.349.192.538**	**130.465.215.266**	**136.687.843.140**

SK No 154438 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 146

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**626.626.312**	**10.028.133.303**	**240.747.629**		**10.895.507.244**	**10.985.206.870**	**11.086.095.905**	**11.208.422.006**
146.01	**SEKRETARIAT JENDERAL**	**626.626.312**	**253.737.897**	**11.384.790**		**891.748.999**	**909.167.145**	**928.803.878**	**952.613.060**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**626.626.312**	**253.737.897**	**11.384.790**		**891.748.999**	**909.167.145**	**928.803.878**	**952.613.060**
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**	**626.626.312**	**253.737.897**	**11.384.790**		**891.748.999**	**909.167.145**	**928.803.878**	**952.613.060**
146.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**626.626.312**	**253.737.897**	**11.384.790**		**891.748.999**	**909.167.145**	**928.803.878**	**952.613.060**
7663	Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tata Laksana		1.080.000			1.080.000	1.091.502	1.104.438	1.120.124
7664	Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan serta Advokasi Hukum		1.250.000			1.250.000	1.250.541	1.251.149	1.251.887
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	626.626.312	240.177.882	11.344.790		878.148.984	895.442.287	914.938.585	938.577.511
7666	Perencanaan dan Kerja Sama		1.915.000			1.915.000	1.923.924	1.933.959	1.946.126
7667	Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik		2.058.544	40.000		2.098.544	2.116.947	2.137.648	2.162.740
7668	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi		1.525.000			1.525.000	1.549.786	1.577.667	1.611.469
7669	Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi		1.100.563			1.100.563	1.117.264	1.136.064	1.158.852
7670	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi		1.527.284			1.527.284	1.542.662	1.559.957	1.580.930
7671	Penyelenggaraan Pengembangan Talenta		1.008.624			1.008.624	1.020.312	1.033.459	1.049.398
7906	Pengelolaan Keuangan dan BMN		2.095.000			2.095.000	2.111.920	2.130.952	2.154.023
146.02	**INSPEKTORAT JENDERAL**		**23.073.082**	**3.804.265**		**26.877.347**	**27.262.137**	**27.694.779**	**28.219.344**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		**23.073.082**	**3.804.265**		**26.877.347**	**27.262.137**	**27.694.779**	**28.219.344**
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**		**23.073.082**	**3.804.265**		**26.877.347**	**27.262.137**	**27.694.779**	**28.219.344**
146.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**23.073.082**	**3.804.265**		**26.877.347**	**27.262.137**	**27.694.779**	**28.219.344**
7672	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman		11.773.082	3.804.265		15.577.347	15.785.908	16.020.370	16.304.647
7673	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman		11.300.000			11.300.000	11.476.229	11.674.409	11.914.697

SK No 154437 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 146

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146.03	**DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN**		**2.937.678.482**	**644.400**		**2.938.322.882**	**2.941.076.703**	**2.944.172.588**	**2.947.926.281**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		**2.937.678.482**	**644.400**		**2.938.322.882**	**2.941.076.703**	**2.944.172.588**	**2.947.926.281**
06.01	**PEMBANGUNAN PERUMAHAN**		**2.917.597.664**			**2.917.597.664**	**2.920.035.872**	**2.922.776.827**	**2.926.100.192**
146.03.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**2.917.597.664**			**2.917.597.664**	**2.920.035.872**	**2.922.776.827**	**2.926.100.192**
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		2.917.597.664			2.917.597.664	2.920.035.872	2.922.776.827	2.926.100.192
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**		**20.080.818**	**644.400**		**20.725.218**	**21.040.831**	**21.395.761**	**21.826.089**
146.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**20.080.818**	**644.400**		**20.725.218**	**21.040.831**	**21.395.761**	**21.826.089**
7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		20.080.818	644.400		20.725.218	21.040.831	21.395.761	21.826.089
146.04	**DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN**		**3.922.289.375**	**1.162.514**		**3.923.451.889**	**3.931.939.082**	**3.941.479.728**	**3.953.047.612**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		**3.922.289.375**	**1.162.514**		**3.923.451.889**	**3.931.939.082**	**3.941.479.728**	**3.953.047.612**
06.01	**PEMBANGUNAN PERUMAHAN**		**3.907.769.803**			**3.907.769.803**	**3.916.122.500**	**3.925.511.925**	**3.936.896.453**
146.04.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**3.907.769.803**			**3.907.769.803**	**3.916.122.500**	**3.925.511.925**	**3.936.896.453**
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		3.907.769.803			3.907.769.803	3.916.122.500	3.925.511.925	3.936.896.453
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**		**14.519.572**	**1.162.514**		**15.682.086**	**15.816.582**	**15.967.803**	**16.151.159**
146.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**14.519.572**	**1.162.514**		**15.682.086**	**15.816.582**	**15.967.803**	**16.151.159**
7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		14.519.572	1.162.514		15.682.086	15.816.582	15.967.803	16.151.159
146.05	**DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN**		**2.850.877.519**	**223.051.660**		**3.073.929.179**	**3.133.854.146**	**3.201.215.551**	**3.282.890.062**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		**2.850.877.519**	**223.051.660**		**3.073.929.179**	**3.133.854.146**	**3.201.215.551**	**3.282.890.062**
06.01	**PEMBANGUNAN PERUMAHAN**		**2.835.391.242**	**222.344.748**		**3.057.735.990**	**3.117.389.109**	**3.184.444.773**	**3.265.748.588**
146.05.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**2.835.391.242**	**222.344.748**		**3.057.735.990**	**3.117.389.109**	**3.184.444.773**	**3.265.748.588**
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		2.835.391.242	222.344.748		3.057.735.990	3.117.389.109	3.184.444.773	3.265.748.588

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 146

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**		**15.486.277**	**706.912**		**16.193.189**	**16.465.037**	**16.770.778**	**17.141.474**
146.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**15.486.277**	**706.912**		**16.193.189**	**16.465.037**	**16.770.778**	**17.141.474**
7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		15.486.277	706.912		16.193.189	16.465.037	16.770.778	17.141.474
146.06	**DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO**		**40.476.948**	**700.000**		**41.176.948**	**41.907.657**	**42.729.381**	**43.725.647**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		**40.476.948**	**700.000**		**41.176.948**	**41.907.657**	**42.729.381**	**43.725.647**
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**		**40.476.948**	**700.000**		**41.176.948**	**41.907.657**	**42.729.381**	**43.725.647**
146.06.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**30.443.519**			**30.443.519**	**31.043.106**	**31.717.421**	**32.534.950**
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		30.443.519			30.443.519	31.043.106	31.717.421	32.534.950
146.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**10.033.429**	**700.000**		**10.733.429**	**10.864.551**	**11.011.960**	**11.190.697**
7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman		10.033.429	700.000		10.733.429	10.864.551	11.011.960	11.190.697
	JUMLAH RM	**626.626.312**	**10.028.133.303**	**240.747.629**		**10.895.507.244**	**10.985.206.870**	**11.086.095.905**	**11.208.422.006**
	TOTAL JUMLAH	**626.626.312**	**10.028.133.303**	**240.747.629**		**10.895.507.244**	**10.985.206.870**	**11.086.095.905**	**11.208.422.006**

SK No 154435 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 147

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147	**KEMENTERIAN PARIWISATA**	**441.136.822**	**1.281.256.305**	**129.301.158**		**1.851.694.285**	**1.887.223.300**	**1.927.163.244**	**1.975.589.823**
147.01	**KEMENTERIAN PARIWISATA**	**441.136.822**	**1.281.256.305**	**129.301.158**		**1.851.694.285**	**1.887.223.300**	**1.927.163.244**	**1.975.589.823**
08	**FUNGSI PARIWISATA**	**267.278.240**	**924.457.723**	**53.651.158**		**1.245.387.121**	**1.269.160.897**	**1.295.885.850**	**1.328.289.540**
08.01	**PENGEMBANGAN PARIWISATA**	**267.278.240**	**924.457.723**	**53.651.158**		**1.245.387.121**	**1.269.160.897**	**1.295.885.850**	**1.328.289.540**
147.01.EK	**Program Pariwisata**		**597.699.315**	**6.270.938**		**603.970.253**	**615.259.332**	**627.949.766**	**643.336.827**
7211	Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I		5.750.000			5.750.000	5.864.081	5.992.322	6.147.814
7212	Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II		5.550.000			5.550.000	5.660.111	5.783.894	5.933.975
7214	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata		20.000.000			20.000.000	20.396.799	20.842.859	21.383.699
7215	Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba		7.250.708	2.249.292		9.500.000	9.688.469	9.900.345	10.157.245
7216	Pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur		5.895.243	100.000		5.995.243	6.065.197	6.143.863	6.239.246
7217	Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo		3.649.260	2.825.750		6.475.010	6.603.453	6.747.858	6.922.958
7218	Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha		4.601.000	399.000		5.000.000	5.000.296	5.000.631	5.001.036
7219	Pengembangan Manajemen Industri		5.000.000			5.000.000	5.024.796	5.052.674	5.086.476
7220	Peningkatan Manajemen Investasi		7.000.000			7.000.000	7.104.739	7.222.498	7.365.280
7222	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan		5.000.000			5.000.000	5.099.180	5.210.696	5.345.902
7223	Pengembangan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata		168.400.000			168.400.000	171.741.191	175.497.023	180.050.895
7224	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara		28.900.000			28.900.000	29.473.369	30.117.925	30.899.438
7225	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara I		19.000.000			19.000.000	19.376.975	19.800.731	20.314.530
7226	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara II		20.000.000			20.000.000	20.396.819	20.842.880	21.383.720
7227	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara III		38.000.000			38.000.000	38.753.957	39.601.472	40.629.068
7228	Pengembangan Wisata Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran		27.900.000			27.900.000	28.453.510	29.075.765	29.830.237

SK No 154434 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 147

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7229	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Daerah		64.300.000			64.300.000	65.424.952	66.689.472	68.222.807
7230	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Nasional		52.800.000			52.800.000	53.720.358	54.754.992	56.009.460
7231	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Internasional		36.000.000			36.000.000	34.793.617	35.685.725	36.767.413
7824	Peningkatan Hubungan Antar Lembaga Internasional		14.400.000			14.400.000	14.685.710	15.006.873	15.396.278
7825	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri		6.550.000			6.550.000	6.653.766	6.770.410	6.911.841
7826	Peningkatan Kapasitas Masyarakat		13.250.000			13.250.000	13.399.790	13.568.177	13.772.345
7827	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi		4.500.000			4.500.000	4.537.406	4.579.463	4.630.455
7828	Pengembangan Manajemen Strategis		2.830.000	170.000		3.000.000	3.059.523	3.126.432	3.207.558
7829	Perancangan Destinasi Pariwisata		10.500.000			10.500.000	10.708.300	10.942.484	11.226.429
7830	Pengembangan Produk Wisata		11.200.000			11.200.000	11.422.195	11.671.989	11.974.855
7831	Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan		5.000.000			5.000.000	5.099.171	5.210.688	5.345.894
7832	Pengembangan Strategi Events		4.473.104	526.896		5.000.000	7.051.602	7.109.625	7.179.973
147.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**267.278.240**	**326.758.408**	**47.380.220**		**641.416.868**	**653.901.565**	**667.936.084**	**684.952.713**
7238	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan		13.000.000	1.000.000		14.000.000	14.049.600	14.105.357	14.172.964
7239	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur		13.050.000	950.000		14.000.000	14.277.724	14.589.965	14.968.556
7240	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Otorita Pariwisata Danau Toba	8.358.699	12.204.463	4.240.000		24.803.162	25.295.256	25.848.441	26.519.163
7241	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Otorita Pariwisata Borobudur	9.244.232	11.850.000	4.650.000		25.744.232	26.245.538	26.809.073	27.492.356
7242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo	7.128.688	11.096.302	5.300.000		23.524.990	23.991.715	24.516.391	25.152.548



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 147

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Industri dan Investasi		12.500.000	500.000		13.000.000	13.255.230	13.542.207	13.890.152
7244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Pemasaran		13.700.000	300.000		14.000.000	14.277.722	14.589.974	14.968.548
7245	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)		13.900.000	100.000		14.000.000	14.276.935	14.588.266	14.965.781
7246	Peningkatan Layanan Umum dan Hukum		143.467.643	29.750.220		173.217.863	175.940.697	179.788.359	184.453.589
7247	Peningkatan Layanan Komunikasi		30.000.000			30.000.000	30.595.183	31.264.271	32.075.530
7248	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	242.546.621	12.280.000			254.826.621	259.882.556	265.565.944	272.456.974
7249	Peningkatan Layanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi		9.000.000			9.000.000	9.178.561	9.379.289	9.622.665
7251	Peningkatan Layanan Data dan Informasi		14.410.000	590.000		15.000.000	15.297.585	15.632.133	16.037.758
7252	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas		16.300.000			16.300.000	17.337.263	17.716.414	18.176.129
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**173.858.582**	**356.798.582**	**75.650.000**		**606.307.164**	**618.062.403**	**631.277.394**	**647.300.283**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**173.858.582**	**356.798.582**	**75.650.000**		**606.307.164**	**618.062.403**	**631.277.394**	**647.300.283**
147.01.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**208.460.065**	**75.650.000**		**284.110.065**	**289.626.103**	**295.827.460**	**303.346.465**
7232	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Medan		27.421.379	8.150.000		35.571.379	36.277.065	37.070.409	38.032.335
7233	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Palembang		24.853.268	10.500.000		35.353.268	36.052.049	36.837.627	37.790.123
7234	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata NHI Bandung		49.961.232	14.000.000		63.961.232	65.112.477	66.406.750	67.976.019
7235	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Bali		54.497.594	23.000.000		77.497.594	79.035.010	80.763.445	82.859.139
7236	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Lombok		19.614.894	12.950.000		32.564.894	33.210.896	33.937.198	34.817.814
7237	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Makassar		32.111.698	7.050.000		39.161.698	39.938.606	40.812.031	41.871.035
147.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**173.858.582**	**148.338.517**			**322.197.099**	**328.436.300**	**335.449.934**	**343.953.818**
7253	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Medan	20.242.485	21.917.453			42.159.938	42.996.392	43.936.687	45.076.777

SK No 154432 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 147

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7254	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Palembang	18.591.320	25.043.529			43.634.849	44.500.095	45.472.737	46.652.045
7255	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata NHI Bandung	46.852.051	20.617.769			67.469.820	68.655.647	69.988.635	71.604.862
7256	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Bali	43.587.560	38.845.964			82.433.524	84.069.040	85.907.559	88.136.717
7257	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Lombok	17.631.896	20.033.598			37.665.494	38.412.782	39.252.837	40.271.389
7258	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Makassar	26.953.270	21.880.204			48.833.474	49.802.344	50.891.479	52.212.028
	JUMLAH RM	**441.136.822**	**1.224.350.594**	**127.626.551**		**1.793.113.967**	**1.827.214.434**	**1.865.857.962**	**1.912.712.656**
	JUMLAH PNBP		**52.110.065**			**52.110.065**	**53.419.237**	**54.581.455**	**55.990.623**
	JUMLAH BLU		**4.795.646**	**1.674.607**		**6.470.253**	**6.589.629**	**6.723.827**	**6.886.544**
	TOTAL JUMLAH	**441.136.822**	**1.281.256.305**	**129.301.158**		**1.851.694.285**	**1.887.223.300**	**1.927.163.244**	**1.975.589.823**

SK No 154431 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 148

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148	**KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF**	**137.759.816**	**389.490.751**	**1.218.000**		**528.468.567**	**538.700.906**	**550.203.674**	**564.150.580**
148.01	**KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF**	**137.759.816**	**389.490.751**	**1.218.000**		**528.468.567**	**538.700.906**	**550.203.674**	**564.150.580**
08	**FUNGSI PARIWISATA**	**137.759.816**	**389.490.751**	**1.218.000**		**528.468.567**	**538.700.906**	**550.203.674**	**564.150.580**
08.01	**PENGEMBANGAN PARIWISATA**	**137.759.816**	**103.336.476**	**818.000**		**241.914.292**	**246.461.300**	**251.573.212**	**257.771.312**
148.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**137.759.816**	**24.182.000**	**818.000**		**162.759.816**	**165.858.067**	**169.340.934**	**173.563.844**
7368	Pengelolaan Layanan Perencanaan dan Keuangan	137.759.816	2.000.000			139.759.816	142.532.765	145.649.829	149.429.216
7369	Pengelolaan Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi		2.025.000			2.025.000	2.059.689	2.098.725	2.146.045
7370	Pengelolaan Layanan Komunikasi		2.850.000			2.850.000	2.901.249	2.958.860	3.028.714
7371	Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas		1.200.000			1.200.000	1.212.415	1.226.385	1.243.320
7372	Pengelolaan Layanan Data dan Informasi		1.307.000	818.000		2.125.000	2.167.156	2.214.547	2.272.011
7373	Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		2.100.000			2.100.000	2.141.642	2.188.472	2.245.258
7374	Pengelolaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif		3.700.000			3.700.000	3.761.132	3.829.855	3.913.179
7375	Pengelolaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain		3.000.000			3.000.000	3.034.147	3.072.548	3.119.108
7376	Pengelolaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi		3.000.000			3.000.000	3.043.293	3.091.987	3.151.025
7377	Pengelolaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Kreativitas Media		3.000.000			3.000.000	3.004.579	3.009.726	3.015.968
148.01.EL	**Program Ekonomi Kreatif**		**79.154.476**			**79.154.476**	**80.603.233**	**82.232.278**	**84.207.468**
7348	Pengembangan Kajian dan Manajemen Strategi		4.125.000			4.125.000	4.206.817	4.298.814	4.410.369
7349	Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan, dan Investasi		4.075.000			4.075.000	4.155.818	4.246.705	4.356.899
7350	Pengembangan Fasilitasi Kekayaan Intelektual		4.050.000			4.050.000	4.130.282	4.220.551	4.330.004

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 148

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7351	Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan		4.450.000			4.450.000	4.491.738	4.538.681	4.595.595
7352	Pengembangan Fasilitasi Infrastruktur		4.100.000			4.100.000	4.180.605	4.271.237	4.381.130
7353	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Kuliner		4.945.000			4.945.000	5.043.098	5.153.380	5.287.103
7354	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Kriya		4.515.000			4.515.000	4.548.432	4.586.036	4.631.628
7355	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Fesyen		4.375.000			4.375.000	4.461.655	4.559.090	4.677.239
7356	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Seni Rupa dan Seni Pertunjukan		3.332.500			3.332.500	3.398.601	3.472.925	3.563.040
7357	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Arsitektur dan Desain		3.332.500			3.332.500	3.397.003	3.469.540	3.557.494
7358	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Gim		5.555.170			5.555.170	5.660.225	5.778.343	5.921.559
7359	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Aplikasi		4.444.136			4.444.136	4.532.285	4.631.407	4.751.584
7360	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Konten Digital		5.555.170			5.555.170	5.665.362	5.789.260	5.939.478
7361	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Teknologi Digital Baru		3.300.000			3.300.000	3.355.475	3.417.868	3.493.514
7362	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Film, Animasi, dan Video		5.500.000			5.500.000	5.609.091	5.731.758	5.880.486
7363	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Periklanan		2.200.000			2.200.000	2.243.638	2.292.701	2.352.195
7364	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Televisi dan Radio		2.460.000			2.460.000	2.508.791	2.563.655	2.630.179
7365	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Musik		4.440.000			4.440.000	4.527.327	4.625.507	4.744.545
7366	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Penerbitan dan Fotografi		4.400.000			4.400.000	4.486.990	4.584.820	4.703.427
08.90	**PARIWISATA LAINNYA**		**286.154.275**	**400.000**		**286.554.275**	**292.239.606**	**298.630.462**	**306.379.268**
148.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**285.008.751**	**400.000**		**285.408.751**	**291.071.369**	**297.436.675**	**305.154.502**
7882	Pengelolaan Layanan Umum		285.008.751	400.000		285.408.751	291.071.369	297.436.675	305.154.502
148.01.EL	**Program Ekonomi Kreatif**		**1.145.524**			**1.145.524**	**1.168.237**	**1.193.787**	**1.224.766**

SK No 154429 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 148

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7881	Pengembangan Ekosistem dan Rantai Nilai subsektor Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi		1.145.524			1.145.524	1.168.237	1.193.787	1.224.766
	JUMLAH RM	**137.759.816**	**389.490.751**	**1.218.000**		**528.468.567**	**538.700.906**	**550.203.674**	**564.150.580**
	TOTAL JUMLAH	**137.759.816**	**389.490.751**	**1.218.000**		**528.468.567**	**538.700.906**	**550.203.674**	**564.150.580**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 149

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	**KEMENTERIAN KOPERASI**	**92.749.199**	**835.529.770**	**33.764.646**		**962.043.615**	**979.743.474**	**999.640.692**	**1.023.765.711**
149.01	**KEMENTERIAN KOPERASI**	**92.749.199**	**835.529.770**	**33.764.646**		**962.043.615**	**979.743.474**	**999.640.692**	**1.023.765.711**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**92.749.199**	**835.529.770**	**33.764.646**		**962.043.615**	**979.743.474**	**999.640.692**	**1.023.765.711**
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**	**92.749.199**	**835.529.770**	**33.764.646**		**962.043.615**	**979.743.474**	**999.640.692**	**1.023.765.711**
149.01.EM	**Program Perkoperasian**		**629.434.453**	**19.354.822**		**648.789.275**	**660.282.430**	**673.202.309**	**688.867.450**
7625	Penguatan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi		6.750.000			6.750.000	6.843.180	6.947.950	7.074.983
7626	Restrukturisasi dan Revitalisasi Koperasi		5.450.000			5.450.000	5.526.903	5.613.376	5.718.221
7627	Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko		9.600.000			9.600.000	9.697.470	9.807.066	9.939.946
7628	Penguatan Digitalisasi Koperasi		50.626.000			50.626.000	51.630.465	52.759.574	54.128.603
7631	Pengembangan Potensi Usaha Koperasi		13.848.750	81.250		13.930.000	14.205.478	14.515.178	14.890.685
7632	Penguatan Kemitraan Koperasi		13.864.520	86.250		13.950.770	14.227.526	14.538.670	14.915.932
7633	Pengembangan Produksi Koperasi		13.734.000	266.000		14.000.000	14.277.740	14.589.969	14.968.562
7634	Penguatan Ekosistem Jaringan Usaha Koperasi		15.070.000	80.000		15.150.000	15.426.745	15.737.881	16.115.116
7636	Fasilitasi peningkatan kualitas SDM dan talenta koperasi		19.338.906			19.338.906	19.676.580	20.056.201	20.516.474
7637	Fasilitasi penyuluhan dan literasi perkoperasian		7.566.320	121.000		7.687.320	7.839.826	8.011.275	8.219.158
7638	Fasilitasi akses pemasaran koperasi		12.847.550	5.632.800		18.480.350	18.733.909	19.018.949	19.364.555
7639	Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Koperasi		4.306.871	193.129		4.500.000	4.579.339	4.668.555	4.776.723
7640	Fasilitasi Akses Rantai Pasok Produk Koperasi		12.746.500			12.746.500	12.979.546	13.241.527	13.559.176
7642	Penguatan Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penilaian Kesehatan		7.220.000	280.000		7.500.000	7.648.786	7.816.049	8.018.872
7643	Fasilitasi dan Penguatan Pengawasan Penataan Usaha Koperasi		7.500.000			7.500.000	7.648.785	7.816.060	8.018.875
7645	Fasilitasi Pemeriksaan Koperasi		8.915.944			8.915.944	9.059.771	9.221.468	9.417.520

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 149

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7646	Fasilitasi advokasi pelindungan anggota koperasi		9.059.990			9.059.990	9.239.710	9.441.775	9.686.774
7653	Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM		213.424.882	12.614.393		226.039.275	229.843.776	234.120.423	239.305.781
7654	Penguatan dan Pengembangan Kontribusi Gerakan Koperasi		13.254.220			13.254.220	13.275.614	13.299.666	13.328.827
7655	Dukungan Pemberdayaan Koperasi di Daerah		176.750.000			176.750.000	180.256.893	184.198.950	188.978.623
8026	Pengelolaan Data Koperasi dan Informasi Publik		7.560.000			7.560.000	7.664.388	7.781.747	7.924.044
149.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**92.749.199**	**206.095.317**	**14.409.824**		**313.254.340**	**319.461.044**	**326.438.383**	**334.898.261**
7624	Koordinasi Perencanaan dan Umum Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi		6.509.380	490.620		7.000.000	7.132.511	7.281.486	7.462.113
7630	Koordinasi Perencanaan dan Umum Bidang Pengembangan Usaha Koperasi		7.585.000			7.585.000	7.735.453	7.904.631	8.109.741
7635	Koordinasi Perencanaan dan Umum Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi		3.750.000	250.000		4.000.000	4.077.511	4.164.683	4.270.372
7641	Koordinasi Perencanaan dan Umum Bidang Pengawasan Koperasi		5.750.000	250.000		6.000.000	6.119.005	6.252.819	6.415.072
7647	Perencanaan Program/Kegiatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		18.899.200			18.899.200	19.274.127	19.695.632	20.206.709
7648	Penyelenggaraan Layanan Umum dan Pelaporan Keuangan	92.749.199	91.548.093	10.432.948		194.730.240	198.593.825	202.936.893	208.202.793
7649	Pengelolaan SDM, Organisasi dan Reformasi Birokrasi		12.200.330	75.340		12.275.670	12.519.179	12.792.967	13.124.922
7650	Penyelenggaraan Kehumasan, Tata Usaha, Komunikasi, dan Teknologi Informasi		47.645.534	2.366.696		50.012.230	51.004.477	52.119.897	53.472.327
7651	Fasilitasi Dukungan Regulasi dan Kerjasama		5.798.400	81.600		5.880.000	5.996.634	6.127.780	6.286.785
7652	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah		6.409.380	462.620		6.872.000	7.008.322	7.161.595	7.347.427
	JUMLAH RM	**92.749.199**	**622.104.888**	**21.150.253**		**736.004.340**	**749.899.698**	**765.520.269**	**784.459.930**
	JUMLAH BLU		**213.424.882**	**12.614.393**		**226.039.275**	**229.843.776**	**234.120.423**	**239.305.781**
	TOTAL JUMLAH	**92.749.199**	**835.529.770**	**33.764.646**		**962.043.615**	**979.743.474**	**999.640.692**	**1.023.765.711**

SK No 154471 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 150

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	**KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**	**116.543.230**	**419.997.443**	**10.049.729**		**546.590.402**	**551.039.332**	**556.040.579**	**562.104.475**
150.01	**KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**	**116.543.230**	**419.997.443**	**10.049.729**		**546.590.402**	**551.039.332**	**556.040.579**	**562.104.475**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**116.543.230**	**419.997.443**	**10.049.729**		**546.590.402**	**551.039.332**	**556.040.579**	**562.104.475**
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**	**116.543.230**	**419.997.443**	**10.049.729**		**546.590.402**	**551.039.332**	**556.040.579**	**562.104.475**
150.01.EN	**Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan**		**256.868.718**	**847.310**		**257.716.028**	**258.096.743**	**258.524.883**	**259.043.974**
7463	Fasilitasi Legalitas dan Pelindungan Usaha Mikro		10.500.000			10.500.000	10.514.221	10.530.213	10.549.603
7464	Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro		12.768.613			12.768.613	15.793.434	15.821.343	15.855.186
7465	Pembiayaan Usaha Mikro		8.525.000			8.525.000	10.545.327	10.568.189	10.595.907
7466	Perluasan Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro		5.800.000	200.000		6.000.000	6.019.838	6.042.139	6.069.181
7467	Penguatan Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro		10.036.484	90.000		10.126.484	11.126.484	11.126.484	11.126.484
7469	Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil		5.143.016			5.143.016	5.650.417	5.658.757	5.668.868
7470	Pengembangan Kapasitas Usaha Kecil		6.837.325			6.837.325	9.821.456	9.859.841	9.906.380
7471	Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil		19.941.962			19.941.962	21.700.141	21.709.343	21.720.502
7472	Kemitraan, Rantai Pasok, dan Pemasaran Usaha Kecil		8.418.924			8.418.924	9.031.191	9.045.000	9.061.735
7475	Pembiayaan dan Investasi Usaha Menengah		5.000.324			5.000.324	7.024.899	7.052.533	7.086.041
7476	Pengembangan Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Menengah		6.239.077			6.239.077	6.255.070	6.273.057	6.294.865
7477	Perluasan Pasar Usaha Menengah		8.739.077			8.739.077	10.755.321	10.773.588	10.795.734
7478	Produksi dan Digitalisasi Usaha Menengah		9.714.077			9.714.077	7.412.053	7.437.892	7.469.219
7480	Manajemen dan Tata Kelola Data		65.879.667			65.879.667	46.654.116	46.654.116	46.654.116
7481	Ekosistem Bisnis Wirausaha		23.505.282	295.000		23.800.282	29.169.385	29.302.669	29.464.262
7482	Inkubasi dan Digitalisasi Wirausaha		4.850.000			4.850.000	4.857.314	4.865.541	4.875.512

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 150

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7483	Perluasan Pembiayaan Wirausaha		3.750.300	39.700		3.790.000	3.802.355	3.816.247	3.833.094
7484	Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan		4.057.390	222.610		4.280.000	4.688.635	4.698.347	4.710.125
7500	Layanan Pemasaran Bagi UMKM		21.502.760			21.502.760	21.502.760	21.502.760	21.502.760
7501	Dukungan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah		6.509.440			6.509.440	6.509.440	6.509.440	6.509.440
7900	Pendampingan Inovasi dan Keberlanjutan Usaha		9.150.000			9.150.000	9.262.886	9.277.384	9.294.960
150.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**116.543.230**	**163.128.725**	**9.202.419**		**288.874.374**	**292.942.589**	**297.515.696**	**303.060.501**
7462	Koordinasi Perencanaan, Data dan Umum Bidang Mikro		3.450.000	50.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7468	Koordinasi Perencanaan, Data dan Umum Bidang Usaha Kecil		3.500.000	500.000		4.000.000	4.008.950	4.019.014	4.031.215
7474	Koordinasi Perencanaan, Data dan Umum Bidang Usaha Menengah		3.981.250	300.000		4.281.250	4.315.464	4.353.926	4.400.560
7479	Koordinasi Manajemen Kinerja dan Umum Bidang Kewirausahaan		3.268.877	731.123		4.000.000	4.034.474	4.073.225	4.120.212
7485	Perencanaan Program/Kegiatan		5.098.884			5.098.884	5.102.105	5.105.727	5.110.120
7486	Manajemen Organisasi dan Reformasi Birokrasi		1.500.000			1.500.000	1.509.917	1.521.067	1.534.589
7487	Layanan Dukungan Kerja Sama		1.390.000	110.000		1.500.000	1.501.059	1.502.250	1.503.695
7488	Manajemen Penyusunan Regulasi		1.728.000			1.728.000	1.753.167	1.781.469	1.815.783
7489	Layanan Manajemen SDM UMKM		1.693.052	116.796		1.809.848	2.126.262	2.135.945	2.147.688
7490	Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan	116.543.230	2.325.140			118.868.370	121.211.028	123.844.409	127.037.329
7492	Penyelenggaraan Tata Usaha dan Protokol		11.000.000			11.000.000	23.361.062	23.365.422	23.370.709
7493	Layanan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kementerian UMKM		86.231.282	6.409.500		92.640.782	68.470.898	69.624.677	71.023.616
7494	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		1.132.000	18.000		1.150.000	1.156.218	1.163.210	1.171.690
7495	Publikasi dan Kehumasan		4.400.000	100.000		4.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
7497	Data dan Teknologi Informasi		3.600.000	700.000		4.300.000	13.026.801	13.134.147	13.264.299

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 150

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7498	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah		5.833.000	167.000		6.000.000	6.417.849	6.437.925	6.462.258
7499	Sarana Prasarana dan Dukungan Manajemen LLP KUKM		22.997.240			22.997.240	23.447.335	23.953.283	24.566.738
	JUMLAH RM	**116.543.230**	**376.997.443**	**10.049.729**		**503.590.402**	**507.589.237**	**512.084.536**	**517.534.977**
	JUMLAH BLU		**43.000.000**			**43.000.000**	**43.450.095**	**43.956.043**	**44.569.498**
	TOTAL JUMLAH	**116.543.230**	**419.997.443**	**10.049.729**		**546.590.402**	**551.039.332**	**556.040.579**	**562.104.475**

SK No 154466 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 151

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**	**356.212.148**	**2.113.653.848**	**34.360.056**		**2.504.226.052**	**2.548.111.467**	**2.597.504.237**	**2.657.288.443**
151.01	**SEKRETARIAT JENDERAL**	**334.147.570**	**143.320.181**	**3.194.000**		**480.661.751**	**487.736.758**	**495.689.699**	**505.332.499**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**334.147.570**	**143.320.181**	**3.194.000**		**480.661.751**	**487.736.758**	**495.689.699**	**505.332.499**
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**	**334.147.570**	**143.320.181**	**3.194.000**		**480.661.751**	**487.736.758**	**495.689.699**	**505.332.499**
151.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**334.147.570**	**143.320.181**	**3.194.000**		**480.661.751**	**487.736.758**	**495.689.699**	**505.332.499**
7340	Penyelenggaraan Legislasi dan Advokasi Hukum		4.500.000			4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
7341	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		8.000.000			8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
7342	Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama		7.000.000			7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
7343	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi		5.500.000			5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
7344	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	334.147.570	6.368.009			340.515.579	347.145.387	354.597.883	363.633.898
7345	Pengelolaan Layanan Pengadaan dan Umum		111.952.172	3.194.000		115.146.172	115.591.371	116.091.816	116.698.601
151.02	**INSPEKTORAT JENDERAL**	**1.743.215**	**20.196.463**	**1.394.369**		**23.334.047**	**23.464.770**	**23.611.729**	**23.789.905**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**1.743.215**	**20.196.463**	**1.394.369**		**23.334.047**	**23.464.770**	**23.611.729**	**23.789.905**
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**	**1.743.215**	**20.196.463**	**1.394.369**		**23.334.047**	**23.464.770**	**23.611.729**	**23.789.905**
151.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.743.215**	**20.196.463**	**1.394.369**		**23.334.047**	**23.464.770**	**23.611.729**	**23.789.905**
7333	Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal	1.743.215	10.696.463	1.394.369		13.834.047	13.964.770	14.111.729	14.289.905
7334	Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur		9.500.000			9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
151.03	**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN**	**5.254.662**	**211.765.747**	**1.200.000**		**218.220.409**	**218.534.571**	**218.887.722**	**219.315.913**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**5.254.662**	**211.765.747**	**1.200.000**		**218.220.409**	**218.534.571**	**218.887.722**	**219.315.913**
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**	**5.254.662**	**211.765.747**	**1.200.000**		**218.220.409**	**218.534.571**	**218.887.722**	**219.315.913**
151.03.CT	**Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal**		**191.164.246**			**191.164.246**	**191.478.408**	**191.831.559**	**192.259.750**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 151

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7322	Pembangunan Desa dan Perdesaan		191.164.246			191.164.246	191.478.408	191.831.559	192.259.750
151.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**5.254.662**	**20.601.501**	**1.200.000**		**27.056.163**	**27.056.163**	**27.056.163**	**27.056.163**
7335	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	5.254.662	20.601.501	1.200.000		27.056.163	27.056.163	27.056.163	27.056.163
151.04	**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL**	**3.315.665**	**344.388.681**	**500.000**		**348.204.346**	**351.947.638**	**356.155.485**	**361.257.435**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**3.315.665**	**344.388.681**	**500.000**		**348.204.346**	**351.947.638**	**356.155.485**	**361.257.435**
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**	**3.315.665**	**344.388.681**	**500.000**		**348.204.346**	**351.947.638**	**356.155.485**	**361.257.435**
151.04.CT	**Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal**		**324.365.487**			**324.365.487**	**328.108.779**	**332.316.626**	**337.418.576**
7325	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal		324.365.487			324.365.487	328.108.779	332.316.626	337.418.576
151.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**3.315.665**	**20.023.194**	**500.000**		**23.838.859**	**23.838.859**	**23.838.859**	**23.838.859**
7336	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	3.315.665	20.023.194	500.000		23.838.859	23.838.859	23.838.859	23.838.859
151.05	**DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**	**2.926.648**	**45.286.524**			**48.213.172**	**48.499.021**	**48.881.919**	**49.242.510**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**2.926.648**	**45.286.524**			**48.213.172**	**48.499.021**	**48.881.919**	**49.242.510**
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**	**2.926.648**	**45.286.524**			**48.213.172**	**48.499.021**	**48.881.919**	**49.242.510**
151.05.CT	**Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal**		**24.500.000**			**24.500.000**	**24.500.000**	**24.500.000**	**24.500.000**
7326	Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal		24.500.000			24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
151.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**2.926.648**	**20.786.524**			**23.713.172**	**23.999.021**	**24.381.919**	**24.742.510**
7337	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	2.926.648	20.786.524			23.713.172	23.999.021	24.381.919	24.742.510
151.11	**BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL**	**3.441.917**	**47.540.365**	**17.481.250**		**68.463.532**	**68.890.557**	**69.370.581**	**69.952.605**

SK No 154464 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 151

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**3.441.917**	**47.540.365**	**17.481.250**		**68.463.532**	**68.890.557**	**69.370.581**	**69.952.605**
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**	**3.441.917**	**47.540.365**	**17.481.250**		**68.463.532**	**68.890.557**	**69.370.581**	**69.952.605**
151.11.CT	**Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal**		**13.852.206**	**3.200.000**		**17.052.206**	**17.052.206**	**17.052.206**	**17.052.206**
7330	Pengelolaan Data dan Informasi Eksternal		2.352.206	3.200.000		5.552.206	5.552.206	5.552.206	5.552.206
7331	Pengembangan Kebijakan, Keterpaduan Rencana, dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal		6.500.000			6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
7332	Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal		5.000.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
151.11.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**3.441.917**	**33.688.159**	**14.281.250**		**51.411.326**	**51.838.351**	**52.318.375**	**52.900.399**
7346	Pengelolaan Data dan Informasi Internal		13.950.000	13.050.000		27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
7347	Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	3.441.917	19.738.159	1.231.250		24.411.326	24.838.351	25.318.375	25.900.399
151.12	**BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL**	**5.382.471**	**1.301.155.887**	**10.590.437**		**1.317.128.795**	**1.349.038.152**	**1.384.907.102**	**1.428.397.576**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**5.382.471**	**1.301.155.887**	**10.590.437**		**1.317.128.795**	**1.349.038.152**	**1.384.907.102**	**1.428.397.576**
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**	**5.382.471**	**1.301.155.887**	**10.590.437**		**1.317.128.795**	**1.349.038.152**	**1.384.907.102**	**1.428.397.576**
151.12.CT	**Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal**		**1.251.217.992**			**1.251.217.992**	**1.282.384.168**	**1.317.417.654**	**1.359.895.148**
7327	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal		28.741.034			28.741.034	28.741.034	28.741.034	28.741.034
7328	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal		1.222.476.958			1.222.476.958	1.253.643.134	1.288.676.620	1.331.154.114
151.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**5.382.471**	**49.937.895**	**10.590.437**		**65.910.803**	**66.653.984**	**67.489.448**	**68.502.428**
7338	Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	5.382.471	39.437.895	10.590.437		55.410.803	56.153.984	56.989.448	58.002.428
7339	Pelatihan dan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara		10.500.000			10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000

SK No 154463 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 151

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH RM	356.212.148	1.899.528.239	34.360.056		2.290.100.443	2.329.928.404	2.374.760.176	2.429.014.241
	JUMLAH PLN		196.261.363			196.261.363	200.004.655	204.212.502	209.314.452
	JUMLAH HLN		17.864.246			17.864.246	18.178.408	18.531.559	18.959.750
	TOTAL JUMLAH	356.212.148	2.113.653.848	34.360.056		2.504.226.052	2.548.111.467	2.597.504.237	2.657.288.443

SK No 154462 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 152

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152	**KEMENTERIAN TRANSMIGRASI**	**114.758.463**	**1.576.755.065**	**210.527.256**		**1.902.040.784**	**1.919.649.739**	**1.939.444.736**	**1.963.445.837**
152.01	**SEKRETARIAT JENDERAL**	**114.758.463**	**334.232.917**	**60.884.118**		**509.875.498**	**516.122.430**	**523.144.954**	**531.659.595**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**114.758.463**	**334.232.917**	**60.884.118**		**509.875.498**	**516.122.430**	**523.144.954**	**531.659.595**
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**	**114.758.463**	**334.232.917**	**60.884.118**		**509.875.498**	**516.122.430**	**523.144.954**	**531.659.595**
152.01.DW	**Program Transmigrasi**		**49.580.000**	**1.420.000**		**51.000.000**	**51.628.893**	**52.336.014**	**53.193.329**
7164	Pengembangan Kebijakan dan Sumber Daya Manusia Transmigrasi		49.580.000	1.420.000		51.000.000	51.628.893	52.336.014	53.193.329
152.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**114.758.463**	**284.652.917**	**59.464.118**		**458.875.498**	**464.493.537**	**470.808.940**	**478.466.266**
7171	Penyelenggaraan Legislasi dan Advokasi Hukum		3.570.413			3.570.413	3.624.449	3.685.205	3.758.875
7172	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		7.790.724			7.790.724	7.922.599	8.070.851	8.250.605
7173	Pengelolaan Perencanaan, Kerja Sama, Komunikasi dan Informasi Publik		6.202.533			6.202.533	6.306.251	6.422.858	6.564.241
7174	Pengelolaan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi		5.600.571			5.600.571	5.701.892	5.815.811	5.953.946
7175	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	114.758.463	2.864.904			117.623.367	119.533.210	121.680.051	124.283.064
7176	Pengelolaan Sumber Daya Umum dan Layanan Pengadaan		241.373.557	35.167.317		276.540.874	279.193.733	282.175.866	285.791.639
7177	Pengelolaan Data dan Informasi Transmigrasi		5.813.310	19.295.000		25.108.310	25.578.815	26.107.721	26.749.012
7178	Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi		11.436.905	5.001.801		16.438.706	16.632.588	16.850.577	17.114.884
152.02	**INSPEKTORAT JENDERAL**		**19.889.112**	**648.000**		**20.537.112**	**21.046.728**	**21.619.650**	**22.314.309**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		**19.889.112**	**648.000**		**20.537.112**	**21.046.728**	**21.619.650**	**22.314.309**
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**		**19.889.112**	**648.000**		**20.537.112**	**21.046.728**	**21.619.650**	**22.314.309**
152.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**19.889.112**	**648.000**		**20.537.112**	**21.046.728**	**21.619.650**	**22.314.309**
7167	Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal		15.387.012	648.000		16.035.012	16.454.480	16.926.053	17.497.826
7168	Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur		4.502.100			4.502.100	4.592.248	4.693.597	4.816.483

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 152

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152.03	**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**481.770.504**	**147.915.380**		**629.685.884**	**637.900.334**	**647.134.396**	**658.330.589**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		**481.770.504**	**147.915.380**		**629.685.884**	**637.900.334**	**647.134.396**	**658.330.589**
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**		**481.770.504**	**147.915.380**		**629.685.884**	**637.900.334**	**647.134.396**	**658.330.589**
152.03.DW	**Program Transmigrasi**		**438.108.575**	**146.767.594**		**584.876.169**	**592.845.328**	**601.803.578**	**612.665.347**
7165	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		438.108.575	146.767.594		584.876.169	592.845.328	601.803.578	612.665.347
152.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**43.661.929**	**1.147.786**		**44.809.715**	**45.055.006**	**45.330.818**	**45.665.242**
7169	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		43.661.929	1.147.786		44.809.715	45.055.006	45.330.818	45.665.242
152.04	**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI**		**740.862.532**	**1.079.758**		**741.942.290**	**744.580.247**	**747.545.736**	**751.141.344**
06	**FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		**740.862.532**	**1.079.758**		**741.942.290**	**744.580.247**	**747.545.736**	**751.141.344**
06.90	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**		**740.862.532**	**1.079.758**		**741.942.290**	**744.580.247**	**747.545.736**	**751.141.344**
152.04.DW	**Program Transmigrasi**		**701.758.959**			**701.758.959**	**703.526.299**	**705.513.057**	**707.921.962**
7166	Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi		701.758.959			701.758.959	703.526.299	705.513.057	707.921.962
152.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**39.103.573**	**1.079.758**		**40.183.331**	**41.053.948**	**42.032.679**	**43.219.382**
7170	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi		39.103.573	1.079.758		40.183.331	41.053.948	42.032.679	43.219.382
	JUMLAH RM	**114.758.463**	**1.576.755.065**	**210.527.256**		**1.902.040.784**	**1.919.649.739**	**1.939.444.736**	**1.963.445.837**
	TOTAL JUMLAH	**114.758.463**	**1.576.755.065**	**210.527.256**		**1.902.040.784**	**1.919.649.739**	**1.939.444.736**	**1.963.445.837**

SK No 154460 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 001

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)**				**1.050.000.000**
2 Fungsi	**01 PELAYANAN UMUM**				**1.050.000.000**
3 Program	**1) CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan**				**735.039.762**
	2) WA Program Dukungan Manajemen				**314.960.238**
Program	**1) CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan**				**735.039.762**
	RM 735.039.762	01 Terselenggaranya pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional MPR RI dengan dukungan teknis dan keahlian yang berkualitas	ABC Kebijakan Bidang Politik	6 Rekomendasi Kebijakan	141.782.239
			AEA Koordinasi	2.283 kegiatan	117.287.399
			AEB Forum	130 forum	19.208.015
			AEF Sosialisasi dan Diseminasi	885.048 orang	449.932.472
			BLA Persidangan Lembaga Legislatif	1 sidang	3.995.125
			EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.834.512
Program	**2) WA Program Dukungan Manajemen**				**314.960.238**
	RM 314.960.238	01 Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi General dan Tematik Setjen MPR RI	BMA Data dan Informasi Publik	201 dokumen, Peta, Data	27.269.343
		02 Meningkatnya layanan internal Setjen MPR RI yang berkualitas	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	34 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	235.838.237
			EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	346 Unit, m2, Paket	41.639.388
			EBC Layanan Manajemen SDM Internal	339 Orang, Layanan, Rekomendasi	4.840.257

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 001

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	292 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.485.021
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	8 Sistem Informasi	887.992

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 002

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**002**	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**					
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					
3 Program	**1) CF**	**Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan**					**5.926.757.173**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**3.973.242.827**
Program	**1) CF**	**Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan**					**5.926.757.173**
	RM	5.926.757.173	01 Terwujudnya persidangan penyusunan dan pembahasan RUU Usul Inisiatif DPR RI dan RUU Usul Pemerintah yang dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dan prioritas pembangunan nasional	AAA Undang-Undang	56	UU, RUU	405.882.010
			02 Terwujudnya persidangan penyusunan dan pembahasan Rancangan APBN/APBN-P dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran negara untuk penguatan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sesuai RPJMN 2025-2029	AAH Peraturan lainnya	1	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	3.847.817
			03 Terwujudnya Persidangan Penyusunan dan Pembahasan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	56	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	36.369.901
			04 Terwujudnya Persidangan Pembahasan Kerja Sama Antara Parlemen dan Organisasi Internasional dalam rangka mendukung politik luar negeri Pemerintah	ABC Kebijakan Bidang Politik	1.247	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	669.942.105
			05 Terwujudnya Persidangan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dalam Memperkokoh Demokrasi Substansial	ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	15	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	30.921.988
			06 Terwujudnya Kebijakan Tata Kelola Kelembagaan DPR RI yang berperan dalam pembangunan nasional	AEA Koordinasi	1.162	kegiatan	113.992.189
			07 Terwujudnya Persidangan dalam rangka Penanganan Perkara Etik dan Perkara Hukum yang dimanfaatkan	AEC Kerja sama	170	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	160.283.584
				AEG Konferensi dan Event	3	Kegiatan, Paket Kegiatan	48.067.226

SK No 154457 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 002
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		BCA Perkara Hukum Perseorangan	20 Perkara, Berkas Perkara	17.549.483
		BCB Perkara Hukum Lembaga	153 Perkara, Berkas Perkara	10.858.020
		BKB Pemantauan produk	5 laporan	10.631.317
		BMB Komunikasi Publik	8.701 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	4.418.411.533
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**3.973.242.827**
RM 3.973.242.827	01 Terwujudnya layanan persidangan yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	60 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.985.757
	02 Terwujudnya layanan administrasi yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan	ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	12 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.660.274
	03 Terwujudnya layanan keahlian yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan	ABC Kebijakan Bidang Politik	204 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	15.680.458
	04 Terwujudnya layanan pengawasan internal inspektorat utama yang berintegritas dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	10 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.223.750
	05 Terwujudnya tata kelola Sekretariat Jenderal DPR RI yang berintegritas dan akuntabel dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI, dalam kerangka reformasi birokrasi	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	678 Unit	51.454.584
	06 Tersedianya hak keuangan Dewan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	32.191 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.917.097.441
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.668 Unit, m2, Paket	861.699.395
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	84 Orang, Layanan, Rekomendasi	31.094.246

SK No 154456 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 002

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	512 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	28.547.151
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	29 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	50.799.771
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	50 Lembaga	6.000.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 004

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**004**	**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**					**6.834.960.000**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**6.834.960.000**
3 Program	**1) CI**	**Program Pemeriksaan Keuangan Negara**					**5.425.003.513**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**1.409.956.487**
Program	**1) CI**	**Program Pemeriksaan Keuangan Negara**					**5.425.003.513**
	RM	5.397.615.237	01 Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pemeriksaan Keuangan Negara	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	232 Unit		5.730.179
	PNBP	27.388.276	02 Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	44 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		3.365.042.742
			03 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.863 Unit, m2, Paket		28.587.947
			04 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Pembelajar melalui BPK Corpu yang Berbasis Pengetahuan	FAF Pemeriksaan Keuangan Negara	10.210 Laporan, Pendapat Hukum, LHP, Bahan Pertimbangan, Pertimbangan		2.025.642.645
			05 Meningkatnya Kualitas Hasil Investigasi				
			06 Menguatnya Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah				
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**1.409.956.487**
	RM	1.409.652.295	01 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Organisasi, Sumber Daya, Komunikasi dan Kerja Sama	BMA Data dan Informasi Publik	2 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi		12.358.379
	PNBP	304.192		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.846 Unit		84.077.434

SK No 154454 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 004
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	7 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	102.899.387
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	296 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	922.032.196
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	26 Unit, m2, Paket	164.777.862
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	9.914 Orang, Layanan, Rekomendasi	97.851.379
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	47 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	21.515.850
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	8 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	4.444.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 005
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**005**	**MAHKAMAH AGUNG**					**14.753.752.140**
2 Fungsi	**03**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					**14.753.752.140**
3 Program	**1) BF**	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**					**198.625.196**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**14.555.126.944**
Program	**1) BF**	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**					**198.625.196**
	RM	188.221.744	01 Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung yang Transparan dan Modern	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.014.868
	PNBP	10.403.452	02 Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	AEA	Koordinasi	2.164 kegiatan	33.471.655
			03 Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan	BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	4.103 Orang	1.002.900
			04 Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	BCA	Perkara Hukum Perseorangan	148.473 Perkara, Berkas Perkara	69.280.179
			05 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	440 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	2.577.747
			08 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	312.863 Orang	40.741.752
			11 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau	QCA	Perkara Hukum Perseorangan	67.898 Perkara, Berkas Perkara	47.706.308
			12 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau	UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	386 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	2.829.787

SK No 154452 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 005
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	14 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang optimal				
	15 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal				
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen					**14.555.126.944**
RM 14.535.743.016	01 Terlaksananya dukungan manajemen pada Kepaniteraan yang prima dan optimal	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	24 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	17.533.223
PNBP 19.383.928	02 Terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, dan Penanganan Pengaduan yang efektif, efesien, dan ekonomis	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.200 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	12.797.472.533
	03 Terlaksananya dukungan manajemen Badan Pengawasan yang prima dan optimal	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11.842 Unit, m2, Paket	1.571.117.616
	05 Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	108.149 Orang, Layanan, Rekomendasi	104.629.992
	08 Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.934 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	42.815.939
	09 Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal	PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
	10 Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang prima dan optimal	PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.000.000
	11 Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang mendukung kebijakan Mahkamah Agung	TBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	6.000.000
	12 Terlaksananya dukungan manajemen Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan yang prima dan optimal	TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	441 Orang, Layanan, Rekomendasi	11.557.641

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 005
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	13 Terwujudnya SDM Mahkamah Agung yang kompeten		

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 006

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**006**	**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**					**20.250.000.000**
2 Fungsi	**03**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					**20.250.000.000**
3 Program	**1) BF**	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**					**8.657.322.245**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**11.592.677.755**
Program	**1) BF**	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**					**8.657.322.245**
	RM	8.470.604.959	01 Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara	AEA Koordinasi	35	kegiatan	969.500
	PNBP	186.717.286	02 Meningkatnya keberhasilan pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	220	orang	463.458
			03 Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Umum secara transparan, akuntabel dan profesional	AEG Konferensi dan Event	538	Kegiatan	1.316.000
			04 Meningkatnya penegakan hukum yang yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	11.642	Orang, Akta, Bidang, Laporan	3.003.200
			05 Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara pidana korupsi, pidana perpajakan, pidana kepabeanan, pidana cukai, pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	1.460	Lembaga	3.856.092
			06 Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara serta pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	BCE Penanganan Perkara	124.477	Perkara	260.698.879
			07 Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	BHB Operasi Bidang Keamanan	1.253	operasi, Hari Operasi	9.042.290

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 006

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	08 Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel dan profesional	BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	2	Orang, Laporan	15.000
	09 Meningkatnnya keberhasilan penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain	BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	20	laporan	21.900
	10 Meningkatnnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer	BMB Komunikasi Publik	90	layanan	2.356.908
	11 Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat yang memuaskan pemangku kepentingan	GAQ Sarana Bidang Hukum	39	Unit	8.234.956.693
	12 Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	162	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.506.682
	13 Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	445	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	28.878.703
	14 Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	476	Laporan, Layanan	1.750.100
	15 Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	FAG Pengawasan Pembangunan	135	Laporan, Layanan	2.618.950
	16 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
	17 Meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum	QHB Operasi Bidang Keamanan	25	operasi, Hari Operasi	8.178.000
	18 Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	QMB Komunikasi Publik	4.135	layanan	19.741.500
		RAQ Sarana Bidang Hukum	55	Unit	74.448.390
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**11.592.677.755**
RM 10.098.420.382	01 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	Unit	551.050.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 006

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
PNBP	547.470.023	02 Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI	CAQ Sarana Bidang Hukum	10 Unit	1.271.175.041
SBSN	854.387.350	03 Menguatnya pengendalian internal pada Kejaksaan RI	CBW Prasarana Bidang Hukum	121 Unit	1.612.957.943
BLU	92.400.000	04 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.258 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	7.225.820.382
		06 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	679 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	17.252.701
		07 Meningkatnya kualitas kebijakan penegakan hukum	FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.000 Orang	50.000.000
		08 Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI	FAH Pengelolaan Keuangan Negara	12 Layanan	10.034.338
		09 Meningkatnya kualitas program Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI	RPW Prasarana Bidang Hukum	5 Unit	854.387.350
		10 Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial			
		11 Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI			
		12 Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan RI			
		13 Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum dan Hubungan Luar Negeri			
		14 Menguatnya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani			
		15 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan berbasis TI			
		16 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI			

SK No 154496 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 007
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**007**	**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**				**2.609.387.464**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**				**2.609.387.464**
3 Program	**1) CA**	**Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden**				**243.863.633**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**2.365.523.831**
Program	**1) CA**	**Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden**				**243.863.633**
	RM 233.888.804		01 Pemberian Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pendapat Hukum terkait Litigasi, Permasalahan Hukum, Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi, Remisi Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara.	AAE Keputusan Presiden	215 KepPres	322.671
	HLN 9.974.829		02 Pemberian Rekomendasi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang Berkualitas	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	19 Rekomendasi Kebijakan	1.436.052
			04 Pemberian Rekomendasi Kebijakan atas Pengaduan Masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Berkualitas	ABC Kebijakan Bidang Politik	12 Rekomendasi Kebijakan	1.443.694
			05 Pemberian Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden yang Berkualitas	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	224 Rekomendasi Kebijakan	1.694.590
			06 Pengelolaan Program Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular, Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri, serta Penanganan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Efektif	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4 Rekomendasi Kebijakan	583.889
			07 Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dan Administrasi Penanganan Administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Pejabat Lainnya	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	1 Rekomendasi Kebijakan	9.974.829
			08 Terselenggaranya Dukungan Administrasi Personel TNI dan Polri yang Berkualitas	ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	4 Rekomendasi Kebijakan	583.889

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 007

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	09 Terselenggaranya Dukungan Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang Berkualitas	ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	41 Rekomendasi Kebijakan	2.013.051
	10 Terwujudnya Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, serta Pers dan Media Kegiatan Presiden yang Lancar	ABN Kebijakan Bidang Sosial	4 Rekomendasi Kebijakan	741.764
	11 Terwujudnya Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, serta Pers dan Media Kegiatan Wakil Presiden yang Lancar	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	170 Orang	1.360.564
	13 Meningkatnya Kelancaran Aktivitas Presiden dan Wakil Presiden melalui Dukungan Koordinasi Pengamanan	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.000 Orang, Akta, Bidang, Laporan	49.920
	14 Layanan Fasilitas Pejabat Negara, Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang Berkualitas	BAH Pelayanan Publik Lainnya	27 layanan	195.038.646
	15 Layanan Dukungan Tugas Lainnya yang secara Administratif Dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara sesuai Ketentuan	BHB Operasi Bidang Keamanan	7 operasi, Hari Operasi	21.430.622
	16 Terwujudnya Tugas Khusus pada Lembaga Lain yang Anggarannya secara Administratif Dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara secara Optimal	BLB Persidangan Lembaga Eksekutif	2 sidang	548.380
	17 Pemberian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM, Perekonomian, Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan yang berkualitas	FAA Kearsipan	4 Dokumen, Arsip	345.879
	18 Terwujudnya layanan pengelolaan persidangan kabinet yang lancar	PEC Kerja sama	13 Kesepakatan	6.295.193
	19 Terwujudnya dokumen pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama/Madya yang berkualitas			
	20 Terwujudnya Naskah Kepresidenan dan Kenegaraan yang berkualitas			
	21 Terwujudnya pengelolaan arsip kepresidenan dan pendokumentasian kegiatan kabinet yang berkualitas			

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 007
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	22 Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Kesekretariatan Negara yang Berkualitas			
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**2.365.523.831**
RM 1.590.603.368	01 Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia	ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan	445.542
PNBP 922.021	02 Organisasi, Tata Kelola, dan Transformasi Birokrasi yang Efektif	BAH Pelayanan Publik Lainnya	15 layanan	478.272.176
BLU 773.998.442	03 Pengawasan yang Berkualitas	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	69 Unit	15.994.612
	04 Perencanaan Kinerja dan Anggaran, serta Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas dan Akuntabel	CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	49 Unit	36.049.640
	05 Layanan BLU Kementerian Sekretariat Negara yang Berkualitas	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	84 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.797.708.254
	06 Terwujudnya Dukungan Administrasi yang Baik pada Lembaga Lain yang Anggarannya secara Administratif Dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	659 Unit, m2, Paket	18.981.379
	07 Hasil Analisis dan Pendapat Hukum terkait Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi, dan Litigasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang Berkualitas	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	7.634 Orang, Layanan, Rekomendasi	13.711.524
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	125 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.152.484
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	1.208.220

SK No 154493 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**010**	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**				**7.800.000.000**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**				**7.800.000.000**
3 Program	**1) CM**	**Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**				**896.731.523**
	2) CP	**Program Tata Kelola Kependudukan**				**2.069.744.710**
	3) CR	**Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum**				**262.819.299**
	4) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**4.570.704.468**
Program	**1) CM**	**Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**				**896.731.523**
	RM	752.739.193	01 Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan Damkar sesuai standar	AAA Undang-Undang	1 UU, RUU	600.000
	PNBP	38.277.432	02 Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, serta pengelolaan kawasan dan perbatasan negara	AAD Peraturan Presiden	2 PerPres, R.Perpres	440.000
	PLN	58.363.400	03 Meningkatnya kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	AAG Peraturan Menteri	11 PerMen, Perka, RPermen	2.135.000
	HLN	47.351.498	04 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa	AAH Peraturan lainnya	6 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	216.000
			05 Meningkatnya kualitas pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional	ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	156 Rekomendasi Kebijakan	26.072.030
			06 Meningkatnya kualitas unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, Produk Hukum Daerah, dan Penataan Daerah	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	1.770 Orang, Sertifikat	2.580.582



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	07 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	11 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.050.000
	08 Meningkatnya kualitas inovasi pemerintahan dalam negeri	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	9.810 Lembaga, Unit Kerja, Tim	22.780.000
	09 Meningkatnya kualitas strategi dan kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan pemerintahan dalam negeri	BMA	Data dan Informasi Publik	4 layanan, dokumen, publikasi Wilayah, Peta, Data, Lokasi	2.800.000
	10 Meningkatnya kualitas standarisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	300.000
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	21.264 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	78.204.863
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1.007 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	3.142.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	7.307 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	189.282.558
		FBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	13.451 Desa, DesaKelurahan	24.250.000
		PAC	Peraturan Pemerintah	1 PP, RPP	520.000
		PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	154 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	48.888.770
		PEC	Kerja sama	21 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	15.900.000
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	19 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.900.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	9.500 Lembaga, Unit Kerja, Tim	6.500.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	3 layanan, dokumen, publikasi Wilayah, Peta, Data, Lokasi	17.300.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	12.449.335

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	7.740	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	45.264.217
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	10.476	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	331.566.788
		UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	73.252	Desa, DesaKelurahan	62.589.380
Program **2) CP Program Tata Kelola Kependudukan**					**2.069.744.710**
RM 704.307.858	01 Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	AAG Peraturan Menteri	2	PerMen, Perka	286.000
PLN 1.365.436.852		AAH Peraturan lainnya	1	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	36.000
		ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	9	Rekomendasi Kebijakan	36.448.365
		AEH Promosi	1	promosi, Kegiatan	5.967.600
		AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	5.000.000
		BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	22.372.927	Orang, Akta, Keping, Bidang	226.136.314
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	33.775.600
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.690	Lembaga, Unit Kerja, Tim	5.223.208
		BMB Komunikasi Publik	1	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	23.868.000
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	751	Unit	877.765.261
		CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	552	Unit, Kab/Kota, Kecamatan, Titik/Lokasi	205.983.706

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	15 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	430.966.412
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	4.846 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	53.613.798
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	4.404 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	85.061.047
		PAD	Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres	440.000
		PBM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.580.851 Orang, Akta, Keping, Bidang	1.400.500
		QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	1.375 Lembaga, Unit Kerja, Hektar, Bidang	14.852.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	703.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	58.936.824
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	60 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.281.075
Program **3) CR** **Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum**					**262.819.299**
RM 262.819.299	01 Meningkatnya kebebasan, Kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi, serta kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri	ABC	Kebijakan Bidang Politik	7 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.000.000
	02 Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di Indonesia	ACB	Perizinan Masyarakat	300 Orang, Ketetapan	400.000
		AEB	Forum	46 forum	7.250.000
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	12 orang	11.000.000
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	8 Lembaga	800.000

SK No 154489 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	30 Kelompok Masyarakat	7.500.000
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	150 Orang	2.250.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	717 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	58.280.174
		PBC	Kebijakan Bidang Politik	3 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.250.000
		PEB	Forum	20 forum, DesaKelurahan, KabKota, TitikLokasi, Milyar, Dokumen, Kilo Liter	3.900.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	8 Lembaga, Unit Kerja, Tim	1.100.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	12.450 Orang	6.700.000
		QEI	Bantuan Lembaga	8 Lembaga	134.489.125
		UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	2.300 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	6.500.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	228 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	13.400.000
Program **4) WA Program Dukungan Manajemen**					**4.570.704.468**
RM 4.554.337.100	01 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	AAG	Peraturan Menteri	15 PerMen, Perka	2.603.485
PNBP 16.367.368	02 Tersedianya kader pemerintahan dalam negeri yang unggul, profesional, berdaya saing dan berintegritas	AAH	Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	25.020
	03 Meningkatnya kualitas pengawasan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	50 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	19.496.511
		ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan	300.000
		ADB	Akreditasi Produk	4 produk	738.609

SK No 154488 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		ADG Standarisasi Profesi dan SDM	380	Orang	797.865
		AEA Koordinasi	8	kegiatan	3.542.003
		AEC Kerja sama	55	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	114.339.183
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	3	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	6.562.095
		BCB Perkara Hukum Lembaga	80	Perkara, Berkas Perkara	3.332.828
		BIE Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	84	Pemerintah Daerah	18.438.084
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	6.142.714
		CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	273.713.709
		CDS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	55	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	6.321.300
		DBA Pendidikan Tinggi	260	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	14.062.122
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	189	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.239.884.719
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11.083	Unit, m2, Paket	475.219.405
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	8.460	Orang, Layanan, Rekomendasi	143.302.218
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	752	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.087.581.780
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	4	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	10.228.748

SK No 154487 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	600 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	1.492.774
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3 Laporan, Layanan	620.016
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	39 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	20.570.824
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	380 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	22.915.684
		QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	76 Lembaga	7.227.606
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan	44.188.095
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	47.057.071

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga **011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI**			**10.220.520.811**
2 Fungsi **01 PELAYANAN UMUM**			**10.220.520.811**
3 Program **1) AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional**			**1.981.062.426**
2) AL Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik			**300.121.729**
3) WA Program Dukungan Manajemen			**7.939.336.656**
Program **1) AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional**			**1.981.062.426**
RM 1.981.062.426	01 Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 37 Rekomendasi Kebijakan	3.926.915
	02 Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antrakawasan	ABC Kebijakan Bidang Politik 137 Rekomendasi Kebijakan	1.040.705.381
	03 Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional	ABN Kebijakan Bidang Sosial 27 Rekomendasi Kebijakan	3.922.632
	04 Kebijakan luar negeri yang berkualitas	AEA Koordinasi 9 kegiatan	67.086.652
	05 Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN	AEB Forum 267 forum	53.727.709
	06 Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional	AEC Kerja sama 889 Kesepakatan	294.158.978
	23 Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh, Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal, dan Citra Positif Indonesia yang Meningkat melalui Perwakilan RI	AEF Sosialisasi dan Diseminasi 5.622.511 orang	6.982.700
		AEH Promosi 1.210 promosi	416.915.257
		BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 882 Kelompok Masyarakat	84.524.756
		BMA Data dan Informasi Publik 5 dokumen, Peta, Data	1.869.360



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi	400.000
		PBC Kebijakan Bidang Politik	44	Rekomendasi Kebijakan	5.673.525
		PEC Kerja sama	5	Kesepakatan	1.168.561
Program 2) AL Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik					**300.121.729**
RM 299.001.857	01 Pelindungan WNI di Luar Negeri termasuk PMI yang Integratif	AEA Koordinasi	34	kegiatan	2.500.000
PNBP 1.119.872		BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	368.131	Orang, Akta, Bidang, Laporan	27.653.899
		BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	471	Lembaga	17.900.000
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	182.150	layanan	23.800.000
		PEA Koordinasi	3	kegiatan	1.183.859
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	154.000	Orang, Akta, Bidang, Laporan	227.083.971
Program 3) WA Program Dukungan Manajemen					**7.939.336.656**
RM 7.710.357.214	01 Infrastruktur Diplomasi Kemenlu yang Kuat	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8	Unit	10.000.000
PNBP 228.979.442		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	196	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	6.988.798.533
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.700	Unit, m2, Paket	668.635.957
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	7.403	Orang, Layanan, Rekomendasi	254.482.967
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	686	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	17.419.199

SK No 154484 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**012**	**KEMENTERIAN PERTAHANAN**				**187.100.000.000**
2 Fungsi	**02**	**PERTAHANAN**				**186.609.805.453**
	10	**PENDIDIKAN**				**490.194.547**
3 Program	**1) AB**	**Program Pelaksanaan Tugas TNI**				**5.896.648.245**
	2) AC	**Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit**				**13.813.236.661**
	3) AD	**Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan**				**36.717.369**
	4) AF	**Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan**				**84.489.115.506**
	5) AJ	**Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan**				**948.487.637**
	6) KA	**Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan**				**1.843.054.027**
	7) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**80.072.740.555**
Program	**1) AB**	**Program Pelaksanaan Tugas TNI**				**5.896.648.245**
	RM	5.822.402.543	01 Terjaganya kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa yang bebas dari pelanggaran maupun ancaman	AEA Koordinasi	5 kegiatan	1.191.305
	PNBP	74.245.702	02 Terwujudnya kesiapan dan kesiapsiagaan operasional Satuan maupun Satgas TNI AD guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Tugas TNI AD yang dilaksanakan melalui Operasi Militer (OMP/OMSP)	AEC Kerja sama	80 Kesepakatan	177.424.428
			03 Terwujudnya kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang mendukung pelaksanaan tugas, peran dan fungsi TNI AD	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	1.001 orang	2.724.310

SK No 154483 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	04 Terwujudnya kesiapsiagaan operasi dan diplomasi TNI AL dalam rangka penegakan hukum, keamanan wilayah laut, serta penguatan hubungan luar negeri	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan	171.900
	05 Terwujudnya kesiapsiagaan operasi dan diplomasi TNI AU dalam rangka pelaksanaan tugas OMP dan OMSP serta penguatan hubungan luar negeri	BHA	Operasi Bidang Pertahanan	12.539.871 operasi	4.965.072.103
	06 Terwujudnya ketersediaan peta wilayah darat dan data geografi medan darat yang mendukung operasi militer dan upaya diplomasi batas negara	BHB	Operasi Bidang Keamanan	3 operasi, Hari Operasi	68.680.915
	07 Terwujudnya batas laut yang jelas	CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 Unit, Paket	1.426.000
	08 Terwujudnya peta udara yang diperbaharui	DCG	Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	2.548 Orang	56.065.026
	09 Terwujudnya sinergi penataan wilayah pertahanan dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.172 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	453.968.518
	10 Meningkatnya peran diplomasi militer yang dilaksanakan Mabes TNI untuk mendukung kebijakan diplomasi pertahanan dalam kerangka diplomasi luar negeri Indonesia	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	38.108 Orang, Layanan, Rekomendasi	39.338.413
	11 Meningkatnya peran diplomasi militer yang dilaksanakan TNI AD untuk mendukung kebijakan diplomasi pertahanan dalam kerangka diplomasi luar negeri Indonesia	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.422 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	22.910.973
		QHA	Operasi Bidang Pertahanan	18 operasi	107.674.354
Program **2) AC Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit**					**13.813.236.661**
RM 6.848.782.730	01 Terwujudnya komposisi personel ideal dalam rangka pemenuhan kekuatan pokok TNI	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	3 Orang	19.204.040
SBSN 1.116.101.000	02 Terwujudnya kekuatan personel militer ideal sesuai pentahapan pemenuhan kekuatan pokok TNI AD yang mencerminkan kesiapan struktural bidang Personel	CAA	Sarana Bidang Pendidikan	2 Paket, Unit, m2	523.490.275

SK No 154482 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	PNBP	1.268.978.013	03 Terwujudnya komposisi personel ideal dalam rangka pemenuhan kekuatan pokok TNI AL yang mencerminkan kesiapan struktural bidang Personel	CAB Sarana Bidang Kesehatan	2.190	Paket, Unit	704.110.769
	BLU	4.579.374.918	04 Terwujudnya komposisi personel ideal dalam rangka pemenuhan kekuatan pokok TNI AU yang mencerminkan kesiapan struktural bidang Personel	CAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	12	Unit, Paket	513.763.218
			05 Terwujudnya personel TNI yang profesional berdasarkan hasil latihan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok	CBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1.860	unit, Kawasan	1.053.687.354
			06 Terwujudnya prajurit TNI dan/atau PNS yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok	CBV Prasarana Bidang Kesehatan	9	Unit	7.462.264
			07 Terwujudnya personel TNI AD yang kompeten berdasarkan hasil latihan dan siap mendukung tugas, peran, dan fungsi TNI AD	CCB OM Sarana Bidang Kesehatan	4.638	Paket, Unit	238.372.622
			08 Terwujudnya kesiapan personel TNI AD yang kompeten berdasarkan hasil pendidikan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI AD	CDM OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	10.583	unit	225.296.175
			09 Terwujudnya personel TNI AL yang profesional berdasarkan hasil latihan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok	DCG Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	2.559.714	Orang, Kegiatan	4.176.051.165
			10 Terwujudnya prajurit dan/atau PNS TNI AL yang profesional berdasarkan hasil pendidikan dan kursus dalam rangka pelaksanaan tugas pokok	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.701	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.222.911.768
			11 Terwujudnya personel TNI AU yang profesional berdasarkan hasil latihan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	800	Orang, Layanan, Rekomendasi	12.786.011
			12 Terwujudnya prajurit dan/atau PNS TNI AU yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok	RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	128	unit, Kawasan	1.116.101.000
			13 Terpenuhinya rumah dinas Prajurit dan PNS di lingkungan TNI				
			14 Terpenuhinya rumah dinas yang layak huni untuk personel TNI AD				

SK No 154481 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	15 Terpenuhinya rumah dinas yang layak huni untuk personel TNI AL			
	16 Terpenuhinya rumah dinas yang layak huni untuk personel TNI AU			
	17 Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan psikologi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI			
	18 Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan psikologi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD			
	19 Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan psikologi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI AL			
	20 Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan psikologi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI AU			
	21 Meningkatnya peran diplomasi militer yang dilaksanakan Mabes TNI melalui latihan bersama untuk mendukung kebijakan diplomasi pertahanan dalam kerangka diplomasi luar negeri Indonesia			
	22 Meningkatnya peran diplomasi militer yang dilaksanakan TNI AD melalui Latihan Bersama untuk mendukung kebijakan diplomasi pertahanan dalam kerangka diplomasi luar negeri Indonesia			
Program 3) AD Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan				**36.717.369**
RM 36.717.369	01 Terlaksananya diplomasi batas negara sesuai tahapan rencana	AAC Peraturan Pemerintah	2 PP, RPP	663.385
	02 Terwujudnya penyusunan rencana aksi implementasi Kebijakan Pertahanan Militer dan/atau Nirmiliter oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda	AAG Peraturan Menteri	7 PerMen, Perka, RPermen	8.052.017
	03 Terwujudnya penataan wilayah pertahanan dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda	AAH Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	443.577

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
			04 Meningkatnya hubungan diplomasi pertahanan melalui kerja sama bilateral dan multilateral di kawasan dan global yang telah disepakati	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	24 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		11.683.874
			05 Terwujudnya kebijakan strategis pertahanan negara yang diimplementasikan	ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		352.849
			15 Terumuskannya rancangan dan rekomendasi kebijakan terkait pertahanan nasional yang bersifat strategis	ABT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	2 Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen		385.120
				AEB Forum	8 forum		3.989.079
				AEC Kerja sama	15 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan		4.496.672
				AEF Sosialisasi dan Diseminasi	640 orang		1.568.294
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		1.982.509
				FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	15 Laporan, Rekomendasi		3.099.993
Program	**4) AF**	**Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan**					**84.489.115.506**
	RM	33.439.862.839	01 Terpenuhinya kebutuhan Alutsista Strategis yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	AEA Koordinasi	4 kegiatan		273.505
	SBSN	797.912.499	02 Terpenuhinya kebutuhan Alutsista Integratif yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	53 orang		946.263
	PDN	3.687.798.759	03 Terpenuhinya kebutuhan Alutsista (Alat Utama Alpalhankam) Matra Darat yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK		34.349
	PLN	46.500.000.000	04 Terpenuhinya kebutuhan Alutsista Matra Laut yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	CAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	594 Unit, Paket		16.518.366.183
	PNBP	63.541.409	05 Terpenuhinya kebutuhan Alutsista Matra Udara yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	CBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	312 unit		7.539.521.506

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	06 Terpenuhinya kebutuhan Non Alutsista yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	CCF OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1.261	Unit, Paket	2.033.175.617
	07 Terwujudnya kodifikasi materiel pertahanan yang diimplementasikan	CDM OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	510	unit	1.202.440.493
	08 Terpenuhinya kebutuhan Non Alutsista Integratif yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	359	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	57.146.965
	09 Terpenuhinya kebutuhan materiel Alpalhankam matra darat Non Alutsista (termasuk Alpalhankam Siber) yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	85	Unit, m2, Paket	538.052.330
	10 Terpenuhinya kebutuhan Non Alutsista Matra Laut yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	2.052.006	Unit, Paket	54.019.526.068
	11 Terpenuhinya kebutuhan Non Alutsista Matra Udara yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	RBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	167	km	300.000.000
	12 Terpenuhinya kebutuhan Sarpras yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	22	unit	911.361.510
	13 Terpenuhinya kebutuhan Sarpras Integratif yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	RCF OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	162	Unit, Paket	1.368.270.717
	14 Terpenuhinya kebutuhan Sarpras Pertahanan Matra Darat yang siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI				
	15 Terpenuhinya kebutuhan Sarpras Matra Laut yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI				
	16 Terpenuhinya kebutuhan Sarpras Matra Udara yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI				
Program 5) AJ Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan					**948.487.637**

SK No 154478 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
RM 948.487.637	01 Terwujudnya kesadaran Bela Negara yang tinggi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran warga negara serta kesiapan kader Bela Negara	AAD Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres	170.000
	02 Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Nasional yang optimal untuk mendukung pertahanan negara melalui pendidikan Komponen Cadangan dan pengelolaan Sumdanas dalam Komponen Pendukung	AAG Peraturan Menteri	11 PerMen, Perka, RPermen	1.509.426
	03 Terwujudnya penyiapan kekuatan pendukung pertahanan aspek darat dalam rangka mewujudkan Alat dan Kondisi Juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara	AAH Peraturan lainnya	12 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	491.500
	04 Terwujudnya penataan wilayah pertahanan darat yang selaras dengan RUTR Kementerian/Lembaga dan Pemda	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	18 Rekomendasi Kebijakan	1.752.225
	05 Terwujudnya penataan wilayah pertahanan laut yang selaras dengan RUTR Kementerian/Lembaga dan Pemda	ABT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	124 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	2.892.500
	06 Terwujudnya penataan wilayah pertahanan udara yang selaras dengan RUTR Kementerian/Lembaga dan Pemda	ACA Perizinan Produk	1 Produk, Keputusan	179.269
	07 Terwujudnya kebijakan di bidang potensi pertahanan yang diimplementasikan	AEA Koordinasi	20 kegiatan	2.339.089
	08 Terwujudnya kebijakan dan kesiapan di bidang kekuatan pertahanan yang diimplementasikan	AEB Forum	1 forum	718.000
		AEC Kerja sama	24 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.047.633
		AEF Sosialisasi dan Diseminasi	5.467 orang	10.015.068
		AEG Konferensi dan Event	1 Kegiatan	143.288
		BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	350 Orang, Akta, Bidang, Laporan	232.852

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	6.000	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	503.235
		BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	132.131	Orang	386.637.784
		BEJ Bantuan Pendidikan Tinggi	65	Orang	11.502.773
		BHA Operasi Bidang Pertahanan	1.397	operasi	272.508.261
		BMA Data dan Informasi Publik	2	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	648.235
		CAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	2	Unit, Paket	1.190.650
		CCF OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	8	Unit	2.175.000
		DCG Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	650	Orang	999.918
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	870	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	126.401.095
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	22	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.155.800
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	75	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	200.040
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	13	Laporan, Rekomendasi	1.736.682
		PAG Peraturan Menteri	1	PerMen, Perka	250.000
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	760	orang	1.262.962
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	10.000.000
		RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1	Unit, Paket	7.275.000
		SCG Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	5.999	Orang	99.549.352

SK No 154476 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
Program **6) KA Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan**				**1.843.054.027**
RM 1.843.054.027	01 Terwujudnya perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri	AAG Peraturan Menteri	1 PerMen, Perka, RPermen	40.000
	02 Meningkatnya kerjasama baru yang ditandatangani dengan industri pertahanan luar negeri	AAH Peraturan lainnya	11 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	369.673
	03 Terwujudnya First Article hasil Litbanghan yang tersertifikasi	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	6 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	50.441.765
	04 Meningkatnya pengadaan, pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam yang melibatkan industri pertahanan	ADC Sertifikasi Produk	1 produk	505.486
	05 Terwujudnya hasil Litbanghan UO Kemhan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara	AEA Koordinasi	3 kegiatan	1.046.137
	06 Tersedianya SDM lulusan Diploma, S1, S2, S3 dengan nilai "Sangat Memuaskan"	AEB Forum	2 forum, Dokumen, Kegiatan, Rekomendasi	1.049.354
	07 Terwujudnya pendidikan tinggi pertahanan menuju pendidikan berbasis Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) yang berkualitas dan bernilai tambah	AEC Kerja sama	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	300.000
	08 Terwujudnya hasil Litbanghan Matra Darat yang direalisasikan	AED Perjanjian	2 perjanjian	1.320.150.000
	09 Terwujudnya hasil Litbanghan Matra Laut yang direalisasikan	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	100 orang	995.050
	10 Terwujudnya hasil Litbanghan Matra Udara yang direalisasikan	AEG Konferensi dan Event	2 Kegiatan, Paket Kegiatan	377.842
	11 Terwujudnya kebijakan di bidang teknologi dan industri pertahanan yang diimplementasikan	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	10 Orang, Akta, Keping, Bidang	892.008
		BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	3 Industri, IKM, Miliar USD	410.000
		BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1 Layanan, Laporan	100.000
		BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1 Badan Usaha, Laporan	75.000

SK No 154475 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				CBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	3	unit	10.403.760
				DBA Pendidikan Tinggi	17.269	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	119.634.846
				DDA Penelitian dan Pengembangan Produk	8	produk, Ekor, BibitBenih	2.431.945
				DDB Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	31	Purwarupa, Desain	60.660.955
				DDC Penelitian dan Pengembangan Modeling	7	model, Desain	7.093.014
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	13	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	27.882.500
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	17	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	7.895.692
				RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	2	Unit, Paket	6.934.000
				SDB Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	5	Purwarupa	223.365.000
Program	**7) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**80.072.740.555**
	BLU	132.010.252	01 Terwujudnya SDM bidang pertahanan yang kompeten dan profesional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi	AAA Undang-Undang	4	UU, RUU	1.254.632
	RM	79.931.239.035	02 Terwujudnya tata kelola sistem pemerintahan Kemhan yang baik	AAC Peraturan Pemerintah	2	PP, RPP	687.394
	PNBP	9.491.268	03 Terpenuhinya pelayanan kesehatan Prajurit dan PNS di lingkungan Kemhan	AAD Peraturan Presiden	1	PerPres, R.Perpres	343.047
			04 Terwujudnya kinerja Unhan yang baik	AAG Peraturan Menteri	9	PerMen, Perka, RPermen	862.975
			05 Terwujudnya tata kelola sistem pemerintahan TNI yang baik	AAH Peraturan lainnya	30	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	2.233.040
			06 Terwujudnya kinerja UO Kemhan yang baik	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	153	Rekomendasi Kebijakan	22.703.843
				ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	60	Orang, Sertifikat	1.700.956

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		AEA Koordinasi	1.452	kegiatan	175.817.858
		AEB Forum	11	forum	826.572
		AEC Kerja sama	2	Kesepakatan	22.798
		AED Perjanjian	1	perjanjian	85.000
		AEF Sosialisasi dan Diseminasi	4.378	orang	16.002.265
		AEG Konferensi dan Event	31	Kegiatan	3.497.126
		AEH Promosi	57.011	promosi, Kegiatan	1.835.000
		AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12	NSPK	37.342.551
		BBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	51.702	Orang	19.468.438
		BCA Perkara Hukum Perseorangan	100.377	Perkara, Berkas Perkara	53.081.355
		BCB Perkara Hukum Lembaga	35	Perkara, Berkas Perkara	1.127.757
		BGF Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pertahanan dan Keamanan	61	Lembaga	1.520.374
		BMB Komunikasi Publik	2	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	3.139.386
		CAB Sarana Bidang Kesehatan	2	Paket, Unit	84.010.252
		CAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	36	Unit, Paket	1.580.253.391
		CBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	16	unit, Kawasan	323.479.817
		CBO Prasarana Pengembangan Kawasan	1	bidang, hektar	782.370
		CBV Prasarana Bidang Kesehatan	742	Unit	70.000.000
		CDM OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	6	unit	70.058.900

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		DCG Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	7.807	Orang, Kegiatan	35.555.833
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.453	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	74.784.086.619
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	29	Unit, m2, Paket	1.815.728.366
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2.484	Orang, Layanan, Rekomendasi	72.407.362
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.509	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	842.083.204
		FAA Kearsipan	66	Dokumen, Arsip	10.542.881
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	9.667.500
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	4.849	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	8.334.331
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	46	Layanan, Dokumen	7.905.965
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	164	Laporan, Rekomendasi	12.308.010
		FAH Pengelolaan Keuangan Negara	16	Laporan	1.983.387

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**015 KEMENTERIAN KEUANGAN**				**52.016.000.000**
2 Fungsi	**01 PELAYANAN UMUM**				**47.773.586.873**
	04 EKONOMI				**249.259.263**
	10 PENDIDIKAN				**3.993.153.864**
3 Program	**1) CB Program Pengelolaan Belanja Negara**				**24.406.799**
	2) CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara				**1.997.068.482**
	3) CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko				**289.232.572**
	4) CE Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi				**90.032.330**
	5) WA Program Dukungan Manajemen				**49.615.259.817**
Program	**1) CB Program Pengelolaan Belanja Negara**				**24.406.799**
	RM 24.406.799	01 Belanja Negara yang berkualitas untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	AAD Peraturan Presiden	2 PerPres, R.Perpres	314.250
			AAG Peraturan Menteri	6 PerMen, Perka, RPermen	405.869
			AAH Peraturan lainnya	8 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	253.400
			ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	82 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.099.393
			AEF Sosialisasi dan Diseminasi	1.500 orang, Paket Kegiatan	733.679
			FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	8.631 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	7.470.143

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	15 Layanan, Dokumen	3.645.784
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	58 Laporan, Rekomendasi	3.460.474
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	4 Laporan	554.578
		UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.150 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	1.709.784
		UAD	Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan, Dokumen	157.000
		UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2 Laporan, Rekomendasi	463.118
		UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	955 Desa, DesaKelurahan	1.139.327
Program **2) CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara**					**1.997.068.482**
RM 1.997.068.482	01 Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang maksimal dan berkeadilan sebagai sumber pendanaan pembangunan	AAC	Peraturan Pemerintah	5 PP, RPP	1.107.172
	02 Pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif	AAG	Peraturan Menteri	18 PerMen, Perka, RPermen	2.019.093
		AAH	Peraturan lainnya	42 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	1.485.385
		ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	146 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	22.883.169
		AEA	Koordinasi	186 kegiatan	5.148.383
		AEC	Kerja sama	10 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	546.361
		AED	Perjanjian	4 perjanjian	1.319.976
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	42.209 orang	11.984.341
		AEG	Konferensi dan Event	7 Kegiatan, Paket Kegiatan	1.226.868

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		BAE Pelayanan Publik kepada UMKM	176 UMKM	775.684
		BCE Penanganan Perkara	1.655.779 Perkara, Berkas Perkara	56.324.550
		BHB Operasi Bidang Keamanan	1.201 operasi, Hari Operasi	225.580.145
		BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	2.186.847 Laporan	372.909.122
		BMA Data dan Informasi Publik	1.262.355 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	184.947.007
		BMB Komunikasi Publik	63.817 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	86.736.417
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2.012 Orang, Layanan, Rekomendasi	5.109.283
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	426 Laporan, Rekomendasi	23.508.487
		FAJ Benda Meterai dan Cukai	801.196.881 Keping, Lembar	989.928.537
		PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5 Rekomendasi Kebijakan	2.000.428
		QAE Pelayanan Publik kepada UMKM	50 UMKM	175.464
		QHB Operasi Bidang Keamanan	2 operasi, Hari Operasi	1.352.610
Program **3) CD** **Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko**				**289.232.572**
RM 268.048.327	01 Pengelolaan perbendaharaan yang optimal untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	AAA Undang-Undang	4 UU, RUU	1.349.720
PNBP 21.184.245	02 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	AAC Peraturan Pemerintah	2 PP, RPP	131.733

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	03 Pengelolaan pembiayaan yang kreatif, inklusif dan risiko yang prudent	AAG	Peraturan Menteri	42 PerMen, Perka, RPermen	869.626
		AAH	Peraturan lainnya	20.736 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	28.985.707
		ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	38.826 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	14.207.212
		ACD	Perizinan Lembaga	10 Institusi, Badan Usaha, Registrasi, Ketetapan	80.000
		ACE	Perizinan Profesi	164 Orang	258.048
		AEB	Forum	2 forum	28.760
		AED	Perjanjian	17 perjanjian	25.750
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	37.120 orang	13.716.703
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	29.978 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	25.278.030
		BDA	Fasilitasi dan Pembinaan BUMN	5 BUMN	95.000
		BMA	Data dan Informasi Publik	14 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	43.100
		BMB	Komunikasi Publik	217 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	2.369.370
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	42.389 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	9.629.259
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	86 Layanan, Dokumen	37.216
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	30.394 Laporan, Rekomendasi, Media, Orang, Volume	56.903.103
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	2.434 Laporan	6.068.127

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		FAK Pengelolaan Aset BUN	1.859 Unit, Aset	40.226.761
		FAL Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	5.500.465.298 Dokumen, Kegiatan	23.745.839
		PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.786.864
		UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	11 Laporan, Rekomendasi	711.046
		UAK Pengelolaan Aset BUN	175 Unit, Aset	60.994.450
		UAL Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	50.002 Dokumen, Kegiatan	691.148
Program 4) CE Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi				**90.032.330**
RM 90.032.330	01 Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang berkualitas, proaktif dan adaptif	AAA Undang-Undang	1 UU, RUU	406.750
	02 Diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang efektif	AAC Peraturan Pemerintah	5 PP, RPP	1.741.383
		AAG Peraturan Menteri	14 PerMen, Perka, RPermen	2.582.867
		AAH Peraturan lainnya	1 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	7.101
		ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	260 Rekomendasi Kebijakan	42.295.742
		AEB Forum	3 forum, Paket Kegiatan	3.192.774
		AEC Kerja sama	5 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	9.506.643
		AEG Konferensi dan Event	9 Kegiatan, Paket Kegiatan	5.214.276
		BMB Komunikasi Publik	2 layanan	4.231.301

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	200 Orang, Layanan, Rekomendasi	201.396
				FAD	Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan, Dokumen	476.130
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	227 Laporan, Layanan	8.875.330
				PAC	Peraturan Pemerintah	4 PP, RPP	1.709.994
				PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	7 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	9.590.643
Program	**5) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**49.615.259.817**
	RM	39.186.048.014	01 Perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik	AAG	Peraturan Menteri	107 PerMen, Perka, RPermen	517.790
	BLU	10.377.043.522	02 Penguatan transformasi digital pada ekosistem keuangan negara¿	AAH	Peraturan lainnya	134 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	795.668
	PNBP	52.168.281	03 Penguatan sistem pengendalian intern terintegrasi¿	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	73 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	20.369.420
			04 Pencapaian tugas khusus yang efektif¿	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	29 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	104.453.543
				ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga, Unit Kerja	15.299
				AEG	Konferensi dan Event	2 Kegiatan	381.482
				BCE	Penanganan Perkara	15.000 Perkara, Berkas Perkara	255.000
				BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1 Layanan	994.744
				BMA	Data dan Informasi Publik	140 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	3.148.330
				BMB	Komunikasi Publik	214.017 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	42.803.682

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CAA Sarana Bidang Pendidikan	580	Paket, Unit	480.010
		CAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	26	Unit, Paket	443.239.527
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	29.981	Unit	319.655.426
		CCF OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	4.083	Unit	273.762.133
		CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.690	Unit	1.286.222.308
		DBA Pendidikan Tinggi	10.938	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	28.545.683
		DCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	184.440	Orang, Kegiatan	189.955.910
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	75.350	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	32.970.544.536
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	182.734	Unit, m2, Paket	1.289.624.563
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	186.695	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.934.721.068
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.547	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	59.099.361
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	97	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	983.248.854
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	46.915	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	5.665.678
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan, Layanan	130.343
		FAK Pengelolaan Aset BUN	39.489	Unit, Aset	45.753.565

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		FAM Hasil Kelolaan Dana	73.640	Rupiah, Hektar, Orang, Usaha Mikro, Milyar, Dokumen, Kilo Liter	4.814.531.632
		PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1	Rekomendasi Kebijakan	3.232.948
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	6	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	15.664.513
		UAM Hasil Kelolaan Dana	2.482.025	Rupiah, Hektar, Orang, Usaha Mikro, Milyar, Dokumen, Kilo Liter	4.777.446.801

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**018**	**KEMENTERIAN PERTANIAN**					**40.145.000.000**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**39.906.769.504**
	10	**PENDIDIKAN**					**238.230.496**
3 Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**747.693.339**
	2) EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**					**6.623.748.308**
	3) HA	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**					**23.814.710.637**
	4) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**8.958.847.716**
Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**747.693.339**
	PNBP	9.519.839	01 Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani	AEC	Kerja sama	10 Kesepakatan	1.050.000
	RM	738.173.500		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	644 Lembaga	13.060.000
				BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.950 Orang	10.000.000
				BMA	Data dan Informasi Publik	39 dokumen, Peta, Data	3.280.000
				CAA	Sarana Bidang Pendidikan	11 Paket, Unit, m2	6.001.762
				CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.070 Unit	269.758.343
				CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	38 Unit	2.280.000
				CBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	3 unit	2.702.184
				CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	6 unit	9.212.550

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		KELUARAN			ALOKASI
					CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12	unit	8.594.086
					DCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	438	Orang	2.630.000
					FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.850.000
					PAA Undang-Undang	1	UU, RUU	300.000
					PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	1.130	Orang, Sertifikat	3.126.500
					QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	48	Lembaga	950.000
					QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	37.605	Orang	135.078.000
					QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.250	Kelompok Masyarakat	12.500.000
					SAC Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	6.484	Orang	207.114.000
					SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	52.456	Orang, Kegiatan	57.205.914
Program	**2) EC**	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**						**6.623.748.308**
	RM	5.917.888.799	01 Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah		ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	14	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.087.200
	PLN	689.711.139	02 Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing		AEA Koordinasi	46	kegiatan	5.873.208
	PNBP	16.148.370	03 Meningkatnya Sertifikasi Usaha Tani Nasional		AEF Sosialisasi dan Diseminasi	6.035	orang	2.646.225
			05 Meningkatnya indeks harga yang diterima petani tanaman pangan		AEH Promosi	5	promosi, Kegiatan	1.000.000
			06 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman pangan		AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	496.792

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	07 Meningkatnya volume ekspor komoditas tanaman pangan yang siap digunakan	BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	26 Orang, Akta, Bidang, Laporan	356.223
	08 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas tanaman pangan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7 Lembaga, Unit Kerja, Tim	311.587
	09 Terpenuhinya kebutuhan pangan asal perkebunan dari produks dalam negeri	BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	55.888.961 Produk	9.880.339
	10 Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun	BMA	Data dan Informasi Publik	298 dokumen, Peta, Data	2.456.000
	13 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	149 Unit	3.795.527
	14 Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	5 Rekomendasi Kebijakan	554.300
	15 Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak	PDA	Standarisasi Produk	1.780 produk	4.450.000
	16 Terjaminnya mutu komoditas peternakan	PDC	Sertifikasi Produk	202 produk	7.250.000
	17 Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan	PEH	Promosi	9 promosi	1.260.000
	18 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	290 Lembaga, Unit Kerja, Tim	571.720.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	42.000 Orang	15.233.300
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	204 Kelompok Masyarakat	7.824.960
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4 Lembaga	50.000
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	291.042.800 Unit	3.277.711.014
		RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	586.194 Unit, Hektar	2.322.775.747

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.638 unit	369.117.695
				RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	214 unit	15.898.191
Program	**3) HA**	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**					**23.814.710.637**
	RM	23.311.712.877	01 Komoditas Tanaman Pangan Dalam Negeri yang Tersedia	AEA	Koordinasi	214 kegiatan	42.552.873
	PNBP	38.904.016	02 Terpenuhinya kebutuhan pangan asal hortikultura dari produksi dalam negeri	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	32 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.170.240
	BLU	48.977.156	03 Terpenuhinya kebutuhan pangan asal ternak dari produksi dalam negeri	BMA	Data dan Informasi Publik	8 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	2.500.000
	SBSN	302.871.785	04 Terjaminnya keamanan komoditas peternakan	CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.365.066 Unit	40.597.025
	PLN	112.244.603	05 Terkendalinya wilayah dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia	CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17 unit	5.066.370
			06 Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali	DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	4 produk	260.000
			07 Terkendalinya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	63 Rekomendasi Kebijakan	19.949.580
			08 Prasarana pertanian yang tersedia sesuai kebutuhan	PDA	Standarisasi Produk	5.423.351 produk, Ekor, Peralatan, Rekomendasi, Standar	58.999.534
			09 Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan	PDC	Sertifikasi Produk	26.533 produk, Sertifikat	11.318.272
			11 Terwujudnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman Pertanian	QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	22.494.262 Orang, Akta, Bidang, Laporan	101.111.203
			12 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	QAH	Pelayanan Publik Lainnya	10.617.422 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	139.269.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	13 Meningkatnya produksi komoditas hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2.458 Kelompok Masyarakat	75.860.720
		QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	225.000 Kelompok Masyarakat	207.765.000
		QEO	Bantuan Produk dan Peralatan	97.750 Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	52.234.100
		QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	17.499 Produk	14.214.081
		QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	52.163 Sampel	20.917.564
		QKB	Pemantauan produk	5.600 laporan	10.750.125
		QMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	10.000.000
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	251.974.028 Unit	4.423.538.451
		RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	4.282.413 Unit, Hektar	2.945.746.948
		RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	26.441 unit	3.586.815.849
		RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	560.000 km2, bidang, km, hektar	10.913.037.429
		RBR	Dukungan Teknis	700.011 Dokumen	333.284.000
		RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.000 unit	754.771.500
		SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	105 produk	37.445.136
		SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	6 Purwarupa, Desain	3.040.000
		SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	2 model, Desain	495.637
Program **4) WA Program Dukungan Manajemen**					**8.958.847.716**
RM 8.918.872.684	01 Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	AAA	Undang-Undang	2 UU, RUU	399.557

SK No 160502 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
PNBP	7.159.172	02 Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	AAG	Peraturan Menteri	19 PerMen, Perka	2.671.331
BLU	32.815.860	03 Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Organisasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel	ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	28 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.075.000
		05 Terwujudnya birokrasi dan tata kelola organisasi Ditjen PKH yang baik transparan dan akuntabel	ACD	Perizinan Lembaga	4 Institusi, Badan Usaha, Lembaga	750.000
			ADC	Sertifikasi Produk	230 produk, Sertifikat	1.469.240
			AEA	Koordinasi	212 kegiatan	94.826.038
			AEC	Kerja sama	19 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	34.407.902
			AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	11.155 orang	4.462.000
			BCB	Perkara Hukum Lembaga	16 Perkara, Berkas Perkara	834.641
			CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	4.500.000
			EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	116.924 Layanan, Perkara	8.647.291.937
			EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4.768 Unit, m2, Paket	21.508.244
			EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	50.704 Orang, Layanan, Rekomendasi	29.360.867
			EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.604 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	105.478.482
			FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	15 Sistem Informasi	5.812.477

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**019**	**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**					**2.501.796.683**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**1.807.044.199**
	10	**PENDIDIKAN**					**694.752.484**
3 Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**117.327.582**
	2) EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**					**729.458.915**
	3) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**1.655.010.186**
Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**117.327.582**
	BLU	48.435.349	01 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	8 Lembaga	830.000
	RM	40.534.428	02 Penguatan Making Indonesia 4.0	CBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	2 unit	227.000
	PNBP	28.357.805	04 Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	45 Lembaga	16.373.990
			05 Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	3 Rekomendasi Kebijakan	930.000
				PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	100 Orang	180.000
				QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	2 Industri	600.000
				QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	32 Start Up	1.877.808
				RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	7 unit	11.367.467
				SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	19.816 Orang	71.946.317
				SCH	Pelatihan Bidang Industri	1.860 Orang	12.995.000

SK No 160803 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
Program **2) EC** **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**					**729.458.915**
RM 568.640.101	01 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	6 Rekomendasi Kebijakan	1.714.514
PNBP 20.132.442	02 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	AEB	Forum	2 forum, Kajian	282.304
BLU 140.686.372	03 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri	AEC	Kerja sama	30 Kesepakatan	1.469.566
	04 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	10.717 orang	4.257.612
	05 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	AEH	Promosi	4 promosi	609.170
	06 Meningkatnya Persebaran Industri	BAD	Pelayanan Publik kepada industri	18.460 Industri	110.076.258
	08 Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, Lembaga Pembiayaan, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi dan lainnya serta penguatan kelembagaan	BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	33 industri	1.423.869
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.134 Produk	814.718
		BMA	Data dan Informasi Publik	7 dokumen, Peta, Data	1.357.841
		CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	137 Unit	39.533.459
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8 Unit	1.188.484
		CBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	3 unit	4.578.500
		PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	81 Rekomendasi Kebijakan	67.172.321
		PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan	600.000
		PDC	Sertifikasi Produk	830 produk	12.035.000

SK No 160538 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PEC Kerja sama	207	Kesepakatan	7.105.000
		PEG Konferensi dan Event	3	Kegiatan	2.000.000
		PEH Promosi	9	promosi	109.725.792
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	49	NSPK	6.700.000
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Lembaga	500.000
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12	Kelompok Masyarakat	7.128.629
		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	63	Badan usaha	29.984.160
		QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	8.922	Industri	283.101.718
		QGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1	Lembaga	3.000.000
		QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	84	Produk	5.450.000
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	40	Lembaga	1.150.000
		QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	93	Badan Usaha	5.100.000
		QMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	902.337
		RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	15.097.663
		RBL Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	1	unit	3.800.000
		SCH Pelatihan Bidang Industri	100	Orang	1.000.000
		SDC Penelitian dan Pengembangan Modeling	6	model, Desain	600.000
Program **3) WA Program Dukungan Manajemen**					**1.655.010.186**
RM 1.480.338.483	01 Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien	AAG Peraturan Menteri	1	PerMen, Perka	150.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	BLU	153.285.063	02 Meningkatnya Penggunaan Produk dan Industri Halal Dalam Negeri	ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1	Rekomendasi Kebijakan	2.578.441
	PNBP	21.386.640	03 Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri	AEC Kerja sama	5	Kesepakatan	202.042
			04 Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	AEH Promosi	1	promosi	1.884.000
			05 Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran	BMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	80.000
			06 Meningkatnya kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	319	Unit	7.899.068
			07 Terwujudnya tata kelola keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana kemenperin yang efektif dan efisien	CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.849	Unit	7.834.383
			08 Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, dan evaluasi kinerja industri	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	316	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.557.497.579
			09 Meningkatnya layanan legislasi dan advokasi yang andal	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	422	Unit, m2, Paket	11.710.712
			10 Meningkatnya nilai TKDN produk industri	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	9.743	Orang, Layanan, Rekomendasi	27.156.361
			12 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	835	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	35.561.649
			13 Terwujudnya ASN yang Kompeten dan Berintegritas	FAD Perencanaan dan Penganggaran	9	Layanan, Dokumen	2.455.951
			14 Meningkatnya penggunaan Knowledge management				
			15 Tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien				
			16 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				10.117.997.491
2 Fungsi	04	EKONOMI				9.952.841.292
	10	PENDIDIKAN				165.156.199
3 Program	1) BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				37.229.768
	2) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				340.595.227
	3) FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi				208.692.425
	4) JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan				5.954.032.709
	5) JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara				53.249.979
	6) WA	Program Dukungan Manajemen				3.524.197.383
Program	1) BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				37.229.768
	RM	37.229.768	01 Terselesaikannya Kasus Penegakan Hukum dan Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Peraturan Perundang- Undangan Sektor ESDM	BCE Penanganan Perkara	3 Perkara	18.532.556
				BHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	4 Operasi	14.460.787
				BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1 Badan Usaha	4.236.425
Program	2) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				340.595.227
	BLU	300.947.921	01 Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSDM ESDM Bertumbuh	ADE Akreditasi Lembaga	16 Lembaga, Unit Kerja	609.828

SK No 160535 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	RM	34.062.108	02 Terwujudnya Pengembangan Kompetensi SDM sektor ESDM yang Unggul dan Berdaya Saing	AEC	Kerja sama	499 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	2.206.193
	PNBP	5.585.198		AEH	Promosi	8 promosi, Kegiatan	724.503
				AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	423 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.361.831
				BAH	Pelayanan Publik Lainnya	82 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	191.605.470
				BMA	Data dan Informasi Publik	6 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	364.046
				CAA	Sarana Bidang Pendidikan	308 Paket, Unit, m2	18.040.000
				CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	85 Unit	639.588
				DAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	50 Orang	105.000
				FAD	Perencanaan dan Penganggaran	2 Layanan, Dokumen	230.000
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2 Laporan, Layanan	420.000
				SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	1.924 Orang	35.777.646
				SCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	8.330 Orang, Kegiatan	12.094.234
				SCH	Pelatihan Bidang Industri	49.910 Orang, Kegiatan	74.416.888
Program	**3) FE**	**Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi**					**208.692.425**
	RM	187.952.778	01 Optimalisasi Data dan Informasi Kebencanaan Geologi serta Penguatan Infrastruktur dan Sistem Mitigasi Bencana Geologi	ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	12 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	1.325.623
	PNBP	1.139.647	02 Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Sumber Daya Geologi	ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	93 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	13.510.690

SK No 160534 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
BLU	19.600.000	03 Optimalisasi Penataaan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Konservasi Lingkungan Berbasis Geologi	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	6 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	21.289.468
			BMA	Data dan Informasi Publik	55 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	10.829.276
			BMB	Komunikasi Publik	128 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	2.402.440
			CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	48 Unit	106.189.970
			CAO	Sarana Bidang IPTEK	2 Unit	1.277.899
			CAP	Sarana Bidang Penanggulangan Bencana	8 Unit	1.849.442
			CBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	9 unit	3.364.237
			CCM	OP Sarana Bidang Pencarian dan Penanggulangan Bencana	25 Unit	688.663
			FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	753.513
			PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	6.474 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	22.762.098
			PBS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	1.261.982
			QMA	Data dan Informasi Publik	42 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	10.123.498
			RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	64 Unit	9.226.752
			RAP	Sarana Bidang Penanggulangan Bencana	2 Unit	469.010
			RCM	OP Sarana Bidang Pencarian dan Penanggulangan Bencana	60 Unit	1.367.864

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		KELUARAN			ALOKASI
Program	**4) JA**	**Program Energi dan Ketenagalistrikan**						**5.954.032.709**
	RM	4.113.871.686	01 Meningkatnya Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi	AAH	Peraturan lainnya	51	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	23.209.563
	PNBP	1.581.336.023	02 Meningkatnya Kontribusi Subsektor Migas terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak	ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	55	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	9.359.965
	BLU	258.825.000	03 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	ABU	Kebijakan Bidang Tenaga Nuklir	4	Rekomendasi Kebijakan	1.331.706
			04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif	ACA	Perizinan Produk	14	Produk, Keputusan	765.916
			11 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	ACD	Perizinan Lembaga	54	Institusi, Badan Usaha, Registrasi, Ketetapan	730.000
			12 Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	ADC	Sertifikasi Produk	100	produk, Sertifikat	251.910
			13 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	ADE	Akreditasi Lembaga	7	Lembaga, Unit Kerja	373.642
			21 Meningkatnya Ketahanan Energi Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi	ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	2.500	Orang	400.000
			22 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Hilir Migas	AEA	Koordinasi	27	kegiatan	2.098.532
			23 Optimalisasi Kontribusi BPH Migas Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak	AEC	Kerja sama	2	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	405.085
			31 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	AED	Perjanjian	10	perjanjian	58.364
			32 Optimalisasi kontribusi Subsektor EBTKE yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	500	orang	211.887
			33 Layanan Subsektor EBTKE yang Optimal	AEH	Promosi	4	promosi, Kegiatan	675.162

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	34 Pembinaan dan Pengawasan Subsektor EBTKE yang Efektif	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.532.804
	41 Mewujudkan Peran Hulu Migas Aceh dalam Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional	BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	1 Lembaga, Unit Kerja, Hektar, Bidang	26.839.033
	42 Mewujudkan Kontribusi Hulu Migas Aceh yang Bertanggung Jawab, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Berkelanjutan	BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	298 Badan usaha, Penyalur, Hektar	12.136.808
	43 Mewujudkan Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas Aceh yang handal, tertib, aman dan ramah lingkungan	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	52 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	225.558.566
	44 Meningkatnya Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Nasional	BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	214 Badan usaha, Miliar USD	3.591.936
	45 Tersedianya Rumusan Rekomendasi Pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Energi Lintas Sektor	BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	3 Industri, IKM, Miliar USD	495.981
		BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1 Lembaga	30.000
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	852 Produk, Laporan, Keputusan	2.669.066
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	5 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	514.546
		BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	4 Layanan	11.854.310
		BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	4 Layanan	13.635.823
		BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	569 Badan Usaha, Laporan	16.528.873
		BKB	Pemantauan produk	1 laporan	162.500
		BMA	Data dan Informasi Publik	7 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	11.244.070
		BMB	Komunikasi Publik	2 layanan	10.000.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	12	Unit	117.314
		CBR Dukungan Teknis	12	Dokumen	12.113.179
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	2	Layanan, Dokumen	1.595.772
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	5	Laporan, Layanan	2.772.936
		FAG Pengawasan Pembangunan	19	Laporan	55.381.443
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	4	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	480.928
		PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	35	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	13.515.359
		PBJ Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	400.000
		PDA Standarisasi Produk	1	produk	173.293
		PEA Koordinasi	3	kegiatan	257.700
		PEC Kerja sama	2	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	640.000
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	339.100
		QEO Bantuan Produk dan Peralatan	420.699	Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	3.108.728.455
		QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	5	Produk, Laporan, Keputusan	245.956
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	127	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	4.078.630
		QIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	3	Layanan, Laporan	750.000
		QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	615	Badan Usaha, Laporan	6.104.106

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		KELUARAN			ALOKASI
					QMA	Data dan Informasi Publik	28 dokumen, Peta, Data	5.372.857
					RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	9.202.450
					RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	2 unit	2.352.197.183
					UAG	Pengawasan Pembangunan	3 Laporan	2.900.000
Program	**5) JB**	**Program Pertambangan Mineral dan Batubara**						**53.249.979**
	RM	20.749.979	21	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Subsektor Batubara	ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	13 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	11.052.251
	BLU	32.500.000	22	Optimalisasi Kontribusi Penerimaan, Manfaat Ekonomi dan Sosial Sub Sektor Minerba	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	33.750.000
			23	Terpenuhinya Produk Mineral untuk Mendukung Hilirisasi dan Industrialisasi	BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	240 Badan Usaha	7.192.728
			24	Optimalisasi Pengelolaan Batubara Nasional	QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	8 Badan usaha	825.000
			25	Pengelolaan Lingkungan Hidup Minerba yang Berkualitas	QII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	2.000 Hektar, Layanan	430.000
			26	Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba yang Efektif				
			27	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dan ASN yang Profesional				
Program	**6) WA**	**Program Dukungan Manajemen**						**3.524.197.383**
	RM	3.289.038.988	01	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif melalui Koordinasi, Pembinaan, dan Dukungan Manajemen Terpadu	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3 layanan	775.935
	PNBP	235.158.395	02	Optimalisasi Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Sekretariat Jenderal	BMA	Data dan Informasi Publik	11 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	57.738.230

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	05 Terwujudnya Dukungan Manajemen yang Efektif dan Akuntabel untuk Penguatan Sistem Penegakan Hukum Sektor ESDM yang Profesional dan Berintegritas	BMB Komunikasi Publik	2	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	1.150.000
	12 Layanan Sektor ESDM yang Optimal serta Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	874	Unit	71.055.021
	14 Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah serta Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien serta Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	393	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.229.731.868
	15 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Inspektorat Jenderal yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan berkelanjutan yang di Dukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dan ASN yang Profesional	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.770	Unit, m2, Paket	24.767.738
	21 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan, yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK, ASN yang Profesional, serta Pengawasan yang Andal dan Memberikan Nilai Tambah	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	26.748	Orang, Layanan, Rekomendasi	59.913.000
	22 Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	536	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	75.003.516
	23 Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	6	Sistem Informasi	3.757.075
	24 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Migas yang Efektif	PAH Peraturan lainnya	1	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	305.000
	25 Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal (Dukman)				
	27 Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas				
	28 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif				

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	29 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan		
	30 Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul		
	31 Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal		
	32 Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal		
	34 Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor EBTKE Yang Berkualitas		
	35 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor EBTKE yang Efektif		
	36 Terwujudnya birokrasi Subsektor EBTKE yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima		
	37 Organisasi EBTKE yang Fit dan SDM yang Unggul		
	38 Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen EBTKE yang Optimal		
	43 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dan ASN yang Profesional		
	49 Meningkatnya Kemandirian Dan Ketahanan Energi Nasional		
	50 Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN		
	53 Layanan Penyusunan Rancangan Perencanaan Energi Lintas Sektor yang Berkelanjutan		
	54 Merumuskan Kebijakan Energi dan Menyusun Perencanaan Energi Yang Bersifat Lintas Sektor Serta Kehumasan dan Persidangan DEN		

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	55 Melaksanakan Pengawasan Implementasi Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral 56 Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi Setjen DEN 57 Terwujudnya Birokrasi Setjen DEN Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima 58 Organisasi Setjen DEN yang Fit dan SDM yang Unggul 59 Pengelolaan Sistem Anggaran Setjen DEN yang Optimal 60 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan BPH Migas yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK, dan ASN yang Profesional 67 Terwujudnya Pengembangan Kompetensi SDM sektor ESDM yang Unggul dan Berdaya Saing 68 Terwujudnya Dukungan Manajemen yang Efektif dan Akuntabel untuk Pengembangan SDM ESDM Berbasis Kompentensi dalam mendukung Ketahanan Kemandirian Energi, Transisi Energi dan Hilirisasi 75 Optimalisasi Kontribusi Sektor Geologi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 78 Terwujudnya birokrasi Badan Geologi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 79 Organisasi Badan Geologi yang Fit dan SDM Unggul 80 Pengelolaan Sistem Anggaran Badan Geologi yang Optimal 83 Terwujudnya Budaya birokrasi BPH Migas yang BerAKHLAK 84 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan BPH Migas yang Efektif, Bersih, Akuntabel dan Berkelanjutan		

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	85 Terwujudnya ASN BPH Migas yang profesional 87 Terwujudnya Pengawasan yang Andal Ditjen Gakum 88 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK Ditjen Gakum 91 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Profesional untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Energi Hulu Migas Aceh 92 Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan BPMA yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan 98 Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi 99 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Setjen DEN yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan, dengan Dukungan ASN yang Profesional		

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**022**	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**					**28.489.404.712**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**26.611.987.133**
	10	**PENDIDIKAN**					**1.877.417.579**
3 Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**1.834.949.516**
	2) GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**					**16.876.512.657**
	3) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**9.777.942.539**
Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**1.834.949.516**
	RM	460.000.000	01 Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten	ADD	Standarisasi Lembaga	48 Lembaga, Unit Kerja	8.382.327
	BLU	1.370.970.584		AEC	Kerja sama	344 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	20.384.931
	PNBP	3.978.932		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	230 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	18.892.815
				BMA	Data dan Informasi Publik	196 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	37.865.471
				CAA	Sarana Bidang Pendidikan	232 Paket, Unit, m2	28.023.626
				CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	500.000
				CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	3 unit	1.920.000
				CCA	OP Sarana Bidang Pendidikan	1.346 Paket, Unit	66.637.668
				CDJ	OP Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	70 unit	47.142.465
				DAB	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	4.990 Orang	78.475.818

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				DCB Pelatihan Bidang Infrastruktur	216.334	Orang, Kegiatan	920.373.740
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	27	Unit, m2, Paket	4.392.498
				RAA Sarana Bidang Pendidikan	2	Paket, Unit, m2	15.263.850
				SAB Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	18.217	Orang	508.267.353
				SCB Pelatihan Bidang Infrastruktur	32.866	Orang, Kegiatan	78.426.954
Program	**2) GA**	**Program Infrastruktur Konektivitas**					**16.876.512.657**
	BLU	447.251.673	01 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	169	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	130.133.791
	RM	10.005.400.741	02 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	ADC Sertifikasi Produk	10.000.005	produk, Sertifikat	73.146.498
	PNBP	3.662.341.739	04 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	1	Orang, Sertifikat	20.016.189
	PLN	2.761.518.504	13 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi Strategis yang Direkomendasikan Badan Kebijakan Transportasi	AEA Koordinasi	32	kegiatan	15.488.121
			14 Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	160	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	115.365.904
			15 Meningkatnya Kinerja Manajemen Pengetahuan Kebijakan Transportasi	BAH Pelayanan Publik Lainnya	9	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	124.141.033
			16 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan yang Efektif	BEO Bantuan Produk dan Peralatan	106	Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	90.748.699
			17 Meningkatnya Integrasi Transportasi Nasional	BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1.310	Layanan, Laporan	568.305.253
			18 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Integrasi Transportasi Antarmoda dan Multimoda	CAC Sarana Bidang Konektivitas Darat	128	Unit, Paket	56.975.673
				CAD Sarana Bidang Konektivitas Udara	26	Unit, Paket	41.715.621
				CAE Sarana Bidang Konektivitas Laut	429	Unit	379.730.276
				CAK Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	2	Unit, Paket	4.623.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	5.374.000
		CBA	Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	9 km, Paket, Unit	93.133.767
		CBD	Prasarana Bidang Konektivitas Laut	90 unit	702.754.029
		CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	208 unit, Paket	224.655.658
		CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	8 Unit, Paket	95.669.369
		CBR	Dukungan Teknis	97 Dokumen	97.621.336
		CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	15.000.000
		CCC	OM Sarana Bidang Konektivitas Darat	44 Unit, Paket	29.660.533
		CCD	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara	44 Unit, Paket	25.931.498
		CCE	OM Sarana Bidang Konektivitas Laut	2.913 Unit	544.373.244
		CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	71 Unit, Paket	88.076.496
		CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	5 Unit	1.100.000
		CDA	OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	171 km, Paket, Unit	80.979.132
		CDD	OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut	191 unit	14.337.503
		CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	656 unit, Paket	487.623.310
		CDP	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat	689 Unit, Paket	213.964.243
		CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	16.213.688



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	21.357.983
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.511 Unit, m2, Paket	329.462.333
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	3 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	15.364.478
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	499.500
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	469 Laporan, Rekomendasi	235.670.518
		PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	14 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	28.262.729
		PEH Promosi	61 promosi, Kegiatan	12.900.000
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7 NSPK	14.400.000
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	11.662 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	3.958.200.583
		RAC Sarana Bidang Konektivitas Darat	5.097 Unit, Paket	346.446.206
		RAE Sarana Bidang Konektivitas Laut	1 Unit	239.000.000
		RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	215 km, Paket, Unit	1.207.165.259
		RBD Prasarana Bidang Konektivitas Laut	23 unit	2.136.190.424
		RBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara	19 unit, Paket	273.936.967
		RBP Prasarana Bidang Konektivitas Darat	3 Unit, Paket	1.169.000.000
		RCC OM Sarana Bidang Konektivitas Darat	617 Unit, Paket	84.106.781
		RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	13 km, Paket, Unit	2.447.691.032
Program 3) WA Program Dukungan Manajemen				**9.777.942.539**

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	RM	9.237.905.965	01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	AAG Peraturan Menteri	123	PerMen, Perka, RPermen	5.046.550
	BLU	407.251.883	02 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	AAH Peraturan lainnya	3	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	481.180
	PNBP	132.784.691	05 Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	13.923.900
			06 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan di Kementerian Perhubungan	ABI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	499.414
			07 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan	ABJ Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	545.130
			08 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Ditjen Integrasi Transportasi dan Mutimoda	ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	4	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.530.000
				ABS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	2	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	485.456
				AEB Forum	1	forum	65.000
				AEC Kerja sama	31	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	24.907.708
				AED Perjanjian	15	perjanjian	535.059
				AEE Kemitraan	1	Kesepakatan	4.323.711
				AEF Sosialisasi dan Diseminasi	250	orang	592.400
				AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	17	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	6.350.608
				BCA Perkara Hukum Perseorangan	30	Perkara, Berkas Perkara	1.650.000
				BCD Perkara Hukum Badan Usaha	1	Perkara, Berkas Perkara	90.000
				BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	6	Layanan, Laporan	12.065.853

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BMA	Data dan Informasi Publik	10 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	18.484.743
		BMB	Komunikasi Publik	7 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	14.291.112
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	175 Unit	13.130.101
		CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit	8.955.134
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.797 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	8.505.309.453
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	750 Unit, m2, Paket	197.891.766
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	28.509 Orang, Layanan, Rekomendasi	120.896.751
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.277 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	802.958.443
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	14 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	22.933.067

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**024**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**					**114.000.000.000**
2 Fungsi	**07**	**KESEHATAN**					**111.488.704.961**
	10	**PENDIDIKAN**					**2.511.295.039**
3 Program	**1) D1**	**Program Sumber Daya Kesehatan**					**59.414.183.231**
	2) DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**2.969.325.835**
	3) DX	**Program Pelayanan Kesehatan Primer**					**2.690.551.491**
	4) DY	**Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan**					**29.697.796.758**
	5) DZ	**Program Sistem Ketahanan Kesehatan**					**9.607.523.881**
	6) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**9.620.618.804**
Program	**1) D1**	**Program Sumber Daya Kesehatan**					**59.414.183.231**
	RM	59.400.386.435	01 Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	32 Rekomendasi Kebijakan	4.495.092
	PNBP	13.796.796	02 Terpenuhinya pembiayaan kesehatan dalam mencapai UHC	ACB	Perizinan Masyarakat	16.000 Orang	2.872.750
			03 Meningkatnya kecukupan pendanaan kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	392.285 Orang	115.906.656
			04 Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	AEA	Koordinasi	7 kegiatan	943.260
			05 Meningkatnya kecukupan, efektifitas, efisiensi, keadilan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan	AEB	Forum	1 forum	75.000
			06 Meningkatnya jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan rehabilitasi medis	AEC	Kerja sama	15 Kesepakatan	204.961.962
				AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	4.000 orang	2.300.000

SK No 160518 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		AEG Konferensi dan Event	22	Kegiatan	1.174.870
		AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	192	NSPK	42.079.023
		BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.117	Orang, Akta, Bidang, Laporan	3.018.974
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	428	Lembaga	17.020.592
		BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.000	Orang	5.171.390
		BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	61	Orang	6.922.390
		BMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	269.990
		BMB Komunikasi Publik	1	layanan	50.000
		CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Unit	2.090.250
		DCM Pelatihan Bidang Kesehatan	2.895	Orang	10.180.860
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2	Laporan, Layanan	155.076
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	41	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	1.839.666
		PBG Kebijakan Bidang Kesehatan	4	Rekomendasi Kebijakan	2.035.000
		PEA Koordinasi	3	kegiatan	563.340
		QEA Bantuan Masyarakat	146.405.975	Orang	58.990.057.090
Program **2) DL** **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**2.969.325.835**
RM 1.545.682.233	01 Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan yang berkualitas	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	25	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	547.316
BLU 1.392.723.010		ADA Standarisasi Produk	1	produk	289.250
PNBP 30.920.592		ADE Akreditasi Lembaga	86	Lembaga, Unit Kerja	16.233.771

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		AEC Kerja sama	826	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	7.555.017
		AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	170.550
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	76	Lembaga, Unit Kerja, Tim	585.978
		BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.981	Kelompok Masyarakat	77.993.039
		BEN Bantuan Peserta Didik	27.377	Orang	71.786.955
		BGC Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	38	Lembaga	653.480.289
		BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	6	Produk, Laporan, Keputusan	52.444
		BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	29.340
		CAA Sarana Bidang Pendidikan	4.539	Paket, Unit, m2	101.054.202
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	521	Unit	7.657.896
		CBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	1.588	unit	99.239.478
		CCA OP Sarana Bidang Pendidikan	675	Paket, Unit	6.130.491
		CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6.354	Unit	12.077.988
		DBA Pendidikan Tinggi	171.496	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	1.060.469.864
		DCI Pelatihan Bidang Pendidikan	16.348	Orang, Kegiatan	70.280.454
		DCM Pelatihan Bidang Kesehatan	135	Orang, Kegiatan	226.300

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	9 produk, Ekor, BibitBenih	1.973.366
				DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	122 Purwarupa, Desain	9.375.499
				DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	2.077 model, Desain	122.338.908
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	129 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	186.689.131
				EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	870 Unit, m2, Paket	13.789.166
				EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	7.793 Orang, Layanan, Rekomendasi	8.137.606
				EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	313 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	17.950.077
				FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	53.064
				QEN	Bantuan Peserta Didik	6.338 Orang	421.958.396
				SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	91 Orang, Kegiatan	1.200.000
Program	**3) DX**	**Program Pelayanan Kesehatan Primer**					**2.690.551.491**
	RM	255.971.903	01 Meningkatnya proporsi kabupaten/kota yang menyelenggarakan skrining penyakit tidak menular prioritas	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	29 layanan	5.245.865
	PNBP	9.718.358	03 Tercapainya imunisasi lengkap pada populasi	BGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	22 Lembaga	53.525.959
	BLU	71.701.791	04 Meningkatnya pengendalian penyakit dan faktor risiko penyakit tidak menular	CAB	Sarana Bidang Kesehatan	9 Paket, Unit	82.470
	PLN	2.331.556.865	05 Meningkatnya tatalaksana penyakit kanker	CCB	OP Sarana Bidang Kesehatan	18 Paket, Unit	2.832.887
	HLN	21.602.574	06 Menurunnya proporsi perokok usia 10-21 tahun	DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	166 Orang	987.704

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	07 Meningkatnya produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi batas maksimum kandungan Gula Garam Lemak (GGL)	FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	15 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	228.275
	08 Meningkatnya Skrining kolesterol pada Puskemas	PEA	Koordinasi	51 kegiatan	6.750.422
	09 Menurunnya insiden penyakit menular	PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	4.200 orang	62.380
	10 Meningkatnya eliminasi penyakit menular	PEH	Promosi	2 promosi	350.000
	11 Menurunnya kematian akibat penyakit menular	PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7 NSPK	745.030
	12 Menurunnya proporsi obesitas di Kab/Kota	QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.437.469 Orang, Akta, Bidang, Laporan	134.927.372
	13 Menurunnya kejadian penyakit menular sensitif iklim	QAH	Pelayanan Publik Lainnya	211 layanan	32.455.602
	14 Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu, anak, usia dewasa dan lansia	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10.200 Lembaga	288.780
	15 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	382 Kelompok Masyarakat	34.550.000
	16 Meningkatnya masyarakat yang berperilaku hidup sehat	QEA	Bantuan Masyarakat	533.147 Orang	31.532.758
	17 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan primer	QEO	Bantuan Produk dan Peralatan	88.126 Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	1.886.991.479
		QGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	23 Lembaga	3.509.055
		QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	24.100 Sampel	1.549.931
		QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	75 Orang, Kelompok Masyarakat	4.001.130
		QMA	Data dan Informasi Publik	6 dokumen, Peta, Data	758.500
		RAB	Sarana Bidang Kesehatan	486 Paket, Unit	334.152.280
		RCB	OP Sarana Bidang Kesehatan	3 Paket, Unit	225.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				SCM Pelatihan Bidang Kesehatan	18.952	Orang	129.746.949
				UAB Sistem Informasi Pemerintahan	6	Sistem Informasi	770.000
				UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	182	Laporan, Layanan	2.964.618
				UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	310	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	21.317.045
Program	**4) DY**	**Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan**					**29.697.796.758**
	PNBP	79.780.279	01 Meningkatnya kualitas layanan obstetrik di RS	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	152	Rekomendasi Kebijakan	45.203.435
	RM	3.924.953.392	02 Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan lanjutan	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	56.270	orang	36.398.320
	BLU	21.637.753.877	03 Meningkatnya layanan berbasis kedokteran presisi	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	393.895
	PLN	4.055.309.210	04 Meningkatnya kapabilitas riset di RS	BAH Pelayanan Publik Lainnya	51	layanan	2.128.802
				BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3.405	Lembaga	2.654.179
				BEN Bantuan Peserta Didik	317	Orang	15.341.602
				BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2	Lembaga	97.770
				BKC Pemantauan lembaga	2.152	Lembaga	384.360
				CAB Sarana Bidang Kesehatan	7.010	Paket, Unit	6.617.780.214
				CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.295	Unit	179.041.079
				CBV Prasarana Bidang Kesehatan	5.459	Unit	1.078.892.652
				CCB OP Sarana Bidang Kesehatan	256	Paket, Unit	4.711.844.794
				CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.278	Unit	57.205.963

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		DCM Pelatihan Bidang Kesehatan	71.475	Orang	209.566.636
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	172	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	8.499.750.708
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.317	Unit, m2, Paket	178.182.181
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	25.022	Orang, Layanan, Rekomendasi	56.876.756
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	93	Laporan, Layanan	11.283.516
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.116
		PBG Kebijakan Bidang Kesehatan	20	Rekomendasi Kebijakan	5.545.548
		PDE Akreditasi Lembaga	46	Lembaga	64.560
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	250	orang	10.800
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	797.147
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3.231	Lembaga	125.130.684
		QEO Bantuan Produk dan Peralatan	20	Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	2.743.664.150
		QKC Pemantauan lembaga	10	Lembaga	185.745
		RAB Sarana Bidang Kesehatan	8.007	Paket, Unit	3.512.080.334
		RBV Prasarana Bidang Kesehatan	2.846	Unit	1.518.982.072
		RCB OP Sarana Bidang Kesehatan	15.324	Paket, Unit	44.508.812
		RCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	129	Unit	24.703.700
		SCM Pelatihan Bidang Kesehatan	1.939	Orang	17.679.207
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi	177.905

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	26	Laporan, Layanan	1.237.116
Program	**5) DZ**	**Program Sistem Ketahanan Kesehatan**					**9.607.523.881**
	RM	9.417.577.440	01 Meningkatnya Desa/Kelurahan yang menerapkan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkelanjutan	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	8	Rekomendasi Kebijakan	220.081
	PNBP	156.428.453	02 Meningkatnya kabupaten/kota yang mendeteksi, merespon dan mengendalikan faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	ACA Perizinan Produk	22.000	Produk	10.839.263
	BLU	33.517.988	03 Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	ACD Perizinan Lembaga	2.025	Institusi, Badan Usaha, Lembaga	3.221.627
			04 Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di Kab/Kota	ADE Akreditasi Lembaga	1	Lembaga	1.273.627
			05 Menurunnya jumlah KLB Keracunan Pangan	ADF Sertifikasi Lembaga	700	Lembaga, Badan Usaha	1.870.291
			06 Meningkatnya Kab/Kota yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang Kesehatan	AEA Koordinasi	15	kegiatan	4.141.872
			07 Meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	21.400	orang	14.490.000
			08 Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	AEH Promosi	2	promosi	150.000
			09 Meningkatnya kemampuan pemenuhan obat, obat bahan alam, produk biologi (termasuk vaksin) serta alkes secara mandiri	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	9	NSPK	755.250
			10 Meningkatnya pemanfaatan alat Kesehatan produksi dalam negeri di pelayanan kesehatan	BAH Pelayanan Publik Lainnya	5	layanan	362.500
			11 Meningkatnya mutu dan keamanan alat kesehatan di peredaran	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	113	Lembaga	3.558.078
			12 Meningkatnya rancangan produk baru dari uji klinik yang dilakukan dalam negeri	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	25.300	Orang	22.159.456

SK No 160556 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	13 Menguatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan untuk menghadapi ancaman kesehatan	BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	171 Industri	1.682.491
		BEE	Bantuan Penanggulangan Kebencanaan	12 Paket	388.128
		BGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	1 Lembaga	313.732
		BHC	Operasi Bidang Penanggulangan Bencana	35 operasi	6.629.353
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	50 Lembaga	200.000
		BJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	55.149 Unit	16.682.020
		CAB	Sarana Bidang Kesehatan	153 Paket, Unit	36.462.805
		CBV	Prasarana Bidang Kesehatan	1 Unit	5.308.152
		CCB	OP Sarana Bidang Kesehatan	5 Paket, Unit	1.884.465
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	22 Sistem Informasi	5.117.946
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	41 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	1.467.740
		PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	1 Rekomendasi Kebijakan	28.500
		PEA	Koordinasi	359 kegiatan	2.715.971
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	3.955 orang	954.048
		PEH	Promosi	2 promosi	401.289
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7 NSPK	274.925
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.179.638 Orang, Akta, Bidang, Laporan	21.871.709
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	39.617 layanan	83.399.665
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	11.511 Lembaga	2.123.779

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	409	Industri	3.866.439
				QEH Bantuan Kelompok Masyarakat	435	Kelompok Masyarakat	44.322.848
				QEO Bantuan Produk dan Peralatan	42	Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	9.277.190.407
				QHC Operasi Bidang Penanggulangan Bencana	35	operasi	4.006.745
				QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	197	Produk	813.736
				QMA Data dan Informasi Publik	4	dokumen, Peta, Data	1.230.000
				RAB Sarana Bidang Kesehatan	686	Paket, Unit	22.668.308
				RCB OP Sarana Bidang Kesehatan	12	Paket, Unit	327.543
				SCM Pelatihan Bidang Kesehatan	1.500	Orang	22.590
				UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	23	Laporan, Layanan	108.100
				UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2.646	Daerah (ProvKabKota) Provinsi, KabKota	2.018.402
Program	**6) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**9.620.618.804**
	RM	9.282.133.592	01 Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan	AAD Peraturan Presiden	2	PerPres, R.Perpres	431.190
	PNBP	56.481.970	04 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	AAG Peraturan Menteri	15	PerMen, Perka	625.535
	HLN	43.768.090	05 Meningkatnya keselarasan perencanaan pusat dan daerah	AAH Peraturan lainnya	70	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	540.135
	PLN	229.897.131		ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	20	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.508
	BLU	8.338.021		AEA Koordinasi	26	kegiatan	6.115.098
				AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	24	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	86.113

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	8 layanan	418.100
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	13 Kelompok Masyarakat	2.990.000
		BMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	22.080
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	268 Unit	51.845.937
		CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	49.000
		CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	142 Unit	58.179.355
		CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	17 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	23.452.884
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	995 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	8.863.123.596
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.011 Unit, m2, Paket	68.241.364
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	128.247 Orang, Layanan, Rekomendasi	53.151.156
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	394 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	22.602.331
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	53 Sistem Informasi	7.971.615
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	39 Layanan, Dokumen	726.990
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	40.000.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3 Lembaga, Unit Kerja, Tim	153.033.996
		QMA	Data dan Informasi Publik	9 dokumen, Peta, Data	453.916

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		QMB Komunikasi Publik	3 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	1.847.986
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	185.784.360
		UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	111 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	3.145.365
		UAD Perencanaan dan Penganggaran	50 Layanan, Dokumen	47.469.609
		UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	128 Laporan, Layanan	22.823.615
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	39 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	5.478.970

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**025**	**KEMENTERIAN AGAMA**					**88.897.728.380**
2 Fungsi	**09**	**AGAMA**					**13.276.526.896**
	10	**PENDIDIKAN**					**75.621.201.484**
3 Program	**1) DC**	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**					**2.737.097.455**
	2) DF	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**					**15.791.615.443**
	3) DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**					**9.784.774.838**
	4) DK	**Program Pendidikan Tinggi**					**8.907.767.806**
	5) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**51.676.472.838**
Program	**1) DC**	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**					**2.737.097.455**
	RM	1.443.951.201	02 Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun	AEG	Konferensi dan Event	182 Kegiatan, Paket Kegiatan	34.489.654
	PNBP	471.010.891	04 Terwujudnya Transformasi Layanan Keagamaan yang Berkualitas, Merata dan Inklusif	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	177 NSPK	9.866.339
	SBSN	822.135.363		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	547.401 Orang, Akta, Bidang, Laporan	4.481.577
				BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22 Lembaga, Unit Kerja, Tim	7.998.511
				BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	3.080.209
				EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	19.465 Orang, Layanan, Rekomendasi	65.469.622
				PBN	Kebijakan Bidang Sosial	18 Rekomendasi Kebijakan	26.132.028
				PEG	Konferensi dan Event	338 Kegiatan, Paket Kegiatan	132.834.549

SK No 160551 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	5.508.805	Orang, Akta, Keping, Bidang	280.528.110
		QAB Pelayanan Publik kepada lembaga	34	Lembaga	7.100.229
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	42	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	488.885.363
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	6.975	Lembaga	239.795.697
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	84.265	Orang	234.531.273
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	25.507	Kelompok Masyarakat	107.244.517
		QDE Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	2.323.689	Keluarga, KK	114.606.701
		QEA Bantuan Masyarakat	25.185.289	Orang	28.410.000
		QEG Bantuan Peralatan / Sarana	3.333	Unit, Titik, Paket, SR	1.379.642
		QEI Bantuan Lembaga	6.764	Lembaga	311.147.070
		QEO Bantuan Produk dan Peralatan	271.474	Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	60.522.715
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	6.209	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	46.000.000
		SCJ Pelatihan Bidang Sosial	271.790	Orang	55.303.649
		UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	9.715	Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	477.290.000
Program **2) DF Program Wajib Belajar 13 Tahun**					**15.791.615.443**
RM 14.988.183.491	01 Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	6	Orang, Akta, Bidang, Laporan	16.000.000
SBSN 803.431.952		BAH Pelayanan Publik Lainnya	100	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	64.250.000

SK No 160550 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		QEG Bantuan Peralatan / Sarana	8.015 Unit, Titik, Paket, SR	3.747.940
		QEI Bantuan Lembaga	15.242 Lembaga	449.254.237
		QEK Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	324 Orang	231.300
		QEN Bantuan Peserta Didik	14.173.957 Orang	13.819.748.393
		RAA Sarana Bidang Pendidikan	33.652 Paket, Unit, m2	526.825.850
		RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	356 unit	842.469.442
		SBB Pendidikan Menengah	11.390 Orang	69.088.281
Program 3) DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran				**9.784.774.838**
RM 9.784.774.838	01 Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	25 Lembaga	3.393.509
	02 Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa	DCI Pelatihan Bidang Pendidikan	120 Orang	646.000
	03 Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	99 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	34.282.327
	04 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP	PDE Akreditasi Lembaga	15 Lembaga, Unit Kerja	254.000
	05 Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	PDG Standarisasi Profesi dan SDM	81.101 Orang	83.000.000
	06 Menguatnya pendidikan karakter siswa	PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	19.745 Orang	16.025.368
	07 Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri	PEF Sosialisasi dan Diseminasi	35.014 orang	33.695.549
	08 Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pendidikan yang moderat/maslahat dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang profesional dan moderat	PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	224 NSPK	8.289.347
	09 Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran	QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.550 Orang, Akta, Keping, Bidang	3.419.782

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
			10 Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	15.610	Lembaga, Unit Kerja, Tim	31.228.859
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.929	Orang, Unit Kerja, Tim	48.158.059
				QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	17	Kelompok Masyarakat	3.276.136
				QEA Bantuan Masyarakat	550.986	Orang	9.134.680.607
				QEH Bantuan Kelompok Masyarakat	145	Kelompok Masyarakat	1.970.000
				QEI Bantuan Lembaga	2.063	Lembaga	49.569.250
				QEK Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	5.777	Orang	119.659.508
				QGC Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	36	Lembaga	1.600.002
				QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	35	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	1.400.000
				SBA Pendidikan Tinggi	700	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	4.500.000
				SCI Pelatihan Bidang Pendidikan	1.035.712	Orang, Kegiatan	205.726.535
Program	**4) DK**	**Program Pendidikan Tinggi**					**8.907.767.806**
	RM	3.442.084.811	01 Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan	ACD Perizinan Lembaga	10	Institusi, Badan Usaha, Registrasi, Ketetapan	3.734.000
	PNBP	731.621.806	02 Meningkatnya Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas	ADE Akreditasi Lembaga	31	Lembaga, Unit Kerja	1.234.682
	SBSN	753.460.932	03 Meningkatnya Kualitas Standar dan Sistem Penjaminan Mutu	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	76	Orang	1.901.443
	BLU	3.980.600.257	04 Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan	AEC Kerja sama	29	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	3.048.465

SK No 160548 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	05 Meningkatnya Relevansi Pendidikan Tinggi Keagamaan Melalui Penguatan Kemitraan Strategis	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	147.998	Orang, Akta, Bidang, Laporan	6.000.000
	06 Meningkatnya Daya Saing Lulusan PTK/Ma'had Aly	BEA Bantuan Masyarakat	10.249	Orang	409.687.896
	07 Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly	BEG Bantuan Peralatan / Sarana	9	Unit, Titik, Paket, SR	1.235.000
		BEI Bantuan Lembaga	614	Lembaga	647.782.243
		BEJ Bantuan Pendidikan Tinggi	3.623	Orang	58.083.637
		BEN Bantuan Peserta Didik	6.296	Orang	22.119.799
		BGC Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	67	Lembaga	3.864.752.244
		CAA Sarana Bidang Pendidikan	4.108	Paket, Unit	272.920.167
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	691	Unit	58.019.119
		CBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	147	unit	702.421.110
		CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	878.302
		DBA Pendidikan Tinggi	8.681	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	20.604.755
		DCI Pelatihan Bidang Pendidikan	2.785	Orang, Kegiatan	10.277.434
		DDC Penelitian dan Pengembangan Modeling	90	model, Desain	4.500.000
		DDD Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	175	kekayaan intelektual	7.226.590
		PDD Standarisasi Lembaga	37	Lembaga	6.400.000
		PDE Akreditasi Lembaga	609	Lembaga, Unit Kerja	22.658.025

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PDG Standarisasi Profesi dan SDM	80	Orang	3.712.500
		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	2.500	Orang, Sertifikat	7.788.465
		PEC Kerja sama	4	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.000.000
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	2.264	orang	5.707.450
		QEA Bantuan Masyarakat	7	Orang	370.000
		QEI Bantuan Lembaga	128	Lembaga	374.380.057
		QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi	226	Orang	2.022.000
		QEN Bantuan Peserta Didik	148.184	Orang	1.611.840.228
		RBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	78	unit	753.460.932
		SBA Pendidikan Tinggi	1.250	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	4.054.615
		SCI Pelatihan Bidang Pendidikan	2.204	Orang, Kegiatan	17.946.648
Program **5) WA Program Dukungan Manajemen**					**51.676.472.838**
RM 51.639.636.156	01 Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama	AAH Peraturan lainnya	20	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	636.040
PNBP 36.836.682	02 Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama	AEC Kerja sama	1	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.484.965
	06 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Efektif dan Akuntabel	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	468	Unit	175.828.788
	07 Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal atas Akuntabilitas Keuangan, Kinerja dan Integritas SDM aparatur Kementerian Agama	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.257	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	50.687.058.737
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.425	Unit, m2, Paket	267.390.818

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	590.281	Orang, Layanan, Rekomendasi	42.379.888
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.862	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	501.693.602

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**026**	**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**					**3.860.857.021**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**3.046.857.021**
	10	**PENDIDIKAN**					**814.000.000**
3 Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**968.113.824**
	2) DN	**Program Pembinaan Ketenagakerjaan**					**1.604.006.677**
	3) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**1.288.736.520**
Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**968.113.824**
	PLN	524.586.985	01 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	AEA	Koordinasi	42 kegiatan	1.987.299
	PNBP	227.854.406	03 Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	AEB	Forum	10 forum	1.125.000
	RM	215.672.433		AEC	Kerja sama	12 Kesepakatan	237.122
				BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	983 Lembaga, Unit Kerja, Tim	3.171.068
				BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	30 Orang	10.000.000
				BMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	1.850.114
				CAA	Sarana Bidang Pendidikan	1 Paket, Unit	2.382.241
				CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	1 unit	300.000
				PDE	Akreditasi Lembaga	26 Lembaga	5.295.809
				PDF	Sertifikasi Lembaga	50 Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat	1.233.600
				PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	61.101 Orang, Sertifikat	52.726.587

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				PEA Koordinasi	43	kegiatan	5.032.634
				PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	300	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	7.409.912
				QEI Bantuan Lembaga	70	Lembaga	63.000.000
				RAJ Sarana Bidang Ketenagakerjaan	47	Unit	526.533.373
				SBA Pendidikan Tinggi	722	Orang	1.762.372
				SCI Pelatihan Bidang Pendidikan	1.060	Orang, Kegiatan	11.122.916
				SCO Pelatihan Vokasi	78.279	Orang, Kegiatan	272.943.777
Program	**2) DN**	**Program Pembinaan Ketenagakerjaan**					**1.604.006.677**
		PNBP 506.880.119	01 Tersedianya Rekomendasi Kebijakan dan Rencana Tenaga Kerja Nasional Berbasis Data dan Informasi Ketenagakerjaan	ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	7	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.832.379
		RM 1.023.485.816	11 Meningkatnya Penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar hubungan kerja	AEA Koordinasi	2	kegiatan	467.793
		PLN 73.640.742	12 Meningkatnya Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	AEE Kemitraan	5	Kesepakatan	99.710
			13 Meningkatnya perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan	AEG Konferensi dan Event	3	Kegiatan, Paket Kegiatan	8.248.522
			15 Meningkatnya pemenuhan hak pekerja/buruh	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.468.660
			17 Meningkatnya kepesertaan Program Jaminan Sosial tenaga kerja dan penyediaan Fasilitas Kesehatan Pekerja	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	757.620	Orang, Akta, Keping, Bidang	21.386.978
				BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	1.113	Lembaga	12.085.745
				BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	24.000	Badan usaha	4.528.854
				BCE Penanganan Perkara	140	Perkara, Berkas Perkara	4.508.757

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	4.723.829
		BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.239.175	Orang	105.944.672
		BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	25	Kelompok Masyarakat, Unit Kerja, Tim, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.000.000
		BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	190	Badan usaha	19.386.287
		BEA Bantuan Masyarakat	104.803.992	Orang	1.154.643.913
		BEI Bantuan Lembaga	200	Lembaga	20.000.000
		BGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	21	Lembaga	13.073.320
		BIE Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	247	Pemerintah Daerah	1.284.100
		BMA Data dan Informasi Publik	42	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	5.987.520
		DCI Pelatihan Bidang Pendidikan	1.220	Orang, Kegiatan	7.095.812
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	52.390.812
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.970	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	12.170.275
		FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	34	Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	5.206.314
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	20	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	279.190
		PBK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	7	Rekomendasi Kebijakan	6.650.894
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	585	orang	2.574.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				QAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	2.367	Badan usaha, Penyalur, Hektar	5.716.205
				QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	351	Lembaga, Unit Kerja, Tim	1.404.000
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	34.252	Orang	20.972.619
				QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	2.641	Badan usaha, Miliar USD	9.338.585
				QEA Bantuan Masyarakat	11.000	Orang	65.000.000
				QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	330.294	Badan Usaha, Laporan	13.268.009
				QMA Data dan Informasi Publik	9	dokumen, Peta, Data	11.110.069
				UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	990	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	10.158.854
Program	**3) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**1.288.736.520**
	PNBP	43.868.868	01 Meningkatnya pengawasan intern Inspektorat Jenderal dalam mendukung tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Kementerian Ketenagakerjaan	AAC Peraturan Pemerintah	2	PP, RPP	286.570
	RM	1.165.437.162	02 Terwujudnya penatakelolaan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang baik, berintegritas, bersih, dan bebas KKN	AAD Peraturan Presiden	2	PerPres, R.Perpres	200.820
	PLN	79.430.490	03 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	AAG Peraturan Menteri	20	PerMen, Perka	1.193.660
			04 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	AAH Peraturan lainnya	25	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	378.940
			05 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	AEA Koordinasi	1	kegiatan	65.480.490

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	06 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	AEC Kerja sama	14 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	3.194.484
	07 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	BCE Penanganan Perkara	25 Perkara	1.271.360
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	112 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.156.838.861
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	166 Unit, m2, Paket	7.879.405
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.238 Orang, Layanan, Rekomendasi	26.344.011
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	212 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	25.667.919



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 027

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**027**	**KEMENTERIAN SOSIAL**					**84.440.056.166**
2 Fungsi	**10**	**PENDIDIKAN**					**4.961.000.000**
	11	**PERLINDUNGAN SOSIAL**					**79.479.056.166**
3 Program	**1) DQ**	**Program Perlindungan Sosial**					**77.861.262.087**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**6.578.794.079**
Program	**1) DQ**	**Program Perlindungan Sosial**					**77.861.262.087**
	RM	77.857.417.551	01 Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan	ABN Kebijakan Bidang Sosial	4	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.300.000
	PNBP	3.844.536	02 Meningkatnya Fungsi Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	ACD Perizinan Lembaga	1.050	Institusi, Badan Usaha, Registrasi, Ketetapan	4.858.139
			03 Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	210	Orang	2.595.000
			04 Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.235	Orang, Akta, Keping, Bidang	4.270.000
			05 Meningkatnya Kualitas Layanan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial	BAH Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	1.021.780
			06 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Sosial	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.100	Lembaga, Unit Kerja, Tim	600.000
			07 Meningkatnya Hubungan Partnership dan Kolaborasi yang Berkualitas	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	87.264	Orang	94.407.552
				BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	150	Badan usaha	600.000
				BEA Bantuan Masyarakat	403	Orang	6.334.052
				BEH Bantuan Kelompok Masyarakat	60	Kelompok Masyarakat	3.900.000

SK No 160585 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 027
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CDN OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	139	unit	2.326.460
		DBA Pendidikan Tinggi	1.630	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	8.530.046
		DCJ Pelatihan Bidang Sosial	2.550	Orang, Kegiatan	4.295.000
		DDA Penelitian dan Pengembangan Produk	69	produk, Ekor, BibitBenih	5.285.961
		PBN Kebijakan Bidang Sosial	6	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	10.545.000
		PDE Akreditasi Lembaga	1.035	Lembaga, Unit Kerja	3.000.000
		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	7.300	Orang, Sertifikat	6.000.000
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	8.250.000
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	526.605	Orang, Akta, Keping, Bidang	776.912.943
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	2	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	93.862.555
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	550	Lembaga, Unit Kerja, Tim	22.000.000
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	88.581	Orang	553.609.915
		QEB Bantuan Keluarga	36.267.800	Keluarga, KK	72.633.986.765
		QEE Bantuan Kebencanaan	72.000	Paket	73.444.720
		QEG Bantuan Peralatan / Sarana	22.131	Unit, Titik, Paket, SR	28.393.176
		QEH Bantuan Kelompok Masyarakat	60	Kelompok Masyarakat	10.500.000
		RAA Sarana Bidang Pendidikan	55.376	Paket, Unit	1.322.387.710

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 027
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	401 Unit	114.063.881
		RBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	280 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	104.797.966
		SBB	Pendidikan Menengah	14.575 Orang	725.711.607
		SBC	Pendidikan Dasar	24.050 Orang	1.144.641.473
		SCJ	Pelatihan Bidang Sosial	14.625 Orang, Kegiatan	29.833.397
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	17.932.949
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	514 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	26.900.000
		UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	1.250 Desa, DesaKelurahan	12.164.040
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**6.578.794.079**
RM 6.576.297.998	01 Penyelenggaran Birokrasi yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien Berorientasi Layanan	ADE	Akreditasi Lembaga	2 Lembaga, Unit Kerja	117.396
PNBP 2.496.081		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	178 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	6.521.156.523
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	391 Unit, m2, Paket	6.333.835
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2.910 Orang, Layanan, Rekomendasi	8.703.453
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	185 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	42.482.872

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**032**	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**13.000.000.000**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**12.782.638.193**
	05	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**					**44.540.000**
	10	**PENDIDIKAN**					**172.821.807**
3 Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**266.668.436**
	2) EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**					**384.600.000**
	3) FD	**Program Kualitas Lingkungan Hidup**					**44.540.000**
	4) HB	**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**					**8.673.131.355**
	5) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**3.631.060.209**
Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**266.668.436**
	RM	177.868.000	01 Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	AAH	Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	200.000
	SBSN	50.754.032		ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	8 Rekomendasi Kebijakan	650.000
	BLU	38.046.404		ADF	Sertifikasi Lembaga	8 Lembaga, Badan Usaha	550.000
				AEA	Koordinasi	4 kegiatan	400.000
				AEE	Kemitraan	4 Kesepakatan	200.000
				AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	11 NSPK	950.000
				DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	50 Orang, Kegiatan	50.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PAH Peraturan lainnya	2	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	200.000
		PDE Akreditasi Lembaga	19	Lembaga	235.000
		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	7.552	Orang	11.035.000
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	150.000
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	40.101	Kelompok Masyarakat	21.068.260
		QGC Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	16	Lembaga	3.000.000
		QKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	1	laporan	100.000
		RAA Sarana Bidang Pendidikan	3	Paket, Unit	28.446.275
		RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	6	Unit	20.129.145
		RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit, Unit, m2, Penelitian, Program Studi	50.000
		RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	1	unit	50.000
		RBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	2	unit	5.140.032
		RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	3	Unit	4.801.121
		SAC Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	5.837	Orang	134.765.500
		SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	23.465	Orang	33.373.103
		SDC Penelitian dan Pengembangan Modeling	23	model, Desain	1.125.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
Program 2) EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri					**384.600.000**
RM 332.831.351	01 Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	15	Rekomendasi Kebijakan	1.950.000
PNBP 14.568.649	02 Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing	ADA Standarisasi Produk	469	produk	3.050.000
SBSN 37.200.000		AEE Kemitraan	10	Kesepakatan	250.000
		AEF Sosialisasi dan Diseminasi	1.500	orang	450.000
		AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4	NSPK	500.000
		BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	45	Badan usaha	600.000
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3.500	Lembaga	7.000.000
		BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	400	UMKM	800.000
		BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	35	Produk	350.000
		BMA Data dan Informasi Publik	10	dokumen, Peta, Data	1.900.000
		DCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	47	Orang	300.000
		DDA Penelitian dan Pengembangan Produk	12	produk	600.000
		PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	118	Rekomendasi Kebijakan	7.050.000
		PDC Sertifikasi Produk	10.413	produk	9.500.000
		PDD Standarisasi Lembaga	108	Lembaga	2.100.000
		PDF Sertifikasi Lembaga	3.007	Lembaga, Badan Usaha	6.250.000
		PEE Kemitraan	30	Kesepakatan	750.000
		PEH Promosi	205	promosi	40.550.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	120	Lembaga	2.310.600
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.000	Orang	15.000.000
		QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	7.895	UMKM	22.100.000
		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	60	Badan usaha, Miliar USD	900.000
		QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	660	Industri	2.300.000
		QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	87	Produk	1.300.000
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2.308	Lembaga	750.000
		QMA Data dan Informasi Publik	22	dokumen, Peta, Data	3.300.000
		RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	5.694	Unit	212.989.400
		RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	15	Unit	39.700.000
Program 3) FD Program Kualitas Lingkungan Hidup					**44.540.000**
RM 14.540.000	01 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	18	Rekomendasi Kebijakan	3.050.000
PLN 30.000.000	02 Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif)	PCA Perizinan Produk	28	Produk	3.075.000
	03 Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	PEE Kemitraan	4	Kesepakatan	465.000
	04 Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	500.000
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2	Kelompok Masyarakat	250.000
		RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	13	Unit	500.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				REA Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	29.464.881	Hektar	32.975.000
				REB Konservasi Jenis/Spesies	22	Spesies, Lokasi	2.625.000
				SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	250	Orang	1.100.000
Program	**4) HB**	**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**					**8.673.131.355**
	RM	8.245.985.929	03 Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	33	Rekomendasi Kebijakan	5.439.648
	PNBP	40.138.237	04 Meningkatnya kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	ACA Perizinan Produk	3.259	Produk	4.600.000
	PLN	220.000.000	05 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	ADC Sertifikasi Produk	1	produk	451.426
	HLN	28.000.000	06 Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautar dan perikanan	AEA Koordinasi	1	kegiatan	509.500
	BLU	139.007.189	10 Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	AEB Forum	5	forum	1.267.569
			11 Meningkatnya produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	970.000
			12 Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	BCB Perkara Hukum Lembaga	2	Perkara	200.000
			15 Terselenggaranya Fasilitasi prasarana dan sarana untuk mendukung produksi perikanan budi daya	BCE Penanganan Perkara	146	Perkara	10.239.100
			17 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.552	Orang	1.600.000
			18 Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	BGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	180	Lembaga	29.500.966
			19 Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam	BHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	1.212	Operasi	18.871.944
			20 Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	BII Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	16	Hektar, Layanan	694.500

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	31 Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	BJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	13.607 Sampel	5.510.960
	32 Produktivitas perikanan tangkap meningkat	BKB	Pemantauan produk	50 Produk	500.000
	33 Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam	BMB	Komunikasi Publik	1 layanan	480.685
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	63 Laporan, Layanan	5.795.030
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	21 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	500.000
		PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	33 Rekomendasi Kebijakan	3.750.000
		PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	2.299 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	43.200.000
		PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	62 Rekomendasi Kebijakan	32.430.000
		PCA	Perizinan Produk	9.110 Produk	2.200.000
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	1.092 Orang	1.960.000
		PEE	Kemitraan	2 Kesepakatan	1.500.000
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	16 NSPK	5.798.242
		QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	1.000 Lembaga	2.000.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	14.500 Orang	8.300.000
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	569 Kelompok Masyarakat	30.000.000
		QEA	Bantuan Masyarakat	275.375 Orang	62.725.000
		QED	Bantuan Tanaman	62.231 Unit	4.500.000
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	201 Unit, Titik, Paket, SR	15.000.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	254 Kelompok Masyarakat	5.005.700.000
		QEL	Bantuan Hewan	185.327.339 Ekor	63.400.000
		QEO	Bantuan Produk dan Peralatan	53.002 Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	657.100.000
		QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	213 Lembaga	21.950.000
		QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	1.482 Operasi	550.194.762
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3.031 Lembaga	16.857.618
		QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	3.206 Sampel	4.922.853
		QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	10.120 laporan	2.400.000
		QKB	Pemantauan produk	6 Produk	1.000.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	100.012 dokumen, Peta, Data	6.750.000
		RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	93.438.144 Unit	194.313.345
		RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	6.600.000
		RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	1.500 bidang, hektar	883.000.000
		RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	85 Unit	842.600.000
		RCG	OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	121 Unit	100.000.000
		RDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	3.928.331
		SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	840 Orang	8.333.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	54	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	3.586.876
Program	**5) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**3.631.060.209**
	RM	3.570.351.588	01 Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	AAH Peraturan lainnya	36	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	1.253.564
	BLU	40.489.085	02 Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal	ABW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	20	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000
	PNBP	20.219.536	03 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP	AEA Koordinasi	78	kegiatan	57.556.407
			04 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen PDSPKP	AEC Kerja sama	25	Kesepakatan	8.314.344
			05 Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP	BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.464	UMKM	8.678.986
			06 Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dilingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1	Layanan	1.181.134
			07 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengelolaan perikanan budi daya	BMA Data dan Informasi Publik	45	dokumen, Peta, Data	17.094.899
			08 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	BMB Komunikasi Publik	3	layanan	15.121.287
			09 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	257	Unit	8.542.720
			10 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan perikanan tangkap	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	599	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.272.444.690
			11 PNBP BLU Sektor KP Meningkat	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	427	Unit, m2, Paket	76.508.390

SK No 160574 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	12 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	26.389 Orang, Layanan, Rekomendasi	27.773.307
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	809 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	66.445.474
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	5 Sistem Informasi	25.155.700
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	4.684 Orang	12.470.200
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4 Laporan, Layanan	1.512.376
		PEC	Kerja sama	2 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	15.000.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	160 dokumen, Peta, Data	4.600.000
		RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	5.606.731
		RCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3 Unit	4.600.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 035

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**035**	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**						**485.214.445**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**						**485.214.445**
3 Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**						**217.442.208**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**						**267.772.237**
Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**						**217.442.208**
	RM	217.442.208	02	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	107 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	124.672.208
			03	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	3 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.500.000
			05	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	6 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.000.000
			06	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	6 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.000.000
			07	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing	ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	26 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	11.425.000
			09	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	9 layanan	4.545.000
			11	Terwujudnya Kemudahan Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi	CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	15.000
			12	Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	21.500.000
			13	Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang terintegrasi	PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	18 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	19.785.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 035

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	14 Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	10.500.000
	15 Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	PBK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	8 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	12.500.000
	16 Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata	PBP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.000.000
	17 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Efektif	QAH Pelayanan Publik Lainnya	4 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	3.000.000
	19 Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi			
	20 Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas			
	21 Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang berkualitas			
	22 Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah			
	23 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang berkualitas			
	41 Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan			
	42 Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan			
	43 Terwujudnya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berdaya saing global			
	44 Terwujudnya kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas			
	45 Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 035

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	46 Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas			
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**267.772.237**
RM 267.772.237	01 Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	14 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	9.000.000
	02 Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas	BMB Komunikasi Publik	2 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	9.585.000
	03 Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai	CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3 Unit	7.026.625
	04 Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	18 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	219.661.987
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	38 Unit, m2, Paket	10.500.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	750 Orang, Layanan, Rekomendasi	4.792.500
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	25 Dokumen, Layanan, Laporan Rekomendasi	7.206.125

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 036

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**036**	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**					**236.708.932**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**236.708.932**
3 Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**					**50.145.620**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**186.563.312**
Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**					**50.145.620**
	RM	50.145.620	01 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	18 Rekomendasi Kebijakan	3.800.000
			02 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	54 Rekomendasi Kebijakan	10.000.000
			03 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	ABN	Kebijakan Bidang Sosial	59 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	17.468.120
			04 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	27 Rekomendasi Kebijakan, Rekomendasi	5.400.000
			05 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan	AEA	Koordinasi	40 kegiatan	9.863.750
			06 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
				PEA	Koordinasi	8 kegiatan	2.613.750

SK No 160568 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 036

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**186.563.312**
RM 186.563.312	01 Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib administrasi	ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	4 Rekomendasi Kebijakan	922.500
		ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	6 Rekomendasi Kebijakan	922.500
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	8 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	160.210.882
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	45 Unit, m2, Paket	15.500.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2 Orang, Layanan, Rekomendasi	3.128.187
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	5 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.879.243

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 041

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**041**	**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**				**280.311.060**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**				**280.311.060**
3 Program	**1) EI**	**Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN**				**82.485.324**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**197.825.736**
Program	**1) EI**	**Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN**				**82.485.324**
	RM	82.485.324	01 Meningkatnya Profitabilitas BUMN	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	13 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	16.371.616
			02 Meningkatnya Kapasitas BUMN	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5 Rekomendasi Kebijakan	3.600.000
			03 Meningkatnya Peran BUMN terhadap Program Pemerintah	BBD Layanan Bantuan Hukum Badan Usaha	40 Badan usaha	3.250.000
			04 Meningkatnya Kontribusi BUMN pada Kemanfaatan Sosial dan Lingkungan	BDA Fasilitasi dan Pembinaan BUMN	51 BUMN	8.880.000
			05 Terwujudnya SDM BUMN yang Profesional dan Berintegritas	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	5 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	41.682.418
			06 Meningkatnya Kualitas Manajemen Risiko di BUMN	PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	13 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.701.290
			07 Terciptanya Penguatan Aspek Legal dan Penegakan Hukum Pengelolaan BUMN yang Efektif			
			08 Penguatan Kualitas Teknologi Strategis di BUMN			
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**				**197.825.736**
	RM	197.825.736	01 Terwujudnya Kelembagaan Kementerian BUMN yang Kuat	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	10 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	175.965.281

SK No 160566 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 041

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	02 Terciptanya SDM Kementerian BUMN yang profesional dan berintegritas	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6 Unit, m2, Paket	1.850.000
	03 Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kementerian BUMN	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	532 Orang, Layanan, Rekomendasi	11.429.703
	04 Terwujudnya Pelayanan Publik Kementerian BUMN yang Berkualitas	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	23 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	7.681.310
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan, Dokumen	899.442

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 047

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**047**	**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					**214.112.817**
2 Fungsi	**11**	**PERLINDUNGAN SOSIAL**					**214.112.817**
3 Program	**1) DE**	**Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak**					**69.070.000**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**145.042.817**
Program	**1) DE**	**Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak**					**69.070.000**
	RM	69.070.000	01 Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	PAD	Peraturan Presiden	3 PerPres, R.Perpres	500.000
			04 Meningkatnya pemenuhan hak anak	PAG	Peraturan Menteri	4 PerMen, Perka, RPermen	500.000
			07 Meningkatnya perlindungan hak perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO	PAH	Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	300.000
			08 Meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	PBN	Kebijakan Bidang Sosial	29 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.800.000
				PDD	Standarisasi Lembaga	143 Lembaga, Unit Kerja	1.650.000
				PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	300 Orang, Sertifikat	150.000
				PEA	Koordinasi	83 kegiatan	1.950.000
				QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.815 Orang, Akta, Keping, Bidang, titik	17.350.000
				QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	4.000.000
				QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	270 Lembaga, Unit Kerja, Tim	7.000.000
				QEA	Bantuan Masyarakat	800 Orang	900.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 047

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	100	Orang, Laporan	200.000
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	36	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	250.000
		QIE Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	50	Pemerintah Daerah	200.000
		QMA Data dan Informasi Publik	4	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	450.000
		QMB Komunikasi Publik	45	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	6.219.999
		SCJ Pelatihan Bidang Sosial	3.962	Orang, Kegiatan	6.300.000
		UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	Laporan, Rekomendasi	350.000
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	270	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	19.000.001
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**145.042.817**
RM 145.042.817	01 Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	25	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	145.042.817

SK No 160563 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 048

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**048**	**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**					**392.980.127**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**392.980.127**
3 Program	**1) CO**	**Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN**					**139.520.000**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**253.460.127**
Program	**1) CO**	**Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN**					**139.520.000**
	RM	139.520.000	01 Terwujudnya kelembagaan instansi pemerintah yang agile dan kolaboratif	AAD	Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres	440.000
			02 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Manajemen Pegawai ASN berlandaskan Sistem Merit yang berkualitas	AAG	Peraturan Menteri	4 PerMen, Perka	799.970
			03 Meningkatnya kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	11 Rekomendasi Kebijakan	5.614.004
			04 Meningkatnya kualitas integritas instansi pemerintah	ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	2 Rekomendasi Kebijakan	400.000
			05 Terwujudnya Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	AEA	Koordinasi	16 kegiatan	1.191.865
			06 Terwujudnya penerapan pemerintah digital	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	3.919.300
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	75.004 Laporan, Layanan	3.876.236
				FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	3.700 Lembaga	29.118.252
				PAC	Peraturan Pemerintah	1 PP, RPP	364.000
				PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	10 Rekomendasi Kebijakan	5.644.640
				PEA	Koordinasi	46 kegiatan	25.078.397
				UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	45.000.000

SK No 160562 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 048

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1.973 Lembaga	18.073.336
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen				**253.460.127**
RM 253.460.127	01 Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien	ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	12 Rekomendasi Kebijakan	765.670
	02 Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional	AEC Kerja sama	7 Kesepakatan	1.945.820
	03 Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi dan akuntabel	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	149 Unit	4.751.483
	04 Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas	CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	204 Unit	2.795.526
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	17 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	224.651.203
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4 Unit, m2, Paket	1.781.507
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2.383 Orang, Layanan, Rekomendasi	8.398.935
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	49 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	8.369.983

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 050
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INTELIJEN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**050**	**BADAN INTELIJEN NEGARA**					**16.670.000.000**
2 Fungsi	**03**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					**16.670.000.000**
3 Program	**1) BK**	**Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara**					**12.994.864.190**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**3.675.135.810**
Program	**1) BK**	**Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara**					**12.994.864.190**
	RM	10.301.000.354	01 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen luar negeri	BHB Operasi Bidang Keamanan	96.030	operasi, Hari Operasi	5.995.324.196
	PLN	2.693.863.836	02 Menurunnya status ancaman aspek Ipoleksosbudhankam yang dipengaruhi dari luar negeri	CAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	99	Unit, Paket	6.322.762.056
			03 Menurunnya status ancaman aspek Ipolsosbudhankam	CCF OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	512	Unit, Paket	626.177.938
			04 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen dalam negeri	QHB Operasi Bidang Keamanan	1.692	operasi, Hari Operasi	50.600.000
			05 Menurunnya status ancaman aspek Sosbudhankam				
			06 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi kontra intelijen				
			07 Menurunnya status ancaman aspek ekonomi				
			08 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen ekonomi				
			09 Menurunnya status ancaman variabel ancaman teknologi				
			10 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen teknologi				

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 050

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INTELIJEN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	11 Menurunnya status ancaman variabel ancaman siber			
	12 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen siber			
	13 Terwujudnya stabilitas pemberitaan media komunikasi dan informasi			
	14 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen bidang komunikasi dan informasi			
	15 Terwujudnya deteksi dini dan peringatan dini secara cepat dan tepat			
	16 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan produksi intelijen			
	17 Meningkatnya efektivitas koordinasi dan kerja sama antar penyelenggara intelijen negara			
	18 Menurunnya status ancaman variabel ancaman pengamanan aparatur			
	19 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen pengamanan aparatur			
	20 Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja, anggaran dan BMN			
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**3.675.135.810**
RM 3.675.135.810	01 Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di BIN	CAB Sarana Bidang Kesehatan	12 Paket, Unit	16.259.756
	02 Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja, anggaran dan BMN	DBA Pendidikan Tinggi	460 Orang	152.176.483
	03 Meningkatnya profesionalisme SDM	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	25 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.182.318.771
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	431 Unit, m2, Paket	1.300.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 050

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INTELIJEN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	12 Dokumen, Layanan, Laporan Rekomendasi	24.380.600

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 051
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**051**	**BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**				**3.495.547.080**
2 Fungsi	**03**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**				**3.495.547.080**
3 Program	**1) BO**	**Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara**				**3.060.691.118**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**434.855.962**
Program	**1) BO**	**Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara**				**3.060.691.118**
	RM	716.703.914	01 Meningkatnya kematangan PSE dan Penyelenggara Persandian dalam menyelenggarakan keamanan siber dan sandi	AAG Peraturan Menteri	1 PerMen, Perka, RPermen	117.889
	PLN	2.343.987.204	02 Meningkatnya manfaat kerja sama keamanan siber dan sandi dalam pengelolaan strategi dan kebijakan keamanan siber dan sandi	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	32 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.364.206
			03 Meningkatnya manfaat kebijakan keamanan siber dan sandi dalam penanganan gangguan keamanan siber dan sandi	ADA Standarisasi Produk	2 produk, Ekor, Peralatan, Rekomendasi, Standar	110.696
			04 Meningkatnya manfaat kerja sama keamanan siber dan sandi dalam operasi keamanan siber dan sandi	ADC Sertifikasi Produk	1 produk, Sertifikat	113.615
			05 Meningkatnya manfaat kerja sama peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	ADE Akreditasi Lembaga	1 Lembaga	142.808
			06 Meningkatnya manfaat kerja sama peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor perekonomian	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	140 Orang	113.139
			07 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	325 Orang, Sertifikat	944.708
			08 Meningkatnya kesadaran K/L/Pemda terhadap keamanan siber	AEA Koordinasi	16 kegiatan	1.187.708
			09 Meningkatnya kesadaran PSE sektor pembangunan manusia terhadap keamanan siber	AEB Forum	6 forum	451.684

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 051
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	10 Meningkatnya kesadaran PSE sektor perekonomian terhadap keamanan siber	AEC	Kerja sama	4 Kesepakatan	162.018
	11 Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan siber nasional	AEG	Konferensi dan Event	2 Kegiatan, Paket Kegiatan	482.509
		AEH	Promosi	1 promosi, Kegiatan	68.908
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	900.000 Orang, Akta, Keping, Bidang	3.031.451
		BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	1 Lembaga	408.996
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	167 Lembaga, Unit Kerja, Tim	9.208.396
		BHB	Operasi Bidang Keamanan	98 operasi, Hari Operasi	7.178.149
		BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	2 Produk	81.860
		CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	4 Unit, Paket	17.802.249
		CBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 unit	3.000.000
		CCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	5 Unit, Paket	217.013.535
		DBA	Pendidikan Tinggi	422 Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	24.757.049
		DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	964 Orang, Kegiatan	4.333.050
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	39 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	1.074.815
		PBE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.267.013
		PDC	Sertifikasi Produk	2 produk, Sertifikat	2.543.193
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	360 Orang, Sertifikat	244.805

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 051
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PEC Kerja sama	2	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	439.568
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	348	Lembaga, Unit Kerja, Tim	14.189.368
		QHB Operasi Bidang Keamanan	27	operasi, Hari Operasi	5.916.713
		RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	5	Unit, Paket	2.733.987.204
		SCG Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	900	Orang, Kegiatan	3.635.516
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	26	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.318.298
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen					**434.855.962**
RM 434.855.962	01 Meningkatnya Hasil Pelaksanaan RB General	AAG Peraturan Menteri	2	PerMen, Perka, RPermen	87.845
		ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	2	Rekomendasi Kebijakan	759.911
		ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	4	Rekomendasi Kebijakan	756.725
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	37	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	423.651.391
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2.129	Orang, Layanan, Rekomendasi	3.695.382
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	45	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.827.038
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	5	Orang	77.670

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 054

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**054**	**BADAN PUSAT STATISTIK**					**6.926.985.046**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**6.926.985.046**
3 Program	**1) GG**	**Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik**					**3.133.423.345**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**3.793.561.701**
Program	**1) GG**	**Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik**					**3.133.423.345**
	RM	3.128.143.128	01 Peningkatan pemanfaatan Data dan Insight Statistik Sosial yang Berkualitas	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	86 Lembaga	4.692.616
	PNBP	5.280.217	02 Peningkatan pemanfaatan Data dan Insight Statistik Produksi yang Berkualitas	BMA	Data dan Informasi Publik	29.412 dokumen, Peta, Data	2.882.838.722
			03 Peningkatan pemanfaatan Data dan Insight Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	538 Unit	159.282.432
			04 Peningkatan pemanfaatan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	559 Lembaga	5.737.293
			05 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Bidang Statistik Sosial yang berkualitas	QMA	Data dan Informasi Publik	1.689 dokumen, Peta, Data	71.633.836
			06 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Bidang Statistik Produksi yang berkualitas	UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	2.982 Desa, DesaKelurahan	9.238.446
			07 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Berkualitas				
			08 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas				

SK No 160600 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 054
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	09 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang berkualitas 10 Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik 11 Terwujudnya pengembangan metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam proses bisnis statistik			
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen				**3.793.561.701**
RM 3.786.817.505	01 Terwujudnya Kelembagaan yang Responsif, Adaptif, dan Kolaboratif melalui Transformasi Lembaga	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.183 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.642.721.709
PNBP 6.744.196	02 Terwujudnya "Belanja Berkualitas" melalui Penguatan Manajemen Risiko	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	49 Unit, m2, Paket	30.898.021
	03 Terwujudnya Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang berkarakter	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	18.447 Orang, Layanan, Rekomendasi	71.645.792
	04 Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.466 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	46.227.419
		PEC Kerja sama	1 Kesepakatan	2.068.760

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 055

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**055 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS**				**2.597.000.000**
2 Fungsi	**01 PELAYANAN UMUM**				**2.597.000.000**
3 Program	**1) CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional**				**1.069.286.597**
	2) WA Program Dukungan Manajemen				**1.527.713.403**
Program	**1) CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional**				**1.069.286.597**
RM 861.581.622		01 Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan sesuai bidangnya	AAA Undang-Undang	1 UU, RUU	320.000
HLN 181.279.536		02 Terlaksananya dukungan pemenuhan anggaran dalam rangka pembangunan nasional	AAC Peraturan Pemerintah	1 PP, RPP	266.939
PLN 26.425.439		03 Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan sesuai bidangnya	AAG Peraturan Menteri	1 PerMen, Perka	250.908
		04 Terlaksananya penerapan kemampuan daya tanggap dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai bidangnya	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	11 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	12.147.014
			ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	3 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	6.368.448
			ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.962.160
			ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	19 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	45.916.884
			ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.574.501

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 055

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.182.000
		ABI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	5.456.591
		ABJ Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.787.490
		ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.172.200
		ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	8 Rekomendasi Kebijakan	8.095.152
		ABN Kebijakan Bidang Sosial	17 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	18.665.000
		ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	3 Rekomendasi Kebijakan	2.232.256
		ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	22 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	10.075.854
		ABQ Kebijakan Bidang Aparatur	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.480.291
		ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	6 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.010.000
		ABS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	3 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	41.460.674
		ABW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.000.000
		AEA Koordinasi	52 kegiatan	532.571.725
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	98 Lembaga, Unit Kerja, Tim	454.140
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	1.500.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 055

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	754 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	26.263.108
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	72 Layanan, Dokumen	75.490.795
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	98 Laporan, Rekomendasi	74.722.625
		PAD	Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres	250.000
		PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	1.797.877
		PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	1 Rekomendasi Kebijakan	800.000
		PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan	4.830.000
		PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	5.039.304
		PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	2 Rekomendasi Kebijakan	2.350.000
		PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	29.110.498
		PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.526.879
		PBS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	3.012.510
		PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.350.000
		PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	2 Rekomendasi Kebijakan	3.200.000
		PEA	Koordinasi	6 kegiatan	36.549.002
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	11.043.772
		UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	249 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	75.000.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 055

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**1.527.713.403**
RM 1.527.713.403	01 Terwujudnya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Professional dan Kompeten atas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PPN/Bappenas	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	92 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.421.809.971
	02 Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mencapai sasaran kinerja yang berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Unit, m2, Paket	45.599.694
	03 Terwujudnya pengelolaan sistem informasi perencanaan dan pembangunan nasional	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	16.884 Orang, Layanan, Rekomendasi	36.000.000
	04 Terwujudnya pengawasan intern untuk manajemen risiko pada lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas lingkup Inspektorat Utama	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	115 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	24.303.738

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**056**	**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN**					**9.499.346.965**
2 Fungsi	**05**	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**					**9.499.346.965**
3 Program	**1) CS**	**Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan**					**2.122.885.068**
	2) IC	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**					**281.617.955**
	3) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**7.094.843.942**
Program	**1) CS**	**Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan**					**2.122.885.068**
	PNBP	1.286.839.030	01 Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produktifitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	ABT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	533	Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen	4.867.151
	PLN	836.046.038	02 Terwujudnya Aset Reform dalam Reforma Agraria	ADF Sertifikasi Lembaga	20	Lembaga, Badan Usaha	6.500
			03 Terwujudnya Akses Reform dalam Reforma Agraria	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	11.583	Orang	4.153.528
			04 Peningkatan Pendaftaran Tanah untuk Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang	AEA Koordinasi	1	kegiatan	519.328
			06 Percepatan Penyelesian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	AEC Kerja sama	9	Kesepakatan	3.606.311
			07 Optimalisasi Pemanfaatan Nilai Tanah	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	37	NSPK	8.542.872
			08 Tersedianya Infrastruktur Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	12.286	Orang, Akta, Bidang, Laporan	368.580
				BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	20.380	Lembaga, Unit Kerja, Hektar, Bidang	19.760.299
				BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	251.635	Badan usaha	4.192.360

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	11.338.491	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	380.679.815
		BCE Penanganan Perkara	66	Perkara	2.171.418
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	8	Lembaga, Unit Kerja, Tim	1.116.251
		BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	571.002	Produk	22.598.141
		BKC Pemantauan lembaga	490	laporan	12.371.539
		BMA Data dan Informasi Publik	156	dokumen, Peta, Data	36.046.518
		CBO Prasarana Pengembangan Kawasan	337.185	bidang, hektar	19.678.305
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	497.878
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.219	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	57.095.138
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	98	Laporan, Layanan	9.647.510
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	9	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	500.000
		PEA Koordinasi	135	kegiatan	47.638.067
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.982.612	Orang, Akta, Bidang, Laporan	449.262.489
		QAB Pelayanan Publik kepada lembaga	3.978.691	Lembaga	851.066.091
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	3.340	layanan	12.090.081
		QCE Penanganan Perkara	2.152	Perkara	79.336.690
		QDE Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	54.600	Keluarga	33.525.400
		QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	40.000	Produk	7.500.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
			QMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	42.851
			RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	5.228.000 km2, bidang, km, hektar	54.003.957
Program	**2) IC Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**					**281.617.955**
	PNBP 146.341.760	01 Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	168 Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen	32.212.700
	PLN 135.276.195	02 Terwujudnya implementasi pemanfaatan ruang yang terkendali dan tertib	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6 NSPK	4.137.306
			BAH	Pelayanan Publik Lainnya	79.901 layanan	34.541.936
			BCE	Penanganan Perkara	6 Perkara	850.000
			BIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	76 Pemerintah Daerah	2.140.000
			EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.322.336
			FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	50 Orang	600.000
			FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	102 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	10.742.336
			PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	278 Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen	163.461.341
			QCE	Penanganan Perkara	68 Perkara	13.550.000
			QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.372 Produk	15.060.000
			UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	50 Orang	2.000.000
Program	**3) WA Program Dukungan Manajemen**					**7.094.843.942**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	PNBP	491.012.584	01 Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek manajemen operasional	AAC Peraturan Pemerintah	3	PP, RPP	401.289
	RM	6.475.585.591	02 Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek pengendalian internal	AAD Peraturan Presiden	6	PerPres, R.Perpres	601.169
	PLN	128.245.767		AAG Peraturan Menteri	18	PerMen, Perka	1.429.512
				ABT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	27	Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen	1.943.703
				AEC Kerja sama	24	Kesepakatan	3.744.223
				AEF Sosialisasi dan Diseminasi	2	orang	378.230
				BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	20	Kelompok Masyarakat	200.000
				BMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	2.000.000
				CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	84.260.464
				DBA Pendidikan Tinggi	2.310	Orang	6.737.289
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.797	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	6.734.452.128
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	14.566	Unit, m2, Paket	96.539.192
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2.410	Orang, Layanan, Rekomendasi	38.292.702
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.225	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	118.295.011
				FAB Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	1.230.400

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		TBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	417.061 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.338.630

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 057

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**057**	**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**					**377.999.537**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**305.682.864**
	10	**PENDIDIKAN**					**72.316.673**
3 Program	**1) DM**	**Program Perpustakaan dan Literasi**					**72.316.673**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**305.682.864**
Program	**1) DM**	**Program Perpustakaan dan Literasi**					**72.316.673**
	RM	72.242.585	01 Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian bahan perpustakaan	BAH Pelayanan Publik Lainnya	92.264	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	100.000
	PNBP	74.088	02 Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	CAA Sarana Bidang Pendidikan	377.500	Paket, Unit, m2	1.000.000
			03 Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian naskah kuno nusantara	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	16	Unit	6.181.000
				DCI Pelatihan Bidang Pendidikan	60	Orang, Kegiatan	402.570
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	24.061
				FAB Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	2.291.000
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	360	Orang	10.675.000
				QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.000	Kelompok Masyarakat	5.389.990
				QEI Bantuan Lembaga	750	Lembaga	40.134.000
				RAA Sarana Bidang Pendidikan	44.600	Paket, Unit, m2	4.839.052

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 057

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		SCI Pelatihan Bidang Pendidikan	2.000	Orang, Kegiatan	1.280.000
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen					**305.682.864**
RM 305.312.190	01 Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perpustakaan Nasional yang Akuntabel	AEC Kerja sama	1	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	882.415
PNBP 370.674		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	13	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	303.925.449
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	44	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	575.000
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	10	Layanan, Dokumen	300.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**059**	**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**					**8.624.310.746**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**8.566.646.298**
	10	**PENDIDIKAN**					**57.664.448**
3 Program	**1) GH**	**Program Komunikasi Publik dan Media**					**277.967.731**
	2) GK	**Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital**					**1.612.528.578**
	3) GL	**Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital**					**4.535.304.473**
	4) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**2.198.509.964**
Program	**1) GH**	**Program Komunikasi Publik dan Media**					**277.967.731**
	RM	277.967.731	01 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan komunikasi publik nasional	AAG	Peraturan Menteri	3 PerMen, Perka, RPermen	600.000
			02 Meningkatnya keterbukaan informasi publik	ACD	Perizinan Lembaga	50 Institusi, Badan Usaha, Lembaga	1.000.000
			03 Meningkatnya kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	210.000
				BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	170.000 Orang, Akta, Keping, Bidang	5.500.000
				BMB	Komunikasi Publik	7 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	5.199.337
				FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	3.900 Orang	6.682.180
				PAA	Undang-Undang	1 UU, RUU	945.000
				PAD	Peraturan Presiden	1 PerPres, R Perpres	440.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.690.244
		PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.500.000
		PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	5 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.619.042
		PDD Standarisasi Lembaga	85 Lembaga, Unit Kerja	245.850
		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	60 Orang, Sertifikat	76.900
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	1.000 orang	900.000
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3 NSPK	610.000
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	3 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	814.555
		QCB Perkara Hukum Lembaga	105 Perkara, Berkas Perkara	1.024.832
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	585 Lembaga	47.792.786
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	201 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	2.171.002
		QMA Data dan Informasi Publik	20 dokumen, Peta, Data	4.647.000
		QMB Komunikasi Publik	101.534.396 layanan, konten	189.140.765
		SCA Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	610 Orang	1.158.238
Program 2) GK Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital				**1.612.528.578**
RM 1.250.917.718	01 Meningkatnya Penciptaan Nilai Ekonomi Digital dengan Penguatan Ekosistem Digital Nasional	AAG Peraturan Menteri	2 PerMen, Perka	400.000

SK No 160586 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
PNBP	361.610.860	02 Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Baru di Sektor Strategis Nasional	ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	17 Rekomendasi Kebijakan	38.275.691
		03 Meningkatnya Kesehatan dan Keberlanjutan Industri Pos Logistik dan Penyiaran	ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga	1.051.233
		04 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Ekosistem Digital	AEC	Kerja sama	6 Kesepakatan	800.450
		05 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan perlindungan di ruang digital	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3 layanan	4.049.270
		06 Meningkatnya Keterpaduan Infrastruktur dan Aplikasi Pemerintah Digital	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	100 Lembaga	2.047.179
		07 Mengakselerasi transformasi digital daerah	BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1 Badan usaha	2.000.000
		08 Akselerasi pengembangan kompetensi digital sdm nasional sesuai kebutuhan industri ke depan	BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	2 Industri	14.200.000
		09 Mempercepat akselerasi kompetensi sdm aparatur dan kepemimpinan digital	BDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	10 Start Up	11.526.750
		10 Mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa produktif dan bijak dalam menggunakan internet	BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	3 Layanan	54.356.279
		11 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang SDM Digital	CAA	Sarana Bidang Pendidikan	3 Paket, Unit	496.170
		12 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Pengawasan Ruang Digital	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	10.413.429
			CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	15.685.459
			CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8 Unit	3.274.258
			DBA	Pendidikan Tinggi	2.340 Orang	12.750.530
			DCA	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	180 Orang	1.611.099

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		DDB Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	8	Purwarupa	3.852.945
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	328	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.255.053
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	9	Sistem Informasi	12.948.323
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	Laporan, Layanan	4.168.327
		PAA Undang-Undang	1	UU, RUU	945.000
		PAG Peraturan Menteri	4	PerMen, Perka	800.000
		PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	7	Rekomendasi Kebijakan	18.664.739
		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	625	Orang	1.173.927
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	4	layanan	60.166.918
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	450	Orang	9.000.000
		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	20	Badan usaha	5.000.000
		QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	3	Industri	5.900.000
		QDJ Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	192	Start Up	64.143.775
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1	Lembaga	80.000.000
		RBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	50	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	879.179
		RCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	22	Unit	313.143.234
		RDS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	693.871.966
		SCA Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	8.270	Orang	27.567.964
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	12	Sistem Informasi	108.109.431

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	40	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	28.000.000
Program	**3) GL**	**Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital**					**4.535.304.473**
	BLU	3.415.252.449	01 Meningkatnya coverage Broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia	ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	9	Rekomendasi Kebijakan	17.191.841
	RM	781.460.269	02 Meningkatnya Penetrasi dan Utilisasi (Take-Up) Internet Broadband	BAH Pelayanan Publik Lainnya	1.474	layanan	142.033.010
	PNBP	338.591.755	03 Meningkatnya kualitas internet broadband Nasional	BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	15	Kelompok Masyarakat	60.185.699
			04 Meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center yang berkelanjutan	BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1	Badan usaha	1.547.591
			05 Meningkatnya Pertumbuhan Industri Perangkat Digital dalam negeri	BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1	Layanan	1.850.000
			06 Meningkatnya Akselerasi Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Layanan Khusus secara nasional	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	95	Unit	3.994.624
			07 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan PNBP Bidang Infrastruktur dan Perangkat Digital	CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	241	Unit	39.388.926
				FBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	615	Desa, DesaKelurahan	10.917.964
				PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	12	Rekomendasi Kebijakan	26.490.279
				QAH Pelayanan Publik Lainnya	7	layanan	21.092.679
				QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2	Lembaga	950.965
				QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	9	Badan usaha	28.976.340
				QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	1	Industri	580.701

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	Unit	44.719.505
				RCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Unit	121.178.184
				RDS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	38.815	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	4.009.548.491
				UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	20	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.657.674
Program	**4) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**2.198.509.964**
	RM	1.473.234.241	02 Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama internasional dalam memperkuat transformasi digital bermakna	AAG Peraturan Menteri	3	PerMen, Perka, RPermen	600.000
	BLU	238.747.551		AAH Peraturan lainnya	7	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	700.000
	PNBP	486.528.172		ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	22	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.101.074
				AEA Koordinasi	2	kegiatan	370.000
				AEC Kerja sama	10	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	8.726.014
				BMA Data dan Informasi Publik	1	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	4.897.500
				BMB Komunikasi Publik	40	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	3.759.698
				CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	17	Unit	47.820.158
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	197	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.900.878.629

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	654 Unit, m2, Paket	30.712.198
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.179 Orang, Layanan, Rekomendasi	114.830.253
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	147 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	81.906.877
		PBO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan	2.207.563

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**060**	**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**					**146.050.000.000**
2 Fungsi	**03**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					**146.050.000.000**
3 Program	**1) BD**	**Program Profesionalisme SDM Polri**					**1.388.391.446**
	2) BI	**Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana**					**3.535.735.259**
	3) BP	**Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri**					**54.327.270.881**
	4) BQ	**Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**					**13.708.842.463**
	5) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**73.089.759.951**
Program	**1) BD**	**Program Profesionalisme SDM Polri**					**1.388.391.446**
	RM	1.316.057.721	01 Mewujudkan pengelolaan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara Profesional yang didukung dengan teknologi yang memadai.	ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	215 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	12.757.038
	PNBP	72.333.725		AEC	Kerja sama	857 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	27.150.410
				DBA	Pendidikan Tinggi	1.853 Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	139.645.056
				DBE	Pendidikan Non Gelar	66.080 Orang	680.194.967
				DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	4.510 Orang, Kegiatan	59.325.252
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	876 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	114.954.588
				EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	306.720 Orang, Layanan, Rekomendasi	324.264.502

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	103 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	26.680.655
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	500 Orang, Sertifikat	1.265.243
		SBE	Pendidikan Non Gelar	225 Orang	1.475.400
		SCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	30 Orang, Kegiatan	678.335
Program 2) BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana					**3.535.735.259**
RM 3.481.012.265	01 Polri yang efektif dan adaptif dalam menegakkan hukum secara adil dan akuntabel.	BCE	Penanganan Perkara	165.194 Perkara, Berkas Perkara	2.827.038.608
PNBP 54.722.994		BHB	Operasi Bidang Keamanan	744 operasi, Hari Operasi	4.976.401
		BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	190.869 Produk	115.374.072
		BMA	Data dan Informasi Publik	2.714 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	2.964.633
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	91.565 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	544.787.039
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	960 Orang, Layanan, Rekomendasi	206.703
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4.461 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	16.569.657
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	10 Orang, Sertifikat	175.000
		QCE	Penanganan Perkara	526 Perkara	23.643.146
Program 3) BP Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri					**54.327.270.881**

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	PNBP	3.189.155.825	01 Meningkatnya kualitas pengelolaan altmasus dan sarpras dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal	CAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	47.124 Unit, Paket		47.465.781.525
	BLU	156.480.986		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.537 Unit		641.611.614
	SBSN	666.964.886		CBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	114 unit, Kawasan		1.170.694.836
	RM	48.183.703.108		CCF OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 Unit		1.500.000
	RMP	1.676.332.207		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.277 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		2.195.560.844
	PDN	454.633.869		RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	23 Unit, Paket		2.185.966.076
				RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	804 unit, Kawasan		665.955.986
Program	**4) BQ**	**Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**					**13.708.842.463**
	RM	6.291.535.345	01 Polri yang responsif dan prediktif untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kemampuan personil Polri yang mampu berkoloboratif dan adaptif untuk mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	11 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		893.344
	PNBP	7.417.307.118		AEC Kerja sama	286 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan		22.084.063
				BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	91.273.439 Orang, Akta, Keping, Bidang		4.874.993.445
				BAH Pelayanan Publik Lainnya	7.001 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik		218.800.680
				BHB Operasi Bidang Keamanan	1.211.545 operasi, Hari Operasi		2.117.944.204

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	1.439.730	laporan	2.020.502.570
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	90.986	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.146.303.572
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.554	Orang, Layanan, Rekomendasi	693.850
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.826	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	296.626.735
				QAH Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	10.000.000
Program	**5) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**73.089.759.951**
	PNBP	245.191.031	01 Terbangunnya efektivitas dukungan manajemen terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal	AAH Peraturan lainnya	82	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	2.223.041
	RM	70.298.906.459		ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	52	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	13.272.885
	BLU	2.545.662.461		AEF Sosialisasi dan Diseminasi	53.746	orang	16.836.669
				BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.270.086	Orang, Akta, Keping, Bidang	2.955.472.121
				BJA Penyidikan dan Pengujian Produk	105	Produk	461.190
				BMA Data dan Informasi Publik	1	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	6.014.216
				DDB Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	1	Purwarupa, Desain	2.000.842
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	27.527	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	69.833.746.811
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	287	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.811.187

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	35.346	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	254.468.057
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	195	Layanan, Dokumen, Laporan, Rekomendasi	2.291.534
		QHB Operasi Bidang Keamanan	1	operasi, Hari Operasi	1.161.398

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 063

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**063**	**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**						**2.247.043.158**
2 Fungsi	**07**	**KESEHATAN**						**2.247.043.158**
3 Program	**1) DR**	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**						**708.269.230**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**						**1.538.773.928**
Program	**1) DR**	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**						**708.269.230**
	RM	609.173.515	01	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	384 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	11.710.465
	PNBP	99.095.715	02	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	ACD	Perizinan Lembaga	56 Institusi, Badan Usaha, Registrasi, Ketetapan	1.600.000
			05	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	AEA	Koordinasi	1.064 kegiatan	1.581.260
			06	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	AEE	Kemitraan	1 Kesepakatan	245.000
			07	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	143 NSPK	13.770.974
			08	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	118.155 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	16.264.288
			09	Layanan Publik BPOM yang Prima	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4.254 Lembaga	16.324.862
			10	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	154.589 Orang	44.664.495
					BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	900 UMKM	1.613.845
					BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	24.586 Produk	16.961.944

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 063

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	12	Orang	398.593
		BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	515	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	3.228.215
		BKB Pemantauan produk	770	laporan	21.237.447
		BMB Komunikasi Publik	785	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	1.316.494
		CAB Sarana Bidang Kesehatan	280	Paket, Unit	14.639.621
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	347	Unit	4.795.800
		CBV Prasarana Bidang Kesehatan	12	Unit	168.534.233
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	10	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	533.044
		PCA Perizinan Produk	158.102	Produk, Keputusan	10.238.302
		PDD Standarisasi Lembaga	154	Lembaga, Unit Kerja	87.914.686
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	396.018
		QCD Perkara Hukum Badan Usaha	197	Perkara, Berkas Perkara	27.651.262
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.455	Orang	4.910.546
		QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	861	UMKM	1.490.809
		QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	152	Industri	6.046.364
		QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	65.624	Produk, Laporan, Keputusan	50.748.322
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	31.496	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	57.969.575

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 063
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
				QKB Pemantauan produk	33 laporan, Berkas Perkara	7.688.756
				RAB Sarana Bidang Kesehatan	73 Paket, Unit	107.765.925
				UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	279 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	6.028.085
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**				**1.538.773.928**
	RM	1.532.943.928	01 Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM	AAH Peraturan lainnya	25 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	339.442
	PNBP	5.830.000	02 Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	6 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	266.401
			03 Layanan Publik Sekretariat Utama yang prima	ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	5 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	207.515
			04 Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	ABQ Kebijakan Bidang Aparatur	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	538.595
			05 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	AEC Kerja sama	70 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.742.967
			06 Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	BAH Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	124.250
			07 Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional	BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	190.926
				BMA Data dan Informasi Publik	5 dokumen, Peta, Data	1.000.000
				BMB Komunikasi Publik	2 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	534.644
				CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	63 Unit	1.002.000
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	358 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.510.386.626

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 063
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	55 Unit, m2, Paket	1.310.000
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	6.956 Orang, Layanan, Rekomendasi	2.212.320
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	53 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	8.084.681
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	4 Layanan, Dokumen	733.033
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	712 Orang, Sertifikat	2.068.869
		PEC	Kerja sama	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	119.354
		TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.561 Orang, Layanan, Rekomendasi	6.762.541
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	5 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	1.149.764

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 064

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**				**212.029.784**
2 Fungsi	**02 PERTAHANAN**				**212.029.784**
3 Program	**1) AI Program Pembinaan Ketahanan Nasional**				**59.029.826**
	2) WA Program Dukungan Manajemen				**152.999.958**
Program	**1) AI Program Pembinaan Ketahanan Nasional**				**59.029.826**
	RM 59.029.826	01 Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Nasional dan Daerah dalam Membina Ketahanan Nasional	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	574.755
		02 Meningkatkan Kapabilitas Ketahanan Nasional bagi Pimpinan Nasional	ABC Kebijakan Bidang Politik	5 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	574.755
		03 Terbentuknya Komponen Bangsa yang memahami dan mengimplementasikan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	54 Rekomendasi Kebijakan	4.742.826
		04 Performa Kajian Strategis yang Efektif dan Kredibel	ABN Kebijakan Bidang Sosial	6 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.649.927
		05 Terukurnya Indeks Ketahanan Nasional	AEA Koordinasi	51 kegiatan	3.214.938
		06 Terwujudnya Basis Data Kompetensi Kepemimpinan Nasional yang Kredibel dan Akuntabel	DBE Pendidikan Non Gelar	80 Orang	9.960.918
		07 Terukurnya Indeks Kepemimpinan Nasional	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	5.946 Orang	14.852.830
			SBE Pendidikan Non Gelar	220 Orang	23.458.877
Program	**2) WA Program Dukungan Manajemen**				**152.999.958**
	RM 152.999.958	01 Terwujudnya Manajemen Lemhannas RI yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	AEC Kerja sama	29 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.186.736

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 064

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	17 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	145.123.695
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	612 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.766.762
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	68 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.922.765

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 065

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**065**	**KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**					**775.082.289**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**775.082.289**
3 Program	**1) ED**	**Program Penanaman Modal dan Hilirisasi**					**298.498.642**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**476.583.647**
Program	**1) ED**	**Program Penanaman Modal dan Hilirisasi**					**298.498.642**
	RM	298.498.642	01 Meningkatnya kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan	BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	70	Badan usaha, Penyalur, Hektar	3.025.640
			02 Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal untuk Mendukung Peningkatan Iklim Penanaman Modal	BMA Data dan Informasi Publik	6	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	3.201.546
			03 Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal	BMB Komunikasi Publik	200.000	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	10.000.000
			04 Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	3.136.194
			05 Terwujudnya promosi yang efektif dalam meningkatkan nilai rencana penanaman modal	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan, Rekomendasi	500.000
			06 Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	PAD Peraturan Presiden	1	PerPres, R.Perpres	4.000.000
			07 Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Berusaha yang Berkualitas	PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	68	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	26.875.171
			08 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1	Rekomendasi Kebijakan	5.700.000
			09 Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif	PEB Forum	5	forum	1.000.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 065
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	10 Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	PEC Kerja sama	39 Kesepakatan, Dokumen Kegiatan	8.987.435
	11 Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis	PEG Konferensi dan Event	3 Kegiatan, Paket Kegiatan	7.172.252
	12 Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Penanaman Modal	PEH Promosi	136 promosi, Kegiatan	84.538.214
	13 Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi Penanaman	PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	500.000
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	3 layanan	2.720.119
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	564 Lembaga, Unit Kerja, Tim	7.000.000
		QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	750 UMKM	6.500.000
		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1.015 Badan usaha, Miliar USD	26.945.987
		QIE Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	5 Pemerintah Daerah	3.409.091
		QKC Pemantauan lembaga	1 laporan	500.000
		QMB Komunikasi Publik	2 layanan	4.863.806
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	3 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	86.923.187
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	1.000.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**476.583.647**
RM 476.583.647	01 Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel dan Transparan	BAH Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan	924.947
	02 Terwujudnya organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional	DCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	324 Orang, Kegiatan	959.930

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 065

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	03 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Berakhlak dan Profesional	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	8 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	467.665.774
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	276 Unit, m2, Paket	2.782.833
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	28 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.208.142
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	8 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.042.021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 066

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**066**	**BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)**					**1.516.617.307**
2 Fungsi	**03**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					**1.516.617.307**
3 Program	**1) BL**	**Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**					**144.788.809**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**1.371.828.498**
Program	**1) BL**	**Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**					**144.788.809**
		RM	128.370.000	01 Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	AAH Peraturan lainnya	1 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	49.120
		PNBP	16.418.809	02 Meningkatnya keberdayaan stakeholder dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	219.760
				03 Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan program rehabilitasi narkoba yang berkelanjutan	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.166.549
				04 Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset jaringan pelaku kejahatan narkoba	ADD Standarisasi Lembaga	7 Lembaga, Unit Kerja	1.180.000
				05 Meningkatnya kualitas sistem hukum penanganan kejahatan narkoba dan kolaborasi lintas instansi	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	30 Orang, Sertifikat	1.486.000
					AEA Koordinasi	3 kegiatan	75.000
					AEC Kerja sama	5 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	275.000
					AED Perjanjian	4 perjanjian	150.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 066

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	9 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	5.277.756
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	79.354 Orang, Akta, Bidang, Laporan	49.828.396
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	236 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	105.752
		BCA	Perkara Hukum Perseorangan	109 Perkara, Berkas Perkara	9.885.805
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.044 Lembaga, Unit Kerja, Tim	6.288.603
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	60 Kelompok Masyarakat	1.496.000
		BHB	Operasi Bidang Keamanan	9 operasi, Hari Operasi	5.345.467
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	68 Produk	1.992.980
		BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	236 Orang, Laporan	2.238.480
		BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	12.004 Produk	4.190.000
		BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	3.041 laporan	8.372.482
		BKC	Pemantauan lembaga	60 laporan	217.983
		BMA	Data dan Informasi Publik	2 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	715.500
		DCJ	Pelatihan Bidang Sosial	1.185 Orang	3.367.855
		DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	250 Orang	1.084.680
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	16 Layanan, Perkara	281.120
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	336.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 066

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan	850.500
		PDD Standarisasi Lembaga	20 Lembaga	3.525.476
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	22.100.000 orang	3.386.980
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	8.554 Orang, Akta, Keping, Bidang	9.411.911
		QCA Perkara Hukum Perseorangan	2 Perkara	2.441.270
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	170 Lembaga	3.950.000
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	277 Kelompok Masyarakat	11.520.464
		SCJ Pelatihan Bidang Sosial	950 Orang, Kegiatan	2.733.020
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	342.400
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**1.371.828.498**
RM 1.371.828.498	01 Meningkatnya kapabilitas kelembagaan yang profesional, adaptif, dan berbasis transformasi digital	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	315 Orang	188.000
	02 Meningkatnya kualitas pengawasan internal berbasis risiko dalam pengelolaan akuntabilaitas kinerja dan sumber daya organisasi	CCF OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	49 Unit	45.000.000
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.999 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.317.211.759
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	24 Unit, m2, Paket	349.800
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	3.150 Orang, Layanan, Rekomendasi	2.575.793
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	458 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.503.146

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 068

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**068**	**KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**				**3.637.975.239**
2 Fungsi	**07**	**KESEHATAN**				**3.637.975.239**
3 Program	**1) DJ**	**Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana**				**359.305.641**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**3.278.669.598**
Program	**1) DJ**	**Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana**				**359.305.641**
	RM	350.908.473	01 Meningkatnya Kualitas Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)	ABN Kebijakan Bidang Sosial	8 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	500.000
	PNBP	79.168	02 Meningkatnya Ketahanan Keluarga Sesuai Siklus Hidup	ADE Akreditasi Lembaga	2 Lembaga, Unit Kerja	356.447
	HLN	8.318.000	03 Meningkatnya Sinergi Kebijakan Pengendalian Penduduk secara Holistik dan Komprehensif	AEH Promosi	38 promosi, Kegiatan	2.500.000
			04 Meningkatnya Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang Komprehensif Berbasis Kewilayahan dan Fokus pada Segmentasi Sasaran	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	85 Lembaga, Unit Kerja, Tim	10.782.380
			05 Meningkatnya Kualitas Penggerakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Kolaboratif	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	5.032.960
			06 Terwujudnya Ekosistem Evidence-Based Policy Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	4 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	263.150
				FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32 Laporan, Rekomendasi	3.335.001

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 068

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.523 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.100.325
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	190.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.607.061 Orang	5.420.000
		QEI	Bantuan Lembaga	21.580 Lembaga	303.000.000
		RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	1.500.000
		SCJ	Pelatihan Bidang Sosial	558 Orang, Kegiatan	2.025.258
		UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	12 Laporan, Rekomendasi	2.662.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.306 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	19.638.120
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**3.278.669.598**
RM 3.278.669.598	01 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang Akuntabel dan Berintegritas	AEA	Koordinasi	3 kegiatan	200.000
	02 Terwujudnya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang Akuntabel dan Berintegritas	AEH	Promosi	38 promosi	1.042.000
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	98 Unit	3.200.000
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	74 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.241.329.001
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13 Unit, m2, Paket	21.800.000
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	8.862 Orang, Layanan, Rekomendasi	5.868.597

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 068

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	18 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.750.000
		FAA	Kearsipan	1 Arsip	150.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	330.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 074

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**074**	**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**					**161.624.725**
2 Fungsi	**03**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					**161.624.725**
3 Program	**1) BG**	**Program Pemajuan dan Penegakan HAM**					**30.180.783**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**131.443.942**
Program	**1) BG**	**Program Pemajuan dan Penegakan HAM**					**30.180.783**
	RM	30.180.783	01 Meningkatnya pemahaman HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan dan Praktik Bisnis	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	9	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.040.948
			02 Meningkatnya Penanganan Pelanggaran HAM yang Optimal	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	2.660	orang	2.503.866
			03 Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	800.000
			04 Terwujudnya Perangkat Standar Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Komprehensif, Inklusif, Efektif, Sistemik, Berkelanjutan, Berbasis Kepulauan dan Digital	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	1	Orang, Akta, Bidang, Laporan	322.853
			05 Meningkatnya Inisiatif Kebijakan Kondusif dan Penyikapan atas Kebijakan Diskriminatif untuk Mendukung Infrastruktur dan Sumber Daya Memadai dalam Memperkuat Sistem Penanganan, Pemulihan, dan Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Diskriminasi	BCC Perkara Hukum Kelompok Masyarakat	5.464	Perkara, Berkas Perkara	5.037.792
				BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	2	laporan	970.234
				FAB Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	610.575
				PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	18	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.394.515

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 074

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	400 Orang, Akta, Bidang, Laporan	2.000.000
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	10 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	2.500.000
		QIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	3 Pemerintah Daerah	1.500.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**131.443.942**
RM 131.443.942	01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan	AEA	Koordinasi	1 kegiatan	664.521
	02 Menguatnya Kredibilitas dan Legitimasi Mekanisme Khusus HAM Perempuan melalui Peningkatan Daya Tanggap Daya Pengaruh dan Tata Kelola Komnas Perempuan	AEB	Forum	3 forum	2.142.682
		AEC	Kerja sama	15 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	961.498
		BMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	400.000
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	20 Unit	666.000
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	33 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	115.383.546
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	32 Unit, Paket	2.832.043
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	61 Orang, Layanan, Rekomendasi	2.511.386
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	27 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.822.266
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	60.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 075

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**075**	**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**				**2.675.438.903**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**				**2.675.438.903**
3 Program	**1) GJ**	**Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika**				**1.369.894.535**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**1.305.544.368**
Program	**1) GJ**	**Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika**				**1.369.894.535**
	RM	669.336.009	01 Meningkatnya layanan informasi Meteorologi terbaik (excellent services) guna mendukung konsep Early Warning for All	AAG Peraturan Menteri	1 PerMen, Perka, RPermen	167.650
	SBSN	122.001.850	02 Tersedianya Layanan Klimatologi yang Prima	ADD Standarisasi Lembaga	18 Lembaga, Unit Kerja	756.186
	PNBP	103.483.619	03 Meningkatnya Layanan Geofisika yang Berkualitas dan Prima	ADE Akreditasi Lembaga	2 Lembaga	200.636
	PLN	476.073.057	04 Meningkatnya Layanan Infrastruktur MKG untuk Mendukung Layanan MKG yang Prima	AEA Koordinasi	116 kegiatan	8.920.507
			05 Meningkatnya Layanan Modifikasi Cuaca yang Prima	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	25 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	112.987
				BAH Pelayanan Publik Lainnya	9 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	4.009.092
				BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	200 Orang	1.112.614
				BMA Data dan Informasi Publik	2 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	150.000
				BMB Komunikasi Publik	2 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	500.000
				CAD Sarana Bidang Konektivitas Udara	22 Unit, Paket	21.972.534

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 075
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	Unit	380.000
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Unit	1.215
		CCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17.720	Unit	472.302.212
		CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	626	Unit	149.162.754
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	813	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	4.003.184
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	Laporan, Layanan	611.412
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	2.655	orang	3.047.547
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.870	Orang	6.403.826
		RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5	Unit	122.001.850
		RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	1	Unit	475.073.057
		ROG OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.884	Unit	99.005.272
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**1.305.544.368**
RM 1.304.535.078	01 Meningkatnya Tata Kelola Dukungan Manajemen Yang Baik Dalam Mendukung Transformasi Organisasi BMKG Berkelas Dunia	AAG Peraturan Menteri	1	PerMen, Perka	100.000
PNBP 1.009.290		AAH Peraturan lainnya	25	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	36.500
		ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	503.809

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 075
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		ADA	Standarisasi Produk	3 produk, Ekor, Peralatan, Rekomendasi, Standar	228.762
		ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	100 Orang	100.000
		AEA	Koordinasi	2 kegiatan	200.000
		AEC	Kerja sama	167 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	460.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	705.000
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	87.429
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	203 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.279.264.174
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	36 Unit, m2, Paket	3.808.694
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	7.717 Orang, Layanan, Rekomendasi	16.045.500
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	45 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.812.340
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	60 Orang	187.660
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2 Laporan, Rekomendasi	4.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 076

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**076 KOMISI PEMILIHAN UMUM**				**3.539.587.941**
2 Fungsi	**01 PELAYANAN UMUM**				**3.539.587.941**
3 Program	**1) CQ Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum**				**87.304.002**
	2) WA Program Dukungan Manajemen				**3.452.283.939**
Program	**1) CQ Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum**				**87.304.002**
	RM 87.304.002	01 Tersedianya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	ABC Kebijakan Bidang Politik	555 Rekomendasi Kebijakan	4.062.150
		02 Tersedianya Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	3 Lembaga	3.000.000
		03 Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pilkada yang Ditetapkan	BBB Layanan Bantuan Hukum Lembaga	1 Institusi, Lembaga	3.003.750
		04 Terwujudnya Layanan kepada Publik dengan Baik	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.766 Lembaga	9.837.902
		05 Tersedianya Data Peserta Pemilu sesuai Ketentuan yang Berlaku	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.658 Lembaga	67.400.200
Program	**2) WA Program Dukungan Manajemen**				**3.452.283.939**
	RM 3.452.283.939	01 Terlaksananya Program Reformasi Birokrasi sesuai Ketentuan yang Berlaku	BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	555 Lembaga	5.611.520
		02 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.347 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.385.223.859
		03 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPU	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.958 Orang, Layanan, Rekomendasi	20.616.541

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 076

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	04 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.671 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	21.101.280
	05 Tersedianya Data Pemilih yang Valid sesuai Ketentuan yang Berlaku	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.222 Lembaga	19.730.739
	06 Terwujudnya Integrasi Data dan Sistem Informasi Pemilu yang Baik			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 077

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**077**	**MAHKAMAH KONSTITUSI RI**					**379.335.542**
2 Fungsi	**03**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					**379.335.542**
3 Program	**1) BJ**	**Program Penanganan Perkara Konstitusi**					**201.519.340**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**177.816.202**
Program	**1) BJ**	**Program Penanganan Perkara Konstitusi**					**201.519.340**
	RM	201.519.340	01 Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.155.000
			02 Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	AEC Kerja sama	3	Kesepakatan	7.125.000
			04 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis dan Literasi Konstitusi	BCE Penanganan Perkara	192	Perkara	169.298.440
			05 Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	300	Orang	90.000
				BMA Data dan Informasi Publik	14	dokumen, Peta, Data	6.023.000
				CAQ Sarana Bidang Hukum	131	Unit	16.477.900
				PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1	Rekomendasi Kebijakan	250.000
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.500	Orang	200.000
				RAQ Sarana Bidang Hukum	1	Unit, Kajian	600.000
				UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	100.000
				UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	Laporan, Layanan	200.000
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**177.816.202**

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 077
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
RM	177.816.202	01 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Tepercaya	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	162.675.642
		02 Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6 Unit, m2, Paket	11.273.210
		03 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	156 Orang, Layanan, Rekomendasi	2.626.600
		04 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan SDM MK yang Profesional	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	54 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.040.750
			PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2 Rekomendasi Kebijakan	200.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 078

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**078**	**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)**					**333.577.080**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**333.577.080**
3 Program	**1) BE**	**Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme**					**82.095.202**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**251.481.878**
Program	**1) BE**	**Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme**					**82.095.202**
	RM	82.095.202	01 Meningkatnya Kebermanfaatan Data Pelaporan PPATK dan Kepatuhan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM	AAH Peraturan lainnya	19	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	699.651
			02 Meningkatnya Tindak Lanjut Produk Intelijen Keuangan PPATK (PIK)	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	33	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.721.493
			03 Meningkatnya Efektivitas Strategi, Kebijakan dan Regulasi APU PPT dan PPSPM	AEC Kerja sama	23	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	2.007.493
			04 Meningkatnya Efektivitas Kerjasama APU PPT dan PPSPM	BCE Penanganan Perkara	890	Perkara	4.338.289
			05 Terwujudnya Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Informasi PPATK	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.565	Lembaga, Unit Kerja, Tim	950.114
				BKC Pemantauan lembaga	209	laporan	3.090.067
				BMA Data dan Informasi Publik	18	dokumen, Peta, Data	349.255
				CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	59	Unit	45.379.412
				DCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	23	Orang, Kegiatan	1.836.234

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 078

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		DCG	Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	11 Orang	1.777.143
		PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5 Rekomendasi Kebijakan	3.681.285
		PEC	Kerja sama	20 Kesepakatan	4.724.713
		QCE	Penanganan Perkara	127 Perkara	5.540.053
		RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	5.000.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**251.481.878**
RM 251.481.878	01 Meningkatnya Tata Kelola Internal PPATK	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	30 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	243.076.094
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	179 Unit, m2, Paket	4.300.000
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	401 Orang, Layanan, Rekomendasi	3.213.007
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	86 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	892.777

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 083

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**083**	**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)**					**2.271.253.362**
2 Fungsi	**05**	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**					**2.271.253.362**
3 Program	**1) GI**	**Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial**					**2.118.731.472**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**152.521.890**
Program	**1) GI**	**Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial**					**2.118.731.472**
	RM	60.050.305	01 Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Dasar termutakhir di wilayah Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial	BAH Pelayanan Publik Lainnya	130 layanan		1.116.767
	PNBP	1.962.080	05 Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai informasi geospasial secara elektronik	BMA Data dan Informasi Publik	6 dokumen, Peta, Data		7.727.078
	PLN	2.056.719.087	06 Meningkatnya pertumbuhan industri geospasial	CAA Sarana Bidang Pendidikan	1 Paket, Unit		3.140.597
			09 Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia	CBR Dukungan Teknis	1 Dokumen		21.628.230
			10 Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis cloud secara berkelanjutan	CCI OM Sarana Pengembangan Kawasan	1.059 Unit, Hektar		30.178.300
			11 Meningkatnya kapabilitas SDM Bidang IG	DCB Pelatihan Bidang Infrastruktur	140 Orang, Kegiatan		845.313
			12 Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan Informasi Geospasial pada standar penyelenggaraan Informasi Geospasial	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1 Orang, Layanan, Rekomendasi		8.847.420
			13 Berkembangnya teknologi penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk seluruh pengguna IG	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan		2.364.120

SK No 160648 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 083
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	14 Terselenggaranya Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial	PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	13.726.762
	15 Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial	QMA Data dan Informasi Publik	17 dokumen, Peta, Data	1.731.809.847
	16 Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial	RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	267.475.033
		RDS OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	29.872.005
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**152.521.890**
RM 152.521.890	01 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	152.521.890



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 084

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**084**	**BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)**						**190.003.227**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**						**190.003.227**
3 Program	**1) EJ**	**Program Standardisasi Nasional**						**44.183.600**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**						**145.819.627**
Program	**1) EJ**	**Program Standardisasi Nasional**						**44.183.600**
		PNBP	44.183.600	03 Meningkatnya ketersediaan LPK untuk mendukung produk Indonesia	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	15 layanan	572.720
				04 Meningkatnya ketertelusuran pengukuran Nasional ke Sistem Internasional	PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	45 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
					PDA	Standarisasi Produk	405 produk	1.895.000
					PDE	Akreditasi Lembaga	2.895 Lembaga	25.428.502
					PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	52 NSPK	5.758.791
					QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.760 Orang, Akta, Bidang, Laporan	1.887.480
					QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.000 UMKM	3.000.000
					QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	810 Industri, IKM, Miliar USD	2.000.000
					QJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	2.020 Unit	2.641.107
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**						**145.819.627**
		RM	144.139.057	01 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	BMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	1.036.092
		PNBP	1.680.570		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	142.474.913
					EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	732 Orang, Layanan, Rekomendasi	650.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 084
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	6 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	910.000
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	644.478
		PEC Kerja sama	2 Kesepakatan	104.144

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 085

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**085**	**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**					**117.741.540**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**117.741.540**
3 Program	**1) KB**	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**					**13.595.786**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**104.145.754**
Program	**1) KB**	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**					**13.595.786**
	PNBP	11.656.786	01 Meningkatnya Kualitas Perizinan dalam Keselamatan dan Keamanan di Fasilitas Kesehatan dan Industri	ACB Perizinan Masyarakat	1.300	Orang	2.225.000
	RM	1.939.000	02 Meningkatnya Kualitas Inspeksi dalam Keselamatan dan Keamanan di Fasilitas Kesehatan dan Industri	ACD Perizinan Lembaga	3.033	Institusi, Badan Usaha, Lembaga	2.865.197
			03 Meningkatnya Kualitas Peraturan ketenaganukliran bidang Kesehatan dan Industri	ADC Sertifikasi Produk	600	produk	188.737
			04 Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan ketenaganukliran bidang Kesehatan dan Industri	ADF Sertifikasi Lembaga	31	Lembaga, Badan Usaha	278.700
			05 Meningkatnya Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Kesehatan, Industri dan Penelitian/Lingkungan Hidup	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	160	Orang	490.304
			06 Meningkatnya Kinerja Perizinan Instalasi Nuklir	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	2.500.000
			07 Meningkatnya Kinerja Inspeksi Instalasi Nuklir	PAC Peraturan Pemerintah	1	PP, RPP	300.000
			08 Meningkatnya Kualitas Peraturan ketenaganukliran bidang Instalasi Nuklir	PEA Koordinasi	1	kegiatan, RUU	200.000
			09 Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Bidang Instalasi Nuklir	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	238	Lembaga	2.608.848

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 085

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	11 Meningkatnya Kinerja Inspeksi PLTN	RDH OP Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana	39 unit	1.939.000
	12 Meningkatnya Kualitas Peraturan ketenaganukliran bidang Energi (PLTN)			
	13 Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Bidang Energi			
	14 Terpenuhinya Infrastruktur Pengkajian Keselamatan Nuklir			
	15 Meningkatnya Infrastruktur Keselamatan, Keamanan dan Safeguards			
	16 Meningkatnya Infrastruktur Layanan Perizinan PLTN			
	17 Meningkatnya Kualitas Sistem Kesiapsiagaan Nuklir dan Respons Kedaruratan Nuklir			
	18 Meningkatnya Infrastruktur Sistem Kesiapsiagaan Nuklir Nasional			
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**104.145.754**
RM 104.145.754	01 Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	104.145.754
	02 Meningkatnya Kualitas Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			
	03 Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum			
	04 Meningkatnya Kualitas Kebijakan			
	05 Meningkat dan Menguatnya Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Ketenaganukliran			
	06 Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan			
	07 Meningkatnya Kualitas Laporan BMN			

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 085

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	08 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 09 Meningkatnya Kualitas Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan 10 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan 11 Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik 12 Meningkatnya Kualitas SDM 13 Meningkatnya Kualitas Layanan TIK		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 086

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA					293.349.382
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					274.594.287
	10	PENDIDIKAN					18.755.095
3 Program	1) CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN					47.221.775
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					246.127.607
Program	1) CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN					47.221.775
	PNBP	45.141.508	01 Meningkatnya kualitas kebijakan instansi pemerintah di Bidang Administrasi Negara	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	81 Rekomendasi Kebijakan	2.821.488
	RM	2.080.267	02 Meningkatnya kualitas Jabatan Fungsional bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara	ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000
			03 Terwujudnya Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara	ADE	Akreditasi Lembaga	30 Lembaga, Unit Kerja	1.272.228
			04 Meningkatnya ASN yang mendapatkan akses pembelajaran	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	765 Orang, Sertifikat	1.076.950
			05 Meningkatnya Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara	BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	36 Kelompok Masyarakat	1.054.702
			06 Meningkatnya daya saing Pendidikan Tinggi dalam Mendukung Pengembangan Administrasi Negara	DBA	Pendidikan Tinggi	15.152 Orang	14.878.905
				FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	4.260 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	25.446.726
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2 Laporan, Rekomendasi	470.776
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					246.127.607
	PNBP	8.941.198	01 Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Kolaboratif	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10 Unit	150.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 086

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
RM 237.186.409		CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8 Unit	2.499.694
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	35 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	242.027.465
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3 Unit, m2, Paket	536.200
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	283 Orang, Layanan, Rekomendasi	786.000
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	128.248

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 087

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**087**	**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**					**279.335.383**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**279.335.383**
3 Program	**1) CN**	**Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional**					**93.268.438**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**186.066.945**
Program	**1) CN**	**Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional**					**93.268.438**
	PNBP	16.201.428	01 Penguatan Tata Kelola Kearsipan Nasional	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	11 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	693.024
	RM	17.067.010	02 Percepatan Digitalisasi Arsip	ADE	Akreditasi Lembaga	15 Lembaga, Unit Kerja	368.400
	SBSN	60.000.000	03 Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	1.540 Orang, Sertifikat	1.475.600
			04 Peningkatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan melalui JIKN	AEG	Konferensi dan Event	1 Kegiatan	31.345
				AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	16.680
				BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	20.100 Orang, Akta, Keping, Bidang	131.523
				BAH	Pelayanan Publik Lainnya	507 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	5.763.841
				BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	109 Lembaga, Unit Kerja, Tim	122.910
				BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	300 Orang	13.260
				BMA	Data dan Informasi Publik	4 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	104.608
				CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	7 Unit	559.980



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 087

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	400.000
		DCI Pelatihan Bidang Pendidikan	2.050	Orang, Kegiatan	7.700.000
		DDD Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	1	kekayaan intelektual	87.472
		FAA Kearsipan	159.657	Dokumen, Arsip	2.400.107
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	4	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	2.326.880
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.360	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	191.565
		FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	60	Lembaga	20.760
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	160	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	749.926
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	497.413	Orang, Akta, Bidang, Laporan	1.846.338
		RBN Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	2	unit	60.000.000
		UAA Kearsipan	701.483	Dokumen, Arsip	6.716.343
		UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	147	Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	1.547.876
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**186.066.945**
RM 184.301.554	01 Peningkatan manajemen internal yang bersih dan transparan	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11	Unit	1.217.296
PNBP 1.765.391		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	23	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	179.247.323
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	112	Unit, m2, Paket	2.947.831

SK No 160638 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 087

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.000 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.475.526
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	32 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.178.969

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 088

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA				639.467.823
2 Fungsi	01 PELAYANAN UMUM				639.467.823
3 Program	1) CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN				19.413.322
	2) WA Program Dukungan Manajemen				620.054.501
Program	1) CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN				19.413.322
	PNBP 19.413.322	01 Terwujudnya pelayanan unggul dalam pengelolaan kepegawaian, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN strategis	ABQ Kebijakan Bidang Aparatur	1 Rekomendasi Kebijakan	212.048
		02 Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis mobilitas talenta	ADE Akreditasi Lembaga	20 Lembaga	500.000
		03 Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperabel dan mendukung kebijakan berbasis bukti	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3 NSPK	977.737
		04 Meningkatnya kepatuhan atas kebijakan manajemen ASN dan prinsip meritokrasi	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	169.949 Orang, Akta, Bidang, Laporan	13.929.787
			FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.105 Orang	3.793.750
Program	2) WA Program Dukungan Manajemen				620.054.501
	RM 578.612.011	01 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengendalian internal BKN	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	17 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	578.612.011
	PNBP 4.799.741	02 Terwujudnya meritokrasi dan profesionalitas ASN BKN	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	21 Unit, m2, Paket	41.442.490
	SBSN 36.642.749	03 Terwujudnya digital BKN			
		04 Meningkatnya kapasitas pengelolaan kebijakan dan kearsipan BKN			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 089

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)						2.374.938.553
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						2.374.938.553
3 Program	1) CH	Program Pengawasan Pembangunan						395.535.656
	2) WA	Program Dukungan Manajemen						1.979.402.897
Program	1) CH	Program Pengawasan Pembangunan						395.535.656
	RM	219.154.795	11	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	AAH	Peraturan lainnya	1 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	910.000
	PNBP	55.681.001	12	Meningkatnya Kesadaran K/L di Lingkungan Kedeputian Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	AEA	Koordinasi	5 kegiatan	19.599.794
	PLN	120.699.860	21	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	BMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	1.476.781
			22	Meningkatnya Kesadaran K/L di Lingkungan Kedeputian Bidang PIP Bidang Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	692.580
			31	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	1.027.468
			32	Meningkatnya Kesadaran K/L/D di Lingkungan Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	84 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.093.087
			41	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	12.824.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 089

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	42 Meningkatnya Kesadaran K/L/D di Lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern	FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	28.182	Orang	173.655.115
	51 Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang Akuntan Negara	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	12	Laporan, Layanan	1.165.084
	52 Meningkatnya Kesadaran K/L/BU di Lingkungan Kedeputian Akuntan Negara dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern	FAG Pengawasan Pembangunan	321	Laporan, Layanan	145.603.539
	61 Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang Investigasi	UAG Pengawasan Pembangunan	149	Laporan	35.488.208
	62 Meningkatnya Kesadaran K/L/D/BU di Lingkungan Kedeputian Bidang Investigasi dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern				
	71 Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional di Lingkungan Perwakilan BPKP				
	72 Meningkatnya Kesadaran Pemerintah Daerah dan Badan Usaha di Lingkungan Perwakilan BPKP dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern				
	81 Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Pengawasan				
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**1.979.402.897**
RM 1.671.074.012	01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BPKP	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	99	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.546.473.197
PNBP 22.349.035		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.039	Unit, m2, Paket	389.890.196
PLN 285.979.850		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	11.540	Orang, Layanan, Rekomendasi	28.572.489

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 089

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	5 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	14.467.015



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**090**	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**					**1.400.364.230**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**1.387.814.230**
	10	**PENDIDIKAN**					**12.550.000**
3 Program	**1) EE**	**Program Perdagangan Luar Negeri**					**97.980.481**
	2) EF	**Program Perdagangan Dalam Negeri**					**37.887.230**
	3) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**1.264.496.519**
Program	**1) EE**	**Program Perdagangan Luar Negeri**					**97.980.481**
	RM	93.293.802	01 Meningkatnya Ekspor Produk Bernilai Tambah Berbasis Kewilayahan serta penguatan partisipasi Indonesia dalam ranta nilai global	ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	9	Rekomendasi Kebijakan	739.854
	PNBP	4.686.679	02 Meningkatnya Efektifitas Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	AEH Promosi	5	promosi, Kegiatan	2.350.000
			03 Meningkatnya Akses Pasar Barang dan Jasa Indonesia di Pasar Internasional	BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	700.000	Badan usaha	400.000
			04 Tersedianya Dukungan atas Pengamanan Kebijakan Nasional serta Tata Aturan yang Kondusif Bagi Perdagangan Internasional Indonesia	BCE Penanganan Perkara	1	Perkara	534.453
			05 Tercapainya Efektivitas Implementasi dan Pemahaman Hasil Perundingan Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA	PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	213	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	13.685.138
			07 Meningkatnya Produk Ekspor yang Berdaya Saing	PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	40	Orang	84.082
				PEA Koordinasi	7	kegiatan	80.833
				PEB Forum	3	forum	396.655
				PEC Kerja sama	11	Kesepakatan	2.823.777
				PED Perjanjian	3	perjanjian	1.356.953

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				PEF Sosialisasi dan Diseminasi	215	orang	539.000
				PEG Konferensi dan Event	70	Kegiatan	30.731.514
				PEH Promosi	48	promosi	34.733.336
				QAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	708.073	Badan usaha	3.327.501
				QCB Perkara Hukum Lembaga	27	Perkara	574.280
				QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	46	Lembaga	225.000
				QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	30	UMKM	600.000
				QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	180	Badan usaha	1.761.360
				SCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1.288	Orang	2.878.475
				UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	158.270
Program	**2) EF**	**Program Perdagangan Dalam Negeri**					**37.887.230**
	RM	22.785.047	01 Meningkatnya Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	AAH Peraturan lainnya	5	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	182.600
	PNBP	15.102.183	02 Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan Jasa	ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	12	Rekomendasi Kebijakan	2.344.088
			03 Meningkatnya Penetrasi Produk Dalam Negeri	ACA Perizinan Produk	169	Produk	264.958
			05 Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab	ACB Perizinan Masyarakat	500	Orang	24.250
			06 Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran	ACD Perizinan Lembaga	503	Institusi, Badan Usaha, Lembaga	144.980
			07 Meningkatnya Integrasi Perdagangan Domestik	ADC Sertifikasi Produk	14.002	produk	3.937.989
			08 Meningkatnya Hasil Pembinaan Usaha dan Pelaku Usaha Perdagangan	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	230	Orang	150.548

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	09 Meningkatnya Kinerja Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang tangguh dan berkelanjutan	AEA Koordinasi	4	kegiatan	238.738
	11 Pengembangan Upaya Perlindungan Konsumen yang Efektif	AEC Kerja sama	1	Kesepakatan	152.000
	12 Meningkatnya Ketahanan Pasar Dalam Negeri terhadap Lonjakan Impor, Barang Dumping, dan Barang Mengandung Subsidi	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	1.000	orang	400.000
		AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	50.000
		BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	100	Orang, Akta, Bidang, Laporan	300.000
		BBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	6	Orang	131.250
		BCB Perkara Hukum Lembaga	5	Perkara	131.250
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7	Lembaga	282.000
		BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7	Lembaga	296.875
		BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	46	Badan Usaha	625.000
		BJA Penyidikan dan Pengujian Produk	85	Produk	1.516.774
		BMA Data dan Informasi Publik	9	dokumen, Peta, Data	67.410
		CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	4	Unit	2.785.490
		CCH OP Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	177	Unit	2.957.950
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	89.490
		PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	4	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	867.332
		PDC Sertifikasi Produk	7.500	produk	1.323.280
		PEA Koordinasi	4	kegiatan	397.590



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				PEB Forum	3	forum	791.385
				PEF Sosialisasi dan Diseminasi	190	orang	76.000
				PEH Promosi	1	promosi	1.479.349
				QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	263	Lembaga	1.988.571
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.655	Orang	1.016.800
				QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	480	UMKM	745.920
				QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	360	Badan usaha	751.660
				QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	4.884	Produk	3.299.988
				QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	79	Lembaga	1.093.380
				QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	200	Badan Usaha	529.484
				QJA Penyidikan dan Pengujian Produk	3.750	Produk	2.000.000
				QMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	3.276.068
				RAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1	Unit	500.000
				RCH OP Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	2	Unit	586.883
				UAB Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	90.000
Program	**3) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**1.264.496.519**
	RM	1.239.755.485	01 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	16	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.529.500
	PNBP	24.741.034	02 Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih	ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1	Rekomendasi Kebijakan	470.000
			04 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	130	Orang	168.880
			05 Meningkatnya Profesionalisme ASN Perdagangan	AEA Koordinasi	9	kegiatan	2.269.178

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	06 Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Perdagangan	AEC	Kerja sama	7 Kesepakatan	237.908
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	250 orang	100.000
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7 layanan	5.700.000
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	100 Orang	5.360
		BMA	Data dan Informasi Publik	14 dokumen, Peta, Data	1.393.664
		BMB	Komunikasi Publik	1 layanan	743.681
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	167 Unit	4.554.936
		CBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	25 unit	1.485.000
		CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.237 Unit	9.321.290
		CDL	OP Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	2 unit	7.562.977
		DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	1 Purwarupa	22.440
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	155 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.193.045.207
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	46 Unit, m2, Paket	2.987.980
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	4.464 Orang, Layanan, Rekomendasi	6.960.602
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	131 Layanan, Rekomendasi	9.737.051
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	20 Sistem Informasi	13.511.930
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	407 Orang	643.926
		SBA	Pendidikan Tinggi	260 Orang	1.000.009

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	45.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 092

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**092**	**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**						**1.156.000.000**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**						**357.550.000**
	08	**PARIWISATA**						**554.637.267**
	10	**PENDIDIKAN**						**243.812.733**
3 Program	**1) DA**	**Program Keolahragaan**						**741.950.000**
	2) DB	**Program Kepemudaan**						**56.500.000**
	3) WA	**Program Dukungan Manajemen**						**357.550.000**
Program	**1) DA**	**Program Keolahragaan**						**741.950.000**
	RM		708.950.000	01 Meningkatnya budaya masyarakat dalam berolahraga	AEA	Koordinasi	8 kegiatan	1.614.477
	BLU		33.000.000	02 Pertumbuhan iklim industri olahraga nasional	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8 NSPK	2.707.096
				03 Meningkatnya Berprestasi Olahraga Tingkat Regional dan Internasional	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan	11.699.095
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	21 Lembaga	534.001
					BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	100 Orang	1.900.000
					BEI	Bantuan Lembaga	5 Lembaga	2.057.600
					BMA	Data dan Informasi Publik	2 dokumen, Peta, Data	2
					EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.581.476
					EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20 Unit, m2, Paket	4.911.145
					EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	12.808.284
					PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	13 Rekomendasi Kebijakan	7.461.356

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 092

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	1.000	Orang	21.000.000
		PEA Koordinasi	32	kegiatan	5.185.869
		PEC Kerja sama	1	Kesepakatan	3.000.000
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	12.254.744
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	148	Lembaga	22.474.587
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	21.288	Orang	476.046.512
		QEA Bantuan Masyarakat	10	Orang	2.000.000
		QEI Bantuan Lembaga	406	Lembaga	150.713.756
Program 2) DB Program Kepemudaan					**56.500.000**
RM 56.500.000	01 Meningkatnya kualitas hidup generasi pemuda dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemuda, Kesehatan Pemuda, Ketenagakerjaan Layak Pemuda, Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda, serta Inklusivitas dan Kesetaraan Gender	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan, Layanan	1.410.340
		PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	4	Rekomendasi Kebijakan	594.000
		PEA Koordinasi	52	kegiatan	18.374.106
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	15	Lembaga	4.156.505
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6.577	Orang	24.577.769
		QEI Bantuan Lembaga	40	Lembaga	7.364.780
		UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan, Layanan	22.500
Program 3) WA Program Dukungan Manajemen					**357.550.000**
RM 357.550.000	01 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Bidang Pemuda dan Olahraga yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima	AAH Peraturan lainnya	10	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	138.600

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 092

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	02 Meningkatnya kualitas telaahan strategis bidang Pemuda dan Olahraga	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan	147.124
		AEA	Koordinasi	3 kegiatan	361.600
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan	685.569
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	231.641
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	21 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	323.350.182
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.425 Unit, m2, Paket	3.000.000
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	4 Orang, Layanan, Rekomendasi	9.755.920
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	16.802.383
		FAA	Kearsipan	200 Arsip	1.156.981
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	22 Sistem Informasi	20.000
		PAC	Peraturan Pemerintah	2 PP, RPP	400.000
		PAD	Peraturan Presiden	3 PerPres, R Perpres	600.000
		PAG	Peraturan Menteri	6 PerMen, Perka	900.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 093

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**093**	**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**					**1.581.860.653**
2 Fungsi	**03**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					**1.581.860.653**
3 Program	**1) BC**	**Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi**					**329.770.836**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**1.252.089.817**
Program	**1) BC**	**Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi**					**329.770.836**
	RM	329.770.836	06 Meningkatnya Integritas Sistem dalam Penyelenggaraan Pemerintahan_01	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	825 Orang, Sertifikat	3.502.108
			07 Meningkatnya Efektivitas Penerapan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan_02	AEA	Koordinasi	14 kegiatan	7.162.611
			08 Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi_03	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	250.000 orang	10.473.280
			09 Menguatnya Nilai Antikorupsi Masyarakat_04	BCE	Penanganan Perkara	550 Perkara	104.972.998
			10 Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi_05	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	8.799 Orang	5.791.170
			11 Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi_06	BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	400.320 Orang, Kelompok Masyarakat	3.119.704
			12 Terwujudnya Digitalisasi Pemberantasan Korupsi Berbasis Data dan Pendekatan Kolaboratif_07	BMA	Data dan Informasi Publik	11 dokumen, Peta, Data	2.086.500
				CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	40 Unit	53.888.196
				CBR	Dukungan Teknis	2 Dokumen	2.176.554
				DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	10.000 Orang	962.547

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 093
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	5 Sistem Informasi	10.260.000
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.734 Laporan, Layanan	69.638.125
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	3.329.595
		FBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	25 Desa, DesaKelurahan	614.701
		PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4 Rekomendasi Kebijakan	5.970.594
		PBQ Kebijakan Bidang Aparatur	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	12.289.980 orang	21.809.980
		QCE Penanganan Perkara	8 Perkara	8.000.000
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	83 Lembaga, Unit Kerja, Tim	2.200.773
		RBR Dukungan Teknis	2 Dokumen	1.348.250
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	3 Sistem Informasi	4.963.150
		UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.575 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	6.000.000
		UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1 Laporan, Layanan	500.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**1.252.089.817**
RM 1.252.089.817	09 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola Aset, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kearsipan_01	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.988 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.218.033.443
	10 Terjaganya Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal dan Integritas KPK_02	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13 Unit, m2, Paket	13.899.784
	11 Meningkatnya Optimalisasi Manajemen Kepegawaian KPK_03	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	3.962 Orang, Layanan, Rekomendasi	12.865.626
	12 Menguatnya Kepercayaan Publik Terhadap KPK_04	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	33 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.647.471

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 093

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	13 Meningkatnya Efektivitas Reformasi Hukum KPK_05	PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 1 Rekomendasi Kebijakan Kajian	3.643.493

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 095

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)				1.800.000.000
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM				1.800.000.000
3 Program	1) CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan				1.082.240.817
	2) WA	Program Dukungan Manajemen				717.759.183
Program	1) CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan				1.082.240.817
	RM	1.082.240.817	01 Tersedianya dukungan bahan dan keahlian legislasi RUU	AAA Undang-Undang	19 UU, RUU	87.042.113
			02 Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	AAH Peraturan lainnya	3 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	3.895.250
			03 Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.929.155
			04 Tersedianya dukungan bahan dan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	ABC Kebijakan Bidang Politik	60 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	58.762.550
			05 Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	4 Rekomendasi Kebijakan	13.693.768
			06 Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	AEA Koordinasi	52 kegiatan	93.385.013
				AEC Kerja sama	3 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	5.779.328
				BLA Persidangan Lembaga Legislatif	1 sidang	4.456.232
				BMA Data dan Informasi Publik	12 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	2.369.521

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 095
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		BMB Komunikasi Publik	12 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	794.389.056
		PBC Kebijakan Bidang Politik	17 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	6.538.831
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen				**717.759.183**
RM 717.759.183	01 Terselenggaranya sistem dan tata kelola internal pada sekretariat jenderal DPD RI	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	714.759.783
		SCA Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	456 Orang	399.000
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	4 Sistem Informasi	2.600.400

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 100

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**100 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**				**195.253.154**
2 Fungsi	**03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN**				**195.253.154**
3 Program	**1) BH Program Penegakan Integritas Hakim**				**39.232.241**
	2) WA Program Dukungan Manajemen				**156.020.913**
Program	**1) BH Program Penegakan Integritas Hakim**				**39.232.241**
	RM 39.232.241	01 Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	45 Orang	7.302.724
		02 Menguatkan Sistem Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	AEA Koordinasi	34 kegiatan	2.173.356
		03 Menguatkan Sistem Rekam Jejak Hakim	BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	2.485 Orang, Laporan	16.683.859
			PDG Standarisasi Profesi dan SDM	620 Orang	9.864.200
			QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	4 Orang, Laporan	3.208.102
Program	**2) WA Program Dukungan Manajemen**				**156.020.913**
	RM 156.020.913	01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Internal	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	136 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	126.265.871
		02 Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6 Unit, m2, Paket	3.990.000
		03 Meningkatkan Kualitas Hasil Kajian, Layanan Informasi, dan Fasilitasi JFPK	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	730 Orang, Layanan, Rekomendasi	2.589.637
			EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	167 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	11.866.805

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 100
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	3 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	595.000
		TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	8 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	10.713.600

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 103

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**103**	**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)**					**490.962.957**
2 Fungsi	**03**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					**490.962.957**
3 Program	**1) FA**	**Program Ketahanan Bencana**					**250.000.000**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**240.962.957**
Program	**1) FA**	**Program Ketahanan Bencana**					**250.000.000**
	RM	250.000.000	01 Meningkatnya Sinkronisasi Pengembangan Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana Secara Terpadu dan Inovatif 02 Meningkatnya kualitas masyarakat yang Tangguh terhadap bencana di kawasan berisiko bencana 03 Meningkatnya manajemen penanganan darurat saat kejadian bencana 04 Meningkatnya kualitas layanan pemulihan pascabencana sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor 05 Meningkatnya ketahanan logistik dan peralatan yang berkelanjutan dalam mendukung penanggulangan bencana berdasarkan wilayah	QEE Bantuan Kebencanaan	30 Paket	250.000.000
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**240.962.957**
	RM	239.327.057	01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Profesional, Akuntabel dan Transparan	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	188 Orang, Sertifikat	423.000
	PNBP	1.635.900	02 Meningkatnya Pengawasan yang Akuntabel dan Transparan	DCK Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	400 Orang, Kegiatan	1.035.000
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	13 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	239.327.057

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 103
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	94 Orang, K/L, Daerah, Unit Kerja	177.900



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 104

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**104**	**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**					**546.336.168**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**546.336.168**
3 Program	**1) DP**	**Program Penempatan, Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia**					**69.786.167**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**476.550.001**
Program	**1) DP**	**Program Penempatan, Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia**					**69.786.167**
	RM	67.266.167	09 Meningkatnya Promosi, Penempatan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia	ACD	Perizinan Lembaga	25 Institusi, Badan Usaha, Lembaga	462.725
	PNBP	2.520.000	10 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal yang Efisien dan Transparan berbasis Transformasi Digital	ADD	Standarisasi Lembaga	10 Lembaga	621.514
				AEA	Koordinasi	8 kegiatan	2.687.200
				AEC	Kerja sama	1 Kesepakatan	414.485
				AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	6.019 orang	2.000.496
				AEH	Promosi	1 promosi	148.475
				AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	24 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.054.637
				BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	30.108 Orang, Akta, Keping, Bidang	4.280.099
				BAH	Pelayanan Publik Lainnya	33 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	2.862.986

SK No 160837 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 104

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	75	Lembaga	619.760
		BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	45	Lembaga	371.625
		BMA Data dan Informasi Publik	3	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	680.060
		DCO Pelatihan Vokasi	276	Orang	587.015
		PEA Koordinasi	1	kegiatan	64.950
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	260.517	Orang, Akta, Keping, Bidang	51.930.140
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**476.550.001**
RM 476.550.001	01 Meningkatnya efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	8.400	orang	2.400.000
		BMA Data dan Informasi Publik	2	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	2.847.180
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	14	Unit	353.990
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	77	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	464.768.955
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	75	Unit, m2, Paket	1.652.544
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	202	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.192.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	141	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.700.612
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	634.720

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 106

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**106**	**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)**					**216.266.954**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**216.266.954**
3 Program	**1) CJ**	**Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional**					**78.127.488**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**138.139.466**
Program	**1) CJ**	**Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional**					**78.127.488**
	RM	78.127.488	01 Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital	AAC	Peraturan Pemerintah	1 PP, RPP	520.000
			02 Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional	AAH	Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	400.000
			03 Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.810.255
			04 Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ	ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	344.000
			05 Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ	ADD	Standarisasi Lembaga	5 Lembaga, Unit Kerja	217.000
			06 Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan	ADE	Akreditasi Lembaga	4 Lembaga	400.000
				ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	145 Orang	1.230.000
				ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	4.732 Orang, Sertifikat	2.115.557
				AEA	Koordinasi	166 kegiatan	1.530.002
				AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	41 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.633.240

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 106

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	1.000.000
		BCE	Penanganan Perkara	1.005 Perkara, Berkas Perkara	2.953.783
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	16 Lembaga, Unit Kerja, Tim	1.750.000
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	200.000 Produk	3.709.723
		CAA	Sarana Bidang Pendidikan	5 Paket, Unit, m2	750.000
		CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	196 Unit	335.000
		DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	12.600 Orang, Kegiatan	6.166.551
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	20.486.560
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	17 Laporan, Rekomendasi	4.083.109
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	244 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	5.344.432
		PAH	Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	383.508
		PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1 Rekomendasi Kebijakan	2.049.300
		PDA	Standarisasi Produk	4 produk	529.994
		PDE	Akreditasi Lembaga	28 Lembaga, Unit Kerja	2.200.000
		PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	550 Orang	1.000.000
		PEC	Kerja sama	8 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.257.272
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5 Lembaga	628.198



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 106

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	450	Orang	776.864
		QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.000	UMKM	4.647.230
		SCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	400	Orang, Kegiatan	707.000
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	1.500.000
		UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	30	Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	1.348.910
		UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	18	Desa, DesaKelurahan	4.320.000
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen					**138.139.466**
RM 138.139.466	01 Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP	ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	3	Rekomendasi Kebijakan	392.502
		BMA Data dan Informasi Publik	1	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.051.610
		CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	16	Unit	5.153.239
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	26	Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	120.271.770
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	84	Unit, m2, Paket	1.000.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	4	Orang, Layanan, Rekomendasi	3.855.976
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	45	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.145.704
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	5	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	2.268.665

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 107
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**107 BADAN SAR NASIONAL**				**1.553.675.969**
2 Fungsi	**04 EKONOMI**				**1.553.675.969**
3 Program	**1) BM Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana**				**685.185.536**
	2) WA Program Dukungan Manajemen				**868.490.433**
Program	**1) BM Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana**				**685.185.536**
	RM 684.241.696	01 Meningkatnya kualitas SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	AEA Koordinasi	101 kegiatan	4.729.637
	PNBP 943.840	02 Meningkatnya kualitas SDM potensi pencarian dan pertolongan	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.289.702
		03 Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	BAH Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan	13.510
		04 Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	765 Orang	3.707.000
		05 Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	719.037
		06 Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	BHC Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	3 operasi	2.500.000
			BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	231 laporan	22.193.657
			CAP Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	500 Unit	150.000
			DCK Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	320 Orang, Kegiatan	28.898.848

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 107
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	46.937
		PEA	Koordinasi	4 kegiatan	700.000
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	2.650.000
		QHC	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	46 operasi	50.328.224
		RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	20.000.000
		RAP	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	1 Unit	27.000.000
		RBH	Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	1 unit, Kawasan	5.000.000
		RCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	128 Unit	76.286.481
		RCM	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	2.548 Unit	433.106.825
		RDH	OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	116 unit, Pos	3.465.678
		SCK	Pelatihan Bidang Penanggulangan Bencana	3 Orang	1.400.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**868.490.433**
RM 868.490.433	01 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	AEC	Kerja sama	10 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.394.130
	02 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	372 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	841.076.948

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 107

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	03 Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	819 Unit, m2, Paket	13.181.490
	04 Meningkatnya efektivitas regulasi dan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	81 Orang, Layanan, Rekomendasi	3.910.899
	05 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	176 Dokumen, Layanan, Laporan Rekomendasi	8.926.966
	06 Meningkatnya kualitas pengawasan intern			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 108

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**108**	**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**					**163.498.893**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**163.498.893**
3 Program	**1) EG**	**Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan**					**56.316.893**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**107.182.000**
Program	**1) EG**	**Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan**					**56.316.893**
	RM	53.164.055	01 Mewujudkan advokasi kebijakan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	14 Rekomendasi Kebijakan	1.772.000
	PNBP	3.152.838	02 Mewujudkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	BCE	Penanganan Perkara	16 Perkara	2.042.000
				FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	15 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	1.436.000
				PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	27 Rekomendasi Kebijakan	8.367.000
				PEA	Koordinasi	1 kegiatan	500.000
				PEB	Forum	3 forum	750.000
				PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	5.681 orang	1.681.000
				QAH	Pelayanan Publik Lainnya	16 layanan	2.200.000
				QCE	Penanganan Perkara	198 Perkara	32.072.893
				QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4 Lembaga	380.000
				QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	4 Badan usaha	400.000
				QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	34 Badan Usaha	4.400.000
				UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	316.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 108

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**				**107.182.000**
	RM	99.334.838	02 Mewujudkan kapasitas dan kapabilitas kinerja layanan birokrasi	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	44 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	91.595.000
	PNBP	7.847.162		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	51 Unit, m2, Paket	5.000.000
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	325 Orang, Layanan, Rekomendasi	5.585.000
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	69 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.002.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 110

KEMENTERIAN/LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**110**	**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**					**251.978.173**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**251.978.173**
3 Program	**1) CG**	**Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**					**37.022.541**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**214.955.632**
Program	**1) CG**	**Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**					**37.022.541**
	RM	37.022.541	01 Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	1 Rekomendasi Kebijakan	10.000
				BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2 Orang, Akta, Bidang, Laporan	60.000
				BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	250.000
				BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2 Lembaga, Unit Kerja, Tim	20.000
				BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	10.000
				BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	10.000
				BMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	10.000
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2 Laporan, Layanan	50.000
				QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	7.876 Orang, Akta, Bidang, Laporan	23.739.278
				QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	85 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	1.418.588

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 110
KEMENTERIAN/LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		QIE Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	552 Pemerintah Daerah	11.444.675
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen				**214.955.632**
RM 214.955.632	01 Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	AEC Kerja sama	1 Kesepakatan	10.000
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	9 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	213.524.589
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11 Unit, m2, Paket	201.043
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	266 Orang, Layanan, Rekomendasi	510.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	5 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	60.000
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	650.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 111

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)					469.610.875
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					469.610.875
3 Program	1) AG	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan					35.261.008
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					434.349.867
Program	1) AG	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan					35.261.008
	RM	35.261.008	01 Meningkatnya Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Laut dan Udara serta Lintas Batas Negara	ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	10 Rekomendasi Kebijakan	1.808.736
			02 Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan berbasis Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara	ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	17 Rekomendasi Kebijakan	5.462.997
			03 Meningkatnya pemerataan pembangunan, sarana dan prasarana infrastruktur layanan dasar serta layanan pemerintahan di kawasan perbatasan negara	AEA	Koordinasi	26 kegiatan	12.862.049
				BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	140 Orang	1.186.435
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	49 Laporan, Layanan	11.196.791
				PEA	Koordinasi	1 kegiatan	740.000
				QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	100 Orang	1.000.000
				UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	75 Orang	1.004.000
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					434.349.867
	RM	434.349.867	01 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Settap BNPP	AEC	Kerja sama	2 Kesepakatan	1.400.000
			02 Meningkatnya kapabilitas Settap BNPP	AEG	Konferensi dan Event	1 Kegiatan	530.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 111

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	03 Meningkatnya kualitas pelayanan Settap BNPP	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	16 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	212.225.867
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.750 Unit, m2, Paket	211.500.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.018 Orang, Layanan, Rekomendasi	3.000.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	17 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.694.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 112

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**112**	**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)**							**2.527.948.530**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**							**2.527.948.530**
3 Program	**1) EH**	**Program Pengembangan Kawasan Strategis**							**1.428.920.479**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**							**1.099.028.051**
Program	**1) EH**	**Program Pengembangan Kawasan Strategis**							**1.428.920.479**
		BLU	1.348.920.479	01	Meningkatnya efektivitas promosi dan kualitas realisasi investasi	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.528.260
		RM	80.000.000	02	Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan, pesisir, dan reklamasi di KPBPB Batam	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	2 Rekomendasi Kebijakan	1.917.321
				03	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur	ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan	2.489.142
				04	Meningkatnya kualitas pelayanan umum BP Batam	ACD	Perizinan Lembaga	2 Institusi, Badan Usaha Lembaga	894.625
				05	Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan bandara, kepelabuhanan, dan lalu lintas barang	AEH	Promosi	18 promosi	12.594.408
						BAH	Pelayanan Publik Lainnya	11 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	91.069.658
						BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	2 Industri	3.405.453
						BHC	Operasi Bidang Penanggulangan Bencana	1 operasi	605.121
						BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	6 Layanan	15.060.670
						BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	10 Badan Usaha	1.446.494

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 112

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CAB	Sarana Bidang Kesehatan	2 Paket, Unit	6.035.000
		CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara	4 Unit, Paket	587.646
		CAE	Sarana Bidang Konektivitas Laut	3 Unit	763.650
		CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3 Unit	16.210.295
		CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	8 Unit, Hektar	65.861.340
		CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	2 unit, Hektar	4.700.000
		CBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	12 km	208.977.932
		CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1 unit	3.115.000
		CBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	8 unit	123.462.404
		CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 unit	13.000.000
		CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	2.900 bidang, hektar	59.331.452
		CBR	Dukungan Teknis	15 Dokumen	18.329.568
		CBV	Prasarana Bidang Kesehatan	3 Unit	33.290.000
		CCB	OP Sarana Bidang Kesehatan	14 Paket, Unit	154.160.672
		CCD	OP Sarana Bidang Konektivitas Udara	5 Unit, Paket	9.648.904
		CCE	OP Sarana Bidang Konektivitas Laut	7 Unit	31.653.014
		CCG	OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4 Unit	12.818.563
		CCI	OP Sarana Pengembangan Kawasan	1 Unit	11.312.348

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 112

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		CDB OP Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	5 unit, Hektar	12.095.684
		CDC OP Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	15 km	73.193.843
		CDD OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut	47 unit	34.092.528
		CDE OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1 unit	2.511.495
		CDG OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	33 unit	98.053.357
		CDK OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6 unit	24.935.516
		CDN OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	4 unit	4.697.580
		CDO OP Prasarana Pengembangan Kawasan	4 bidang, Hektar	5.647.782
		CDV OP Prasarana Bidang Kesehatan	2 Unit	7.400.000
		FAA Kearsipan	4 Arsip	983.004
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	3 Sistem Informasi	6.202.868
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	11 Laporan, Layanan	1.778.340
		FAG Pengawasan Pembangunan	4 Laporan, Layanan	8.697.095
		RBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	8 km	244.362.447
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**1.099.028.051**
BLU 1.099.028.051	01 Meningkatnya kualitas kebijakan dan perizinan BP Batam	ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	2 Rekomendasi Kebijakan	905.170
	02 Meningkatnya kualitas pengelolaan internal BP Batam	ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	5 Rekomendasi Kebijakan	1.282.435
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	3 layanan	1.436.490

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 112

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		BMA Data dan Informasi Publik	5 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.701.181
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10 Unit	44.249.536
		CBR Dukungan Teknis	20 Dokumen	45.348.592
		CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	40 Unit	32.971.732
		CDS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	1.756.574
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	32 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	910.963.843
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	703 Unit, m2, Paket	16.392.547
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2 Orang, Layanan, Rekomendasi	24.774.410
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	33 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	13.578.528
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	11 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	3.667.013

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 113

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)**				**1.719.777.488**
2 Fungsi	**03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN**				**1.719.777.488**
3 Program	**1) BA Program Penanggulangan Terorisme**				**1.435.049.128**
	2) WA Program Dukungan Manajemen				**284.728.360**
Program	**1) BA Program Penanggulangan Terorisme**				**1.435.049.128**
	RM 3.819.400	01 Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	AEA Koordinasi	1 kegiatan	779.400
	PLN 1.431.229.728	02 Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia	CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10 Unit	3.040.000
		03 Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme	RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 Unit, Paket	1.431.229.728
		04 Terselenggaranya kerjasama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri			
		05 Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap			
		06 Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat reliabel			
		07 Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme			
		09 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme			
		10 Terkendalinya situasi keamanaan saat kejahatan terorisme terjadi			

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 113

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	11 Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme terorisme		
	12 Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan		
	13 Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi		
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**			**284.728.360**
RM 164.063.469	01 Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 80 Unit	1.258.574
SBSN 120.664.891	02 Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	162.804.895
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Unit, m2, Paket	120.664.891

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 115

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**				**2.472.934.469**
2 Fungsi	**01 PELAYANAN UMUM**				**2.472.934.469**
3 Program	**1) CQ Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum**				**42.657.837**
	2) WA Program Dukungan Manajemen				**2.430.276.632**
Program	**1) CQ Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum**				**42.657.837**
	RM 42.657.837	01 Terwujudnya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu yang berkualitas	ABC Kebijakan Bidang Politik	10 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.523.837
		02 Terwujudnya data pemilih berkelanjutan yang menjamin hak memilih dan dipilih	AEC Kerja sama	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	20.000
		03 Terwujudnya sistem penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel	BAH Pelayanan Publik Lainnya	554 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	80.000
		04 Terwujudnya sistem penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	31.994.000
		05 Terbangunnya sistem teknologi informasi kepemiluan Bawaslu	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	42 Lembaga, Unit Kerja, Tim	3.500.000
		06 Terwujudnya keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	553 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	2.440.000
		07 Terwujudnya pemberdayaan pemantau Pemilu terakreditasi dalam Pengawasan Pemilu partisipatif	UAB Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	1.100.000
		08 Terwujudnya kolaborasi Pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri pada Kementerian/Lembaga, penyelenggara negara, dan kepala desa/perangkat desa			
Program	**2) WA Program Dukungan Manajemen**				**2.430.276.632**

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 115

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
RM 2.430.276.632	01 Terwujudnya peningkatan profesionalitas pegawai	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.649 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.429.736.632
	02 Terwujudnya kajian ilmiah dalam mendukung Pengawasan Pemilu inovatif dan akuntabel	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.001 Orang, Layanan, Rekomendasi	130.000
	03 Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit Bawaslu yang transparan	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	6 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	410.000
	04 Terwujudnya ASN yang berorientasi hasil, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif			
	05 Terwujudnya tata kelola hukum pengawasan pemilu yang terukur, transparan, dan berkelanjutan			
	06 Terwujudnya pengelolaan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan yang akuntabel			
	07 Terwujudnya layanan BMN yang akuntabel			
	08 Terwujudnya tingkat kematangan UKPBJ Bawaslu			
	09 Terwujudnya keselarasan antara Renstra K/L dan Renja K/L pada Sasaran Strategis, dan/atau Sasaran Program, dan/atau Sasaran Kegiatan			
	10 Terwujudnya perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan capaian kinerja internal yang tepat sasaran dan berorientasi hasil			
	11 Terwujudnya pencapaian kinerja pada unit kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota			
	12 Terwujudnya pencapaian kinerja proyek prioritas sesuai dengan RPJMN/RKP			
	13 Terwujudnya pengawasan arsip statis dan dinamis di Bawaslu			
	14 Terwujudnya Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi			

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 115

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	15 Meningkatnya tindak lanjut Areas of Improvement dari Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP 16 Terwujudnya penjaminan tindak lanjut pengaduan masyarakat 17 Terwujudnya peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja 18 Tewujudnya hasil pemeriksaan Pengawasan yang bernilai tambah 19 Tewujudnya peran APIP yang efektif 20 Terwujudnya pengelolaan keamanan siber yang optimal dan berfungsi secara menyeluruh 21 Terwujudnya tata kelola data dan informasi Kepemiluan Bawaslu 22 Terwujudnya pengelolaan data Pengawasan Kepemiluan yang berkualitas, berkelanjutan dan sesuai kebutuhan pengguna 23 Terwujudnya pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 24 Terwujudnya layanan kehumasan, website, dan media massa		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 116

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**116**	**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**				**997.705.955**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**				**997.705.955**
3 Program	**1) GC**	**Program Penyiaran Publik**				**15.868.345**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**981.837.610**
Program	**1) GC**	**Program Penyiaran Publik**				**15.868.345**
	PNBP	15.868.345	01 Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi konten	ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.208.148
			02 Meningkatnya Relevansi Program Siaran dengan Prioritas Nasional	AEC Kerja sama	2 Kesepakatan, Dokumen Kegiatan	1.068.100
			03 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penyiaran	BMA Data dan Informasi Publik	2 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.600.649
			04 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Promosi Program Siaran yang Selaras dengan Prioritas Nasional	QAH Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan	1.747.548
				QMA Data dan Informasi Publik	847 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	9.243.900
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**				**981.837.610**
	RM	981.837.610	01 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan LPP RRI yang Responsif, Efektif, Efisien, Adaptif, Kolaboratif dan Berintegritas serta Akuntabel dalam Penerapan Reformasi Birokrasi	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	108 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	981.837.610
			02 Meningkatnya Kualitas tata kelola pelaksanaan anggaran			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 117

KEMENTERIAN/LEMBAGA : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**117**	**TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**					**1.159.703.060**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**1.159.703.060**
3 Program	**1) GC**	**Program Penyiaran Publik**					**183.986.881**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**975.716.179**
Program	**1) GC**	**Program Penyiaran Publik**					**183.986.881**
	RM	122.453.125	01 Meningkatkan Kualitas Program Siaran Dan Multiplatform yang Meliputi Siaran Nasional, Siaran Olahraga, Siaran Internasional Dan Media Baru yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Indonesia Maupun Masyarakat Global	AEC Kerja sama	103 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan		6.826.045
	PNBP	61.533.756	02 Meningkatnya Konten yang Berkualitas, Cepat, dan Menarik dalam Multiplatform LPP TVRI	BAH Pelayanan Publik Lainnya	102 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik		58.318.922
			03 Meningkatnya Partisipasi Publik Dan Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Penyelanggaraan Public Service Media	CBR Dukungan Teknis	6 Dokumen		7.788.584
			04 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peralatan teknik dan Jangkauan Penyiaran	CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	477 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi		6.471.933
			05 Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Bertalenta Digital	CDS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	214 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi		2.021.516
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		238.996
				QAH Pelayanan Publik Lainnya	6 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik		59.427.885
				RBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	66 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi		29.693.000
				RDS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	7 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi		13.200.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 117

KEMENTERIAN/LEMBAGA : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
Program	**2) WA Program Dukungan Manajemen**				**975.716.179**
	RM 967.052.707	01 Terciptanya Transformasi Birokrasi Digital	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	34 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	967.143.087
	PNBP 8.663.472	02 Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Bertalenta Digital	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13 Unit, m2, Paket	7.779.071
		03 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	832 Orang, Layanan, Rekomendasi	794.021

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 118

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**118**	**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)**						**36.475.743**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**						**36.475.743**
3 Program	**1) EH**	**Program Pengembangan Kawasan Strategis**						**5.259.545**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**						**31.216.198**
Program	**1) EH**	**Program Pengembangan Kawasan Strategis**						**5.259.545**
		BLU	5.259.545	01 Peningkatan Pengembangan Kawasan Strategis KPBPB Sabang	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	2 Rekomendasi Kebijakan	93.258
				05 Meningkatnya daya saing dan investasi Pelabuhan	ADF	Sertifikasi Lembaga	1 Lembaga, Badan Usaha	100.000
					AEC	Kerja sama	1 Kesepakatan	75.000
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	30 layanan	91.800
					CCE	OP Sarana Bidang Konektivitas Laut	3 Unit	183.000
					CCI	OP Sarana Pengembangan Kawasan	2 Unit	179.000
					RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	1 Unit	1.890.286
					RDD	OP Prasarana Bidang Konektivitas Laut	1 unit	2.647.201
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**						**31.216.198**
		RM	24.800.173	01 Peningkatan Kualitas Kelembagaan BPKS dalam Pengusahaan Kawasan Sabang	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	30.716.198
		BLU	6.416.025		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 119
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEAMANAN LAUT

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**119**	**BADAN KEAMANAN LAUT**				**1.751.987.893**
2 Fungsi	**03**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**				**1.751.987.893**
3 Program	**1) BN**	**Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia**				**1.504.902.934**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**247.084.959**
Program	**1) BN**	**Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia**				**1.504.902.934**
	SBSN	271.556.655	01 Menurunnya kasus kejahatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia	CCF OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	8 Unit, Paket	5.661.273
	RM	140.741.113	02 Meningkatnya kualitas kebijakan keamanan dan keselamatan laut	RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 Unit, Paket	1.092.605.166
	PLN	1.092.605.166	03 Meningkatnya kapasitas sistem informasi/sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan Laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi	RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	16 unit	271.556.655
			04 Meningkatnya Kualitas Regulasi dan Penanganan Pelanggaran Keamanan dan Keselamatan Laut	RCF OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	6 Unit, Paket	135.079.840
			05 Meningkatnya Partisipasi aktif Bakamla RI dalam diplomasi maritim di forum bilateral maupun multilateral			
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**				**247.084.959**
	RM	247.084.959	01 Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis Konsep Operasi Keamanan Laut	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	247.084.959

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 119

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEAMANAN LAUT

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	02 Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan Kinerja tinggi, efektif dan efisien 03 Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Bakamla RI yang akuntabel dan profesional 04 Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 122

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA					384.862.022
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					384.862.022
3 Program	1) AH	Program Pembinaan Ideologi Pancasila					194.885.000
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					189.977.022
Program	1) AH	Program Pembinaan Ideologi Pancasila					194.885.000
	RM	194,885.000	01 Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang Efektif	ABC	Kebijakan Bidang Politik	9 Rekomendasi Kebijakan	5.700.000
			02 Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Dan Pengawasan Regulasi, Serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	9 Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
			03 Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang Efektif	ABN	Kebijakan Bidang Sosial	15 Rekomendasi Kebijakan	8.173.226
			04 Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Komprehensif	AEG	Konferensi dan Event	3 Kegiatan	2.500.000
			05 Terwujudnya Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7 NSPK	2.000.000
				BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	16.000 Orang	35.000.000
				PBC	Kebijakan Bidang Politik	4 Rekomendasi Kebijakan	13.224.979
				PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	14 Rekomendasi Kebijakan	11.321.267
				PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	2 Rekomendasi Kebijakan	6.000.000
				PBN	Kebijakan Bidang Sosial	5 Rekomendasi Kebijakan	5.294.726

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 122
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		PDE Akreditasi Lembaga	10 Lembaga	1.995.600
		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	315 Orang	5.000.000
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	1.020.000 orang	41.500.000
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6.903 Orang	38.000.000
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	4.000.000
		SCJ Pelatihan Bidang Sosial	9.984 Orang	12.175.202
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**189.977.022**
RM 189.977.022	01 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BerAKHLAK dan Pelayanan Prima Berbasis Elektronik	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	10 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	176.450.022
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	963 Unit, m2, Paket	2.000.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	536 Orang, Layanan, Rekomendasi	4.550.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	12 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.977.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 123

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN					259.222.211
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN					259.222.211
3 Program	1) BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					122.213.277
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					137.008.934
Program	1) BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					122.213.277
	RM	122.213.277	01 Meningkatnya aksesibilitas layanan perlindungan saksi dan korban	BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	9.790 Orang, Akta, Bidang, Laporan	60.423.250
			02 Terpenuhinya hak-hak saksi dan korban yang berorientasi keadilan	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	13.729 layanan	58.726.977
				PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
				QMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	1.563.050
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					137.008.934
	RM	137.008.934	01 Terwujudnya jejaring governansi perlindungan saksi dan korban	AEA	Koordinasi	3 kegiatan	100.000
			02 Terwujudnya transformasi tata kelola kelembagaan LPSK secara menyeluruh	AEC	Kerja sama	3 Kesepakatan	615.000
				AED	Perjanjian	1 perjanjian	50.000
				AEE	Kemitraan	1 Kesepakatan	92.200
				CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	500 Unit	150.000
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	129.851.960

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 123

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3 Unit, m2, Paket	100.000
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	391 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.401.486
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	22 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.648.288

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 124

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**124**	**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**					**6.144.562.191**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**6.116.595.881**
	10	**PENDIDIKAN**					**27.966.310**
3 Program	**1) KB**	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**					**2.269.753.395**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**3.874.808.796**
Program	**1) KB**	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**					**2.269.753.395**
	RM	1.635.588.740	01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Riset dan Inovasi	CBR	Dukungan Teknis	1 Dokumen	1.000.000
	PNBP	230.938.729	02 Peningkatan Kualitas Hasil Riset dan Inovasi	CDT	OM Prasarana Bidang IPTEK	1 Unit, Hektar	116.697.189
	SBSN	150.000.000	03 Peningkatan Kapasitas Infrastruktur riset dan inovasi untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi	PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	150 Rekomendasi Kebijakan	9.000.000
	HLN	16.759.778	04 Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global	PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	2.000 Orang	4.107.500
	PLN	236.466.148	05 Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global melalui Naskah Kebijakan/ Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan di bidang Kebijakan Pembangunan	PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	9 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	699.905
			07 Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global melalui Naskah Kebijakan/ Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan di bidang Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10.336 Lembaga, Unit Kerja, Tim	242.647.000
			09 Peningkatan Fungsi Pemanfaatan Riset dan Inovasi	QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	11.895 Orang	165.490.103
			11 Peningkatan proporsi anggaran matching fund di bidang SDM Iptek	QMA	Data dan Informasi Publik	2 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	36.759.778
				RAO	Sarana Bidang IPTEK	9 Unit	1.084.445.240
				RBU	Prasarana Bidang IPTEK	2 Unit	408.188.820

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 124
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		SBA Pendidikan Tinggi	450 Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	12.467.860
		SDB Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	286 Purwarupa	143.000.000
		SDC Penelitian dan Pengembangan Modeling	94 model, Desain	23.500.000
		SDD Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	29 kekayaan intelektual	21.750.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**3.874.808.796**
RM 3.874.808.796	01 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pengawasan melalui penguatan pelayanan publik, sistem digital, akuntabilitas kinerja, dan budaya kerja	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	9 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.863.804.796
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.370 Orang, Layanan, Rekomendasi	9.000.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	26 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.004.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 125
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PANGAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**125**	**BADAN PANGAN NASIONAL**					**233.294.603**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**233.294.603**
3 Program	**1) HA**	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**					**89.196.331**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**144.098.272**
Program	**1) HA**	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**					**89.196.331**
	RM	89.196.331	01 Terpenuhinya ketersediaan pangan	ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	5 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	858.900
			02 Terjaganya stabilitas harga pangan antar wilayah dan antar waktu	AEA	Koordinasi	75 kegiatan	19.955.995
			03 Menurunnya daerah rentan rawan pangan	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	20 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.295.300
			04 Meningkatnya Penyelamatan Pangan	PAD	Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres	440.000
			05 Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	87 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.337.030
			06 Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	PCA	Perizinan Produk	800 Produk, Keputusan	2.222.860
				PEH	Promosi	1 promosi, Kegiatan	1.500.000
				QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	86 Lembaga, Unit Kerja, Tim	3.171.120
				QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	160 Kelompok Masyarakat	11.921.000
				QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	10 UMKM	1.700.000
				QEB	Bantuan Keluarga	16.460 Keluarga	6.003.327
				QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	39 Produk, Laporan, Keputusan	4.739.630

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 125

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PANGAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QMA	Data dan Informasi Publik	18 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	17.951.169
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10 Unit	8.100.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**144.098.272**
RM 144.098.272	01 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	AEA	Koordinasi	1 kegiatan	9.720.000
		AEC	Kerja sama	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.200.000
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	108.887.520
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	39 Unit, m2, Paket	1.314.054
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	520 Orang, Layanan, Rekomendasi	2.187.686
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	34 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	9.346.452
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	6 Layanan, Dokumen	4.860.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.850.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	2.708.060
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	1.024.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 126

KEMENTERIAN/LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga **126 OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**			**6.262.046.870**
2 Fungsi **04 EKONOMI**			**6.262.046.870**
3 Program **1) EH Program Pengembangan Kawasan Strategis**			**5.617.980.000**
2) WA Program Dukungan Manajemen			**644.066.870**
Program **1) EH Program Pengembangan Kawasan Strategis**			**5.617.980.000**
RM 5.617.980.000	01 Terwujudnya Perencanaan Kota Kelas Dunia	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 2 Rekomendasi Kebijakan	1.765.000
	02 Terwujudnya Pembangunan Kawasan IKN berkelas dunia	ABI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam 3 Rekomendasi Kebijakan, Rekomendasi	500.000
	03 Meningkatnya kualitas dan keberlanjutan Lingkungan Hidup	ABJ Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 1 Rekomendasi Kebijakan	506.000
	04 Meningkatkan kapabilitas SDM Penduduk IKN yang kompeten dan berdaya saing tinggi	ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi 7 Rekomendasi Kebijakan	1.639.821
	05 Meningkatnya kesiapan kawasan industri dan pusat ekonomi	ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 2 Rekomendasi Kebijakan	1.220.000
	06 Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi	ABS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim 2 Rekomendasi Kebijakan, Rekomendasi	2.449.182
	07 Terwujudnya Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kelas Dunia	AEA Koordinasi 47 kegiatan	21.857.968
	08 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang handal dan berkualitas	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 7 NSPK	1.495.035
	09 Terwujudnya infrastruktur Penyelenggaraan Pemerintahan	BAH Pelayanan Publik Lainnya 7 layanan	350.000
	10 Terwujudnya infrastruktur pelayanan publik bagi masyarakat IKN	BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 5 Kelompok Masyarakat	972.617

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 126
KEMENTERIAN/LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Unit	2.050.000
		CAI Sarana Pengembangan Kawasan	7	Unit	1.063.264.491
		CBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	15	km	875.625.578
		CBO Prasarana Pengembangan Kawasan	1	bidang, hektar	1.800.500.000
		DCK Pelatihan Bidang Penanggulangan Bencana	100	Orang	1.063.564
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	64	Laporan, Rekomendasi	19.046.317
		PAH Peraturan lainnya	9	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	313.500
		PBK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	3	Rekomendasi Kebijakan	9.750.000
		PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	726.946
		PBQ Kebijakan Bidang Aparatur	1	Rekomendasi Kebijakan	1.419.670
		PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	14	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	71.300.000
		PEA Koordinasi	5	kegiatan	8.460.330
		PEC Kerja sama	25	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	7.200.000
		PEH Promosi	20	promosi, Kegiatan	10.985.800
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	13	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	49.233.781
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	23	Orang	1.953.776



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 126
KEMENTERIAN/LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	71 Kelompok Masyarakat	5.514.416
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	42 UMKM	1.563.600
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	9 Badan usaha	2.898.630
		QII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	9 Hektar, Laporan	2.025.383
		QMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	850.000
		RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit	9.240.000
		RAP	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	16 Unit	6.962.454
		RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	3 unit, Hektar	778.154.000
		RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	10 unit	6.000.000
		RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	598 km2, bidang, km, hektar	310.484.302
		RBR	Dukungan Teknis	3 Dokumen	25.831.513
		RCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	4.616.572
		RDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	129 unit, Hektar, KK, Literdetik, SR	382.044.299
		RDC	OP Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	12 km	51.160.764
		RDG	OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	15 unit	27.483.362
		RDO	OP Prasarana Pengembangan Kawasan	3 bidang, Hektar	34.055.933
		REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	150 Hektar	4.650.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 126
KEMENTERIAN/LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		SCO Pelatihan Vokasi	16 Orang	903.008
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	7.892.388
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen				**644.066.870**
RM 644.066.870	01 Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Efektif	AAH Peraturan lainnya	19 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	7.645.226
	02 Meningkatnya Tata Kelola Otorita Ibu Kota Nusantara yang Optimal	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	1.500 orang	549.530
		BMA Data dan Informasi Publik	1 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	375.000
		BMB Komunikasi Publik	3 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	765.750
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	217 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	608.475.189
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	599 Unit, m2, Paket	12.252.218
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	9 Orang, Layanan, Rekomendasi	4.680.857
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	31 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	9.323.100

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 127
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KARANTINA INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**127**	**BADAN KARANTINA INDONESIA**					**1.796.065.911**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**1.796.065.911**
3 Program	**1) HA**	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**					**604.647.071**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**1.191.418.840**
Program	**1) HA**	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**					**604.647.071**
	PNBP	282.264.770	01 Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Hewan yang Efektif	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	268 Rekomendasi Kebijakan	66.456.524
	RM	242.559.279	02 Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif	PDC	Sertifikasi Produk	1.601.258 produk	154.050.706
	SBSN	79.823.022	03 Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Tumbuhan yang Efektif	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	74 Produk	71.937.846
			04 Terselenggaranya Layanan Perkarantinaan yang Profesional	RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	402 Unit	76.158.454
			05 Sinergitas pencegahan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan	RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	44.409 unit	246.043.541
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**1.191.418.840**
	RM	1.191.418.840	01 Terciptanya Tata Kelola Birokrasi yang Baik	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	43 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.191.418.840

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 128
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN GIZI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**128**	**BADAN GIZI NASIONAL**					**268.000.000.000**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**19.714.694.606**
	07	**KESEHATAN**					**24.726.344.904**
	10	**PENDIDIKAN**					**223.558.960.490**
3 Program	**1) DT**	**Program Pemenuhan Gizi Nasional**					**255.580.233.304**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**12.419.766.696**
Program	**1) DT**	**Program Pemenuhan Gizi Nasional**					**255.580.233.304**
	RM	255.580.233.304	01 Terwujudnya Sistem dan Tata Kelola pemenuhan gizi nasional yang efektif	AEA	Koordinasi	40 kegiatan	283.457.610
			02 Terwujudnya penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif	AEC	Kerja sama	16 Kesepakatan	10.000.000
			03 Terwujudnya promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang makan bergizi secara optimal	PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	21 Rekomendasi Kebijakan	500.500.000
			04 Terwujudnya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional	PEE	Kemitraan	38 Kesepakatan	40.000.000
			05 Terwujudnya pemantauan dan pengawasan program makan bergizi sesuai standar	PEH	Promosi	22 promosi	270.000.000
				PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	18 NSPK	9.000.000
				QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	5.000 Kelompok Masyarakat	50.000.000
				QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3.000 UMKM	45.000.000
				QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1.000 Badan usaha, Miliar USD	15.000.000
				QEA	Bantuan Masyarakat	74.560.151 Orang	248.285.305.394

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 128

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN GIZI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	13.254	Lembaga	860.000.000
		QMB Komunikasi Publik	1	layanan	32.800.000
		RAB Sarana Bidang Kesehatan	6.800	Paket, Unit	4.300.000.000
		RBV Prasarana Bidang Kesehatan	384	Unit	595.200.000
		SCM Pelatihan Bidang Kesehatan	81.000	Orang	121.500.000
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	162.470.300
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen					**12.419.766.696**
RM 12.419.766.696	01 Terwujudnya Birokrasi Pemenuhan Gizi Nasional yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Excellence, Responsif, dan Adaptif	AAH Peraturan lainnya	50	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	10.000.000
	02 Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Internal Badan Gizi Nasional yang Akuntabel	ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	3	Rekomendasi Kebijakan	7.500.000
		ABQ Kebijakan Bidang Aparatur	5	Rekomendasi Kebijakan	10.000.000
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	32.000	Unit	3.910.440.000
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	332	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	7.949.505.873
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.543	Unit, m2, Paket	177.100.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.001	Orang, Layanan, Rekomendasi	84.000.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	364	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	80.550.823
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	94.670.000
		UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	32.000	Orang	96.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 129

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**129**	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN**				**357.997.743**
2 Fungsi	**03**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**				**357.997.743**
3 Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**				**103.000.000**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**254.997.743**
Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**				**103.000.000**
	RM	103.000.000	01 Terselenggaranya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan yang Terintegrasi dalam Mendukung Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Penyelesaian Masalah Politik dalam Rangka Memperkokoh Demokrasi	ABC Kebijakan Bidang Politik	23 Rekomendasi Kebijakan	23.300.000
			02 Terlaksananya Dukungan Manajemen yang Efektif, Akuntabel, dan Berbasis Sistem Administrasi Terintegrasi untuk Memperkuat Koordinasi dan Pelayanan Internal di Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	6 Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
			03 Terselenggaranya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Luar Negeri terhadap Kepentingan Nasional yang Bersinergi pada Diplomasi Politik dan Kerja Sama Internasional dalam Rangka Memperkuat Kedudukan Indonesia di Dunia Internasional	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	39 Rekomendasi Kebijakan	39.100.000
			04 Terlaksananya Dukungan Manajemen yang Efektif, Akuntabel, dan Berbasis Sistem Administrasi Terintegrasi untuk Memperkuat Koordinasi dan Pelayanan Internal di Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	16 Rekomendasi Kebijakan	16.300.000
			05 Terselenggaranya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pertahanan dan Kesatuan Bangsa untuk Memperkuat Kedaulatan Negara,Keutuhan Wilayah NKRI dan Melindungi Segenap Bangsa serta Seluruh Tumpah Darah Indonesia dari ATHG terhadap Keutuhan Bangsa dan Negara	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.223.888

SK No 160703 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 129

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	06 Terlaksananya Dukungan Manajemen yang Efektif, Akuntabel, dan Berbasis Sistem Administrasi Terintegrasi untuk Memperkuat Koordinasi dan Pelayanan Internal di Deputi Bidang Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	15 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.776.112
	07 Terselenggaranya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Serta Penegakan Hukum yang Efektif dalam Rangka Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional	PBC Kebijakan Bidang Politik	4 Rekomendasi Kebijakan	7.200.000
	08 Terlaksananya Dukungan Manajemen yang Efektif, Akuntabel, dan Berbasis Sistem Administrasi Terintegrasi untuk Memperkuat Koordinasi dan Pelayanan Internal di Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PBE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	4 Rekomendasi Kebijakan	4.900.000
	09 Terselenggaranya Sinkronisasi dan Koordinasi Efektivitas Komunikasi dan Penyebaran Informasi Kebijakan Politik dan Keamanan dalam Rangka Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Publik	PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.200.000
	10 Terlaksananya Dukungan Manajemen yang Efektif, Akuntabel, dan Berbasis Sistem Administrasi Terintegrasi untuk Memperkuat Koordinasi dan Pelayanan Internal di Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi			
	11 Terselenggaranya pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi kebijakan terhadap penyelenggaraan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum			
	12 Tersusunnya rekomendasi terkait Arah Kebijakan Kejaksaan RI yang berkualitas kepada Presiden RI			
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen				**254.997.743**
RM 254.997.743	01 Terselenggaranya layanan koordinasi kebijakan politik dan keamanan yang responsif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan strategis nasional	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	5 Rekomendasi Kebijakan	3.000.000

SK No 160743 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 129

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	02 Terlaksananya sistem koordinasi internal yang terintegrasi melalui penguatan regulasi, dukungan persidangan, dan tata kelola yang tertib	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	19 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	228.026.866
	03 Meningkatnya kapasitas SDM, sistem informasi, dan budaya organisasi berbasis kinerja dan nilai ASN	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	218 Orang, Layanan, Rekomendasi	3.317.000
	04 Terselenggaranya pengelolaan anggaran, aset, dan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan efisien	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	16 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	20.653.877

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 130

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**130**	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**					**221.934.522**
2 Fungsi	**03**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					**221.934.522**
3 Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**					**33.784.557**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**188.149.965**
Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**					**33.784.557**
	RM	33.784.557	01 Terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang hukum	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	35 Rekomendasi Kebijakan	18.132.646
			02 Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait penghormatan, pemajuan, pelindungan, penegakan dan pemenuhan HAM	AEA	Koordinasi	35 kegiatan	15.151.911
			03 Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Keimigrasian dan Pemasyarakatan	PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**188.149.965**
	RM	188.149.965	01 Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	26.080.000
				CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	1.740.000
				CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	960.000
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	118.632.969
				EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	437 Unit, m2, Paket	33.418.800

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 130
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	248 Orang, Layanan, Rekomendasi	694.400
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	12 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.591.225
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	2.032.571

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 131

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**131**	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN**					**206.987.149**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**206.987.149**
3 Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**					**50.000.000**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**156.987.149**
Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**					**50.000.000**
	RM	50.000.000	01 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Tata Niaga dan Distribusi Pangan	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	68 Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
			02 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Usaha Pangan dan Pertanian	ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	716 Rekomendasi Kebijakan	42.650.000
			03 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Keterjangkauan dan Keamanan Pangan	ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	57 Rekomendasi Kebijakan, Rekomendasi	3.350.000
			04 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Sumber Daya Maritim				
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**156.987.149**
	RM	156.987.149	01 Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	AAG	Peraturan Menteri	3 PerMen, Perka	600.000
				AEC	Kerja sama	2 Kesepakatan	638.131
				BMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	200.000
				CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	650.000
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	148.743.298

SK No 160739 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 131
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100 Unit, m2, Paket	200.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	50 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.100.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	59 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.855.720

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 132

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**132**	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**				**262.557.371**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**				**262.557.371**
3 Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**				**72.944.890**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**189.612.481**
Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**				**72.944.890**
	RM	72.944.890	01 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	16 Rekomendasi Kebijakan	20.158.191
			02 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Pengembangan Konektivitas	ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	19 Rekomendasi Kebijakan	17.712.050
			03 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur Dasar	ABT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	30 Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen	35.074.649
			04 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Pembangunan Perumahan dan Saran dan Prasarana Permukiman			
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**				**189.612.481**
	RM	189.612.481	01 Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	BMA Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	2.500.000
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	19 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	162.952.311
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	31 Unit, m2, Paket	12.785.520
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	7 Orang, Layanan, Rekomendasi	5.000.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 132

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	36 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.374.650

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 134

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**134**	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**					**333.585.580**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**333.585.580**
3 Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**					**53.708.482**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**279.877.098**
Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**					**53.708.482**
	RM	53.708.482	01 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran	ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	14 Rekomendasi Kebijakan		7.000.000
			02 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	ABN Kebijakan Bidang Sosial	12 Rekomendasi Kebijakan		8.300.000
			03 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu	ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	12 Rekomendasi Kebijakan		6.000.000
			04 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan	AEA Koordinasi	7 kegiatan		19.908.482
			05 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses	PBN Kebijakan Bidang Sosial	7 Rekomendasi Kebijakan		10.500.000
			06 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Koordinasi Kebijakan Kemandirian Sosial dan Ekonomi	PEA Koordinasi	3 kegiatan		2.000.000
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**279.877.098**

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 134

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
RM 279.877.098	01 Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1 Rekomendasi Kebijakan	766.556
		ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1 Rekomendasi Kebijakan	741.273
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	18 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	256.452.338
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	64 Unit, m2, Paket	12.246.473
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	180 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.853.740
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	37 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	7.816.718

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**135 KEMENTERIAN HUKUM**				**4.221.215.291**
2 Fungsi	**03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN**				**4.145.026.344**
	10 PENDIDIKAN				**76.188.947**
3 Program	**1) BB Program Pembentukan Regulasi**				**47.036.578**
	2) BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				**780.163.540**
	3) WA Program Dukungan Manajemen				**3.394.015.173**
Program	**1) BB Program Pembentukan Regulasi**				**47.036.578**
	RM 47.036.578	01 Meningkatnya kualitas peraturan-perundang-undangan	AAA Undang-Undang	5 UU, RUU	1.071.452
		02 Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional	AAC Peraturan Pemerintah	4 PP, RPP	493.273
		04 Meningkatnya Kepatutan Hukum Lembaga Hukum	AAD Peraturan Presiden	4 PerPres, R.Perpres	537.605
			AAG Peraturan Menteri	4 PerMen, Perka	166.044
			ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3.575 Rekomendasi Kebijakan	26.948.255
			ADG Standarisasi Profesi dan SDM	700 Orang	1.661.954
			AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6 NSPK	802.675
			BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	64 Lembaga	2.626.663
			BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 Lembaga	299.084
			BMA Data dan Informasi Publik	1.037 dokumen, Peta, Data	4.270.931
			FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	33 Laporan, Layanan	741.718
			PAA Undang-Undang	5 UU, RUU	3.245.961
			PAD Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres	100.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3	Rekomendasi Kebijakan	1.920.963
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	350.000
		QMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	1.900.000
Program 2) BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					**780.163.540**
RM 74.865.162	01 Terwujudnya Penegakan Hukum AHU yang Profesional	ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1	Rekomendasi Kebijakan	900.000
PNBP 705.298.378	02 Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	655	Orang	980.998
	03 Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional	AEC Kerja sama	72	Kesepakatan	15.313.625
	04 Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	6.400	orang	2.553.328
	05 Meningkatnya Kepatutan Hukum Masyarakat Indonesia	AEH Promosi	68	promosi	6.208.600
	06 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	16	NSPK	27.226.635
	07 Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.700	Orang, Akta, Bidang, Laporan	4.988.552
	08 Meningkatnya Kemudahan Berusaha pada Layanan Badan Usaha dan Keperdataan	BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	30	Lembaga	9.649.805
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	334.675	layanan	184.997.566
		BCB Perkara Hukum Lembaga	119	Perkara	5.889.516
		BCE Penanganan Perkara	32	Perkara	4.720.114
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	295	Lembaga	1.877.217
		BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	9.615	Orang	1.614.994
		BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	30	Produk	1.195.216

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4.716 Lembaga	36.397.345
		BLB Persidangan Lembaga Eksekutif	113 sidang	8.414.640
		BMA Data dan Informasi Publik	736 dokumen, Peta, Data	21.553.976
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit	82.887.543
		CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	14.084.200
		CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	34 Unit	198.714.318
		CDS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	16.400.000
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	65.382.295
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	33 Laporan, Layanan	1.886.338
		QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	6.271 Orang	50.168.000
		QBC Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	843 Kelompok Masyarakat	8.994.810
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	66 Lembaga	6.625.000
		QMA Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	538.907
Program **3) WA Program Dukungan Manajemen**				**3.394.015.173**
RM 2.923.697.575	02 Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	94 Rekomendasi Kebijakan	7.789.839
PNBP 470.317.598	03 Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum	ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	9 Rekomendasi Kebijakan	1.138.520
	04 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	2.260 Orang	4.130.334

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	05 Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Hukum	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	3.066 orang	496.704
	06 Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangar Kompetensi SDM Bidang Hukum	BMA	Data dan Informasi Publik	7 dokumen, Peta, Data	1.492.943
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8 Unit	73.260.710
		CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	223 Unit	28.643.140
		DCG	Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	55 Orang	784.460
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	320 Layanan, Perkara	2.815.607.523
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5.470 Unit, m2, Paket	250.440.836
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	62.964 Orang, Layanan, Rekomendasi	98.360.735
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	404 Layanan, Rekomendasi	99.985.670
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	10 Sistem Informasi	1.193.280
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1 Lembaga	227.960
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	4.530.814
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	1.000.480
		UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	462 Orang	4.931.225

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 136
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga **136 KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA**					**718.129.472**
2 Fungsi **03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					**718.129.472**
3 Program **1) BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM**					**235.078.185**
2) WA Program Dukungan Manajemen					**483.051.287**
Program **1) BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM**					**235.078.185**
RM 235.078.185	01 Terwujudnya penegakan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia	AAD Peraturan Presiden	2	PerPres, R.Perpres	10.000
	02 Meningkatnya manfaat PUU dalam perlindungan Hak Asasi Manusia	AAG Peraturan Menteri	1	PerMen, Perka	10.000
	03 Meningkatnya kesadaran HAM Pemerintah dan Masyarakat Indonesia	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	14	Rekomendasi Kebijakan	12.269.386
		AEA Koordinasi	3	kegiatan	5.860.866
		AEB Forum	1	forum	10.000.000
		AEG Konferensi dan Event	5	Kegiatan	8.178.000
		AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	2.259.140
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	1.410	layanan	10.595.340
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	42	Lembaga	5.122.015
		BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	113.521	Orang	67.113.921
		BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	128	Kelompok Masyarakat	2.316.349
		BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	84	Badan usaha	5.375.591
		BEH Bantuan Kelompok Masyarakat	21	Kelompok Masyarakat	10.668.634

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 136
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	23 Orang, Kelompok Masyarakat	6.016.572
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	47 Laporan, Layanan	8.491.040
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	331 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	5.035.484
		FBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	489 Desa, Desa/Kelurahan	49.715.847
		PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	201 Rekomendasi Kebijakan	7.540.000
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	955 Lembaga	12.500.000
		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	54 Badan usaha	3.000.000
		QMA Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	3.000.000
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen				**483.051.287**
RM 483.051.287	01 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian HAM	ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	3 Rekomendasi Kebijakan	477.106
	02 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kementerian HAM	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	500 Orang	1.037.422
		AEC Kerja sama	9 Kesepakatan	428.939
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3 Lembaga	698.781
		BMA Data dan Informasi Publik	2 dokumen, Peta, Data	29.184
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	5 Unit	1.128.234
		CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	26.590
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	187 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	432.208.638

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 136
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2.587	Orang, Layanan, Rekomendasi	10.284.421
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	250	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	20.371.987
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	54.690
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	900	Orang	3.305.295
		PAA Undang-Undang	1	UU, RUU	1.000.000
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	12.000.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 137

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**137**	**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**					**18.849.074.581**
2 Fungsi	**03**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					**18.849.074.581**
3 Program	**1) BF**	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**					**5.777.350.112**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**13.071.724.469**
Program	**1) BF**	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**					**5.777.350.112**
	PNBP	2.794.160.312	01 Terwujudnya pemenuhan hak bagi tahanan, anak dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap bermasyarakat	AEA Koordinasi	20	kegiatan	2.046.518
	RM	2.983.189.800	02 Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian	AEB Forum	10	forum	2.795.032
			03 Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian	AEC Kerja sama	15	Kesepakatan	11.168.427
				AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	27	NSPK	48.934.662
				BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	4.818.872	Orang, Akta, Bidang, Laporan	220.644.656
				BAH Pelayanan Publik Lainnya	2	layanan, Rekomendasi	1.461.647.260
				BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	288.136	Orang	2.723.000.000
				BHB Operasi Bidang Keamanan	2.976	operasi, Hari Operasi	128.400.940
				BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	11.910	Orang	96.030.722
				BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1.300	Layanan	17.448.796
				BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	2.812	Orang, Kelompok Masyarakat	105.264.753
				BMA Data dan Informasi Publik	4	dokumen, Peta, Data	239.387.716

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 137

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Unit	246.909.000
				CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Unit	120.370.734
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	808	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	84.414.114
				FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	147.427.044
				PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	5.963.642
				QHB Operasi Bidang Keamanan	1.001	operasi, Hari Operasi	41.551.503
				QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	22.742.401	Orang	73.944.593
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**13.071.724.469**
	RM	11.231.103.304	01 Meningkatnya Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	3.095.175
	PNBP	1.840.621.165	02 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.453	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	10.757.243.588
			03 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.682	Unit, m2, Paket	2.061.103.414
			04 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	180	Orang, Layanan, Rekomendasi	128.871.173
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	543	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	115.356.990
				PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1	Rekomendasi Kebijakan	6.054.129

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 138

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**138**	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**					**56.682.130.000**
2 Fungsi	**10**	**PENDIDIKAN**					**56.682.130.000**
3 Program	**1) DF**	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**					**27.290.347.151**
	2) DI	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**					**21.155.833.945**
	3) DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**3.210.177.351**
	4) DU	**Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan**					**198.217.983**
	5) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**4.827.553.570**
Program	**1) DF**	**Program Wajib Belajar 13 Tahun**					**27.290.347.151**
	RM	27.290.347.151	01 Terwujudnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	BEI	Bantuan Lembaga	943 Lembaga	280.368.949
				QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.435 Lembaga	158.631.424
				QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	253.215 Orang	114.879.846
				QEN	Bantuan Peserta Didik	19.488.146 Orang	13.980.373.017
				RAA	Sarana Bidang Pendidikan	2.185 Paket, Unit, m2	180.316.770
				RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	11.109 unit	12.575.777.145
Program	**2) DI**	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**					**21.155.833.945**
	RM	20.991.713.615	01 Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	11 Rekomendasi Kebijakan	12.774.029

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 138

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
BLU	161.437.398		AEE	Kemitraan	103 Kesepakatan	25.918.429
PNBP	2.682.932		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	105.000 orang	8.982.427
			BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	5.676 Orang, Akta, Bidang, Laporan	346.264.618
			BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4.050 Orang	56.770.803
			BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	500 Lembaga	5.267.260
			BMA	Data dan Informasi Publik	620 dokumen, Peta, Data	63.048.000
			DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	36.175 Orang	266.046.773
			DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	44 model, Desain	9.533.261
			PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	35.008 Rekomendasi Kebijakan	287.914.750
			PDE	Akreditasi Lembaga	99.235 Lembaga	304.120.044
			PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	41.957 Orang	671.206.854
			PEE	Kemitraan	15 Kesepakatan	4.292.204
			QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	3.508.000 Orang, Akta, Bidang, Laporan	392.411.517
			QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.068.402 Lembaga	1.525.345.855
			QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	222.728 Orang	1.479.763.798
			QEA	Bantuan Masyarakat	798.905 Orang	14.126.587.721
			QEN	Bantuan Peserta Didik	3.000 Orang	61.471.548
			QGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	750 Lembaga	3.482.430
			QMA	Data dan Informasi Publik	1.885 dokumen, Peta, Data	32.760.667

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 138
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				QMB Komunikasi Publik	15 layanan		56.931.789
				SCI Pelatihan Bidang Pendidikan	91.886 Orang		916.973.403
				SDC Penelitian dan Pengembangan Modeling	10 model, Desain		2.552.000
				UAB Sistem Informasi Pemerintahan	29 Sistem Informasi		368.000.889
				UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	266 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota		127.412.876
Program	**3) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**3.210.177.351**
	RM	3.205.439.436	01 Meningkatnya Pembelajaran dan Produktivitas Vokasi	PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	14 Rekomendasi Kebijakan		1.769.404
	PNBP	4.737.915		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	258.000 Orang		311.496.390
				PEC Kerja sama	271 Kesepakatan		23.023.770
				QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5.854 Lembaga		170.140.156
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	22.710 Orang		114.123.511
				QMA Data dan Informasi Publik	11 dokumen, Peta, Data		128.589.457
				RAA Sarana Bidang Pendidikan	66 Paket, Unit		69.590.721
				RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	640 unit		2.000.207.329
				SCI Pelatihan Bidang Pendidikan	24.225 Orang		391.236.613
Program	**4) DU**	**Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan**					**198.217.983**
	RM	197.226.633	01 Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.539 Lembaga		12.748.784

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 138
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	PNBP	991.350		BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	5	Orang	3.126.529
				BMA Data dan Informasi Publik	46	dokumen, Peta, Data	3.773.908
				PEG Konferensi dan Event	157	Kegiatan	44.214.682
				QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	387	Lembaga	34.102.536
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	221.038	Orang	48.101.322
				QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	265	Kelompok Masyarakat	16.269.455
				QMA Data dan Informasi Publik	149	dokumen, Peta, Data	35.880.767
Program	**5) WA Program Dukungan Manajemen**						**4.827.553.570**
	RM	4.826.478.414	01 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	AEC Kerja sama	1	Kesepakatan	7.887.347
	PNBP	1.075.156		BAH Pelayanan Publik Lainnya	22	layanan	62.342.227
				BMA Data dan Informasi Publik	3	dokumen, Peta, Data	190.750.087
				BMB Komunikasi Publik	158	layanan	72.116.112
				CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	Unit	61.990.743
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	971	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.760.227.915
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.714	Unit, m2, Paket	176.296.204
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	20.379	Orang, Layanan, Rekomendasi	209.825.400
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	651	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	199.994.447
				FAB Sistem Informasi Pemerintahan	14	Sistem Informasi	3.505.550

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 138

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	64 Layanan, Dokumen	38.808.847
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	42 Laporan, Layanan	15.239.287
		FAH Pengelolaan Keuangan Negara	46 Layanan	23.061.759
		QMA Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	5.507.645

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**139**	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**					**61.873.870.000**
2 Fungsi	**10**	**PENDIDIKAN**					**61.873.870.000**
3 Program	**1) DK**	**Program Pendidikan Tinggi**					**41.520.922.645**
	2) KB	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**					**1.082.500.000**
	3) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**19.270.447.355**
Program	**1) DK**	**Program Pendidikan Tinggi**					**41.520.922.645**
	RM	28.286.581.310	01 Meningkatnya partisipasi, produktivitas, dan daya saing pendidikan tinggi	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	6 Rekomendasi Kebijakan	6.000.000
	BLU	9.228.849.612		ADD	Standarisasi Lembaga	490 Lembaga	14.061.600
	SBSN	1.550.806.101		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	12.974 Orang, Akta, Bidang, Laporan	296.564.083
	PNBP	991.451.232		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3.391 Lembaga	98.598.779
	RMP	7.530.000		BEI	Bantuan Lembaga	561 Lembaga	6.327.166.220
	PLN	1.408.051.633		BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	66.247 Orang	2.704.297.187
	HLN	47.652.757		CAA	Sarana Bidang Pendidikan	3.321 Paket, Unit	666.916.348
				CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	930 unit	1.414.413.348
				DBA	Pendidikan Tinggi	3.341.100 Orang	8.186.385.148
				DBE	Pendidikan Non Gelar	2.555 Orang	7.385.000
				PAD	Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres	440.000
				PDB	Akreditasi Produk	1.400 produk	23.750.000
				PDD	Standarisasi Lembaga	619 Lembaga, Unit Kerja	22.200.165

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PDE	Akreditasi Lembaga	1.760 Lembaga, Unit Kerja	48.230.748
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	4.800 Orang, Sertifikat	5.100.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12 Lembaga, Unit Kerja, Tim	87.167.793
		QEI	Bantuan Lembaga	3.233 Lembaga	1.983.482.925
		QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	1.062.818 Orang	15.906.076.144
		RAA	Sarana Bidang Pendidikan	1.497 Paket, Unit	1.551.098.092
		RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	33 unit	1.086.485.973
		SBA	Pendidikan Tinggi	4.091 Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	88.421.585
		SBE	Pendidikan Non Gelar	6.460 Orang	20.244.454
		SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	4.455 Orang, Kegiatan	213.098.691
		SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	780 produk	700.338.362
		SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	350 Purwarupa	52.500.000
		SDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	350 kekayaan intelektual	10.500.000
Program **2) KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**					**1.082.500.000**
RM 1.082.500.000	01 Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000
	07 Meningkatnya pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang sains dan teknologi	AEH	Promosi	10 promosi	3.000.000
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22 Lembaga	8.500.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	10 Kelompok Masyarakat	5.500.000
		DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	500 Orang, Kegiatan	10.000.000
		DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	50 model, Desain	10.000.000
		PEC	Kerja sama	12 Kesepakatan	5.000.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	9 Lembaga	20.000.000
		QEI	Bantuan Lembaga	25 Lembaga	20.000.000
		RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	4 unit	975.000.000
		SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	40 Orang	15.000.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	10.000.000
Program 3) WA Program Dukungan Manajemen					**19.270.447.355**
RM 19.270.447.355	01 Meningkatnya tata kelola Kementerian yang berkualitas	ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan	4.720.450
		AEC	Kerja sama	2 Kesepakatan	4.877.376
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2 Orang, Akta, Bidang, Laporan	2.000.000
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan	819.714
		BMA	Data dan Informasi Publik	5 dokumen, Peta, Data	8.017.636
		BMB	Komunikasi Publik	1 layanan, konten	1.490.607
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	61.261.799
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	524 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	19.049.505.233

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	555 Unit, m2, Paket	19.730.122
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.672 Orang, Layanan, Rekomendasi	16.079.242
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	351 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	88.634.726
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	5 Sistem Informasi	10.912.153
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	650 orang	2.398.297

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 140

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**140**	**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN**					**1.507.391.821**
2 Fungsi	**10**	**PENDIDIKAN**					**1.507.391.821**
3 Program	**1) DV**	**Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan**					**654.693.728**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**852.698.093**
Program	**1) DV**	**Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan**					**654.693.728**
	RM	592.419.000	01 Terwujudnya revitalisasi nilai budaya dan penguatan kearifan lokal di masyarakat	ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	71	Rekomendasi Kebijakan	5.962.385
	BLU	62.274.728	02 Terwujudnya pengelolaan dan pemajuan warisan budaya dalam memperkaya kebudayaan nasional	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	200	Orang	3.838.810
			03 Terwujudnya rekognisi global budaya Indonesia melalui penguatan diplomasi, promosi dan kerja sama	AEG Konferensi dan Event	166	Kegiatan	31.730.233
			04 Terwujudnya Talenta Nasional bidang seni dan budaya yang unggul dan berkualitas	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	16	NSPK	5.700.000
			05 Terwujudnya pengelolaan Kekayaan Budaya Nasional secara optimal dan komprehensif yang mendukung produktivitas	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	4.000	Orang, Akta, Bidang, Laporan	4.400.000
			06 Terwujudnya keterlibatan kelompok masyarakat berkreatifitas dan berekspresi budaya	BMA Data dan Informasi Publik	239	dokumen, Peta, Data	17.743.446
				PEB Forum	4	forum	5.000.000
				PEG Konferensi dan Event	6	Kegiatan	45.000.000
				PEH Promosi	4	promosi	15.000.000
				QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	859.053	Orang, Akta, Bidang, Laporan	51.898.669
				QAH Pelayanan Publik Lainnya	3	layanan	3.763.190

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 140
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	690	Lembaga	28.413.013
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4.053	Orang	81.643.000
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.365	Kelompok Masyarakat	68.295.999
		QMA Data dan Informasi Publik	9.988	dokumen, Peta, Data	123.289.781
		RBN Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	9	unit	4.659.000
		RDN OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	100.461	unit	135.753.090
		SCD Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	360	Orang	4.712.112
		UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	100	Desa, DesaKelurahan	17.891.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**852.698.093**
RM 852.698.093	01 Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Kebudayaan yang berkualitas	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	3.649.335
	02 Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal yang berkualitas	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	90	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	803.581.240
	03 Terwujudnya sistem Sistem Pengendalian dan Pengawasan di Kementerian Kebudayaan yang optimal	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	49	Unit, m2, Paket	1.980.500
	04 Terwujudnya Tata Kelola Inspektorat Jenderal yang Berkualitas	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1	Orang, Layanan, Rekomendasi	5.079.540
	05 Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi yang berkualitas	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	57	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	34.462.118
	06 Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Diplomasi, Promosi dan Kerja Sama yang berkualitas	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi	1.945.360
	07 Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yang berkualitas	QMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	2.000.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 141

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga **141 KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH**				**579.031.717**
2 Fungsi **09 AGAMA**				**579.031.717**
3 Program **1) DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**				**484.964.329**
2) WA Program Dukungan Manajemen				**94.067.388**
Program **1) DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**				**484.964.329**
RM 484.964.329	01 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman	PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	3 Rekomendasi Kebijakan	7.591.849
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	311.434 Orang, Akta, Bidang, Laporan	36.606.641
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	3.000 layanan	15.680.380
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	324.588 Orang	356.635.951
		QIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	7 Layanan	27.731.510
		QMA Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	40.517.998
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**94.067.388**
RM 94.067.388	01 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	8 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	93.467.388
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	60 Orang, Layanan, Rekomendasi	100.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	4 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	500.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 142

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**142**	**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**					**551.848.230**
2 Fungsi	**09**	**AGAMA**					**551.848.230**
3 Program	**1) DC**	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**					**391.021.061**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**160.827.169**
Program	**1) DC**	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**					**391.021.061**
	BLU	57.988.916	02 Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	AEE	Kemitraan	30 Kesepakatan	12.300.000
	RM	333.032.145	03 Meningkatnya kualitas kehalalan produk	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8 NSPK	4.500.000
			04 Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	PDC	Sertifikasi Produk	1.368.000 produk	335.752.169
			06 Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	PDE	Akreditasi Lembaga	33 Lembaga	20.700.000
			07 Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	350 Lembaga	8.021.061
				QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.300 Orang	2.500.000
				QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.100 Lembaga	7.247.831
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**160.827.169**
	RM	160.827.169	01 Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	16.000.000
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	105.917.045
				EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Unit, m2, Paket	36.172.924

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 142

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.500.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	160 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.237.200

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**143**	**KEMENTERIAN KEHUTANAN**					**6.039.285.258**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**4.976.507.615**
	05	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**					**986.777.643**
	10	**PENDIDIKAN**					**76.000.000**
3 Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**112.348.750**
	2) FF	**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**					**1.723.704.412**
	3) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**4.203.232.096**
Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**112.348.750**
	PNBP	21.420.000	02 Sumber Daya Manusia Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan kehutanan yang berkelanjutan	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	1.500 Orang	2.150.000
	RM	90.928.750		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan	1.800.000
				BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	700 Orang	2.000.000
				CEA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	100 Hektar	1.000.000
				DCE	Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	1.587 Orang	7.141.500
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	800.000
				EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	865 Orang, Layanan, Rekomendasi	3.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7	Unit	4.200.000
				SAE Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanaan dan Lingkungan Hidup	499	Orang	74.500.000
				SCE Pelatihan Bidang Kehutanaan dan Lingkungan Hidup	4.814	Orang	15.757.250
Program	**2) FF**	**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**					**1.723.704.412**
	RM	478.944.472	01 Peningkatan daya dukung daerah aliran sungai yang berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati melalui pelaksanaan rehabilitasi hutan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan	ABV Kebijakan Bidang Kehutanan	47	Rekomendasi Kebijakan	31.313.793
	PNBP	1.028.160.000	02 Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	4.000.000
	HLN	216.599.940	03 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	7	Lembaga	365.400
			04 Meningkatan peran perhutanan sosial dalam penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	2.525	Badan usaha	12.473.000
			05 Penegakan hukum kehutanan dan pengendalian kebakaran hutan yang berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	BAH Pelayanan Publik Lainnya	468	layanan	13.691.133

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	06 Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	BCE Penanganan Perkara	7 Perkara		3.000.000
	07 Meningkatkan peran perhutanan sosial dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	294 Lembaga		129.121.548
	08 SDM Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung peran hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.130 Orang		5.100.000
	09 Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga	BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat		58.592.976
	10 Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	100 UMKM		10.960.000
	11 Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	60 Badan usaha		5.300.000
	12 Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem	BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	295 Badan Usaha		9.000.000
	13 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	BMA Data dan Informasi Publik	771 dokumen, Peta, Data		16.455.426
	14 Meningkatkan peran perhutanan sosial dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17 Unit		76.553.382
	15 Meningkatnya layanan dukungan tugas teknis kementerian	CDK OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	28 unit		778.000
		PAD Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres		1.000.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PBV Kebijakan Bidang Kehutanan	536	Rekomendasi Kebijakan	86.460.999
		PEE Kemitraan	20	Kesepakatan	1.170.000
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	2.000	orang	200.000
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	1	Orang, Akta, Bidang, Laporan	1.650.000
		QAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	368	Badan usaha	21.595.000
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	116	layanan	13.490.000
		QCE Penanganan Perkara	42	Perkara	67.861.107
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	115	Lembaga	9.523.000
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.681	Orang	25.810.000
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2.844	Kelompok Masyarakat	146.533.543
		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	456	Badan usaha	25.522.000
		QHC Operasi Bidang Penanggulangan Bencana	665	operasi	40.845.056
		QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	643	Badan Usaha	29.250.525
		QMA Data dan Informasi Publik	439	dokumen, Peta, Data	38.280.000
		RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.030	Unit	54.991.353
		RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	21.580.005	unit	216.250.000
		RBO Prasarana Pengembangan Kawasan	22.501	bidang, hektar	147.486.372
		RDK OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9	unit	569.439
		REA Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	2.263.034	Hektar	377.261.360

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		REB Konservasi Jenis/Spesies	185 Spesies, Lokasi	4.500.000
		SCE Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	170 Orang, Peta, Data	10.250.000
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	34 Sistem Informasi	26.500.000
Program **3) WA Program Dukungan Manajemen**				**4.203.232.096**
RM 4.181.812.096	01 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	ABV Kebijakan Bidang Kehutanan	6 Rekomendasi Kebijakan	2.350.091
PNBP 21.420.000	02 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	AEA Koordinasi	3 kegiatan	2.175.391
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan	1.181.250
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	574 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	4.171.146.721
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	150 Unit, m2, Paket	7.213.859
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2.501 Orang, Layanan, Rekomendasi	2.336.260
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	118 Dokumen, Layanan, Laporan Rekomendasi	14.832.024
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	1.996.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**144**	**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**					**1.396.394.243**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**839.697.829**
	05	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**					**556.696.414**
3 Program	**1) FB**	**Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**					**58.790.177**
	2) FD	**Program Kualitas Lingkungan Hidup**					**476.441.690**
	3) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**861.162.376**
Program	**1) FB**	**Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**					**58.790.177**
	RM	47.156.777	01 Menurunnya emisi GRK dari 5 sektor NDC yang terverifikasi	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	11 Lembaga	12.634.400
	HLN	11.633.400	02 Menurunnya tingkat kerentanan iklim di lokasi prioritas	PBS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	7 Rekomendasi Kebijakan, Rekomendasi	7.097.112
			03 Meningkatnya PNBP dari Ekonomi Karbon	QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan	1.612.811
				QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5 Lembaga	1.050.000
				QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	323 Kelompok Masyarakat	14.191.382
				QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	80 Badan Usaha	2.430.000
				QII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	40 Hektar, Layanan	5.014.505
				QMA	Data dan Informasi Publik	8 dokumen, Peta, Data	5.062.663
				RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20 Unit, Pos	8.086.012
				UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1 Laporan, Layanan	1.611.292

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
Program 2) FD Program Kualitas Lingkungan Hidup				**476.441.690**
RM 476.441.690	01 Meningkatnya penguatan kebijakan di bidang lingkungan hidup	ABJ Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	11 Rekomendasi Kebijakan	5.500.000
	02 Meningkatnya penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan rekomendasi perubahan iklim yang berkelanjutan	ADA Standarisasi Produk	10 produk	100.000
	03 Meningkatnya kualitas air	ADF Sertifikasi Lembaga	3 Lembaga, Badan Usaha	100.000
	04 Meningkatnya kualitas udara	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	450 Orang	700.000
	05 Meningkatnya kualitas lahan	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3 NSPK	75.000
	06 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	675 Badan usaha	1.150.000
	07 Meningkatnya kualitas air laut	BAH Pelayanan Publik Lainnya	21 layanan	4.371.000
	08 Meningkatnya layanan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas lingkungan hidup	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	17 Lembaga	2.171.713
	09 Meningkatnya Kualitas Ekosistem Esensial	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	390 Orang	945.237
	10 Meningkatnya pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	1.977.517
	11 Meningkatnya pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	60 Badan usaha	7.196.023
	12 Meningkatnya penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	8 Industri	1.643.310
	13 Meningkatnya pengelolaan sampah	BMA Data dan Informasi Publik	2 dokumen, Peta, Data	1.100.000
	14 Menurunnya ancaman kehilangan keanekaragaman hayati	CCG OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2 Unit	2.050.000
	15 Menurunnya emisi GRK dari sub sektor limbah padat domestik	CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	2.028.933
	16 Meningkatnya nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup	DBA Pendidikan Tinggi	8 Orang	391.559

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	17 Meningkatnya PNBP dari Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup	DCE	Pelatihan Bidang Kehutanianan dan Lingkungan Hidup	250 Orang	3.785.600
	18 Meningkatnya penegakan hukum dibidang lingkungan hidup	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	100.000
	19 Meningkatnya Indeks Produktifitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	357 Orang, Layanan, Rekomendasi	300.000
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	4 Sistem Informasi	5.189.682
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	375 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	32.813.214
		PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	54 Rekomendasi Kebijakan	10.200.000
		PDA	Standarisasi Produk	3 produk	300.000
		PEB	Forum	7 forum	700.000
		PEE	Kemitraan	15 Kesepakatan	483.300
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	17 NSPK	665.000
		QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	21 Lembaga	525.000
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2.489 layanan	20.307.526
		QCE	Penanganan Perkara	64 Perkara	51.785.467
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.455 Lembaga	5.753.698
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	186 Kelompok Masyarakat	24.717.021
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	136 Badan usaha	7.816.109
		QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	3.949 Industri	17.146.434
		QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	805 Badan Usaha	48.932.542

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QMA Data dan Informasi Publik	2.175	dokumen, Peta, Data	39.621.879
		RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	57	Unit	86.339.139
		RBR Dukungan Teknis	2	Dokumen	2.300.000
		RCG OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	388	Unit	23.562.000
		REA Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	430	Hektar	5.850.986
		SCE Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	1.300	Orang	2.600.000
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi	6.510.000
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2.380	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	22.386.005
		UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	45	Desa, DesaKelurahan	24.250.796
Program **3) WA Program Dukungan Manajemen**					**861.162.376**
RM 861.162.376	01 Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi KLH yang agile, efektif, dan efisien	AEA Koordinasi	8	kegiatan	2.808.586
	02 Meningkatnya laporan keuangan KLH yang transparan dan akuntabel	BAH Pelayanan Publik Lainnya	4	layanan	3.361.562
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	144	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	818.334.524
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	201	Unit, m2, Paket	18.302.878
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2.501	Orang, Layanan, Rekomendasi	3.139.262
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	184	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	11.601.681

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	4 Sistem informasi	3.613.883

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					118.500.000.000
2 Fungsi	04	EKONOMI					82.218.820.884
	06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					13.220.624.577
	10	PENDIDIKAN					23.060.554.539
3 Program	1) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					140.648.866
	2) FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air					32.095.164.080
	3) GA	Program Infrastruktur Konektivitas					42.606.582.257
	4) GM	Program Prasarana Strategis					23.910.726.854
	5) IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					10.694.320.539
	6) WA	Program Dukungan Manajemen					9.052.557.404
Program	1) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					140.648.866
	RM	129.407.739	01 Meningkatnya SDM Vokasional Pendidikan Bidang Pekerjaan Umum yang Kompeten dan Siap Kerja	ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga, Unit Kerja	1.000.000
	PNBP	11.241.127		AEC	Kerja sama	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	500.000
				BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	3 Lembaga	19.741.127
				CAA	Sarana Bidang Pendidikan	1 Paket, Unit	44.000.000
				CDJ	OP Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	1 unit	19.707.739
				DAB	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	21.379 Orang	45.977.952

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				DCO Pelatihan Vokasi	2.694	Orang	7.022.048
				DDA Penelitian dan Pengembangan Produk	6	produk, RUU	2.700.000
Program	**2) FC**	**Program Ketahanan Sumber Daya Air**					**32.095.164.080**
	RM	24.932.631.073	01 Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	41	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	41.103.777
	RMP	135.229.378	02 Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi	AEA Koordinasi	79	kegiatan	74.135.984
	SBSN	2.009.353.227		BAH Pelayanan Publik Lainnya	519	layanan	255.168.946
	PLN	5.017.950.402		BHC Operasi Bidang Penanggulangan Bencana	126	operasi	380.490.990
				BHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	102	Operasi	52.250.367
				BMA Data dan Informasi Publik	145	dokumen, Peta, Data	147.364.896
				CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	12	Unit	24.934.923
				CAP Sarana Bidang Penanggulangan Bencana	51	Unit	102.300.000
				CBG Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	87	unit	1.100.119.884
				CBH Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	20	unit	304.954.607
				CBR Dukungan Teknis	1.049	Dokumen	2.499.424.038
				CBS Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	758	Km	5.040.023.989
				CCM OP Sarana Bidang Pencarian dan Penanggulangan Bencana	855	Unit	166.517.378
				CDG OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	6.285	unit	1.671.350.260

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				CDH OP Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana	652	unit	324.957.202
				CDR OP Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	51.149	Km	1.750.196.099
				RBG Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	20	unit	2.849.912.526
				RBH Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	12	unit	668.811.550
				RBS Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	884	Km	11.941.146.664
				RDG OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	1	unit	2.700.000.000
Program	**3) GA**	**Program Infrastruktur Konektivitas**					**42.606.582.257**
	RM	29.134.985.151	01 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	56	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	365.487.648
	SBSN	4.054.039.624	02 Meningkatnya kinerja pelayanan jalan tol	BEE Bantuan Kebencanaan	1	Paket	203.345.351
	RMP	609.466.388	03 Meningkatnya konektivitas jalan daerah	CBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	2.798	km	1.262.658.213
	PDN	3.005.253.840	04 Meningkatnya kualitas proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	CBF Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	26.135	m	141.824.146
	PLN	5.802.837.254		CBR Dukungan Teknis	541	Dokumen	1.958.140.852
				CDC OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	43.441	km	4.359.382.336
				CDF OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	444.896	m	516.228.040
				RBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	157	km	16.883.320.773
				RBF Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	8.753	m	1.707.364.216
				RBR Dukungan Teknis	3	Dokumen	578.676.590

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		RDC OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	4.124	km	12.276.642.360
		RDF OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	107.975	m	2.353.511.732
Program 4) GM Program Prasarana Strategis					**23.910.726.854**
RM 23.910.726.854	01 Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementeriar PU	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3	Rekomendasi Kebijakan	22.000.000
		BMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	2.800.000
		CBB Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	3	unit, Hektar	24.669.700
		CBV Prasarana Bidang Kesehatan	2	Unit	100.782.768
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	37	Layanan, Dokumen	130.600.094
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	Laporan, Layanan	8.024.689
		RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	9	unit, Hektar, KK, Literdetik, SR, Kawasan	435.853.670
		RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	1.145	unit	22.608.858.951
		RBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	7	unit	301.046.722
		RBL Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	9	unit, Ruas	255.204.707
		RBN Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	2	unit, Kawasan	20.885.553
Program 5) IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					**10.694.320.539**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	RM	7.921.071.331	01 Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan aset infrastruktur air minum, air limbah domestik, dan persampahan yang aman dan berkelanjutan¿	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	128 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	50.590.594
	SBSN	218.685.692	02 Meningkatnya Keterpaduan Infrastruktur Keciptakaryaan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan Gedung yang Andal	AEE	Kemitraan	2 Kesepakatan	4.700.000
	PLN	2.553.693.927	03 Meningkatnya Kualitas Proses Bisnis Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7 NSPK	9.008.000
	HLN	869.569		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2.863 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	50.721.961
				BHC	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	35 operasi	100.000.000
				BMA	Data dan Informasi Publik	36 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	26.474.700
				CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	161 unit, Hektar	1.289.469.678
				DCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	5.930 Orang, Kegiatan	22.982.381
				FAD	Perencanaan dan Penganggaran	38 Layanan, Dokumen	233.907.176
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	58 Laporan, Rekomendasi	110.127.836
				FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.697 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	153.808.738
				PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10 NSPK	11.700.000
				QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan	1.305.801
				RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	154.874 unit, Hektar, KK, Literdetik, SR, Kawasan	8.321.403.209
				SCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	700 Orang	5.306.472

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.588	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	302.813.993
Program 6) WA Program Dukungan Manajemen					**9.052.557.404**
RM 9.052.557.404	01 Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	AAG Peraturan Menteri	1	PerMen, Perka, RPermen	200.000
		AAH Peraturan lainnya	6	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	219.000
		ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	36	Rekomendasi Kebijakan	12.681.685
		ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	51	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	83.180.000
		ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	90	Orang, Sertifikat	198.350
		AEC Kerja sama	9	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	7.579.912
		AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	56	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	17.445.971
		BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	9	Orang, Akta, Keping, Bidang	5.966.904
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	36	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	41.321.150
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.170	Lembaga	17.541.714
		BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	30	Kelompok Masyarakat	464.764
		BMA Data dan Informasi Publik	8	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	50.559.600
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	Unit	24.248.116

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CBR	Dukungan Teknis	13 Dokumen	38.650.000
		DCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	11.266 Orang	20.814.287
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.368 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	8.359.451.704
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.330 Unit, m2, Paket	148.934.190
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	61.511 Orang, Layanan, Rekomendasi	83.392.145
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.876 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	111.952.208
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	8.920.072
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	456 Laporan, Rekomendasi	10.431.499
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.708 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	8.404.133

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 146

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	146	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.895.507.244
2 Fungsi	06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					10.895.507.244
3 Program	1) IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					9.913.546.976
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					981.960.268
Program	1) IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					9.913.546.976
	RM	9.913.546.976	01 Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	258 Rekomendasi Kebijakan	73.333.337
				AEA	Koordinasi	3 kegiatan	2.329.280
				AEE	Kemitraan	2 Kesepakatan	1.435.640
				AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	850 orang	890.000
				AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8 NSPK	3.164.884
				BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3 Lembaga	1.882.250
				BMA	Data dan Informasi Publik	52 dokumen, Peta, Data	10.782.707
				CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	212 unit, Hektar	70.922.847
				CBR	Dukungan Teknis	69 Dokumen	17.874.306
				DCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	200 Orang	828.136
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	182 Laporan, Layanan	44.058.859
				PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	20 Rekomendasi Kebijakan	4.660.000
				PEA	Koordinasi	23 kegiatan	6.621.796

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 146

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	407.136 unit, Hektar	9.674.762.934
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen				**981.960.268**
RM 981.960.268	01 Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PKP	AEC Kerja sama	6 Kesepakatan	552.728
	02 Meningkatnya Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	14 NSPK	686.085
	03 Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	BMA Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	308.000
	04 Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	117.415
	05 Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	117.610
	06 Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	437 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	938.262.839
	07 Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.370 Unit, m2, Paket	18.287.881
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.160 Orang, Layanan, Rekomendasi	5.520.300
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	154 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	17.520.129
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	472.975
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1 Laporan, Layanan	114.306

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 147

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**147**	**KEMENTERIAN PARIWISATA**					**1.851.694.285**
2 Fungsi	**08**	**PARIWISATA**					**1.245.387.121**
	10	**PENDIDIKAN**					**606.307.164**
3 Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**284.110.065**
	2) EK	**Program Pariwisata**					**603.970.253**
	3) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**963.613.967**
Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**284.110.065**
	RM	232.000.000	01 Meningkatnya kapabilitas SDM Kepariwisataan	PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	6.751 Orang	4.770.534
	PNBP	52.110.065		PEC	Kerja sama	186 Kesepakatan	4.101.768
				RAA	Sarana Bidang Pendidikan	8 Paket, Unit	14.900.000
				RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	9 unit	60.750.000
				SAD	Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	21.850 Orang	199.587.763
Program	**2) EK**	**Program Pariwisata**					**603.970.253**
	RM	597.500.000	01 Terwujudnya destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	3 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
	BLU	6.470.253	02 Meningkatnya kapasitas dan skala industri pariwisata nasional	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	2 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
			03 Meningkatnya kualitas dukungan kebijakan berbasis kajian dan jejaring kebijakan terhadap bidang pariwisata	ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	1 Rekomendasi Kebijakan	620.000
			04 Meningkatnya jumlah dan kapasitas SDM pariwisata	AEA	Koordinasi	6 kegiatan	2.110.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 147

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	05 Meningkatnya frekuensi dan kualitas wisatawan mancanegara dan Wisatawan Nusantara serta citra pariwisata Indonesia	AEC	Kerja sama	20 Kesepakatan	12.400.000
		AEE	Kemitraan	1 Kesepakatan	3.743.520
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	12.975 orang	60.920.000
		AEG	Konferensi dan Event	46 Kegiatan	12.102.750
		AEH	Promosi	43 promosi	48.898.420
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	278 NSPK	39.550.960
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.000 Orang	9.250.000
		BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	180 Badan usaha	950.000
		CAM	Sarana Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	1 Unit	100.000
		CBR	Dukungan Teknis	1 Dokumen	100.000
		CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	4.000.000
		DCD	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	20 Orang	200.000
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	5 Sistem Informasi	3.350.000
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	295 Orang, Layanan, Rekomendasi	2.650.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	1.210.000
		PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2 Rekomendasi Kebijakan	2.600.000
		PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1 Rekomendasi Kebijakan	1.400.000

SK No 160763 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 147
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PBP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	6	Rekomendasi Kebijakan	7.000.000
		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	2.000	Orang	1.562.872
		PEA Koordinasi	100	kegiatan	40.700.000
		PEC Kerja sama	6	Kesepakatan	5.482.785
		PEG Konferensi dan Event	144	Kegiatan	113.550.000
		PEH Promosi	107	promosi	190.826.945
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	730	Orang	5.649.685
		QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	38	UMKM	1.300.000
		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	241	Badan usaha	9.905.000
		QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	4	Industri	1.250.000
		QMA Data dan Informasi Publik	2	dokumen, Peta, Data	1.600.000
		RAM Sarana Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	92	Unit	4.800.000
		RBN Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	7	unit, hektar	6.474.695
		RBO Prasarana Pengembangan Kawasan	1	bidang, hektar	1.079.393
		SCD Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	700	Orang	2.633.228
Program **3) WA Program Dukungan Manajemen**					**963.613.967**
RM 963.613.967	01 Transformasi birokrasi Kemenpar yang berdampak pada kinerja strategis	BMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	3.000.000
	02 Terwujudnya Pelayanan Dukungan Manajemen Internal yang Berkualitas	BMB Komunikasi Publik	1	layanan	30.000.000
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	26	Unit	714.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 147
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	138 Unit	10.251.337
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	59 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	806.447.909
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	101 Unit, m2, Paket	40.490.220
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	950 Orang, Layanan, Rekomendasi	19.175.597
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	360 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	50.538.704
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	6 Sistem Informasi	2.996.200

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 148

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**148**	**KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF**				**528.468.567**
2 Fungsi	**08**	**PARIWISATA**				**528.468.567**
3 Program	**1) EL**	**Program Ekonomi Kreatif**				**80.300.000**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**448.168.567**
Program	**1) EL**	**Program Ekonomi Kreatif**				**80.300.000**
	RM	80.300.000	01 Penguatan kebijakan strategis ekonomi kreatif	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	25 Orang	400.000
			02 Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif	BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	100 Badan usaha	1.000.000
			03 Pengembangan skema insentif ekonomi kreatif	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	100.000
			04 Penguatan Pelindungan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif	PAD Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres	439.346
			05 Penguatan infrastruktur ekonomi kreatif	PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1 Rekomendasi Kebijakan	382.000
			06 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif	PBK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	11 Rekomendasi Kebijakan, RUU	6.138.531
			07 Peningkatan Efektivitas Pemasaran Ekonomi Kreatif	PDC Sertifikasi Produk	240 produk	1.300.000
			08 Peningkatan nilai Pendanaan dan Pembiayaan ekonomi kreatif berbasis budaya dan desain	PEA Koordinasi	2 kegiatan	600.000
			09 Peningkatan nilai Pendanaan dan Pembiayaan ekonomi kreatif berbasis digital dan teknologi	PEB Forum	1 forum	2.450.000
			10 Peningkatan nilai Pendanaan dan Pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kreativitas media	PEC Kerja sama	2 Kesepakatan	1.000.000
			11 Peningkatan Aktivasi Pemasaran dan komersialisasi Ekonomi Kreatif Kreativitas Budaya dan Desain	PEH Promosi	64 promosi	25.378.994

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 148

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	12 Peningkatan Aktivasi Pemasaran dan komersialisasi Ekonomi Kreatif Kreativitas Digital dan Teknologi	PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	150.000
	13 Peningkatan Aktivasi Pemasaran dan komersialisasi Ekonomi Kreatif Kreativitas Media	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4 Lembaga	1.800.000
	14 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif bidang kreativitas budaya dan desain terhadap PDB nasional	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	660 Orang	3.615.000
	15 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif bidang kreativitas digital dan teknologi terhadap PDB nasional	QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	122 Badan usaha, RPP	1.582.500
	16 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif bidang kreativitas media terhadap PDB nasional	QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	98 Industri	17.487.500
	17 Peningkatan ekspor subsektor ekonomi kreatif bidang kreativitas budaya dan desain	QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	82 Start Up	6.831.993
	18 Peningkatan ekspor subsektor ekonomi kreatif bidang kreativitas digital dan teknologi	QMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	500.000
	19 Peningkatan ekspor subsektor ekonomi kreatif bidang kreativitas media	RAM	Sarana Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	5 Unit	650.000
	20 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap tenaga kerja bidang kreativitas budaya dan desain	RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	1 unit	1.750.000
	21 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap tenaga kerja bidang kreativitas digital dan teknologi	SCL	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	4.440 Orang	6.744.136
	22 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap tenaga kerja bidang kreativitas media				
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**448.168.567**
RM 448.168.567	01 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	BMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	625.000
	02 Penguatan data ekonomi kreatif	BMB	Komunikasi Publik	1 layanan	2.850.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 148

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	03 Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM ekonomi kreatif	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	500.000
	04 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang berkualitas pada Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif	CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	400.000
	05 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang berkualitas pada Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	25 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	434.725.287
	06 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang berkualitas pada Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	37 Unit, m2, Paket	600.000
	07 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang berkualitas pada Deputi Bidang Kreativitas Media	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	148 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.360.080
	08 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih d Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.208.200
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	200.000
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	200 Orang	700.000
		SCL	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	200 Orang	1.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 149

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**149**	**KEMENTERIAN KOPERASI**					**962.043.615**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**962.043.615**
3 Program	**1) EM**	**Program Perkoperasian**					**648.789.275**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**313.254.340**
Program	**1) EM**	**Program Perkoperasian**					**648.789.275**
	RM	422.750.000	01 Penguatan dan Pengembangan Koperasi	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	100 orang		750.000
	BLU	226.039.275		BAF Pelayanan Publik kepada Koperasi	300 Koperasi		1.800.000
				BDF Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	360 Koperasi		22.314.210
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	26 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		186.382.645
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	64 Unit, m2, Paket		2.075.258
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	58 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		33.963.972
				FAD Perencanaan dan Penganggaran	3 Layanan, Dokumen		14.609.600
				PAA Undang-Undang	1 UU, RUU		1.500.000
				PAC Peraturan Pemerintah	2 PP, RPP		900.000
				PAD Peraturan Presiden	2 PerPres, R Perpres		750.000
				PAG Peraturan Menteri	2 PerMen, Perka		1.579.650
				PEG Konferensi dan Event	1 Kegiatan		1.500.000
				QAF Pelayanan Publik kepada Koperasi	14.588 Koperasi		23.843.048
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.160 Orang		162.140.400

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 149
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	100	Kelompok Masyarakat	2.611.672
		QDF Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	4.229	Koperasi	154.639.914
		QMA Data dan Informasi Publik	2	dokumen, Peta, Data	18.090.000
		SCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2.110	Orang	19.338.906
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen					**313.254.340**
RM 313.254.340		AEA Koordinasi	4	kegiatan	4.211.800
		AEC Kerja sama	1	Kesepakatan	1.750.000
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	15	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	209.972.140
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	24	Unit, m2, Paket	36.440.980
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1	Orang, Layanan, Rekomendasi, Rekomendasi, Unit	9.275.670
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	15	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	28.053.750
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	5	Sistem Informasi	12.950.000
		PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	3	Rekomendasi Kebijakan	10.600.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 150

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**150**	**KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**					**546.590.402**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**546.590.402**
3 Program	**1) EN**	**Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan**					**257.716.028**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**288.874.374**
Program	**1) EN**	**Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan**					**257.716.028**
	RM	237.713.268	01 Penguatan UMKM dan Kewirausahaan	BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	12.090 UMKM	34.080.044
	BLU	20.002.760		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	100.000
				FAD	Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan, Dokumen	2.982.240
				FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	3.527.200
				PAH	Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	1.000.000
				PDC	Sertifikasi Produk	20.161 produk	7.500.000
				PEA	Koordinasi	1 kegiatan	206.308
				PEC	Kerja sama	1 Kesepakatan	1.500.000
				PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	989.077
				QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	1.548 Orang	1.500.000
				QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5 Lembaga	1.350.000
				QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.315 Orang	32.733.974
				QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	51.358 UMKM	78.743.885

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 150

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	40 Start Up	2.500.000
		QEO	Bantuan Produk dan Peralatan	40 Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	11.906.308
		QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1 Lembaga	3.600.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	3 dokumen, Peta, Data	381.076
		SBE	Pendidikan Non Gelar	486 Orang	1.206.308
		SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	686 Orang	2.031.017
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	64.734.901
		UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	640 Orang	4.180.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	55 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	763.690
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**288.874.374**
RM 265.877.134	01 Penguatan Tata Kelola dalam Mendukung Reformasi Birokrasi	AEA	Koordinasi	1 kegiatan	300.000
BLU 22.997.240		BMB	Komunikasi Publik	5 layanan	4.500.000
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	19 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	250.385.690
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	210 Unit, Paket	7.990.623
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	100 Orang, Layanan, Rekomendasi	509.848
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	22 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	19.888.213
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	4.300.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 150

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		PBK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 151

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL					2.504.226.052
2 Fungsi	06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					2.504.226.052
3 Program	1) CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal					1.808.299.931
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					695.926.121
Program	1) CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal					1.808.299.931
	RM	1.594.174.322	01 Meningkatnya layanan sosial dasar, pengelolaan SDA, dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	ABN	Kebijakan Bidang Sosial	5 Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
	HLN	17.864.246	02 Meningkatnya Pemberdayaan Desa Adaptif	ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	30 Rekomendasi Kebijakan	13.500.000
	PLN	196.261.363	03 Meningkatnya peran pendampingan dalam perencanaan dan pembangunan desa	AEA	Koordinasi	2 kegiatan	900.000
			04 Meningkatnya Kemandirian Perdesaan pada Daerah Tertinggal	DCJ	Pelatihan Bidang Sosial	835 Orang	993.862
			05 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal serta layanan data desa terpublikasi	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	13 Laporan, Layanan	3.000.000
			06 Meningkatnya daya saing kawasan perdesaan dan kemandirian desa di kawasan perdesaan	FBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	10 Desa, DesaKelurahan	1.500.000
			07 Meningkatnya alokasi APBDes dan kegiatan K/L untuk program penurunan kemiskinan di desa	PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	8 Rekomendasi Kebijakan	8.338.653
			08 Meningkatnya peran BUM Desa dalam mendukung penurunan kemiskinan	PBS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	1 Rekomendasi Kebijakan, Rekomendasi	200.000
			09 Meningkatnya omzet BUM Desa yang berbadan hukum	PEA	Koordinasi	37 kegiatan	32.855.160

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 151

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	10 Tersedianya kesepahaman / kerjasama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih	PEC Kerja sama	110	Kesepakatan	16.500.000
	11 Meningkatnya Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Menurunnya Persentase Penduduk Miskin (PPM) di Daerah Tertinggal	PEH Promosi	9	promosi	4.500.000
	12 Meningkatnya Rata-rata alokasi APBD dan jumlah kegiatan K/L di Kabupaten Daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan	PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4	NSPK	350.000
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	30.896	Orang	1.237.465.271
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.838	Kelompok Masyarakat	179.524.237
		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1.508	Badan usaha	99.104.124
		RAI Sarana Pengembangan Kawasan	140	Unit	51.350.000
		RBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	5	km	6.000.000
		RBN Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	100	unit	44.400.000
		SCJ Pelatihan Bidang Sosial	4.440	Orang	20.747.172
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi	8.757.206
		UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2	Laporan, Layanan	7.500.000
		UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	160.689	Desa, DesaKelurahan	66.814.246
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**695.926.121**
RM 695.926.121	13 Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	AAG Peraturan Menteri	10	PerMen, Perka	709.655
	14 Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	ABQ Kebijakan Bidang Aparatur	17	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
	15 Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Layanan Data, dan Sistem Informasi	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	200	Orang	1.148.355

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 151

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	16 Meningkatnya Pengawasan Internal	AEA	Koordinasi	15 kegiatan	6.343.339
		AEC	Kerja sama	5 Kesepakatan	1.557.579
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	3.600 orang	1.424.596
		BMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	8.100.000
		BMB	Komunikasi Publik	1 layanan, konten	5.573.241
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	286 Unit	4.564.787
		CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	12.350.000
		CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	4.060.000
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	113 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	596.744.118
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	323 Unit, m2, Paket	13.545.269
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2.870 Orang, Layanan, Rekomendasi	11.307.394
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	282 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	21.380.595
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	2.265.548
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.200 Orang	1.851.645

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 152

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**152 KEMENTERIAN TRANSMIGRASI**				**1.902.040.784**
2 Fungsi	**06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**				**1.902.040.784**
3 Program	**1) DW Program Transmigrasi**				**1.337.635.128**
	2) WA Program Dukungan Manajemen				**564.405.656**
Program	**1) DW Program Transmigrasi**				**1.337.635.128**
	RM 1.337.635.128	01 Terselenggaranya legalisasi dan pemanfaatan lahan transmigrasi secara optimal guna menjamin kepastian hukum dan mendukung produktivitas kawasan transmigrasi	ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	44 Rekomendasi Kebijakan	29.792.623
		05 Terselenggaranya migrasi buatan dalam rangka penguatan pengembangan potensi lokal	ABT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1 Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen	74.095
		06 Terwujudnya pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di kawasan transmigrasi yang unggul, terampil, dan berdaya saing serta mampu mempercepat pembangunan dan kemandirian kawasan transmigrasi	AEA Koordinasi	76 kegiatan	20.310.740
		07 Meningkatnya penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan kawasan transmigrasi secara inklusif dan berkelanjutan	AEC Kerja sama	2 Kesepakatan	308.578
		08 Terwujudnya SDM unggul, berkarakter kebangsaan, dan berkomitmen dalam pengembangan kawasan transmigrasi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian	AEE Kemitraan	11 Kesepakatan	6.200.150
		09 Terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi melalui penguatan hilirisasi produk lokal, penciptaan lapangan kerja, dan kolaborasi dunia usaha	AEH Promosi	10 promosi	13.469.405
		10 Terwujudnya pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum dalam rangka penguatan pengembangan potensi lokal	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	22 NSPK	5.824.869

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 152
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	11 Terwujudnya pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum dalam rangka penguatan pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12	Lembaga	2.190.001
	12 Terselenggaranya migrasi buatan dalam rangka penguatan pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7.094	Orang	52.224.069
	13 Terwujudnya Kawasan transmigrasi yang mandiri melalui SDM yang berkualitas unggul	BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	32	Kelompok Masyarakat	6.043.370
		BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	30	UMKM	2.109.290
		BEB Bantuan Keluarga	67	Keluarga	407.950
		BEH Bantuan Kelompok Masyarakat	12	Kelompok Masyarakat	13.822.000
		BEI Bantuan Lembaga	82	Lembaga	22.253.167
		BEO Bantuan Produk dan Peralatan	20	Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	1.000.000
		CAI Sarana Pengembangan Kawasan	60	Unit	84.536.649
		CBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	66	km	90.558.038
		CBF Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	333	m	23.369.470
		CBS Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	6	Km	6.232.295
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	93	Laporan, Layanan	11.677.960
		PBP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	205	Rekomendasi Kebijakan	161.640.806
		QCC Perkara Hukum Kelompok Masyarakat	55	Perkara	2.592.320
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10	Lembaga	225.000
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	33.559	Orang	8.022.055
		QDE Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	271	Keluarga	6.694.201

SK No 160788 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 152
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		QEB Bantuan Keluarga	4.241 Keluarga	54.390.042
		QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi	1.000 Orang	400.271.540
		QEO Bantuan Produk dan Peralatan	9 Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	445.000
		RAI Sarana Pengembangan Kawasan	313 Unit	161.126.084
		RBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	68 km	124.423.290
		RBF Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	150 m	20.822.295
		RBS Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	3 Km	2.552.776
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	28 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.025.000
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen				**564.405.656**
RM 564.405.656	01 Menguatnya Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	AEA Koordinasi	1 kegiatan	1.466.134
	03 Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	433 Unit	7.440.716
	04 Meningkatnya layanan sarana dan prasarana dan layanan pengadaan	CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	15.895.000
	05 Meningkatnya Kualitas Penataan Peraturan Perundang-undangan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	220 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	457.529.730
	06 Terlaksananya pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5.391 Unit, m2, Paket	37.281.350
	07 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Transmigrasi	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	741 Orang, Layanan, Rekomendasi	14.915.801

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 152
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	08 Meningkatnya kinerja perencanaan dan penganggaran	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	246 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	20.663.615
	09 Meningkatnya kepuasan atas layanan dukungan manajemen	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	8 Sistem Informasi	9.213.310
	10 Meningkatnya layanan keterbukaan informasi publik			
	11 Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)			
	12 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
	13 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
	14 Meningkatnya Penerapan Pengendalian Internal Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
	15 Meningkatnya Layanan Kearsipan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
	17 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi			
	18 Meningkatnya Penerapan Pengendalian Internal Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi			
	19 Meningkatnya Layanan Kearsipan Direktorat jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi			
	20 Peningkatan kualitas layanan, pengelolaan data, dan pengembangan teknologi informasi transmigrasi			
	21 Meningkatnya Sumber Daya Manusia di Kawasan Transmigrasi			

SK No 160786 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 152
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	22 Meningkatnya layanan pengkajian dan pengembangan strategi kebijakan penyelenggaraan transmigrasi 23 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern di Kementerian 24 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Yang Bernilai Tambah 25 APIP yang Optimal dan Berintegritas 26 Meningkatnya layanan dukungan regulasi, pertimbangan hukum dan advokasi hukum 28 Meningkatnya kualitas ASN Kementerian Transmigrasi		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

SK No 160476 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN 2026

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.01] PENGELOLA UTANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	**PELAYANAN UMUM**		**0**	**0**	**0**	**599.440.898.164**	**599.440.898.164**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.01] PENGELOLA UTANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.05	PINJAMAN PEMERINTAH		0	0	0	599.440.898.164	599.440.898.164
999.01.06	Program Pengelolaan Utang Negara		0	0	0	599.440.898.164	599.440.898.164
	Pengelolaan Pembayaran Kewajiban Utang	RM	0	0	0	599.440.898.164	599.440.898.164
1	Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri		0	0	0	538.701.328.102	538.701.328.102
2	Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri		0	0	0	60.739.570.062	60.739.570.062
	JUMLAH TOTAL		**0**	**0**	**0**	**599.440.898.164**	**599.440.898.164**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] PENGELOLA HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	**PELAYANAN UMUM**		**0**	**0**	**0**	**350.610.000**	**350.610.000**
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA		0	0	0	350.610.000	350.610.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	350.610.000	350.610.000
	Pengelolaan Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dan *Banking Commission*	RM	0	0	0	350.610.000	350.610.000
1	Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing		0	0	0	349.610.000	349.610.000
2	*Banking Commission*		0	0	0	1.000.000	1.000.000
	JUMLAH TOTAL		**0**	**0**	**0**	**350.610.000**	**350.610.000**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	**PELAYANAN UMUM**		**0**	**0**	**0**	**10.649.892.145**	**10.649.892.145**
01.90	PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA		0	0	0	10.649.892.145	10.649.892.145
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	10.649.892.145	10.649.892.145
	Pengelolaan Subsidi Pajak	RM	0	0	0	10.649.892.145	10.649.892.145
1	PPh atas Komoditas Panas Bumi		0	0	0	3.645.004.553	3.645.004.553

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	PPh DTP Bunga, Imbal Hasil, dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Atau Pihak Lain Yang Mendapat Penugasan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali SBN di Pasar Internasional, Tetapi Tidak Termasuk Jasa Konsultan Hukum Lokal		0	0	0	7.004.887.592	7.004.887.592
04	**EKONOMI**		**0**	**0**	**0**	**302.658.090.890**	**302.658.090.890**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		0	0	0	36.685.721.902	36.685.721.902
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	174.950.694	174.950.694
	Pengelolaan Subsidi Kredit Program	RM	0	0	0	174.950.694	174.950.694
1	Skema Subsidi Resi Gudang		0	0	0	5.753.771	5.753.771
2	Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah		0	0	0	169.196.923	169.196.923
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	36.510.771.208	36.510.771.208

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Subsidi IJP KUR dan Bunga KUR	RM	0	0	0	36.510.771.208	36.510.771.208
1	Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR		0	0	0	16.192.000	16.192.000
2	Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat		0	0	0	36.483.962.208	36.483.962.208
3	Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)		0	0	0	10.617.000	10.617.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN		0	0	0	46.874.493.429	46.874.493.429
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	46.874.493.429	46.874.493.429

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Subsidi Pupuk	RM	0	0	0	46.874.493.429	46.874.493.429
1	Subsidi Pupuk		0	0	0	46.874.493.429	46.874.493.429
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI		0	0	0	210.060.831.700	210.060.831.700
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	210.060.831.700	210.060.831.700
	Pengelolaan Subsidi Energi	RM	0	0	0	210.060.831.700	210.060.831.700
1	Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT)		0	0	0	25.144.542.060	25.144.542.060
2	Subsidi LPG Tabung 3 Kg		0	0	0	80.269.826.037	80.269.826.037
3	Subsidi Listrik		0	0	0	104.646.463.603	104.646.463.603
04.08	TRANSPORTASI		0	0	0	8.832.660.963	8.832.660.963

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	5.864.206.808	5.864.206.808
	Pengelolaan Subsidi PSO Perkeretaapian	RM	0	0	0	5.864.206.808	5.864.206.808
1	PSO Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi		0	0	0	5.864.206.808	5.864.206.808
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	2.968.454.155	2.968.454.155
	Pengelolaan Subsidi PSO Angkutan Laut	RM	0	0	0	2.968.454.155	2.968.454.155
1	PSO Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi		0	0	0	2.968.454.155	2.968.454.155
04.09	TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		0	0	0	182.178.954	182.178.954
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	182.178.954	182.178.954

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers	RM	0	0	0	182.178.954	182.178.954
1	PSO Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Pers		0	0	0	182.178.954	182.178.954
04.90	EKONOMI LAINNYA		0	0	0	22.203.942	22.203.942
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	22.203.942	22.203.942
	Pengelolaan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah	RM	0	0	0	22.203.942	22.203.942
1	Subsidi Bunga Pinjaman Daerah		0	0	0	22.203.942	22.203.942
06	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		**0**	**0**	**0**	**10.817.821**	**10.817.821**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		0	0	0	10.817.821	10.817.821
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	10.817.821	10.817.821
	Pengelolaan Subsidi Bunga Air Bersih	RM	0	0	0	10.817.821	10.817.821
1	Subsidi Bunga Penyediaan Air Minum		0	0	0	10.817.821	10.817.821
11	**PERLINDUNGAN SOSIAL**		**0**	**0**	**0**	**5.567.434.751**	**5.567.434.751**
11.07	BANTUAN PERUMAHAN		0	0	0	5.567.434.751	5.567.434.751
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	5.567.434.751	5.567.434.751
	Pengelolaan Subsidi Perumahan	RM	0	0	0	5.567.434.751	5.567.434.751
1.	Subsidi Perumahan		0	0	0	5.567.434.751	5.567.434.751

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	JUMLAH TOTAL		**0**	**0**	**0**	**318.886.235.607**	**318.886.235.607**

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] PENGELOLA BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	PELAYANAN UMUM	RM	32.296.800.000	0	0	21.734.693.526	54.031.493.526
01	PELAYANAN UMUM	PLN	0	0	0	9.339.881.580	9.339.881.580
01	PELAYANAN UMUM	PDN	0	0	0	187.118.420	187.118.420
02	PERTAHANAN	RM	0	0	0	150.550.000.000	150.550.000.000
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	RM	0	0	5.000.000.000	4.000.000.000	9.000.000.000
04	EKONOMI	RM	0	0	0	289.762.521.406	289.762.521.406
07	KESEHATAN	RM	0	0	0	11.000.000.000	11.000.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] PENGELOLA BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN-LAIN	
08	PARIWISATA	RM	0	0	0	683.000.000	683.000.000
11	PERLIDUNGAN SOSIAL	RM	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
	JUMLAH TOTAL		**32.296.800.000**	**0**	**5.000.000.000**	**489.257.214.932**	**526.554.014.932**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	**PELAYANAN UMUM**		**0**	**376.406.836**	**0**	**514.491.403**	**890.898.239**
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		0	376.406.836	0	514.491.403	890.898.239
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	0	0	160.249.068	160.249.068
	Pengelolaan Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	RM	0	0	0	160.249.068	160.249.068

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog		0	0	0	160.249.068	160.249.068
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	376.406.836	0	0	376.406.836
	Pengelolaan Pembayaran Belanja Terkait Pengelolaan Kas Negara	RM	0	376.406.836	0	0	376.406.836

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pembiayaan Operasional BUN Pengelolaan Kas Negara		0	376.406.836	0	0	376.406.836
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus					354.242.335	354.242.335
	Pengelolaan Dana PNBP BUN Dalam Rangka Peningkatan Kinerja dan Pengawasan BUN	PNBP				354.242.335	354.242.335

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan, Pengembangan dan Pengawasan BUN					354.242.335	354.242.335
04	**EKONOMI**		**0**	**782.997.261**	**0**	**0**	**782.997.261**
04.90	EKONOMI LAINNYA		0	782.997.261	0	0	782.997.261
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	219.212.632	0	0	219.212.632
	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Dana Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama	RM	0	219.212.632	0	0	219.212.632

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Dana Dukungan Kelayakan/ *Viability Gap Fund* (VGF) pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		0	219.212.632	0	0	219.212.632
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	352.303.151	0	0	352.303.151

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Dana Fasilitas Penyiapan Proyek	RM	0	352.303.151	0	0	352.303.151
	Dana Fasilitas Penyiapan Proyek dengan Skema KPBU		0	352.303.151	0	0	352.303.151
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	206.822.210	0	0	206.822.210

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Pembayaran Kontribusi dan *Trust Fund* ke Lembaga Internasional	RM	0	206.822.210	0	0	206.822.210
	Kontribusi ke Lembaga Internasional		0	206.822.210			206.822.210
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	4.659.268	0	0	4.659.268
	Pengelolaan Dukungan Investasi Pemerintah	RM	0	4.659.268	0	0	4.659.268

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penggantian Biaya dan Margin Investasi		0	4.659.268	0	0	4.659.268
11	**PERLINDUNGAN SOSIAL**		**191.412.212.525**	**868.746.272**	**0**	**0**	**192.280.958.797**
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL		191.412.212.525	868.746.272	0	0	192.280.958.797
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		191.412.212.525	868.746.272	0	0	192.280.958.797
	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Kontribusi Sosial	RM	191.412.212.525	868.746.272	0	0	192.280.958.797

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Anggaran Manfaat Pensiun		177.121.404.794	0	0	0	177.121.404.794
2	Jaminan Pelayanan Kesehatan (BPJS Kesehatan)		12.604.516.299	0	0	0	12.604.516.299
3	Cicilan UPSL Program THT		0	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Jamkesmen dan Jamkestama		687.598.981	0	0	0	687.598.981
5	IWP Program Jaminan Kecelakaan Kerja		353.327.191	0	0	0	353.327.191
6	IWP Program Jaminan Kematian		645.365.260	0	0	0	645.365.260
7	BOP Manfaat Pensiun		0	868.746.272	0	0	868.746.272

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	JUMLAH TOTAL		**191.412.212.525**	**2.028.150.369**	**0**	**514.491.403**	**193.954.854.297**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 160459 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

V.1.RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	APBN TA 2026
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	58.515.000.000
1. DBH Pajak	26.837.190.871
a. Pajak Penghasilan	15.223.108.671
b. Pajak Bumi dan Bangunan	8.330.520.077
c. Cukai Hasil Tembakau	3.283.562.123
2. DBH Sumber Daya Alam	30.903.117.522
a. Kehutanan	745.973.828
b. Mineral dan Batubara	19.936.639.869
c. Minyak Bumi dan Gas Bumi	9.464.123.596
d. Panas Bumi	537.887.138
e. Perikanan	218.493.091
3. DBH Perkebunan Sawit	774.691.607
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	400.019.370.460
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	386.739.874.265
2. DAU ditentukan penggunaannya	13.279.496.195
a. Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.699.200.000
b. Dukungan Bidang Pendidikan	
c. Dukungan Bidang Kesehatan	4.726.152.330
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	6.854.143.865
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	154.343.290.901
a. Bidang Kesehatan	5.000.000.000
b. Bidang Konektivitas	1.874.490.454
c. Bidang Air Minum	2.376.044.690
d. Bidang Sanitasi	367.302.311
e. Bidang Pangan Pertanian	270.835.827
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	111.326.718
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	149.343.290.901
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	59.295.114.550
c. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	74.763.332.083
	12.878.672.152

URAIAN	APBN TA 2026
d. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.999.172.116
e. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	150.000.000
f. Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	125.000.000
g. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	132.000.000
3. Hibah kepada Daerah	2.746.687.810
D. Dana Otonomi Khusus	14.000.629.540
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	9.000.435.835
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	4.000.193.705
3. Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi-Provinsi di Papua	1.000.000.000
E. Dana Keistimewaan DIY	1.000.000.000
F. Dana Desa	60.570.000.000
G. Dana Insentif Fiskal	1.800.000.000
JUMLAH	692.994.978.711

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
1	Provinsi Aceh	34.356.050	730.277	35.086.327
2	Kab. Aceh Barat	2.779.590	37.190	2.816.780
3	Kab. Aceh Besar	3.020.736	49.289	3.070.025
4	Kab. Aceh Selatan	1.341.524	18.820	1.360.344
5	Kab. Aceh Singkil	1.158.549	22.110	1.180.659
6	Kab. Aceh Tengah	1.532.216	29.754	1.561.970
7	Kab. Aceh Tenggara	1.215.548	22.501	1.238.049
8	Kab. Aceh Timur	1.946.334	24.752	1.971.086
9	Kab. Aceh Utara	3.848.807	76.387	3.925.194
10	Kab. Bireuen	1.989.286	41.087	2.030.373
11	Kab. Pidie	2.033.192	73.371	2.106.563
12	Kab. Simeulue	1.035.538	16.799	1.052.337
13	Kota Banda Aceh	13.710.001	322.977	14.032.978
14	Kota Sabang	1.066.406	18.441	1.084.847
15	Kota Langsa	2.244.451	48.264	2.292.715

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
16	Kota Lhokseumawe	4.306.074	100.458	4.406.532
17	Kab. Gayo Lues	951.497	18.292	969.789
18	Kab. Aceh Barat Daya	1.167.276	18.499	1.185.775
19	Kab. Aceh Jaya	1.141.364	17.391	1.158.755
20	Kab. Nagan Raya	2.327.951	79.265	2.407.216
21	Kab. Aceh Tamiang	2.052.929	74.172	2.127.101
22	Kab. Bener Meriah	1.131.967	16.521	1.148.488
23	Kab. Pidie Jaya	1.186.143	15.312	1.201.455
24	Kota Subulussalam	1.150.044	19.144	1.169.188
25	Provinsi Sumatera Utara	113.010.257	9.874.106	122.884.363
26	Kab. Asahan	4.996.790	337.168	5.333.958
27	Kab. Dairi	2.452.182	174.363	2.626.545
28	Kab. Deli Serdang	16.678.281	823.517	17.501.798
29	Kab. Karo	3.355.914	224.894	3.580.808
30	Kab. Labuhanbatu	4.268.355	302.653	4.571.008

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
31	Kab. Langkat	5.020.624	337.895	5.358.519
32	Kab. Mandailing Natal	3.460.619	177.104	3.637.723
33	Kab. Nias	2.129.763	166.425	2.296.188
34	Kab. Simalungun	6.874.345	278.874	7.153.219
35	Kab. Tapanuli Selatan	5.268.279	219.265	5.487.544
36	Kab. Tapanuli Tengah	2.910.593	180.792	3.091.385
37	Kab. Tapanuli Utara	3.281.421	177.190	3.458.611
38	Kab. Toba	3.674.222	182.227	3.856.449
39	Kota Binjai	3.587.233	392.376	3.979.609
40	Kota Medan	82.332.232	9.738.748	92.070.980
41	Kota Pematang Siantar	5.425.614	407.370	5.832.984
42	Kota Sibolga	3.235.017	208.385	3.443.402
43	Kota Tanjung Balai	2.536.287	319.512	2.855.799
44	Kota Tebing Tinggi	2.785.465	460.975	3.246.440
45	Kota Padang Sidempuan	3.787.836	193.775	3.981.611

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
46	Kab. Pakpak Bharat	1.855.765	148.533	2.004.298
47	Kab. Nias Selatan	2.280.286	167.422	2.447.708
48	Kab. Humbang Hasundutan	2.411.705	173.661	2.585.366
49	Kab. Serdang Bedagai	4.216.135	356.741	4.572.876
50	Kab. Samosir	2.255.494	169.980	2.425.474
51	Kab. Batu Bara	6.055.922	309.971	6.365.893
52	Kab. Padang Lawas	2.623.567	183.539	2.807.106
53	Kab. Padang Lawas Utara	2.289.605	157.488	2.447.093
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	3.558.923	326.840	3.885.763
55	Kab. Labuhanbatu Utara	2.990.224	217.908	3.208.132
56	Kab. Nias Utara	2.140.155	165.913	2.306.068
57	Kab. Nias Barat	2.178.973	164.740	2.343.713
58	Kota Gunungsitoli	2.861.618	191.066	3.052.684
59	Provinsi Sumatera Barat	39.394.141	2.419.423	41.813.564
60	Kab. Lima Puluh Kota	1.964.230	117.878	2.082.108

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
61	Kab. Agam	2.624.216	130.814	2.755.030
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.442.765	67.913	1.510.678
63	Kab. Padang Pariaman	2.609.411	86.836	2.696.247
64	Kab. Pasaman	1.767.415	100.632	1.868.047
65	Kab. Pesisir Selatan	2.460.708	81.998	2.542.706
66	Kab. Sijunjung	1.697.259	68.251	1.765.510
67	Kab. Solok	1.740.237	72.929	1.813.166
68	Kab. Tanah Datar	2.217.369	100.687	2.318.056
69	Kota Bukit Tinggi	3.730.777	152.451	3.883.228
70	Kota Padang Panjang	1.658.474	111.667	1.770.141
71	Kota Padang	26.654.410	2.312.855	28.967.265
72	Kota Payakumbuh	2.235.139	130.909	2.366.048
73	Kota Sawahlunto	1.813.300	73.874	1.887.174
74	Kota Solok	2.375.736	81.972	2.457.708
75	Kota Pariaman	1.923.210	80.423	2.003.633

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
76	Kab. Pasaman Barat	2.314.026	80.153	2.394.179
77	Kab. Dharmasraya	1.947.607	95.093	2.042.700
78	Kab. Solok Selatan	2.086.811	70.141	2.156.952
79	Provinsi Riau	81.240.397	4.286.905	85.527.302
80	Kab. Bengkalis	15.668.961	637.527	16.306.488
81	Kab. Indragiri Hilir	5.773.848	437.813	6.211.661
82	Kab. Indragiri Hulu	6.028.118	281.912	6.310.030
83	Kab. Kampar	7.205.445	244.057	7.449.502
84	Kab. Kuantan Singingi	4.663.005	533.628	5.196.633
85	Kab. Pelalawan	11.735.676	216.286	11.951.962
86	Kab. Rokan Hilir	5.238.030	277.919	5.515.949
87	Kab. Rokan Hulu	6.334.258	238.662	6.572.920
88	Kab. Siak	11.242.781	246.100	11.488.881
89	Kota Dumai	12.523.235	1.000.689	13.523.924
90	Kota Pekanbaru	43.775.001	2.640.199	46.415.200

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
91	Kab. Kepulauan Meranti	4.388.049	356.599	4.744.648
92	Provinsi Jambi	22.859.229	1.162.082	24.021.311
93	Kab. Batang Hari	2.193.405	97.825	2.291.230
94	Kab. Bungo	3.384.718	167.307	3.552.025
95	Kab. Kerinci	1.604.620	60.349	1.664.969
96	Kab. Merangin	1.878.713	92.691	1.971.404
97	Kab. Muaro Jambi	3.106.177	71.588	3.177.765
98	Kab. Sarolangun	2.242.413	64.536	2.306.949
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	2.705.731	98.485	2.804.216
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.721.445	59.146	2.780.591
101	Kab. Tebo	1.972.469	69.567	2.042.036
102	Kota Jambi	14.228.294	1.082.854	15.311.148
103	Kota Sungai Penuh	1.877.241	65.802	1.943.043
104	Provinsi Sumatera Selatan	77.685.303	4.154.212	81.839.515
105	Kab. Lahat	6.981.066	180.229	7.161.295

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
106	Kab. Musi Banyuasin	8.564.782	172.196	8.736.978
107	Kab. Musi Rawas	3.860.643	150.073	4.010.716
108	Kab. Muara Enim	15.221.686	407.056	15.628.742
109	Kab. Ogan Komering Ilir	5.823.609	145.130	5.968.739
110	Kab. Ogan Komering Ulu	4.587.676	188.387	4.776.063
111	Kota Palembang	47.707.700	3.996.974	51.704.674
112	Kota Prabumulih	6.578.920	246.477	6.825.397
113	Kota Pagar Alam	2.641.189	131.171	2.772.360
114	Kota Lubuk Linggau	4.150.656	213.770	4.364.426
115	Kab. Banyuasin	5.817.907	255.743	6.073.650
116	Kab. Ogan Ilir	3.432.025	157.580	3.589.605
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3.296.095	181.456	3.477.551
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3.011.867	146.506	3.158.373
119	Kab. Empat Lawang	2.589.691	126.144	2.715.835
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3.632.133	155.484	3.787.617

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
121	Kab. Musi Rawas Utara	3.253.631	134.118	3.387.749
122	Provinsi Bengkulu	11.064.455	358.947	11.423.402
123	Kab. Bengkulu Selatan	1.375.279	41.624	1.416.903
124	Kab. Bengkulu Utara	1.763.778	58.305	1.822.083
125	Kab. Rejang Lebong	1.374.405	115.035	1.489.440
126	Kota Bengkulu	8.747.038	232.430	8.979.468
127	Kab. Kaur	995.137	23.263	1.018.400
128	Kab. Seluma	1.120.205	23.879	1.144.084
129	Kab. Mukomuko	1.532.186	40.626	1.572.812
130	Kab. Lebong	940.104	31.432	971.536
131	Kab. Kepahiang	1.160.655	27.682	1.188.337
132	Kab. Bengkulu Tengah	1.165.936	57.594	1.223.530
133	Provinsi Lampung	35.575.216	2.142.387	37.717.603
134	Kab. Lampung Barat	1.653.342	79.135	1.732.477
135	Kab. Lampung Selatan	5.124.264	179.740	5.304.004

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
136	Kab. Lampung Tengah	5.284.173	207.327	5.491.500
137	Kab. Lampung Utara	2.943.762	117.672	3.061.434
138	Kab. Lampung Timur	2.517.940	242.915	2.760.855
139	Kab. Tanggamus	2.466.143	107.424	2.573.567
140	Kab. Tulang Bawang	2.577.865	106.782	2.684.647
141	Kab. Way Kanan	2.412.963	97.412	2.510.375
142	Kota Bandar Lampung	19.557.598	1.590.412	21.148.010
143	Kota Metro	3.364.549	282.101	3.646.650
144	Kab. Pesawaran	1.993.590	74.684	2.068.274
145	Kab. Pringsewu	2.232.934	114.570	2.347.504
146	Kab. Mesuji	1.742.039	74.353	1.816.392
147	Kab. Tulang Bawang Barat	1.734.852	80.749	1.815.601
148	Kab. Pesisir Barat	1.482.899	69.951	1.552.850
149	Provinsi DKI Jakarta	7.086.173.764	400.598.439	7.486.772.203
150	Provinsi Jawa Barat	558.849.646	36.365.705	595.215.351

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
151	Kab. Bandung	29.395.588	1.760.649	31.156.237
152	Kab. Bekasi	186.172.089	6.864.183	193.036.272
153	Kab. Bogor	67.077.868	3.050.380	70.128.248
154	Kab. Ciamis	12.472.836	752.463	13.225.299
155	Kab. Cianjur	15.373.330	2.172.399	17.545.729
156	Kab. Cirebon	20.146.513	1.037.102	21.183.615
157	Kab. Garut	15.710.536	1.008.747	16.719.283
158	Kab. Indramayu	18.190.188	1.305.499	19.495.687
159	Kab. Karawang	92.805.531	2.291.722	95.097.253
160	Kab. Kuningan	12.106.753	819.167	12.925.920
161	Kab. Majalengka	14.122.023	731.319	14.853.342
162	Kab. Purwakarta	30.358.934	873.863	31.232.797
163	Kab. Subang	18.709.895	722.968	19.432.863
164	Kab. Sukabumi	19.441.648	830.489	20.272.137
165	Kab. Sumedang	16.295.062	803.473	17.098.535

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
166	Kab. Tasikmalaya	12.994.683	745.100	13.739.783
167	Kota Bandung	121.832.015	14.373.823	136.205.838
168	Kota Bekasi	51.880.638	4.753.764	56.634.402
169	Kota Bogor	26.839.738	3.061.570	29.901.308
170	Kota Cirebon	17.880.786	1.417.170	19.297.956
171	Kota Depok	34.165.229	3.515.590	37.680.819
172	Kota Sukabumi	13.463.026	941.547	14.404.573
173	Kota Tasikmalaya	15.204.296	1.105.333	16.309.629
174	Kota Cimahi	16.181.510	2.466.598	18.648.108
175	Kota Banjar	11.281.438	705.840	11.987.278
176	Kab. Bandung Barat	19.790.621	1.418.582	21.209.203
177	Kab. Pangandaran	11.196.023	675.790	11.871.813
178	Provinsi Jawa Tengah	189.335.787	16.118.165	205.453.952
179	Kab. Banjarnegara	5.533.320	358.842	5.892.162
180	Kab. Banyumas	12.185.773	788.562	12.974.335

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
181	Kab. Batang	6.734.297	346.006	7.080.303
182	Kab. Blora	5.119.859	332.404	5.452.263
183	Kab. Boyolali	6.220.529	467.468	6.687.997
184	Kab. Brebes	6.347.907	448.774	6.796.681
185	Kab. Cilacap	12.988.178	980.721	13.968.899
186	Kab. Demak	6.345.007	377.771	6.722.778
187	Kab. Grobogan	5.491.326	345.939	5.837.265
188	Kab. Jepara	9.409.277	702.296	10.111.573
189	Kab. Karanganyar	7.824.771	522.438	8.347.209
190	Kab. Kebumen	5.045.985	554.434	5.600.419
191	Kab. Kendal	6.665.612	400.475	7.066.087
192	Kab. Klaten	7.169.932	663.470	7.833.402
193	Kab. Kudus	31.896.317	1.740.148	33.636.465
194	Kab. Magelang	5.261.527	405.104	5.666.631
195	Kab. Pati	6.153.750	521.470	6.675.220

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
196	Kab. Pekalongan	4.007.624	284.425	4.292.049
197	Kab. Pemalang	4.924.895	352.129	5.277.024
198	Kab. Purbalingga	5.156.872	391.920	5.548.792
199	Kab. Purworejo	4.451.551	434.768	4.886.319
200	Kab. Rembang	4.750.156	426.591	5.176.747
201	Kab. Semarang	8.936.921	533.206	9.470.127
202	Kab. Sragen	5.456.543	369.778	5.826.321
203	Kab. Sukoharjo	8.495.729	824.616	9.320.345
204	Kab. Tegal	6.195.063	383.483	6.578.546
205	Kab. Temanggung	5.035.886	382.060	5.417.946
206	Kab. Wonogiri	5.109.125	324.206	5.433.331
207	Kab. Wonosobo	4.348.654	294.877	4.643.531
208	Kota Magelang	5.497.045	574.715	6.071.760
209	Kota Pekalongan	5.747.449	989.086	6.736.535
210	Kota Salatiga	6.068.941	665.068	6.734.009

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
211	Kota Semarang	66.802.202	6.792.051	73.594.253
212	Kota Surakarta	14.325.143	2.405.943	16.731.086
213	Kota Tegal	5.952.891	631.248	6.584.139
214	Provinsi DI Yogyakarta	36.059.825	3.325.856	39.385.681
215	Kab. Bantul	9.292.264	864.345	10.156.609
216	Kab. Gunung Kidul	6.068.492	462.126	6.530.618
217	Kab. Kulon Progo	6.371.902	463.902	6.835.804
218	Kab. Sleman	19.582.869	2.100.804	21.683.673
219	Kota Yogyakarta	18.784.182	1.651.917	20.436.099
220	Provinsi Jawa Timur	330.795.361	42.802.623	373.597.984
221	Kab. Bangkalan	6.041.727	661.036	6.702.763
222	Kab. Banyuwangi	9.786.053	960.914	10.746.967
223	Kab. Blitar	5.256.802	981.809	6.238.611
224	Kab. Bojonegoro	9.966.585	868.978	10.835.563
225	Kab. Bondowoso	5.294.287	585.719	5.880.006

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
226	Kab. Gresik	41.745.731	2.180.045	43.925.776
227	Kab. Jember	11.711.562	1.089.638	12.801.200
228	Kab. Jombang	7.252.680	748.151	8.000.831
229	Kab. Kediri	7.419.764	800.236	8.220.000
230	Kab. Lamongan	7.077.286	664.754	7.742.040
231	Kab. Lumajang	6.055.010	795.778	6.850.788
232	Kab. Madiun	5.917.591	649.709	6.567.300
233	Kab. Magetan	6.220.533	717.856	6.938.389
234	Kab. Malang	12.904.904	1.860.114	14.765.018
235	Kab. Mojokerto	11.548.142	716.203	12.264.345
236	Kab. Nganjuk	6.678.784	887.381	7.566.165
237	Kab. Ngawi	6.163.121	649.639	6.812.760
238	Kab. Pacitan	5.531.058	662.627	6.193.685
239	Kab. Pamekasan	6.582.422	711.332	7.293.754
240	Kab. Pasuruan	22.719.389	1.173.040	23.892.429

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
241	Kab. Ponorogo	6.650.455	763.964	7.414.419
242	Kab. Probolinggo	7.979.689	662.721	8.642.410
243	Kab. Sampang	5.365.859	565.074	5.930.933
244	Kab. Sidoarjo	43.946.111	4.404.443	48.350.554
245	Kab. Situbondo	5.987.914	696.587	6.684.501
246	Kab. Sumenep	6.122.451	697.876	6.820.327
247	Kab. Trenggalek	5.558.406	688.047	6.246.453
248	Kab. Tuban	9.763.249	750.214	10.513.463
249	Kab. Tulungagung	6.764.694	1.197.752	7.962.446
250	Kota Blitar	5.585.553	879.137	6.464.690
251	Kota Kediri	13.649.542	2.848.050	16.497.592
252	Kota Madiun	10.288.488	855.664	11.144.152
253	Kota Malang	19.669.423	3.166.792	22.836.215
254	Kota Mojokerto	5.898.833	706.358	6.605.191
255	Kota Pasuruan	5.946.561	612.512	6.559.073

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
256	Kota Probolinggo	6.166.830	640.711	6.807.541
257	Kota Surabaya	165.797.089	30.643.216	196.440.305
258	Kota Batu	5.317.903	653.007	5.970.910
259	Provinsi Kalimantan Barat	32.923.953	2.416.679	35.340.632
260	Kab. Bengkayang	1.859.983	115.297	1.975.280
261	Kab. Landak	1.976.113	103.945	2.080.058
262	Kab. Kapuas Hulu	2.630.769	108.239	2.739.008
263	Kab. Ketapang	6.434.425	170.525	6.604.950
264	Kab. Mempawah	2.302.511	109.512	2.412.023
265	Kab. Sambas	2.219.358	180.235	2.399.593
266	Kab. Sanggau	3.473.388	131.166	3.604.554
267	Kab. Sintang	3.346.455	159.102	3.505.557
268	Kota Pontianak	16.123.180	1.928.629	18.051.809
269	Kota Singkawang	2.806.320	415.309	3.221.629
270	Kab. Sekadau	2.225.528	106.961	2.332.489

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
271	Kab. Melawi	1.833.387	98.715	1.932.102
272	Kab. Kayong Utara	1.815.880	101.581	1.917.461
273	Kab. Kubu Raya	5.227.115	197.293	5.424.408
274	Provinsi Kalimantan Tengah	34.021.915	610.214	34.632.129
275	Kab. Barito Selatan	2.548.833	23.733	2.572.566
276	Kab. Barito Utara	3.514.025	22.472	3.536.497
277	Kab. Kapuas	3.057.998	25.894	3.083.892
278	Kab. Kotawaringin Barat	6.594.157	259.786	6.853.943
279	Kab. Kotawaringin Timur	7.579.885	267.375	7.847.260
280	Kota Palangkaraya	9.228.821	117.595	9.346.416
281	Kab. Katingan	2.013.480	21.431	2.034.911
282	Kab. Seruyan	2.699.243	16.542	2.715.785
283	Kab. Sukamara	1.761.076	23.066	1.784.142
284	Kab. Lamandau	1.764.752	33.950	1.798.702
285	Kab. Gunung Mas	2.108.106	24.934	2.133.040

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
286	Kab. Pulang Pisau	1.967.144	22.098	1.989.242
287	Kab. Murung Raya	3.879.784	82.808	3.962.592
288	Kab. Barito Timur	4.484.770	22.739	4.507.509
289	Provinsi Kalimantan Selatan	58.548.320	1.961.845	60.510.165
290	Kab. Banjar	5.815.427	414.525	6.229.952
291	Kab. Barito Kuala	3.465.250	84.408	3.549.658
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.277.493	107.258	3.384.751
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	3.542.416	109.910	3.652.326
294	Kab. Hulu Sungai Utara	3.285.339	95.185	3.380.524
295	Kab. Kotabaru	7.917.282	116.684	8.033.966
296	Kab. Tabalong	7.025.529	127.863	7.153.392
297	Kab. Tanah Laut	6.356.484	116.321	6.472.805
298	Kab. Tapin	5.253.655	115.447	5.369.102
299	Kota Banjarbaru	11.648.251	176.526	11.824.777
300	Kota Banjarmasin	21.892.502	1.310.505	23.203.007

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
301	Kab. Balangan	5.978.109	80.478	6.058.587
302	Kab. Tanah Bumbu	11.437.086	399.617	11.836.703
303	Provinsi Kalimantan Timur	137.513.992	3.322.749	140.836.741
304	Kab. Berau	19.496.867	325.532	19.822.399
305	Kab. Kutai Kartanegara	29.202.737	296.302	29.499.039
306	Kab. Kutai Barat	13.440.556	184.523	13.625.079
307	Kab. Kutai Timur	30.167.073	256.602	30.423.675
308	Kab. Paser	13.538.912	261.264	13.800.176
309	Kota Balikpapan	62.485.272	2.181.486	64.666.758
310	Kota Bontang	22.812.430	302.480	23.114.910
311	Kota Samarinda	27.973.600	1.576.078	29.549.678
312	Kab. Penajam Paser Utara	10.834.674	212.979	11.047.653
313	Kab. Mahakam Ulu	7.713.638	177.246	7.890.884
314	Provinsi Sulawesi Utara	23.539.283	1.142.228	24.681.511
315	Kab. Bolaang Mongondow	1.465.001	53.196	1.518.197

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
316	Kab. Minahasa	2.202.346	82.380	2.284.726
317	Kab. Kepulauan Sangihe	1.612.757	45.581	1.658.338
318	Kota Bitung	2.641.439	127.749	2.769.188
319	Kota Manado	15.373.896	879.525	16.253.421
320	Kab. Kepulauan Talaud	1.158.582	41.624	1.200.206
321	Kab. Minahasa Selatan	1.631.912	54.599	1.686.511
322	Kota Tomohon	1.713.418	143.434	1.856.852
323	Kab. Minahasa Utara	3.130.822	97.826	3.228.648
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	978.755	41.324	1.020.079
325	Kota Kotamobagu	2.356.158	87.522	2.443.680
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.114.157	39.544	1.153.701
327	Kab. Minahasa Tenggara	1.157.730	41.622	1.199.352
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.102.780	105.544	1.208.324
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.045.575	40.678	1.086.253
330	Provinsi Sulawesi Tengah	57.690.359	723.341	58.413.700

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
331	Kab. Banggai	6.620.357	217.487	6.837.844
332	Kab. Banggai Kepulauan	2.526.446	30.455	2.556.901
333	Kab. Buol	2.810.004	43.205	2.853.209
334	Kab. Toli-Toli	3.125.512	91.520	3.217.032
335	Kab. Donggala	2.879.533	52.938	2.932.471
336	Kab. Morowali	46.511.107	48.574	46.559.681
337	Kab. Poso	3.089.033	49.290	3.138.323
338	Kota Palu	10.545.862	409.847	10.955.709
339	Kab. Parigi Moutong	3.247.868	75.045	3.322.913
340	Kab. Tojo Una Una	2.623.147	33.992	2.657.139
341	Kab. Sigi	2.828.250	35.309	2.863.559
342	Kab. Banggai Laut	2.558.398	52.883	2.611.281
343	Kab. Morowali Utara	4.453.096	32.106	4.485.202
344	Provinsi Sulawesi Selatan	70.887.131	3.598.020	74.485.151
345	Kab. Bantaeng	2.794.384	91.106	2.885.490

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
346	Kab. Barru	2.165.224	72.376	2.237.600
347	Kab. Bone	3.954.863	182.199	4.137.062
348	Kab. Bulukumba	2.992.711	96.033	3.088.744
349	Kab. Enrekang	1.912.367	84.835	1.997.202
350	Kab. Gowa	3.857.469	175.035	4.032.504
351	Kab. Jeneponto	2.719.336	83.563	2.802.899
352	Kab. Luwu	2.294.296	97.300	2.391.596
353	Kab. Luwu Utara	2.301.262	88.508	2.389.770
354	Kab. Maros	4.088.430	108.576	4.197.006
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	3.900.179	105.644	4.005.823
356	Kota Palopo	3.744.103	172.547	3.916.650
357	Kab. Luwu Timur	8.335.299	113.642	8.448.941
358	Kab. Pinrang	2.351.592	95.764	2.447.356
359	Kab. Sinjai	2.116.897	88.043	2.204.940
360	Kab. Kepulauan Selayar	2.056.213	85.109	2.141.322

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
361	Kab. Sidenreng Rappang	2.368.284	107.795	2.476.079
362	Kab. Soppeng	2.275.095	100.426	2.375.521
363	Kab. Takalar	2.406.531	90.157	2.496.688
364	Kab. Tana Toraja	2.141.037	94.774	2.235.811
365	Kab. Wajo	2.956.492	123.956	3.080.448
366	Kota Pare-pare	3.386.350	144.303	3.530.653
367	Kota Makassar	42.879.196	3.135.998	46.015.194
368	Kab. Toraja Utara	2.040.715	103.847	2.144.562
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	19.714.266	407.216	20.121.482
370	Kab. Buton	967.989	12.658	980.647
371	Kab. Konawe	2.116.858	74.530	2.191.388
372	Kab. Kolaka	4.830.460	43.167	4.873.627
373	Kab. Muna	1.450.312	24.282	1.474.594
374	Kota Kendari	10.227.631	308.223	10.535.854
375	Kota Bau-bau	1.952.823	70.026	2.022.849

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
376	Kab. Konawe Selatan	1.526.540	14.679	1.541.219
377	Kab. Bombana	1.875.773	13.522	1.889.295
378	Kab. Wakatobi	1.004.342	14.333	1.018.675
379	Kab. Kolaka Utara	949.230	14.990	964.220
380	Kab. Konawe Utara	1.231.309	12.794	1.244.103
381	Kab. Buton Utara	812.324	12.539	824.863
382	Kab. Konawe Kepulauan	715.857	12.541	728.398
383	Kab. Kolaka Timur	858.370	14.114	872.484
384	Kab. Muna Barat	830.725	12.494	843.219
385	Kab. Buton Tengah	913.324	12.904	926.228
386	Kab. Buton Selatan	793.887	13.034	806.921
387	Provinsi Bali	82.549.028	6.107.751	88.656.779
388	Kab. Badung	43.931.926	2.570.315	46.502.241
389	Kab. Bangli	5.875.797	415.450	6.291.247
390	Kab. Buleleng	9.161.568	749.582	9.911.150

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
391	Kab. Gianyar	9.866.103	1.064.652	10.930.755
392	Kab. Jembrana	6.145.217	500.144	6.645.361
393	Kab. Karangasem	6.865.494	434.047	7.299.541
394	Kab. Klungkung	6.649.563	437.658	7.087.221
395	Kab. Tabanan	8.055.122	666.972	8.722.094
396	Kota Denpasar	40.281.259	3.264.330	43.545.589
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	27.679.880	929.093	28.608.973
398	Kab. Bima	2.163.954	66.442	2.230.396
399	Kab. Dompu	2.379.943	89.213	2.469.156
400	Kab. Lombok Barat	3.191.422	94.196	3.285.618
401	Kab. Lombok Tengah	3.578.457	109.967	3.688.424
402	Kab. Lombok Timur	3.471.064	109.054	3.580.118
403	Kab. Sumbawa	3.293.310	160.123	3.453.433
404	Kota Mataram	13.661.758	674.414	14.336.172
405	Kota Bima	3.021.300	110.229	3.131.529

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
406	Kab. Sumbawa Barat	9.045.083	63.056	9.108.139
407	Kab. Lombok Utara	2.208.736	68.160	2.276.896
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	17.575.164	1.060.889	18.636.053
409	Kab. Alor	779.397	220.497	999.894
410	Kab. Belu	1.023.249	54.759	1.078.008
411	Kab. Ende	1.224.906	91.340	1.316.246
412	Kab. Flores Timur	888.607	72.590	961.197
413	Kab. Kupang	1.126.156	26.646	1.152.802
414	Kab. Lembata	676.283	55.343	731.626
415	Kab. Manggarai	1.026.117	60.275	1.086.392
416	Kab. Ngada	803.614	36.447	840.061
417	Kab. Sikka	1.494.086	104.706	1.598.792
418	Kab. Sumba Barat	855.015	46.611	901.626
419	Kab. Sumba Timur	1.551.509	88.272	1.639.781
420	Kab. Timor Tengah Selatan	920.654	32.317	952.971

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
421	Kab. Timor Tengah Utara	806.270	26.872	833.142
422	Kota Kupang	9.472.081	566.954	10.039.035
423	Kab. Rote Ndao	755.485	31.502	786.987
424	Kab. Manggarai Barat	1.733.501	50.190	1.783.691
425	Kab. Nagekeo	648.598	29.578	678.176
426	Kab. Sumba Barat Daya	748.014	31.035	779.049
427	Kab. Sumba Tengah	547.750	26.328	574.078
428	Kab. Manggarai Timur	698.257	52.506	750.763
429	Kab. Sabu Raijua	665.349	25.297	690.646
430	Kab. Malaka	720.044	28.413	748.457
431	Provinsi Maluku	10.173.697	221.804	10.395.501
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	1.008.446	19.453	1.027.899
433	Kab. Maluku Tengah	1.563.730	20.779	1.584.509
434	Kab. Maluku Tenggara	1.114.603	29.618	1.144.221
435	Kab. Buru	812.399	12.466	824.865

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
436	Kota Ambon	7.887.107	193.784	8.080.891
437	Kab. Seram Bagian Barat	855.305	17.195	872.500
438	Kab. Seram Bagian Timur	1.059.231	12.001	1.071.232
439	Kab. Kepulauan Aru	829.766	38.587	868.353
440	Kota Tual	780.525	19.564	800.089
441	Kab. Maluku Barat Daya	1.342.891	11.948	1.354.839
442	Kab. Buru Selatan	595.206	11.829	607.035
443	Provinsi Papua	12.795.900	496.161	13.292.061
444	Kab. Biak Numfor	2.080.289	92.703	2.172.992
445	Kab. Jayapura	1.973.413	98.968	2.072.381
446	Kab. Kepulauan Yapen	1.313.668	40.208	1.353.876
447	Kota Jayapura	11.669.977	458.993	12.128.970
448	Kab. Sarmi	994.756	34.395	1.029.151
449	Kab. Keerom	1.021.980	32.569	1.054.549
450	Kab. Waropen	922.513	29.990	952.503

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
451	Kab. Supiori	938.827	29.885	968.712
452	Kab. Mamberamo Raya	906.051	29.796	935.847
453	Provinsi Maluku Utara	48.915.553	360.268	49.275.821
454	Kab. Halmahera Tengah	34.897.208	23.405	34.920.613
455	Kota Ternate	8.262.403	365.450	8.627.853
456	Kab. Halmahera Barat	2.912.690	23.881	2.936.571
457	Kab. Halmahera Timur	3.629.959	21.386	3.651.345
458	Kab. Halmahera Selatan	14.208.745	34.841	14.243.586
459	Kab. Halmahera Utara	4.485.166	40.121	4.525.287
460	Kab. Kepulauan Sula	2.947.501	22.707	2.970.208
461	Kota Tidore Kepulauan	4.442.030	22.817	4.464.847
462	Kab. Pulau Morotai	2.766.597	25.659	2.792.256
463	Kab. Pulau Taliabu	2.843.079	19.221	2.862.300
464	Provinsi Banten	335.998.380	11.051.274	347.049.654
465	Kab. Lebak	25.679.765	847.839	26.527.604

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
466	Kab. Pandeglang	25.480.140	803.751	26.283.891
467	Kab. Serang	43.588.989	1.035.728	44.624.717
468	Kab. Tangerang	112.750.714	3.437.603	116.188.317
469	Kota Cilegon	63.611.243	1.649.678	65.260.921
470	Kota Tangerang	135.139.770	3.252.082	138.391.852
471	Kota Serang	34.931.281	909.085	35.840.366
472	Kota Tangerang Selatan	93.369.316	5.665.260	99.034.576
473	Provinsi Bangka Belitung	12.798.583	672.949	13.471.532
474	Kab. Bangka	3.254.926	161.420	3.416.346
475	Kab. Belitung	2.526.401	112.900	2.639.301
476	Kota Pangkal Pinang	7.044.080	572.374	7.616.454
477	Kab. Bangka Selatan	1.544.294	56.540	1.600.834
478	Kab. Bangka Tengah	2.439.279	82.218	2.521.497
479	Kab. Bangka Barat	2.406.334	68.496	2.474.830
480	Kab. Belitung Timur	2.042.458	65.150	2.107.608

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
481	Provinsi Gorontalo	6.574.412	324.515	6.898.927
482	Kab. Boalemo	1.037.076	35.628	1.072.704
483	Kab. Gorontalo	1.997.422	131.900	2.129.322
484	Kota Gorontalo	4.048.510	257.615	4.306.125
485	Kab. Pohuwato	1.346.878	52.709	1.399.587
486	Kab. Bone Bolango	1.643.841	39.069	1.682.910
487	Kab. Gorontalo Utara	991.041	31.626	1.022.667
488	Provinsi Kepulauan Riau	70.332.995	4.679.428	75.012.423
489	Kab. Natuna	6.519.911	413.620	6.933.531
490	Kab. Kepulauan Anambas	8.481.145	386.259	8.867.404
491	Kab. Karimun	11.346.819	637.549	11.984.368
492	Kota Batam	66.590.700	4.682.336	71.273.036
493	Kota Tanjung Pinang	10.619.649	915.920	11.535.569
494	Kab. Lingga	6.029.477	388.352	6.417.829
495	Kab. Bintan	9.686.456	507.556	10.194.012

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
496	Provinsi Papua Barat	8.595.095	248.045	8.843.140
497	Kab. Fak Fak	1.312.702	70.523	1.383.225
498	Kab. Manokwari	3.903.767	170.756	4.074.523
499	Kab. Teluk Bintuni	5.606.280	94.970	5.701.250
500	Kab. Teluk Wondama	920.669	22.663	943.332
501	Kab. Kaimana	1.075.801	24.900	1.100.701
502	Kab. Manokwari Selatan	880.296	19.881	900.177
503	Kab. Pegunungan Arfak	942.685	20.307	962.992
504	Provinsi Sulawesi Barat	4.968.062	82.375	5.050.437
505	Kab. Majene	1.137.042	15.558	1.152.600
506	Kab. Mamuju	3.132.862	43.593	3.176.455
507	Kab. Polewali Mandar	1.540.702	44.267	1.584.969
508	Kab. Mamasa	836.394	11.269	847.663
509	Kab. Pasangkayu	975.353	10.295	985.648
510	Kab. Mamuju Tengah	687.035	13.652	700.687

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
511	Provinsi Kalimantan Utara	10.992.790	1.039.884	12.032.674
512	Kab. Bulungan	5.723.570	164.761	5.888.331
513	Kab. Malinau	2.494.464	126.882	2.621.346
514	Kab. Nunukan	2.154.667	152.401	2.307.068
515	Kota Tarakan	5.652.072	1.127.812	6.779.884
516	Kab. Tana Tidung	1.993.833	125.016	2.118.849
517	Provinsi Papua Selatan	3.700.351	161.280	3.861.631
518	Kab. Merauke	3.210.289	187.917	3.398.206
519	Kab. Boven Digoel	1.130.014	26.133	1.156.147
520	Kab. Mappi	912.770	28.636	941.406
521	Kab. Asmat	952.211	27.308	979.519
522	Provinsi Papua Tengah	54.557.549	356.268	54.913.817
523	Kab. Mimika	56.751.663	325.895	57.077.558
524	Kab. Nabire	5.287.492	87.888	5.375.380
525	Kab. Paniai	3.943.923	28.012	3.971.935

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
526	Kab. Puncak Jaya	3.814.596	22.964	3.837.560
527	Kab. Dogiyai	3.929.751	25.355	3.955.106
528	Kab. Puncak	3.657.627	21.987	3.679.614
529	Kab. Intan Jaya	3.575.556	21.987	3.597.543
530	Kab. Deiyai	3.593.569	22.475	3.616.044
531	Provinsi Papua Pegunungan	2.667.758	40.406	2.708.164
532	Kab. Jayawijaya	1.560.742	46.891	1.607.633
533	Kab. Yahukimo	499.583	2.849	502.432
534	Kab. Pegunungan Bintang	520.667	3.801	524.468
535	Kab. Tolikara	465.917	2.771	468.688
536	Kab. Mamberamo Tengah	347.273	2.773	350.046
537	Kab. Yalimo	435.183	2.780	437.963
538	Kab. Lanny Jaya	364.681	2.771	367.452
539	Kab. Nduga	263.078	2.771	265.849
540	Provinsi Papua Barat Daya	5.110.304	317.336	5.427.640

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
541	Kab. Sorong	1.952.666	43.782	1.996.448
542	Kab. Sorong Selatan	741.217	34.075	775.292
543	Kab. Raja Ampat	1.028.256	42.165	1.070.421
544	Kab. Tambrauw	619.020	34.311	653.331
545	Kab. Maybrat	625.198	31.135	656.333
546	Kota Sorong	3.686.315	346.908	4.033.223
547	Selisih Lebih	178.038.596	8.700.050	186.738.646
JUMLAH NASIONAL		14.372.428.836	850.679.835	15.223.108.671

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
1	Provinsi Aceh	2.924.394	306.386	11.311.427
2	Kab. Aceh Barat	2.111.954	8.082	373.382
3	Kab. Aceh Besar	74.416	1.092.257	401.644
4	Kab. Aceh Selatan	241.847	7.738	386.067
5	Kab. Aceh Singkil	1.987.156	7.738	365.505
6	Kab. Aceh Tengah	75.490	92.275	386.461
7	Kab. Aceh Tenggara	75.490	7.909	385.317
8	Kab. Aceh Timur	2.037.523	7.909	11.316.591
9	Kab. Aceh Utara	659.968	23.238	12.332.602
10	Kab. Bireuen	313.669	7.738	385.104
11	Kab. Pidie	73.849	7.738	395.273
12	Kab. Simeulue	73.849	7.738	359.765
13	Kota Banda Aceh	82.054	8.597	364.541
14	Kota Sabang	73.849	7.738	311.960

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
1	Provinsi Aceh	0	937.407	214.824	15.694.438
2	Kab. Aceh Barat	0	2.005.557	45.417	4.544.392
3	Kab. Aceh Besar	0	318.810	43.484	1.930.611
4	Kab. Aceh Selatan	0	23.794	43.484	702.930
5	Kab. Aceh Singkil	0	23.672	43.484	2.427.555
6	Kab. Aceh Tengah	0	24.198	44.450	622.874
7	Kab. Aceh Tenggara	0	24.198	44.450	537.364
8	Kab. Aceh Timur	0	24.198	44.450	13.430.671
9	Kab. Aceh Utara	0	25.776	47.349	13.088.933
10	Kab. Bireuen	0	23.672	43.484	773.667
11	Kab. Pidie	0	30.670	43.484	551.014
12	Kab. Simeulue	0	23.672	43.484	508.508
13	Kota Banda Aceh	0	26.302	48.316	529.810
14	Kota Sabang	0	23.672	43.484	460.703

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
15	Kota Langsa	317.898	7.738	321.212
16	Kota Lhokseumawe	80.413	8.426	409.371
17	Kab. Gayo Lues	75.490	40.120	390.576
18	Kab. Aceh Barat Daya	337.328	7.738	340.842
19	Kab. Aceh Jaya	183.868	8.597	406.153
20	Kab. Nagan Raya	2.123.867	8.597	406.030
21	Kab. Aceh Tamiang	2.565.771	8.253	24.611.660
22	Kab. Bener Meriah	75.490	44.993	347.092
23	Kab. Pidie Jaya	78.614	7.909	336.821
24	Kota Subulussalam	497.050	7.738	325.114
25	Provinsi Sumatera Utara	21.735.201	711.131	6.128.140
26	Kab. Asahan	15.272.217	19.330	316.996
27	Kab. Dairi	468.710	62.885	198.719
28	Kab. Deli Serdang	7.499.723	14.938	1.095.822

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
15	Kota Langsa	0	23.672	43.484	714.004
16	Kota Lhokseumawe	0	25.776	47.349	571.335
17	Kab. Gayo Lues	0	24.198	44.450	574.834
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	70.168	43.484	799.560
19	Kab. Aceh Jaya	0	26.302	48.316	673.236
20	Kab. Nagan Raya	0	1.773.240	48.316	4.360.050
21	Kab. Aceh Tamiang	0	25.631	46.383	27.257.698
22	Kab. Bener Meriah	0	24.198	44.450	536.223
23	Kab. Pidie Jaya	0	24.198	44.450	491.992
24	Kota Subulussalam	0	25.472	43.484	898.858
25	Provinsi Sumatera Utara	7.220.615	1.562.907	277.403	37.635.397
26	Kab. Asahan	154.763	33.499	48.316	15.845.121
27	Kab. Dairi	142.382	210.024	44.450	1.127.170
28	Kab. Deli Serdang	168.501	32.829	47.349	8.859.162

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
29	Kab. Karo	554.565	14.023	215.239
30	Kab. Labuhanbatu	8.874.249	14.023	237.844
31	Kab. Langkat	12.189.884	14.938	25.298.232
32	Kab. Mandailing Natal	4.851.961	111.770	316.918
33	Kab. Nias	465.861	15.243	178.868
34	Kab. Simalungun	12.999.690	381.154	354.379
35	Kab. Tapanuli Selatan	2.442.832	133.372	236.683
36	Kab. Tapanuli Tengah	1.780.385	28.246	246.591
37	Kab. Tapanuli Utara	465.861	414.042	234.087
38	Kab. Toba	490.084	109.248	207.826
39	Kota Binjai	712.067	14.633	671.745
40	Kota Medan	465.861	15.243	738.039
41	Kota Pematang Siantar	431.569	13.719	163.276
42	Kota Sibolga	465.861	15.243	155.583

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
29	Kab. Karo	560.335	30.819	44.450	1.419.431
30	Kab. Labuhanbatu	142.382	30.819	44.450	9.343.767
31	Kab. Langkat	161.495	32.829	47.349	37.744.727
32	Kab. Mandailing Natal	12.964.932	67.033	48.316	18.360.930
33	Kab. Nias	154.763	33.499	48.316	896.550
34	Kab. Simalungun	154.909	33.499	48.316	13.971.947
35	Kab. Tapanuli Selatan	1.843.181	7.339.284	46.383	12.041.735
36	Kab. Tapanuli Tengah	193.427	41.378	48.316	2.338.343
37	Kab. Tapanuli Utara	21.225.888	37.703	48.316	22.425.897
38	Kab. Toba	154.763	33.499	48.316	1.043.736
39	Kota Binjai	148.573	32.159	46.383	1.625.560
40	Kota Medan	154.763	33.499	48.316	1.455.721
41	Kota Pematang Siantar	139.287	30.149	43.484	821.484
42	Kota Sibolga	154.763	33.499	48.316	873.265

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
43	Kota Tanjung Balai	465.861	15.243	169.271
44	Kota Tebing Tinggi	465.861	15.243	167.429
45	Kota Padang Sidempuan	525.765	14.938	175.278
46	Kab. Pakpak Bharat	419.276	37.758	170.714
47	Kab. Nias Selatan	456.544	353.683	273.707
48	Kab. Humbang Hasundutan	465.861	178.541	209.670
49	Kab. Serdang Bedagai	10.432.115	15.243	278.622
50	Kab. Samosir	465.861	248.110	191.170
51	Kab. Batu Bara	3.329.918	15.243	229.616
52	Kab. Padang Lawas	4.817.714	680.165	494.441
53	Kab. Padang Lawas Utara	4.661.085	78.672	220.016
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	15.199.051	844.883	215.116
55	Kab. Labuhanbatu Utara	7.301.189	14.023	237.615
56	Kab. Nias Utara	484.919	15.243	204.675

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
43	Kota Tanjung Balai	154.763	33.499	48.316	886.953
44	Kota Tebing Tinggi	154.763	33.499	48.316	885.111
45	Kota Padang Sidempuan	162.427	32.829	47.349	958.586
46	Kab. Pakpak Bharat	139.287	52.170	43.484	862.689
47	Kab. Nias Selatan	151.668	32.829	47.349	1.315.780
48	Kab. Humbang Hasundutan	154.763	33.499	48.316	1.090.650
49	Kab. Serdang Bedagai	154.763	34.547	48.316	10.963.606
50	Kab. Samosir	154.763	33.499	48.316	1.141.719
51	Kab. Batu Bara	154.763	33.499	48.316	3.811.355
52	Kab. Padang Lawas	148.573	32.159	46.383	6.219.435
53	Kab. Padang Lawas Utara	341.314	30.819	44.450	5.376.356
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	142.382	30.819	44.450	16.476.701
55	Kab. Labuhanbatu Utara	142.382	30.819	44.450	7.770.478
56	Kab. Nias Utara	154.763	33.499	48.316	941.415

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
57	Kab. Nias Barat	465.861	15.243	187.132
58	Kota Gunungsitoli	465.861	15.243	172.237
59	Provinsi Sumatera Barat	3.061.560	181.515	450.607
60	Kab. Lima Puluh Kota	211.854	6.225	130.755
61	Kab. Agam	1.016.523	6.225	137.790
62	Kab. Kepulauan Mentawai	104.992	328.248	188.884
63	Kab. Padang Pariaman	104.992	6.225	115.428
64	Kab. Pasaman	104.992	6.225	125.527
65	Kab. Pesisir Selatan	2.474.237	193.436	208.569
66	Kab. Sijunjung	489.637	219.358	405.789
67	Kab. Solok	170.467	5.852	121.077
68	Kab. Tanah Datar	109.871	6.225	99.872
69	Kota Bukit tinggi	102.892	6.101	42.379
70	Kota Padang Panjang	104.992	6.225	33.563

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
57	Kab. Nias Barat	154.763	33.499	48.316	904.814
58	Kota Gunungsitoli	154.763	33.499	48.316	889.919
59	Provinsi Sumatera Barat	2.279.288	587.603	177.463	6.738.036
60	Kab. Lima Puluh Kota	78.165	280.710	48.316	756.025
61	Kab. Agam	78.165	20.151	48.316	1.307.170
62	Kab. Kepulauan Mentawai	78.165	20.151	48.316	768.756
63	Kab. Padang Pariaman	78.165	20.151	48.316	373.277
64	Kab. Pasaman	78.165	20.151	48.316	383.376
65	Kab. Pesisir Selatan	97.040	42.645	48.316	3.064.243
66	Kab. Sijunjung	78.165	20.181	48.316	1.261.446
67	Kab. Solok	73.475	112.436	45.417	528.724
68	Kab. Tanah Datar	78.165	23.265	48.316	365.714
69	Kota Bukit tinggi	76.602	19.748	47.349	295.071
70	Kota Padang Panjang	78.165	20.151	48.316	291.412

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
71	Kota Padang	104.992	6.225	185.623
72	Kota Payakumbuh	104.992	6.225	45.974
73	Kota Sawahlunto	104.992	6.225	40.621
74	Kota Solok	96.593	5.727	37.916
75	Kota Pariaman	104.992	6.225	47.250
76	Kab. Pasaman Barat	4.427.714	6.225	153.105
77	Kab. Dharmasraya	3.178.953	96.649	100.768
78	Kab. Solok Selatan	2.696.907	14.109	98.144
79	Provinsi Riau	15.683.626	4.452.181	200.798.304
80	Kab. Bengkalis	4.727.683	2.854.741	496.146.908
81	Kab. Indragiri Hilir	9.697.423	1.891.278	11.581.185
82	Kab. Indragiri Hulu	8.992.187	915.544	25.511.718
83	Kab. Kampar	11.195.067	2.036.326	96.000.306
84	Kab. Kuantan Singingi	4.322.072	1.299.018	11.405.762

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
71	Kota Padang	78.165	1.415.015	48.316	1.838.336
72	Kota Payakumbuh	78.165	20.151	48.316	303.823
73	Kota Sawahlunto	78.165	895.496	48.316	1.173.815
74	Kota Solok	71.912	18.539	44.450	275.137
75	Kota Pariaman	78.165	20.151	48.316	305.099
76	Kab. Pasaman Barat	78.165	20.151	48.316	4.733.676
77	Kab. Dharmasraya	78.165	20.991	48.316	3.523.842
78	Kab. Solok Selatan	10.364.546	20.151	48.316	13.242.173
79	Provinsi Riau	0	1.790.047	112.082	222.836.240
80	Kab. Bengkalis	0	100.452	48.316	503.878.100
81	Kab. Indragiri Hilir	0	7.276.042	48.316	30.494.244
82	Kab. Indragiri Hulu	0	116.045	48.316	35.583.810
83	Kab. Kampar	0	100.452	48.316	109.380.467
84	Kab. Kuantan Singingi	0	404.138	48.316	17.479.306

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
85	Kab. Pelalawan	11.295.086	6.491.362	37.230.085
86	Kab. Rokan Hilir	7.588.764	613.540	111.040.064
87	Kab. Rokan Hulu	11.649.105	536.500	17.943.428
88	Kab. Siak	7.390.007	3.567.293	162.355.687
89	Kota Dumai	880.114	1.147.453	16.233.078
90	Kota Pekanbaru	1.348.769	271.979	16.645.964
91	Kab. Kepulauan Meranti	914.462	1.208.612	25.821.574
92	Provinsi Jambi	3.791.357	1.491.882	32.080.060
93	Kab. Batang Hari	3.101.739	1.473.356	18.867.555
94	Kab. Bungo	2.594.671	113.765	2.195.340
95	Kab. Kerinci	461.659	86.454	1.940.957
96	Kab. Merangin	371.621	86.454	2.021.715
97	Kab. Muaro Jambi	4.247.727	552.872	27.646.880
98	Kab. Sarolangun	2.900.815	1.106.002	8.515.938

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
85	Kab. Pelalawan	0	163.981	47.349	55.227.863
86	Kab. Rokan Hilir	0	92.416	44.450	119.379.234
87	Kab. Rokan Hulu	0	98.443	47.349	30.274.825
88	Kab. Siak	0	100.452	48.316	173.461.755
89	Kota Dumai	0	100.452	48.316	18.409.413
90	Kota Pekanbaru	0	100.452	48.316	18.415.480
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	592.914	48.316	28.585.878
92	Provinsi Jambi	99.191	676.410	100.687	38.239.587
93	Kab. Batang Hari	6.248	257.555	48.316	23.754.769
94	Kab. Bungo	6.248	749.632	48.316	5.707.972
95	Kab. Kerinci	395.530	39.197	44.450	2.968.247
96	Kab. Merangin	5.749	47.453	44.450	2.577.442
97	Kab. Muaro Jambi	6.123	147.644	47.349	32.648.595
98	Kab. Sarolangun	6.248	1.889.978	48.316	14.467.297

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	2.835.183	2.004.885	67.291.592
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.378.008	664.784	16.410.187
101	Kab. Tebo	1.308.588	1.460.694	6.005.500
102	Kota Jambi	234.035	92.092	11.746.962
103	Kota Sungai Penuh	229.259	90.212	1.970.784
104	Provinsi Sumatera Selatan	11.426.594	4.271.004	155.510.144
105	Kab. Lahat	2.582.346	670.540	21.436.209
106	Kab. Musi Banyuasin	11.334.850	2.525.599	307.790.343
107	Kab. Musi Rawas	5.311.073	1.543.448	78.907.204
108	Kab. Muara Enim	3.801.451	1.393.246	113.375.687
109	Kab. Ogan Komering Ilir	12.247.609	12.711.021	6.221.756
110	Kab. Ogan Komering Ulu	3.580.310	323.481	25.976.282
111	Kota Palembang	440.842	164.777	6.272.505
112	Kota Prabumulih	422.082	157.765	33.449.045

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	5.998	70.711	46.383	72.254.752
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	5.998	41.767	46.383	18.547.127
101	Kab. Tebo	6.248	225.987	48.316	9.055.333
102	Kota Jambi	6.123	41.754	47.349	12.168.315
103	Kota Sungai Penuh	35.916	40.902	46.383	2.413.456
104	Provinsi Sumatera Selatan	2.885.239	24.693.319	149.256	198.935.556
105	Kab. Lahat	644.143	54.581.942	48.316	79.963.496
106	Kab. Musi Banyuasin	118.419	10.011.490	48.316	331.829.017
107	Kab. Musi Rawas	121.783	1.013.773	48.316	86.945.597
108	Kab. Muara Enim	9.357.517	43.339.447	44.450	171.311.798
109	Kab. Ogan Komering Ilir	108.946	1.079.299	44.450	32.413.081
110	Kab. Ogan Komering Ulu	1.891.218	1.935.771	48.316	33.755.378
111	Kota Palembang	111.314	952.675	45.417	7.987.530
112	Kota Prabumulih	106.577	912.136	43.484	35.091.089

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
113	Kota Pagar Alam	562.610	157.765	5.784.788
114	Kota Lubuk Linggau	459.601	171.788	6.305.616
115	Kab. Banyuasin	8.658.319	732.228	15.389.764
116	Kab. Ogan Ilir	1.419.538	161.271	18.588.777
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1.869.761	311.454	6.604.723
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	761.696	338.682	6.519.289
119	Kab. Empat Lawang	2.011.022	275.359	6.119.947
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.357.160	291.635	165.790.766
121	Kab. Musi Rawas Utara	4.153.754	255.071	10.352.884
122	Provinsi Bengkulu	1.881.450	4.794	155.056
123	Kab. Bengkulu Selatan	391.423	351	66.604
124	Kab. Bengkulu Utara	3.164.376	366	144.062
125	Kab. Rejang Lebong	162.545	351	83.137
126	Kota Bengkulu	143.382	366	83.623

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
113	Kota Pagar Alam	1.137.367	912.136	43.484	8.598.150
114	Kota Lubuk Linggau	116.051	993.214	47.349	8.093.619
115	Kab. Banyuasin	118.419	1.456.595	48.316	26.403.641
116	Kab. Ogan Ilir	108.946	932.406	44.450	21.255.388
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	118.419	1.036.037	48.316	9.988.710
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	439.518	1.018.027	48.316	9.125.528
119	Kab. Empat Lawang	111.314	952.675	45.417	9.515.734
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	116.051	1.490.085	47.349	169.093.046
121	Kab. Musi Rawas Utara	158.494	8.772.546	47.349	23.740.098
122	Provinsi Bengkulu	353.793	1.886.560	84.062	4.365.715
123	Kab. Bengkulu Selatan	25.884	139.256	46.383	669.901
124	Kab. Bengkulu Utara	123.432	4.517.265	48.316	7.997.817
125	Kab. Rejang Lebong	94.673	143.976	46.383	531.065
126	Kota Bengkulu	26.963	159.921	48.316	462.571

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
127	Kab. Kaur	483.516	351	87.884
128	Kab. Seluma	1.419.895	359	96.705
129	Kab. Mukomuko	3.764.233	24.264	113.030
130	Kab. Lebong	174.317	351	73.453
131	Kab. Kepahiang	200.812	351	58.874
132	Kab. Bengkulu Tengah	788.623	351	63.788
133	Provinsi Lampung	4.163.131	259.620	2.297.523
134	Kab. Lampung Barat	168.875	10.532	176.614
135	Kab. Lampung Selatan	2.209.407	10.761	308.403
136	Kab. Lampung Tengah	6.158.277	11.448	405.103
137	Kab. Lampung Utara	1.582.259	11.448	248.489
138	Kab. Lampung Timur	213.327	11.448	8.611.127
139	Kab. Tanggamus	313.155	11.219	258.372
140	Kab. Tulang Bawang	3.316.945	11.448	227.211

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
127	Kab. Kaur	109.057	138.020	46.383	865.211
128	Kab. Seluma	26.423	157.042	47.349	1.747.773
129	Kab. Mukomuko	27.151	143.771	48.316	4.120.765
130	Kab. Lebong	1.474.416	177.954	46.383	1.946.874
131	Kab. Kepahiang	25.884	138.020	46.383	470.324
132	Kab. Bengkulu Tengah	25.884	4.890.281	46.383	5.815.310
133	Provinsi Lampung	3.726.265	124.399	140.103	10.711.041
134	Kab. Lampung Barat	151.155	59.758	44.450	611.384
135	Kab. Lampung Selatan	180.200	233.930	45.417	2.988.118
136	Kab. Lampung Tengah	164.298	25.354	48.316	6.812.796
137	Kab. Lampung Utara	164.298	30.001	48.316	2.084.811
138	Kab. Lampung Timur	164.298	5.485	48.316	9.054.001
139	Kab. Tanggamus	16.608.847	140.290	47.349	17.379.232
140	Kab. Tulang Bawang	164.298	11.195	48.316	3.779.413

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
141	Kab. Way Kanan	1.746.301	891.373	237.834
142	Kota Bandar Lampung	172.547	10.761	261.828
143	Kota Metro	179.889	11.219	133.288
144	Kab. Pesawaran	823.531	14.708	208.544
145	Kab. Pringsewu	168.875	10.532	171.512
146	Kab. Mesuji	3.061.019	299.229	182.057
147	Kab. Tulang Bawang Barat	883.829	11.219	178.439
148	Kab. Pesisir Barat	292.023	10.761	181.739
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	13.890.867
150	Provinsi Jawa Barat	5.700.972	924.545	23.663.772
151	Kab. Bandung	6.843.407	21.951	1.191.867
152	Kab. Bekasi	135.351	21.951	15.250.182
153	Kab. Bogor	2.188.530	206.521	1.511.698
154	Kab. Ciamis	397.171	243.440	793.485

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
141	Kab. Way Kanan	164.298	16.731	48.316	3.104.853
142	Kota Bandar Lampung	154.440	7.938	45.417	652.931
143	Kota Metro	161.012	5.376	47.349	538.133
144	Kab. Pesawaran	161.012	22.352	47.349	1.277.496
145	Kab. Pringsewu	151.155	14.437	44.450	560.961
146	Kab. Mesuji	164.298	10.322	48.316	3.765.241
147	Kab. Tulang Bawang Barat	161.012	5.376	47.349	1.287.224
148	Kab. Pesisir Barat	154.440	27.755	45.417	712.135
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	57.656	13.948.523
150	Provinsi Jawa Barat	23.020.241	1.654.363	252.184	55.216.077
151	Kab. Bandung	47.627.582	39.278	48.316	55.772.401
152	Kab. Bekasi	546.540	179.050	48.316	16.181.390
153	Kab. Bogor	15.784.251	5.770.013	48.316	25.509.329
154	Kab. Ciamis	557.726	39.278	48.316	2.079.416

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
155	Kab. Cianjur	1.343.138	828.543	1.033.355
156	Kab. Cirebon	135.351	78.288	2.045.490
157	Kab. Garut	3.042.996	21.951	1.058.033
158	Kab. Indramayu	1.919.407	191.431	34.611.248
159	Kab. Karawang	127.230	149.746	16.751.452
160	Kab. Kuningan	196.691	162.003	729.022
161	Kab. Majalengka	1.372.771	69.351	3.057.668
162	Kab. Purwakarta	724.275	552.134	790.259
163	Kab. Subang	3.898.280	103.374	25.505.568
164	Kab. Sukabumi	3.020.849	625.362	1.036.919
165	Kab. Sumedang	135.351	391.538	776.026
166	Kab. Tasikmalaya	599.531	192.529	919.672
167	Kota Bandung	135.351	21.951	976.273
168	Kota Bekasi	135.351	21.951	3.867.178

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
155	Kab. Cianjur	585.812	55.744	48.316	3.894.908
156	Kab. Cirebon	546.540	522.300	48.316	3.376.285
157	Kab. Garut	25.048.036	45.043	48.316	29.264.375
158	Kab. Indramayu	535.609	38.492	47.349	37.343.536
159	Kab. Karawang	513.748	36.921	45.417	17.624.514
160	Kab. Kuningan	513.748	36.921	45.417	1.683.802
161	Kab. Majalengka	559.238	39.278	48.316	5.146.622
162	Kab. Purwakarta	546.540	233.048	48.316	2.894.572
163	Kab. Subang	502.817	36.136	44.450	30.090.625
164	Kab. Sukabumi	16.196.852	852.462	46.383	21.778.827
165	Kab. Sumedang	553.393	50.879	48.316	1.955.503
166	Kab. Tasikmalaya	1.605.186	44.982	48.316	3.410.216
167	Kota Bandung	546.540	39.278	48.316	1.767.709
168	Kota Bekasi	546.540	39.278	48.316	4.658.614

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
169	Kota Bogor	132.644	21.512	730.682
170	Kota Cirebon	135.351	21.951	681.475
171	Kota Depok	135.351	21.951	882.283
172	Kota Sukabumi	132.644	21.512	610.977
173	Kota Tasikmalaya	135.351	21.951	688.632
174	Kota Cimahi	135.351	21.951	656.652
175	Kota Banjar	282.456	21.951	604.368
176	Kab. Bandung Barat	1.136.564	424.395	880.885
177	Kab. Pangandaran	383.370	241.616	656.972
178	Provinsi Jawa Tengah	2.069.249	2.307.151	8.416.506
179	Kab. Banjarnegara	38.335	374.206	341.928
180	Kab. Banyumas	297.881	340.723	496.147
181	Kab. Batang	543.407	282.806	349.602
182	Kab. Blora	36.802	2.177.837	28.164.130

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
169	Kota Bogor	535.801	38.492	47.349	1.506.480
170	Kota Cirebon	546.540	39.278	48.316	1.472.911
171	Kota Depok	546.540	39.278	48.316	1.673.719
172	Kota Sukabumi	560.147	38.492	47.349	1.411.121
173	Kota Tasikmalaya	546.540	41.268	48.316	1.482.058
174	Kota Cimahi	546.540	39.278	48.316	1.448.088
175	Kota Banjar	546.540	39.278	48.316	1.542.909
176	Kab. Bandung Barat	570.666	99.010	48.316	3.159.836
177	Kab. Pangandaran	546.540	39.278	48.316	1.916.092
178	Provinsi Jawa Tengah	1.120.202	395.627	320.367	14.629.102
179	Kab. Banjarnegara	3.184.366	7.330	48.316	3.994.481
180	Kab. Banyumas	77.473	181.435	48.316	1.441.975
181	Kab. Batang	90.640	7.184	47.349	1.320.988
182	Kab. Blora	19.923	7.037	46.383	30.452.112

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
183	Kab. Boyolali	37.569	364.810	342.844
184	Kab. Brebes	254.738	996.877	547.922
185	Kab. Cilacap	2.500.071	480.612	551.131
186	Kab. Demak	38.335	144.451	375.829
187	Kab. Grobogan	37.569	1.403.320	2.204.523
188	Kab. Jepara	952.986	166.211	386.608
189	Kab. Karanganyar	421.481	50.574	320.774
190	Kab. Kebumen	38.335	253.006	407.124
191	Kab. Kendal	1.450.798	294.203	624.200
192	Kab. Klaten	38.335	69.229	374.030
193	Kab. Kudus	38.335	52.022	306.337
194	Kab. Magelang	35.268	169.495	356.473
195	Kab. Pati	815.892	303.752	397.831
196	Kab. Pekalongan	459.617	191.362	321.832

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
183	Kab. Boyolali	20.338	7.184	47.349	820.094
184	Kab. Brebes	20.753	21.306	48.316	1.889.912
185	Kab. Cilacap	20.753	560.764	48.316	4.161.647
186	Kab. Demak	20.753	7.330	48.316	635.014
187	Kab. Grobogan	20.338	321.949	47.349	4.035.048
188	Kab. Jepara	20.338	22.931	47.349	1.596.423
189	Kab. Karanganyar	20.753	7.330	48.316	869.228
190	Kab. Kebumen	20.753	7.330	48.316	774.864
191	Kab. Kendal	49.790	7.330	48.316	2.474.637
192	Kab. Klaten	20.753	7.330	48.316	557.993
193	Kab. Kudus	20.753	7.330	48.316	473.093
194	Kab. Magelang	19.093	6.743	44.450	631.522
195	Kab. Pati	20.338	10.337	47.349	1.595.499
196	Kab. Pekalongan	125.519	7.037	46.383	1.151.750

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
197	Kab. Pemalang	200.695	528.890	421.800
198	Kab. Purbalingga	38.335	173.220	337.596
199	Kab. Purworejo	38.335	269.000	303.573
200	Kab. Rembang	37.569	703.732	343.376
201	Kab. Semarang	1.297.478	209.450	344.920
202	Kab. Sragen	192.859	288.485	334.699
203	Kab. Sukoharjo	176.231	45.324	310.712
204	Kab. Tegal	116.934	477.690	419.923
205	Kab. Temanggung	249.101	155.799	301.108
206	Kab. Wonogiri	38.335	353.351	354.543
207	Kab. Wonosobo	162.407	289.668	322.958
208	Kota Magelang	37.569	41.887	175.872
209	Kota Pekalongan	36.802	41.032	202.301
210	Kota Salatiga	60.607	41.887	187.516

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
197	Kab. Pemalang	20.338	7.184	47.349	1.226.256
198	Kab. Purbalingga	20.753	7.330	48.316	625.550
199	Kab. Purworejo	20.753	9.385	48.316	689.362
200	Kab. Rembang	20.338	728.976	47.349	1.881.340
201	Kab. Semarang	20.753	7.330	48.316	1.928.247
202	Kab. Sragen	20.753	7.330	48.316	892.442
203	Kab. Sukoharjo	20.753	7.330	48.316	608.666
204	Kab. Tegal	19.508	17.399	45.417	1.096.871
205	Kab. Temanggung	35.101	7.330	48.316	796.755
206	Kab. Wonogiri	20.753	7.330	48.316	822.628
207	Kab. Wonosobo	1.761.836	7.330	48.316	2.592.515
208	Kota Magelang	20.338	7.184	47.349	330.199
209	Kota Pekalongan	19.923	7.037	46.383	353.478
210	Kota Salatiga	20.338	7.184	47.349	364.881

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
211	Kota Semarang	37.569	131.059	1.358.735
212	Kota Surakarta	38.335	42.742	251.772
213	Kota Tegal	36.035	40.178	193.695
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	143.971
215	Kab. Bantul	0	0	182.928
216	Kab. Gunung Kidul	0	0	165.358
217	Kab. Kulon Progo	0	0	103.463
218	Kab. Sleman	0	0	204.718
219	Kota Yogyakarta	0	0	88.270
220	Provinsi Jawa Timur	3.648.390	3.782.089	71.358.298
221	Kab. Bangkalan	59.651	120.955	1.545.954
222	Kab. Banyuwangi	3.674.014	1.044.181	1.534.129
223	Kab. Blitar	896.068	202.264	1.306.669
224	Kab. Bojonegoro	60.868	2.810.300	288.715.399

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
211	Kota Semarang	20.338	7.184	47.349	1.602.234
212	Kota Surakarta	20.753	7.330	48.316	409.248
213	Kota Tegal	19.508	6.890	45.417	341.723
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	4.191	46.701	194.863
215	Kab. Bantul	0	647	48.316	231.891
216	Kab. Gunung Kidul	0	647	48.316	214.321
217	Kab. Kulon Progo	0	19.091	48.316	170.870
218	Kab. Sleman	0	647	48.316	253.681
219	Kota Yogyakarta	0	647	48.316	137.233
220	Provinsi Jawa Timur	145.085	1.683.291	354.926	80.972.079
221	Kab. Bangkalan	2.372	27.522	47.349	1.803.803
222	Kab. Banyuwangi	46.460	4.135.094	48.316	10.482.194
223	Kab. Blitar	2.227	25.837	44.450	2.477.515
224	Kab. Bojonegoro	2.421	37.038	48.316	291.674.342

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
225	Kab. Bondowoso	822.326	140.263	1.234.725
226	Kab. Gresik	60.868	134.273	19.764.638
227	Kab. Jember	3.595.959	571.792	1.629.389
228	Kab. Jombang	54.781	599.085	1.294.593
229	Kab. Kediri	2.015.154	345.672	1.334.897
230	Kab. Lamongan	57.216	1.028.116	1.593.647
231	Kab. Lumajang	1.468.642	318.212	1.394.024
232	Kab. Madiun	60.868	1.688.087	1.327.339
233	Kab. Magetan	60.868	128.140	1.314.518
234	Kab. Malang	2.501.867	1.128.463	1.612.745
235	Kab. Mojokerto	93.551	498.564	1.288.318
236	Kab. Nganjuk	59.651	557.477	1.367.574
237	Kab. Ngawi	665.012	1.399.335	1.354.611
238	Kab. Pacitan	60.868	109.258	1.313.934

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
225	Kab. Bondowoso	558.874	25.837	44.450	2.826.475
226	Kab. Gresik	2.421	36.021	48.316	20.046.537
227	Kab. Jember	2.372	27.522	47.349	5.874.383
228	Kab. Jombang	2.179	25.275	43.484	2.019.397
229	Kab. Kediri	2.179	25.275	43.484	3.766.661
230	Kab. Lamongan	2.276	26.398	45.417	2.753.070
231	Kab. Lumajang	2.421	28.084	48.316	3.259.699
232	Kab. Madiun	2.421	28.084	48.316	3.155.115
233	Kab. Magetan	2.421	28.084	48.316	1.582.347
234	Kab. Malang	2.324	76.188	46.383	5.367.970
235	Kab. Mojokerto	2.227	52.091	44.450	1.979.201
236	Kab. Nganjuk	2.372	27.522	47.349	2.061.945
237	Kab. Ngawi	2.421	28.084	48.316	3.497.779
238	Kab. Pacitan	2.421	38.501	48.316	1.573.298

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
239	Kab. Pamekasan	59.651	69.500	1.328.621
240	Kab. Pasuruan	199.844	300.321	1.535.414
241	Kab. Ponorogo	60.868	649.744	1.369.820
242	Kab. Probolinggo	119.335	59.313	1.330.035
243	Kab. Sampang	59.651	77.155	1.378.181
244	Kab. Sidoarjo	59.651	2.889	2.354.928
245	Kab. Situbondo	508.495	342.743	1.336.319
246	Kab. Sumenep	60.868	306.732	3.308.611
247	Kab. Trenggalek	61.205	1.023.552	1.337.077
248	Kab. Tuban	60.868	2.042.111	8.770.996
249	Kab. Tulungagung	197.995	717.338	1.279.844
250	Kota Blitar	55.999	60.164	1.123.209
251	Kota Kediri	59.651	88.335	1.216.320
252	Kota Madiun	60.868	63.098	1.226.382

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
239	Kab. Pamekasan	2.372	27.522	47.349	1.535.015
240	Kab. Pasuruan	2.324	148.584	46.383	2.232.870
241	Kab. Ponorogo	11.852	28.084	48.316	2.168.684
242	Kab. Probolinggo	2.276	26.398	45.417	1.582.774
243	Kab. Sampang	2.372	27.522	47.349	1.592.230
244	Kab. Sidoarjo	2.372	27.522	47.349	2.494.711
245	Kab. Situbondo	2.421	28.084	48.316	2.266.378
246	Kab. Sumenep	2.421	28.084	48.316	3.755.032
247	Kab. Trenggalek	2.421	34.721	48.316	2.507.292
248	Kab. Tuban	2.421	3.312.924	48.316	14.237.636
249	Kab. Tulungagung	2.227	33.137	44.450	2.274.991
250	Kota Blitar	2.227	25.837	44.450	1.311.886
251	Kota Kediri	2.372	27.522	47.349	1.441.549
252	Kota Madiun	2.421	28.084	48.316	1.429.169

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
253	Kota Malang	54.781	56.789	1.201.429
254	Kota Mojokerto	55.999	58.051	1.120.686
255	Kota Pasuruan	54.781	56.789	1.107.169
256	Kota Probolinggo	55.999	58.051	1.136.546
257	Kota Surabaya	60.868	63.098	1.677.353
258	Kota Batu	59.651	211.879	1.208.765
259	Provinsi Kalimantan Barat	15.351.093	2.689.113	639.989
260	Kab. Bengkayang	4.605.176	180.547	153.485
261	Kab. Landak	5.726.051	164.981	198.554
262	Kab. Kapuas Hulu	4.955.982	461.165	501.235
263	Kab. Ketapang	25.652.354	6.041.963	556.854
264	Kab. Mempawah	1.535.678	210.076	114.662
265	Kab. Sambas	4.995.681	326.755	199.253
266	Kab. Sanggau	7.848.203	1.130.797	255.151

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
253	Kota Malang	2.179	25.275	43.484	1.383.937
254	Kota Mojokerto	2.227	25.837	44.450	1.307.250
255	Kota Pasuruan	2.179	25.275	43.484	1.289.677
256	Kota Probolinggo	2.227	25.837	44.450	1.323.110
257	Kota Surabaya	2.421	28.084	48.316	1.880.140
258	Kota Batu	2.372	27.522	47.349	1.557.538
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	1.785.823	122.917	20.588.935
260	Kab. Bengkayang	0	90.924	43.484	5.073.616
261	Kab. Landak	0	186.942	43.484	6.320.012
262	Kab. Kapuas Hulu	0	94.588	48.316	6.061.286
263	Kab. Ketapang	0	4.169.025	48.316	36.468.512
264	Kab. Mempawah	0	186.853	44.450	2.091.719
265	Kab. Sambas	0	93.415	44.450	5.659.554
266	Kab. Sanggau	0	3.879.971	43.484	13.157.606

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
267	Kab. Sintang	9.160.193	1.601.932	394.063
268	Kota Pontianak	697.904	122.255	130.603
269	Kota Singkawang	706.796	122.255	76.286
270	Kab. Sekadau	3.596.238	868.586	146.727
271	Kab. Melawi	2.712.177	1.780.099	209.737
272	Kab. Kayong Utara	2.732.391	388.176	173.846
273	Kab. Kubu Raya	5.700.263	900.111	243.005
274	Provinsi Kalimantan Tengah	19.221.489	3.375.037	1.723.585
275	Kab. Barito Selatan	1.230.086	356.734	190.114
276	Kab. Barito Utara	2.552.517	1.866.291	4.738.034
277	Kab. Kapuas	6.626.664	1.161.950	352.542
278	Kab. Kotawaringin Barat	12.503.426	1.189.752	267.164
279	Kab. Kotawaringin Timur	25.718.317	684.864	347.091
280	Kota Palangkaraya	1.051.735	144.233	149.784

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
267	Kab. Sintang	0	91.453	47.349	11.294.990
268	Kota Pontianak	0	81.189	43.484	1.075.435
269	Kota Singkawang	0	82.892	43.484	1.031.713
270	Kab. Sekadau	0	82.994	44.450	4.738.995
271	Kab. Melawi	0	86.626	46.383	4.835.022
272	Kab. Kayong Utara	0	90.210	48.316	3.432.939
273	Kab. Kubu Raya	0	85.626	44.450	6.973.455
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	36.134.469	130.762	60.585.342
275	Kab. Barito Selatan	0	9.865.320	45.417	11.687.671
276	Kab. Barito Utara	0	52.974.266	44.450	62.175.558
277	Kab. Kapuas	0	36.811.454	44.450	44.997.060
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	1.820.400	48.316	15.829.058
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	2.186.066	45.417	28.981.755
280	Kota Palangkaraya	0	1.611.540	43.484	3.000.776

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
281	Kab. Katingan	4.117.342	1.915.116	370.904
282	Kab. Seruyan	17.238.267	2.697.025	329.734
283	Kab. Sukamara	3.401.672	157.054	156.163
284	Kab. Lamandau	6.243.249	1.468.943	191.683
285	Kab. Gunung Mas	5.320.258	1.470.898	232.435
286	Kab. Pulang Pisau	5.209.314	153.849	239.804
287	Kab. Murung Raya	875.909	3.019.237	391.559
288	Kab. Barito Timur	2.911.748	191.222	334.275
289	Provinsi Kalimantan Selatan	5.642.936	404.887	3.331.100
290	Kab. Banjar	2.030.780	344.414	333.870
291	Kab. Barito Kuala	3.004.553	20.411	263.483
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.500.098	33.527	238.463
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	290.275	20.828	241.141
294	Kab. Hulu Sungai Utara	460.992	20.828	229.233

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
281	Kab. Katingan	0	1.662.616	45.417	8.111.395
282	Kab. Seruyan	0	1.816.447	48.316	22.129.789
283	Kab. Sukamara	0	1.681.472	47.349	5.443.710
284	Kab. Lamandau	0	1.613.727	43.484	9.561.086
285	Kab. Gunung Mas	0	2.227.874	46.383	9.297.848
286	Kab. Pulang Pisau	0	1.647.156	46.383	7.296.506
287	Kab. Murung Raya	0	46.783.575	44.450	51.114.730
288	Kab. Barito Timur	0	10.037.943	44.450	13.519.638
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	75.760.167	121.422	85.260.512
290	Kab. Banjar	0	6.802.754	48.316	9.560.134
291	Kab. Barito Kuala	0	3.819.186	47.349	7.154.982
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	16.672.264	48.316	18.492.668
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	3.898.748	48.316	4.499.308
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	3.897.128	48.316	4.656.497

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
295	Kab. Kotabaru	7.608.234	409.834	400.447
296	Kab. Tabalong	644.513	207.870	13.219.410
297	Kab. Tanah Laut	5.610.481	525.288	296.856
298	Kab. Tapin	3.296.830	37.002	242.504
299	Kota Banjarbaru	290.275	20.828	224.230
300	Kota Banjarmasin	290.275	20.828	282.938
301	Kab. Balangan	334.278	19.578	893.584
302	Kab. Tanah Bumbu	3.670.856	403.283	296.621
303	Provinsi Kalimantan Timur	15.430.150	3.834.305	56.188.755
304	Kab. Berau	9.160.454	4.430.535	4.748.400
305	Kab. Kutai Kartanegara	15.884.879	4.399.291	211.299.250
306	Kab. Kutai Barat	12.154.105	2.238.477	4.053.426
307	Kab. Kutai Timur	24.938.274	4.267.818	14.965.791
308	Kab. Paser	9.351.029	1.109.301	6.740.439

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
295	Kab. Kotabaru	0	51.202.847	48.316	59.669.678
296	Kab. Tabalong	0	26.704.347	48.316	40.824.456
297	Kab. Tanah Laut	0	14.298.123	48.316	20.779.064
298	Kab. Tapin	0	34.873.199	48.316	38.497.851
299	Kota Banjarbaru	0	3.914.741	48.316	4.498.390
300	Kota Banjarmasin	0	3.897.128	48.316	4.539.485
301	Kab. Balangan	0	74.668.982	45.417	75.961.839
302	Kab. Tanah Bumbu	0	139.553.660	47.349	143.971.769
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	100.959.139	84.062	176.496.411
304	Kab. Berau	0	31.791.620	48.316	50.179.325
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	241.047.683	44.450	472.675.553
306	Kab. Kutai Barat	0	28.778.521	43.484	47.268.013
307	Kab. Kutai Timur	0	116.671.305	43.484	160.886.672
308	Kab. Paser	0	70.443.943	44.450	87.689.162

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
309	Kota Balikpapan	1.128.864	314.005	4.240.590
310	Kota Bontang	1.058.310	262.984	27.912.983
311	Kota Samarinda	1.081.828	268.828	7.966.367
312	Kab. Penajam Paser Utara	3.411.557	2.374.910	11.384.627
313	Kab. Mahakam Ulu	3.548.273	993.864	4.135.056
314	Provinsi Sulawesi Utara	42.916	0	212.801
315	Kab. Bolaang Mongondow	68.692	0	106.781
316	Kab. Minahasa	25.541	0	81.477
317	Kab. Kepulauan Sangihe	1.741	0	79.763
318	Kota Bitung	1.855	0	57.728
319	Kota Manado	1.893	0	90.774
320	Kab. Kepulauan Talaud	1.893	0	86.828
321	Kab. Minahasa Selatan	42.018	0	85.045
322	Kota Tomohon	1.893	0	42.631

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
309	Kota Balikpapan	0	7.412.818	46.383	13.142.660
310	Kota Bontang	0	6.924.496	43.484	36.202.257
311	Kota Samarinda	0	16.006.725	44.450	25.368.198
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	7.708.250	48.316	24.927.660
313	Kab. Mahakam Ulu	0	6.992.883	43.484	15.713.560
314	Provinsi Sulawesi Utara	2.078.092	1.503.483	140.103	3.977.395
315	Kab. Bolaang Mongondow	89.794	2.476.927	47.349	2.789.543
316	Kab. Minahasa	4.179.251	60.988	44.450	4.391.707
317	Kab. Kepulauan Sangihe	84.297	112.929	44.450	323.180
318	Kota Bitung	89.794	1.767.137	47.349	1.963.863
319	Kota Manado	131.105	66.292	48.316	338.380
320	Kab. Kepulauan Talaud	91.627	66.292	48.316	294.956
321	Kab. Minahasa Selatan	322.031	80.979	48.316	578.389
322	Kota Tomohon	4.711.491	86.800	48.316	4.891.131

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
323	Kab. Minahasa Utara	50.255	0	77.575
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1.703	0	40.223
325	Kota Kotamobagu	1.893	0	39.478
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	5.275	0	78.801
327	Kab. Minahasa Tenggara	2.706	0	63.088
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	8.577	0	65.187
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.893	0	82.235
330	Provinsi Sulawesi Tengah	1.236.625	42.237	24.309.151
331	Kab. Banggai	1.026.455	57.015	100.251.131
332	Kab. Banggai Kepulauan	62.497	2.086	1.293.773
333	Kab. Buol	959.224	2.129	1.321.077
334	Kab. Toli-Toli	611.391	2.086	1.293.555
335	Kab. Donggala	605.885	2.129	1.373.471
336	Kab. Morowali	365.865	2.129	1.348.222

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
323	Kab. Minahasa Utara	118.902	111.064	48.316	406.112
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	82.464	59.663	43.484	227.537
325	Kota Kotamobagu	91.627	66.292	48.316	247.606
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	91.627	67.516	48.316	291.535
327	Kab. Minahasa Tenggara	98.805	81.445	48.316	294.360
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	89.794	91.541	47.349	302.448
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	91.627	2.471.187	48.316	2.695.258
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	6.449.066	121.422	32.158.501
331	Kab. Banggai	0	2.312.624	44.450	103.691.675
332	Kab. Banggai Kepulauan	0	318.473	46.383	1.723.212
333	Kab. Buol	0	341.480	47.349	2.671.259
334	Kab. Toli-Toli	0	340.494	46.383	2.293.909
335	Kab. Donggala	0	675.921	47.349	2.704.755
336	Kab. Morowali	0	20.203.138	47.349	21.966.703

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
337	Kab. Poso	230.779	2.043	1.319.450
338	Kota Palu	63.613	2.173	1.321.222
339	Kab. Parigi Moutong	63.613	2.173	1.436.112
340	Kab. Tojo Una Una	59.796	83.553	1.316.033
341	Kab. Sigi	63.613	2.173	1.374.808
342	Kab. Banggai Laut	63.613	2.173	1.343.712
343	Kab. Morowali Utara	2.004.331	44.979	1.645.179
344	Provinsi Sulawesi Selatan	1.607.529	34.468	2.775.472
345	Kab. Bantaeng	44.024	945	123.793
346	Kab. Barru	39.622	850	119.865
347	Kab. Bone	1.754.326	926	278.272
348	Kab. Bulukumba	741.462	926	176.654
349	Kab. Enrekang	270.529	850	133.380
350	Kab. Gowa	137.849	160.226	230.009

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
337	Kab. Poso	0	311.838	45.417	1.909.527
338	Kota Palu	0	2.246.717	48.316	3.682.041
339	Kab. Parigi Moutong	0	354.962	48.316	1.905.176
340	Kab. Tojo Una Una	0	311.838	45.417	1.816.637
341	Kab. Sigi	0	360.299	48.316	1.849.209
342	Kab. Banggai Laut	0	331.743	48.316	1.789.557
343	Kab. Morowali Utara	0	4.458.042	47.349	8.199.880
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	2.114.222	219.681	6.751.372
345	Kab. Bantaeng	0	59.443	48.316	276.521
346	Kab. Barru	0	52.801	43.484	256.622
347	Kab. Bone	0	60.791	47.349	2.141.664
348	Kab. Bulukumba	0	56.743	47.349	1.023.134
349	Kab. Enrekang	0	52.111	43.484	500.354
350	Kab. Gowa	0	57.901	48.316	634.301

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
351	Kab. Jeneponto	151.614	945	164.110
352	Kab. Luwu	39.622	850	169.517
353	Kab. Luwu Utara	129.719	907	230.189
354	Kab. Maros	42.263	907	159.254
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	43.144	926	149.815
356	Kota Palopo	43.144	926	112.571
357	Kab. Luwu Timur	724.787	850	203.288
358	Kab. Pinrang	51.701	850	161.307
359	Kab. Sinjai	41.383	888	134.427
360	Kab. Kepulauan Selayar	44.024	945	199.146
361	Kab. Sidenreng Rappang	109.291	850	141.624
362	Kab. Soppeng	81.042	926	136.705
363	Kab. Takalar	1.889.774	945	151.534
364	Kab. Tana Toraja	122.913	869	141.037

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
351	Kab. Jeneponto	0	58.223	48.316	423.208
352	Kab. Luwu	0	77.220	43.484	330.693
353	Kab. Luwu Utara	0	104.871	46.383	512.069
354	Kab. Maros	0	860.098	46.383	1.108.905
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	0	1.793.689	47.349	2.034.923
356	Kota Palopo	0	56.743	47.349	260.733
357	Kab. Luwu Timur	0	6.415.840	43.484	7.388.249
358	Kab. Pinrang	0	52.111	43.484	309.453
359	Kab. Sinjai	0	54.427	45.417	276.542
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	57.901	48.316	350.332
361	Kab. Sidenreng Rappang	0	52.111	43.484	347.360
362	Kab. Soppeng	0	57.810	47.349	323.832
363	Kab. Takalar	0	57.901	48.316	2.148.470
364	Kab. Tana Toraja	0	54.454	44.450	363.723

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
365	Kab. Wajo	1.573.991	926	10.393.982
366	Kota Pare-pare	39.622	850	97.240
367	Kota Makassar	39.622	850	285.127
368	Kab. Toraja Utara	69.012	850	130.420
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	619.717	8.638	277.630
370	Kab. Buton	23.910	334	73.034
371	Kab. Konawe	826.102	334	123.001
372	Kab. Kolaka	661.632	342	101.413
373	Kab. Muna	23.910	39.348	80.534
374	Kota Kendari	23.910	334	69.036
375	Kota Bau-bau	23.910	334	44.780
376	Kab. Konawe Selatan	574.409	334	127.380
377	Kab. Bombana	135.489	342	104.432
378	Kab. Wakatobi	23.910	334	72.531

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
365	Kab. Wajo	0	57.228	47.349	12.073.476
366	Kota Pare-pare	0	52.111	43.484	233.307
367	Kota Makassar	0	52.111	43.484	421.194
368	Kab. Toraja Utara	0	52.111	43.484	295.877
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	7.879.662	142.905	8.928.552
370	Kab. Buton	0	450.152	43.484	590.914
371	Kab. Konawe	0	2.477.488	43.484	3.470.409
372	Kab. Kolaka	0	7.461.921	44.450	8.269.758
373	Kab. Muna	0	304.051	43.484	491.327
374	Kota Kendari	0	304.000	43.484	440.764
375	Kota Bau-bau	0	304.027	43.484	416.535
376	Kab. Konawe Selatan	0	4.195.027	43.484	4.940.634
377	Kab. Bombana	0	4.535.239	44.450	4.819.952
378	Kab. Wakatobi	0	304.000	43.484	444.259

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
379	Kab. Kolaka Utara	24.441	342	87.071
380	Kab. Konawe Utara	691.695	334	100.337
381	Kab. Buton Utara	37.403	334	84.965
382	Kab. Konawe Kepulauan	24.441	342	73.626
383	Kab. Kolaka Timur	58.477	342	99.664
384	Kab. Muna Barat	23.910	334	62.384
385	Kab. Buton Tengah	23.910	334	71.739
386	Kab. Buton Selatan	23.910	334	70.354
387	Provinsi Bali	60.362	0	182.097
388	Kab. Badung	4.658	0	107.885
389	Kab. Bangli	4.565	0	65.877
390	Kab. Buleleng	11.733	0	172.310
391	Kab. Gianyar	36.519	0	94.402
392	Kab. Jembrana	233.713	0	86.004

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
379	Kab. Kolaka Utara	0	1.447.044	44.450	1.603.348
380	Kab. Konawe Utara	0	15.994.391	43.484	16.830.241
381	Kab. Buton Utara	0	304.000	43.484	470.186
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	310.755	44.450	453.614
383	Kab. Kolaka Timur	0	310.755	44.450	513.688
384	Kab. Muna Barat	0	304.000	43.484	434.112
385	Kab. Buton Tengah	0	1.755.159	43.484	1.894.626
386	Kab. Buton Selatan	0	304.000	43.484	442.082
387	Provinsi Bali	66.405	0	84.062	392.926
388	Kab. Badung	18.049	0	48.316	178.908
389	Kab. Bangli	7.437	0	47.349	125.228
390	Kab. Buleleng	38.428	0	48.316	270.787
391	Kab. Gianyar	10.157	0	45.417	186.495
392	Kab. Jembrana	5.124	0	48.316	373.157

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
393	Kab. Karangasem	4.658	0	117.912
394	Kab. Klungkung	4.658	0	62.763
395	Kab. Tabanan	4.658	0	104.034
396	Kota Denpasar	4.658	0	123.402
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	36.260	37.323	294.599
398	Kab. Bima	12.973	8.552	198.132
399	Kab. Dompu	64.002	36.516	112.356
400	Kab. Lombok Barat	2.487	2.561	162.196
401	Kab. Lombok Tengah	2.438	27.452	215.121
402	Kab. Lombok Timur	52.658	46.596	278.899
403	Kab. Sumbawa	43.011	37.744	229.739
404	Kota Mataram	2.487	2.561	96.379
405	Kota Bima	2.487	2.561	60.784
406	Kab. Sumbawa Barat	2.487	2.561	82.458

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
393	Kab. Karangasem	5.124	0	48.316	176.010
394	Kab. Klungkung	5.124	0	48.316	120.861
395	Kab. Tabanan	248.135	0	48.316	405.143
396	Kota Denpasar	5.124	0	48.316	181.500
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	11.553.063	93.402	12.014.647
398	Kab. Bima	0	801.737	48.316	1.069.710
399	Kab. Dompu	0	827.470	48.316	1.088.660
400	Kab. Lombok Barat	0	828.635	48.316	1.044.195
401	Kab. Lombok Tengah	0	776.928	47.349	1.069.288
402	Kab. Lombok Timur	0	819.634	48.316	1.246.103
403	Kab. Sumbawa	0	1.617.604	48.316	1.976.414
404	Kota Mataram	0	792.391	48.316	942.134
405	Kota Bima	0	792.391	48.316	906.539
406	Kab. Sumbawa Barat	0	51.696.941	48.316	51.832.763

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
407	Kab. Lombok Utara	2.438	24.902	81.795
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	191.104	51.282	434.569
409	Kab. Alor	5.852	1.571	130.656
410	Kab. Belu	5.618	1.508	70.863
411	Kab. Ende	5.384	1.445	98.546
412	Kab. Flores Timur	5.267	1.414	103.701
413	Kab. Kupang	5.852	243.349	176.755
414	Kab. Lembata	6.802	1.414	77.480
415	Kab. Manggarai	5.384	1.445	90.431
416	Kab. Ngada	215.302	1.445	75.203
417	Kab. Sikka	5.267	1.414	107.128
418	Kab. Sumba Barat	23.506	1.508	59.323
419	Kab. Sumba Timur	654.845	1.571	182.595
420	Kab. Timor Tengah Selatan	5.735	1.539	155.556

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
407	Kab. Lombok Utara	0	776.702	47.349	933.186
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	382.809	22.141	197.264	1.279.169
409	Kab. Alor	11.722	1.938	48.316	200.055
410	Kab. Belu	11.253	2.085	46.383	137.710
411	Kab. Ende	955.452	952	44.450	1.106.229
412	Kab. Flores Timur	10.550	611	43.484	165.027
413	Kab. Kupang	11.722	4.335	48.316	490.329
414	Kab. Lembata	10.550	611	43.484	140.341
415	Kab. Manggarai	630.477	13.375	44.450	785.562
416	Kab. Ngada	106.882	624	44.450	443.906
417	Kab. Sikka	10.550	8.195	43.484	176.038
418	Kab. Sumba Barat	11.253	651	46.383	142.624
419	Kab. Sumba Timur	11.722	678	48.316	899.727
420	Kab. Timor Tengah Selatan	11.488	28.916	47.349	250.583

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
421	Kab. Timor Tengah Utara	5.384	1.445	93.560
422	Kota Kupang	5.618	1.508	83.463
423	Kab. Rote Ndao	5.618	1.508	89.856
424	Kab. Manggarai Barat	5.852	1.571	125.826
425	Kab. Nagekeo	5.384	1.445	76.060
426	Kab. Sumba Barat Daya	5.852	1.571	108.484
427	Kab. Sumba Tengah	5.852	1.571	89.898
428	Kab. Manggarai Timur	5.267	1.414	101.520
429	Kab. Sabu Raijua	5.852	1.571	68.917
430	Kab. Malaka	9.164	1.539	77.374
431	Provinsi Maluku	82.891	343.269	981.240
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	5.685	345.761	235.804
433	Kab. Maluku Tengah	333.158	87.456	382.395
434	Kab. Maluku Tenggara	5.685	23.544	143.014

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
421	Kab. Timor Tengah Utara	10.784	26.566	44.450	182.189
422	Kota Kupang	11.253	2.844	46.383	151.069
423	Kab. Rote Ndao	11.253	660	46.383	155.278
424	Kab. Manggarai Barat	11.722	3.315	48.316	196.602
425	Kab. Nagekeo	10.784	2.685	44.450	140.808
426	Kab. Sumba Barat Daya	11.722	678	48.316	176.623
427	Kab. Sumba Tengah	11.722	678	48.316	158.037
428	Kab. Manggarai Timur	10.550	611	43.484	162.846
429	Kab. Sabu Raijua	11.722	11.082	48.316	147.460
430	Kab. Malaka	11.488	1.385	47.349	148.299
431	Provinsi Maluku	29.287	38.986	92.468	1.568.141
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	2.009	2.675	48.316	640.250
433	Kab. Maluku Tengah	145.274	2.621	47.349	998.253
434	Kab. Maluku Tenggara	2.009	2.675	48.316	225.243

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
435	Kab. Buru	54.695	352.193	185.550
436	Kota Ambon	5.117	21.190	121.927
437	Kab. Seram Bagian Barat	35.170	23.544	230.699
438	Kab. Seram Bagian Timur	5.685	822.186	3.475.616
439	Kab. Kepulauan Aru	5.685	23.544	285.894
440	Kota Tual	5.685	23.544	129.040
441	Kab. Maluku Barat Daya	5.685	23.544	248.275
442	Kab. Buru Selatan	5.117	193.628	158.781
443	Provinsi Papua	793.264	279.240	340.703
444	Kab. Biak Numfor	66.650	23.462	124.897
445	Kab. Jayapura	1.771.064	269.660	238.581
446	Kab. Kepulauan Yapen	62.570	22.026	126.782
447	Kota Jayapura	62.570	22.026	101.614
448	Kab. Sarmi	103.730	880.167	254.161

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
435	Kab. Buru	1.969	2.621	47.349	644.377
436	Kota Ambon	1.808	2.407	43.484	195.933
437	Kab. Seram Bagian Barat	2.009	92.002	48.316	431.740
438	Kab. Seram Bagian Timur	2.009	2.675	48.316	4.356.487
439	Kab. Kepulauan Aru	2.009	2.675	48.316	368.123
440	Kota Tual	2.009	2.675	48.316	211.269
441	Kab. Maluku Barat Daya	2.009	108.010	48.316	435.839
442	Kab. Buru Selatan	1.808	2.407	43.484	405.225
443	Provinsi Papua	0	17.009	75.655	1.505.871
444	Kab. Biak Numfor	0	1.430	47.349	263.788
445	Kab. Jayapura	0	1.342	44.450	2.325.097
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	1.342	44.450	257.170
447	Kota Jayapura	0	1.342	44.450	232.002
448	Kab. Sarmi	0	43.335	43.484	1.324.877

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
449	Kab. Keerom	1.836.957	171.221	178.043
450	Kab. Waropen	124.136	21.547	234.673
451	Kab. Supiori	61.210	21.547	98.704
452	Kab. Mamberamo Raya	61.210	21.547	425.295
453	Provinsi Maluku Utara	69.736	368.934	249.261
454	Kab. Halmahera Tengah	4.783	139.897	97.654
455	Kota Ternate	4.783	25.305	71.343
456	Kab. Halmahera Barat	4.783	25.305	108.905
457	Kab. Halmahera Timur	4.688	616.318	161.140
458	Kab. Halmahera Selatan	284.582	401.726	278.100
459	Kab. Halmahera Utara	37.882	25.305	123.887
460	Kab. Kepulauan Sula	4.783	586.091	117.425
461	Kota Tidore Kepulauan	4.783	25.305	84.253
462	Kab. Pulau Morotai	4.688	24.798	106.932

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
449	Kab. Keerom	0	35.463	43.484	2.265.168
450	Kab. Waropen	0	1.313	43.484	425.153
451	Kab. Supiori	0	1.313	43.484	226.258
452	Kab. Mamberamo Raya	0	1.313	43.484	552.849
453	Provinsi Maluku Utara	0	12.835.842	93.402	13.617.175
454	Kab. Halmahera Tengah	0	16.456.399	48.316	16.747.049
455	Kota Ternate	0	880.374	48.316	1.030.121
456	Kab. Halmahera Barat	0	899.271	48.316	1.086.580
457	Kab. Halmahera Timur	0	24.296.288	47.349	25.125.783
458	Kab. Halmahera Selatan	0	17.307.104	48.316	18.319.828
459	Kab. Halmahera Utara	0	894.005	48.316	1.129.395
460	Kab. Kepulauan Sula	0	914.221	48.316	1.670.836
461	Kota Tidore Kepulauan	0	887.453	48.316	1.050.110
462	Kab. Pulau Morotai	0	863.662	47.349	1.047.429

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
463	Kab. Pulau Taliabu	4.783	25.305	134.276
464	Provinsi Banten	1.069.739	378.900	488.130
465	Kab. Lebak	3.840.282	1.086.677	334.206
466	Kab. Pandeglang	1.031.477	672.835	332.540
467	Kab. Serang	190.164	33.413	351.881
468	Kab. Tangerang	86.787	30.740	546.873
469	Kota Cilegon	94.334	33.413	121.407
470	Kota Tangerang	86.787	30.740	322.841
471	Kota Serang	94.334	33.413	167.325
472	Kota Tangerang Selatan	90.561	32.077	261.428
473	Provinsi Bangka Belitung	2.111.686	89.804	143.688
474	Kab. Bangka	2.239.573	78.571	123.794
475	Kab. Belitung	2.251.821	9.240	109.488
476	Kota Pangkal Pinang	217.252	9.240	59.301

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
463	Kab. Pulau Taliabu	0	2.485.509	48.316	2.698.189
464	Provinsi Banten	24.352	136.405	74.721	2.172.247
465	Kab. Lebak	2.335	109.225	48.316	5.421.041
466	Kab. Pandeglang	56.960	18.261	48.316	2.160.389
467	Kab. Serang	55.938	502.655	48.316	1.182.367
468	Kab. Tangerang	1.977	11.067	44.450	721.894
469	Kota Cilegon	2.148	27.345	48.316	326.963
470	Kota Tangerang	1.977	11.067	44.450	497.862
471	Kota Serang	2.148	12.029	48.316	357.565
472	Kota Tangerang Selatan	2.062	11.548	46.383	444.059
473	Provinsi Bangka Belitung	0	3.345.963	65.381	5.756.522
474	Kab. Bangka	0	5.191.257	48.316	7.681.511
475	Kab. Belitung	0	984.748	48.316	3.403.613
476	Kota Pangkal Pinang	0	344.235	48.316	678.344

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
477	Kab. Bangka Selatan	864.952	9.055	127.117
478	Kab. Bangka Tengah	808.952	112.078	104.189
479	Kab. Bangka Barat	2.376.066	94.547	110.114
480	Kab. Belitung Timur	2.104.201	148.595	104.544
481	Provinsi Gorontalo	308.952	119.796	96.489
482	Kab. Boalemo	340.616	15.092	78.030
483	Kab. Gorontalo	426.790	15.092	113.244
484	Kota Gorontalo	38.921	15.092	48.133
485	Kab. Pohuwato	727.497	14.790	111.794
486	Kab. Bone Bolango	37.364	14.488	68.288
487	Kab. Gorontalo Utara	42.319	545.737	82.997
488	Provinsi Kepulauan Riau	179.684	0	11.546.865
489	Kab. Natuna	18.864	0	34.265.076
490	Kab. Kepulauan Anambas	53.958	0	19.990.104

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
477	Kab. Bangka Selatan	0	5.137.653	47.349	6.186.126
478	Kab. Bangka Tengah	0	791.351	48.316	1.864.886
479	Kab. Bangka Barat	0	3.398.341	48.316	6.027.384
480	Kab. Belitung Timur	0	1.328.584	47.349	3.733.273
481	Provinsi Gorontalo	0	14.420	54.921	594.578
482	Kab. Boalemo	0	3.253	48.316	485.307
483	Kab. Gorontalo	0	1.882	48.316	605.324
484	Kota Gorontalo	0	1.817	48.316	152.279
485	Kab. Pohuwato	0	20.680	47.349	922.110
486	Kab. Bone Bolango	0	40.853	46.383	207.376
487	Kab. Gorontalo Utara	0	5.395	47.349	723.797
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	842.679	64.074	12.633.302
489	Kab. Natuna	0	692.756	48.316	35.025.012
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	88.465	48.316	20.180.843

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
491	Kab. Karimun	131.805	0	1.302.058
492	Kota Batam	18.864	0	1.464.613
493	Kota Tanjung Pinang	18.487	0	1.235.538
494	Kab. Lingga	189.758	0	1.319.179
495	Kab. Bintan	512.461	0	1.320.360
496	Provinsi Papua Barat	380.196	1.083.043	81.798.112
497	Kab. Fak fak	680.744	378.419	20.059.042
498	Kab. Manokwari	525.439	111.424	8.504.259
499	Kab. Teluk Bintuni	648.106	1.730.122	370.295.841
500	Kab. Teluk Wondama	39.985	881.671	8.726.779
501	Kab. Kaimana	78.938	2.425.265	8.889.285
502	Kab. Manokwari Selatan	39.115	111.424	8.516.878
503	Kab. Pegunungan Arfak	39.985	113.901	8.765.753
504	Provinsi Sulawesi Barat	654.104	21.157	128.157

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
491	Kab. Karimun	0	2.340.753	48.316	3.822.932
492	Kota Batam	0	88.521	48.316	1.620.314
493	Kota Tanjung Pinang	0	86.695	47.349	1.388.069
494	Kab. Lingga	0	730.220	47.349	2.286.506
495	Kab. Bintan	0	403.919	48.316	2.285.056
496	Provinsi Papua Barat	0	12.966	58.843	83.333.160
497	Kab. Fak fak	0	1.483	48.316	21.168.004
498	Kab. Manokwari	0	59.065	43.484	9.243.671
499	Kab. Teluk Bintuni	0	1.364	44.450	372.719.883
500	Kab. Teluk Wondama	0	1.364	44.450	9.694.249
501	Kab. Kaimana	0	1.364	44.450	11.439.302
502	Kab. Manokwari Selatan	0	1.335	43.484	8.712.236
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	1.364	44.450	8.965.453
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	1.466	53.800	858.684

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
505	Kab. Majene	84.119	2.721	77.208
506	Kab. Mamuju	470.041	2.613	158.543
507	Kab. Polewali Mandar	84.119	2.721	129.961
508	Kab. Mamasa	82.437	2.667	103.165
509	Kab. Pasangkayu	2.210.637	28.917	98.697
510	Kab. Mamuju Tengah	300.207	65.306	95.046
511	Provinsi Kalimantan Utara	2.792.579	1.227.742	12.285.045
512	Kab. Bulungan	5.121.563	2.059.075	17.240.080
513	Kab. Malinau	430.954	2.240.003	2.427.909
514	Kab. Nunukan	6.210.611	1.180.650	8.061.762
515	Kota Tarakan	422.335	185.678	29.226.000
516	Kab. Tana Tidung	1.711.428	579.052	5.295.345
517	Provinsi Papua Selatan	1.460.965	323.496	365.551
518	Kab. Merauke	5.335.159	908.088	689.806

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
505	Kab. Majene	0	189	48.316	212.553
506	Kab. Mamuju	0	1.725	46.383	679.305
507	Kab. Polewali Mandar	0	1.984	48.316	267.101
508	Kab. Mamasa	0	3.483	47.349	239.101
509	Kab. Pasangkayu	0	170	43.484	2.381.905
510	Kab. Mamuju Tengah	0	173	44.450	505.182
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	19.746.894	46.701	36.098.961
512	Kab. Bulungan	0	11.695.502	48.316	36.164.536
513	Kab. Malinau	0	10.359.006	48.316	15.506.188
514	Kab. Nunukan	0	11.923.698	44.450	27.421.171
515	Kota Tarakan	0	2.986.413	47.349	32.867.775
516	Kab. Tana Tidung	0	64.085.107	48.316	71.719.248
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	34.372	2.184.384
518	Kab. Merauke	0	0	44.450	6.977.503

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
519	Kab. Boven Digoel	1.620.959	544.956	382.109
520	Kab. Mappi	313.681	160.473	418.740
521	Kab. Asmat	300.610	66.564	417.729
522	Provinsi Papua Tengah	233.621	419.481	296.590
523	Kab. Mimika	67.332	494.676	316.667
524	Kab. Nabire	1.011.687	1.410.271	255.134
525	Kab. Paniai	20.190	36.252	134.674
526	Kab. Puncak Jaya	19.366	34.772	157.961
527	Kab. Dogiyai	20.602	36.992	145.216
528	Kab. Puncak	18.542	33.293	167.049
529	Kab. Intan Jaya	18.542	33.293	140.365
530	Kab. Deiyai	18.954	34.032	131.216
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	236.080
532	Kab. Jayawijaya	0	0	102.773

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
519	Kab. Boven Digoel	0	0	44.450	2.592.474
520	Kab. Mappi	0	0	46.383	939.277
521	Kab. Asmat	0	0	44.450	829.353
522	Provinsi Papua Tengah	0	32.024.431	74.721	33.048.844
523	Kab. Mimika	0	134.217.948	44.450	135.141.073
524	Kab. Nabire	0	2.824.025	48.316	5.549.433
525	Kab. Paniai	0	2.767.544	47.349	3.006.009
526	Kab. Puncak Jaya	0	2.654.583	45.417	2.912.099
527	Kab. Dogiyai	0	2.824.025	48.316	3.075.151
528	Kab. Puncak	0	2.541.622	43.484	2.803.990
529	Kab. Intan Jaya	0	2.541.622	43.484	2.777.306
530	Kab. Deiyai	0	2.598.102	44.450	2.826.754
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	15.951	67.249	319.280
532	Kab. Jayawijaya	0	1.407	43.484	147.664

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
533	Kab. Yahukimo	0	0	296.404
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	225.804
535	Kab. Tolikara	0	0	134.637
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	110.486
537	Kab. Yalimo	0	0	106.088
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	102.485
539	Kab. Nduga	0	0	148.971
540	Provinsi Papua Barat Daya	345.771	28.130	6.072.289
541	Kab. Sorong	1.155.716	3.705	28.611.480
542	Kab. Sorong Selatan	453.226	128.146	878.656
543	Kab. Raja Ampat	42.688	3.473	1.031.356
544	Kab. Tambrauw	53.122	3.551	1.007.082
545	Kab. Maybrat	114.568	3.473	889.675
546	Kota Sorong	42.688	3.473	802.841

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
533	Kab. Yahukimo	0	1.438	44.450	342.292
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	72.664	43.484	341.952
535	Kab. Tolikara	0	1.407	43.484	179.528
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	1.407	43.484	155.377
537	Kab. Yalimo	0	1.407	43.484	150.979
538	Kab. Lanny Jaya	0	1.407	43.484	147.376
539	Kab. Nduga	0	1.407	43.484	193.862
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	980.400	50.437	7.477.027
541	Kab. Sorong	0	129.588	46.383	29.946.872
542	Kab. Sorong Selatan	0	121.038	43.484	1.624.550
543	Kab. Raja Ampat	0	4.457.051	43.484	5.578.052
544	Kab. Tambrauw	0	123.728	44.450	1.231.933
545	Kab. Maybrat	0	121.038	43.484	1.172.238
546	Kota Sorong	0	129.798	43.484	1.022.284

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
547	Selisih Lebih	35.160.304	7.833.237	151.843.644
JUMLAH NASIONAL		942.151.523	216.715.052	4.617.368.728

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
547	Selisih Lebih	4.285.504	109.787.264	1.015.592	309.925.545
JUMLAH NASIONAL		274.695.768	2.250.242.397	29.346.609	8.330.520.077

V.4. RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	CHT
1	2	3
1	Provinsi Aceh	10.396.929
2	Provinsi Sumatera Utara	12.750.187
3	Provinsi Sumatera Barat	827.335
4	Provinsi Riau	1.690
5	Provinsi Jambi	809.319
6	Provinsi Sumatera Selatan	179.341
7	Provinsi Bengkulu	410
8	Provinsi Lampung	2.029.433
9	Provinsi DKI Jakarta	1.211.795
10	Provinsi Jawa Barat	290.202.997
11	Provinsi Jawa Tengah	764.870.938
12	Provinsi DI Yogyakarta	9.687.792
13	Provinsi Jawa Timur	1.857.306.250
14	Provinsi Kalimantan Barat	1.098.530
15	Provinsi Kalimantan Tengah	196
16	Provinsi Kalimantan Selatan	10.913
17	Provinsi Kalimantan Timur	16.945
18	Provinsi Sulawesi Utara	0
19	Provinsi Sulawesi Tengah	265.662
20	Provinsi Sulawesi Selatan	10.406.682
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	0
22	Provinsi Bali	1.242.794
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	312.628.695
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.296.298
25	Provinsi Maluku	0
26	Provinsi Papua	0
27	Provinsi Maluku Utara	0
28	Provinsi Banten	2.206.537
29	Provinsi Bangka Belitung	0
30	Provinsi Gorontalo	188
31	Provinsi Kepulauan Riau	299.084
32	Provinsi Papua Barat	0
33	Provinsi Sulawesi Barat	0
34	Provinsi Kalimantan Utara	112
35	Provinsi Papua Selatan	0
36	Provinsi Papua Tengah	0
37	Provinsi Papua Pegunungan	0
38	Provinsi Papua Barat Daya	0
39	Selisih Lebih	1.815.071
JUMLAH NASIONAL		3.283.562.123



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
1	Provinsi Aceh	399.264	18.815.854	19.215.118
2	Kab. Aceh Barat	35.903	0	35.903
3	Kab. Aceh Besar	35.903	0	35.903
4	Kab. Aceh Selatan	35.903	0	35.903
5	Kab. Aceh Singkil	35.903	0	35.903
6	Kab. Aceh Tengah	120.386	0	120.386
7	Kab. Aceh Tenggara	35.903	0	35.903
8	Kab. Aceh Timur	1.134.135	0	1.134.135
9	Kab. Aceh Utara	309.093	0	309.093
10	Kab. Bireuen	58.903	0	58.903

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
1	Provinsi Aceh	1.221.901	20.867.577	22.089.478	41.304.596
2	Kab. Aceh Barat	96.594	0	96.594	132.497
3	Kab. Aceh Besar	96.594	0	96.594	132.497
4	Kab. Aceh Selatan	96.594	0	96.594	132.497
5	Kab. Aceh Singkil	96.594	0	96.594	132.497
6	Kab. Aceh Tengah	292.110	0	292.110	412.496
7	Kab. Aceh Tenggara	100.506	0	100.506	136.409
8	Kab. Aceh Timur	2.847.678	0	2.847.678	3.981.813
9	Kab. Aceh Utara	1.710.918	0	1.710.918	2.020.011
10	Kab. Bireuen	261.532	0	261.532	320.435

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
11	Kab. Pidie	35.903	0	35.903
12	Kab. Simeulue	35.903	0	35.903
13	Kota Banda Aceh	35.170	0	35.170
14	Kota Sabang	35.903	0	35.903
15	Kota Langsa	117.929	0	117.929
16	Kota Lhokseumawe	57.701	0	57.701
17	Kab. Gayo Lues	120.386	0	120.386
18	Kab. Aceh Barat Daya	35.903	0	35.903
19	Kab. Aceh Jaya	35.903	0	35.903
20	Kab. Nagan Raya	35.903	0	35.903

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
11	Kab. Pidie	96.594	0	96.594	132.497
12	Kab. Simeulue	96.594	0	96.594	132.497
13	Kota Banda Aceh	94.623	0	94.623	129.793
14	Kota Sabang	96.594	0	96.594	132.497
15	Kota Langsa	286.149	0	286.149	404.078
16	Kota Lhokseumawe	256.195	0	256.195	313.896
17	Kab. Gayo Lues	296.023	0	296.023	416.409
18	Kab. Aceh Barat Daya	96.594	0	96.594	132.497
19	Kab. Aceh Jaya	96.594	0	96.594	132.497
20	Kab. Nagan Raya	96.594	0	96.594	132.497

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
21	Kab. Aceh Tamiang	120.386	0	120.386
22	Kab. Bener Meriah	137.532	0	137.532
23	Kab. Pidie Jaya	35.903	0	35.903
24	Kota Subulussalam	35.903	0	35.903
25	Provinsi Sumatera Utara	17.311	0	17.311
26	Kab. Asahan	1.038	0	1.038
27	Kab. Dairi	1.060	0	1.060
28	Kab. Deli Serdang	1.038	0	1.038
29	Kab. Karo	1.060	0	1.060
30	Kab. Labuhanbatu	9.440.078	0	9.440.078

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
21	Kab. Aceh Tamiang	296.023	0	296.023	416.409
22	Kab. Bener Meriah	438.393	0	438.393	575.925
23	Kab. Pidie Jaya	96.594	0	96.594	132.497
24	Kota Subulussalam	96.594	0	96.594	132.497
25	Provinsi Sumatera Utara	15.652	0	15.652	32.963
26	Kab. Asahan	826	0	826	1.864
27	Kab. Dairi	843	0	843	1.903
28	Kab. Deli Serdang	4.659	0	4.659	5.697
29	Kab. Karo	4.756	0	4.756	5.816
30	Kab. Labuhanbatu	826	0	826	9.440.904

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
31	Kab. Langkat	1.060	0	1.060
32	Kab. Mandailing Natal	6.252	0	6.252
33	Kab. Nias	1.060	0	1.060
34	Kab. Simalungun	1.038	0	1.038
35	Kab. Tapanuli Selatan	6.252	0	6.252
36	Kab. Tapanuli Tengah	1.060	0	1.060
37	Kab. Tapanuli Utara	1.060	0	1.060
38	Kab. Toba	1.060	0	1.060
39	Kota Binjai	1.038	0	1.038
40	Kota Medan	1.038	0	1.038

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
31	Kab. Langkat	53.256	0	53.256	54.316
32	Kab. Mandailing Natal	843	0	843	7.095
33	Kab. Nias	843	0	843	1.903
34	Kab. Simalungun	826	0	826	1.864
35	Kab. Tapanuli Selatan	843	0	843	7.095
36	Kab. Tapanuli Tengah	843	0	843	1.903
37	Kab. Tapanuli Utara	843	0	843	1.903
38	Kab. Toba	843	0	843	1.903
39	Kota Binjai	4.659	0	4.659	5.697
40	Kota Medan	826	0	826	1.864

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
41	Kota Pematang Siantar	1.038	0	1.038
42	Kota Sibolga	1.017	0	1.017
43	Kota Tanjung Balai	1.038	0	1.038
44	Kota Tebing Tinggi	1.038	0	1.038
45	Kota Padang Sidempuan	1.038	0	1.038
46	Kab. Pakpak Bharat	1.060	0	1.060
47	Kab. Nias Selatan	1.060	0	1.060
48	Kab. Humbang Hasundutan	1.060	0	1.060
49	Kab. Serdang Bedagai	1.038	0	1.038
50	Kab. Samosir	1.060	0	1.060

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
41	Kota Pematang Siantar	826	0	826	1.864
42	Kota Sibolga	809	0	809	1.826
43	Kota Tanjung Balai	826	0	826	1.864
44	Kota Tebing Tinggi	826	0	826	1.864
45	Kota Padang Sidempuan	826	0	826	1.864
46	Kab. Pakpak Bharat	843	0	843	1.903
47	Kab. Nias Selatan	843	0	843	1.903
48	Kab. Humbang Hasundutan	843	0	843	1.903
49	Kab. Serdang Bedagai	826	0	826	1.864
50	Kab. Samosir	843	0	843	1.903

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
51	Kab. Batu Bara	1.038	0	1.038
52	Kab. Padang Lawas	275.401	0	275.401
53	Kab. Padang Lawas Utara	9.866.077	0	9.866.077
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	9.636.746	0	9.636.746
55	Kab. Labuhanbatu Utara	1.038	0	1.038
56	Kab. Nias Utara	1.038	0	1.038
57	Kab. Nias Barat	1.038	0	1.038
58	Kota Gunungsitoli	1.038	0	1.038
59	Provinsi Sumatera Barat	0	0	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	5.140.330	0	5.140.330

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
51	Kab. Batu Bara	826	0	826	1.864
52	Kab. Padang Lawas	826	0	826	276.227
53	Kab. Padang Lawas Utara	843	0	843	9.866.920
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	843	0	843	9.637.589
55	Kab. Labuhanbatu Utara	826	0	826	1.864
56	Kab. Nias Utara	826	0	826	1.864
57	Kab. Nias Barat	826	0	826	1.864
58	Kota Gunungsitoli	826	0	826	1.864
59	Provinsi Sumatera Barat	0	0	0	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	305.056	0	305.056	5.445.386

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
61	Kab. Agam	0	0	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0
63	Kab. Padang Pariaman	0	0	0
64	Kab. Pasaman	229.332	0	229.332
65	Kab. Pesisir Selatan	0	0	0
66	Kab. Sijunjung	4.815.861	0	4.815.861
67	Kab. Solok	0	0	0
68	Kab. Tanah Datar	0	0	0
69	Kota Bukit Tinggi	0	0	0
70	Kota Padang Panjang	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
61	Kab. Agam	0	0	0	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0	0
63	Kab. Padang Pariaman	0	0	0	0
64	Kab. Pasaman	0	0	0	229.332
65	Kab. Pesisir Selatan	0	0	0	0
66	Kab. Sijunjung	298.830	0	298.830	5.114.691
67	Kab. Solok	0	0	0	0
68	Kab. Tanah Datar	0	0	0	0
69	Kota Bukit Tinggi	0	0	0	0
70	Kota Padang Panjang	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
71	Kota Padang	0	0	0
72	Kota Payakumbuh	0	0	0
73	Kota Sawahlunto	0	0	0
74	Kota Solok	0	0	0
75	Kota Pariaman	0	0	0
76	Kab. Pasaman Barat	0	0	0
77	Kab. Dharmasraya	48.768	0	48.768
78	Kab. Solok Selatan	0	0	0
79	Provinsi Riau	151.866.316	0	151.866.316
80	Kab. Bengkalis	260.293.739	0	260.293.739

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
71	Kota Padang	0	0	0	0
72	Kota Payakumbuh	0	0	0	0
73	Kota Sawahlunto	0	0	0	0
74	Kota Solok	0	0	0	0
75	Kota Pariaman	0	0	0	0
76	Kab. Pasaman Barat	0	0	0	0
77	Kab. Dharmasraya	0	0	0	48.768
78	Kab. Solok Selatan	0	0	0	0
79	Provinsi Riau	5.706.323	0	5.706.323	157.572.639
80	Kab. Bengkalis	862.075	0	862.075	261.155.814

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
81	Kab. Indragiri Hilir	26.266.451	0	26.266.451
82	Kab. Indragiri Hulu	20.380.477	0	20.380.477
83	Kab. Kampar	98.409.375	0	98.409.375
84	Kab. Kuantan Singingi	25.162.833	0	25.162.833
85	Kab. Pelalawan	33.806.848	0	33.806.848
86	Kab. Rokan Hilir	160.374.450	0	160.374.450
87	Kab. Rokan Hulu	68.422.306	0	68.422.306
88	Kab. Siak	129.841.511	0	129.841.511
89	Kota Dumai	89.226.729	0	89.226.729
90	Kota Pekanbaru	33.029.762	0	33.029.762

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
81	Kab. Indragiri Hilir	11.256.779	0	11.256.779	37.523.230
82	Kab. Indragiri Hulu	1.907.976	0	1.907.976	22.288.453
83	Kab. Kampar	6.624.009	0	6.624.009	105.033.384
84	Kab. Kuantan Singingi	2.206.805	0	2.206.805	27.369.638
85	Kab. Pelalawan	15.016.544	0	15.016.544	48.823.392
86	Kab. Rokan Hilir	862.075	0	862.075	161.236.525
87	Kab. Rokan Hulu	1.160.904	0	1.160.904	69.583.210
88	Kab. Siak	2.206.805	0	2.206.805	132.048.316
89	Kota Dumai	862.075	0	862.075	90.088.804
90	Kota Pekanbaru	2.206.805	0	2.206.805	35.236.567

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
91	Kab. Kepulauan Meranti	27.452.160	0	27.452.160
92	Provinsi Jambi	24.040.221	0	24.040.221
93	Kab. Batang Hari	13.702.876	0	13.702.876
94	Kab. Bungo	4.323.600	0	4.323.600
95	Kab. Kerinci	4.273.818	0	4.273.818
96	Kab. Merangin	4.576.972	0	4.576.972
97	Kab. Muaro Jambi	14.423.289	0	14.423.289
98	Kab. Sarolangun	8.274.006	0	8.274.006
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	69.171.999	0	69.171.999
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	21.609.399	0	21.609.399

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
91	Kab. Kepulauan Meranti	936.749	0	936.749	28.388.909
92	Provinsi Jambi	35.777.610	0	35.777.610	59.817.831
93	Kab. Batang Hari	31.002.023	0	31.002.023	44.704.899
94	Kab. Bungo	5.962.936	0	5.962.936	10.286.536
95	Kab. Kerinci	5.962.936	0	5.962.936	10.236.754
96	Kab. Merangin	5.841.413	0	5.841.413	10.418.385
97	Kab. Muaro Jambi	31.636.631	0	31.636.631	46.059.920
98	Kab. Sarolangun	21.475.518	0	21.475.518	29.749.524
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	111.092.057	0	111.092.057	180.264.056
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	28.195.199	0	28.195.199	49.804.598

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
101	Kab. Tebo	13.031.206	0	13.031.206
102	Kota Jambi	4.186.597	0	4.186.597
103	Kota Sungai Penuh	4.273.818	0	4.273.818
104	Provinsi Sumatera Selatan	15.060.077	0	15.060.077
105	Kab. Lahat	1.530.272	0	1.530.272
106	Kab. Musi Banyuasin	40.323.833	0	40.323.833
107	Kab. Musi Rawas	5.623.314	0	5.623.314
108	Kab. Muara Enim	2.022.325	0	2.022.325
109	Kab. Ogan Komering Ilir	1.389.677	0	1.389.677
110	Kab. Ogan Komering Ulu	3.695.510	0	3.695.510

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
101	Kab. Tebo	15.253.562	0	15.253.562	28.284.768
102	Kota Jambi	5.841.243	0	5.841.243	10.027.840
103	Kota Sungai Penuh	5.962.936	0	5.962.936	10.236.754
104	Provinsi Sumatera Selatan	75.609.515	0	75.609.515	90.669.592
105	Kab. Lahat	9.166.640	0	9.166.640	10.696.912
106	Kab. Musi Banyuasin	230.353.545	0	230.353.545	270.677.378
107	Kab. Musi Rawas	33.565.020	0	33.565.020	39.188.334
108	Kab. Muara Enim	13.717.585	0	13.717.585	15.739.910
109	Kab. Ogan Komering Ilir	6.943.732	0	6.943.732	8.333.409
110	Kab. Ogan Komering Ulu	8.288.802	0	8.288.802	11.984.312

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
111	Kota Palembang	5.086.285	0	5.086.285
112	Kota Prabumulih	1.491.528	0	1.491.528
113	Kota Pagar Alam	1.427.065	0	1.427.065
114	Kota Lubuk Linggau	1.470.482	0	1.470.482
115	Kab. Banyuasin	9.576.356	0	9.576.356
116	Kab. Ogan Ilir	1.671.847	0	1.671.847
117	Kab. OKU Timur	1.656.814	0	1.656.814
118	Kab. OKU Selatan	1.665.239	0	1.665.239
119	Kab. Empat Lawang	1.446.917	0	1.446.917
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	5.222.255	0	5.222.255

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
111	Kota Palembang	7.187.786	0	7.187.786	12.274.071
112	Kota Prabumulih	10.851.516	0	10.851.516	12.343.044
113	Kota Pagar Alam	7.448.002	0	7.448.002	8.875.067
114	Kota Lubuk Linggau	7.658.557	0	7.658.557	9.129.039
115	Kab. Banyuasin	35.205.913	0	35.205.913	44.782.269
116	Kab. Ogan Ilir	11.124.113	0	11.124.113	12.795.960
117	Kab. OKU Timur	7.069.562	0	7.069.562	8.726.376
118	Kab. OKU Selatan	7.313.617	0	7.313.617	8.978.856
119	Kab. Empat Lawang	7.610.475	0	7.610.475	9.057.392
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	23.287.436	0	23.287.436	28.509.691

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
121	Kab. Musi Rawas Utara	7.550.386	0	7.550.386
122	Provinsi Bengkulu	0	0	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	6.447	0	6.447
124	Kab. Bengkulu Utara	0	0	0
125	Kab. Rejang Lebong	58.599	0	58.599
126	Kota Bengkulu	0	0	0
127	Kab. Kaur	8.603	0	8.603
128	Kab. Seluma	6.313	0	6.313
129	Kab. Mukomuko	0	0	0
130	Kab. Lebong	380.956	0	380.956

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
121	Kab. Musi Rawas Utara	22.508.494	0	22.508.494	30.058.880
122	Provinsi Bengkulu	0	0	0	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	108.217	0	108.217	114.664
124	Kab. Bengkulu Utara	0	0	0	0
125	Kab. Rejang Lebong	570.164	0	570.164	628.763
126	Kota Bengkulu	0	0	0	0
127	Kab. Kaur	249.140	0	249.140	257.743
128	Kab. Seluma	105.962	0	105.962	112.275
129	Kab. Mukomuko	0	0	0	0
130	Kab. Lebong	570.164	0	570.164	951.120

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
131	Kab. Kepahiang	0	0	0
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	0
133	Provinsi Lampung	11.717.901	0	11.717.901
134	Kab. Lampung Barat	1.641.891	0	1.641.891
135	Kab. Lampung Selatan	2.675.828	0	2.675.828
136	Kab. Lampung Tengah	2.675.828	0	2.675.828
137	Kab. Lampung Utara	1.608.383	0	1.608.383
138	Kab. Lampung Timur	10.774.483	0	10.774.483
139	Kab. Tanggamus	1.641.891	0	1.641.891
140	Kab. Tulang Bawang	2.675.828	0	2.675.828

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
131	Kab. Kepahiang	0	0	0	0
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	0	0
133	Provinsi Lampung	487.875	0	487.875	12.205.776
134	Kab. Lampung Barat	66.677	0	66.677	1.708.568
135	Kab. Lampung Selatan	65.316	0	65.316	2.741.144
136	Kab. Lampung Tengah	65.316	0	65.316	2.741.144
137	Kab. Lampung Utara	65.316	0	65.316	1.673.699
138	Kab. Lampung Timur	66.677	0	66.677	10.841.160
139	Kab. Tanggamus	66.677	0	66.677	1.708.568
140	Kab. Tulang Bawang	65.316	0	65.316	2.741.144

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
141	Kab. Way Kanan	1.641.891	0	1.641.891
142	Kota Bandar Lampung	1.608.383	0	1.608.383
143	Kota Metro	2.675.828	0	2.675.828
144	Kab. Pesawaran	1.608.383	0	1.608.383
145	Kab. Pringsewu	1.608.383	0	1.608.383
146	Kab. Mesuji	1.608.383	0	1.608.383
147	Kab. Tulang Bawang Barat	1.608.383	0	1.608.383
148	Kab. Pesisir Barat	1.641.891	0	1.641.891
149	Provinsi DKI Jakarta	16.739.159	0	16.739.159
150	Provinsi Jawa Barat	9.582.036	0	9.582.036

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
141	Kab. Way Kanan	66.677	0	66.677	1.708.568
142	Kota Bandar Lampung	65.316	0	65.316	1.673.699
143	Kota Metro	65.316	0	65.316	2.741.144
144	Kab. Pesawaran	65.316	0	65.316	1.673.699
145	Kab. Pringsewu	65.316	0	65.316	1.673.699
146	Kab. Mesuji	65.316	0	65.316	1.673.699
147	Kab. Tulang Bawang Barat	65.316	0	65.316	1.673.699
148	Kab. Pesisir Barat	66.677	0	66.677	1.708.568
149	Provinsi DKI Jakarta	2.295.139	0	2.295.139	19.034.298
150	Provinsi Jawa Barat	7.525.340	0	7.525.340	17.107.376

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
151	Kab. Bandung	673.360	0	673.360
152	Kab. Bekasi	686.335	0	686.335
153	Kab. Bogor	700.937	0	700.937
154	Kab. Ciamis	687.388	0	687.388
155	Kab. Cianjur	673.360	0	673.360
156	Kab. Cirebon	673.360	0	673.360
157	Kab. Garut	673.360	0	673.360
158	Kab. Indramayu	2.611.829	0	2.611.829
159	Kab. Karawang	908.117	0	908.117
160	Kab. Kuningan	687.388	0	687.388

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
151	Kab. Bandung	682.090	0	682.090	1.355.450
152	Kab. Bekasi	2.120.518	0	2.120.518	2.806.853
153	Kab. Bogor	835.094	0	835.094	1.536.031
154	Kab. Ciamis	534.944	0	534.944	1.222.332
155	Kab. Cianjur	520.760	0	520.760	1.194.120
156	Kab. Cirebon	593.867	0	593.867	1.267.227
157	Kab. Garut	520.760	0	520.760	1.194.120
158	Kab. Indramayu	1.702.793	0	1.702.793	4.314.622
159	Kab. Karawang	2.029.710	0	2.029.710	2.937.827
160	Kab. Kuningan	534.944	0	534.944	1.222.332

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
161	Kab. Majalengka	673.360	0	673.360
162	Kab. Purwakarta	700.937	0	700.937
163	Kab. Subang	700.937	0	700.937
164	Kab. Sukabumi	673.360	0	673.360
165	Kab. Sumedang	673.360	0	673.360
166	Kab. Tasikmalaya	659.332	0	659.332
167	Kota Bandung	673.360	0	673.360
168	Kota Bekasi	673.360	0	673.360
169	Kota Bogor	673.360	0	673.360
170	Kota Cirebon	673.360	0	673.360

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
161	Kab. Majalengka	633.949	0	633.949	1.307.309
162	Kab. Purwakarta	819.525	0	819.525	1.520.462
163	Kab. Subang	2.868.762	0	2.868.762	3.569.699
164	Kab. Sukabumi	520.760	0	520.760	1.194.120
165	Kab. Sumedang	755.198	0	755.198	1.428.558
166	Kab. Tasikmalaya	513.109	0	513.109	1.172.441
167	Kota Bandung	520.760	0	520.760	1.194.120
168	Kota Bekasi	951.540	0	951.540	1.624.900
169	Kota Bogor	520.760	0	520.760	1.194.120
170	Kota Cirebon	520.760	0	520.760	1.194.120

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
171	Kota Depok	673.360	0	673.360
172	Kota Sukabumi	673.360	0	673.360
173	Kota Tasikmalaya	673.360	0	673.360
174	Kota Cimahi	659.332	0	659.332
175	Kota Banjar	673.360	0	673.360
176	Kab. Bandung Barat	673.360	0	673.360
177	Kab. Pangandaran	673.360	0	673.360
178	Provinsi Jawa Tengah	104.739	0	104.739
179	Kab. Banjarnegara	4.622	0	4.622
180	Kab. Banyumas	4.622	0	4.622

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
171	Kota Depok	565.817	0	565.817	1.239.177
172	Kota Sukabumi	520.760	0	520.760	1.194.120
173	Kota Tasikmalaya	520.760	0	520.760	1.194.120
174	Kota Cimahi	509.910	0	509.910	1.169.242
175	Kota Banjar	520.760	0	520.760	1.194.120
176	Kab. Bandung Barat	682.090	0	682.090	1.355.450
177	Kab. Pangandaran	520.760	0	520.760	1.194.120
178	Provinsi Jawa Tengah	771.026	0	771.026	875.765
179	Kab. Banjarnegara	39.089	0	39.089	43.711
180	Kab. Banyumas	39.089	0	39.089	43.711

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
181	Kab. Batang	4.622	0	4.622
182	Kab. Blora	59.755.897	0	59.755.897
183	Kab. Boyolali	6.694	0	6.694
184	Kab. Brebes	4.718	0	4.718
185	Kab. Cilacap	56.991	0	56.991
186	Kab. Demak	6.694	0	6.694
187	Kab. Grobogan	63.468	0	63.468
188	Kab. Jepara	4.622	0	4.622
189	Kab. Karanganyar	4.718	0	4.718
190	Kab. Kebumen	4.622	0	4.622

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
181	Kab. Batang	39.089	0	39.089	43.711
182	Kab. Blora	3.678.533	0	3.678.533	63.434.430
183	Kab. Boyolali	50.816	0	50.816	57.510
184	Kab. Brebes	39.904	0	39.904	44.622
185	Kab. Cilacap	39.089	0	39.089	96.080
186	Kab. Demak	50.816	0	50.816	57.510
187	Kab. Grobogan	424.532	0	424.532	488.000
188	Kab. Jepara	39.089	0	39.089	43.711
189	Kab. Karanganyar	39.904	0	39.904	44.622
190	Kab. Kebumen	39.089	0	39.089	43.711

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
191	Kab. Kendal	4.622	0	4.622
192	Kab. Klaten	4.622	0	4.622
193	Kab. Kudus	6.694	0	6.694
194	Kab. Magelang	4.622	0	4.622
195	Kab. Pati	30.116	0	30.116
196	Kab. Pekalongan	4.622	0	4.622
197	Kab. Pemalang	4.622	0	4.622
198	Kab. Purbalingga	4.622	0	4.622
199	Kab. Purworejo	4.622	0	4.622
200	Kab. Rembang	302.343	0	302.343

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
191	Kab. Kendal	39.089	0	39.089	43.711
192	Kab. Klaten	39.089	0	39.089	43.711
193	Kab. Kudus	50.816	0	50.816	57.510
194	Kab. Magelang	39.089	0	39.089	43.711
195	Kab. Pati	227.937	0	227.937	258.053
196	Kab. Pekalongan	39.089	0	39.089	43.711
197	Kab. Pemalang	39.089	0	39.089	43.711
198	Kab. Purbalingga	39.089	0	39.089	43.711
199	Kab. Purworejo	39.089	0	39.089	43.711
200	Kab. Rembang	218.180	0	218.180	520.523

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
201	Kab. Semarang	6.694	0	6.694
202	Kab. Sragen	6.694	0	6.694
203	Kab. Sukoharjo	4.622	0	4.622
204	Kab. Tegal	4.622	0	4.622
205	Kab. Temanggung	4.622	0	4.622
206	Kab. Wonogiri	4.622	0	4.622
207	Kab. Wonosobo	4.718	0	4.718
208	Kota Magelang	4.622	0	4.622
209	Kota Pekalongan	4.622	0	4.622
210	Kota Salatiga	4.622	0	4.622

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
201	Kab. Semarang	50.816	0	50.816	57.510
202	Kab. Sragen	50.816	0	50.816	57.510
203	Kab. Sukoharjo	39.089	0	39.089	43.711
204	Kab. Tegal	39.089	0	39.089	43.711
205	Kab. Temanggung	39.089	0	39.089	43.711
206	Kab. Wonogiri	39.089	0	39.089	43.711
207	Kab. Wonosobo	39.904	0	39.904	44.622
208	Kota Magelang	39.089	0	39.089	43.711
209	Kota Pekalongan	39.089	0	39.089	43.711
210	Kota Salatiga	39.089	0	39.089	43.711

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
211	Kota Semarang	4.622	0	4.622
212	Kota Surakarta	4.622	0	4.622
213	Kota Tegal	4.622	0	4.622
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	0
215	Kab. Bantul	0	0	0
216	Kab. Gunung Kidul	0	0	0
217	Kab. Kulon Progo	0	0	0
218	Kab. Sleman	0	0	0
219	Kota Yogyakarta	0	0	0
220	Provinsi Jawa Timur	283.110.654	0	283.110.654

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
211	Kota Semarang	39.089	0	39.089	43.711
212	Kota Surakarta	39.089	0	39.089	43.711
213	Kota Tegal	39.089	0	39.089	43.711
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	0	0
215	Kab. Bantul	0	0	0	0
216	Kab. Gunung Kidul	0	0	0	0
217	Kab. Kulon Progo	0	0	0	0
218	Kab. Sleman	0	0	0	0
219	Kota Yogyakarta	0	0	0	0
220	Provinsi Jawa Timur	50.441.068	0	50.441.068	333.551.722

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
221	Kab. Bangkalan	11.462.493	0	11.462.493
222	Kab. Banyuwangi	11.528.582	0	11.528.582
223	Kab. Blitar	11.293.305	0	11.293.305
224	Kab. Bojonegoro	919.650.510	0	919.650.510
225	Kab. Bondowoso	11.293.305	0	11.293.305
226	Kab. Gresik	13.853.798	0	13.853.798
227	Kab. Jember	11.293.305	0	11.293.305
228	Kab. Jombang	69.248.347	0	69.248.347
229	Kab. Kediri	11.528.582	0	11.528.582
230	Kab. Lamongan	69.821.820	0	69.821.820

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
221	Kab. Bangkalan	2.478.024	0	2.478.024	13.940.517
222	Kab. Banyuwangi	2.521.436	0	2.521.436	14.050.018
223	Kab. Blitar	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
224	Kab. Bojonegoro	21.378.412	0	21.378.412	941.028.922
225	Kab. Bondowoso	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
226	Kab. Gresik	9.537.597	0	9.537.597	23.391.395
227	Kab. Jember	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
228	Kab. Jombang	3.645.563	0	3.645.563	72.893.910
229	Kab. Kediri	2.521.436	0	2.521.436	14.050.018
230	Kab. Lamongan	3.840.340	0	3.840.340	73.662.160

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
231	Kab. Lumajang	11.293.305	0	11.293.305
232	Kab. Madiun	70.691.022	0	70.691.022
233	Kab. Magetan	11.293.305	0	11.293.305
234	Kab. Malang	11.528.582	0	11.528.582
235	Kab. Mojokerto	11.592.478	0	11.592.478
236	Kab. Nganjuk	69.248.347	0	69.248.347
237	Kab. Ngawi	69.273.841	0	69.273.841
238	Kab. Pacitan	11.293.305	0	11.293.305
239	Kab. Pamekasan	11.293.305	0	11.293.305
240	Kab. Pasuruan	11.293.305	0	11.293.305

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
231	Kab. Lumajang	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
232	Kab. Madiun	3.721.512	0	3.721.512	74.412.534
233	Kab. Magetan	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
234	Kab. Malang	2.521.436	0	2.521.436	14.050.018
235	Kab. Mojokerto	2.693.565	0	2.693.565	14.286.043
236	Kab. Nganjuk	3.645.563	0	3.645.563	72.893.910
237	Kab. Ngawi	3.834.410	0	3.834.410	73.108.251
238	Kab. Pacitan	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
239	Kab. Pamekasan	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
240	Kab. Pasuruan	2.500.757	0	2.500.757	13.794.062

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
241	Kab. Ponorogo	11.528.582	0	11.528.582
242	Kab. Probolinggo	11.293.305	0	11.293.305
243	Kab. Sampang	11.372.379	0	11.372.379
244	Kab. Sidoarjo	11.592.478	0	11.592.478
245	Kab. Situbondo	11.293.305	0	11.293.305
246	Kab. Sumenep	11.293.305	0	11.293.305
247	Kab. Trenggalek	11.528.582	0	11.528.582
248	Kab. Tuban	187.426.847	0	187.426.847
249	Kab. Tulungagung	11.293.305	0	11.293.305
250	Kota Blitar	11.293.305	0	11.293.305

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
241	Kab. Ponorogo	2.521.436	0	2.521.436	14.050.018
242	Kab. Probolinggo	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
243	Kab. Sampang	2.473.597	0	2.473.597	13.845.976
244	Kab. Sidoarjo	2.936.469	0	2.936.469	14.528.947
245	Kab. Situbondo	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
246	Kab. Sumenep	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
247	Kab. Trenggalek	2.521.436	0	2.521.436	14.050.018
248	Kab. Tuban	4.372.437	0	4.372.437	191.799.284
249	Kab. Tulungagung	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
250	Kota Blitar	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
251	Kota Kediri	11.293.305	0	11.293.305
252	Kota Madiun	11.293.305	0	11.293.305
253	Kota Malang	11.293.305	0	11.293.305
254	Kota Mojokerto	11.293.305	0	11.293.305
255	Kota Pasuruan	11.293.305	0	11.293.305
256	Kota Probolinggo	11.293.305	0	11.293.305
257	Kota Surabaya	11.592.478	0	11.592.478
258	Kota Batu	11.528.582	0	11.528.582
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
251	Kota Kediri	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
252	Kota Madiun	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
253	Kota Malang	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
254	Kota Mojokerto	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
255	Kota Pasuruan	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
256	Kota Probolinggo	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
257	Kota Surabaya	2.693.565	0	2.693.565	14.286.043
258	Kota Batu	2.521.436	0	2.521.436	14.050.018
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
261	Kab. Landak	0	0	0
262	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0
263	Kab. Ketapang	0	0	0
264	Kab. Mempawah	0	0	0
265	Kab. Sambas	0	0	0
266	Kab. Sanggau	0	0	0
267	Kab. Sintang	0	0	0
268	Kota Pontianak	0	0	0
269	Kota Singkawang	0	0	0
270	Kab. Sekadau	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
261	Kab. Landak	0	0	0	0
262	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	0
263	Kab. Ketapang	0	0	0	0
264	Kab. Mempawah	0	0	0	0
265	Kab. Sambas	0	0	0	0
266	Kab. Sanggau	0	0	0	0
267	Kab. Sintang	0	0	0	0
268	Kota Pontianak	0	0	0	0
269	Kota Singkawang	0	0	0	0
270	Kab. Sekadau	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
271	Kab. Melawi	0	0	0
272	Kab. Kayong Utara	0	0	0
273	Kab. Kubu Raya	0	0	0
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	0	0	0
276	Kab. Barito Utara	27.459	0	27.459
277	Kab. Kapuas	0	0	0
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	0	0
280	Kota Palangkaraya	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
271	Kab. Melawi	0	0	0	0
272	Kab. Kayong Utara	0	0	0	0
273	Kab. Kubu Raya	0	0	0	0
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	0	0	0	0
276	Kab. Barito Utara	0	0	0	27.459
277	Kab. Kapuas	0	0	0	0
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	0
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	0	0	0
280	Kota Palangkaraya	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
281	Kab. Katingan	0	0	0
282	Kab. Seruyan	0	0	0
283	Kab. Sukamara	0	0	0
284	Kab. Lamandau	0	0	0
285	Kab. Gunung Mas	0	0	0
286	Kab. Pulang Pisau	0	0	0
287	Kab. Murung Raya	0	0	0
288	Kab. Barito Timur	0	0	0
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0
290	Kab. Banjar	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
281	Kab. Katingan	0	0	0	0
282	Kab. Seruyan	0	0	0	0
283	Kab. Sukamara	0	0	0	0
284	Kab. Lamandau	0	0	0	0
285	Kab. Gunung Mas	0	0	0	0
286	Kab. Pulang Pisau	0	0	0	0
287	Kab. Murung Raya	0	0	0	0
288	Kab. Barito Timur	0	0	0	0
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0	0
290	Kab. Banjar	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
291	Kab. Barito Kuala	0	0	0
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0	0
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	0	0
295	Kab. Kotabaru	27.459	0	27.459
296	Kab. Tabalong	27.459	0	27.459
297	Kab. Tanah Laut	0	0	0
298	Kab. Tapin	0	0	0
299	Kota Banjarbaru	0	0	0
300	Kota Banjarmasin	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
291	Kab. Barito Kuala	0	0	0	0
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0	0	0
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0	0
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	0	0	0
295	Kab. Kotabaru	0	0	0	27.459
296	Kab. Tabalong	0	0	0	27.459
297	Kab. Tanah Laut	0	0	0	0
298	Kab. Tapin	0	0	0	0
299	Kota Banjarbaru	0	0	0	0
300	Kota Banjarmasin	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
301	Kab. Balangan	27.459	0	27.459
302	Kab. Tanah Bumbu	0	0	0
303	Provinsi Kalimantan Timur	27.165.694	0	27.165.694
304	Kab. Berau	4.837.691	0	4.837.691
305	Kab. Kutai Kartanegara	46.040.181	0	46.040.181
306	Kab. Kutai Barat	7.484.808	0	7.484.808
307	Kab. Kutai Timur	7.401.617	0	7.401.617
308	Kab. Paser	5.306.937	0	5.306.937
309	Kota Balikpapan	16.705.500	0	16.705.500
310	Kota Bontang	7.478.739	0	7.478.739

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
301	Kab. Balangan	0	0	0	27.459
302	Kab. Tanah Bumbu	0	0	0	0
303	Provinsi Kalimantan Timur	21.683.787	0	21.683.787	48.849.481
304	Kab. Berau	4.336.191	0	4.336.191	9.173.882
305	Kab. Kutai Kartanegara	29.188.631	0	29.188.631	75.228.812
306	Kab. Kutai Barat	5.849.520	0	5.849.520	13.334.328
307	Kab. Kutai Timur	5.737.770	0	5.737.770	13.139.387
308	Kab. Paser	4.434.417	0	4.434.417	9.741.354
309	Kota Balikpapan	5.730.142	0	5.730.142	22.435.642
310	Kota Bontang	5.632.967	0	5.632.967	13.111.706

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
311	Kota Samarinda	7.309.842	0	7.309.842
312	Kab. Penajam Paser Utara	8.428.051	0	8.428.051
313	Kab. Mahakam Ulu	7.326.747	0	7.326.747
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	0	0	0
316	Kab. Minahasa	0	0	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0	0	0
318	Kota Bitung	0	0	0
319	Kota Manado	0	0	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
311	Kota Samarinda	6.355.334	0	6.355.334	13.665.176
312	Kab. Penajam Paser Utara	6.722.783	0	6.722.783	15.150.834
313	Kab. Mahakam Ulu	5.733.941	0	5.733.941	13.060.688
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	0	0	0	0
316	Kab. Minahasa	0	0	0	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0	0	0	0
318	Kota Bitung	0	0	0	0
319	Kota Manado	0	0	0	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
321	Kab. Minahasa Selatan	0	0	0
322	Kota Tomohon	0	0	0
323	Kab. Minahasa Utara	0	0	0
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	0	0
325	Kota Kotamobagu	0	0	0
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	5.106.681	0	5.106.681

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
321	Kab. Minahasa Selatan	0	0	0	0
322	Kota Tomohon	0	0	0	0
323	Kab. Minahasa Utara	0	0	0	0
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	0	0	0
325	Kota Kotamobagu	0	0	0	0
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	0	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	0	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0	0	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	25.214.697	0	25.214.697	30.321.378

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
331	Kab. Banggai	16.793.124	0	16.793.124
332	Kab. Banggai Kepulauan	834.747	0	834.747
333	Kab. Buol	834.747	0	834.747
334	Kab. Toli-Toli	834.747	0	834.747
335	Kab. Donggala	834.747	0	834.747
336	Kab. Morowali	834.747	0	834.747
337	Kab. Poso	834.747	0	834.747
338	Kota Palu	834.747	0	834.747
339	Kab. Parigi Moutong	834.747	0	834.747
340	Kab. Tojo Una Una	4.664.757	0	4.664.757

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
331	Kab. Banggai	91.403.277	0	91.403.277	108.196.401
332	Kab. Banggai Kepulauan	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
333	Kab. Buol	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
334	Kab. Toli-Toli	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
335	Kab. Donggala	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
336	Kab. Morowali	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
337	Kab. Poso	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
338	Kota Palu	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
339	Kab. Parigi Moutong	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
340	Kab. Tojo Una Una	22.062.860	0	22.062.860	26.727.617

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
341	Kab. Sigi	834.747	0	834.747
342	Kab. Banggai Laut	834.747	0	834.747
343	Kab. Morowali Utara	4.664.757	0	4.664.757
344	Provinsi Sulawesi Selatan	77	0	77
345	Kab. Bantaeng	8	0	8
346	Kab. Barru	8	0	8
347	Kab. Bone	35	0	35
348	Kab. Bulukumba	8	0	8
349	Kab. Enrekang	8	0	8
350	Kab. Gowa	8	0	8

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
341	Kab. Sigi	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
342	Kab. Banggai Laut	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
343	Kab. Morowali Utara	22.062.860	0	22.062.860	26.727.617
344	Provinsi Sulawesi Selatan	4.496.152	0	4.496.152	4.496.229
345	Kab. Bantaeng	340.063	0	340.063	340.071
346	Kab. Barru	340.063	0	340.063	340.071
347	Kab. Bone	1.984.770	0	1.984.770	1.984.805
348	Kab. Bulukumba	333.123	0	333.123	333.131
349	Kab. Enrekang	340.063	0	340.063	340.071
350	Kab. Gowa	333.123	0	333.123	333.131

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
351	Kab. Jeneponto	8	0	8
352	Kab. Luwu	35	0	35
353	Kab. Luwu Utara	8	0	8
354	Kab. Maros	8	0	8
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	8	0	8
356	Kota Palopo	8	0	8
357	Kab. Luwu Timur	8	0	8
358	Kab. Pinrang	8	0	8
359	Kab. Sinjai	8	0	8
360	Kab. Kepulauan Selayar	8	0	8

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
351	Kab. Jeneponto	333.123	0	333.123	333.131
352	Kab. Luwu	1.943.421	0	1.943.421	1.943.456
353	Kab. Luwu Utara	340.063	0	340.063	340.071
354	Kab. Maros	340.063	0	340.063	340.071
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	340.063	0	340.063	340.071
356	Kota Palopo	333.123	0	333.123	333.131
357	Kab. Luwu Timur	340.063	0	340.063	340.071
358	Kab. Pinrang	333.123	0	333.123	333.131
359	Kab. Sinjai	340.063	0	340.063	340.071
360	Kab. Kepulauan Selayar	333.123	0	333.123	333.131

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
361	Kab. Sidenreng Rappang	35	0	35
362	Kab. Soppeng	35	0	35
363	Kab. Takalar	8	0	8
364	Kab. Tana Toraja	8	0	8
365	Kab. Wajo	245	0	245
366	Kota Pare-pare	8	0	8
367	Kota Makassar	8	0	8
368	Kab. Toraja Utara	8	0	8
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0	0
370	Kab. Buton	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
361	Kab. Sidenreng Rappang	1.984.770	0	1.984.770	1.984.805
362	Kab. Soppeng	1.984.770	0	1.984.770	1.984.805
363	Kab. Takalar	333.123	0	333.123	333.131
364	Kab. Tana Toraja	340.063	0	340.063	340.071
365	Kab. Wajo	14.910.706	0	14.910.706	14.910.951
366	Kota Pare-pare	333.123	0	333.123	333.131
367	Kota Makassar	333.123	0	333.123	333.131
368	Kab. Toraja Utara	340.063	0	340.063	340.071
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
370	Kab. Buton	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
371	Kab. Konawe	0	0	0
372	Kab. Kolaka	0	0	0
373	Kab. Muna	0	0	0
374	Kota Kendari	0	0	0
375	Kota Bau-bau	0	0	0
376	Kab. Konawe Selatan	0	0	0
377	Kab. Bombana	0	0	0
378	Kab. Wakatobi	0	0	0
379	Kab. Kolaka Utara	0	0	0
380	Kab. Konawe Utara	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
371	Kab. Konawe	0	0	0	0
372	Kab. Kolaka	0	0	0	0
373	Kab. Muna	0	0	0	0
374	Kota Kendari	0	0	0	0
375	Kota Bau-bau	0	0	0	0
376	Kab. Konawe Selatan	0	0	0	0
377	Kab. Bombana	0	0	0	0
378	Kab. Wakatobi	0	0	0	0
379	Kab. Kolaka Utara	0	0	0	0
380	Kab. Konawe Utara	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
381	Kab. Buton Utara	0	0	0
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	0
384	Kab. Muna Barat	0	0	0
385	Kab. Buton Tengah	0	0	0
386	Kab. Buton Selatan	0	0	0
387	Provinsi Bali	0	0	0
388	Kab. Badung	0	0	0
389	Kab. Bangli	0	0	0
390	Kab. Buleleng	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
381	Kab. Buton Utara	0	0	0	0
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0	0
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	0	0
384	Kab. Muna Barat	0	0	0	0
385	Kab. Buton Tengah	0	0	0	0
386	Kab. Buton Selatan	0	0	0	0
387	Provinsi Bali	0	0	0	0
388	Kab. Badung	0	0	0	0
389	Kab. Bangli	0	0	0	0
390	Kab. Buleleng	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
391	Kab. Gianyar	0	0	0
392	Kab. Jembrana	0	0	0
393	Kab. Karangasem	0	0	0
394	Kab. Klungkung	0	0	0
395	Kab. Tabanan	0	0	0
396	Kota Denpasar	0	0	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	0	0
398	Kab. Bima	0	0	0
399	Kab. Dompu	0	0	0
400	Kab. Lombok Barat	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
391	Kab. Gianyar	0	0	0	0
392	Kab. Jembrana	0	0	0	0
393	Kab. Karangasem	0	0	0	0
394	Kab. Klungkung	0	0	0	0
395	Kab. Tabanan	0	0	0	0
396	Kota Denpasar	0	0	0	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
398	Kab. Bima	0	0	0	0
399	Kab. Dompu	0	0	0	0
400	Kab. Lombok Barat	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
401	Kab. Lombok Tengah	0	0	0
402	Kab. Lombok Timur	0	0	0
403	Kab. Sumbawa	0	0	0
404	Kota Mataram	0	0	0
405	Kota Bima	0	0	0
406	Kab. Sumbawa Barat	0	0	0
407	Kab. Lombok Utara	0	0	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0
409	Kab. Alor	0	0	0
410	Kab. Belu	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
401	Kab. Lombok Tengah	0	0	0	0
402	Kab. Lombok Timur	0	0	0	0
403	Kab. Sumbawa	0	0	0	0
404	Kota Mataram	0	0	0	0
405	Kota Bima	0	0	0	0
406	Kab. Sumbawa Barat	0	0	0	0
407	Kab. Lombok Utara	0	0	0	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
409	Kab. Alor	0	0	0	0
410	Kab. Belu	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
411	Kab. Ende	0	0	0
412	Kab. Flores Timur	0	0	0
413	Kab. Kupang	0	0	0
414	Kab. Lembata	0	0	0
415	Kab. Manggarai	0	0	0
416	Kab. Ngada	0	0	0
417	Kab. Sikka	0	0	0
418	Kab. Sumba Barat	0	0	0
419	Kab. Sumba Timur	0	0	0
420	Kab. Timor Tengah Selatan	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
411	Kab. Ende	0	0	0	0
412	Kab. Flores Timur	0	0	0	0
413	Kab. Kupang	0	0	0	0
414	Kab. Lembata	0	0	0	0
415	Kab. Manggarai	0	0	0	0
416	Kab. Ngada	0	0	0	0
417	Kab. Sikka	0	0	0	0
418	Kab. Sumba Barat	0	0	0	0
419	Kab. Sumba Timur	0	0	0	0
420	Kab. Timor Tengah Selatan	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
421	Kab. Timor Tengah Utara	0	0	0
422	Kota Kupang	0	0	0
423	Kab. Rote Ndao	0	0	0
424	Kab. Manggarai Barat	0	0	0
425	Kab. Nagekeo	0	0	0
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	0
427	Kab. Sumba Tengah	0	0	0
428	Kab. Manggarai Timur	0	0	0
429	Kab. Sabu Raijua	0	0	0
430	Kab. Malaka	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
421	Kab. Timor Tengah Utara	0	0	0	0
422	Kota Kupang	0	0	0	0
423	Kab. Rote Ndao	0	0	0	0
424	Kab. Manggarai Barat	0	0	0	0
425	Kab. Nagekeo	0	0	0	0
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	0	0
427	Kab. Sumba Tengah	0	0	0	0
428	Kab. Manggarai Timur	0	0	0	0
429	Kab. Sabu Raijua	0	0	0	0
430	Kab. Malaka	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
431	Provinsi Maluku	359.566	0	359.566
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	70.280	0	70.280
433	Kab. Maluku Tengah	609.628	0	609.628
434	Kab. Maluku Tenggara	70.280	0	70.280
435	Kab. Buru	70.280	0	70.280
436	Kota Ambon	70.280	0	70.280
437	Kab. Seram Bagian Barat	70.280	0	70.280
438	Kab. Seram Bagian Timur	1.184.932	0	1.184.932
439	Kab. Kepulauan Aru	68.846	0	68.846
440	Kota Tual	70.280	0	70.280

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
431	Provinsi Maluku	0	0	0	359.566
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	0	0	70.280
433	Kab. Maluku Tengah	0	0	0	609.628
434	Kab. Maluku Tenggara	0	0	0	70.280
435	Kab. Buru	0	0	0	70.280
436	Kota Ambon	0	0	0	70.280
437	Kab. Seram Bagian Barat	0	0	0	70.280
438	Kab. Seram Bagian Timur	0	0	0	1.184.932
439	Kab. Kepulauan Aru	0	0	0	68.846
440	Kota Tual	0	0	0	70.280

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
441	Kab. Maluku Barat Daya	70.280	0	70.280
442	Kab. Buru Selatan	70.280	0	70.280
443	Provinsi Papua	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	0	0	0
445	Kab. Jayapura	0	0	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0
447	Kota Jayapura	0	0	0
448	Kab. Sarmi	0	0	0
449	Kab. Keerom	0	0	0
450	Kab. Waropen	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	0	70.280
442	Kab. Buru Selatan	0	0	0	70.280
443	Provinsi Papua	0	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	0	0	0	0
445	Kab. Jayapura	0	0	0	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0	0
447	Kota Jayapura	0	0	0	0
448	Kab. Sarmi	0	0	0	0
449	Kab. Keerom	0	0	0	0
450	Kab. Waropen	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
451	Kab. Supiori	0	0	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0
453	Provinsi Maluku Utara	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	0	0
455	Kota Ternate	0	0	0
456	Kab. Halmahera Barat	0	0	0
457	Kab. Halmahera Timur	0	0	0
458	Kab. Halmahera Selatan	0	0	0
459	Kab. Halmahera Utara	0	0	0
460	Kab. Kepulauan Sula	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
451	Kab. Supiori	0	0	0	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	0
453	Provinsi Maluku Utara	0	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	0	0	0
455	Kota Ternate	0	0	0	0
456	Kab. Halmahera Barat	0	0	0	0
457	Kab. Halmahera Timur	0	0	0	0
458	Kab. Halmahera Selatan	0	0	0	0
459	Kab. Halmahera Utara	0	0	0	0
460	Kab. Kepulauan Sula	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
461	Kota Tidore Kepulauan	0	0	0
462	Kab. Pulau Morotai	0	0	0
463	Kab. Pulau Taliabu	0	0	0
464	Provinsi Banten	0	0	0
465	Kab. Lebak	0	0	0
466	Kab. Pandeglang	0	0	0
467	Kab. Serang	0	0	0
468	Kab. Tangerang	0	0	0
469	Kota Cilegon	0	0	0
470	Kota Tangerang	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
461	Kota Tidore Kepulauan	0	0	0	0
462	Kab. Pulau Morotai	0	0	0	0
463	Kab. Pulau Taliabu	0	0	0	0
464	Provinsi Banten	0	0	0	0
465	Kab. Lebak	0	0	0	0
466	Kab. Pandeglang	0	0	0	0
467	Kab. Serang	0	0	0	0
468	Kab. Tangerang	0	0	0	0
469	Kota Cilegon	0	0	0	0
470	Kota Tangerang	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
471	Kota Serang	0	0	0
472	Kota Tangerang Selatan	0	0	0
473	Provinsi Bangka Belitung	622.067	0	622.067
474	Kab. Bangka	182.813	0	182.813
475	Kab. Belitung	182.813	0	182.813
476	Kota Pangkal Pinang	182.813	0	182.813
477	Kab. Bangka Selatan	182.813	0	182.813
478	Kab. Bangka Tengah	182.813	0	182.813
479	Kab. Bangka Barat	186.621	0	186.621
480	Kab. Belitung Timur	182.813	0	182.813

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
471	Kota Serang	0	0	0	0
472	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0
473	Provinsi Bangka Belitung	0	0	0	622.067
474	Kab. Bangka	0	0	0	182.813
475	Kab. Belitung	0	0	0	182.813
476	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	182.813
477	Kab. Bangka Selatan	0	0	0	182.813
478	Kab. Bangka Tengah	0	0	0	182.813
479	Kab. Bangka Barat	0	0	0	186.621
480	Kab. Belitung Timur	0	0	0	182.813

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
481	Provinsi Gorontalo	0	0	0
482	Kab. Boalemo	0	0	0
483	Kab. Gorontalo	0	0	0
484	Kota Gorontalo	0	0	0
485	Kab. Pohuwato	0	0	0
486	Kab. Bone Bolango	0	0	0
487	Kab. Gorontalo Utara	0	0	0
488	Provinsi Kepulauan Riau	4.072.910	0	4.072.910
489	Kab. Natuna	11.067.097	0	11.067.097
490	Kab. Kepulauan Anambas	6.556.195	0	6.556.195

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
481	Provinsi Gorontalo	0	0	0	0
482	Kab. Boalemo	0	0	0	0
483	Kab. Gorontalo	0	0	0	0
484	Kota Gorontalo	0	0	0	0
485	Kab. Pohuwato	0	0	0	0
486	Kab. Bone Bolango	0	0	0	0
487	Kab. Gorontalo Utara	0	0	0	0
488	Provinsi Kepulauan Riau	18.745.064	0	18.745.064	22.817.974
489	Kab. Natuna	36.702.343	0	36.702.343	47.769.440
490	Kab. Kepulauan Anambas	22.262.164	0	22.262.164	28.818.359

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
491	Kab. Karimun	1.293.475	0	1.293.475
492	Kota Batam	1.267.078	0	1.267.078
493	Kota Tanjung Pinang	1.267.078	0	1.267.078
494	Kab. Lingga	1.293.475	0	1.293.475
495	Kab. Bintan	1.267.078	0	1.267.078
496	Provinsi Papua Barat	5.339.497	251.632.217	256.971.714
497	Kab. Fak Fak	2.603.006	0	2.603.006
498	Kab. Manokwari	1.601.850	0	1.601.850
499	Kab. Teluk Bintuni	18.421.262	0	18.421.262
500	Kab. Teluk Wondama	2.603.006	0	2.603.006

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
491	Kab. Karimun	5.415.289	0	5.415.289	6.708.764
492	Kota Batam	5.304.773	0	5.304.773	6.571.851
493	Kota Tanjung Pinang	5.304.773	0	5.304.773	6.571.851
494	Kab. Lingga	5.415.289	0	5.415.289	6.708.764
495	Kab. Bintan	5.304.773	0	5.304.773	6.571.851
496	Provinsi Papua Barat	134.483.654	2.296.709.508	2.431.193.162	2.688.164.876
497	Kab. Fak Fak	62.198.690	0	62.198.690	64.801.696
498	Kab. Manokwari	36.983.006	0	36.983.006	38.584.856
499	Kab. Teluk Bintuni	467.330.693	0	467.330.693	485.751.955
500	Kab. Teluk Wondama	62.198.690	0	62.198.690	64.801.696

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
501	Kab. Kaimana	2.603.006	0	2.603.006
502	Kab. Manokwari Selatan	2.603.006	0	2.603.006
503	Kab. Pegunungan Arfak	2.603.006	0	2.603.006
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0
505	Kab. Majene	0	0	0
506	Kab. Mamuju	0	0	0
507	Kab. Polewali Mandar	0	0	0
508	Kab. Mamasa	0	0	0
509	Kab. Pasangkayu	0	0	0
510	Kab. Mamuju Tengah	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
501	Kab. Kaimana	62.198.690	0	62.198.690	64.801.696
502	Kab. Manokwari Selatan	62.198.690	0	62.198.690	64.801.696
503	Kab. Pegunungan Arfak	62.198.690	0	62.198.690	64.801.696
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0	0
505	Kab. Majene	0	0	0	0
506	Kab. Mamuju	0	0	0	0
507	Kab. Polewali Mandar	0	0	0	0
508	Kab. Mamasa	0	0	0	0
509	Kab. Pasangkayu	0	0	0	0
510	Kab. Mamuju Tengah	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
511	Provinsi Kalimantan Utara	506.479	0	506.479
512	Kab. Bulungan	240.578	0	240.578
513	Kab. Malinau	2.729.635	0	2.729.635
514	Kab. Nunukan	240.578	0	240.578
515	Kota Tarakan	2.406.291	0	2.406.291
516	Kab. Tana Tidung	240.578	0	240.578
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	0	0
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0
520	Kab. Mappi	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
511	Provinsi Kalimantan Utara	158.293	0	158.293	664.772
512	Kab. Bulungan	163.546	0	163.546	404.124
513	Kab. Malinau	1.497.173	0	1.497.173	4.226.808
514	Kab. Nunukan	80.580	0	80.580	321.158
515	Kota Tarakan	571.245	0	571.245	2.977.536
516	Kab. Tana Tidung	121.996	0	121.996	362.574
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	0	0	0
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0	0
520	Kab. Mappi	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
521	Kab. Asmat	0	0	0
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0
523	Kab. Mimika	0	0	0
524	Kab. Nabire	0	0	0
525	Kab. Paniai	0	0	0
526	Kab. Puncak Jaya	0	0	0
527	Kab. Dogiyai	0	0	0
528	Kab. Puncak	0	0	0
529	Kab. Intan Jaya	0	0	0
530	Kab. Deiyai	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
521	Kab. Asmat	0	0	0	0
522	Provinsi Papua Tengah .	0	0	0	0
523	Kab. Mimika	0	0	0	0
524	Kab. Nabire	0	0	0	0
525	Kab. Paniai	0	0	0	0
526	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	0
527	Kab. Dogiyai	0	0	0	0
528	Kab. Puncak	0	0	0	0
529	Kab. Intan Jaya	0	0	0	0
530	Kab. Deiyai	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	0	0	0
533	Kab. Yahukimo	0	0	0
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	0
535	Kab. Tolikara	0	0	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0
537	Kab. Yalimo	0	0	0
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	0
539	Kab. Nduga	0	0	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	2.273.926	107.162.306	109.436.232

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	0	0	0	0
533	Kab. Yahukimo	0	0	0	0
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	0	0
535	Kab. Tolikara	0	0	0	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	0
537	Kab. Yalimo	0	0	0	0
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	0	0
539	Kab. Nduga	0	0	0	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	514.203	8.781.529	9.295.732	118.731.964

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
541	Kab. Sorong	8.527.219	0	8.527.219
542	Kab. Sorong Selatan	2.365.511	0	2.365.511
543	Kab. Raja Ampat	1.364.356	0	1.364.356
544	Kab. Tambrauw	2.365.511	0	2.365.511
545	Kab. Maybrat	2.365.511	0	2.365.511
546	Kota Sorong	1.364.356	0	1.364.356
547	Selisih Lebih	122.065.744	0	122.065.744
JUMLAH NASIONAL		4.117.091.305	377.610.377	4.494.701.682

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
541	Kab. Sorong	1.756.857	0	1.756.857	10.284.076
542	Kab. Sorong Selatan	25.545.632	0	25.545.632	27.911.143
543	Kab. Raja Ampat	329.947	0	329.947	1.694.303
544	Kab. Tambrauw	25.545.632	0	25.545.632	27.911.143
545	Kab. Maybrat	25.545.632	0	25.545.632	27.911.143
546	Kota Sorong	329.947	0	329.947	1.694.303
547	Selisih Lebih	66.769.808	0	66.769.808	188.835.552
JUMLAH NASIONAL		2.643.063.300	2.326.358.614	4.969.421.914	9.464.123.596

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	Provinsi Aceh	644.657	24.791.339	25.435.996
2	Kab. Aceh Barat	373.211	38.751.469	39.124.680
3	Kab. Aceh Besar	24.245	1.384.103	1.408.348
4	Kab. Aceh Selatan	15.387	1.862.389	1.877.776
5	Kab. Aceh Singkil	17	1.400.374	1.400.391
6	Kab. Aceh Tengah	258.002	5.813.362	6.071.364
7	Kab. Aceh Tenggara	17	1.400.374	1.400.391
8	Kab. Aceh Timur	38	1.384.103	1.384.141
9	Kab. Aceh Utara	25	1.355.856	1.355.881
10	Kab. Bireuen	117	1.384.103	1.384.220

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
11	Kab. Pidie	19.280	4.856.811	4.876.091
12	Kab. Simeulue	0	1.384.103	1.384.103
13	Kota Banda Aceh	0	1.355.856	1.355.856
14	Kota Sabang	0	1.384.103	1.384.103
15	Kota Langsa	23	1.355.856	1.355.879
16	Kota Lhokseumawe	0	1.355.856	1.355.856
17	Kab. Gayo Lues	161.844	2.621.961	2.783.805
18	Kab. Aceh Barat Daya	17.335	4.441.074	4.458.409
19	Kab. Aceh Jaya	106.867	4.856.811	4.963.678
20	Kab. Nagan Raya	89.971	15.151.149	15.241.120

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
21	Kab. Aceh Tamiang	5.763	1.384.103	1.389.866
22	Kab. Bener Meriah	71	1.327.609	1.327.680
23	Kab. Pidie Jaya	91	1.384.103	1.384.194
24	Kota Subulussalam	2.138	1.400.374	1.402.512
25	Provinsi Sumatera Utara	1.635.687	56.601.127	58.236.814
26	Kab. Asahan	0	2.139.607	2.139.607
27	Kab. Dairi	186.403	2.184.182	2.370.585
28	Kab. Deli Serdang	75	2.139.607	2.139.682
29	Kab. Karo	50	2.184.182	2.184.232
30	Kab. Labuhanbatu	0	2.139.607	2.139.607

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
31	Kab. Langkat	604	2.184.182	2.184.786
32	Kab. Mandailing Natal	1.529.037	8.492.996	10.022.033
33	Kab. Nias	0	2.184.182	2.184.182
34	Kab. Simalungun	119	2.139.607	2.139.726
35	Kab. Tapanuli Selatan	723.331	114.059.845	114.783.176
36	Kab. Tapanuli Tengah	169.631	8.248.589	8.418.220
37	Kab. Tapanuli Utara	90.413	8.248.589	8.339.002
38	Kab. Toba	0	2.184.182	2.184.182
39	Kota Binjai	0	2.139.607	2.139.607
40	Kota Medan	0	2.139.607	2.139.607

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
41	Kota Pematang Siantar	0	2.139.607	2.139.607
42	Kota Sibolga	0	2.095.032	2.095.032
43	Kota Tanjung Balai	0	2.139.607	2.139.607
44	Kota Tebing Tinggi	0	2.139.607	2.139.607
45	Kota Padang Sidempuan	0	8.080.250	8.080.250
46	Kab. Pakpak Bharat	25.643	2.184.182	2.209.825
47	Kab. Nias Selatan	0	2.184.182	2.184.182
48	Kab. Humbang Hasundutan	0	2.184.182	2.184.182
49	Kab. Serdang Bedagai	0	2.139.607	2.139.607
50	Kab. Samosir	0	2.184.182	2.184.182

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
51	Kab. Batu Bara	55	2.139.607	2.139.662
52	Kab. Padang Lawas	0	8.080.250	8.080.250
53	Kab. Padang Lawas Utara	568	8.248.589	8.249.157
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	17	2.184.182	2.184.199
55	Kab. Labuhanbatu Utara	203	8.080.250	8.080.453
56	Kab. Nias Utara	0	2.139.607	2.139.607
57	Kab. Nias Barat	0	2.139.607	2.139.607
58	Kota Gunungsitoli	0	2.139.607	2.139.607
59	Provinsi Sumatera Barat	259.041	7.475.212	7.734.253
60	Kab. Lima Puluh Kota	5.137	544.096	549.233

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
61	Kab. Agam	51	559.307	559.358
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	481.359	481.359
63	Kab. Padang Pariaman	2.436	471.536	473.972
64	Kab. Pasaman	931	559.307	560.238
65	Kab. Pesisir Selatan	4.151	481.359	485.510
66	Kab. Sijunjung	2.746	2.820.822	2.823.568
67	Kab. Solok	357.188	2.267.638	2.624.826
68	Kab. Tanah Datar	0	2.224.722	2.224.722
69	Kota Bukit Tinggi	0	471.536	471.536
70	Kota Padang Panjang	0	471.536	471.536

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
71	Kota Padang	17.255	481.359	498.614
72	Kota Payakumbuh	0	474.898	474.898
73	Kota Sawahlunto	31.726	14.178.491	14.210.217
74	Kota Solok	0	471.536	471.536
75	Kota Pariaman	0	471.536	471.536
76	Kab. Pasaman Barat	1.605	1.043.326	1.044.931
77	Kab. Dharmasraya	6.843	4.185.509	4.192.352
78	Kab. Solok Selatan	730	481.359	482.089
79	Provinsi Riau	198.408	7.350.257	7.548.665
80	Kab. Bengkalis	0	715.935	715.935

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
81	Kab. Indragiri Hilir	40.681	7.751.497	7.792.178
82	Kab. Indragiri Hulu	218.089	5.587.721	5.805.810
83	Kab. Kampar	0	1.256.814	1.256.814
84	Kab. Kuantan Singingi	18.542	7.963.797	7.982.339
85	Kab. Pelalawan	0	1.919.612	1.919.612
86	Kab. Rokan Hilir	0	715.935	715.935
87	Kab. Rokan Hulu	1.899	885.722	887.621
88	Kab. Siak	329	715.935	716.264
89	Kota Dumai	0	715.935	715.935
90	Kota Pekanbaru	0	715.935	715.935

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	730.851	730.851
92	Provinsi Jambi	781.025	31.119.236	31.900.261
93	Kab. Batang Hari	277.551	22.670.000	22.947.551
94	Kab. Bungo	29.962	23.200.530	23.230.492
95	Kab. Kerinci	0	5.106.686	5.106.686
96	Kab. Merangin	119.846	18.076.663	18.196.509
97	Kab. Muaro Jambi	59.445	13.501.305	13.560.750
98	Kab. Sarolangun	571.826	36.652.375	37.224.201
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.226	6.065.010	6.068.236
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	9.975.912	9.975.912

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
101	Kab. Tebo	225.639	17.987.492	18.213.131
102	Kota Jambi	0	3.164.916	3.164.916
103	Kota Sungai Penuh	0	3.198.367	3.198.367
104	Provinsi Sumatera Selatan	2.874.337	312.082.559	314.956.896
105	Kab. Lahat	219.282	228.095.415	228.314.697
106	Kab. Musi Banyuasin	2.173.792	74.241.873	76.415.665
107	Kab. Musi Rawas	65.943	50.501.775	50.567.718
108	Kab. Muara Enim	868.396	324.753.055	325.621.451
109	Kab. Ogan Komering Ilir	95.612	20.866.392	20.962.004
110	Kab. Ogan Komering Ulu	224.336	32.592.298	32.816.634

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
111	Kota Palembang	0	31.023.115	31.023.115
112	Kota Prabumulih	379	30.791.957	30.792.336
113	Kota Pagar Alam	0	43.917.091	43.917.091
114	Kota Lubuk Linggau	0	20.630.459	20.630.459
115	Kab. Banyuasin	307.713	47.515.586	47.823.299
116	Kab. Ogan Ilir	0	31.288.978	31.288.978
117	Kab. OKU Timur	65.548	20.423.139	20.488.687
118	Kab. OKU Selatan	11.185	30.579.861	30.591.046
119	Kab. Empat Lawang	2.107	32.864.102	32.866.209
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	354.645	34.585.894	34.940.539

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
121	Kab. Musi Rawas Utara	318.964	72.125.908	72.444.872
122	Provinsi Bengkulu	277.706	9.856.409	10.134.115
123	Kab. Bengkulu Selatan	524	19.709.741	19.710.265
124	Kab. Bengkulu Utara	226.570	19.363.040	19.589.610
125	Kab. Rejang Lebong	177	2.678.922	2.679.099
126	Kota Bengkulu	0	1.204.577	1.204.577
127	Kab. Kaur	115	17.570.369	17.570.484
128	Kab. Seluma	210.470	19.327.140	19.537.610
129	Kab. Mukomuko	126	2.563.628	2.563.754
130	Kab. Lebong	5.374	12.571.120	12.576.494

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
131	Kab. Kepahiang	0	1.204.577	1.204.577
132	Kab. Bengkulu Tengah	10.310	2.929.261	2.939.571
133	Provinsi Lampung	90.756	0	90.756
134	Kab. Lampung Barat	48.453	0	48.453
135	Kab. Lampung Selatan	3.148	0	3.148
136	Kab. Lampung Tengah	1.477	0	1.477
137	Kab. Lampung Utara	660	0	660
138	Kab. Lampung Timur	3.357	0	3.357
139	Kab. Tanggamus	55.829	0	55.829
140	Kab. Tulang Bawang	4.168	0	4.168

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
141	Kab. Way Kanan	31.752	0	31.752
142	Kota Bandar Lampung	260	0	260
143	Kota Metro	0	0	0
144	Kab. Pesawaran	422	0	422
145	Kab. Pringsewu	323	0	323
146	Kab. Mesuji	564	0	564
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	0	0
148	Kab. Pesisir Barat	632	0	632
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	0
150	Provinsi Jawa Barat	125.588	7.078.489	7.204.077

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
151	Kab. Bandung	837	322.163	323.000
152	Kab. Bekasi	1.387	787.927	789.314
153	Kab. Bogor	101.994	14.271.917	14.373.911
154	Kab. Ciamis	0	328.875	328.875
155	Kab. Cianjur	16.047	804.970	821.017
156	Kab. Cirebon	6.582	322.163	328.745
157	Kab. Garut	39.387	322.163	361.550
158	Kab. Indramayu	326	322.163	322.489
159	Kab. Karawang	481	804.881	805.362
160	Kab. Kuningan	562	328.875	329.437

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
161	Kab. Majalengka	168	322.163	322.331
162	Kab. Purwakarta	3.337	804.691	808.028
163	Kab. Subang	965	322.183	323.148
164	Kab. Sukabumi	34.055	807.815	841.870
165	Kab. Sumedang	478	322.163	322.641
166	Kab. Tasikmalaya	195	315.451	315.646
167	Kota Bandung	0	322.163	322.163
168	Kota Bekasi	0	804.671	804.671
169	Kota Bogor	0	804.671	804.671
170	Kota Cirebon	0	322.163	322.163

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
171	Kota Depok	0	804.671	804.671
172	Kota Sukabumi	0	322.462	322.462
173	Kota Tasikmalaya	32	322.163	322.195
174	Kota Cimahi	0	315.451	315.451
175	Kota Banjar	0	322.163	322.163
176	Kab. Bandung Barat	2.430	322.163	324.593
177	Kab. Pangandaran	45	322.163	322.208
178	Provinsi Jawa Tengah	35.490	0	35.490
179	Kab. Banjarnegara	1.625	0	1.625
180	Kab. Banyumas	16.621	0	16.621

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
181	Kab. Batang	201	0	201
182	Kab. Blora	22	0	22
183	Kab. Boyolali	280	0	280
184	Kab. Brebes	167	0	167
185	Kab. Cilacap	9.407	0	9.407
186	Kab. Demak	0	0	0
187	Kab. Grobogan	5.367	0	5.367
188	Kab. Jepara	1.034	0	1.034
189	Kab. Karanganyar	0	0	0
190	Kab. Kebumen	348	0	348

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
191	Kab. Kendal	779	0	779
192	Kab. Klaten	134	0	134
193	Kab. Kudus	261	0	261
194	Kab. Magelang	895	0	895
195	Kab. Pati	376	0	376
196	Kab. Pekalongan	0	0	0
197	Kab. Pemalang	1.061	0	1.061
198	Kab. Purbalingga	600	0	600
199	Kab. Purworejo	10	0	10
200	Kab. Rembang	4.902	0	4.902

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
201	Kab. Semarang	131	0	131
202	Kab. Sragen	501	0	501
203	Kab. Sukoharjo	0	0	0
204	Kab. Tegal	1.074	0	1.074
205	Kab. Temanggung	0	0	0
206	Kab. Wonogiri	13.380	0	13.380
207	Kab. Wonosobo	0	0	0
208	Kota Magelang	0	0	0
209	Kota Pekalongan	0	0	0
210	Kota Salatiga	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
211	Kota Semarang	0	0	0
212	Kota Surakarta	0	0	0
213	Kota Tegal	0	0	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	4.864	0	4.864
215	Kab. Bantul	362	0	362
216	Kab. Gunung Kidul	147	0	147
217	Kab. Kulon Progo	7.594	0	7.594
218	Kab. Sleman	9	0	9
219	Kota Yogyakarta	0	0	0
220	Provinsi Jawa Timur	471.352	29.881.469	30.352.821

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
221	Kab. Bangkalan	106	978.498	978.604
222	Kab. Banyuwangi	71.793	60.155.921	60.227.714
223	Kab. Blitar	903	978.498	979.401
224	Kab. Bojonegoro	608	998.884	999.492
225	Kab. Bondowoso	0	8.296.385	8.296.385
226	Kab. Gresik	3.881	978.688	982.569
227	Kab. Jember	585	8.296.385	8.296.970
228	Kab. Jombang	0	978.498	978.498
229	Kab. Kediri	913	998.884	999.797
230	Kab. Lamongan	1.376	978.517	979.893

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
231	Kab. Lumajang	1.674	978.498	980.172
232	Kab. Madiun	0	998.884	998.884
233	Kab. Magetan	694	978.498	979.192
234	Kab. Malang	1.153	998.884	1.000.037
235	Kab. Mojokerto	4.093	978.517	982.610
236	Kab. Nganjuk	0	978.498	978.498
237	Kab. Ngawi	409	978.498	978.907
238	Kab. Pacitan	13.855	978.498	992.353
239	Kab. Pamekasan	0	978.498	978.498
240	Kab. Pasuruan	5.502	978.498	984.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
241	Kab. Ponorogo	133	998.884	999.017
242	Kab. Probolinggo	778	978.498	979.276
243	Kab. Sampang	239	978.498	978.737
244	Kab. Sidoarjo	0	978.517	978.517
245	Kab. Situbondo	2.744	8.296.385	8.299.129
246	Kab. Sumenep	0	978.498	978.498
247	Kab. Trenggalek	656.594	998.884	1.655.478
248	Kab. Tuban	16.314	978.498	994.812
249	Kab. Tulungagung	18	978.498	978.516
250	Kota Blitar	0	978.498	978.498

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
251	Kota Kediri	0	978.498	978.498
252	Kota Madiun	0	978.498	978.498
253	Kota Malang	0	978.498	978.498
254	Kota Mojokerto	137	978.498	978.635
255	Kota Pasuruan	0	978.498	978.498
256	Kota Probolinggo	0	978.498	978.498
257	Kota Surabaya	0	978.517	978.517
258	Kota Batu	0	998.884	998.884
259	Provinsi Kalimantan Barat	4.681.306	22.972.698	27.654.004
260	Kab. Bengkayang	27.993	3.358.443	3.386.436

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
261	Kab. Landak	883.045	5.054.911	5.937.956
262	Kab. Kapuas Hulu	18.442	22.710.252	22.728.694
263	Kab. Ketapang	4.670.222	25.876.360	30.546.582
264	Kab. Mempawah	125.361	2.171.791	2.297.152
265	Kab. Sambas	11.563	2.001.547	2.013.110
266	Kab. Sanggau	1.843.121	21.696.180	23.539.301
267	Kab. Sintang	38.516	25.412.377	25.450.893
268	Kota Pontianak	0	2.001.547	2.001.547
269	Kota Singkawang	15.306	2.001.547	2.016.853
270	Kab. Sekadau	1.903	4.273.838	4.275.741

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
271	Kab. Melawi	1.381	11.850.630	11.852.011
272	Kab. Kayong Utara	23.911	4.187.568	4.211.479
273	Kab. Kubu Raya	1.935	4.736.699	4.738.634
274	Provinsi Kalimantan Tengah	6.343.273	400.029.799	406.373.072
275	Kab. Barito Selatan	612.344	118.566.950	119.179.294
276	Kab. Barito Utara	2.271.293	488.440.843	490.712.136
277	Kab. Kapuas	966.855	245.882.078	246.848.933
278	Kab. Kotawaringin Barat	197.038	31.774.943	31.971.981
279	Kab. Kotawaringin Timur	502.891	50.351.271	50.854.162
280	Kota Palangkaraya	21.235	32.421.856	32.443.091

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
281	Kab. Katingan	378.503	36.028.413	36.406.916
282	Kab. Seruyan	411.413	35.566.271	35.977.684
283	Kab. Sukamara	96.250	32.915.360	33.011.610
284	Kab. Lamandau	1.758	33.601.096	33.602.854
285	Kab. Gunung Mas	821.782	60.110.253	60.932.035
286	Kab. Pulang Pisau	20.934	42.976.741	42.997.675
287	Kab. Murung Raya	3.548.973	248.524.436	252.073.409
288	Kab. Barito Timur	690.827	83.146.139	83.836.966
289	Provinsi Kalimantan Selatan	2.493.512	665.773.779	668.267.291
290	Kab. Banjar	323.815	171.888.353	172.212.168

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
291	Kab. Barito Kuala	0	92.498.697	92.498.697
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	95.594	100.166.356	100.261.950
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	27.236	99.546.815	99.574.051
294	Kab. Hulu Sungai Utara	7.221	119.921.800	119.929.021
295	Kab. Kotabaru	1.353.037	342.081.655	343.434.692
296	Kab. Tabalong	440.206	318.280.054	318.720.260
297	Kab. Tanah Laut	410.226	196.505.806	196.916.032
298	Kab. Tapin	236.017	164.013.686	164.249.703
299	Kota Banjarbaru	25.823	72.087.977	72.113.800
300	Kota Banjarmasin	0	61.190.905	61.190.905

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
301	Kab. Balangan	227.577	477.354.754	477.582.331
302	Kab. Tanah Bumbu	992.970	485.765.926	486.758.896
303	Provinsi Kalimantan Timur	6.696.818	1.187.338.195	1.194.035.013
304	Kab. Berau	1.129.530	571.291.944	572.421.474
305	Kab. Kutai Kartanegara	3.345.964	983.574.288	986.920.252
306	Kab. Kutai Barat	1.350.262	412.806.947	414.157.209
307	Kab. Kutai Timur	3.748.477	1.030.150.553	1.033.899.030
308	Kab. Paser	502.980	405.599.530	406.102.510
309	Kota Balikpapan	0	168.461.277	168.461.277
310	Kota Bontang	0	245.575.915	245.575.915

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
311	Kota Samarinda	287.924	196.771.850	197.059.774
312	Kab. Penajam Paser Utara	76.274	198.749.001	198.825.275
313	Kab. Mahakam Ulu	713.960	235.244.740	235.958.700
314	Provinsi Sulawesi Utara	1.497.686	46.782.251	48.279.937
315	Kab. Bolaang Mongondow	185.884	43.268.418	43.454.302
316	Kab. Minahasa	208	9.105.599	9.105.807
317	Kab. Kepulauan Sangihe	1.584.416	3.887.156	5.471.572
318	Kota Bitung	33.322	15.740.293	15.773.615
319	Kota Manado	0	8.932.540	8.932.540
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	3.968.138	3.968.138

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
321	Kab. Minahasa Selatan	6.988	6.997.593	7.004.581
322	Kota Tomohon	0	3.887.156	3.887.156
323	Kab. Minahasa Utara	305.663	45.668.471	45.974.134
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	3.968.138	3.968.138
325	Kota Kotamobagu	3.243	6.824.534	6.827.777
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	26.539	7.356.930	7.383.469
327	Kab. Minahasa Tenggara	11.704	5.234.543	5.246.247
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	185.843	7.533.594	7.719.437
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	112.504	11.017.549	11.130.053
330	Provinsi Sulawesi Tengah	2.345.350	141.425.392	143.770.742

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
331	Kab. Banggai	645.490	57.031.739	57.677.229
332	Kab. Banggai Kepulauan	884	13.258.632	13.259.516
333	Kab. Buol	72.539	13.258.632	13.331.171
334	Kab. Toli-Toli	75.924	13.258.632	13.334.556
335	Kab. Donggala	177.586	19.207.481	19.385.067
336	Kab. Morowali	1.824.815	161.130.349	162.955.164
337	Kab. Poso	19.867	22.620.743	22.640.610
338	Kota Palu	111.771	59.362.214	59.473.985
339	Kab. Parigi Moutong	183.457	19.207.481	19.390.938
340	Kab. Tojo Una Una	2.423	27.251.821	27.254.244

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
341	Kab. Sigi	73.365	19.207.481	19.280.846
342	Kab. Banggai Laut	0	13.258.632	13.258.632
343	Kab. Morowali Utara	720.808	121.274.057	121.994.865
344	Provinsi Sulawesi Selatan	1.284.004	20.128.816	21.412.820
345	Kab. Bantaeng	0	656.376	656.376
346	Kab. Barru	6.980	656.376	663.356
347	Kab. Bone	158.695	642.980	801.675
348	Kab. Bulukumba	1.833	642.980	644.813
349	Kab. Enrekang	478	656.376	656.854
350	Kab. Gowa	285	642.980	643.265

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
351	Kab. Jeneponto	189	642.980	643.169
352	Kab. Luwu	121.113	629.585	750.698
353	Kab. Luwu Utara	368.277	3.172.478	3.540.755
354	Kab. Maros	3.587	656.376	659.963
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	12.284	656.376	668.660
356	Kota Palopo	229	642.980	643.209
357	Kab. Luwu Timur	1.423.243	77.169.928	78.593.171
358	Kab. Pinrang	1.915	642.980	644.895
359	Kab. Sinjai	16	656.376	656.392
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	642.980	642.980

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
361	Kab. Sidenreng Rappang	638	642.980	643.618
362	Kab. Soppeng	600	642.980	643.580
363	Kab. Takalar	0	642.980	642.980
364	Kab. Tana Toraja	27.756	656.376	684.132
365	Kab. Wajo	114	642.980	643.094
366	Kota Pare-pare	0	642.980	642.980
367	Kota Makassar	55	642.980	643.035
368	Kab. Toraja Utara	3.155	656.376	659.531
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.222.740	205.723.148	207.945.888
370	Kab. Buton	150.916	9.786.656	9.937.572

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
371	Kab. Konawe	601.511	106.038.623	106.640.134
372	Kab. Kolaka	365.289	170.731.781	171.097.070
373	Kab. Muna	1.342	10.346.874	10.348.216
374	Kota Kendari	0	16.198.829	16.198.829
375	Kota Bau-bau	848	9.657.038	9.657.886
376	Kab. Konawe Selatan	95.290	62.756.489	62.851.779
377	Kab. Bombana	398.873	65.460.417	65.859.290
378	Kab. Wakatobi	0	9.249.671	9.249.671
379	Kab. Kolaka Utara	996.439	58.152.873	59.149.312
380	Kab. Konawe Utara	910.944	202.591.918	203.502.862

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
381	Kab. Buton Utara	0	9.657.038	9.657.038
382	Kab. Konawe Kepulauan	51.468	15.412.044	15.463.512
383	Kab. Kolaka Timur	55.843	30.469.817	30.525.660
384	Kab. Muna Barat	0	9.643.274	9.643.274
385	Kab. Buton Tengah	44.946	18.200.200	18.245.146
386	Kab. Buton Selatan	29.904	9.657.038	9.686.942
387	Provinsi Bali	153	0	153
388	Kab. Badung	0	0	0
389	Kab. Bangli	0	0	0
390	Kab. Buleleng	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
391	Kab. Gianyar	0	0	0
392	Kab. Jembrana	0	0	0
393	Kab. Karangasem	255	0	255
394	Kab. Klungkung	0	0	0
395	Kab. Tabanan	0	0	0
396	Kota Denpasar	0	0	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	525.978	53.383.882	53.909.860
398	Kab. Bima	0	6.972.662	6.972.662
399	Kab. Dompu	22.989	7.939.431	7.962.420
400	Kab. Lombok Barat	54	6.972.589	6.972.643

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
401	Kab. Lombok Tengah	40	6.972.589	6.972.629
402	Kab. Lombok Timur	507	6.972.589	6.973.096
403	Kab. Sumbawa	415.457	50.225.131	50.640.588
404	Kota Mataram	89	6.972.589	6.972.678
405	Kota Bima	18.035	6.972.589	6.990.624
406	Kab. Sumbawa Barat	418.464	105.380.531	105.798.995
407	Kab. Lombok Utara	132	6.972.589	6.972.721
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	207.684	16.807	224.491
409	Kab. Alor	26	983	1.009
410	Kab. Belu	5.661	963	6.624

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
411	Kab. Ende	0	983	983
412	Kab. Flores Timur	5	983	988
413	Kab. Kupang	29.600	33.995	63.595
414	Kab. Lembata	25	983	1.008
415	Kab. Manggarai	3.493	983	4.476
416	Kab. Ngada	0	983	983
417	Kab. Sikka	0	983	983
418	Kab. Sumba Barat	0	983	983
419	Kab. Sumba Timur	0	963	963
420	Kab. Timor Tengah Selatan	267.794	5.185	272.979

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
421	Kab. Timor Tengah Utara	25.156	5.185	30.341
422	Kota Kupang	0	5.079	5.079
423	Kab. Rote Ndao	0	963	963
424	Kab. Manggarai Barat	467	983	1.450
425	Kab. Nagekeo	850	963	1.813
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	963	963
427	Kab. Sumba Tengah	0	963	963
428	Kab. Manggarai Timur	0	983	983
429	Kab. Sabu Raijua	12.671	963	13.634
430	Kab. Malaka	0	963	963

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
431	Provinsi Maluku	46.278	1.235.458	1.281.736
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	148.817	148.817
433	Kab. Maluku Tengah	1.255	148.817	150.072
434	Kab. Maluku Tenggara	0	148.817	148.817
435	Kab. Buru	0	148.817	148.817
436	Kota Ambon	0	148.817	148.817
437	Kab. Seram Bagian Barat	49.633	148.817	198.450
438	Kab. Seram Bagian Timur	0	148.817	148.817
439	Kab. Kepulauan Aru	0	145.781	145.781
440	Kota Tual	0	148.817	148.817

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
441	Kab. Maluku Barat Daya	26.243	3.453.664	3.479.907
442	Kab. Buru Selatan	0	148.817	148.817
443	Provinsi Papua	185.352	0	185.352
444	Kab. Biak Numfor	0	0	0
445	Kab. Jayapura	0	0	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0
447	Kota Jayapura	0	0	0
448	Kab. Sarmi	23.809	0	23.809
449	Kab. Keerom	285.111	0	285.111
450	Kab. Waropen	0	9.705.640	9.705.640

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
451	Kab. Supiori	0	0	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0
453	Provinsi Maluku Utara	3.303.764	243.196.562	246.500.326
454	Kab. Halmahera Tengah	447.056	263.814.724	264.261.780
455	Kota Ternate	0	20.266.381	20.266.381
456	Kab. Halmahera Barat	232.651	52.358.939	52.591.590
457	Kab. Halmahera Timur	1.361.673	280.915.015	282.276.688
458	Kab. Halmahera Selatan	364.801	182.983.329	183.348.130
459	Kab. Halmahera Utara	292.811	20.286.923	20.579.734
460	Kab. Kepulauan Sula	736.454	20.266.381	21.002.835

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
461	Kota Tidore Kepulauan	0	86.973.963	86.973.963
462	Kab. Pulau Morotai	120.673	20.266.381	20.387.054
463	Kab. Pulau Taliabu	1.950.163	24.654.219	26.604.382
464	Provinsi Banten	65.361	242	65.603
465	Kab. Lebak	83.292	600.860	684.152
466	Kab. Pandeglang	19.817	78	19.895
467	Kab. Serang	5.284	498	5.782
468	Kab. Tangerang	140	600.561	600.701
469	Kota Cilegon	405	78	483
470	Kota Tangerang	0	42	42

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
471	Kota Serang	0	78	78
472	Kota Tangerang Selatan	0	600.525	600.525
473	Provinsi Bangka Belitung	2.398.332	66.303.028	68.701.360
474	Kab. Bangka	564.704	54.822.884	55.387.588
475	Kab. Belitung	126.023	10.413.267	10.539.290
476	Kota Pangkal Pinang	1.870	16.507.185	16.509.055
477	Kab. Bangka Selatan	286.765	42.089.828	42.376.593
478	Kab. Bangka Tengah	134.841	34.765.596	34.900.437
479	Kab. Bangka Barat	517.907	57.425.358	57.943.265
480	Kab. Belitung Timur	405.952	10.412.996	10.818.948

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
481	Provinsi Gorontalo	206.805	0	206.805
482	Kab. Boalemo	0	0	0
483	Kab. Gorontalo	45.955	0	45.955
484	Kota Gorontalo	0	0	0
485	Kab. Pohuwato	70.430	0	70.430
486	Kab. Bone Bolango	221.147	1.852.165	2.073.312
487	Kab. Gorontalo Utara	6.188	0	6.188
488	Provinsi Kepulauan Riau	513.171	1.476.018	1.989.189
489	Kab. Natuna	37.081	184.503	221.584
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	184.503	184.503

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
491	Kab. Karimun	521.957	922.511	1.444.468
492	Kota Batam	0	180.737	180.737
493	Kota Tanjung Pinang	631	180.737	181.368
494	Kab. Lingga	260.824	4.059.046	4.319.870
495	Kab. Bintan	1.392	180.737	182.129
496	Provinsi Papua Barat	814	0	814
497	Kab. Fak Fak	0	0	0
498	Kab. Manokwari	1.356	0	1.356
499	Kab. Teluk Bintuni	0	0	0
500	Kab. Teluk Wondama	0	9.705.640	9.705.640

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
501	Kab. Kaimana	0	33.362.632	33.362.632
502	Kab. Manokwari Selatan	0	0	0
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	0
504	Provinsi Sulawesi Barat	29.650	0	29.650
505	Kab. Majene	635	0	635
506	Kab. Mamuju	9.935	0	9.935
507	Kab. Polewali Mandar	29.041	0	29.041
508	Kab. Mamasa	64	0	64
509	Kab. Pasangkayu	7.627	0	7.627
510	Kab. Mamuju Tengah	1.513	0	1.513

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
511	Provinsi Kalimantan Utara	565.741	85.567.595	86.133.336
512	Kab. Bulungan	623.537	142.064.107	142.687.644
513	Kab. Malinau	107.196	288.303.745	288.410.941
514	Kab. Nunukan	161.147	44.570.047	44.731.194
515	Kota Tarakan	0	20.373.238	20.373.238
516	Kab. Tana Tidung	51.025	89.095.870	89.146.895
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	0	0
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0
520	Kab. Mappi	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
521	Kab. Asmat	0	33.362.475	33.362.475
522	Provinsi Papua Tengah	75.271	252.342.513	252.417.784
523	Kab. Mimika	84.431	514.388.116	514.472.547
524	Kab. Nabire	32.075	36.744.572	36.776.647
525	Kab. Paniai	7.060	60.399.330	60.406.390
526	Kab. Puncak Jaya	0	36.742.180	36.742.180
527	Kab. Dogiyai	0	60.399.330	60.399.330
528	Kab. Puncak	1.364	59.166.536	59.167.900
529	Kab. Intan Jaya	486	59.166.691	59.167.177
530	Kab. Deiyai	0	57.933.900	57.933.900

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
531	Provinsi Papua Pegunungan	76.857	0	76.857
532	Kab. Jayawijaya	0	0	0
533	Kab. Yahukimo	0	0	0
534	Kab. Pegunungan Bintang	128.094	0	128.094
535	Kab. Tolikara	0	0	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0
537	Kab. Yalimo	0	0	0
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	0
539	Kab. Nduga	0	32.000.741	32.000.741
540	Provinsi Papua Barat Daya	150.094	11.849.830	11.999.924

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
541	Kab. Sorong	74.479	11.779.800	11.854.279
542	Kab. Sorong Selatan	0	2.782.343	2.782.343
543	Kab. Raja Ampat	175.677	24.490.148	24.665.825
544	Kab. Tambrauw	0	2.782.343	2.782.343
545	Kab. Maybrat	0	2.782.343	2.782.343
546	Kota Sorong	0	2.782.343	2.782.343
547	Selisih Lebih	2.718.994	471.819.348	474.538.342
JUMLAH NASIONAL		115.829.671	19.820.810.198	19.936.639.869

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Provinsi Aceh	0	58.733	805.583	864.316
2	Kab. Aceh Barat	0	15.053	0	15.053
3	Kab. Aceh Besar	0	4.046	0	4.046
4	Kab. Aceh Selatan	0	8.621	0	8.621
5	Kab. Aceh Singkil	0	12.681	0	12.681
6	Kab. Aceh Tengah	0	22.094	0	22.094
7	Kab. Aceh Tenggara	0	10.183	0	10.183
8	Kab. Aceh Timur	0	39.312	0	39.312
9	Kab. Aceh Utara	0	8.446	0	8.446
10	Kab. Bireuen	0	5.609	0	5.609

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
11	Kab. Pidie	0	6.008	0	6.008
12	Kab. Simeulue	0	2.670	0	2.670
13	Kota Banda Aceh	0	2.618	0	2.618
14	Kota Sabang	0	2.670	0	2.670
15	Kota Langsa	0	5.424	0	5.424
16	Kota Lhokseumawe	0	2.768	0	2.768
17	Kab. Gayo Lues	0	20.839	0	20.839
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	5.210	0	5.210
19	Kab. Aceh Jaya	0	11.824	0	11.824
20	Kab. Nagan Raya	0	15.840	0	15.840

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
21	Kab. Aceh Tamiang	0	7.199	0	7.199
22	Kab. Bener Meriah	0	20.722	0	20.722
23	Kab. Pidie Jaya	0	2.672	0	2.672
24	Kota Subulussalam	0	17.405	0	17.405
25	Provinsi Sumatera Utara	12.630	2.309.576	13.631.808	15.954.014
26	Kab. Asahan	0	109.426	0	109.426
27	Kab. Dairi	0	147.200	0	147.200
28	Kab. Deli Serdang	0	90.926	0	90.926
29	Kab. Karo	18.943	115.022	0	133.965
30	Kab. Labuhanbatu	0	266.254	0	266.254

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
31	Kab. Langkat	0	80.501	0	80.501
32	Kab. Mandailing Natal	0	399.240	0	399.240
33	Kab. Nias	0	342.803	0	342.803
34	Kab. Simalungun	0	330.116	0	330.116
35	Kab. Tapanuli Selatan	0	323.052	0	323.052
36	Kab. Tapanuli Tengah	0	187.807	0	187.807
37	Kab. Tapanuli Utara	0	352.712	0	352.712
38	Kab. Toba	0	225.367	0	225.367
39	Kota Binjai	0	71.140	0	71.140
40	Kota Medan	0	70.703	0	70.703

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
41	Kota Pematang Siantar	0	88.329	0	88.329
42	Kota Sibolga	0	74.697	0	74.697
43	Kota Tanjung Balai	0	71.399	0	71.399
44	Kota Tebing Tinggi	0	70.703	0	70.703
45	Kota Padang Sidempuan	0	75.327	0	75.327
46	Kab. Pakpak Bharat	0	168.190	0	168.190
47	Kab. Nias Selatan	0	1.137.773	0	1.137.773
48	Kab. Humbang Hasundutan	0	281.169	0	281.169
49	Kab. Serdang Bedagai	0	88.329	0	88.329
50	Kab. Samosir	0	347.959	0	347.959

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
51	Kab. Batu Bara	0	89.027	0	89.027
52	Kab. Padang Lawas	0	1.136.220	0	1.136.220
53	Kab. Padang Lawas Utara	0	732.255	0	732.255
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	848.322	0	848.322
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0	145.625	0	145.625
56	Kab. Nias Utara	0	70.703	0	70.703
57	Kab. Nias Barat	0	335.808	0	335.808
58	Kota Gunungsitoli	0	70.703	0	70.703
59	Provinsi Sumatera Barat	0	856.116	13.520.101	14.376.217
60	Kab. Lima Puluh Kota	0	183.580	0	183.580

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
61	Kab. Agam	0	52.546	0	52.546
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	2.115.590	0	2.115.590
63	Kab. Padang Pariaman	0	49.821	0	49.821
64	Kab. Pasaman	0	206.271	0	206.271
65	Kab. Pesisir Selatan	0	78.562	0	78.562
66	Kab. Sijunjung	0	345.739	0	345.739
67	Kab. Solok	0	120.635	0	120.635
68	Kab. Tanah Datar	0	59.251	0	59.251
69	Kota Bukit Tinggi	0	46.605	0	46.605
70	Kota Padang Panjang	0	46.592	0	46.592

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
71	Kota Padang	0	53.383	0	53.383
72	Kota Payakumbuh	0	46.598	0	46.598
73	Kota Sawahlunto	0	76.992	0	76.992
74	Kota Solok	0	50.445	0	50.445
75	Kota Pariaman	0	46.592	0	46.592
76	Kab. Pasaman Barat	0	100.946	0	100.946
77	Kab. Dharmasraya	0	249.087	0	249.087
78	Kab. Solok Selatan	0	103.196	0	103.196
79	Provinsi Riau	374.577	11.867.883	3.971.804	16.214.264
80	Kab. Bengkalis	0	4.493.302	0	4.493.302

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
81	Kab. Indragiri Hilir	0	4.351.479	0	4.351.479
82	Kab. Indragiri Hulu	97.911	2.842.000	0	2.939.911
83	Kab. Kampar	0	3.618.039	0	3.618.039
84	Kab. Kuantan Singingi	0	3.088.834	0	3.088.834
85	Kab. Pelalawan	0	9.599.289	0	9.599.289
86	Kab. Rokan Hilir	0	2.326.748	0	2.326.748
87	Kab. Rokan Hulu	0	2.484.902	0	2.484.902
88	Kab. Siak	0	6.104.704	0	6.104.704
89	Kota Dumai	0	1.901.761	0	1.901.761
90	Kota Pekanbaru	0	2.208.570	0	2.208.570

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
91	Kab. Kepulauan Meranti	461.914	2.639.425	0	3.101.339
92	Provinsi Jambi	0	1.108.023	4.789.091	5.897.114
93	Kab. Batang Hari	0	788.893	0	788.893
94	Kab. Bungo	0	257.066	0	257.066
95	Kab. Kerinci	0	164.242	0	164.242
96	Kab. Merangin	0	284.959	0	284.959
97	Kab. Muaro Jambi	0	506.634	0	506.634
98	Kab. Sarolangun	0	388.291	0	388.291
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	1.482.819	0	1.482.819
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	431.790	0	431.790

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
101	Kab. Tebo	0	998.953	0	998.953
102	Kota Jambi	0	112.629	0	112.629
103	Kota Sungai Penuh	0	111.030	0	111.030
104	Provinsi Sumatera Selatan	0	4.686.694	110.994	4.797.688
105	Kab. Lahat	0	523.209	0	523.209
106	Kab. Musi Banyuasin	0	2.464.034	0	2.464.034
107	Kab. Musi Rawas	0	960.211	0	960.211
108	Kab. Muara Enim	0	905.012	0	905.012
109	Kab. Ogan Komering Ilir	0	5.420.683	0	5.420.683
110	Kab. Ogan Komering Ulu	0	394.466	0	394.466

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
111	Kota Palembang	0	338.252	0	338.252
112	Kota Prabumulih	0	313.152	0	313.152
113	Kota Pagar Alam	0	336.949	0	336.949
114	Kota Lubuk Linggau	0	319.785	0	319.785
115	Kab. Banyuasin	0	1.281.404	0	1.281.404
116	Kab. Ogan Ilir	0	729.915	0	729.915
117	Kab. OKU Timur	0	753.558	0	753.558
118	Kab. OKU Selatan	0	340.193	0	340.193
119	Kab. Empat Lawang	0	329.448	0	329.448
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	538.043	0	538.043

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
121	Kab. Musi Rawas Utara	0	490.893	0	490.893
122	Provinsi Bengkulu	0	136.318	722.112	858.430
123	Kab. Bengkulu Selatan	0	33.598	0	33.598
124	Kab. Bengkulu Utara	0	131.020	0	131.020
125	Kab. Rejang Lebong	0	51.846	0	51.846
126	Kota Bengkulu	0	15.441	0	15.441
127	Kab. Kaur	0	60.411	0	60.411
128	Kab. Seluma	0	33.273	0	33.273
129	Kab. Mukomuko	0	171.601	0	171.601
130	Kab. Lebong	0	59.325	0	59.325

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
131	Kab. Kepahiang	0	15.260	0	15.260
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	27.184	0	27.184
133	Provinsi Lampung	0	100.497	48.836	149.333
134	Kab. Lampung Barat	0	14.065	0	14.065
135	Kab. Lampung Selatan	0	7.152	0	7.152
136	Kab. Lampung Tengah	0	8.698	0	8.698
137	Kab. Lampung Utara	0	13.257	0	13.257
138	Kab. Lampung Timur	0	7.218	0	7.218
139	Kab. Tanggamus	0	15.656	0	15.656
140	Kab. Tulang Bawang	0	401.100	0	401.100

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
141	Kab. Way Kanan	0	463.321	0	463.321
142	Kota Bandar Lampung	0	7.081	0	7.081
143	Kota Metro	0	7.065	0	7.065
144	Kab. Pesawaran	0	8.394	0	8.394
145	Kab. Pringsewu	0	8.390	0	8.390
146	Kab. Mesuji	0	496.308	0	496.308
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	406.750	0	406.750
148	Kab. Pesisir Barat	0	10.302	0	10.302
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	0	0
150	Provinsi Jawa Barat	0	876.502	0	876.502

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
151	Kab. Bandung	0	97.757	0	97.757
152	Kab. Bekasi	0	36.375	0	36.375
153	Kab. Bogor	0	293.977	0	293.977
154	Kab. Ciamis	0	406.077	0	406.077
155	Kab. Cianjur	0	389.775	0	389.775
156	Kab. Cirebon	0	77.353	0	77.353
157	Kab. Garut	0	101.316	0	101.316
158	Kab. Indramayu	0	86.424	0	86.424
159	Kab. Karawang	0	67.985	0	67.985
160	Kab. Kuningan	0	225.636	0	225.636

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
161	Kab. Majalengka	0	110.179	0	110.179
162	Kab. Purwakarta	0	272.766	0	272.766
163	Kab. Subang	0	85.494	0	85.494
164	Kab. Sukabumi	0	386.712	0	386.712
165	Kab. Sumedang	0	89.822	0	89.822
166	Kab. Tasikmalaya	0	216.021	0	216.021
167	Kota Bandung	0	47.581	0	47.581
168	Kota Bekasi	0	35.683	0	35.683
169	Kota Bogor	0	35.683	0	35.683
170	Kota Cirebon	0	34.653	0	34.653

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
171	Kota Depok	0	35.683	0	35.683
172	Kota Sukabumi	0	56.337	0	56.337
173	Kota Tasikmalaya	0	67.610	0	67.610
174	Kota Cimahi	0	46.590	0	46.590
175	Kota Banjar	0	69.672	0	69.672
176	Kab. Bandung Barat	0	227.088	0	227.088
177	Kab. Pangandaran	0	192.346	0	192.346
178	Provinsi Jawa Tengah	0	3.831.696	0	3.831.696
179	Kab. Banjarnegara	0	243.321	0	243.321
180	Kab. Banyumas	0	414.918	0	414.918

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
181	Kab. Batang	0	617.654	0	617.654
182	Kab. Blora	0	2.382.692	0	2.382.692
183	Kab. Boyolali	0	368.094	0	368.094
184	Kab. Brebes	0	368.125	0	368.125
185	Kab. Cilacap	0	380.194	0	380.194
186	Kab. Demak	0	289.983	0	289.983
187	Kab. Grobogan	0	1.290.257	0	1.290.257
188	Kab. Jepara	0	478.142	0	478.142
189	Kab. Karanganyar	0	160.006	0	160.006
190	Kab. Kebumen	0	179.518	0	179.518

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
191	Kab. Kendal	0	347.585	0	347.585
192	Kab. Klaten	0	126.865	0	126.865
193	Kab. Kudus	0	291.232	0	291.232
194	Kab. Magelang	0	159.067	0	159.067
195	Kab. Pati	0	1.126.692	0	1.126.692
196	Kab. Pekalongan	0	343.749	0	343.749
197	Kab. Pemalang	0	1.201.012	0	1.201.012
198	Kab. Purbalingga	0	283.577	0	283.577
199	Kab. Purworejo	0	135.375	0	135.375
200	Kab. Rembang	0	978.014	0	978.014

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
201	Kab. Semarang	0	300.340	0	300.340
202	Kab. Sragen	0	214.837	0	214.837
203	Kab. Sukoharjo	0	128.788	0	128.788
204	Kab. Tegal	0	737.798	0	737.798
205	Kab. Temanggung	0	181.492	0	181.492
206	Kab. Wonogiri	0	146.951	0	146.951
207	Kab. Wonosobo	0	224.626	0	224.626
208	Kota Magelang	0	113.921	0	113.921
209	Kota Pekalongan	0	165.574	0	165.574
210	Kota Salatiga	0	118.249	0	118.249

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
211	Kota Semarang	0	143.988	0	143.988
212	Kota Surakarta	0	124.848	0	124.848
213	Kota Tegal	0	186.325	0	186.325
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	16.229	0	16.229
215	Kab. Bantul	0	8.788	0	8.788
216	Kab. Gunung Kidul	0	24.306	0	24.306
217	Kab. Kulon Progo	0	9.515	0	9.515
218	Kab. Sleman	0	10.011	0	10.011
219	Kota Yogyakarta	0	12.337	0	12.337
220	Provinsi Jawa Timur	0	1.710.887	563.973	2.274.860

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
221	Kab. Bangkalan	0	50.595	0	50.595
222	Kab. Banyuwangi	0	662.317	0	662.317
223	Kab. Blitar	0	144.313	0	144.313
224	Kab. Bojonegoro	0	618.830	0	618.830
225	Kab. Bondowoso	0	219.397	0	219.397
226	Kab. Gresik	0	115.384	0	115.384
227	Kab. Jember	0	457.058	0	457.058
228	Kab. Jombang	0	143.134	0	143.134
229	Kab. Kediri	0	164.260	0	164.260
230	Kab. Lamongan	0	267.929	0	267.929

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
231	Kab. Lumajang	0	143.433	0	143.433
232	Kab. Madiun	0	507.462	0	507.462
233	Kab. Magetan	0	120.202	0	120.202
234	Kab. Malang	0	148.890	0	148.890
235	Kab. Mojokerto	0	96.806	0	96.806
236	Kab. Nganjuk	0	282.264	0	282.264
237	Kab. Ngawi	0	715.328	0	715.328
238	Kab. Pacitan	0	64.701	0	64.701
239	Kab. Pamekasan	0	50.213	0	50.213
240	Kab. Pasuruan	0	70.935	0	70.935

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
241	Kab. Ponorogo	0	229.086	0	229.086
242	Kab. Probolinggo	0	165.295	0	165.295
243	Kab. Sampang	0	48.857	0	48.857
244	Kab. Sidoarjo	0	71.025	0	71.025
245	Kab. Situbondo	0	158.666	0	158.666
246	Kab. Sumenep	0	51.448	0	51.448
247	Kab. Trenggalek	0	89.291	0	89.291
248	Kab. Tuban	0	652.420	0	652.420
249	Kab. Tulungagung	0	116.103	0	116.103
250	Kota Blitar	0	56.194	0	56.194

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
251	Kota Kediri	0	52.191	0	52.191
252	Kota Madiun	0	77.820	0	77.820
253	Kota Malang	0	48.867	0	48.867
254	Kota Mojokerto	0	46.771	0	46.771
255	Kota Pasuruan	0	46.646	0	46.646
256	Kota Probolinggo	0	49.799	0	49.799
257	Kota Surabaya	0	122.870	0	122.870
258	Kota Batu	0	53.543	0	53.543
259	Provinsi Kalimantan Barat	634.821	2.614.884	27.879.626	31.129.331
260	Kab. Bengkayang	0	253.694	0	253.694

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
261	Kab. Landak	0	388.870	0	388.870
262	Kab. Kapuas Hulu	0	832.696	0	832.696
263	Kab. Ketapang	399.021	3.321.273	0	3.720.294
264	Kab. Mempawah	0	371.802	0	371.802
265	Kab. Sambas	0	243.053	0	243.053
266	Kab. Sanggau	114.509	658.524	0	773.033
267	Kab. Sintang	259.213	1.812.659	0	2.071.872
268	Kota Pontianak	0	265.004	0	265.004
269	Kota Singkawang	0	209.004	0	209.004
270	Kab. Sekadau	0	428.432	0	428.432

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
271	Kab. Melawi	168.793	2.184.093	0	2.352.886
272	Kab. Kayong Utara	0	539.983	0	539.983
273	Kab. Kubu Raya	0	1.063.032	0	1.063.032
274	Provinsi Kalimantan Tengah	75.819	18.438.996	79.379.085	97.893.900
275	Kab. Barito Selatan	0	2.311.365	0	2.311.365
276	Kab. Barito Utara	0	6.388.533	0	6.388.533
277	Kab. Kapuas	0	7.152.074	0	7.152.074
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	5.238.377	0	5.238.377
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	4.773.515	0	4.773.515
280	Kota Palangkaraya	0	2.196.487	0	2.196.487

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
281	Kab. Katingan	0	9.594.172	0	9.594.172
282	Kab. Seruyan	0	8.811.573	0	8.811.573
283	Kab. Sukamara	0	2.262.042	0	2.262.042
284	Kab. Lamandau	0	3.912.563	0	3.912.563
285	Kab. Gunung Mas	0	5.446.517	0	5.446.517
286	Kab. Pulang Pisau	0	2.667.878	0	2.667.878
287	Kab. Murung Raya	113.729	7.127.961	0	7.241.690
288	Kab. Barito Timur	0	1.460.116	0	1.460.116
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	141.382	1.890.155	2.031.537
290	Kab. Banjar	0	33.568	0	33.568

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
291	Kab. Barito Kuala	0	430.274	0	430.274
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	17.641	0	17.641
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	20.617	0	20.617
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	39.963	0	39.963
295	Kab. Kotabaru	0	109.244	0	109.244
296	Kab. Tabalong	0	432.561	0	432.561
297	Kab. Tanah Laut	0	66.047	0	66.047
298	Kab. Tapin	0	14.404	0	14.404
299	Kota Banjarbaru	0	19.808	0	19.808
300	Kota Banjarmasin	0	11.542	0	11.542

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
301	Kab. Balangan	0	73.615	0	73.615
302	Kab. Tanah Bumbu	0	67.014	0	67.014
303	Provinsi Kalimantan Timur	867.207	6.133.791	51.170.819	58.171.817
304	Kab. Berau	0	6.188.032	0	6.188.032
305	Kab. Kutai Kartanegara	363.765	4.080.221	0	4.443.986
306	Kab. Kutai Barat	0	2.101.509	0	2.101.509
307	Kab. Kutai Timur	937.046	4.483.186	0	5.420.232
308	Kab. Paser	0	1.374.626	0	1.374.626
309	Kota Balikpapan	0	908.551	0	908.551
310	Kota Bontang	0	1.205.179	0	1.205.179

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
311	Kota Samarinda	0	854.426	0	854.426
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	1.460.170	0	1.460.170
313	Kab. Mahakam Ulu	0	2.145.333	0	2.145.333
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	40.910	753.185	794.095
315	Kab. Bolaang Mongondow	0	15.666	0	15.666
316	Kab. Minahasa	0	7.508	0	7.508
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0	2.863	0	2.863
318	Kota Bitung	0	6.281	0	6.281
319	Kota Manado	0	3.910	0	3.910
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	2.923	0	2.923

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
321	Kab. Minahasa Selatan	0	10.450	0	10.450
322	Kota Tomohon	0	2.863	0	2.863
323	Kab. Minahasa Utara	0	10.083	0	10.083
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	2.923	0	2.923
325	Kota Kotamobagu	0	4.292	0	4.292
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	18.228	0	18.228
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	22.553	0	22.553
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	18.322	0	18.322
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	37.041	0	37.041
330	Provinsi Sulawesi Tengah	270.194	236.987	3.894.999	4.402.180

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
331	Kab. Banggai	178.439	44.857	0	223.296
332	Kab. Banggai Kepulauan	0	19.749	0	19.749
333	Kab. Buol	0	134.719	0	134.719
334	Kab. Toli-Toli	0	63.594	0	63.594
335	Kab. Donggala	0	38.754	0	38.754
336	Kab. Morowali	119.504	350.597	0	470.101
337	Kab. Poso	107.350	124.794	0	232.144
338	Kota Palu	0	21.307	0	21.307
339	Kab. Parigi Moutong	0	126.281	0	126.281
340	Kab. Tojo Una Una	0	43.135	0	43.135

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
341	Kab. Sigi	0	26.238	0	26.238
342	Kab. Banggai Laut	0	19.749	0	19.749
343	Kab. Morowali Utara	0	256.954	0	256.954
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	464.438	10.127.118	10.591.556
345	Kab. Bantaeng	0	21.108	0	21.108
346	Kab. Barru	0	20.351	0	20.351
347	Kab. Bone	0	21.085	0	21.085
348	Kab. Bulukumba	0	19.796	0	19.796
349	Kab. Enrekang	0	21.074	0	21.074
350	Kab. Gowa	0	31.911	0	31.911

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
351	Kab. Jeneponto	0	20.664	0	20.664
352	Kab. Luwu	0	22.527	0	22.527
353	Kab. Luwu Utara	0	99.580	0	99.580
354	Kab. Maros	0	21.222	0	21.222
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	0	20.431	0	20.431
356	Kota Palopo	0	20.026	0	20.026
357	Kab. Luwu Timur	0	955.702	0	955.702
358	Kab. Pinrang	0	21.119	0	21.119
359	Kab. Sinjai	0	21.229	0	21.229
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	19.782	0	19.782

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
361	Kab. Sidenreng Rappang	0	21.002	0	21.002
362	Kab. Soppeng	0	20.100	0	20.100
363	Kab. Takalar	0	20.664	0	20.664
364	Kab. Tana Toraja	0	21.549	0	21.549
365	Kab. Wajo	0	20.112	0	20.112
366	Kota Pare-pare	0	19.856	0	19.856
367	Kota Makassar	0	20.673	0	20.673
368	Kab. Toraja Utara	0	21.027	0	21.027
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	71.041	123.256	1.070.503	1.264.800
370	Kab. Buton	0	9.042	0	9.042

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
371	Kab. Konawe	0	152.770	0	152.770
372	Kab. Kolaka	106.562	58.173	0	164.735
373	Kab. Muna	0	8.366	0	8.366
374	Kota Kendari	0	10.473	0	10.473
375	Kota Bau-bau	0	8.119	0	8.119
376	Kab. Konawe Selatan	0	29.781	0	29.781
377	Kab. Bombana	0	117.247	0	117.247
378	Kab. Wakatobi	0	7.390	0	7.390
379	Kab. Kolaka Utara	0	97.720	0	97.720
380	Kab. Konawe Utara	0	74.406	0	74.406

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
381	Kab. Buton Utara	0	9.677	0	9.677
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	21.296	0	21.296
383	Kab. Kolaka Timur	0	49.755	0	49.755
384	Kab. Muna Barat	0	7.739	0	7.739
385	Kab. Buton Tengah	0	20.329	0	20.329
386	Kab. Buton Selatan	0	7.997	0	7.997
387	Provinsi Bali	0	1.586	0	1.586
388	Kab. Badung	0	199	0	199
389	Kab. Bangli	0	216	0	216
390	Kab. Buleleng	0	1.014	0	1.014

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
391	Kab. Gianyar	0	195	0	195
392	Kab. Jembrana	0	3.066	0	3.066
393	Kab. Karangasem	0	273	0	273
394	Kab. Klungkung	0	207	0	207
395	Kab. Tabanan	0	947	0	947
396	Kota Denpasar	0	195	0	195
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	79.362	64.889	820.504	964.755
398	Kab. Bima	0	28.888	0	28.888
399	Kab. Dompu	0	58.026	0	58.026
400	Kab. Lombok Barat	0	9.375	0	9.375

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
401	Kab. Lombok Tengah	0	8.983	0	8.983
402	Kab. Lombok Timur	0	9.283	0	9.283
403	Kab. Sumbawa	119.042	79.620	0	198.662
404	Kota Mataram	0	7.304	0	7.304
405	Kota Bima	0	10.588	0	10.588
406	Kab. Sumbawa Barat	0	31.836	0	31.836
407	Kab. Lombok Utara	0	12.640	0	12.640
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
409	Kab. Alor	0	0	0	0
410	Kab. Belu	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
411	Kab. Ende	0	0	0	0
412	Kab. Flores Timur	0	0	0	0
413	Kab. Kupang	0	0	0	0
414	Kab. Lembata	0	0	0	0
415	Kab. Manggarai	0	0	0	0
416	Kab. Ngada	0	0	0	0
417	Kab. Sikka	0	0	0	0
418	Kab. Sumba Barat	0	0	0	0
419	Kab. Sumba Timur	0	0	0	0
420	Kab. Timor Tengah Selatan	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
421	Kab. Timor Tengah Utara	0	0	0	0
422	Kota Kupang	0	0	0	0
423	Kab. Rote Ndao	0	0	0	0
424	Kab. Manggarai Barat	0	0	0	0
425	Kab. Nagekeo	0	0	0	0
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	0	0
427	Kab. Sumba Tengah	0	0	0	0
428	Kab. Manggarai Timur	0	0	0	0
429	Kab. Sabu Raijua	0	0	0	0
430	Kab. Malaka	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
431	Provinsi Maluku	338.827	666.340	7.409.257	8.414.424
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	348.693	0	348.693
433	Kab. Maluku Tengah	118.411	179.369	0	297.780
434	Kab. Maluku Tenggara	0	66.635	0	66.635
435	Kab. Buru	0	724.459	0	724.459
436	Kota Ambon	0	84.530	0	84.530
437	Kab. Seram Bagian Barat	98.719	92.233	0	190.952
438	Kab. Seram Bagian Timur	291.113	97.217	0	388.330
439	Kab. Kepulauan Aru	0	67.607	0	67.607
440	Kota Tual	0	66.635	0	66.635

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	66.635	0	66.635
442	Kab. Buru Selatan	0	869.945	0	869.945
443	Provinsi Papua	347.039	868.393	4.395.319	5.610.751
444	Kab. Biak Numfor	0	108.550	0	108.550
445	Kab. Jayapura	99.471	564.844	0	664.315
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	108.550	0	108.550
447	Kota Jayapura	0	211.834	0	211.834
448	Kab. Sarmi	210.384	1.048.757	0	1.259.141
449	Kab. Keerom	0	604.002	0	604.002
450	Kab. Waropen	0	161.396	0	161.396

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
451	Kab. Supiori	0	108.550	0	108.550
452	Kab. Mamberamo Raya	210.706	295.679	0	506.385
453	Provinsi Maluku Utara	0	572.471	7.205.488	7.777.959
454	Kab. Halmahera Tengah	0	466.939	0	466.939
455	Kota Ternate	0	63.609	0	63.609
456	Kab. Halmahera Barat	0	113.600	0	113.600
457	Kab. Halmahera Timur	0	331.680	0	331.680
458	Kab. Halmahera Selatan	0	545.916	0	545.916
459	Kab. Halmahera Utara	0	65.775	0	65.775
460	Kab. Kepulauan Sula	0	220.173	0	220.173

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
461	Kota Tidore Kepulauan	0	265.209	0	265.209
462	Kab. Pulau Morotai	0	63.609	0	63.609
463	Kab. Pulau Taliabu	0	153.377	0	153.377
464	Provinsi Banten	0	3.747.586	0	3.747.586
465	Kab. Lebak	0	3.440.183	0	3.440.183
466	Kab. Pandeglang	0	6.256.525	0	6.256.525
467	Kab. Serang	0	2.192.909	0	2.192.909
468	Kab. Tangerang	0	686.833	0	686.833
469	Kota Cilegon	0	536.334	0	536.334
470	Kota Tangerang	0	535.371	0	535.371

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
471	Kota Serang	0	536.334	0	536.334
472	Kota Tangerang Selatan	0	537.341	0	537.341
473	Provinsi Bangka Belitung	0	32.407	787.999	820.406
474	Kab. Bangka	0	7.317	0	7.317
475	Kab. Belitung	0	21.840	0	21.840
476	Kota Pangkal Pinang	0	6.241	0	6.241
477	Kab. Bangka Selatan	0	38.185	0	38.185
478	Kab. Bangka Tengah	0	26.988	0	26.988
479	Kab. Bangka Barat	0	5.647	0	5.647
480	Kab. Belitung Timur	0	20.884	0	20.884

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
481	Provinsi Gorontalo	0	425.486	6.437.973	6.863.459
482	Kab. Boalemo	0	185.300	0	185.300
483	Kab. Gorontalo	0	100.883	0	100.883
484	Kota Gorontalo	0	87.079	0	87.079
485	Kab. Pohuwato	0	764.849	0	764.849
486	Kab. Bone Bolango	0	103.761	0	103.761
487	Kab. Gorontalo Utara	0	259.042	0	259.042
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	216.736	4.324.485	4.541.221
489	Kab. Natuna	0	36.123	0	36.123
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	36.123	0	36.123

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
491	Kab. Karimun	0	79.414	0	79.414
492	Kota Batam	0	52.264	0	52.264
493	Kota Tanjung Pinang	0	141.315	0	141.315
494	Kab. Lingga	0	283.536	0	283.536
495	Kab. Bintan	0	229.362	0	229.362
496	Provinsi Papua Barat	0	1.881.519	12.272.608	14.154.127
497	Kab. Fak Fak	0	932.452	0	932.452
498	Kab. Manokwari	0	316.599	0	316.599
499	Kab. Teluk Bintuni	0	3.107.581	0	3.107.581
500	Kab. Teluk Wondama	0	899.200	0	899.200

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
501	Kab. Kaimana	0	825.087	0	825.087
502	Kab. Manokwari Selatan	0	538.426	0	538.426
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	490.734	0	490.734
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	6.635	86.534	93.169
505	Kab. Majene	0	2.501	0	2.501
506	Kab. Mamuju	0	3.144	0	3.144
507	Kab. Polewali Mandar	0	5.863	0	5.863
508	Kab. Mamasa	0	4.630	0	4.630
509	Kab. Pasangkayu	0	5.326	0	5.326
510	Kab. Mamuju Tengah	0	3.957	0	3.957

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	5.323.381	77.057.611	82.380.992
512	Kab. Bulungan	0	6.809.941	0	6.809.941
513	Kab. Malinau	0	5.769.712	0	5.769.712
514	Kab. Nunukan	0	4.532.776	0	4.532.776
515	Kota Tarakan	0	1.303.686	0	1.303.686
516	Kab. Tana Tidung	0	3.603.911	0	3.603.911
517	Provinsi Papua Selatan	703.009	1.092.532	19.774.080	21.569.621
518	Kab. Merauke	237.478	1.609.322	0	1.846.800
519	Kab. Boven Digoel	470.392	1.367.834	0	1.838.226
520	Kab. Mappi	199.826	793.364	0	993.190

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
521	Kab. Asmat	146.820	487.842	0	634.662
522	Provinsi Papua Tengah	0	665.119	4.676.372	5.341.491
523	Kab. Mimika	0	771.382	0	771.382
524	Kab. Nabire	0	715.035	0	715.035
525	Kab. Paniai	0	190.844	0	190.844
526	Kab. Puncak Jaya	0	97.120	0	97.120
527	Kab. Dogiyai	0	197.430	0	197.430
528	Kab. Puncak	0	139.299	0	139.299
529	Kab. Intan Jaya	0	186.949	0	186.949
530	Kab. Deiyai	0	134.381	0	134.381

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	0	0	0	0
533	Kab. Yahukimo	0	94.936	0	94.936
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	181.708	0	181.708
535	Kab. Tolikara	0	2.103	0	2.103
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	158.831	0	158.831
537	Kab. Yalimo	0	18.491	0	18.491
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	0	0
539	Kab. Nduga	0	43.243	0	43.243
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	358.992	2.768.255	3.127.247

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
541	Kab. Sorong	0	491.979	0	491.979
542	Kab. Sorong Selatan	0	325.167	0	325.167
543	Kab. Raja Ampat	0	121.682	0	121.682
544	Kab. Tambrauw	0	325.455	0	325.455
545	Kab. Maybrat	0	529.172	0	529.172
546	Kota Sorong	0	137.334	0	137.334
547	Selisih Lebih	205.285	9.992.262	7.394.808	17.592.355
JUMLAH NASIONAL		9.628.872	366.603.871	369.741.085	745.973.828

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
1	Provinsi Aceh	0
2	Kab. Aceh Barat	311.966
3	Kab. Aceh Besar	527.593
4	Kab. Aceh Selatan	460.479
5	Kab. Aceh Singkil	724.243
6	Kab. Aceh Tengah	252.406
7	Kab. Aceh Tenggara	252.406
8	Kab. Aceh Timur	391.185
9	Kab. Aceh Utara	310.028
10	Kab. Bireuen	333.321
11	Kab. Pidie	318.502
12	Kab. Simeulue	838.987
13	Kota Banda Aceh	262.413
14	Kota Sabang	386.492
15	Kota Langsa	260.951
16	Kota Lhokseumawe	270.014
17	Kab. Gayo Lues	252.406
18	Kab. Aceh Barat Daya	305.393
19	Kab. Aceh Jaya	423.218
20	Kab. Nagan Raya	340.607
21	Kab. Aceh Tamiang	310.116
22	Kab. Bener Meriah	242.104
23	Kab. Pidie Jaya	285.666
24	Kota Subulussalam	252.406
25	Provinsi Sumatera Utara	0
26	Kab. Asahan	313.413
27	Kab. Dairi	252.406
28	Kab. Deli Serdang	293.051
29	Kab. Karo	252.406
30	Kab. Labuhanbatu	299.327
31	Kab. Langkat	345.160
32	Kab. Mandailing Natal	458.274
33	Kab. Nias	364.018

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
34	Kab. Simalungun	247.255
35	Kab. Tapanuli Selatan	270.439
36	Kab. Tapanuli Tengah	567.512
37	Kab. Tapanuli Utara	252.406
38	Kab. Toba	252.406
39	Kota Binjai	247.255
40	Kota Medan	253.583
41	Kota Pematang Siantar	247.255
42	Kota Sibolga	248.596
43	Kota Tanjung Balai	247.255
44	Kota Tebing Tinggi	247.255
45	Kota Padang Sidempuan	247.255
46	Kab. Pakpak Bharat	252.406
47	Kab. Nias Selatan	1.081.243
48	Kab. Humbang Hasundutan	252.406
49	Kab. Serdang Bedagai	346.806
50	Kab. Samosir	252.406
51	Kab. Batu Bara	367.259
52	Kab. Padang Lawas	247.255
53	Kab. Padang Lawas Utara	252.406
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	252.406
55	Kab. Labuhanbatu Utara	267.363
56	Kab. Nias Utara	502.031
57	Kab. Nias Barat	360.936
58	Kota Gunungsitoli	277.646
59	Provinsi Sumatera Barat	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	252.406
61	Kab. Agam	305.849
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.471.103
63	Kab. Padang Pariaman	314.753
64	Kab. Pasaman	252.406
65	Kab. Pesisir Selatan	673.550
66	Kab. Sijunjung	247.255

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
67	Kab. Solok	252.406
68	Kab. Tanah Datar	247.255
69	Kota Bukit Tinggi	247.255
70	Kota Padang Panjang	247.255
71	Kota Padang	426.786
72	Kota Payakumbuh	247.255
73	Kota Sawahlunto	247.255
74	Kota Solok	247.255
75	Kota Pariaman	278.668
76	Kab. Pasaman Barat	379.736
77	Kab. Dharmasraya	247.255
78	Kab. Solok Selatan	252.406
79	Provinsi Riau	0
80	Kab. Bengkalis	617.455
81	Kab. Indragiri Hilir	541.368
82	Kab. Indragiri Hulu	247.255
83	Kab. Kampar	247.255
84	Kab. Kuantan Singingi	247.255
85	Kab. Pelalawan	371.034
86	Kab. Rokan Hilir	495.600
87	Kab. Rokan Hulu	247.255
88	Kab. Siak	288.852
89	Kota Dumai	322.148
90	Kota Pekanbaru	247.255
91	Kab. Kepulauan Meranti	538.923
92	Provinsi Jambi	0
93	Kab. Batang Hari	247.255
94	Kab. Bungo	252.406
95	Kab. Kerinci	252.406
96	Kab. Merangin	247.255
97	Kab. Muaro Jambi	247.255
98	Kab. Sarolangun	252.406
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	310.539

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	440.015
101	Kab. Tebo	247.255
102	Kota Jambi	247.255
103	Kota Sungai Penuh	252.406
104	Provinsi Sumatera Selatan	0
105	Kab. Lahat	247.255
106	Kab. Musi Banyuasin	247.255
107	Kab. Musi Rawas	252.406
108	Kab. Muara Enim	247.255
109	Kab. Ogan Komering Ilir	600.191
110	Kab. Ogan Komering Ulu	247.255
111	Kota Palembang	247.255
112	Kota Prabumulih	247.255
113	Kota Pagar Alam	252.406
114	Kota Lubuk Linggau	252.406
115	Kab. Banyuasin	500.660
116	Kab. Ogan Ilir	247.255
117	Kab. OKU Timur	247.255
118	Kab. OKU Selatan	247.255
119	Kab. Empat Lawang	247.255
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	252.406
121	Kab. Musi Rawas Utara	252.406
122	Provinsi Bengkulu	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	296.952
124	Kab. Bengkulu Utara	558.243
125	Kab. Rejang Lebong	252.406
126	Kota Bengkulu	306.245
127	Kab. Kaur	352.474
128	Kab. Seluma	322.374
129	Kab. Mukomuko	362.453
130	Kab. Lebong	252.406
131	Kab. Kepahiang	247.255
132	Kab. Bengkulu Tengah	262.316

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
133	Provinsi Lampung	0
134	Kab. Lampung Barat	295.149
135	Kab. Lampung Selatan	557.147
136	Kab. Lampung Tengah	247.255
137	Kab. Lampung Utara	247.255
138	Kab. Lampung Timur	409.652
139	Kab. Tanggamus	490.411
140	Kab. Tulang Bawang	327.340
141	Kab. Way Kanan	252.406
142	Kota Bandar Lampung	255.134
143	Kota Metro	247.255
144	Kab. Pesawaran	366.575
145	Kab. Pringsewu	247.255
146	Kab. Mesuji	247.255
147	Kab. Tulang Bawang Barat	247.255
148	Kab. Pesisir Barat	477.679
149	Provinsi DKI Jakarta	1.192.950
150	Provinsi Jawa Barat	0
151	Kab. Bandung	247.255
152	Kab. Bekasi	291.182
153	Kab. Bogor	247.255
154	Kab. Ciamis	252.406
155	Kab. Cianjur	328.915
156	Kab. Cirebon	316.908
157	Kab. Garut	330.236
158	Kab. Indramayu	443.353
159	Kab. Karawang	337.589
160	Kab. Kuningan	252.406
161	Kab. Majalengka	247.255
162	Kab. Purwakarta	247.255
163	Kab. Subang	297.372
164	Kab. Sukabumi	388.361
165	Kab. Sumedang	247.255

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
166	Kab. Tasikmalaya	295.178
167	Kota Bandung	247.255
168	Kota Bekasi	247.255
169	Kota Bogor	247.255
170	Kota Cirebon	253.951
171	Kota Depok	247.255
172	Kota Sukabumi	247.255
173	Kota Tasikmalaya	247.255
174	Kota Cimahi	242.104
175	Kota Banjar	247.255
176	Kab. Bandung Barat	247.255
177	Kab. Pangandaran	323.356
178	Provinsi Jawa Tengah	0
179	Kab. Banjarnegara	247.255
180	Kab. Banyumas	247.255
181	Kab. Batang	286.550
182	Kab. Blora	252.406
183	Kab. Boyolali	247.255
184	Kab. Brebes	308.940
185	Kab. Cilacap	348.429
186	Kab. Demak	290.447
187	Kab. Grobogan	247.255
188	Kab. Jepara	585.036
189	Kab. Karanganyar	252.406
190	Kab. Kebumen	314.656
191	Kab. Kendal	300.694
192	Kab. Klaten	247.255
193	Kab. Kudus	247.255
194	Kab. Magelang	247.255
195	Kab. Pati	304.892
196	Kab. Pekalongan	259.283
197	Kab. Pemalang	287.238
198	Kab. Purbalingga	247.255

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
199	Kab. Purworejo	271.041
200	Kab. Rembang	328.252
201	Kab. Semarang	247.255
202	Kab. Sragen	247.255
203	Kab. Sukoharjo	247.255
204	Kab. Tegal	273.474
205	Kab. Temanggung	247.255
206	Kab. Wonogiri	255.074
207	Kab. Wonosobo	252.406
208	Kota Magelang	247.255
209	Kota Pekalongan	254.139
210	Kota Salatiga	247.255
211	Kota Semarang	266.031
212	Kota Surakarta	247.255
213	Kota Tegal	253.019
214	Provinsi DI Yogyakarta	0
215	Kab. Bantul	263.814
216	Kab. Gunung Kidul	330.085
217	Kab. Kulon Progo	277.353
218	Kab. Sleman	247.255
219	Kota Yogyakarta	247.255
220	Provinsi Jawa Timur	0
221	Kab. Bangkalan	369.302
222	Kab. Banyuwangi	525.730
223	Kab. Blitar	296.324
224	Kab. Bojonegoro	252.406
225	Kab. Bondowoso	247.255
226	Kab. Gresik	419.205
227	Kab. Jember	407.156
228	Kab. Jombang	247.255
229	Kab. Kediri	252.406
230	Kab. Lamongan	290.330
231	Kab. Lumajang	290.491

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
232	Kab. Madiun	252.406
233	Kab. Magetan	247.255
234	Kab. Malang	359.586
235	Kab. Mojokerto	247.255
236	Kab. Nganjuk	247.255
237	Kab. Ngawi	247.255
238	Kab. Pacitan	323.669
239	Kab. Pamekasan	307.861
240	Kab. Pasuruan	276.329
241	Kab. Ponorogo	252.406
242	Kab. Probolinggo	333.169
243	Kab. Sampang	367.488
244	Kab. Sidoarjo	282.196
245	Kab. Situbondo	409.702
246	Kab. Sumenep	1.565.626
247	Kab. Trenggalek	358.223
248	Kab. Tuban	320.386
249	Kab. Tulungagung	278.714
250	Kota Blitar	247.255
251	Kota Kediri	247.255
252	Kota Madiun	247.255
253	Kota Malang	247.255
254	Kota Mojokerto	247.255
255	Kota Pasuruan	254.164
256	Kota Probolinggo	251.499
257	Kota Surabaya	272.238
258	Kota Batu	252.406
259	Provinsi Kalimantan Barat	0
260	Kab. Bengkayang	389.768
261	Kab. Landak	252.406
262	Kab. Kapuas Hulu	252.406
263	Kab. Ketapang	793.828
264	Kab. Mempawah	433.966

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
265	Kab. Sambas	471.042
266	Kab. Sanggau	247.255
267	Kab. Sintang	252.406
268	Kota Pontianak	247.255
269	Kota Singkawang	270.030
270	Kab. Sekadau	247.255
271	Kab. Melawi	252.406
272	Kab. Kayong Utara	1.153.245
273	Kab. Kubu Raya	494.684
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0
275	Kab. Barito Selatan	252.406
276	Kab. Barito Utara	252.406
277	Kab. Kapuas	283.261
278	Kab. Kotawaringin Barat	415.436
279	Kab. Kotawaringin Timur	344.952
280	Kota Palangkaraya	252.406
281	Kab. Katingan	339.360
282	Kab. Seruyan	416.870
283	Kab. Sukamara	335.091
284	Kab. Lamandau	252.406
285	Kab. Gunung Mas	247.255
286	Kab. Pulang Pisau	371.399
287	Kab. Murung Raya	252.406
288	Kab. Barito Timur	252.406
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0
290	Kab. Banjar	256.200
291	Kab. Barito Kuala	267.083
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	247.255
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	252.406
294	Kab. Hulu Sungai Utara	247.255
295	Kab. Kotabaru	1.159.897
296	Kab. Tabalong	252.406
297	Kab. Tanah Laut	455.096

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
298	Kab. Tapin	247.255
299	Kota Banjarbaru	247.255
300	Kota Banjarmasin	247.255
301	Kab. Balangan	252.406
302	Kab. Tanah Bumbu	358.026
303	Provinsi Kalimantan Timur	0
304	Kab. Berau	1.004.396
305	Kab. Kutai Kartanegara	561.763
306	Kab. Kutai Barat	252.406
307	Kab. Kutai Timur	639.640
308	Kab. Paser	437.572
309	Kota Balikpapan	297.636
310	Kota Bontang	292.280
311	Kota Samarinda	247.376
312	Kab. Penajam Paser Utara	319.548
313	Kab. Mahakam Ulu	252.406
314	Provinsi Sulawesi Utara	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	345.174
316	Kab. Minahasa	326.162
317	Kab. Kepulauan Sangihe	969.226
318	Kota Bitung	338.905
319	Kota Manado	307.439
320	Kab. Kepulauan Talaud	754.132
321	Kab. Minahasa Selatan	335.723
322	Kota Tomohon	247.255
323	Kab. Minahasa Utara	464.104
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	554.175
325	Kota Kotamobagu	247.255
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	376.996
327	Kab. Minahasa Tenggara	309.050
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	337.018
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	408.067
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
331	Kab. Banggai	1.054.377
332	Kab. Banggai Kepulauan	725.983
333	Kab. Buol	451.873
334	Kab. Toli-Toli	614.721
335	Kab. Donggala	712.081
336	Kab. Morowali	865.859
337	Kab. Poso	332.909
338	Kota Palu	269.228
339	Kab. Parigi Moutong	812.067
340	Kab. Tojo Una Una	952.758
341	Kab. Sigi	252.406
342	Kab. Banggai Laut	1.208.781
343	Kab. Morowali Utara	435.637
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0
345	Kab. Bantaeng	276.424
346	Kab. Barru	337.080
347	Kab. Bone	387.809
348	Kab. Bulukumba	377.293
349	Kab. Enrekang	252.406
350	Kab. Gowa	247.256
351	Kab. Jeneponto	327.062
352	Kab. Luwu	355.290
353	Kab. Luwu Utara	315.572
354	Kab. Maros	271.156
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.923.397
356	Kota Palopo	253.022
357	Kab. Luwu Timur	355.025
358	Kab. Pinrang	341.228
359	Kab. Sinjai	328.939
360	Kab. Kepulauan Selayar	1.640.737
361	Kab. Sidenreng Rappang	247.255
362	Kab. Soppeng	247.255
363	Kab. Takalar	395.631

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
364	Kab. Tana Toraja	252.406
365	Kab. Wajo	332.711
366	Kota Pare-pare	249.225
367	Kota Makassar	396.598
368	Kab. Toraja Utara	252.406
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0
370	Kab. Buton	431.909
371	Kab. Konawe	350.014
372	Kab. Kolaka	496.619
373	Kab. Muna	423.691
374	Kota Kendari	259.197
375	Kota Bau-bau	264.048
376	Kab. Konawe Selatan	464.429
377	Kab. Bombana	645.318
378	Kab. Wakatobi	774.534
379	Kab. Kolaka Utara	410.029
380	Kab. Konawe Utara	421.312
381	Kab. Buton Utara	466.899
382	Kab. Konawe Kepulauan	395.681
383	Kab. Kolaka Timur	252.406
384	Kab. Muna Barat	436.561
385	Kab. Buton Tengah	418.195
386	Kab. Buton Selatan	436.438
387	Provinsi Bali	0
388	Kab. Badung	326.069
389	Kab. Bangli	252.406
390	Kab. Buleleng	409.500
391	Kab. Gianyar	260.630
392	Kab. Jembrana	335.511
393	Kab. Karangasem	356.840
394	Kab. Klungkung	362.447
395	Kab. Tabanan	279.111
396	Kota Denpasar	263.584

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0
398	Kab. Bima	837.170
399	Kab. Dompu	443.341
400	Kab. Lombok Barat	383.346
401	Kab. Lombok Tengah	303.778
402	Kab. Lombok Timur	424.560
403	Kab. Sumbawa	904.399
404	Kota Mataram	255.399
405	Kota Bima	253.750
406	Kab. Sumbawa Barat	421.337
407	Kab. Lombok Utara	351.007
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0
409	Kab. Alor	832.463
410	Kab. Belu	273.483
411	Kab. Ende	477.476
412	Kab. Flores Timur	630.017
413	Kab. Kupang	693.242
414	Kab. Lembata	586.936
415	Kab. Manggarai	346.472
416	Kab. Ngada	352.663
417	Kab. Sikka	650.178
418	Kab. Sumba Barat	321.516
419	Kab. Sumba Timur	711.296
420	Kab. Timor Tengah Selatan	356.970
421	Kab. Timor Tengah Utara	302.523
422	Kota Kupang	260.570
423	Kab. Rote Ndao	617.249
424	Kab. Manggarai Barat	796.407
425	Kab. Nagekeo	347.582
426	Kab. Sumba Barat Daya	365.890
427	Kab. Sumba Tengah	331.426
428	Kab. Manggarai Timur	366.392
429	Kab. Sabu Raijua	463.374

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
430	Kab. Malaka	307.526
431	Provinsi Maluku	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	1.523.029
433	Kab. Maluku Tengah	1.380.313
434	Kab. Maluku Tenggara	776.662
435	Kab. Buru	492.901
436	Kota Ambon	319.682
437	Kab. Seram Bagian Barat	950.979
438	Kab. Seram Bagian Timur	1.178.746
439	Kab. Kepulauan Aru	1.571.559
440	Kota Tual	686.388
441	Kab. Maluku Barat Daya	1.975.119
442	Kab. Buru Selatan	612.982
443	Provinsi Papua	0
444	Kab. Biak Numfor	897.249
445	Kab. Jayapura	368.834
446	Kab. Kepulauan Yapen	1.020.561
447	Kota Jayapura	319.731
448	Kab. Sarmi	683.310
449	Kab. Keerom	252.406
450	Kab. Waropen	448.319
451	Kab. Supiori	597.870
452	Kab. Mamberamo Raya	532.362
453	Provinsi Maluku Utara	0
454	Kab. Halmahera Tengah	827.799
455	Kota Ternate	458.791
456	Kab. Halmahera Barat	496.348
457	Kab. Halmahera Timur	838.278
458	Kab. Halmahera Selatan	2.633.065
459	Kab. Halmahera Utara	682.322
460	Kab. Kepulauan Sula	803.034
461	Kota Tidore Kepulauan	451.738
462	Kab. Pulau Morotai	619.498

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
463	Kab. Pulau Taliabu	700.370
464	Provinsi Banten	0
465	Kab. Lebak	334.419
466	Kab. Pandeglang	698.756
467	Kab. Serang	433.436
468	Kab. Tangerang	274.607
469	Kota Cilegon	288.390
470	Kota Tangerang	247.255
471	Kota Serang	250.122
472	Kota Tangerang Selatan	247.255
473	Provinsi Bangka Belitung	0
474	Kab. Bangka	455.408
475	Kab. Belitung	812.654
476	Kota Pangkal Pinang	254.462
477	Kab. Bangka Selatan	667.690
478	Kab. Bangka Tengah	606.614
479	Kab. Bangka Barat	538.387
480	Kab. Belitung Timur	929.922
481	Provinsi Gorontalo	0
482	Kab. Boalemo	361.524
483	Kab. Gorontalo	300.142
484	Kota Gorontalo	256.883
485	Kab. Pohuwato	444.763
486	Kab. Bone Bolango	317.828
487	Kab. Gorontalo Utara	460.015
488	Provinsi Kepulauan Riau	0
489	Kab. Natuna	1.535.209
490	Kab. Kepulauan Anambas	1.298.433
491	Kab. Karimun	798.586
492	Kota Batam	731.919
493	Kota Tanjung Pinang	275.939
494	Kab. Lingga	1.595.787
495	Kab. Bintan	1.281.915

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
496	Provinsi Papua Barat	0
497	Kab. Fak Fak	960.249
498	Kab. Manokwari	430.960
499	Kab. Teluk Bintuni	704.497
500	Kab. Teluk Wondama	896.731
501	Kab. Kaimana	1.098.858
502	Kab. Manokwari Selatan	348.675
503	Kab. Pegunungan Arfak	252.406
504	Provinsi Sulawesi Barat	0
505	Kab. Majene	385.500
506	Kab. Mamuju	794.066
507	Kab. Polewali Mandar	317.067
508	Kab. Mamasa	252.406
509	Kab. Pasangkayu	418.690
510	Kab. Mamuju Tengah	327.811
511	Provinsi Kalimantan Utara	0
512	Kab. Bulungan	603.722
513	Kab. Malinau	252.406
514	Kab. Nunukan	425.368
515	Kota Tarakan	308.419
516	Kab. Tana Tidung	354.903
517	Provinsi Papua Selatan	0
518	Kab. Merauke	1.206.218
519	Kab. Boven Digoel	252.406
520	Kab. Mappi	392.197
521	Kab. Asmat	548.474
522	Provinsi Papua Tengah	0
523	Kab. Mimika	686.355
524	Kab. Nabire	923.470
525	Kab. Paniai	252.406
526	Kab. Puncak Jaya	252.406
527	Kab. Dogiyai	252.406
528	Kab. Puncak	247.255

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
529	Kab. Intan Jaya	247.255
530	Kab. Deiyai	242.104
531	Provinsi Papua Pegunungan	0
532	Kab. Jayawijaya	252.406
533	Kab. Yahukimo	247.255
534	Kab. Pegunungan Bintang	252.406
535	Kab. Tolikara	252.406
536	Kab. Mamberamo Tengah	242.104
537	Kab. Yalimo	252.406
538	Kab. Lanny Jaya	242.104
539	Kab. Nduga	242.104
540	Provinsi Papua Barat Daya	0
541	Kab. Sorong	730.372
542	Kab. Sorong Selatan	451.145
543	Kab. Raja Ampat	3.629.864
544	Kab. Tambrauw	557.116
545	Kab. Maybrat	252.406
546	Kota Sorong	306.552
547	Selisih Lebih	6.329.106
JUMLAH NASIONAL		218.493.091

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Provinsi Aceh	0	97.601	0	97.601
2	Kab. Aceh Barat	0	5.450	0	5.450
3	Kab. Aceh Besar	0	141.603	0	141.603
4	Kab. Aceh Selatan	0	5.450	0	5.450
5	Kab. Aceh Singkil	0	5.450	0	5.450
6	Kab. Aceh Tengah	0	5.450	0	5.450
7	Kab. Aceh Tenggara	0	5.450	0	5.450
8	Kab. Aceh Timur	0	5.450	0	5.450
9	Kab. Aceh Utara	0	5.339	0	5.339
10	Kab. Bireuen	0	5.450	0	5.450

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
11	Kab. Pidie	0	22.764	0	22.764
12	Kab. Simeulue	0	5.450	0	5.450
13	Kota Banda Aceh	0	22.300	0	22.300
14	Kota Sabang	0	82.427	0	82.427
15	Kota Langsa	0	5.339	0	5.339
16	Kota Lhokseumawe	0	5.339	0	5.339
17	Kab. Gayo Lues	0	5.450	0	5.450
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	5.450	0	5.450
19	Kab. Aceh Jaya	0	22.764	0	22.764
20	Kab. Nagan Raya	0	5.450	0	5.450

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
21	Kab. Aceh Tamiang	0	5.450	0	5.450
22	Kab. Bener Meriah	0	5.228	0	5.228
23	Kab. Pidie Jaya	0	5.450	0	5.450
24	Kota Subulussalam	0	5.450	0	5.450
25	Provinsi Sumatera Utara	2.178.509	190.609	0	2.369.118
26	Kab. Asahan	50.017	4.377	0	54.394
27	Kab. Dairi	51.059	4.468	0	55.527
28	Kab. Deli Serdang	50.017	4.377	0	54.394
29	Kab. Karo	51.059	4.468	0	55.527
30	Kab. Labuhanbatu	50.017	4.377	0	54.394

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
31	Kab. Langkat	51.059	4.468	0	55.527
32	Kab. Mandailing Natal	5.446.270	476.520	0	5.922.790
33	Kab. Nias	51.059	4.468	0	55.527
34	Kab. Simalungun	50.017	4.377	0	54.394
35	Kab. Tapanuli Selatan	459.530	40.208	0	499.738
36	Kab. Tapanuli Tengah	51.059	4.468	0	55.527
37	Kab. Tapanuli Utara	51.059	4.468	0	55.527
38	Kab. Toba	51.059	4.468	0	55.527
39	Kota Binjai	50.017	4.377	0	54.394
40	Kota Medan	50.017	4.377	0	54.394

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
41	Kota Pematang Siantar	50.017	4.377	0	54.394
42	Kota Sibolga	48.975	4.286	0	53.261
43	Kota Tanjung Balai	50.017	4.377	0	54.394
44	Kota Tebing Tinggi	50.017	4.377	0	54.394
45	Kota Padang Sidempuan	50.017	4.377	0	54.394
46	Kab. Pakpak Bharat	51.059	4.468	0	55.527
47	Kab. Nias Selatan	51.059	4.468	0	55.527
48	Kab. Humbang Hasundutan	51.059	4.468	0	55.527
49	Kab. Serdang Bedagai	50.017	4.377	0	54.394
50	Kab. Samosir	51.059	4.468	0	55.527

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
51	Kab. Batu Bara	50.017	4.377	0	54.394
52	Kab. Padang Lawas	450.152	39.387	0	489.539
53	Kab. Padang Lawas Utara	51.059	4.468	0	55.527
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	51.059	4.468	0	55.527
55	Kab. Labuhanbatu Utara	50.017	4.377	0	54.394
56	Kab. Nias Utara	50.017	4.377	0	54.394
57	Kab. Nias Barat	50.017	4.377	0	54.394
58	Kota Gunungsitoli	50.017	4.377	0	54.394
59	Provinsi Sumatera Barat	1.877.178	107.212	0	1.984.390
60	Kab. Lima Puluh Kota	78.217	4.468	0	82.685

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
61	Kab. Agam	78.217	4.468	0	82.685
62	Kab. Kepulauan Mentawai	78.217	4.468	0	82.685
63	Kab. Padang Pariaman	76.621	7.697	0	84.318
64	Kab. Pasaman	486.687	40.208	0	526.895
65	Kab. Pesisir Selatan	430.188	20.334	0	450.522
66	Kab. Sijunjung	76.621	7.697	0	84.318
67	Kab. Solok	430.188	96.588	0	526.776
68	Kab. Tanah Datar	76.621	7.697	0	84.318
69	Kota Bukit Tinggi	76.621	4.377	0	80.998
70	Kota Padang Panjang	76.621	4.377	0	80.998

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
71	Kota Padang	78.217	7.857	0	86.074
72	Kota Payakumbuh	76.621	4.377	0	80.998
73	Kota Sawahlunto	76.621	7.697	0	84.318
74	Kota Solok	76.621	7.697	0	84.318
75	Kota Pariaman	76.621	4.377	0	80.998
76	Kab. Pasaman Barat	476.755	39.387	0	516.142
77	Kab. Dharmasraya	421.409	19.919	0	441.328
78	Kab. Solok Selatan	4.692.943	191.773	0	4.884.716
79	Provinsi Riau	0	0	0	0
80	Kab. Bengkalis	0	0	0	0

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
81	Kab. Indragiri Hilir	0	0	0	0
82	Kab. Indragiri Hulu	0	0	0	0
83	Kab. Kampar	0	0	0	0
84	Kab. Kuantan Singingi	0	0	0	0
85	Kab. Pelalawan	0	0	0	0
86	Kab. Rokan Hilir	0	0	0	0
87	Kab. Rokan Hulu	0	0	0	0
88	Kab. Siak	0	0	0	0
89	Kota Dumai	0	0	0	0
90	Kota Pekanbaru	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	0	0	0
92	Provinsi Jambi	0	0	0	0
93	Kab. Batang Hari	0	0	0	0
94	Kab. Bungo	0	0	0	0
95	Kab. Kerinci	351.971	12.478	0	364.449
96	Kab. Merangin	0	0	0	0
97	Kab. Muaro Jambi	0	0	0	0
98	Kab. Sarolangun	0	0	0	0
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
101	Kab. Tebo	0	0	0	0
102	Kota Jambi	0	0	0	0
103	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.262.932	106.720	0	1.369.652
105	Kab. Lahat	324.182	27.395	0	351.577
106	Kab. Musi Banyuasin	57.993	4.901	0	62.894
107	Kab. Musi Rawas	136.619	13.924	0	150.543
108	Kab. Muara Enim	2.594.845	219.269	0	2.814.114
109	Kab. Ogan Komering Ilir	57.993	4.901	0	62.894
110	Kab. Ogan Komering Ulu	123.315	10.422	0	133.737

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
111	Kota Palembang	123.315	10.422	0	133.737
112	Kota Prabumulih	123.315	10.422	0	133.737
113	Kota Pagar Alam	525.365	44.395	0	569.760
114	Kota Lubuk Linggau	59.201	9.623	0	68.824
115	Kab. Banyuasin	123.315	10.422	0	133.737
116	Kab. Ogan Ilir	123.315	10.422	0	133.737
117	Kab. OKU Timur	57.993	4.901	0	62.894
118	Kab. OKU Selatan	123.315	10.422	0	133.737
119	Kab. Empat Lawang	68.509	18.051	0	86.560
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	125.884	10.639	0	136.523

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
121	Kab. Musi Rawas Utara	59.201	5.003	0	64.204
122	Provinsi Bengkulu	0	53.788	0	53.788
123	Kab. Bengkulu Selatan	47.075	10.565	0	57.640
124	Kab. Bengkulu Utara	0	9.103	0	9.103
125	Kab. Rejang Lebong	0	57.168	0	57.168
126	Kota Bengkulu	0	6.587	0	6.587
127	Kab. Kaur	104.003	15.513	0	119.516
128	Kab. Seluma	10.298	7.320	0	17.618
129	Kab. Mukomuko	0	6.587	0	6.587
130	Kab. Lebong	0	9.103	0	9.103

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
131	Kab. Kepahiang	0	68.227	0	68.227
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	16.654	0	16.654
133	Provinsi Lampung	0	135.407	4.412.742	4.548.149
134	Kab. Lampung Barat	0	12.428	898.310	910.738
135	Kab. Lampung Selatan	0	88.882	231.573	320.455
136	Kab. Lampung Tengah	0	28.904	879.977	908.881
137	Kab. Lampung Utara	0	11.528	231.573	243.101
138	Kab. Lampung Timur	0	17.380	236.398	253.778
139	Kab. Tanggamus	0	31.794	11.031.853	11.063.647
140	Kab. Tulang Bawang	0	11.528	231.573	243.101

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
141	Kab. Way Kanan	0	11.768	236.398	248.166
142	Kota Bandar Lampung	0	75.236	231.573	306.809
143	Kota Metro	0	11.528	231.573	243.101
144	Kab. Pesawaran	0	172.469	879.977	1.052.446
145	Kab. Pringsewu	0	23.406	879.977	903.383
146	Kab. Mesuji	0	11.528	231.573	243.101
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	11.528	231.573	243.101
148	Kab. Pesisir Barat	0	12.428	898.310	910.738
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	0	0
150	Provinsi Jawa Barat	0	88.773	87.908.243	87.997.016

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
151	Kab. Bandung	0	13.665	107.364.164	107.377.829
152	Kab. Bekasi	0	4.118	3.315.887	3.320.005
153	Kab. Bogor	0	10.247	36.240.430	36.250.677
154	Kab. Ciamis	0	4.294	2.588.645	2.592.939
155	Kab. Cianjur	0	12.641	14.189.778	14.202.419
156	Kab. Cirebon	0	4.206	2.535.816	2.540.022
157	Kab. Garut	0	4.364	56.848.141	56.852.505
158	Kab. Indramayu	0	8.513	2.535.816	2.544.329
159	Kab. Karawang	0	10.564	3.386.438	3.397.002
160	Kab. Kuningan	0	4.294	2.588.645	2.592.939

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
161	Kab. Majalengka	0	4.206	2.535.816	2.540.022
162	Kab. Purwakarta	0	37.695	3.386.438	3.424.133
163	Kab. Subang	0	76.570	6.989.475	7.066.045
164	Kab. Sukabumi	0	46.157	37.466.518	37.512.675
165	Kab. Sumedang	0	8.671	10.779.495	10.788.166
166	Kab. Tasikmalaya	0	4.118	7.283.628	7.287.746
167	Kota Bandung	0	6.599	6.989.475	6.996.074
168	Kota Bekasi	0	4.206	3.386.438	3.390.644
169	Kota Bogor	0	4.206	3.386.438	3.390.644
170	Kota Cirebon	0	4.206	2.535.816	2.540.022

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
171	Kota Depok	0	4.206	3.386.438	3.390.644
172	Kota Sukabumi	0	8.197	5.095.476	5.103.673
173	Kota Tasikmalaya	0	4.206	2.535.816	2.540.022
174	Kota Cimahi	0	6.462	6.843.860	6.850.322
175	Kota Banjar	0	4.206	2.535.816	2.540.022
176	Kab. Bandung Barat	0	45.970	6.989.475	7.035.445
177	Kab. Pangandaran	0	4.206	2.535.816	2.540.022
178	Provinsi Jawa Tengah	0	97.301	0	97.301
179	Kab. Banjarnegara	0	3.499	0	3.499
180	Kab. Banyumas	0	3.499	0	3.499

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
181	Kab. Batang	0	4.178	0	4.178
182	Kab. Blora	0	3.572	0	3.572
183	Kab. Boyolali	0	14.018	0	14.018
184	Kab. Brebes	0	3.572	0	3.572
185	Kab. Cilacap	0	3.499	0	3.499
186	Kab. Demak	0	9.525	0	9.525
187	Kab. Grobogan	0	9.652	0	9.652
188	Kab. Jepara	0	3.499	0	3.499
189	Kab. Karanganyar	0	3.702	0	3.702
190	Kab. Kebumen	0	3.499	0	3.499

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
191	Kab. Kendal	0	19.805	0	19.805
192	Kab. Klaten	0	3.626	0	3.626
193	Kab. Kudus	0	3.499	0	3.499
194	Kab. Magelang	0	49.013	0	49.013
195	Kab. Pati	0	3.499	0	3.499
196	Kab. Pekalongan	0	3.499	0	3.499
197	Kab. Pemalang	0	3.499	0	3.499
198	Kab. Purbalingga	0	3.499	0	3.499
199	Kab. Purworejo	0	5.301	0	5.301
200	Kab. Rembang	0	3.499	0	3.499

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
201	Kab. Semarang	0	135.197	0	135.197
202	Kab. Sragen	0	3.626	0	3.626
203	Kab. Sukoharjo	0	3.626	0	3.626
204	Kab. Tegal	0	3.499	0	3.499
205	Kab. Temanggung	0	25.987	0	25.987
206	Kab. Wonogiri	0	3.499	0	3.499
207	Kab. Wonosobo	0	7.458	0	7.458
208	Kota Magelang	0	5.301	0	5.301
209	Kota Pekalongan	0	3.499	0	3.499
210	Kota Salatiga	0	11.181	0	11.181

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
211	Kota Semarang	0	10.204	0	10.204
212	Kota Surakarta	0	3.626	0	3.626
213	Kota Tegal	0	3.499	0	3.499
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	0	0
215	Kab. Bantul	0	0	0	0
216	Kab. Gunung Kidul	0	0	0	0
217	Kab. Kulon Progo	0	3.155	0	3.155
218	Kab. Sleman	0	1.804	0	1.804
219	Kota Yogyakarta	0	0	0	0
220	Provinsi Jawa Timur	234.930	219.453	0	454.383

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
221	Kab. Bangkalan	4.666	4.359	0	9.025
222	Kab. Banyuwangi	63.495	96.250	0	159.745
223	Kab. Blitar	4.666	4.655	0	9.321
224	Kab. Bojonegoro	4.763	4.450	0	9.213
225	Kab. Bondowoso	177.266	421.142	0	598.408
226	Kab. Gresik	4.666	5.431	0	10.097
227	Kab. Jember	4.666	40.657	0	45.323
228	Kab. Jombang	4.666	5.727	0	10.393
229	Kab. Kediri	4.763	4.752	0	9.515
230	Kab. Lamongan	4.666	5.431	0	10.097

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
231	Kab. Lumajang	4.666	4.655	0	9.321
232	Kab. Madiun	4.763	4.450	0	9.213
233	Kab. Magetan	4.666	4.359	0	9.025
234	Kab. Malang	4.763	15.873	0	20.636
235	Kab. Mojokerto	4.666	30.358	0	35.024
236	Kab. Nganjuk	4.666	4.359	0	9.025
237	Kab. Ngawi	4.666	4.359	0	9.025
238	Kab. Pacitan	4.666	4.359	0	9.025
239	Kab. Pamekasan	4.666	4.359	0	9.025
240	Kab. Pasuruan	4.666	24.458	0	29.124

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
241	Kab. Ponorogo	4.763	4.450	0	9.213
242	Kab. Probolinggo	62.200	34.321	0	96.521
243	Kab. Sampang	4.666	4.359	0	9.025
244	Kab. Sidoarjo	4.666	6.486	0	11.152
245	Kab. Situbondo	460.270	41.093	0	501.363
246	Kab. Sumenep	4.666	4.359	0	9.025
247	Kab. Trenggalek	4.763	4.450	0	9.213
248	Kab. Tuban	4.666	4.359	0	9.025
249	Kab. Tulungagung	4.666	4.359	0	9.025
250	Kota Blitar	4.666	4.359	0	9.025

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
251	Kota Kediri	4.666	4.359	0	9.025
252	Kota Madiun	4.666	4.359	0	9.025
253	Kota Malang	4.666	4.655	0	9.321
254	Kota Mojokerto	4.666	5.431	0	10.097
255	Kota Pasuruan	4.666	5.414	0	10.080
256	Kota Probolinggo	4.666	4.359	0	9.025
257	Kota Surabaya	4.666	4.359	0	9.025
258	Kota Batu	4.763	23.189	0	27.952
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
261	Kab. Landak	0	0	0	0
262	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	0
263	Kab. Ketapang	0	0	0	0
264	Kab. Mempawah	0	0	0	0
265	Kab. Sambas	0	0	0	0
266	Kab. Sanggau	0	0	0	0
267	Kab. Sintang	0	0	0	0
268	Kota Pontianak	0	0	0	0
269	Kota Singkawang	0	0	0	0
270	Kab. Sekadau	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
271	Kab. Melawi	0	0	0	0
272	Kab. Kayong Utara	0	0	0	0
273	Kab. Kubu Raya	0	0	0	0
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	0	0	0	0
276	Kab. Barito Utara	0	0	0	0
277	Kab. Kapuas	0	0	0	0
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	0
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	0	0	0
280	Kota Palangkaraya	0	0	0	0

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
281	Kab. Katingan	0	0	0	0
282	Kab. Seruyan	0	0	0	0
283	Kab. Sukamara	0	0	0	0
284	Kab. Lamandau	0	0	0	0
285	Kab. Gunung Mas	0	0	0	0
286	Kab. Pulang Pisau	0	0	0	0
287	Kab. Murung Raya	0	0	0	0
288	Kab. Barito Timur	0	0	0	0
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0	0
290	Kab. Banjar	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
291	Kab. Barito Kuala	0	0	0	0
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0	0	0
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0	0
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	0	0	0
295	Kab. Kotabaru	0	0	0	0
296	Kab. Tabalong	0	0	0	0
297	Kab. Tanah Laut	0	0	0	0
298	Kab. Tapin	0	0	0	0
299	Kota Banjarbaru	0	0	0	0
300	Kota Banjarmasin	0	0	0	0

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
301	Kab. Balangan	0	0	0	0
302	Kab. Tanah Bumbu	0	0	0	0
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	0	0
304	Kab. Berau	0	0	0	0
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	0	0	0
306	Kab. Kutai Barat	0	0	0	0
307	Kab. Kutai Timur	0	0	0	0
308	Kab. Paser	0	0	0	0
309	Kota Balikpapan	0	0	0	0
310	Kota Bontang	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
311	Kota Samarinda	0	0	0	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	0	0	0
313	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	0
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	28.520	3.774.107	3.802.627
315	Kab. Bolaang Mongondow	0	14.420	224.901	239.321
316	Kab. Minahasa	0	3.556	5.532.260	5.535.816
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0	2.429	198.059	200.488
318	Kota Bitung	0	2.480	205.771	208.251
319	Kota Manado	0	2.429	495.472	497.901
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	2.480	202.185	204.665

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
321	Kab. Minahasa Selatan	0	17.226	684.301	701.527
322	Kota Tomohon	0	2.429	5.275.663	5.278.092
323	Kab. Minahasa Utara	0	2.429	487.352	489.781
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	2.480	202.185	204.665
325	Kota Kotamobagu	0	8.031	198.059	206.090
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	3.075	202.185	205.260
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	6.068	481.829	487.897
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	37.991	225.844	263.835
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	5.639	202.185	207.824
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
331	Kab. Banggai	0	0	0	0
332	Kab. Banggai Kepulauan	0	0	0	0
333	Kab. Buol	0	0	0	0
334	Kab. Toli-Toli	0	0	0	0
335	Kab. Donggala	0	0	0	0
336	Kab. Morowali	0	0	0	0
337	Kab. Poso	0	0	0	0
338	Kota Palu	0	0	0	0
339	Kab. Parigi Moutong	0	0	0	0
340	Kab. Tojo Una Una	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
341	Kab. Sigi	0	0	0	0
342	Kab. Banggai Laut	0	0	0	0
343	Kab. Morowali Utara	0	0	0	0
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	0	0	0
345	Kab. Bantaeng	0	0	0	0
346	Kab. Barru	0	0	0	0
347	Kab. Bone	0	0	0	0
348	Kab. Bulukumba	0	0	0	0
349	Kab. Enrekang	0	0	0	0
350	Kab. Gowa	0	0	0	0

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
351	Kab. Jeneponto	0	0	0	0
352	Kab. Luwu	0	0	0	0
353	Kab. Luwu Utara	0	0	0	0
354	Kab. Maros	0	0	0	0
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	0	0	0	0
356	Kota Palopo	0	0	0	0
357	Kab. Luwu Timur	0	0	0	0
358	Kab. Pinrang	0	0	0	0
359	Kab. Sinjai	0	0	0	0
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
361	Kab. Sidenreng Rappang	0	0	0	0
362	Kab. Soppeng	0	0	0	0
363	Kab. Takalar	0	0	0	0
364	Kab. Tana Toraja	0	0	0	0
365	Kab. Wajo	0	0	0	0
366	Kota Pare-pare	0	0	0	0
367	Kota Makassar	0	0	0	0
368	Kab. Toraja Utara	0	0	0	0
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
370	Kab. Buton	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
371	Kab. Konawe	0	0	0	0
372	Kab. Kolaka	0	0	0	0
373	Kab. Muna	0	0	0	0
374	Kota Kendari	0	0	0	0
375	Kota Bau-bau	0	0	0	0
376	Kab. Konawe Selatan	0	0	0	0
377	Kab. Bombana	0	0	0	0
378	Kab. Wakatobi	0	0	0	0
379	Kab. Kolaka Utara	0	0	0	0
380	Kab. Konawe Utara	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
381	Kab. Buton Utara	0	0	0	0
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0	0
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	0	0
384	Kab. Muna Barat	0	0	0	0
385	Kab. Buton Tengah	0	0	0	0
386	Kab. Buton Selatan	0	0	0	0
387	Provinsi Bali	0	0	0	0
388	Kab. Badung	0	0	0	0
389	Kab. Bangli	0	0	0	0
390	Kab. Buleleng	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
391	Kab. Gianyar	0	0	0	0
392	Kab. Jembrana	0	0	0	0
393	Kab. Karangasem	0	0	0	0
394	Kab. Klungkung	0	0	0	0
395	Kab. Tabanan	0	0	0	0
396	Kota Denpasar	0	0	0	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	26.029	0	26.029
398	Kab. Bima	0	18.072	0	18.072
399	Kab. Dompu	0	47.159	0	47.159
400	Kab. Lombok Barat	0	3.400	0	3.400

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
401	Kab. Lombok Tengah	0	3.400	0	3.400
402	Kab. Lombok Timur	0	3.400	0	3.400
403	Kab. Sumbawa	0	11.963	0	11.963
404	Kota Mataram	0	3.400	0	3.400
405	Kota Bima	0	4.644	0	4.644
406	Kab. Sumbawa Barat	0	3.471	0	3.471
407	Kab. Lombok Utara	0	3.400	0	3.400
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	316.056	248.857	0	564.913
409	Kab. Alor	11.289	8.889	0	20.178
410	Kab. Belu	11.059	8.708	0	19.767

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
411	Kab. Ende	419.091	303.680	0	722.771
412	Kab. Flores Timur	11.289	8.889	0	20.178
413	Kab. Kupang	11.289	8.889	0	20.178
414	Kab. Lembata	11.289	136.408	0	147.697
415	Kab. Manggarai	382.335	159.148	0	541.483
416	Kab. Ngada	11.289	84.808	0	96.097
417	Kab. Sikka	74.058	57.249	0	131.307
418	Kab. Sumba Barat	11.289	8.889	0	20.178
419	Kab. Sumba Timur	11.059	8.708	0	19.767
420	Kab. Timor Tengah Selatan	11.289	8.889	0	20.178

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
421	Kab. Timor Tengah Utara	11.289	8.889	0	20.178
422	Kota Kupang	11.059	8.708	0	19.767
423	Kab. Rote Ndao	11.059	8.708	0	19.767
424	Kab. Manggarai Barat	67.040	29.657	0	96.697
425	Kab. Nagekeo	72.546	62.522	0	135.068
426	Kab. Sumba Barat Daya	11.059	8.708	0	19.767
427	Kab. Sumba Tengah	11.059	8.708	0	19.767
428	Kab. Manggarai Timur	67.040	36.232	0	103.272
429	Kab. Sabu Raijua	11.059	8.708	0	19.767
430	Kab. Malaka	11.059	8.708	0	19.767

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
431	Provinsi Maluku	0	0	0	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	0	0	0
433	Kab. Maluku Tengah	0	0	0	0
434	Kab. Maluku Tenggara	0	0	0	0
435	Kab. Buru	0	0	0	0
436	Kota Ambon	0	0	0	0
437	Kab. Seram Bagian Barat	0	0	0	0
438	Kab. Seram Bagian Timur	0	0	0	0
439	Kab. Kepulauan Aru	0	0	0	0
440	Kota Tual	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	0	0
442	Kab. Buru Selatan	0	0	0	0
443	Provinsi Papua	0	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	0	0	0	0
445	Kab. Jayapura	0	0	0	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0	0
447	Kota Jayapura	0	0	0	0
448	Kab. Sarmi	0	0	0	0
449	Kab. Keerom	0	0	0	0
450	Kab. Waropen	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
451	Kab. Supiori	0	0	0	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	0
453	Provinsi Maluku Utara	0	64.058	0	64.058
454	Kab. Halmahera Tengah	0	32.563	0	32.563
455	Kota Ternate	0	8.542	0	8.542
456	Kab. Halmahera Barat	0	8.542	0	8.542
457	Kab. Halmahera Timur	0	8.542	0	8.542
458	Kab. Halmahera Selatan	0	131.317	0	131.317
459	Kab. Halmahera Utara	0	8.542	0	8.542
460	Kab. Kepulauan Sula	0	8.542	0	8.542

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
461	Kota Tidore Kepulauan	0	32.563	0	32.563
462	Kab. Pulau Morotai	0	8.542	0	8.542
463	Kab. Pulau Taliabu	0	8.542	0	8.542
464	Provinsi Banten	0	158.271	0	158.271
465	Kab. Lebak	0	72.554	3.410.284	3.482.838
466	Kab. Pandeglang	0	189.808	0	189.808
467	Kab. Serang	0	205.188	0	205.188
468	Kab. Tangerang	0	38.609	850.623	889.232
469	Kota Cilegon	0	38.609	0	38.609
470	Kota Tangerang	0	26.850	0	26.850

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
471	Kota Serang	0	38.609	0	38.609
472	Kota Tangerang Selatan	0	26.850	850.623	877.473
473	Provinsi Bangka Belitung	0	0	0	0
474	Kab. Bangka	0	0	0	0
475	Kab. Belitung	0	0	0	0
476	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0
477	Kab. Bangka Selatan	0	0	0	0
478	Kab. Bangka Tengah	0	0	0	0
479	Kab. Bangka Barat	0	0	0	0
480	Kab. Belitung Timur	0	0	0	0

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
481	Provinsi Gorontalo	0	0	0	0
482	Kab. Boalemo	0	0	0	0
483	Kab. Gorontalo	0	0	0	0
484	Kota Gorontalo	0	0	0	0
485	Kab. Pohuwato	0	0	0	0
486	Kab. Bone Bolango	0	0	0	0
487	Kab. Gorontalo Utara	0	0	0	0
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	0
489	Kab. Natuna	0	0	0	0
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
491	Kab. Karimun	0	0	0	0
492	Kota Batam	0	0	0	0
493	Kota Tanjung Pinang	0	0	0	0
494	Kab. Lingga	0	0	0	0
495	Kab. Bintan	0	0	0	0
496	Provinsi Papua Barat	0	0	0	0
497	Kab. Fak Fak	0	0	0	0
498	Kab. Manokwari	0	0	0	0
499	Kab. Teluk Bintuni	0	0	0	0
500	Kab. Teluk Wondama	0	0	0	0

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
501	Kab. Kaimana	0	0	0	0
502	Kab. Manokwari Selatan	0	0	0	0
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	0	0
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0	0
505	Kab. Majene	0	0	0	0
506	Kab. Mamuju	0	0	0	0
507	Kab. Polewali Mandar	0	0	0	0
508	Kab. Mamasa	0	0	0	0
509	Kab. Pasangkayu	0	0	0	0
510	Kab. Mamuju Tengah	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	0
512	Kab. Bulungan	0	0	0	0
513	Kab. Malinau	0	0	0	0
514	Kab. Nunukan	0	0	0	0
515	Kota Tarakan	0	0	0	0
516	Kab. Tana Tidung	0	0	0	0
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	0	0	0
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0	0
520	Kab. Mappi	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
521	Kab. Asmat	0	0	0	0
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0	0
523	Kab. Mimika	0	0	0	0
524	Kab. Nabire	0	0	0	0
525	Kab. Paniai	0	0	0	0
526	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	0
527	Kab. Dogiyai	0	0	0	0
528	Kab. Puncak	0	0	0	0
529	Kab. Intan Jaya	0	0	0	0
530	Kab. Deiyai	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	0	0	0	0
533	Kab. Yahukimo	0	0	0	0
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	0	0
535	Kab. Tolikara	0	0	0	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	0
537	Kab. Yalimo	0	0	0	0
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	0	0
539	Kab. Nduga	0	0	0	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
541	Kab. Sorong	0	0	0	0
542	Kab. Sorong Selatan	0	0	0	0
543	Kab. Raja Ampat	0	0	0	0
544	Kab. Tambrauw	0	0	0	0
545	Kab. Maybrat	0	0	0	0
546	Kota Sorong	0	0	0	0
547	Selisih Lebih	763.305	246.680	19.781.994	20.791.979
JUMLAH NASIONAL		29.946.973	8.315.093	499.625.072	537.887.138

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
1	Provinsi Aceh	8.056.583
2	Kab. Aceh Barat	1.543.754
3	Kab. Aceh Besar	585.457
4	Kab. Aceh Selatan	1.774.615
5	Kab. Aceh Singkil	2.158.991
6	Kab. Aceh Tengah	556.094
7	Kab. Aceh Tenggara	1.409.539
8	Kab. Aceh Timur	2.309.224
9	Kab. Aceh Utara	1.959.053
10	Kab. Bireuen	1.343.917
11	Kab. Pidie	1.101.049
12	Kab. Simeulue	697.642
13	Kota Banda Aceh	400.000
14	Kota Sabang	0
15	Kota Langsa	1.615.787
16	Kota Lhokseumawe	953.568
17	Kab. Gayo Lues	916.439
18	Kab. Aceh Barat Daya	1.275.428
19	Kab. Aceh Jaya	1.284.547
20	Kab. Nagan Raya	2.523.047
21	Kab. Aceh Tamiang	2.385.014
22	Kab. Bener Meriah	917.604
23	Kab. Pidie Jaya	953.954
24	Kota Subulussalam	1.568.646
25	Provinsi Sumatera Utara	15.226.554
26	Kab. Asahan	4.336.441
27	Kab. Dairi	1.508.376
28	Kab. Deli Serdang	2.364.591
29	Kab. Karo	1.871.073
30	Kab. Labuhanbatu	3.666.930
31	Kab. Langkat	3.684.300
32	Kab. Mandailing Natal	2.416.277
33	Kab. Nias	400.000
34	Kab. Simalungun	3.657.005
35	Kab. Tapanuli Selatan	2.955.732
36	Kab. Tapanuli Tengah	2.062.904
37	Kab. Tapanuli Utara	1.545.079
38	Kab. Toba	1.476.687

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
39	Kota Binjai	400.000
40	Kota Medan	400.000
41	Kota Pematang Siantar	400.000
42	Kota Sibolga	400.000
43	Kota Tanjung Balai	400.000
44	Kota Tebing Tinggi	400.000
45	Kota Padang Sidempuan	1.352.829
46	Kab. Pakpak Bharat	956.861
47	Kab. Nias Selatan	611.378
48	Kab. Humbang Hasundutan	1.231.860
49	Kab. Serdang Bedagai	2.635.480
50	Kab. Samosir	400.000
51	Kab. Batu Bara	2.196.594
52	Kab. Padang Lawas	3.009.506
53	Kab. Padang Lawas Utara	3.913.229
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	4.209.488
55	Kab. Labuhanbatu Utara	4.099.612
56	Kab. Nias Utara	0
57	Kab. Nias Barat	400.000
58	Kota Gunungsitoli	0
59	Provinsi Sumatera Barat	6.912.499
60	Kab. Lima Puluh Kota	1.872.080
61	Kab. Agam	2.287.033
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0
63	Kab. Padang Pariaman	1.256.535
64	Kab. Pasaman	2.249.643
65	Kab. Pesisir Selatan	2.535.763
66	Kab. Sijunjung	2.012.579
67	Kab. Solok	2.041.419
68	Kab. Tanah Datar	1.165.003
69	Kota Bukit Tinggi	400.000
70	Kota Padang Panjang	400.000
71	Kota Padang	838.178
72	Kota Payakumbuh	400.000
73	Kota Sawahlunto	742.261
74	Kota Solok	1.295.600
75	Kota Pariaman	664.188
76	Kab. Pasaman Barat	3.681.097

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
77	Kab. Dharmasraya	3.016.441
78	Kab. Solok Selatan	2.294.640
79	Provinsi Riau	20.689.214
80	Kab. Bengkalis	6.706.550
81	Kab. Indragiri Hilir	5.305.118
82	Kab. Indragiri Hulu	6.057.350
83	Kab. Kampar	10.985.748
84	Kab. Kuantan Singingi	6.589.503
85	Kab. Pelalawan	8.111.296
86	Kab. Rokan Hilir	6.589.074
87	Kab. Rokan Hulu	10.425.149
88	Kab. Siak	7.535.366
89	Kota Dumai	2.924.485
90	Kota Pekanbaru	2.566.678
91	Kab. Kepulauan Meranti	1.626.557
92	Provinsi Jambi	7.150.703
93	Kab. Batang Hari	4.145.164
94	Kab. Bungo	3.191.081
95	Kab. Kerinci	1.429.188
96	Kab. Merangin	3.196.262
97	Kab. Muaro Jambi	4.537.221
98	Kab. Sarolangun	2.974.068
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.881.399
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.466.216
101	Kab. Tebo	4.433.428
102	Kota Jambi	400.000
103	Kota Sungai Penuh	400.000
104	Provinsi Sumatera Selatan	12.232.699
105	Kab. Lahat	2.105.017
106	Kab. Musi Banyuasin	6.512.756
107	Kab. Musi Rawas	4.098.153
108	Kab. Muara Enim	3.243.049
109	Kab. Ogan Komering Ilir	5.611.863
110	Kab. Ogan Komering Ulu	1.716.686
111	Kota Palembang	1.142.546
112	Kota Prabumulih	1.524.792
113	Kota Pagar Alam	1.010.711
114	Kota Lubuk Linggau	1.254.227

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
115	Kab. Banyuasin	5.746.187
116	Kab. Ogan Ilir	2.163.836
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2.053.906
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.120.314
119	Kab. Empat Lawang	1.271.869
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2.527.693
121	Kab. Musi Rawas Utara	2.691.586
122	Provinsi Bengkulu	5.566.984
123	Kab. Bengkulu Selatan	1.806.016
124	Kab. Bengkulu Utara	3.349.021
125	Kab. Rejang Lebong	1.779.016
126	Kota Bengkulu	1.320.503
127	Kab. Kaur	1.775.258
128	Kab. Seluma	2.339.834
129	Kab. Mukomuko	3.575.558
130	Kab. Lebong	991.283
131	Kab. Kepahiang	1.066.319
132	Kab. Bengkulu Tengah	2.180.143
133	Provinsi Lampung	4.336.812
134	Kab. Lampung Barat	1.144.957
135	Kab. Lampung Selatan	1.013.059
136	Kab. Lampung Tengah	1.703.618
137	Kab. Lampung Utara	996.070
138	Kab. Lampung Timur	1.119.438
139	Kab. Tanggamus	708.120
140	Kab. Tulang Bawang	1.700.097
141	Kab. Way Kanan	1.645.721
142	Kota Bandar Lampung	541.753
143	Kota Metro	400.000
144	Kab. Pesawaran	1.135.223
145	Kab. Pringsewu	775.912
146	Kab. Mesuji	2.288.709
147	Kab. Tulang Bawang Barat	1.540.831
148	Kab. Pesisir Barat	1.183.255
149	Provinsi DKI Jakarta	0
150	Provinsi Jawa Barat	2.096.828
151	Kab. Bandung	400.000
152	Kab. Bekasi	400.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
153	Kab. Bogor	1.265.005
154	Kab. Ciamis	400.000
155	Kab. Cianjur	590.837
156	Kab. Cirebon	0
157	Kab. Garut	721.428
158	Kab. Indramayu	400.000
159	Kab. Karawang	400.000
160	Kab. Kuningan	0
161	Kab. Majalengka	400.000
162	Kab. Purwakarta	400.000
163	Kab. Subang	1.242.740
164	Kab. Sukabumi	1.231.316
165	Kab. Sumedang	400.000
166	Kab. Tasikmalaya	708.487
167	Kota Bandung	0
168	Kota Bekasi	400.000
169	Kota Bogor	400.000
170	Kota Cirebon	0
171	Kota Depok	400.000
172	Kota Sukabumi	400.000
173	Kota Tasikmalaya	400.000
174	Kota Cimahi	0
175	Kota Banjar	628.390
176	Kab. Bandung Barat	400.000
177	Kab. Pangandaran	450.094
178	Provinsi Jawa Tengah	0
179	Kab. Banjarnegara	0
180	Kab. Banyumas	0
181	Kab. Batang	0
182	Kab. Blora	0
183	Kab. Boyolali	0
184	Kab. Brebes	0
185	Kab. Cilacap	400.000
186	Kab. Demak	0
187	Kab. Grobogan	0
188	Kab. Jepara	0
189	Kab. Karanganyar	0
190	Kab. Kebumen	0

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
191	Kab. Kendal	0
192	Kab. Klaten	0
193	Kab. Kudus	0
194	Kab. Magelang	0
195	Kab. Pati	0
196	Kab. Pekalongan	0
197	Kab. Pemalang	0
198	Kab. Purbalingga	0
199	Kab. Purworejo	0
200	Kab. Rembang	0
201	Kab. Semarang	0
202	Kab. Sragen	0
203	Kab. Sukoharjo	0
204	Kab. Tegal	0
205	Kab. Temanggung	0
206	Kab. Wonogiri	0
207	Kab. Wonosobo	0
208	Kota Magelang	0
209	Kota Pekalongan	0
210	Kota Salatiga	0
211	Kota Semarang	0
212	Kota Surakarta	0
213	Kota Tegal	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	0
215	Kab. Bantul	0
216	Kab. Gunung Kidul	0
217	Kab. Kulon Progo	0
218	Kab. Sleman	0
219	Kota Yogyakarta	0
220	Provinsi Jawa Timur	0
221	Kab. Bangkalan	0
222	Kab. Banyuwangi	0
223	Kab. Blitar	0
224	Kab. Bojonegoro	0
225	Kab. Bondowoso	0
226	Kab. Gresik	0
227	Kab. Jember	0
228	Kab. Jombang	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
229	Kab. Kediri	0
230	Kab. Lamongan	0
231	Kab. Lumajang	0
232	Kab. Madiun	0
233	Kab. Magetan	0
234	Kab. Malang	0
235	Kab. Mojokerto	0
236	Kab. Nganjuk	0
237	Kab. Ngawi	0
238	Kab. Pacitan	0
239	Kab. Pamekasan	0
240	Kab. Pasuruan	0
241	Kab. Ponorogo	0
242	Kab. Probolinggo	0
243	Kab. Sampang	0
244	Kab. Sidoarjo	0
245	Kab. Situbondo	0
246	Kab. Sumenep	0
247	Kab. Trenggalek	0
248	Kab. Tuban	0
249	Kab. Tulungagung	0
250	Kota Blitar	0
251	Kota Kediri	0
252	Kota Madiun	0
253	Kota Malang	0
254	Kota Mojokerto	0
255	Kota Pasuruan	0
256	Kota Probolinggo	0
257	Kota Surabaya	0
258	Kota Batu	0
259	Provinsi Kalimantan Barat	14.331.717
260	Kab. Bengkayang	3.332.663
261	Kab. Landak	4.311.901
262	Kab. Kapuas Hulu	2.672.059
263	Kab. Ketapang	12.949.473
264	Kab. Mempawah	1.830.486
265	Kab. Sambas	3.058.308
266	Kab. Sanggau	7.715.103

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
267	Kab. Sintang	5.540.431
268	Kota Pontianak	400.000
269	Kota Singkawang	1.253.007
270	Kab. Sekadau	3.814.089
271	Kab. Melawi	3.067.591
272	Kab. Kayong Utara	2.439.506
273	Kab. Kubu Raya	4.384.538
274	Provinsi Kalimantan Tengah	14.889.648
275	Kab. Barito Selatan	1.295.339
276	Kab. Barito Utara	2.353.530
277	Kab. Kapuas	4.292.414
278	Kab. Kotawaringin Barat	6.588.870
279	Kab. Kotawaringin Timur	9.257.093
280	Kota Palangkaraya	1.291.541
281	Kab. Katingan	5.062.175
282	Kab. Seruyan	9.093.484
283	Kab. Sukamara	4.107.644
284	Kab. Lamandau	5.375.050
285	Kab. Gunung Mas	3.140.533
286	Kab. Pulang Pisau	3.311.024
287	Kab. Murung Raya	1.502.262
288	Kab. Barito Timur	2.028.707
289	Provinsi Kalimantan Selatan	5.813.577
290	Kab. Banjar	1.926.264
291	Kab. Barito Kuala	2.100.956
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.621.039
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	400.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	1.397.489
295	Kab. Kotabaru	3.625.245
296	Kab. Tabalong	1.512.390
297	Kab. Tanah Laut	1.976.400
298	Kab. Tapin	1.981.147
299	Kota Banjarbaru	834.304
300	Kota Banjarmasin	785.410
301	Kab. Balangan	1.312.431
302	Kab. Tanah Bumbu	2.955.039
303	Provinsi Kalimantan Timur	10.686.006
304	Kab. Berau	4.818.175

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
305	Kab. Kutai Kartanegara	6.115.530
306	Kab. Kutai Barat	4.086.567
307	Kab. Kutai Timur	10.443.895
308	Kab. Paser	4.354.315
309	Kota Balikpapan	1.328.505
310	Kota Bontang	1.836.190
311	Kota Samarinda	1.236.063
312	Kab. Penajam Paser Utara	2.382.261
313	Kab. Mahakam Ulu	2.344.481
314	Provinsi Sulawesi Utara	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	0
316	Kab. Minahasa	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0
318	Kota Bitung	0
319	Kota Manado	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	0
321	Kab. Minahasa Selatan	0
322	Kota Tomohon	0
323	Kab. Minahasa Utara	0
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0
325	Kota Kotamobagu	0
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	3.615.970
331	Kab. Banggai	1.567.550
332	Kab. Banggai Kepulauan	0
333	Kab. Buol	1.354.099
334	Kab. Toli-Toli	1.089.784
335	Kab. Donggala	1.727.861
336	Kab. Morowali	1.890.976
337	Kab. Poso	1.459.183
338	Kota Palu	400.000
339	Kab. Parigi Moutong	1.060.739
340	Kab. Tojo Una Una	1.022.084
341	Kab. Sigi	1.045.066
342	Kab. Banggai Laut	0

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
343	Kab. Morowali Utara	2.186.868
344	Provinsi Sulawesi Selatan	2.708.503
345	Kab. Bantaeng	400.000
346	Kab. Barru	400.000
347	Kab. Bone	809.390
348	Kab. Bulukumba	400.000
349	Kab. Enrekang	492.008
350	Kab. Gowa	489.878
351	Kab. Jeneponto	400.000
352	Kab. Luwu	696.311
353	Kab. Luwu Utara	2.069.163
354	Kab. Maros	400.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	400.000
356	Kota Palopo	439.145
357	Kab. Luwu Timur	1.490.081
358	Kab. Pinrang	550.964
359	Kab. Sinjai	478.230
360	Kab. Kepulauan Selayar	0
361	Kab. Sidenreng Rappang	608.697
362	Kab. Soppeng	751.618
363	Kab. Takalar	400.000
364	Kab. Tana Toraja	400.000
365	Kab. Wajo	891.424
366	Kota Pare-pare	400.000
367	Kota Makassar	400.000
368	Kab. Toraja Utara	400.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.107.216
370	Kab. Buton	400.000
371	Kab. Konawe	1.350.836
372	Kab. Kolaka	963.470
373	Kab. Muna	756.052
374	Kota Kendari	515.062
375	Kota Bau-bau	0
376	Kab. Konawe Selatan	804.534
377	Kab. Bombana	662.634
378	Kab. Wakatobi	0
379	Kab. Kolaka Utara	400.000
380	Kab. Konawe Utara	1.047.032

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
381	Kab. Buton Utara	400.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	0
383	Kab. Kolaka Timur	1.115.653
384	Kab. Muna Barat	477.101
385	Kab. Buton Tengah	400.000
386	Kab. Buton Selatan	0
387	Provinsi Bali	0
388	Kab. Badung	0
389	Kab. Bangli	0
390	Kab. Buleleng	0
391	Kab. Gianyar	0
392	Kab. Jembrana	0
393	Kab. Karangasem	0
394	Kab. Klungkung	0
395	Kab. Tabanan	0
396	Kota Denpasar	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0
398	Kab. Bima	0
399	Kab. Dompu	0
400	Kab. Lombok Barat	0
401	Kab. Lombok Tengah	0
402	Kab. Lombok Timur	0
403	Kab. Sumbawa	0
404	Kota Mataram	0
405	Kota Bima	0
406	Kab. Sumbawa Barat	0
407	Kab. Lombok Utara	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0
409	Kab. Alor	0
410	Kab. Belu	0
411	Kab. Ende	0
412	Kab. Flores Timur	0
413	Kab. Kupang	0
414	Kab. Lembata	0
415	Kab. Manggarai	0
416	Kab. Ngada	0
417	Kab. Sikka	0
418	Kab. Sumba Barat	0

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
419	Kab. Sumba Timur	0
420	Kab. Timor Tengah Selatan	0
421	Kab. Timor Tengah Utara	0
422	Kota Kupang	0
423	Kab. Rote Ndao	0
424	Kab. Manggarai Barat	0
425	Kab. Nagekeo	0
426	Kab. Sumba Barat Daya	0
427	Kab. Sumba Tengah	0
428	Kab. Manggarai Timur	0
429	Kab. Sabu Raijua	0
430	Kab. Malaka	0
431	Provinsi Maluku	465.034
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0
433	Kab. Maluku Tengah	1.084.951
434	Kab. Maluku Tenggara	0
435	Kab. Buru	0
436	Kota Ambon	400.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	400.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	519.957
439	Kab. Kepulauan Aru	0
440	Kota Tual	0
441	Kab. Maluku Barat Daya	0
442	Kab. Buru Selatan	0
443	Provinsi Papua	996.702
444	Kab. Biak Numfor	0
445	Kab. Jayapura	1.643.171
446	Kab. Kepulauan Yapen	0
447	Kota Jayapura	400.000
448	Kab. Sarmi	400.000
449	Kab. Keerom	1.597.236
450	Kab. Waropen	400.000
451	Kab. Supiori	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0
453	Provinsi Maluku Utara	400.000
454	Kab. Halmahera Tengah	400.000
455	Kota Ternate	0
456	Kab. Halmahera Barat	0

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
457	Kab. Halmahera Timur	0
458	Kab. Halmahera Selatan	1.099.163
459	Kab. Halmahera Utara	0
460	Kab. Kepulauan Sula	0
461	Kota Tidore Kepulauan	400.000
462	Kab. Pulau Morotai	0
463	Kab. Pulau Taliabu	0
464	Provinsi Banten	634.479
465	Kab. Lebak	1.251.160
466	Kab. Pandeglang	988.410
467	Kab. Serang	400.000
468	Kab. Tangerang	400.000
469	Kota Cilegon	0
470	Kota Tangerang	0
471	Kota Serang	0
472	Kota Tangerang Selatan	400.000
473	Provinsi Bangka Belitung	3.513.366
474	Kab. Bangka	2.893.550
475	Kab. Belitung	2.543.232
476	Kota Pangkal Pinang	400.197
477	Kab. Bangka Selatan	1.576.551
478	Kab. Bangka Tengah	2.141.677
479	Kab. Bangka Barat	2.027.639
480	Kab. Belitung Timur	2.621.997
481	Provinsi Gorontalo	915.450
482	Kab. Boalemo	1.415.217
483	Kab. Gorontalo	842.381
484	Kota Gorontalo	400.000
485	Kab. Pohuwato	972.949
486	Kab. Bone Bolango	400.000
487	Kab. Gorontalo Utara	400.000
488	Provinsi Kepulauan Riau	668.138
489	Kab. Natuna	0
490	Kab. Kepulauan Anambas	0
491	Kab. Karimun	1.134.839
492	Kota Batam	0
493	Kota Tanjung Pinang	400.000
494	Kab. Lingga	0

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
495	Kab. Bintan	1.134.980
496	Provinsi Papua Barat	989.340
497	Kab. Fak Fak	1.268.119
498	Kab. Manokwari	979.526
499	Kab. Teluk Bintuni	875.929
500	Kab. Teluk Wondama	400.000
501	Kab. Kaimana	400.000
502	Kab. Manokwari Selatan	400.000
503	Kab. Pegunungan Arfak	400.000
504	Provinsi Sulawesi Barat	2.194.535
505	Kab. Majene	575.693
506	Kab. Mamuju	1.736.068
507	Kab. Polewali Mandar	717.734
508	Kab. Mamasa	400.000
509	Kab. Pasangkayu	2.398.179
510	Kab. Mamuju Tengah	1.740.286
511	Provinsi Kalimantan Utara	2.394.993
512	Kab. Bulungan	2.751.164
513	Kab. Malinau	3.031.131
514	Kab. Nunukan	2.816.980
515	Kota Tarakan	0
516	Kab. Tana Tidung	1.732.563
517	Provinsi Papua Selatan	1.241.689
518	Kab. Merauke	2.342.720
519	Kab. Boven Digoel	1.895.853
520	Kab. Mappi	477.931
521	Kab. Asmat	400.000
522	Provinsi Papua Tengah	664.123
523	Kab. Mimika	626.141
524	Kab. Nabire	1.323.380
525	Kab. Paniai	400.000
526	Kab. Puncak Jaya	0
527	Kab. Dogiyai	400.000
528	Kab. Puncak	400.000
529	Kab. Intan Jaya	400.000
530	Kab. Deiyai	400.000
531	Provinsi Papua Pegunungan	0
532	Kab. Jayawijaya	0

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
533	Kab. Yahukimo	400.000
534	Kab. Pegunungan Bintang	400.000
535	Kab. Tolikara	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0
537	Kab. Yalimo	400.000
538	Kab. Lanny Jaya	0
539	Kab. Nduga	400.000
540	Provinsi Papua Barat Daya	622.358
541	Kab. Sorong	1.048.827
542	Kab. Sorong Selatan	1.029.852
543	Kab. Raja Ampat	400.000
544	Kab. Tambrauw	400.000
545	Kab. Maybrat	400.000
546	Kota Sorong	400.000
547	Selisih Lebih	15.067.980
JUMLAH NASIONAL		774.691.607

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Provinsi Aceh	1.767.514.725	0	16.828.437	26.674.135	1.811.017.297
2	Kab. Aceh Barat	611.706.363	0	9.754.310	14.591.766	636.052.439
3	Kab. Aceh Besar	876.503.215	0	6.748.793	21.345.317	904.597.325
4	Kab. Aceh Selatan	565.432.543	0	10.644.259	12.431.077	588.507.879
5	Kab. Aceh Singkil	448.029.473	0	10.458.882	10.133.340	468.621.695
6	Kab. Aceh Tengah	668.114.267	0	11.156.650	15.637.753	694.908.670
7	Kab. Aceh Tenggara	595.456.732	0	12.206.535	12.357.143	620.020.410
8	Kab. Aceh Timur	997.663.491	0	18.620.966	22.992.424	1.039.276.881
9	Kab. Aceh Utara	1.155.110.652	0	21.564.614	26.925.136	1.203.600.402
10	Kab. Bireuen	977.065.341	0	16.728.067	15.867.697	1.009.661.105

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
11	Kab. Pidie	1.039.311.149	0	16.315.213	26.504.874	1.082.131.236
12	Kab. Simeulue	459.346.652	0	8.404.860	9.663.784	477.415.296
13	Kota Banda Aceh	543.944.009	0	5.777.204	8.908.130	558.629.343
14	Kota Sabang	298.874.402	0	2.633.520	6.874.076	308.381.998
15	Kota Langsa	401.762.214	0	3.339.757	9.371.374	414.473.345
16	Kota Lhokseumawe	367.358.455	0	3.582.080	8.984.618	379.925.153
17	Kab. Gayo Lues	381.470.505	0	6.062.668	7.118.588	394.651.761
18	Kab. Aceh Barat Daya	474.829.228	0	8.315.093	10.170.525	493.314.846
19	Kab. Aceh Jaya	403.986.434	0	3.550.697	7.719.218	415.256.349
20	Kab. Nagan Raya	540.462.810	0	9.137.918	11.454.538	561.055.266

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
21	Kab. Aceh Tamiang	569.752.307	0	4.967.740	13.359.790	588.079.837
22	Kab. Bener Meriah	507.146.895	0	4.039.195	6.384.971	517.571.061
23	Kab. Pidie Jaya	456.432.074	0	7.312.893	10.962.073	474.707.040
24	Kota Subulussalam	270.316.461	0	6.124.608	5.602.302	282.043.371
25	Provinsi Sumatera Utara	2.516.619.123	0	60.597.918	25.674.574	2.602.891.615
26	Kab. Asahan	745.512.839	5.400.000	13.003.665	19.448.375	783.364.879
27	Kab. Dairi	516.844.986	1.600.000	4.870.351	7.150.432	530.465.769
28	Kab. Deli Serdang	1.493.400.794	2.800.000	14.545.924	26.056.427	1.536.803.145
29	Kab. Karo	689.176.039	2.000.000	6.396.128	5.313.176	702.885.343
30	Kab. Labuhanbatu	567.706.433	4.600.000	10.446.346	14.278.869	597.031.648

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
31	Kab. Langkat	1.061.177.897	7.400.000	18.551.963	28.356.409	1.115.486.269
32	Kab. Mandailing Natal	895.458.954	5.400.000	17.821.232	20.093.498	938.773.684
33	Kab. Nias	399.733.600	0	4.225.781	7.951.112	411.910.493
34	Kab. Simalungun	1.169.183.735	5.400.000	21.823.603	29.718.609	1.226.125.947
35	Kab. Tapanuli Selatan	551.656.676	7.400.000	5.215.548	12.484.371	576.756.595
36	Kab. Tapanuli Tengah	538.399.137	11.200.000	11.057.405	13.616.857	574.273.399
37	Kab. Tapanuli Utara	645.892.636	2.200.000	7.340.491	14.179.789	669.612.916
38	Kab. Toba	632.025.038	2.600.000	6.761.507	13.981.735	655.368.280
39	Kota Binjai	458.877.407	7.400.000	4.697.797	7.970.167	478.945.371
40	Kota Medan	1.689.600.132	30.200.000	14.684.899	0	1.734.485.031

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
41	Kota Pematang Siantar	473.823.519	10.600.000	4.829.397	7.779.513	497.032.429
42	Kota Sibolga	332.209.869	3.400.000	3.754.082	8.820.752	348.184.703
43	Kota Tanjung Balai	339.905.155	6.200.000	2.974.237	8.879.561	357.958.953
44	Kota Tebing Tinggi	345.709.902	7.000.000	3.700.539	0	356.410.441
45	Kota Padang Sidempuan	391.661.101	7.400.000	3.658.926	9.912.216	412.632.243
46	Kab. Pakpak Bharat	281.968.634	0	2.111.669	4.636.132	288.716.435
47	Kab. Nias Selatan	644.883.131	400.000	21.637.525	15.758.107	682.678.763
48	Kab. Humbang Hasundutan	485.215.954	200.000	5.421.598	9.973.240	500.810.792
49	Kab. Serdang Bedagai	729.367.302	1.200.000	6.823.489	19.095.404	756.486.195
50	Kab. Samosir	396.494.784	1.200.000	0	7.920.188	405.614.972

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
51	Kab. Batu Bara	483.090.419	2.000.000	9.487.603	12.616.151	507.194.173
52	Kab. Padang Lawas	516.228.505	200.000	9.898.978	11.346.754	537.674.237
53	Kab. Padang Lawas Utara	534.060.631	400.000	14.201.655	11.836.212	560.498.498
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	405.388.594	400.000	3.609.302	9.564.238	418.962.134
55	Kab. Labuhanbatu Utara	469.476.260	1.600.000	8.188.272	11.556.313	490.820.845
56	Kab. Nias Utara	312.721.196	200.000	5.757.050	6.104.546	324.782.792
57	Kab. Nias Barat	308.473.857	0	2.972.092	5.823.943	317.269.892
58	Kota Gunungsitoli	337.090.813	600.000	3.914.268	4.876.821	346.481.902
59	Provinsi Sumatera Barat	1.634.400.415	0	18.253.722	24.038.246	1.676.692.383
60	Kab. Lima Puluh Kota	627.815.193	0	5.321.897	15.148.509	648.285.599

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
61	Kab. Agam	727.215.104	0	5.969.616	11.332.237	744.516.957
62	Kab. Kepulauan Mentawai	401.448.587	0	9.161.497	6.452.986	417.063.070
63	Kab. Padang Pariaman	717.498.413	0	5.835.798	15.663.535	738.997.746
64	Kab. Pasaman	566.710.737	0	5.755.946	13.322.116	585.788.799
65	Kab. Pesisir Selatan	913.606.637	0	15.826.404	13.295.904	942.728.945
66	Kab. Sijunjung	517.397.218	0	5.320.612	11.520.997	534.238.827
67	Kab. Solok	597.034.586	0	5.773.750	13.971.912	616.780.248
68	Kab. Tanah Datar	644.062.792	0	4.941.129	14.704.476	663.708.397
69	Kota Bukit Tinggi	364.380.154	4.800.000	0	8.948.053	378.128.207
70	Kota Padang Panjang	305.085.061	3.200.000	0	7.475.267	315.760.328

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
71	Kota Padang	1.018.306.798	20.800.000	10.403.864	18.385.961	1.067.896.623
72	Kota Payakumbuh	355.641.598	9.400.000	0	8.467.293	373.508.891
73	Kota Sawahlunto	304.876.310	2.000.000	2.360.931	4.031.986	313.269.227
74	Kota Solok	323.112.686	2.600.000	3.368.926	5.029.075	334.110.687
75	Kota Pariaman	324.021.851	3.200.000	3.292.655	7.571.665	338.086.171
76	Kab. Pasaman Barat	542.589.672	0	11.429.480	13.340.700	567.359.852
77	Kab. Dharmasraya	485.961.640	0	4.631.165	6.867.327	497.460.132
78	Kab. Solok Selatan	392.843.377	0	3.035.185	7.777.766	403.656.328
79	Provinsi Riau	1.295.177.479	0	13.308.446	12.336.789	1.320.822.714
80	Kab. Bengkalis	491.336.103	3.800.000	5.122.243	7.964.676	508.223.022

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
81	Kab. Indragiri Hilir	920.375.576	7.800.000	16.388.645	24.102.550	968.666.771
82	Kab. Indragiri Hulu	625.542.023	3.200.000	6.131.847	14.003.009	648.876.879
83	Kab. Kampar	1.040.521.252	1.600.000	20.901.457	15.933.390	1.078.956.099
84	Kab. Kuantan Singingi	636.411.850	2.200.000	5.645.214	13.886.032	658.143.096
85	Kab. Pelalawan	641.769.045	2.800.000	6.865.040	14.617.682	666.051.767
86	Kab. Rokan Hilir	684.435.130	5.000.000	14.187.575	16.374.427	719.997.132
87	Kab. Rokan Hulu	755.023.342	1.200.000	7.978.451	16.917.488	781.119.281
88	Kab. Siak	688.163.063	1.800.000	6.897.339	10.330.845	707.191.247
89	Kota Dumai	405.681.847	7.200.000	3.851.032	3.144.558	419.877.437
90	Kota Pekanbaru	828.052.827	16.600.000	0	14.544.179	859.197.006

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
91	Kab. Kepulauan Meranti	539.425.019	1.000.000	9.070.361	7.887.667	557.383.047
92	Provinsi Jambi	1.088.871.101	0	20.578.643	11.077.226	1.120.526.970
93	Kab. Batang Hari	483.140.689	2.800.000	4.740.372	7.265.752	497.946.813
94	Kab. Bungo	571.329.031	2.400.000	5.441.156	14.097.421	593.267.608
95	Kab. Kerinci	614.723.130	400.000	5.490.226	9.275.321	629.888.677
96	Kab. Merangin	704.835.384	2.000.000	13.637.214	16.554.865	737.027.463
97	Kab. Muaro Jambi	542.822.541	1.000.000	9.667.167	13.741.296	567.231.004
98	Kab. Sarolangun	594.164.520	1.800.000	6.081.688	13.006.552	615.052.760
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	443.602.047	4.000.000	8.083.482	10.133.476	465.819.005
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	424.204.188	4.000.000	3.634.183	9.148.128	440.986.499

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
101	Kab. Tebo	442.584.447	1.400.000	4.175.904	10.814.880	458.975.231
102	Kota Jambi	660.905.731	13.600.000	6.661.598	11.865.527	693.032.856
103	Kota Sungai Penuh	389.804.204	800.000	3.946.746	9.513.230	404.064.180
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.395.112.058	0	30.441.356	22.010.112	1.447.563.526
105	Kab. Lahat	909.103.798	3.600.000	16.581.583	21.608.762	950.894.143
106	Kab. Musi Banyuasin	543.287.704	2.600.000	6.129.278	13.229.405	565.246.387
107	Kab. Musi Rawas	640.671.818	2.600.000	5.745.575	9.802.265	658.819.658
108	Kab. Muara Enim	589.595.342	2.000.000	6.061.216	14.799.114	612.455.672
109	Kab. Ogan Komering Ilir	1.013.181.778	2.600.000	10.619.163	24.856.763	1.051.257.704
110	Kab. Ogan Komering Ulu	674.807.940	2.800.000	13.022.001	11.254.296	701.884.237

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
111	Kota Palembang	1.290.673.530	21.400.000	0	0	1.312.073.530
112	Kota Prabumulih	445.171.593	6.600.000	4.493.637	3.573.170	459.838.400
113	Kota Pagar Alam	358.456.239	7.000.000	3.176.099	5.503.151	374.135.489
114	Kota Lubuk Linggau	371.139.447	14.400.000	4.157.217	6.541.162	396.237.826
115	Kab. Banyuasin	1.063.034.206	5.000.000	22.826.924	18.044.378	1.108.905.508
116	Kab. Ogan Ilir	511.708.575	2.800.000	10.689.795	12.655.352	537.853.722
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	935.942.119	1.400.000	8.730.804	7.949.843	954.022.766
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	630.363.500	1.400.000	11.361.144	15.755.801	658.880.445
119	Kab. Empat Lawang	484.598.644	1.800.000	7.168.884	12.581.116	506.148.644
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	369.278.031	1.200.000	8.195.000	5.903.234	384.576.265

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
121	Kab. Musi Rawas Utara	304.777.995	1.400.000	6.259.009	7.462.385	319.899.389
122	Provinsi Bengkulu	1.007.965.071	0	18.666.429	0	1.026.631.500
123	Kab. Bengkulu Selatan	525.898.133	3.200.000	4.279.155	6.859.460	540.236.748
124	Kab. Bengkulu Utara	702.469.137	1.000.000	7.032.156	11.567.906	722.069.199
125	Kab. Rejang Lebong	508.651.469	6.800.000	4.741.544	8.316.888	528.509.901
126	Kota Bengkulu	535.693.239	13.400.000	5.253.319	8.593.284	562.939.842
127	Kab. Kaur	478.082.232	600.000	8.804.334	6.929.660	494.416.226
128	Kab. Seluma	567.342.366	4.000.000	9.993.435	13.525.742	594.861.543
129	Kab. Mukomuko	473.071.087	600.000	4.485.486	7.122.560	485.279.133
130	Kab. Lebong	382.018.850	2.200.000	6.579.568	5.615.214	396.413.632

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
131	Kab. Kepahiang	395.902.920	2.400.000	6.476.270	6.165.705	410.944.895
132	Kab. Bengkulu Tengah	406.387.078	200.000	3.574.079	9.396.429	419.557.586
133	Provinsi Lampung	1.662.482.982	0	34.566.825	17.675.709	1.714.725.516
134	Kab. Lampung Barat	489.492.437	1.000.000	8.606.629	8.154.149	507.253.215
135	Kab. Lampung Selatan	948.930.350	800.000	18.146.491	8.258.655	976.135.496
136	Kab. Lampung Tengah	1.226.907.912	2.000.000	11.850.413	21.710.977	1.262.469.302
137	Kab. Lampung Utara	878.586.904	3.000.000	15.692.537	7.539.794	904.819.235
138	Kab. Lampung Timur	1.040.502.519	0	19.148.473	9.140.074	1.068.791.066
139	Kab. Tanggamus	805.079.075	600.000	15.134.787	13.818.909	834.632.771
140	Kab. Tulang Bawang	587.215.395	800.000	5.979.927	9.564.800	603.560.122

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
141	Kab. Way Kanan	591.791.160	1.200.000	11.838.496	14.548.935	619.378.591
142	Kota Bandar Lampung	916.968.452	25.200.000	9.551.627	16.953.839	968.673.918
143	Kota Metro	377.530.705	4.400.000	4.256.281	2.945.498	389.132.484
144	Kab. Pesawaran	531.299.756	0	9.271.120	8.868.610	549.439.486
145	Kab. Pringsewu	567.382.416	1.000.000	5.333.188	4.745.620	578.461.224
146	Kab. Mesuji	387.892.383	0	3.952.284	6.185.241	398.029.908
147	Kab. Tulang Bawang Barat	376.745.926	600.000	7.273.181	3.092.517	387.711.624
148	Kab. Pesisir Barat	364.131.568	400.000	3.463.441	8.672.583	376.667.592
149	Provinsi DKI Jakarta	226.345.202	53.400.000	0	6.083.924	285.829.126
150	Provinsi Jawa Barat	3.262.933.542	0	48.727.551	50.371.765	3.362.032.858

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
151	Kab. Bandung	2.066.669.373	2.000.000	25.823.258	44.214.154	2.138.706.785
152	Kab. Bekasi	1.218.535.742	1.600.000	16.387.596	39.104.877	1.275.628.215
153	Kab. Bogor	2.150.768.082	3.800.000	28.322.144	69.867.325	2.252.757.551
154	Kab. Ciamis	1.106.914.440	1.400.000	0	23.259.890	1.131.574.330
155	Kab. Cianjur	1.659.684.156	1.200.000	21.727.879	52.037.027	1.734.649.062
156	Kab. Cirebon	1.663.361.963	2.400.000	18.428.487	36.097.860	1.720.288.310
157	Kab. Garut	1.915.916.055	4.200.000	26.089.847	60.864.036	2.007.069.938
158	Kab. Indramayu	1.337.652.689	1.600.000	31.993.939	44.467.484	1.415.714.112
159	Kab. Karawang	1.255.147.123	2.400.000	15.355.127	39.078.173	1.311.980.423
160	Kab. Kuningan	1.209.403.736	3.000.000	0	25.065.179	1.237.468.915

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
161	Kab. Majalengka	1.289.800.601	2.600.000	14.359.314	27.203.749	1.333.963.664
162	Kab. Purwakarta	706.283.407	1.800.000	8.642.178	22.014.245	738.739.830
163	Kab. Subang	1.082.004.999	1.600.000	12.805.758	33.970.652	1.130.381.409
164	Kab. Sukabumi	1.485.277.670	1.000.000	17.939.845	47.853.304	1.552.070.819
165	Kab. Sumedang	1.147.513.165	1.400.000	13.203.260	11.838.269	1.173.954.694
166	Kab. Tasikmalaya	1.437.144.225	0	15.963.629	46.402.619	1.499.510.473
167	Kota Bandung	1.440.839.505	30.200.000	0	31.272.827	1.502.312.332
168	Kota Bekasi	1.557.118.353	11.200.000	0	14.040.488	1.582.358.841
169	Kota Bogor	683.692.897	13.600.000	8.569.112	23.535.720	729.397.729
170	Kota Cirebon	491.907.274	4.400.000	0	15.243.134	511.550.408

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
171	Kota Depok	933.318.213	12.600.000	0	9.377.766	955.295.979
172	Kota Sukabumi	406.541.449	6.600.000	0	13.232.376	426.373.825
173	Kota Tasikmalaya	625.632.618	13.800.000	0	20.188.191	659.620.809
174	Kota Cimahi	480.406.775	3.000.000	0	10.688.833	494.095.608
175	Kota Banjar	387.613.479	1.800.000	0	0	389.413.479
176	Kab. Bandung Barat	1.030.126.430	0	12.193.762	34.227.227	1.076.547.419
177	Kab. Pangandaran	503.015.581	0	4.539.097	4.908.640	512.463.318
178	Provinsi Jawa Tengah	3.221.471.619	0	43.948.075	49.959.475	3.315.379.169
179	Kab. Banjarnegara	952.017.152	2.400.000	0	9.852.902	964.270.054
180	Kab. Banyumas	1.411.361.788	6.000.000	0	0	1.417.361.788

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
181	Kab. Batang	771.534.915	1.800.000	0	16.353.612	789.688.527
182	Kab. Blora	865.974.136	4.800.000	0	17.701.030	888.475.166
183	Kab. Boyolali	824.519.917	1.200.000	0	18.041.879	843.761.796
184	Kab. Brebes	1.431.459.603	1.000.000	14.666.953	31.211.939	1.478.338.495
185	Kab. Cilacap	1.210.560.754	3.000.000	0	12.874.645	1.226.435.399
186	Kab. Demak	853.410.216	1.200.000	0	8.849.865	863.460.081
187	Kab. Grobogan	1.016.484.919	1.400.000	0	10.693.528	1.028.578.447
188	Kab. Jepara	971.296.210	2.200.000	0	0	973.496.210
189	Kab. Karanganyar	809.150.956	3.000.000	0	8.233.900	820.384.856
190	Kab. Kebumen	1.300.648.800	2.200.000	0	13.622.731	1.316.471.531

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
191	Kab. Kendal	952.863.778	4.000.000	0	9.741.367	966.605.145
192	Kab. Klaten	1.233.285.550	2.000.000	0	0	1.235.285.550
193	Kab. Kudus	663.634.292	1.800.000	0	14.448.034	679.882.326
194	Kab. Magelang	1.072.581.117	1.000.000	0	11.466.420	1.085.047.537
195	Kab. Pati	1.204.863.452	1.000.000	0	0	1.205.863.452
196	Kab. Pekalongan	993.694.155	2.600.000	0	20.850.986	1.017.145.141
197	Kab. Pemalang	1.156.708.919	2.200.000	13.297.197	37.937.188	1.210.143.304
198	Kab. Purbalingga	927.040.036	3.000.000	0	0	930.040.036
199	Kab. Purworejo	1.123.465.020	5.000.000	0	0	1.128.465.020
200	Kab. Rembang	924.444.483	1.400.000	0	0	925.844.483

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
201	Kab. Semarang	828.808.789	5.400.000	0	0	834.208.789
202	Kab. Sragen	945.485.314	2.400.000	0	9.521.803	957.407.117
203	Kab. Sukoharjo	757.081.391	3.400.000	0	0	760.481.391
204	Kab. Tegal	1.015.679.558	1.200.000	10.667.601	11.040.517	1.038.587.676
205	Kab. Temanggung	820.558.578	4.600.000	0	8.604.122	833.762.700
206	Kab. Wonogiri	1.122.797.880	8.600.000	0	0	1.131.397.880
207	Kab. Wonosobo	827.119.980	5.800.000	0	0	832.919.980
208	Kota Magelang	379.596.907	3.400.000	0	0	382.996.907
209	Kota Pekalongan	383.993.365	5.400.000	0	8.340.275	397.733.640
210	Kota Salatiga	391.131.260	4.600.000	0	0	395.731.260

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
211	Kota Semarang	1.030.821.894	35.400.000	0	0	1.066.221.894
212	Kota Surakarta	709.651.145	10.800.000	0	7.217.232	727.668.377
213	Kota Tegal	407.700.574	5.400.000	0	4.056.096	417.156.670
214	Provinsi DI Yogyakarta	1.094.517.680	0	0	9.235.034	1.103.752.714
215	Kab. Bantul	905.814.689	0	0	8.649.465	914.464.154
216	Kab. Gunung Kidul	920.701.888	0	0	8.808.971	929.510.859
217	Kab. Kulon Progo	645.580.492	200.000	0	0	645.780.492
218	Kab. Sleman	842.391.984	0	0	8.537.741	850.929.725
219	Kota Yogyakarta	552.272.203	9.000.000	0	5.518.565	566.790.768
220	Provinsi Jawa Timur	3.485.291.064	0	47.158.102	37.306.334	3.569.755.500

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
221	Kab. Bangkalan	912.726.890	1.600.000	23.173.806	18.785.709	956.286.405
222	Kab. Banyuwangi	1.161.934.855	5.600.000	0	23.113.149	1.190.648.004
223	Kab. Blitar	999.976.770	5.600.000	0	10.374.038	1.015.950.808
224	Kab. Bojonegoro	1.196.180.546	2.200.000	0	26.307.358	1.224.687.904
225	Kab. Bondowoso	866.288.584	2.000.000	8.095.958	16.215.999	892.600.541
226	Kab. Gresik	784.695.092	5.200.000	0	8.539.195	798.434.287
227	Kab. Jember	1.580.615.988	4.400.000	15.187.718	49.851.157	1.650.054.863
228	Kab. Jombang	1.039.663.998	800.000	0	10.904.285	1.051.368.283
229	Kab. Kediri	1.263.134.434	200.000	0	13.327.596	1.276.662.030
230	Kab. Lamongan	1.320.382.056	2.400.000	0	14.661.525	1.337.443.581

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
231	Kab. Lumajang	800.348.018	1.400.000	0	25.157.584	826.905.602
232	Kab. Madiun	853.435.562	1.600.000	0	8.550.185	863.585.747
233	Kab. Magetan	878.999.462	5.600.000	0	0	884.599.462
234	Kab. Malang	1.534.101.917	2.400.000	0	32.925.246	1.569.427.163
235	Kab. Mojokerto	794.223.794	1.000.000	0	8.076.999	803.300.793
236	Kab. Nganjuk	1.007.401.745	4.000.000	0	9.955.095	1.021.356.840
237	Kab. Ngawi	941.697.392	800.000	0	0	942.497.392
238	Kab. Pacitan	736.736.259	1.000.000	0	6.522.522	744.258.781
239	Kab. Pamekasan	706.265.922	2.200.000	13.978.879	21.891.561	744.336.362
240	Kab. Pasuruan	1.015.580.006	4.800.000	10.327.527	32.118.998	1.062.826.531

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
241	Kab. Ponorogo	949.763.616	5.200.000	0	10.187.730	965.151.346
242	Kab. Probolinggo	997.419.765	1.000.000	9.733.801	32.559.225	1.040.712.791
243	Kab. Sampang	795.705.134	1.200.000	17.966.552	25.538.409	840.410.095
244	Kab. Sidoarjo	1.063.529.552	5.600.000	0	11.180.995	1.080.310.547
245	Kab. Situbondo	719.357.758	800.000	6.876.391	13.865.064	740.899.213
246	Kab. Sumenep	1.208.574.751	800.000	18.866.903	41.615.177	1.269.856.831
247	Kab. Trenggalek	903.524.354	1.000.000	0	0	904.524.354
248	Kab. Tuban	865.937.414	3.400.000	0	19.096.762	888.434.176
249	Kab. Tulungagung	1.358.133.853	2.800.000	0	26.201.245	1.387.135.098
250	Kota Blitar	373.074.733	4.200.000	0	0	377.274.733

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
251	Kota Kediri	497.805.380	9.200.000	0	9.842.012	516.847.392
252	Kota Madiun	429.715.143	5.400.000	0	0	435.115.143
253	Kota Malang	688.723.774	11.400.000	0	13.617.560	713.741.334
254	Kota Mojokerto	367.970.906	3.600.000	0	0	371.570.906
255	Kota Pasuruan	365.307.590	6.800.000	0	7.630.799	379.738.389
256	Kota Probolinggo	455.498.930	5.800.000	5.343.294	14.074.283	480.716.507
257	Kota Surabaya	1.144.312.392	30.600.000	0	25.828.041	1.200.740.433
258	Kota Batu	408.805.338	1.000.000	0	4.057.814	413.863.152
259	Provinsi Kalimantan Barat	1.549.912.938	0	38.003.170	16.571.879	1.604.487.987
260	Kab. Bengkayang	571.620.135	400.000	10.752.938	10.700.639	593.473.712

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
261	Kab. Landak	605.276.164	0	11.504.426	11.564.377	628.344.967
262	Kab. Kapuas Hulu	771.743.704	800.000	13.139.601	13.456.738	799.140.043
263	Kab. Ketapang	1.005.997.022	1.800.000	17.851.939	27.363.395	1.053.012.356
264	Kab. Mempawah	473.990.735	1.400.000	7.521.241	14.553.129	497.465.105
265	Kab. Sambas	867.166.988	0	16.565.101	26.354.062	910.086.151
266	Kab. Sanggau	770.558.120	1.200.000	14.198.614	22.993.209	808.949.943
267	Kab. Sintang	895.076.179	3.200.000	16.139.133	24.220.553	938.635.865
268	Kota Pontianak	701.813.288	5.800.000	6.516.025	22.951.326	737.080.639
269	Kota Singkawang	413.600.733	5.200.000	3.842.417	4.075.781	426.718.931
270	Kab. Sekadau	409.545.810	0	11.829.827	11.833.721	433.209.358

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
271	Kab. Melawi	447.043.040	0	7.865.520	11.671.714	466.580.274
272	Kab. Kayong Utara	377.943.949	0	6.889.737	10.934.221	395.767.907
273	Kab. Kubu Raya	774.928.999	0	13.483.225	24.817.101	813.229.325
274	Provinsi Kalimantan Tengah	1.217.091.938	0	13.145.076	18.602.419	1.248.839.433
275	Kab. Barito Selatan	486.326.588	1.400.000	3.055.394	11.596.784	502.378.766
276	Kab. Barito Utara	778.840.833	2.000.000	12.436.640	20.572.462	813.849.935
277	Kab. Kapuas	780.067.955	3.400.000	11.304.880	20.569.716	815.342.551
278	Kab. Kotawaringin Barat	564.019.228	2.600.000	5.144.007	9.821.764	581.584.999
279	Kab. Kotawaringin Timur	863.483.343	3.400.000	8.164.741	22.267.633	897.315.717
280	Kota Palangkaraya	519.785.030	6.000.000	3.931.593	15.325.562	545.042.185

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
281	Kab. Katingan	648.413.732	1.400.000	11.800.161	17.334.445	678.948.338
282	Kab. Seruyan	582.567.245	600.000	5.543.967	13.469.069	602.180.281
283	Kab. Sukamara	338.985.822	600.000	5.156.531	4.978.853	349.721.206
284	Kab. Lamandau	423.108.935	600.000	3.530.047	10.949.895	438.188.877
285	Kab. Gunung Mas	576.754.368	2.600.000	11.487.422	14.127.920	604.969.710
286	Kab. Pulang Pisau	423.268.408	800.000	6.487.219	10.116.139	440.671.766
287	Kab. Murung Raya	756.590.956	1.800.000	12.662.083	17.532.999	788.586.038
288	Kab. Barito Timur	484.442.627	600.000	3.495.909	12.029.126	500.567.662
289	Provinsi Kalimantan Selatan	981.208.541	0	10.174.728	5.514.962	996.898.231
290	Kab. Banjar	1.118.802.973	2.600.000	8.270.301	35.882.953	1.165.556.227

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
291	Kab. Barito Kuala	740.430.373	1.200.000	6.047.376	7.139.491	754.817.240
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	720.483.304	800.000	5.073.801	13.850.844	740.207.949
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	721.096.650	1.600.000	0	14.144.843	736.841.493
294	Kab. Hulu Sungai Utara	723.129.592	1.000.000	0	23.369.306	747.498.898
295	Kab. Kotabaru	992.870.675	800.000	8.812.056	26.955.543	1.029.438.274
296	Kab. Tabalong	765.564.596	2.000.000	6.445.008	14.233.446	788.243.050
297	Kab. Tanah Laut	830.406.141	1.000.000	6.689.995	7.809.352	845.905.488
298	Kab. Tapin	743.613.885	1.800.000	5.881.818	14.162.384	765.458.087
299	Kota Banjarbaru	400.634.143	4.000.000	0	0	404.634.143
300	Kota Banjarmasin	708.745.985	10.400.000	0	14.954.523	734.100.508

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
301	Kab. Balangan	518.399.553	600.000	3.889.484	4.627.388	527.516.425
302	Kab. Tanah Bumbu	573.289.885	1.000.000	4.921.763	4.790.734	584.002.382
303	Provinsi Kalimantan Timur	846.491.404	0	11.259.264	8.867.424	866.618.092
304	Kab. Berau	746.773.588	2.000.000	13.630.519	12.202.939	774.607.046
305	Kab. Kutai Kartanegara	2.261.871.113	8.800.000	20.720.765	20.976.632	2.312.368.510
306	Kab. Kutai Barat	1.360.891.479	800.000	20.972.215	18.757.549	1.401.421.243
307	Kab. Kutai Timur	1.938.403.961	400.000	20.566.500	53.786.210	2.013.156.671
308	Kab. Paser	1.057.501.670	1.000.000	9.399.508	29.313.061	1.097.214.239
309	Kota Balikpapan	523.788.045	6.800.000	4.869.014	11.178.574	546.635.633
310	Kota Bontang	501.205.170	3.000.000	5.247.857	0	509.453.027

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
311	Kota Samarinda	738.050.978	11.800.000	6.657.048	15.577.289	772.085.315
312	Kab. Penajam Paser Utara	734.019.425	4.800.000	6.279.240	12.368.128	757.466.793
313	Kab. Mahakam Ulu	483.319.969	0	8.617.171	7.879.135	499.816.275
314	Provinsi Sulawesi Utara	1.151.864.347	0	28.880.987	17.570.335	1.198.315.669
315	Kab. Bolaang Mongondow	532.175.247	400.000	8.345.561	15.740.489	556.661.297
316	Kab. Minahasa	582.392.148	8.600.000	4.440.239	11.482.245	606.914.632
317	Kab. Kepulauan Sangihe	475.799.993	4.400.000	7.455.151	9.288.929	496.944.073
318	Kota Bitung	393.335.823	13.800.000	6.551.486	12.480.800	426.168.109
319	Kota Manado	658.823.315	17.400.000	5.616.858	13.604.792	695.444.965
320	Kab. Kepulauan Talaud	407.774.406	2.200.000	7.648.914	12.194.782	429.818.102

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
321	Kab. Minahasa Selatan	439.108.809	2.000.000	6.453.455	8.625.045	456.187.309
322	Kota Tomohon	336.793.459	8.800.000	2.508.824	2.966.540	351.068.823
323	Kab. Minahasa Utara	419.001.590	1.200.000	7.518.710	4.161.981	431.882.281
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	303.320.235	2.000.000	6.825.439	8.550.319	320.695.993
325	Kota Kotamobagu	340.066.182	3.600.000	5.398.233	3.436.992	352.501.407
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	326.710.867	200.000	5.840.505	9.931.009	342.682.381
327	Kab. Minahasa Tenggara	325.882.621	1.800.000	2.332.768	7.686.110	337.701.499
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	277.253.764	0	3.335.715	6.573.876	287.163.355
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	306.621.127	0	7.285.407	7.684.963	321.591.497
330	Provinsi Sulawesi Tengah	1.257.395.894	0	28.466.395	18.492.394	1.304.354.683

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
331	Kab. Banggai	996.722.275	9.200.000	17.651.016	18.829.163	1.042.402.454
332	Kab. Banggai Kepulauan	447.376.505	600.000	6.918.742	10.333.376	465.228.623
333	Kab. Buol	495.360.578	1.400.000	7.959.680	11.907.031	516.627.289
334	Kab. Toli-Toli	521.114.510	1.200.000	8.524.354	14.449.944	545.288.808
335	Kab. Donggala	572.351.031	1.800.000	16.573.791	15.992.714	606.717.536
336	Kab. Morowali	402.322.685	1.400.000	3.930.633	6.774.796	414.428.114
337	Kab. Poso	632.006.942	5.600.000	9.702.642	17.725.924	665.035.508
338	Kota Palu	590.972.814	9.200.000	5.211.020	0	605.383.834
339	Kab. Parigi Moutong	869.487.930	1.000.000	17.190.560	23.554.536	911.233.026
340	Kab. Tojo Una Una	518.995.519	2.400.000	8.568.671	8.406.197	538.370.387

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
341	Kab. Sigi	606.815.149	0	9.888.989	16.348.172	633.052.310
342	Kab. Banggai Laut	354.848.974	600.000	6.162.728	8.611.285	370.222.987
343	Kab. Morowali Utara	551.748.232	600.000	9.066.928	9.400.205	570.815.365
344	Provinsi Sulawesi Selatan	2.324.384.989	0	57.527.240	38.553.042	2.420.465.271
345	Kab. Bantaeng	399.300.098	4.200.000	3.301.319	11.549.464	418.350.881
346	Kab. Barru	412.066.692	3.000.000	3.421.102	7.579.599	426.067.393
347	Kab. Bone	1.189.989.204	8.800.000	9.242.710	24.179.717	1.232.211.631
348	Kab. Bulukumba	649.508.373	5.400.000	5.243.961	19.365.537	679.517.871
349	Kab. Enrekang	491.234.658	3.400.000	0	3.981.794	498.616.452
350	Kab. Gowa	891.213.017	9.200.000	7.379.816	8.536.851	916.329.684

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
351	Kab. Jeneponto	578.804.359	6.200.000	10.205.817	17.534.338	612.744.514
352	Kab. Luwu	668.414.683	4.000.000	5.050.898	11.722.011	689.187.592
353	Kab. Luwu Utara	678.330.868	1.400.000	9.678.682	5.833.940	695.243.490
354	Kab. Maros	650.878.020	4.600.000	5.824.599	0	661.302.619
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	623.735.208	7.600.000	6.104.286	17.974.435	655.413.929
356	Kota Palopo	420.678.293	9.600.000	3.776.609	0	434.054.902
357	Kab. Luwu Timur	826.638.970	600.000	6.107.312	6.471.176	839.817.458
358	Kab. Pinrang	626.475.219	8.000.000	5.425.768	6.346.738	646.247.725
359	Kab. Sinjai	519.949.371	2.600.000	0	9.039.208	531.588.579
360	Kab. Kepulauan Selayar	492.982.723	1.400.000	7.640.986	12.444.259	514.467.968

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
361	Kab. Sidenreng Rappang	549.925.219	7.600.000	4.707.958	0	562.233.177
362	Kab. Soppeng	514.730.051	4.200.000	3.412.775	4.733.368	527.076.194
363	Kab. Takalar	514.290.601	4.800.000	9.416.438	10.072.860	538.579.899
364	Kab. Tana Toraja	493.445.618	9.400.000	4.310.352	8.489.991	515.645.961
365	Kab. Wajo	651.993.806	9.600.000	5.404.691	12.772.961	679.771.458
366	Kota Pare-pare	381.419.560	4.400.000	0	3.767.602	389.587.162
367	Kota Makassar	1.419.790.960	30.600.000	13.251.904	15.268.841	1.478.911.705
368	Kab. Toraja Utara	469.955.229	8.000.000	9.451.917	8.955.460	496.362.606
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.321.833.951	0	35.952.118	13.009.973	1.370.796.042
370	Kab. Buton	361.402.026	2.400.000	3.790.573	9.350.515	376.943.114

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
371	Kab. Konawe	611.705.539	11.400.000	11.539.362	17.610.511	652.255.412
372	Kab. Kolaka	488.202.121	7.000.000	8.327.490	9.176.621	512.706.232
373	Kab. Muna	580.218.266	5.200.000	6.119.566	15.269.650	606.807.482
374	Kota Kendari	583.130.569	13.000.000	11.727.282	0	607.857.851
375	Kota Bau-bau	428.263.677	8.600.000	4.258.233	12.388.760	453.510.670
376	Kab. Konawe Selatan	725.088.578	3.000.000	13.441.628	13.810.750	755.340.956
377	Kab. Bombana	408.795.708	4.400.000	7.574.482	10.961.445	431.731.635
378	Kab. Wakatobi	357.935.052	5.000.000	6.559.974	9.737.913	379.232.939
379	Kab. Kolaka Utara	410.837.891	1.200.000	6.923.835	11.511.761	430.473.487
380	Kab. Konawe Utara	393.879.967	2.200.000	2.819.788	7.439.584	406.339.339

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
381	Kab. Buton Utara	318.592.145	2.400.000	5.989.610	7.289.329	334.271.084
382	Kab. Konawe Kepulauan	253.511.665	1.400.000	4.580.041	5.907.247	265.398.953
383	Kab. Kolaka Timur	367.025.346	3.200.000	2.776.181	6.382.628	379.384.155
384	Kab. Muna Barat	316.508.947	1.000.000	3.032.575	7.670.871	328.212.393
385	Kab. Buton Tengah	295.499.662	2.000.000	5.673.558	7.843.662	311.016.882
386	Kab. Buton Selatan	295.822.445	2.000.000	5.723.834	7.607.304	311.153.583
387	Provinsi Bali	1.149.433.493	0	0	0	1.149.433.493
388	Kab. Badung	341.996.152	3.200.000	0	0	345.196.152
389	Kab. Bangli	602.324.681	800.000	4.961.136	4.462.725	612.548.542
390	Kab. Buleleng	1.026.230.763	3.800.000	10.588.738	0	1.040.619.501

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
391	Kab. Gianyar	577.413.452	1.200.000	0	0	578.613.452
392	Kab. Jembrana	517.679.956	2.000.000	0	0	519.679.956
393	Kab. Karangasem	648.684.415	600.000	5.805.809	0	655.090.224
394	Kab. Klungkung	571.290.356	1.200.000	5.297.126	0	577.787.482
395	Kab. Tabanan	794.201.381	0	0	0	794.201.381
396	Kota Denpasar	575.009.235	3.200.000	0	5.392.665	583.601.900
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.465.821.818	0	26.126.753	26.341.098	1.518.289.669
398	Kab. Bima	1.027.567.984	0	9.736.306	8.489.307	1.045.793.597
399	Kab. Dompu	590.302.556	1.800.000	11.824.478	9.692.942	613.619.976
400	Kab. Lombok Barat	825.932.987	600.000	6.568.374	14.886.649	847.988.010

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
401	Kab. Lombok Tengah	1.105.610.215	2.400.000	9.098.704	19.871.663	1.136.980.582
402	Kab. Lombok Timur	1.437.526.038	3.000.000	24.827.789	25.871.823	1.491.225.650
403	Kab. Sumbawa	991.821.147	1.600.000	8.858.137	16.562.076	1.018.841.360
404	Kota Mataram	599.402.026	10.000.000	5.112.093	5.360.802	619.874.921
405	Kota Bima	402.840.803	8.200.000	3.554.568	0	414.595.371
406	Kab. Sumbawa Barat	363.639.250	1.400.000	3.364.980	2.939.372	371.343.602
407	Kab. Lombok Utara	375.722.429	0	6.094.407	6.549.823	388.366.659
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.643.809.745	0	38.347.271	17.401.341	1.699.558.357
409	Kab. Alor	609.210.423	3.400.000	17.117.407	14.244.671	643.972.501
410	Kab. Belu	450.005.639	2.400.000	13.726.068	11.570.521	477.702.228

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
411	Kab. Ende	595.679.547	4.600.000	5.139.289	9.596.268	615.015.104
412	Kab. Flores Timur	633.458.896	4.200.000	5.402.424	10.448.710	653.510.030
413	Kab. Kupang	629.240.091	3.400.000	11.941.107	15.703.651	660.284.849
414	Kab. Lembata	456.336.740	1.400.000	3.406.578	3.486.583	464.629.901
415	Kab. Manggarai	594.384.722	5.200.000	5.680.102	13.450.758	618.715.582
416	Kab. Ngada	519.606.679	3.200.000	3.881.233	7.386.207	534.074.119
417	Kab. Sikka	662.316.773	2.600.000	11.769.952	10.874.580	687.561.305
418	Kab. Sumba Barat	322.966.797	2.200.000	9.563.126	4.791.427	339.521.350
419	Kab. Sumba Timur	658.533.114	3.200.000	12.104.497	14.830.772	688.668.383
420	Kab. Timor Tengah Selatan	779.337.371	2.400.000	24.461.997	18.857.246	825.056.614

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
421	Kab. Timor Tengah Utara	610.929.662	2.200.000	18.923.431	15.171.883	647.224.976
422	Kota Kupang	636.461.519	10.200.000	5.620.283	5.201.197	657.482.999
423	Kab. Rote Ndao	392.241.516	1.400.000	7.511.775	9.045.282	410.198.573
424	Kab. Manggarai Barat	489.076.933	1.000.000	8.247.003	7.473.256	505.797.192
425	Kab. Nagekeo	403.858.850	3.200.000	3.382.969	0	410.441.819
426	Kab. Sumba Barat Daya	482.263.098	400.000	17.243.700	10.947.853	510.854.651
427	Kab. Sumba Tengah	281.259.611	0	4.486.898	5.397.396	291.143.905
428	Kab. Manggarai Timur	539.982.227	3.400.000	10.125.624	13.004.182	566.512.033
429	Kab. Sabu Raijua	310.337.124	1.000.000	6.524.962	7.026.858	324.888.944
430	Kab. Malaka	497.465.495	0	15.654.279	12.424.231	525.544.005

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
431	Provinsi Maluku	1.239.091.599	0	39.646.032	20.289.986	1.299.027.617
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	457.866.828	400.000	13.593.041	11.115.593	482.975.462
433	Kab. Maluku Tengah	839.353.109	1.200.000	20.805.573	21.465.422	882.824.104
434	Kab. Maluku Tenggara	413.953.038	200.000	9.757.426	9.089.425	432.999.889
435	Kab. Buru	406.736.788	0	7.254.614	8.591.642	422.583.044
436	Kota Ambon	583.785.555	4.000.000	4.890.145	15.798.366	608.474.066
437	Kab. Seram Bagian Barat	499.441.094	0	9.789.409	12.315.132	521.545.635
438	Kab. Seram Bagian Timur	455.302.283	0	13.558.619	11.360.003	480.220.905
439	Kab. Kepulauan Aru	462.126.263	400.000	14.518.357	11.511.247	488.555.867
440	Kota Tual	324.122.940	600.000	7.764.943	8.041.779	340.529.662

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
441	Kab. Maluku Barat Daya	423.549.967	200.000	7.225.124	7.789.883	438.764.974
442	Kab. Buru Selatan	338.850.202	0	10.667.910	7.372.428	356.890.540
443	Provinsi Papua	705.266.694	0	1.837.401	10.148.525	717.252.620
444	Kab. Biak Numfor	626.517.463	2.800.000	22.672.451	13.271.723	665.261.637
445	Kab. Jayapura	559.205.867	1.000.000	18.409.399	13.039.379	591.654.645
446	Kab. Kepulauan Yapen	485.944.863	1.000.000	17.653.979	11.121.278	515.720.120
447	Kota Jayapura	620.056.896	5.000.000	10.895.963	16.397.012	652.349.871
448	Kab. Sarmi	479.525.688	400.000	14.504.334	8.257.837	502.687.859
449	Kab. Keerom	817.126.158	0	23.812.442	18.048.857	858.987.457
450	Kab. Waropen	441.962.058	0	13.257.628	10.656.784	465.876.470

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
451	Kab. Supiori	334.978.988	0	11.883.657	6.369.814	353.232.459
452	Kab. Mamberamo Raya	496.515.602	0	13.525.416	8.269.498	518.310.516
453	Provinsi Maluku Utara	942.579.383	0	27.696.693	14.262.949	984.539.025
454	Kab. Halmahera Tengah	428.416.361	0	8.434.506	10.531.993	447.382.860
455	Kota Ternate	509.284.875	15.600.000	8.071.047	4.561.980	537.517.902
456	Kab. Halmahera Barat	403.982.475	0	9.472.333	9.723.239	423.178.047
457	Kab. Halmahera Timur	356.816.105	0	7.493.834	6.965.525	371.275.464
458	Kab. Halmahera Selatan	581.406.121	0	16.557.982	13.519.933	611.484.036
459	Kab. Halmahera Utara	458.549.540	0	13.656.094	11.803.391	484.009.025
460	Kab. Kepulauan Sula	368.578.700	0	9.709.518	8.409.241	386.697.459

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
461	Kota Tidore Kepulauan	438.104.945	8.000.000	6.677.534	0	452.782.479
462	Kab. Pulau Morotai	319.581.951	0	9.107.236	7.991.059	336.680.246
463	Kab. Pulau Taliabu	268.560.270	0	9.696.623	5.132.981	283.389.874
464	Provinsi Banten	929.472.024	0	13.664.545	13.966.986	957.103.555
465	Kab. Lebak	1.100.800.525	1.000.000	27.174.466	35.838.928	1.164.813.919
466	Kab. Pandeglang	1.236.097.226	2.600.000	14.937.294	39.792.491	1.293.427.011
467	Kab. Serang	910.470.470	0	22.951.644	29.085.980	962.508.094
468	Kab. Tangerang	1.156.318.231	5.600.000	30.801.021	38.276.843	1.230.996.095
469	Kota Cilegon	509.593.633	8.600.000	6.499.239	10.314.358	535.007.230
470	Kota Tangerang	810.251.519	20.800.000	0	9.244.303	840.295.822

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
471	Kota Serang	512.238.321	13.400.000	7.043.799	16.238.055	548.920.175
472	Kota Tangerang Selatan	573.700.691	10.800.000	7.604.011	6.190.302	598.295.004
473	Provinsi Bangka Belitung	831.356.644	0	7.545.381	0	838.902.025
474	Kab. Bangka	449.057.373	3.800.000	0	3.560.065	456.417.438
475	Kab. Belitung	458.949.682	1.400.000	4.002.145	3.458.660	467.810.487
476	Kota Pangkal Pinang	373.926.347	8.400.000	0	3.078.361	385.404.708
477	Kab. Bangka Selatan	424.392.419	600.000	4.139.314	6.501.171	435.632.904
478	Kab. Bangka Tengah	416.116.675	1.400.000	4.391.316	3.372.352	425.280.343
479	Kab. Bangka Barat	429.805.278	1.200.000	4.171.821	3.118.762	438.295.861
480	Kab. Belitung Timur	437.002.664	0	0	0	437.002.664

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
481	Provinsi Gorontalo	791.428.833	0	18.948.768	12.252.317	822.629.918
482	Kab. Boalemo	402.834.666	0	6.751.217	6.993.933	416.579.816
483	Kab. Gorontalo	672.110.892	2.800.000	5.256.339	12.306.155	692.473.386
484	Kota Gorontalo	425.473.594	10.000.000	3.830.988	9.005.300	448.309.882
485	Kab. Pohuwato	496.603.035	600.000	4.244.217	8.206.459	509.653.711
486	Kab. Bone Bolango	489.099.972	1.000.000	9.346.793	9.575.976	509.022.741
487	Kab. Gorontalo Utara	363.941.903	0	6.369.578	6.484.071	376.795.552
488	Provinsi Kepulauan Riau	972.609.974	0	11.055.857	0	983.665.831
489	Kab. Natuna	476.351.958	1.400.000	8.480.705	9.647.514	495.880.177
490	Kab. Kepulauan Anambas	421.733.836	400.000	4.027.471	8.720.958	434.882.265

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
491	Kab. Karimun	374.229.850	5.800.000	3.564.698	2.981.401	386.575.949
492	Kota Batam	741.764.750	12.800.000	0	6.467.852	761.032.602
493	Kota Tanjung Pinang	406.408.438	3.600.000	0	6.720.616	416.729.054
494	Kab. Lingga	389.042.696	1.800.000	6.835.754	5.554.983	403.233.433
495	Kab. Bintan	411.756.187	3.000.000	3.826.533	3.043.656	421.626.376
496	Provinsi Papua Barat	531.888.473	0	1.178.261	6.796.990	539.863.724
497	Kab. Fak Fak	565.997.361	1.400.000	18.031.616	12.836.152	598.265.129
498	Kab. Manokwari	476.333.485	1.800.000	10.827.585	10.997.480	499.958.550
499	Kab. Teluk Bintuni	375.913.966	400.000	8.929.993	6.020.370	391.264.329
500	Kab. Teluk Wondama	344.830.767	200.000	10.430.922	7.018.260	362.479.949

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
501	Kab. Kaimana	470.349.270	400.000	18.520.428	10.059.458	499.329.156
502	Kab. Manokwari Selatan	263.467.006	0	7.541.135	5.253.782	276.261.923
503	Kab. Pegunungan Arfak	263.652.838	0	4.316.426	4.090.212	272.059.476
504	Provinsi Sulawesi Barat	810.888.229	0	19.179.300	8.394.822	838.462.351
505	Kab. Majene	416.114.791	4.000.000	8.224.297	11.502.436	439.841.524
506	Kab. Mamuju	514.535.599	2.600.000	10.244.011	15.341.632	542.721.242
507	Kab. Polewali Mandar	749.024.212	4.600.000	13.993.098	22.590.015	790.207.325
508	Kab. Mamasa	413.357.250	2.600.000	8.517.474	11.746.740	436.221.464
509	Kab. Pasangkayu	360.669.856	800.000	5.395.469	8.384.403	375.249.728
510	Kab. Mamuju Tengah	287.068.668	0	2.592.101	8.005.467	297.666.236

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
511	Provinsi Kalimantan Utara	830.626.335	0	8.063.283	0	838.689.618
512	Kab. Bulungan	833.686.120	1.400.000	8.241.207	0	843.327.327
513	Kab. Malinau	1.046.670.930	0	16.455.902	20.318.947	1.083.445.779
514	Kab. Nunukan	819.003.634	1.600.000	15.599.426	16.184.486	852.387.546
515	Kota Tarakan	386.190.294	4.000.000	3.707.758	3.973.845	397.871.897
516	Kab. Tana Tidung	330.502.789	0	2.665.543	2.165.104	335.333.436
517	Provinsi Papua Selatan	404.853.475	0	1.100.185	7.164.900	413.118.560
518	Kab. Merauke	952.508.838	2.200.000	32.195.142	14.056.318	1.000.960.298
519	Kab. Boven Digoel	584.191.777	0	14.813.872	8.407.501	607.413.150
520	Kab. Mappi	581.086.678	400.000	20.267.310	9.521.433	611.275.421

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
521	Kab. Asmat	678.582.781	0	26.879.918	15.947.619	721.410.318
522	Provinsi Papua Tengah	377.572.312	0	691.094	7.640.961	385.904.367
523	Kab. Mimika	1.285.892.894	3.800.000	40.653.026	31.274.232	1.361.620.152
524	Kab. Nabire	619.051.110	1.800.000	21.034.011	13.322.627	655.207.748
525	Kab. Paniai	557.014.372	1.000.000	29.867.855	11.352.356	599.234.583
526	Kab. Puncak Jaya	741.980.556	600.000	6.631.153	22.753.558	771.965.267
527	Kab. Dogiyai	453.488.615	0	14.690.635	10.954.078	479.133.328
528	Kab. Puncak	759.113.997	0	2.933.638	22.130.065	784.177.700
529	Kab. Intan Jaya	519.591.983	0	3.713.326	14.301.845	537.607.154
530	Kab. Deiyai	374.204.696	0	16.860.572	7.922.177	398.987.445

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
531	Provinsi Papua Pegunungan	465.820.867	0	405.859	7.240.465	473.467.191
532	Kab. Jayawijaya	581.112.637	800.000	15.324.841	15.078.880	612.316.358
533	Kab. Yahukimo	824.795.457	200.000	23.826.112	18.076.343	866.897.912
534	Kab. Pegunungan Bintang	630.023.552	0	11.046.559	12.712.386	653.782.497
535	Kab. Tolikara	745.407.911	800.000	11.675.244	20.563.863	778.447.018
536	Kab. Mamberamo Tengah	468.713.184	0	8.459.147	10.533.520	487.705.851
537	Kab. Yalimo	477.479.511	0	9.648.474	13.308.408	500.436.393
538	Kab. Lanny Jaya	564.981.883	200.000	15.150.633	15.078.355	595.410.871
539	Kab. Nduga	454.489.664	0	4.731.843	11.486.905	470.708.412
540	Provinsi Papua Barat Daya	391.176.894	0	630.655	5.929.881	397.737.430

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
541	Kab. Sorong	528.949.221	5.200.000	9.229.176	10.565.217	553.943.614
542	Kota Sorong	490.572.730	8.200.000	8.642.566	8.986.968	516.402.264
543	Kab. Raja Ampat	528.285.664	800.000	15.952.693	10.147.230	555.185.587
544	Kab. Sorong Selatan	340.158.550	400.000	8.993.167	5.620.894	355.172.611
545	Kab. Maybrat	359.788.820	200.000	4.239.799	5.717.386	369.946.005
546	Kab. Tambrauw	383.678.329	0	7.943.849	6.092.471	397.714.649
JUMLAH NASIONAL		386.739.874.265	1.699.200.000	4.726.152.330	6.854.143.865	400.019.370.460

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Provinsi Aceh	0	0	0	0	0
2	Kab. Aceh Barat	9.630.508	0	0	0	0
3	Kab. Aceh Besar	8.900.000	12.156.574	0	0	12.156.574
4	Kab. Aceh Selatan	55.077.530	0	0	0	0
5	Kab. Aceh Singkil	1.121.167	0	0	0	0
6	Kab. Aceh Tengah	2.280.000	7.000.000	0	0	7.000.000
7	Kab. Aceh Tenggara	1.156.591	0	0	0	0
8	Kab. Aceh Timur	11.985.860	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Provinsi Aceh	0	0	0	0	0	0
2	Kab. Aceh Barat	4.878.616	3.305.137	0	3.305.137	0	17.814.261
3	Kab. Aceh Besar	4.146.521	2.789.445	0	2.789.445	0	27.992.540
4	Kab. Aceh Selatan	4.327.609	2.915.308	0	2.915.308	0	62.320.447
5	Kab. Aceh Singkil	2.356.029	0	0	0	0	3.477.196
6	Kab. Aceh Tengah	3.870.048	3.499.436	0	3.499.436	0	16.649.484
7	Kab. Aceh Tenggara	4.581.277	2.542.860	0	2.542.860	0	8.280.728
8	Kab. Aceh Timur	4.245.125	3.003.192	0	3.003.192	0	19.234.177

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
9	Kab. Aceh Utara	0	11.115.418	0	0	11.115.418
10	Kab. Bireuen	0	8.432.477	0	0	8.432.477
11	Kab. Pidie	6.252.489	0	17.892.590	0	17.892.590
12	Kab. Simeulue	3.209.220	0	0	0	0
13	Kota Banda Aceh	0	0	0	0	0
14	Kota Sabang	27.188.616	0	0	0	0
15	Kota Langsa	1.300.000	0	0	0	0
16	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
9	Kab. Aceh Utara	0	0	0	0	0	11.115.418
10	Kab. Bireuen	4.044.704	2.000.093	0	2.000.093	0	14.477.274
11	Kab. Pidie	5.057.713	2.535.249	0	2.535.249	8.158.567	39.896.608
12	Kab. Simeulue	2.796.344	2.235.234	0	2.235.234	0	8.240.798
13	Kota Banda Aceh	0	0	0	0	0	0
14	Kota Sabang	0	0	0	0	0	27.188.616
15	Kota Langsa	0	0	0	0	0	1.300.000
16	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
17	Kab. Gayo Lues	2.487.850	8.720.000	0	0	8.720.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	2.504.250	0	0	0	0
19	Kab. Aceh Jaya	31.182.488	0	0	0	0
20	Kab. Nagan Raya	22.897.083	0	0	0	0
21	Kab. Aceh Tamiang	6.198.914	0	0	0	0
22	Kab. Bener Meriah	2.580.000	0	0	0	0
23	Kab. Pidie Jaya	0	9.038.418	0	0	9.038.418
24	Kota Subulussalam	1.197.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
17	Kab. Gayo Lues	0	0	0	0	0	11.207.850
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.202.000	3.193.857	0	3.193.857	0	8.900.107
19	Kab. Aceh Jaya	3.698.221	2.727.282	0	2.727.282	0	37.607.991
20	Kab. Nagan Raya	4.796.485	2.633.614	0	2.633.614	0	30.327.182
21	Kab. Aceh Tamiang	2.284.489	3.036.796	0	3.036.796	0	11.520.199
22	Kab. Bener Meriah	5.122.682	1.663.524	0	1.663.524	0	9.366.206
23	Kab. Pidie Jaya	4.384.771	1.067.831	0	1.067.831	0	14.491.020
24	Kota Subulussalam	4.750.000	908.315	0	908.315	0	6.855.315

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
25	Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0
26	Kab. Asahan	0	11.412.879	0	0	11.412.879
27	Kab. Dairi	19.769.308	0	0	0	0
28	Kab. Deli Serdang	0	14.600.000	0	0	14.600.000
29	Kab. Karo	0	0	0	6.661.305	6.661.305
30	Kab. Labuhanbatu	2.095.375	0	0	0	0
31	Kab. Langkat	0	9.007.040	0	0	9.007.040
32	Kab. Mandailing Natal	1.200.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
25	Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0
26	Kab. Asahan	0	0	0	0	0	11.412.879
27	Kab. Dairi	0	2.339.915	0	2.339.915	0	22.109.223
28	Kab. Deli Serdang	5.356.333	1.011.950	0	1.011.950	0	20.968.283
29	Kab. Karo	0	0	660.833	660.833	0	7.322.138
30	Kab. Labuhanbatu	1.900.000	0	0	0	0	3.995.375
31	Kab. Langkat	0	0	0	0	0	9.007.040
32	Kab. Mandailing Natal	0	0	0	0	0	1.200.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
33	Kab. Nias	0	0	0	0	0
34	Kab. Simalungun	0	0	0	0	0
35	Kab. Tapanuli Selatan	0	6.141.000	0	0	6.141.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	0	0	0	0	0
37	Kab. Tapanuli Utara	0	0	0	7.127.764	7.127.764
38	Kab. Toba	4.500.000	14.220.000	0	0	14.220.000
39	Kota Binjai	1.235.000	0	0	0	0
40	Kota Medan	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
33	Kab. Nias	0	0	0	0	0	0
34	Kab. Simalungun	0	0	0	0	0	0
35	Kab. Tapanuli Selatan	0	0	0	0	0	6.141.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	0	0	0	0	0	0
37	Kab. Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	7.127.764
38	Kab. Toba	0	1.936.066	0	1.936.066	0	20.656.066
39	Kota Binjai	0	2.571.691	0	2.571.691	0	3.806.691
40	Kota Medan	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
41	Kota Pematang Siantar	1.541.765	0	0	0	0
42	Kota Sibolga	0	0	0	0	0
43	Kota Tanjung Balai	2.423.000	0	0	0	0
44	Kota Tebing Tinggi	1.812.243	0	0	0	0
45	Kota Padang Sidempuan	5.920.506	0	0	0	0
46	Kab. Pakpak Bharat	4.934.108	0	0	0	0
47	Kab. Nias Selatan	0	0	0	6.907.369	6.907.369
48	Kab. Humbang Hasundutan	2.595.295	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
41	Kota Pematang Siantar	0	0	0	0	0	1.541.765
42	Kota Sibolga	0	0	0	0	0	0
43	Kota Tanjung Balai	0	0	0	0	0	2.423.000
44	Kota Tebing Tinggi	0	0	0	0	0	1.812.243
45	Kota Padang Sidempuan	2.245.500	0	0	0	0	8.166.006
46	Kab. Pakpak Bharat	2.850.000	0	0	0	0	7.784.108
47	Kab. Nias Selatan	0	0	0	0	0	6.907.369
48	Kab. Humbang Hasundutan	0	0	0	0	0	2.595.295

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
49	Kab. Serdang Bedagai	1.171.830	25.408.543	0	0	25.408.543
50	Kab. Samosir	1.582.908	0	0	0	0
51	Kab. Batu Bara	4.700.000	8.186.636	0	0	8.186.636
52	Kab. Padang Lawas	0	10.079.189	0	0	10.079.189
53	Kab. Padang Lawas Utara	0	0	0	0	0
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	0	0	0	0
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0	0	0	0	0
56	Kab. Nias Utara	0	10.053.911	0	0	10.053.911

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
49	Kab. Serdang Bedagai	0	0	0	0	0	26.580.373
50	Kab. Samosir	3.977.087	0	0	0	0	5.559.995
51	Kab. Batu Bara	0	0	0	0	0	12.886.636
52	Kab. Padang Lawas	0	0	0	0	0	10.079.189
53	Kab. Padang Lawas Utara	0	0	0	0	0	0
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	0	0	0	0	0
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0	0	0	0	0	0
56	Kab. Nias Utara	0	0	0	0	0	10.053.911

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
57	Kab. Nias Barat	0	9.510.000	0	0	9.510.000
58	Kota Gunungsitoli	0	0	0	0	0
59	Provinsi Sumatera Barat	5.912.600	0	0	0	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	1.038.118	0	0	0	0
61	Kab. Agam	1.308.029	0	0	0	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0	0	0
63	Kab. Padang Pariaman	0	0	0	0	0
64	Kab. Pasaman	2.300.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
57	Kab. Nias Barat	0	0	0	0	0	9.510.000
58	Kota Gunungsitoli	0	0	0	0	0	0
59	Provinsi Sumatera Barat	0	0	0	0	0	5.912.600
60	Kab. Lima Puluh Kota	0	0	0	0	0	1.038.118
61	Kab. Agam	0	2.531.986	0	2.531.986	0	3.840.015
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0	0	0	0
63	Kab. Padang Pariaman	0	0	0	0	0	0
64	Kab. Pasaman	0	0	0	0	0	2.300.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
65	Kab. Pesisir Selatan	2.074.913	0	0	0	0
66	Kab. Sijunjung	629.816	0	0	0	0
67	Kab. Solok	1.349.553	0	16.509.149	0	16.509.149
68	Kab. Tanah Datar	0	0	0	0	0
69	Kota Bukit Tinggi	4.391.300	0	0	0	0
70	Kota Padang Panjang	950.000	0	0	0	0
71	Kota Padang	0	9.829.741	0	0	9.829.741
72	Kota Payakumbuh	1.903.373	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
65	Kab. Pesisir Selatan	0	3.428.161	0	3.428.161	0	5.503.074
66	Kab. Sijunjung	0	0	0	0	0	629.816
67	Kab. Solok	2.500.000	0	0	0	8.214.321	28.573.023
68	Kab. Tanah Datar	0	3.504.723	0	3.504.723	0	3.504.723
69	Kota Bukit Tinggi	0	0	0	0	0	4.391.300
70	Kota Padang Panjang	0	0	0	0	0	950.000
71	Kota Padang	0	0	0	0	0	9.829.741
72	Kota Payakumbuh	0	0	0	0	0	1.903.373

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
73	Kota Sawahlunto	3.529.601	0	0	0	0
74	Kota Solok	0	0	0	0	0
75	Kota Pariaman	0	0	0	0	0
76	Kab. Pasaman Barat	2.300.000	0	0	0	0
77	Kab. Dharmasraya	1.308.029	0	0	0	0
78	Kab. Solok Selatan	5.077.643	0	0	0	0
79	Provinsi Riau	0	0	0	0	0
80	Kab. Bengkalis	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
73	Kota Sawahlunto	0	0	0	0	0	3.529.601
74	Kota Solok	0	0	0	0	0	0
75	Kota Pariaman	0	0	0	0	0	0
76	Kab. Pasaman Barat	0	1.456.000	0	1.456.000	7.384.384	11.140.384
77	Kab. Dharmasraya	0	0	0	0	0	1.308.029
78	Kab. Solok Selatan	2.500.000	0	0	0	0	7.577.643
79	Provinsi Riau	0	0	0	0	0	0
80	Kab. Bengkalis	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
81	Kab. Indragiri Hilir	1.260.000	0	0	0	0
82	Kab. Indragiri Hulu	2.165.000	0	0	0	0
83	Kab. Kampar	0	0	0	0	0
84	Kab. Kuantan Singingi	3.542.000	0	0	0	0
85	Kab. Pelalawan	4.330.000	0	0	0	0
86	Kab. Rokan Hilir	2.200.307	0	0	0	0
87	Kab. Rokan Hulu	3.718.365	0	0	0	0
88	Kab. Siak	1.955.787	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
81	Kab. Indragiri Hilir	0	0	0	0	0	1.260.000
82	Kab. Indragiri Hulu	0	0	0	0	0	2.165.000
83	Kab. Kampar	0	0	0	0	0	0
84	Kab. Kuantan Singingi	0	0	0	0	0	3.542.000
85	Kab. Pelalawan	0	0	0	0	0	4.330.000
86	Kab. Rokan Hilir	0	0	0	0	0	2.200.307
87	Kab. Rokan Hulu	0	0	0	0	0	3.718.365
88	Kab. Siak	0	0	0	0	0	1.955.787

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
89	Kota Dumai	0	0	0	0	0
90	Kota Pekanbaru	4.333.473	0	0	0	0
91	Kab. Kepulauan Meranti	1.260.000	0	0	0	0
92	Provinsi Jambi	15.445.200	0	0	0	0
93	Kab. Batang Hari	4.117.464	0	0	0	0
94	Kab. Bungo	0	0	0	0	0
95	Kab. Kerinci	0	0	0	0	0
96	Kab. Merangin	10.052.616	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
89	Kota Dumai	0	0	0	0	0	0
90	Kota Pekanbaru	0	0	0	0	0	4.333.473
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	0	0	0	843.485	2.103.485
92	Provinsi Jambi	0	0	0	0	0	15.445.200
93	Kab. Batang Hari	0	0	0	0	0	4.117.464
94	Kab. Bungo	0	0	0	0	0	0
95	Kab. Kerinci	0	0	0	0	0	0
96	Kab. Merangin	0	0	0	0	0	10.052.616

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
97	Kab. Muaro Jambi	0	0	0	0	0
98	Kab. Sarolangun	4.347.052	0	0	0	0
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.337.186	0	0	0	0
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	3.236.329	8.896.389	0	0	8.896.389
101	Kab. Tebo	0	0	0	0	0
102	Kota Jambi	0	0	0	0	0
103	Kota Sungai Penuh	14.708.011	0	0	0	0
104	Provinsi Sumatera Selatan	12.364.440	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
97	Kab. Muaro Jambi	0	0	0	0	0	0
98	Kab. Sarolangun	0	0	0	0	0	4.347.052
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0	0	1.337.186
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0	0	12.132.718
101	Kab. Tebo	0	0	0	0	0	0
102	Kota Jambi	0	0	0	0	0	0
103	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	14.708.011
104	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	12.364.440

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
105	Kab. Lahat	0	0	0	0	0
106	Kab. Musi Banyuasin	0	0	0	0	0
107	Kab. Musi Rawas	3.541.300	0	0	0	0
108	Kab. Muara Enim	1.197.000	0	0	0	0
109	Kab. Ogan Komering Ilir	2.166.190	15.438.599	0	0	15.438.599
110	Kab. Ogan Komering Ulu	1.058.880	0	0	0	0
111	Kota Palembang	0	0	0	0	0
112	Kota Prabumulih	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
105	Kab. Lahat	2.500.000	0	0	0	1.200.000	3.700.000
106	Kab. Musi Banyuasin	0	0	0	0	0	0
107	Kab. Musi Rawas	0	0	0	0	0	3.541.300
108	Kab. Muara Enim	0	0	0	0	0	1.197.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	0	0	0	0	0	17.604.789
110	Kab. Ogan Komering Ulu	0	0	0	0	0	1.058.880
111	Kota Palembang	0	0	0	0	0	0
112	Kota Prabumulih	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
113	Kota Pagar Alam	13.040.000	0	0	7.050.125	7.050.125
114	Kota Lubuk Linggau	2.920.635	62.195.181	0	0	62.195.181
115	Kab. Banyuasin	0	0	17.225.188	0	17.225.188
116	Kab. Ogan Ilir	3.675.976	0	0	0	0
117	Kab. OKU Timur	2.691.546	0	13.354.439	0	13.354.439
118	Kab. OKU Selatan	0	0	0	0	0
119	Kab. Empat Lawang	3.400.000	15.747.328	0	0	15.747.328

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
113	Kota Pagar Alam	0	0	0	0	0	20.090.125
114	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0	0	65.115.816
115	Kab. Banyuasin	0	0	0	0	1.788.910	19.014.098
116	Kab. Ogan Ilir	4.848.485	3.403.041	0	3.403.041	0	11.927.502
117	Kab. OKU Timur	0	0	0	0	10.757.825	26.803.810
118	Kab. OKU Selatan	0	0	0	0	0	0
119	Kab. Empat Lawang	4.729.774	1.076.238	0	1.076.238	0	24.953.340

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0	0
121	Kab. Musi Rawas Utara	0	0	0	0	0
122	Provinsi Bengkulu	3.000.000	0	0	0	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	4.274.413	0	0	0	0
124	Kab. Bengkulu Utara	2.262.000	0	0	0	0
125	Kab. Rejang Lebong	8.519.015	0	0	0	0
126	Kota Bengkulu	1.121.167	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0	0	0
121	Kab. Musi Rawas Utara	4.259.620	0	0	0	0	4.259.620
122	Provinsi Bengkulu	0	0	0	0	0	3.000.000
123	Kab. Bengkulu Selatan	0	0	0	0	0	4.274.413
124	Kab. Bengkulu Utara	0	0	0	0	0	2.262.000
125	Kab. Rejang Lebong	0	0	0	0	0	8.519.015
126	Kota Bengkulu	0	0	0	0	0	1.121.167

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
127	Kab. Kaur	0	0	0	0	0
128	Kab. Seluma	6.300.000	0	0	0	0
129	Kab. Mukomuko	0	0	0	0	0
130	Kab. Lebong	3.648.476	0	0	0	0
131	Kab. Kepahiang	4.200.000	0	0	0	0
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	0	0	0
133	Provinsi Lampung	21.864.440	0	0	0	0
134	Kab. Lampung Barat	4.479.405	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
127	Kab. Kaur	0	0	0	0	0	0
128	Kab. Seluma	0	0	0	0	0	6.300.000
129	Kab. Mukomuko	0	0	0	0	0	0
130	Kab. Lebong	0	0	0	0	0	3.648.476
131	Kab. Kepahiang	0	0	0	0	0	4.200.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	0	0	0	0
133	Provinsi Lampung	0	0	0	0	0	21.864.440
134	Kab. Lampung Barat	0	0	0	0	0	4.479.405

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
135	Kab. Lampung Selatan	13.482.894	3.270.000	0	0	3.270.000
136	Kab. Lampung Tengah	4.184.670	0	0	0	0
137	Kab. Lampung Utara	36.484.838	14.462.096	0	0	14.462.096
138	Kab. Lampung Timur	25.329.663	0	0	0	0
139	Kab. Tanggamus	0	0	0	0	0
140	Kab. Tulang Bawang	1.896.978	9.771.674	0	0	9.771.674
141	Kab. Way Kanan	4.353.556	14.800.000	0	0	14.800.000
142	Kota Bandar Lampung	0	4.957.050	0	0	4.957.050

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
135	Kab. Lampung Selatan	0	0	0	0	0	16.752.894
136	Kab. Lampung Tengah	0	0	0	0	0	4.184.670
137	Kab. Lampung Utara	0	0	0	0	0	50.946.934
138	Kab. Lampung Timur	0	0	0	0	0	25.329.663
139	Kab. Tanggamus	0	0	0	0	0	0
140	Kab. Tulang Bawang	0	0	0	0	0	11.668.652
141	Kab. Way Kanan	0	0	0	0	0	19.153.556
142	Kota Bandar Lampung	0	0	0	0	0	4.957.050

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
143	Kota Metro	0	18.057.600	0	0	18.057.600
144	Kab. Pesawaran	2.706.006	0	0	0	0
145	Kab. Pringsewu	15.549.176	0	0	0	0
146	Kab. Mesuji	3.911.591	0	0	0	0
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	0	0	0	0
148	Kab. Pesisir Barat	0	0	0	0	0
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	0	0	0
150	Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
143	Kota Metro	0	0	0	0	0	18.057.600
144	Kab. Pesawaran	0	0	0	0	0	2.706.006
145	Kab. Pringsewu	0	0	0	0	0	15.549.176
146	Kab. Mesuji	0	0	0	0	0	3.911.591
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	0	0	0	0	0
148	Kab. Pesisir Barat	0	0	0	0	0	0
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
150	Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
151	Kab. Bandung	0	0	0	0	0
152	Kab. Bekasi	0	0	0	0	0
153	Kab. Bogor	0	0	0	0	0
154	Kab. Ciamis	12.024.550	0	0	0	0
155	Kab. Cianjur	0	13.470.000	0	0	13.470.000
156	Kab. Cirebon	0	0	0	0	0
157	Kab. Garut	0	0	0	0	0
158	Kab. Indramayu	2.522.627	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
151	Kab. Bandung	0	0	0	0	0	0
152	Kab. Bekasi	0	0	0	0	0	0
153	Kab. Bogor	4.812.283	3.220.119	0	3.220.119	0	8.032.402
154	Kab. Ciamis	4.906.446	3.458.618	0	3.458.618	0	20.389.614
155	Kab. Cianjur	0	0	0	0	0	13.470.000
156	Kab. Cirebon	0	0	0	0	0	0
157	Kab. Garut	0	0	0	0	6.558.464	6.558.464
158	Kab. Indramayu	0	0	0	0	0	2.522.627

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
159	Kab. Karawang	0	0	0	0	0
160	Kab. Kuningan	14.229.965	29.625.000	0	0	29.625.000
161	Kab. Majalengka	2.573.463	14.850.000	0	0	14.850.000
162	Kab. Purwakarta	1.398.335	0	0	0	0
163	Kab. Subang	0	0	0	0	0
164	Kab. Sukabumi	0	14.850.000	0	0	14.850.000
165	Kab. Sumedang	1.594.036	0	0	0	0
166	Kab. Tasikmalaya	1.550.471	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
159	Kab. Karawang	0	0	0	0	0	0
160	Kab. Kuningan	0	0	0	0	0	43.854.965
161	Kab. Majalengka	0	0	0	0	0	17.423.463
162	Kab. Purwakarta	0	0	0	0	0	1.398.335
163	Kab. Subang	0	0	0	0	0	0
164	Kab. Sukabumi	0	0	0	0	0	14.850.000
165	Kab. Sumedang	0	0	0	0	0	1.594.036
166	Kab. Tasikmalaya	0	0	0	0	0	1.550.471

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
167	Kota Bandung	0	0	0	0	0
168	Kota Bekasi	0	0	0	0	0
169	Kota Bogor	0	0	0	0	0
170	Kota Cirebon	0	0	0	0	0
171	Kota Depok	0	0	0	0	0
172	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0
173	Kota Tasikmalaya	1.749.021	0	0	0	0
174	Kota Cimahi	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
167	Kota Bandung	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
168	Kota Bekasi	0	0	0	0	0	0
169	Kota Bogor	0	0	0	0	0	0
170	Kota Cirebon	0	0	0	0	0	0
171	Kota Depok	0	0	0	0	0	0
172	Kota Sukabumi	3.087.500	2.642.262	0	2.642.262	0	5.729.762
173	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	1.749.021
174	Kota Cimahi	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
175	Kota Banjar	1.270.732	0	0	0	0
176	Kab. Bandung Barat	4.605.075	0	0	0	0
177	Kab. Pangandaran	0	0	0	0	0
178	Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0
179	Kab. Banjarnegara	1.237.687	0	18.588.104	0	18.588.104
180	Kab. Banyumas	0	6.480.584	0	0	6.480.584
181	Kab. Batang	1.876.295	0	0	0	0
182	Kab. Blora	1.246.339	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
175	Kota Banjar	0	0	0	0	0	1.270.732
176	Kab. Bandung Barat	506.738	0	0	0	0	5.111.813
177	Kab. Pangandaran	0	0	0	0	0	0
178	Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0
179	Kab. Banjarnegara	0	0	0	0	1.190.651	21.016.442
180	Kab. Banyumas	0	0	0	0	0	6.480.584
181	Kab. Batang	0	0	0	0	0	1.876.295
182	Kab. Blora	0	0	0	0	0	1.246.339

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
183	Kab. Boyolali	0	0	0	0	0
184	Kab. Brebes	17.250.000	15.597.998	0	0	15.597.998
185	Kab. Cilacap	0	22.749.000	0	0	22.749.000
186	Kab. Demak	0	0	0	0	0
187	Kab. Grobogan	41.424.761	16.613.069	13.887.861	0	30.500.930
188	Kab. Jepara	0	9.378.312	0	0	9.378.312
189	Kab. Karanganyar	1.038.118	48.846.000	0	0	48.846.000
190	Kab. Kebumen	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
183	Kab. Boyolali	0	0	0	0	0	0
184	Kab. Brebes	0	0	0	0	0	32.847.998
185	Kab. Cilacap	0	0	0	0	0	22.749.000
186	Kab. Demak	0	0	0	0	0	0
187	Kab. Grobogan	5.669.349	2.719.032	0	2.719.032	10.261.303	90.575.375
188	Kab. Jepara	0	0	0	0	0	9.378.312
189	Kab. Karanganyar	0	0	0	0	0	49.884.118
190	Kab. Kebumen	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
191	Kab. Kendal	0	0	0	0	0
192	Kab. Klaten	0	15.050.000	0	9.386.698	24.436.698
193	Kab. Kudus	0	0	0	0	0
194	Kab. Magelang	2.487.453	0	0	8.402.764	8.402.764
195	Kab. Pati	0	0	0	0	0
196	Kab. Pekalongan	1.245.742	0	0	0	0
197	Kab. Pemalang	0	29.838.358	0	0	29.838.358
198	Kab. Purbalingga	17.450.339	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
191	Kab. Kendal	0	0	0	0	0	0
192	Kab. Klaten	0	0	650.000	650.000	0	25.086.698
193	Kab. Kudus	0	0	0	0	0	0
194	Kab. Magelang	3.930.006	0	660.833	660.833	0	15.481.056
195	Kab. Pati	0	0	0	0	6.985.545	6.985.545
196	Kab. Pekalongan	0	0	0	0	0	1.245.742
197	Kab. Pemalang	0	0	0	0	0	29.838.358
198	Kab. Purbalingga	0	0	0	0	0	17.450.339

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
199	Kab. Purworejo	0	0	0	0	0
200	Kab. Rembang	2.802.919	15.010.717	0	0	15.010.717
201	Kab. Semarang	0	14.573.354	0	0	14.573.354
202	Kab. Sragen	2.387.671	0	0	0	0
203	Kab. Sukoharjo	0	0	0	0	0
204	Kab. Tegal	17.668.695	44.993.967	0	0	44.993.967
205	Kab. Temanggung	0	0	18.987.631	0	18.987.631
206	Kab. Wonogiri	0	12.187.000	0	0	12.187.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
199	Kab. Purworejo	0	0	0	0	0	0
200	Kab. Rembang	0	0	0	0	0	17.813.636
201	Kab. Semarang	0	0	0	0	0	14.573.354
202	Kab. Sragen	0	0	0	0	0	2.387.671
203	Kab. Sukoharjo	0	0	0	0	0	0
204	Kab. Tegal	0	0	0	0	0	62.662.662
205	Kab. Temanggung	3.290.533	2.509.961	0	2.509.961	1.583.625	26.371.750
206	Kab. Wonogiri	0	0	0	0	0	12.187.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
207	Kab. Wonosobo	1.306.250	0	0	8.138.565	8.138.565
208	Kota Magelang	0	0	0	0	0
209	Kota Pekalongan	0	0	0	0	0
210	Kota Salatiga	0	0	0	0	0
211	Kota Semarang	0	0	0	0	0
212	Kota Surakarta	1.260.000	0	0	0	0
213	Kota Tegal	0	0	0	0	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
207	Kab. Wonosobo	3.650.097	2.979.524	650.000	3.629.524	0	16.724.436
208	Kota Magelang	0	0	0	0	0	0
209	Kota Pekalongan	0	0	0	0	0	0
210	Kota Salatiga	0	0	0	0	0	0
211	Kota Semarang	0	0	0	0	0	0
212	Kota Surakarta	0	0	0	0	0	1.260.000
213	Kota Tegal	2.500.000	540.001	0	540.001	0	3.040.001
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
215	Kab. Bantul	0	14.987.070	0	0	14.987.070
216	Kab. Gunung Kidul	0	0	0	0	0
217	Kab. Kulon Progo	0	0	0	0	0
218	Kab. Sleman	0	0	0	0	0
219	Kota Yogyakarta	0	0	0	0	0
220	Provinsi Jawa Timur	5.904.243	0	0	0	0
221	Kab. Bangkalan	0	2.000.000	35.578.516	0	37.578.516
222	Kab. Banyuwangi	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
215	Kab. Bantul	0	0	0	0	0	14.987.070
216	Kab. Gunung Kidul	0	0	0	0	0	0
217	Kab. Kulon Progo	0	0	0	0	0	0
218	Kab. Sleman	0	0	0	0	0	0
219	Kota Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
220	Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0	0	5.904.243
221	Kab. Bangkalan	0	0	0	0	4.942.047	42.520.563
222	Kab. Banyuwangi	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
223	Kab. Blitar	0	0	0	0	0
224	Kab. Bojonegoro	1.741.629	37.450.000	0	0	37.450.000
225	Kab. Bondowoso	0	0	0	0	0
226	Kab. Gresik	0	19.500.000	0	0	19.500.000
227	Kab. Jember	39.485.913	43.744.579	0	0	43.744.579
228	Kab. Jombang	3.959.000	0	0	0	0
229	Kab. Kediri	2.211.176	0	0	0	0
230	Kab. Lamongan	0	34.544.000	0	0	34.544.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
223	Kab. Blitar	0	0	0	0	0	0
224	Kab. Bojonegoro	0	0	0	0	0	39.191.629
225	Kab. Bondowoso	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
226	Kab. Gresik	0	0	0	0	0	19.500.000
227	Kab. Jember	3.184.100	2.975.393	0	2.975.393	0	89.389.985
228	Kab. Jombang	0	0	0	0	0	3.959.000
229	Kab. Kediri	0	0	0	0	0	2.211.176
230	Kab. Lamongan	0	0	0	0	0	34.544.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
231	Kab. Lumajang	0	14.875.000	0	0	14.875.000
232	Kab. Madiun	1.158.527	0	0	0	0
233	Kab. Magetan	2.523.254	0	0	7.136.799	7.136.799
234	Kab. Malang	0	0	0	10.258.340	10.258.340
235	Kab. Mojokerto	0	0	0	0	0
236	Kab. Nganjuk	0	0	16.111.790	0	16.111.790
237	Kab. Ngawi	3.652.099	14.770.000	0	0	14.770.000
238	Kab. Pacitan	2.753.435	14.200.000	0	8.843.607	23.043.607

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
231	Kab. Lumajang	0	0	0	0	0	14.875.000
232	Kab. Madiun	0	0	0	0	0	1.158.527
233	Kab. Magetan	1.250.000	1.500.000	650.000	2.150.000	0	13.060.053
234	Kab. Malang	0	0	650.000	650.000	0	10.908.340
235	Kab. Mojokerto	0	0	0	0	0	0
236	Kab. Nganjuk	0	0	0	0	2.574.857	18.686.647
237	Kab. Ngawi	0	0	0	0	0	18.422.099
238	Kab. Pacitan	0	0	617.500	617.500	0	26.414.542

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
239	Kab. Pamekasan	23.737.390	0	0	0	0
240	Kab. Pasuruan	0	15.675.000	0	0	15.675.000
241	Kab. Ponorogo	3.830.656	22.740.421	0	7.441.016	30.181.437
242	Kab. Probolinggo	4.112.598	0	16.574.091	0	16.574.091
243	Kab. Sampang	0	0	0	0	0
244	Kab. Sidoarjo	0	0	0	0	0
245	Kab. Situbondo	3.830.904	0	0	0	0
246	Kab. Sumenep	0	35.757.500	13.610.620	0	49.368.120

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
239	Kab. Pamekasan	3.824.750	0	0	0	0	27.562.140
240	Kab. Pasuruan	4.099.598	0	0	0	0	19.774.598
241	Kab. Ponorogo	0	0	660.833	660.833	0	34.672.926
242	Kab. Probolinggo	4.052.347	3.357.877	0	3.357.877	5.806.625	33.903.538
243	Kab. Sampang	0	0	0	0	0	0
244	Kab. Sidoarjo	0	0	0	0	0	0
245	Kab. Situbondo	0	0	0	0	0	3.830.904
246	Kab. Sumenep	2.500.000	1.500.000	0	1.500.000	3.695.125	57.063.245

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
247	Kab. Trenggalek	3.350.000	19.700.000	0	0	19.700.000
248	Kab. Tuban	0	14.850.000	0	0	14.850.000
249	Kab. Tulungagung	1.335.000	14.790.000	19.561.368	0	34.351.368
250	Kota Blitar	0	0	0	0	0
251	Kota Kediri	0	0	0	0	0
252	Kota Madiun	0	0	0	0	0
253	Kota Malang	2.823.400	14.968.000	0	0	14.968.000
254	Kota Mojokerto	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
247	Kab. Trenggalek	2.499.890	0	0	0	1.800.000	27.349.890
248	Kab. Tuban	0	0	0	0	0	14.850.000
249	Kab. Tulungagung	0	0	0	0	2.850.525	38.536.893
250	Kota Blitar	0	0	0	0	0	0
251	Kota Kediri	0	0	0	0	0	0
252	Kota Madiun	0	0	0	0	0	0
253	Kota Malang	0	0	0	0	0	17.791.400
254	Kota Mojokerto	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
255	Kota Pasuruan	3.207.271	0	0	0	0
256	Kota Probolinggo	1.300.000	0	0	0	0
257	Kota Surabaya	0	0	0	0	0
258	Kota Batu	0	0	0	0	0
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	46.439.924	25.701.394	0	0	25.701.394
261	Kab. Landak	3.771.515	0	0	0	0
262	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
255	Kota Pasuruan	0	0	0	0	0	3.207.271
256	Kota Probolinggo	1.159.927	3.215.833	0	3.215.833	0	5.675.760
257	Kota Surabaya	0	0	0	0	0	0
258	Kota Batu	0	0	0	0	0	0
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	0	0	0	0	0	72.141.318
261	Kab. Landak	4.629.615	3.289.116	0	3.289.116	0	11.690.246
262	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
263	Kab. Ketapang	0	0	0	0	0
264	Kab. Mempawah	0	0	0	0	0
265	Kab. Sambas	5.200.000	8.369.658	0	0	8.369.658
266	Kab. Sanggau	8.835.000	9.555.293	0	0	9.555.293
267	Kab. Sintang	2.430.000	0	0	0	0
268	Kota Pontianak	0	0	0	0	0
269	Kota Singkawang	0	0	0	0	0
270	Kab. Sekadau	3.685.319	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
263	Kab. Ketapang	0	0	0	0	0	0
264	Kab. Mempawah	3.562.500	0	0	0	0	3.562.500
265	Kab. Sambas	5.248.203	3.416.189	0	3.416.189	0	22.234.050
266	Kab. Sanggau	0	0	0	0	0	18.390.293
267	Kab. Sintang	0	0	0	0	0	2.430.000
268	Kota Pontianak	0	0	0	0	0	0
269	Kota Singkawang	0	0	0	0	0	0
270	Kab. Sekadau	0	0	0	0	0	3.685.319

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
271	Kab. Melawi	4.544.132	0	0	0	0
272	Kab. Kayong Utara	3.541.300	0	0	0	0
273	Kab. Kubu Raya	0	33.130.000	0	0	33.130.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	2.500.000	0	0	0	0
276	Kab. Barito Utara	0	0	0	0	0
277	Kab. Kapuas	0	0	0	0	0
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
271	Kab. Melawi	0	0	0	0	0	4.544.132
272	Kab. Kayong Utara	0	0	0	0	0	3.541.300
273	Kab. Kubu Raya	4.533.011	0	0	0	0	37.663.011
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	0	2.340.527	0	2.340.527	0	4.840.527
276	Kab. Barito Utara	0	0	0	0	0	0
277	Kab. Kapuas	0	0	0	0	0	0
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	0	0	0	0
280	Kota Palangkaraya	29.057.944	0	0	0	0
281	Kab. Katingan	2.200.000	0	0	0	0
282	Kab. Seruyan	0	0	0	0	0
283	Kab. Sukamara	494.000	0	0	0	0
284	Kab. Lamandau	2.281.300	0	0	0	0
285	Kab. Gunung Mas	3.050.000	0	0	0	0
286	Kab. Pulang Pisau	1.260.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	2.515.841	0	2.515.841	0	2.515.841
280	Kota Palangkaraya	0	0	0	0	0	29.057.944
281	Kab. Katingan	0	0	0	0	0	2.200.000
282	Kab. Seruyan	0	2.415.717	0	2.415.717	0	2.415.717
283	Kab. Sukamara	0	0	0	0	0	494.000
284	Kab. Lamandau	0	0	0	0	0	2.281.300
285	Kab. Gunung Mas	0	0	0	0	0	3.050.000
286	Kab. Pulang Pisau	3.690.000	0	0	0	0	4.950.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
287	Kab. Murung Raya	0	0	0	0	0
288	Kab. Barito Timur	0	0	0	0	0
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0
290	Kab. Banjar	2.300.000	14.800.000	0	0	14.800.000
291	Kab. Barito Kuala	2.147.000	0	0	0	0
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0	0	0	0
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0	0	0
294	Kab. Hulu Sungai Utara	2.046.800	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
287	Kab. Murung Raya	0	0	0	0	0	0
288	Kab. Barito Timur	0	0	0	0	0	0
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
290	Kab. Banjar	3.577.452	2.473.557	0	2.473.557	0	23.151.009
291	Kab. Barito Kuala	0	0	0	0	0	2.147.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.615.810	2.760.044	0	2.760.044	0	6.375.854
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0	0	0	0
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	3.407.529	0	3.407.529	0	5.454.329

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
295	Kab. Kotabaru	0	0	0	0	0
296	Kab. Tabalong	1.425.000	0	0	0	0
297	Kab. Tanah Laut	0	0	0	0	0
298	Kab. Tapin	1.403.299	0	0	0	0
299	Kota Banjarbaru	3.400.000	0	0	0	0
300	Kota Banjarmasin	0	0	0	0	0
301	Kab. Balangan	0	0	0	0	0
302	Kab. Tanah Bumbu	1.502.625	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
295	Kab. Kotabaru	0	0	0	0	0	0
296	Kab. Tabalong	0	0	0	0	0	1.425.000
297	Kab. Tanah Laut	0	3.176.955	0	3.176.955	0	3.176.955
298	Kab. Tapin	0	0	0	0	0	1.403.299
299	Kota Banjarbaru	0	0	0	0	0	3.400.000
300	Kota Banjarmasin	0	2.349.920	0	2.349.920	0	2.349.920
301	Kab. Balangan	2.712.793	3.211.142	0	3.211.142	0	5.923.935
302	Kab. Tanah Bumbu	0	0	0	0	0	1.502.625

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	0	0	0
304	Kab. Berau	0	10.868.566	0	0	10.868.566
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	0	0	0	0
306	Kab. Kutai Barat	2.755.000	0	0	0	0
307	Kab. Kutai Timur	0	0	0	0	0
308	Kab. Paser	0	0	0	0	0
309	Kota Balikpapan	0	0	0	0	0
310	Kota Bontang	0	6.500.000	0	0	6.500.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
304	Kab. Berau	0	0	0	0	0	10.868.566
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	0	0	0	0	0
306	Kab. Kutai Barat	0	2.949.280	0	2.949.280	0	5.704.280
307	Kab. Kutai Timur	0	0	0	0	0	0
308	Kab. Paser	0	0	0	0	0	0
309	Kota Balikpapan	0	0	0	0	0	0
310	Kota Bontang	0	0	0	0	0	6.500.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
311	Kota Samarinda	0	0	0	0	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	0	0	0	0
313	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	0	0
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	0	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	5.820.000	0	0	0	0
316	Kab. Minahasa	1.260.000	0	0	0	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	29.269.877	0	0	0	0
318	Kota Bitung	6.187.973	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
311	Kota Samarinda	0	0	0	0	0	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	1.539.925	0	1.539.925	0	1.539.925
313	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	0	0	0	0	0	5.820.000
316	Kab. Minahasa	0	0	0	0	0	1.260.000
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0	0	0	0	0	29.269.877
318	Kota Bitung	0	1.076.238	0	1.076.238	0	7.264.211

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
319	Kota Manado	4.950.000	0	0	0	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	13.513.000	0	0	0	0
321	Kab. Minahasa Selatan	11.137.550	0	0	0	0
322	Kota Tomohon	4.117.464	0	0	0	0
323	Kab. Minahasa Utara	1.308.029	0	0	0	0
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	4.196.000	14.739.998	0	0	14.739.998
325	Kota Kotamobagu	3.991.000	3.069.000	0	0	3.069.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
319	Kota Manado	0	0	0	0	0	4.950.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	0	0	0	0	13.513.000
321	Kab. Minahasa Selatan	0	0	0	0	0	11.137.550
322	Kota Tomohon	0	0	0	0	0	4.117.464
323	Kab. Minahasa Utara	0	0	0	0	0	1.308.029
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	0	0	0	0	18.935.998
325	Kota Kotamobagu	0	0	0	0	0	7.060.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	0	0	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	0	0	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0	0	0	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	0	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	13.012.807	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	0	0	0	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	0	0	0	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0	0	0	0	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	0	0	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	13.012.807

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
331	Kab. Banggai	8.500.000	0	0	0	0
332	Kab. Banggai Kepulauan	2.780.328	0	0	0	0
333	Kab. Buol	1.312.181	13.041.460	0	0	13.041.460
334	Kab. Toli-Toli	1.308.029	0	0	0	0
335	Kab. Donggala	2.292.500	0	0	0	0
336	Kab. Morowali	1.197.000	0	0	0	0
337	Kab. Poso	0	0	0	0	0
338	Kota Palu	52.908.345	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
331	Kab. Banggai	2.220.000	0	0	0	0	10.720.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	0	0	0	0	0	2.780.328
333	Kab. Buol	4.620.561	0	0	0	0	18.974.202
334	Kab. Toli-Toli	4.553.689	0	0	0	0	5.861.718
335	Kab. Donggala	4.777.197	0	0	0	0	7.069.697
336	Kab. Morowali	0	0	0	0	0	1.197.000
337	Kab. Poso	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	900.000	3.900.000
338	Kota Palu	4.300.000	3.449.568	0	3.449.568	600.000	61.257.913

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
339	Kab. Parigi Moutong	1.282.500	0	0	0	0
340	Kab. Tojo Una Una	5.258.800	0	0	0	0
341	Kab. Sigi	44.842.358	7.911.800	0	0	7.911.800
342	Kab. Banggai Laut	1.868.484	0	0	0	0
343	Kab. Morowali Utara	3.541.300	0	0	0	0
344	Provinsi Sulawesi Selatan	20.340.746	0	0	0	0
345	Kab. Bantaeng	3.325.000	15.150.000	0	0	15.150.000
346	Kab. Barru	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
339	Kab. Parigi Moutong	1.400.000	0	0	0	900.000	3.582.500
340	Kab. Tojo Una Una	1.495.660	1.500.000	0	1.500.000	600.000	8.854.460
341	Kab. Sigi	1.500.000	3.389.899	0	3.389.899	0	57.644.057
342	Kab. Banggai Laut	0	0	0	0	0	1.868.484
343	Kab. Morowali Utara	0	0	0	0	0	3.541.300
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	20.340.746
345	Kab. Bantaeng	0	0	0	0	0	18.475.000
346	Kab. Barru	1.360.000	3.362.505	0	3.362.505	0	4.722.505

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
347	Kab. Bone	2.111.884	0	15.505.195	0	15.505.195
348	Kab. Bulukumba	13.817.464	5.998.969	0	0	5.998.969
349	Kab. Enrekang	3.080.090	0	0	0	0
350	Kab. Gowa	0	0	0	0	0
351	Kab. Jeneponto	0	0	0	0	0
352	Kab. Luwu	0	0	0	0	0
353	Kab. Luwu Utara	2.747.987	0	0	0	0
354	Kab. Maros	20.452.576	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
347	Kab. Bone	0	3.504.723	0	3.504.723	7.301.655	28.423.457
348	Kab. Bulukumba	5.099.596	3.416.189	0	3.416.189	0	28.332.218
349	Kab. Enrekang	0	0	0	0	0	3.080.090
350	Kab. Gowa	0	0	0	0	0	0
351	Kab. Jeneponto	0	3.076.378	0	3.076.378	0	3.076.378
352	Kab. Luwu	0	0	0	0	0	0
353	Kab. Luwu Utara	0	0	0	0	0	2.747.987
354	Kab. Maros	0	3.384.544	0	3.384.544	0	23.837.120

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.401.459	9.500.000	0	0	9.500.000
356	Kota Palopo	0	0	0	0	0
357	Kab. Luwu Timur	0	0	0	0	0
358	Kab. Pinrang	3.619.900	0	18.433.445	0	18.433.445
359	Kab. Sinjai	3.538.280	0	0	0	0
360	Kab. Kepulauan Selayar	2.751.013	0	0	0	0
361	Kab. Sidenreng Rappang	3.840.346	15.595.560	0	0	15.595.560
362	Kab. Soppeng	1.260.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	0	0	0	0	0	10.901.459
356	Kota Palopo	0	0	0	0	0	0
357	Kab. Luwu Timur	0	0	0	0	0	0
358	Kab. Pinrang	0	0	0	0	2.451.686	24.505.031
359	Kab. Sinjai	4.015.300	3.032.175	0	3.032.175	0	10.585.755
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	1.949.568	0	1.949.568	0	4.700.581
361	Kab. Sidenreng Rappang	0	3.369.179	0	3.369.179	0	22.805.085
362	Kab. Soppeng	0	3.502.426	0	3.502.426	0	4.762.426

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
363	Kab. Takalar	2.927.000	0	0	0	0
364	Kab. Tana Toraja	10.416.678	0	0	0	0
365	Kab. Wajo	0	0	16.365.974	0	16.365.974
366	Kota Pare-pare	24.109.180	3.277.750	0	0	3.277.750
367	Kota Makassar	0	0	0	0	0
368	Kab. Toraja Utara	8.834.288	0	0	0	0
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.660.000	0	0	0	0
370	Kab. Buton	2.272.588	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
363	Kab. Takalar	0	3.427.267	0	3.427.267	0	6.354.267
364	Kab. Tana Toraja	0	3.504.723	0	3.504.723	0	13.921.401
365	Kab. Wajo	0	0	0	0	1.741.837	18.107.811
366	Kota Pare-pare	3.600.000	1.076.238	0	1.076.238	0	32.063.168
367	Kota Makassar	0	0	0	0	0	0
368	Kab. Toraja Utara	0	0	0	0	0	8.834.288
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	2.660.000
370	Kab. Buton	0	0	0	0	0	2.272.588

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
371	Kab. Konawe	0	0	17.834.871	0	17.834.871
372	Kab. Kolaka	0	0	0	0	0
373	Kab. Muna	0	0	0	0	0
374	Kota Kendari	0	0	0	0	0
375	Kota Bau-bau	8.661.863	0	0	0	0
376	Kab. Konawe Selatan	9.300.000	0	0	0	0
377	Kab. Bombana	0	10.916.637	0	0	10.916.637
378	Kab. Wakatobi	1.652.136	0	0	9.244.656	9.244.656

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
371	Kab. Konawe	0	1.867.557	0	1.867.557	3.035.281	22.737.709
372	Kab. Kolaka	0	3.165.680	0	3.165.680	0	3.165.680
373	Kab. Muna	0	0	0	0	0	0
374	Kota Kendari	0	0	0	0	0	0
375	Kota Bau-bau	1.083.450	2.872.565	0	2.872.565	0	12.617.878
376	Kab. Konawe Selatan	0	3.410.233	0	3.410.233	0	12.710.233
377	Kab. Bombana	0	0	0	0	0	10.916.637
378	Kab. Wakatobi	0	0	650.000	650.000	0	11.546.792

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
379	Kab. Kolaka Utara	3.425.789	15.750.000	0	0	15.750.000
380	Kab. Konawe Utara	0	9.600.659	0	0	9.600.659
381	Kab. Buton Utara	0	0	0	0	0
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0	0	0
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	0	0	0
384	Kab. Muna Barat	0	0	0	0	0
385	Kab. Buton Tengah	0	0	0	0	0
386	Kab. Buton Selatan	4.670.801	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
379	Kab. Kolaka Utara	0	2.797.499	0	2.797.499	0	21.973.288
380	Kab. Konawe Utara	0	3.168.269	0	3.168.269	0	12.768.928
381	Kab. Buton Utara	0	0	0	0	0	0
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0	0	0	0
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	0	0	0	0
384	Kab. Muna Barat	0	0	0	0	0	0
385	Kab. Buton Tengah	0	3.408.572	0	3.408.572	0	3.408.572
386	Kab. Buton Selatan	0	1.949.568	0	1.949.568	0	6.620.369

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
387	Provinsi Bali	0	0	0	0	0
388	Kab. Badung	0	0	0	0	0
389	Kab. Bangli	0	0	0	8.880.688	8.880.688
390	Kab. Buleleng	0	0	0	0	0
391	Kab. Gianyar	0	0	0	0	0
392	Kab. Jembrana	2.500.000	0	0	0	0
393	Kab. Karangasem	2.429.196	0	0	0	0
394	Kab. Klungkung	0	15.000.000	0	9.457.617	24.457.617

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
387	Provinsi Bali	0	0	0	0	0	0
388	Kab. Badung	0	0	0	0	0	0
389	Kab. Bangli	0	0	600.001	600.001	0	9.480.689
390	Kab. Buleleng	0	0	0	0	0	0
391	Kab. Gianyar	0	0	0	0	0	0
392	Kab. Jembrana	0	0	0	0	0	2.500.000
393	Kab. Karangasem	0	0	0	0	0	2.429.196
394	Kab. Klungkung	0	0	648.000	648.000	0	25.105.617

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
395	Kab. Tabanan	0	0	0	0	0
396	Kota Denpasar	0	0	0	0	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0
398	Kab. Bima	4.453.964	0	0	0	0
399	Kab. Dompu	4.374.885	0	0	0	0
400	Kab. Lombok Barat	1.121.167	0	0	0	0
401	Kab. Lombok Tengah	7.747.391	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
395	Kab. Tabanan	0	0	0	0	0	0
396	Kota Denpasar	0	0	0	0	0	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
398	Kab. Bima	8.353.461	1.539.300	0	1.539.300	3.000.000	17.346.725
399	Kab. Dompu	0	0	0	0	0	4.374.885
400	Kab. Lombok Barat	0	0	0	0	0	1.121.167
401	Kab. Lombok Tengah	0	0	0	0	0	7.747.391

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
402	Kab. Lombok Timur	6.295.800	0	0	7.688.713	7.688.713
403	Kab. Sumbawa	0	0	0	0	0
404	Kota Mataram	0	0	0	0	0
405	Kota Bima	0	0	0	0	0
406	Kab. Sumbawa Barat	2.448.266	0	0	0	0
407	Kab. Lombok Utara	3.100.000	0	0	0	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	20.900.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
402	Kab. Lombok Timur	4.640.180	2.951.497	0	2.951.497	0	21.576.190
403	Kab. Sumbawa	5.617.381	2.994.390	0	2.994.390	0	8.611.771
404	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0
405	Kota Bima	5.142.955	1.529.557	0	1.529.557	0	6.672.512
406	Kab. Sumbawa Barat	0	0	0	0	0	2.448.266
407	Kab. Lombok Utara	3.974.044	1.511.643	0	1.511.643	0	8.585.687
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	20.900.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
409	Kab. Alor	3.723.828	8.951.797	0	0	8.951.797
410	Kab. Belu	0	10.095.414	0	0	10.095.414
411	Kab. Ende	1.446.052	0	0	0	0
412	Kab. Flores Timur	1.203.802	0	0	0	0
413	Kab. Kupang	3.610.000	11.200.188	0	0	11.200.188
414	Kab. Lembata	15.549.011	0	0	0	0
415	Kab. Manggarai	0	0	0	0	0
416	Kab. Ngada	953.329	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
409	Kab. Alor	0	0	0	0	0	12.675.625
410	Kab. Belu	0	2.432.955	0	2.432.955	0	12.528.369
411	Kab. Ende	0	0	0	0	0	1.446.052
412	Kab. Flores Timur	0	2.116.970	0	2.116.970	0	3.320.772
413	Kab. Kupang	0	0	0	0	0	14.810.188
414	Kab. Lembata	0	0	0	0	0	15.549.011
415	Kab. Manggarai	0	0	0	0	0	0
416	Kab. Ngada	0	0	0	0	0	953.329

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
417	Kab. Sikka	9.211.630	0	0	0	0
418	Kab. Sumba Barat	2.778.144	11.115.555	0	0	11.115.555
419	Kab. Sumba Timur	0	9.129.107	0	0	9.129.107
420	Kab. Timor Tengah Selatan	11.656.093	12.299.852	0	0	12.299.852
421	Kab. Timor Tengah Utara	11.572.396	6.156.724	0	0	6.156.724
422	Kota Kupang	0	0	0	0	0
423	Kab. Rote Ndao	3.562.193	9.843.407	0	0	9.843.407
424	Kab. Manggarai Barat	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
417	Kab. Sikka	0	0	0	0	0	9.211.630
418	Kab. Sumba Barat	0	0	0	0	0	13.893.699
419	Kab. Sumba Timur	0	2.439.638	0	2.439.638	0	11.568.745
420	Kab. Timor Tengah Selatan	0	1.061.368	0	1.061.368	0	25.017.313
421	Kab. Timor Tengah Utara	0	0	0	0	0	17.729.120
422	Kota Kupang	0	2.497.624	0	2.497.624	0	2.497.624
423	Kab. Rote Ndao	0	0	0	0	0	13.405.600
424	Kab. Manggarai Barat	0	2.401.804	0	2.401.804	0	2.401.804

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
425	Kab. Nagekeo	3.421.950	0	0	0	0
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	11.714.412	0	0	11.714.412
427	Kab. Sumba Tengah	4.117.000	11.181.711	0	0	11.181.711
428	Kab. Manggarai Timur	18.065.847	14.700.000	0	0	14.700.000
429	Kab. Sabu Raijua	0	7.645.798	0	0	7.645.798
430	Kab. Malaka	7.400.000	10.373.885	0	0	10.373.885
431	Provinsi Maluku	0	0	0	0	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	11.468.947	9.525.535	0	0	9.525.535

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
425	Kab. Nagekeo	0	0	0	0	0	3.421.950
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	600.000	600.000	0	12.314.412
427	Kab. Sumba Tengah	0	0	0	0	0	15.298.711
428	Kab. Manggarai Timur	0	0	0	0	0	32.765.847
429	Kab. Sabu Raijua	0	0	0	0	0	7.645.798
430	Kab. Malaka	0	0	0	0	0	17.773.885
431	Provinsi Maluku	0	0	0	0	0	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.567.958	0	0	0	0	25.562.440

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
433	Kab. Maluku Tengah	5.800.000	0	0	0	0
434	Kab. Maluku Tenggara	1.330.000	8.556.344	0	0	8.556.344
435	Kab. Buru	0	0	0	0	0
436	Kota Ambon	0	0	0	0	0
437	Kab. Seram Bagian Barat	989.313	8.667.100	0	0	8.667.100
438	Kab. Seram Bagian Timur	12.457.416	0	0	0	0
439	Kab. Kepulauan Aru	0	8.314.389	0	0	8.314.389
440	Kota Tual	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
433	Kab. Maluku Tengah	4.084.208	2.412.561	0	2.412.561	0	12.296.769
434	Kab. Maluku Tenggara	3.572.087	2.541.147	0	2.541.147	0	15.999.578
435	Kab. Buru	4.970.546	0	0	0	0	4.970.546
436	Kota Ambon	0	0	0	0	0	0
437	Kab. Seram Bagian Barat	4.868.157	2.412.539	0	2.412.539	0	16.937.109
438	Kab. Seram Bagian Timur	4.509.436	0	0	0	0	16.966.852
439	Kab. Kepulauan Aru	0	0	0	0	0	8.314.389
440	Kota Tual	3.827.946	2.376.951	0	2.376.951	0	6.204.897

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	26.026.222	0	0	26.026.222
442	Kab. Buru Selatan	0	10.010.612	0	0	10.010.612
443	Provinsi Papua	0	0	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	0	10.487.918	0	0	10.487.918
445	Kab. Jayapura	0	0	0	0	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	47.225.985	15.600.000	0	0	15.600.000
447	Kota Jayapura	0	15.825.469	0	0	15.825.469
448	Kab. Sarmi	0	9.046.829	0	0	9.046.829

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	0	0	0	26.026.222
442	Kab. Buru Selatan	3.717.869	0	0	0	0	13.728.481
443	Provinsi Papua	0	0	0	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	4.230.205	0	0	0	0	14.718.123
445	Kab. Jayapura	0	0	0	0	0	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0	0	0	62.825.985
447	Kota Jayapura	0	0	0	0	0	15.825.469
448	Kab. Sarmi	0	0	0	0	0	9.046.829

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
449	Kab. Keerom	14.335.300	8.508.126	0	0	8.508.126
450	Kab. Waropen	0	8.766.117	0	0	8.766.117
451	Kab. Supiori	0	24.673.486	0	0	24.673.486
452	Kab. Mamberamo Raya	0	9.538.444	0	0	9.538.444
453	Provinsi Maluku Utara	0	0	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	10.404.747	0	0	10.404.747
455	Kota Ternate	0	0	0	0	0
456	Kab. Halmahera Barat	2.565.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
449	Kab. Keerom	0	0	0	0	0	22.843.426
450	Kab. Waropen	0	0	0	0	0	8.766.117
451	Kab. Supiori	0	0	0	0	0	24.673.486
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	0	0	9.538.444
453	Provinsi Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	1.076.238	0	1.076.238	0	11.480.985
455	Kota Ternate	0	0	0	0	0	0
456	Kab. Halmahera Barat	0	0	0	0	0	2.565.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
457	Kab. Halmahera Timur	0	0	0	0	0
458	Kab. Halmahera Selatan	1.900.000	0	0	0	0
459	Kab. Halmahera Utara	0	0	0	0	0
460	Kab. Kepulauan Sula	0	0	0	0	0
461	Kota Tidore Kepulauan	4.040.083	0	0	4.839.855	4.839.855
462	Kab. Pulau Morotai	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
457	Kab. Halmahera Timur	0	0	0	0	0	0
458	Kab. Halmahera Selatan	0	1.747.041	0	1.747.041	0	3.647.041
459	Kab. Halmahera Utara	0	0	0	0	0	0
460	Kab. Kepulauan Sula	0	0	0	0	0	0
461	Kota Tidore Kepulauan	0	0	0	0	0	8.879.938
462	Kab. Pulau Morotai	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
463	Kab. Pulau Taliabu	0	0	0	0	0
464	Provinsi Banten	11.285.352	0	0	0	0
465	Kab. Lebak	4.890.885	0	0	0	0
466	Kab. Pandeglang	8.503.277	0	0	0	0
467	Kab. Serang	0	0	0	0	0
468	Kab. Tangerang	0	0	0	0	0
469	Kota Cilegon	0	0	0	0	0
470	Kota Tangerang	1.844.186	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
463	Kab. Pulau Taliabu	0	0	0	0	0	0
464	Provinsi Banten	0	0	0	0	0	11.285.352
465	Kab. Lebak	4.371.596	2.495.819	0	2.495.819	0	11.758.300
466	Kab. Pandeglang	4.837.888	0	0	0	0	13.341.165
467	Kab. Serang	0	0	0	0	0	0
468	Kab. Tangerang	0	0	0	0	0	0
469	Kota Cilegon	0	0	0	0	0	0
470	Kota Tangerang	0	0	0	0	0	1.844.186

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
471	Kota Serang	3.249.309	0	0	0	0
472	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0	0
473	Provinsi Bangka Belitung	0	0	0	0	0
474	Kab. Bangka	0	0	0	0	0
475	Kab. Belitung	0	0	0	9.941.969	9.941.969
476	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0	0
477	Kab. Bangka Selatan	5.105.564	14.850.000	0	0	14.850.000
478	Kab. Bangka Tengah	3.700.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
471	Kota Serang	1.417.500	0	0	0	3.000.000	7.666.809
472	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0	0	0
473	Provinsi Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
474	Kab. Bangka	0	0	0	0	0	0
475	Kab. Belitung	0	0	600.000	600.000	0	10.541.969
476	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0
477	Kab. Bangka Selatan	0	0	0	0	0	19.955.564
478	Kab. Bangka Tengah	0	0	0	0	0	3.700.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
479	Kab. Bangka Barat	0	0	0	0	0
480	Kab. Belitung Timur	4.838.342	0	0	0	0
481	Provinsi Gorontalo	44.437.652	0	0	0	0
482	Kab. Boalemo	1.577.939	15.750.000	0	0	15.750.000
483	Kab. Gorontalo	0	0	0	0	0
484	Kota Gorontalo	0	0	0	0	0
485	Kab. Pohuwato	3.695.700	0	0	0	0
486	Kab. Bone Bolango	3.114.354	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
479	Kab. Bangka Barat	0	0	0	0	0	0
480	Kab. Belitung Timur	0	0	0	0	0	4.838.342
481	Provinsi Gorontalo	0	0	0	0	0	44.437.652
482	Kab. Boalemo	0	0	0	0	0	17.327.939
483	Kab. Gorontalo	780.562	1.949.568	0	1.949.568	0	2.730.130
484	Kota Gorontalo	1.789.419	1.000.000	0	1.000.000	0	2.789.419
485	Kab. Pohuwato	0	0	0	0	0	3.695.700
486	Kab. Bone Bolango	0	0	0	0	0	3.114.354

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
487	Kab. Gorontalo Utara	4.351.064	0	0	0	0
488	Provinsi Kepulauan Riau	176.500	0	0	0	0
489	Kab. Natuna	2.283.860	0	0	0	0
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	8.339.984	0	0	8.339.984
491	Kab. Karimun	0	0	0	0	0
492	Kota Batam	0	0	0	0	0
493	Kota Tanjung Pinang	3.316.787	0	0	4.520.502	4.520.502
494	Kab. Lingga	2.167.500	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
487	Kab. Gorontalo Utara	4.296.436	1.076.238	0	1.076.238	0	9.723.738
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	176.500
489	Kab. Natuna	0	0	0	0	0	2.283.860
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	0	0	0	0	8.339.984
491	Kab. Karimun	0	0	0	0	0	0
492	Kota Batam	0	0	0	0	0	0
493	Kota Tanjung Pinang	0	0	615.430	615.430	0	8.452.719
494	Kab. Lingga	0	0	0	0	0	2.167.500

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
495	Kab. Bintan	0	0	0	0	0
496	Provinsi Papua Barat	4.202.196	0	0	0	0
497	Kab. Fak Fak	9.991.977	0	0	0	0
498	Kab. Manokwari	10.027.250	0	0	0	0
499	Kab. Teluk Bintuni	0	10.515.058	0	0	10.515.058
500	Kab. Teluk Wondama	4.227.690	10.110.932	0	0	10.110.932
501	Kab. Kaimana	3.424.902	9.300.594	0	0	9.300.594
502	Kab. Manokwari Selatan	4.852.152	10.561.753	0	0	10.561.753

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
495	Kab. Bintan	0	0	0	0	0	0
496	Provinsi Papua Barat	0	0	0	0	0	4.202.196
497	Kab. Fak Fak	0	0	0	0	0	9.991.977
498	Kab. Manokwari	0	0	0	0	0	10.027.250
499	Kab. Teluk Bintuni	0	0	0	0	0	10.515.058
500	Kab. Teluk Wondama	0	0	0	0	0	14.338.622
501	Kab. Kaimana	0	0	0	0	0	12.725.496
502	Kab. Manokwari Selatan	0	0	0	0	0	15.413.905

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	11.516.327	0	0	11.516.327
504	Provinsi Sulawesi Barat	2.430.000	0	0	0	0
505	Kab. Majene	1.308.029	0	0	0	0
506	Kab. Mamuju	9.719.468	0	0	0	0
507	Kab. Polewali Mandar	2.430.000	0	0	0	0
508	Kab. Mamasa	0	8.449.500	0	0	8.449.500
509	Kab. Pasangkayu	0	25.225.196	0	0	25.225.196
510	Kab. Mamuju Tengah	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	0	0	0	11.516.327
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	2.430.000
505	Kab. Majene	0	2.346.508	0	2.346.508	0	3.654.537
506	Kab. Mamuju	0	1.947.220	0	1.947.220	0	11.666.688
507	Kab. Polewali Mandar	0	2.593.659	0	2.593.659	0	5.023.659
508	Kab. Mamasa	0	1.661.974	0	1.661.974	0	10.111.474
509	Kab. Pasangkayu	0	2.244.704	0	2.244.704	0	27.469.900
510	Kab. Mamuju Tengah	0	2.378.998	0	2.378.998	0	2.378.998

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
511	Provinsi Kalimantan Utara	50.413.937	0	0	0	0
512	Kab. Bulungan	2.295.680	0	0	0	0
513	Kab. Malinau	0	11.352.485	0	0	11.352.485
514	Kab. Nunukan	1.057.744	9.690.403	0	0	9.690.403
515	Kota Tarakan	3.357.162	0	0	0	0
516	Kab. Tana Tidung	0	10.805.309	0	0	10.805.309
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	25.132.666	0	0	25.132.666

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	50.413.937
512	Kab. Bulungan	0	0	0	0	0	2.295.680
513	Kab. Malinau	0	0	0	0	0	11.352.485
514	Kab. Nunukan	0	0	0	0	0	10.748.147
515	Kota Tarakan	0	0	0	0	0	3.357.162
516	Kab. Tana Tidung	0	0	0	0	0	10.805.309
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	0	0	0	0	25.132.666

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0	0	0
520	Kab. Mappi	0	8.885.093	0	0	8.885.093
521	Kab. Asmat	0	10.349.371	0	0	10.349.371
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0	0	0
523	Kab. Mimika	950.000	0	0	0	0
524	Kab. Nabire	0	0	0	0	0
525	Kab. Paniai	3.193.235	0	0	0	0
526	Kab. Puncak Jaya	0	12.428.165	0	0	12.428.165

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0	0	0	0
520	Kab. Mappi	0	0	0	0	0	8.885.093
521	Kab. Asmat	2.419.848	0	0	0	0	12.769.219
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0	0	0	0
523	Kab. Mimika	0	0	0	0	0	950.000
524	Kab. Nabire	0	0	0	0	0	0
525	Kab. Paniai	0	0	0	0	0	3.193.235
526	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	0	0	12.428.165

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
527	Kab. Dogiyai	0	10.376.390	0	0	10.376.390
528	Kab. Puncak	0	12.783.991	0	0	12.783.991
529	Kab. Intan Jaya	0	11.783.363	0	0	11.783.363
530	Kab. Deiyai	0	0	0	0	0
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	0	10.781.831	0	0	10.781.831
533	Kab. Yahukimo	0	10.146.250	0	0	10.146.250
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	12.572.074	0	0	12.572.074

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
527	Kab. Dogiyai	0	0	0	0	0	10.376.390
528	Kab. Puncak	0	0	0	0	0	12.783.991
529	Kab. Intan Jaya	5.147.379	0	0	0	0	16.930.742
530	Kab. Deiyai	0	0	0	0	0	0
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	4.532.376	0	0	0	0	15.314.207
533	Kab. Yahukimo	4.358.718	0	0	0	0	14.504.968
534	Kab. Pegunungan Bintang	5.228.929	0	0	0	0	17.801.003

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
535	Kab. Tolikara	0	10.459.917	0	0	10.459.917
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	10.962.200	0	0	10.962.200
537	Kab. Yalimo	0	11.428.464	0	0	11.428.464
538	Kab. Lanny Jaya	0	11.168.358	0	0	11.168.358
539	Kab. Nduga	0	12.207.435	0	0	12.207.435
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	0	0	0
541	Kab. Sorong	3.570.000	0	0	0	0
542	Kota Sorong	2.200.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
535	Kab. Tolikara	5.273.687	0	0	0	0	15.733.604
536	Kab. Mamberamo Tengah	5.173.860	0	0	0	0	16.136.060
537	Kab. Yalimo	4.365.982	0	0	0	0	15.794.446
538	Kab. Lanny Jaya	3.973.850	0	0	0	0	15.142.208
539	Kab. Nduga	5.280.014	0	0	0	0	17.487.449
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0
541	Kab. Sorong	0	1.076.238	0	1.076.238	0	4.646.238
542	Kota Sorong	0	1.076.238	0	1.076.238	0	3.276.238

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
543	Kab. Raja Ampat	0	9.473.827	0	0	9.473.827
544	Kab. Sorong Selatan	3.750.059	11.072.414	0	0	11.072.414
545	Kab. Maybrat	0	11.607.552	0	0	11.607.552
546	Kab. Tambrauw	20.000.000	0	0	0	0
	JUMLAH NASIONAL	1.874.490.454	1.948.095.506	286.020.832	141.928.352	2.376.044.690

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
543	Kab. Raja Ampat	0	1.512.903	0	1.512.903	0	10.986.730
544	Kab. Sorong Selatan	0	1.076.238	0	1.076.238	0	15.898.711
545	Kab. Maybrat	0	0	0	0	0	11.607.552
546	Kab. Tambrauw	2.500.000	0	0	0	1.200.000	23.700.000
	JUMLAH NASIONAL	367.302.311	261.922.397	8.913.430	270.835.827	111.326.718	5.000.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Provinsi Aceh	349.793.820	7.598.000	413.000	0	0	0
2	Kab. Aceh Barat	24.121.740	752.000	460.000	2.809.840	82.500	100.000
3	Kab. Aceh Besar	45.498.680	810.000	160.000	5.910.600	82.500	25.000
4	Kab. Aceh Selatan	30.628.660	717.500	760.000	6.265.200	82.500	575.000
5	Kab. Aceh Singkil	25.000.140	480.000	625.000	2.896.020	82.500	325.000
6	Kab. Aceh Tengah	28.440.540	682.500	315.000	3.596.670	82.500	125.000
7	Kab. Aceh Tenggara	35.612.080	742.500	320.000	5.247.600	82.500	200.000
8	Kab. Aceh Timur	62.038.560	967.500	470.000	7.394.740	82.500	100.000
9	Kab. Aceh Utara	86.515.060	1.504.500	2.215.000	9.600.000	82.500	1.775.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Provinsi Aceh	0	0	0	714.515.369	798.000	4.447.070
2	Kab. Aceh Barat	810.820	90.000	0	79.243.887	49.750	6.370.647
3	Kab. Aceh Besar	3.005.300	135.000	0	100.751.365	189.000	3.171.065
4	Kab. Aceh Selatan	510.900	90.000	31.000	82.702.028	44.250	6.876.604
5	Kab. Aceh Singkil	416.320	90.000	0	57.005.711	27.000	6.413.709
6	Kab. Aceh Tengah	257.360	45.000	0	96.107.364	78.000	3.877.424
7	Kab. Aceh Tenggara	2.363.200	135.000	0	76.696.068	90.000	1.377.031
8	Kab. Aceh Timur	11.139.620	180.000	31.000	151.999.579	291.000	5.588.827
9	Kab. Aceh Utara	11.670.500	225.000	93.000	201.850.743	264.000	26.929.700

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
1	Provinsi Aceh	700.000	3.000.000	1.500.000	0
2	Kab. Aceh Barat	500.000	0	0	3.319.489
3	Kab. Aceh Besar	500.000	0	0	5.875.084
4	Kab. Aceh Selatan	0	0	0	3.002.157
5	Kab. Aceh Singkil	498.545	0	0	1.704.442
6	Kab. Aceh Tengah	498.545	500.000	0	3.416.939
7	Kab. Aceh Tenggara	0	0	0	4.599.847
8	Kab. Aceh Timur	498.545	0	0	6.004.089
9	Kab. Aceh Utara	398.545	0	0	7.405.121

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
1	Provinsi Aceh	7.772.868	0	0	0
2	Kab. Aceh Barat	0	6.416.920	10.503.984	111.247
3	Kab. Aceh Besar	0	9.483.350	18.756.224	445.647
4	Kab. Aceh Selatan	0	7.133.271	17.664.329	86.359
5	Kab. Aceh Singkil	0	8.032.740	11.619.237	477.187
6	Kab. Aceh Tengah	0	6.680.627	9.011.241	383.982
7	Kab. Aceh Tenggara	0	7.976.077	16.822.920	209.986
8	Kab. Aceh Timur	0	9.715.134	17.364.888	203.917
9	Kab. Aceh Utara	0	9.962.700	28.644.493	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
1	Provinsi Aceh	0	408.000	1.090.946.127
2	Kab. Aceh Barat	0	408.000	136.150.824
3	Kab. Aceh Besar	0	0	194.798.815
4	Kab. Aceh Selatan	0	0	157.169.758
5	Kab. Aceh Singkil	7.202.880	0	122.896.431
6	Kab. Aceh Tengah	0	507.000	154.605.692
7	Kab. Aceh Tenggara	0	0	152.474.809
8	Kab. Aceh Timur	0	0	274.069.899
9	Kab. Aceh Utara	0	408.000	389.543.862

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
10	Kab. Bireuen	56.682.680	925.000	1.090.000	6.834.260	82.500	525.000
11	Kab. Pidie	46.894.920	932.500	220.000	4.068.600	82.500	50.000
12	Kab. Simeulue	15.527.060	445.000	130.000	1.484.600	82.500	25.000
13	Kota Banda Aceh	37.957.100	365.000	0	5.380.050	82.500	0
14	Kota Sabang	5.664.400	102.500	0	758.200	82.500	0
15	Kota Langsa	19.807.000	262.500	0	3.010.200	82.500	0
16	Kota Lhokseumawe	26.660.890	320.000	0	2.272.410	82.500	0
17	Kab. Gayo Lues	16.529.850	400.000	95.000	1.987.220	82.500	25.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	18.422.080	410.000	0	3.882.600	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
10	Kab. Bireuen	7.104.190	135.000	93.000	130.869.251	57.000	15.404.107
11	Kab. Pidie	1.088.200	90.000	0	114.534.389	51.000	3.182.152
12	Kab. Simeulue	111.940	90.000	0	57.663.522	45.000	1.342.791
13	Kota Banda Aceh	3.122.970	90.000	0	64.619.228	21.000	0
14	Kota Sabang	463.560	90.000	0	19.828.543	21.000	0
15	Kota Langsa	2.113.900	135.000	0	44.014.212	15.000	0
16	Kota Lhokseumawe	471.020	45.000	0	54.682.822	84.000	0
17	Kab. Gayo Lues	380.900	45.000	31.000	51.584.304	57.000	2.238.919
18	Kab. Aceh Barat Daya	450.000	90.000	0	52.577.664	66.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
10	Kab. Bireuen	398.545	0	0	5.604.337
11	Kab. Pidie	498.545	0	0	7.024.933
12	Kab. Simeulue	0	0	0	1.859.499
13	Kota Banda Aceh	0	0	0	1.351.568
14	Kota Sabang	0	0	0	292.114
15	Kota Langsa	0	0	0	793.469
16	Kota Lhokseumawe	500.000	500.000	0	837.037
17	Kab. Gayo Lues	0	0	0	2.324.465
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	0	0	1.883.487

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
10	Kab. Bireuen	0	10.177.087	13.410.313	320.158
11	Kab. Pidie	0	8.480.816	18.640.118	596.125
12	Kab. Simeulue	0	6.159.402	10.067.468	189.710
13	Kota Banda Aceh	0	3.106.660	6.550.300	0
14	Kota Sabang	0	7.237.903	3.722.587	239.319
15	Kota Langsa	0	2.328.383	4.044.805	212.796
16	Kota Lhokseumawe	0	5.094.665	3.793.357	510.409
17	Kab. Gayo Lues	0	6.075.946	10.200.047	0
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	5.243.351	8.160.885	224.976

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
10	Kab. Bireuen	0	408.000	250.120.428
11	Kab. Pidie	0	0	206.434.798
12	Kab. Simeulue	5.762.304	0	100.985.796
13	Kota Banda Aceh	0	507.000	123.153.376
14	Kota Sabang	0	507.000	39.009.626
15	Kota Langsa	0	507.000	77.326.765
16	Kota Lhokseumawe	0	507.000	96.361.110
17	Kab. Gayo Lues	0	0	92.057.151
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	0	91.493.543

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
19	Kab. Aceh Jaya	13.384.420	365.000	155.000	3.051.000	82.500	125.000
20	Kab. Nagan Raya	24.707.440	490.000	185.000	3.258.880	82.500	175.000
21	Kab. Aceh Tamiang	38.103.300	650.000	0	3.066.600	82.500	0
22	Kab. Bener Meriah	24.940.640	525.000	250.000	3.514.800	82.500	175.000
23	Kab. Pidie Jaya	17.647.820	365.000	125.000	2.559.000	82.500	25.000
24	Kota Subulussalam	17.865.220	415.000	155.000	2.860.200	82.500	125.000
25	Provinsi Sumatera Utara	1.083.750.170	13.167.000	5.705.000	0	0	0
26	Kab. Asahan	86.334.600	1.397.500	0	5.856.600	82.500	0
27	Kab. Dairi	54.909.890	852.500	120.000	1.841.490	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
19	Kab. Aceh Jaya	3.947.000	135.000	0	56.576.737	24.000	1.876.291
20	Kab. Nagan Raya	1.077.550	90.000	0	68.661.969	51.000	2.000.220
21	Kab. Aceh Tamiang	1.293.700	135.000	0	93.584.955	63.000	0
22	Kab. Bener Meriah	1.001.100	90.000	0	84.664.640	111.000	3.152.368
23	Kab. Pidie Jaya	1.190.400	90.000	0	48.464.081	12.000	1.474.928
24	Kota Subulussalam	799.300	90.000	0	34.756.977	12.000	2.003.794
25	Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	650.819.443	147.000	50.105.485
26	Kab. Asahan	2.713.900	45.000	0	110.413.423	150.000	0
27	Kab. Dairi	161.140	45.000	0	109.137.384	52.250	469.874

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
19	Kab. Aceh Jaya	398.545	0	0	1.886.222
20	Kab. Nagan Raya	400.000	0	0	2.689.269
21	Kab. Aceh Tamiang	500.000	0	0	2.932.104
22	Kab. Bener Meriah	398.545	0	0	3.139.597
23	Kab. Pidie Jaya	0	600.000	0	3.022.759
24	Kota Subulussalam	0	0	0	1.019.349
25	Provinsi Sumatera Utara	400.000	1.300.000	1.700.000	0
26	Kab. Asahan	0	0	0	5.864.316
27	Kab. Dairi	398.545	0	0	3.043.340

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
19	Kab. Aceh Jaya	0	6.819.603	6.845.635	711.147
20	Kab. Nagan Raya	0	7.194.037	13.302.784	375.812
21	Kab. Aceh Tamiang	0	6.488.947	9.388.487	419.634
22	Kab. Bener Meriah	0	6.536.104	7.307.313	713.319
23	Kab. Pidie Jaya	0	5.418.695	8.149.532	311.416
24	Kota Subulussalam	0	5.181.681	4.790.328	60.828
25	Provinsi Sumatera Utara	16.121.097	0	0	0
26	Kab. Asahan	0	12.362.614	16.029.374	340.649
27	Kab. Dairi	0	7.235.069	12.786.130	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
19	Kab. Aceh Jaya	0	0	96.383.100
20	Kab. Nagan Raya	0	408.000	125.149.461
21	Kab. Aceh Tamiang	0	0	156.708.227
22	Kab. Bener Meriah	0	507.000	137.108.926
23	Kab. Pidie Jaya	0	0	89.538.131
24	Kota Subulussalam	0	0	70.217.177
25	Provinsi Sumatera Utara	0	408.000	1.823.623.195
26	Kab. Asahan	0	408.000	241.998.476
27	Kab. Dairi	0	408.000	191.543.112

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
28	Kab. Deli Serdang	252.616.690	3.327.500	0	14.784.570	82.500	0
29	Kab. Karo	57.524.900	875.000	0	2.576.100	82.500	0
30	Kab. Labuhanbatu	61.696.710	897.500	0	4.855.040	82.500	0
31	Kab. Langkat	121.197.880	2.115.000	95.000	7.750.200	82.500	75.000
32	Kab. Mandailing Natal	70.568.850	1.237.500	2.710.000	4.858.800	82.500	925.000
33	Kab. Nias	29.914.680	679.500	3.300.000	1.469.700	82.500	800.000
34	Kab. Simalungun	109.339.800	2.190.000	30.000	6.141.600	82.500	0
35	Kab. Tapanuli Selatan	43.429.730	862.500	940.000	3.468.150	82.500	250.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	48.665.800	1.057.500	1.360.000	2.542.800	82.500	325.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
28	Kab. Deli Serdang	16.809.910	405.000	0	247.245.003	222.000	0
29	Kab. Karo	277.180	45.000	0	97.713.160	129.000	0
30	Kab. Labuhanbatu	2.951.510	90.000	0	102.928.557	240.000	0
31	Kab. Langkat	3.899.900	180.000	31.000	227.457.097	588.000	791.873
32	Kab. Mandailing Natal	922.110	90.000	31.000	197.484.218	402.000	31.872.031
33	Kab. Nias	1.037.960	135.000	124.000	65.478.788	141.000	32.511.857
34	Kab. Simalungun	430.500	45.000	0	233.220.415	324.000	213.920
35	Kab. Tapanuli Selatan	1.318.300	45.000	0	92.622.428	147.000	7.722.224
36	Kab. Tapanuli Tengah	253.360	90.000	0	78.398.003	150.000	9.955.670

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
28	Kab. Deli Serdang	0	600.000	0	10.311.194
29	Kab. Karo	398.545	0	0	3.321.707
30	Kab. Labuhanbatu	0	0	0	3.513.920
31	Kab. Langkat	500.000	600.000	0	7.298.717
32	Kab. Mandailing Natal	498.545	0	0	6.326.900
33	Kab. Nias	0	0	0	2.103.080
34	Kab. Simalungun	398.545	0	0	6.836.628
35	Kab. Tapanuli Selatan	0	0	0	3.522.874
36	Kab. Tapanuli Tengah	398.545	0	0	3.766.883

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
28	Kab. Deli Serdang	0	13.145.838	34.322.950	887.974
29	Kab. Karo	0	8.631.282	10.958.656	225.193
30	Kab. Labuhanbatu	0	8.749.717	10.736.091	338.507
31	Kab. Langkat	0	13.843.922	18.549.031	280.631
32	Kab. Mandailing Natal	0	10.921.839	26.362.919	319.374
33	Kab. Nias	0	7.704.672	7.707.298	317.787
34	Kab. Simalungun	0	13.110.091	24.323.747	0
35	Kab. Tapanuli Selatan	0	6.565.197	12.840.010	336.655
36	Kab. Tapanuli Tengah	0	8.071.946	17.497.949	383.803

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
28	Kab. Deli Serdang	0	408.000	595.169.129
29	Kab. Karo	0	0	182.758.223
30	Kab. Labuhanbatu	0	408.000	197.488.052
31	Kab. Langkat	0	0	405.335.751
32	Kab. Mandailing Natal	0	0	355.613.586
33	Kab. Nias	7.563.024	0	161.070.846
34	Kab. Simalungun	0	408.000	397.094.746
35	Kab. Tapanuli Selatan	0	408.000	174.560.568
36	Kab. Tapanuli Tengah	0	0	172.999.759

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
37	Kab. Tapanuli Utara	59.245.410	1.157.500	985.000	3.676.680	82.500	225.000
38	Kab. Toba	36.973.950	727.500	670.000	2.413.160	82.500	200.000
39	Kota Binjai	43.956.790	592.500	0	2.192.400	82.500	0
40	Kota Medan	268.369.000	3.025.000	0	11.937.700	82.500	0
41	Kota Pematang Siantar	38.262.200	445.000	0	2.409.600	82.500	0
42	Kota Sibolga	13.666.120	160.000	0	1.380.600	82.500	0
43	Kota Tanjung Balai	21.513.400	285.000	0	1.315.200	82.500	0
44	Kota Tebing Tinggi	26.234.700	330.000	0	1.608.000	82.500	0
45	Kota Padang Sidempuan	30.179.360	477.000	0	1.514.630	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
37	Kab. Tapanuli Utara	756.680	45.000	0	120.530.697	66.000	6.229.778
38	Kab. Toba	54.270	0	0	88.592.289	54.000	5.335.286
39	Kota Binjai	1.658.260	45.000	0	69.195.994	30.000	0
40	Kota Medan	8.308.670	225.000	0	228.362.802	357.000	0
41	Kota Pematang Siantar	794.800	45.000	0	53.883.489	36.000	0
42	Kota Sibolga	325.200	45.000	0	26.067.618	18.000	0
43	Kota Tanjung Balai	987.400	90.000	0	33.646.799	12.000	0
44	Kota Tebing Tinggi	766.000	45.000	0	42.274.183	78.000	0
45	Kota Padang Sidempuan	796.360	90.000	0	53.067.671	36.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
37	Kab. Tapanuli Utara	498.545	0	0	3.874.094
38	Kab. Toba	400.000	0	0	3.107.394
39	Kota Binjai	500.000	0	0	2.052.253
40	Kota Medan	0	0	0	9.277.075
41	Kota Pematang Siantar	398.545	0	0	2.110.574
42	Kota Sibolga	0	0	0	483.550
43	Kota Tanjung Balai	0	0	0	1.087.931
44	Kota Tebing Tinggi	0	0	0	1.447.236
45	Kota Padang Sidempuan	0	0	0	2.054.415

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
37	Kab. Tapanuli Utara	0	11.509.467	17.846.054	338.599
38	Kab. Toba	0	6.204.574	5.091.620	321.892
39	Kota Binjai	0	8.632.393	4.653.757	306.623
40	Kota Medan	0	17.278.886	5.013.747	506.015
41	Kota Pematang Siantar	0	6.066.601	8.934.004	0
42	Kota Sibolga	0	1.747.076	3.364.370	268.206
43	Kota Tanjung Balai	0	5.087.670	2.770.921	264.505
44	Kota Tebing Tinggi	0	4.711.102	3.126.840	0
45	Kota Padang Sidempuan	0	5.665.842	7.556.867	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
37	Kab. Tapanuli Utara	0	408.000	227.475.004
38	Kab. Toba	0	0	150.228.435
39	Kota Binjai	0	408.000	134.306.470
40	Kota Medan	0	408.000	553.151.395
41	Kota Pematang Siantar	0	0	113.468.313
42	Kota Sibolga	0	408.000	48.016.240
43	Kota Tanjung Balai	0	507.000	67.650.326
44	Kota Tebing Tinggi	0	507.000	81.210.561
45	Kota Padang Sidempuan	0	408.000	101.928.645

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
46	Kab. Pakpak Bharat	8.883.840	240.000	30.000	945.500	82.500	0
47	Kab. Nias Selatan	58.717.130	1.335.000	10.550.000	5.361.300	82.500	3.850.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	37.466.870	757.000	185.000	2.498.400	82.500	75.000
49	Kab. Serdang Bedagai	80.858.100	1.362.500	0	5.124.000	82.500	0
50	Kab. Samosir	26.978.640	590.000	120.000	1.607.680	82.500	0
51	Kab. Batu Bara	57.650.800	772.500	0	4.116.600	82.500	0
52	Kab. Padang Lawas	37.068.970	590.000	640.000	3.904.140	82.500	200.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	35.962.000	635.000	1.210.000	2.625.840	82.500	100.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	44.967.450	682.500	0	2.765.100	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
46	Kab. Pakpak Bharat	309.660	45.000	0	32.137.185	32.250	376.740
47	Kab. Nias Selatan	848.250	45.000	93.000	59.693.736	69.000	61.960.495
48	Kab. Humbang Hasundutan	14.480	45.000	0	85.481.314	63.000	1.325.601
49	Kab. Serdang Bedagai	7.207.200	135.000	0	123.834.069	144.000	0
50	Kab. Samosir	22.830	45.000	0	60.406.143	30.000	1.018.208
51	Kab. Batu Bara	1.983.200	90.000	0	84.948.746	45.000	0
52	Kab. Padang Lawas	1.434.990	90.000	0	83.138.960	18.000	9.746.185
53	Kab. Padang Lawas Utara	1.438.360	45.000	0	63.674.228	66.000	10.737.027
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.445.860	45.000	0	63.075.788	57.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
46	Kab. Pakpak Bharat	0	0	0	796.374
47	Kab. Nias Selatan	0	0	0	5.517.028
48	Kab. Humbang Hasundutan	0	0	0	2.102.044
49	Kab. Serdang Bedagai	500.000	0	0	5.017.305
50	Kab. Samosir	0	0	0	1.981.477
51	Kab. Batu Bara	400.000	0	0	3.165.990
52	Kab. Padang Lawas	398.545	0	0	3.804.352
53	Kab. Padang Lawas Utara	0	0	0	4.279.846
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	0	0	1.421.899

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
46	Kab. Pakpak Bharat	0	3.623.421	3.678.628	0
47	Kab. Nias Selatan	0	22.399.194	38.251.774	366.749
48	Kab. Humbang Hasundutan	0	8.076.685	10.450.619	0
49	Kab. Serdang Bedagai	0	9.984.848	15.159.000	0
50	Kab. Samosir	0	5.878.244	6.664.024	664.075
51	Kab. Batu Bara	0	9.216.244	10.506.429	377.741
52	Kab. Padang Lawas	0	8.099.967	12.643.469	347.086
53	Kab. Padang Lawas Utara	0	6.616.985	17.369.367	199.753
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	6.195.858	4.015.596	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
46	Kab. Pakpak Bharat	0	0	51.181.098
47	Kab. Nias Selatan	3.241.296	0	272.381.452
48	Kab. Humbang Hasundutan	0	0	148.623.513
49	Kab. Serdang Bedagai	0	0	249.408.522
50	Kab. Samosir	0	0	106.088.821
51	Kab. Batu Bara	0	408.000	173.763.750
52	Kab. Padang Lawas	0	0	162.207.164
53	Kab. Padang Lawas Utara	0	408.000	145.449.906
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	408.000	125.162.551

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
55	Kab. Labuhanbatu Utara	46.316.360	885.000	340.000	2.726.090	82.500	125.000
56	Kab. Nias Utara	26.563.930	592.500	3.125.000	2.085.710	82.500	1.350.000
57	Kab. Nias Barat	18.086.500	387.500	4.485.000	1.211.100	82.500	2.550.000
58	Kota Gunungsitoli	25.454.740	387.500	310.000	2.128.640	82.500	125.000
59	Provinsi Sumatera Barat	419.583.550	6.119.500	210.000	0	0	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	50.008.520	1.187.000	0	5.100.600	82.500	0
61	Kab. Agam	59.707.600	1.257.500	0	5.229.000	82.500	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	20.836.760	455.000	2.865.000	1.231.230	82.500	1.375.000
63	Kab. Padang Pariaman	56.186.100	1.277.000	0	3.937.800	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
55	Kab. Labuhanbatu Utara	276.900	45.000	0	102.756.662	30.000	2.798.184
56	Kab. Nias Utara	432.820	45.000	93.000	65.350.768	342.000	34.231.665
57	Kab. Nias Barat	281.930	45.000	62.000	48.163.553	30.000	64.789.832
58	Kota Gunungsitoli	1.280.410	45.000	31.000	49.051.924	18.000	3.008.296
59	Provinsi Sumatera Barat	0	0	0	545.629.116	264.000	3.591.619
60	Kab. Lima Puluh Kota	4.498.300	135.000	0	150.288.128	78.000	0
61	Kab. Agam	3.545.300	135.000	0	157.300.277	72.000	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.368.290	90.000	124.000	45.878.828	57.000	30.877.247
63	Kab. Padang Pariaman	1.535.400	45.000	0	153.367.186	132.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0	0	0	2.662.249
56	Kab. Nias Utara	0	0	0	1.754.402
57	Kab. Nias Barat	0	0	0	1.186.237
58	Kota Gunungsitoli	398.545	0	0	1.425.781
59	Provinsi Sumatera Barat	500.000	1.300.000	2.500.000	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	600.000	0	0	2.729.385
61	Kab. Agam	0	800.000	0	3.534.504
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0	819.304
63	Kab. Padang Pariaman	498.545	0	0	3.014.967

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0	8.635.357	10.762.619	183.646
56	Kab. Nias Utara	0	7.744.475	6.567.042	208.916
57	Kab. Nias Barat	0	5.852.778	9.783.330	310.251
58	Kota Gunungsitoli	0	7.336.012	5.664.542	317.335
59	Provinsi Sumatera Barat	7.908.348	0	0	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	0	8.256.348	9.796.449	345.133
61	Kab. Agam	0	13.255.055	11.489.180	685.688
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	7.784.760	9.217.633	325.489
63	Kab. Padang Pariaman	0	10.893.159	15.413.695	377.857

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0	0	178.625.567
56	Kab. Nias Utara	1.440.576	0	152.010.304
57	Kab. Nias Barat	2.521.008	0	159.828.519
58	Kota Gunungsitoli	0	507.000	97.572.225
59	Provinsi Sumatera Barat	0	408.000	988.014.133
60	Kab. Lima Puluh Kota	0	408.000	233.513.363
61	Kab. Agam	0	507.000	257.600.604
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2.881.152	0	126.269.193
63	Kab. Padang Pariaman	0	0	246.761.209

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
64	Kab. Pasaman	40.037.900	725.000	0	5.165.400	82.500	0
65	Kab. Pesisir Selatan	68.100.700	1.337.500	125.000	6.676.200	82.500	25.000
66	Kab. Sijunjung	35.797.420	792.000	0	4.828.800	82.500	0
67	Kab. Solok	57.127.140	1.112.500	680.000	5.135.400	82.500	500.000
68	Kab. Tanah Datar	39.883.300	994.500	0	4.180.200	82.500	0
69	Kota Bukit Tinggi	21.819.910	372.500	0	2.457.080	82.500	0
70	Kota Padang Panjang	9.025.900	247.000	0	1.370.400	82.500	0
71	Kota Padang	121.185.500	1.606.500	0	8.565.600	82.500	0
72	Kota Payakumbuh	24.042.500	359.500	0	2.851.800	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
64	Kab. Pasaman	4.831.900	135.000	0	108.709.393	174.000	0
65	Kab. Pesisir Selatan	7.843.600	135.000	0	186.991.616	60.000	1.741.629
66	Kab. Sijunjung	2.293.900	90.000	0	99.202.601	75.000	0
67	Kab. Solok	5.344.300	90.000	0	127.190.404	195.000	6.138.433
68	Kab. Tanah Datar	1.536.300	45.000	0	111.482.067	96.000	0
69	Kota Bukit Tinggi	1.166.880	90.000	0	31.816.065	27.000	0
70	Kota Padang Panjang	422.300	0	0	19.128.761	6.000	0
71	Kota Padang	4.972.200	135.000	0	193.923.002	186.000	0
72	Kota Payakumbuh	1.916.000	90.000	0	40.591.385	15.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
64	Kab. Pasaman	498.545	600.000	0	1.798.194
65	Kab. Pesisir Selatan	600.000	0	0	3.502.895
66	Kab. Sijunjung	600.000	0	0	1.758.607
67	Kab. Solok	498.545	0	0	2.482.667
68	Kab. Tanah Datar	0	0	0	2.580.510
69	Kota Bukit Tinggi	0	1.200.000	0	738.944
70	Kota Padang Panjang	600.000	0	0	427.075
71	Kota Padang	0	0	0	4.610.114
72	Kota Payakumbuh	398.545	0	0	966.142

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
64	Kab. Pasaman	0	8.116.738	8.835.022	315.702
65	Kab. Pesisir Selatan	0	8.946.750	11.009.234	161.105
66	Kab. Sijunjung	0	6.585.143	8.590.509	541.401
67	Kab. Solok	0	10.040.488	10.033.892	471.240
68	Kab. Tanah Datar	0	8.287.314	9.332.066	461.908
69	Kota Bukit Tinggi	0	3.486.481	3.302.589	332.402
70	Kota Padang Panjang	0	2.989.348	2.224.773	391.404
71	Kota Padang	0	9.039.037	10.819.918	609.034
72	Kota Payakumbuh	0	5.616.659	3.801.177	282.418

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
64	Kab. Pasaman	0	408.000	180.433.294
65	Kab. Pesisir Selatan	0	408.000	297.746.729
66	Kab. Sijunjung	0	408.000	161.645.881
67	Kab. Solok	0	0	227.122.509
68	Kab. Tanah Datar	0	408.000	179.369.665
69	Kota Bukit Tinggi	0	507.000	67.399.351
70	Kota Padang Panjang	0	507.000	37.422.461
71	Kota Padang	0	0	355.734.405
72	Kota Payakumbuh	0	507.000	81.520.626

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
73	Kota Sawahlunto	7.858.520	387.500	0	1.127.400	82.500	0
74	Kota Solok	12.634.000	147.500	0	1.153.200	82.500	0
75	Kota Pariaman	13.868.700	272.500	0	1.758.600	82.500	0
76	Kab. Pasaman Barat	63.239.400	997.000	0	5.183.400	82.500	0
77	Kab. Dharmasraya	34.044.600	522.500	275.000	3.618.000	82.500	225.000
78	Kab. Solok Selatan	23.764.580	455.000	465.000	2.239.800	82.500	175.000
79	Provinsi Riau	470.293.720	6.982.750	1.344.000	0	0	0
80	Kab. Bengkalis	97.213.800	1.360.000	220.000	7.527.600	82.500	50.000
81	Kab. Indragiri Hilir	84.309.880	1.839.500	7.780.000	5.997.000	82.500	2.775.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
73	Kota Sawahlunto	302.100	45.000	0	27.079.323	27.000	0
74	Kota Solok	454.600	0	0	28.140.344	33.000	0
75	Kota Pariaman	1.268.900	45.000	0	38.796.863	63.000	0
76	Kab. Pasaman Barat	4.117.400	135.000	0	147.794.833	72.000	0
77	Kab. Dharmasraya	1.154.700	90.000	0	90.831.189	57.000	3.505.624
78	Kab. Solok Selatan	1.921.100	90.000	0	65.681.565	9.000	5.221.711
79	Provinsi Riau	0	0	0	550.978.158	294.000	8.126.788
80	Kab. Bengkalis	1.577.700	90.000	0	185.967.168	132.000	2.409.115
81	Kab. Indragiri Hilir	2.011.100	90.000	93.000	157.650.781	93.000	45.456.782

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
73	Kota Sawahlunto	500.000	2.200.000	0	512.066
74	Kota Solok	0	0	0	632.698
75	Kota Pariaman	498.545	0	0	870.718
76	Kab. Pasaman Barat	500.000	0	0	2.518.558
77	Kab. Dharmasraya	600.000	0	0	1.989.544
78	Kab. Solok Selatan	398.545	0	0	1.214.186
79	Provinsi Riau	500.000	0	1.000.000	0
80	Kab. Bengkalis	0	0	0	3.475.285
81	Kab. Indragiri Hilir	400.000	0	0	3.285.253

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
73	Kota Sawahlunto	0	3.253.751	3.019.157	397.339
74	Kota Solok	0	4.528.770	2.014.877	292.229
75	Kota Pariaman	0	5.038.529	5.689.878	414.644
76	Kab. Pasaman Barat	0	8.348.826	5.660.993	245.135
77	Kab. Dharmasraya	0	7.430.655	12.917.290	286.348
78	Kab. Solok Selatan	0	5.900.717	2.284.851	156.618
79	Provinsi Riau	9.137.629	0	0	0
80	Kab. Bengkalis	0	10.727.445	13.066.053	809.175
81	Kab. Indragiri Hilir	0	11.281.749	17.019.346	210.052

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
73	Kota Sawahlunto	0	507.000	47.298.656
74	Kota Solok	0	507.000	50.620.718
75	Kota Pariaman	0	507.000	69.175.377
76	Kab. Pasaman Barat	0	408.000	239.303.045
77	Kab. Dharmasraya	0	507.000	158.136.950
78	Kab. Solok Selatan	0	0	110.060.173
79	Provinsi Riau	0	408.000	1.049.065.045
80	Kab. Bengkalis	10.084.032	408.000	335.199.873
81	Kab. Indragiri Hilir	0	408.000	340.782.943

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
82	Kab. Indragiri Hulu	71.018.400	1.035.000	180.000	3.939.000	82.500	0
83	Kab. Kampar	128.731.200	1.986.500	1.215.000	11.025.000	82.500	250.000
84	Kab. Kuantan Singingi	45.201.800	952.000	185.000	5.493.000	82.500	200.000
85	Kab. Pelalawan	70.636.500	1.037.000	1.250.000	4.050.000	82.500	300.000
86	Kab. Rokan Hilir	101.459.470	1.332.500	375.000	6.469.050	82.500	175.000
87	Kab. Rokan Hulu	90.689.100	1.345.000	990.000	7.543.800	82.500	525.000
88	Kab. Siak	71.273.900	1.156.500	65.000	6.963.600	82.500	50.000
89	Kota Dumai	51.292.840	445.000	0	2.948.740	82.500	0
90	Kota Pekanbaru	150.762.200	1.699.500	0	8.586.600	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
82	Kab. Indragiri Hulu	1.542.400	45.000	0	134.394.160	171.000	1.747.224
83	Kab. Kampar	4.611.600	135.000	0	223.829.617	276.000	9.815.458
84	Kab. Kuantan Singingi	430.500	90.000	0	129.562.526	573.000	2.584.058
85	Kab. Pelalawan	1.079.500	45.000	0	119.838.289	114.000	12.379.318
86	Kab. Rokan Hilir	4.317.820	135.000	0	197.577.819	336.000	4.362.553
87	Kab. Rokan Hulu	2.430.900	135.000	0	167.716.027	269.250	8.607.432
88	Kab. Siak	2.788.500	45.000	0	157.162.988	90.000	811.827
89	Kota Dumai	3.740.790	135.000	0	86.609.240	18.000	0
90	Kota Pekanbaru	12.357.100	225.000	0	140.096.219	126.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
82	Kab. Indragiri Hulu	400.000	0	0	3.041.561
83	Kab. Kampar	500.000	0	0	4.794.422
84	Kab. Kuantan Singingi	0	0	0	2.747.155
85	Kab. Pelalawan	0	0	0	2.194.293
86	Kab. Rokan Hilir	0	0	0	3.451.523
87	Kab. Rokan Hulu	0	0	0	3.634.120
88	Kab. Siak	0	500.000	0	2.740.050
89	Kota Dumai	300.000	0	0	1.874.525
90	Kota Pekanbaru	300.000	0	0	4.087.794

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
82	Kab. Indragiri Hulu	0	9.960.320	10.339.352	193.370
83	Kab. Kampar	0	14.730.512	20.123.966	212.884
84	Kab. Kuantan Singingi	0	9.243.922	11.279.469	183.068
85	Kab. Pelalawan	0	7.156.056	4.103.233	411.549
86	Kab. Rokan Hilir	0	11.308.533	14.547.501	251.071
87	Kab. Rokan Hulu	0	10.300.495	13.210.080	564.325
88	Kab. Siak	0	9.550.214	7.255.577	179.630
89	Kota Dumai	0	5.918.340	5.024.283	252.933
90	Kota Pekanbaru	0	9.509.799	10.102.379	289.706

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
82	Kab. Indragiri Hulu	0	408.000	238.497.287
83	Kab. Kampar	0	408.000	422.727.659
84	Kab. Kuantan Singingi	0	408.000	209.215.998
85	Kab. Pelalawan	0	408.000	225.085.238
86	Kab. Rokan Hilir	0	408.000	346.589.340
87	Kab. Rokan Hulu	0	408.000	308.451.029
88	Kab. Siak	0	408.000	261.123.286
89	Kota Dumai	0	507.000	159.149.191
90	Kota Pekanbaru	0	507.000	338.731.797

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
91	Kab. Kepulauan Meranti	28.812.160	592.500	2.370.000	3.551.000	82.500	1.650.000
92	Provinsi Jambi	218.961.870	4.454.750	126.000	0	0	0
93	Kab. Batang Hari	39.094.900	740.000	65.000	6.108.600	82.500	50.000
94	Kab. Bungo	46.726.600	894.500	0	4.936.800	82.500	0
95	Kab. Kerinci	27.658.080	814.500	30.000	5.949.600	82.500	25.000
96	Kab. Merangin	51.468.760	1.092.500	590.000	6.256.800	82.500	200.000
97	Kab. Muaro Jambi	51.702.400	1.096.500	30.000	5.107.200	82.500	0
98	Kab. Sarolangun	43.058.620	877.500	475.000	7.123.800	82.500	200.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	45.429.600	740.000	470.000	5.349.760	82.500	250.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
91	Kab. Kepulauan Meranti	638.380	90.000	62.000	67.944.987	75.000	26.023.861
92	Provinsi Jambi	0	0	0	267.405.918	333.000	245.196
93	Kab. Batang Hari	2.125.600	135.000	0	106.228.088	60.000	531.572
94	Kab. Bungo	1.773.700	135.000	0	94.482.073	268.250	0
95	Kab. Kerinci	1.629.200	135.000	0	89.583.591	61.750	298.238
96	Kab. Merangin	2.758.700	90.000	0	136.242.583	279.000	4.471.895
97	Kab. Muaro Jambi	708.400	90.000	0	117.582.393	213.000	56.799
98	Kab. Sarolangun	1.244.400	135.000	0	91.950.133	178.750	2.459.361
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.221.850	135.000	31.000	82.353.985	78.000	5.023.729

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	0	0	2.177.332
92	Provinsi Jambi	500.000	2.250.000	3.000.000	0
93	Kab. Batang Hari	0	0	0	1.877.437
94	Kab. Bungo	400.000	0	0	2.566.720
95	Kab. Kerinci	398.545	0	0	2.893.137
96	Kab. Merangin	398.545	0	0	3.378.532
97	Kab. Muaro Jambi	0	0	0	2.625.391
98	Kab. Sarolangun	400.000	0	0	2.508.020
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	0	0	2.248.208

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	2.929.828	6.247.732	429.486
92	Provinsi Jambi	3.356.485	0	0	0
93	Kab. Batang Hari	0	4.384.750	11.502.103	577.648
94	Kab. Bungo	0	6.828.870	11.942.415	240.305
95	Kab. Kerinci	0	7.066.691	17.966.435	362.023
96	Kab. Merangin	0	10.011.321	18.699.481	569.932
97	Kab. Muaro Jambi	0	8.205.810	16.995.729	511.186
98	Kab. Sarolangun	0	7.098.705	10.281.623	268.460
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	7.270.137	10.280.277	497.366

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
91	Kab. Kepulauan Meranti	4.681.872	408.000	148.766.638
92	Provinsi Jambi	0	408.000	501.041.219
93	Kab. Batang Hari	0	408.000	173.971.198
94	Kab. Bungo	0	0	171.277.733
95	Kab. Kerinci	0	0	154.954.290
96	Kab. Merangin	0	408.000	236.998.549
97	Kab. Muaro Jambi	0	0	205.007.308
98	Kab. Sarolangun	0	408.000	168.749.872
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	408.000	163.869.412

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	29.822.150	682.500	250.000	4.221.200	82.500	150.000
101	Kab. Tebo	48.493.420	865.000	65.000	4.242.000	82.500	25.000
102	Kota Jambi	79.612.700	1.137.500	0	7.054.800	82.500	0
103	Kota Sungai Penuh	11.493.500	250.000	0	2.068.200	82.500	0
104	Provinsi Sumatera Selatan	545.597.900	7.394.500	252.000	0	0	0
105	Kab. Lahat	54.594.600	977.500	90.000	4.702.200	82.500	75.000
106	Kab. Musi Banyuasin	109.272.400	1.819.500	1.315.000	10.102.200	82.500	850.000
107	Kab. Musi Rawas	55.606.300	1.247.000	250.000	3.865.800	82.500	150.000
108	Kab. Muara Enim	89.063.600	1.195.000	0	6.558.000	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	626.450	90.000	0	67.202.022	64.750	2.369.063
101	Kab. Tebo	2.384.900	135.000	0	74.106.684	84.000	402.170
102	Kota Jambi	2.796.400	90.000	0	98.822.969	134.750	0
103	Kota Sungai Penuh	413.200	45.000	0	43.120.328	99.000	0
104	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	0	571.230.849	96.000	0
105	Kab. Lahat	821.800	90.000	0	139.752.654	27.000	947.902
106	Kab. Musi Banyuasin	1.864.800	90.000	0	219.720.161	114.000	12.204.122
107	Kab. Musi Rawas	1.372.100	45.000	0	98.931.048	42.000	2.017.475
108	Kab. Muara Enim	1.588.300	45.000	0	192.846.926	171.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	0	0	1.994.100
101	Kab. Tebo	0	0	0	2.868.640
102	Kota Jambi	0	0	0	2.645.857
103	Kota Sungai Penuh	398.545	0	0	1.531.900
104	Provinsi Sumatera Selatan	500.000	2.300.000	2.000.000	0
105	Kab. Lahat	0	0	0	4.405.482
106	Kab. Musi Banyuasin	0	0	0	3.899.425
107	Kab. Musi Rawas	400.000	0	0	3.451.673
108	Kab. Muara Enim	0	0	0	4.436.085

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	7.335.877	11.163.349	627.704
101	Kab. Tebo	0	7.049.958	12.929.654	306.077
102	Kota Jambi	0	5.311.462	8.233.044	500.861
103	Kota Sungai Penuh	0	5.197.567	7.660.764	439.552
104	Provinsi Sumatera Selatan	8.642.529	0	0	0
105	Kab. Lahat	0	10.858.271	40.007.093	404.175
106	Kab. Musi Banyuasin	0	10.218.214	12.295.368	0
107	Kab. Musi Rawas	0	7.095.199	12.210.523	207.994
108	Kab. Muara Enim	0	7.122.877	14.337.845	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	0	126.681.665
101	Kab. Tebo	0	0	154.040.003
102	Kota Jambi	0	507.000	206.929.843
103	Kota Sungai Penuh	0	507.000	73.307.056
104	Provinsi Sumatera Selatan	0	354.000	1.138.367.778
105	Kab. Lahat	0	408.000	258.244.177
106	Kab. Musi Banyuasin	0	0	383.847.690
107	Kab. Musi Rawas	0	0	186.974.612
108	Kab. Muara Enim	0	408.000	317.855.133

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
109	Kab. Ogan Komering Ilir	105.111.900	1.605.000	1.340.000	10.698.000	82.500	725.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	50.080.300	752.500	60.000	3.268.200	82.500	100.000
111	Kota Palembang	215.022.600	1.714.500	0	12.837.600	82.500	0
112	Kota Prabumulih	29.924.500	352.500	0	1.934.400	82.500	0
113	Kota Pagar Alam	18.482.700	285.000	0	1.419.600	82.500	0
114	Kota Lubuk Linggau	34.619.100	387.500	0	1.747.800	82.500	0
115	Kab. Banyuasin	120.083.100	1.660.000	490.000	10.784.400	82.500	225.000
116	Kab. Ogan Ilir	56.345.400	922.500	0	7.932.600	82.500	0
117	Kab. OKU Timur	80.468.000	1.482.500	0	8.769.600	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
109	Kab. Ogan Komering Ilir	1.675.500	90.000	0	219.270.558	165.000	10.975.830
110	Kab. Ogan Komering Ulu	909.300	90.000	0	103.513.969	102.000	0
111	Kota Palembang	3.841.400	180.000	0	295.495.539	124.250	0
112	Kota Prabumulih	1.322.400	135.000	0	62.853.386	42.000	0
113	Kota Pagar Alam	523.100	45.000	0	38.012.568	15.000	0
114	Kota Lubuk Linggau	651.500	45.000	0	54.096.527	15.000	0
115	Kab. Banyuasin	6.113.900	180.000	0	257.086.254	155.500	4.966.703
116	Kab. Ogan Ilir	2.498.000	90.000	0	129.932.253	75.000	0
117	Kab. OKU Timur	1.994.100	90.000	0	167.124.832	350.750	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
109	Kab. Ogan Komering Ilir	400.000	0	0	5.705.395
110	Kab. Ogan Komering Ulu	398.545	0	0	2.724.756
111	Kota Palembang	400.000	900.000	0	8.167.441
112	Kota Prabumulih	398.545	0	0	1.336.645
113	Kota Pagar Alam	0	0	0	1.339.230
114	Kota Lubuk Linggau	500.000	0	0	2.122.032
115	Kab. Banyuasin	0	0	0	5.424.003
116	Kab. Ogan Ilir	400.000	0	0	3.729.136
117	Kab. OKU Timur	500.000	0	0	5.348.791

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
109	Kab. Ogan Komering Ilir	0	9.566.072	30.792.030	162.961
110	Kab. Ogan Komering Ulu	0	8.337.909	15.449.530	197.454
111	Kota Palembang	0	11.167.445	30.694.408	490.688
112	Kota Prabumulih	0	5.917.545	5.101.321	290.638
113	Kota Pagar Alam	0	5.234.388	4.803.156	128.167
114	Kota Lubuk Linggau	0	5.885.136	7.044.013	225.807
115	Kab. Banyuasin	0	12.402.023	23.473.886	360.365
116	Kab. Ogan Ilir	0	10.981.312	15.319.921	0
117	Kab. OKU Timur	0	10.227.172	18.041.118	466.841

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
109	Kab. Ogan Komering Ilir	0	0	398.365.746
110	Kab. Ogan Komering Ulu	0	408.000	186.474.963
111	Kota Palembang	0	0	581.118.371
112	Kota Prabumulih	0	0	109.691.380
113	Kota Pagar Alam	0	408.000	70.778.409
114	Kota Lubuk Linggau	0	408.000	107.829.915
115	Kab. Banyuasin	0	0	443.487.634
116	Kab. Ogan Ilir	0	408.000	228.716.622
117	Kab. OKU Timur	0	0	294.946.204

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
118	Kab. OKU Selatan	46.316.700	875.000	795.000	4.047.600	82.500	375.000
119	Kab. Empat Lawang	31.393.100	567.500	0	2.039.400	82.500	0
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	32.767.700	554.500	60.000	2.313.000	82.500	75.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	26.962.800	432.500	30.000	2.507.400	82.500	75.000
122	Provinsi Bengkulu	138.034.770	2.799.000	0	0	0	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	21.605.700	497.000	0	3.063.600	82.500	0
124	Kab. Bengkulu Utara	41.386.220	994.000	30.000	3.943.800	82.500	0
125	Kab. Rejang Lebong	35.806.400	615.000	90.000	2.645.400	82.500	0
126	Kota Bengkulu	52.098.000	727.000	0	5.044.800	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
118	Kab. OKU Selatan	760.500	90.000	0	95.257.282	45.000	8.128.755
119	Kab. Empat Lawang	273.600	45.000	0	69.890.747	78.000	0
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2.212.270	90.000	0	70.748.487	60.000	1.072.640
121	Kab. Musi Rawas Utara	602.500	90.000	0	41.795.522	21.000	482.247
122	Provinsi Bengkulu	0	0	0	196.351.421	48.000	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	432.800	90.000	0	75.925.645	21.000	0
124	Kab. Bengkulu Utara	1.414.300	45.000	0	95.991.886	66.000	0
125	Kab. Rejang Lebong	1.237.200	90.000	0	81.986.280	123.000	38.444
126	Kota Bengkulu	4.338.100	225.000	0	87.489.080	49.750	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
118	Kab. OKU Selatan	0	0	0	3.709.617
119	Kab. Empat Lawang	0	0	0	2.431.617
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	1.984.299
121	Kab. Musi Rawas Utara	0	0	0	1.872.990
122	Provinsi Bengkulu	600.000	1.000.000	2.000.000	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	0	0	0	1.876.715
124	Kab. Bengkulu Utara	0	0	0	2.925.135
125	Kab. Rejang Lebong	398.545	0	0	2.434.674
126	Kota Bengkulu	398.545	0	0	2.005.072

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
118	Kab. OKU Selatan	0	4.718.871	11.379.727	0
119	Kab. Empat Lawang	0	7.761.472	7.398.363	478.114
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	6.397.111	4.448.862	0
121	Kab. Musi Rawas Utara	0	6.996.214	76.430.406	152.602
122	Provinsi Bengkulu	5.440.264	0	0	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	0	6.861.872	9.041.146	545.847
124	Kab. Bengkulu Utara	0	7.669.320	9.747.091	0
125	Kab. Rejang Lebong	0	7.746.860	8.094.549	0
126	Kota Bengkulu	0	5.352.635	7.039.395	304.337

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
118	Kab. OKU Selatan	0	0	176.581.552
119	Kab. Empat Lawang	0	0	122.439.413
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	408.000	123.274.369
121	Kab. Musi Rawas Utara	6.842.736	0	165.376.417
122	Provinsi Bengkulu	0	408.000	346.681.455
123	Kab. Bengkulu Selatan	0	408.000	120.451.825
124	Kab. Bengkulu Utara	0	408.000	164.703.252
125	Kab. Rejang Lebong	0	408.000	141.796.852
126	Kota Bengkulu	0	0	165.154.214

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
127	Kab. Kaur	18.556.300	490.000	125.000	1.837.800	82.500	75.000
128	Kab. Seluma	25.628.900	602.500	95.000	2.122.200	82.500	100.000
129	Kab. Mukomuko	28.270.800	547.500	0	3.246.600	82.500	0
130	Kab. Lebong	14.528.520	490.000	30.000	1.539.600	82.500	25.000
131	Kab. Kepahiang	17.187.120	452.500	0	1.758.600	82.500	50.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	15.349.740	365.000	30.000	1.724.400	82.500	25.000
133	Provinsi Lampung	544.044.180	7.434.750	210.000	0	0	0
134	Kab. Lampung Barat	37.621.540	827.000	65.000	2.806.000	82.500	0
135	Kab. Lampung Selatan	129.689.600	1.742.500	0	15.070.800	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
127	Kab. Kaur	801.200	45.000	0	66.332.030	60.000	1.774.795
128	Kab. Seluma	599.500	90.000	0	80.018.667	39.000	992.597
129	Kab. Mukomuko	720.800	90.000	0	67.376.019	12.000	0
130	Kab. Lebong	1.306.200	45.000	0	41.018.928	27.000	275.098
131	Kab. Kepahiang	1.078.300	90.000	0	53.071.774	15.000	0
132	Kab. Bengkulu Tengah	579.700	45.000	0	58.897.228	133.250	111.373
133	Provinsi Lampung	0	0	0	468.545.502	270.000	932.072
134	Kab. Lampung Barat	612.350	90.000	0	87.152.237	45.000	423.297
135	Kab. Lampung Selatan	6.807.500	180.000	0	133.635.686	60.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
127	Kab. Kaur	400.000	0	0	1.860.422
128	Kab. Seluma	398.545	0	0	2.378.064
129	Kab. Mukomuko	0	0	0	1.811.277
130	Kab. Lebong	0	0	0	1.329.577
131	Kab. Kepahiang	498.545	0	0	1.362.141
132	Kab. Bengkulu Tengah	400.000	0	0	1.743.977
133	Provinsi Lampung	400.000	2.500.000	2.500.000	0
134	Kab. Lampung Barat	500.000	0	0	2.284.527
135	Kab. Lampung Selatan	400.000	0	0	6.401.572

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
127	Kab. Kaur	0	4.524.876	10.966.049	484.310
128	Kab. Seluma	0	8.002.054	18.199.179	359.914
129	Kab. Mukomuko	0	6.612.184	6.850.677	244.273
130	Kab. Lebong	0	4.397.644	7.818.643	249.485
131	Kab. Kepahiang	0	5.096.176	7.733.085	197.030
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	5.497.517	10.989.047	278.997
133	Provinsi Lampung	9.425.616	0	0	0
134	Kab. Lampung Barat	0	6.733.610	17.781.965	443.899
135	Kab. Lampung Selatan	0	11.890.086	25.062.130	567.339

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
127	Kab. Kaur	0	408.000	108.823.282
128	Kab. Seluma	0	408.000	140.116.620
129	Kab. Mukomuko	0	0	115.864.630
130	Kab. Lebong	0	0	73.163.195
131	Kab. Kepahiang	0	408.000	89.080.771
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	408.000	96.660.729
133	Provinsi Lampung	0	408.000	1.036.670.120
134	Kab. Lampung Barat	0	408.000	157.876.925
135	Kab. Lampung Selatan	0	408.000	331.997.713

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
136	Kab. Lampung Tengah	171.539.820	2.480.000	0	16.896.600	82.500	0
137	Kab. Lampung Utara	79.900.580	1.387.500	0	6.070.800	82.500	0
138	Kab. Lampung Timur	119.740.200	2.144.000	0	16.366.800	82.500	0
139	Kab. Tanggamus	71.531.200	1.237.500	685.000	9.264.000	82.500	550.000
140	Kab. Tulang Bawang	60.020.160	917.500	345.000	5.686.200	82.500	100.000
141	Kab. Way Kanan	65.994.240	1.105.000	250.000	6.837.000	82.500	175.000
142	Kota Bandar Lampung	125.109.200	1.342.000	0	12.111.600	82.500	0
143	Kota Metro	27.738.100	809.500	0	3.612.600	82.500	0
144	Kab. Pesawaran	54.694.700	977.500	155.000	6.138.000	82.500	25.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
136	Kab. Lampung Tengah	4.982.900	90.000	0	264.988.985	167.000	0
137	Kab. Lampung Utara	2.592.500	90.000	0	133.582.675	112.000	0
138	Kab. Lampung Timur	2.779.100	135.000	0	164.985.706	126.000	0
139	Kab. Tanggamus	2.619.300	135.000	0	150.828.012	57.000	5.392.564
140	Kab. Tulang Bawang	525.800	45.000	0	86.698.713	93.000	3.094.040
141	Kab. Way Kanan	2.703.500	90.000	0	116.929.926	117.000	2.820.021
142	Kota Bandar Lampung	6.241.100	180.000	0	150.761.484	87.000	0
143	Kota Metro	1.883.400	45.000	0	43.926.212	63.000	0
144	Kab. Pesawaran	1.281.100	90.000	0	85.573.182	72.000	763.816

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
136	Kab. Lampung Tengah	600.000	0	0	6.933.631
137	Kab. Lampung Utara	498.545	0	0	4.245.470
138	Kab. Lampung Timur	398.545	0	0	6.914.832
139	Kab. Tanggamus	398.545	0	0	4.422.730
140	Kab. Tulang Bawang	398.545	0	0	2.846.915
141	Kab. Way Kanan	398.545	0	0	3.587.600
142	Kota Bandar Lampung	0	0	0	5.617.220
143	Kota Metro	0	0	0	1.086.000
144	Kab. Pesawaran	398.545	0	0	2.293.500

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
136	Kab. Lampung Tengah	0	13.800.301	12.950.059	421.593
137	Kab. Lampung Utara	0	8.017.416	14.929.786	256.038
138	Kab. Lampung Timur	0	12.995.860	21.068.103	619.192
139	Kab. Tanggamus	0	12.771.491	17.920.407	0
140	Kab. Tulang Bawang	0	9.252.037	16.773.649	340.584
141	Kab. Way Kanan	0	9.426.330	18.100.187	322.068
142	Kota Bandar Lampung	0	11.933.828	21.291.850	659.898
143	Kota Metro	0	2.892.374	6.067.344	226.112
144	Kab. Pesawaran	0	7.118.071	11.433.907	256.688

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
136	Kab. Lampung Tengah	0	408.000	496.341.389
137	Kab. Lampung Utara	0	408.000	252.173.810
138	Kab. Lampung Timur	0	408.000	348.763.838
139	Kab. Tanggamus	0	0	277.895.249
140	Kab. Tulang Bawang	0	408.000	187.627.643
141	Kab. Way Kanan	0	408.000	229.346.917
142	Kota Bandar Lampung	0	507.000	335.924.680
143	Kota Metro	0	408.000	88.840.142
144	Kab. Pesawaran	0	408.000	171.761.509

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
145	Kab. Pringsewu	54.367.400	852.500	0	5.541.000	82.500	0
146	Kab. Mesuji	33.386.830	525.000	315.000	4.002.820	82.500	175.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	39.925.300	650.000	0	3.547.200	82.500	0
148	Kab. Pesisir Barat	25.445.190	432.500	405.000	1.918.280	82.500	100.000
149	Provinsi DKI Jakarta	1.802.134.620	19.803.250	0	74.527.790	495.000	0
150	Provinsi Jawa Barat	3.240.825.330	28.567.250	42.000	0	0	0
151	Kab. Bandung	502.022.010	4.810.000	0	42.204.800	82.500	0
152	Kab. Bekasi	497.295.620	3.842.500	0	34.929.700	82.500	0
153	Kab. Bogor	891.280.940	6.960.000	0	77.536.970	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
145	Kab. Pringsewu	904.100	45.000	0	105.684.908	57.250	0
146	Kab. Mesuji	833.250	90.000	0	67.227.686	51.000	3.592.572
147	Kab. Tulang Bawang Barat	1.108.700	45.000	0	67.925.129	69.000	0
148	Kab. Pesisir Barat	162.130	45.000	0	65.244.867	102.000	4.010.285
149	Provinsi DKI Jakarta	45.835.160	1.350.000	0	1.398.189.746	459.000	0
150	Provinsi Jawa Barat	0	0	0	1.476.461.619	246.000	0
151	Kab. Bandung	22.604.210	450.000	0	425.075.469	465.000	0
152	Kab. Bekasi	9.198.580	270.000	0	437.019.388	1.674.500	0
153	Kab. Bogor	86.445.440	945.000	0	559.428.626	588.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
145	Kab. Pringsewu	498.545	0	0	2.813.315
146	Kab. Mesuji	0	0	0	1.601.651
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	0	0	2.752.720
148	Kab. Pesisir Barat	0	0	0	1.784.050
149	Provinsi DKI Jakarta	0	5.200.000	0	3.088.832
150	Provinsi Jawa Barat	500.000	2.000.000	3.000.000	0
151	Kab. Bandung	300.000	0	0	25.480.157
152	Kab. Bekasi	180.982	0	0	18.421.476
153	Kab. Bogor	0	0	0	31.014.379

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
145	Kab. Pringsewu	0	6.919.652	10.798.805	427.049
146	Kab. Mesuji	0	7.101.079	7.096.522	538.655
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	7.842.122	6.263.272	54.042
148	Kab. Pesisir Barat	0	6.080.882	8.704.436	0
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	0	0
150	Provinsi Jawa Barat	33.473.420	0	0	0
151	Kab. Bandung	0	19.294.396	26.943.121	994.599
152	Kab. Bekasi	0	12.329.752	17.227.590	0
153	Kab. Bogor	0	42.672.499	53.900.110	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
145	Kab. Pringsewu	0	0	188.992.024
146	Kab. Mesuji	0	0	126.619.565
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	408.000	130.672.985
148	Kab. Pesisir Barat	2.521.008	408.000	117.446.128
149	Provinsi DKI Jakarta	0	408.000	3.351.491.398
150	Provinsi Jawa Barat	0	354.000	4.785.469.619
151	Kab. Bandung	0	0	1.070.726.262
152	Kab. Bekasi	0	408.000	1.032.880.588
153	Kab. Bogor	0	0	1.750.854.464

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
154	Kab. Ciamis	118.694.700	2.277.500	0	15.589.800	82.500	0
155	Kab. Cianjur	342.566.210	4.465.000	95.000	35.465.400	82.500	75.000
156	Kab. Cirebon	275.615.800	2.724.500	0	21.781.270	82.500	0
157	Kab. Garut	356.722.500	5.257.000	0	47.696.400	82.500	0
158	Kab. Indramayu	240.331.190	2.727.500	0	24.767.160	82.500	0
159	Kab. Karawang	328.293.780	3.052.500	0	31.921.910	82.500	0
160	Kab. Kuningan	136.071.160	1.992.000	0	19.897.590	82.500	0
161	Kab. Majalengka	151.152.400	1.985.000	0	16.332.140	82.500	0
162	Kab. Purwakarta	143.710.340	1.422.500	0	10.378.180	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
154	Kab. Ciamis	8.932.400	225.000	0	226.293.225	117.000	0
155	Kab. Cianjur	68.488.120	1.620.000	31.000	426.152.021	1.772.250	538.632
156	Kab. Cirebon	17.941.710	405.000	0	361.974.531	201.000	0
157	Kab. Garut	42.826.300	1.260.000	0	392.771.442	699.000	0
158	Kab. Indramayu	10.691.890	360.000	0	207.981.115	88.000	0
159	Kab. Karawang	20.034.880	270.000	0	272.677.111	390.000	0
160	Kab. Kuningan	20.075.140	495.000	0	264.505.948	249.000	0
161	Kab. Majalengka	13.693.950	180.000	0	261.818.520	141.000	0
162	Kab. Purwakarta	7.793.800	180.000	0	147.312.959	81.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
154	Kab. Ciamis	700.000	0	0	9.968.382
155	Kab. Cianjur	0	0	0	16.130.670
156	Kab. Cirebon	500.000	600.000	0	16.603.929
157	Kab. Garut	398.545	0	0	20.193.408
158	Kab. Indramayu	500.000	0	0	13.035.075
159	Kab. Karawang	0	0	0	17.589.205
160	Kab. Kuningan	600.000	600.000	0	10.009.159
161	Kab. Majalengka	500.000	0	0	10.318.490
162	Kab. Purwakarta	0	0	0	7.877.350

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
154	Kab. Ciamis	0	15.843.320	31.650.602	452.157
155	Kab. Cianjur	0	21.560.363	42.882.822	397.676
156	Kab. Cirebon	0	24.442.371	29.706.825	0
157	Kab. Garut	0	28.545.405	77.394.046	0
158	Kab. Indramayu	0	21.008.137	15.705.498	0
159	Kab. Karawang	0	21.795.639	22.248.160	0
160	Kab. Kuningan	0	12.241.637	25.408.920	601.726
161	Kab. Majalengka	0	11.836.795	24.348.822	575.906
162	Kab. Purwakarta	0	10.740.007	12.971.893	229.572

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
154	Kab. Ciamis	0	408.000	431.234.586
155	Kab. Cianjur	0	408.000	962.730.664
156	Kab. Cirebon	0	0	752.579.436
157	Kab. Garut	0	408.000	974.254.546
158	Kab. Indramayu	0	0	537.278.065
159	Kab. Karawang	0	0	718.355.685
160	Kab. Kuningan	0	408.000	493.237.780
161	Kab. Majalengka	0	0	492.965.523
162	Kab. Purwakarta	0	0	342.780.101

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
163	Kab. Subang	206.939.140	2.587.500	0	21.584.430	82.500	0
164	Kab. Sukabumi	310.601.700	4.110.000	0	44.447.400	82.500	0
165	Kab. Sumedang	143.992.200	1.885.000	0	16.666.840	82.500	0
166	Kab. Tasikmalaya	205.272.400	3.527.500	0	26.129.400	82.500	0
167	Kota Bandung	293.610.240	2.962.500	0	25.943.280	82.500	0
168	Kota Bekasi	326.826.100	2.507.500	0	24.020.320	82.500	0
169	Kota Bogor	157.363.680	1.752.000	0	10.121.450	82.500	0
170	Kota Cirebon	50.397.450	535.000	0	4.113.080	82.500	0
171	Kota Depok	249.965.840	2.084.500	0	22.690.650	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
163	Kab. Subang	9.070.170	225.000	0	269.921.843	255.000	0
164	Kab. Sukabumi	15.095.080	360.000	0	298.081.610	570.000	0
165	Kab. Sumedang	14.863.050	405.000	0	230.765.067	156.000	0
166	Kab. Tasikmalaya	10.966.070	225.000	0	272.630.321	108.000	0
167	Kota Bandung	29.887.900	495.000	0	303.147.974	162.000	0
168	Kota Bekasi	9.875.340	270.000	0	258.734.656	534.000	0
169	Kota Bogor	20.009.030	225.000	0	131.137.299	126.000	0
170	Kota Cirebon	4.907.110	135.000	0	79.478.786	60.000	0
171	Kota Depok	23.005.880	270.000	0	131.132.773	99.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
163	Kab. Subang	400.000	600.000	0	12.521.110
164	Kab. Sukabumi	300.000	600.000	0	20.362.671
165	Kab. Sumedang	500.000	0	0	9.037.958
166	Kab. Tasikmalaya	0	0	0	11.836.796
167	Kota Bandung	300.000	0	0	18.430.314
168	Kota Bekasi	0	0	0	15.327.816
169	Kota Bogor	0	0	0	6.885.761
170	Kota Cirebon	600.000	0	0	2.267.739
171	Kota Depok	0	0	0	12.542.467

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
163	Kab. Subang	0	13.128.095	23.565.295	0
164	Kab. Sukabumi	0	30.878.299	70.477.427	0
165	Kab. Sumedang	0	11.759.475	27.455.414	847.572
166	Kab. Tasikmalaya	0	21.709.639	45.952.028	869.945
167	Kota Bandung	0	18.974.306	25.638.211	0
168	Kota Bekasi	0	15.269.560	23.332.816	0
169	Kota Bogor	0	11.550.837	17.394.308	666.374
170	Kota Cirebon	0	5.848.749	14.487.631	203.033
171	Kota Depok	0	13.864.349	28.623.981	531.828

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
163	Kab. Subang	0	0	560.880.083
164	Kab. Sukabumi	0	408.000	796.374.687
165	Kab. Sumedang	0	0	458.416.076
166	Kab. Tasikmalaya	0	0	599.309.599
167	Kota Bandung	0	408.000	720.042.225
168	Kota Bekasi	0	0	676.780.608
169	Kota Bogor	0	408.000	357.722.239
170	Kota Cirebon	0	0	163.116.078
171	Kota Depok	0	408.000	485.301.768

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
172	Kota Sukabumi	49.262.430	467.500	0	3.959.320	82.500	0
173	Kota Tasikmalaya	91.113.690	932.500	0	8.823.840	82.500	0
174	Kota Cimahi	71.178.800	632.000	0	5.806.020	82.500	0
175	Kota Banjar	20.802.900	307.500	0	4.143.600	82.500	0
176	Kab. Bandung Barat	226.569.600	2.275.000	0	21.431.680	82.500	0
177	Kab. Pangandaran	42.012.400	862.500	0	4.841.400	82.500	0
178	Provinsi Jawa Tengah	2.152.073.350	19.329.000	42.000	0	0	0
179	Kab. Banjarnegara	98.442.200	1.845.000	0	12.757.800	82.500	0
180	Kab. Banyumas	182.323.500	2.417.500	0	19.251.000	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
172	Kota Sukabumi	5.880.720	135.000	0	54.748.286	15.000	0
173	Kota Tasikmalaya	3.425.790	90.000	0	110.193.166	63.000	0
174	Kota Cimahi	4.186.600	135.000	0	80.642.078	45.000	0
175	Kota Banjar	1.222.200	135.000	0	43.930.076	6.000	0
176	Kab. Bandung Barat	11.192.730	225.000	0	204.085.866	69.000	0
177	Kab. Pangandaran	2.553.700	45.000	0	92.368.326	135.000	0
178	Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	1.453.709.072	360.000	0
179	Kab. Banjarnegara	6.055.000	135.000	0	189.245.895	102.000	0
180	Kab. Banyumas	9.019.200	180.000	0	306.750.650	357.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
172	Kota Sukabumi	500.000	0	0	2.853.252
173	Kota Tasikmalaya	500.000	0	0	4.944.336
174	Kota Cimahi	0	0	0	3.665.052
175	Kota Banjar	398.545	0	0	1.791.930
176	Kab. Bandung Barat	398.545	0	0	13.694.680
177	Kab. Pangandaran	500.000	0	0	3.251.460
178	Provinsi Jawa Tengah	500.000	1.500.000	3.000.000	0
179	Kab. Banjarnegara	500.000	0	0	8.033.265
180	Kab. Banyumas	600.000	600.000	800.000	11.654.359

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
172	Kota Sukabumi	0	6.251.097	13.010.184	0
173	Kota Tasikmalaya	0	7.461.183	17.628.877	701.577
174	Kota Cimahi	0	5.578.431	4.900.560	0
175	Kota Banjar	0	4.203.079	6.389.112	254.858
176	Kab. Bandung Barat	0	17.770.074	18.278.788	784.070
177	Kab. Pangandaran	0	4.733.592	10.733.136	191.209
178	Provinsi Jawa Tengah	22.226.241	0	0	0
179	Kab. Banjarnegara	0	12.498.959	22.705.299	320.290
180	Kab. Banyumas	0	15.129.152	28.043.273	334.708

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
172	Kota Sukabumi	0	507.000	137.672.289
173	Kota Tasikmalaya	0	0	245.960.459
174	Kota Cimahi	0	0	176.852.041
175	Kota Banjar	0	408.000	84.075.300
176	Kab. Bandung Barat	0	0	516.857.533
177	Kab. Pangandaran	0	0	162.310.223
178	Provinsi Jawa Tengah	0	408.000	3.653.147.663
179	Kab. Banjarnegara	0	0	352.723.208
180	Kab. Banyumas	0	408.000	577.950.842

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
181	Kab. Batang	82.507.300	1.315.000	0	13.528.200	82.500	0
182	Kab. Blora	86.149.940	1.835.000	0	16.240.280	82.500	0
183	Kab. Boyolali	91.015.600	1.799.500	0	16.130.400	82.500	0
184	Kab. Brebes	205.653.270	2.597.500	0	21.936.220	82.500	0
185	Kab. Cilacap	200.161.700	3.040.000	0	20.320.800	82.500	0
186	Kab. Demak	128.164.290	1.417.500	60.000	22.597.740	82.500	50.000
187	Kab. Grobogan	146.086.310	2.412.500	0	21.374.400	82.500	0
188	Kab. Jepara	116.550.720	1.841.500	125.000	26.965.620	82.500	100.000
189	Kab. Karanganyar	88.351.300	1.495.000	0	15.259.200	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
181	Kab. Batang	5.957.000	135.000	0	154.938.012	87.000	0
182	Kab. Blora	6.040.770	135.000	0	209.423.823	114.000	0
183	Kab. Boyolali	2.999.600	90.000	0	205.185.772	684.000	0
184	Kab. Brebes	14.627.600	270.000	0	323.993.068	126.000	0
185	Kab. Cilacap	6.269.400	180.000	0	339.429.762	276.000	0
186	Kab. Demak	6.402.310	135.000	0	185.178.675	66.000	818.308
187	Kab. Grobogan	6.498.260	135.000	0	254.445.017	141.000	0
188	Kab. Jepara	7.767.430	90.000	0	212.420.596	159.000	1.359.254
189	Kab. Karanganyar	7.135.700	135.000	0	189.505.897	120.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
181	Kab. Batang	500.000	0	0	6.579.555
182	Kab. Blora	600.000	0	0	7.819.439
183	Kab. Boyolali	500.000	600.000	0	8.890.335
184	Kab. Brebes	400.000	0	0	14.642.781
185	Kab. Cilacap	500.000	0	0	11.441.937
186	Kab. Demak	400.000	600.000	0	9.280.908
187	Kab. Grobogan	500.000	600.000	0	10.866.582
188	Kab. Jepara	500.000	600.000	0	8.315.527
189	Kab. Karanganyar	600.000	0	0	7.570.420

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
181	Kab. Batang	0	7.967.038	14.571.331	305.193
182	Kab. Blora	0	10.947.886	23.705.216	520.313
183	Kab. Boyolali	0	7.739.583	23.182.454	356.006
184	Kab. Brebes	0	16.261.089	37.442.705	609.131
185	Kab. Cilacap	0	12.578.690	33.595.714	464.412
186	Kab. Demak	0	7.366.800	19.311.148	656.265
187	Kab. Grobogan	0	13.559.602	24.780.333	514.912
188	Kab. Jepara	0	7.580.754	17.158.044	244.304
189	Kab. Karanganyar	0	9.163.353	16.373.899	337.828

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
181	Kab. Batang	0	0	288.473.129
182	Kab. Blora	0	0	363.614.167
183	Kab. Boyolali	0	0	359.255.750
184	Kab. Brebes	0	408.000	639.049.864
185	Kab. Cilacap	0	0	628.340.915
186	Kab. Demak	0	0	382.587.444
187	Kab. Grobogan	0	0	481.996.416
188	Kab. Jepara	0	408.000	402.268.249
189	Kab. Karanganyar	0	0	336.130.097

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
190	Kab. Kebumen	136.790.500	2.107.500	0	18.780.600	82.500	0
191	Kab. Kendal	111.303.620	1.667.500	0	20.233.800	82.500	0
192	Kab. Klaten	124.116.100	2.017.500	0	15.705.600	82.500	0
193	Kab. Kudus	72.910.430	1.177.500	0	13.510.350	82.500	0
194	Kab. Magelang	109.105.800	2.012.500	30.000	15.610.200	82.500	0
195	Kab. Pati	119.243.120	1.922.500	0	23.084.820	82.500	0
196	Kab. Pekalongan	98.200.010	1.462.500	0	19.594.420	82.500	0
197	Kab. Pemalang	171.408.900	2.142.500	0	19.084.800	82.500	0
198	Kab. Purbalingga	96.156.100	1.360.000	0	10.618.800	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
190	Kab. Kebumen	3.299.700	135.000	0	278.424.643	411.000	0
191	Kab. Kendal	5.685.350	90.000	0	210.861.725	114.000	0
192	Kab. Klaten	2.444.400	45.000	0	242.663.309	372.000	0
193	Kab. Kudus	4.295.310	90.000	0	130.139.553	39.000	0
194	Kab. Magelang	7.532.100	90.000	0	209.627.427	174.000	305.920
195	Kab. Pati	2.680.930	135.000	0	240.594.492	350.000	0
196	Kab. Pekalongan	8.424.880	180.000	0	174.207.446	117.000	0
197	Kab. Pemalang	9.884.700	135.000	0	261.338.380	297.000	0
198	Kab. Purbalingga	5.796.100	90.000	0	200.628.817	258.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
190	Kab. Kebumen	600.000	0	0	10.815.176
191	Kab. Kendal	600.000	0	0	7.875.705
192	Kab. Klaten	500.000	0	0	9.211.735
193	Kab. Kudus	106.518	1.300.000	0	4.981.792
194	Kab. Magelang	600.000	0	0	10.100.000
195	Kab. Pati	500.000	0	0	8.571.795
196	Kab. Pekalongan	600.000	0	0	7.573.340
197	Kab. Pemalang	600.000	0	0	13.216.635
198	Kab. Purbalingga	600.000	600.000	0	6.639.596

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
190	Kab. Kebumen	0	13.576.222	25.765.200	647.965
191	Kab. Kendal	0	7.995.674	23.558.850	358.903
192	Kab. Klaten	0	12.033.506	18.560.735	491.875
193	Kab. Kudus	0	6.338.941	13.290.250	0
194	Kab. Magelang	0	9.870.986	17.233.185	519.819
195	Kab. Pati	0	11.089.387	19.319.998	188.279
196	Kab. Pekalongan	0	7.933.743	19.781.529	430.071
197	Kab. Pemalang	0	16.895.438	15.940.976	91.053
198	Kab. Purbalingga	0	10.202.717	17.995.061	361.531

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
190	Kab. Kebumen	0	408.000	491.844.006
191	Kab. Kendal	0	408.000	390.835.627
192	Kab. Klaten	0	0	428.244.260
193	Kab. Kudus	0	0	248.262.144
194	Kab. Magelang	0	408.000	383.302.437
195	Kab. Pati	0	408.000	428.170.821
196	Kab. Pekalongan	0	0	338.587.439
197	Kab. Pemalang	0	408.000	511.525.882
198	Kab. Purbalingga	0	408.000	351.797.222

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
199	Kab. Purworejo	79.223.200	1.517.500	0	10.996.200	82.500	0
200	Kab. Rembang	66.829.110	1.100.000	0	16.211.200	82.500	0
201	Kab. Semarang	106.539.120	1.532.500	0	16.183.440	82.500	0
202	Kab. Sragen	96.834.000	1.710.000	0	14.559.600	82.500	0
203	Kab. Sukoharjo	80.801.800	1.327.500	0	11.402.400	82.500	0
204	Kab. Tegal	168.540.300	1.972.500	335.000	22.045.200	82.500	200.000
205	Kab. Temanggung	74.036.760	1.405.000	0	11.757.750	82.500	0
206	Kab. Wonogiri	97.263.180	2.130.000	0	12.734.400	82.500	0
207	Kab. Wonosobo	90.880.410	1.420.000	65.000	14.260.800	82.500	75.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
199	Kab. Purworejo	2.014.300	90.000	0	173.135.812	72.000	0
200	Kab. Rembang	6.076.540	90.000	0	158.791.763	99.000	0
201	Kab. Semarang	6.014.710	90.000	0	192.586.133	141.000	0
202	Kab. Sragen	4.193.200	90.000	0	191.700.101	21.000	0
203	Kab. Sukoharjo	1.592.700	45.000	0	152.972.308	97.000	0
204	Kab. Tegal	9.092.600	135.000	31.000	248.955.760	291.000	3.502.353
205	Kab. Temanggung	5.863.850	180.000	0	155.637.399	69.000	0
206	Kab. Wonogiri	4.267.700	90.000	0	243.857.819	105.000	0
207	Kab. Wonosobo	6.795.640	90.000	0	174.708.257	108.000	621.987

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
199	Kab. Purworejo	500.000	700.000	0	6.153.191
200	Kab. Rembang	498.545	700.000	0	4.349.876
201	Kab. Semarang	500.000	0	0	8.283.285
202	Kab. Sragen	700.000	0	0	7.198.390
203	Kab. Sukoharjo	500.000	0	0	6.885.545
204	Kab. Tegal	400.000	0	0	10.797.557
205	Kab. Temanggung	600.000	0	0	6.345.587
206	Kab. Wonogiri	600.000	0	0	8.069.190
207	Kab. Wonosobo	500.000	0	0	7.332.535

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
199	Kab. Purworejo	0	9.778.792	12.000.574	268.346
200	Kab. Rembang	0	6.178.305	20.000.029	198.947
201	Kab. Semarang	0	8.268.962	16.328.736	540.064
202	Kab. Sragen	0	10.799.768	20.020.331	72.461
203	Kab. Sukoharjo	0	5.256.119	12.808.433	485.875
204	Kab. Tegal	0	12.499.759	28.107.286	519.965
205	Kab. Temanggung	0	10.303.035	18.746.278	464.033
206	Kab. Wonogiri	0	9.114.904	26.277.217	642.236
207	Kab. Wonosobo	0	10.215.849	17.271.373	457.073

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
199	Kab. Purworejo	0	408.000	296.940.415
200	Kab. Rembang	0	0	281.205.815
201	Kab. Semarang	0	0	357.090.450
202	Kab. Sragen	0	0	347.981.351
203	Kab. Sukoharjo	0	408.000	274.665.180
204	Kab. Tegal	0	408.000	507.915.780
205	Kab. Temanggung	0	0	285.491.192
206	Kab. Wonogiri	0	0	405.234.146
207	Kab. Wonosobo	0	408.000	325.292.424

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
208	Kota Magelang	21.905.200	695.000	0	2.523.000	82.500	0
209	Kota Pekalongan	30.364.900	352.500	0	5.642.400	82.500	0
210	Kota Salatiga	25.705.920	285.000	0	3.385.500	82.500	0
211	Kota Semarang	183.270.960	2.145.000	0	24.972.790	82.500	0
212	Kota Surakarta	81.099.500	1.064.500	0	8.688.000	82.500	0
213	Kota Tegal	36.534.370	455.000	0	4.270.000	82.500	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	267.622.250	4.751.750	0	0	0	0
215	Kab. Bantul	98.609.480	2.163.500	0	21.564.270	82.500	0
216	Kab. Gunung Kidul	68.805.590	1.542.500	0	14.832.720	82.500	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
208	Kota Magelang	2.424.100	90.000	0	36.708.883	18.000	0
209	Kota Pekalongan	3.446.700	90.000	0	48.671.148	24.000	0
210	Kota Salatiga	3.571.980	45.000	0	42.173.686	18.000	0
211	Kota Semarang	7.839.380	180.000	0	217.303.083	81.000	0
212	Kota Surakarta	4.146.300	90.000	0	93.380.373	33.000	0
213	Kota Tegal	3.059.810	45.000	0	63.426.373	63.000	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	0	225.261.778	18.000	0
215	Kab. Bantul	6.058.440	180.000	0	172.018.730	90.000	0
216	Kab. Gunung Kidul	2.057.440	135.000	0	192.708.715	238.250	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
208	Kota Magelang	300.000	0	0	800.875
209	Kota Pekalongan	400.000	600.000	0	2.118.615
210	Kota Salatiga	400.000	0	0	1.410.932
211	Kota Semarang	0	0	0	11.852.480
212	Kota Surakarta	300.000	1.400.000	1.500.000	3.995.402
213	Kota Tegal	600.000	0	0	2.014.759
214	Provinsi DI Yogyakarta	600.000	1.700.000	2.750.000	0
215	Kab. Bantul	0	0	0	4.916.151
216	Kab. Gunung Kidul	700.000	0	3.000.000	3.925.633

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
208	Kota Magelang	0	2.696.965	2.664.778	249.841
209	Kota Pekalongan	0	3.827.052	8.693.710	354.458
210	Kota Salatiga	0	2.761.096	3.026.756	224.575
211	Kota Semarang	0	15.161.104	29.553.392	783.305
212	Kota Surakarta	0	6.132.853	15.063.329	395.482
213	Kota Tegal	0	3.295.548	6.252.076	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	2.265.974	0	0	0
215	Kab. Bantul	0	6.665.860	21.983.685	396.757
216	Kab. Gunung Kidul	0	9.341.859	20.558.127	474.008

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
208	Kota Magelang	0	507.000	71.666.142
209	Kota Pekalongan	0	408.000	105.075.983
210	Kota Salatiga	0	0	83.090.945
211	Kota Semarang	0	408.000	493.632.994
212	Kota Surakarta	0	408.000	217.779.239
213	Kota Tegal	0	507.000	120.605.436
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	507.000	505.476.752
215	Kab. Bantul	0	507.000	335.236.373
216	Kab. Gunung Kidul	0	507.000	318.909.342

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
217	Kab. Kulon Progo	46.807.660	1.010.000	0	9.450.660	82.500	0
218	Kab. Sleman	119.230.600	2.358.500	0	23.214.600	82.500	0
219	Kota Yogyakarta	57.866.960	1.016.500	0	6.988.020	82.500	0
220	Provinsi Jawa Timur	2.363.293.840	26.124.500	294.000	0	0	0
221	Kab. Bangkalan	144.001.710	2.635.000	0	17.338.750	82.500	0
222	Kab. Banyuwangi	159.306.380	2.900.000	0	26.887.680	82.500	0
223	Kab. Blitar	95.038.480	1.892.500	0	17.431.200	82.500	0
224	Kab. Bojonegoro	98.321.680	2.005.000	0	27.207.000	82.500	0
225	Kab. Bondowoso	65.065.260	1.477.500	90.000	18.601.800	82.500	75.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
217	Kab. Kulon Progo	1.049.220	45.000	0	112.105.674	62.250	0
218	Kab. Sleman	5.935.870	135.000	0	183.599.845	141.000	0
219	Kota Yogyakarta	2.633.010	90.000	0	67.558.074	36.000	0
220	Provinsi Jawa Timur	0	0	0	1.506.172.876	1.359.000	0
221	Kab. Bangkalan	3.705.540	135.000	0	197.134.528	300.000	0
222	Kab. Banyuwangi	20.190.260	360.000	0	235.187.028	93.000	0
223	Kab. Blitar	1.790.000	45.000	0	219.675.810	192.000	0
224	Kab. Bojonegoro	1.111.200	90.000	0	277.058.488	111.000	0
225	Kab. Bondowoso	10.292.900	270.000	31.000	168.428.563	129.000	888.393

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
217	Kab. Kulon Progo	0	0	2.500.000	3.250.940
218	Kab. Sleman	0	600.000	0	6.855.161
219	Kota Yogyakarta	0	0	0	2.358.920
220	Provinsi Jawa Timur	0	1.200.000	3.000.000	0
221	Kab. Bangkalan	500.000	500.000	0	7.116.460
222	Kab. Banyuwangi	0	0	0	11.883.745
223	Kab. Blitar	400.000	600.000	0	9.239.077
224	Kab. Bojonegoro	0	0	0	8.732.379
225	Kab. Bondowoso	398.545	0	0	5.743.220

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
217	Kab. Kulon Progo	0	4.710.533	14.395.636	480.106
218	Kab. Sleman	0	7.480.879	12.881.278	473.750
219	Kota Yogyakarta	0	4.263.566	8.716.100	419.195
220	Provinsi Jawa Timur	23.001.123	0	0	0
221	Kab. Bangkalan	0	9.361.855	18.121.940	368.582
222	Kab. Banyuwangi	0	9.071.985	19.092.997	0
223	Kab. Blitar	0	9.495.785	19.719.912	280.653
224	Kab. Bojonegoro	0	10.148.603	16.076.674	0
225	Kab. Bondowoso	0	10.087.773	16.374.046	246.623

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
217	Kab. Kulon Progo	0	408.000	196.358.179
218	Kab. Sleman	0	507.000	363.495.983
219	Kota Yogyakarta	0	507.000	152.535.845
220	Provinsi Jawa Timur	0	408.000	3.924.853.339
221	Kab. Bangkalan	0	408.000	401.709.865
222	Kab. Banyuwangi	0	0	485.055.575
223	Kab. Blitar	0	408.000	376.290.917
224	Kab. Bojonegoro	0	0	440.944.524
225	Kab. Bondowoso	0	408.000	298.690.123

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
226	Kab. Gresik	134.021.360	1.612.500	0	36.183.600	82.500	0
227	Kab. Jember	238.335.340	3.861.500	0	40.971.520	82.500	0
228	Kab. Jombang	114.779.660	2.069.500	0	21.786.150	82.500	0
229	Kab. Kediri	136.493.800	2.040.000	0	27.522.600	82.500	0
230	Kab. Lamongan	94.803.730	2.000.000	0	34.676.400	82.500	0
231	Kab. Lumajang	100.054.250	1.885.000	0	20.271.360	82.500	0
232	Kab. Madiun	53.860.560	1.132.500	0	10.589.600	82.500	0
233	Kab. Magetan	57.268.080	1.132.500	0	9.701.760	82.500	0
234	Kab. Malang	259.768.020	4.205.000	0	41.878.620	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
226	Kab. Gresik	3.238.300	90.000	0	168.759.124	162.000	0
227	Kab. Jember	2.928.880	135.000	0	302.959.985	366.000	0
228	Kab. Jombang	3.787.900	135.000	0	180.103.377	186.000	0
229	Kab. Kediri	11.814.250	180.000	0	196.474.721	96.000	0
230	Kab. Lamongan	2.171.150	90.000	0	218.755.493	306.000	0
231	Kab. Lumajang	4.635.400	135.000	0	144.697.174	72.000	0
232	Kab. Madiun	3.279.150	45.000	0	131.116.376	57.000	0
233	Kab. Magetan	1.250.640	45.000	0	152.384.557	168.000	0
234	Kab. Malang	11.875.870	225.000	0	361.504.082	429.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
226	Kab. Gresik	0	600.000	0	8.514.037
227	Kab. Jember	0	0	0	17.892.421
228	Kab. Jombang	400.000	0	0	8.785.330
229	Kab. Kediri	0	0	0	12.728.655
230	Kab. Lamongan	500.000	600.000	0	9.305.470
231	Kab. Lumajang	400.000	600.000	0	7.842.591
232	Kab. Madiun	500.000	0	0	4.852.699
233	Kab. Magetan	600.000	0	0	5.169.743
234	Kab. Malang	400.000	600.000	0	22.610.785

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
226	Kab. Gresik	0	10.331.789	28.651.284	436.152
227	Kab. Jember	0	14.816.997	32.441.266	473.734
228	Kab. Jombang	0	10.647.043	19.609.735	0
229	Kab. Kediri	0	10.645.613	18.923.357	516.674
230	Kab. Lamongan	0	12.543.828	22.726.537	162.389
231	Kab. Lumajang	0	10.782.936	14.828.892	300.810
232	Kab. Madiun	0	11.043.792	15.216.628	833.307
233	Kab. Magetan	0	7.864.134	13.299.782	221.691
234	Kab. Malang	0	13.611.464	49.249.091	313.059

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
226	Kab. Gresik	0	408.000	393.090.646
227	Kab. Jember	0	408.000	655.673.143
228	Kab. Jombang	0	408.000	362.780.195
229	Kab. Kediri	0	0	417.518.170
230	Kab. Lamongan	0	0	398.723.497
231	Kab. Lumajang	0	0	306.587.913
232	Kab. Madiun	0	0	232.609.112
233	Kab. Magetan	0	0	249.188.387
234	Kab. Malang	0	408.000	767.160.491

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
235	Kab. Mojokerto	94.523.360	1.422.500	0	22.606.600	82.500	0
236	Kab. Nganjuk	100.261.080	1.722.500	0	17.355.660	82.500	0
237	Kab. Ngawi	70.872.790	1.462.500	0	11.797.380	82.500	0
238	Kab. Pacitan	44.262.400	1.225.000	0	9.101.400	82.500	0
239	Kab. Pamekasan	87.668.380	1.884.000	0	15.617.700	82.500	0
240	Kab. Pasuruan	160.095.040	2.215.000	0	24.800.620	82.500	0
241	Kab. Ponorogo	74.164.560	1.620.000	0	11.441.920	82.500	0
242	Kab. Probolinggo	98.753.780	2.217.000	0	18.052.800	82.500	0
243	Kab. Sampang	112.311.090	2.607.500	0	19.243.980	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
235	Kab. Mojokerto	2.837.430	90.000	0	165.825.472	267.000	0
236	Kab. Nganjuk	1.715.010	45.000	0	212.429.836	78.000	0
237	Kab. Ngawi	2.232.320	90.000	0	181.275.969	114.000	0
238	Kab. Pacitan	2.069.900	90.000	0	159.679.546	63.000	0
239	Kab. Pamekasan	2.428.670	90.000	0	163.206.913	77.000	0
240	Kab. Pasuruan	7.625.150	135.000	0	264.513.751	279.000	0
241	Kab. Ponorogo	1.204.550	45.000	0	189.926.237	135.000	0
242	Kab. Probolinggo	4.089.300	135.000	0	186.127.077	99.000	0
243	Kab. Sampang	6.553.040	180.000	0	159.317.099	36.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
235	Kab. Mojokerto	400.000	0	0	7.849.430
236	Kab. Nganjuk	500.000	600.000	0	8.189.730
237	Kab. Ngawi	600.000	600.000	0	5.827.613
238	Kab. Pacitan	498.545	0	0	4.407.630
239	Kab. Pamekasan	0	600.000	0	5.658.975
240	Kab. Pasuruan	0	0	0	10.903.104
241	Kab. Ponorogo	498.545	0	0	7.391.925
242	Kab. Probolinggo	398.545	0	0	8.460.112
243	Kab. Sampang	500.000	0	0	5.867.034

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
235	Kab. Mojokerto	0	8.807.981	17.837.707	0
236	Kab. Nganjuk	0	9.134.996	23.988.899	679.945
237	Kab. Ngawi	0	11.021.737	19.908.001	694.821
238	Kab. Pacitan	0	8.599.918	14.356.000	284.900
239	Kab. Pamekasan	0	15.507.869	17.636.315	590.436
240	Kab. Pasuruan	0	11.861.966	16.855.890	259.534
241	Kab. Ponorogo	0	11.389.532	20.447.466	240.457
242	Kab. Probolinggo	0	11.015.993	17.506.864	188.813
243	Kab. Sampang	0	12.290.396	15.403.629	379.872

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
235	Kab. Mojokerto	0	408.000	322.957.980
236	Kab. Nganjuk	0	0	376.783.156
237	Kab. Ngawi	0	408.000	306.987.631
238	Kab. Pacitan	0	0	244.720.739
239	Kab. Pamekasan	0	0	311.048.758
240	Kab. Pasuruan	0	0	499.626.555
241	Kab. Ponorogo	0	0	318.587.692
242	Kab. Probolinggo	0	0	347.126.784
243	Kab. Sampang	0	408.000	335.180.140

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
244	Kab. Sidoarjo	238.226.480	2.092.000	0	37.910.670	82.500	0
245	Kab. Situbondo	64.720.160	1.390.000	60.000	11.744.400	82.500	100.000
246	Kab. Sumenep	81.401.920	2.140.000	1.215.000	14.480.050	82.500	1.025.000
247	Kab. Trenggalek	62.039.750	1.305.000	0	9.996.070	82.500	0
248	Kab. Tuban	94.876.920	1.667.500	0	23.620.140	82.500	0
249	Kab. Tulungagung	95.099.700	1.962.500	0	17.595.000	82.500	0
250	Kota Blitar	20.212.500	227.500	0	3.216.000	82.500	0
251	Kota Kediri	37.213.000	477.500	0	5.624.400	82.500	0
252	Kota Madiun	24.358.840	362.500	0	3.746.160	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
244	Kab. Sidoarjo	5.259.880	135.000	0	263.423.905	351.000	0
245	Kab. Situbondo	2.415.200	135.000	0	151.356.605	171.000	517.602
246	Kab. Sumenep	3.235.020	225.000	31.000	188.443.270	99.000	7.675.508
247	Kab. Trenggalek	1.730.150	45.000	0	159.361.363	126.000	0
248	Kab. Tuban	6.800.920	180.000	0	217.954.931	114.000	0
249	Kab. Tulungagung	3.539.560	135.000	0	211.673.954	141.000	0
250	Kota Blitar	1.047.200	45.000	0	37.860.444	24.000	0
251	Kota Kediri	2.583.000	45.000	0	51.874.500	77.500	0
252	Kota Madiun	744.920	45.000	0	46.084.237	18.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
244	Kab. Sidoarjo	0	0	0	13.943.384
245	Kab. Situbondo	0	0	0	5.345.545
246	Kab. Sumenep	400.000	600.000	0	7.066.760
247	Kab. Trenggalek	600.000	0	0	4.409.555
248	Kab. Tuban	0	600.000	0	8.412.194
249	Kab. Tulungagung	600.000	600.000	0	7.349.481
250	Kota Blitar	0	0	0	1.045.906
251	Kota Kediri	0	600.000	0	2.057.744
252	Kota Madiun	400.000	0	0	1.431.575

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
244	Kab. Sidoarjo	0	10.814.288	24.490.318	529.031
245	Kab. Situbondo	0	8.109.723	14.010.909	0
246	Kab. Sumenep	0	10.246.291	21.262.212	0
247	Kab. Trenggalek	0	8.146.409	17.054.079	599.416
248	Kab. Tuban	0	8.351.939	20.944.883	293.971
249	Kab. Tulungagung	0	7.081.645	17.746.466	0
250	Kota Blitar	0	2.391.347	1.730.059	493.023
251	Kota Kediri	0	3.358.728	4.713.548	0
252	Kota Madiun	0	3.767.739	3.497.942	460.756

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
244	Kab. Sidoarjo	0	408.000	597.666.456
245	Kab. Situbondo	0	408.000	260.566.644
246	Kab. Sumenep	3.601.440	0	343.229.971
247	Kab. Trenggalek	0	408.000	265.903.292
248	Kab. Tuban	0	0	383.899.898
249	Kab. Tulungagung	0	408.000	364.014.806
250	Kota Blitar	0	0	68.375.479
251	Kota Kediri	0	408.000	109.115.420
252	Kota Madiun	0	0	85.000.169

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
253	Kota Malang	98.445.000	1.072.500	0	14.412.600	82.500	0
254	Kota Mojokerto	19.321.930	205.000	0	3.134.250	82.500	0
255	Kota Pasuruan	25.548.700	262.500	0	4.619.400	82.500	0
256	Kota Probolinggo	25.933.600	307.500	0	4.749.000	82.500	0
257	Kota Surabaya	320.287.450	2.702.500	0	55.104.480	82.500	0
258	Kota Batu	23.522.520	285.000	0	3.760.800	82.500	0
259	Provinsi Kalimantan Barat	386.215.040	5.558.000	1.713.600	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	51.948.870	1.032.000	2.532.000	2.732.400	82.500	570.000
261	Kab. Landak	73.047.490	1.397.500	4.956.000	4.304.910	82.500	1.260.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
253	Kota Malang	6.275.500	90.000	0	144.091.592	164.500	0
254	Kota Mojokerto	299.480	45.000	0	30.318.799	3.000	0
255	Kota Pasuruan	655.000	45.000	0	39.535.672	15.000	0
256	Kota Probolinggo	482.300	45.000	0	43.105.770	21.000	0
257	Kota Surabaya	4.844.890	180.000	0	278.977.712	300.000	0
258	Kota Batu	1.004.160	45.000	0	38.882.689	12.000	0
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0	318.053.105	300.000	10.352.559
260	Kab. Bengkayang	1.079.370	90.000	37.200	88.239.437	63.000	15.775.963
261	Kab. Landak	574.120	45.000	37.200	107.188.832	607.000	26.195.748

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
253	Kota Malang	400.000	1.100.000	0	5.167.413
254	Kota Mojokerto	300.000	0	0	1.070.738
255	Kota Pasuruan	0	0	0	1.523.890
256	Kota Probolinggo	0	600.000	0	1.814.468
257	Kota Surabaya	300.000	1.300.000	0	17.917.764
258	Kota Batu	300.000	0	0	1.944.332
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	900.000	1.500.000	0
260	Kab. Bengkayang	500.000	0	0	2.600.000
261	Kab. Landak	398.545	0	0	3.567.205

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
253	Kota Malang	0	7.417.727	7.366.600	482.226
254	Kota Mojokerto	0	2.550.451	3.167.089	239.413
255	Kota Pasuruan	0	3.161.856	4.067.013	323.710
256	Kota Probolinggo	0	1.866.005	2.786.686	212.514
257	Kota Surabaya	0	43.549.384	35.483.772	0
258	Kota Batu	0	2.055.137	3.283.560	440.347
259	Provinsi Kalimantan Barat	6.014.111	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	0	9.314.058	13.667.361	487.574
261	Kab. Landak	0	10.543.273	19.259.674	190.428

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
253	Kota Malang	0	408.000	286.976.158
254	Kota Mojokerto	0	0	60.737.650
255	Kota Pasuruan	0	0	79.840.241
256	Kota Probolinggo	0	507.000	82.513.343
257	Kota Surabaya	0	408.000	761.438.452
258	Kota Batu	0	0	75.618.045
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	408.000	731.014.415
260	Kab. Bengkayang	4.681.872	408.000	195.841.605
261	Kab. Landak	0	0	253.655.425

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
262	Kab. Kapuas Hulu	51.063.400	1.307.500	4.590.000	3.629.700	82.500	1.170.000
263	Kab. Ketapang	91.152.590	1.932.500	6.870.000	7.393.750	82.500	1.200.000
264	Kab. Mempawah	36.386.400	637.500	336.000	3.818.330	82.500	90.000
265	Kab. Sambas	97.152.770	1.464.500	636.000	6.965.320	82.500	390.000
266	Kab. Sanggau	82.168.320	1.535.000	4.440.000	4.602.500	82.500	1.140.000
267	Kab. Sintang	82.638.480	1.699.000	10.680.000	3.765.330	82.500	1.800.000
268	Kota Pontianak	87.889.130	1.082.500	0	6.632.010	82.500	0
269	Kota Singkawang	40.754.600	387.500	0	2.218.350	82.500	0
270	Kab. Sekadau	37.558.910	785.000	1.884.000	2.508.480	82.500	390.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
262	Kab. Kapuas Hulu	1.027.560	45.000	0	117.580.054	150.000	19.309.343
263	Kab. Ketapang	3.692.980	135.000	37.200	180.566.323	135.000	45.584.878
264	Kab. Mempawah	3.505.300	135.000	0	71.708.081	111.000	1.793.529
265	Kab. Sambas	4.349.240	90.000	0	123.967.296	135.000	3.919.609
266	Kab. Sanggau	2.708.390	90.000	0	137.060.078	180.000	23.035.917
267	Kab. Sintang	1.969.180	45.000	37.200	127.623.066	231.000	70.999.092
268	Kota Pontianak	3.103.720	90.000	0	91.226.504	96.000	0
269	Kota Singkawang	1.098.690	45.000	0	50.561.760	33.000	0
270	Kab. Sekadau	1.179.310	45.000	0	74.333.465	99.000	9.974.567

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
262	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	4.167.217
263	Kab. Ketapang	400.000	0	0	4.187.520
264	Kab. Mempawah	400.000	0	0	1.787.219
265	Kab. Sambas	0	600.000	0	4.039.257
266	Kab. Sanggau	400.000	0	0	3.528.835
267	Kab. Sintang	0	600.000	0	5.656.505
268	Kota Pontianak	0	0	0	1.400.000
269	Kota Singkawang	500.000	0	0	1.086.203
270	Kab. Sekadau	0	0	0	1.500.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
262	Kab. Kapuas Hulu	0	8.439.416	19.643.369	0
263	Kab. Ketapang	0	11.521.678	18.323.802	376.868
264	Kab. Mempawah	0	6.441.416	9.313.043	328.329
265	Kab. Sambas	0	10.198.501	29.425.326	324.428
266	Kab. Sanggau	0	8.254.692	14.770.008	290.340
267	Kab. Sintang	0	9.505.633	16.715.394	0
268	Kota Pontianak	0	6.486.786	12.698.703	607.599
269	Kota Singkawang	0	3.517.747	6.508.121	327.553
270	Kab. Sekadau	0	7.868.532	8.763.721	342.647

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
262	Kab. Kapuas Hulu	5.762.304	0	237.967.363
263	Kab. Ketapang	0	0	373.592.589
264	Kab. Mempawah	0	0	136.873.647
265	Kab. Sambas	13.685.472	408.000	297.833.219
266	Kab. Sanggau	7.923.168	0	292.209.748
267	Kab. Sintang	12.244.896	408.000	346.700.276
268	Kota Pontianak	0	0	211.395.452
269	Kota Singkawang	0	0	107.121.024
270	Kab. Sekadau	0	0	147.315.132

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
271	Kab. Melawi	39.972.420	1.005.000	6.936.000	2.978.730	82.500	1.920.000
272	Kab. Kayong Utara	20.703.330	422.500	420.000	1.656.000	82.500	30.000
273	Kab. Kubu Raya	88.537.360	1.415.000	1.386.000	6.537.600	82.500	60.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	175.001.270	4.520.000	1.108.800	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	17.399.140	739.500	2.046.000	1.693.970	82.500	630.000
276	Kab. Barito Utara	20.941.540	580.000	960.000	2.510.380	82.500	360.000
277	Kab. Kapuas	43.418.360	1.355.000	4.338.000	6.651.600	82.500	2.280.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	41.905.970	695.000	192.000	5.382.640	82.500	30.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	72.811.840	1.449.000	2.526.000	6.226.800	82.500	720.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
271	Kab. Melawi	851.480	45.000	0	70.214.933	273.000	31.334.556
272	Kab. Kayong Utara	357.720	45.000	0	53.247.340	42.000	3.254.845
273	Kab. Kubu Raya	3.674.950	90.000	0	113.366.059	159.000	7.423.917
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0	263.545.941	279.000	5.162.861
275	Kab. Barito Selatan	519.780	90.000	0	68.147.647	63.000	14.357.858
276	Kab. Barito Utara	679.340	45.000	0	81.977.230	104.000	8.052.700
277	Kab. Kapuas	2.326.900	90.000	0	147.326.360	330.000	38.187.687
278	Kab. Kotawaringin Barat	3.162.160	135.000	0	72.831.368	30.000	1.015.316
279	Kab. Kotawaringin Timur	2.535.600	90.000	0	125.908.841	183.000	12.766.789

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
271	Kab. Melawi	0	0	0	2.626.366
272	Kab. Kayong Utara	0	0	0	1.218.110
273	Kab. Kubu Raya	0	0	0	2.921.242
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	900.000	2.000.000	0
275	Kab. Barito Selatan	0	0	0	1.245.373
276	Kab. Barito Utara	0	0	0	1.383.675
277	Kab. Kapuas	0	0	0	2.896.308
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	1.868.805
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	600.000	0	2.998.155

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
271	Kab. Melawi	0	6.554.139	7.289.261	204.368
272	Kab. Kayong Utara	0	5.946.706	9.504.785	368.970
273	Kab. Kubu Raya	0	9.011.921	20.012.349	248.384
274	Provinsi Kalimantan Tengah	5.389.050	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	0	5.859.710	10.693.000	177.204
276	Kab. Barito Utara	0	4.950.226	9.157.845	313.263
277	Kab. Kapuas	0	8.243.224	115.762.659	683.540
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	5.725.857	14.035.572	560.759
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	5.116.130	15.036.172	449.785

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
271	Kab. Melawi	0	0	172.287.753
272	Kab. Kayong Utara	0	0	97.299.806
273	Kab. Kubu Raya	0	408.000	255.334.282
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	408.000	458.314.922
275	Kab. Barito Selatan	0	408.000	124.152.682
276	Kab. Barito Utara	0	0	132.097.699
277	Kab. Kapuas	0	408.000	374.380.138
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	408.000	148.060.947
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	408.000	249.908.612

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
280	Kota Palangkaraya	34.268.360	600.000	156.000	3.312.910	82.500	30.000
281	Kab. Katingan	29.859.520	810.000	4.062.000	2.139.000	82.500	870.000
282	Kab. Seruyan	31.013.260	909.500	1.878.000	3.248.160	82.500	330.000
283	Kab. Sukamara	11.029.170	182.500	192.000	1.842.480	82.500	150.000
284	Kab. Lamandau	18.180.880	592.000	678.000	2.858.100	82.500	150.000
285	Kab. Gunung Mas	26.282.480	615.000	2.016.000	2.205.450	82.500	510.000
286	Kab. Pulang Pisau	20.102.940	602.500	828.000	2.525.400	82.500	300.000
287	Kab. Murung Raya	21.723.740	650.000	2.730.000	2.671.900	82.500	1.230.000
288	Kab. Barito Timur	13.801.720	477.500	78.000	1.983.000	82.500	30.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
280	Kota Palangkaraya	8.271.160	90.000	0	77.394.215	45.000	0
281	Kab. Katingan	3.019.500	90.000	37.200	90.391.473	51.000	22.909.284
282	Kab. Seruyan	1.005.630	45.000	0	55.582.286	45.000	8.623.287
283	Kab. Sukamara	468.940	45.000	0	27.816.264	12.000	1.888.555
284	Kab. Lamandau	456.040	90.000	0	43.867.117	90.000	5.359.093
285	Kab. Gunung Mas	96.700	45.000	0	87.377.809	60.000	16.479.681
286	Kab. Pulang Pisau	4.314.320	90.000	0	56.739.913	42.000	4.098.889
287	Kab. Murung Raya	1.287.190	45.000	0	77.378.945	48.000	22.006.237
288	Kab. Barito Timur	727.800	45.000	0	65.019.379	72.000	894.010

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
280	Kota Palangkaraya	400.000	0	0	2.021.410
281	Kab. Katingan	0	0	0	1.612.561
282	Kab. Seruyan	0	0	0	1.503.787
283	Kab. Sukamara	0	0	0	496.685
284	Kab. Lamandau	0	0	0	990.569
285	Kab. Gunung Mas	0	0	0	1.532.341
286	Kab. Pulang Pisau	0	0	0	1.216.177
287	Kab. Murung Raya	0	0	0	1.255.482
288	Kab. Barito Timur	0	0	0	1.314.966

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
280	Kota Palangkaraya	0	6.374.258	7.673.017	357.915
281	Kab. Katingan	0	7.029.066	12.445.194	561.264
282	Kab. Seruyan	0	5.620.017	7.553.057	283.894
283	Kab. Sukamara	0	3.860.950	4.600.093	491.858
284	Kab. Lamandau	0	4.105.863	4.934.299	328.763
285	Kab. Gunung Mas	0	7.368.514	10.648.277	253.747
286	Kab. Pulang Pisau	0	5.884.561	9.258.361	358.960
287	Kab. Murung Raya	0	4.734.060	10.974.425	463.770
288	Kab. Barito Timur	0	5.903.494	10.920.342	125.047

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
280	Kota Palangkaraya	0	408.000	141.484.745
281	Kab. Katingan	0	408.000	176.377.562
282	Kab. Seruyan	0	0	117.723.378
283	Kab. Sukamara	0	0	53.158.995
284	Kab. Lamandau	0	0	82.763.224
285	Kab. Gunung Mas	0	408.000	155.981.499
286	Kab. Pulang Pisau	0	0	106.444.521
287	Kab. Murung Raya	0	0	147.281.249
288	Kab. Barito Timur	0	0	101.474.758

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
289	Provinsi Kalimantan Selatan	223.358.740	4.282.250	100.800	0	0	0
290	Kab. Banjar	53.970.200	1.135.000	444.000	8.544.060	82.500	90.000
291	Kab. Barito Kuala	37.684.900	975.000	258.000	6.019.020	82.500	210.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	21.592.360	635.000	186.000	4.358.400	82.500	60.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	22.120.740	725.000	216.000	4.204.200	82.500	60.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	15.755.830	567.500	600.000	3.528.240	82.500	630.000
295	Kab. Kotabaru	42.699.100	917.000	336.000	4.986.000	82.500	90.000
296	Kab. Tabalong	32.287.470	849.500	612.000	5.534.740	82.500	150.000
297	Kab. Tanah Laut	40.193.600	772.500	36.000	6.486.000	82.500	30.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0	289.192.350	219.000	906.266
290	Kab. Banjar	14.241.230	180.000	0	150.018.627	81.000	3.720.627
291	Kab. Barito Kuala	2.323.410	45.000	0	120.050.902	99.000	1.885.702
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.703.600	135.000	0	80.703.688	69.000	1.579.500
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	3.997.400	90.000	0	86.042.188	45.000	1.833.626
294	Kab. Hulu Sungai Utara	1.457.070	90.000	0	72.934.294	81.000	5.306.539
295	Kab. Kotabaru	2.455.300	90.000	0	71.094.684	84.000	1.365.312
296	Kab. Tabalong	2.754.770	135.000	0	100.166.688	138.000	5.280.362
297	Kab. Tanah Laut	3.016.100	90.000	0	118.181.907	51.000	347.089

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
289	Provinsi Kalimantan Selatan	400.000	2.500.000	3.000.000	0
290	Kab. Banjar	500.000	0	0	4.179.974
291	Kab. Barito Kuala	0	0	0	2.613.477
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	600.000	0	2.084.028
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0	2.094.410
294	Kab. Hulu Sungai Utara	500.000	0	0	2.399.498
295	Kab. Kotabaru	0	0	0	2.611.451
296	Kab. Tabalong	300.000	0	0	1.896.854
297	Kab. Tanah Laut	0	0	0	2.343.836

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
289	Provinsi Kalimantan Selatan	7.012.481	0	0	0
290	Kab. Banjar	0	11.153.525	23.650.086	319.963
291	Kab. Barito Kuala	0	8.139.078	13.986.263	224.982
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	6.995.176	15.267.854	62.430
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	6.280.328	9.969.337	190.916
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	5.966.731	5.381.950	0
295	Kab. Kotabaru	0	10.233.106	18.165.360	0
296	Kab. Tabalong	0	6.732.483	11.189.085	0
297	Kab. Tanah Laut	0	8.799.694	11.576.502	199.024

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	408.000	531.379.887
290	Kab. Banjar	0	408.000	272.718.792
291	Kab. Barito Kuala	0	408.000	195.005.234
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	507.000	138.621.536
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	408.000	138.359.645
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	408.000	115.689.152
295	Kab. Kotabaru	0	408.000	155.617.813
296	Kab. Tabalong	0	408.000	168.517.452
297	Kab. Tanah Laut	0	408.000	192.613.752

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
298	Kab. Tapin	20.837.340	510.000	72.000	4.104.600	82.500	60.000
299	Kota Banjarbaru	35.758.530	737.000	0	5.423.760	82.500	0
300	Kota Banjarmasin	72.303.330	1.004.000	0	8.346.240	82.500	0
301	Kab. Balangan	13.791.360	510.000	258.000	3.664.820	82.500	60.000
302	Kab. Tanah Bumbu	47.054.500	695.000	114.000	7.444.200	82.500	60.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	311.452.350	5.190.250	302.400	0	0	0
304	Kab. Berau	50.135.690	627.500	594.000	5.076.060	82.500	210.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	128.065.180	1.922.500	1.164.000	11.952.500	82.500	360.000
306	Kab. Kutai Barat	36.867.420	769.500	1.398.000	2.874.080	82.500	390.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
298	Kab. Tapin	6.948.100	135.000	0	67.530.641	54.000	589.616
299	Kota Banjarbaru	5.566.020	90.000	0	58.446.587	33.000	0
300	Kota Banjarmasin	5.426.680	90.000	0	123.535.668	24.000	0
301	Kab. Balangan	2.586.860	135.000	0	66.503.148	102.000	2.735.227
302	Kab. Tanah Bumbu	4.603.400	90.000	0	103.882.118	108.000	691.471
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	0	316.713.547	153.000	2.330.020
304	Kab. Berau	2.121.440	45.000	0	106.132.545	159.000	4.275.454
305	Kab. Kutai Kartanegara	6.022.650	135.000	0	230.969.227	225.000	10.077.744
306	Kab. Kutai Barat	496.690	45.000	0	80.259.792	225.000	10.045.654

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
298	Kab. Tapin	0	0	0	1.847.133
299	Kota Banjarbaru	0	0	0	1.477.888
300	Kota Banjarmasin	0	0	0	2.274.201
301	Kab. Balangan	0	0	0	1.488.540
302	Kab. Tanah Bumbu	0	0	0	2.627.302
303	Provinsi Kalimantan Timur	300.000	1.000.000	1.900.000	0
304	Kab. Berau	300.000	0	0	1.947.746
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	0	0	4.708.949
306	Kab. Kutai Barat	0	0	0	2.514.770

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
298	Kab. Tapin	0	5.354.080	8.075.971	427.290
299	Kota Banjarbaru	0	3.638.378	6.687.930	235.534
300	Kota Banjarmasin	0	8.434.152	14.218.723	405.326
301	Kab. Balangan	0	5.736.905	8.397.048	370.659
302	Kab. Tanah Bumbu	0	8.732.675	10.678.037	0
303	Provinsi Kalimantan Timur	1.870.540	0	0	0
304	Kab. Berau	0	6.489.279	9.059.188	424.774
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	12.566.393	17.241.679	375.763
306	Kab. Kutai Barat	0	6.266.817	10.427.179	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
298	Kab. Tapin	0	408.000	117.036.271
299	Kota Banjarbaru	0	408.000	118.585.127
300	Kota Banjarmasin	0	408.000	236.552.820
301	Kab. Balangan	0	0	106.422.067
302	Kab. Tanah Bumbu	0	0	186.863.203
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	507.000	641.719.107
304	Kab. Berau	16.926.768	408.000	205.014.944
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	408.000	426.277.085
306	Kab. Kutai Barat	0	507.000	153.169.402

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
307	Kab. Kutai Timur	83.425.460	890.000	864.000	9.722.740	82.500	420.000
308	Kab. Paser	46.334.490	919.500	1.176.000	4.119.040	82.500	210.000
309	Kota Balikpapan	103.380.540	1.168.500	0	9.704.280	82.500	0
310	Kota Bontang	27.720.180	312.500	0	4.209.660	82.500	0
311	Kota Samarinda	115.270.020	1.614.500	0	7.755.150	82.500	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	30.642.020	387.500	0	3.428.040	82.500	0
313	Kab. Mahakam Ulu	10.146.180	160.000	408.000	1.232.840	82.500	480.000
314	Provinsi Sulawesi Utara	187.140.560	4.285.250	54.600	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	30.008.570	762.500	169.000	2.461.960	82.500	32.500

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
307	Kab. Kutai Timur	3.729.500	90.000	37.200	126.893.724	102.000	6.437.530
308	Kab. Paser	948.840	45.000	0	112.316.427	144.000	6.687.663
309	Kota Balikpapan	11.276.610	45.000	0	116.565.057	102.000	0
310	Kota Bontang	1.567.670	90.000	0	32.762.283	51.000	0
311	Kota Samarinda	7.602.990	135.000	0	158.699.608	156.000	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	653.990	45.000	0	61.231.531	45.000	0
313	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	18.651.585	33.000	1.889.064
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	0	0	253.661.843	129.000	279.231
315	Kab. Bolaang Mongondow	1.815.520	135.000	0	90.263.254	141.000	1.099.155

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
307	Kab. Kutai Timur	0	0	0	2.204.612
308	Kab. Paser	0	600.000	0	2.363.470
309	Kota Balikpapan	0	0	0	2.301.301
310	Kota Bontang	300.000	0	0	955.450
311	Kota Samarinda	0	0	0	3.689.757
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	0	0	1.403.518
313	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	517.320
314	Provinsi Sulawesi Utara	500.000	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	498.545	0	0	2.167.577

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
307	Kab. Kutai Timur	0	10.010.174	16.491.341	0
308	Kab. Paser	0	3.499.753	10.134.561	0
309	Kota Balikpapan	0	8.183.896	19.675.797	794.217
310	Kota Bontang	0	4.820.263	2.170.768	135.804
311	Kota Samarinda	0	10.788.100	15.418.005	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	6.853.568	6.067.717	213.514
313	Kab. Mahakam Ulu	0	5.758.485	2.855.796	0
314	Provinsi Sulawesi Utara	5.987.849	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	0	8.540.661	10.314.350	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
307	Kab. Kutai Timur	0	408.000	261.808.781
308	Kab. Paser	0	408.000	189.989.244
309	Kota Balikpapan	0	507.000	273.786.698
310	Kota Bontang	0	507.000	75.685.078
311	Kota Samarinda	0	507.000	321.718.630
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	408.000	111.461.898
313	Kab. Mahakam Ulu	720.288	0	42.935.058
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	507.000	452.545.333
315	Kab. Bolaang Mongondow	6.482.592	408.000	155.382.684

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
316	Kab. Minahasa	37.302.290	1.150.000	0	2.496.730	82.500	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	21.454.150	877.500	1.579.500	1.881.750	82.500	617.500
318	Kota Bitung	26.375.140	387.500	0	1.248.720	82.500	0
319	Kota Manado	57.550.150	954.500	0	3.060.480	82.500	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	17.723.040	532.000	201.500	2.038.520	82.500	162.500
321	Kab. Minahasa Selatan	27.252.080	855.000	78.000	2.222.350	82.500	97.500
322	Kota Tomohon	13.695.240	262.500	0	898.560	82.500	0
323	Kab. Minahasa Utara	30.581.820	807.500	39.000	2.379.520	82.500	32.500
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	9.316.580	439.500	78.000	679.700	82.500	32.500

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
316	Kab. Minahasa	1.275.830	90.000	0	89.697.423	102.000	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	671.900	45.000	0	59.591.586	138.000	7.191.033
318	Kota Bitung	1.401.840	90.000	0	40.463.525	18.000	0
319	Kota Manado	1.801.450	135.000	0	76.978.297	23.750	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	474.780	45.000	0	47.037.112	42.000	1.233.944
321	Kab. Minahasa Selatan	1.374.860	90.000	0	60.684.777	6.000	289.805
322	Kota Tomohon	323.600	90.000	0	29.405.945	12.000	0
323	Kab. Minahasa Utara	3.460.460	135.000	0	62.721.416	54.000	880.597
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	13.720	45.000	0	28.729.225	39.000	631.985

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
316	Kab. Minahasa	398.545	0	0	2.819.237
317	Kab. Kepulauan Sangihe	398.545	0	0	1.957.620
318	Kota Bitung	400.000	0	0	1.876.921
319	Kota Manado	0	0	0	2.844.741
320	Kab. Kepulauan Talaud	498.545	0	0	1.712.027
321	Kab. Minahasa Selatan	398.545	0	0	2.200.347
322	Kota Tomohon	400.000	0	0	913.480
323	Kab. Minahasa Utara	0	0	0	1.936.475
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	398.545	0	0	1.011.035

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
316	Kab. Minahasa	0	10.258.732	14.008.631	169.351
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0	6.725.345	8.734.128	208.477
318	Kota Bitung	0	7.024.948	3.201.777	295.977
319	Kota Manado	0	5.982.689	8.665.816	544.452
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	6.639.567	12.439.950	293.024
321	Kab. Minahasa Selatan	0	6.969.351	10.818.177	143.336
322	Kota Tomohon	0	4.999.482	5.329.297	293.665
323	Kab. Minahasa Utara	0	6.773.528	10.673.185	244.616
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	5.211.266	4.532.040	216.986

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
316	Kab. Minahasa	0	0	159.851.269
317	Kab. Kepulauan Sangihe	13.685.472	507.000	126.347.006
318	Kota Bitung	0	507.000	83.373.848
319	Kota Manado	0	507.000	159.130.825
320	Kab. Kepulauan Talaud	7.563.024	0	98.719.033
321	Kab. Minahasa Selatan	6.842.736	0	120.405.364
322	Kota Tomohon	0	507.000	57.213.269
323	Kab. Minahasa Utara	0	408.000	121.210.117
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	6.482.592	0	57.940.174

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
325	Kota Kotamobagu	14.430.240	250.000	0	1.090.560	82.500	0
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	10.162.160	295.000	0	1.560.000	82.500	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	15.281.260	400.000	0	1.669.040	82.500	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	9.478.280	262.500	0	880.740	82.500	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	9.876.910	285.000	0	1.630.600	82.500	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	195.025.810	4.729.000	218.400	0	0	0
331	Kab. Banggai	47.466.300	1.230.000	318.500	6.095.400	82.500	130.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	18.675.420	592.500	247.000	2.345.400	82.500	162.500
333	Kab. Buol	22.967.640	605.000	0	2.518.200	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
325	Kota Kotamobagu	434.790	90.000	0	32.235.161	27.000	0
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.077.000	45.000	0	33.819.171	33.000	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	786.980	90.000	0	38.525.142	63.000	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	482.310	90.000	0	33.819.122	36.000	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.041.760	90.000	0	31.971.362	60.000	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	0	0	335.486.376	121.500	1.780.526
331	Kab. Banggai	1.753.800	135.000	0	128.659.469	249.000	1.341.533
332	Kab. Banggai Kepulauan	1.034.380	135.000	0	72.902.947	64.500	2.321.688
333	Kab. Buol	630.400	45.000	0	74.359.585	51.750	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
325	Kota Kotamobagu	0	0	0	1.090.755
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	398.545	0	0	1.244.251
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	0	1.631.820
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	398.545	0	0	1.011.149
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	1.198.304
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	1.200.000	0	0
331	Kab. Banggai	398.545	500.000	0	3.705.057
332	Kab. Banggai Kepulauan	400.000	0	0	1.892.390
333	Kab. Buol	398.545	0	0	1.503.138

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
325	Kota Kotamobagu	0	2.602.172	1.949.370	196.791
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	3.573.232	8.218.313	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	5.484.751	6.708.292	128.815
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	4.890.637	5.823.392	482.878
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	5.816.874	5.724.730	376.427
330	Provinsi Sulawesi Tengah	3.364.960	0	0	0
331	Kab. Banggai	0	11.987.302	28.561.221	412.795
332	Kab. Banggai Kepulauan	0	8.022.045	12.340.934	137.092
333	Kab. Buol	0	10.053.933	9.742.309	532.278

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
325	Kota Kotamobagu	0	507.000	54.986.339
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.881.152	507.000	63.896.324
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	70.851.600
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	507.000	58.245.053
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	58.154.467
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	408.000	542.334.572
331	Kab. Banggai	0	0	233.026.422
332	Kab. Banggai Kepulauan	0	0	121.356.296
333	Kab. Buol	2.881.152	0	126.371.430

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
334	Kab. Toli-Toli	29.970.420	762.500	604.500	3.277.800	82.500	97.500
335	Kab. Donggala	44.790.160	1.247.000	1.651.000	4.815.000	82.500	292.500
336	Kab. Morowali	30.067.560	500.000	1.534.000	5.793.000	82.500	1.007.500
337	Kab. Poso	28.490.040	820.000	370.500	2.868.600	82.500	97.500
338	Kota Palu	51.376.700	935.000	0	5.141.400	82.500	0
339	Kab. Parigi Moutong	58.561.540	1.487.500	643.500	9.639.000	82.500	97.500
340	Kab. Tojo Una Una	23.304.720	637.500	2.548.000	2.629.800	82.500	1.040.000
341	Kab. Sigi	33.560.660	852.500	2.405.000	3.680.400	82.500	780.000
342	Kab. Banggai Laut	12.208.800	342.500	1.085.500	1.532.640	82.500	455.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
334	Kab. Toli-Toli	896.200	45.000	0	72.320.974	96.000	4.122.358
335	Kab. Donggala	1.804.600	135.000	0	124.485.031	99.000	7.849.478
336	Kab. Morowali	890.900	45.000	40.300	73.887.491	93.000	10.649.496
337	Kab. Poso	743.300	90.000	0	88.813.539	18.000	2.323.212
338	Kota Palu	4.672.000	135.000	0	111.697.742	84.000	0
339	Kab. Parigi Moutong	4.298.900	135.000	40.300	168.958.580	507.000	2.159.239
340	Kab. Tojo Una Una	1.443.800	90.000	241.800	83.018.321	81.000	20.914.553
341	Kab. Sigi	3.817.500	135.000	40.300	99.045.870	93.250	11.265.353
342	Kab. Banggai Laut	562.410	90.000	0	43.426.825	39.000	8.674.987

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
334	Kab. Toli-Toli	398.545	0	0	2.025.994
335	Kab. Donggala	398.545	0	0	3.104.277
336	Kab. Morowali	0	0	0	1.825.480
337	Kab. Poso	498.545	0	0	2.255.350
338	Kota Palu	0	0	0	3.221.020
339	Kab. Parigi Moutong	500.000	0	0	4.137.177
340	Kab. Tojo Una Una	0	0	0	1.819.060
341	Kab. Sigi	500.000	0	0	2.599.036
342	Kab. Banggai Laut	0	0	0	987.053

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
334	Kab. Toli-Toli	0	8.544.095	8.856.215	148.933
335	Kab. Donggala	0	8.976.792	17.620.610	889.956
336	Kab. Morowali	0	3.557.390	9.252.423	327.131
337	Kab. Poso	0	9.405.919	16.804.718	523.582
338	Kota Palu	0	4.948.615	8.581.550	515.404
339	Kab. Parigi Moutong	0	11.002.389	22.977.338	420.456
340	Kab. Tojo Una Una	0	8.501.936	15.385.704	383.938
341	Kab. Sigi	0	9.905.915	15.388.861	682.033
342	Kab. Banggai Laut	0	6.450.507	7.023.084	225.283

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
334	Kab. Toli-Toli	6.842.736	0	139.092.270
335	Kab. Donggala	4.681.872	0	222.923.321
336	Kab. Morowali	0	0	139.553.171
337	Kab. Poso	0	408.000	154.613.305
338	Kota Palu	0	507.000	191.897.931
339	Kab. Parigi Moutong	0	408.000	286.055.919
340	Kab. Tojo Una Una	6.482.592	507.000	169.112.224
341	Kab. Sigi	5.042.016	408.000	190.284.194
342	Kab. Banggai Laut	720.288	0	83.906.377

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
343	Kab. Morowali Utara	19.432.280	635.000	1.079.000	2.784.000	82.500	325.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	562.653.120	7.990.750	600.600	0	0	0
345	Kab. Bantaeng	24.802.740	612.500	0	3.336.000	82.500	0
346	Kab. Barru	23.347.920	590.000	0	3.354.000	82.500	0
347	Kab. Bone	87.459.140	2.132.000	123.500	9.571.200	82.500	0
348	Kab. Bulukumba	51.828.560	1.032.500	0	6.340.200	82.500	0
349	Kab. Enrekang	28.350.690	692.500	357.500	3.354.820	82.500	390.000
350	Kab. Gowa	100.016.100	1.422.500	0	9.597.600	82.500	0
351	Kab. Jeneponto	50.349.680	932.500	0	5.123.400	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
343	Kab. Morowali Utara	338.200	45.000	0	63.049.300	42.000	5.624.568
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	0	0	852.170.562	234.000	5.566.746
345	Kab. Bantaeng	4.583.300	45.000	0	80.337.719	27.000	0
346	Kab. Barru	2.462.800	45.000	0	76.613.718	48.000	0
347	Kab. Bone	5.489.900	90.000	0	253.291.394	138.000	1.223.251
348	Kab. Bulukumba	3.651.100	180.000	0	122.625.987	60.000	0
349	Kab. Enrekang	930.290	45.000	0	109.177.791	45.000	3.513.463
350	Kab. Gowa	4.508.000	135.000	0	150.986.497	57.000	0
351	Kab. Jeneponto	1.615.500	45.000	0	99.709.485	54.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
343	Kab. Morowali Utara	0	0	0	1.817.200
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	3.200.000	1.500.000	0
345	Kab. Bantaeng	0	0	0	1.966.840
346	Kab. Barru	500.000	0	0	1.813.239
347	Kab. Bone	500.000	0	0	7.551.985
348	Kab. Bulukumba	500.000	0	0	3.617.018
349	Kab. Enrekang	500.000	0	0	3.302.417
350	Kab. Gowa	400.000	600.000	0	5.969.350
351	Kab. Jeneponto	400.000	0	0	3.318.809

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
343	Kab. Morowali Utara	0	7.224.658	10.258.250	387.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	11.401.400	0	0	0
345	Kab. Bantaeng	0	3.989.596	12.511.006	0
346	Kab. Barru	0	5.689.951	7.246.268	206.596
347	Kab. Bone	0	14.076.313	28.225.297	0
348	Kab. Bulukumba	0	9.527.612	15.248.034	743.909
349	Kab. Enrekang	0	6.143.497	10.359.339	193.606
350	Kab. Gowa	0	14.436.307	21.913.790	673.745
351	Kab. Jeneponto	0	8.707.238	14.479.362	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
343	Kab. Morowali Utara	0	408.000	113.531.956
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	408.000	1.445.725.178
345	Kab. Bantaeng	0	408.000	132.702.201
346	Kab. Barru	0	408.000	122.407.992
347	Kab. Bone	0	408.000	410.362.480
348	Kab. Bulukumba	0	408.000	215.845.420
349	Kab. Enrekang	0	408.000	167.846.413
350	Kab. Gowa	0	0	310.798.389
351	Kab. Jeneponto	0	0	184.817.474

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
352	Kab. Luwu	53.022.030	1.015.000	2.632.500	4.029.440	82.500	357.500
353	Kab. Luwu Utara	41.227.990	842.500	1.878.500	3.735.680	82.500	260.000
354	Kab. Maros	60.809.740	842.500	39.000	5.307.600	82.500	0
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	49.665.500	1.047.500	2.691.000	5.665.800	82.500	1.170.000
356	Kota Palopo	25.642.600	307.500	0	1.797.000	82.500	0
357	Kab. Luwu Timur	47.930.220	615.000	84.500	4.197.410	82.500	0
358	Kab. Pinrang	51.244.900	1.017.000	728.000	4.244.400	82.500	97.500
359	Kab. Sinjai	31.822.320	737.500	78.000	5.771.400	82.500	65.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	20.500.800	547.500	1.332.500	2.502.450	82.500	585.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
352	Kab. Luwu	2.254.880	45.000	0	110.328.957	189.000	16.430.477
353	Kab. Luwu Utara	877.930	90.000	40.300	108.279.960	48.000	12.323.429
354	Kab. Maros	560.200	45.000	0	109.794.747	81.000	236.449
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.568.200	90.000	40.300	123.395.890	57.000	14.365.123
356	Kota Palopo	562.300	45.000	0	48.175.717	51.000	0
357	Kab. Luwu Timur	887.020	45.000	0	101.602.754	51.000	296.911
358	Kab. Pinrang	4.477.600	135.000	0	112.024.681	126.000	4.800.138
359	Kab. Sinjai	7.239.500	90.000	0	97.577.062	36.000	0
360	Kab. Kepulauan Selayar	4.102.020	90.000	0	77.454.243	45.000	11.335.587

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
352	Kab. Luwu	398.545	0	0	3.281.990
353	Kab. Luwu Utara	398.545	0	0	3.034.606
354	Kab. Maros	400.000	600.000	0	3.178.342
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	500.000	0	0	3.715.538
356	Kota Palopo	398.545	0	0	1.869.875
357	Kab. Luwu Timur	0	0	0	3.045.558
358	Kab. Pinrang	400.000	0	0	4.226.730
359	Kab. Sinjai	498.545	0	0	2.153.475
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	600.000	0	1.239.430

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
352	Kab. Luwu	0	11.347.972	18.814.474	413.078
353	Kab. Luwu Utara	0	7.784.876	11.888.510	629.502
354	Kab. Maros	0	5.495.725	11.364.712	0
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	0	9.600.661	21.026.361	118.025
356	Kota Palopo	0	4.159.273	8.331.297	428.431
357	Kab. Luwu Timur	0	5.160.921	11.106.294	796.139
358	Kab. Pinrang	0	8.263.758	15.552.246	498.313
359	Kab. Sinjai	0	6.658.236	8.452.445	0
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	7.056.909	10.615.323	352.632

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
352	Kab. Luwu	0	0	224.643.343
353	Kab. Luwu Utara	0	408.000	193.830.828
354	Kab. Maros	0	408.000	199.245.515
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	3.961.584	408.000	240.168.982
356	Kota Palopo	0	507.000	92.358.038
357	Kab. Luwu Timur	0	0	175.901.227
358	Kab. Pinrang	0	0	207.918.766
359	Kab. Sinjai	0	408.000	161.669.983
360	Kab. Kepulauan Selayar	7.563.024	0	146.004.918

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
361	Kab. Sidenreng Rappang	39.215.200	909.500	0	5.912.400	82.500	0
362	Kab. Soppeng	24.296.160	812.000	0	2.621.400	82.500	0
363	Kab. Takalar	42.968.200	715.000	0	4.426.800	82.500	0
364	Kab. Tana Toraja	40.382.850	897.000	2.047.500	2.956.850	82.500	780.000
365	Kab. Wajo	44.391.120	1.157.500	0	6.136.200	82.500	0
366	Kota Pare-pare	21.824.600	330.000	0	1.719.600	82.500	0
367	Kota Makassar	182.257.400	2.448.500	0	11.026.200	82.500	0
368	Kab. Toraja Utara	43.148.980	730.000	481.000	1.935.990	82.500	65.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	219.255.310	5.179.250	491.400	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
361	Kab. Sidenreng Rappang	1.727.800	90.000	0	90.918.114	33.000	0
362	Kab. Soppeng	1.897.500	45.000	0	89.439.397	102.000	0
363	Kab. Takalar	6.857.200	180.000	0	76.978.106	36.000	0
364	Kab. Tana Toraja	2.337.110	90.000	0	99.578.765	78.000	13.536.030
365	Kab. Wajo	1.857.500	45.000	0	112.112.209	156.000	0
366	Kota Pare-pare	1.075.290	45.000	0	56.172.213	66.000	0
367	Kota Makassar	7.568.700	135.000	0	252.109.207	183.000	0
368	Kab. Toraja Utara	874.130	45.000	0	110.172.775	57.000	4.229.454
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0	0	429.424.858	255.000	3.879.348

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
361	Kab. Sidenreng Rappang	398.545	0	0	2.291.830
362	Kab. Soppeng	500.000	0	0	2.249.485
363	Kab. Takalar	498.545	0	0	2.181.646
364	Kab. Tana Toraja	398.545	0	0	2.952.419
365	Kab. Wajo	398.545	0	0	3.226.162
366	Kota Pare-pare	0	0	0	1.499.816
367	Kota Makassar	0	1.000.000	0	8.456.665
368	Kab. Toraja Utara	498.545	0	0	3.201.182
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	700.000	800.000	1.500.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
361	Kab. Sidenreng Rappang	0	7.632.434	9.221.918	0
362	Kab. Soppeng	0	7.034.252	9.748.907	65.500
363	Kab. Takalar	0	5.651.157	20.868.314	0
364	Kab. Tana Toraja	0	7.337.358	13.530.166	381.139
365	Kab. Wajo	0	8.861.011	16.161.671	369.500
366	Kota Pare-pare	0	1.680.589	5.136.919	0
367	Kota Makassar	0	12.318.905	22.545.815	437.107
368	Kab. Toraja Utara	0	8.590.019	18.665.932	121.598
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	6.265.695	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
361	Kab. Sidenreng Rappang	0	0	158.433.241
362	Kab. Soppeng	0	408.000	139.302.101
363	Kab. Takalar	0	0	161.443.468
364	Kab. Tana Toraja	0	408.000	187.774.232
365	Kab. Wajo	0	408.000	195.362.918
366	Kota Pare-pare	0	507.000	90.139.527
367	Kota Makassar	0	507.000	501.075.999
368	Kab. Toraja Utara	0	408.000	193.307.105
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	408.000	668.158.861

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
370	Kab. Buton	21.097.130	502.500	123.500	2.450.240	82.500	65.000
371	Kab. Konawe	35.257.400	875.000	448.500	4.098.600	82.500	130.000
372	Kab. Kolaka	33.374.200	637.500	364.000	3.557.400	82.500	65.000
373	Kab. Muna	37.774.000	810.000	747.500	3.894.840	82.500	520.000
374	Kota Kendari	51.963.000	467.500	0	4.422.000	82.500	0
375	Kota Bau-bau	24.872.210	262.500	0	2.317.770	82.500	0
376	Kab. Konawe Selatan	44.801.200	1.035.000	773.500	3.566.400	82.500	162.500
377	Kab. Bombana	24.095.360	627.500	741.000	2.211.000	82.500	260.000
378	Kab. Wakatobi	17.305.200	445.000	0	2.548.480	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
370	Kab. Buton	1.326.440	90.000	0	73.131.508	27.000	587.936
371	Kab. Konawe	3.383.800	225.000	40.300	130.619.150	111.000	3.683.548
372	Kab. Kolaka	1.108.100	90.000	0	76.392.319	69.000	2.976.693
373	Kab. Muna	3.284.010	180.000	40.300	115.552.204	57.000	8.758.148
374	Kota Kendari	3.933.400	90.000	0	115.079.758	54.000	0
375	Kota Bau-bau	2.235.660	135.000	0	59.019.256	15.000	0
376	Kab. Konawe Selatan	2.666.800	180.000	80.600	116.313.964	138.000	4.275.314
377	Kab. Bombana	3.069.900	225.000	120.900	82.267.468	153.000	6.006.901
378	Kab. Wakatobi	2.544.380	90.000	0	61.988.550	45.000	628.914

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
370	Kab. Buton	398.545	0	0	1.620.553
371	Kab. Konawe	498.545	0	0	4.830.851
372	Kab. Kolaka	0	0	0	2.495.259
373	Kab. Muna	498.545	600.000	0	3.270.790
374	Kota Kendari	398.545	0	0	2.746.314
375	Kota Bau-bau	398.545	0	0	1.431.398
376	Kab. Konawe Selatan	0	0	0	4.022.053
377	Kab. Bombana	0	0	0	2.985.299
378	Kab. Wakatobi	0	0	0	1.668.128

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
370	Kab. Buton	0	7.046.326	10.693.239	392.098
371	Kab. Konawe	0	10.342.883	24.768.630	382.081
372	Kab. Kolaka	0	7.010.698	9.821.669	382.254
373	Kab. Muna	0	15.086.011	30.577.482	0
374	Kota Kendari	0	6.014.346	15.149.696	636.046
375	Kota Bau-bau	0	6.477.596	9.508.021	0
376	Kab. Konawe Selatan	0	10.041.445	19.614.558	634.062
377	Kab. Bombana	0	7.566.724	15.813.330	570.929
378	Kab. Wakatobi	0	5.820.088	9.205.050	464.423

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
370	Kab. Buton	0	408.000	120.042.515
371	Kab. Konawe	0	0	219.777.788
372	Kab. Kolaka	0	0	138.426.592
373	Kab. Muna	0	0	221.733.330
374	Kota Kendari	0	408.000	201.445.105
375	Kota Bau-bau	0	507.000	107.262.456
376	Kab. Konawe Selatan	0	408.000	208.795.896
377	Kab. Bombana	0	408.000	147.204.811
378	Kab. Wakatobi	2.160.864	0	104.996.577

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
379	Kab. Kolaka Utara	17.831.960	570.000	416.000	2.077.800	82.500	357.500
380	Kab. Konawe Utara	13.690.360	387.500	253.500	1.664.690	82.500	65.000
381	Kab. Buton Utara	13.660.650	320.000	253.500	1.965.480	82.500	162.500
382	Kab. Konawe Kepulauan	6.910.570	182.500	0	1.118.880	82.500	0
383	Kab. Kolaka Timur	15.989.440	623.250	526.500	1.770.600	82.500	130.000
384	Kab. Muna Barat	15.332.010	387.500	838.500	1.587.200	82.500	325.000
385	Kab. Buton Tengah	19.553.700	365.000	208.000	2.000.880	82.500	97.500
386	Kab. Buton Selatan	17.390.820	320.000	208.000	2.253.240	82.500	325.000
387	Provinsi Bali	353.738.920	4.544.250	0	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
379	Kab. Kolaka Utara	2.544.500	135.000	0	50.322.437	60.000	2.707.281
380	Kab. Konawe Utara	2.969.320	135.000	40.300	49.278.991	90.000	2.089.839
381	Kab. Buton Utara	862.610	45.000	0	52.388.930	45.000	3.085.944
382	Kab. Konawe Kepulauan	1.028.820	90.000	0	23.005.333	48.000	0
383	Kab. Kolaka Timur	289.800	45.000	0	65.441.737	12.000	4.300.907
384	Kab. Muna Barat	337.420	45.000	80.600	48.955.259	42.000	5.377.781
385	Kab. Buton Tengah	1.711.370	90.000	40.300	49.249.495	24.000	3.225.325
386	Kab. Buton Selatan	210.020	45.000	0	50.364.391	36.000	2.107.585
387	Provinsi Bali	0	0	0	297.283.625	66.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
379	Kab. Kolaka Utara	500.000	0	0	1.671.460
380	Kab. Konawe Utara	0	0	0	1.933.060
381	Kab. Buton Utara	0	0	0	1.319.167
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0	1.425.033
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	0	2.324.876
384	Kab. Muna Barat	0	0	0	1.591.657
385	Kab. Buton Tengah	0	0	0	1.284.806
386	Kab. Buton Selatan	0	0	0	1.051.889
387	Provinsi Bali	0	2.800.000	2.000.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
379	Kab. Kolaka Utara	0	8.518.842	14.544.016	650.164
380	Kab. Konawe Utara	0	5.745.059	18.862.705	0
381	Kab. Buton Utara	0	6.310.064	11.375.073	287.285
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	3.308.371	8.173.301	0
383	Kab. Kolaka Timur	0	6.398.056	8.880.663	339.725
384	Kab. Muna Barat	0	6.409.136	14.379.171	0
385	Kab. Buton Tengah	0	5.823.466	10.934.540	306.325
386	Kab. Buton Selatan	0	7.203.889	9.559.282	177.429
387	Provinsi Bali	3.729.116	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
379	Kab. Kolaka Utara	0	408.000	103.397.460
380	Kab. Konawe Utara	0	507.000	97.794.824
381	Kab. Buton Utara	0	507.000	92.670.703
382	Kab. Konawe Kepulauan	1.440.576	0	46.813.884
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	107.155.054
384	Kab. Muna Barat	1.440.576	507.000	97.718.310
385	Kab. Buton Tengah	2.160.864	408.000	97.566.071
386	Kab. Buton Selatan	1.800.720	408.000	93.543.765
387	Provinsi Bali	0	408.000	664.569.911

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
388	Kab. Badung	101.673.730	1.200.000	0	9.985.640	82.500	0
389	Kab. Bangli	36.205.620	587.500	0	2.564.800	82.500	0
390	Kab. Buleleng	114.494.640	1.502.500	0	7.665.840	82.500	0
391	Kab. Gianyar	72.506.510	844.500	0	7.616.220	82.500	0
392	Kab. Jembrana	40.515.800	706.500	0	3.291.560	82.500	0
393	Kab. Karangasem	71.538.380	985.000	0	4.345.910	82.500	0
394	Kab. Klungkung	26.604.050	620.000	0	2.937.000	82.500	0
395	Kab. Tabanan	59.452.000	792.500	0	6.218.140	82.500	0
396	Kota Denpasar	122.550.000	1.274.000	0	10.235.360	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
388	Kab. Badung	1.816.290	45.000	0	144.715.030	69.000	0
389	Kab. Bangli	61.250	90.000	0	59.802.332	15.000	0
390	Kab. Buleleng	1.655.160	90.000	0	203.997.014	84.000	0
391	Kab. Gianyar	331.250	45.000	0	139.283.402	198.000	0
392	Kab. Jembrana	584.320	90.000	0	70.521.115	45.000	0
393	Kab. Karangasem	1.308.040	90.000	0	138.807.481	429.000	0
394	Kab. Klungkung	421.300	45.000	0	72.319.303	33.000	0
395	Kab. Tabanan	458.410	90.000	0	106.788.649	132.000	0
396	Kota Denpasar	2.430.580	90.000	0	113.549.658	51.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
388	Kab. Badung	260.100	600.000	0	3.441.681
389	Kab. Bangli	0	0	0	1.847.853
390	Kab. Buleleng	700.000	600.000	0	5.188.360
391	Kab. Gianyar	0	0	0	3.254.487
392	Kab. Jembrana	0	500.000	0	2.094.247
393	Kab. Karangasem	390.625	0	0	3.050.522
394	Kab. Klungkung	400.000	900.000	0	1.379.175
395	Kab. Tabanan	500.000	900.000	1.500.000	3.207.457
396	Kota Denpasar	0	0	0	4.375.226

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
388	Kab. Badung	0	4.782.183	5.719.137	289.078
389	Kab. Bangli	0	3.645.689	6.748.332	481.503
390	Kab. Buleleng	0	6.722.245	7.503.419	271.902
391	Kab. Gianyar	0	3.786.646	5.630.242	301.863
392	Kab. Jembrana	0	6.120.646	5.677.849	311.396
393	Kab. Karangasem	0	3.310.598	4.660.860	371.140
394	Kab. Klungkung	0	4.377.076	6.005.539	428.428
395	Kab. Tabanan	0	4.986.836	11.878.423	439.940
396	Kota Denpasar	0	5.190.955	7.759.683	298.927

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
388	Kab. Badung	0	0	274.679.369
389	Kab. Bangli	0	0	112.132.379
390	Kab. Buleleng	0	408.000	350.965.580
391	Kab. Gianyar	0	408.000	234.288.620
392	Kab. Jembrana	0	0	130.540.933
393	Kab. Karangasem	0	408.000	229.778.056
394	Kab. Klungkung	2.160.864	0	118.713.235
395	Kab. Tabanan	0	408.000	197.834.855
396	Kota Denpasar	0	408.000	268.295.889

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	344.167.820	5.972.000	352.800	0	0	0
398	Kab. Bima	67.031.680	1.435.000	1.057.000	15.345.000	82.500	700.000
399	Kab. Dompu	37.411.120	960.250	0	6.194.400	82.500	0
400	Kab. Lombok Barat	82.770.960	1.275.000	0	13.365.100	82.500	0
401	Kab. Lombok Tengah	120.417.840	2.295.750	0	25.374.600	82.500	0
402	Kab. Lombok Timur	181.000.660	2.878.250	0	30.944.640	82.500	0
403	Kab. Sumbawa	68.748.520	1.325.750	1.260.000	12.099.960	82.500	560.000
404	Kota Mataram	63.598.950	1.028.500	0	5.011.020	82.500	0
405	Kota Bima	22.833.150	307.500	0	3.836.420	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	0	0	420.588.261	117.000	2.159.491
398	Kab. Bima	2.265.320	180.000	0	187.243.358	138.000	6.217.400
399	Kab. Dompu	5.498.300	225.000	0	107.376.206	159.000	0
400	Kab. Lombok Barat	4.606.910	225.000	0	147.667.709	105.000	0
401	Kab. Lombok Tengah	5.911.300	180.000	0	253.664.569	315.000	0
402	Kab. Lombok Timur	5.533.390	225.000	0	276.264.414	264.000	0
403	Kab. Sumbawa	3.368.380	180.000	86.800	186.668.047	147.000	8.308.982
404	Kota Mataram	1.055.970	45.000	0	96.166.073	39.000	0
405	Kota Bima	2.992.700	90.000	0	64.599.615	183.750	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	500.000	1.500.000	2.000.000	0
398	Kab. Bima	498.545	0	0	4.059.000
399	Kab. Dompu	398.545	0	0	2.177.724
400	Kab. Lombok Barat	600.000	0	0	5.230.990
401	Kab. Lombok Tengah	0	0	0	6.825.893
402	Kab. Lombok Timur	0	0	0	9.922.412
403	Kab. Sumbawa	0	0	0	4.336.693
404	Kota Mataram	0	0	0	3.303.481
405	Kota Bima	0	0	0	1.452.650

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	6.757.497	0	0	0
398	Kab. Bima	0	10.998.819	21.498.823	524.571
399	Kab. Dompu	0	7.606.852	12.118.205	465.073
400	Kab. Lombok Barat	0	33.099.309	17.892.160	755.574
401	Kab. Lombok Tengah	0	14.248.330	22.673.467	356.098
402	Kab. Lombok Timur	0	18.400.560	33.914.796	440.797
403	Kab. Sumbawa	0	11.089.368	16.197.813	210.062
404	Kota Mataram	0	3.964.110	4.618.502	209.725
405	Kota Bima	0	5.735.397	5.396.988	596.486

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	408.000	784.522.869
398	Kab. Bima	12.605.040	408.000	332.288.056
399	Kab. Dompu	6.482.592	507.000	187.662.767
400	Kab. Lombok Barat	0	408.000	308.084.212
401	Kab. Lombok Tengah	0	0	452.345.347
402	Kab. Lombok Timur	0	408.000	560.279.419
403	Kab. Sumbawa	24.129.648	0	338.799.523
404	Kota Mataram	0	408.000	179.530.831
405	Kota Bima	6.842.736	408.000	115.357.892

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
406	Kab. Sumbawa Barat	22.191.260	648.000	0	3.652.070	82.500	0
407	Kab. Lombok Utara	33.085.420	557.500	0	4.516.200	82.500	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	476.866.890	7.336.750	3.586.800	0	0	0
409	Kab. Alor	42.411.120	1.107.500	3.472.000	2.956.850	82.500	910.000
410	Kab. Belu	33.517.600	823.000	350.000	3.251.400	82.500	350.000
411	Kab. Ende	42.047.920	1.108.250	1.659.000	2.016.000	82.500	560.000
412	Kab. Flores Timur	38.759.640	875.000	476.000	4.151.660	82.500	245.000
413	Kab. Kupang	56.635.620	1.405.000	3.465.000	4.743.600	82.500	1.610.000
414	Kab. Lembata	20.720.860	643.250	826.000	1.366.800	82.500	175.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
406	Kab. Sumbawa Barat	407.640	45.000	0	66.886.921	30.000	0
407	Kab. Lombok Utara	1.400.100	90.000	0	70.065.214	144.000	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	560.999.117	772.750	15.229.899
409	Kab. Alor	1.906.780	135.000	86.800	80.040.206	201.000	19.036.676
410	Kab. Belu	1.399.500	90.000	0	64.712.812	42.250	1.985.794
411	Kab. Ende	372.600	90.000	0	97.220.717	54.000	6.689.094
412	Kab. Flores Timur	985.770	45.000	0	97.871.805	87.000	2.820.814
413	Kab. Kupang	1.267.600	90.000	43.400	131.398.350	288.000	13.862.803
414	Kab. Lembata	401.200	45.000	0	55.330.394	24.000	5.094.730

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
406	Kab. Sumbawa Barat	0	0	0	1.234.512
407	Kab. Lombok Utara	0	0	0	2.313.440
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	1.000.000	1.500.000	0
409	Kab. Alor	398.545	600.000	0	2.365.810
410	Kab. Belu	398.545	0	0	2.182.305
411	Kab. Ende	0	0	0	3.204.539
412	Kab. Flores Timur	398.545	0	0	3.004.213
413	Kab. Kupang	0	0	0	3.456.567
414	Kab. Lembata	600.000	0	0	2.377.928

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
406	Kab. Sumbawa Barat	0	6.845.605	5.894.082	162.625
407	Kab. Lombok Utara	0	6.088.652	6.692.120	254.156
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	7.111.811	0	0	0
409	Kab. Alor	0	7.761.297	20.884.862	468.769
410	Kab. Belu	0	8.286.621	14.414.186	409.580
411	Kab. Ende	0	10.058.767	18.379.052	346.464
412	Kab. Flores Timur	0	8.671.484	19.172.171	670.992
413	Kab. Kupang	0	11.126.312	25.880.210	200.337
414	Kab. Lembata	0	7.057.572	11.938.654	272.256

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
406	Kab. Sumbawa Barat	5.762.304	0	113.842.519
407	Kab. Lombok Utara	7.923.168	507.000	133.719.470
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	408.000	1.074.812.017
409	Kab. Alor	1.440.576	0	186.266.291
410	Kab. Belu	5.402.160	0	137.698.253
411	Kab. Ende	3.601.440	0	187.490.343
412	Kab. Flores Timur	3.961.584	0	182.279.178
413	Kab. Kupang	3.241.296	0	258.796.595
414	Kab. Lembata	720.288	0	107.676.432

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
415	Kab. Manggarai	66.685.850	972.500	1.351.000	5.925.030	82.500	630.000
416	Kab. Ngada	25.362.700	797.000	525.000	1.656.000	82.500	175.000
417	Kab. Sikka	48.519.300	1.187.500	3.815.000	4.067.400	82.500	1.925.000
418	Kab. Sumba Barat	24.262.530	365.000	217.000	2.947.480	82.500	140.000
419	Kab. Sumba Timur	44.596.700	887.500	1.288.000	4.015.200	82.500	490.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	78.849.600	1.902.500	4.606.000	4.914.000	82.500	1.855.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	45.949.300	980.000	1.477.000	3.503.400	82.500	490.000
422	Kota Kupang	59.094.490	1.075.500	0	4.115.670	82.500	0
423	Kab. Rote Ndao	26.356.340	732.750	1.953.000	2.118.000	82.500	700.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
415	Kab. Manggarai	2.259.260	90.000	43.400	114.758.201	210.000	7.537.549
416	Kab. Ngada	744.700	90.000	0	75.334.888	75.000	3.391.849
417	Kab. Sikka	841.800	90.000	0	106.122.699	66.000	18.908.402
418	Kab. Sumba Barat	152.310	45.000	0	49.375.999	27.000	1.456.659
419	Kab. Sumba Timur	697.800	45.000	0	106.259.096	255.000	6.350.518
420	Kab. Timor Tengah Selatan	1.323.700	135.000	86.800	180.415.650	438.000	20.353.913
421	Kab. Timor Tengah Utara	227.700	90.000	0	104.079.452	147.000	7.797.048
422	Kota Kupang	1.809.460	90.000	0	104.661.146	78.000	0
423	Kab. Rote Ndao	2.282.000	45.000	43.400	76.817.543	68.500	15.757.710

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
415	Kab. Manggarai	398.545	0	0	2.990.260
416	Kab. Ngada	0	0	0	1.795.466
417	Kab. Sikka	0	0	0	2.755.555
418	Kab. Sumba Barat	0	0	0	1.610.351
419	Kab. Sumba Timur	0	400.000	0	2.863.550
420	Kab. Timor Tengah Selatan	498.545	0	0	4.177.710
421	Kab. Timor Tengah Utara	498.545	0	0	2.929.965
422	Kota Kupang	398.545	0	0	3.572.565
423	Kab. Rote Ndao	398.545	0	0	1.919.416

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
415	Kab. Manggarai	0	12.682.004	13.792.436	353.587
416	Kab. Ngada	0	7.318.410	16.930.898	310.038
417	Kab. Sikka	0	11.529.251	22.500.621	544.249
418	Kab. Sumba Barat	0	5.639.261	9.323.758	0
419	Kab. Sumba Timur	0	8.743.580	17.215.529	0
420	Kab. Timor Tengah Selatan	0	13.270.870	28.281.420	262.223
421	Kab. Timor Tengah Utara	0	10.117.905	22.175.847	0
422	Kota Kupang	0	7.632.320	12.250.235	271.686
423	Kab. Rote Ndao	0	7.488.865	8.434.854	381.776

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
415	Kab. Manggarai	6.482.592	408.000	237.652.714
416	Kab. Ngada	3.241.296	408.000	138.238.745
417	Kab. Sikka	9.363.744	408.000	232.727.021
418	Kab. Sumba Barat	7.563.024	408.000	103.615.872
419	Kab. Sumba Timur	6.482.592	0	200.672.565
420	Kab. Timor Tengah Selatan	2.881.152	408.000	344.742.583
421	Kab. Timor Tengah Utara	5.042.016	0	205.587.678
422	Kota Kupang	0	507.000	195.639.117
423	Kab. Rote Ndao	2.881.152	0	148.461.351

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
424	Kab. Manggarai Barat	46.320.510	1.059.000	2.625.000	4.005.760	82.500	1.050.000
425	Kab. Nagekeo	24.756.980	665.750	483.000	1.980.600	82.500	315.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	70.000.350	1.120.000	2.849.000	5.159.680	82.500	1.295.000
427	Kab. Sumba Tengah	13.744.850	365.000	1.001.000	2.043.500	82.500	875.000
428	Kab. Manggarai Timur	52.254.550	1.340.750	3.955.000	3.019.400	82.500	945.000
429	Kab. Sabu Raijua	21.217.140	285.000	553.000	2.555.960	82.500	805.000
430	Kab. Malaka	33.087.120	752.500	2.142.000	3.333.600	82.500	1.120.000
431	Provinsi Maluku	175.239.860	4.684.500	2.812.600	0	0	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	26.174.160	515.000	1.603.000	1.288.200	82.500	245.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
424	Kab. Manggarai Barat	1.057.820	45.000	86.800	102.055.833	162.000	11.150.685
425	Kab. Nagekeo	687.000	90.000	0	73.861.245	36.000	2.739.623
426	Kab. Sumba Barat Daya	981.050	45.000	86.800	89.803.096	105.750	16.111.270
427	Kab. Sumba Tengah	213.690	45.000	0	45.646.955	57.000	8.729.870
428	Kab. Manggarai Timur	287.570	45.000	0	90.952.371	174.000	24.656.960
429	Kab. Sabu Raijua	121.170	45.000	0	37.808.892	30.000	5.714.714
430	Kab. Malaka	911.800	90.000	130.200	56.237.121	99.000	11.093.084
431	Provinsi Maluku	0	0	0	256.951.471	135.000	16.841.171
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.186.450	90.000	130.200	48.648.942	53.500	7.509.193

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
424	Kab. Manggarai Barat	0	0	0	2.309.733
425	Kab. Nagekeo	498.545	0	0	1.499.235
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	0	3.615.405
427	Kab. Sumba Tengah	0	0	0	882.330
428	Kab. Manggarai Timur	0	0	0	2.954.050
429	Kab. Sabu Raijua	0	0	0	1.068.640
430	Kab. Malaka	0	0	0	1.827.459
431	Provinsi Maluku	500.000	1.000.000	2.500.000	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	0	0	1.152.402

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
424	Kab. Manggarai Barat	0	5.497.727	23.192.390	542.941
425	Kab. Nagekeo	0	5.580.410	7.666.365	449.067
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	7.146.342	14.545.546	381.122
427	Kab. Sumba Tengah	0	7.313.037	9.782.617	224.945
428	Kab. Manggarai Timur	0	12.208.699	27.012.775	429.070
429	Kab. Sabu Raijua	0	4.092.965	8.352.079	240.077
430	Kab. Malaka	0	7.699.300	23.921.504	243.742
431	Provinsi Maluku	4.535.146	0	0	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	11.936.519	14.434.625	310.134

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
424	Kab. Manggarai Barat	0	0	201.243.699
425	Kab. Nagekeo	3.241.296	0	124.632.616
426	Kab. Sumba Barat Daya	1.080.432	0	214.408.343
427	Kab. Sumba Tengah	2.521.008	0	93.528.302
428	Kab. Manggarai Timur	1.440.576	0	221.758.271
429	Kab. Sabu Raijua	1.440.576	507.000	84.919.713
430	Kab. Malaka	2.521.008	0	145.291.938
431	Provinsi Maluku	0	408.000	465.607.748
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	3.601.440	0	121.961.265

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
433	Kab. Maluku Tengah	64.520.400	1.512.000	1.540.000	4.760.680	82.500	490.000
434	Kab. Maluku Tenggara	22.574.260	766.250	2.212.000	2.445.000	82.500	840.000
435	Kab. Buru	32.494.180	547.500	2.268.000	3.682.560	82.500	665.000
436	Kota Ambon	50.311.550	1.198.250	0	3.576.120	82.500	0
437	Kab. Seram Bagian Barat	38.297.610	822.500	2.562.000	4.564.700	82.500	1.295.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	23.563.700	620.750	5.390.000	2.711.800	82.500	1.785.000
439	Kab. Kepulauan Aru	27.652.620	557.500	7.602.000	1.657.810	82.500	2.170.000
440	Kota Tual	13.685.320	290.750	399.000	1.634.760	82.500	175.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	26.097.340	620.750	3.325.000	1.771.180	82.500	1.225.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
433	Kab. Maluku Tengah	585.180	90.000	0	172.968.118	363.000	5.374.980
434	Kab. Maluku Tenggara	631.030	45.000	130.200	41.451.947	66.000	10.120.490
435	Kab. Buru	370.120	90.000	43.400	65.619.471	48.000	11.559.887
436	Kota Ambon	2.223.760	90.000	0	109.469.819	78.000	0
437	Kab. Seram Bagian Barat	178.100	45.000	0	71.313.670	36.000	15.234.179
438	Kab. Seram Bagian Timur	56.430	90.000	0	54.280.882	315.000	36.317.172
439	Kab. Kepulauan Aru	116.660	45.000	0	46.624.772	57.000	30.604.155
440	Kota Tual	132.830	90.000	0	30.691.411	123.000	3.565.865
441	Kab. Maluku Barat Daya	111.440	45.000	0	47.757.754	81.000	14.103.783

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
433	Kab. Maluku Tengah	500.000	0	0	3.188.493
434	Kab. Maluku Tenggara	0	0	0	2.193.301
435	Kab. Buru	398.545	0	0	1.798.127
436	Kota Ambon	0	0	0	2.120.440
437	Kab. Seram Bagian Barat	0	0	0	1.358.472
438	Kab. Seram Bagian Timur	398.545	0	0	2.158.786
439	Kab. Kepulauan Aru	0	0	0	1.375.530
440	Kota Tual	0	0	0	626.494
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	0	1.295.853

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
433	Kab. Maluku Tengah	0	13.134.906	35.565.988	989.718
434	Kab. Maluku Tenggara	0	8.744.868	20.968.213	399.247
435	Kab. Buru	0	6.363.053	12.849.567	294.521
436	Kota Ambon	0	9.211.478	13.105.718	386.088
437	Kab. Seram Bagian Barat	0	10.256.718	21.972.549	0
438	Kab. Seram Bagian Timur	0	8.689.854	28.262.615	464.782
439	Kab. Kepulauan Aru	0	10.199.650	20.378.867	631.334
440	Kota Tual	0	6.974.339	10.562.446	211.038
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	8.402.938	12.168.397	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
433	Kab. Maluku Tengah	11.524.608	0	317.190.571
434	Kab. Maluku Tenggara	5.042.016	0	118.712.322
435	Kab. Buru	4.681.872	0	143.856.303
436	Kota Ambon	0	408.000	192.261.723
437	Kab. Seram Bagian Barat	4.321.728	0	172.340.726
438	Kab. Seram Bagian Timur	4.321.728	0	169.509.544
439	Kab. Kepulauan Aru	4.321.728	0	154.077.126
440	Kota Tual	5.762.304	0	75.007.057
441	Kab. Maluku Barat Daya	720.288	0	117.808.223

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
442	Kab. Buru Selatan	19.750.650	422.500	3.451.000	2.816.350	82.500	2.135.000
443	Provinsi Papua	5.930.420	393.500	63.000	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	52.694.260	865.250	3.705.000	2.084.020	82.500	450.000
445	Kab. Jayapura	52.320.380	1.178.500	1.218.000	2.908.940	82.500	112.500
446	Kab. Kepulauan Yapen	43.353.530	654.500	4.212.000	1.656.000	82.500	750.000
447	Kota Jayapura	75.668.510	1.993.250	0	2.641.140	82.500	0
448	Kab. Sarmi	18.606.630	352.500	1.413.000	885.660	82.500	225.000
449	Kab. Keerom	22.314.180	441.500	2.143.500	1.367.650	82.500	525.000
450	Kab. Waropen	16.104.490	432.750	1.929.000	708.640	82.500	450.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
442	Kab. Buru Selatan	1.022.940	45.000	86.800	46.030.722	117.000	20.952.837
443	Provinsi Papua	0	0	0	4.273.396	0	0
444	Kab. Biak Numfor	1.067.120	135.000	139.500	63.568.779	215.250	13.833.270
445	Kab. Jayapura	3.066.370	90.000	0	65.012.587	66.000	2.657.420
446	Kab. Kepulauan Yapen	451.620	90.000	46.500	38.166.134	30.000	13.606.523
447	Kota Jayapura	2.231.340	90.000	0	89.750.233	145.000	0
448	Kab. Sarmi	604.030	45.000	46.500	18.602.403	6.000	3.971.435
449	Kab. Keerom	915.910	90.000	279.000	34.581.382	27.000	13.270.718
450	Kab. Waropen	85.980	45.000	46.500	14.996.603	9.000	5.104.099

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
442	Kab. Buru Selatan	0	0	0	894.347
443	Provinsi Papua	0	0	1.500.000	0
444	Kab. Biak Numfor	0	0	0	2.543.320
445	Kab. Jayapura	0	0	0	1.555.250
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0	1.700.293
447	Kota Jayapura	398.545	0	0	2.457.289
448	Kab. Sarmi	0	0	0	1.070.465
449	Kab. Keerom	0	0	0	985.843
450	Kab. Waropen	0	0	0	1.003.380

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
442	Kab. Buru Selatan	0	4.108.985	11.529.628	250.597
443	Provinsi Papua	4.130.945	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	0	5.872.839	18.749.136	352.863
445	Kab. Jayapura	0	15.401.734	27.127.642	212.862
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	9.389.369	19.013.182	866.351
447	Kota Jayapura	0	13.968.449	13.834.753	778.041
448	Kab. Sarmi	0	6.965.286	13.992.775	0
449	Kab. Keerom	0	6.674.458	8.590.000	254.148
450	Kab. Waropen	0	5.989.764	12.510.238	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
442	Kab. Buru Selatan	2.881.152	0	116.578.008
443	Provinsi Papua	0	408.000	16.699.261
444	Kab. Biak Numfor	5.762.304	408.000	172.528.411
445	Kab. Jayapura	9.723.888	0	182.734.573
446	Kab. Kepulauan Yapen	3.961.584	0	138.030.086
447	Kota Jayapura	0	408.000	204.447.050
448	Kab. Sarmi	2.160.864	0	69.030.048
449	Kab. Keerom	2.160.864	507.000	95.210.653
450	Kab. Waropen	360.144	0	59.858.088

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
451	Kab. Supiori	11.997.330	322.500	1.011.000	314.760	82.500	262.500
452	Kab. Mamberamo Raya	20.168.330	375.000	3.363.000	516.200	82.500	300.000
453	Provinsi Maluku Utara	129.233.670	3.348.500	3.273.200	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	15.295.620	262.500	714.000	1.384.500	82.500	280.000
455	Kota Ternate	32.232.480	964.250	0	1.860.480	82.500	0
456	Kab. Halmahera Barat	23.207.380	650.000	2.723.000	1.563.420	82.500	980.000
457	Kab. Halmahera Timur	17.000.730	422.500	1.862.000	1.656.430	82.500	455.000
458	Kab. Halmahera Selatan	46.457.040	1.130.000	8.085.000	4.738.920	82.500	3.430.000
459	Kab. Halmahera Utara	33.035.010	775.000	2.128.000	3.804.260	82.500	770.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
451	Kab. Supiori	187.520	90.000	0	15.681.817	36.000	5.015.021
452	Kab. Mamberamo Raya	488.550	45.000	46.500	6.459.769	6.000	4.278.611
453	Provinsi Maluku Utara	0	0	0	173.867.924	117.000	14.180.666
454	Kab. Halmahera Tengah	417.470	90.000	0	38.477.609	114.000	5.768.493
455	Kota Ternate	537.960	90.000	0	65.911.976	24.000	0
456	Kab. Halmahera Barat	598.630	45.000	86.800	68.446.056	30.000	17.213.440
457	Kab. Halmahera Timur	572.780	45.000	86.800	47.068.428	60.000	9.936.205
458	Kab. Halmahera Selatan	5.461.370	180.000	520.800	94.313.623	126.000	27.838.542
459	Kab. Halmahera Utara	5.856.540	225.000	43.400	63.198.769	93.000	9.644.345

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
451	Kab. Supiori	0	0	0	561.816
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	628.213
453	Provinsi Maluku Utara	398.545	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	0	0	1.032.960
455	Kota Ternate	500.000	0	0	1.598.574
456	Kab. Halmahera Barat	398.545	0	0	2.113.390
457	Kab. Halmahera Timur	0	0	0	1.352.957
458	Kab. Halmahera Selatan	0	0	0	3.000.000
459	Kab. Halmahera Utara	0	0	0	2.392.480

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
451	Kab. Supiori	0	4.465.163	8.674.106	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0	7.663.183	11.996.957	0
453	Provinsi Maluku Utara	3.226.342	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	3.849.624	37.851.026	0
455	Kota Ternate	0	6.498.083	10.152.251	152.574
456	Kab. Halmahera Barat	0	5.523.624	15.223.380	574.291
457	Kab. Halmahera Timur	0	7.374.259	13.099.723	0
458	Kab. Halmahera Selatan	0	10.514.374	33.538.994	586.470
459	Kab. Halmahera Utara	0	6.578.504	13.293.489	161.136

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
451	Kab. Supiori	3.961.584	0	52.663.617
452	Kab. Mamberamo Raya	360.144	0	56.777.957
453	Provinsi Maluku Utara	0	507.000	328.152.847
454	Kab. Halmahera Tengah	1.800.720	408.000	107.829.022
455	Kota Ternate	0	507.000	121.112.128
456	Kab. Halmahera Barat	5.762.304	507.000	145.728.760
457	Kab. Halmahera Timur	1.080.432	507.000	102.662.744
458	Kab. Halmahera Selatan	5.762.304	408.000	246.173.937
459	Kab. Halmahera Utara	9.723.888	408.000	152.213.321

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
460	Kab. Kepulauan Sula	19.005.920	655.250	1.827.000	2.515.360	82.500	1.120.000
461	Kota Tidore Kepulauan	17.640.280	438.250	42.000	2.368.080	82.500	70.000
462	Kab. Pulau Morotai	11.455.000	285.000	308.000	2.155.300	82.500	280.000
463	Kab. Pulau Taliabu	16.877.820	377.500	3.591.000	3.259.540	82.500	2.415.000
464	Provinsi Banten	787.285.320	8.607.250	168.000	0	0	0
465	Kab. Lebak	181.733.600	2.727.500	1.335.000	18.357.000	82.500	825.000
466	Kab. Pandeglang	167.490.900	2.697.000	895.000	14.745.000	82.500	300.000
467	Kab. Serang	216.552.700	2.422.500	0	24.808.800	82.500	0
468	Kab. Tangerang	451.136.390	3.992.500	0	30.118.140	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
460	Kab. Kepulauan Sula	240.840	90.000	43.400	37.356.026	111.000	9.800.030
461	Kota Tidore Kepulauan	731.760	90.000	0	57.697.647	48.000	244.278
462	Kab. Pulau Morotai	112.360	45.000	0	25.823.462	27.000	2.852.922
463	Kab. Pulau Taliabu	2.112.140	90.000	130.200	48.716.797	90.000	18.397.231
464	Provinsi Banten	0	0	0	458.236.407	738.000	558.817
465	Kab. Lebak	7.203.600	180.000	31.000	295.943.729	201.000	11.608.812
466	Kab. Pandeglang	11.019.900	270.000	0	297.748.938	231.000	8.881.448
467	Kab. Serang	15.256.000	405.000	0	235.951.807	414.000	0
468	Kab. Tangerang	16.815.880	405.000	0	336.476.806	199.500	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
460	Kab. Kepulauan Sula	0	0	0	1.016.090
461	Kota Tidore Kepulauan	0	0	0	1.311.355
462	Kab. Pulau Morotai	0	0	0	1.066.984
463	Kab. Pulau Taliabu	0	0	0	1.081.410
464	Provinsi Banten	400.000	0	0	0
465	Kab. Lebak	500.000	600.000	0	11.236.206
466	Kab. Pandeglang	498.545	0	0	11.446.241
467	Kab. Serang	0	0	0	12.425.540
468	Kab. Tangerang	300.000	0	0	19.547.243

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
460	Kab. Kepulauan Sula	0	5.328.296	11.248.929	0
461	Kota Tidore Kepulauan	0	5.875.054	5.841.968	0
462	Kab. Pulau Morotai	0	7.979.920	9.548.494	0
463	Kab. Pulau Taliabu	0	6.228.699	7.538.485	0
464	Provinsi Banten	4.842.175	0	0	0
465	Kab. Lebak	0	15.397.608	25.639.163	679.098
466	Kab. Pandeglang	0	18.728.109	26.758.972	363.135
467	Kab. Serang	0	13.073.657	22.772.134	344.968
468	Kab. Tangerang	0	25.061.255	36.296.483	825.179

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
460	Kab. Kepulauan Sula	2.881.152	0	93.321.793
461	Kota Tidore Kepulauan	10.444.176	507.000	103.432.348
462	Kab. Pulau Morotai	1.800.720	408.000	64.230.662
463	Kab. Pulau Taliabu	1.800.720	0	112.789.042
464	Provinsi Banten	0	354.000	1.261.189.969
465	Kab. Lebak	0	408.000	574.688.816
466	Kab. Pandeglang	0	408.000	562.564.688
467	Kab. Serang	0	408.000	544.917.606
468	Kab. Tangerang	0	0	921.256.876

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
469	Kota Cilegon	63.343.120	1.047.500	0	7.110.770	82.500	0
470	Kota Tangerang	219.907.650	2.231.000	0	13.571.840	82.500	0
471	Kota Serang	104.490.800	974.500	0	8.417.400	82.500	0
472	Kota Tangerang Selatan	184.751.560	1.449.500	0	14.702.160	82.500	0
473	Provinsi Bangka Belitung	96.941.590	2.520.750	0	0	0	0
474	Kab. Bangka	45.795.900	737.500	0	3.415.800	82.500	0
475	Kab. Belitung	26.185.680	557.500	0	1.962.920	82.500	0
476	Kota Pangkal Pinang	34.965.260	380.000	0	2.552.240	82.500	0
477	Kab. Bangka Selatan	31.272.520	525.000	0	2.220.400	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
469	Kota Cilegon	2.379.540	90.000	0	93.854.626	123.000	0
470	Kota Tangerang	5.281.580	180.000	0	296.676.418	975.000	0
471	Kota Serang	8.739.900	180.000	0	128.668.904	162.000	0
472	Kota Tangerang Selatan	11.179.710	315.000	0	158.969.799	77.250	0
473	Provinsi Bangka Belitung	0	0	0	104.709.758	33.000	0
474	Kab. Bangka	1.102.100	45.000	0	70.464.614	42.000	0
475	Kab. Belitung	1.284.570	45.000	0	52.975.452	42.000	0
476	Kota Pangkal Pinang	2.801.370	45.000	0	42.228.897	57.000	0
477	Kab. Bangka Selatan	1.033.370	45.000	0	62.854.274	42.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
469	Kota Cilegon	400.000	0	0	2.808.866
470	Kota Tangerang	0	0	0	6.023.046
471	Kota Serang	398.545	0	0	4.890.848
472	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	8.071.019
473	Provinsi Bangka Belitung	500.000	0	0	0
474	Kab. Bangka	0	0	0	2.212.656
475	Kab. Belitung	0	0	0	1.215.325
476	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	1.443.545
477	Kab. Bangka Selatan	400.000	0	0	1.386.166

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
469	Kota Cilegon	0	4.740.706	5.928.155	648.430
470	Kota Tangerang	0	14.225.485	18.519.191	0
471	Kota Serang	0	7.826.237	15.772.324	417.263
472	Kota Tangerang Selatan	0	14.834.877	17.011.422	336.384
473	Provinsi Bangka Belitung	2.646.530	0	0	0
474	Kab. Bangka	0	4.848.841	7.279.647	201.789
475	Kab. Belitung	0	5.553.742	5.554.601	338.102
476	Kota Pangkal Pinang	0	3.726.426	6.589.290	282.877
477	Kab. Bangka Selatan	0	5.300.728	4.586.036	140.168

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
469	Kota Cilegon	0	507.000	183.064.213
470	Kota Tangerang	0	408.000	578.081.710
471	Kota Serang	0	408.000	281.429.221
472	Kota Tangerang Selatan	0	408.000	412.189.181
473	Provinsi Bangka Belitung	0	408.000	207.759.628
474	Kab. Bangka	0	0	136.228.347
475	Kab. Belitung	0	408.000	96.205.392
476	Kota Pangkal Pinang	0	507.000	95.661.405
477	Kab. Bangka Selatan	3.961.584	408.000	114.257.746

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
478	Kab. Bangka Tengah	28.591.200	402.500	0	2.922.600	82.500	0
479	Kab. Bangka Barat	31.221.270	629.000	0	3.616.460	82.500	0
480	Kab. Belitung Timur	18.139.140	352.500	0	2.063.360	82.500	0
481	Provinsi Gorontalo	73.840.130	2.175.250	54.600	0	0	0
482	Kab. Boalemo	18.448.010	525.000	539.500	3.604.490	82.500	422.500
483	Kab. Gorontalo	48.214.920	1.194.500	84.500	6.875.400	82.500	32.500
484	Kota Gorontalo	23.440.700	522.000	0	2.844.000	82.500	0
485	Kab. Pohuwato	20.275.500	467.500	0	3.922.200	82.500	0
486	Kab. Bone Bolango	20.188.060	637.000	0	4.561.200	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
478	Kab. Bangka Tengah	1.691.800	90.000	0	60.588.734	18.000	0
479	Kab. Bangka Barat	970.110	45.000	0	55.992.718	66.000	0
480	Kab. Belitung Timur	580.240	90.000	0	49.968.873	33.000	0
481	Provinsi Gorontalo	0	0	0	132.005.975	36.000	495.643
482	Kab. Boalemo	505.620	90.000	0	64.635.002	51.000	3.927.969
483	Kab. Gorontalo	5.524.800	180.000	0	107.196.952	147.000	440.174
484	Kota Gorontalo	1.809.400	45.000	0	57.034.823	75.000	0
485	Kab. Pohuwato	1.122.900	45.000	0	67.704.771	75.000	0
486	Kab. Bone Bolango	1.011.200	90.000	0	65.917.476	114.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
478	Kab. Bangka Tengah	0	0	0	1.416.232
479	Kab. Bangka Barat	0	0	0	1.371.215
480	Kab. Belitung Timur	0	0	0	957.756
481	Provinsi Gorontalo	600.000	1.000.000	0	0
482	Kab. Boalemo	300.000	0	0	1.441.429
483	Kab. Gorontalo	600.000	0	0	4.528.210
484	Kota Gorontalo	400.000	0	0	2.140.565
485	Kab. Pohuwato	0	0	0	1.569.951
486	Kab. Bone Bolango	500.000	0	0	2.692.363

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
478	Kab. Bangka Tengah	0	5.808.914	4.705.422	447.551
479	Kab. Bangka Barat	0	5.132.142	5.267.722	192.472
480	Kab. Belitung Timur	0	5.153.887	4.300.188	0
481	Provinsi Gorontalo	3.533.305	0	0	0
482	Kab. Boalemo	0	7.389.464	8.318.822	201.838
483	Kab. Gorontalo	0	12.543.247	16.428.452	842.715
484	Kota Gorontalo	0	4.882.453	5.072.476	451.006
485	Kab. Pohuwato	0	7.278.733	11.772.841	344.061
486	Kab. Bone Bolango	0	8.237.327	10.456.046	289.547

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
478	Kab. Bangka Tengah	9.003.600	0	115.769.053
479	Kab. Bangka Barat	6.842.736	408.000	111.837.345
480	Kab. Belitung Timur	8.283.312	507.000	90.511.756
481	Provinsi Gorontalo	0	408.000	214.148.903
482	Kab. Boalemo	0	0	110.483.144
483	Kab. Gorontalo	0	408.000	205.323.870
484	Kota Gorontalo	0	0	98.799.923
485	Kab. Pohuwato	0	507.000	115.167.957
486	Kab. Bone Bolango	0	408.000	115.184.719

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
487	Kab. Gorontalo Utara	17.018.900	490.000	279.500	2.591.400	82.500	130.000
488	Provinsi Kepulauan Riau	207.299.630	3.090.250	126.000	0	0	0
489	Kab. Natuna	15.228.080	307.500	60.000	2.132.520	82.500	50.000
490	Kab. Kepulauan Anambas	11.332.460	262.500	655.000	1.424.890	82.500	225.000
491	Kab. Karimun	45.474.090	647.500	485.000	3.370.700	82.500	100.000
492	Kota Batam	235.280.480	1.619.500	315.000	10.226.060	82.500	50.000
493	Kota Tanjung Pinang	38.599.260	740.000	0	2.081.250	82.500	0
494	Kab. Lingga	19.122.020	542.000	1.065.000	1.811.080	82.500	275.000
495	Kab. Bintan	29.949.920	452.000	220.000	2.780.570	82.500	200.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
487	Kab. Gorontalo Utara	1.052.900	90.000	0	68.121.270	120.000	2.285.367
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	148.075.256	48.000	1.405.225
489	Kab. Natuna	356.850	0	0	42.121.790	54.000	1.668.004
490	Kab. Kepulauan Anambas	303.340	45.000	31.000	33.395.691	18.000	6.037.018
491	Kab. Karimun	1.177.060	90.000	0	83.000.236	24.000	6.304.828
492	Kota Batam	7.933.140	225.000	0	163.797.979	81.000	0
493	Kota Tanjung Pinang	476.530	90.000	0	46.343.192	39.000	0
494	Kab. Lingga	310.130	90.000	0	54.055.682	24.000	10.786.973
495	Kab. Bintan	957.430	90.000	31.000	54.979.786	30.000	2.704.190

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
487	Kab. Gorontalo Utara	600.000	0	0	2.200.870
488	Provinsi Kepulauan Riau	600.000	0	0	0
489	Kab. Natuna	398.545	0	0	1.190.592
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	0	0	858.880
491	Kab. Karimun	0	0	0	1.886.475
492	Kota Batam	0	600.000	0	5.123.523
493	Kota Tanjung Pinang	600.000	700.000	0	957.530
494	Kab. Lingga	0	600.000	0	1.094.245
495	Kab. Bintan	398.545	600.000	0	1.355.946

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
487	Kab. Gorontalo Utara	0	7.569.595	10.788.972	216.165
488	Provinsi Kepulauan Riau	4.210.510	0	0	0
489	Kab. Natuna	0	7.624.840	5.945.358	179.338
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	6.241.058	4.867.193	0
491	Kab. Karimun	0	3.664.896	7.593.710	720.327
492	Kota Batam	0	11.609.414	13.270.795	415.207
493	Kota Tanjung Pinang	0	3.785.507	5.536.147	176.016
494	Kab. Lingga	0	5.876.817	5.334.022	383.835
495	Kab. Bintan	0	4.432.626	5.831.233	388.452

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
487	Kab. Gorontalo Utara	3.241.296	0	116.878.735
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	408.000	365.262.871
489	Kab. Natuna	3.241.296	507.000	81.148.213
490	Kab. Kepulauan Anambas	5.762.304	0	71.541.834
491	Kab. Karimun	0	408.000	155.029.322
492	Kota Batam	0	408.000	451.037.598
493	Kota Tanjung Pinang	0	507.000	100.713.932
494	Kab. Lingga	3.601.440	507.000	105.561.744
495	Kab. Bintan	0	507.000	105.991.198

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
496	Provinsi Papua Barat	1.249.200	147.000	0	0	0	0
497	Kab. Fak Fak	29.841.060	612.000	2.053.500	1.751.310	82.500	337.500
498	Kab. Manokwari	53.791.320	997.500	1.300.500	2.126.160	82.500	225.000
499	Kab. Teluk Bintuni	31.108.000	588.250	3.643.500	1.697.640	82.500	787.500
500	Kab. Teluk Wondama	15.336.290	345.750	1.668.000	555.560	82.500	712.500
501	Kab. Kaimana	22.439.240	413.250	3.393.000	975.320	82.500	300.000
502	Kab. Manokwari Selatan	12.350.790	250.000	823.500	628.320	82.500	150.000
503	Kab. Pegunungan Arfak	13.551.340	317.500	4.305.000	373.520	82.500	637.500
504	Provinsi Sulawesi Barat	91.510.650	2.991.250	755.300	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
496	Provinsi Papua Barat	0	0	0	513.348	0	0
497	Kab. Fak Fak	921.870	45.000	46.500	50.944.789	63.000	11.467.518
498	Kab. Manokwari	1.758.120	135.000	93.000	67.771.235	36.000	5.967.975
499	Kab. Teluk Bintuni	695.590	90.000	46.500	41.338.439	60.000	13.286.134
500	Kab. Teluk Wondama	331.420	45.000	0	19.047.050	55.000	5.241.587
501	Kab. Kaimana	524.940	45.000	0	35.494.480	30.000	13.147.851
502	Kab. Manokwari Selatan	49.230	45.000	0	15.099.032	6.000	2.887.163
503	Kab. Pegunungan Arfak	34.700	45.000	46.500	17.184.760	27.000	14.230.860
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0	131.984.714	30.000	3.208.842

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
496	Provinsi Papua Barat	0	0	0	0
497	Kab. Fak Fak	0	0	0	1.981.941
498	Kab. Manokwari	400.000	0	0	1.985.317
499	Kab. Teluk Bintuni	0	0	0	1.391.254
500	Kab. Teluk Wondama	0	0	0	742.042
501	Kab. Kaimana	0	0	0	850.000
502	Kab. Manokwari Selatan	0	0	0	752.313
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	0	1.415.736
504	Provinsi Sulawesi Barat	600.000	0	2.000.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
496	Provinsi Papua Barat	2.872.382	0	0	0
497	Kab. Fak Fak	0	8.800.204	8.785.461	0
498	Kab. Manokwari	0	9.067.175	11.695.505	596.991
499	Kab. Teluk Bintuni	0	23.857.264	11.586.243	0
500	Kab. Teluk Wondama	0	4.315.496	8.701.243	0
501	Kab. Kaimana	0	5.650.114	8.257.013	158.809
502	Kab. Manokwari Selatan	0	5.515.056	7.256.891	0
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	5.438.687	6.742.479	0
504	Provinsi Sulawesi Barat	4.241.173	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
496	Provinsi Papua Barat	0	507.000	5.288.930
497	Kab. Fak Fak	0	507.000	118.241.153
498	Kab. Manokwari	0	507.000	158.536.298
499	Kab. Teluk Bintuni	3.601.440	0	133.860.254
500	Kab. Teluk Wondama	2.881.152	0	60.060.590
501	Kab. Kaimana	0	0	91.761.517
502	Kab. Manokwari Selatan	2.521.008	0	48.416.803
503	Kab. Pegunungan Arfak	360.144	0	64.793.226
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	408.000	237.729.929

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
505	Kab. Majene	25.490.000	792.000	1.014.000	4.455.000	82.500	422.500
506	Kab. Mamuju	41.857.120	1.373.000	2.216.500	3.433.800	82.500	260.000
507	Kab. Polewali Mandar	56.808.800	1.080.000	741.000	9.948.000	82.500	357.500
508	Kab. Mamasa	27.859.660	935.000	7.202.000	2.845.800	82.500	3.932.500
509	Kab. Pasangkayu	25.701.600	525.000	162.500	2.156.400	82.500	0
510	Kab. Mamuju Tengah	19.041.960	410.000	279.500	2.784.000	82.500	65.000
511	Provinsi Kalimantan Utara	60.701.040	1.846.000	201.600	0	0	0
512	Kab. Bulungan	29.893.540	655.000	156.000	3.160.640	82.500	60.000
513	Kab. Malinau	17.653.160	387.500	1.524.000	1.634.750	82.500	690.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
505	Kab. Majene	3.510.100	135.000	80.600	101.712.855	234.000	9.413.660
506	Kab. Mamuju	4.155.300	135.000	80.600	103.597.436	228.000	11.772.300
507	Kab. Polewali Mandar	4.040.600	90.000	0	143.914.149	132.000	5.089.214
508	Kab. Mamasa	2.057.920	225.000	403.000	57.465.493	75.000	28.083.819
509	Kab. Pasangkayu	864.600	45.000	0	45.321.642	45.000	839.601
510	Kab. Mamuju Tengah	4.102.500	135.000	40.300	49.295.807	96.000	1.720.125
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	70.954.274	30.000	1.784.727
512	Kab. Bulungan	1.019.410	45.000	0	68.923.854	267.000	845.399
513	Kab. Malinau	759.420	45.000	0	50.238.788	21.000	10.203.841

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
505	Kab. Majene	500.000	600.000	0	1.488.327
506	Kab. Mamuju	0	0	0	2.290.899
507	Kab. Polewali Mandar	700.000	0	0	3.284.209
508	Kab. Mamasa	600.000	0	0	2.325.152
509	Kab. Pasangkayu	0	0	0	1.609.660
510	Kab. Mamuju Tengah	0	0	0	1.186.169
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	0
512	Kab. Bulungan	0	0	0	1.248.997
513	Kab. Malinau	0	0	0	1.007.250

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
505	Kab. Majene	0	6.997.938	12.266.274	0
506	Kab. Mamuju	0	8.927.955	19.412.482	324.018
507	Kab. Polewali Mandar	0	8.785.120	15.932.621	225.904
508	Kab. Mamasa	0	5.499.560	17.033.749	65.263
509	Kab. Pasangkayu	0	7.338.071	11.142.345	353.328
510	Kab. Mamuju Tengah	0	5.712.106	7.619.040	262.559
511	Provinsi Kalimantan Utara	3.367.083	0	0	0
512	Kab. Bulungan	0	6.709.504	9.133.120	388.773
513	Kab. Malinau	0	7.029.312	9.916.518	200.483

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
505	Kab. Majene	0	408.000	169.602.754
506	Kab. Mamuju	0	0	200.146.910
507	Kab. Polewali Mandar	0	0	251.211.617
508	Kab. Mamasa	0	0	156.691.416
509	Kab. Pasangkayu	0	0	96.187.247
510	Kab. Mamuju Tengah	0	408.000	93.240.566
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	507.000	139.391.724
512	Kab. Bulungan	11.524.608	408.000	134.521.345
513	Kab. Malinau	7.563.024	0	108.956.546

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
514	Kab. Nunukan	37.824.100	694.500	1.242.000	3.893.250	82.500	360.000
515	Kota Tarakan	39.230.480	349.500	0	3.013.920	82.500	0
516	Kab. Tana Tidung	6.135.800	249.500	156.000	929.520	82.500	60.000
517	Provinsi Papua Selatan	1.114.880	147.000	0	0	0	0
518	Kab. Merauke	90.748.290	1.936.000	3.816.000	4.581.600	82.500	375.000
519	Kab. Boven Digoel	31.280.090	595.250	2.995.500	906.500	82.500	375.000
520	Kab. Mappi	51.037.680	874.000	6.126.000	1.095.640	82.500	712.500
521	Kab. Asmat	49.639.020	1.045.470	6.654.000	3.380.400	82.500	1.200.000
522	Provinsi Papua Tengah	4.762.530	159.500	0	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
514	Kab. Nunukan	2.184.270	135.000	0	74.255.488	192.000	9.899.497
515	Kota Tarakan	2.205.660	90.000	0	47.737.293	24.000	0
516	Kab. Tana Tidung	276.230	45.000	0	16.482.898	9.000	1.222.573
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0	2.815.641	0	0
518	Kab. Merauke	4.179.870	135.000	0	88.822.431	66.000	14.599.657
519	Kab. Boven Digoel	1.522.220	90.000	232.500	19.662.355	9.000	5.532.115
520	Kab. Mappi	945.440	45.000	139.500	30.515.840	15.000	24.469.152
521	Kab. Asmat	8.282.000	135.000	651.000	22.902.721	12.000	23.237.651
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0	2.549.552	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
514	Kab. Nunukan	0	0	0	2.532.875
515	Kota Tarakan	0	700.000	0	1.114.598
516	Kab. Tana Tidung	0	0	0	407.340
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	0	0	2.102.125
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0	1.136.870
520	Kab. Mappi	0	0	0	1.574.010
521	Kab. Asmat	0	0	0	2.026.197
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
514	Kab. Nunukan	0	8.818.269	13.751.422	590.116
515	Kota Tarakan	0	5.394.581	3.679.607	319.263
516	Kab. Tana Tidung	0	4.272.906	3.513.724	236.056
517	Provinsi Papua Selatan	1.858.220	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	13.910.510	25.096.671	586.623
519	Kab. Boven Digoel	0	10.140.849	16.744.811	636.493
520	Kab. Mappi	0	10.498.095	12.394.340	0
521	Kab. Asmat	0	7.558.139	15.572.101	0
522	Provinsi Papua Tengah	2.831.663	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
514	Kab. Nunukan	9.723.888	0	166.179.175
515	Kota Tarakan	0	0	103.941.402
516	Kab. Tana Tidung	1.800.720	0	35.879.767
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	5.935.741
518	Kab. Merauke	11.524.608	507.000	263.069.885
519	Kab. Boven Digoel	4.681.872	0	96.623.925
520	Kab. Mappi	2.160.864	0	142.685.561
521	Kab. Asmat	5.042.016	0	147.420.215
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	10.303.245

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
523	Kab. Mimika	85.507.030	1.315.500	2.680.500	3.102.400	82.500	450.000
524	Kab. Nabire	67.275.750	1.893.750	1.237.500	3.175.520	82.500	187.500
525	Kab. Paniai	55.832.600	340.000	2.977.500	10.167.600	82.500	1.650.000
526	Kab. Puncak Jaya	15.737.630	192.500	868.500	327.600	82.500	112.500
527	Kab. Dogiyai	35.810.650	317.500	2.793.000	330.000	82.500	300.000
528	Kab. Puncak	6.407.750	192.500	1.627.500	30.000	82.500	37.500
529	Kab. Intan Jaya	8.441.900	147.500	1.735.500	21.600	82.500	75.000
530	Kab. Deiyai	40.252.000	260.000	225.000	2.385.600	82.500	37.500
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
523	Kab. Mimika	3.770.450	90.000	279.000	70.534.948	48.000	12.709.724
524	Kab. Nabire	18.743.770	360.000	511.500	62.089.565	54.000	2.059.576
525	Kab. Paniai	21.859.000	180.000	1.023.000	13.211.387	21.000	6.004.722
526	Kab. Puncak Jaya	1.025.800	45.000	46.500	7.124.309	9.000	4.143.495
527	Kab. Dogiyai	333.800	45.000	93.000	7.987.869	6.000	5.122.213
528	Kab. Puncak	1.107.600	45.000	139.500	4.579.255	9.000	4.217.864
529	Kab. Intan Jaya	1.448.600	45.000	232.500	4.318.563	6.000	6.164.584
530	Kab. Deiyai	157.200	90.000	0	9.737.515	9.000	272.252
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
523	Kab. Mimika	0	0	0	1.563.626
524	Kab. Nabire	0	0	0	1.071.453
525	Kab. Paniai	0	0	0	2.424.736
526	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	2.696.855
527	Kab. Dogiyai	0	0	0	790.458
528	Kab. Puncak	0	0	0	1.825.286
529	Kab. Intan Jaya	0	0	0	826.251
530	Kab. Deiyai	0	0	0	924.952
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
523	Kab. Mimika	0	16.565.030	21.193.227	0
524	Kab. Nabire	0	11.335.485	30.448.309	398.320
525	Kab. Paniai	0	9.663.610	35.723.761	0
526	Kab. Puncak Jaya	0	2.167.656	11.836.163	0
527	Kab. Dogiyai	0	2.453.428	1.318.500	0
528	Kab. Puncak	0	6.754.914	13.153.063	0
529	Kab. Intan Jaya	0	7.384.706	7.357.953	0
530	Kab. Deiyai	0	11.684.938	13.717.609	0
531	Provinsi Papua Pegunungan	4.279.350	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
523	Kab. Mimika	0	0	219.891.935
524	Kab. Nabire	7.923.168	0	208.847.666
525	Kab. Paniai	3.961.584	0	165.123.000
526	Kab. Puncak Jaya	2.521.008	0	48.937.016
527	Kab. Dogiyai	2.521.008	0	60.304.926
528	Kab. Puncak	1.080.432	0	41.289.664
529	Kab. Intan Jaya	2.160.864	0	40.449.021
530	Kab. Deiyai	1.800.720	0	81.636.786
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	4.279.350

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
532	Kab. Jayawijaya	73.419.200	1.450.000	2.410.500	4.036.800	82.500	637.500
533	Kab. Yahukimo	96.361.240	670.000	8.046.000	1.922.400	82.500	675.000
534	Kab. Pegunungan Bintang	27.617.680	465.000	5.673.000	1.922.400	82.500	600.000
535	Kab. Tolikara	37.030.940	375.000	2.686.500	300.000	82.500	75.000
536	Kab. Mamberamo Tengah	11.923.730	170.000	1.674.000	217.200	82.500	150.000
537	Kab. Yalimo	17.811.760	330.000	3.819.000	176.400	82.500	187.500
538	Kab. Lanny Jaya	55.030.780	420.000	3.910.500	784.800	82.500	487.500
539	Kab. Nduga	11.974.890	192.500	1.405.500	183.600	82.500	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	1.457.540	108.750	0	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
532	Kab. Jayawijaya	19.740.400	405.000	279.000	29.149.791	12.000	9.667.183
533	Kab. Yahukimo	3.637.000	45.000	279.000	11.466.446	12.000	7.028.610
534	Kab. Pegunungan Bintang	2.513.400	90.000	418.500	10.764.912	6.000	10.741.555
535	Kab. Tolikara	5.574.400	90.000	279.000	6.746.183	6.000	3.427.747
536	Kab. Mamberamo Tengah	90.200	45.000	46.500	6.892.187	24.000	4.505.830
537	Kab. Yalimo	66.000	45.000	46.500	11.002.686	18.000	11.618.055
538	Kab. Lanny Jaya	8.205.800	180.000	1.302.000	11.620.795	3.000	12.829.639
539	Kab. Nduga	0	0	0	5.809.269	6.000	2.722.014
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	0	5.451.303	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
532	Kab. Jayawijaya	0	0	0	3.034.798
533	Kab. Yahukimo	0	0	0	4.474.348
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	0	2.473.665
535	Kab. Tolikara	0	0	0	4.657.129
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	626.613
537	Kab. Yalimo	0	0	0	2.719.280
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	0	3.126.666
539	Kab. Nduga	0	0	0	2.117.608
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
532	Kab. Jayawijaya	0	6.154.897	25.238.916	0
533	Kab. Yahukimo	0	7.046.380	42.845.808	0
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	11.537.020	45.898.088	0
535	Kab. Tolikara	0	9.344.997	23.188.268	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	5.172.214	9.914.601	0
537	Kab. Yalimo	0	4.440.227	6.306.742	0
538	Kab. Lanny Jaya	0	4.394.130	18.612.473	0
539	Kab. Nduga	0	3.347.454	9.531.151	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	1.982.643	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
532	Kab. Jayawijaya	8.283.312	0	184.001.797
533	Kab. Yahukimo	2.881.152	0	187.472.884
534	Kab. Pegunungan Bintang	3.961.584	0	124.765.304
535	Kab. Tolikara	2.521.008	408.000	96.792.672
536	Kab. Mamberamo Tengah	1.080.432	0	42.615.007
537	Kab. Yalimo	1.800.720	0	60.470.370
538	Kab. Lanny Jaya	1.080.432	0	122.071.015
539	Kab. Nduga	360.144	0	37.732.630
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	9.000.236

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
541	Kab. Sorong	37.710.830	932.000	4.269.000	1.352.520	82.500	225.000
542	Kota Sorong	51.495.090	1.550.250	240.000	1.395.180	82.500	37.500
543	Kab. Raja Ampat	26.158.020	522.500	3.708.000	652.540	82.500	675.000
544	Kab. Sorong Selatan	21.482.600	587.000	4.698.000	573.180	82.500	375.000
545	Kab. Maybrat	9.707.540	317.500	1.959.000	208.740	82.500	225.000
546	Kab. Tambrauw	10.496.840	295.000	3.669.000	257.550	82.500	412.500
	NASIONAL	52.215.847.710	781.662.470	435.536.500	3.769.058.850	42.405.000	127.742.500

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
541	Kab. Sorong	469.560	45.000	46.500	72.481.310	72.000	21.593.328
542	Kota Sorong	508.870	45.000	0	63.487.812	27.000	900.411
543	Kab. Raja Ampat	401.690	45.000	46.500	47.194.267	84.000	15.587.506
544	Kab. Sorong Selatan	892.200	45.000	232.500	37.165.165	63.000	24.882.916
545	Kab. Maybrat	210.140	45.000	139.500	19.005.671	39.000	9.996.283
546	Kab. Tambrauw	348.060	45.000	46.500	14.476.122	21.000	15.418.013
	NASIONAL	1.852.797.820	57.735.000	12.328.700	72.201.044.402	68.112.250	2.494.175.431

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
541	Kab. Sorong	400.000	0	0	3.002.831
542	Kota Sorong	0	0	0	1.526.430
543	Kab. Raja Ampat	0	0	0	1.268.840
544	Kab. Sorong Selatan	0	0	0	1.389.636
545	Kab. Maybrat	0	0	0	2.323.392
546	Kab. Tambrauw	0	0	0	2.113.048
	NASIONAL	125.000.000	89.850.000	60.150.000	1.999.172.116

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
541	Kab. Sorong	0	9.071.634	21.341.506	0
542	Kota Sorong	0	7.152.028	8.124.442	0
543	Kab. Raja Ampat	0	4.882.917	17.875.165	0
544	Kab. Sorong Selatan	0	6.979.784	19.896.535	0
545	Kab. Maybrat	0	5.499.626	16.766.821	0
546	Kab. Tambrauw	0	2.890.542	9.735.542	0
	NASIONAL	262.233.571	4.320.188.182	7.507.715.087	150.000.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
541	Kab. Sorong	11.524.608	507.000	185.127.127
542	Kota Sorong	0	408.000	136.980.513
543	Kab. Raja Ampat	2.521.008	0	121.705.453
544	Kab. Sorong Selatan	2.521.008	0	121.866.024
545	Kab. Maybrat	720.288	0	67.246.001
546	Kab. Tambrauw	1.440.576	0	61.747.793
	NASIONAL	638.535.312	132.000.000	149.343.290.901

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
1	Provinsi Aceh	0	0	0	0
2	Kab. Aceh Barat	0	0	0	0
3	Kab. Aceh Besar	0	0	0	0
4	Kab. Aceh Selatan	0	0	0	0
5	Kab. Aceh Singkil	0	0	0	0
6	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	0
7	Kab. Aceh Tenggara	0	0	0	0
8	Kab. Aceh Timur	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
9	Kab. Aceh Utara	0	0	0	0
10	Kab. Bireuen	0	0	0	0
11	Kab. Pidie	0	0	0	0
12	Kab. Simeulue	0	0	0	0
13	Kota Banda Aceh	0	0	0	0
14	Kota Sabang	0	0	0	0
15	Kota Langsa	0	0	0	0
16	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
17	Kab. Gayo Lues	0	0	0	0
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	0	0	0
19	Kab. Aceh Jaya	0	0	0	0
20	Kab. Nagan Raya	0	0	0	0
21	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	0
22	Kab. Bener Meriah	0	0	0	0
23	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	0
24	Kota Subulussalam	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
25	Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0
26	Kab. Asahan	0	0	0	0
27	Kab. Dairi	0	0	0	0
28	Kab. Deli Serdang	0	0	0	0
29	Kab. Karo	0	0	0	0
30	Kab. Labuhanbatu	0	0	0	0
31	Kab. Langkat	0	0	0	0
32	Kab. Mandailing Natal	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
33	Kab. Nias	0	0	0	0
34	Kab. Simalungun	0	0	0	0
35	Kab. Tapanuli Selatan	0	0	0	0
36	Kab. Tapanuli Tengah	0	0	0	0
37	Kab. Tapanuli Utara	0	0	0	0
38	Kab. Toba	0	0	0	0
39	Kota Binjai	0	0	0	0
40	Kota Medan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
41	Kota Pematang Siantar	0	0	0	0
42	Kota Sibolga	0	0	0	0
43	Kota Tanjung Balai	0	0	0	0
44	Kota Tebing Tinggi	0	0	0	0
45	Kota Padangsidimpuan	0	0	0	0
46	Kab. Pakpak Bharat	0	0	0	0
47	Kab. Nias Selatan	0	0	0	0
48	Kab. Humbang Hasundutan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
49	Kab. Serdang Bedagai	0	0	0	0
50	Kab. Samosir	0	0	0	0
51	Kab. Batu Bara	0	0	0	0
52	Kab. Padang Lawas	0	0	0	0
53	Kab. Padang Lawas Utara	0	0	0	0
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	0	0	0
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0	0	0	0
56	Kab. Nias Utara	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
57	Kab. Nias Barat	0	0	0	0
58	Kota Gunungsitoli	0	0	0	0
59	Provinsi Sumatera Barat	0	0	0	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	0	0	0	0
61	Kab. Agam	0	0	0	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0	0
63	Kab. Padang Pariaman	0	0	0	0
64	Kab. Pasaman	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
65	Kab. Pesisir Selatan	0	0	0	0
66	Kab. Sijunjung	0	0	0	0
67	Kab. Solok	0	0	0	0
68	Kab. Tanah Datar	0	0	0	0
69	Kota Bukittinggi	0	0	0	0
70	Kota Padang Panjang	0	0	0	0
71	Kota Padang	0	0	0	0
72	Kota Payakumbuh	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
73	Kota Sawahlunto	0	0	0	0
74	Kota Solok	0	0	0	0
75	Kota Pariaman	0	0	0	0
76	Kab. Pasaman Barat	0	0	0	0
77	Kab. Dharmasraya	0	0	0	0
78	Kab. Solok Selatan	0	0	0	0
79	Provinsi Riau	0	0	0	0
80	Kab. Bengkalis	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
81	Kab. Indragiri Hilir	0	0	0	0
82	Kab. Indragiri Hulu	0	0	0	0
83	Kab. Kampar	0	0	0	0
84	Kab. Kuantan Singingi	0	0	0	0
85	Kab. Pelalawan	0	0	0	0
86	Kab. Rokan Hilir	0	0	0	0
87	Kab. Rokan Hulu	0	0	0	0
88	Kab. Siak	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
89	Kota Dumai	0	0	0	0
90	Kota Pekanbaru	0	0	0	0
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	0	0	0
92	Provinsi Jambi	0	0	6.000.000	6.000.000
93	Kab. Batanghari	0	0	0	0
94	Kab. Bungo	0	0	0	0
95	Kab. Kerinci	0	0	0	0
96	Kab. Merangin	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
97	Kab. Muaro Jambi	0	0	0	0
98	Kab. Sarolangun	0	0	0	0
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0
101	Kab. Tebo	0	0	0	0
102	Kota Jambi	0	0	0	0
103	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0
104	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
105	Kab. Lahat	0	0	0	0
106	Kab. Musi Banyuasin	0	0	0	0
107	Kab. Musi Rawas	0	0	0	0
108	Kab. Muara Enim	0	0	0	0
109	Kab. Ogan Komering Ilir	0	0	0	0
110	Kab. Ogan Komering Ulu	0	0	0	0
111	Kota Palembang	0	0	0	0
112	Kota Prabumulih	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
113	Kota Pagar Alam	0	0	0	0
114	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0
115	Kab. Banyuasin	0	0	0	0
116	Kab. Ogan Ilir	0	0	0	0
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	0	0	0	0
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0	0	0	0
119	Kab. Empat Lawang	0	0	0	0
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
121	Kab. Musi Rawas Utara	0	0	0	0
122	Provinsi Bengkulu	0	0	0	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	0	0	0	0
124	Kab. Bengkulu Utara	0	0	0	0
125	Kab. Rejang Lebong	0	0	0	0
126	Kota Bengkulu	0	0	0	0
127	Kab. Kaur	0	0	0	0
128	Kab. Seluma	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
129	Kab. Mukomuko	0	0	0	0
130	Kab. Lebong	0	0	0	0
131	Kab. Kepahiang	0	0	0	0
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	0	0
133	Provinsi Lampung	0	0	0	0
134	Kab. Lampung Barat	0	0	0	0
135	Kab. Lampung Selatan	0	0	0	0
136	Kab. Lampung Tengah	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
137	Kab. Lampung Utara	0	0	0	0
138	Kab. Lampung Timur	0	0	0	0
139	Kab. Tanggamus	0	0	0	0
140	Kab. Tulang Bawang	0	0	0	0
141	Kab. Way Kanan	0	0	0	0
142	Kota Bandar Lampung	0	0	0	0
143	Kota Metro	0	0	0	0
144	Kab. Pesawaran	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
145	Kab. Pringsewu	0	0	0	0
146	Kab. Mesuji	0	0	0	0
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	0	0	0
148	Kab. Pesisir Barat	0	0	0	0
149	Provinsi DKI Jakarta	2.607.618.000	0	0	2.607.618.000
150	Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0
151	Kab. Bandung	0	0	0	0
152	Kab. Bekasi	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
153	Kab. Bogor	0	0	0	0
154	Kab. Ciamis	0	0	0	0
155	Kab. Cianjur	0	0	0	0
156	Kab. Cirebon	0	6.560.960	0	6.560.960
157	Kab. Garut	0	20.396.050	0	20.396.050
158	Kab. Indramayu	0	0	0	0
159	Kab. Karawang	0	0	0	0
160	Kab. Kuningan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
161	Kab. Majalengka	0	0	0	0
162	Kab. Purwakarta	0	0	0	0
163	Kab. Subang	0	3.211.750	0	3.211.750
164	Kab. Sukabumi	0	0	0	0
165	Kab. Sumedang	0	0	0	0
166	Kab. Tasikmalaya	0	19.885.250	0	19.885.250
167	Kota Bandung	0	0	0	0
168	Kota Bekasi	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
169	Kota Bogor	0	0	0	0
170	Kota Cirebon	0	0	0	0
171	Kota Depok	0	0	0	0
172	Kota Sukabumi	0	0	0	0
173	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0
174	Kota Cimahi	0	0	0	0
175	Kota Banjar	0	0	0	0
176	Kab. Bandung Barat	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
177	Kab. Pangandaran	0	0	0	0
178	Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0
179	Kab. Banjarnegara	0	16.870.500	0	16.870.500
180	Kab. Banyumas	0	0	0	0
181	Kab. Batang	0	0	0	0
182	Kab. Blora	0	0	0	0
183	Kab. Boyolali	0	0	0	0
184	Kab. Brebes	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
185	Kab. Cilacap	0	0	0	0
186	Kab. Demak	0	0	0	0
187	Kab. Grobogan	0	0	0	0
188	Kab. Jepara	0	0	0	0
189	Kab. Karanganyar	0	0	0	0
190	Kab. Kebumen	0	0	0	0
191	Kab. Kendal	0	0	0	0
192	Kab. Klaten	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
193	Kab. Kudus	0	0	0	0
194	Kab. Magelang	0	6.465.000	0	6.465.000
195	Kab. Pati	0	0	0	0
196	Kab. Pekalongan	0	0	0	0
197	Kab. Pemalang	0	0	0	0
198	Kab. Purbalingga	0	12.915.000	0	12.915.000
199	Kab. Purworejo	0	0	0	0
200	Kab. Rembang	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
201	Kab. Semarang	0	0	0	0
202	Kab. Sragen	0	0	0	0
203	Kab. Sukoharjo	0	0	0	0
204	Kab. Tegal	0	0	0	0
205	Kab. Temanggung	0	0	0	0
206	Kab. Wonogiri	0	0	0	0
207	Kab. Wonosobo	0	0	0	0
208	Kota Magelang	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
209	Kota Pekalongan	0	0	0	0
210	Kota Salatiga	0	0	0	0
211	Kota Semarang	0	0	0	0
212	Kota Surakarta	0	0	0	0
213	Kota Tegal	0	0	0	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	0	0
215	Kab. Bantul	0	0	0	0
216	Kab. Gunung Kidul	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
217	Kab. Kulon Progo	0	0	0	0
218	Kab. Sleman	0	0	0	0
219	Kota Yogyakarta	0	0	0	0
220	Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0
221	Kab. Bangkalan	0	0	0	0
222	Kab. Banyuwangi	0	0	0	0
223	Kab. Blitar	0	0	0	0
224	Kab. Bojonegoro	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
225	Kab. Bondowoso	0	0	0	0
226	Kab. Gresik	0	0	0	0
227	Kab. Jember	0	0	0	0
228	Kab. Jombang	0	0	0	0
229	Kab. Kediri	0	0	0	0
230	Kab. Lamongan	0	0	0	0
231	Kab. Lumajang	0	0	0	0
232	Kab. Madiun	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
233	Kab. Magetan	0	0	0	0
234	Kab. Malang	0	9.204.000	0	9.204.000
235	Kab. Mojokerto	0	0	0	0
236	Kab. Nganjuk	0	0	0	0
237	Kab. Ngawi	0	0	0	0
238	Kab. Pacitan	0	0	0	0
239	Kab. Pamekasan	0	0	0	0
240	Kab. Pasuruan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
241	Kab. Ponorogo	0	0	0	0
242	Kab. Probolinggo	0	0	0	0
243	Kab. Sampang	0	0	0	0
244	Kab. Sidoarjo	0	0	0	0
245	Kab. Situbondo	0	0	0	0
246	Kab. Sumenep	0	10.751.000	0	10.751.000
247	Kab. Trenggalek	0	0	0	0
248	Kab. Tuban	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
249	Kab. Tulungagung	0	0	0	0
250	Kota Blitar	0	0	0	0
251	Kota Kediri	0	0	0	0
252	Kota Madiun	0	0	0	0
253	Kota Malang	0	0	0	0
254	Kota Mojokerto	0	0	0	0
255	Kota Pasuruan	0	0	0	0
256	Kota Probolinggo	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
257	Kota Surabaya	0	0	0	0
258	Kota Batu	0	0	0	0
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	0	0	0	0
261	Kab. Landak	0	0	0	0
262	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	0
263	Kab. Ketapang	0	0	0	0
264	Kab. Mempawah	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
265	Kab. Sambas	0	0	0	0
266	Kab. Sanggau	0	0	0	0
267	Kab. Sintang	0	0	0	0
268	Kota Pontianak	0	0	0	0
269	Kota Singkawang	0	0	0	0
270	Kab. Sekadau	0	0	0	0
271	Kab. Melawi	0	0	0	0
272	Kab. Kayong Utara	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
273	Kab. Kubu Raya	0	0	0	0
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	0	0	0	0
276	Kab. Barito Utara	0	0	0	0
277	Kab. Kapuas	0	0	0	0
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	0
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	0	0	0
280	Kota Palangkaraya	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
281	Kab. Katingan	0	0	0	0
282	Kab. Seruyan	0	0	0	0
283	Kab. Sukamara	0	0	0	0
284	Kab. Lamandau	0	0	0	0
285	Kab. Gunung Mas	0	0	0	0
286	Kab. Pulang Pisau	0	0	0	0
287	Kab. Murung Raya	0	0	0	0
288	Kab. Barito Timur	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0	0
290	Kab. Banjar	0	0	0	0
291	Kab. Barito Kuala	0	0	0	0
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0	0	0
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0	0
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	0	0	0
295	Kab. Kotabaru	0	0	0	0
296	Kab. Tabalong	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
297	Kab. Tanah Laut	0	0	0	0
298	Kab. Tapin	0	0	0	0
299	Kota Banjarbaru	0	0	0	0
300	Kota Banjarmasin	0	0	0	0
301	Kab. Balangan	0	0	0	0
302	Kab. Tanah Bumbu	0	0	0	0
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	0	0
304	Kab. Berau	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	0	0	0
306	Kab. Kutai Barat	0	0	0	0
307	Kab. Kutai Timur	0	0	0	0
308	Kab. Paser	0	0	0	0
309	Kota Balikpapan	0	0	0	0
310	Kota Bontang	0	0	0	0
311	Kota Samarinda	0	0	0	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
313	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	0
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	0	0	0	0
316	Kab. Minahasa	0	0	0	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0	0	0	0
318	Kota Bitung	0	0	0	0
319	Kota Manado	0	0	0	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
321	Kab. Minahasa Selatan	0	7.587.850	0	7.587.850
322	Kota Tomohon	0	0	0	0
323	Kab. Minahasa Utara	0	0	0	0
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	0	0	0	0
325	Kota Kotamobagu	0	0	0	0
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	0	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	0	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	0	0	0
331	Kab. Banggai	0	0	0	0
332	Kab. Banggai Kepulauan	0	0	0	0
333	Kab. Buol	0	0	0	0
334	Kab. Toli-Toli	0	0	0	0
335	Kab. Donggala	0	0	0	0
336	Kab. Morowali	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
337	Kab. Poso	0	0	0	0
338	Kota Palu	0	0	0	0
339	Kab. Parigi Moutong	0	0	0	0
340	Kab. Tojo Una-Una	0	0	0	0
341	Kab. Sigi	0	0	0	0
342	Kab. Banggai Laut	0	0	0	0
343	Kab. Morowali Utara	0	0	0	0
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
345	Kab. Bantaeng	0	0	0	0
346	Kab. Barru	0	0	0	0
347	Kab. Bone	0	0	0	0
348	Kab. Bulukumba	0	0	0	0
349	Kab. Enrekang	0	0	0	0
350	Kab. Gowa	0	0	0	0
351	Kab. Jeneponto	0	0	0	0
352	Kab. Luwu	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
353	Kab. Luwu Utara	0	0	0	0
354	Kab. Maros	0	0	0	0
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0	0	0	0
356	Kota Palopo	0	0	0	0
357	Kab. Luwu Timur	0	0	0	0
358	Kab. Pinrang	0	0	0	0
359	Kab. Sinjai	0	0	0	0
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
361	Kab. Sidenreng Rappang	0	0	0	0
362	Kab. Soppeng	0	0	0	0
363	Kab. Takalar	0	0	0	0
364	Kab. Tana Toraja	0	0	0	0
365	Kab. Wajo	0	0	0	0
366	Kota Parepare	0	0	0	0
367	Kota Makassar	0	0	0	0
368	Kab. Toraja Utara	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
370	Kab. Buton	0	0	0	0
371	Kab. Konawe	0	0	0	0
372	Kab. Kolaka	0	0	0	0
373	Kab. Muna	0	0	0	0
374	Kota Kendari	0	0	0	0
375	Kota Baubau	0	0	0	0
376	Kab. Konawe Selatan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
377	Kab. Bombana	0	0	0	0
378	Kab. Wakatobi	0	0	0	0
379	Kab. Kolaka Utara	0	0	0	0
380	Kab. Konawe Utara	0	0	0	0
381	Kab. Buton Utara	0	0	0	0
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0	0
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	0	0
384	Kab. Muna Barat	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
385	Kab. Buton Tengah	0	0	0	0
386	Kab. Buton Selatan	0	0	0	0
387	Provinsi Bali	0	0	0	0
388	Kab. Badung	0	0	0	0
389	Kab. Bangli	0	0	0	0
390	Kab. Buleleng	0	0	0	0
391	Kab. Gianyar	0	0	0	0
392	Kab. Jembrana	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
393	Kab. Karangasem	0	0	0	0
394	Kab. Klungkung	0	0	0	0
395	Kab. Tabanan	0	0	0	0
396	Kota Denpasar	0	0	0	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
398	Kab. Bima	0	0	0	0
399	Kab. Dompu	0	0	0	0
400	Kab. Lombok Barat	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
401	Kab. Lombok Tengah	0	0	0	0
402	Kab. Lombok Timur	0	0	0	0
403	Kab. Sumbawa	0	12.008.950	0	12.008.950
404	Kota Mataram	0	0	0	0
405	Kota Bima	0	0	0	0
406	Kab. Sumbawa Barat	0	0	0	0
407	Kab. Lombok Utara	0	0	0	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
409	Kab. Alor	0	0	0	0
410	Kab. Belu	0	0	0	0
411	Kab. Ende	0	0	0	0
412	Kab. Flores Timur	0	0	0	0
413	Kab. Kupang	0	0	0	0
414	Kab. Lembata	0	0	0	0
415	Kab. Manggarai	0	0	0	0
416	Kab. Ngada	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
417	Kab. Sikka	0	0	0	0
418	Kab. Sumba Barat	0	0	0	0
419	Kab. Sumba Timur	0	0	0	0
420	Kab. Timor Tengah Selatan	0	0	0	0
421	Kab. Timor Tengah Utara	0	0	0	0
422	Kota Kupang	0	0	0	0
423	Kab. Rote Ndao	0	0	0	0
424	Kab. Manggarai Barat	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
425	Kab. Nagekeo	0	0	0	0
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	0	0
427	Kab. Sumba Tengah	0	0	0	0
428	Kab. Manggarai Timur	0	0	0	0
429	Kab. Sabu Raijua	0	0	0	0
430	Kab. Malaka	0	0	0	0
431	Provinsi Maluku	0	0	0	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
433	Kab. Maluku Tengah	0	0	0	0
434	Kab. Maluku Tenggara	0	0	0	0
435	Kab. Buru	0	0	0	0
436	Kota Ambon	0	0	0	0
437	Kab. Seram Bagian Barat	0	0	0	0
438	Kab. Seram Bagian Timur	0	0	0	0
439	Kab. Kepulauan Aru	0	0	0	0
440	Kota Tual	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	0	0
442	Kab. Buru Selatan	0	0	0	0
443	Provinsi Papua	0	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	0	0	0	0
445	Kab. Jayapura	0	0	0	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0	0
447	Kota Jayapura	0	0	0	0
448	Kab. Sarmi	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
449	Kab. Keerom	0	0	0	0
450	Kab. Waropen	0	0	0	0
451	Kab. Supiori	0	0	0	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	0
453	Provinsi Maluku Utara	0	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	0	0	0
455	Kota Ternate	0	0	0	0
456	Kab. Halmahera Barat	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
457	Kab. Halmahera Timur	0	0	0	0
458	Kab. Halmahera Selatan	0	0	0	0
459	Kab. Halmahera Utara	0	0	0	0
460	Kab. Kepulauan Sula	0	0	0	0
461	Kota Tidore Kepulauan	0	0	0	0
462	Kab. Pulau Morotai	0	0	0	0
463	Kab. Pulau Taliabu	0	0	0	0
464	Provinsi Banten	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
465	Kab. Lebak	0	5.485.000	0	5.485.000
466	Kab. Pandeglang	0	0	0	0
467	Kab. Serang	0	0	0	0
468	Kab. Tangerang	0	0	0	0
469	Kota Cilegon	0	0	0	0
470	Kota Tangerang	0	0	0	0
471	Kota Serang	0	0	0	0
472	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
473	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0
474	Kab. Bangka	0	0	0	0
475	Kab. Belitung	0	0	0	0
476	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0
477	Kab. Bangka Selatan	0	0	0	0
478	Kab. Bangka Tengah	0	0	0	0
479	Kab. Bangka Barat	0	0	0	0
480	Kab. Belitung Timur	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
481	Provinsi Gorontalo	0	0	0	0
482	Kab. Boalemo	0	0	0	0
483	Kab. Gorontalo	0	1.728.500	0	1.728.500
484	Kota Gorontalo	0	0	0	0
485	Kab. Pohuwato	0	0	0	0
486	Kab. Bone Bolango	0	0	0	0
487	Kab. Gorontalo Utara	0	0	0	0
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
489	Kab. Natuna	0	0	0	0
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	0	0	0
491	Kab. Karimun	0	0	0	0
492	Kota Batam	0	0	0	0
493	Kota Tanjung Pinang	0	0	0	0
494	Kab. Lingga	0	0	0	0
495	Kab. Bintan	0	0	0	0
496	Provinsi Papua Barat	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
497	Kab. Fakfak	0	0	0	0
498	Kab. Manokwari	0	0	0	0
499	Kab. Teluk Bintuni	0	0	0	0
500	Kab. Teluk Wondama	0	0	0	0
501	Kab. Kaimana	0	0	0	0
502	Kab. Manokwari Selatan	0	0	0	0
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	0	0
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
505	Kab. Majene	0	0	0	0
506	Kab. Mamuju	0	0	0	0
507	Kab. Polewali Mandar	0	0	0	0
508	Kab. Mamasa	0	0	0	0
509	Kab. Pasangkayu	0	0	0	0
510	Kab. Mamuju Tengah	0	0	0	0
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	0
512	Kab. Bulungan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
513	Kab. Malinau	0	0	0	0
514	Kab. Nunukan	0	0	0	0
515	Kota Tarakan	0	0	0	0
516	Kab. Tana Tidung	0	0	0	0
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	0	0	0
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0	0
520	Kab. Mappi	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
521	Kab. Asmat	0	0	0	0
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0	0
523	Kab. Mimika	0	0	0	0
524	Kab. Nabire	0	0	0	0
525	Kab. Paniai	0	0	0	0
526	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	0
527	Kab. Dogiyai	0	0	0	0
528	Kab. Puncak	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
529	Kab. Intan Jaya	0	0	0	0
530	Kab. Deiyai	0	0	0	0
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	0	0	0	0
533	Kab. Yahukimo	0	0	0	0
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	0	0
535	Kab. Tolikara	0	0	0	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
537	Kab. Yalimo	0	0	0	0
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	0	0
539	Kab. Nduga	0	0	0	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	0	0
541	Kab. Sorong	0	0	0	0
542	Kota Sorong	0	0	0	0
543	Kab. Raja Ampat	0	0	0	0
544	Kab. Tambrauw	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
545	Kab. Maybrat	0	0	0	0
546	Kab. Sorong Selatan	0	0	0	0
	JUMLAH NASIONAL	2.607.618.000	133.069.810	6.000.000	2.746.687.810

V.15. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
		DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA	DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	DANA OTSUS PAPUA BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS PAPUA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Provinsi Aceh	1.336.817.102	1.792.985.129	-	-	-	-
2	Kab. Aceh Barat	-	38.440.784	-	-	-	-
3	Kab. Aceh Besar	-	45.012.070	-	-	-	-
4	Kab. Aceh Selatan	-	38.966.830	-	-	-	-
5	Kab. Aceh Singkil	-	31.517.803	-	-	-	-
6	Kab. Aceh Tengah	-	38.634.066	-	-	-	-
7	Kab. Aceh Tenggara	-	38.549.140	-	-	-	-
8	Kab. Aceh Timur	-	51.082.553	-	-	-	-
9	Kab. Aceh Utara	-	50.610.014	-	-	-	-
10	Kab. Bireuen	-	40.173.283	-	-	-	-
11	Kab. Pidie	-	46.201.624	-	-	-	-

V.15. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
		DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA	DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	DANA OTSUS PAPUA BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS PAPUA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
12	Kab. Simeulue	-	34.002.156	-	-	-	-
13	Kota Banda Aceh	-	49.050.501	-	-	-	-
14	Kota Sabang	-	28.059.947	-	-	-	-
15	Kota Langsa	-	28.331.056	-	-	-	-
16	Kota Lhokseumawe	-	28.371.931	-	-	-	-
17	Kab. Gayo Lues	-	38.375.671	-	-	-	-
18	Kab. Aceh Barat Daya	-	32.056.363	-	-	-	-
19	Kab. Aceh Jaya	-	38.020.353	-	-	-	-
20	Kab. Nagan Raya	-	39.215.516	-	-	-	-
21	Kab. Aceh Tamiang	-	36.830.412	-	-	-	-
22	Kab. Bener Meriah	-	35.879.660	-	-	-	-

V.15. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
		DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA	DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	DANA OTSUS PAPUA BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS PAPUA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
23	Kab. Pidie Jaya	-	33.357.125	-	-	-	-
24	Kota Subulussalam	-	29.652.616	-	-	-	-
25	Provinsi DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	1.000.000.000
26	Provinsi Papua	-	-	196.504.108	251.193.501	106.928.086	-
27	Kab. Biak Numfor	-	-	67.496.755	96.955.066	6.034.077	-
28	Kab. Jayapura	-	-	62.399.401	90.902.132	11.399.973	-
29	Kab. Kepulauan Yapen	-	-	47.997.200	56.183.640	9.260.894	-
30	Kota Jayapura	-	-	71.793.177	91.874.508	5.102.380	-
31	Kab. Sarmi	-	-	45.565.941	58.999.002	5.582.962	-
32	Kab. Keerom	-	-	33.251.085	35.158.987	7.923.179	-
33	Kab. Waropen	-	-	45.673.361	58.905.510	4.463.016	-

V.15. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
		DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA	DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	DANA OTSUS PAPUA BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS PAPUA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
34	Kab. Supiori	-	-	34.639.744	46.107.243	5.143.900	-
35	Kab. Mamberamo Raya	-	-	49.692.921	51.032.082	16.375.009	-
36	Provinsi Papua Barat	-	-	139.593.087	160.564.812	102.207.662	-
37	Kab. Fak Fak	-	-	47.793.842	69.898.378	5.294.723	-
38	Kab. Manokwari	-	-	40.776.074	44.052.042	4.996.764	-
39	Kab. Teluk Bintuni	-	-	55.052.003	67.235.039	7.921.259	-
40	Kab. Teluk Wondama	-	-	47.280.354	62.249.811	8.595.706	-
41	Kab. Kaimana	-	-	40.334.860	56.437.321	5.786.065	-
42	Kab. Manokwari Selatan	-	-	39.165.401	20.853.031	3.478.221	-
43	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	55.314.668	53.925.607	7.730.546	-
44	Provinsi Papua Selatan	-	-	65.551.436	129.360.827	110.297.631	-

V.15. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
		DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA	DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	DANA OTSUS PAPUA BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS PAPUA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
45	Kab. Merauke	-	-	119.820.935	145.150.980	8.127.866	-
46	Kab. Boven Digoel	-	-	100.128.641	100.639.190	7.696.292	-
47	Kab. Mappi	-	-	97.173.402	109.919.838	22.968.009	-
48	Kab. Asmat	-	-	139.637.246	158.223.649	8.478.247	-
49	Provinsi Papua Tengah	-	-	92.903.936	119.907.122	92.428.433	-
50	Kab. Mimika	-	-	69.008.385	117.860.917	9.266.360	-
51	Kab. Nabire	-	-	105.392.399	112.797.679	8.049.795	-
52	Kab. Paniai	-	-	103.159.091	111.868.583	8.218.927	-
53	Kab. Puncak Jaya	-	-	84.364.313	122.026.234	12.264.246	-
54	Kab. Dogiyai	-	-	64.696.504	72.119.959	11.633.624	-
55	Kab. Puncak	-	-	100.305.819	143.005.026	28.479.319	-

V.15. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
		DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA	DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	DANA OTSUS PAPUA BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS PAPUA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
56	Kab. Intan Jaya	-	-	77.496.537	90.319.586	9.691.024	-
57	Kab. Deiyai	-	-	70.203.086	84.790.983	4.825.139	-
58	Provinsi Papua Pegunungan	-	-	113.797.557	314.014.859	135.796.890	-
59	Kab. Jayawijaya	-	-	136.608.372	151.519.276	2.033.580	-
60	Kab. Yahukimo	-	-	216.077.936	234.806.992	22.675.785	-
61	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	139.422.013	166.053.473	10.878.221	-
62	Kab. Tolikara	-	-	133.176.669	180.717.635	6.037.698	-
63	Kab. Mamberamo Tengah	-	-	63.586.646	87.708.490	3.376.203	-
64	Kab. Yalimo	-	-	99.952.602	95.154.207	2.327.329	-
65	Kab. Lanny Jaya	-	-	120.182.174	133.235.733	3.930.167	-
66	Kab. Nduga	-	-	82.911.361	96.948.241	6.939.684	-

V.15. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
		DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA	DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	DANA OTSUS PAPUA BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS PAPUA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
67	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	120.859.697	119.394.676	41.806.533	-
68	Kab. Sorong	-	-	65.133.202	79.850.323	13.746.268	-
69	Kota Sorong	-	-	71.565.211	39.173.239	5.155.123	-
70	Kab. Raja Ampat	-	-	71.563.352	107.452.335	24.921.981	-
71	Kab. Sorong Selatan	-	-	43.500.505	55.998.725	19.810.185	-
72	Kab. Maybrat	-	-	48.688.222	64.541.111	17.956.911	-
73	Kab. Tambrauw	-	-	63.002.474	83.154.530	15.958.108	-
JUMLAH		1.336.817.102	2.663.376.603	4.000.193.705	5.000.242.130	1.000.000.000	1.000.000.000

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Kab. Aceh Barat	321	139.324.275	8.748.950
2	Kab. Aceh Besar	603	268.063.520	14.105.450
3	Kab. Aceh Selatan	260	119.368.050	8.927.520
4	Kab. Aceh Singkil	116	55.016.795	3.213.900
5	Kab. Aceh Tengah	295	132.883.370	10.043.460
6	Kab. Aceh Tenggara	385	169.393.755	12.944.904
7	Kab. Aceh Timur	513	234.728.320	14.953.596
8	Kab. Aceh Utara	852	381.735.665	19.819.050
9	Kab. Bireuen	609	274.896.580	17.855.040
10	Kab. Pidie	730	321.329.115	16.962.250
11	Kab. Simeulue	138	61.443.800	4.686.948
12	Kota Banda Aceh	90	49.037.575	3.347.820

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
1	Kab. Aceh Barat	1.930.789	47.471.060	197.475.074
2	Kab. Aceh Besar	165.976	78.591.272	360.926.218
3	Kab. Aceh Selatan	2.874.020	38.313.290	169.482.880
4	Kab. Aceh Singkil	1.767.642	21.461.630	81.459.967
5	Kab. Aceh Tengah	414.940	43.463.896	186.805.666
6	Kab. Aceh Tenggara	331.952	51.142.958	233.813.569
7	Kab. Aceh Timur	1.507.551	79.161.662	330.351.129
8	Kab. Aceh Utara	6.331.982	119.515.740	527.402.437
9	Kab. Bireuen	3.261.426	81.353.336	377.366.382
10	Kab. Pidie	1.197.664	94.093.556	433.582.585
11	Kab. Simeulue	677.671	21.353.532	88.161.951
12	Kota Banda Aceh	-	15.546.816	67.932.211

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
13	Kota Sabang	18	9.299.500	714.200
14	Kota Langsa	66	34.925.620	1.964.050
15	Kota Lhokseumawe	68	36.664.460	2.455.068
16	Kab. Gayo Lues	136	61.090.450	4.686.948
17	Kab. Aceh Barat Daya	152	71.191.235	4.106.650
18	Kab. Aceh Jaya	172	75.359.765	5.802.888
19	Kab. Nagan Raya	222	99.896.065	6.070.700
20	Kab. Aceh Tamiang	215	103.508.580	7.365.204
21	Kab. Bener Meriah	232	104.260.690	7.811.580
22	Kab. Pidie Jaya	222	100.127.000	7.588.392
23	Kota Subulussalam	82	39.022.585	2.499.700
24	Kab. Asahan	177	98.468.705	6.026.076

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
13	Kota Sabang	-	3.495.024	13.508.724
14	Kota Langsa	82.988	13.309.462	50.282.120
15	Kota Lhokseumawe	-	13.743.964	52.863.492
16	Kab. Gayo Lues	746.892	23.627.444	90.151.734
17	Kab. Aceh Barat Daya	580.916	23.008.836	98.887.637
18	Kab. Aceh Jaya	414.940	22.869.010	104.446.603
19	Kab. Nagan Raya	829.880	33.992.508	140.789.153
20	Kab. Aceh Tamiang	1.327.808	36.357.112	148.558.704
21	Kab. Bener Meriah	912.868	33.684.896	146.670.034
22	Kab. Pidie Jaya	437.005	29.175.210	137.327.607
23	Kota Subulussalam	589.214	15.500.984	57.612.483
24	Kab. Asahan	497.928	44.159.528	149.152.237

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
25	Kab. Dairi	161	80.632.525	5.579.700
26	Kab. Deli Serdang	380	207.072.885	12.944.904
27	Kab. Karo	259	123.636.485	8.704.332
28	Kab. Labuhanbatu	75	42.230.840	2.142.600
29	Kab. Langkat	240	134.076.590	8.257.956
30	Kab. Mandailing Natal	377	176.293.425	10.177.350
31	Kab. Nias	170	77.488.805	5.802.888
32	Kab. Simalungun	386	198.896.910	12.944.904
33	Kab. Tapanuli Selatan	211	99.107.240	5.713.600
34	Kab. Tapanuli Tengah	159	76.411.300	5.356.512
35	Kab. Tapanuli Utara	241	115.607.080	6.606.350
36	Kab. Toba	231	105.815.905	7.811.580

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
25	Kab. Dairi	912.868	28.252.668	115.377.761
26	Kab. Deli Serdang	82.988	98.451.110	318.551.887
27	Kab. Karo	-	36.182.608	168.523.425
28	Kab. Labuhanbatu	-	22.446.434	66.819.874
29	Kab. Langkat	-	62.477.860	204.812.406
30	Kab. Mandailing Natal	6.904.198	60.755.284	254.130.257
31	Kab. Nias	6.497.942	30.138.614	119.928.249
32	Kab. Simalungun	248.964	69.482.876	281.573.654
33	Kab. Tapanuli Selatan	82.988	30.646.012	135.549.840
34	Kab. Tapanuli Tengah	5.444.000	28.084.352	115.296.164
35	Kab. Tapanuli Utara	1.109.207	40.913.182	164.235.819
36	Kab. Toba	1.361.000	33.890.204	148.878.689

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
37	Kota Padang Sidempuan	42	20.409.585	1.428.400
38	Kab. Pakpak Bharat	52	24.485.545	2.008.692
39	Kab. Nias Selatan	459	207.637.990	11.605.750
40	Kab. Humbang Hasundutan	153	73.850.295	5.133.324
41	Kab. Serdang Bedagai	237	123.674.915	6.427.800
42	Kab. Samosir	128	60.312.085	4.463.760
43	Kab. Batu Bara	141	76.983.315	3.928.100
44	Kab. Padang Lawas	303	136.086.420	8.213.300
45	Kab. Padang Lawas Utara	386	167.954.075	10.355.900
46	Kab. Labuhanbatu Selatan	52	30.720.175	1.606.950
47	Kab. Labuhanbatu Utara	82	46.354.060	3.124.632
48	Kab. Nias Utara	112	53.906.000	3.035.350

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
37	Kota Padang Sidempuan	-	5.550.788	27.388.773
38	Kab. Pakpak Bharat	165.976	8.023.776	34.683.989
39	Kab. Nias Selatan	25.775.846	87.584.766	332.604.352
40	Kab. Humbang Hasundutan	1.161.832	25.652.496	105.797.947
41	Kab. Serdang Bedagai	-	48.793.934	178.896.649
42	Kab. Samosir	663.904	19.764.708	85.204.457
43	Kab. Batu Bara	-	31.168.408	112.079.823
44	Kab. Padang Lawas	3.590.541	44.627.828	192.518.089
45	Kab. Padang Lawas Utara	3.479.830	60.657.294	242.447.099
46	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	19.003.840	51.330.965
47	Kab. Labuhanbatu Utara	331.952	24.277.496	74.088.140
48	Kab. Nias Utara	4.890.618	24.447.302	86.279.270

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
49	Kab. Nias Barat	105	48.628.205	3.571.008
50	Kota Gunungsitoli	98	47.045.080	2.856.800
51	Kab. Lima Puluh Kota	79	47.094.025	2.321.150
52	Kab. Agam	92	54.297.800	3.347.820
53	Kab. Kepulauan Mentawai	43	22.144.945	1.785.504
54	Kab. Padang Pariaman	103	59.243.215	3.571.008
55	Kab. Pasaman	62	36.989.810	2.231.880
56	Kab. Pesisir Selatan	182	97.851.270	6.249.264
57	Kab. Sijunjung	62	34.911.635	1.785.500
58	Kab. Solok	74	42.689.175	2.678.256
59	Kab. Tanah Datar	75	43.847.245	2.678.256
60	Kota Sawahlunto	27	13.718.355	1.115.940

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
49	Kab. Nias Barat	5.856.103	18.737.280	76.792.596
50	Kota Gunungsitoli	746.892	16.677.034	67.325.806
51	Kab. Lima Puluh Kota	-	24.754.332	74.169.507
52	Kab. Agam	-	28.416.536	86.062.156
53	Kab. Kepulauan Mentawai	884.948	15.972.974	40.788.371
54	Kab. Padang Pariaman	-	25.981.234	88.795.457
55	Kab. Pasaman	-	21.043.302	60.264.992
56	Kab. Pesisir Selatan	-	41.531.716	145.632.250
57	Kab. Sijunjung	-	17.461.426	54.158.561
58	Kab. Solok	179.743	25.635.316	71.182.490
59	Kab. Tanah Datar	-	19.769.136	66.294.637
60	Kota Sawahlunto	-	3.885.826	18.720.121

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
61	Kota Pariaman	55	27.093.835	2.008.692
62	Kab. Pasaman Barat	90	53.598.035	3.347.820
63	Kab. Dharmasraya	52	30.316.075	2.008.692
64	Kab. Solok Selatan	39	22.246.375	1.562.316
65	Kab. Bengkalis	136	73.675.350	4.686.948
66	Kab. Indragiri Hilir	197	101.598.310	6.695.640
67	Kab. Indragiri Hulu	178	91.371.685	6.026.076
68	Kab. Kampar	242	130.562.175	6.606.350
69	Kab. Kuantan Singingi	218	106.809.605	5.892.150
70	Kab. Pelalawan	104	55.321.245	2.856.800
71	Kab. Rokan Hilir	159	87.956.955	5.356.512
72	Kab. Rokan Hulu	139	77.611.330	3.749.550

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
61	Kota Pariaman	-	7.021.230	36.123.757
62	Kab. Pasaman Barat	82.988	29.033.224	86.062.067
63	Kab. Dharmasraya	-	16.211.682	48.536.449
64	Kab. Solok Selatan	-	13.062.846	36.871.537
65	Kab. Bengkalis	-	38.785.824	117.148.122
66	Kab. Indragiri Hilir	-	47.174.428	155.468.378
67	Kab. Indragiri Hulu	-	38.171.876	135.569.637
68	Kab. Kampar	-	63.280.904	200.449.429
69	Kab. Kuantan Singingi	-	39.044.574	151.746.329
70	Kab. Pelalawan	-	32.199.442	90.377.487
71	Kab. Rokan Hilir	96.755	42.807.572	136.217.794
72	Kab. Rokan Hulu	-	40.453.726	121.814.606

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
73	Kab. Siak	122	65.313.485	4.240.572
74	Kab. Kepulauan Meranti	96	47.846.315	2.856.800
75	Kab. Batang Hari	110	56.323.645	3.035.350
76	Kab. Bungo	141	72.365.070	4.910.136
77	Kab. Kerinci	285	132.617.630	9.597.084
78	Kab. Merangin	205	99.952.190	6.918.828
79	Kab. Muaro Jambi	150	79.554.865	5.133.324
80	Kab. Sarolangun	149	74.298.095	4.106.650
81	Kab. Tanjung Jabung Barat	114	57.607.625	3.213.900
82	Kab. Tanjung Jabung Timur	73	37.663.360	2.142.600
83	Kab. Tebo	122	65.255.730	4.240.572
84	Kota Sungai Penuh	65	31.631.630	2.455.068

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
73	Kab. Siak	-	31.240.702	100.794.759
74	Kab. Kepulauan Meranti	-	25.864.850	76.567.965
75	Kab. Batang Hari	-	24.417.530	83.776.525
76	Kab. Bungo	82.988	27.778.646	105.136.840
77	Kab. Kerinci	359.486	38.158.030	180.732.230
78	Kab. Merangin	82.988	39.637.366	146.591.372
79	Kab. Muaro Jambi	-	31.913.834	116.602.023
80	Kab. Sarolangun	331.952	30.138.636	108.875.333
81	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	24.035.630	84.857.155
82	Kab. Tanjung Jabung Timur	580.916	18.288.662	58.675.538
83	Kab. Tebo	-	28.501.326	97.997.628
84	Kota Sungai Penuh	-	7.909.986	41.996.684

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
85	Kab. Lahat	360	166.651.005	9.820.250
86	Kab. Musi Banyuasin	229	122.261.600	7.811.580
87	Kab. Musi Rawas	186	95.382.990	6.249.264
88	Kab. Muara Enim	246	127.170.275	8.257.956
89	Kab. Ogan Komering Ilir	314	163.026.560	10.713.024
90	Kab. Ogan Komering Ulu	143	72.314.340	4.910.136
91	Kota Prabumulih	12	6.161.190	669.564
92	Kab. Banyuasin	288	149.888.995	9.820.272
93	Kab. Ogan Ilir	227	113.364.515	6.249.250
94	Kab. OKU Timur	305	158.030.485	10.266.648
95	Kab. OKU Selatan	252	122.515.245	8.481.144
96	Kab. Empat Lawang	147	74.637.500	5.133.324

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
85	Kab. Lahat	-	55.282.542	231.753.797
86	Kab. Musi Banyuasin	82.988	65.007.132	195.163.300
87	Kab. Musi Rawas	-	41.272.762	142.905.016
88	Kab. Muara Enim	-	53.283.878	188.712.109
89	Kab. Ogan Komering Ilir	-	81.460.422	255.200.006
90	Kab. Ogan Komering Ulu	248.964	29.875.564	107.349.004
91	Kota Prabumulih	-	2.245.202	9.075.956
92	Kab. Banyuasin	-	69.639.182	229.348.449
93	Kab. Ogan Ilir	82.988	43.326.866	163.023.619
94	Kab. OKU Timur	-	58.411.364	226.708.497
95	Kab. OKU Selatan	1.327.808	43.698.160	176.022.357
96	Kab. Empat Lawang	-	27.822.018	107.592.842

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
97	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	65	34.518.025	2.455.068
98	Kab. Musi Rawas Utara	82	42.428.600	2.499.700
99	Kab. Bengkulu Selatan	142	65.556.575	4.910.136
100	Kab. Bengkulu Utara	215	102.931.270	7.365.204
101	Kab. Rejang Lebong	122	59.944.760	4.240.572
102	Kab. Kaur	192	85.763.140	6.472.452
103	Kab. Seluma	182	84.862.335	6.249.264
104	Kab. Mukomuko	148	71.061.815	5.133.324
105	Kab. Lebong	93	43.621.605	2.678.250
106	Kab. Kepahiang	105	49.378.690	3.571.008
107	Kab. Bengkulu Tengah	142	65.036.990	4.910.136
108	Kab. Lampung Barat	131	67.250.005	4.463.760

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
97	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	14.699.814	51.672.907
98	Kab. Musi Rawas Utara	-	22.453.568	67.381.868
99	Kab. Bengkulu Selatan	-	22.736.182	93.202.893
100	Kab. Bengkulu Utara	165.976	38.489.798	148.952.248
101	Kab. Rejang Lebong	248.964	23.253.804	87.688.100
102	Kab. Kaur	248.964	27.967.190	120.451.746
103	Kab. Seluma	843.647	31.914.432	123.869.678
104	Kab. Mukomuko	-	26.351.972	102.547.111
105	Kab. Lebong	82.988	14.633.086	61.015.929
106	Kab. Kepahiang	-	16.323.982	69.273.680
107	Kab. Bengkulu Tengah	-	21.605.762	91.552.888
108	Kab. Lampung Barat	-	26.484.310	98.198.075

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
109	Kab. Lampung Selatan	256	145.620.485	8.704.332
110	Kab. Lampung Tengah	301	174.411.055	8.213.300
111	Kab. Lampung Utara	232	120.944.350	7.811.580
112	Kab. Lampung Timur	264	153.037.620	7.142.000
113	Kab. Tanggamus	299	153.275.770	10.043.460
114	Kab. Tulang Bawang	147	78.274.375	4.106.650
115	Kab. Way Kanan	221	113.689.830	7.588.392
116	Kab. Pesawaran	148	81.914.720	5.133.324
117	Kab. Pringsewu	126	69.657.075	4.240.572
118	Kab. Mesuji	105	54.747.480	3.571.008
119	Kab. Tulang Bawang Barat	100	54.268.125	3.571.008
120	Kab. Pesisir Barat	116	56.113.665	4.017.384

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
109	Kab. Lampung Selatan	-	76.494.736	230.819.553
110	Kab. Lampung Tengah	-	84.372.918	266.997.273
111	Kab. Lampung Utara	-	54.638.544	183.394.474
112	Kab. Lampung Timur	-	78.464.760	238.644.380
113	Kab. Tanggamus	-	58.905.334	222.224.564
114	Kab. Tulang Bawang	-	30.898.098	113.279.123
115	Kab. Way Kanan	-	43.751.084	165.029.306
116	Kab. Pesawaran	-	35.992.430	123.040.474
117	Kab. Pringsewu	-	27.109.726	101.007.373
118	Kab. Mesuji	-	20.195.674	78.514.162
119	Kab. Tulang Bawang Barat	-	20.331.876	78.171.009
120	Kab. Pesisir Barat	96.755	21.342.808	81.570.612

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
121	Kab. Bandung	270	181.575.945	9.150.708
122	Kab. Bekasi	179	119.430.750	4.820.850
123	Kab. Bogor	416	279.300.900	13.168.092
124	Kab. Ciamis	258	153.536.160	8.704.332
125	Kab. Cianjur	354	221.587.145	12.052.152
126	Kab. Cirebon	412	253.713.855	12.944.904
127	Kab. Garut	421	262.404.650	13.168.092
128	Kab. Indramayu	309	191.122.455	8.391.850
129	Kab. Karawang	297	186.635.285	10.043.460
130	Kab. Kuningan	361	197.770.210	12.275.340
131	Kab. Majalengka	330	189.637.365	11.159.400
132	Kab. Purwakarta	183	109.227.100	6.249.264

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
121	Kab. Bandung	193.510	153.117.296	344.037.459
122	Kab. Bekasi	-	115.307.022	239.558.622
123	Kab. Bogor	-	237.039.162	529.508.154
124	Kab. Ciamis	-	67.710.566	229.951.058
125	Kab. Cianjur	82.988	140.979.980	374.702.265
126	Kab. Cirebon	96.755	139.298.826	406.054.340
127	Kab. Garut	96.755	148.897.956	424.567.453
128	Kab. Indramayu	-	111.942.504	311.456.809
129	Kab. Karawang	-	111.327.582	308.006.327
130	Kab. Kuningan	-	83.062.472	293.108.022
131	Kab. Majalengka	-	83.088.500	283.885.265
132	Kab. Purwakarta	-	50.937.446	166.413.810

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
133	Kab. Subang	245	151.931.935	8.257.956
134	Kab. Sukabumi	381	240.847.400	12.944.904
135	Kab. Sumedang	270	155.598.690	9.150.708
136	Kab. Tasikmalaya	351	216.669.835	9.463.150
137	Kota Banjar	16	9.985.235	669.564
138	Kab. Bandung Barat	165	109.683.490	5.579.700
139	Kab. Pangandaran	93	55.455.850	3.347.820
140	Kab. Banjarnegara	266	151.081.945	8.927.520
141	Kab. Banyumas	301	181.684.780	10.266.648
142	Kab. Batang	239	132.110.385	8.034.768
143	Kab. Blora	271	146.308.055	9.150.708
144	Kab. Boyolali	261	150.198.480	8.927.520

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
133	Kab. Subang	-	81.451.486	241.641.377
134	Kab. Sukabumi	-	133.240.328	387.032.632
135	Kab. Sumedang	-	69.426.170	234.175.568
136	Kab. Tasikmalaya	-	110.161.182	336.294.167
137	Kota Banjar	-	5.175.992	15.830.791
138	Kab. Bandung Barat	-	96.795.346	212.058.536
139	Kab. Pangandaran	-	25.779.274	84.582.944
140	Kab. Banjarnegara	-	76.387.908	236.397.373
141	Kab. Banyumas	-	101.632.024	293.583.452
142	Kab. Batang	-	51.751.892	191.897.045
143	Kab. Blora	-	62.389.848	217.848.611
144	Kab. Boyolali	-	65.996.888	225.122.888

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
145	Kab. Brebes	292	180.210.005	7.856.200
146	Kab. Cilacap	269	166.678.885	9.150.708
147	Kab. Demak	243	144.131.695	8.257.956
148	Kab. Grobogan	273	163.748.855	9.150.708
149	Kab. Jepara	184	113.329.280	6.249.264
150	Kab. Karanganyar	162	97.434.770	5.579.700
151	Kab. Kebumen	449	246.165.800	14.060.844
152	Kab. Kendal	266	150.562.370	8.927.520
153	Kab. Klaten	391	217.502.740	13.168.092
154	Kab. Kudus	123	76.112.035	3.392.450
155	Kab. Magelang	367	204.891.740	9.998.800
156	Kab. Pati	401	222.329.210	12.721.716

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
145	Kab. Brebes	-	129.937.374	318.003.579
146	Kab. Cilacap	-	106.764.292	282.593.885
147	Kab. Demak	248.964	74.508.832	227.147.447
148	Kab. Grobogan	-	86.417.652	259.317.215
149	Kab. Jepara	-	59.428.850	179.007.394
150	Kab. Karanganyar	-	49.658.250	152.672.720
151	Kab. Kebumen	-	113.071.146	373.297.790
152	Kab. Kendal	82.988	64.106.962	223.679.840
153	Kab. Klaten	-	87.661.774	318.332.606
154	Kab. Kudus	-	40.137.436	119.641.921
155	Kab. Magelang	-	89.287.088	304.177.628
156	Kab. Pati	-	89.333.130	324.384.056

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
157	Kab. Pekalongan	272	152.257.465	9.150.708
158	Kab. Pemalang	212	130.110.690	7.142.016
159	Kab. Purbalingga	224	130.903.190	7.588.392
160	Kab. Purworejo	469	227.762.680	14.730.408
161	Kab. Rembang	287	149.250.520	9.820.272
162	Kab. Semarang	208	119.705.710	7.142.016
163	Kab. Sragen	196	116.315.415	6.695.640
164	Kab. Sukoharjo	150	90.176.770	5.133.324
165	Kab. Tegal	281	172.955.520	9.597.084
166	Kab. Temanggung	266	143.115.505	8.927.520
167	Kab. Wonogiri	251	141.504.255	8.481.144
168	Kab. Wonosobo	236	131.118.460	6.427.800

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
157	Kab. Pekalongan	-	64.042.102	225.450.275
158	Kab. Pemalang	82.988	94.432.376	231.768.070
159	Kab. Purbalingga	-	69.160.826	207.652.408
160	Kab. Purworejo	248.964	74.288.720	317.030.772
161	Kab. Rembang	-	55.516.530	214.587.322
162	Kab. Semarang	-	50.604.008	177.451.734
163	Kab. Sragen	-	60.315.242	183.326.297
164	Kab. Sukoharjo	-	41.494.314	136.804.408
165	Kab. Tegal	594.683	88.255.684	271.402.971
166	Kab. Temanggung	-	53.106.758	205.149.783
167	Kab. Wonogiri	-	63.304.168	213.289.567
168	Kab. Wonosobo	-	63.048.372	200.594.632

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
169	Kab. Bantul	75	49.966.305	2.678.256
170	Kab. Gunung Kidul	144	86.634.350	4.910.136
171	Kab. Kulon Progo	87	51.105.270	3.124.632
172	Kab. Sleman	86	57.163.105	3.124.632
173	Kab. Bangkalan	273	151.741.430	9.150.708
174	Kab. Banyuwangi	189	120.043.155	6.472.452
175	Kab. Blitar	220	131.004.645	7.588.392
176	Kab. Bojonegoro	419	230.243.220	13.168.092
177	Kab. Bondowoso	209	117.226.940	7.142.016
178	Kab. Gresik	330	184.153.275	11.159.400
179	Kab. Jember	226	148.286.160	7.588.392
180	Kab. Jombang	302	177.012.335	10.266.648

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
169	Kab. Bantul	-	50.045.838	102.690.399
170	Kab. Gunung Kidul	-	53.077.826	144.622.312
171	Kab. Kulon Progo	-	28.403.200	82.633.102
172	Kab. Sleman	-	48.812.154	109.099.891
173	Kab. Bangkalan	-	82.536.058	243.428.196
174	Kab. Banyuwangi	-	72.750.696	199.266.303
175	Kab. Blitar	-	61.521.332	200.114.369
176	Kab. Bojonegoro	-	98.832.768	342.244.080
177	Kab. Bondowoso	-	51.141.520	175.510.476
178	Kab. Gresik	-	81.259.868	276.572.543
179	Kab. Jember	-	111.707.740	267.582.292
180	Kab. Jombang	-	76.948.354	264.227.337

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
181	Kab. Kediri	343	202.440.725	11.605.776
182	Kab. Lamongan	462	247.596.850	14.507.220
183	Kab. Lumajang	198	118.920.185	6.695.640
184	Kab. Madiun	198	111.357.875	6.695.640
185	Kab. Magetan	207	112.313.100	7.142.016
186	Kab. Malang	378	236.507.290	12.721.716
187	Kab. Mojokerto	299	170.536.270	10.043.460
188	Kab. Nganjuk	264	150.382.200	8.927.520
189	Kab. Ngawi	213	122.436.440	7.142.016
190	Kab. Pacitan	167	93.238.235	5.802.888
191	Kab. Pamekasan	178	102.917.225	6.026.076
192	Kab. Pasuruan	341	198.161.915	11.605.776

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
181	Kab. Kediri	-	100.444.136	314.490.637
182	Kab. Lamongan	-	100.038.066	362.142.136
183	Kab. Lumajang	-	60.407.460	186.023.285
184	Kab. Madiun	-	45.768.634	163.822.149
185	Kab. Magetan	-	40.823.214	160.278.330
186	Kab. Malang	-	139.599.250	388.828.256
187	Kab. Mojokerto	-	71.019.656	251.599.386
188	Kab. Nganjuk	-	67.096.922	226.406.642
189	Kab. Ngawi	-	60.996.112	190.574.568
190	Kab. Pacitan	-	41.980.524	141.021.647
191	Kab. Pamekasan	-	56.932.414	165.875.715
192	Kab. Pasuruan	-	89.107.470	298.875.161

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
193	Kab. Ponorogo	281	153.732.290	9.597.084
194	Kab. Probolinggo	325	183.558.450	10.936.212
195	Kab. Sampang	180	108.062.045	6.249.264
196	Kab. Sidoarjo	318	192.366.230	10.713.024
197	Kab. Situbondo	132	77.817.665	3.571.000
198	Kab. Sumenep	330	182.652.305	8.927.500
199	Kab. Trenggalek	152	89.837.415	5.133.324
200	Kab. Tuban	311	176.466.620	10.489.836
201	Kab. Tulungagung	257	148.048.505	8.704.332
202	Kota Batu	19	12.362.580	892.752
203	Kab. Bengkayang	122	62.427.035	4.240.572
204	Kab. Landak	156	82.750.980	5.356.512

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
193	Kab. Ponorogo	-	60.230.984	223.560.358
194	Kab. Probolinggo	-	90.340.690	284.835.352
195	Kab. Sampang	-	74.132.846	188.444.155
196	Kab. Sidoarjo	-	85.151.560	288.230.814
197	Kab. Situbondo	-	38.491.268	119.879.933
198	Kab. Sumenep	-	94.339.558	285.919.363
199	Kab. Trenggalek	-	43.898.890	138.869.629
200	Kab. Tuban	-	85.380.950	272.337.406
201	Kab. Tulungagung	-	60.308.686	217.061.523
202	Kota Batu	-	6.473.604	19.728.936
203	Kab. Bengkayang	96.755	28.043.604	94.807.966
204	Kab. Landak	-	43.710.454	131.817.946

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
205	Kab. Kapuas Hulu	278	128.494.395	9.373.896
206	Kab. Ketapang	253	127.136.970	8.481.144
207	Kab. Mempawah	60	34.211.890	2.231.880
208	Kab. Sambas	195	108.518.700	5.356.500
209	Kab. Sanggau	163	88.144.205	4.463.750
210	Kab. Sintang	390	181.592.175	13.168.092
211	Kab. Sekadau	94	49.224.820	3.571.008
212	Kab. Melawi	169	81.006.820	5.802.888
213	Kab. Kayong Utara	43	23.299.505	1.785.504
214	Kab. Kubu Raya	123	69.415.610	4.240.572
215	Kab. Barito Selatan	86	39.498.370	3.124.632
216	Kab. Barito Utara	93	42.524.725	2.678.250

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
205	Kab. Kapuas Hulu	-	69.735.612	207.603.903
206	Kab. Ketapang	-	77.610.064	213.228.178
207	Kab. Mempawah	-	15.578.108	52.021.878
208	Kab. Sambas	-	45.708.148	159.583.348
209	Kab. Sanggau	-	45.484.170	138.092.125
210	Kab. Sintang	-	91.230.836	285.991.103
211	Kab. Sekadau	-	24.171.030	76.966.858
212	Kab. Melawi	-	40.471.064	127.280.772
213	Kab. Kayong Utara	-	12.940.862	38.025.871
214	Kab. Kubu Raya	-	41.524.370	115.180.552
215	Kab. Barito Selatan	-	17.114.084	59.737.086
216	Kab. Barito Utara	-	21.904.176	67.107.151

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
217	Kab. Kapuas	214	103.966.930	5.892.150
218	Kab. Kotawaringin Barat	81	40.693.205	2.321.150
219	Kab. Kotawaringin Timur	168	81.926.965	5.802.888
220	Kab. Katingan	154	70.043.580	5.356.512
221	Kab. Seruyan	97	45.771.490	2.856.800
222	Kab. Sukamara	29	14.244.905	892.750
223	Kab. Lamandau	85	39.206.225	3.124.632
224	Kab. Gunung Mas	114	51.315.150	4.017.384
225	Kab. Pulang Pisau	95	45.649.100	2.856.800
226	Kab. Murung Raya	116	51.610.760	3.213.900
227	Kab. Barito Timur	100	45.955.190	3.571.008
228	Kab. Banjar	277	137.554.380	9.373.896

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
217	Kab. Kapuas	497.928	51.250.248	161.607.256
218	Kab. Kotawaringin Barat	-	19.656.322	62.670.677
219	Kab. Kotawaringin Timur	-	40.564.184	128.294.037
220	Kab. Katingan	96.755	40.659.952	116.156.799
221	Kab. Seruyan	-	28.071.318	76.699.608
222	Kab. Sukamara	-	6.511.826	21.649.481
223	Kab. Lamandau	-	17.794.190	60.125.047
224	Kab. Gunung Mas	414.940	23.196.192	78.943.666
225	Kab. Pulang Pisau	-	19.197.140	67.703.040
226	Kab. Murung Raya	248.964	31.334.348	86.407.972
227	Kab. Barito Timur	-	15.354.028	64.880.226
228	Kab. Banjar	-	45.009.828	191.938.104

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
229	Kab. Barito Kuala	195	95.529.905	6.695.640
230	Kab. Hulu Sungai Selatan	144	70.759.220	3.928.100
231	Kab. Hulu Sungai Tengah	161	79.189.320	5.579.700
232	Kab. Hulu Sungai Utara	214	100.387.765	7.365.204
233	Kab. Kotabaru	198	96.637.190	6.695.640
234	Kab. Tabalong	121	60.518.575	3.392.450
235	Kab. Tanah Laut	130	68.689.730	3.571.000
236	Kab. Tapin	126	60.016.455	3.392.450
237	Kab. Balangan	153	70.328.775	4.106.650
238	Kab. Tanah Bumbu	152	77.310.455	5.133.324
239	Kab. Berau	100	49.130.270	3.571.008
240	Kab. Kutai Kartanegara	193	102.219.320	5.177.950

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
229	Kab. Barito Kuala	-	29.982.232	132.207.777
230	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	20.719.958	95.407.278
231	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	24.132.880	108.901.900
232	Kab. Hulu Sungai Utara	-	26.795.874	134.548.843
233	Kab. Kotabaru	-	41.455.732	144.788.562
234	Kab. Tabalong	-	21.118.144	85.029.169
235	Kab. Tanah Laut	-	25.507.890	97.768.620
236	Kab. Tapin	-	19.022.816	82.431.721
237	Kab. Balangan	-	20.216.892	94.652.317
238	Kab. Tanah Bumbu	-	28.822.874	111.266.653
239	Kab. Berau	-	34.977.878	87.679.156
240	Kab. Kutai Kartanegara	-	62.379.066	169.776.336

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
241	Kab. Kutai Barat	190	85.871.620	5.177.950
242	Kab. Kutai Timur	139	72.300.355	3.749.550
243	Kab. Paser	139	69.240.730	4.686.948
244	Kab. Penajam Paser Utara	30	16.557.515	1.339.128
245	Kab. Mahakam Ulu	50	22.458.025	1.606.950
246	Kab. Bolaang Mongondow	200	95.489.625	6.918.828
247	Kab. Minahasa	227	107.245.195	7.811.580
248	Kab. Kepulauan Sangihe	145	64.816.545	3.928.100
249	Kab. Kepulauan Talaud	142	63.131.920	3.928.100
250	Kab. Minahasa Selatan	167	79.960.745	4.642.300
251	Kab. Minahasa Utara	125	61.744.785	4.240.572
252	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	83	37.351.915	2.499.700

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
241	Kab. Kutai Barat	-	39.203.152	130.252.722
242	Kab. Kutai Timur	82.988	54.904.786	131.037.679
243	Kab. Paser	-	33.388.322	107.316.000
244	Kab. Penajam Paser Utara	-	7.486.750	25.383.393
245	Kab. Mahakam Ulu	-	20.675.818	44.740.793
246	Kab. Bolaang Mongondow	414.940	28.024.576	130.847.969
247	Kab. Minahasa	-	28.905.652	143.962.427
248	Kab. Kepulauan Sangihe	165.976	19.078.862	87.989.483
249	Kab. Kepulauan Talaud	-	19.722.274	86.782.294
250	Kab. Minahasa Selatan	-	23.523.350	108.126.395
251	Kab. Minahasa Utara	-	18.841.182	84.826.539
252	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	188.041	10.005.964	50.045.620

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
253	Kota Kotamobagu	15	7.961.260	669.564
254	Kab. Bolaang Mongondow Utara	106	48.689.420	2.856.800
255	Kab. Minahasa Tenggara	135	62.068.385	4.686.948
256	Kab. Bolaang Mongondow Timur	81	38.441.810	2.901.444
257	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	81	37.287.215	2.901.444
258	Kab. Banggai	291	134.197.235	9.820.272
259	Kab. Banggai Kepulauan	141	64.802.585	4.910.136
260	Kab. Buol	108	51.294.230	3.035.350
261	Kab. Toli-Toli	103	51.623.115	2.856.800
262	Kab. Donggala	158	79.871.540	4.285.200
263	Kab. Morowali	126	60.824.625	3.392.450
264	Kab. Poso	142	68.096.665	4.910.136

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
253	Kota Kotamobagu	-	2.459.314	11.090.138
254	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	13.881.792	65.428.012
255	Kab. Minahasa Tenggara	179.743	17.227.706	84.162.782
256	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	10.196.108	51.539.362
257	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	82.988	11.757.572	52.029.219
258	Kab. Banggai	-	45.280.390	189.297.897
259	Kab. Banggai Kepulauan	-	23.027.662	92.740.383
260	Kab. Buol	-	19.501.510	73.831.090
261	Kab. Toli-Toli	-	21.231.410	75.711.325
262	Kab. Donggala	663.904	35.318.774	120.139.418
263	Kab. Morowali	290.265	25.865.074	90.372.414
264	Kab. Poso	-	29.757.274	102.764.075

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
265	Kab. Parigi Moutong	278	137.557.915	9.373.896
266	Kab. Tojo Una Una	134	62.064.880	4.686.948
267	Kab. Sigi	176	85.591.820	4.820.850
268	Kab. Banggai Laut	63	29.546.390	1.964.050
269	Kab. Morowali Utara	122	57.693.310	3.392.450
270	Kab. Bantaeng	46	25.041.845	1.785.504
271	Kab. Barru	40	22.249.880	1.562.316
272	Kab. Bone	328	167.347.560	11.159.400
273	Kab. Bulukumba	109	60.361.050	3.794.196
274	Kab. Enrekang	112	55.522.450	3.035.350
275	Kab. Gowa	121	69.581.805	3.392.450
276	Kab. Jeneponto	82	46.065.420	2.499.700

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
265	Kab. Parigi Moutong	262.731	53.321.838	200.516.380
266	Kab. Tojo Una Una	248.964	26.862.232	93.863.024
267	Kab. Sigi	-	35.876.496	126.289.166
268	Kab. Banggai Laut	-	9.971.748	41.482.188
269	Kab. Morowali Utara	96.755	26.688.170	87.870.685
270	Kab. Bantaeng	-	9.273.398	36.100.747
271	Kab. Barru	-	9.433.450	33.245.646
272	Kab. Bone	-	62.041.608	240.548.568
273	Kab. Bulukumba	-	21.027.404	85.182.650
274	Kab. Enrekang	91.286	19.084.642	77.733.728
275	Kab. Gowa	-	30.249.952	103.224.207
276	Kab. Jeneponto	-	19.665.854	68.230.974

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
277	Kab. Luwu	207	102.152.950	7.142.016
278	Kab. Luwu Utara	166	83.594.125	5.579.700
279	Kab. Maros	80	44.326.585	2.901.444
280	Kab. Pangkajene Kepulauan	65	34.806.680	2.455.068
281	Kab. Luwu Timur	125	65.670.380	3.392.450
282	Kab. Pinrang	69	37.822.535	2.678.256
283	Kab. Sinjai	67	36.545.520	2.455.068
284	Kab. Kepulauan Selayar	81	39.192.300	2.321.150
285	Kab. Sidenreng Rappang	68	36.029.500	2.455.068
286	Kab. Soppeng	49	26.899.645	2.008.692
287	Kab. Takalar	86	46.772.175	2.499.700
288	Kab. Tana Toraja	112	55.176.065	3.035.350

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
277	Kab. Luwu	2.586.395	37.353.058	149.234.419
278	Kab. Luwu Utara	1.100.909	35.940.962	126.215.696
279	Kab. Maros	82.988	20.419.562	67.730.579
280	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	15.965.948	53.227.696
281	Kab. Luwu Timur	-	26.899.660	95.962.490
282	Kab. Pinrang	414.940	16.070.486	56.986.217
283	Kab. Sinjai	-	13.405.066	52.405.654
284	Kab. Kepulauan Selayar	248.964	13.515.872	55.278.286
285	Kab. Sidenreng Rappang	-	12.983.040	51.467.608
286	Kab. Soppeng	-	10.261.998	39.170.335
287	Kab. Takalar	331.952	16.083.980	65.687.807
288	Kab. Tana Toraja	2.074.700	22.601.370	82.887.485

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
289	Kab. Wajo	142	71.444.975	4.910.136
290	Kab. Toraja Utara	111	54.826.185	3.794.196
291	Kab. Buton	83	39.199.275	2.499.700
292	Kab. Konawe	291	130.617.990	7.856.200
293	Kab. Kolaka	100	48.206.660	2.856.800
294	Kab. Muna	124	59.720.840	4.240.572
295	Kab. Konawe Selatan	336	155.483.240	11.382.588
296	Kab. Bombana	121	56.823.890	3.392.450
297	Kab. Wakatobi	75	35.245.755	2.678.256
298	Kab. Kolaka Utara	127	59.384.905	4.463.760
299	Kab. Konawe Utara	159	68.040.485	4.285.200
300	Kab. Buton Utara	78	35.256.210	2.901.444

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
289	Kab. Wajo	-	22.652.402	99.007.513
290	Kab. Toraja Utara	2.766.138	20.678.120	82.064.639
291	Kab. Buton	-	12.871.642	54.570.617
292	Kab. Konawe	345.719	45.137.976	183.957.885
293	Kab. Kolaka	165.976	17.672.426	68.901.862
294	Kab. Muna	1.939.087	21.070.344	86.970.843
295	Kab. Konawe Selatan	96.755	51.882.238	218.844.821
296	Kab. Bombana	-	20.487.030	80.703.370
297	Kab. Wakatobi	96.755	11.846.350	49.867.116
298	Kab. Kolaka Utara	995.856	21.063.928	85.908.449
299	Kab. Konawe Utara	589.214	26.056.528	98.971.427
300	Kab. Buton Utara	-	11.749.828	49.907.482

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
301	Kab. Konawe Kepulauan	89	37.834.665	2.678.250
302	Kab. Kolaka Timur	117	53.750.265	4.017.384
303	Kab. Muna Barat	81	38.037.705	2.321.150
304	Kab. Buton Tengah	67	32.158.180	1.964.050
305	Kab. Buton Selatan	60	29.189.560	1.785.500
306	Kab. Badung	46	28.274.595	1.428.400
307	Kab. Bangli	68	37.068.560	1.964.050
308	Kab. Buleleng	129	77.691.725	4.463.760
309	Kab. Gianyar	64	40.229.570	2.455.068
310	Kab. Jembrana	41	25.139.785	1.562.316
311	Kab. Karangasem	75	46.387.255	2.142.600
312	Kab. Klungkung	53	30.204.130	2.008.692

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
301	Kab. Konawe Kepulauan	96.755	13.195.164	53.804.834
302	Kab. Kolaka Timur	82.988	21.346.138	79.196.775
303	Kab. Muna Barat	663.904	12.134.386	53.157.145
304	Kab. Buton Tengah	580.916	11.375.446	46.078.592
305	Kab. Buton Selatan	-	11.081.638	42.056.698
306	Kab. Badung	-	12.351.344	42.054.339
307	Kab. Bangli	-	13.732.750	52.765.360
308	Kab. Buleleng	-	35.490.630	117.646.115
309	Kab. Gianyar	-	18.774.688	61.459.326
310	Kab. Jembrana	-	11.677.418	38.379.519
311	Kab. Karangasem	-	24.009.532	72.539.387
312	Kab. Klungkung	-	10.281.622	42.494.444

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
313	Kab. Tabanan	133	73.838.005	4.463.760
314	Kota Denpasar	27	18.278.815	1.115.940
315	Kab. Bima	191	103.251.440	5.177.950
316	Kab. Dompu	72	39.911.250	2.678.256
317	Kab. Lombok Barat	119	73.615.750	4.017.384
318	Kab. Lombok Tengah	142	89.802.345	3.928.100
319	Kab. Lombok Timur	239	143.251.850	6.427.800
320	Kab. Sumbawa	157	85.698.565	5.356.512
321	Kab. Sumbawa Barat	58	29.586.665	1.785.500
322	Kab. Lombok Utara	43	26.532.250	1.785.504
323	Kab. Alor	158	74.618.215	4.285.200
324	Kab. Belu	69	35.397.965	2.142.600

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
313	Kab. Tabanan	-	26.447.720	104.749.485
314	Kota Denpasar	-	13.945.760	33.340.515
315	Kab. Bima	96.755	45.647.520	154.173.665
316	Kab. Dompu	-	18.412.654	61.002.160
317	Kab. Lombok Barat	-	44.477.146	122.110.280
318	Kab. Lombok Tengah	-	58.625.390	152.355.835
319	Kab. Lombok Timur	-	91.220.160	240.899.810
320	Kab. Sumbawa	96.755	41.694.206	132.846.038
321	Kab. Sumbawa Barat	-	11.323.422	42.695.587
322	Kab. Lombok Utara	-	23.278.092	51.595.846
323	Kab. Alor	3.692.962	32.465.408	115.061.785
324	Kab. Belu	-	16.487.020	54.027.585

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
325	Kab. Ende	255	115.367.260	6.963.450
326	Kab. Flores Timur	229	107.598.545	7.811.580
327	Kab. Kupang	160	81.552.670	5.579.700
328	Kab. Lembata	144	65.159.440	3.928.100
329	Kab. Manggarai	145	73.360.560	4.910.136
330	Kab. Ngada	190	85.929.360	6.472.452
331	Kab. Sikka	181	88.726.730	6.249.264
332	Kab. Sumba Barat	63	31.624.645	1.964.050
333	Kab. Sumba Timur	140	68.147.445	4.910.136
334	Kab. Timor Tengah Selatan	266	132.378.135	8.927.520
335	Kab. Timor Tengah Utara	182	86.882.865	4.999.400
336	Kab. Rote Ndao	112	53.617.380	3.035.350

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
325	Kab. Ende	5.573.963	45.779.866	173.684.539
326	Kab. Flores Timur	248.964	37.284.458	152.943.547
327	Kab. Kupang	3.529.240	40.258.442	130.920.052
328	Kab. Lembata	760.659	25.087.206	94.935.405
329	Kab. Manggarai	1.341.575	33.156.942	112.769.213
330	Kab. Ngada	2.060.736	29.563.636	124.026.184
331	Kab. Sikka	1.590.539	33.906.160	130.472.693
332	Kab. Sumba Barat	2.710.684	17.655.528	53.954.907
333	Kab. Sumba Timur	3.147.878	38.593.430	114.798.889
334	Kab. Timor Tengah Selatan	13.609.031	65.274.148	220.188.834
335	Kab. Timor Tengah Utara	2.874.020	35.889.972	130.646.257
336	Kab. Rote Ndao	663.904	23.930.558	81.247.192

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
337	Kab. Manggarai Barat	164	81.104.850	5.579.700
338	Kab. Nagekeo	97	46.348.850	2.856.800
339	Kab. Sumba Barat Daya	173	88.871.930	5.802.888
340	Kab. Sumba Tengah	65	31.689.365	2.455.068
341	Kab. Manggarai Timur	159	78.951.420	4.285.200
342	Kab. Sabu Raijua	58	28.432.090	2.231.880
343	Kab. Malaka	127	62.906.400	3.571.000
344	Kab. Kepulauan Tanimbar	80	39.188.785	2.321.150
345	Kab. Maluku Tengah	186	93.131.480	6.249.264
346	Kab. Maluku Tenggara	190	83.273.775	5.177.950
347	Kab. Buru	82	40.003.970	2.499.700
348	Kota Ambon	30	17.481.160	1.339.128

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
337	Kab. Manggarai Barat	2.530.941	38.336.240	127.551.731
338	Kab. Nagekeo	1.203.133	17.496.052	67.904.835
339	Kab. Sumba Barat Daya	8.832.347	49.398.508	152.905.673
340	Kab. Sumba Tengah	1.258.587	17.145.844	52.548.864
341	Kab. Manggarai Timur	428.707	38.860.420	122.525.747
342	Kab. Sabu Raijua	3.582.251	14.352.230	48.598.451
343	Kab. Malaka	580.916	25.826.192	92.884.508
344	Kab. Kepulauan Tanimbar	96.755	21.523.596	63.130.286
345	Kab. Maluku Tengah	788.193	47.605.320	147.774.257
346	Kab. Maluku Tenggara	580.916	32.652.918	121.685.559
347	Kab. Buru	810.258	20.122.456	63.436.384
348	Kota Ambon	-	10.463.204	29.283.492

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
349	Kab. Seram Bagian Barat	92	45.407.650	3.347.820
350	Kab. Seram Bagian Timur	198	87.458.190	5.356.500
351	Kab. Kepulauan Aru	117	51.152.410	3.213.900
352	Kota Tual	27	13.371.970	892.750
353	Kab. Maluku Barat Daya	117	52.076.080	3.213.900
354	Kab. Buru Selatan	81	37.460.395	2.321.150
355	Kab. Biak Numfor	254	105.953.810	8.704.332
356	Kab. Jayapura	139	62.775.055	4.686.948
357	Kab. Kepulauan Yapen	160	68.967.645	5.579.700
358	Kota Jayapura	14	7.034.105	535.650
359	Kab. Sarmi	92	38.595.640	3.347.820
360	Kab. Keerom	91	40.324.045	2.678.250

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
349	Kab. Seram Bagian Barat	1.048.284	29.209.006	79.012.760
350	Kab. Seram Bagian Timur	5.150.717	38.505.198	136.470.605
351	Kab. Kepulauan Aru	2.265.570	30.289.096	86.920.976
352	Kota Tual	-	6.839.320	21.104.040
353	Kab. Maluku Barat Daya	1.161.832	26.614.916	83.066.728
354	Kab. Buru Selatan	1.308.186	16.713.524	57.803.255
355	Kab. Biak Numfor	9.675.978	40.283.086	164.617.206
356	Kab. Jayapura	3.904.936	35.151.034	106.517.973
357	Kab. Kepulauan Yapen	1.028.662	29.639.310	105.215.317
358	Kota Jayapura	96.755	3.143.146	10.809.656
359	Kab. Sarmi	3.248.944	28.872.936	74.065.340
360	Kab. Keerom	3.821.751	25.879.728	72.703.774

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
361	Kab. Waropen	100	42.260.505	3.571.008
362	Kab. Supiori	38	17.335.965	1.249.850
363	Kab. Mamberamo Raya	60	26.707.165	1.785.500
364	Kab. Halmahera Tengah	61	29.654.845	1.785.500
365	Kab. Halmahera Barat	173	78.884.780	4.642.300
366	Kab. Halmahera Timur	102	47.232.225	3.571.008
367	Kab. Halmahera Selatan	249	115.288.570	6.784.900
368	Kab. Halmahera Utara	196	91.088.205	5.356.500
369	Kab. Kepulauan Sula	78	37.045.815	2.901.444
370	Kota Tidore Kepulauan	49	23.089.570	2.008.692
371	Kab. Pulau Morotai	88	40.775.400	2.678.250
372	Kab. Pulau Taliabu	71	32.749.420	2.142.600

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
361	Kab. Waropen	5.281.177	28.266.860	79.379.550
362	Kab. Supiori	1.120.334	6.940.394	26.646.543
363	Kab. Mamberamo Raya	3.374.391	39.185.940	71.052.996
364	Kab. Halmahera Tengah	1.050.538	12.242.702	44.733.585
365	Kab. Halmahera Barat	3.626.570	27.070.180	114.223.830
366	Kab. Halmahera Timur	1.258.587	21.478.502	73.540.322
367	Kab. Halmahera Selatan	2.378.732	48.352.090	172.804.292
368	Kab. Halmahera Utara	414.940	30.154.882	127.014.527
369	Kab. Kepulauan Sula	3.636.933	13.567.576	57.151.768
370	Kota Tidore Kepulauan	-	8.130.620	33.228.882
371	Kab. Pulau Morotai	387.020	13.387.740	57.228.410
372	Kab. Pulau Taliabu	1.717.657	14.630.206	51.239.883

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
373	Kab. Lebak	339	198.039.400	11.382.588
374	Kab. Pandeglang	326	187.314.265	8.748.950
375	Kab. Serang	326	198.571.135	8.748.950
376	Kab. Tangerang	246	163.423.160	8.257.956
377	Kab. Bangka	62	34.680.715	2.231.880
378	Kab. Belitung	42	23.065.090	1.785.504
379	Kab. Bangka Selatan	50	27.595.885	1.606.950
380	Kab. Bangka Tengah	56	30.676.480	2.008.692
381	Kab. Bangka Barat	60	32.768.695	2.231.880
382	Kab. Belitung Timur	39	21.900.015	1.562.316
383	Kab. Boalemo	82	41.735.865	3.124.632
384	Kab. Gorontalo	191	97.074.625	6.472.452

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
373	Kab. Lebak	1.078.844	92.523.522	303.024.354
374	Kab. Pandeglang	1.037.157	86.547.908	283.648.280
375	Kab. Serang	96.755	93.405.700	300.822.540
376	Kab. Tangerang	-	127.750.226	299.431.342
377	Kab. Bangka	-	15.382.180	52.294.775
378	Kab. Belitung	-	11.023.550	35.874.144
379	Kab. Bangka Selatan	-	13.196.928	42.399.763
380	Kab. Bangka Tengah	-	13.004.986	45.690.158
381	Kab. Bangka Barat	-	13.842.916	48.843.491
382	Kab. Belitung Timur	-	10.440.904	33.903.235
383	Kab. Boalemo	82.988	16.296.586	61.240.071
384	Kab. Gorontalo	-	37.910.460	141.457.537

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
385	Kab. Pohuwato	101	49.537.925	3.571.008
386	Kab. Bone Bolango	160	75.087.025	4.463.750
387	Kab. Gorontalo Utara	123	57.985.465	3.392.450
388	Kab. Natuna	70	31.418.150	2.678.256
389	Kab. Kepulauan Anambas	52	23.619.595	2.008.692
390	Kab. Karimun	42	21.390.965	1.785.504
391	Kab. Lingga	75	35.303.475	2.142.600
392	Kab. Bintan	36	18.194.920	1.249.850
393	Kab. Fak Fak	142	59.148.580	4.910.136
394	Kab. Manokwari	163	69.613.175	5.579.700
395	Kab. Teluk Bintuni	115	48.720.830	3.213.900
396	Kab. Teluk Wondama	75	32.243.795	2.678.256

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
385	Kab. Pohuwato	-	21.154.822	74.263.755
386	Kab. Bone Bolango	96.755	23.524.302	103.171.832
387	Kab. Gorontalo Utara	-	19.065.314	80.443.229
388	Kab. Natuna	-	10.591.226	44.687.632
389	Kab. Kepulauan Anambas	-	7.304.928	32.933.215
390	Kab. Karimun	82.988	8.017.508	31.276.965
391	Kab. Lingga	-	13.237.714	50.683.789
392	Kab. Bintan	-	7.267.892	26.712.662
393	Kab. Fak Fak	5.669.733	28.058.686	97.787.135
394	Kab. Manokwari	7.672.140	26.920.062	109.785.077
395	Kab. Teluk Bintuni	7.688.925	40.516.040	100.139.695
396	Kab. Teluk Wondama	4.117.485	17.795.012	56.834.548

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
397	Kab. Kaimana	84	35.334.855	2.499.700
398	Kab. Manokwari Selatan	57	24.964.805	1.785.500
399	Kab. Pegunungan Arfak	166	67.545.330	4.463.750
400	Kab. Majene	62	30.639.770	1.785.500
401	Kab. Mamuju	88	44.816.415	2.678.250
402	Kab. Polewali Mandar	144	76.762.940	3.928.100
403	Kab. Mamasa	168	77.135.450	5.802.888
404	Kab. Pasangkayu	59	31.264.260	1.785.500
405	Kab. Mamuju Tengah	54	28.706.725	1.606.950
406	Kab. Bulungan	74	35.415.400	2.142.600
407	Kab. Malinau	109	47.776.190	3.794.196
408	Kab. Nunukan	232	95.947.805	7.811.580

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
397	Kab. Kaimana	5.155.935	29.699.318	72.689.808
398	Kab. Manokwari Selatan	4.318.332	11.950.490	43.019.127
399	Kab. Pegunungan Arfak	11.857.113	34.656.760	118.522.953
400	Kab. Majene	1.510.380	12.096.438	46.032.088
401	Kab. Mamuju	1.576.772	21.847.856	70.919.293
402	Kab. Polewali Mandar	602.981	37.254.446	118.548.467
403	Kab. Mamasa	4.315.368	28.418.004	115.671.710
404	Kab. Pasangkayu	331.952	13.405.890	46.787.602
405	Kab. Mamuju Tengah	248.964	13.155.516	43.718.155
406	Kab. Bulungan	-	24.244.832	61.802.832
407	Kab. Malinau	96.755	43.602.854	95.269.995
408	Kab. Nunukan	82.988	48.611.216	152.453.589

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
409	Kab. Tana Tidung	32	14.601.740	1.339.128
410	Kab. Merauke	179	80.579.840	4.820.850
411	Kab. Boven Digoel	112	47.267.080	3.035.350
412	Kab. Mappi	162	71.687.920	4.463.750
413	Kab. Asmat	224	96.439.295	7.588.392
414	Kab. Mimika	133	58.539.910	3.571.000
415	Kab. Nabire	72	33.387.910	2.678.256
416	Kab. Paniai	216	90.753.935	7.365.204
417	Kab. Puncak Jaya	302	132.965.510	8.213.300
418	Kab. Dogiyai	79	39.127.600	2.321.150
419	Kab. Puncak	206	94.760.080	6.918.828
420	Kab. Intan Jaya	97	47.099.335	2.856.800

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
409	Kab. Tana Tidung	-	7.641.562	23.582.430
410	Kab. Merauke	4.976.057	71.777.798	162.154.545
411	Kab. Boven Digoel	3.172.378	44.120.474	97.595.282
412	Kab. Mappi	8.611.263	56.805.912	141.568.845
413	Kab. Asmat	11.266.863	74.335.092	189.629.642
414	Kab. Mimika	6.437.343	45.819.174	114.367.427
415	Kab. Nabire	3.025.835	24.078.996	63.170.997
416	Kab. Paniai	7.694.448	49.914.860	155.728.447
417	Kab. Puncak Jaya	17.523.692	79.505.184	238.207.686
418	Kab. Dogiyai	5.670.648	26.523.230	73.642.628
419	Kab. Puncak	15.863.183	58.117.110	175.659.201
420	Kab. Intan Jaya	7.727.775	39.823.832	97.507.742

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
421	Kab. Deiyai	67	32.331.370	1.964.050
422	Kab. Jayawijaya	328	144.602.120	11.159.400
423	Kab. Yahukimo	510	226.347.050	14.953.596
424	Kab. Pegunungan Bintang	277	116.714.040	9.373.896
425	Kab. Tolikara	541	228.360.355	12.677.050
426	Kab. Mamberamo Tengah	59	26.761.410	1.785.500
427	Kab. Yalimo	300	123.779.490	8.213.300
428	Kab. Lanny Jaya	354	154.910.950	9.641.700
429	Kab. Nduga	248	105.759.700	6.784.900
430	Kab. Sorong	227	89.002.960	6.249.250
431	Kab. Raja Ampat	117	49.478.245	3.213.900
432	Kab. Sorong Selatan	120	50.758.770	3.392.450

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
421	Kab. Deiyai	2.043.746	21.331.678	57.670.844
422	Kab. Jayawijaya	17.217.437	67.785.394	240.764.351
423	Kab. Yahukimo	33.569.756	135.005.872	409.876.274
424	Kab. Pegunungan Bintang	11.798.331	73.603.130	211.489.397
425	Kab. Tolikara	32.509.786	118.788.356	392.335.547
426	Kab. Mamberamo Tengah	4.056.554	15.889.770	48.493.234
427	Kab. Yalimo	23.380.634	63.416.488	218.789.912
428	Kab. Lanny Jaya	27.654.682	81.879.102	274.086.434
429	Kab. Nduga	19.612.233	61.941.434	194.098.267
430	Kab. Sorong	7.054.288	46.784.286	149.090.784
431	Kab. Raja Ampat	3.855.329	26.654.146	83.201.620
432	Kab. Sorong Selatan	6.915.460	25.903.114	86.969.794

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
433	Kab. Maybrat	259	103.084.935	8.704.332
434	Kab. Tambrauw	216	82.210.330	5.892.150
Jumlah Dana Desa Nasional		75.260	38.720.498.480	2.382.798.132
Dana Desa TA Berjalan				
Total				

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
433	Kab. Maybrat	6.434.711	48.113.214	166.337.192
434	Kab. Tambrauw	6.839.431	48.964.102	143.906.013
Jumlah Dana Desa Nasional		595.698.272	17.871.005.116	59.570.000.000
Dana Desa TA Berjalan				1.000.000.000
Total				60.570.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

SK No 160458 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	ALOKASI
1.	**Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat**	**470.462.497.909**
1.1	**Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga**	**470.462.497.909**
1.1.1	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	56.682.130.000
1.1.2	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	61.873.870.000
1.1.3	Kementerian Kebudayaan	1.507.391.821
1.1.4	Kementerian Agama	75.621.201.484
1.1.5	Kementerian Keuangan	3.934.153.051
1.1.6	Kementerian Pertanian	238.230.496
1.1.7	Kementerian Perindustrian	685.931.252
1.1.8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	165.156.199
1.1.9	Kementerian Perhubungan	1.702.218.515
1.1.10	Kementerian Kesehatan	2.511.295.039
1.1.11	Kementerian Kehutanan	76.000.000
1.1.12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	172.821.807
1.1.13	Kementerian Pariwisata	606.307.164
1.1.14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	243.812.733
1.1.15	Kementerian Pertahanan	490.194.547
1.1.16	Kementerian Ketenagakerjaan	814.000.000
1.1.17	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	72.316.673
1.1.18	Kementerian Komunikasi dan Digital	57.664.448
1.1.19	Kementerian Pekerjaan Umum	23.060.554.539
1.1.20	Kementerian Perdagangan	12.550.000

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	ALOKASI
1.1.21	Kementerian Sosial	15.946.576.833
1.1.22	Badan Riset dan Inovasi Nasional	429.160.818
1.1.23	Badan Gizi Nasional	223.558.960.490
1.2	**Anggaran Pendidikan pada Belanja Non Kementerian/Lembaga**	-
2.	**Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah**	**264.624.371.415**
2.1	DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	128.190.823.087
2.2	Dana Alokasi Khusus	134.333.446.633
2.2.1	DAK Non Fisik	134.333.446.633
2.2.1.1	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	59.295.114.550
2.2.1.2	Tunjangan Guru ASN Daerah	74.763.332.083
2.2.1.3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	150.000.000
2.2.1.4	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	125.000.000
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2.100.101.695
3.	**Anggaran Pendidikan Melalui Pembiayaan**	**34.000.000.000**
3.1	Dana Abadi di Bidang Pendidikan	25.000.000.000
3.2	Pembiayaan Pendidikan	9.000.000.000
	JUMLAH	**769.086.869.324**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 275664 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
A. Pembiayaan Utang	**832.208.898.829**
I. Surat Berharga Negara (Neto)	799.534.753.376
II. Pinjaman (Neto)	32.674.145.453
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	(6.536.498.992)
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	7.334.804.888
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(13.871.303.880)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	39.210.644.445
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	144.543.404.779
i. Pinjaman Tunai	41.929.930.000
ii. Pinjaman Kegiatan	102.613.474.779
- Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	97.953.677.465
(1) Pinjaman Kegiatan K/L	95.212.989.655
(2) Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	2.740.687.810
- Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	4.659.797.314
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(105.332.760.334)
B. Pembiayaan Investasi	**(203.056.843.566)**
I. Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Layanan Umum	(41.456.239.736)
II. Investasi Kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(1.960.281.244)
III. Investasi Pemerintah oleh BUN (Non Permanen)	(51.795.700.000)

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
IV. Investasi Lainnya	(111.839.303.957)
1. Pembiayaan Pendidikan	(9.000.000.000)
2. Cadangan Pembiayaan Investasi	(42.074.303.957)
3. Cadangan Pembiayaan Lainnya	(60.765.000.000)
V. Penerimaan Kembali Investasi	3.994.681.371
C. Pemberian Pinjaman	**(404.152.655)**
I. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Neto)	(404.152.655)
1. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Bruto)	(4.659.797.314)
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	4.255.644.659
D. Pembiayaan Lainnya	**60.400.000.000**
I. Saldo Anggaran Lebih	60.000.000.000
II. Hasil Pengelolaan Aset	400.000.000
JUMLAH	**689.147.902.608**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman